PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI AGAM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BUPATI AGAM,

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM SETDA

BENNI WARLIS

BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 21);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. laporan operasional;
   d. laporan perubahan ekuitas;
   e. neraca;
   f. laporan arus kas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2025 terdiri dari:

   a. pendapatan sebesar Rp1.572.095.969.805,78 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh delapan rupiah);
   b. belanja sebesar Rp1.495.186.732.880,97 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah);
   c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp76.909.236.924,81 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh satu rupiah);
   d. pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan

miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

e. pembiayaan netto sebesar (Rp38.578.636.185,73) (minus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);

f. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sebelum koreksi sebesar Rp115.487.873.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah);

g. koreksi SiLPA sebesar Rp24.000 (dua puluh empat ribu rupiah); dan

h. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran setelah koreksi sebesar Rp115.487.897.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah).

(2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan setelah perubahan APBD sebesar Rp1.539.155.141.754,46 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh lima juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat koma empat puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.572.095.969.805,78 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima koma tujuh puluh delapan rupiah);

b. anggaran belanja setelah perubahan APBD sebesar Rp1.577.733.777.940,19 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan belas rupiah) dengan realisasi belanja sebesar Rp1.495.186.732.880,97 (satu triliun empat ratus sembilan puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah);

c. defisit anggaran setelah perubahan APBD sebesar (Rp38.578.636.185,73) (minus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan realisasi surplus sebesar Rp76.909.236.924,81 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus sembilan juta dua ratus

tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma delapan puluh satu rupiah);

d. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan APBD sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);

e. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan APBD sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

f. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan APBD sebesar (Rp38.578.636.185,73) (minus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar (Rp38.578.636.185,73) (minus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah); dan

g. Koreksi SiLPA tahun lalu sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) yang menambah nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025.

Pasal 3

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);

b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);

c. sub total sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

d. sisa lebih pembiayaan anggaran/selisih kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp115.487.873.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah);

e. sub total sebesar Rp115.487.873.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah);

f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp24.000 (dua puluh empat ribu rupiah); dan

g. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp115.487.897.110,54 (seratus lima belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sepuluh koma lima puluh empat rupiah).

Pasal 4

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. pendapatan operasional sebesar Rp1.497.898.206.100,64 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam ribu seratus koma enam puluh empat rupiah);

b. beban operasional sebesar Rp1.476.598.553.887,53 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tiga rupiah);

c. surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp21.299.652.213,11 (dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tiga belas koma sebelas rupiah);

d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp (8.799.771.220,15) (minus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh koma lima belas rupiah);

e. pos luar biasa sebesar Rp(6.426.717.278,85) (minus enam miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh lima rupiah); dan

f. jumlah surplus laporan operasional sebesar Rp6.073.163.714,11 (enam miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma sebelas rupiah).

Pasal 5

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

a. ekuitas awal sebesar Rp2.110.922.733.390,70 (dua triliun seratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh koma tujuh puluh rupiah);

b. surplus laporan operasional sebesar Rp6.073.163.714,11 (enam miliar tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas koma sebelas rupiah);

c. dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp3.371.981.428,14 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan koma empat belas rupiah); dan

d. ekuitas akhir sebesar Rp2.120.367.878.532,95 (dua triliun seratus dua puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset sebesar Rp2.203.562.958.451,83 (dua triliun dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu koma delapan puluh tiga rupiah);

b. jumlah kewajiban sebesar Rp83.195.079.918,88 (delapan puluh tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma delapan puluh delapan rupiah); dan

c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.120.367.878.532,95 (dua triliun seratus dua puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp132.679.956.102,81 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus dua koma delapan puluh satu rupiah);

b. arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar (Rp56.770.719.178,00) (minus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

c. arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

d. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp9.414.637,00 (sembilan ratus empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

e. kenaikan bersih kas selama periode ini sebesar Rp75.918.651.561,81 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu koma delapan puluh satu rupiah);

f. saldo awal kas per 1 januari 2025 sebesar Rp39.580.138.735,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
   1. saldo awal kas di kas daerah per 1 januari 2025 sebesar Rp3.372.232.042,59 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat puluh dua koma lima puluh sembilan rupiah);
   2. saldo awal kas di bendahara penerimaan Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
   3. saldo awal di bendahara pengeluaran Rp78.059.123,00 (tujuh puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
   4. saldo awal kas di BLUD Rp33.286.848.002,53 (tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua koma lima puluh tiga rupiah);
   5. saldo awal kas pada bendahara BOSP Rp466.489.210,61 (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh koma enam puluh satu rupiah);
   6. saldo awal kas lainnya Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
   7. saldo awal kas BOK pada puskesmas Rp2.375.719.357,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

g. koreksi saldo awal pada bendahara BOSP dan BLUD Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah); dan

h. saldo akhir kas per 31 desember 2025 sebesar Rp115.498.814.297,54 (seratus lima belas miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
   1. saldo akhir kas di kas daerah per 31 desember 2025 sebesar Rp86.094.569.571,69 (delapan puluh enam miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu koma enam puluh sembilan rupiah);
   2. saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   3. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp26.159.960,71 (dua puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh koma tujuh puluh satu rupiah);
   4. saldo akhir kas pada bendahara BLUD sebesar Rp25.953.143.252,53 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus empat

puluh tiga ribu dua ratus lima puluh dua koma lima puluh tiga rupiah);

5. saldo akhir kas pada bendahara BOSP sebesar Rp329.265.124,61 (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh empat koma enam puluh satu rupiah);
6. saldo akhir kas dana BOK pada Puskesmas sebesar Rp3.095.676.388,00 (tiga miliar sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
7. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran berupa utang pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
    1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
    2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
    4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III memuat laporan operasional;
d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V memuat neraca;
f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

t. Lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:

   1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah; dan

   2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Agustus 2026

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

MHD LUTFI AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: (3/32/2026)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan sisa anggaran lebih (LPSAL), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan kinerja instansi pemerintah, ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah, dan laporan rekapitulasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 29

DAFTAR ISI

Nomor Urut	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Lampiran I : LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERDIRI ATAS
	Lampiran I.1 : RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
	Lampiran I.2 : RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
	Lampiran I.3 : RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	DINAS SOSIAL
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
13	DINAS PERHUBUNGAN
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
16	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
17	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
19	DINAS PERTANIAN
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN
21	SEKRETARIAT DAERAH
22	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
27	INSPEKTORAT DAERAH
28	KEC. BASO
29	KEC. IV ANGKEK
30	KEC. CANDUNG
31	KEC. TILKAM
32	KEC. KAMANG MAGEK
33	KEC. PALUPUH

34	**KEC. BANUHAMPU**		
35	**KEC. SEI. PUA**		
36	**KEC. IV. KOTO**		
37	**KEC. MATUR**		
38	**KEC. PALEMBAYAN**		
39	**KEC. TJG. RAYA**		
40	**KEC. L. BASUNG**		
41	**KEC. IV NAGARI**		
42	**KEC. TJ. MUTIARA**		
43	**KEC.MALALAK**		
44	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
	Lampiran 1.4	**:**	**REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN**
	Lampiran II	:	**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**
	Lampiran III	:	**LAPORAN OPERASIONAL**
	Lampiran IV	:	**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
	Lampiran V	:	**NERACA**
	Lampiran VI	:	**LAPORAN ARUS KAS**
	Lampiran VII	:	**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
	LAMPIRAN VIII	:	**DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH**
	LAMPIRAN IX	:	**DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH**
	LAMPIRAN X	:	**DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR**
	LAMPIRAN XI	:	**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH**
	LAMPIRAN XII	:	**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**
	LAMPIRAN XIII	:	**DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP**
	LAMPIRAN XIV	:	**DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN**
	LAMPIRAN XV	:	**DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA**
	LAMPIRAN XVI	:	**DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH**
	LAMPIRAN XVII	:	**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**
	LAMPIRAN XVIII	:	**DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**
	LAMPIRAN XIX	:	**DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**
	LAMPIRAN XX	:	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI ATAS**
	Lampiran XX.1	:	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**
	Lampiran XX.2	:	**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH**

LAMPIRAN I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERDIRI ATAS :

LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Agam
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	**Pendapatan**	**1.539.155.141.754,46**	**1.572.095.969.805,78**	**32.940.828.051,32**	**102,14**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**95.071.723.180,00**	**98.301.217.359,00**	**3.229.494.179,00**	**103,39**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01	**1.01.2.22.0.00.02.0000**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**100,00**
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**94.460.423.180,00**	**97.605.895.449,00**	**3.145.472.269,00**	**103,32**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0001**		**Rumah Sakit Umum Daerah**	**57.119.110.000,00**	**63.228.888.396,00**	**6.109.778.396,00**	**110,69**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	57.119.110.000,00	63.228.888.396,00	6.109.778.396,00	110,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.119.110.000,00	63.228.888.396,00	6.109.778.396,00	110,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	56.494.110.000,00	62.470.601.182,00	5.976.491.182,00	110,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	625.000.000,00	758.287.214,00	133.287.214,00	121,32
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**		**Puskesmas Lubuk Basung**	**2.964.454.733,00**	**2.674.809.819,00**	**(289.644.914,00)**	**90,22**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	2.964.454.733,00	2.674.809.819,00	(289.644.914,00)	90,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.964.454.733,00	2.674.809.819,00	(289.644.914,00)	90,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	2.949.092.852,00	2.658.061.856,00	(291.030.996,00)	90,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.361.881,00	16.747.963,00	1.386.082,00	109,02
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0002**		**Puskesmas Tiku**	**1.363.484.802,00**	**1.484.449.058,00**	**120.964.256,00**	**108,87**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	1.363.484.802,00	1.484.449.058,00	120.964.256,00	108,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.363.484.802,00	1.484.449.058,00	120.964.256,00	108,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	1.357.558.657,00	1.477.471.449,00	119.912.792,00	108,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.926.145,00	6.977.609,00	1.051.464,00	117,74
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0003**		**Puskesmas Muaro Putuih**	**599.315.000,00**	**590.809.515,00**	**(8.505.485,00)**	**98,58**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	599.315.000,00	590.809.515,00	(8.505.485,00)	98,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	599.315.000,00	590.809.515,00	(8.505.485,00)	98,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	598.000.000,00	589.884.815,00	(8.115.185,00)	98,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.315.000,00	924.700,00	(390.300,00)	70,31
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0004**		**Puskesmas Manggopoh**	**2.213.601.481,00**	**1.846.826.389,00**	**(366.775.092,00)**	**83,43**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	2.213.601.481,00	1.846.826.389,00	(366.775.092,00)	83,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.213.601.481,00	1.846.826.389,00	(366.775.092,00)	83,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	2.205.181.518,00	1.840.934.869,00	(364.246.649,00)	83,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.419.963,00	5.891.520,00	(2.528.443,00)	69,97
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**		**Puskesmas Bawan**	**1.502.500.000,00**	**1.635.319.113,00**	**132.819.113,00**	**108,83**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	1.502.500.000,00	1.635.319.113,00	132.819.113,00	108,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.502.500.000,00	1.635.319.113,00	132.819.113,00	108,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	1.495.540.000,00	1.628.906.106,00	133.366.106,00	108,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.960.000,00	6.413.007,00	(546.993,00)	92,14
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**		**Puskesmas Batu Kambing**	**880.000.000,00**	**820.412.100,00**	**(59.587.900,00)**	**93,22**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	880.000.000,00	820.412.100,00	(59.587.900,00)	93,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	880.000.000,00	820.412.100,00	(59.587.900,00)	93,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	877.800.000,00	819.865.242,00	(57.934.758,00)	93,40
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.200.000,00	546.858,00	(1.653.142,00)	24,85
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**		**Puskesmas Pasar Ahad**	**1.305.305.265,00**	**1.256.992.282,00**	**(48.312.983,00)**	**96,29**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	1.305.305.265,00	1.256.992.282,00	(48.312.983,00)	96,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.305.305.265,00	1.256.992.282,00	(48.312.983,00)	96,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	1.301.133.152,00	1.250.063.835,00	(51.069.317,00)	96,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.172.113,00	6.928.447,00	2.756.334,00	166,06
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0009**		**Puskesmas Maninjau**	**1.902.422.900,00**	**1.734.256.683,00**	**(168.166.217,00)**	**91,16**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	1.902.422.900,00	1.734.256.683,00	(168.166.217,00)	91,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.902.422.900,00	1.734.256.683,00	(168.166.217,00)	91,16
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	1.898.070.000,00	1.733.695.660,00	(164.374.340,00)	91,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.352.900,00	561.023,00	(3.791.877,00)	12,88
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0010**		**Puskesmas Koto Alam**	**2.000.000.000,00**	**1.689.293.961,00**	**(310.706.039,00)**	**84,46**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.689.293.961,00	(310.706.039,00)	84,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.689.293.961,00	(310.706.039,00)	84,46

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.02	Retribusi Daerah	1.994.639.183,00	1.681.998.888,00	(312.640.295,00)	84,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.360.817,00	7.295.073,00	1.934.256,00	136,08
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0011**		**Puskesmas Palembayan**	**1.221.020.229,00**	**1.024.568.274,00**	**(196.451.955,00)**	**83,91**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	1.221.020.229,00	1.024.568.274,00	(196.451.955,00)	83,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.221.020.229,00	1.024.568.274,00	(196.451.955,00)	83,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.02	Retribusi Daerah	1.218.896.096,00	1.023.697.956,00	(195.198.140,00)	83,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.124.133,00	870.318,00	(1.253.815,00)	40,97
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0012**		**Puskesmas Matur**	**2.005.691.881,00**	**1.723.825.043,00**	**(281.866.838,00)**	**85,94**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4	PENDAPATAN DAERAH	2.005.691.881,00	1.723.825.043,00	(281.866.838,00)	85,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.005.691.881,00	1.723.825.043,00	(281.866.838,00)	85,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.02	Retribusi Daerah	2.001.288.279,00	1.720.268.229,00	(281.020.050,00)	85,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.403.602,00	3.556.814,00	(846.788,00)	80,77
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0013**		**Puskesmas IV Koto**	**1.784.098.155,00**	**1.808.781.044,00**	**24.682.889,00**	**101,38**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4	PENDAPATAN DAERAH	1.784.098.155,00	1.808.781.044,00	24.682.889,00	101,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.784.098.155,00	1.808.781.044,00	24.682.889,00	101,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.02	Retribusi Daerah	1.778.413.901,00	1.802.408.175,00	23.994.274,00	101,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.684.254,00	6.372.869,00	688.615,00	112,11
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0014**		**Puskesmas Malalak**	**860.000.000,00**	**734.772.980,00**	**(125.227.020,00)**	**85,43**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4	PENDAPATAN DAERAH	860.000.000,00	734.772.980,00	(125.227.020,00)	85,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	860.000.000,00	734.772.980,00	(125.227.020,00)	85,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.02	Retribusi Daerah	858.500.000,00	733.267.167,00	(125.232.833,00)	85,41
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000,00	1.505.813,00	5.813,00	100,38
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0015**		**Puskesmas Padang Luar**	**1.886.932.200,00**	**1.816.736.265,00**	**(70.195.935,00)**	**96,27**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4	PENDAPATAN DAERAH	1.886.932.200,00	1.816.736.265,00	(70.195.935,00)	96,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.886.932.200,00	1.816.736.265,00	(70.195.935,00)	96,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.02	Retribusi Daerah	1.879.612.580,00	1.810.288.710,00	(69.323.870,00)	96,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.319.620,00	6.447.555,00	(872.065,00)	88,08
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0016**		**Puskesmas Sungai Pua**	**1.933.757.573,00**	**1.846.454.461,00**	**(87.303.112,00)**	**95,48**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4	PENDAPATAN DAERAH	1.933.757.573,00	1.846.454.461,00	(87.303.112,00)	95,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.933.757.573,00	1.846.454.461,00	(87.303.112,00)	95,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1.02	Retribusi Daerah	1.929.427.573,00	1.844.348.646,00	(85.078.927,00)	95,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.330.000,00	2.105.815,00	(2.224.185,00)	48,63
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0017**		**Puskesmas Lasi**	**1.661.770.230,00**	**1.350.793.657,00**	**(310.976.573,00)**	**81,28**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4	PENDAPATAN DAERAH	1.661.770.230,00	1.350.793.657,00	(310.976.573,00)	81,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.661.770.230,00	1.350.793.657,00	(310.976.573,00)	81,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1.02	Retribusi Daerah	1.655.770.230,00	1.347.500.847,00	(308.269.383,00)	81,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000,00	3.292.810,00	(2.707.190,00)	54,88
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0018**		**Puskesmas biaro**	**2.679.480.294,00**	**2.660.548.454,00**	**(18.931.840,00)**	**99,29**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4	PENDAPATAN DAERAH	2.679.480.294,00	2.660.548.454,00	(18.931.840,00)	99,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.679.480.294,00	2.660.548.454,00	(18.931.840,00)	99,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1.02	Retribusi Daerah	2.674.986.399,00	2.654.450.831,00	(20.535.568,00)	99,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.493.895,00	6.097.623,00	1.603.728,00	135,68
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0019**		**Puskesmas Baso**	**2.017.000.000,00**	**1.814.739.835,00**	**(202.260.165,00)**	**89,97**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4	PENDAPATAN DAERAH	2.017.000.000,00	1.814.739.835,00	(202.260.165,00)	89,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.017.000.000,00	1.814.739.835,00	(202.260.165,00)	89,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1.02	Retribusi Daerah	2.002.000.000,00	1.807.821.562,00	(194.178.438,00)	90,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.000.000,00	6.918.273,00	(8.081.727,00)	46,12
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0020**		**Puskesmas Padang Tarok**	**855.581.000,00**	**814.061.447,00**	**(41.519.553,00)**	**95,14**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4	PENDAPATAN DAERAH	855.581.000,00	814.061.447,00	(41.519.553,00)	95,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	855.581.000,00	814.061.447,00	(41.519.553,00)	95,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1.02	Retribusi Daerah	850.981.000,00	810.536.015,00	(40.444.985,00)	95,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.600.000,00	3.525.432,00	(1.074.568,00)	76,63
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0021**		**Puskesmas Magek**	**1.557.960.641,00**	**1.318.917.752,00**	**(239.042.889,00)**	**84,65**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4	PENDAPATAN DAERAH	1.557.960.641,00	1.318.917.752,00	(239.042.889,00)	84,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.557.960.641,00	1.318.917.752,00	(239.042.889,00)	84,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4.1.02	Retribusi Daerah	1.551.339.125,00	1.312.868.768,00	(238.470.357,00)	84,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.621.516,00	6.048.984,00	(572.532,00)	91,35
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0022**		**Puskesmas Pakan Kamis**	**2.086.939.809,00**	**1.758.710.127,00**	**(328.229.682,00)**	**84,27**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4	PENDAPATAN DAERAH	2.086.939.809,00	1.758.710.127,00	(328.229.682,00)	84,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.086.939.809,00	1.758.710.127,00	(328.229.682,00)	84,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4.1.02	Retribusi Daerah	2.078.267.000,00	1.751.686.447,00	(326.580.553,00)	84,28
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.672.809,00	7.023.680,00	(1.649.129,00)	80,98
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0023**		**Puskesmas Kapau**	**739.996.987,00**	**678.124.205,00**	**(61.872.782,00)**	**91,63**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4	PENDAPATAN DAERAH	739.996.987,00	678.124.205,00	(61.872.782,00)	91,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	739.996.987,00	678.124.205,00	(61.872.782,00)	91,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4.1.02	Retribusi Daerah	736.732.052,00	677.142.925,00	(59.589.127,00)	91,91

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.264.935,00	981.280,00	(2.283.655,00)	30,05
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0024**		**Puskesmas Palupuh**	**1.320.000.000,00**	**1.292.804.589,00**	**(27.195.411,00)**	**97,93**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4	PENDAPATAN DAERAH	1.320.000.000,00	1.292.804.589,00	(27.195.411,00)	97,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.320.000.000,00	1.292.804.589,00	(27.195.411,00)	97,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4.1.02	Retribusi Daerah	1.316.800.000,00	1.289.571.653,00	(27.228.347,00)	97,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.200.000,00	3.232.936,00	32.936,00	101,02
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**470.000.000,00**	**550.021.910,00**	**80.021.910,00**	**117,02**
1.03	**1.03.5.05.0.00.01.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**470.000.000,00**	**550.021.910,00**	**80.021.910,00**	**117,02**
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	470.000.000,00	550.021.910,00	80.021.910,00	117,02
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	470.000.000,00	550.021.910,00	80.021.910,00	117,02
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	470.000.000,00	550.021.910,00	80.021.910,00	117,02
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**139.800.000,00**	**143.800.000,00**	**4.000.000,00**	**102,86**
1.04	**1.04.2.10.0.00.02.0000**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**139.800.000,00**	**143.800.000,00**	**4.000.000,00**	**102,86**
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86
2			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**1.332.328.000,00**	**1.215.787.190,00**	**(116.540.810,00)**	**91,25**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**15.360.000,00**	**5.710.000,00**	**(9.650.000,00)**	**37,17**
2.07	**3.31.3.30.2.07.01.0000**		**Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan**	**15.360.000,00**	**5.710.000,00**	**(9.650.000,00)**	**37,17**
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**38.840.000,00**	**22.308.000,00**	**(16.532.000,00)**	**57,43**
2.09	**2.09.3.25.0.00.02.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**38.840.000,00**	**22.308.000,00**	**(16.532.000,00)**	**57,43**
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**332.000.000,00**	**225.957.000,00**	**(106.043.000,00)**	**68,05**
2.19	**3.26.2.19.0.00.02.0000**		**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**	**332.000.000,00**	**225.957.000,00**	**(106.043.000,00)**	**68,05**
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**862.128.000,00**	**912.882.190,00**	**50.754.190,00**	**105,88**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**862.128.000,00**	**912.882.190,00**	**50.754.190,00**	**105,88**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	862.128.000,00	912.882.190,00	50.754.190,00	105,88
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	862.128.000,00	912.882.190,00	50.754.190,00	105,88
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	862.128.000,00	912.882.190,00	50.754.190,00	105,88
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**84.000.000,00**	**48.930.000,00**	**(35.070.000,00)**	**58,25**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perhubungan**	**84.000.000,00**	**48.930.000,00**	**(35.070.000,00)**	**58,25**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	84.000.000,00	48.930.000,00	(35.070.000,00)	58,25
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.000.000,00	48.930.000,00	(35.070.000,00)	58,25
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	84.000.000,00	48.930.000,00	(35.070.000,00)	58,25
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**303.536.000,00**	**300.342.000,00**	**(3.194.000,00)**	**98,94**
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**303.536.000,00**	**300.342.000,00**	**(3.194.000,00)**	**98,94**
3.27	**3.27.2.09.0.00.01.0000**		**Dinas Pertanian**	**303.536.000,00**	**300.342.000,00**	**(3.194.000,00)**	**98,94**
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	303.536.000,00	300.342.000,00	(3.194.000,00)	98,94
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.536.000,00	300.342.000,00	(3.194.000,00)	98,94
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	303.536.000,00	300.342.000,00	(3.194.000,00)	98,94
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.442.447.554.574,46**	**1.472.278.623.256,78**	**29.831.068.682,32**	**102,06**
5.02			**KEUANGAN**	**1.442.447.554.574,46**	**1.472.278.623.256,78**	**29.831.068.682,32**	**102,06**
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Pendapatan Daerah**	**101.820.900.086,00**	**97.915.811.679,20**	**(3.905.088.406,80)**	**96,16**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	101.820.900.086,00	97.915.811.679,20	(3.905.088.406,80)	96,16
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.820.900.086,00	97.915.807.679,20	(3.905.092.406,80)	96,16
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	86.794.945.026,00	82.630.684.214,00	(4.164.260.812,00)	95,20
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	135.610.000,00	(64.390.000,00)	67,80
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.807.124.697,00	13.807.124.697,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.018.830.363,00	1.342.388.768,20	323.558.405,20	131,75
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.02	**5.02.0.00.0.00.10.0000**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**1.340.626.654.488,46**	**1.374.362.811.577,58**	**33.736.157.089,12**	**102,51**
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.340.626.654.488,46	1.374.362.811.577,58	33.736.157.089,12	102,51
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.546.295.230,00	5.052.916.748,58	(1.493.378.481,42)	77,18
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.546.295.230,00	5.052.916.748,58	(1.493.378.481,42)	77,18
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.330.080.359.258,46	1.365.309.894.829,00	35.229.535.570,54	102,64
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.263.938.865.949,00	1.294.527.978.607,00	30.589.112.658,00	102,42
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.141.493.309,46	70.781.916.222,00	4.640.422.912,54	107,01

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
		5	**Belanja**	**1.577.733.777.940,19**	**1.495.186.732.880,97**	**(82.547.045.059,22)**	**94,76**
1			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.053.841.855.586,68**	**1.018.482.103.429,00**	**(35.359.752.157,68)**	**96,64**
1.01			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**644.491.549.425,72**	**641.255.420.618,00**	**(3.236.128.807,72)**	**99,49**
1.01	**1.01.2.22.0.00.02.0000**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**644.491.549.425,72**	**641.255.420.618,00**	**(3.236.128.807,72)**	**99,49**
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	644.491.549.425,72	641.255.420.618,00	(3.236.128.807,72)	99,49
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	629.147.298.540,72	626.526.152.073,00	(2.621.146.467,72)	99,58
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	556.803.775.133,11	557.905.091.720,00	1.101.316.586,89	100,19
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.012.457.051,61	55.714.013.222,00	(3.298.443.829,61)	94,41
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	13.331.066.356,00	12.907.047.131,00	(424.019.225,00)	96,81
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.344.250.885,00	14.729.268.545,00	(614.982.340,00)	95,99
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.734.653.033,00	7.345.365.849,00	(389.287.184,00)	94,96
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.803.519.206,00	1.791.779.148,00	(11.740.058,00)	99,34
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.806.078.646,00	5.592.123.548,00	(213.955.098,00)	96,31
1.02			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**320.928.176.991,00**	**297.415.509.495,00**	**(23.512.667.496,00)**	**92,67**
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kesehatan**	**183.162.986.398,00**	**178.107.169.149,00**	**(5.055.817.249,00)**	**97,23**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	183.162.986.398,00	178.107.169.149,00	(5.055.817.249,00)	97,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	181.077.371.037,00	176.779.645.809,00	(4.297.725.228,00)	97,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	118.154.787.248,00	117.957.782.543,00	(197.004.705,00)	99,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.722.583.789,00	58.621.863.266,00	(4.100.720.523,00)	93,46
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	2.085.615.361,00	1.327.523.340,00	(758.092.021,00)	63,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.574.710,00	299.500.000,00	(357.074.710,00)	45,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	537.040.651,00	198.941.340,00	(338.099.311,00)	37,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	892.000.000,00	829.082.000,00	(62.918.000,00)	92,94
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0001**		**Rumah Sakit Umum Daerah**	**79.033.904.000,00**	**71.961.973.633,00**	**(7.071.930.367,00)**	**91,05**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	79.033.904.000,00	71.961.973.633,00	(7.071.930.367,00)	91,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.605.938.000,00	60.527.458.531,00	(4.078.479.469,00)	93,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	20.373.305.925,00	20.011.872.110,00	(361.433.815,00)	98,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.232.632.075,00	40.515.586.421,00	(3.717.045.654,00)	91,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	14.427.966.000,00	11.434.515.102,00	(2.993.450.898,00)	79,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.289.600.000,00	7.853.320.554,00	(436.279.446,00)	94,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.101.716.000,00	2.906.054.884,00	(195.661.116,00)	93,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000.000,00	638.889.664,00	(2.361.110.336,00)	21,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.650.000,00	36.250.000,00	(400.000,00)	98,90
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0005**		**Puskesmas Lubuk Basung**	**4.999.029.583,00**	**4.031.346.754,00**	**(967.682.829,00)**	**80,64**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	4.999.029.583,00	4.031.346.754,00	(967.682.829,00)	80,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.866.869.257,00	3.180.949.559,00	(685.919.698,00)	82,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	2.166.411.071,00	1.927.758.310,00	(238.652.761,00)	88,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.458.186,00	1.253.191.249,00	(447.266.937,00)	73,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	1.132.160.326,00	850.397.195,00	(281.763.131,00)	75,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.132.160.326,00	850.397.195,00	(281.763.131,00)	75,11
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0002**		**Puskesmas Tiku**	**2.484.709.869,00**	**2.026.817.091,00**	**(457.892.778,00)**	**81,57**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	2.484.709.869,00	2.026.817.091,00	(457.892.778,00)	81,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.267.779.869,00	1.934.856.306,00	(332.923.563,00)	85,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	816.812.427,00	725.198.364,00	(91.614.063,00)	88,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.967.442,00	1.209.657.942,00	(241.309.500,00)	83,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	216.930.000,00	91.960.785,00	(124.969.215,00)	42,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.930.000,00	91.960.785,00	(124.969.215,00)	42,39
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0003**		**Puskesmas Muaro Putuih**	**1.166.660.225,00**	**920.031.462,00**	**(246.628.763,00)**	**78,86**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	1.166.660.225,00	920.031.462,00	(246.628.763,00)	78,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.131.760.225,00	911.496.272,00	(220.263.953,00)	80,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	262.006.005,00	261.521.367,00	(484.638,00)	99,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.754.220,00	649.974.905,00	(219.779.315,00)	74,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	34.900.000,00	8.535.190,00	(26.364.810,00)	24,45
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.900.000,00	8.535.190,00	(26.364.810,00)	24,45
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0004**		**Puskesmas Manggopoh**	**3.376.183.859,00**	**2.396.171.282,00**	**(980.012.577,00)**	**70,97**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	3.376.183.859,00	2.396.171.282,00	(980.012.577,00)	70,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.657.190.930,00	2.137.598.142,00	(519.592.788,00)	80,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.269.600.000,00	1.214.204.590,00	(55.395.410,00)	95,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.387.590.930,00	923.393.552,00	(464.197.378,00)	66,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	718.992.929,00	258.573.140,00	(460.419.789,00)	35,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	718.992.929,00	258.573.140,00	(460.419.789,00)	35,96
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0006**		**Puskesmas Bawan**	**2.676.231.022,00**	**2.480.876.476,00**	**(195.354.546,00)**	**92,70**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	2.676.231.022,00	2.480.876.476,00	(195.354.546,00)	92,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.152.524.408,00	2.116.696.439,00	(35.827.969,00)	98,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	836.140.000,00	835.814.537,00	(325.463,00)	99,96
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.384.408,00	1.280.881.902,00	(35.502.506,00)	97,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	523.706.614,00	364.180.037,00	(159.526.577,00)	69,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523.706.614,00	364.180.037,00	(159.526.577,00)	69,53
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0007**		**Puskesmas Batu Kambing**	**1.511.184.936,00**	**1.214.339.243,00**	**(296.845.693,00)**	**80,35**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	1.511.184.936,00	1.214.339.243,00	(296.845.693,00)	80,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.411.184.936,00	1.116.160.443,00	(295.024.493,00)	79,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	394.580.000,00	377.884.310,00	(16.695.690,00)	95,76
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.016.604.936,00	738.276.133,00	(278.328.803,00)	72,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.178.800,00	(1.821.200,00)	98,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	98.178.800,00	(1.821.200,00)	98,17
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0008**		**Puskesmas Pasar Ahad**	**2.334.219.790,00**	**1.951.507.453,00**	**(382.712.337,00)**	**83,60**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	2.334.219.790,00	1.951.507.453,00	(382.712.337,00)	83,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.980.318.453,00	1.648.393.330,00	(331.925.123,00)	83,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	758.280.000,00	624.084.559,00	(134.195.441,00)	82,30
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.222.038.453,00	1.024.308.771,00	(197.729.682,00)	83,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	353.901.337,00	303.114.123,00	(50.787.214,00)	85,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.901.337,00	303.114.123,00	(50.787.214,00)	85,64
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0009**		**Puskesmas Maninjau**	**2.408.856.973,00**	**2.202.834.004,00**	**(206.022.969,00)**	**91,44**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	2.408.856.973,00	2.202.834.004,00	(206.022.969,00)	91,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.260.386.774,00	2.127.081.291,00	(133.305.483,00)	94,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	853.600.000,00	800.502.452,00	(53.097.548,00)	93,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.406.786.774,00	1.326.578.839,00	(80.207.935,00)	94,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	148.470.199,00	75.752.713,00	(72.717.486,00)	51,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.470.199,00	75.752.713,00	(72.717.486,00)	51,02
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0010**		**Puskesmas Koto Alam**	**2.976.819.520,00**	**2.046.767.650,00**	**(930.051.870,00)**	**68,75**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	2.976.819.520,00	2.046.767.650,00	(930.051.870,00)	68,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.496.878.903,00	1.766.087.823,00	(730.791.080,00)	70,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	1.031.000.000,00	864.950.694,00	(166.049.306,00)	83,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.465.878.903,00	901.137.129,00	(564.741.774,00)	61,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	479.940.617,00	280.679.827,00	(199.260.790,00)	58,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	479.940.617,00	280.679.827,00	(199.260.790,00)	58,48
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0011**		**Puskesmas Palembayan**	**1.866.782.095,00**	**1.562.506.286,00**	**(304.275.809,00)**	**83,70**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	1.866.782.095,00	1.562.506.286,00	(304.275.809,00)	83,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.622.808.484,00	1.470.313.486,00	(152.494.998,00)	90,60
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	512.991.085,00	482.219.597,00	(30.771.488,00)	94,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.109.817.399,00	988.093.889,00	(121.723.510,00)	89,03
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	243.973.611,00	92.192.800,00	(151.780.811,00)	37,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.973.611,00	92.192.800,00	(151.780.811,00)	37,78
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0012**		**Puskesmas Matur**	**2.761.682.187,00**	**2.293.016.276,00**	**(468.665.911,00)**	**83,02**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	2.761.682.187,00	2.293.016.276,00	(468.665.911,00)	83,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.424.951.559,00	2.031.530.301,00	(393.421.258,00)	83,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	914.436.374,00	855.451.238,00	(58.985.136,00)	93,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.510.515.185,00	1.176.079.063,00	(334.436.122,00)	77,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	336.730.628,00	261.485.975,00	(75.244.653,00)	77,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.730.628,00	261.485.975,00	(75.244.653,00)	77,65
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0013**		**Puskesmas IV Koto**	**2.847.968.131,00**	**2.438.954.860,00**	**(409.013.271,00)**	**85,63**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	2.847.968.131,00	2.438.954.860,00	(409.013.271,00)	85,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	2.520.479.659,00	2.130.502.616,00	(389.977.043,00)	84,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	1.084.172.245,00	1.008.491.915,00	(75.680.330,00)	93,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.436.307.414,00	1.122.010.701,00	(314.296.713,00)	78,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	327.488.472,00	308.452.244,00	(19.036.228,00)	94,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.488.472,00	232.948.934,00	(18.539.538,00)	92,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.000.000,00	75.503.310,00	(496.690,00)	99,34
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0014**		**Puskesmas Malalak**	**1.383.176.284,00**	**1.014.329.244,00**	**(368.847.040,00)**	**73,33**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	1.383.176.284,00	1.014.329.244,00	(368.847.040,00)	73,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.227.937.484,00	898.322.244,00	(329.615.240,00)	73,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	348.720.000,00	312.309.088,00	(36.410.912,00)	89,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	879.217.484,00	586.013.156,00	(293.204.328,00)	66,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	155.238.800,00	116.007.000,00	(39.231.800,00)	74,72
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.238.800,00	116.007.000,00	(39.231.800,00)	74,72
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0015**		**Puskesmas Padang Luar**	**2.864.317.416,00**	**2.107.738.157,00**	**(756.579.259,00)**	**73,58**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	2.864.317.416,00	2.107.738.157,00	(756.579.259,00)	73,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	2.609.672.416,00	1.988.306.697,00	(621.365.719,00)	76,18

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	1.030.092.448,00	938.681.639,00	(91.410.809,00)	91,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.579.968,00	1.049.625.058,00	(529.954.910,00)	66,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	254.645.000,00	119.431.460,00	(135.213.540,00)	46,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.645.000,00	119.431.460,00	(135.213.540,00)	46,90
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0016**		**Puskesmas Sungai Pua**	**2.653.477.217,00**	**2.356.374.925,00**	**(297.102.292,00)**	**88,80**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5	BELANJA DAERAH	2.653.477.217,00	2.356.374.925,00	(297.102.292,00)	88,80
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	2.456.711.737,00	2.203.715.447,00	(252.996.290,00)	89,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.01	Belanja Pegawai	1.012.560.000,00	965.815.109,00	(46.744.891,00)	95,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.444.151.737,00	1.237.900.338,00	(206.251.399,00)	85,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	196.765.480,00	152.659.478,00	(44.106.002,00)	77,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.765.480,00	152.659.478,00	(44.106.002,00)	77,58
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0017**		**Puskesmas Lasi**	**2.549.460.241,00**	**1.989.145.227,00**	**(560.315.014,00)**	**78,02**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5	BELANJA DAERAH	2.549.460.241,00	1.989.145.227,00	(560.315.014,00)	78,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.179.720.200,00	1.756.563.147,00	(423.157.053,00)	80,58
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	923.392.956,00	780.687.033,00	(142.705.923,00)	84,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.256.327.244,00	975.876.114,00	(280.451.130,00)	77,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	369.740.041,00	232.582.080,00	(137.157.961,00)	62,90
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.481.641,00	147.613.080,00	(98.868.561,00)	59,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.258.400,00	84.969.000,00	(38.289.400,00)	68,93
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0018**		**Puskesmas biaro**	**3.749.316.080,00**	**3.580.165.698,00**	**(169.150.382,00)**	**95,48**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5	BELANJA DAERAH	3.749.316.080,00	3.580.165.698,00	(169.150.382,00)	95,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	3.379.023.891,00	3.219.508.271,00	(159.515.620,00)	95,27
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1.01	Belanja Pegawai	1.764.549.274,00	1.758.010.408,00	(6.538.866,00)	99,62
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.614.474.617,00	1.461.497.863,00	(152.976.754,00)	90,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	370.292.189,00	360.657.427,00	(9.634.762,00)	97,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.292.189,00	360.657.427,00	(9.634.762,00)	97,39
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0019**		**Puskesmas Baso**	**3.189.203.358,00**	**2.396.933.166,00**	**(792.270.192,00)**	**75,15**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5	BELANJA DAERAH	3.189.203.358,00	2.396.933.166,00	(792.270.192,00)	75,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	2.789.203.358,00	2.100.972.681,00	(688.230.677,00)	75,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.01	Belanja Pegawai	1.328.215.854,00	969.657.977,00	(358.557.877,00)	73,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.987.504,00	1.131.314.704,00	(329.672.800,00)	77,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	295.960.485,00	(104.039.515,00)	73,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	295.960.485,00	(104.039.515,00)	73,99
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0020**		**Puskesmas Padang Tarok**	**1.664.589.701,00**	**1.227.658.377,00**	**(436.931.324,00)**	**73,75**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5	BELANJA DAERAH	1.664.589.701,00	1.227.658.377,00	(436.931.324,00)	73,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	1.515.752.201,00	1.132.235.977,00	(383.516.224,00)	74,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	496.651.101,00	393.610.345,00	(103.040.756,00)	79,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.019.101.100,00	738.625.632,00	(280.475.468,00)	72,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	148.837.500,00	95.422.400,00	(53.415.100,00)	64,11
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.837.500,00	95.422.400,00	(53.415.100,00)	64,11
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0021**		**Puskesmas Magek**	**2.581.391.112,00**	**1.787.217.355,00**	**(794.173.757,00)**	**69,23**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5	BELANJA DAERAH	2.581.391.112,00	1.787.217.355,00	(794.173.757,00)	69,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.342.414.837,00	1.593.984.059,00	(748.430.778,00)	68,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	1.021.665.778,00	742.824.082,00	(278.841.696,00)	72,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.749.059,00	851.159.977,00	(469.589.082,00)	64,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	238.976.275,00	193.233.296,00	(45.742.979,00)	80,85
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.976.275,00	193.233.296,00	(45.742.979,00)	80,85
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0022**		**Puskesmas Pakan Kamis**	**3.251.604.665,00**	**2.241.967.590,00**	**(1.009.637.075,00)**	**68,94**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5	BELANJA DAERAH	3.251.604.665,00	2.241.967.590,00	(1.009.637.075,00)	68,94
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	3.059.001.665,00	2.076.055.411,00	(982.946.254,00)	67,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1.01	Belanja Pegawai	1.140.538.245,00	963.506.667,00	(177.031.578,00)	84,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.918.463.420,00	1.112.548.744,00	(805.914.676,00)	57,99
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	192.603.000,00	165.912.179,00	(26.690.821,00)	86,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.603.000,00	165.912.179,00	(26.690.821,00)	86,14
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0023**		**Puskesmas Kapau**	**1.393.353.349,00**	**1.256.036.401,00**	**(137.316.948,00)**	**90,14**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5	BELANJA DAERAH	1.393.353.349,00	1.256.036.401,00	(137.316.948,00)	90,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	1.188.101.987,00	1.057.453.387,00	(130.648.600,00)	89,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1.01	Belanja Pegawai	356.937.538,00	351.860.872,00	(5.076.666,00)	98,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.164.449,00	705.592.515,00	(125.571.934,00)	84,89
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	205.251.362,00	198.583.014,00	(6.668.348,00)	96,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.251.362,00	198.583.014,00	(6.668.348,00)	96,75
1.02	**1.02.0.00.0.00.01.0024**		**Puskesmas Palupuh**	**2.041.068.980,00**	**1.823.631.736,00**	**(217.437.244,00)**	**89,34**
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5	BELANJA DAERAH	2.041.068.980,00	1.823.631.736,00	(217.437.244,00)	89,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	1.951.068.980,00	1.735.997.738,00	(215.071.242,00)	88,97
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1.01	Belanja Pegawai	772.430.000,00	759.880.829,00	(12.549.171,00)	98,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.178.638.980,00	976.116.909,00	(202.522.071,00)	82,81

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	87.633.998,00	(2.366.002,00)	97,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	87.633.998,00	(2.366.002,00)	97,37
1.03			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**49.911.098.751,82**	**44.243.324.037,00**	**(5.667.774.714,82)**	**88,64**
1.03	**1.03.5.05.0.00.01.0000**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	**49.911.098.751,82**	**44.243.324.037,00**	**(5.667.774.714,82)**	**88,64**
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	49.911.098.751,82	44.243.324.037,00	(5.667.774.714,82)	88,64
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	32.317.899.281,92	29.392.502.627,00	(2.925.396.654,92)	90,94
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.968.749.542,04	6.579.328.432,00	(389.421.110,04)	94,41
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.349.149.739,88	22.813.174.195,00	(2.535.975.544,88)	89,99
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	17.593.199.469,90	14.850.821.410,00	(2.742.378.059,90)	84,41
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.709.060,00	148.016.773,00	(6.692.287,00)	95,67
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	968.446.639,90	927.135.545,00	(41.311.094,90)	95,73
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.470.043.770,00	13.775.669.092,00	(2.694.374.678,00)	83,64
1.04			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**7.746.873.347,00**	**7.429.451.411,00**	**(317.421.936,00)**	**95,90**
1.04	**1.04.2.10.0.00.02.0000**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**7.746.873.347,00**	**7.429.451.411,00**	**(317.421.936,00)**	**95,90**
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	7.746.873.347,00	7.429.451.411,00	(317.421.936,00)	95,90
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	7.735.028.347,00	7.423.001.411,00	(312.026.936,00)	95,96
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.853.275.475,00	2.673.886.975,00	(179.388.500,00)	93,71
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.369.752.872,00	3.237.114.436,00	(132.638.436,00)	96,06
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	0,00	100,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.845.000,00	6.450.000,00	(5.395.000,00)	54,45
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.845.000,00	6.450.000,00	(5.395.000,00)	54,45
1.05			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**20.431.781.054,14**	**18.950.212.035,00**	**(1.481.569.019,14)**	**92,74**
1.05	**1.05.0.00.0.00.02.0000**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**5.758.331.949,14**	**5.246.621.958,00**	**(511.709.991,14)**	**91,11**
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.758.331.949,14	5.246.621.958,00	(511.709.991,14)	91,11
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.508.331.949,14	4.996.977.958,00	(511.353.991,14)	90,71
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.023.138.027,14	2.842.813.568,00	(180.324.459,14)	94,03
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.485.193.922,00	2.154.164.390,00	(331.029.532,00)	86,67
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	250.000.000,00	249.644.000,00	(356.000,00)	99,85
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	249.644.000,00	(356.000,00)	99,85
1.05	**1.05.0.00.0.00.03.0000**		**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**14.673.449.105,00**	**13.703.590.077,00**	**(969.859.028,00)**	**93,39**
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	14.673.449.105,00	13.703.590.077,00	(969.859.028,00)	93,39
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.328.258.265,00	13.520.682.576,00	(807.575.689,00)	94,36
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.767.187.673,00	9.309.569.317,00	(457.618.356,00)	95,31
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.561.070.592,00	4.211.113.259,00	(349.957.333,00)	92,32
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	345.190.840,00	182.907.501,00	(162.283.339,00)	52,98
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	345.190.840,00	182.907.501,00	(162.283.339,00)	52,98
1.06			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**10.332.376.017,00**	**9.188.185.833,00**	**(1.144.190.184,00)**	**88,92**
1.06	**1.06.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Sosial**	**4.582.376.017,00**	**4.221.665.315,00**	**(360.710.702,00)**	**92,12**
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.582.376.017,00	4.221.665.315,00	(360.710.702,00)	92,12
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.554.864.617,00	4.197.260.915,00	(357.603.702,00)	92,14
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.626.832.958,00	2.490.526.322,00	(136.306.636,00)	94,81
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.928.031.659,00	1.706.734.593,00	(221.297.066,00)	88,52
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.511.400,00	24.404.400,00	(3.107.000,00)	88,70
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.511.400,00	24.404.400,00	(3.107.000,00)	88,70
1.06	**4.01.1.06.0.00.01.0005**		**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**5.750.000.000,00**	**4.966.520.518,00**	**(783.479.482,00)**	**86,37**
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	(783.479.482,00)	86,37
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	(783.479.482,00)	86,37
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	4.216.520.518,00	(783.479.482,00)	84,33
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00
2			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**107.291.811.472,99**	**94.940.764.167,00**	**(12.351.047.305,99)**	**88,48**
2.07			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**5.192.360.857,00**	**4.973.786.060,00**	**(218.574.797,00)**	**95,79**
2.07	**3.31.3.30.2.07.01.0000**		**Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan**	**5.192.360.857,00**	**4.973.786.060,00**	**(218.574.797,00)**	**95,79**
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.192.360.857,00	4.973.786.060,00	(218.574.797,00)	95,79
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.163.898.357,00	4.950.511.061,00	(213.387.296,00)	95,86
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.239.999.276,00	3.162.289.524,00	(77.709.752,00)	97,60
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.923.899.081,00	1.788.221.537,00	(135.677.544,00)	92,94
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	28.462.500,00	23.274.999,00	(5.187.501,00)	81,77
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.462.500,00	23.274.999,00	(5.187.501,00)	81,77
2.08			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**5.722.383.323,00**	**5.331.094.113,00**	**(391.289.210,00)**	**93,16**
2.08	**2.08.2.14.0.00.02.0000**		**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**5.722.383.323,00**	**5.331.094.113,00**	**(391.289.210,00)**	**93,16**
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	5.722.383.323,00	5.331.094.113,00	(391.289.210,00)	93,16
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.663.168.823,00	5.272.398.303,00	(390.770.520,00)	93,09
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.865.580.725,00	3.611.397.377,00	(254.183.348,00)	93,42
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.797.588.098,00	1.661.000.926,00	(136.587.172,00)	92,40

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	59.214.500,00	58.695.810,00	(518.690,00)	99,12
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.214.500,00	58.695.810,00	(518.690,00)	99,12
2.09			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**4.257.192.106,00**	**3.994.196.991,00**	**(262.995.115,00)**	**93,82**
2.09	**2.09.3.25.0.00.02.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**4.257.192.106,00**	**3.994.196.991,00**	**(262.995.115,00)**	**93,82**
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.257.192.106,00	3.994.196.991,00	(262.995.115,00)	93,82
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.180.751.406,00	3.923.952.491,00	(256.798.915,00)	93,85
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.596.051.514,00	2.486.641.708,00	(109.409.806,00)	95,78
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.699.892,00	1.437.310.783,00	(147.389.109,00)	90,69
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	76.440.700,00	70.244.500,00	(6.196.200,00)	91,89
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.440.700,00	70.244.500,00	(6.196.200,00)	91,89
2.10			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	**132.340.900,00**	**127.845.655,00**	**(4.495.245,00)**	**96,60**
2.10	**1.04.2.10.0.00.02.0000**		**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**132.340.900,00**	**127.845.655,00**	**(4.495.245,00)**	**96,60**
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	132.340.900,00	127.845.655,00	(4.495.245,00)	96,60
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	132.340.900,00	127.845.655,00	(4.495.245,00)	96,60
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.340.900,00	127.845.655,00	(4.495.245,00)	96,60
2.11			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**16.000.015.659,00**	**13.330.971.024,00**	**(2.669.044.635,00)**	**83,31**
2.11	**2.11.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Lingkungan Hidup**	**16.000.015.659,00**	**13.330.971.024,00**	**(2.669.044.635,00)**	**83,31**
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	16.000.015.659,00	13.330.971.024,00	(2.669.044.635,00)	83,31
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	15.500.324.033,44	12.916.089.824,00	(2.584.234.209,44)	83,32
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.689.791.308,00	3.509.854.861,00	(179.936.447,00)	95,12
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.810.532.725,44	9.406.234.963,00	(2.404.297.762,44)	79,64
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	499.691.625,56	414.881.200,00	(84.810.425,56)	83,02
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.691.625,56	414.881.200,00	(84.810.425,56)	83,02
2.12			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**5.310.500.516,00**	**4.964.079.479,00**	**(346.421.037,00)**	**93,47**
2.12	**2.12.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**5.310.500.516,00**	**4.964.079.479,00**	**(346.421.037,00)**	**93,47**
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.310.500.516,00	4.964.079.479,00	(346.421.037,00)	93,47
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.983.460.516,00	4.659.534.571,00	(323.925.945,00)	93,49
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.830.128.333,00	2.675.607.921,00	(154.520.412,00)	94,54
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.153.332.183,00	1.983.926.650,00	(169.405.533,00)	92,13
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	327.040.000,00	304.544.908,00	(22.495.092,00)	93,12
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	327.040.000,00	304.544.908,00	(22.495.092,00)	93,12
2.13			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**8.285.663.279,00**	**7.102.588.370,00**	**(1.183.074.909,00)**	**85,72**
2.13	**2.13.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari**	**8.285.663.279,00**	**7.102.588.370,00**	**(1.183.074.909,00)**	**85,72**
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.285.663.279,00	7.102.588.370,00	(1.183.074.909,00)	85,72
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.285.663.279,00	7.102.588.370,00	(1.183.074.909,00)	85,72
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.141.550.208,00	2.028.549.833,00	(113.000.375,00)	94,72
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.144.113.071,00	5.074.038.537,00	(1.070.074.534,00)	82,58
2.14			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**9.486.686.773,00**	**7.318.078.116,00**	**(2.168.608.657,00)**	**77,14**
2.14	**2.08.2.14.0.00.02.0000**		**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**9.486.686.773,00**	**7.318.078.116,00**	**(2.168.608.657,00)**	**77,14**
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	9.486.686.773,00	7.318.078.116,00	(2.168.608.657,00)	77,14
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.352.310.161,00	5.796.038.112,00	(556.272.049,00)	91,24
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.352.310.161,00	5.796.038.112,00	(556.272.049,00)	91,24
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.134.376.612,00	1.522.040.004,00	(1.612.336.608,00)	48,55
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.039.376.612,00	441.695.417,00	(1.597.681.195,00)	21,65
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.095.000.000,00	1.080.344.587,00	(14.655.413,00)	98,66
2.15			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**24.284.958.793,00**	**23.771.801.781,00**	**(513.157.012,00)**	**97,88**
2.15	**2.15.0.00.0.00.01.0000**		**Dinas Perhubungan**	**24.284.958.793,00**	**23.771.801.781,00**	**(513.157.012,00)**	**97,88**
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	24.284.958.793,00	23.771.801.781,00	(513.157.012,00)	97,88
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	24.284.958.793,00	23.771.801.781,00	(513.157.012,00)	97,88
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.904.961.771,00	3.607.981.737,00	(296.980.034,00)	92,39
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.379.997.022,00	20.163.820.044,00	(216.176.978,00)	98,93
2.16			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**8.040.459.896,00**	**5.925.708.988,00**	**(2.114.750.908,00)**	**73,69**
2.16	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**8.040.459.896,00**	**5.925.708.988,00**	**(2.114.750.908,00)**	**73,69**
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.040.459.896,00	5.925.708.988,00	(2.114.750.908,00)	73,69
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.717.932.262,00	5.695.266.984,00	(1.022.665.278,00)	84,77
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.662.087.121,28	3.557.464.525,00	(104.622.596,28)	97,14
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.055.845.140,72	2.137.802.459,00	(918.042.681,72)	69,95
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.322.527.634,00	230.442.004,00	(1.092.085.630,00)	17,42
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.322.527.634,00	230.442.004,00	(1.092.085.630,00)	17,42
2.17			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**3.722.764.195,00**	**3.099.221.870,00**	**(623.542.325,00)**	**83,25**
2.17	**2.17.0.00.0.00.10.0000**		**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**3.722.764.195,00**	**3.099.221.870,00**	**(623.542.325,00)**	**83,25**
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	3.722.764.195,00	3.099.221.870,00	(623.542.325,00)	83,25
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.593.442.555,00	2.981.999.170,00	(611.443.385,00)	82,98
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.323.092.718,00	1.202.664.904,00	(120.427.814,00)	90,89

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.270.349.837,00	1.779.334.266,00	(491.015.571,00)	78,37
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	129.321.640,00	117.222.700,00	(12.098.940,00)	90,64
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.321.640,00	117.222.700,00	(12.098.940,00)	90,64
2.18			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**2.877.933.190,99**	**2.569.578.959,00**	**(308.354.231,99)**	**89,28**
2.18	**2.18.0.00.0.00.03.0000**		**Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**2.877.933.190,99**	**2.569.578.959,00**	**(308.354.231,99)**	**89,28**
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	2.877.933.190,99	2.569.578.959,00	(308.354.231,99)	89,28
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.819.783.790,99	2.523.461.071,00	(296.322.719,99)	89,49
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.855.340.929,97	1.713.857.261,00	(141.483.668,97)	92,37
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	964.442.861,02	809.603.810,00	(154.839.051,02)	83,94
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	58.149.400,00	46.117.888,00	(12.031.512,00)	79,30
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.149.400,00	46.117.888,00	(12.031.512,00)	79,30
2.19			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**8.158.337.144,00**	**7.247.621.258,00**	**(910.715.886,00)**	**88,83**
2.19	**3.26.2.19.0.00.02.0000**		**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**	**8.158.337.144,00**	**7.247.621.258,00**	**(910.715.886,00)**	**88,83**
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	8.158.337.144,00	7.247.621.258,00	(910.715.886,00)	88,83
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.132.975.124,00	7.235.375.758,00	(897.599.366,00)	88,96
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.603.282.439,00	3.293.728.848,00	(309.553.591,00)	91,40
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.529.692.685,00	2.943.754.395,00	(585.938.290,00)	83,39
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	997.892.515,00	(2.107.485,00)	99,78
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.362.020,00	12.245.500,00	(13.116.520,00)	48,28
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.362.020,00	12.245.500,00	(13.116.520,00)	48,28
2.20			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	**65.721.400,00**	**61.411.370,00**	**(4.310.030,00)**	**93,44**
2.20	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**65.721.400,00**	**61.411.370,00**	**(4.310.030,00)**	**93,44**
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44
2.21			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**6.551.000,00**	**6.410.600,00**	**(140.400,00)**	**97,85**
2.21	**2.16.2.20.2.21.01.0000**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**6.551.000,00**	**6.410.600,00**	**(140.400,00)**	**97,85**
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85
2.22			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**2.062.569.500,00**	**1.685.416.493,00**	**(377.153.007,00)**	**81,71**
2.22	**1.01.2.22.0.00.02.0000**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**2.062.569.500,00**	**1.685.416.493,00**	**(377.153.007,00)**	**81,71**
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.062.569.500,00	1.685.416.493,00	(377.153.007,00)	81,71
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.062.569.500,00	1.685.416.493,00	(377.153.007,00)	81,71
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.062.569.500,00	1.685.416.493,00	(377.153.007,00)	81,71
2.23			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**116.526.100,00**	**106.634.250,00**	**(9.891.850,00)**	**91,51**
2.23	**2.24.2.23.0.00.02.0000**		**Dinas Arsip dan Perpustakaan**	**116.526.100,00**	**106.634.250,00**	**(9.891.850,00)**	**91,51**
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	116.526.100,00	106.634.250,00	(9.891.850,00)	91,51
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	116.076.100,00	106.184.250,00	(9.891.850,00)	91,47
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.076.100,00	106.184.250,00	(9.891.850,00)	91,47
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
2.24			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**3.568.846.841,00**	**3.324.318.790,00**	**(244.528.051,00)**	**93,14**
2.24	**2.24.2.23.0.00.02.0000**		**Dinas Arsip dan Perpustakaan**	**3.568.846.841,00**	**3.324.318.790,00**	**(244.528.051,00)**	**93,14**
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.568.846.841,00	3.324.318.790,00	(244.528.051,00)	93,14
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.506.400.205,00	3.263.869.639,00	(242.530.566,00)	93,08
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.851.415.592,00	2.666.867.431,00	(184.548.161,00)	93,52
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	654.984.613,00	597.002.208,00	(57.982.405,00)	91,14
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	62.446.636,00	60.449.151,00	(1.997.485,00)	96,80
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.446.636,00	60.449.151,00	(1.997.485,00)	96,80
3			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**24.227.571.577,61**	**20.622.007.671,00**	**(3.605.563.906,61)**	**85,11**
3.25			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**580.838.728,00**	**282.978.704,00**	**(297.860.024,00)**	**48,71**
3.25	**2.09.3.25.0.00.02.0000**		**Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan**	**580.838.728,00**	**282.978.704,00**	**(297.860.024,00)**	**48,71**
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	580.838.728,00	282.978.704,00	(297.860.024,00)	48,71
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	580.838.728,00	282.978.704,00	(297.860.024,00)	48,71
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	580.838.728,00	282.978.704,00	(297.860.024,00)	48,71
3.26			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**1.456.971.843,00**	**663.021.350,00**	**(793.950.493,00)**	**45,50**
3.26	**3.26.2.19.0.00.02.0000**		**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**	**1.456.971.843,00**	**663.021.350,00**	**(793.950.493,00)**	**45,50**
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.456.971.843,00	663.021.350,00	(793.950.493,00)	45,50
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	792.273.265,00	623.181.350,00	(169.091.915,00)	78,65
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	792.273.265,00	623.181.350,00	(169.091.915,00)	78,65
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	664.698.578,00	39.840.000,00	(624.858.578,00)	5,99
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.686.200,00	39.840.000,00	(1.846.200,00)	95,57
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	623.012.378,00	0,00	(623.012.378,00)	0,00
3.27			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**21.403.829.824,61**	**19.004.593.189,00**	**(2.399.236.635,61)**	**88,79**
3.27	**3.27.2.09.0.00.01.0000**		**Dinas Pertanian**	**21.403.829.824,61**	**19.004.593.189,00**	**(2.399.236.635,61)**	**88,79**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	21.403.829.824,61	19.004.593.189,00	(2.399.236.635,61)	88,79
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.278.725.596,61	18.954.588.842,00	(2.324.136.754,61)	89,07
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	13.273.366.342,61	12.983.667.193,00	(289.699.149,61)	97,81
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.005.359.254,00	5.970.921.649,00	(2.034.437.605,00)	74,58
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	125.104.228,00	50.004.347,00	(75.099.881,00)	39,97
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.460.720,00	39.081.947,00	(72.378.773,00)	35,06
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.835.910,00	8.125.200,00	(2.710.710,00)	74,98
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.807.598,00	2.797.200,00	(10.398,00)	99,62
3.30			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**204.836.682,00**	**146.606.400,00**	**(58.230.282,00)**	**71,57**
3.30	**3.31.3.30.2.07.01.0000**		**Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan**	**204.836.682,00**	**146.606.400,00**	**(58.230.282,00)**	**71,57**
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	5	BELANJA DAERAH	204.836.682,00	146.606.400,00	(58.230.282,00)	71,57
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	204.836.682,00	146.606.400,00	(58.230.282,00)	71,57
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.836.682,00	146.606.400,00	(58.230.282,00)	71,57
3.31			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**581.094.500,00**	**524.808.028,00**	**(56.286.472,00)**	**90,31**
3.31	**3.31.3.30.2.07.01.0000**		**Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan**	**581.094.500,00**	**524.808.028,00**	**(56.286.472,00)**	**90,31**
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	5	BELANJA DAERAH	581.094.500,00	524.808.028,00	(56.286.472,00)	90,31
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	581.094.500,00	524.808.028,00	(56.286.472,00)	90,31
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	581.094.500,00	524.808.028,00	(56.286.472,00)	90,31
4			**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**102.011.209.023,00**	**89.489.842.716,00**	**(12.521.366.307,00)**	**87,72**
4.01			**SEKRETARIAT DAERAH**	**50.531.526.283,00**	**41.426.638.645,00**	**(9.104.887.638,00)**	**81,98**
4.01	**4.01.1.06.0.00.01.0001**		**Bagian Umum**	**17.358.523.705,00**	**14.357.091.183,00**	**(3.001.432.522,00)**	**82,70**
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	17.358.523.705,00	14.357.091.183,00	(3.001.432.522,00)	82,70
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.057.875.678,00	11.371.698.088,00	(2.686.177.590,00)	80,89
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.057.875.678,00	11.371.698.088,00	(2.686.177.590,00)	80,89
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.300.648.027,00	2.985.393.095,00	(315.254.932,00)	90,44
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.271.498.027,00	2.956.366.595,00	(315.131.432,00)	90,36
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.150.000,00	29.026.500,00	(123.500,00)	99,57
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0002**		**Bagian Hukum**	**313.599.682,00**	**222.310.044,00**	**(91.289.638,00)**	**70,88**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	313.599.682,00	222.310.044,00	(91.289.638,00)	70,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	313.599.682,00	222.310.044,00	(91.289.638,00)	70,88
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.599.682,00	222.310.044,00	(91.289.638,00)	70,88
4.01	**4.01.1.06.0.00.01.0003**		**Bagian Tata Pemerintahan**	**547.805.719,00**	**422.466.879,00**	**(125.338.840,00)**	**77,11**
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	547.805.719,00	422.466.879,00	(125.338.840,00)	77,11
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	532.118.219,00	407.286.879,00	(124.831.340,00)	76,54
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.118.219,00	407.286.879,00	(124.831.340,00)	76,54
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.687.500,00	15.180.000,00	(507.500,00)	96,76
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.687.500,00	15.180.000,00	(507.500,00)	96,76
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0004**		**Bagian Organisasi**	**340.572.659,00**	**230.619.713,00**	**(109.952.946,00)**	**67,71**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	340.572.659,00	230.619.713,00	(109.952.946,00)	67,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	340.572.659,00	230.619.713,00	(109.952.946,00)	67,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.572.659,00	230.619.713,00	(109.952.946,00)	67,71
4.01	**4.01.1.06.0.00.01.0005**		**Bagian Kesejahteraan Rakyat**	**15.132.414.508,00**	**10.136.793.184,00**	**(4.995.621.324,00)**	**66,98**
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	15.132.414.508,00	10.136.793.184,00	(4.995.621.324,00)	66,98
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.132.414.508,00	10.136.793.184,00	(4.995.621.324,00)	66,98
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.449.914.508,00	6.364.043.184,00	(3.085.871.324,00)	67,34
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	5.1.05	Belanja Hibah	2.205.500.000,00	1.863.000.000,00	(342.500.000,00)	84,47
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.477.000.000,00	1.909.750.000,00	(1.567.250.000,00)	54,92
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0007**		**Bagian Administrasi Pembangunan**	**279.573.922,00**	**263.110.957,00**	**(16.462.965,00)**	**94,11**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	279.573.922,00	263.110.957,00	(16.462.965,00)	94,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	279.573.922,00	263.110.957,00	(16.462.965,00)	94,11
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.573.922,00	263.110.957,00	(16.462.965,00)	94,11
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0008**		**Bagian Perekonomian**	**272.757.009,00**	**193.679.802,00**	**(79.077.207,00)**	**71,00**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	272.757.009,00	193.679.802,00	(79.077.207,00)	71,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	231.838.109,00	163.479.802,00	(68.358.307,00)	70,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.838.109,00	163.479.802,00	(68.358.307,00)	70,51
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	40.918.900,00	30.200.000,00	(10.718.900,00)	73,80
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.918.900,00	30.200.000,00	(10.718.900,00)	73,80
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0009**		**Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**948.190.351,00**	**883.285.481,00**	**(64.904.870,00)**	**93,15**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	948.190.351,00	883.285.481,00	(64.904.870,00)	93,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	948.190.351,00	883.285.481,00	(64.904.870,00)	93,15
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.190.351,00	883.285.481,00	(64.904.870,00)	93,15
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0010**		**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**	**411.685.297,00**	**253.547.825,00**	**(158.137.472,00)**	**61,58**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	411.685.297,00	253.547.825,00	(158.137.472,00)	61,58
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	328.013.297,00	234.667.825,00	(93.345.472,00)	71,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.013.297,00	234.667.825,00	(93.345.472,00)	71,54
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	83.672.000,00	18.880.000,00	(64.792.000,00)	22,56

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.672.000,00	18.880.000,00	(64.792.000,00)	22,56
4.01	**4.01.1.06.0.00.01.0011**		**Bagian Perencanaan dan Keuangan**	**14.734.710.980,00**	**14.294.695.353,00**	**(440.015.627,00)**	**97,01**
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	14.734.710.980,00	14.294.695.353,00	(440.015.627,00)	97,01
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.636.986.680,00	14.209.335.854,00	(427.650.826,00)	97,07
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	13.293.690.269,00	13.000.552.929,00	(293.137.340,00)	97,79
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.343.296.411,00	1.208.782.925,00	(134.513.486,00)	89,98
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	97.724.300,00	85.359.499,00	(12.364.801,00)	87,34
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.724.300,00	85.359.499,00	(12.364.801,00)	87,34
4.01	**4.01.0.00.0.00.01.0012**		**Bagian Sumber Daya Alam**	**191.692.451,00**	**169.038.224,00**	**(22.654.227,00)**	**88,18**
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	191.692.451,00	169.038.224,00	(22.654.227,00)	88,18
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	191.692.451,00	169.038.224,00	(22.654.227,00)	88,18
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.692.451,00	169.038.224,00	(22.654.227,00)	88,18
4.02			**SEKRETARIAT DPRD**	**51.479.682.740,00**	**48.063.204.071,00**	**(3.416.478.669,00)**	**93,36**
4.02	**4.02.0.00.0.00.01.0000**		**Sekretariat DPRD**	**51.479.682.740,00**	**48.063.204.071,00**	**(3.416.478.669,00)**	**93,36**
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	51.479.682.740,00	48.063.204.071,00	(3.416.478.669,00)	93,36
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	50.086.454.272,00	46.794.529.371,00	(3.291.924.901,00)	93,42
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	22.984.380.952,00	22.635.915.581,00	(348.465.371,00)	98,48
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.102.073.320,00	24.158.613.790,00	(2.943.459.530,00)	89,13
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.393.228.468,00	1.268.674.700,00	(124.553.768,00)	91,06
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.370.235.968,00	1.268.674.700,00	(101.561.268,00)	92,58
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.992.500,00	0,00	(22.992.500,00)	0,00
5			**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**242.651.499.054,11**	**229.417.069.993,85**	**(13.234.429.060,26)**	**94,54**
5.01			**PERENCANAAN**	**4.764.188.188,00**	**4.405.027.771,00**	**(359.160.417,00)**	**92,46**
5.01	**5.01.5.05.0.00.01.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**4.764.188.188,00**	**4.405.027.771,00**	**(359.160.417,00)**	**92,46**
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.764.188.188,00	4.405.027.771,00	(359.160.417,00)	92,46
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.669.389.789,00	4.324.662.772,00	(344.727.017,00)	92,61
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.354.109.004,00	3.193.527.968,00	(160.581.036,00)	95,21
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.315.280.785,00	1.131.134.804,00	(184.145.981,00)	85,99
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	94.798.399,00	80.364.999,00	(14.433.400,00)	84,77
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.798.399,00	80.364.999,00	(14.433.400,00)	84,77
5.02			**KEUANGAN**	**231.270.709.837,11**	**219.249.378.529,85**	**(12.021.331.307,26)**	**94,80**
5.02	**5.02.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Pendapatan Daerah**	**11.022.424.468,04**	**10.200.267.900,00**	**(822.156.568,04)**	**92,54**
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	11.022.424.468,04	10.200.267.900,00	(822.156.568,04)	92,54
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.620.124.418,04	9.816.824.104,00	(803.300.314,04)	92,43
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	5.650.628.359,04	5.392.594.453,00	(258.033.906,04)	95,43
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.969.496.059,00	4.424.229.651,00	(545.266.408,00)	89,02
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	402.300.050,00	383.443.796,00	(18.856.254,00)	95,31
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.300.050,00	161.443.796,00	(15.856.254,00)	91,05
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00	222.000.000,00	(3.000.000,00)	98,66
5.02	**5.02.0.00.0.00.10.0000**		**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**220.248.285.369,07**	**209.049.110.629,85**	**(11.199.174.739,22)**	**94,91**
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	220.248.285.369,07	209.049.110.629,85	(11.199.174.739,22)	94,91
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.871.325.468,16	7.436.317.541,00	(1.435.007.927,16)	83,82
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.387.462.439,16	3.232.964.099,00	(154.498.340,16)	95,43
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.483.863.029,00	4.203.353.442,00	(1.280.509.587,00)	76,64
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	223.084.508,00	196.672.800,00	(26.411.708,00)	88,16
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.084.508,00	196.672.800,00	(26.411.708,00)	88,16
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	(4.592.480.757,06)	58,68
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	(4.592.480.757,06)	58,68
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00	(5.145.274.347,00)	97,42
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.197.982.264,00	9.647.487.656,00	(1.550.494.608,00)	86,15
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00	(3.594.779.739,00)	98,09
5.03			**KEPEGAWAIAN**	**5.703.064.829,00**	**4.979.980.982,00**	**(723.083.847,00)**	**87,32**
5.03	**5.04.5.03.5.05.01.0000**		**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**5.703.064.829,00**	**4.979.980.982,00**	**(723.083.847,00)**	**87,32**
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.703.064.829,00	4.979.980.982,00	(723.083.847,00)	87,32
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.601.302.029,00	4.944.220.982,00	(657.081.047,00)	88,26
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.748.186.677,00	3.480.654.423,00	(267.532.254,00)	92,86
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.115.352,00	1.463.566.559,00	(389.548.793,00)	78,97
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	101.762.800,00	35.760.000,00	(66.002.800,00)	35,14
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.762.800,00	35.760.000,00	(66.002.800,00)	35,14
5.05			**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**913.536.200,00**	**782.682.711,00**	**(130.853.489,00)**	**85,67**
5.05	**5.01.5.05.0.00.01.0000**		**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**913.536.200,00**	**782.682.711,00**	**(130.853.489,00)**	**85,67**
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	913.536.200,00	782.682.711,00	(130.853.489,00)	85,67
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	913.536.200,00	782.682.711,00	(130.853.489,00)	85,67
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	913.536.200,00	782.682.711,00	(130.853.489,00)	85,67
6			**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**11.439.736.023,00**	**9.619.225.635,00**	**(1.820.510.388,00)**	**84,08**
6.01			**INSPEKTORAT DAERAH**	**11.439.736.023,00**	**9.619.225.635,00**	**(1.820.510.388,00)**	**84,08**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
6.01	**6.01.0.00.0.00.02.0000**		**Inspektorat Daerah**	**11.439.736.023,00**	**9.619.225.635,00**	**(1.820.510.388,00)**	**84,08**
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	11.439.736.023,00	9.619.225.635,00	(1.820.510.388,00)	84,08
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.112.749.849,00	9.347.422.431,00	(1.765.327.418,00)	84,11
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	7.342.936.189,00	7.028.119.269,00	(314.816.920,00)	95,71
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.769.813.660,00	2.319.303.162,00	(1.450.510.498,00)	61,52
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	326.986.174,00	271.803.204,00	(55.182.970,00)	83,12
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.986.174,00	271.803.204,00	(55.182.970,00)	83,12
7			**UNSUR KEWILAYAHAN**	**30.464.725.933,08**	**27.488.863.686,12**	**(2.975.862.246,96)**	**90,23**
7.01			**KECAMATAN**	**30.464.725.933,08**	**27.488.863.686,12**	**(2.975.862.246,96)**	**90,23**
7.01	**7.01.0.00.0.00.02.0000**		**Kecamatan Ampek Angkek**	**2.196.410.955,00**	**2.005.004.047,00**	**(191.406.908,00)**	**91,28**
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.196.410.955,00	2.005.004.047,00	(191.406.908,00)	91,28
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.196.410.955,00	2.005.004.047,00	(191.406.908,00)	91,28
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.803.283.654,00	1.659.904.905,00	(143.378.749,00)	92,04
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.127.301,00	345.099.142,00	(48.028.159,00)	87,78
7.01	**7.01.0.00.0.00.03.0000**		**Kecamatan Candung**	**1.807.656.309,00**	**1.732.443.400,00**	**(75.212.909,00)**	**95,83**
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.807.656.309,00	1.732.443.400,00	(75.212.909,00)	95,83
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.807.656.309,00	1.732.443.400,00	(75.212.909,00)	95,83
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.433.259.816,00	1.372.727.697,00	(60.532.119,00)	95,77
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.396.493,00	359.715.703,00	(14.680.790,00)	96,07
7.01	**7.01.0.00.0.00.04.0000**		**Kecamatan Tilatang Kamang**	**2.030.205.289,00**	**1.877.837.606,00**	**(152.367.683,00)**	**92,49**
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	2.030.205.289,00	1.877.837.606,00	(152.367.683,00)	92,49
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.030.205.289,00	1.877.837.606,00	(152.367.683,00)	92,49
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.518.398.414,00	1.444.527.867,00	(73.870.547,00)	95,13
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	511.806.875,00	433.309.739,00	(78.497.136,00)	84,66
7.01	**7.01.0.00.0.00.05.0000**		**Kecamatan Kamang Magek**	**1.715.473.301,00**	**1.636.818.158,00**	**(78.655.143,00)**	**95,41**
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.715.473.301,00	1.636.818.158,00	(78.655.143,00)	95,41
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.698.973.301,00	1.620.338.708,00	(78.634.593,00)	95,37
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.198.370,00	1.258.967.593,00	(41.230.777,00)	96,82
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.774.931,00	361.371.115,00	(37.403.816,00)	90,62
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.500.000,00	16.479.450,00	(20.550,00)	99,87
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.500.000,00	16.479.450,00	(20.550,00)	99,87
7.01	**7.01.0.00.0.00.06.0000**		**Kecamatan Palupuh**	**1.943.742.649,08**	**1.636.856.911,00**	**(306.885.738,08)**	**84,21**
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	1.943.742.649,08	1.636.856.911,00	(306.885.738,08)	84,21
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.943.742.649,08	1.636.856.911,00	(306.885.738,08)	84,21
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.361.505.614,00	1.166.493.031,00	(195.012.583,00)	85,67
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.237.035,08	470.363.880,00	(111.873.155,08)	80,78
7.01	**7.01.0.00.0.00.07.0000**		**Kecamatan Banuhampu**	**2.025.070.637,00**	**1.648.898.868,00**	**(376.171.769,00)**	**81,42**
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	2.025.070.637,00	1.648.898.868,00	(376.171.769,00)	81,42
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.955.231.637,00	1.582.698.868,00	(372.532.769,00)	80,94
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.399.253.742,00	1.159.578.135,00	(239.675.607,00)	82,87
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.977.895,00	423.120.733,00	(132.857.162,00)	76,10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	69.839.000,00	66.200.000,00	(3.639.000,00)	94,78
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.839.000,00	66.200.000,00	(3.639.000,00)	94,78
7.01	**7.01.0.00.0.00.08.0000**		**Kecamatan Sungai Pua**	**1.809.671.088,00**	**1.624.342.491,00**	**(185.328.597,00)**	**89,75**
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	1.809.671.088,00	1.624.342.491,00	(185.328.597,00)	89,75
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.809.671.088,00	1.624.342.491,00	(185.328.597,00)	89,75
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.376.446.461,00	1.272.271.047,00	(104.175.414,00)	92,43
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.224.627,00	352.071.444,00	(81.153.183,00)	81,26
7.01	**7.01.0.00.0.00.09.0000**		**Kecamatan IV Koto**	**1.633.008.836,00**	**1.491.855.290,00**	**(141.153.546,00)**	**91,35**
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	1.633.008.836,00	1.491.855.290,00	(141.153.546,00)	91,35
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.597.732.836,00	1.458.516.440,00	(139.216.396,00)	91,28
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.221.017.626,00	1.109.639.942,00	(111.377.684,00)	90,87
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.715.210,00	348.876.498,00	(27.838.712,00)	92,61
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	35.276.000,00	33.338.850,00	(1.937.150,00)	94,50
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.276.000,00	33.338.850,00	(1.937.150,00)	94,50
7.01	**7.01.0.00.0.00.10.0000**		**Kecamatan Matur**	**1.803.319.968,00**	**1.610.490.058,00**	**(192.829.910,00)**	**89,30**
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.803.319.968,00	1.610.490.058,00	(192.829.910,00)	89,30
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.803.319.968,00	1.610.490.058,00	(192.829.910,00)	89,30
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.460.699.489,46	1.287.892.486,00	(172.807.003,46)	88,16
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.620.478,54	322.597.572,00	(20.022.906,54)	94,15
7.01	**7.01.0.00.0.00.11.0000**		**Kecamatan Palembayan**	**1.762.448.292,00**	**1.599.089.098,00**	**(163.359.194,00)**	**90,73**
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.762.448.292,00	1.599.089.098,00	(163.359.194,00)	90,73
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.762.448.292,00	1.599.089.098,00	(163.359.194,00)	90,73
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.368.795.275,00	1.225.862.699,00	(142.932.576,00)	89,55
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.653.017,00	373.226.399,00	(20.426.618,00)	94,81
7.01	**7.01.0.00.0.00.12.0000**		**Kecamatan Tanjung Raya**	**2.182.863.879,00**	**1.904.508.876,12**	**(278.355.002,88)**	**87,24**

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5	BELANJA DAERAH	2.182.863.879,00	1.904.508.876,12	(278.355.002,88)	87,24
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.182.863.879,00	1.904.508.876,12	(278.355.002,88)	87,24
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.566.445.649,00	1.425.310.495,12	(141.135.153,88)	90,99
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.418.230,00	479.198.381,00	(137.219.849,00)	77,73
7.01	**7.01.0.00.0.00.13.0000**		**Kecamatan Lubuk Basung**	**1.978.918.077,00**	**1.734.085.610,00**	**(244.832.467,00)**	**87,62**
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5	BELANJA DAERAH	1.978.918.077,00	1.734.085.610,00	(244.832.467,00)	87,62
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.958.614.827,00	1.717.324.610,00	(241.290.217,00)	87,68
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.454.100.119,00	1.251.118.832,00	(202.981.287,00)	86,04
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	504.514.708,00	466.205.778,00	(38.308.930,00)	92,40
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2	BELANJA MODAL	20.303.250,00	16.761.000,00	(3.542.250,00)	82,55
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.303.250,00	16.761.000,00	(3.542.250,00)	82,55
7.01	**7.01.0.00.0.00.14.0000**		**Kecamatan Ampek Nagari**	**1.932.305.721,00**	**1.727.444.557,00**	**(204.861.164,00)**	**89,39**
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5	BELANJA DAERAH	1.932.305.721,00	1.727.444.557,00	(204.861.164,00)	89,39
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.932.305.721,00	1.727.444.557,00	(204.861.164,00)	89,39
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.454.606.902,00	1.303.106.093,00	(151.500.809,00)	89,58
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	477.698.819,00	424.338.464,00	(53.360.355,00)	88,82
7.01	**7.01.0.00.0.00.15.0000**		**Kecamatan Tanjung Mutiara**	**2.167.556.932,00**	**2.004.606.781,00**	**(162.950.151,00)**	**92,48**
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5	BELANJA DAERAH	2.167.556.932,00	2.004.606.781,00	(162.950.151,00)	92,48
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.154.078.432,00	1.999.334.281,00	(154.744.151,00)	92,81
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.607.095.214,00	1.560.356.694,00	(46.738.520,00)	97,09
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	546.983.218,00	438.977.587,00	(108.005.631,00)	80,25
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.2	BELANJA MODAL	13.478.500,00	5.272.500,00	(8.206.000,00)	39,11
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.478.500,00	5.272.500,00	(8.206.000,00)	39,11
7.01	**7.01.0.00.0.00.16.0000**		**Kecamatan Malalak**	**1.691.923.138,00**	**1.571.411.848,00**	**(120.511.290,00)**	**92,87**
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5	BELANJA DAERAH	1.691.923.138,00	1.571.411.848,00	(120.511.290,00)	92,87
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.657.246.288,00	1.571.411.848,00	(85.834.440,00)	94,82
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.011.512,00	1.125.075.096,00	(49.936.416,00)	95,75
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.234.776,00	446.336.752,00	(35.898.024,00)	92,55
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.2	BELANJA MODAL	34.676.850,00	0,00	(34.676.850,00)	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.676.850,00	0,00	(34.676.850,00)	0,00
7.01	**7.01.0.00.0.00.01.0000**		**Kecamatan Baso**	**1.784.150.862,00**	**1.683.170.087,00**	**(100.980.775,00)**	**94,34**
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.784.150.862,00	1.683.170.087,00	(100.980.775,00)	94,34
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.784.150.862,00	1.683.170.087,00	(100.980.775,00)	94,34
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.314.070.796,00	1.230.666.777,00	(83.404.019,00)	93,65
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.080.066,00	452.503.310,00	(17.576.756,00)	96,26
8			**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**5.805.369.269,72**	**5.126.855.583,00**	**(678.513.686,72)**	**88,31**
8.01			**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.805.369.269,72**	**5.126.855.583,00**	**(678.513.686,72)**	**88,31**
8.01	**8.01.0.00.0.00.01.0000**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**5.805.369.269,72**	**5.126.855.583,00**	**(678.513.686,72)**	**88,31**
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.805.369.269,72	5.126.855.583,00	(678.513.686,72)	88,31
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.769.072.019,72	5.093.369.103,00	(675.702.916,72)	88,28
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.104.831.893,56	2.017.370.241,00	(87.461.652,56)	95,84
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.791.742.314,16	2.203.501.050,00	(588.241.264,16)	78,92
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	872.497.812,00	872.497.812,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	36.297.250,00	33.486.480,00	(2.810.770,00)	92,25
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.297.250,00	33.486.480,00	(2.810.770,00)	92,25
			Jumlah	**(38.578.636.185,73)**	**76.909.236.924,81**	**115.487.873.110,54**	**(199,35)**

BUPATI AGAM

BENNI WARLIS

LAMPIRAN I.2

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran 1.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Agam
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. AGAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.539.155.141.754,46	1.572.095.969.805,78	102,14	1.526.670.873.804,71
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	205.074.782.496,00	202.786.070.976,78	98,88	164.717.557.879,71
4.1.01	Pajak Daerah	86.794.945.026,00	82.630.684.214,00	95,20	46.865.864.045,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	331.919.850,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	331.919.850,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	331.919.850,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.083.816.822,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.083.816.822,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.083.816.822,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.026.500.000,00	997.888.322,00	97,21	835.653.876,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	950.000.000,00	688.632.126,00	72,48	650.334.571,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	950.000.000,00	688.632.126,00	72,48	650.334.571,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	50.000.000,00	110.912.245,00	221,82	100.403.425,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	50.000.000,00	110.912.245,00	221,82	100.403.425,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.000.000,00	186.848.401,00	747,39	84.290.880,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	25.000.000,00	186.848.401,00	747,39	84.290.880,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000,00	5.625.000,00	562,50	625.000,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	1.000.000,00	5.625.000,00	562,50	625.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	500.000,00	5.870.550,00	1.174,11	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	500.000,00	5.870.550,00	1.174,11	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	9.423.856.647,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	109.132.035,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	109.132.035,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	9.314.724.612,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	9.314.724.612,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	450.000.000,00	514.128.154,00	114,25	546.290.234,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	450.000.000,00	514.128.154,00	114,25	546.290.234,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	450.000.000,00	514.128.154,00	114,25	546.290.234,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	2.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	2.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	2.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.357.399.593,00	733.917.479,00	21,85	641.741.994,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	2.857.399.593,00	404.962.533,00	14,17	350.190.514,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	2.857.399.593,00	404.962.533,00	14,17	350.190.514,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	328.954.946,00	65,79	291.551.480,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	500.000.000,00	328.954.946,00	65,79	291.551.480,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000,00	5.552.631.653,00	50,47	4.234.834.265,00
4.1.01.15.01	PBBP2	11.000.000.000,00	5.552.631.653,00	50,47	4.234.834.265,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.000.000.000,00	5.552.631.653,00	50,47	4.234.834.265,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.955.203.933,00	9.489.443.730,00	105,96	11.026.603.526,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.955.203.933,00	9.489.443.730,00	105,96	11.026.603.526,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.955.203.933,00	9.489.443.730,00	105,96	11.026.603.526,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	28.130.000.000,00	30.418.860.794,00	108,13	17.729.646.831,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.000.000.000,00	5.936.481.066,00	118,72	3.339.997.997,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	5.000.000.000,00	5.936.481.066,00	118,72	3.339.997.997,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	21.550.000.000,00	22.085.127.869,00	102,48	13.542.375.728,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	21.300.000.000,00	21.770.260.204,00	102,20	13.351.129.173,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	250.000.000,00	314.867.665,00	125,94	191.246.555,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.500.000.000,00	2.312.421.071,00	154,16	817.836.662,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.500.000.000,00	2.312.421.071,00	154,16	817.836.662,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	20.000.000,00	20.586.293,00	102,93	8.742.361,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	20.000.000,00	20.586.293,00	102,93	8.742.361,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	60.000.000,00	64.244.495,00	107,07	20.694.083,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	10.000.000,00	30.280.985,00	302,80	20.694.083,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	50.000.000,00	33.963.510,00	67,92	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	21.459.046.658,00	24.796.528.682,00	115,55	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	21.459.046.658,00	24.796.528.682,00	115,55	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	21.459.046.658,00	24.796.528.682,00	115,55	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.666.794.842,00	10.127.285.400,00	104,76	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	9.666.794.842,00	10.127.285.400,00	104,76	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	9.666.794.842,00	10.127.285.400,00	104,76	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	96.151.303.597,00	99.084.402.933,00	103,05	93.939.107.790,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	94.549.163.597,00	97.599.739.623,00	103,22	92.712.863.490,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	93.684.139.597,00	96.737.341.833,00	103,25	91.837.156.126,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	37.210.029.597,00	34.266.740.651,00	92,09	33.876.316.898,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	56.474.110.000,00	62.470.601.182,00	110,61	57.960.839.228,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	732.128.000,00	792.270.790,00	108,21	811.116.364,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	732.128.000,00	792.270.790,00	108,21	811.116.364,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	12.750.000,00	25,50	6.750.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	12.750.000,00	25,50	6.750.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	52.896.000,00	46.952.000,00	88,76	49.591.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	52.896.000,00	46.952.000,00	88,76	49.591.000,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	30.000.000,00	10.425.000,00	34,75	8.250.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	10.425.000,00	34,75	8.250.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.202.140.000,00	993.066.400,00	82,60	921.221.900,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	199.800.000,00	202.550.000,00	101,37	448.877.400,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00	158.319.400,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	139.800.000,00	143.800.000,00	102,86	139.958.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	58.500.000,00	57.250.000,00	97,86	34.100.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	25.200.000,00	26.880.000,00	106,66	2.205.000,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	25.200.000,00	26.880.000,00	106,66	2.205.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	21.000.000,00	13.978.000,00	66,56	10.850.500,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	21.000.000,00	13.978.000,00	66,56	10.850.500,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	83.800.000,00	38.474.000,00	45,91	22.169.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	83.800.000,00	38.474.000,00	45,91	22.169.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80	246.400.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80	246.400.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	235.000.000,00	172.359.000,00	73,34	140.895.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	235.000.000,00	172.359.000,00	73,34	140.895.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.340.000,00	13.058.000,00	64,19	18.840.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	18.840.000,00	12.320.000,00	65,39	17.340.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	1.500.000,00	738.000,00	49,20	1.500.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.985.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.985.000,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.19.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	362.000.000,00	276.267.400,00	76,31	13.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	362.000.000,00	276.267.400,00	76,31	13.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00	491.596.910,00	122,89	305.022.400,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	491.596.910,00	122,89	305.022.400,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	491.596.910,00	122,89	305.022.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.807.124.697,00	13.807.124.697,00	100,00	13.723.582.467,00
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	13.807.124.697,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	13.807.124.697,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	13.807.124.697,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	13.807.124.697,00	0,00	13.723.582.467,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	13.807.124.697,00	0,00	13.723.582.467,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	13.807.124.697,00	0,00	13.723.582.467,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.321.409.176,00	7.263.859.132,78	87,29	10.189.003.577,71
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	540.124.150,00	1.080,24	59.589.593,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	3.024.000,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	56.565.593,00
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	56.565.593,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	50.000.000,00	540.124.150,00	1.080,24	0,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	50.000.000,00	540.124.150,00	1.080,24	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	192.961.000,00	96,48	191.924.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	200.000.000,00	192.961.000,00	96,48	191.924.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	200.000.000,00	192.961.000,00	96,48	191.924.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.128.264.935,00	1.311.483.326,00	61,62	2.366.116.565,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.164.672.466,00	77,64	2.366.116.565,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.164.672.466,00	77,64	2.366.116.565,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	625.000.000,00	146.810.860,00	23,48	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	625.000.000,00	146.810.860,00	23,48	0,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	3.264.935,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	3.264.935,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	480.819.894,00	96,16	215.322.572,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	480.819.894,00	96,16	215.322.572,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	480.819.894,00	96,16	215.322.572,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.000.000.000,00	1.831.188.469,36	61,03	5.846.192.274,71
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	146.873.970,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	146.873.970,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00	1.831.188.469,36	61,03	5.699.318.304,71
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.000.000.000,00	1.831.188.469,36	61,03	5.699.318.304,71
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000,00	159.757.957,00	72,61	184.691.657,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000,00	159.757.957,00	72,61	184.691.657,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000,00	159.757.957,00	72,61	184.691.657,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	297.830.363,00	570.973.679,20	191,71	88.290.732,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.000.000,00	148.920.393,60	1.861,50	2.712.487,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.000.000,00	148.920.393,60	1.861,50	2.712.487,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6.000.000,00	103.530.668,60	1.725,51	1.676.989,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.000.000,00	103.530.668,60	1.725,51	1.676.989,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.000.000,00	381.900,00	38,19	95.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.000.000,00	381.900,00	38,19	95.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	329.738,00	0,00	0,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	329.738,00	0,00	0,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.000.000,00	1.233.120,00	123,31	0,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.000.000,00	1.233.120,00	123,31	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000,00	1.102.899,00	36,76	0,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	1.102.899,00	0,00	0,00
4.1.04.12.14.0039	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75.000.000,00	50.584.901,00	67,44	83.806.256,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	75.000.000,00	50.584.901,00	67,44	83.806.256,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	183.259,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	128.155,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0019	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	55.104,00	0,00	0,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	197.000.000,00	264.620.500,00	134,32	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	197.000.000,00	264.620.500,00	134,32	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.830.363,00	86.300,00	1,26	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	6.830.363,00	86.300,00	1,26	0,00
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.546.295.230,00	1.576.235.919,22	101,93	383.737.446,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	60.000.000,00	37.249.306,22	62,08	42.423.942,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000,00	37.249.306,22	62,08	42.423.942,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00	198.468.414,00	99,23	341.313.504,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	200.000.000,00	198.468.414,00	99,23	0,00
4.1.04.15.08.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-Tunjangan Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	0,00	0,00	341.313.504,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.286.295.230,00	1.340.518.199,00	104,21	0,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.340.518.199,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.286.295.230,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	128.018.648,00	600.314.738,00	468,92	853.138.738,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	128.018.648,00	600.314.738,00	468,92	853.138.738,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	128.018.648,00	600.314.738,00	468,92	853.138.738,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**205.074.782.496,00**	**202.786.070.976,78**	**98,88**	**164.717.557.879,71**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.330.080.359.258,46**	**1.365.309.894.829,00**	**102,64**	**1.361.215.315.925,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.263.938.865.949,00	1.294.527.978.607,00	102,42	1.281.140.966.857,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.037.443.000,00	19.953.885.000,00	104,81	23.155.639.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	13.874.758.000,00	14.683.527.000,00	105,82	12.317.757.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	5.229.061.000,00	5.736.762.000,00	109,70	4.623.153.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	8.382.289.000,00	8.339.090.250,00	99,48	7.446.333.000,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	333.878.750,00	0,00	0,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	263.408.000,00	273.796.000,00	103,94	248.271.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.854.983.000,00	1.962.656.000,00	105,80	10.837.882.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	210.884.000,00	220.664.000,00	104,63	252.064.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	583.619.000,00	678.787.000,00	116,30	1.145.552.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	32.034.000,00	34.759.000,00	108,50	8.058.204.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1.028.446.000,00	1.028.446.000,00	100,00	1.382.062.000,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	3.307.702.000,00	3.307.702.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	3.307.702.000,00	3.307.702.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	863.326.777.000,00	893.639.603.961,00	103,51	860.911.170.294,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	773.645.573.000,00	805.467.182.954,00	104,11	748.319.513.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	773.645.573.000,00	805.467.182.954,00	104,11	748.319.513.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	89.681.204.000,00	88.172.421.007,00	98,31	112.591.657.294,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.272.472.000,00	4.763.689.007,00	75,94	28.952.515.294,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	50.266.849.000,00	50.266.849.000,00	100,00	45.935.381.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	33.141.883.000,00	33.141.883.000,00	100,00	14.606.555.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	23.097.206.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	280.635.237.949,00	282.905.595.096,00	100,80	295.394.632.563,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	16.072.042.000,00	14.276.769.310,00	88,82	58.347.668.989,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.560.271.000,00	1.560.271.000,00	100,00	1.175.015.509,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	321.673.000,00	306.107.926,00	95,16	3.657.435.000,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	236.224.000,00	230.589.459,00	97,61	3.399.533.000,00
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	0,00	0,00	1.105.631.633,00
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	763.948.235,00
4.2.01.09.01.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	506.892.650,00
4.2.01.09.01.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	10.039.246.147,00
4.2.01.09.01.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.498.000.156,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	14.895.121.700,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.159.623.000,00	7.159.623.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.01.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.764.275.000,00
4.2.01.09.01.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.747.000.000,00
4.2.01.09.01.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	110.400.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	10.685.169.959,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3.600.079.000,00	3.437.169.398,00	95,47	0,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	3.194.172.000,00	1.583.008.527,00	49,55	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	264.563.195.949,00	268.628.825.786,00	101,53	237.046.963.574,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.411.800.000,00	60.115.721.137,00	99,50	60.896.188.737,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.865.750.000,00	2.865.750.000,00	100,00	3.012.500.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	164.619.153.000,00	172.769.056.133,00	104,95	137.328.264.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.142.477.000,00	566.500.000,00	49,58	3.265.843.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.626.800.000,00	5.587.217.526,00	99,29	5.608.909.700,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.099.400.000,00	3.092.515.021,00	99,77	3.121.300.000,00
4.2.01.09.02.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	992.220.255,00	992.220.255,00	100,00	655.476.970,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	575.284.245,00
4.2.01.09.02.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	1.095.375.880,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	421.654.680,00
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.547.158.924,00	5.547.158.924,00	100,00	5.074.211.343,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	386.514.338,00	386.514.358,00	100,00	367.218.032,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	718.618.575,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.165.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.234.791.789,00	4.234.791.789,00	100,00	7.464.989.314,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	628.728.000,00	628.728.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.491.532.643,00	11.491.532.643,00	100,00	7.441.129.098,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	351.120.000,00	351.120.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.162.999.457.949,00**	**1.196.499.084.057,00**	**102,88**	**1.179.461.441.857,00**
4.2.01.05	Dana Desa	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	97,11	94.152.458.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	97,11	94.152.458.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	97,11	94.152.458.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	7.527.067.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	7.527.067.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	7.527.067.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**100.939.408.000,00**	**98.028.894.550,00**	**97,11**	**101.679.525.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.141.493.309,46	70.781.916.222,00	107,01	80.074.349.068,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	63.741.493.309,46	64.881.946.222,00	101,78	80.074.349.068,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.741.493.309,46	64.881.946.222,00	101,78	80.074.349.068,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.202.076.974,00	5.339.563.186,00	102,64	18.872.307.712,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.860.872.309,00	1.981.119.814,00	106,46	8.603.716.296,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.573.871.943,46	33.153.744.928,00	105,00	29.085.373.814,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	624.522.301,00	734.505.387,00	117,61	451.565.111,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	24.480.149.782,00	23.673.012.907,00	96,70	23.061.386.135,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.400.000.000,00	5.899.970.000,00	245,83	0,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	750.000.000,00	4.179.970.000,00	557,32	0,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	750.000.000,00	4.179.970.000,00	557,32	0,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	1.650.000.000,00	1.720.000.000,00	104,24	0,00
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000,00	1.720.000.000,00	104,24	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**66.141.493.309,46**	**70.781.916.222,00**	**107,01**	**80.074.349.068,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**1.330.080.359.258,46**	**1.365.309.894.829,00**	**102,64**	**1.361.215.315.925,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**4.000.000.000,00**	**4.000.004.000,00**	**100,00**	**738.000.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	4.000,00	0,00	738.000.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	738.000.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	738.000.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	738.000.000,00
4.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.3.01.03.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.3.01.03.01.0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.02.01	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.02.01.01	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.02.01.01.0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**4.000.000.000,00**	**4.000.004.000,00**	**100,00**	**738.000.000,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.539.155.141.754,46**	**1.572.095.969.805,78**	**102,14**	**1.526.670.873.804,71**
5	**BELANJA DAERAH**	**1.577.733.777.940,19**	**1.495.186.732.880,97**	**94,76**	**1.534.849.060.997,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.296.434.311.161,82**	**1.237.459.769.264,12**	**95,45**	**1.210.859.160.870,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	875.183.897.096,37	866.021.568.444,12	98,95	750.224.137.285,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	535.670.468.546,50	528.577.332.441,12	98,67	504.414.798.559,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	402.361.848.112,24	399.651.003.172,00	99,32	381.993.388.488,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	288.285.229.028,00	286.148.336.781,00	99,25	302.372.606.798,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	114.076.619.084,24	113.502.666.391,00	99,49	79.620.781.690,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	37.549.466.891,95	37.091.870.609,00	98,78	35.634.460.778,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.078.314.493,26	26.725.276.583,00	98,69	28.209.774.694,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.471.152.398,69	10.366.594.026,00	99,00	7.424.686.084,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.830.670.551,34	5.514.015.292,00	94,56	6.095.439.994,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.830.670.551,34	5.514.015.292,00	94,56	6.095.439.994,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.419.043.629,80	33.161.135.078,00	99,22	30.478.997.940,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.254.526.702,28	22.023.079.610,00	98,95	22.424.616.940,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11.164.516.927,52	11.138.055.468,00	99,76	8.054.381.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.132.715.956,86	2.015.774.250,00	94,51	1.862.314.998,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.903.313.054,26	1.810.919.250,00	95,14	1.862.314.998,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	229.402.902,60	204.855.000,00	89,29	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	21.282.880.975,94	21.014.226.958,00	98,73	19.884.286.978,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.100.595.562,76	13.895.225.400,00	98,54	14.799.316.678,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.182.285.413,18	7.119.001.558,00	99,11	5.084.970.300,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.751.866.809,09	1.720.884.427,00	98,23	1.383.169.882,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.748.397.356,69	1.720.884.427,00	98,42	1.383.169.882,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.469.452,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.364.226,51	4.955.222,00	92,37	4.964.735,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.745.517,72	3.446.408,00	92,01	3.864.097,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.618.708,79	1.508.814,00	93,21	1.100.638,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	27.931.448.285,10	25.103.212.433,12	89,87	23.910.662.641,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.812.021.736,28	18.119.953.919,20	91,45	19.638.828.417,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	8.119.426.548,82	6.983.258.513,92	86,00	4.271.834.224,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	860.935.298,75	825.050.352,00	95,83	791.652.607,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	615.089.055,86	586.694.043,00	95,38	619.721.816,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	245.846.242,89	238.356.309,00	96,95	171.930.791,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.544.227.808,92	2.475.204.648,00	97,28	2.375.459.518,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.812.869.693,79	1.760.087.702,00	97,08	1.859.645.340,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	731.358.115,13	715.116.946,00	97,77	515.814.178,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	277.454.524.887,87	278.364.064.458,00	100,32	77.440.634.821,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	75.464.640.677,87	70.997.338.715,00	94,08	71.979.013.064,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	61.869.057.548,64	58.478.070.824,00	94,51	61.037.048.886,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	13.595.583.129,23	12.519.267.891,00	92,08	10.941.964.178,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.812.154.067,00	2.661.555.466,00	94,64	2.493.509.472,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.772.639.716,00	2.635.898.738,00	95,06	2.487.974.093,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	39.514.351,00	25.656.728,00	64,93	5.535.379,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.302.538.564,00	3.276.130.157,00	99,20	2.968.112.285,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.170.501.040,00	3.144.311.037,00	99,17	2.968.112.285,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	132.037.524,00	131.819.120,00	99,83	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	195.875.191.579,00	201.429.040.120,00	102,83	0,00
5.1.01.02.06.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	265.544.246,00	264.437.745,00	99,58	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	18.034.751,00	18.026.182,00	99,95	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	15.343.000,00	15.343.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.385.802,00	5.334.501,00	72,22	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	22.000.000,00	21.941.961,00	99,73	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	315.813.372,00	313.521.337,00	99,27	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.372.514.045,00	1.361.460.367,00	99,19	0,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	592.787.213,00	582.872.238,00	98,32	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	29.494.960,00	27.857.469,00	94,44	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	5.472.000,00	1.876.800,00	34,29	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	22.323.250,00	10.057.562,00	45,05	0,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	10.000.000,00	8.750.000,00	87,50	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.106.258,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.318.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	813.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0063	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.120.000,00	1.500.000,00	70,75	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	138.253.290.000,00	146.579.724.898,00	106,02	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	360.000.000,00	11.000.000,00	3,05	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.575.127.039,00	1.501.204.660,00	95,30	0,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	50.946.363.144,00	49.491.381.400,00	97,14	0,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	2.033.014.999,00	1.197.750.000,00	58,91	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	146.827.997.297,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	1.289.064.765,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	18.580.329,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	297.991.603,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	12.171.473,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	396.375,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00	31.152.491,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	366.887.252,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(],PBJT],	0,00	0,00	0,00	561.885.242,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	12.867.500,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	3.937.500,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	8.930.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	138.672.599.100,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	138.672.599.100,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.643.436.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	2.643.436.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.377.224.682,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.377.224.682,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	2.832.805.250,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.715.730.250,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	102.075.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.199.551.260,00	19.980.661.961,00	98,91	17.158.200.732,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	996.555.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	996.555.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	94.315.200,00	67,09	90.654.900,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	94.315.200,00	67,09	90.654.900,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	109.499.040,00	70,00	109.499.040,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	109.499.040,00	70,00	109.499.040,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.470.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.470.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.458.098.250,00	1.455.814.500,00	99,84	1.445.004.750,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.458.098.250,00	1.455.814.500,00	99,84	1.445.004.750,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.027.460,00	113.578.500,00	97,88	94.060.050,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	116.027.460,00	113.578.500,00	97,88	94.060.050,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	83.131.740,00	16.914.975,00	20,34	23.888.025,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	83.131.740,00	16.914.975,00	20,34	23.888.025,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	100,00	3.383.100.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	100,00	3.383.100.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.386.000.000,00	97,77	554.400.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.386.000.000,00	97,77	554.400.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	10.533.662,00	568.998,00	5,40	381.569,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	10.533.662,00	568.998,00	5,40	381.569,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.090.493.548,00	3.087.902.748,00	99,91	3.061.497.398,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	89.964.000,00	87.570.504,00	97,33	86.716.266,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.065.392,00	100,00	2.051.280,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.393.480,00	6.196.176,00	96,91	6.153.840,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.992.070.676,00	2.992.070.676,00	100,00	2.966.576.012,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.956.000.000,00	6.956.000.000,00	100,00	6.896.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.956.000.000,00	6.956.000.000,00	100,00	6.896.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.710.000,00	0,00	0,00	417.690.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.710.000,00	0,00	0,00	417.690.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.003.391.115,00	864.613.270,00	86,16	387.068.089,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	72.661.500,00	72.300.000,00	99,50	29.400.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	72.661.500,00	72.300.000,00	99,50	29.400.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.300.370,00	5.274.000,00	99,50	4.116.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.300.370,00	5.274.000,00	99,50	4.116.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	85.203.900,00	84.780.000,00	99,50	52.920.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	85.203.900,00	84.780.000,00	99,50	52.920.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.585.272,00	4.562.460,00	99,50	4.055.520,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.585.272,00	4.562.460,00	99,50	4.055.520,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	767.749,00	763.929,00	99,50	419.670,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	767.749,00	763.929,00	99,50	419.670,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.668,00	1.660,00	99,52	1.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.668,00	1.660,00	99,52	1.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.072.482,00	5.032.320,00	82,87	2.963.520,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.072.482,00	5.032.320,00	82,87	2.963.520,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	104.198,00	103.680,00	99,50	60.480,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	104.198,00	103.680,00	99,50	60.480,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	312.595,00	311.040,00	99,50	181.440,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	312.595,00	311.040,00	99,50	181.440,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	807.884.941,00	677.374.968,00	83,84	292.950.459,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	104.618.067,00	89.859.756,00	85,89	0,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	47.125.624,00	47.125.624,00	100,00	0,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	8.340.312,00	8.046.804,00	96,48	4.611.260,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	35.714.037,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	675.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.468.750,00	4.468.750,00	100,00	3.250.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.433.066,00	707.375,00	49,36	736.124,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	32.517.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	107.080.442,00	97.004.307,00	90,59	61.791.514,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	401.616.180,00	357.738.069,00	89,07	186.847.524,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor [(],PKB],	100.010.100,00	72.424.283,00	72,41	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	20.496.440,00	14.109.213,00	68,83	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.611.440,00	8.007.650,00	92,98	0,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.000.000,00	1.151.563,00	38,38	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.643.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	325.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00	0,00
5.1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	236.250,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.05.11.0044	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	680.000,00	450.000,00	66,17	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	952.000.000,00	802.385.743,00	84,28	776.635.980,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	124.320.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	124.320.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00	550.385.743,00	78,62	652.315.980,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000,00	550.385.743,00	78,62	652.315.980,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	39.903.961.287,00	37.432.510.571,00	93,80	3.218.801.807,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	39.903.961.287,00	37.432.510.571,00	93,80	3.218.801.807,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	39.903.961.287,00	37.432.510.571,00	93,80	3.218.801.807,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.902.349.897,45	350.426.013.362,00	88,06	388.176.440.957,00
5.1.02.01	Belanja Barang	71.808.378.009,70	61.596.825.442,00	85,77	67.096.493.920,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.761.570.649,70	61.550.890.442,00	85,77	67.088.798.470,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	69.079.320,00	67.691.420,00	97,99	68.321.103,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	420.384.541,00	309.286.805,00	73,57	116.575.430,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.244.989.050,44	9.844.324.649,00	80,39	10.314.691.963,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	514.683.623,00	454.176.100,00	88,24	240.823.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.305.600,00	89.000,00	2,06	514.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	10.717.000,00	10.705.000,00	99,88	147.092.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.055.369.387,97	1.511.935.162,00	73,56	1.131.700.312,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	910.924.114,00	654.537.475,00	71,85	1.175.646.010,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	146.232.630,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.880.600,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	63.503.250,00	47.826.790,00	75,31	24.891.790,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.286.379.881,50	2.941.852.904,00	89,51	3.542.103.624,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	82.600,00	0,00	0,00	205.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.380.045.911,58	2.788.751.574,00	82,50	3.600.206.512,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	215.280.032,00	179.773.200,00	83,50	188.605.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.173.376,00	3.168.000,00	99,83	2.240.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	119.797.971,50	97.403.122,00	81,30	101.353.201,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	795.508.707,50	723.080.571,00	90,89	460.972.468,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	16.393.425,00	10.489.500,00	63,98	1.320.900,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	304.290.000,00	267.173.045,00	87,80	294.618.660,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.185.600,00	39.676.400,00	84,08	8.473.500,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.995.490.519,66	3.927.484.510,00	98,29	6.175.374.615,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.616.848.128,00	4.474.428.124,00	96,91	171.835.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.263.981.143,00	8.100.334.975,00	87,43	22.145.748.832,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	15.211.734.540,01	13.886.178.588,00	91,28	5.384.079.207,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	183.958.736,00	136.803.850,00	74,36	85.815.518,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.394.700,00	1.302.050,00	93,35	55.128.500,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	3.910.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.064.779.691,54	4.272.784.203,00	70,45	4.415.557.594,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.998.230.000,00	1.868.943.537,00	93,52	1.733.463.216,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.812.954.000,00	2.426.738.500,00	86,27	2.148.833.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.816.577.000,00	1.505.675.594,00	82,88	1.143.052.765,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	278.600.000,00	115.018.600,00	41,28	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	477.000.000,00	472.052.475,00	98,96	631.980.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00	14.935.500,00	99,57	42.124.250,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	45.125.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	356.579.500,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	57.900.000,00	21.687.000,00	37,45	50.603.500,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	82.500.000,00	73.562.900,00	89,16	351.840.670,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	52.969.200,00	26.139.279,00	49,34	19.343.750,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	232.879.000,00	223.901.040,00	96,14	230.793.300,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	100.800.000,00	20.979.000,00	20,81	141.021.750,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	375.000,00	375.000,00	100,00	7.695.450,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	375.000,00	375.000,00	100,00	7.695.450,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	46.432.360,00	45.560.000,00	98,12	0,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	40.000.000,00	39.960.000,00	99,90	0,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	6.432.360,00	5.600.000,00	87,05	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	149.312.901.552,01	132.985.071.816,00	89,06	127.606.648.974,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	87.337.741.864,01	77.237.904.605,00	88,43	80.945.968.025,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.433.706.000,00	1.761.036.767,00	51,28	1.910.828.943,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.156.020.000,00	991.417.500,00	85,76	1.130.670.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	95.400.000,00	90.000.000,00	94,33	106.199.890,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.111.920.000,00	1.027.170.000,00	92,37	700.400.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	76.200.000,00	58.500.000,00	76,77	82.300.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	280.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	577.600.000,00	567.300.000,00	98,21	552.100.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.587.500.000,00	5.821.675.000,00	88,37	5.851.825.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.977.174.161,00	2.135.614.727,00	71,73	3.134.599.239,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	471.382.036,00	392.109.000,00	83,18	471.373.500,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	512.000.000,00	473.250.000,00	92,43	203.700.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.942.640.000,00	1.859.637.800,00	95,72	2.031.010.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	514.630.000,00	504.669.000,00	98,06	370.920.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	87.480.000,00	86.980.000,00	99,42	94.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.301.677.500,00	11.359.939.965,00	92,34	14.075.576.185,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	5.433.707.700,00	4.729.796.988,00	87,04	4.823.494.713,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.347.585.000,00	3.104.117.450,00	92,72	2.931.071.200,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.877.710.000,00	1.468.780.000,00	78,22	1.635.247.500,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.966.915.010,00	6.217.342.367,00	89,24	6.449.583.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.804.440.000,00	1.592.544.000,00	88,25	1.778.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.527.510.000,00	2.066.008.800,00	81,74	1.703.470.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	94.655.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	38.950.000,00	13.450.000,00	34,53	17.300.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.169.344.000,00	1.826.249.416,00	84,18	2.093.938.518,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	50.170.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	200.850.000,00	198.994.483,00	99,07	189.371.854,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	393.839.235,00	347.836.714,00	88,31	170.540.051,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	410.412.949,35	243.358.000,00	59,29	282.985.450,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.239.357.988,66	3.445.640.406,00	81,27	21.530.897.406,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	607.689.000,00	539.319.200,00	88,74	1.047.316.704,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.651.430.000,00	1.471.864.353,00	89,12	1.571.544.651,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	82.185.000,00	43.828.600,00	53,32	24.868.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	637.238.400,00	432.613.100,00	67,88	252.552.050,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	16.555.347.884,00	16.461.507.618,00	99,43	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.557.828.000,00	3.145.692.451,00	88,41	3.298.758.671,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	50.000.000,00	4.614.900,00	9,22	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.782.347.000,00	2.662.246.000,00	95,68	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	142.725.000,00	77.800.000,00	54,51	0,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.619.325.474,00	45.073.779.955,00	96,68	34.057.634.020,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.740.000.000,00	1.708.359.504,00	98,18	1.589.647.694,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	37.765.756.000,00	37.702.140.000,00	99,83	27.578.628.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.802.576.400,00	3.796.211.900,00	99,83	2.956.758.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.158.123.074,00	468.574.506,00	40,45	654.865.152,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	968.335.000,00	373.397.297,00	38,56	570.781.838,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	351.115.000,00	191.883.948,00	54,64	359.781.336,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	496.140.000,00	495.960.000,00	99,96	206.650.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	337.280.000,00	337.252.800,00	99,99	140.522.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	40.000.000,00	32.190.000,00	80,47	40.410.000,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	40.000.000,00	32.190.000,00	80,47	34.410.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.353.081.000,00	1.670.718.350,00	71,00	1.235.257.950,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.353.807.000,00	1.004.300.200,00	74,18	558.202.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	671.050.000,00	485.105.150,00	72,29	435.841.950,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	111.000.000,00	39.465.000,00	35,55	54.966.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	151.600.000,00	121.224.000,00	79,96	164.848.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	65.624.000,00	20.624.000,00	31,42	17.400.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.991.079.116,00	4.531.467.300,00	64,81	5.146.369.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	639.000.000,00	306.856.000,00	48,02	181.313.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	40.000.000,00	38.850.000,00	97,12	0,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.200.000,00	5.194.800,00	99,90	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	38.850.000,00
5.1.02.02.05.0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	80.000.000,00	79.925.000,00	99,90	69.925.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	6.226.879.116,00	4.100.641.500,00	65,85	4.854.781.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	55.590.000,00
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	55.590.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.970.274.098,00	2.655.627.206,00	89,40	4.379.669.979,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	97.078.380,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	199.230.000,00	193.225.914,00	96,98	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00	99.716.850,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.270.741.018,00	1.072.316.342,00	84,38	3.309.132.997,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	900.000.000,00	805.634.670,00	89,51	802.822.152,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	100.523.080,00	100.523.080,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	112.000.000,00	111.993.200,00	99,99	55.919.600,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	37.500.000,00	22.000.000,00	58,66	15.000.000,00
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	350.280.000,00	349.934.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	162.000.000,00	126.000.000,00	77,77	254.505.000,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	146.505.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	162.000.000,00	126.000.000,00	77,77	108.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	344.850.000,00	343.850.000,00	99,71	297.350.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	316.500.000,00	315.750.000,00	99,76	54.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	28.350.000,00	28.100.000,00	99,11	232.350.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.414.550.000,00	1.233.534.400,00	51,08	1.114.895.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.604.800.000,00	936.350.000,00	58,34	646.165.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	809.750.000,00	297.184.400,00	36,70	459.730.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	79.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	79.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.698.695.237,40	9.368.756.932,00	80,08	7.739.589.970,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.580.395.439,00	4.449.487.147,00	79,73	3.302.567.695,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	447.972.970,00	342.326.086,00	76,41	146.936.193,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	117.492.000,00	76.061.850,00	64,73	22.296.400,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.798.817.640,00	3.083.377.177,00	81,16	2.249.889.632,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	52.281.000,00	0,00	0,00	51.948.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	142.887.000,00	103.246.510,00	72,25	172.866.990,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	287.944.829,00	238.737.465,00	82,91	206.482.456,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.500.000,00	9.991.000,00	95,15	1.250.000,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	7.000.000,00	1.520.000,00	21,71	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	444.570.000,00	392.598.912,00	88,30	310.462.574,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	204.930.000,00	156.122.947,00	76,18	113.269.950,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	28.000.000,00	21.005.200,00	75,01	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.500.000,00	0,00	0,00	18.165.500,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	15.500.000,00	15.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.502.568.968,40	1.874.520.214,00	74,90	2.676.941.610,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.498.435.768,40	1.870.395.214,00	74,86	849.671.080,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.827.270.530,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	4.133.200,00	4.125.000,00	99,80	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.615.730.830,00	3.044.749.571,00	84,20	1.760.080.665,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.032.000.000,00	2.486.533.443,00	82,00	1.550.495.588,00
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	583.730.830,00	558.216.128,00	95,62	209.585.077,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	33.668.508.350,73	30.097.217.498,00	89,39	47.728.396.373,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.547.128.350,73	30.097.217.498,00	89,71	47.728.396.373,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.744.000.308,00	21.825.580.183,00	91,92	29.629.685.943,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.491.248.042,73	8.063.917.315,00	84,96	17.651.615.430,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	311.880.000,00	207.720.000,00	66,60	447.095.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	121.380.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas BiasaÃ¢â‚¬â€œLuar Negeri	121.380.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.384.936.400,00	10.806.164.813,00	80,73	7.672.058.463,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.516.768.900,00	2.574.797.810,00	57,00	1.684.066.900,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	4.516.768.900,00	2.574.797.810,00	57,00	1.684.066.900,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.868.167.500,00	8.231.367.003,00	92,81	5.987.991.563,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.880.717.500,00	5.410.271.003,00	92,00	5.549.735.708,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.987.450.000,00	2.821.096.000,00	94,43	438.255.855,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	49.657.585.443,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	49.657.585.443,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	49.657.585.443,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	50.242.317.421,61	47.593.235.946,00	94,72	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	49.808.376.221,61	47.159.294.746,00	94,68	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	47.328.985.063,61	44.665.576.723,00	94,37	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.479.391.158,00	2.493.718.023,00	100,57	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	199.784.500,00	199.784.500,00	100,00	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	199.784.500,00	199.784.500,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	234.156.700,00	234.156.700,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	234.156.700,00	234.156.700,00	100,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.764.900.000,00	4.607.050.000,00	68,10	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.764.900.000,00	4.607.050.000,00	68,10	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.764.900.000,00	4.607.050.000,00	68,10	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.021.712.926,00	53.371.690.915,00	87,46	80.675.667.814,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.021.712.926,00	53.371.690.915,00	87,46	80.675.667.814,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.021.712.926,00	53.371.690.915,00	87,46	80.675.667.814,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.359.064.168,00	17.590.437.458,00	95,81	66.843.582.628,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.155.500.000,00	3.810.892.515,00	91,70	61.252.913.542,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.105.500.000,00	2.761.854.180,00	88,93	57.111.783.101,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.105.500.000,00	2.761.854.180,00	88,93	57.111.783.101,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	49.879.000,00	99,75	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000,00	49.879.000,00	99,75	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	999.159.335,00	99,91	4.141.130.441,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	999.159.335,00	99,91	4.141.130.441,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.818.365.556,00	4.796.912.956,00	99,55	4.721.047.723,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.818.365.556,00	4.796.912.956,00	99,55	4.721.047.723,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.818.365.556,00	4.796.912.956,00	99,55	4.721.047.723,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	872.497.812,00	872.497.812,00	100,00	869.621.363,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	872.497.812,00	872.497.812,00	100,00	869.621.363,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	872.497.812,00	872.497.812,00	100,00	869.621.363,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.512.700.800,00	8.110.134.175,00	95,27	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.589.600.000,00	5.283.919.154,00	94,53	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.589.600.000,00	5.283.919.154,00	94,53	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.923.100.800,00	2.826.215.021,00	96,68	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.923.100.800,00	2.826.215.021,00	96,68	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.989.000.000,00	3.421.750.000,00	68,58	5.615.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.989.000.000,00	3.421.750.000,00	68,58	5.615.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.989.000.000,00	3.421.750.000,00	68,58	5.615.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.989.000.000,00	3.421.750.000,00	68,58	5.615.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.296.434.311.161,82**	**1.237.459.769.264,12**	**95,45**	**1.210.859.160.870,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**70.145.591.385,46**	**56.310.843.328,00**	**80,27**	**139.007.975.111,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.055.539.686,56	27.846.028.860,00	79,43	29.175.409.504,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	5.255.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	5.255.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	5.255.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.193.355.000,00	2.988.800.000,00	93,59	2.995.292.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.193.355.000,00	2.988.800.000,00	93,59	2.995.292.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	3.193.355.000,00	2.988.800.000,00	93,59	463.700.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	38.592.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	2.493.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	60.191.095,00	50.746.100,00	84,30	1.149.888.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	9.451.000,00	5.400.000,00	57,13	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	9.451.000,00	5.400.000,00	57,13	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	50.740.095,00	45.346.100,00	89,36	1.149.888.000,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	0,00	0,00	0,00	888.000,00
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	0,00	0,00	0,00	1.149.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	50.740.095,00	45.346.100,00	89,36	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	184.540.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	184.540.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00	54.190.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	130.350.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.721.738.740,00	3.055.462.513,00	82,09	1.570.039.043,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	535.882.622,00	433.754.710,00	80,94	354.845.765,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.630.000,00	3.470.000,00	95,59	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	228.940.000,00	226.317.900,00	98,85	44.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	303.312.622,00	203.966.810,00	67,24	310.845.765,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.926.845.348,00	2.396.547.843,00	81,88	1.009.053.278,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	690.435.150,00	511.986.647,00	74,15	514.950.700,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	14.784.800,00	7.992.000,00	54,05	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	347.019.838,00	318.963.450,00	91,91	55.202.500,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	43.300.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.629.239.220,00	1.404.148.246,00	86,18	271.170.078,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	245.366.340,00	153.457.500,00	62,54	124.430.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	259.010.770,00	225.159.960,00	86,93	206.140.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	80.073.360,00	78.654.600,00	98,22	88.260.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	38.303.050,00	34.970.550,00	91,29	48.280.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	1.620.000,00	1.287.600,00	79,48	0,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	20.449.000,00	11.100.000,00	54,28	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	59.993.000,00	59.862.300,00	99,78	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	58.572.360,00	39.284.910,00	67,07	69.600.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	535.082.818,00	177.868.503,00	33,24	66.010.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	387.340.818,00	67.033.002,00	17,30	66.010.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	18.550.000,00	18.128.000,00	97,72	30.610.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	35.400.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	368.790.818,00	48.905.002,00	13,26	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	147.742.000,00	110.835.501,00	75,01	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	28.455.000,00	23.984.001,00	84,28	0,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	119.287.000,00	86.851.500,00	72,80	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.162.525.910,00	389.243.000,00	17,99	8.014.680.714,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.824.162.910,00	89.743.000,00	4,91	7.962.129.215,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.824.162.910,00	89.743.000,00	4,91	60.026.400,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	0,00	718.000.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	0,00	0,00	670.000.000,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	809.678.815,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	1.914.700.000,00
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	613.957.000,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0,00	0,00	0,00	3.065.367.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	110.400.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	338.363.000,00	299.500.000,00	88,51	52.551.499,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	338.363.000,00	299.500.000,00	88,51	52.551.499,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	296.761.380,60	290.075.559,00	97,74	650.261.170,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	246.711.170,00
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	0,00	0,00	0,00	245.711.170,00
5.2.02.08.01.0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	227.700.000,00	222.365.559,00	97,65	375.600.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	227.700.000,00	222.365.559,00	97,65	375.600.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	69.061.380,60	67.710.000,00	98,04	27.950.000,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	69.061.380,60	67.710.000,00	98,04	27.950.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.596.949.255,96	2.352.484.729,00	65,40	2.455.879.868,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.662.504.769,96	1.873.221.553,00	70,35	2.095.028.920,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	707.450.000,00	268.950.000,00	38,01	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.720.291.530,96	1.502.177.083,00	87,32	2.095.028.920,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	234.763.239,00	102.094.470,00	43,48	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	934.444.486,00	479.263.176,00	51,28	360.850.948,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	567.869.220,00	452.012.676,00	79,59	240.225.948,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	343.683.866,00	17.704.500,00	5,15	86.450.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.891.400,00	9.546.000,00	41,70	34.175.000,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	1.989.200,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	1.989.200,00
5.2.02.11.02.0001	Belanja Modal Mekanik	0,00	0,00	0,00	1.989.200,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	125.200.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	125.200.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	0,00	0,00	99.350.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.850.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.286.375.373,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.286.375.373,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.286.375.373,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.153.794.507,00	5.836.914.566,00	94,85	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	6.093.771.007,00	5.776.891.066,00	94,79	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.817.489.087,00	5.600.911.185,00	96,27	0,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	276.281.920,00	175.979.881,00	63,69	0,00
5.2.02.89.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	54.529.000,00	54.529.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.02.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	54.529.000,00	54.529.000,00	100,00	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	5.494.500,00	5.494.500,00	100,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.494.500,00	5.494.500,00	100,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.329.885.980,00	12.704.433.890,00	82,87	6.675.254.136,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.329.885.980,00	12.704.433.890,00	82,87	6.675.254.136,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	15.329.885.980,00	12.704.433.890,00	82,87	6.675.254.136,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.361.821.684,90	7.072.853.014,00	84,58	24.250.418.079,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.422.563.284,90	6.306.913.218,00	84,96	22.629.553.971,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.422.563.284,90	6.306.913.218,00	84,96	22.629.553.971,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.544.516.561,00	1.188.544.235,00	76,95	2.110.577.203,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.561.716.000,00	2.499.528.738,00	97,57	7.475.126.847,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	968.446.639,90	927.135.545,00	95,73	1.047.209.090,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.701.879.206,00	1.691.704.700,00	99,40	10.428.578.148,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	22.992.500,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	623.012.378,00	0,00	0,00	1.568.062.683,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	49.964.417,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	49.964.417,00
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.964.417,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	939.258.400,00	765.939.796,00	81,54	1.570.899.691,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	939.258.400,00	765.939.796,00	81,54	1.570.899.691,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	939.258.400,00	765.939.796,00	81,54	1.570.899.691,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.631.351.368,00	15.512.561.406,00	75,18	79.222.627.499,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	15.445.043.770,00	12.752.291.092,00	82,56	69.931.491.649,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	13.269.390.250,00	12.478.154.682,00	94,03	55.846.049.272,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	13.269.390.250,00	12.478.154.682,00	94,03	55.846.049.272,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.175.653.520,00	274.136.410,00	12,60	14.085.442.377,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.175.653.520,00	274.136.410,00	12,60	14.085.442.377,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.291.500.000,00	1.289.501.450,00	99,84	9.281.145.850,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.275.000.000,00	1.273.022.000,00	99,84	9.281.145.850,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.200.000.000,00	1.198.036.000,00	99,83	9.281.145.850,00
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	75.000.000,00	74.986.000,00	99,98	0,00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	16.500.000,00	16.479.450,00	99,87	0,00
5.2.04.02.05.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	16.500.000,00	16.479.450,00	99,87	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	894.807.598,00	831.879.200,00	92,96	0,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	892.000.000,00	829.082.000,00	92,94	0,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	892.000.000,00	829.082.000,00	92,94	0,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.807.598,00	2.797.200,00	99,62	0,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.807.598,00	2.797.200,00	99,62	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.000.000.000,00	638.889.664,00	21,29	9.990.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.000.000.000,00	638.889.664,00	21,29	9.990.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.000.000.000,00	638.889.664,00	21,29	9.990.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.871.878.646,00	5.657.400.048,00	96,34	5.488.641.329,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	29.150.000,00	29.026.500,00	99,57	27.500.000,00
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	29.150.000,00	29.026.500,00	99,57	27.500.000,00
5.2.05.01.04.0002	Belanja Modal Musik Lainnya	29.150.000,00	29.026.500,00	99,57	27.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	99.360.000,00	99.069.565,00	99,70	378.674.750,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	99.360.000,00	99.069.565,00	99,70	375.844.250,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	99.360.000,00	99.069.565,00	99,70	375.844.250,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	2.830.500,00
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.830.500,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	5.082.466.579,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	5.082.466.579,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	5.082.466.579,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.706.718.646,00	5.493.053.983,00	96,25	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	5.651.784.146,00	5.438.118.683,00	96,21	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	5.514.646.026,00	5.330.630.783,00	96,66	0,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	137.138.120,00	107.487.900,00	78,37	0,00
5.2.05.89.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD	28.286.500,00	28.286.500,00	100,00	0,00
5.2.05.89.02.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP PAUD Reguler	28.286.500,00	28.286.500,00	100,00	0,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	26.648.000,00	26.648.800,00	100,00	0,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	26.648.000,00	26.648.800,00	100,00	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	36.650.000,00	36.250.000,00	98,90	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	36.650.000,00	36.250.000,00	98,90	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	36.650.000,00	36.250.000,00	98,90	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00	222.000.000,00	98,66	870.878.700,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	225.000.000,00	222.000.000,00	98,66	870.878.700,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	225.000.000,00	222.000.000,00	98,66	870.878.700,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	225.000.000,00	222.000.000,00	98,66	450.000.000,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	420.878.700,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**70.145.591.385,46**	**56.310.843.328,00**	**80,27**	**139.007.975.111,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**11.114.959.028,91**	**6.522.478.271,85**	**58,68**	**3.157.818.416,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	58,68	3.157.818.416,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	58,68	3.157.818.416,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	58,68	3.157.818.416,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	58,68	3.157.818.416,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**11.114.959.028,91**	**6.522.478.271,85**	**58,68**	**3.157.818.416,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**200.038.916.364,00**	**194.893.642.017,00**	**97,42**	**181.824.106.600,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.197.982.264,00	9.647.487.656,00	86,15	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.672.738.125,00	9.169.969.784,00	85,91	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.672.738.125,00	9.169.969.784,00	85,91	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.672.738.125,00	9.169.969.784,00	85,91	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	525.244.139,00	477.517.872,00	90,91	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	525.244.139,00	477.517.872,00	90,91	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	525.244.139,00	477.517.872,00	90,91	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00	98,09	181.824.106.600,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00	98,09	181.824.106.600,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00	98,09	181.824.106.600,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	97,11	94.152.458.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	87.901.526.100,00	87.217.259.811,00	99,22	87.671.648.600,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**200.038.916.364,00**	**194.893.642.017,00**	**97,42**	**181.824.106.600,00**
	JUMLAH BELANJA	**1.577.733.777.940,19**	**1.495.186.732.880,97**	**94,76**	**1.534.849.060.997,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(38.578.636.185,73)**	**76.909.236.924,81**	**(199,35)**	**(8.178.187.192,29)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**38.578.636.185,73**	**38.578.660.185,73**	**100,00**	**47.756.823.378,02**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**39.578.636.185,73**	**39.578.660.185,73**	**100,00**	**48.756.823.378,02**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.578.636.185,73	39.578.660.185,73	100,00	48.756.823.378,02
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	(54.901.127.578,29)	0,00	(73.092.935.315,51)
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0,00	(29.391.458.140,00)	0,00	(28.778.049.401,43)
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	0,00	(29.424.727,00)	0,00	(703.965.861,00)
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	0,00	(236.023.045,00)	0,00	(6.326.772.135,80)
6.1.01.01.01.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	(1.111.025.000,00)
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	0,00	135.653.876,00	0,00	(1.764.373.057,00)
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	0,00	(1.958.250.650,00)	0,00	(52.535.062,00)
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	0,00	146.290.234,00	0,00	(146.357.154,12)
6.1.01.01.01.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	0,00	(5.000.000.000,00)	0,00	(2.588.340.000,00)
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	(13.943.069.506,00)	0,00	(5.363.828.440,00)
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	(11.769.234.420,00)	0,00	(12.585.295.398,51)
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	162.161.526,00	0,00	1.864.442.707,00
6.1.01.01.01.0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	3.100.438.572,00	0,00	0,00
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	0,00	8.246.821.517,00	0,00	(3.783.192.195,00)
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	0,00	10.614.234.405,00	0,00	(1.283.562.300,00)
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	0,00	(1.098.072.288,00)	0,00	(1.331.898.000,00)
6.1.01.01.02.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	(1.269.340.600,00)	0,00	(1.167.731.895,00)
6.1.01.01.03	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(6.552.008.533,00)	0,00	(12.113.836.479,00)
6.1.01.01.03.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	(6.552.008.533,00)	0,00	(12.113.836.479,00)
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	0,00	(27.204.482.422,29)	0,00	(28.417.857.240,08)
6.1.01.01.04.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	(2.293.434.407,00)	0,00	(2.193.642.559,00)
6.1.01.01.04.0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	(1.596.476.000,00)	0,00	(1.662.550.000,00)
6.1.01.01.04.0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	0,00	(6.292.344.697,00)	0,00	(11.756.741.325,00)
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	0,00	(11.284.677.428,00)	0,00	(10.000.000.000,00)
6.1.01.01.04.0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	(1.839.183.725,29)	0,00	(6.472.145.378,41)
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	(515.308.343,00)	0,00	(2.094.959.887,40)
6.1.01.01.04.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	(244.709.268,00)	0,00	(224.775.288,49)
6.1.01.01.04.0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	(50.000.000,00)	0,00	(66.000.000,00)
6.1.01.01.04.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	(2.596.086.000,00)	0,00	(1.491.116.070,07)
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	0,00	(392.262.554,00)	0,00	(299.832.414,71)
6.1.01.01.04.0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	(100.000.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.01.04.0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)
6.1.01.01.04.0022	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00	0,00	7.943.905.683,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	(52.367.026.581,00)	0,00	(26.809.512.216,00)
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	0,00	(14.124.204.905,00)	0,00	(2.800.218.238,00)
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	667.773.000,00	0,00	1.036.248.564,00
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	1.188.612.000,00	0,00	591.346.464,00
6.1.01.02.01.0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	267.160.658,00
6.1.01.02.01.0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	23.574.000,00	0,00	(23.394.233,00)
6.1.01.02.01.0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	0,00	109.657.000,00	0,00	67.668.626,00
6.1.01.02.01.0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	0,00	442.790.000,00	0,00	102.463.519,00
6.1.01.02.01.0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	(56.839.000,00)	0,00	(60.087.963,00)
6.1.01.02.01.0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	0,00	0,00	0,00	211.753.211,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	0,00	23.377.628.000,00	0,00	7.708.510.500,00
6.1.01.02.01.0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	(26.685.772.706,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	(9.696.491,00)	0,00	(3.225.450,00)
6.1.01.02.01.0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	(65.400.000,00)	0,00	(3.190.000,00)
6.1.01.02.01.0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	(41.875.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0023	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00	(10.238.367,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0028	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	(36.051.765,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0035	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	(30.375.000,00)
6.1.01.02.01.0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	(524.061.000,00)
6.1.01.02.01.0043	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	(701.337.048,00)
6.1.01.02.01.0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	(96.924.940,00)
6.1.01.02.01.0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	(1.463.236.800,00)
6.1.01.02.01.0062	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	(54.891.000,00)
6.1.01.02.01.0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler	0,00	0,00	0,00	(513.848.003,00)
6.1.01.02.01.0070	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	(1.761.364.994,00)
6.1.01.02.01.0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	(6.184.398.146,00)
6.1.01.02.01.0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,00	0,00	0,00	(4.186.697,00)
6.1.01.02.01.0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	0,00	0,00	0,00	(812.891.400,00)
6.1.01.02.01.0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00	0,00	(547.464.000,00)
6.1.01.02.01.0103	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	(493.106,00)
6.1.01.02.01.0106	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	(5.860.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0221	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	(37.360.350,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0227	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	(963.964.853,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0229	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	(642.835.844,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0230	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	(407.785.300,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0239	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	(286.010.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0241	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	(58.285.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0256	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	(613.655.041,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0297	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	(495.711.263,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0299	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	(3.342.500.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0300	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	(6.953.118.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0301	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	872.828.000,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0303	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	(53.290.300,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0304	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat- Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	(40.600.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0319	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	(217.625,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0329	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00	503.831.000,00	0,00	0,00
6.1.01.02.01.0330	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	(503.831.000,00)	0,00	0,00
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	0,00	(38.242.821.676,00)	0,00	(24.009.293.978,00)
6.1.01.02.02.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil	0,00	(38.242.821.676,00)	0,00	(24.009.293.978,00)
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	(12.000.000,00)	0,00	(846.000.000,00)
6.1.01.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	0,00	(12.000.000,00)	0,00	(846.000.000,00)
6.1.01.03.01.0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	(12.000.000,00)	0,00	(846.000.000,00)
6.1.01.05	Penghematan Belanja	3.450.382.165,59	146.858.814.345,02	4.256,30	149.505.270.909,53

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	3.450.382.165,59	124.766.316.171,02	3.616,01	111.917.265.193,02
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	31.101.833.153,50	0,00	4.217.255.513,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	0,00	18.643.125.617,50	0,00	11.189.008.565,02
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	6.376.325.253,00	0,00	12.058.161.621,00
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	545.235.968,00	0,00	165.166.002,00
6.1.01.05.01.0005	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	147.270.869,00	0,00	367.407.520,00
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	224.155.453,00	0,00	422.361.613,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	0,00	17.203.213.620,00	0,00	14.827.226.706,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	3.450.382.165,59	13.295.626.482,00	385,33	29.207.306.971,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	0,00	2.364.440.666,00	0,00	1.776.364.336,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	0,00	7.679.507.148,00	0,00	12.177.313.614,00
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	4.142.177.183,00	0,00	3.373.638.915,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	608.186.458,00	0,00	16.424.160.921,00
6.1.01.05.01.0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	0,00	75.652.277,00	0,00	50.049.427,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	503.900.000,00	0,00	222.500.000,00
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	5.281.322.171,00	0,00	0,00
6.1.01.05.01.0034	Penghematan Belanja Pegawai-Pegawai BLUD	0,00	1.050.535.193,00	0,00	867.287.338,00
6.1.01.05.01.0036	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	3.335.152.838,00	0,00	3.172.677.534,00
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	12.188.655.821,02	0,00	1.399.378.597,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	22.092.498.174,00	0,00	26.232.590.678,00
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00	5.255.000,00	0,00	7.250.000,00
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	800.508.795,00	0,00	3.152.693.286,00
6.1.01.05.02.0004	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	57.163.320,00	0,00	963.304,00
6.1.01.05.02.0005	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian	0,00	3.759.474,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	894.894.181,00	0,00	901.639.753,00
6.1.01.05.02.0007	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	82.993.000,00	0,00	205.925.367,00
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	408.393.609,00	0,00	4.506.393.979,00
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	0,00	58.012.755,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	0,00	593.668.106,00	0,00	667.198.904,00
6.1.01.05.02.0012	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi	0,00	510.800,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0017	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	0,00	1.171.400,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	8.715.000,00
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	2.332.158.506,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	1.829.425.237,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	623.809,00
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	35.583,00	0,00	9.072.217.082,00
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	11.842.473.816,00	0,00	251.099.200,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	289.432.850,00	0,00	2.807.598,00
6.1.01.05.02.0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi	0,00	0,00	0,00	351.800.000,00
6.1.01.05.02.0028	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	0,00	175.000.000,00	0,00	42.032.500,00
6.1.01.05.02.0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan	0,00	1.650.000,00	0,00	1.663.000,00
6.1.01.05.02.0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	21.111.790,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0035	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	522.307.806,00
6.1.01.05.02.0036	Penghematan Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	2.369.375.930,00
6.1.01.05.02.0037	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	(450.471.037,00)	0,00	1.977.132.272,00
6.1.01.05.02.0038	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	3.291.313.104,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0039	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	1.234.373.166,00	0,00	0,00
6.1.01.05.02.0040	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	5.010.000,00	0,00	537.559.100,00
6.1.01.05.02.0041	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	867.691.925,00	0,00	(823.991.253,00)
6.1.01.05.02.0042	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	94.565.535,00
6.1.01.05.02.0043	Penghematan Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	79.121.300,00	0,00	50.460.000,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	3.358.206.307,51
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	3.358.206.307,51
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	7.997.208.731,00
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00	0,00	7.997.388.731,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	(180.000,00)
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	36.128.254.020,14	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	33.286.045.452,53	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	33.286.045.452,53	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	466.489.210,61	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.04.0002	Sisa Dana BOSP-BOS Kinerja	466.489.210,61	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.375.719.357,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.375.719.357,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**39.578.636.185,73**	**39.578.660.185,73**	**100,00**	**48.756.823.378,02**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**

Lamp II

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**	**1.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**38.578.636.185,73**	**38.578.660.185,73**	**100,00**	**47.756.823.378,02**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**115.487.897.110,54**	**0,00**	**39.578.636.185,73**

BUPATI AGAM

BENNI WARLIS

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Agam
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	644.491.549.425,72	641.255.420.618,00	(3.236.128.807,72)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	559.581.477.223,11	560.338.244.285,00	756.767.061,89	100,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	556.914.345.133,11	558.008.603.720,00	1.094.258.586,89	100,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	556.803.775.133,11	557.905.091.720,00	1.101.316.586,89	100,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	556.803.775.133,11	557.905.091.720,00	1.101.316.586,89	100,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	556.803.775.133,11	557.905.091.720,00	1.101.316.586,89	100,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	110.570.000,00	103.512.000,00	(7.058.000,00)	93,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.570.000,00	103.512.000,00	(7.058.000,00)	93,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.570.000,00	103.512.000,00	(7.058.000,00)	93,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	348.274.246,00	338.794.280,00	(9.479.966,00)	97,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.913.520,00	11.911.800,00	(1.720,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.913.520,00	11.911.800,00	(1.720,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.913.520,00	11.911.800,00	(1.720,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	67.454.426,00	67.138.694,00	(315.732,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.454.426,00	67.138.694,00	(315.732,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.454.426,00	67.138.694,00	(315.732,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	69.760.300,00	69.670.816,00	(89.484,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	69.760.300,00	69.670.816,00	(89.484,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.760.300,00	69.670.816,00	(89.484,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	199.146.000,00	190.072.970,00	(9.073.030,00)	95,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.146.000,00	190.072.970,00	(9.073.030,00)	95,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.146.000,00	190.072.970,00	(9.073.030,00)	95,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.205.501.644,00	1.893.229.785,00	(312.271.859,00)	85,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	229.999.644,00	178.017.945,00	(51.981.699,00)	77,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	229.999.644,00	178.017.945,00	(51.981.699,00)	77,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.999.644,00	178.017.945,00	(51.981.699,00)	77,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.570.000,00	11.520.000,00	(50.000,00)	99,56	

Lampiran I.3 : Peraturan Daerah Kabupaten Agam
Nomor :
Tanggal :

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	644.491.549.425,72	641.255.420.618,00	(3.236.128.807,72)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	559.581.477.223,11	560.338.244.285,00	756.767.061,89	100,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	556.914.345.133,11	558.008.603.720,00	1.094.258.586,89	100,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	556.803.775.133,11	557.905.091.720,00	1.101.316.586,89	100,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	556.803.775.133,11	557.905.091.720,00	1.101.316.586,89	100,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	556.803.775.133,11	557.905.091.720,00	1.101.316.586,89	100,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	110.570.000,00	103.512.000,00	(7.058.000,00)	93,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	110.570.000,00	103.512.000,00	(7.058.000,00)	93,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.570.000,00	103.512.000,00	(7.058.000,00)	93,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	348.274.246,00	338.794.280,00	(9.479.966,00)	97,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.913.520,00	11.911.800,00	(1.720,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.913.520,00	11.911.800,00	(1.720,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.913.520,00	11.911.800,00	(1.720,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	67.454.426,00	67.138.694,00	(315.732,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	67.454.426,00	67.138.694,00	(315.732,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.454.426,00	67.138.694,00	(315.732,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	69.760.300,00	69.670.816,00	(89.484,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	69.760.300,00	69.670.816,00	(89.484,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.760.300,00	69.670.816,00	(89.484,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	199.146.000,00	190.072.970,00	(9.073.030,00)	95,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.146.000,00	190.072.970,00	(9.073.030,00)	95,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.146.000,00	190.072.970,00	(9.073.030,00)	95,44	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.205.501.644,00	1.893.229.785,00	(312.271.859,00)	85,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	229.999.644,00	178.017.945,00	(51.981.699,00)	77,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	229.999.644,00	178.017.945,00	(51.981.699,00)	77,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.999.644,00	178.017.945,00	(51.981.699,00)	77,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.570.000,00	11.520.000,00	(50.000,00)	99,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.570.000,00	11.520.000,00	(50.000,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	11.520.000,00	(50.000,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.963.932.000,00	1.703.691.840,00	(260.240.160,00)	86,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.963.932.000,00	1.703.691.840,00	(260.240.160,00)	86,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.963.932.000,00	1.703.691.840,00	(260.240.160,00)	86,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	113.356.200,00	97.616.500,00	(15.739.700,00)	86,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	52.410.000,00	46.692.450,00	(5.717.550,00)	89,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.410.000,00	46.692.450,00	(5.717.550,00)	89,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.410.000,00	46.692.450,00	(5.717.550,00)	89,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.930.200,00	34.925.850,00	(10.004.350,00)	77,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.930.200,00	34.925.850,00	(10.004.350,00)	77,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.930.200,00	34.925.850,00	(10.004.350,00)	77,73	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	16.016.000,00	15.998.200,00	(17.800,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.016.000,00	15.998.200,00	(17.800,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.016.000,00	15.998.200,00	(17.800,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.696.542.202,61	80.789.613.733,00	(3.906.928.469,61)	95,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	53.106.618.341,61	51.134.329.453,00	(1.972.288.888,61)	96,28	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	104.792.500,00	104.270.370,00	(522.130,00)	99,50	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	103.542.500,00	103.020.370,00	(522.130,00)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	103.542.500,00	103.020.370,00	(522.130,00)	99,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	104.337.000,00	103.945.728,00	(391.272,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	104.337.000,00	103.945.728,00	(391.272,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.337.000,00	103.945.728,00	(391.272,00)	99,62	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0016		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	459.706.950,00	446.279.976,00	(13.426.974,00)	97,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	9.955.800,00	9.891.800,00	(64.000,00)	99,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.955.800,00	9.891.800,00	(64.000,00)	99,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2	BELANJA MODAL	449.751.150,00	436.388.176,00	(13.362.974,00)	97,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.751.150,00	436.388.176,00	(13.362.974,00)	97,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	105.660.000,00	105.145.230,00	(514.770,00)	99,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	105.660.000,00	105.145.230,00	(514.770,00)	99,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.660.000,00	105.145.230,00	(514.770,00)	99,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.443.576.968,00	1.386.658.820,00	(56.918.148,00)	96,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.405.895.000,00	1.386.658.820,00	(19.236.180,00)	98,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.895.000,00	1.386.658.820,00	(19.236.180,00)	98,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	37.681.968,00	0,00	(37.681.968,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.681.968,00	0,00	(37.681.968,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	599.442.200,00	482.915.539,00	(116.526.661,00)	80,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	599.442.200,00	482.915.539,00	(116.526.661,00)	80,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.442.200,00	482.915.539,00	(116.526.661,00)	80,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	43.970.000,00	43.824.180,00	(145.820,00)	99,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	43.970.000,00	43.824.180,00	(145.820,00)	99,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.970.000,00	43.824.180,00	(145.820,00)	99,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	48.952.096.930,61	47.179.097.899,00	(1.772.999.031,61)	96,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	41.124.284.884,61	39.518.656.118,00	(1.605.628.766,61)	96,09	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.905.919.328,61	35.485.693.162,00	(2.420.226.166,61)	93,61	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	3.218.365.556,00	4.032.962.956,00	814.597.400,00	125,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	7.827.812.046,00	7.660.441.781,00	(167.370.265,00)	97,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.971.368.346,00	3.824.848.948,00	(146.519.398,00)	96,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.856.443.700,00	3.835.592.833,00	(20.850.867,00)	99,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	200.000.000,00	197.715.000,00	(2.285.000,00)	98,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	197.715.000,00	(2.285.000,00)	98,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	197.715.000,00	(2.285.000,00)	98,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	938.093.993,00	931.710.104,00	(6.383.889,00)	99,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	8.002.000,00	7.201.600,00	(800.400,00)	89,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.002.000,00	7.201.600,00	(800.400,00)	89,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	930.091.993,00	924.508.504,00	(5.583.489,00)	99,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	930.091.993,00	924.508.504,00	(5.583.489,00)	99,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0050		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	42.110.000,00	41.504.530,00	(605.470,00)	98,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	42.110.000,00	41.504.530,00	(605.470,00)	98,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.110.000,00	41.504.530,00	(605.470,00)	98,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	112.831.800,00	111.262.077,00	(1.569.723,00)	98,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	8.666.800,00	7.581.200,00	(1.085.600,00)	87,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.666.800,00	7.581.200,00	(1.085.600,00)	87,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	104.165.000,00	103.680.877,00	(484.123,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.165.000,00	103.680.877,00	(484.123,00)	99,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	20.036.961.727,00	18.533.847.510,00	(1.503.114.217,00)	92,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	401.964.400,00	392.667.067,00	(9.297.333,00)	97,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	18.106.900,00	17.304.500,00	(802.400,00)	95,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.106.900,00	17.304.500,00	(802.400,00)	95,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	383.857.500,00	375.362.567,00	(8.494.933,00)	97,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.700.000,00	222.365.559,00	(5.334.441,00)	97,65	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.157.500,00	152.997.008,00	(3.160.492,00)	97,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	99.650.000,00	99.358.320,00	(291.680,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2	BELANJA MODAL	99.650.000,00	99.358.320,00	(291.680,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.650.000,00	99.358.320,00	(291.680,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0027		PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	816.850.134,00	794.844.565,00	(22.005.569,00)	97,30	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	98.490.134,00	91.575.000,00	(6.915.134,00)	92,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.490.134,00	91.575.000,00	(6.915.134,00)	92,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	718.360.000,00	703.269.565,00	(15.090.435,00)	97,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	619.000.000,00	604.200.000,00	(14.800.000,00)	97,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0027	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.360.000,00	99.069.565,00	(290.435,00)	99,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	198.385.000,00	185.215.090,00	(13.169.910,00)	93,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	198.385.000,00	185.215.090,00	(13.169.910,00)	93,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.385.000,00	185.215.090,00	(13.169.910,00)	93,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0039		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	394.980.000,00	386.488.000,00	(8.492.000,00)	97,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1	BELANJA OPERASI	394.980.000,00	386.488.000,00	(8.492.000,00)	97,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.980.000,00	386.488.000,00	(8.492.000,00)	97,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	49.384.280,00	45.283.967,00	(4.100.313,00)	91,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	49.384.280,00	45.283.967,00	(4.100.313,00)	91,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.384.280,00	45.283.967,00	(4.100.313,00)	91,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	40.913.000,00	27.199.900,00	(13.713.100,00)	66,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	40.913.000,00	27.199.900,00	(13.713.100,00)	66,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.913.000,00	27.199.900,00	(13.713.100,00)	66,48	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	17.420.200.000,00	15.992.119.552,00	(1.428.080.448,00)	91,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	13.502.456.893,00	12.437.551.584,00	(1.064.905.309,00)	92,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.902.456.893,00	11.673.601.584,00	(228.855.309,00)	98,07	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	1.600.000.000,00	763.950.000,00	(836.050.000,00)	47,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	3.917.743.107,00	3.554.567.968,00	(363.175.139,00)	90,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.122.402.661,00	1.952.042.118,00	(170.360.543,00)	91,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.795.340.446,00	1.602.525.850,00	(192.814.596,00)	89,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	519.299.913,00	517.053.689,00	(2.246.224,00)	99,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	9.737.700,00	9.481.300,00	(256.400,00)	97,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.737.700,00	9.481.300,00	(256.400,00)	97,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	509.562.213,00	507.572.389,00	(1.989.824,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	509.562.213,00	507.572.389,00	(1.989.824,00)	99,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	95.335.000,00	93.617.360,00	(1.717.640,00)	98,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	95.335.000,00	93.617.360,00	(1.717.640,00)	98,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.335.000,00	93.617.360,00	(1.717.640,00)	98,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	8.204.927.226,00	7.881.059.379,00	(323.867.847,00)	96,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	90.317.700,00	88.659.863,00	(1.657.837,00)	98,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.317.700,00	88.659.863,00	(1.657.837,00)	98,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.317.700,00	88.659.863,00	(1.657.837,00)	98,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009		PENGADAAN PERLENGKAPAN PAUD	1.573.883.500,00	1.571.621.813,00	(2.261.687,00)	99,85	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.560.271.000,00	1.558.121.813,00	(2.149.187,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.560.271.000,00	1.558.121.813,00	(2.149.187,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2	BELANJA MODAL	13.612.500,00	13.500.000,00	(112.500,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.612.500,00	13.500.000,00	(112.500,00)	99,17	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	46.599.990,00	44.490.390,00	(2.109.600,00)	95,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	46.599.990,00	44.490.390,00	(2.109.600,00)	95,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.599.990,00	44.490.390,00	(2.109.600,00)	95,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	5.872.200.000,00	5.566.519.154,00	(305.680.846,00)	94,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	5.789.384.500,00	5.483.703.654,00	(305.680.846,00)	94,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.784.500,00	199.784.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	5.589.600.000,00	5.283.919.154,00	(305.680.846,00)	94,53	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	82.815.500,00	82.815.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.529.000,00	54.529.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.286.500,00	28.286.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	529.024.536,00	526.256.439,00	(2.768.097,00)	99,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	529.024.536,00	526.256.439,00	(2.768.097,00)	99,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.024.536,00	526.256.439,00	(2.768.097,00)	99,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0041		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	44.740.000,00	37.160.100,00	(7.579.900,00)	83,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1	BELANJA OPERASI	44.740.000,00	37.160.100,00	(7.579.900,00)	83,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.740.000,00	37.160.100,00	(7.579.900,00)	83,05	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0045		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	48.161.500,00	46.351.620,00	(1.809.880,00)	96,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0045	5.1	BELANJA OPERASI	48.161.500,00	46.351.620,00	(1.809.880,00)	96,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.161.500,00	46.351.620,00	(1.809.880,00)	96,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	3.348.034.908,00	3.240.377.391,00	(107.657.517,00)	96,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	3.189.400.000,00	3.092.515.021,00	(96.884.979,00)	96,96	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	3.157.257.500,00	3.060.371.721,00	(96.885.779,00)	96,93	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.156.700,00	234.156.700,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	2.923.100.800,00	2.826.215.021,00	(96.885.779,00)	96,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	32.142.500,00	32.143.300,00	800,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.494.500,00	5.494.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.648.000,00	26.648.800,00	800,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0036		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	24.120.000,00	23.511.000,00	(609.000,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0036	5.1	BELANJA OPERASI	24.120.000,00	23.511.000,00	(609.000,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.120.000,00	23.511.000,00	(609.000,00)	97,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0046		PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	119.510.908,00	109.364.600,00	(10.146.308,00)	91,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1	BELANJA OPERASI	90.385.000,00	80.671.100,00	(9.713.900,00)	89,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.385.000,00	80.671.100,00	(9.713.900,00)	89,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2	BELANJA MODAL	29.125.908,00	28.693.500,00	(432.408,00)	98,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0046	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.125.908,00	28.693.500,00	(432.408,00)	98,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0049		PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	15.004.000,00	14.986.770,00	(17.230,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0049	5.1	BELANJA OPERASI	15.004.000,00	14.986.770,00	(17.230,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0049	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.004.000,00	14.986.770,00	(17.230,00)	99,88	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	206.980.000,00	121.212.600,00	(85.767.400,00)	58,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	206.980.000,00	121.212.600,00	(85.767.400,00)	58,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0004		PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	206.980.000,00	121.212.600,00	(85.767.400,00)	58,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	206.980.000,00	121.212.600,00	(85.767.400,00)	58,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.980.000,00	121.212.600,00	(85.767.400,00)	58,56	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.550.000,00	6.350.000,00	(200.000,00)	96,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	6.550.000,00	6.350.000,00	(200.000,00)	96,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	6.550.000,00	6.350.000,00	(200.000,00)	96,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.550.000,00	6.350.000,00	(200.000,00)	96,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.350.000,00	(200.000,00)	96,94	
				JUMLAH BELANJA	644.491.549.425,72	641.255.420.618,00	(3.236.128.807,72)	99,49	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(644.490.049.425,72)	(641.253.920.618,00)	3.236.128.807,72	99,49	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(644.490.049.425,72)	(641.253.920.618,00)	3.236.128.807,72	99,49	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
	1.01.2.22.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.062.569.500,00	1.685.416.493,00	(377.153.007,00)	81,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	354.775.000,00	198.933.050,00	(155.841.950,00)	56,07	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	354.775.000,00	198.933.050,00	(155.841.950,00)	56,07	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA ADAT	354.775.000,00	198.933.050,00	(155.841.950,00)	56,07	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	354.775.000,00	198.933.050,00	(155.841.950,00)	56,07	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.775.000,00	198.933.050,00	(155.841.950,00)	56,07	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	440.000.000,00	439.997.767,00	(2.233,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	440.000.000,00	439.997.767,00	(2.233,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	440.000.000,00	439.997.767,00	(2.233,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	440.000.000,00	439.997.767,00	(2.233,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.000.000,00	439.997.767,00	(2.233,00)	99,99	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	253.020.000,00	247.241.704,00	(5.778.296,00)	97,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.05.2.02		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	253.020.000,00	247.241.704,00	(5.778.296,00)	97,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.05.2.02.0001		PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA	253.020.000,00	247.241.704,00	(5.778.296,00)	97,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	253.020.000,00	247.241.704,00	(5.778.296,00)	97,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.020.000,00	247.241.704,00	(5.778.296,00)	97,71	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.014.774.500,00	799.243.972,00	(215.530.528,00)	78,76	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01		PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	1.014.774.500,00	799.243.972,00	(215.530.528,00)	78,76	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERMUSEUMAN	610.342.000,00	400.986.400,00	(209.355.600,00)	65,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	610.342.000,00	400.986.400,00	(209.355.600,00)	65,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.342.000,00	400.986.400,00	(209.355.600,00)	65,69	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0003		PENINGKATAN PELAYANAN DAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP MUSEUM	304.432.500,00	298.507.126,00	(5.925.374,00)	98,05	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	304.432.500,00	298.507.126,00	(5.925.374,00)	98,05	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.432.500,00	298.507.126,00	(5.925.374,00)	98,05	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0004		PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA MUSEUM	100.000.000,00	99.750.446,00	(249.554,00)	99,75	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.750.446,00	(249.554,00)	99,75	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.750.446,00	(249.554,00)	99,75	
				JUMLAH BELANJA	2.062.569.500,00	1.685.416.493,00	(377.153.007,00)	81,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.061.069.500,00)	(1.683.916.493,00)	377.153.007,00	81,70	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.061.069.500,00)	(1.683.916.493,00)	377.153.007,00	81,70	

DINAS KESEHATAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	183.162.986.398,00	178.107.169.149,00	(5.055.817.249,00)	97,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.369.928.625,00	123.744.521.893,00	(2.625.406.732,00)	97,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	118.259.232.248,00	118.063.219.404,00	(196.012.844,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	118.144.787.248,00	117.950.865.404,00	(193.921.844,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	118.144.787.248,00	117.950.865.404,00	(193.921.844,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	118.144.787.248,00	117.950.865.404,00	(193.921.844,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	114.445.000,00	112.354.000,00	(2.091.000,00)	98,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	114.445.000,00	112.354.000,00	(2.091.000,00)	98,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.445.000,00	112.354.000,00	(2.091.000,00)	98,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	471.173.688,00	406.387.680,00	(64.786.008,00)	86,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.085.200,00	13.084.686,00	(514,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.085.200,00	13.084.686,00	(514,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.085.200,00	13.084.686,00	(514,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	97.193.268,00	91.803.770,00	(5.389.498,00)	94,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.193.268,00	91.803.770,00	(5.389.498,00)	94,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.193.268,00	91.803.770,00	(5.389.498,00)	94,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	52.819.800,00	52.803.430,00	(16.370,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	52.819.800,00	52.803.430,00	(16.370,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.819.800,00	52.803.430,00	(16.370,00)	99,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	308.075.420,00	248.695.794,00	(59.379.626,00)	80,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	308.075.420,00	248.695.794,00	(59.379.626,00)	80,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.075.420,00	248.695.794,00	(59.379.626,00)	80,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.366.097.689,00	5.019.632.176,00	(2.346.465.513,00)	68,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	442.601.689,00	391.219.370,00	(51.382.319,00)	88,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	442.601.689,00	391.219.370,00	(51.382.319,00)	88,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.601.689,00	391.219.370,00	(51.382.319,00)	88,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.923.496.000,00	4.628.412.806,00	(2.295.083.194,00)	66,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.923.496.000,00	4.628.412.806,00	(2.295.083.194,00)	66,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.923.496.000,00	4.628.412.806,00	(2.295.083.194,00)	66,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	273.425.000,00	255.282.633,00	(18.142.367,00)	93,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	27.115.000,00	25.579.400,00	(1.535.600,00)	94,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.115.000,00	25.579.400,00	(1.535.600,00)	94,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.115.000,00	25.579.400,00	(1.535.600,00)	94,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	132.940.000,00	116.356.803,00	(16.583.197,00)	87,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.940.000,00	116.356.803,00	(16.583.197,00)	87,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.940.000,00	116.356.803,00	(16.583.197,00)	87,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	58.320.000,00	58.319.700,00	(300,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	58.320.000,00	58.319.700,00	(300,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.320.000,00	58.319.700,00	(300,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	55.050.000,00	55.026.730,00	(23.270,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	55.050.000,00	55.026.730,00	(23.270,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.050.000,00	55.026.730,00	(23.270,00)	99,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	54.993.784.823,00	53.212.498.181,00	(1.781.286.642,00)	96,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.681.851.281,00	9.873.020.329,00	(808.830.952,00)	92,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002		PEMBANGUNAN PUSKESMAS	651.933.731,00	313.745.970,00	(338.187.761,00)	48,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.893.080,00	114.804.630,00	(88.450,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.893.080,00	114.804.630,00	(88.450,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	537.040.651,00	198.941.340,00	(338.099.311,00)	37,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	537.040.651,00	198.941.340,00	(338.099.311,00)	37,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007		PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.240.287.800,00	1.137.874.840,00	(102.412.960,00)	91,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	9.924.800,00	9.292.840,00	(631.960,00)	93,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.924.800,00	9.292.840,00	(631.960,00)	93,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	1.230.363.000,00	1.128.582.000,00	(101.781.000,00)	91,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	338.363.000,00	299.500.000,00	(38.863.000,00)	88,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	892.000.000,00	829.082.000,00	(62.918.000,00)	92,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	8.789.629.750,00	8.421.399.519,00	(368.230.231,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	8.656.117.550,00	8.421.399.519,00	(234.718.031,00)	97,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.656.117.550,00	8.421.399.519,00	(234.718.031,00)	97,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2	BELANJA MODAL	133.512.200,00	0,00	(133.512.200,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.512.200,00	0,00	(133.512.200,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.282.016.042,00	43.310.605.602,00	(971.410.440,00)	97,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	18.673.000,00	13.847.900,00	(4.825.100,00)	74,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.673.000,00	13.847.900,00	(4.825.100,00)	74,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.673.000,00	13.847.900,00	(4.825.100,00)	74,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	18.136.700,00	8.952.650,00	(9.184.050,00)	49,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.136.700,00	8.952.650,00	(9.184.050,00)	49,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.136.700,00	8.952.650,00	(9.184.050,00)	49,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	19.056.600,00	9.624.300,00	(9.432.300,00)	50,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.056.600,00	9.624.300,00	(9.432.300,00)	50,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.056.600,00	9.624.300,00	(9.432.300,00)	50,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA	19.469.400,00	8.082.200,00	(11.387.200,00)	41,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.469.400,00	8.082.200,00	(11.387.200,00)	41,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.469.400,00	8.082.200,00	(11.387.200,00)	41,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	16.424.000,00	13.793.800,00	(2.630.200,00)	83,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.424.000,00	13.793.800,00	(2.630.200,00)	83,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.424.000,00	13.793.800,00	(2.630.200,00)	83,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	14.456.000,00	12.262.150,00	(2.193.850,00)	84,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.456.000,00	12.262.150,00	(2.193.850,00)	84,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.456.000,00	12.262.150,00	(2.193.850,00)	84,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	47.499.750,00	24.412.200,00	(23.087.550,00)	51,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	47.499.750,00	24.412.200,00	(23.087.550,00)	51,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.499.750,00	24.412.200,00	(23.087.550,00)	51,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	18.740.000,00	12.934.650,00	(5.805.350,00)	69,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	18.740.000,00	12.934.650,00	(5.805.350,00)	69,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.740.000,00	12.934.650,00	(5.805.350,00)	69,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	16.705.009,00	1.962.700,00	(14.742.309,00)	11,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.705.009,00	1.962.700,00	(14.742.309,00)	11,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.705.009,00	1.962.700,00	(14.742.309,00)	11,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	19.250.000,00	7.430.600,00	(11.819.400,00)	38,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.250.000,00	7.430.600,00	(11.819.400,00)	38,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.250.000,00	7.430.600,00	(11.819.400,00)	38,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	54.634.828,00	36.943.000,00	(17.691.828,00)	67,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	54.634.828,00	36.943.000,00	(17.691.828,00)	67,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.634.828,00	36.943.000,00	(17.691.828,00)	67,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	6.814.000,00	6.800.000,00	(14.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	6.814.000,00	6.800.000,00	(14.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.814.000,00	6.800.000,00	(14.000,00)	99,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	5.973.920,00	5.075.000,00	(898.920,00)	84,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	5.973.920,00	5.075.000,00	(898.920,00)	84,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.973.920,00	5.075.000,00	(898.920,00)	84,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	15.118.000,00	2.107.200,00	(13.010.800,00)	13,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	15.118.000,00	2.107.200,00	(13.010.800,00)	13,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.118.000,00	2.107.200,00	(13.010.800,00)	13,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	277.800.100,00	260.031.763,00	(17.768.337,00)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	277.800.100,00	260.031.763,00	(17.768.337,00)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.800.100,00	260.031.763,00	(17.768.337,00)	93,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	276.676.000,00	143.095.300,00	(133.580.700,00)	51,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	276.676.000,00	143.095.300,00	(133.580.700,00)	51,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.676.000,00	143.095.300,00	(133.580.700,00)	51,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	105.871.000,00	81.480.539,00	(24.390.461,00)	76,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	105.871.000,00	81.480.539,00	(24.390.461,00)	76,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.01	Belanja Pegawai	10.000.000,00	6.917.139,00	(3.082.861,00)	69,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.871.000,00	74.563.400,00	(21.307.600,00)	77,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	216.864.000,00	196.350.900,00	(20.513.100,00)	90,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	216.864.000,00	196.350.900,00	(20.513.100,00)	90,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.864.000,00	196.350.900,00	(20.513.100,00)	90,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	41.568.332.400,00	41.498.351.900,00	(69.980.500,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	41.568.332.400,00	41.498.351.900,00	(69.980.500,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.568.332.400,00	41.498.351.900,00	(69.980.500,00)	99,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027		DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH	234.503.835,00	35.685.100,00	(198.818.735,00)	15,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1	BELANJA OPERASI	49.804.325,00	35.685.100,00	(14.119.225,00)	71,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.804.325,00	35.685.100,00	(14.119.225,00)	71,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.2	BELANJA MODAL	184.699.510,00	0,00	(184.699.510,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.699.510,00	0,00	(184.699.510,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	2.010.000,00	1.170.000,00	(840.000,00)	58,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	2.010.000,00	1.170.000,00	(840.000,00)	58,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	1.170.000,00	(840.000,00)	58,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	301.589.000,00	297.232.650,00	(4.356.350,00)	98,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	301.589.000,00	297.232.650,00	(4.356.350,00)	98,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.589.000,00	297.232.650,00	(4.356.350,00)	98,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	6.814.000,00	6.790.000,00	(24.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	6.814.000,00	6.790.000,00	(24.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.814.000,00	6.790.000,00	(24.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	6.814.000,00	6.760.000,00	(54.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	6.814.000,00	6.760.000,00	(54.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.814.000,00	6.760.000,00	(54.000,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	28.007.500,00	12.452.600,00	(15.554.900,00)	44,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	28.007.500,00	12.452.600,00	(15.554.900,00)	44,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.007.500,00	12.452.600,00	(15.554.900,00)	44,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	18.949.000,00	7.002.300,00	(11.946.700,00)	36,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	18.949.000,00	7.002.300,00	(11.946.700,00)	36,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.949.000,00	7.002.300,00	(11.946.700,00)	36,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	933.485.000,00	587.534.200,00	(345.950.800,00)	62,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	933.485.000,00	587.534.200,00	(345.950.800,00)	62,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.485.000,00	587.534.200,00	(345.950.800,00)	62,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0050		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI	13.349.000,00	12.440.000,00	(909.000,00)	93,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0050	5.1	BELANJA OPERASI	13.349.000,00	12.440.000,00	(909.000,00)	93,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.349.000,00	12.440.000,00	(909.000,00)	93,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.917.500,00	28.872.250,00	(1.045.250,00)	96,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA	8.589.000,00	8.494.500,00	(94.500,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.589.000,00	8.494.500,00	(94.500,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.589.000,00	8.494.500,00	(94.500,00)	98,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	11.223.500,00	10.788.450,00	(435.050,00)	96,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.223.500,00	10.788.450,00	(435.050,00)	96,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.223.500,00	10.788.450,00	(435.050,00)	96,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004		PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	10.105.000,00	9.589.300,00	(515.700,00)	94,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.105.000,00	9.589.300,00	(515.700,00)	94,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.105.000,00	9.589.300,00	(515.700,00)	94,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	964.544.950,00	380.738.890,00	(583.806.060,00)	39,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	3.654.950,00	2.056.600,00	(1.598.350,00)	56,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001		PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.654.950,00	2.056.600,00	(1.598.350,00)	56,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.654.950,00	2.056.600,00	(1.598.350,00)	56,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.654.950,00	2.056.600,00	(1.598.350,00)	56,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	960.890.000,00	378.682.290,00	(582.207.710,00)	39,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	960.890.000,00	378.682.290,00	(582.207.710,00)	39,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	960.890.000,00	378.682.290,00	(582.207.710,00)	39,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.890.000,00	378.682.290,00	(582.207.710,00)	39,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	634.728.000,00	569.410.185,00	(65.317.815,00)	89,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	79.480.000,00	66.646.800,00	(12.833.200,00)	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	79.480.000,00	66.646.800,00	(12.833.200,00)	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.480.000,00	66.646.800,00	(12.833.200,00)	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.480.000,00	66.646.800,00	(12.833.200,00)	83,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	274.949.000,00	251.485.800,00	(23.463.200,00)	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	274.949.000,00	251.485.800,00	(23.463.200,00)	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	274.949.000,00	251.485.800,00	(23.463.200,00)	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.949.000,00	251.485.800,00	(23.463.200,00)	91,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06		PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	280.299.000,00	251.277.585,00	(29.021.415,00)	89,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001		PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN	280.299.000,00	251.277.585,00	(29.021.415,00)	89,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	280.299.000,00	251.277.585,00	(29.021.415,00)	89,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.299.000,00	251.277.585,00	(29.021.415,00)	89,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	183.162.986.398,00	178.107.169.149,00	(5.055.817.249,00)	97,23	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(183.162.986.398,00)	(178.107.169.149,00)	5.055.817.249,00	97,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(183.162.986.398,00)	(178.107.169.149,00)	5.055.817.249,00	97,23	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	57.119.110.000,00	63.228.888.396,00	6.109.778.396,00	110,69	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.119.110.000,00	63.228.888.396,00	6.109.778.396,00	110,69	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	56.494.110.000,00	62.470.601.182,00	5.976.491.182,00	110,57	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	625.000.000,00	758.287.214,00	133.287.214,00	121,32	
				JUMLAH PENDAPATAN	57.119.110.000,00	63.228.888.396,00	6.109.778.396,00	110,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	79.033.904.000,00	71.961.973.633,00	(7.071.930.367,00)	91,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.664.188.000,00	69.650.951.735,00	(7.013.236.265,00)	90,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	64.486.000,00	60.977.000,00	(3.509.000,00)	94,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	64.486.000,00	60.977.000,00	(3.509.000,00)	94,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	64.486.000,00	60.977.000,00	(3.509.000,00)	94,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.486.000,00	60.977.000,00	(3.509.000,00)	94,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.232.268.000,00	1.222.301.000,00	(9.967.000,00)	99,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.232.268.000,00	1.222.301.000,00	(9.967.000,00)	99,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.232.268.000,00	1.222.301.000,00	(9.967.000,00)	99,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.232.268.000,00	1.222.301.000,00	(9.967.000,00)	99,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	75.367.434.000,00	68.367.673.735,00	(6.999.760.265,00)	90,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	75.367.434.000,00	68.367.673.735,00	(6.999.760.265,00)	90,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.301.184.000,00	59.233.746.031,00	(4.067.437.969,00)	93,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	20.373.305.925,00	20.011.872.110,00	(361.433.815,00)	98,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.927.878.075,00	39.221.873.921,00	(3.706.004.154,00)	91,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	12.066.250.000,00	9.133.927.704,00	(2.932.322.296,00)	75,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.289.600.000,00	7.853.320.554,00	(436.279.446,00)	94,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	740.000.000,00	605.467.486,00	(134.532.514,00)	81,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000.000,00	638.889.664,00	(2.361.110.336,00)	21,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.650.000,00	36.250.000,00	(400.000,00)	98,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.369.716.000,00	2.311.021.898,00	(58.694.102,00)	97,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.369.716.000,00	2.311.021.898,00	(58.694.102,00)	97,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	2.369.716.000,00	2.311.021.898,00	(58.694.102,00)	97,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	10.434.500,00	2.434.500,00	130,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	10.434.500,00	2.434.500,00	130,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	2.361.716.000,00	2.300.587.398,00	(61.128.602,00)	97,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.361.716.000,00	2.300.587.398,00	(61.128.602,00)	97,41	
				JUMLAH BELANJA	79.033.904.000,00	71.961.973.633,00	(7.071.930.367,00)	91,05	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(21.914.794.000,00)	(8.733.085.237,00)	13.181.708.763,00	39,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.914.794.000,00)	(8.733.085.237,00)	13.181.708.763,00	39,85	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Tiku

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4	PENDAPATAN DAERAH	1.363.484.802,00	1.484.449.058,00	120.964.256,00	108,87	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.363.484.802,00	1.484.449.058,00	120.964.256,00	108,87	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1.02	Retribusi Daerah	1.357.558.657,00	1.477.471.449,00	119.912.792,00	108,83	
	1.02.0.00.0.00.01.0002		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.926.145,00	6.977.609,00	1.051.464,00	117,74	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.363.484.802,00	1.484.449.058,00	120.964.256,00	108,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	2.484.709.869,00	2.026.817.091,00	(457.892.778,00)	81,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.866.249.869,00	1.502.241.849,00	(364.008.020,00)	80,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.866.249.869,00	1.502.241.849,00	(364.008.020,00)	80,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.866.249.869,00	1.502.241.849,00	(364.008.020,00)	80,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.649.319.869,00	1.410.281.064,00	(239.038.805,00)	85,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	756.812.427,00	671.318.664,00	(85.493.763,00)	88,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	892.507.442,00	738.962.400,00	(153.545.042,00)	82,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	216.930.000,00	91.960.785,00	(124.969.215,00)	42,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.930.000,00	91.960.785,00	(124.969.215,00)	42,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	615.500.000,00	524.575.242,00	(90.924.758,00)	85,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	615.500.000,00	524.575.242,00	(90.924.758,00)	85,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	26.500.000,00	25.503.000,00	(997.000,00)	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.500.000,00	25.503.000,00	(997.000,00)	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	25.503.000,00	(997.000,00)	96,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	22.000.000,00	20.600.000,00	(1.400.000,00)	93,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	20.600.000,00	(1.400.000,00)	93,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	20.600.000,00	(1.400.000,00)	93,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.200.000,00	(600.000,00)	87,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	9.350.000,00	7.950.000,00	(1.400.000,00)	85,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.350.000,00	7.950.000,00	(1.400.000,00)	85,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	7.950.000,00	(1.400.000,00)	85,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	276.360.000,00	247.577.250,00	(28.782.750,00)	89,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	276.360.000,00	247.577.250,00	(28.782.750,00)	89,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.360.000,00	247.577.250,00	(28.782.750,00)	89,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	21.450.000,00	17.100.000,00	(4.350.000,00)	79,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	21.450.000,00	17.100.000,00	(4.350.000,00)	79,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	17.100.000,00	(4.350.000,00)	79,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	22.700.000,00	4.250.000,00	(18.450.000,00)	18,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	22.700.000,00	4.250.000,00	(18.450.000,00)	18,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	4.250.000,00	(18.450.000,00)	18,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	88.600.000,00	74.900.000,00	(13.700.000,00)	84,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	88.600.000,00	74.900.000,00	(13.700.000,00)	84,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.600.000,00	74.900.000,00	(13.700.000,00)	84,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	128.040.000,00	109.294.992,00	(18.745.008,00)	85,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	128.040.000,00	109.294.992,00	(18.745.008,00)	85,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	60.000.000,00	53.879.700,00	(6.120.300,00)	89,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.040.000,00	55.415.292,00	(12.624.708,00)	81,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.800.000,00	650.000,00	(1.150.000,00)	36,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	650.000,00	(1.150.000,00)	36,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	650.000,00	(1.150.000,00)	36,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.960.000,00	0,00	(2.960.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.960.000,00	0,00	(2.960.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	2.960.000,00	0,00	(2.960.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.960.000,00	0,00	(2.960.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	0,00	(2.960.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	2.484.709.869,00	2.026.817.091,00	(457.892.778,00)	81,57	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.121.225.067,00)	(542.368.033,00)	578.857.034,00	48,37	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.121.225.067,00)	(542.368.033,00)	578.857.034,00	48,37	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Muaro Putuih

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4	PENDAPATAN DAERAH	599.315.000,00	590.809.515,00	(8.505.485,00)	98,58	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	599.315.000,00	590.809.515,00	(8.505.485,00)	98,58	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1.02	Retribusi Daerah	598.000.000,00	589.884.815,00	(8.115.185,00)	98,64	
	1.02.0.00.0.00.01.0003		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.315.000,00	924.700,00	(390.300,00)	70,31	
				JUMLAH PENDAPATAN	599.315.000,00	590.809.515,00	(8.505.485,00)	98,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	1.166.660.225,00	920.031.462,00	(246.628.763,00)	78,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	700.660.225,00	547.873.945,00	(152.786.280,00)	78,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	700.660.225,00	547.873.945,00	(152.786.280,00)	78,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	700.660.225,00	547.873.945,00	(152.786.280,00)	78,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	665.760.225,00	539.338.755,00	(126.421.470,00)	81,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	207.721.005,00	207.247.611,00	(473.394,00)	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.039.220,00	332.091.144,00	(125.948.076,00)	72,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	34.900.000,00	8.535.190,00	(26.364.810,00)	24,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.900.000,00	8.535.190,00	(26.364.810,00)	24,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	465.100.000,00	372.157.517,00	(92.942.483,00)	80,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	465.100.000,00	372.157.517,00	(92.942.483,00)	80,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	11.550.000,00	10.087.100,00	(1.462.900,00)	87,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.550.000,00	10.087.100,00	(1.462.900,00)	87,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	10.087.100,00	(1.462.900,00)	87,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	7.600.000,00	5.750.000,00	(1.850.000,00)	75,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.600.000,00	5.750.000,00	(1.850.000,00)	75,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	5.750.000,00	(1.850.000,00)	75,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	97,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	97,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.600.000,00	(400.000,00)	97,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	193.300.000,00	130.903.950,00	(62.396.050,00)	67,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	193.300.000,00	130.903.950,00	(62.396.050,00)	67,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.300.000,00	130.903.950,00	(62.396.050,00)	67,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	7.460.000,00	4.800.000,00	(2.660.000,00)	64,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	7.460.000,00	4.800.000,00	(2.660.000,00)	64,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	4.800.000,00	(2.660.000,00)	64,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	80.440.000,00	71.668.800,00	(8.771.200,00)	89,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	80.440.000,00	71.668.800,00	(8.771.200,00)	89,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.440.000,00	71.668.800,00	(8.771.200,00)	89,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	103.400.000,00	90.297.667,00	(13.102.333,00)	87,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	103.400.000,00	90.297.667,00	(13.102.333,00)	87,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	54.285.000,00	54.273.756,00	(11.244,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.115.000,00	36.023.911,00	(13.091.089,00)	73,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	600.000,00	(100.000,00)	85,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	4.150.000,00	4.100.000,00	(50.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	4.150.000,00	4.100.000,00	(50.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.100.000,00	(50.000,00)	98,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.400.000,00	250.000,00	(2.150.000,00)	10,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	250.000,00	(2.150.000,00)	10,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	250.000,00	(2.150.000,00)	10,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	0,00	(900.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	1.166.660.225,00	920.031.462,00	(246.628.763,00)	78,86	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(567.345.225,00)	(329.221.947,00)	238.123.278,00	58,02	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(567.345.225,00)	(329.221.947,00)	238.123.278,00	58,02	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Manggopoh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4	PENDAPATAN DAERAH	2.213.601.481,00	1.846.826.389,00	(366.775.092,00)	83,43	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.213.601.481,00	1.846.826.389,00	(366.775.092,00)	83,43	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1.02	Retribusi Daerah	2.205.181.518,00	1.840.934.869,00	(364.246.649,00)	83,48	
	1.02.0.00.0.00.01.0004		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.419.963,00	5.891.520,00	(2.528.443,00)	69,97	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.213.601.481,00	1.846.826.389,00	(366.775.092,00)	83,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	3.376.183.859,00	2.396.171.282,00	(980.012.577,00)	70,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.658.434.859,00	1.900.351.555,00	(758.083.304,00)	71,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.658.434.859,00	1.900.351.555,00	(758.083.304,00)	71,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.658.434.859,00	1.900.351.555,00	(758.083.304,00)	71,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.939.441.930,00	1.641.778.415,00	(297.663.515,00)	84,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.180.000.000,00	1.134.986.763,00	(45.013.237,00)	96,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	759.441.930,00	506.791.652,00	(252.650.278,00)	66,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	718.992.929,00	258.573.140,00	(460.419.789,00)	35,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	718.992.929,00	258.573.140,00	(460.419.789,00)	35,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	712.329.000,00	491.233.727,00	(221.095.273,00)	68,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	712.329.000,00	491.233.727,00	(221.095.273,00)	68,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	32.000.000,00	25.447.000,00	(6.553.000,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	25.447.000,00	(6.553.000,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	25.447.000,00	(6.553.000,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	35.400.000,00	13.950.000,00	(21.450.000,00)	39,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.400.000,00	13.950.000,00	(21.450.000,00)	39,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	13.950.000,00	(21.450.000,00)	39,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	67.800.000,00	22.250.000,00	(45.550.000,00)	32,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	67.800.000,00	22.250.000,00	(45.550.000,00)	32,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.800.000,00	22.250.000,00	(45.550.000,00)	32,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	11.500.000,00	6.500.000,00	(5.000.000,00)	56,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	6.500.000,00	(5.000.000,00)	56,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	6.500.000,00	(5.000.000,00)	56,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	201.880.000,00	186.058.000,00	(15.822.000,00)	92,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	201.880.000,00	186.058.000,00	(15.822.000,00)	92,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.880.000,00	186.058.000,00	(15.822.000,00)	92,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	9.000.000,00	1.100.000,00	(7.900.000,00)	12,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	1.100.000,00	(7.900.000,00)	12,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	1.100.000,00	(7.900.000,00)	12,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12.400.000,00	10.700.000,00	(1.700.000,00)	86,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	10.700.000,00	(1.700.000,00)	86,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	10.700.000,00	(1.700.000,00)	86,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	22.450.000,00	10.150.000,00	(12.300.000,00)	45,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	22.450.000,00	10.150.000,00	(12.300.000,00)	45,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.450.000,00	10.150.000,00	(12.300.000,00)	45,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	2.400.000,00	(9.600.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	132.400.000,00	85.588.000,00	(46.812.000,00)	64,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	132.400.000,00	85.588.000,00	(46.812.000,00)	64,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.400.000,00	85.588.000,00	(46.812.000,00)	64,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	158.880.000,00	122.790.727,00	(36.089.273,00)	77,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	158.880.000,00	122.790.727,00	(36.089.273,00)	77,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	89.600.000,00	79.217.827,00	(10.382.173,00)	88,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.280.000,00	43.572.900,00	(25.707.100,00)	62,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	3.969.000,00	0,00	(3.969.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	3.969.000,00	0,00	(3.969.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.969.000,00	0,00	(3.969.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	0,00	(250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.100.000,00	1.900.000,00	(200.000,00)	90,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	1.900.000,00	(200.000,00)	90,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	1.900.000,00	(200.000,00)	90,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	9.000.000,00	1.300.000,00	(7.700.000,00)	14,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	1.300.000,00	(7.700.000,00)	14,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	1.300.000,00	(7.700.000,00)	14,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	1.300.000,00	1.100.000,00	(200.000,00)	84,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.100.000,00	(200.000,00)	84,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.100.000,00	(200.000,00)	84,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.420.000,00	4.586.000,00	(834.000,00)	84,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.420.000,00	4.586.000,00	(834.000,00)	84,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	5.420.000,00	4.586.000,00	(834.000,00)	84,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.420.000,00	4.586.000,00	(834.000,00)	84,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.420.000,00	4.586.000,00	(834.000,00)	84,61	
				JUMLAH BELANJA	3.376.183.859,00	2.396.171.282,00	(980.012.577,00)	70,97	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.162.582.378,00)	(549.344.893,00)	613.237.485,00	47,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.162.582.378,00)	(549.344.893,00)	613.237.485,00	47,25	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Lubuk Basung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4	PENDAPATAN DAERAH	2.964.454.733,00	2.674.809.819,00	(289.644.914,00)	90,22	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.964.454.733,00	2.674.809.819,00	(289.644.914,00)	90,22	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1.02	Retribusi Daerah	2.949.092.852,00	2.658.061.856,00	(291.030.996,00)	90,13	
	1.02.0.00.0.00.01.0005		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.361.881,00	16.747.963,00	1.386.082,00	109,02	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.964.454.733,00	2.674.809.819,00	(289.644.914,00)	90,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	4.999.029.583,00	4.031.346.754,00	(967.682.829,00)	80,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.209.346.583,00	3.433.009.895,00	(776.336.688,00)	81,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	4.209.346.583,00	3.433.009.895,00	(776.336.688,00)	81,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	4.209.346.583,00	3.433.009.895,00	(776.336.688,00)	81,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.077.186.257,00	2.582.612.700,00	(494.573.557,00)	83,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.082.411.071,00	1.843.758.310,00	(238.652.761,00)	88,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	994.775.186,00	738.854.390,00	(255.920.796,00)	74,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.132.160.326,00	850.397.195,00	(281.763.131,00)	75,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.132.160.326,00	850.397.195,00	(281.763.131,00)	75,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	784.103.400,00	598.336.859,00	(185.766.541,00)	76,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	784.103.400,00	598.336.859,00	(185.766.541,00)	76,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	75.660.000,00	70.466.500,00	(5.193.500,00)	93,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.660.000,00	70.466.500,00	(5.193.500,00)	93,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.660.000,00	70.466.500,00	(5.193.500,00)	93,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	37.290.000,00	28.500.000,00	(8.790.000,00)	76,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.290.000,00	28.500.000,00	(8.790.000,00)	76,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.290.000,00	28.500.000,00	(8.790.000,00)	76,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	36.600.000,00	29.700.000,00	(6.900.000,00)	81,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	36.600.000,00	29.700.000,00	(6.900.000,00)	81,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	29.700.000,00	(6.900.000,00)	81,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	269.414.000,00	186.639.400,00	(82.774.600,00)	69,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	269.414.000,00	186.639.400,00	(82.774.600,00)	69,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.414.000,00	186.639.400,00	(82.774.600,00)	69,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	16.350.000,00	12.600.000,00	(3.750.000,00)	77,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	16.350.000,00	12.600.000,00	(3.750.000,00)	77,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	12.600.000,00	(3.750.000,00)	77,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	29.300.000,00	10.600.000,00	(18.700.000,00)	36,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	29.300.000,00	10.600.000,00	(18.700.000,00)	36,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	10.600.000,00	(18.700.000,00)	36,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	127.950.000,00	95.895.000,00	(32.055.000,00)	74,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	127.950.000,00	95.895.000,00	(32.055.000,00)	74,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.950.000,00	95.895.000,00	(32.055.000,00)	74,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	158.720.400,00	139.478.959,00	(19.241.441,00)	87,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	158.720.400,00	139.478.959,00	(19.241.441,00)	87,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.720.400,00	55.478.959,00	(19.241.441,00)	74,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	3.969.000,00	0,00	(3.969.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	3.969.000,00	0,00	(3.969.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.969.000,00	0,00	(3.969.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	6.950.000,00	6.857.000,00	(93.000,00)	98,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	6.950.000,00	6.857.000,00	(93.000,00)	98,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	6.857.000,00	(93.000,00)	98,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.250.000,00	200.000,00	(2.050.000,00)	8,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	200.000,00	(2.050.000,00)	8,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	200.000,00	(2.050.000,00)	8,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.579.600,00	0,00	(5.579.600,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.579.600,00	0,00	(5.579.600,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	5.579.600,00	0,00	(5.579.600,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.579.600,00	0,00	(5.579.600,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.579.600,00	0,00	(5.579.600,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	4.999.029.583,00	4.031.346.754,00	(967.682.829,00)	80,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.034.574.850,00)	(1.356.536.935,00)	678.037.915,00	66,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.034.574.850,00)	(1.356.536.935,00)	678.037.915,00	66,67	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Bawan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4	PENDAPATAN DAERAH	1.502.500.000,00	1.635.319.113,00	132.819.113,00	108,83	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.502.500.000,00	1.635.319.113,00	132.819.113,00	108,83	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1.02	Retribusi Daerah	1.495.540.000,00	1.628.906.106,00	133.366.106,00	108,91	
	1.02.0.00.0.00.01.0006		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.960.000,00	6.413.007,00	(546.993,00)	92,14	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.502.500.000,00	1.635.319.113,00	132.819.113,00	108,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	2.676.231.022,00	2.480.876.476,00	(195.354.546,00)	92,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.149.511.022,00	1.989.713.515,00	(159.797.507,00)	92,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.149.511.022,00	1.989.713.515,00	(159.797.507,00)	92,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.149.511.022,00	1.989.713.515,00	(159.797.507,00)	92,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.625.804.408,00	1.625.533.478,00	(270.930,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	775.840.000,00	775.688.727,00	(151.273,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.964.408,00	849.844.751,00	(119.657,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	523.706.614,00	364.180.037,00	(159.526.577,00)	69,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	523.706.614,00	364.180.037,00	(159.526.577,00)	69,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	526.520.000,00	490.962.961,00	(35.557.039,00)	93,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	526.520.000,00	490.962.961,00	(35.557.039,00)	93,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	24.000.000,00	23.974.800,00	(25.200,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.974.800,00	(25.200,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.974.800,00	(25.200,00)	99,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	22.100.000,00	11.900.000,00	(10.200.000,00)	53,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.100.000,00	11.900.000,00	(10.200.000,00)	53,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	11.900.000,00	(10.200.000,00)	53,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	22.500.000,00	20.850.000,00	(1.650.000,00)	92,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	20.850.000,00	(1.650.000,00)	92,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	20.850.000,00	(1.650.000,00)	92,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	219.120.000,00	218.343.000,00	(777.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	219.120.000,00	218.343.000,00	(777.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.120.000,00	218.343.000,00	(777.000,00)	99,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	1.750.000,00	900.000,00	(850.000,00)	51,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	900.000,00	(850.000,00)	51,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	900.000,00	(850.000,00)	51,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	15.400.000,00	13.500.000,00	(1.900.000,00)	87,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	15.400.000,00	13.500.000,00	(1.900.000,00)	87,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	13.500.000,00	(1.900.000,00)	87,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	77.250.000,00	64.217.700,00	(13.032.300,00)	83,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	77.250.000,00	64.217.700,00	(13.032.300,00)	83,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	64.217.700,00	(13.032.300,00)	83,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	114.300.000,00	109.077.461,00	(5.222.539,00)	95,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	114.300.000,00	109.077.461,00	(5.222.539,00)	95,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	60.300.000,00	60.125.810,00	(174.190,00)	99,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	48.951.651,00	(5.048.349,00)	90,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.000.000,00	600.000,00	(1.400.000,00)	30,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	600.000,00	(1.400.000,00)	30,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	600.000,00	(1.400.000,00)	30,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.676.231.022,00	2.480.876.476,00	(195.354.546,00)	92,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.173.731.022,00)	(845.557.363,00)	328.173.659,00	72,04	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.173.731.022,00)	(845.557.363,00)	328.173.659,00	72,04	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Batu Kambing

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	880.000.000,00	820.412.100,00	(59.587.900,00)	93,22	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	880.000.000,00	820.412.100,00	(59.587.900,00)	93,22	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1.02	Retribusi Daerah	877.800.000,00	819.865.242,00	(57.934.758,00)	93,40	
	1.02.0.00.0.00.01.0007		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.200.000,00	546.858,00	(1.653.142,00)	24,85	
				JUMLAH PENDAPATAN	880.000.000,00	820.412.100,00	(59.587.900,00)	93,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	1.511.184.936,00	1.214.339.243,00	(296.845.693,00)	80,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	934.104.936,00	841.223.774,00	(92.881.162,00)	90,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	934.104.936,00	841.223.774,00	(92.881.162,00)	90,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	934.104.936,00	841.223.774,00	(92.881.162,00)	90,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	834.104.936,00	743.044.974,00	(91.059.962,00)	89,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	332.880.000,00	321.367.632,00	(11.512.368,00)	96,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	501.224.936,00	421.677.342,00	(79.547.594,00)	84,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	98.178.800,00	(1.821.200,00)	98,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	98.178.800,00	(1.821.200,00)	98,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	573.080.000,00	371.632.969,00	(201.447.031,00)	64,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	573.080.000,00	371.632.969,00	(201.447.031,00)	64,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	22.800.000,00	7.989.200,00	(14.810.800,00)	35,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	7.989.200,00	(14.810.800,00)	35,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	7.989.200,00	(14.810.800,00)	35,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	23.600.000,00	7.500.000,00	(16.100.000,00)	31,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.600.000,00	7.500.000,00	(16.100.000,00)	31,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.600.000,00	7.500.000,00	(16.100.000,00)	31,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	18.600.000,00	10.800.000,00	(7.800.000,00)	58,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	18.600.000,00	10.800.000,00	(7.800.000,00)	58,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	10.800.000,00	(7.800.000,00)	58,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	14.150.000,00	9.000.000,00	(5.150.000,00)	63,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.150.000,00	9.000.000,00	(5.150.000,00)	63,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.150.000,00	9.000.000,00	(5.150.000,00)	63,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	197.830.000,00	123.301.500,00	(74.528.500,00)	62,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	197.830.000,00	123.301.500,00	(74.528.500,00)	62,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.830.000,00	123.301.500,00	(74.528.500,00)	62,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	5.850.000,00	3.000.000,00	(2.850.000,00)	51,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.850.000,00	3.000.000,00	(2.850.000,00)	51,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	3.000.000,00	(2.850.000,00)	51,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	29.100.000,00	14.100.000,00	(15.000.000,00)	48,45	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	29.100.000,00	14.100.000,00	(15.000.000,00)	48,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	14.100.000,00	(15.000.000,00)	48,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	8.200.000,00	750.000,00	(7.450.000,00)	9,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	750.000,00	(7.450.000,00)	9,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	750.000,00	(7.450.000,00)	9,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	8.200.000,00	6.650.000,00	(1.550.000,00)	81,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	6.650.000,00	(1.550.000,00)	81,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	6.650.000,00	(1.550.000,00)	81,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	91.650.000,00	69.012.500,00	(22.637.500,00)	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	91.650.000,00	69.012.500,00	(22.637.500,00)	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.650.000,00	69.012.500,00	(22.637.500,00)	75,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	127.100.000,00	99.472.269,00	(27.627.731,00)	78,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	127.100.000,00	99.472.269,00	(27.627.731,00)	78,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	61.700.000,00	56.516.678,00	(5.183.322,00)	91,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	42.955.591,00	(22.444.409,00)	65,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	0,00	(100.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	14.950.000,00	10.957.500,00	(3.992.500,00)	73,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	14.950.000,00	10.957.500,00	(3.992.500,00)	73,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	10.957.500,00	(3.992.500,00)	73,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	33,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	10.350.000,00	8.900.000,00	(1.450.000,00)	85,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	10.350.000,00	8.900.000,00	(1.450.000,00)	85,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	8.900.000,00	(1.450.000,00)	85,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.000.000,00	1.482.500,00	(2.517.500,00)	37,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.000.000,00	1.482.500,00	(2.517.500,00)	37,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	4.000.000,00	1.482.500,00	(2.517.500,00)	37,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	1.482.500,00	(2.517.500,00)	37,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.482.500,00	(2.517.500,00)	37,06	
				JUMLAH BELANJA	1.511.184.936,00	1.214.339.243,00	(296.845.693,00)	80,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(631.184.936,00)	(393.927.143,00)	237.257.793,00	62,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(631.184.936,00)	(393.927.143,00)	237.257.793,00	62,41	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Pasar Ahad

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4	PENDAPATAN DAERAH	1.305.305.265,00	1.256.992.282,00	(48.312.983,00)	96,29	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.305.305.265,00	1.256.992.282,00	(48.312.983,00)	96,29	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1.02	Retribusi Daerah	1.301.133.152,00	1.250.063.835,00	(51.069.317,00)	96,07	
	1.02.0.00.0.00.01.0008		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.172.113,00	6.928.447,00	2.756.334,00	166,06	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.305.305.265,00	1.256.992.282,00	(48.312.983,00)	96,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	2.334.219.790,00	1.951.507.453,00	(382.712.337,00)	83,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.786.699.790,00	1.538.947.089,00	(247.752.701,00)	86,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.786.699.790,00	1.538.947.089,00	(247.752.701,00)	86,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.786.699.790,00	1.538.947.089,00	(247.752.701,00)	86,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.432.798.453,00	1.235.832.966,00	(196.965.487,00)	86,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	696.000.000,00	570.757.618,00	(125.242.382,00)	82,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.798.453,00	665.075.348,00	(71.723.105,00)	90,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	353.901.337,00	303.114.123,00	(50.787.214,00)	85,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	353.901.337,00	303.114.123,00	(50.787.214,00)	85,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	541.345.000,00	408.119.164,00	(133.225.836,00)	75,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	541.345.000,00	408.119.164,00	(133.225.836,00)	75,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	38.400.000,00	17.318.000,00	(21.082.000,00)	45,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.400.000,00	17.318.000,00	(21.082.000,00)	45,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	17.318.000,00	(21.082.000,00)	45,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	15.550.000,00	13.450.000,00	(2.100.000,00)	86,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.550.000,00	13.450.000,00	(2.100.000,00)	86,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.550.000,00	13.450.000,00	(2.100.000,00)	86,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	165.220.000,00	119.203.200,00	(46.016.800,00)	72,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	165.220.000,00	119.203.200,00	(46.016.800,00)	72,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.220.000,00	119.203.200,00	(46.016.800,00)	72,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	3.950.000,00	3.350.000,00	(600.000,00)	84,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.950.000,00	3.350.000,00	(600.000,00)	84,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.350.000,00	(600.000,00)	84,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	16.100.000,00	15.050.000,00	(1.050.000,00)	93,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	16.100.000,00	15.050.000,00	(1.050.000,00)	93,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	15.050.000,00	(1.050.000,00)	93,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	12.102.000,00	6.150.000,00	(5.952.000,00)	50,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	12.102.000,00	6.150.000,00	(5.952.000,00)	50,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.102.000,00	6.150.000,00	(5.952.000,00)	50,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	2.100.000,00	900.000,00	(1.200.000,00)	42,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	900.000,00	(1.200.000,00)	42,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	900.000,00	(1.200.000,00)	42,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	104.448.000,00	85.644.000,00	(18.804.000,00)	81,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	104.448.000,00	85.644.000,00	(18.804.000,00)	81,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.448.000,00	85.644.000,00	(18.804.000,00)	81,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	125.525.000,00	97.003.964,00	(28.521.036,00)	77,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	125.525.000,00	97.003.964,00	(28.521.036,00)	77,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	62.280.000,00	53.326.941,00	(8.953.059,00)	85,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.245.000,00	43.677.023,00	(19.567.977,00)	69,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	4.550.000,00	3.000.000,00	(1.550.000,00)	65,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	4.550.000,00	3.000.000,00	(1.550.000,00)	65,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	3.000.000,00	(1.550.000,00)	65,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	13.400.000,00	7.750.000,00	(5.650.000,00)	57,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	13.400.000,00	7.750.000,00	(5.650.000,00)	57,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	7.750.000,00	(5.650.000,00)	57,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	30,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.175.000,00	4.441.200,00	(1.733.800,00)	71,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.175.000,00	4.441.200,00	(1.733.800,00)	71,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	6.175.000,00	4.441.200,00	(1.733.800,00)	71,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.175.000,00	4.441.200,00	(1.733.800,00)	71,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	4.441.200,00	(1.733.800,00)	71,92	
				JUMLAH BELANJA	2.334.219.790,00	1.951.507.453,00	(382.712.337,00)	83,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.028.914.525,00)	(694.515.171,00)	334.399.354,00	67,49	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.028.914.525,00)	(694.515.171,00)	334.399.354,00	67,49	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Maninjau

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4	PENDAPATAN DAERAH	1.902.422.900,00	1.734.256.683,00	(168.166.217,00)	91,16	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.902.422.900,00	1.734.256.683,00	(168.166.217,00)	91,16	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1.02	Retribusi Daerah	1.898.070.000,00	1.733.695.660,00	(164.374.340,00)	91,33	
	1.02.0.00.0.00.01.0009		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.352.900,00	561.023,00	(3.791.877,00)	12,88	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.902.422.900,00	1.734.256.683,00	(168.166.217,00)	91,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	2.408.856.973,00	2.202.834.004,00	(206.022.969,00)	91,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.914.136.973,00	1.735.686.239,00	(178.450.734,00)	90,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.914.136.973,00	1.735.686.239,00	(178.450.734,00)	90,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.914.136.973,00	1.735.686.239,00	(178.450.734,00)	90,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.765.666.774,00	1.659.933.526,00	(105.733.248,00)	94,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	802.000.000,00	749.020.184,00	(52.979.816,00)	93,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	963.666.774,00	910.913.342,00	(52.753.432,00)	94,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	148.470.199,00	75.752.713,00	(72.717.486,00)	51,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.470.199,00	75.752.713,00	(72.717.486,00)	51,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	494.720.000,00	467.147.765,00	(27.572.235,00)	94,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	494.720.000,00	467.147.765,00	(27.572.235,00)	94,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	37.350.000,00	35.085.350,00	(2.264.650,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.350.000,00	35.085.350,00	(2.264.650,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.350.000,00	35.085.350,00	(2.264.650,00)	93,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	29.800.000,00	25.850.000,00	(3.950.000,00)	86,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.800.000,00	25.850.000,00	(3.950.000,00)	86,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.800.000,00	25.850.000,00	(3.950.000,00)	86,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	9.600.000,00	9.300.000,00	(300.000,00)	96,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.300.000,00	(300.000,00)	96,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.300.000,00	(300.000,00)	96,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	161.720.000,00	160.350.450,00	(1.369.550,00)	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	161.720.000,00	160.350.450,00	(1.369.550,00)	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.720.000,00	160.350.450,00	(1.369.550,00)	99,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	3.900.000,00	3.750.000,00	(150.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.750.000,00	(150.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.750.000,00	(150.000,00)	96,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	8.400.000,00	6.800.000,00	(1.600.000,00)	80,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	6.800.000,00	(1.600.000,00)	80,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	6.800.000,00	(1.600.000,00)	80,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	15.150.000,00	10.800.000,00	(4.350.000,00)	71,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	15.150.000,00	10.800.000,00	(4.350.000,00)	71,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	10.800.000,00	(4.350.000,00)	71,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	91.950.000,00	87.126.500,00	(4.823.500,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	91.950.000,00	87.126.500,00	(4.823.500,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.950.000,00	87.126.500,00	(4.823.500,00)	94,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	114.300.000,00	105.735.465,00	(8.564.535,00)	92,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	114.300.000,00	105.735.465,00	(8.564.535,00)	92,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.482.268,00	(117.732,00)	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00	54.253.197,00	(8.446.803,00)	86,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.408.856.973,00	2.202.834.004,00	(206.022.969,00)	91,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(506.434.073,00)	(468.577.321,00)	37.856.752,00	92,52	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(506.434.073,00)	(468.577.321,00)	37.856.752,00	92,52	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Koto Alam

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000.000,00	1.689.293.961,00	(310.706.039,00)	84,46	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000.000,00	1.689.293.961,00	(310.706.039,00)	84,46	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1.02	Retribusi Daerah	1.994.639.183,00	1.681.998.888,00	(312.640.295,00)	84,32	
	1.02.0.00.0.00.01.0010		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.360.817,00	7.295.073,00	1.934.256,00	136,08	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000.000,00	1.689.293.961,00	(310.706.039,00)	84,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		5	BELANJA DAERAH	2.976.819.520,00	2.046.767.650,00	(930.051.870,00)	68,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.437.599.520,00	1.629.173.119,00	(808.426.401,00)	66,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.437.599.520,00	1.629.173.119,00	(808.426.401,00)	66,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.437.599.520,00	1.629.173.119,00	(808.426.401,00)	66,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.957.658.903,00	1.348.493.292,00	(609.165.611,00)	68,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	971.000.000,00	809.152.677,00	(161.847.323,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.658.903,00	539.340.615,00	(447.318.288,00)	54,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	479.940.617,00	280.679.827,00	(199.260.790,00)	58,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	479.940.617,00	280.679.827,00	(199.260.790,00)	58,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	534.360.000,00	414.539.231,00	(119.820.769,00)	77,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	534.360.000,00	414.539.231,00	(119.820.769,00)	77,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	37.800.000,00	27.714.000,00	(10.086.000,00)	73,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.800.000,00	27.714.000,00	(10.086.000,00)	73,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	27.714.000,00	(10.086.000,00)	73,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	31.200.000,00	28.200.000,00	(3.000.000,00)	90,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	28.200.000,00	(3.000.000,00)	90,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	28.200.000,00	(3.000.000,00)	90,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	8.000.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.600.000,00	(400.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	13.600.000,00	5.700.000,00	(7.900.000,00)	41,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	5.700.000,00	(7.900.000,00)	41,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	5.700.000,00	(7.900.000,00)	41,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	204.970.000,00	157.104.000,00	(47.866.000,00)	76,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	204.970.000,00	157.104.000,00	(47.866.000,00)	76,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.970.000,00	157.104.000,00	(47.866.000,00)	76,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	3.950.000,00	500.000,00	(3.450.000,00)	12,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.950.000,00	500.000,00	(3.450.000,00)	12,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	500.000,00	(3.450.000,00)	12,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	18.200.000,00	15.300.000,00	(2.900.000,00)	84,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	18.200.000,00	15.300.000,00	(2.900.000,00)	84,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	15.300.000,00	(2.900.000,00)	84,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	21.600.000,00	12.050.000,00	(9.550.000,00)	55,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	12.050.000,00	(9.550.000,00)	55,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	12.050.000,00	(9.550.000,00)	55,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	3.400.000,00	3.200.000,00	(200.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.200.000,00	(200.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.200.000,00	(200.000,00)	94,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	71.900.000,00	59.000.000,00	(12.900.000,00)	82,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	71.900.000,00	59.000.000,00	(12.900.000,00)	82,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.900.000,00	59.000.000,00	(12.900.000,00)	82,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	109.440.000,00	91.271.231,00	(18.168.769,00)	83,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	109.440.000,00	91.271.231,00	(18.168.769,00)	83,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	60.000.000,00	55.798.017,00	(4.201.983,00)	92,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.440.000,00	35.473.214,00	(13.966.786,00)	71,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	71,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	71,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	500.000,00	(200.000,00)	71,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	3.600.000,00	500.000,00	(3.100.000,00)	13,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	500.000,00	(3.100.000,00)	13,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	500.000,00	(3.100.000,00)	13,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.900.000,00	(100.000,00)	98,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.860.000,00	3.055.300,00	(1.804.700,00)	62,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.860.000,00	3.055.300,00	(1.804.700,00)	62,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	4.860.000,00	3.055.300,00	(1.804.700,00)	62,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.860.000,00	3.055.300,00	(1.804.700,00)	62,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	3.055.300,00	(1.804.700,00)	62,86	
				JUMLAH BELANJA	2.976.819.520,00	2.046.767.650,00	(930.051.870,00)	68,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(976.819.520,00)	(357.473.689,00)	619.345.831,00	36,59	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(976.819.520,00)	(357.473.689,00)	619.345.831,00	36,59	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Palembayan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4	PENDAPATAN DAERAH	1.221.020.229,00	1.024.568.274,00	(196.451.955,00)	83,91	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.221.020.229,00	1.024.568.274,00	(196.451.955,00)	83,91	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1.02	Retribusi Daerah	1.218.896.096,00	1.023.697.956,00	(195.198.140,00)	83,98	
	1.02.0.00.0.00.01.0011		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.124.133,00	870.318,00	(1.253.815,00)	40,97	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.221.020.229,00	1.024.568.274,00	(196.451.955,00)	83,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		5	BELANJA DAERAH	1.866.782.095,00	1.562.506.286,00	(304.275.809,00)	83,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.299.722.095,00	1.096.526.476,00	(203.195.619,00)	84,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.299.722.095,00	1.096.526.476,00	(203.195.619,00)	84,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.299.722.095,00	1.096.526.476,00	(203.195.619,00)	84,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.055.748.484,00	1.004.333.676,00	(51.414.808,00)	95,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	446.991.085,00	419.025.832,00	(27.965.253,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.757.399,00	585.307.844,00	(23.449.555,00)	96,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	243.973.611,00	92.192.800,00	(151.780.811,00)	37,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.973.611,00	92.192.800,00	(151.780.811,00)	37,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	561.980.000,00	464.415.810,00	(97.564.190,00)	82,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.980.000,00	464.415.810,00	(97.564.190,00)	82,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	14.080.000,00	13.128.000,00	(952.000,00)	93,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.080.000,00	13.128.000,00	(952.000,00)	93,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.080.000,00	13.128.000,00	(952.000,00)	93,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	16.400.000,00	12.600.000,00	(3.800.000,00)	76,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.400.000,00	12.600.000,00	(3.800.000,00)	76,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	12.600.000,00	(3.800.000,00)	76,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	19.800.000,00	16.050.000,00	(3.750.000,00)	81,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	19.800.000,00	16.050.000,00	(3.750.000,00)	81,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	16.050.000,00	(3.750.000,00)	81,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	6.950.000,00	6.700.000,00	(250.000,00)	96,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	6.950.000,00	6.700.000,00	(250.000,00)	96,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	6.700.000,00	(250.000,00)	96,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	181.210.000,00	162.035.400,00	(19.174.600,00)	89,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	181.210.000,00	162.035.400,00	(19.174.600,00)	89,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.210.000,00	162.035.400,00	(19.174.600,00)	89,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	2.400.000,00	200.000,00	(2.200.000,00)	8,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	200.000,00	(2.200.000,00)	8,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	200.000,00	(2.200.000,00)	8,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	13.300.000,00	8.100.000,00	(5.200.000,00)	60,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	13.300.000,00	8.100.000,00	(5.200.000,00)	60,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	8.100.000,00	(5.200.000,00)	60,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	16.100.000,00	4.850.000,00	(11.250.000,00)	30,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	16.100.000,00	4.850.000,00	(11.250.000,00)	30,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	4.850.000,00	(11.250.000,00)	30,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	5.800.000,00	4.700.000,00	(1.100.000,00)	81,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	4.700.000,00	(1.100.000,00)	81,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	4.700.000,00	(1.100.000,00)	81,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	105.050.000,00	88.969.500,00	(16.080.500,00)	84,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	105.050.000,00	88.969.500,00	(16.080.500,00)	84,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.050.000,00	88.969.500,00	(16.080.500,00)	84,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	126.120.000,00	105.039.610,00	(21.080.390,00)	83,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	126.120.000,00	105.039.610,00	(21.080.390,00)	83,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	66.000.000,00	63.193.765,00	(2.806.235,00)	95,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.120.000,00	41.845.845,00	(18.274.155,00)	69,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	13.350.000,00	5.543.300,00	(7.806.700,00)	41,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	13.350.000,00	5.543.300,00	(7.806.700,00)	41,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.350.000,00	5.543.300,00	(7.806.700,00)	41,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.620.000,00	400.000,00	(2.220.000,00)	15,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.620.000,00	400.000,00	(2.220.000,00)	15,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	400.000,00	(2.220.000,00)	15,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	37.000.000,00	36.100.000,00	(900.000,00)	97,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	36.100.000,00	(900.000,00)	97,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	36.100.000,00	(900.000,00)	97,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.080.000,00	1.564.000,00	(3.516.000,00)	30,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.080.000,00	1.564.000,00	(3.516.000,00)	30,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	5.080.000,00	1.564.000,00	(3.516.000,00)	30,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.080.000,00	1.564.000,00	(3.516.000,00)	30,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	1.564.000,00	(3.516.000,00)	30,78	
				JUMLAH BELANJA	1.866.782.095,00	1.562.506.286,00	(304.275.809,00)	83,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(645.761.866,00)	(537.938.012,00)	107.823.854,00	83,30	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(645.761.866,00)	(537.938.012,00)	107.823.854,00	83,30	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Matur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4	PENDAPATAN DAERAH	2.005.691.881,00	1.723.825.043,00	(281.866.838,00)	85,94	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.005.691.881,00	1.723.825.043,00	(281.866.838,00)	85,94	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1.02	Retribusi Daerah	2.001.288.279,00	1.720.268.229,00	(281.020.050,00)	85,95	
	1.02.0.00.0.00.01.0012		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.403.602,00	3.556.814,00	(846.788,00)	80,77	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.005.691.881,00	1.723.825.043,00	(281.866.838,00)	85,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		5	BELANJA DAERAH	2.761.682.187,00	2.293.016.276,00	(468.665.911,00)	83,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.245.442.187,00	1.929.152.131,00	(316.290.056,00)	85,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.245.442.187,00	1.929.152.131,00	(316.290.056,00)	85,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.245.442.187,00	1.929.152.131,00	(316.290.056,00)	85,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.908.711.559,00	1.667.666.156,00	(241.045.403,00)	87,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	856.360.574,00	815.731.427,00	(40.629.147,00)	95,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.052.350.985,00	851.934.729,00	(200.416.256,00)	80,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	336.730.628,00	261.485.975,00	(75.244.653,00)	77,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.730.628,00	261.485.975,00	(75.244.653,00)	77,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	509.660.000,00	358.126.795,00	(151.533.205,00)	70,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	509.660.000,00	358.126.795,00	(151.533.205,00)	70,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	44.695.000,00	44.304.400,00	(390.600,00)	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.695.000,00	44.304.400,00	(390.600,00)	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.695.000,00	44.304.400,00	(390.600,00)	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	28.400.000,00	12.550.000,00	(15.850.000,00)	44,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.400.000,00	12.550.000,00	(15.850.000,00)	44,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	12.550.000,00	(15.850.000,00)	44,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	10.600.000,00	9.550.000,00	(1.050.000,00)	90,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	10.600.000,00	9.550.000,00	(1.050.000,00)	90,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	9.550.000,00	(1.050.000,00)	90,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	9.250.000,00	8.100.000,00	(1.150.000,00)	87,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	8.100.000,00	(1.150.000,00)	87,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	8.100.000,00	(1.150.000,00)	87,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	139.690.000,00	112.581.000,00	(27.109.000,00)	80,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	139.690.000,00	112.581.000,00	(27.109.000,00)	80,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.690.000,00	112.581.000,00	(27.109.000,00)	80,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	3.600.000,00	1.450.000,00	(2.150.000,00)	40,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	1.450.000,00	(2.150.000,00)	40,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	1.450.000,00	(2.150.000,00)	40,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	15.600.000,00	12.000.000,00	(3.600.000,00)	76,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	12.000.000,00	(3.600.000,00)	76,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	12.000.000,00	(3.600.000,00)	76,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	13.300.000,00	8.900.000,00	(4.400.000,00)	66,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	13.300.000,00	8.900.000,00	(4.400.000,00)	66,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	8.900.000,00	(4.400.000,00)	66,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	66,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	104.750.000,00	53.769.250,00	(50.980.750,00)	51,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	104.750.000,00	53.769.250,00	(50.980.750,00)	51,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.750.000,00	53.769.250,00	(50.980.750,00)	51,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	124.320.000,00	83.122.145,00	(41.197.855,00)	66,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	124.320.000,00	83.122.145,00	(41.197.855,00)	66,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	58.075.800,00	39.719.811,00	(18.355.989,00)	68,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.244.200,00	43.402.334,00	(22.841.866,00)	65,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	1.000.000,00	(1.200.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	1.000.000,00	(1.200.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	1.000.000,00	(1.200.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.255.000,00	0,00	(1.255.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.255.000,00	0,00	(1.255.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	0,00	(1.255.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.580.000,00	5.737.350,00	(842.650,00)	87,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.580.000,00	5.737.350,00	(842.650,00)	87,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	6.580.000,00	5.737.350,00	(842.650,00)	87,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.580.000,00	5.737.350,00	(842.650,00)	87,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	5.737.350,00	(842.650,00)	87,19	
				JUMLAH BELANJA	2.761.682.187,00	2.293.016.276,00	(468.665.911,00)	83,02	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(755.990.306,00)	(569.191.233,00)	186.799.073,00	75,29	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(755.990.306,00)	(569.191.233,00)	186.799.073,00	75,29	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas IV Koto

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4	PENDAPATAN DAERAH	1.784.098.155,00	1.808.781.044,00	24.682.889,00	101,38	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.784.098.155,00	1.808.781.044,00	24.682.889,00	101,38	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4.1.02	Retribusi Daerah	1.778.413.901,00	1.802.408.175,00	23.994.274,00	101,34	
	1.02.0.00.0.00.01.0013		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.684.254,00	6.372.869,00	688.615,00	112,11	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.784.098.155,00	1.808.781.044,00	24.682.889,00	101,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		5	BELANJA DAERAH	2.847.968.131,00	2.438.954.860,00	(409.013.271,00)	85,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.199.068.131,00	1.882.296.610,00	(316.771.521,00)	85,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.199.068.131,00	1.882.296.610,00	(316.771.521,00)	85,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.199.068.131,00	1.882.296.610,00	(316.771.521,00)	85,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.871.579.659,00	1.573.844.366,00	(297.735.293,00)	84,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.003.572.245,00	927.891.915,00	(75.680.330,00)	92,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	868.007.414,00	645.952.451,00	(222.054.963,00)	74,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	327.488.472,00	308.452.244,00	(19.036.228,00)	94,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	251.488.472,00	232.948.934,00	(18.539.538,00)	92,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.000.000,00	75.503.310,00	(496.690,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	646.200.000,00	554.826.750,00	(91.373.250,00)	85,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	646.200.000,00	554.826.750,00	(91.373.250,00)	85,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	16.800.000,00	16.688.000,00	(112.000,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.688.000,00	(112.000,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.688.000,00	(112.000,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	29.200.000,00	16.000.000,00	(13.200.000,00)	54,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	29.200.000,00	16.000.000,00	(13.200.000,00)	54,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	16.000.000,00	(13.200.000,00)	54,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	10.000.000,00	5.300.000,00	(4.700.000,00)	53,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.300.000,00	(4.700.000,00)	53,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.300.000,00	(4.700.000,00)	53,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	283.750.000,00	253.094.050,00	(30.655.950,00)	89,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	283.750.000,00	253.094.050,00	(30.655.950,00)	89,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.750.000,00	253.094.050,00	(30.655.950,00)	89,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	1.750.000,00	750.000,00	(1.000.000,00)	42,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	750.000,00	(1.000.000,00)	42,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	750.000,00	(1.000.000,00)	42,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	16.400.000,00	13.950.000,00	(2.450.000,00)	85,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	16.400.000,00	13.950.000,00	(2.450.000,00)	85,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	13.950.000,00	(2.450.000,00)	85,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	16.800.000,00	15.250.000,00	(1.550.000,00)	90,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	15.250.000,00	(1.550.000,00)	90,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	15.250.000,00	(1.550.000,00)	90,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	1.900.000,00	1.000.000,00	(900.000,00)	52,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.000.000,00	(900.000,00)	52,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.000.000,00	(900.000,00)	52,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	117.900.000,00	89.781.000,00	(28.119.000,00)	76,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	117.900.000,00	89.781.000,00	(28.119.000,00)	76,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.900.000,00	89.781.000,00	(28.119.000,00)	76,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	144.600.000,00	137.563.700,00	(7.036.300,00)	95,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	144.600.000,00	137.563.700,00	(7.036.300,00)	95,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	56.963.700,00	(7.036.300,00)	89,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.800.000,00	1.950.000,00	(850.000,00)	69,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	1.950.000,00	(850.000,00)	69,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	1.950.000,00	(850.000,00)	69,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	300.000,00	(600.000,00)	33,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.200.000,00	(200.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.700.000,00	1.831.500,00	(868.500,00)	67,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.700.000,00	1.831.500,00	(868.500,00)	67,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	2.700.000,00	1.831.500,00	(868.500,00)	67,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	1.831.500,00	(868.500,00)	67,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	1.831.500,00	(868.500,00)	67,83	
				JUMLAH BELANJA	2.847.968.131,00	2.438.954.860,00	(409.013.271,00)	85,63	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.063.869.976,00)	(630.173.816,00)	433.696.160,00	59,23	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.063.869.976,00)	(630.173.816,00)	433.696.160,00	59,23	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Malalak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4	PENDAPATAN DAERAH	860.000.000,00	734.772.980,00	(125.227.020,00)	85,43	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	860.000.000,00	734.772.980,00	(125.227.020,00)	85,43	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4.1.02	Retribusi Daerah	858.500.000,00	733.267.167,00	(125.232.833,00)	85,41	
	1.02.0.00.0.00.01.0014		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.500.000,00	1.505.813,00	5.813,00	100,38	
				JUMLAH PENDAPATAN	860.000.000,00	734.772.980,00	(125.227.020,00)	85,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		5	BELANJA DAERAH	1.383.176.284,00	1.014.329.244,00	(368.847.040,00)	73,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	955.656.284,00	725.392.668,00	(230.263.616,00)	75,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	955.656.284,00	725.392.668,00	(230.263.616,00)	75,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	955.656.284,00	725.392.668,00	(230.263.616,00)	75,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	800.417.484,00	609.385.668,00	(191.031.816,00)	76,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	309.960.000,00	273.739.816,00	(36.220.184,00)	88,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.457.484,00	335.645.852,00	(154.811.632,00)	68,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	155.238.800,00	116.007.000,00	(39.231.800,00)	74,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.238.800,00	116.007.000,00	(39.231.800,00)	74,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	425.620.200,00	288.936.576,00	(136.683.624,00)	67,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	425.620.200,00	288.936.576,00	(136.683.624,00)	67,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	22.960.000,00	11.268.100,00	(11.691.900,00)	49,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.960.000,00	11.268.100,00	(11.691.900,00)	49,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.960.000,00	11.268.100,00	(11.691.900,00)	49,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	8.300.000,00	6.600.000,00	(1.700.000,00)	79,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.300.000,00	6.600.000,00	(1.700.000,00)	79,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	6.600.000,00	(1.700.000,00)	79,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	37,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	37,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	37,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	7.000.000,00	2.150.000,00	(4.850.000,00)	30,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	2.150.000,00	(4.850.000,00)	30,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	2.150.000,00	(4.850.000,00)	30,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	174.974.000,00	152.476.650,00	(22.497.350,00)	87,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	174.974.000,00	152.476.650,00	(22.497.350,00)	87,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.974.000,00	152.476.650,00	(22.497.350,00)	87,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	5.650.000,00	4.750.000,00	(900.000,00)	84,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	5.650.000,00	4.750.000,00	(900.000,00)	84,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	4.750.000,00	(900.000,00)	84,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	16.970.000,00	7.100.000,00	(9.870.000,00)	41,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	16.970.000,00	7.100.000,00	(9.870.000,00)	41,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.970.000,00	7.100.000,00	(9.870.000,00)	41,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	6.800.000,00	5.800.000,00	(1.000.000,00)	85,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	6.800.000,00	5.800.000,00	(1.000.000,00)	85,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	5.800.000,00	(1.000.000,00)	85,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	71.275.000,00	27.600.000,00	(43.675.000,00)	38,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	71.275.000,00	27.600.000,00	(43.675.000,00)	38,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.275.000,00	27.600.000,00	(43.675.000,00)	38,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	91.002.200,00	65.241.826,00	(25.760.374,00)	71,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	91.002.200,00	65.241.826,00	(25.760.374,00)	71,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	38.760.000,00	38.569.272,00	(190.728,00)	99,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.242.200,00	26.672.554,00	(25.569.646,00)	51,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	3.540.000,00	450.000,00	(3.090.000,00)	12,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	3.540.000,00	450.000,00	(3.090.000,00)	12,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	450.000,00	(3.090.000,00)	12,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	4.049.000,00	950.000,00	(3.099.000,00)	23,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	4.049.000,00	950.000,00	(3.099.000,00)	23,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.049.000,00	950.000,00	(3.099.000,00)	23,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	2.400.000,00	1.550.000,00	(850.000,00)	64,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	1.550.000,00	(850.000,00)	64,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.550.000,00	(850.000,00)	64,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.899.800,00	0,00	(1.899.800,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.899.800,00	0,00	(1.899.800,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	1.899.800,00	0,00	(1.899.800,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.899.800,00	0,00	(1.899.800,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.899.800,00	0,00	(1.899.800,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	1.383.176.284,00	1.014.329.244,00	(368.847.040,00)	73,33	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(523.176.284,00)	(279.556.264,00)	243.620.020,00	53,43	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(523.176.284,00)	(279.556.264,00)	243.620.020,00	53,43	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Padang Luar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4	PENDAPATAN DAERAH	1.886.932.200,00	1.816.736.265,00	(70.195.935,00)	96,27	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.886.932.200,00	1.816.736.265,00	(70.195.935,00)	96,27	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4.1.02	Retribusi Daerah	1.879.612.580,00	1.810.288.710,00	(69.323.870,00)	96,31	
	1.02.0.00.0.00.01.0015		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.319.620,00	6.447.555,00	(872.065,00)	88,08	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.886.932.200,00	1.816.736.265,00	(70.195.935,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		5	BELANJA DAERAH	2.864.317.416,00	2.107.738.157,00	(756.579.259,00)	73,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.211.477.416,00	1.611.410.671,00	(600.066.745,00)	72,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.211.477.416,00	1.611.410.671,00	(600.066.745,00)	72,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.211.477.416,00	1.611.410.671,00	(600.066.745,00)	72,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.956.832.416,00	1.491.979.211,00	(464.853.205,00)	76,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	961.582.448,00	872.154.223,00	(89.428.225,00)	90,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	995.249.968,00	619.824.988,00	(375.424.980,00)	62,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	254.645.000,00	119.431.460,00	(135.213.540,00)	46,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.645.000,00	119.431.460,00	(135.213.540,00)	46,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	628.430.000,00	481.410.686,00	(147.019.314,00)	76,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	628.430.000,00	481.410.686,00	(147.019.314,00)	76,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	33.600.000,00	17.938.300,00	(15.661.700,00)	53,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	17.938.300,00	(15.661.700,00)	53,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	17.938.300,00	(15.661.700,00)	53,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	38.050.000,00	35.400.000,00	(2.650.000,00)	93,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	38.050.000,00	35.400.000,00	(2.650.000,00)	93,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.050.000,00	35.400.000,00	(2.650.000,00)	93,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0007		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	10.800.000,00	10.650.000,00	(150.000,00)	98,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.650.000,00	(150.000,00)	98,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.650.000,00	(150.000,00)	98,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	15.000.000,00	8.450.000,00	(6.550.000,00)	56,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	8.450.000,00	(6.550.000,00)	56,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	8.450.000,00	(6.550.000,00)	56,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	27.400.000,00	21.650.000,00	(5.750.000,00)	79,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	27.400.000,00	21.650.000,00	(5.750.000,00)	79,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.400.000,00	21.650.000,00	(5.750.000,00)	79,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	151.590.000,00	140.057.500,00	(11.532.500,00)	92,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	151.590.000,00	140.057.500,00	(11.532.500,00)	92,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.590.000,00	140.057.500,00	(11.532.500,00)	92,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	1.500.000,00	1.100.000,00	(400.000,00)	73,33	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.100.000,00	(400.000,00)	73,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.100.000,00	(400.000,00)	73,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	28.000.000,00	16.650.000,00	(11.350.000,00)	59,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	16.650.000,00	(11.350.000,00)	59,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	16.650.000,00	(11.350.000,00)	59,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	12.800.000,00	9.350.000,00	(3.450.000,00)	73,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	9.350.000,00	(3.450.000,00)	73,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	9.350.000,00	(3.450.000,00)	73,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	21.400.000,00	2.800.000,00	(18.600.000,00)	13,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	21.400.000,00	2.800.000,00	(18.600.000,00)	13,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	2.800.000,00	(18.600.000,00)	13,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	74.220.000,00	54.425.700,00	(19.794.300,00)	73,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	74.220.000,00	54.425.700,00	(19.794.300,00)	73,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.220.000,00	54.425.700,00	(19.794.300,00)	73,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	140.270.000,00	114.639.186,00	(25.630.814,00)	81,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	140.270.000,00	114.639.186,00	(25.630.814,00)	81,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	68.510.000,00	66.527.416,00	(1.982.584,00)	97,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.760.000,00	48.111.770,00	(23.648.230,00)	67,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	71.100.000,00	46.600.000,00	(24.500.000,00)	65,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	71.100.000,00	46.600.000,00	(24.500.000,00)	65,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.100.000,00	46.600.000,00	(24.500.000,00)	65,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.410.000,00	14.916.800,00	(9.493.200,00)	61,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.410.000,00	14.916.800,00	(9.493.200,00)	61,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	24.410.000,00	14.916.800,00	(9.493.200,00)	61,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.410.000,00	14.916.800,00	(9.493.200,00)	61,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.410.000,00	14.916.800,00	(9.493.200,00)	61,10	
				JUMLAH BELANJA	2.864.317.416,00	2.107.738.157,00	(756.579.259,00)	73,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(977.385.216,00)	(291.001.892,00)	686.383.324,00	29,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(977.385.216,00)	(291.001.892,00)	686.383.324,00	29,77	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Sungai Pua

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4	PENDAPATAN DAERAH	1.933.757.573,00	1.846.454.461,00	(87.303.112,00)	95,48	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.933.757.573,00	1.846.454.461,00	(87.303.112,00)	95,48	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4.1.02	Retribusi Daerah	1.929.427.573,00	1.844.348.646,00	(85.078.927,00)	95,59	
	1.02.0.00.0.00.01.0016		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.330.000,00	2.105.815,00	(2.224.185,00)	48,63	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.933.757.573,00	1.846.454.461,00	(87.303.112,00)	95,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		5	BELANJA DAERAH	2.653.477.217,00	2.356.374.925,00	(297.102.292,00)	88,80	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.965.317.217,00	1.816.156.205,00	(149.161.012,00)	92,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.965.317.217,00	1.816.156.205,00	(149.161.012,00)	92,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.965.317.217,00	1.816.156.205,00	(149.161.012,00)	92,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.768.551.737,00	1.663.496.727,00	(105.055.010,00)	94,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	940.560.000,00	893.815.109,00	(46.744.891,00)	95,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.991.737,00	769.681.618,00	(58.310.119,00)	92,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	196.765.480,00	152.659.478,00	(44.106.002,00)	77,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.765.480,00	152.659.478,00	(44.106.002,00)	77,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	683.720.000,00	536.052.320,00	(147.667.680,00)	78,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	683.720.000,00	536.052.320,00	(147.667.680,00)	78,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	33.150.000,00	29.016.400,00	(4.133.600,00)	87,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.150.000,00	29.016.400,00	(4.133.600,00)	87,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.150.000,00	29.016.400,00	(4.133.600,00)	87,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	27.000.000,00	21.850.000,00	(5.150.000,00)	80,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	21.850.000,00	(5.150.000,00)	80,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	21.850.000,00	(5.150.000,00)	80,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	275.610.000,00	199.337.000,00	(76.273.000,00)	72,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	275.610.000,00	199.337.000,00	(76.273.000,00)	72,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.610.000,00	199.337.000,00	(76.273.000,00)	72,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	62,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	62,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	250.000,00	(150.000,00)	62,50	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	23.500.000,00	23.400.000,00	(100.000,00)	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	23.400.000,00	(100.000,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.400.000,00	(100.000,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	28.900.000,00	27.000.000,00	(1.900.000,00)	93,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	28.900.000,00	27.000.000,00	(1.900.000,00)	93,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00	27.000.000,00	(1.900.000,00)	93,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	115.350.000,00	94.081.600,00	(21.268.400,00)	81,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	115.350.000,00	94.081.600,00	(21.268.400,00)	81,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.350.000,00	94.081.600,00	(21.268.400,00)	81,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	158.960.000,00	123.505.620,00	(35.454.380,00)	77,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	158.960.000,00	123.505.620,00	(35.454.380,00)	77,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.960.000,00	51.505.620,00	(35.454.380,00)	59,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	1.950.000,00	1.461.700,00	(488.300,00)	74,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.461.700,00	(488.300,00)	74,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.461.700,00	(488.300,00)	74,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.450.000,00	200.000,00	(2.250.000,00)	8,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	200.000,00	(2.250.000,00)	8,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	200.000,00	(2.250.000,00)	8,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.440.000,00	4.166.400,00	(273.600,00)	93,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.440.000,00	4.166.400,00	(273.600,00)	93,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	4.440.000,00	4.166.400,00	(273.600,00)	93,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.440.000,00	4.166.400,00	(273.600,00)	93,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	4.166.400,00	(273.600,00)	93,83	
				JUMLAH BELANJA	2.653.477.217,00	2.356.374.925,00	(297.102.292,00)	88,80	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(719.719.644,00)	(509.920.464,00)	209.799.180,00	70,84	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(719.719.644,00)	(509.920.464,00)	209.799.180,00	70,84	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Lasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4	PENDAPATAN DAERAH	1.661.770.230,00	1.350.793.657,00	(310.976.573,00)	81,28	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.661.770.230,00	1.350.793.657,00	(310.976.573,00)	81,28	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4.1.02	Retribusi Daerah	1.655.770.230,00	1.347.500.847,00	(308.269.383,00)	81,38	
	1.02.0.00.0.00.01.0017		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000,00	3.292.810,00	(2.707.190,00)	54,88	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.661.770.230,00	1.350.793.657,00	(310.976.573,00)	81,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		5	BELANJA DAERAH	2.549.460.241,00	1.989.145.227,00	(560.315.014,00)	78,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.808.520.241,00	1.441.084.330,00	(367.435.911,00)	79,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.808.520.241,00	1.441.084.330,00	(367.435.911,00)	79,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.808.520.241,00	1.441.084.330,00	(367.435.911,00)	79,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.438.780.200,00	1.208.502.250,00	(230.277.950,00)	83,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	843.392.956,00	703.030.336,00	(140.362.620,00)	83,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	595.387.244,00	505.471.914,00	(89.915.330,00)	84,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	369.740.041,00	232.582.080,00	(137.157.961,00)	62,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	246.481.641,00	147.613.080,00	(98.868.561,00)	59,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	123.258.400,00	84.969.000,00	(38.289.400,00)	68,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	737.490.000,00	548.060.897,00	(189.429.103,00)	74,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	737.490.000,00	548.060.897,00	(189.429.103,00)	74,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	40.000.000,00	31.808.000,00	(8.192.000,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	31.808.000,00	(8.192.000,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	31.808.000,00	(8.192.000,00)	79,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	45.400.000,00	16.950.000,00	(28.450.000,00)	37,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	45.400.000,00	16.950.000,00	(28.450.000,00)	37,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	16.950.000,00	(28.450.000,00)	37,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	12.700.000,00	2.200.000,00	(10.500.000,00)	17,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	12.700.000,00	2.200.000,00	(10.500.000,00)	17,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	2.200.000,00	(10.500.000,00)	17,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	20.350.000,00	6.350.000,00	(14.000.000,00)	31,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.350.000,00	6.350.000,00	(14.000.000,00)	31,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.350.000,00	6.350.000,00	(14.000.000,00)	31,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	269.040.000,00	233.340.700,00	(35.699.300,00)	86,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	269.040.000,00	233.340.700,00	(35.699.300,00)	86,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.040.000,00	233.340.700,00	(35.699.300,00)	86,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	50,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	8.400.000,00	7.700.000,00	(700.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	7.700.000,00	(700.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	7.700.000,00	(700.000,00)	91,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	7.100.000,00	2.050.000,00	(5.050.000,00)	28,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	7.100.000,00	2.050.000,00	(5.050.000,00)	28,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	2.050.000,00	(5.050.000,00)	28,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	21.600.000,00	5.800.000,00	(15.800.000,00)	26,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	5.800.000,00	(15.800.000,00)	26,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	5.800.000,00	(15.800.000,00)	26,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	142.550.000,00	100.942.500,00	(41.607.500,00)	70,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	142.550.000,00	100.942.500,00	(41.607.500,00)	70,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.550.000,00	100.942.500,00	(41.607.500,00)	70,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	159.850.000,00	137.519.697,00	(22.330.303,00)	86,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	159.850.000,00	137.519.697,00	(22.330.303,00)	86,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	80.000.000,00	77.656.697,00	(2.343.303,00)	97,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.850.000,00	59.863.000,00	(19.987.000,00)	74,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	1.700.000,00	(500.000,00)	77,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	900.000,00	100.000,00	(800.000,00)	11,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	100.000,00	(800.000,00)	11,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	100.000,00	(800.000,00)	11,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	0,00	(3.450.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	2.549.460.241,00	1.989.145.227,00	(560.315.014,00)	78,02	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(887.690.011,00)	(638.351.570,00)	249.338.441,00	71,91	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(887.690.011,00)	(638.351.570,00)	249.338.441,00	71,91	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas biaro

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4	PENDAPATAN DAERAH	2.679.480.294,00	2.660.548.454,00	(18.931.840,00)	99,29	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.679.480.294,00	2.660.548.454,00	(18.931.840,00)	99,29	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4.1.02	Retribusi Daerah	2.674.986.399,00	2.654.450.831,00	(20.535.568,00)	99,23	
	1.02.0.00.0.00.01.0018		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.493.895,00	6.097.623,00	1.603.728,00	135,68	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.679.480.294,00	2.660.548.454,00	(18.931.840,00)	99,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		5	BELANJA DAERAH	3.749.316.080,00	3.580.165.698,00	(169.150.382,00)	95,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.050.416.080,00	2.985.812.354,00	(64.603.726,00)	97,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	3.050.416.080,00	2.985.812.354,00	(64.603.726,00)	97,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	3.050.416.080,00	2.985.812.354,00	(64.603.726,00)	97,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.680.123.891,00	2.625.154.927,00	(54.968.964,00)	97,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.687.549.274,00	1.681.686.656,00	(5.862.618,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.574.617,00	943.468.271,00	(49.106.346,00)	95,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	370.292.189,00	360.657.427,00	(9.634.762,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.292.189,00	360.657.427,00	(9.634.762,00)	97,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	689.800.000,00	587.717.844,00	(102.082.156,00)	85,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	689.800.000,00	587.717.844,00	(102.082.156,00)	85,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	29.750.000,00	29.405.000,00	(345.000,00)	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.750.000,00	29.405.000,00	(345.000,00)	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.750.000,00	29.405.000,00	(345.000,00)	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	35.950.000,00	25.950.000,00	(10.000.000,00)	72,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.950.000,00	25.950.000,00	(10.000.000,00)	72,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.950.000,00	25.950.000,00	(10.000.000,00)	72,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	12.600.000,00	7.350.000,00	(5.250.000,00)	58,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	7.350.000,00	(5.250.000,00)	58,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	7.350.000,00	(5.250.000,00)	58,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	286.600.000,00	268.674.100,00	(17.925.900,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	286.600.000,00	268.674.100,00	(17.925.900,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.600.000,00	268.674.100,00	(17.925.900,00)	93,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	5.600.000,00	800.000,00	(4.800.000,00)	14,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	800.000,00	(4.800.000,00)	14,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	800.000,00	(4.800.000,00)	14,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	13.250.000,00	9.500.000,00	(3.750.000,00)	71,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	13.250.000,00	9.500.000,00	(3.750.000,00)	71,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	9.500.000,00	(3.750.000,00)	71,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	28.450.000,00	14.730.000,00	(13.720.000,00)	51,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	28.450.000,00	14.730.000,00	(13.720.000,00)	51,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	14.730.000,00	(13.720.000,00)	51,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	7.300.000,00	4.700.000,00	(2.600.000,00)	64,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	4.700.000,00	(2.600.000,00)	64,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	4.700.000,00	(2.600.000,00)	64,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	106.000.000,00	84.781.900,00	(21.218.100,00)	79,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	106.000.000,00	84.781.900,00	(21.218.100,00)	79,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.000.000,00	84.781.900,00	(21.218.100,00)	79,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	140.000.000,00	122.176.844,00	(17.823.156,00)	87,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	122.176.844,00	(17.823.156,00)	87,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	77.000.000,00	76.323.752,00	(676.248,00)	99,12	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	45.853.092,00	(17.146.908,00)	72,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	9,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	9,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	9,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	14.600.000,00	14.550.000,00	(50.000,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	14.600.000,00	14.550.000,00	(50.000,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	14.550.000,00	(50.000,00)	99,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.100.000,00	6.635.500,00	(2.464.500,00)	72,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.100.000,00	6.635.500,00	(2.464.500,00)	72,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	9.100.000,00	6.635.500,00	(2.464.500,00)	72,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	6.635.500,00	(2.464.500,00)	72,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	6.635.500,00	(2.464.500,00)	72,91	
				JUMLAH BELANJA	3.749.316.080,00	3.580.165.698,00	(169.150.382,00)	95,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.069.835.786,00)	(919.617.244,00)	150.218.542,00	85,95	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.069.835.786,00)	(919.617.244,00)	150.218.542,00	85,95	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Baso

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4	PENDAPATAN DAERAH	2.017.000.000,00	1.814.739.835,00	(202.260.165,00)	89,97	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.017.000.000,00	1.814.739.835,00	(202.260.165,00)	89,97	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4.1.02	Retribusi Daerah	2.002.000.000,00	1.807.821.562,00	(194.178.438,00)	90,30	
	1.02.0.00.0.00.01.0019		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.000.000,00	6.918.273,00	(8.081.727,00)	46,12	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.017.000.000,00	1.814.739.835,00	(202.260.165,00)	89,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		5	BELANJA DAERAH	3.189.203.358,00	2.396.933.166,00	(792.270.192,00)	75,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.492.383.358,00	1.942.624.638,00	(549.758.720,00)	77,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.492.383.358,00	1.942.624.638,00	(549.758.720,00)	77,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.492.383.358,00	1.942.624.638,00	(549.758.720,00)	77,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.092.383.358,00	1.646.664.153,00	(445.719.205,00)	78,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.253.215.854,00	897.371.549,00	(355.844.305,00)	71,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.167.504,00	749.292.604,00	(89.874.900,00)	89,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	400.000.000,00	295.960.485,00	(104.039.515,00)	73,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	295.960.485,00	(104.039.515,00)	73,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	691.100.000,00	454.308.528,00	(236.791.472,00)	65,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	691.100.000,00	454.308.528,00	(236.791.472,00)	65,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	42.600.000,00	33.719.650,00	(8.880.350,00)	79,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.600.000,00	33.719.650,00	(8.880.350,00)	79,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	33.719.650,00	(8.880.350,00)	79,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	53.350.000,00	29.050.000,00	(24.300.000,00)	54,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	53.350.000,00	29.050.000,00	(24.300.000,00)	54,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.350.000,00	29.050.000,00	(24.300.000,00)	54,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	9.000.000,00	5.900.000,00	(3.100.000,00)	65,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	5.900.000,00	(3.100.000,00)	65,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	5.900.000,00	(3.100.000,00)	65,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	20.800.000,00	9.400.000,00	(11.400.000,00)	45,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.800.000,00	9.400.000,00	(11.400.000,00)	45,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	9.400.000,00	(11.400.000,00)	45,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	179.920.000,00	109.041.100,00	(70.878.900,00)	60,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	179.920.000,00	109.041.100,00	(70.878.900,00)	60,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.920.000,00	109.041.100,00	(70.878.900,00)	60,60	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	9.400.000,00	6.050.000,00	(3.350.000,00)	64,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	9.400.000,00	6.050.000,00	(3.350.000,00)	64,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	6.050.000,00	(3.350.000,00)	64,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	8.600.000,00	7.050.000,00	(1.550.000,00)	81,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	7.050.000,00	(1.550.000,00)	81,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	7.050.000,00	(1.550.000,00)	81,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	29.300.000,00	8.550.000,00	(20.750.000,00)	29,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	29.300.000,00	8.550.000,00	(20.750.000,00)	29,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.300.000,00	8.550.000,00	(20.750.000,00)	29,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	16,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	16,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	1.200.000,00	(6.000.000,00)	16,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	118.300.000,00	91.718.500,00	(26.581.500,00)	77,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	118.300.000,00	91.718.500,00	(26.581.500,00)	77,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.300.000,00	91.718.500,00	(26.581.500,00)	77,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	157.980.000,00	132.609.278,00	(25.370.722,00)	83,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	157.980.000,00	132.609.278,00	(25.370.722,00)	83,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	75.000.000,00	72.286.428,00	(2.713.572,00)	96,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.980.000,00	60.322.850,00	(22.657.150,00)	72,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	2.000.000,00	700.000,00	(1.300.000,00)	35,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	700.000,00	(1.300.000,00)	35,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	700.000,00	(1.300.000,00)	35,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	10.300.000,00	5.720.000,00	(4.580.000,00)	55,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	10.300.000,00	5.720.000,00	(4.580.000,00)	55,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	5.720.000,00	(4.580.000,00)	55,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	45,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	39.600.000,00	12.350.000,00	(27.250.000,00)	31,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	39.600.000,00	12.350.000,00	(27.250.000,00)	31,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	12.350.000,00	(27.250.000,00)	31,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	0,00	(5.720.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	3.189.203.358,00	2.396.933.166,00	(792.270.192,00)	75,15	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.172.203.358,00)	(582.193.331,00)	590.010.027,00	49,66	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.172.203.358,00)	(582.193.331,00)	590.010.027,00	49,66	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Padang Tarok

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4	PENDAPATAN DAERAH	855.581.000,00	814.061.447,00	(41.519.553,00)	95,14	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	855.581.000,00	814.061.447,00	(41.519.553,00)	95,14	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4.1.02	Retribusi Daerah	850.981.000,00	810.536.015,00	(40.444.985,00)	95,24	
	1.02.0.00.0.00.01.0020		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.600.000,00	3.525.432,00	(1.074.568,00)	76,63	
				JUMLAH PENDAPATAN	855.581.000,00	814.061.447,00	(41.519.553,00)	95,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		5	BELANJA DAERAH	1.664.589.701,00	1.227.658.377,00	(436.931.324,00)	73,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.095.339.701,00	832.164.269,00	(263.175.432,00)	75,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.095.339.701,00	832.164.269,00	(263.175.432,00)	75,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.095.339.701,00	832.164.269,00	(263.175.432,00)	75,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	946.502.201,00	736.741.869,00	(209.760.332,00)	77,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	424.951.101,00	324.558.737,00	(100.392.364,00)	76,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	521.551.100,00	412.183.132,00	(109.367.968,00)	79,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	148.837.500,00	95.422.400,00	(53.415.100,00)	64,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	148.837.500,00	95.422.400,00	(53.415.100,00)	64,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	566.325.000,00	395.494.108,00	(170.830.892,00)	69,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	566.325.000,00	395.494.108,00	(170.830.892,00)	69,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	25.000.000,00	24.460.000,00	(540.000,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.460.000,00	(540.000,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.460.000,00	(540.000,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	27.600.000,00	20.150.000,00	(7.450.000,00)	73,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	20.150.000,00	(7.450.000,00)	73,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	20.150.000,00	(7.450.000,00)	73,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	20.200.000,00	12.750.000,00	(7.450.000,00)	63,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	12.750.000,00	(7.450.000,00)	63,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	12.750.000,00	(7.450.000,00)	63,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	191.550.000,00	120.250.000,00	(71.300.000,00)	62,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	191.550.000,00	120.250.000,00	(71.300.000,00)	62,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.550.000,00	120.250.000,00	(71.300.000,00)	62,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	6.150.000,00	5.450.000,00	(700.000,00)	88,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.150.000,00	5.450.000,00	(700.000,00)	88,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	5.450.000,00	(700.000,00)	88,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	10.900.000,00	9.500.000,00	(1.400.000,00)	87,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	10.900.000,00	9.500.000,00	(1.400.000,00)	87,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	9.500.000,00	(1.400.000,00)	87,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	22.650.000,00	9.100.000,00	(13.550.000,00)	40,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	22.650.000,00	9.100.000,00	(13.550.000,00)	40,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	9.100.000,00	(13.550.000,00)	40,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	5.800.000,00	4.500.000,00	(1.300.000,00)	77,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	4.500.000,00	(1.300.000,00)	77,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	4.500.000,00	(1.300.000,00)	77,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	89.450.000,00	57.704.600,00	(31.745.400,00)	64,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	89.450.000,00	57.704.600,00	(31.745.400,00)	64,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.450.000,00	57.704.600,00	(31.745.400,00)	64,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	128.975.000,00	99.079.508,00	(29.895.492,00)	76,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	128.975.000,00	99.079.508,00	(29.895.492,00)	76,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	71.700.000,00	69.051.608,00	(2.648.392,00)	96,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.275.000,00	30.027.900,00	(27.247.100,00)	52,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	12.700.000,00	8.350.000,00	(4.350.000,00)	65,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	12.700.000,00	8.350.000,00	(4.350.000,00)	65,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	8.350.000,00	(4.350.000,00)	65,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	200.000,00	(800.000,00)	20,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	7.700.000,00	7.350.000,00	(350.000,00)	95,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	7.700.000,00	7.350.000,00	(350.000,00)	95,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.350.000,00	(350.000,00)	95,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	0,00	(2.925.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	1.664.589.701,00	1.227.658.377,00	(436.931.324,00)	73,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(809.008.701,00)	(413.596.930,00)	395.411.771,00	51,12	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(809.008.701,00)	(413.596.930,00)	395.411.771,00	51,12	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Magek

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0021		4	PENDAPATAN DAERAH	1.557.960.641,00	1.318.917.752,00	(239.042.889,00)	84,65	
	1.02.0.00.0.00.01.0021		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.557.960.641,00	1.318.917.752,00	(239.042.889,00)	84,65	
	1.02.0.00.0.00.01.0021		4.1.02	Retribusi Daerah	1.551.339.125,00	1.312.868.768,00	(238.470.357,00)	84,62	
	1.02.0.00.0.00.01.0021		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.621.516,00	6.048.984,00	(572.532,00)	91,35	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.557.960.641,00	1.318.917.752,00	(239.042.889,00)	84,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		5	BELANJA DAERAH	2.581.391.112,00	1.787.217.355,00	(794.173.757,00)	69,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.988.311.112,00	1.345.727.576,00	(642.583.536,00)	67,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.988.311.112,00	1.345.727.576,00	(642.583.536,00)	67,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.988.311.112,00	1.345.727.576,00	(642.583.536,00)	67,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.749.334.837,00	1.152.494.280,00	(596.840.557,00)	65,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	955.479.539,00	676.656.553,00	(278.822.986,00)	70,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	793.855.298,00	475.837.727,00	(318.017.571,00)	59,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	238.976.275,00	193.233.296,00	(45.742.979,00)	80,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.976.275,00	193.233.296,00	(45.742.979,00)	80,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	589.125.000,00	441.239.779,00	(147.885.221,00)	74,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	589.125.000,00	441.239.779,00	(147.885.221,00)	74,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	47.260.000,00	38.586.800,00	(8.673.200,00)	81,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.260.000,00	38.586.800,00	(8.673.200,00)	81,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.260.000,00	38.586.800,00	(8.673.200,00)	81,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	28.400.000,00	20.150.000,00	(8.250.000,00)	70,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.400.000,00	20.150.000,00	(8.250.000,00)	70,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.400.000,00	20.150.000,00	(8.250.000,00)	70,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	8.300.000,00	3.600.000,00	(4.700.000,00)	43,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.300.000,00	3.600.000,00	(4.700.000,00)	43,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	3.600.000,00	(4.700.000,00)	43,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	145.380.000,00	112.830.000,00	(32.550.000,00)	77,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	145.380.000,00	112.830.000,00	(32.550.000,00)	77,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.380.000,00	112.830.000,00	(32.550.000,00)	77,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	0,00	(750.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	8.400.000,00	6.000.000,00	(2.400.000,00)	71,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	6.000.000,00	(2.400.000,00)	71,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	6.000.000,00	(2.400.000,00)	71,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	24.700.000,00	14.250.000,00	(10.450.000,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	24.700.000,00	14.250.000,00	(10.450.000,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	14.250.000,00	(10.450.000,00)	57,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	101.800.000,00	63.643.650,00	(38.156.350,00)	62,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	101.800.000,00	63.643.650,00	(38.156.350,00)	62,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.800.000,00	63.643.650,00	(38.156.350,00)	62,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	126.745.000,00	106.829.329,00	(19.915.671,00)	84,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	126.745.000,00	106.829.329,00	(19.915.671,00)	84,28	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	66.186.239,00	66.167.529,00	(18.710,00)	99,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.558.761,00	40.661.800,00	(19.896.961,00)	67,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	83.290.000,00	61.250.000,00	(22.040.000,00)	73,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	83.290.000,00	61.250.000,00	(22.040.000,00)	73,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.290.000,00	61.250.000,00	(22.040.000,00)	73,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.955.000,00	250.000,00	(3.705.000,00)	6,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.955.000,00	250.000,00	(3.705.000,00)	6,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	3.955.000,00	250.000,00	(3.705.000,00)	6,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.955.000,00	250.000,00	(3.705.000,00)	6,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.955.000,00	250.000,00	(3.705.000,00)	6,32	
				JUMLAH BELANJA	2.581.391.112,00	1.787.217.355,00	(794.173.757,00)	69,23	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.023.430.471,00)	(468.299.603,00)	555.130.868,00	45,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.023.430.471,00)	(468.299.603,00)	555.130.868,00	45,75	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Pakan Kamis

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0022		4	PENDAPATAN DAERAH	2.086.939.809,00	1.758.710.127,00	(328.229.682,00)	84,27	
	1.02.0.00.0.00.01.0022		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.086.939.809,00	1.758.710.127,00	(328.229.682,00)	84,27	
	1.02.0.00.0.00.01.0022		4.1.02	Retribusi Daerah	2.078.267.000,00	1.751.686.447,00	(326.580.553,00)	84,28	
	1.02.0.00.0.00.01.0022		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.672.809,00	7.023.680,00	(1.649.129,00)	80,98	
				JUMLAH PENDAPATAN	2.086.939.809,00	1.758.710.127,00	(328.229.682,00)	84,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		5	BELANJA DAERAH	3.251.604.665,00	2.241.967.590,00	(1.009.637.075,00)	68,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.549.664.665,00	1.762.626.108,00	(787.038.557,00)	69,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	2.549.664.665,00	1.762.626.108,00	(787.038.557,00)	69,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	2.549.664.665,00	1.762.626.108,00	(787.038.557,00)	69,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.357.061.665,00	1.596.713.929,00	(760.347.736,00)	67,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.052.138.245,00	878.321.227,00	(173.817.018,00)	83,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.304.923.420,00	718.392.702,00	(586.530.718,00)	55,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	192.603.000,00	165.912.179,00	(26.690.821,00)	86,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.603.000,00	165.912.179,00	(26.690.821,00)	86,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	695.360.000,00	473.835.882,00	(221.524.118,00)	68,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	695.360.000,00	473.835.882,00	(221.524.118,00)	68,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	12.200.000,00	11.869.800,00	(330.200,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.200.000,00	11.869.800,00	(330.200,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	11.869.800,00	(330.200,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	59.850.000,00	50.800.000,00	(9.050.000,00)	84,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.850.000,00	50.800.000,00	(9.050.000,00)	84,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.850.000,00	50.800.000,00	(9.050.000,00)	84,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	40.200.000,00	29.000.000,00	(11.200.000,00)	72,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	40.200.000,00	29.000.000,00	(11.200.000,00)	72,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	29.000.000,00	(11.200.000,00)	72,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	19.300.000,00	16.600.000,00	(2.700.000,00)	86,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.300.000,00	16.600.000,00	(2.700.000,00)	86,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	16.600.000,00	(2.700.000,00)	86,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	214.640.000,00	152.841.500,00	(61.798.500,00)	71,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	214.640.000,00	152.841.500,00	(61.798.500,00)	71,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.640.000,00	152.841.500,00	(61.798.500,00)	71,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	6.750.000,00	5.250.000,00	(1.500.000,00)	77,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	6.750.000,00	5.250.000,00	(1.500.000,00)	77,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	5.250.000,00	(1.500.000,00)	77,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	28.800.000,00	18.700.000,00	(10.100.000,00)	64,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	18.700.000,00	(10.100.000,00)	64,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	18.700.000,00	(10.100.000,00)	64,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	20.300.000,00	8.650.000,00	(11.650.000,00)	42,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	20.300.000,00	8.650.000,00	(11.650.000,00)	42,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	8.650.000,00	(11.650.000,00)	42,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	13.600.000,00	3.050.000,00	(10.550.000,00)	22,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	3.050.000,00	(10.550.000,00)	22,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	3.050.000,00	(10.550.000,00)	22,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	110.200.000,00	44.550.000,00	(65.650.000,00)	40,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	110.200.000,00	44.550.000,00	(65.650.000,00)	40,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.200.000,00	44.550.000,00	(65.650.000,00)	40,42	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	158.720.000,00	123.828.582,00	(34.891.418,00)	78,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	158.720.000,00	123.828.582,00	(34.891.418,00)	78,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	88.400.000,00	85.185.440,00	(3.214.560,00)	96,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.320.000,00	38.643.142,00	(31.676.858,00)	54,95	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	0,00	(400.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	2.500.000,00	2.446.000,00	(54.000,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.446.000,00	(54.000,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.446.000,00	(54.000,00)	97,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.900.000,00	250.000,00	(1.650.000,00)	13,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	250.000,00	(1.650.000,00)	13,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	250.000,00	(1.650.000,00)	13,15	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.580.000,00	5.505.600,00	(1.074.400,00)	83,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.580.000,00	5.505.600,00	(1.074.400,00)	83,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	6.580.000,00	5.505.600,00	(1.074.400,00)	83,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.580.000,00	5.505.600,00	(1.074.400,00)	83,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	5.505.600,00	(1.074.400,00)	83,67	
				JUMLAH BELANJA	3.251.604.665,00	2.241.967.590,00	(1.009.637.075,00)	68,94	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.164.664.856,00)	(483.257.463,00)	681.407.393,00	41,49	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.164.664.856,00)	(483.257.463,00)	681.407.393,00	41,49	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Kapau

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0023		4	PENDAPATAN DAERAH	739.996.987,00	678.124.205,00	(61.872.782,00)	91,63	
	1.02.0.00.0.00.01.0023		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	739.996.987,00	678.124.205,00	(61.872.782,00)	91,63	
	1.02.0.00.0.00.01.0023		4.1.02	Retribusi Daerah	736.732.052,00	677.142.925,00	(59.589.127,00)	91,91	
	1.02.0.00.0.00.01.0023		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.264.935,00	981.280,00	(2.283.655,00)	30,05	
				JUMLAH PENDAPATAN	739.996.987,00	678.124.205,00	(61.872.782,00)	91,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		5	BELANJA DAERAH	1.393.353.349,00	1.256.036.401,00	(137.316.948,00)	90,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	845.308.349,00	771.705.000,00	(73.603.349,00)	91,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	845.308.349,00	771.705.000,00	(73.603.349,00)	91,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	845.308.349,00	771.705.000,00	(73.603.349,00)	91,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	640.056.987,00	573.121.986,00	(66.935.001,00)	89,54	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	285.237.538,00	280.287.321,00	(4.950.217,00)	98,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.819.449,00	292.834.665,00	(61.984.784,00)	82,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	205.251.362,00	198.583.014,00	(6.668.348,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.251.362,00	198.583.014,00	(6.668.348,00)	96,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	544.084.000,00	481.291.401,00	(62.792.599,00)	88,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	544.084.000,00	481.291.401,00	(62.792.599,00)	88,45	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	40.600.000,00	40.250.000,00	(350.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.600.000,00	40.250.000,00	(350.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.600.000,00	40.250.000,00	(350.000,00)	99,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	44.100.000,00	42.300.000,00	(1.800.000,00)	95,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.100.000,00	42.300.000,00	(1.800.000,00)	95,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.100.000,00	42.300.000,00	(1.800.000,00)	95,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	83,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	16.100.000,00	11.950.000,00	(4.150.000,00)	74,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	16.100.000,00	11.950.000,00	(4.150.000,00)	74,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	11.950.000,00	(4.150.000,00)	74,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	149.560.000,00	123.627.500,00	(25.932.500,00)	82,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	149.560.000,00	123.627.500,00	(25.932.500,00)	82,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.560.000,00	123.627.500,00	(25.932.500,00)	82,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	8.600.000,00	8.200.000,00	(400.000,00)	95,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	8.600.000,00	8.200.000,00	(400.000,00)	95,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.200.000,00	(400.000,00)	95,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	27.200.000,00	25.200.000,00	(2.000.000,00)	92,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	27.200.000,00	25.200.000,00	(2.000.000,00)	92,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.200.000,00	25.200.000,00	(2.000.000,00)	92,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	18.000.000,00	7.300.000,00	(10.700.000,00)	40,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	7.300.000,00	(10.700.000,00)	40,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	7.300.000,00	(10.700.000,00)	40,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	81.064.000,00	70.587.000,00	(10.477.000,00)	87,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	81.064.000,00	70.587.000,00	(10.477.000,00)	87,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.064.000,00	70.587.000,00	(10.477.000,00)	87,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	127.560.000,00	121.976.901,00	(5.583.099,00)	95,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	127.560.000,00	121.976.901,00	(5.583.099,00)	95,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	71.700.000,00	71.573.551,00	(126.449,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.860.000,00	50.403.350,00	(5.456.650,00)	90,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	0,00	(200.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	8.800.000,00	8.700.000,00	(100.000,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	8.800.000,00	8.700.000,00	(100.000,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	8.700.000,00	(100.000,00)	98,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	50,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.961.000,00	3.040.000,00	(921.000,00)	76,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.961.000,00	3.040.000,00	(921.000,00)	76,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	3.961.000,00	3.040.000,00	(921.000,00)	76,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.961.000,00	3.040.000,00	(921.000,00)	76,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.961.000,00	3.040.000,00	(921.000,00)	76,74	
				JUMLAH BELANJA	1.393.353.349,00	1.256.036.401,00	(137.316.948,00)	90,14	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(653.356.362,00)	(577.912.196,00)	75.444.166,00	88,45	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(653.356.362,00)	(577.912.196,00)	75.444.166,00	88,45	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Puskesmas Palupuh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0024		4	PENDAPATAN DAERAH	1.320.000.000,00	1.292.804.589,00	(27.195.411,00)	97,93	
	1.02.0.00.0.00.01.0024		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.320.000.000,00	1.292.804.589,00	(27.195.411,00)	97,93	
	1.02.0.00.0.00.01.0024		4.1.02	Retribusi Daerah	1.316.800.000,00	1.289.571.653,00	(27.228.347,00)	97,93	
	1.02.0.00.0.00.01.0024		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.200.000,00	3.232.936,00	32.936,00	101,02	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.320.000.000,00	1.292.804.589,00	(27.195.411,00)	97,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		5	BELANJA DAERAH	2.041.068.980,00	1.823.631.736,00	(217.437.244,00)	89,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.500.663.980,00	1.313.891.085,00	(186.772.895,00)	87,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	1.500.663.980,00	1.313.891.085,00	(186.772.895,00)	87,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	1.500.663.980,00	1.313.891.085,00	(186.772.895,00)	87,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.410.663.980,00	1.226.257.087,00	(184.406.893,00)	86,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	705.000.000,00	693.069.574,00	(11.930.426,00)	98,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.663.980,00	533.187.513,00	(172.476.467,00)	75,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	90.000.000,00	87.633.998,00	(2.366.002,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	87.633.998,00	(2.366.002,00)	97,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	540.105.000,00	509.440.651,00	(30.664.349,00)	94,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	540.105.000,00	509.440.651,00	(30.664.349,00)	94,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	42.600.000,00	42.302.500,00	(297.500,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.600.000,00	42.302.500,00	(297.500,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	42.302.500,00	(297.500,00)	99,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0010		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT	46.800.000,00	41.550.000,00	(5.250.000,00)	88,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	46.800.000,00	41.550.000,00	(5.250.000,00)	88,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	41.550.000,00	(5.250.000,00)	88,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	117.700.000,00	116.103.250,00	(1.596.750,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	117.700.000,00	116.103.250,00	(1.596.750,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.700.000,00	116.103.250,00	(1.596.750,00)	98,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0016		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA	4.100.000,00	3.000.000,00	(1.100.000,00)	73,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	3.000.000,00	(1.100.000,00)	73,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	3.000.000,00	(1.100.000,00)	73,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	8.700.000,00	7.600.000,00	(1.100.000,00)	87,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	8.700.000,00	7.600.000,00	(1.100.000,00)	87,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	7.600.000,00	(1.100.000,00)	87,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0021		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	7.000.000,00	5.650.000,00	(1.350.000,00)	80,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0021	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.650.000,00	(1.350.000,00)	80,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.650.000,00	(1.350.000,00)	80,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	120.008.000,00	112.903.000,00	(7.105.000,00)	94,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	120.008.000,00	112.903.000,00	(7.105.000,00)	94,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.008.000,00	112.903.000,00	(7.105.000,00)	94,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	130.769.000,00	119.959.901,00	(10.809.099,00)	91,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	130.769.000,00	119.959.901,00	(10.809.099,00)	91,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	67.430.000,00	66.811.255,00	(618.745,00)	99,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.339.000,00	53.148.646,00	(10.190.354,00)	83,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	192.000,00	0,00	(192.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	192.000,00	0,00	(192.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.000,00	0,00	(192.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	6.036.000,00	5.972.000,00	(64.000,00)	98,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	6.036.000,00	5.972.000,00	(64.000,00)	98,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.036.000,00	5.972.000,00	(64.000,00)	98,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.200.000,00	400.000,00	(1.800.000,00)	18,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	2.200.000,00	400.000,00	(1.800.000,00)	18,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	400.000,00	(1.800.000,00)	18,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0047		PENGELOLAAN PELAYANAN KELANJUTUSIAAN	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0047	5.1	BELANJA OPERASI	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.041.068.980,00	1.823.631.736,00	(217.437.244,00)	89,34	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(721.068.980,00)	(530.827.147,00)	190.241.833,00	73,61	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(721.068.980,00)	(530.827.147,00)	190.241.833,00	73,61	

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.5.05.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	470.000.000,00	550.021.910,00	80.021.910,00	117,02	
	1.03.5.05.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	470.000.000,00	550.021.910,00	80.021.910,00	117,02	
	1.03.5.05.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	470.000.000,00	550.021.910,00	80.021.910,00	117,02	
				JUMLAH PENDAPATAN	470.000.000,00	550.021.910,00	80.021.910,00	117,02	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	49.911.098.751,82	44.243.324.037,00	(5.667.774.714,82)	88,64	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.204.800.098,91	8.470.406.329,00	(734.393.769,91)	92,02	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.256.819.542,04	6.844.342.432,00	(412.477.110,04)	94,31	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.968.749.542,04	6.579.328.432,00	(389.421.110,04)	94,41	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.968.749.542,04	6.579.328.432,00	(389.421.110,04)	94,41	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.968.749.542,04	6.579.328.432,00	(389.421.110,04)	94,41	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	288.070.000,00	265.014.000,00	(23.056.000,00)	91,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	288.070.000,00	265.014.000,00	(23.056.000,00)	91,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.070.000,00	265.014.000,00	(23.056.000,00)	91,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	318.688.868,47	312.872.153,00	(5.816.715,47)	98,17	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	87.834.312,47	87.833.841,00	(471,47)	99,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	87.834.312,47	87.833.841,00	(471,47)	99,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.834.312,47	87.833.841,00	(471,47)	99,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.642.556,00	25.373.460,00	(269.096,00)	98,95	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.642.556,00	25.373.460,00	(269.096,00)	98,95	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.642.556,00	25.373.460,00	(269.096,00)	98,95	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	205.212.000,00	199.664.852,00	(5.547.148,00)	97,29	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	205.212.000,00	199.664.852,00	(5.547.148,00)	97,29	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.212.000,00	199.664.852,00	(5.547.148,00)	97,29	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	62.615.960,00	58.474.898,00	(4.141.062,00)	93,38	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	62.615.960,00	58.474.898,00	(4.141.062,00)	93,38	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	62.615.960,00	58.474.898,00	(4.141.062,00)	93,38	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.615.960,00	58.474.898,00	(4.141.062,00)	93,38	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.164.339.690,00	858.190.698,00	(306.148.992,00)	73,70	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	209.009.690,00	145.739.930,00	(63.269.760,00)	69,72	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	209.009.690,00	145.739.930,00	(63.269.760,00)	69,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.009.690,00	145.739.930,00	(63.269.760,00)	69,72	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	955.330.000,00	712.450.768,00	(242.879.232,00)	74,57	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	955.330.000,00	712.450.768,00	(242.879.232,00)	74,57	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.330.000,00	712.450.768,00	(242.879.232,00)	74,57	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	402.336.038,40	396.526.148,00	(5.809.890,40)	98,55	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	356.082.970,00	350.276.802,00	(5.806.168,00)	98,36	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	356.082.970,00	350.276.802,00	(5.806.168,00)	98,36	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.082.970,00	350.276.802,00	(5.806.168,00)	98,36	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	22.602.000,00	22.602.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.602.000,00	22.602.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.602.000,00	22.602.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	23.651.068,40	23.647.346,00	(3.722,40)	99,98	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.651.068,40	23.647.346,00	(3.722,40)	99,98	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.651.068,40	23.647.346,00	(3.722,40)	99,98	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.379.591.850,00	2.220.195.498,00	(159.396.352,00)	93,30	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	165.478.750,00	139.511.060,00	(25.967.690,00)	84,30	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093		NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI	165.478.750,00	139.511.060,00	(25.967.690,00)	84,30	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1	BELANJA OPERASI	165.478.750,00	139.511.060,00	(25.967.690,00)	84,30	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.478.750,00	139.511.060,00	(25.967.690,00)	84,30	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.214.113.100,00	2.080.684.438,00	(133.428.662,00)	93,97	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	2.214.113.100,00	2.080.684.438,00	(133.428.662,00)	93,97	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.014.113.100,00	882.648.438,00	(131.464.662,00)	87,03	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.014.113.100,00	882.648.438,00	(131.464.662,00)	87,03	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.200.000.000,00	1.198.036.000,00	(1.964.000,00)	99,83	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.200.000.000,00	1.198.036.000,00	(1.964.000,00)	99,83	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.313.008.488,00	7.198.003.880,00	(115.004.608,00)	98,42	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.313.008.488,00	7.198.003.880,00	(115.004.608,00)	98,42	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0021		PENINGKATAN INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT)	153.385.488,00	108.499.730,00	(44.885.758,00)	70,73	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	153.385.488,00	108.499.730,00	(44.885.758,00)	70,73	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.385.488,00	108.499.730,00	(44.885.758,00)	70,73	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0025		PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERKOTAAN	7.159.623.000,00	7.089.504.150,00	(70.118.850,00)	99,02	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	7.159.623.000,00	7.089.504.150,00	(70.118.850,00)	99,02	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.159.623.000,00	7.089.504.150,00	(70.118.850,00)	99,02	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	12.807.263.476,91	11.621.074.761,00	(1.186.188.715,91)	90,73	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	12.807.263.476,91	11.621.074.761,00	(1.186.188.715,91)	90,73	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015		IDENTIFIKASI, PENETAPAN, PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA YANG DILESTARIKAN UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.807.263.476,91	11.621.074.761,00	(1.186.188.715,91)	90,73	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	8.923.864.187,01	7.887.872.143,00	(1.035.992.044,01)	88,39	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.923.864.187,01	7.887.872.143,00	(1.035.992.044,01)	88,39	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	3.883.399.289,90	3.733.202.618,00	(150.196.671,90)	96,13	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.262.400,00	15.282.875,00	(979.525,00)	93,97	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	968.446.639,90	927.135.545,00	(41.311.094,90)	95,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.898.690.250,00	2.790.784.198,00	(107.906.052,00)	96,27	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.075.776.838,00	14.679.642.669,00	(3.396.134.169,00)	81,21	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	18.075.776.838,00	14.679.642.669,00	(3.396.134.169,00)	81,21	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	12.565.472.300,00	11.762.742.156,00	(802.730.144,00)	93,61	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.118.941.600,00	2.001.112.672,00	(117.828.928,00)	94,43	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.118.941.600,00	2.001.112.672,00	(117.828.928,00)	94,43	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	10.446.530.700,00	9.761.629.484,00	(684.901.216,00)	93,44	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.830.700,00	74.259.000,00	(1.571.700,00)	97,92	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.370.700.000,00	9.687.370.484,00	(683.329.516,00)	93,41	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0039		REHABILITASI JEMBATAN	300.000.000,00	180.039.018,00	(119.960.982,00)	60,01	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	180.039.018,00	(119.960.982,00)	60,01	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	180.039.018,00	(119.960.982,00)	60,01	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	2.319.754.538,00	316.853.170,00	(2.002.901.368,00)	13,65	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	319.101.018,00	217.374.760,00	(101.726.258,00)	68,12	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.101.018,00	217.374.760,00	(101.726.258,00)	68,12	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	2.000.653.520,00	99.478.410,00	(1.901.175.110,00)	4,97	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.653.520,00	99.478.410,00	(1.901.175.110,00)	4,97	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	2.890.550.000,00	2.420.008.325,00	(470.541.675,00)	83,72	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1	BELANJA OPERASI	2.890.550.000,00	2.420.008.325,00	(470.541.675,00)	83,72	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.890.550.000,00	2.420.008.325,00	(470.541.675,00)	83,72	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	80.598.000,00	9.665.000,00	(70.933.000,00)	11,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	80.598.000,00	9.665.000,00	(70.933.000,00)	11,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010		FASILITASI SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR DAN TEKNISI ATAU ANALIS	80.598.000,00	9.665.000,00	(70.933.000,00)	11,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	80.598.000,00	9.665.000,00	(70.933.000,00)	11,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.598.000,00	9.665.000,00	(70.933.000,00)	11,99	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.060.000,00	44.335.900,00	(5.724.100,00)	88,56	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.12.2.03		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.060.000,00	44.335.900,00	(5.724.100,00)	88,56	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004		PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	50.060.000,00	44.335.900,00	(5.724.100,00)	88,56	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.060.000,00	44.335.900,00	(5.724.100,00)	88,56	
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.060.000,00	44.335.900,00	(5.724.100,00)	88,56	
				JUMLAH BELANJA	49.911.098.751,82	44.243.324.037,00	(5.667.774.714,82)	88,64	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(49.441.098.751,82)	(43.693.302.127,00)	5.747.796.624,82	88,37	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(49.441.098.751,82)	(43.693.302.127,00)	5.747.796.624,82	88,37	

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86	
	1.04.2.10.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86	
	1.04.2.10.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86	
				JUMLAH PENDAPATAN	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	7.746.873.347,00	7.429.451.411,00	(317.421.936,00)	95,90	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.499.189.147,00	3.295.740.129,00	(203.449.018,00)	94,18	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.116.976.475,00	2.929.927.455,00	(187.049.020,00)	93,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.853.275.475,00	2.673.886.975,00	(179.388.500,00)	93,71	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.853.275.475,00	2.673.886.975,00	(179.388.500,00)	93,71	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.853.275.475,00	2.673.886.975,00	(179.388.500,00)	93,71	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	263.701.000,00	256.040.480,00	(7.660.520,00)	97,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	263.701.000,00	256.040.480,00	(7.660.520,00)	97,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.701.000,00	256.040.480,00	(7.660.520,00)	97,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	204.629.783,00	199.532.515,00	(5.097.268,00)	97,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	62.625.183,00	62.383.665,00	(241.518,00)	99,61	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.785.183,00	57.633.665,00	(151.518,00)	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.785.183,00	57.633.665,00	(151.518,00)	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.840.000,00	4.750.000,00	(90.000,00)	98,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.840.000,00	4.750.000,00	(90.000,00)	98,14	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.759.600,00	16.660.883,00	(98.717,00)	99,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.759.600,00	16.660.883,00	(98.717,00)	99,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.759.600,00	16.660.883,00	(98.717,00)	99,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	125.245.000,00	120.487.967,00	(4.757.033,00)	96,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	125.245.000,00	120.487.967,00	(4.757.033,00)	96,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.245.000,00	120.487.967,00	(4.757.033,00)	96,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100.115.289,00	89.310.354,00	(10.804.935,00)	89,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.805.289,00	45.750.354,00	(10.054.935,00)	81,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.805.289,00	45.750.354,00	(10.054.935,00)	81,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.805.289,00	45.750.354,00	(10.054.935,00)	81,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	44.310.000,00	43.560.000,00	(750.000,00)	98,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	44.310.000,00	43.560.000,00	(750.000,00)	98,30	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.310.000,00	43.560.000,00	(750.000,00)	98,30	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	77.467.600,00	76.969.805,00	(497.795,00)	99,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	49.500.000,00	49.082.105,00	(417.895,00)	99,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.500.000,00	49.082.105,00	(417.895,00)	99,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.082.105,00	(417.895,00)	99,15	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.950.000,00	23.887.700,00	(62.300,00)	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.950.000,00	23.887.700,00	(62.300,00)	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.950.000,00	23.887.700,00	(62.300,00)	99,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.017.600,00	4.000.000,00	(17.600,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.017.600,00	4.000.000,00	(17.600,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.017.600,00	4.000.000,00	(17.600,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	339.943.700,00	283.088.097,00	(56.855.603,00)	83,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	56.098.000,00	42.269.100,00	(13.828.900,00)	75,34	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0004		PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA	7.588.000,00	2.650.000,00	(4.938.000,00)	34,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.588.000,00	2.650.000,00	(4.938.000,00)	34,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.588.000,00	2.650.000,00	(4.938.000,00)	34,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0007		IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	48.510.000,00	39.619.100,00	(8.890.900,00)	81,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	48.510.000,00	39.619.100,00	(8.890.900,00)	81,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.510.000,00	39.619.100,00	(8.890.900,00)	81,67	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	102.357.600,00	85.523.450,00	(16.834.150,00)	83,55	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0004		PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	3.507.600,00	1.243.100,00	(2.264.500,00)	35,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.507.600,00	1.243.100,00	(2.264.500,00)	35,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.507.600,00	1.243.100,00	(2.264.500,00)	35,44	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0007		FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	98.850.000,00	84.280.350,00	(14.569.650,00)	85,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	98.850.000,00	84.280.350,00	(14.569.650,00)	85,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.850.000,00	84.280.350,00	(14.569.650,00)	85,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.05		PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	181.488.100,00	155.295.547,00	(26.192.553,00)	85,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.05.0002		PENATAUSAHAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS	181.488.100,00	155.295.547,00	(26.192.553,00)	85,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	174.483.100,00	153.595.547,00	(20.887.553,00)	88,02	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.483.100,00	153.595.547,00	(20.887.553,00)	88,02	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.05.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.005.000,00	1.700.000,00	(5.305.000,00)	24,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.05.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.005.000,00	1.700.000,00	(5.305.000,00)	24,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	317.713.000,00	313.298.500,00	(4.414.500,00)	98,61	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02		PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	35.683.000,00	33.104.900,00	(2.578.100,00)	92,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02.0008		PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	35.683.000,00	33.104.900,00	(2.578.100,00)	92,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	35.683.000,00	33.104.900,00	(2.578.100,00)	92,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.683.000,00	33.104.900,00	(2.578.100,00)	92,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	282.030.000,00	280.193.600,00	(1.836.400,00)	99,34	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	282.030.000,00	280.193.600,00	(1.836.400,00)	99,34	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	282.030.000,00	280.193.600,00	(1.836.400,00)	99,34	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.030.000,00	28.193.600,00	(1.836.400,00)	93,88	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.394.620.000,00	1.393.936.850,00	(683.150,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04.2.01		PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.394.620.000,00	1.393.936.850,00	(683.150,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04.2.01.0001		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	1.394.620.000,00	1.393.936.850,00	(683.150,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.394.620.000,00	1.393.936.850,00	(683.150,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.620.000,00	133.936.850,00	(683.150,00)	99,49	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.195.407.500,00	2.143.387.835,00	(52.019.665,00)	97,63	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	2.195.407.500,00	2.143.387.835,00	(52.019.665,00)	97,63	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0001		PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	127.895.000,00	109.612.900,00	(18.282.100,00)	85,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	127.895.000,00	109.612.900,00	(18.282.100,00)	85,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.895.000,00	109.612.900,00	(18.282.100,00)	85,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0002		PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	2.067.512.500,00	2.033.774.935,00	(33.737.565,00)	98,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.067.512.500,00	2.033.774.935,00	(33.737.565,00)	98,36	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.067.512.500,00	2.033.774.935,00	(33.737.565,00)	98,36	
				JUMLAH BELANJA	7.746.873.347,00	7.429.451.411,00	(317.421.936,00)	95,90	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.607.073.347,00)	(7.285.651.411,00)	321.421.936,00	95,77	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.607.073.347,00)	(7.285.651.411,00)	321.421.936,00	95,77	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86	
	1.04.2.10.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86	
	1.04.2.10.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86	
				JUMLAH PENDAPATAN	139.800.000,00	143.800.000,00	4.000.000,00	102,86	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	132.340.900,00	127.845.655,00	(4.495.245,00)	96,60	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	53.437.900,00	52.334.505,00	(1.103.395,00)	97,93	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.04.2.01		PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.437.900,00	52.334.505,00	(1.103.395,00)	97,93	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.04.2.01.0004		MEDIASI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.437.900,00	52.334.505,00	(1.103.395,00)	97,93	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.437.900,00	52.334.505,00	(1.103.395,00)	97,93	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.437.900,00	52.334.505,00	(1.103.395,00)	97,93	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	29.734.000,00	28.881.500,00	(852.500,00)	97,13	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01		PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.734.000,00	28.881.500,00	(852.500,00)	97,13	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.734.000,00	28.881.500,00	(852.500,00)	97,13	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.734.000,00	28.881.500,00	(852.500,00)	97,13	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.734.000,00	28.881.500,00	(852.500,00)	97,13	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	49.169.000,00	46.629.650,00	(2.539.350,00)	94,83	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.10.2.01		PENGGUNAAN TANAH YANG HAMPARANNYA DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.169.000,00	46.629.650,00	(2.539.350,00)	94,83	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.10.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PENGGUNAAN TANAH	49.169.000,00	46.629.650,00	(2.539.350,00)	94,83	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.169.000,00	46.629.650,00	(2.539.350,00)	94,83	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.10.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.169.000,00	46.629.650,00	(2.539.350,00)	94,83	
				JUMLAH BELANJA	132.340.900,00	127.845.655,00	(4.495.245,00)	96,60	
				SURPLUS / (DEFISIT)	7.459.100,00	15.954.345,00	8.495.245,00	213,89	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.459.100,00	15.954.345,00	8.495.245,00	213,89	

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.05.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00	
	1.05.0.00.0.00.02.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00	
	1.05.0.00.0.00.02.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	0,00	498.000.000,00	498.000.000,00	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	5.758.331.949,14	5.246.621.958,00	(511.709.991,14)	91,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.800.248.629,14	4.458.112.792,00	(342.135.837,14)	92,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.072.648.027,14	2.892.003.568,00	(180.644.459,14)	94,12	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.023.138.027,14	2.842.813.568,00	(180.324.459,14)	94,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.023.138.027,14	2.842.813.568,00	(180.324.459,14)	94,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.023.138.027,14	2.842.813.568,00	(180.324.459,14)	94,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	49.510.000,00	49.190.000,00	(320.000,00)	99,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.510.000,00	49.190.000,00	(320.000,00)	99,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.510.000,00	49.190.000,00	(320.000,00)	99,35	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	292.992.434,00	264.536.702,00	(28.455.732,00)	90,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.146.000,00	3.097.000,00	(49.000,00)	98,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.146.000,00	3.097.000,00	(49.000,00)	98,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.146.000,00	3.097.000,00	(49.000,00)	98,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.138.834,00	56.113.666,00	(25.168,00)	99,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.138.834,00	56.113.666,00	(25.168,00)	99,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.138.834,00	56.113.666,00	(25.168,00)	99,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.316.600,00	15.316.315,00	(285,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.316.600,00	15.316.315,00	(285,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.316.600,00	15.316.315,00	(285,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	218.391.000,00	190.009.721,00	(28.381.279,00)	87,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	218.391.000,00	190.009.721,00	(28.381.279,00)	87,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.391.000,00	190.009.721,00	(28.381.279,00)	87,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.047.535.168,00	937.796.332,00	(109.738.836,00)	89,52	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	45.839.168,00	40.089.482,00	(5.749.686,00)	87,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.839.168,00	40.089.482,00	(5.749.686,00)	87,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.839.168,00	40.089.482,00	(5.749.686,00)	87,45	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.540.000,00	16.426.850,00	(3.113.150,00)	84,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.540.000,00	16.426.850,00	(3.113.150,00)	84,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.540.000,00	16.426.850,00	(3.113.150,00)	84,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	982.156.000,00	881.280.000,00	(100.876.000,00)	89,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	982.156.000,00	881.280.000,00	(100.876.000,00)	89,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	982.156.000,00	881.280.000,00	(100.876.000,00)	89,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	247.073.000,00	223.776.190,00	(23.296.810,00)	90,57	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	36.615.000,00	31.676.100,00	(4.938.900,00)	86,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.615.000,00	31.676.100,00	(4.938.900,00)	86,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.615.000,00	31.676.100,00	(4.938.900,00)	86,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	182.930.000,00	164.618.100,00	(18.311.900,00)	89,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	182.930.000,00	164.618.100,00	(18.311.900,00)	89,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.930.000,00	164.618.100,00	(18.311.900,00)	89,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	27.528.000,00	27.481.990,00	(46.010,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	27.528.000,00	27.481.990,00	(46.010,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.528.000,00	27.481.990,00	(46.010,00)	99,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	958.083.320,00	788.509.166,00	(169.574.154,00)	82,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	27.986.080,00	27.567.300,00	(418.780,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	27.986.080,00	27.567.300,00	(418.780,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.986.080,00	27.567.300,00	(418.780,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.986.080,00	27.567.300,00	(418.780,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	143.647.640,00	141.039.824,00	(2.607.816,00)	98,18	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0018		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	48.932.708,00	48.110.400,00	(822.308,00)	98,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	48.932.708,00	48.110.400,00	(822.308,00)	98,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.932.708,00	48.110.400,00	(822.308,00)	98,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	3.008.200,00	2.723.600,00	(284.600,00)	90,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	3.008.200,00	2.723.600,00	(284.600,00)	90,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.008.200,00	2.723.600,00	(284.600,00)	90,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	91.706.732,00	90.205.824,00	(1.500.908,00)	98,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	91.706.732,00	90.205.824,00	(1.500.908,00)	98,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.706.732,00	90.205.824,00	(1.500.908,00)	98,36	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	163.407.000,00	120.578.025,00	(42.828.975,00)	73,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	37.851.700,00	13.273.005,00	(24.578.695,00)	35,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.851.700,00	13.273.005,00	(24.578.695,00)	35,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.851.700,00	13.273.005,00	(24.578.695,00)	35,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	118.480.300,00	101.438.370,00	(17.041.930,00)	85,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	118.480.300,00	101.438.370,00	(17.041.930,00)	85,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.480.300,00	101.438.370,00	(17.041.930,00)	85,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009		PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	7.075.000,00	5.866.650,00	(1.208.350,00)	82,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.075.000,00	5.866.650,00	(1.208.350,00)	82,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	5.866.650,00	(1.208.350,00)	82,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	623.042.600,00	499.324.017,00	(123.718.583,00)	80,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010		KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	623.042.600,00	499.324.017,00	(123.718.583,00)	80,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	373.042.600,00	249.680.017,00	(123.362.583,00)	66,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.042.600,00	249.680.017,00	(123.362.583,00)	66,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2	BELANJA MODAL	250.000.000,00	249.644.000,00	(356.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	250.000.000,00	249.644.000,00	(356.000,00)	99,85	
				JUMLAH BELANJA	5.758.331.949,14	5.246.621.958,00	(511.709.991,14)	91,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.758.331.949,14)	(4.748.621.958,00)	1.009.709.991,14	82,46	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.758.331.949,14)	(4.748.621.958,00)	1.009.709.991,14	82,46	

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	14.673.449.105,00	13.703.590.077,00	(969.859.028,00)	93,39	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.056.469.965,00	11.477.653.224,00	(578.816.741,00)	95,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.819.597.673,00	9.361.979.317,00	(457.618.356,00)	95,33	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	9.767.187.673,00	9.309.569.317,00	(457.618.356,00)	95,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.767.187.673,00	9.309.569.317,00	(457.618.356,00)	95,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	9.767.187.673,00	9.309.569.317,00	(457.618.356,00)	95,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	52.410.000,00	52.410.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.410.000,00	52.410.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.410.000,00	52.410.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	217.313.558,00	213.582.501,00	(3.731.057,00)	98,28	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.830.510,00	13.761.900,00	(68.610,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.830.510,00	13.761.900,00	(68.610,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.830.510,00	13.761.900,00	(68.610,00)	99,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	35.728.448,00	35.251.041,00	(477.407,00)	98,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.728.448,00	35.251.041,00	(477.407,00)	98,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.728.448,00	35.251.041,00	(477.407,00)	98,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.999.400,00	7.130.400,00	(2.869.000,00)	71,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.400,00	7.130.400,00	(2.869.000,00)	71,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.400,00	7.130.400,00	(2.869.000,00)	71,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	157.755.200,00	157.439.160,00	(316.040,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	157.755.200,00	157.439.160,00	(316.040,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.755.200,00	157.439.160,00	(316.040,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100.124.500,00	29.750.001,00	(70.374.499,00)	29,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	100.124.500,00	29.750.001,00	(70.374.499,00)	29,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	99.824.500,00	29.450.001,00	(70.374.499,00)	29,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.824.500,00	29.450.001,00	(70.374.499,00)	29,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.835.412.234,00	1.810.039.905,00	(25.372.329,00)	98,61	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.119.000,00	75.177.969,00	(8.941.031,00)	89,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.119.000,00	75.177.969,00	(8.941.031,00)	89,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.119.000,00	75.177.969,00	(8.941.031,00)	89,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.751.293.234,00	1.734.861.936,00	(16.431.298,00)	99,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.751.293.234,00	1.734.861.936,00	(16.431.298,00)	99,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.751.293.234,00	1.734.861.936,00	(16.431.298,00)	99,06	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	84.022.000,00	62.301.500,00	(21.720.500,00)	74,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	10.300.000,00	8.799.125,00	(1.500.875,00)	85,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.300.000,00	8.799.125,00	(1.500.875,00)	85,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	8.799.125,00	(1.500.875,00)	85,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	37.500.000,00	20.656.000,00	(16.844.000,00)	55,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	20.656.000,00	(16.844.000,00)	55,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	20.656.000,00	(16.844.000,00)	55,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.020.000,00	13.057.375,00	(2.962.625,00)	81,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.020.000,00	13.057.375,00	(2.962.625,00)	81,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.020.000,00	13.057.375,00	(2.962.625,00)	81,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	20.202.000,00	19.789.000,00	(413.000,00)	97,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.202.000,00	19.789.000,00	(413.000,00)	97,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.202.000,00	19.789.000,00	(413.000,00)	97,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.183.172.000,00	1.113.922.770,00	(69.249.230,00)	94,14	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.151.792.000,00	1.084.901.970,00	(66.890.030,00)	94,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	901.581.800,00	862.153.700,00	(39.428.100,00)	95,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	901.581.800,00	862.153.700,00	(39.428.100,00)	95,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	901.581.800,00	862.153.700,00	(39.428.100,00)	95,62	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016		PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA	173.710.200,00	173.409.400,00	(300.800,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	173.710.200,00	173.409.400,00	(300.800,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.710.200,00	173.409.400,00	(300.800,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0018		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	76.500.000,00	49.338.870,00	(27.161.130,00)	64,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	76.500.000,00	49.338.870,00	(27.161.130,00)	64,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	49.338.870,00	(27.161.130,00)	64,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02		PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	31.380.000,00	29.020.800,00	(2.359.200,00)	92,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011		PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	10.380.000,00	8.880.000,00	(1.500.000,00)	85,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	10.380.000,00	8.880.000,00	(1.500.000,00)	85,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.380.000,00	8.880.000,00	(1.500.000,00)	85,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0012		PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	21.000.000,00	20.140.800,00	(859.200,00)	95,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	20.140.800,00	(859.200,00)	95,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	20.140.800,00	(859.200,00)	95,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.433.807.140,00	1.112.014.083,00	(321.793.057,00)	77,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.278.475.340,00	1.006.451.883,00	(272.023.457,00)	78,72	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	829.911.000,00	659.881.950,00	(170.029.050,00)	79,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	829.911.000,00	659.881.950,00	(170.029.050,00)	79,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	829.911.000,00	659.881.950,00	(170.029.050,00)	79,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0005		STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	148.000.000,00	147.825.363,00	(174.637,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	148.000.000,00	147.825.363,00	(174.637,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	147.825.363,00	(174.637,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	261.516.340,00	161.457.500,00	(100.058.840,00)	61,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	16.150.000,00	8.000.000,00	(8.150.000,00)	49,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	8.000.000,00	(8.150.000,00)	49,53	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	245.366.340,00	153.457.500,00	(91.908.840,00)	62,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	245.366.340,00	153.457.500,00	(91.908.840,00)	62,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0018		PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAN KOORDINASI ANTAR DAERAH BERBATASAN, ANTAR LEMBAGA, DAN KEMITRAAN DALAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	39.048.000,00	37.287.070,00	(1.760.930,00)	95,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	39.048.000,00	37.287.070,00	(1.760.930,00)	95,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.048.000,00	37.287.070,00	(1.760.930,00)	95,49	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.02		INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	6.132.800,00	3.240.000,00	(2.892.800,00)	52,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.02.0002		PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	6.132.800,00	3.240.000,00	(2.892.800,00)	52,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.132.800,00	3.240.000,00	(2.892.800,00)	52,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.132.800,00	3.240.000,00	(2.892.800,00)	52,83	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	85.769.000,00	57.287.400,00	(28.481.600,00)	66,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT	56.525.500,00	48.363.000,00	(8.162.500,00)	85,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.525.500,00	48.363.000,00	(8.162.500,00)	85,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.525.500,00	48.363.000,00	(8.162.500,00)	85,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0002		PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN	29.243.500,00	8.924.400,00	(20.319.100,00)	30,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.243.500,00	8.924.400,00	(20.319.100,00)	30,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.243.500,00	8.924.400,00	(20.319.100,00)	30,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.05		PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	63.430.000,00	45.034.800,00	(18.395.200,00)	70,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.05.0001		PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA PERISTIWA YANG MENIMPA, MEMBAHAYAKAN, DAN/ATAU MENGANCAM KESELAMATAN MANUSIA	63.430.000,00	45.034.800,00	(18.395.200,00)	70,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.430.000,00	45.034.800,00	(18.395.200,00)	70,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.430.000,00	45.034.800,00	(18.395.200,00)	70,99	
				JUMLAH BELANJA	14.673.449.105,00	13.703.590.077,00	(969.859.028,00)	93,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(14.673.449.105,00)	(13.703.590.077,00)	969.859.028,00	93,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.673.449.105,00)	(13.703.590.077,00)	969.859.028,00	93,39	

DINAS SOSIAL

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.582.376.017,00	4.221.665.315,00	(360.710.702,00)	92,12	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.580.239.639,00	3.373.388.875,00	(206.850.764,00)	94,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.679.142.958,00	2.536.743.322,00	(142.399.636,00)	94,68	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.626.832.958,00	2.490.526.322,00	(136.306.636,00)	94,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.626.832.958,00	2.490.526.322,00	(136.306.636,00)	94,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.626.832.958,00	2.490.526.322,00	(136.306.636,00)	94,81	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	52.310.000,00	46.217.000,00	(6.093.000,00)	88,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	52.310.000,00	46.217.000,00	(6.093.000,00)	88,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.310.000,00	46.217.000,00	(6.093.000,00)	88,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	169.675.716,00	163.414.152,00	(6.261.564,00)	96,30	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.178.451,00	5.764.400,00	(414.051,00)	93,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.178.451,00	5.764.400,00	(414.051,00)	93,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.178.451,00	5.764.400,00	(414.051,00)	93,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	49.155.665,00	46.474.361,00	(2.681.304,00)	94,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.155.665,00	46.474.361,00	(2.681.304,00)	94,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.155.665,00	46.474.361,00	(2.681.304,00)	94,54	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.705.300,00	13.692.900,00	(12.400,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.705.300,00	13.692.900,00	(12.400,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.705.300,00	13.692.900,00	(12.400,00)	99,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100.636.300,00	97.482.491,00	(3.153.809,00)	96,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.636.300,00	97.482.491,00	(3.153.809,00)	96,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.636.300,00	97.482.491,00	(3.153.809,00)	96,86	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	27.511.400,00	24.404.400,00	(3.107.000,00)	88,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.511.400,00	24.404.400,00	(3.107.000,00)	88,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	27.511.400,00	24.404.400,00	(3.107.000,00)	88,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.511.400,00	24.404.400,00	(3.107.000,00)	88,70	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	606.744.565,00	571.097.591,00	(35.646.974,00)	94,12	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	50.986.565,00	46.632.591,00	(4.353.974,00)	91,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.986.565,00	46.632.591,00	(4.353.974,00)	91,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.986.565,00	46.632.591,00	(4.353.974,00)	91,46	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	555.758.000,00	524.465.000,00	(31.293.000,00)	94,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	555.758.000,00	524.465.000,00	(31.293.000,00)	94,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.758.000,00	524.465.000,00	(31.293.000,00)	94,36	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.165.000,00	77.729.410,00	(19.435.590,00)	79,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	22.345.000,00	21.233.460,00	(1.111.540,00)	95,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.345.000,00	21.233.460,00	(1.111.540,00)	95,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.345.000,00	21.233.460,00	(1.111.540,00)	95,02	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	47.500.000,00	37.185.850,00	(10.314.150,00)	78,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.500.000,00	37.185.850,00	(10.314.150,00)	78,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	37.185.850,00	(10.314.150,00)	78,28	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.850.000,00	7.100.000,00	(1.750.000,00)	80,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.850.000,00	7.100.000,00	(1.750.000,00)	80,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	7.100.000,00	(1.750.000,00)	80,22	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	18.470.000,00	12.210.100,00	(6.259.900,00)	66,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	18.470.000,00	12.210.100,00	(6.259.900,00)	66,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.470.000,00	12.210.100,00	(6.259.900,00)	66,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	227.522.555,00	203.941.136,00	(23.581.419,00)	89,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	227.522.555,00	203.941.136,00	(23.581.419,00)	89,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	114.500.000,00	110.960.000,00	(3.540.000,00)	96,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	114.500.000,00	110.960.000,00	(3.540.000,00)	96,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.500.000,00	110.960.000,00	(3.540.000,00)	96,90	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	37.488.800,00	27.235.200,00	(10.253.600,00)	72,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.488.800,00	27.235.200,00	(10.253.600,00)	72,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.488.800,00	27.235.200,00	(10.253.600,00)	72,64	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	75.533.755,00	65.745.936,00	(9.787.819,00)	87,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	75.533.755,00	65.745.936,00	(9.787.819,00)	87,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.533.755,00	65.745.936,00	(9.787.819,00)	87,04	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	306.748.600,00	262.672.775,00	(44.075.825,00)	85,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	299.413.600,00	256.363.775,00	(43.049.825,00)	85,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001		PENYEDIAAN PERMAKANAN	89.542.400,00	84.029.035,00	(5.513.365,00)	93,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.542.400,00	84.029.035,00	(5.513.365,00)	93,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.542.400,00	84.029.035,00	(5.513.365,00)	93,84	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	32.400.000,00	30.991.644,00	(1.408.356,00)	95,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.400.000,00	30.991.644,00	(1.408.356,00)	95,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	30.991.644,00	(1.408.356,00)	95,65	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003		PENYEDIAAN ALAT BANTU	47.008.500,00	34.729.996,00	(12.278.504,00)	73,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	47.008.500,00	34.729.996,00	(12.278.504,00)	73,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.008.500,00	34.729.996,00	(12.278.504,00)	73,88	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004		PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	4.654.100,00	2.339.500,00	(2.314.600,00)	50,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.654.100,00	2.339.500,00	(2.314.600,00)	50,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.654.100,00	2.339.500,00	(2.314.600,00)	50,26	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	9.388.800,00	8.172.000,00	(1.216.800,00)	87,03	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.388.800,00	8.172.000,00	(1.216.800,00)	87,03	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.388.800,00	8.172.000,00	(1.216.800,00)	87,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	42.710.500,00	35.777.300,00	(6.933.200,00)	83,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.710.500,00	35.777.300,00	(6.933.200,00)	83,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.710.500,00	35.777.300,00	(6.933.200,00)	83,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007		FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK	417.000,00	150.000,00	(267.000,00)	35,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	417.000,00	150.000,00	(267.000,00)	35,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.000,00	150.000,00	(267.000,00)	35,97	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	1.969.500,00	1.275.000,00	(694.500,00)	64,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.969.500,00	1.275.000,00	(694.500,00)	64,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.969.500,00	1.275.000,00	(694.500,00)	64,73	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	39.000.000,00	29.584.000,00	(9.416.000,00)	75,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	39.000.000,00	29.584.000,00	(9.416.000,00)	75,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	29.584.000,00	(9.416.000,00)	75,85	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0011		PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	3.143.700,00	2.581.000,00	(562.700,00)	82,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	3.143.700,00	2.581.000,00	(562.700,00)	82,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.143.700,00	2.581.000,00	(562.700,00)	82,10	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	29.179.100,00	26.734.300,00	(2.444.800,00)	91,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	29.179.100,00	26.734.300,00	(2.444.800,00)	91,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.179.100,00	26.734.300,00	(2.444.800,00)	91,62	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	7.335.000,00	6.309.000,00	(1.026.000,00)	86,01	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	1.950.000,00	1.297.000,00	(653.000,00)	66,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.297.000,00	(653.000,00)	66,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.297.000,00	(653.000,00)	66,51	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013		PEMBERIAN LAYANAN RUJUKAN	5.385.000,00	5.012.000,00	(373.000,00)	93,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	5.385.000,00	5.012.000,00	(373.000,00)	93,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.385.000,00	5.012.000,00	(373.000,00)	93,07	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202.428.500,00	183.005.200,00	(19.423.300,00)	90,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.428.500,00	183.005.200,00	(19.423.300,00)	90,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.428.500,00	183.005.200,00	(19.423.300,00)	90,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	202.428.500,00	183.005.200,00	(19.423.300,00)	90,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.428.500,00	183.005.200,00	(19.423.300,00)	90,40	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	256.053.523,00	189.282.329,00	(66.771.194,00)	73,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	166.135.632,00	118.104.120,00	(48.031.512,00)	71,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	99.922.182,00	66.873.380,00	(33.048.802,00)	66,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.922.182,00	66.873.380,00	(33.048.802,00)	66,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.922.182,00	66.873.380,00	(33.048.802,00)	66,92	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002		PENYEDIAAN SANDANG	26.062.500,00	25.825.240,00	(237.260,00)	99,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.062.500,00	25.825.240,00	(237.260,00)	99,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.062.500,00	25.825.240,00	(237.260,00)	99,08	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0003		PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	35.402.500,00	20.702.500,00	(14.700.000,00)	58,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.402.500,00	20.702.500,00	(14.700.000,00)	58,47	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.402.500,00	20.702.500,00	(14.700.000,00)	58,47	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	695.750,00	686.000,00	(9.750,00)	98,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	695.750,00	686.000,00	(9.750,00)	98,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.750,00	686.000,00	(9.750,00)	98,59	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	4.052.700,00	4.017.000,00	(35.700,00)	99,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.052.700,00	4.017.000,00	(35.700,00)	99,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.052.700,00	4.017.000,00	(35.700,00)	99,11	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	89.917.891,00	71.178.209,00	(18.739.682,00)	79,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	89.917.891,00	71.178.209,00	(18.739.682,00)	79,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	89.917.891,00	71.178.209,00	(18.739.682,00)	79,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.917.891,00	71.178.209,00	(18.739.682,00)	79,15	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	9.383.200,00	9.375.000,00	(8.200,00)	99,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	9.383.200,00	9.375.000,00	(8.200,00)	99,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	9.383.200,00	9.375.000,00	(8.200,00)	99,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.383.200,00	9.375.000,00	(8.200,00)	99,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.383.200,00	9.375.000,00	(8.200,00)	99,91	
				JUMLAH BELANJA	4.582.376.017,00	4.221.665.315,00	(360.710.702,00)	92,12	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.582.376.017,00)	(4.221.665.315,00)	360.710.702,00	92,12	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.582.376.017,00)	(4.221.665.315,00)	360.710.702,00	92,12	

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	5.722.383.323,00	5.331.094.113,00	(391.289.210,00)	93,16	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.641.304.673,00	4.322.783.286,00	(318.521.387,00)	93,13	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.934.510.725,00	3.676.795.377,00	(257.715.348,00)	93,44	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.865.580.725,00	3.611.397.377,00	(254.183.348,00)	93,42	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.865.580.725,00	3.611.397.377,00	(254.183.348,00)	93,42	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.865.580.725,00	3.611.397.377,00	(254.183.348,00)	93,42	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	68.930.000,00	65.398.000,00	(3.532.000,00)	94,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	68.930.000,00	65.398.000,00	(3.532.000,00)	94,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.930.000,00	65.398.000,00	(3.532.000,00)	94,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	157.854.619,00	157.480.701,00	(373.918,00)	99,76	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.697.600,00	9.697.000,00	(600,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.697.600,00	9.697.000,00	(600,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.697.600,00	9.697.000,00	(600,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	43.744.609,00	43.413.526,00	(331.083,00)	99,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.744.609,00	43.413.526,00	(331.083,00)	99,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.744.609,00	43.413.526,00	(331.083,00)	99,24	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100.362.410,00	100.320.175,00	(42.235,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	100.362.410,00	100.320.175,00	(42.235,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.362.410,00	100.320.175,00	(42.235,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	59.214.500,00	58.695.810,00	(518.690,00)	99,12	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	19.189.500,00	18.880.000,00	(309.500,00)	98,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	19.189.500,00	18.880.000,00	(309.500,00)	98,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.189.500,00	18.880.000,00	(309.500,00)	98,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.025.000,00	39.815.810,00	(209.190,00)	99,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	40.025.000,00	39.815.810,00	(209.190,00)	99,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.025.000,00	39.815.810,00	(209.190,00)	99,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	357.175.000,00	303.398.949,00	(53.776.051,00)	84,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	119.719.000,00	86.662.949,00	(33.056.051,00)	72,38	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	119.719.000,00	86.662.949,00	(33.056.051,00)	72,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.719.000,00	86.662.949,00	(33.056.051,00)	72,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	237.456.000,00	216.736.000,00	(20.720.000,00)	91,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	237.456.000,00	216.736.000,00	(20.720.000,00)	91,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.456.000,00	216.736.000,00	(20.720.000,00)	91,27	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	132.549.829,00	126.412.449,00	(6.137.380,00)	95,36	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	19.115.000,00	19.032.129,00	(82.871,00)	99,56	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.115.000,00	19.032.129,00	(82.871,00)	99,56	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.115.000,00	19.032.129,00	(82.871,00)	99,56	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	90.274.000,00	84.758.950,00	(5.515.050,00)	93,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.274.000,00	84.758.950,00	(5.515.050,00)	93,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.274.000,00	84.758.950,00	(5.515.050,00)	93,89	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.674.829,00	8.650.000,00	(24.829,00)	99,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.674.829,00	8.650.000,00	(24.829,00)	99,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.674.829,00	8.650.000,00	(24.829,00)	99,71	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	14.486.000,00	13.971.370,00	(514.630,00)	96,44	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	14.486.000,00	13.971.370,00	(514.630,00)	96,44	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.486.000,00	13.971.370,00	(514.630,00)	96,44	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	358.528.000,00	293.988.980,00	(64.539.020,00)	81,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	18.950.000,00	13.913.000,00	(5.037.000,00)	73,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0006		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN PUG KEWENANGAN KAB/KOTA	18.950.000,00	13.913.000,00	(5.037.000,00)	73,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.950.000,00	13.913.000,00	(5.037.000,00)	73,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.950.000,00	13.913.000,00	(5.037.000,00)	73,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	39.578.000,00	38.031.000,00	(1.547.000,00)	96,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	39.578.000,00	38.031.000,00	(1.547.000,00)	96,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.578.000,00	38.031.000,00	(1.547.000,00)	96,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.578.000,00	38.031.000,00	(1.547.000,00)	96,09	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	242.044.980,00	(57.955.020,00)	80,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03.0002		PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	300.000.000,00	242.044.980,00	(57.955.020,00)	80,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	242.044.980,00	(57.955.020,00)	80,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	242.044.980,00	(57.955.020,00)	80,68	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	76.401.451,00	73.937.100,00	(2.464.351,00)	96,77	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	47.813.400,00	(2.186.600,00)	95,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.000.000,00	47.813.400,00	(2.186.600,00)	95,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.813.400,00	(2.186.600,00)	95,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.813.400,00	(2.186.600,00)	95,62	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	26.401.451,00	26.123.700,00	(277.751,00)	98,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	26.401.451,00	26.123.700,00	(277.751,00)	98,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.401.451,00	26.123.700,00	(277.751,00)	98,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.401.451,00	26.123.700,00	(277.751,00)	98,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	150.000.000,00	147.448.522,00	(2.551.478,00)	98,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	147.448.522,00	(2.551.478,00)	98,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0003		PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.000.000,00	147.448.522,00	(2.551.478,00)	98,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	147.448.522,00	(2.551.478,00)	98,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	147.448.522,00	(2.551.478,00)	98,29	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	14.324.000,00	13.809.900,00	(514.100,00)	96,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05.2.01		PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.324.000,00	13.809.900,00	(514.100,00)	96,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	14.324.000,00	13.809.900,00	(514.100,00)	96,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.324.000,00	13.809.900,00	(514.100,00)	96,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.324.000,00	13.809.900,00	(514.100,00)	96,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	130.484.000,00	128.441.000,00	(2.043.000,00)	98,43	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	130.484.000,00	128.441.000,00	(2.043.000,00)	98,43	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	130.484.000,00	128.441.000,00	(2.043.000,00)	98,43	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	130.484.000,00	128.441.000,00	(2.043.000,00)	98,43	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.484.000,00	128.441.000,00	(2.043.000,00)	98,43	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	351.341.199,00	350.685.325,00	(655.874,00)	99,81	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.01		PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.500.000,00	51.362.100,00	(137.900,00)	99,73	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.01.0004		ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	51.500.000,00	51.362.100,00	(137.900,00)	99,73	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.500.000,00	51.362.100,00	(137.900,00)	99,73	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	51.362.100,00	(137.900,00)	99,73	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	230.821.199,00	230.525.825,00	(295.374,00)	99,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02.0005		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.082.650,00	26.901.255,00	(181.395,00)	99,33	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.082.650,00	26.901.255,00	(181.395,00)	99,33	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.082.650,00	26.901.255,00	(181.395,00)	99,33	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02.0007		KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK	203.738.549,00	203.624.570,00	(113.979,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	203.738.549,00	203.624.570,00	(113.979,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.738.549,00	203.624.570,00	(113.979,00)	99,94	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.03		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	69.020.000,00	68.797.400,00	(222.600,00)	99,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.03.0006		PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/	69.020.000,00	68.797.400,00	(222.600,00)	99,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	69.020.000,00	68.797.400,00	(222.600,00)	99,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	68.797.400,00	(222.600,00)	99,67	
				JUMLAH BELANJA	5.722.383.323,00	5.331.094.113,00	(391.289.210,00)	93,16	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.722.383.323,00)	(5.331.094.113,00)	391.289.210,00	93,16	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.722.383.323,00)	(5.331.094.113,00)	391.289.210,00	93,16	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	9.486.686.773,00	7.318.078.116,00	(2.168.608.657,00)	77,14	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	297.435.000,00	269.377.110,00	(28.057.890,00)	90,56	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	55.635.000,00	49.970.000,00	(5.665.000,00)	89,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0009		ADVOKASI, SOSIALISASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR FORMAL DI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD/MI DAN SLTP/MTS, JALUR NONFORMAL DAN INFORMAL	55.635.000,00	49.970.000,00	(5.665.000,00)	89,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.635.000,00	49.970.000,00	(5.665.000,00)	89,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.635.000,00	49.970.000,00	(5.665.000,00)	89,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	241.800.000,00	219.407.110,00	(22.392.890,00)	90,73	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	88.200.000,00	87.600.000,00	(600.000,00)	99,31	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	88.200.000,00	87.600.000,00	(600.000,00)	99,31	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.200.000,00	87.600.000,00	(600.000,00)	99,31	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	153.600.000,00	131.807.110,00	(21.792.890,00)	85,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	153.600.000,00	131.807.110,00	(21.792.890,00)	85,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.600.000,00	131.807.110,00	(21.792.890,00)	85,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.605.260.088,00	4.492.159.776,00	(2.113.100.312,00)	68,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.376.716.088,00	1.185.676.280,00	(191.039.808,00)	86,12	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008		PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	79.906.088,00	77.572.100,00	(2.333.988,00)	97,07	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	79.906.088,00	77.572.100,00	(2.333.988,00)	97,07	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.906.088,00	77.572.100,00	(2.333.988,00)	97,07	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	722.720.000,00	685.282.550,00	(37.437.450,00)	94,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	722.720.000,00	685.282.550,00	(37.437.450,00)	94,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.720.000,00	685.282.550,00	(37.437.450,00)	94,81	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	320.000.000,00	300.087.500,00	(19.912.500,00)	93,77	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	320.000.000,00	300.087.500,00	(19.912.500,00)	93,77	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.000.000,00	300.087.500,00	(19.912.500,00)	93,77	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	67.750.000,00	67.746.980,00	(3.020,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	67.750.000,00	67.746.980,00	(3.020,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00	67.746.980,00	(3.020,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	186.340.000,00	54.987.150,00	(131.352.850,00)	29,50	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	186.340.000,00	54.987.150,00	(131.352.850,00)	29,50	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.340.000,00	54.987.150,00	(131.352.850,00)	29,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	582.000.000,00	581.800.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	582.000.000,00	581.800.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	582.000.000,00	581.800.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.000.000,00	581.800.000,00	(200.000,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.242.984.000,00	2.409.238.496,00	(1.833.745.504,00)	56,78	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	24.300.000,00	12.414.050,00	(11.885.950,00)	51,08	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.300.000,00	12.414.050,00	(11.885.950,00)	51,08	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	12.414.050,00	(11.885.950,00)	51,08	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	899.762.000,00	788.411.700,00	(111.350.300,00)	87,62	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	899.762.000,00	788.411.700,00	(111.350.300,00)	87,62	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.762.000,00	788.411.700,00	(111.350.300,00)	87,62	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006		PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	3.294.172.000,00	1.596.662.746,00	(1.697.509.254,00)	48,46	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	159.795.388,00	74.622.742,00	(85.172.646,00)	46,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.795.388,00	74.622.742,00	(85.172.646,00)	46,69	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.134.376.612,00	1.522.040.004,00	(1.612.336.608,00)	48,55	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.039.376.612,00	441.695.417,00	(1.597.681.195,00)	21,65	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.095.000.000,00	1.080.344.587,00	(14.655.413,00)	98,66	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	24.750.000,00	11.750.000,00	(13.000.000,00)	47,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	11.750.000,00	(13.000.000,00)	47,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	11.750.000,00	(13.000.000,00)	47,47	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	403.560.000,00	315.445.000,00	(88.115.000,00)	78,16	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	403.560.000,00	315.445.000,00	(88.115.000,00)	78,16	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	403.560.000,00	315.445.000,00	(88.115.000,00)	78,16	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.560.000,00	315.445.000,00	(88.115.000,00)	78,16	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.583.991.685,00	2.556.541.230,00	(27.450.455,00)	98,93	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	105.200.000,00	79.732.000,00	(25.468.000,00)	75,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008		PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	40.200.000,00	22.270.000,00	(17.930.000,00)	55,39	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	40.200.000,00	22.270.000,00	(17.930.000,00)	55,39	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	22.270.000,00	(17.930.000,00)	55,39	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	65.000.000,00	57.462.000,00	(7.538.000,00)	88,40	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	57.462.000,00	(7.538.000,00)	88,40	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	57.462.000,00	(7.538.000,00)	88,40	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	2.478.791.685,00	2.476.809.230,00	(1.982.455,00)	99,92	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005		PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	1.113.000.000,00	1.111.500.000,00	(1.500.000,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.113.000.000,00	1.111.500.000,00	(1.500.000,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.000.000,00	1.111.500.000,00	(1.500.000,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006		PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	1.365.791.685,00	1.365.309.230,00	(482.455,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.365.791.685,00	1.365.309.230,00	(482.455,00)	99,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.365.791.685,00	1.365.309.230,00	(482.455,00)	99,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	9.486.686.773,00	7.318.078.116,00	(2.168.608.657,00)	77,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.486.686.773,00)	(7.318.078.116,00)	2.168.608.657,00	77,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.486.686.773,00)	(7.318.078.116,00)	2.168.608.657,00	77,14	

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43	
	2.09.3.25.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43	
	2.09.3.25.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43	
				JUMLAH PENDAPATAN	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	4.257.192.106,00	3.994.196.991,00	(262.995.115,00)	93,82	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.649.756.070,00	3.457.660.723,00	(192.095.347,00)	94,73	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.652.276.514,00	2.542.533.708,00	(109.742.806,00)	95,86	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.596.051.514,00	2.486.641.708,00	(109.409.806,00)	95,78	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.596.051.514,00	2.486.641.708,00	(109.409.806,00)	95,78	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.596.051.514,00	2.486.641.708,00	(109.409.806,00)	95,78	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	56.225.000,00	55.892.000,00	(333.000,00)	99,40	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	56.225.000,00	55.892.000,00	(333.000,00)	99,40	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.225.000,00	55.892.000,00	(333.000,00)	99,40	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	195.492.256,00	188.161.793,00	(7.330.463,00)	96,25	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.361.480,00	2.350.000,00	(11.480,00)	99,51	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.361.480,00	2.350.000,00	(11.480,00)	99,51	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.361.480,00	2.350.000,00	(11.480,00)	99,51	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.984.576,00	47.749.913,00	(5.234.663,00)	90,12	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.984.576,00	47.749.913,00	(5.234.663,00)	90,12	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.984.576,00	47.749.913,00	(5.234.663,00)	90,12	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.981.800,00	16.698.800,00	(283.000,00)	98,33	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.981.800,00	16.698.800,00	(283.000,00)	98,33	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.981.800,00	16.698.800,00	(283.000,00)	98,33	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	123.164.400,00	121.363.080,00	(1.801.320,00)	98,53	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	123.164.400,00	121.363.080,00	(1.801.320,00)	98,53	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.164.400,00	121.363.080,00	(1.801.320,00)	98,53	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	76.440.700,00	70.244.500,00	(6.196.200,00)	91,89	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	76.440.700,00	70.244.500,00	(6.196.200,00)	91,89	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	76.440.700,00	70.244.500,00	(6.196.200,00)	91,89	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.440.700,00	70.244.500,00	(6.196.200,00)	91,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	567.607.500,00	537.116.561,00	(30.490.939,00)	94,62	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	74.091.500,00	69.546.561,00	(4.544.939,00)	93,86	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	74.091.500,00	69.546.561,00	(4.544.939,00)	93,86	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.091.500,00	69.546.561,00	(4.544.939,00)	93,86	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	493.516.000,00	467.570.000,00	(25.946.000,00)	94,74	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	493.516.000,00	467.570.000,00	(25.946.000,00)	94,74	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.516.000,00	467.570.000,00	(25.946.000,00)	94,74	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.939.100,00	119.604.161,00	(38.334.939,00)	75,72	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	135.783.100,00	97.681.371,00	(38.101.729,00)	71,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	135.783.100,00	97.681.371,00	(38.101.729,00)	71,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.783.100,00	97.681.371,00	(38.101.729,00)	71,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.050.000,00	6.990.000,00	(60.000,00)	99,14	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.050.000,00	6.990.000,00	(60.000,00)	99,14	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	6.990.000,00	(60.000,00)	99,14	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.106.000,00	14.932.790,00	(173.210,00)	98,85	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	15.106.000,00	14.932.790,00	(173.210,00)	98,85	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.106.000,00	14.932.790,00	(173.210,00)	98,85	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	457.118.110,00	415.835.848,00	(41.282.262,00)	90,96	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	160.748.710,00	146.282.454,00	(14.466.256,00)	91,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN POKOK DAN PANGAN LAINNYA	66.427.000,00	59.320.700,00	(7.106.300,00)	89,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	66.427.000,00	59.320.700,00	(7.106.300,00)	89,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.427.000,00	59.320.700,00	(7.106.300,00)	89,30	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0007		PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	89.521.710,00	82.216.754,00	(7.304.956,00)	91,84	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	89.521.710,00	82.216.754,00	(7.304.956,00)	91,84	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.521.710,00	82.216.754,00	(7.304.956,00)	91,84	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0014		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS	4.800.000,00	4.745.000,00	(55.000,00)	98,85	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.745.000,00	(55.000,00)	98,85	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.745.000,00	(55.000,00)	98,85	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.02		PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	257.899.600,00	234.700.694,00	(23.198.906,00)	91,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.02.0003		PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	257.899.600,00	234.700.694,00	(23.198.906,00)	91,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	257.899.600,00	234.700.694,00	(23.198.906,00)	91,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.899.600,00	234.700.694,00	(23.198.906,00)	91,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	38.469.800,00	34.852.700,00	(3.617.100,00)	90,59	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	38.469.800,00	34.852.700,00	(3.617.100,00)	90,59	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.469.800,00	34.852.700,00	(3.617.100,00)	90,59	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.469.800,00	34.852.700,00	(3.617.100,00)	90,59	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	120.562.536,00	92.719.870,00	(27.842.666,00)	76,90	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.01		PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	4.774.400,00	2.293.900,00	(2.480.500,00)	48,04	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.01.0001		PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	4.774.400,00	2.293.900,00	(2.480.500,00)	48,04	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.774.400,00	2.293.900,00	(2.480.500,00)	48,04	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.774.400,00	2.293.900,00	(2.480.500,00)	48,04	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	115.788.136,00	90.425.970,00	(25.362.166,00)	78,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0002		PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.704.075,00	18.727.100,00	(11.976.975,00)	60,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.704.075,00	18.727.100,00	(11.976.975,00)	60,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.704.075,00	18.727.100,00	(11.976.975,00)	60,99	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA	67.539.021,00	62.933.570,00	(4.605.451,00)	93,18	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.539.021,00	62.933.570,00	(4.605.451,00)	93,18	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.539.021,00	62.933.570,00	(4.605.451,00)	93,18	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0004		PELAKSANAAN INTERVENSI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	9.255.040,00	2.308.300,00	(6.946.740,00)	24,94	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.255.040,00	2.308.300,00	(6.946.740,00)	24,94	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.255.040,00	2.308.300,00	(6.946.740,00)	24,94	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0005		PENYUSUNAN PETA SITUASI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI KABUPATEN/KOTA	8.290.000,00	6.457.000,00	(1.833.000,00)	77,88	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.290.000,00	6.457.000,00	(1.833.000,00)	77,88	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.290.000,00	6.457.000,00	(1.833.000,00)	77,88	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	29.755.390,00	27.980.550,00	(1.774.840,00)	94,03	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.755.390,00	27.980.550,00	(1.774.840,00)	94,03	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.05.2.01.0006		REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	29.755.390,00	27.980.550,00	(1.774.840,00)	94,03	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.755.390,00	27.980.550,00	(1.774.840,00)	94,03	
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.755.390,00	27.980.550,00	(1.774.840,00)	94,03	
				JUMLAH BELANJA	4.257.192.106,00	3.994.196.991,00	(262.995.115,00)	93,82	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.218.352.106,00)	(3.971.888.991,00)	246.463.115,00	94,15	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.218.352.106,00)	(3.971.888.991,00)	246.463.115,00	94,15	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.09.3.25.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43	
	2.09.3.25.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43	
	2.09.3.25.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43	
				JUMLAH PENDAPATAN	38.840.000,00	22.308.000,00	(16.532.000,00)	57,43	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	580.838.728,00	282.978.704,00	(297.860.024,00)	48,71	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	58.236.860,00	55.798.000,00	(2.438.860,00)	95,81	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.236.860,00	55.798.000,00	(2.438.860,00)	95,81	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	10.275.000,00	9.586.950,00	(688.050,00)	93,30	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.275.000,00	9.586.950,00	(688.050,00)	93,30	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.275.000,00	9.586.950,00	(688.050,00)	93,30	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA NELAYAN SKALA KECIL	47.961.860,00	46.211.050,00	(1.750.810,00)	96,34	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	47.961.860,00	46.211.050,00	(1.750.810,00)	96,34	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.961.860,00	46.211.050,00	(1.750.810,00)	96,34	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	393.046.500,00	109.222.030,00	(283.824.470,00)	27,78	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	293.721.600,00	12.297.400,00	(281.424.200,00)	4,18	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	293.721.600,00	12.297.400,00	(281.424.200,00)	4,18	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	293.721.600,00	12.297.400,00	(281.424.200,00)	4,18	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.721.600,00	12.297.400,00	(281.424.200,00)	4,18	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	99.324.900,00	96.924.630,00	(2.400.270,00)	97,58	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.04.0009		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.324.900,00	96.924.630,00	(2.400.270,00)	97,58	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1	BELANJA OPERASI	99.324.900,00	96.924.630,00	(2.400.270,00)	97,58	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.04.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.324.900,00	96.924.630,00	(2.400.270,00)	97,58	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.179.000,00	3.732.200,00	(446.800,00)	89,30	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.05.2.01		PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	4.179.000,00	3.732.200,00	(446.800,00)	89,30	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.05.2.01.0004		PENGAWASAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	4.179.000,00	3.732.200,00	(446.800,00)	89,30	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.179.000,00	3.732.200,00	(446.800,00)	89,30	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.179.000,00	3.732.200,00	(446.800,00)	89,30	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125.376.368,00	114.226.474,00	(11.149.894,00)	91,10	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	125.376.368,00	114.226.474,00	(11.149.894,00)	91,10	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.653.568,00	65.494.274,00	(10.159.294,00)	86,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.653.568,00	65.494.274,00	(10.159.294,00)	86,57	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.653.568,00	65.494.274,00	(10.159.294,00)	86,57	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03.0002		PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.722.800,00	48.732.200,00	(990.600,00)	98,00	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.722.800,00	48.732.200,00	(990.600,00)	98,00	
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.722.800,00	48.732.200,00	(990.600,00)	98,00	
				JUMLAH BELANJA	580.838.728,00	282.978.704,00	(297.860.024,00)	48,71	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(541.998.728,00)	(260.670.704,00)	281.328.024,00	48,09	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(541.998.728,00)	(260.670.704,00)	281.328.024,00	48,09	

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	862.128.000,00	912.882.190,00	50.754.190,00	105,88	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	862.128.000,00	912.882.190,00	50.754.190,00	105,88	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	862.128.000,00	912.882.190,00	50.754.190,00	105,88	
				JUMLAH PENDAPATAN	862.128.000,00	912.882.190,00	50.754.190,00	105,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	16.000.015.659,00	13.330.971.024,00	(2.669.044.635,00)	83,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.903.558.339,00	4.494.331.186,00	(409.227.153,00)	91,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.770.148.308,00	3.586.262.801,00	(183.885.507,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.689.791.308,00	3.509.854.861,00	(179.936.447,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.689.791.308,00	3.509.854.861,00	(179.936.447,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.689.791.308,00	3.509.854.861,00	(179.936.447,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	80.357.000,00	76.407.940,00	(3.949.060,00)	95,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	80.357.000,00	76.407.940,00	(3.949.060,00)	95,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.357.000,00	76.407.940,00	(3.949.060,00)	95,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	194.238.587,00	190.537.967,00	(3.700.620,00)	98,09	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.703.137,00	47.118.910,00	(584.227,00)	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.703.137,00	47.118.910,00	(584.227,00)	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.703.137,00	47.118.910,00	(584.227,00)	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.851.600,00	14.629.470,00	(222.130,00)	98,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.851.600,00	14.629.470,00	(222.130,00)	98,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.851.600,00	14.629.470,00	(222.130,00)	98,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	131.683.850,00	128.789.587,00	(2.894.263,00)	97,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	131.683.850,00	128.789.587,00	(2.894.263,00)	97,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.683.850,00	128.789.587,00	(2.894.263,00)	97,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.840.000,00	3.980.000,00	(860.000,00)	82,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.840.000,00	3.980.000,00	(860.000,00)	82,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.840.000,00	3.980.000,00	(860.000,00)	82,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.840.000,00	3.980.000,00	(860.000,00)	82,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	890.651.444,00	672.208.946,00	(218.442.498,00)	75,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	297.229.444,00	212.769.946,00	(84.459.498,00)	71,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	297.229.444,00	212.769.946,00	(84.459.498,00)	71,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297.229.444,00	212.769.946,00	(84.459.498,00)	71,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	593.422.000,00	459.439.000,00	(133.983.000,00)	77,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	593.422.000,00	459.439.000,00	(133.983.000,00)	77,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.422.000,00	459.439.000,00	(133.983.000,00)	77,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	43.680.000,00	41.341.472,00	(2.338.528,00)	94,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	31.500.000,00	29.502.347,00	(1.997.653,00)	93,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	29.502.347,00	(1.997.653,00)	93,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	29.502.347,00	(1.997.653,00)	93,65	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.180.000,00	11.839.125,00	(340.875,00)	97,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.180.000,00	11.839.125,00	(340.875,00)	97,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.180.000,00	11.839.125,00	(340.875,00)	97,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	121.729.240,00	120.174.300,00	(1.554.940,00)	98,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	121.729.240,00	120.174.300,00	(1.554.940,00)	98,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006		PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	121.729.240,00	120.174.300,00	(1.554.940,00)	98,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	121.729.240,00	120.174.300,00	(1.554.940,00)	98,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.729.240,00	120.174.300,00	(1.554.940,00)	98,72	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.194.969.792,00	972.779.587,00	(222.190.205,00)	81,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.125.912.952,00	929.437.387,00	(196.475.565,00)	82,54	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	24.237.100,00	10.238.600,00	(13.998.500,00)	42,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.237.100,00	10.238.600,00	(13.998.500,00)	42,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.237.100,00	10.238.600,00	(13.998.500,00)	42,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0007		PELAKSANAAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	28.989.300,00	27.632.000,00	(1.357.300,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.989.300,00	27.632.000,00	(1.357.300,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.989.300,00	27.632.000,00	(1.357.300,00)	95,31	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.072.686.552,00	891.566.787,00	(181.119.765,00)	83,11	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	956.327.566,44	786.893.787,00	(169.433.779,44)	82,28	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	956.327.566,44	786.893.787,00	(169.433.779,44)	82,28	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	116.358.985,56	104.673.000,00	(11.685.985,56)	89,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.358.985,56	104.673.000,00	(11.685.985,56)	89,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03		PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	69.056.840,00	43.342.200,00	(25.714.640,00)	62,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0011		PELAKSANAAN PEMBERSIHAN UNSUR PENCEMAR DI KABUPATEN/KOTA YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	69.056.840,00	43.342.200,00	(25.714.640,00)	62,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	55.444.340,00	30.692.200,00	(24.752.140,00)	55,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.444.340,00	30.692.200,00	(24.752.140,00)	55,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0011	5.2	BELANJA MODAL	13.612.500,00	12.650.000,00	(962.500,00)	92,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.612.500,00	12.650.000,00	(962.500,00)	92,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.320.642.015,00	1.178.701.186,00	(141.940.829,00)	89,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	1.320.642.015,00	1.178.701.186,00	(141.940.829,00)	89,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	1.320.642.015,00	1.178.701.186,00	(141.940.829,00)	89,25	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.290.602.455,00	1.173.301.186,00	(117.301.269,00)	90,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.602.455,00	1.173.301.186,00	(117.301.269,00)	90,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	30.039.560,00	5.400.000,00	(24.639.560,00)	17,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.039.560,00	5.400.000,00	(24.639.560,00)	17,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.935.600,00	3.060.000,00	(22.875.600,00)	11,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	25.935.600,00	3.060.000,00	(22.875.600,00)	11,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	25.935.600,00	3.060.000,00	(22.875.600,00)	11,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.935.600,00	3.060.000,00	(22.875.600,00)	11,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.935.600,00	3.060.000,00	(22.875.600,00)	11,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	111.642.000,00	83.657.500,00	(27.984.500,00)	74,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.642.000,00	83.657.500,00	(27.984.500,00)	74,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	64.160.400,00	43.485.000,00	(20.675.400,00)	67,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.160.400,00	43.485.000,00	(20.675.400,00)	67,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.160.400,00	43.485.000,00	(20.675.400,00)	67,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	47.481.600,00	40.172.500,00	(7.309.100,00)	84,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.081.600,00	26.852.500,00	(3.229.100,00)	89,26	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.081.600,00	26.852.500,00	(3.229.100,00)	89,26	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	17.400.000,00	13.320.000,00	(4.080.000,00)	76,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.400.000,00	13.320.000,00	(4.080.000,00)	76,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	8.309.171.473,00	6.467.419.765,00	(1.841.751.708,00)	77,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.309.171.473,00	6.467.419.765,00	(1.841.751.708,00)	77,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002		PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	8.278.714.323,00	6.441.333.505,00	(1.837.380.818,00)	77,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.961.273.743,00	6.166.475.305,00	(1.794.798.438,00)	77,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.961.273.743,00	6.166.475.305,00	(1.794.798.438,00)	77,45	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	317.440.580,00	274.858.200,00	(42.582.380,00)	86,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	317.440.580,00	274.858.200,00	(42.582.380,00)	86,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT	30.457.150,00	26.086.260,00	(4.370.890,00)	85,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.457.150,00	26.086.260,00	(4.370.890,00)	85,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.457.150,00	26.086.260,00	(4.370.890,00)	85,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	12.327.200,00	10.847.500,00	(1.479.700,00)	87,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	12.327.200,00	10.847.500,00	(1.479.700,00)	87,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	12.327.200,00	10.847.500,00	(1.479.700,00)	87,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.327.200,00	10.847.500,00	(1.479.700,00)	87,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.327.200,00	10.847.500,00	(1.479.700,00)	87,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000,00	0,00	(40.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	16.000.015.659,00	13.330.971.024,00	(2.669.044.635,00)	83,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.137.887.659,00)	(12.418.088.834,00)	2.719.798.825,00	82,03	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.137.887.659,00)	(12.418.088.834,00)	2.719.798.825,00	82,03	

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.310.500.516,00	4.964.079.479,00	(346.421.037,00)	93,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.152.213.316,00	3.906.199.074,00	(246.014.242,00)	94,07	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.880.048.333,00	2.724.120.921,00	(155.927.412,00)	94,58	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.830.128.333,00	2.675.607.921,00	(154.520.412,00)	94,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.830.128.333,00	2.675.607.921,00	(154.520.412,00)	94,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.830.128.333,00	2.675.607.921,00	(154.520.412,00)	94,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	49.920.000,00	48.513.000,00	(1.407.000,00)	97,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	49.920.000,00	48.513.000,00	(1.407.000,00)	97,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	48.513.000,00	(1.407.000,00)	97,18	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	171.570.819,00	166.575.389,00	(4.995.430,00)	97,08	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.836.021,00	8.447.263,00	(388.758,00)	95,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.836.021,00	8.447.263,00	(388.758,00)	95,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.836.021,00	8.447.263,00	(388.758,00)	95,60	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	53.030.826,00	50.709.746,00	(2.321.080,00)	95,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.030.826,00	50.709.746,00	(2.321.080,00)	95,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.030.826,00	50.709.746,00	(2.321.080,00)	95,62	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.648.000,00	21.868.520,00	(1.779.480,00)	92,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.648.000,00	21.868.520,00	(1.779.480,00)	92,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.648.000,00	21.868.520,00	(1.779.480,00)	92,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	86.055.972,00	85.549.860,00	(506.112,00)	99,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	86.055.972,00	85.549.860,00	(506.112,00)	99,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.055.972,00	85.549.860,00	(506.112,00)	99,41	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	327.115.000,00	304.619.908,00	(22.495.092,00)	93,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	18.447.000,00	0,00	(18.447.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	18.447.000,00	0,00	(18.447.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.447.000,00	0,00	(18.447.000,00)	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	308.668.000,00	304.619.908,00	(4.048.092,00)	98,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	308.593.000,00	304.544.908,00	(4.048.092,00)	98,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.593.000,00	304.544.908,00	(4.048.092,00)	98,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	524.680.664,00	494.318.236,00	(30.362.428,00)	94,21	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	83.393.200,00	76.531.005,00	(6.862.195,00)	91,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.393.200,00	76.531.005,00	(6.862.195,00)	91,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.393.200,00	76.531.005,00	(6.862.195,00)	91,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	441.287.464,00	417.787.231,00	(23.500.233,00)	94,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	441.287.464,00	417.787.231,00	(23.500.233,00)	94,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.287.464,00	417.787.231,00	(23.500.233,00)	94,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	248.798.500,00	216.564.620,00	(32.233.880,00)	87,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	25.242.500,00	24.046.010,00	(1.196.490,00)	95,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.242.500,00	24.046.010,00	(1.196.490,00)	95,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.242.500,00	24.046.010,00	(1.196.490,00)	95,26	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	15.200.000,00	10.897.500,00	(4.302.500,00)	71,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.200.000,00	10.897.500,00	(4.302.500,00)	71,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000,00	10.897.500,00	(4.302.500,00)	71,69	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.520.000,00	8.098.500,00	(421.500,00)	95,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.520.000,00	8.098.500,00	(421.500,00)	95,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	8.098.500,00	(421.500,00)	95,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	199.836.000,00	173.522.610,00	(26.313.390,00)	86,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	199.836.000,00	173.522.610,00	(26.313.390,00)	86,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.836.000,00	173.522.610,00	(26.313.390,00)	86,83	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.031.935.700,00	935.557.905,00	(96.377.795,00)	90,66	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	19.605.000,00	16.277.800,00	(3.327.200,00)	83,02	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	19.605.000,00	16.277.800,00	(3.327.200,00)	83,02	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.605.000,00	16.277.800,00	(3.327.200,00)	83,02	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.605.000,00	16.277.800,00	(3.327.200,00)	83,02	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	1.012.330.700,00	919.280.105,00	(93.050.595,00)	90,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004		BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL	1.012.330.700,00	919.280.105,00	(93.050.595,00)	90,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.012.330.700,00	919.280.105,00	(93.050.595,00)	90,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.330.700,00	919.280.105,00	(93.050.595,00)	90,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	126.351.500,00	122.322.500,00	(4.029.000,00)	96,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	126.351.500,00	122.322.500,00	(4.029.000,00)	96,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	126.351.500,00	122.322.500,00	(4.029.000,00)	96,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	126.351.500,00	122.322.500,00	(4.029.000,00)	96,81	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.351.500,00	122.322.500,00	(4.029.000,00)	96,81	
				JUMLAH BELANJA	5.310.500.516,00	4.964.079.479,00	(346.421.037,00)	93,47	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.310.500.516,00)	(4.964.079.479,00)	346.421.037,00	93,47	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.310.500.516,00)	(4.964.079.479,00)	346.421.037,00	93,47	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.285.663.279,00	7.102.588.370,00	(1.183.074.909,00)	85,72	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.666.919.884,00	4.366.801.149,00	(300.118.735,00)	93,56	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.183.450.208,00	2.070.228.833,00	(113.221.375,00)	94,81	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.141.550.208,00	2.028.549.833,00	(113.000.375,00)	94,72	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.141.550.208,00	2.028.549.833,00	(113.000.375,00)	94,72	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.141.550.208,00	2.028.549.833,00	(113.000.375,00)	94,72	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	41.900.000,00	41.679.000,00	(221.000,00)	99,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	41.900.000,00	41.679.000,00	(221.000,00)	99,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.900.000,00	41.679.000,00	(221.000,00)	99,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	249.255.040,00	211.145.410,00	(38.109.630,00)	84,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.138.980,00	3.598.000,00	(1.540.980,00)	70,01	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.138.980,00	3.598.000,00	(1.540.980,00)	70,01	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.138.980,00	3.598.000,00	(1.540.980,00)	70,01	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	56.072.444,00	44.954.580,00	(11.117.864,00)	80,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	56.072.444,00	44.954.580,00	(11.117.864,00)	80,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.072.444,00	44.954.580,00	(11.117.864,00)	80,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21.228.616,00	15.807.710,00	(5.420.906,00)	74,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	21.228.616,00	15.807.710,00	(5.420.906,00)	74,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.228.616,00	15.807.710,00	(5.420.906,00)	74,46	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	166.815.000,00	146.785.120,00	(20.029.880,00)	87,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	166.815.000,00	146.785.120,00	(20.029.880,00)	87,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.815.000,00	146.785.120,00	(20.029.880,00)	87,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.161.963.636,00	2.022.120.996,00	(139.842.640,00)	93,53	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	210.311.636,00	145.105.492,00	(65.206.144,00)	68,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	210.311.636,00	145.105.492,00	(65.206.144,00)	68,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.311.636,00	145.105.492,00	(65.206.144,00)	68,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.951.652.000,00	1.877.015.504,00	(74.636.496,00)	96,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.951.652.000,00	1.877.015.504,00	(74.636.496,00)	96,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.951.652.000,00	1.877.015.504,00	(74.636.496,00)	96,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	72.251.000,00	63.305.910,00	(8.945.090,00)	87,61	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	24.215.000,00	22.675.500,00	(1.539.500,00)	93,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.215.000,00	22.675.500,00	(1.539.500,00)	93,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.215.000,00	22.675.500,00	(1.539.500,00)	93,64	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	13.800.000,00	13.652.500,00	(147.500,00)	98,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.652.500,00	(147.500,00)	98,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.652.500,00	(147.500,00)	98,93	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.676.000,00	12.429.500,00	(7.246.500,00)	63,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.676.000,00	12.429.500,00	(7.246.500,00)	63,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.676.000,00	12.429.500,00	(7.246.500,00)	63,17	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0011		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	14.560.000,00	14.548.410,00	(11.590,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.560.000,00	14.548.410,00	(11.590,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.560.000,00	14.548.410,00	(11.590,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA	80.065.000,00	68.400.800,00	(11.664.200,00)	85,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	80.065.000,00	68.400.800,00	(11.664.200,00)	85,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0001		PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA	80.065.000,00	68.400.800,00	(11.664.200,00)	85,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.065.000,00	68.400.800,00	(11.664.200,00)	85,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.065.000,00	68.400.800,00	(11.664.200,00)	85,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	498.783.926,00	413.972.450,00	(84.811.476,00)	82,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	498.783.926,00	413.972.450,00	(84.811.476,00)	82,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA	77.527.226,00	64.310.050,00	(13.217.176,00)	82,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	77.527.226,00	64.310.050,00	(13.217.176,00)	82,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.527.226,00	64.310.050,00	(13.217.176,00)	82,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	110.257.800,00	72.243.650,00	(38.014.150,00)	65,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	110.257.800,00	72.243.650,00	(38.014.150,00)	65,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.257.800,00	72.243.650,00	(38.014.150,00)	65,52	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	41.702.500,00	40.869.900,00	(832.600,00)	98,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.702.500,00	40.869.900,00	(832.600,00)	98,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.702.500,00	40.869.900,00	(832.600,00)	98,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005		PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	208.363.000,00	181.246.050,00	(27.116.950,00)	86,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	208.363.000,00	181.246.050,00	(27.116.950,00)	86,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.363.000,00	181.246.050,00	(27.116.950,00)	86,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013		FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	34.438.200,00	29.669.500,00	(4.768.700,00)	86,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	34.438.200,00	29.669.500,00	(4.768.700,00)	86,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.438.200,00	29.669.500,00	(4.768.700,00)	86,15	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018		FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	26.495.200,00	25.633.300,00	(861.900,00)	96,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	26.495.200,00	25.633.300,00	(861.900,00)	96,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.495.200,00	25.633.300,00	(861.900,00)	96,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.039.894.469,00	2.253.413.971,00	(786.480.498,00)	74,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.039.894.469,00	2.253.413.971,00	(786.480.498,00)	74,12	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.099.512.600,00	1.526.739.755,00	(572.772.845,00)	72,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.099.512.600,00	1.526.739.755,00	(572.772.845,00)	72,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.099.512.600,00	1.526.739.755,00	(572.772.845,00)	72,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009		FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	940.381.869,00	726.674.216,00	(213.707.653,00)	77,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	940.381.869,00	726.674.216,00	(213.707.653,00)	77,27	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	940.381.869,00	726.674.216,00	(213.707.653,00)	77,27	
				JUMLAH BELANJA	8.285.663.279,00	7.102.588.370,00	(1.183.074.909,00)	85,72	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.285.663.279,00)	(7.102.588.370,00)	1.183.074.909,00	85,72	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.285.663.279,00)	(7.102.588.370,00)	1.183.074.909,00	85,72	

DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	84.000.000,00	48.930.000,00	(35.070.000,00)	58,25	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.000.000,00	48.930.000,00	(35.070.000,00)	58,25	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	84.000.000,00	48.930.000,00	(35.070.000,00)	58,25	
				JUMLAH PENDAPATAN	84.000.000,00	48.930.000,00	(35.070.000,00)	58,25	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	24.284.958.793,00	23.771.801.781,00	(513.157.012,00)	97,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.818.816.107,00	5.414.525.759,00	(404.290.348,00)	93,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.005.272.771,00	3.707.759.737,00	(297.513.034,00)	92,57	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.904.961.771,00	3.607.981.737,00	(296.980.034,00)	92,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.904.961.771,00	3.607.981.737,00	(296.980.034,00)	92,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.904.961.771,00	3.607.981.737,00	(296.980.034,00)	92,39	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	100.311.000,00	99.778.000,00	(533.000,00)	99,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	100.311.000,00	99.778.000,00	(533.000,00)	99,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.311.000,00	99.778.000,00	(533.000,00)	99,46	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	270.061.686,00	266.947.913,00	(3.113.773,00)	98,84	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.784.100,00	13.784.000,00	(100,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.784.100,00	13.784.000,00	(100,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.784.100,00	13.784.000,00	(100,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	79.188.340,00	79.187.623,00	(717,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	79.188.340,00	79.187.623,00	(717,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.188.340,00	79.187.623,00	(717,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.225.246,00	19.142.000,00	(83.246,00)	99,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.225.246,00	19.142.000,00	(83.246,00)	99,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.225.246,00	19.142.000,00	(83.246,00)	99,56	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	157.864.000,00	154.834.290,00	(3.029.710,00)	98,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	157.864.000,00	154.834.290,00	(3.029.710,00)	98,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.864.000,00	154.834.290,00	(3.029.710,00)	98,08	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.336.175.600,00	1.243.298.655,00	(92.876.945,00)	93,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	85.095.600,00	77.638.502,00	(7.457.098,00)	91,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.095.600,00	77.638.502,00	(7.457.098,00)	91,23	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.095.600,00	77.638.502,00	(7.457.098,00)	91,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.251.080.000,00	1.165.660.153,00	(85.419.847,00)	93,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.251.080.000,00	1.165.660.153,00	(85.419.847,00)	93,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.251.080.000,00	1.165.660.153,00	(85.419.847,00)	93,17	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	207.306.050,00	196.519.454,00	(10.786.596,00)	94,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	91.443.750,00	83.835.899,00	(7.607.851,00)	91,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.443.750,00	83.835.899,00	(7.607.851,00)	91,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.443.750,00	83.835.899,00	(7.607.851,00)	91,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	54.080.000,00	50.901.255,00	(3.178.745,00)	94,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	54.080.000,00	50.901.255,00	(3.178.745,00)	94,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.080.000,00	50.901.255,00	(3.178.745,00)	94,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	61.782.300,00	61.782.300,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	61.782.300,00	61.782.300,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.782.300,00	61.782.300,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18.424.597.686,00	18.315.988.822,00	(108.608.864,00)	99,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01		PENETAPAN RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ KABUPATEN/KOTA	36.414.400,00	36.283.850,00	(130.550,00)	99,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0005		PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA	36.414.400,00	36.283.850,00	(130.550,00)	99,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.414.400,00	36.283.850,00	(130.550,00)	99,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.414.400,00	36.283.850,00	(130.550,00)	99,64	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	17.484.504.686,00	17.383.933.840,00	(100.570.846,00)	99,42	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	929.156.802,00	922.426.222,00	(6.730.580,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	929.156.802,00	922.426.222,00	(6.730.580,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	929.156.802,00	922.426.222,00	(6.730.580,00)	99,27	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	16.555.347.884,00	16.461.507.618,00	(93.840.266,00)	99,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.555.347.884,00	16.461.507.618,00	(93.840.266,00)	99,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.555.347.884,00	16.461.507.618,00	(93.840.266,00)	99,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03		PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C	42.355.000,00	42.162.200,00	(192.800,00)	99,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006		PENGAWASAN OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE C	42.355.000,00	42.162.200,00	(192.800,00)	99,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.355.000,00	42.162.200,00	(192.800,00)	99,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.355.000,00	42.162.200,00	(192.800,00)	99,54	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	108.529.000,00	106.809.150,00	(1.719.850,00)	98,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004		PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	108.529.000,00	106.809.150,00	(1.719.850,00)	98,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	108.529.000,00	106.809.150,00	(1.719.850,00)	98,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.529.000,00	106.809.150,00	(1.719.850,00)	98,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	369.421.700,00	364.446.482,00	(4.975.218,00)	98,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016		PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	369.421.700,00	364.446.482,00	(4.975.218,00)	98,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1	BELANJA OPERASI	369.421.700,00	364.446.482,00	(4.975.218,00)	98,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.421.700,00	364.446.482,00	(4.975.218,00)	98,65	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11		PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.280.000,00	31.226.400,00	(53.600,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11.0001		PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.280.000,00	31.226.400,00	(53.600,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.280.000,00	31.226.400,00	(53.600,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.280.000,00	31.226.400,00	(53.600,00)	99,82	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14		PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	352.092.900,00	351.126.900,00	(966.000,00)	99,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	352.092.900,00	351.126.900,00	(966.000,00)	99,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	352.092.900,00	351.126.900,00	(966.000,00)	99,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.092.900,00	351.126.900,00	(966.000,00)	99,72	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	41.545.000,00	41.287.200,00	(257.800,00)	99,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13		PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	41.545.000,00	41.287.200,00	(257.800,00)	99,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010		PENGAWASAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	41.545.000,00	41.287.200,00	(257.800,00)	99,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010	5.1	BELANJA OPERASI	41.545.000,00	41.287.200,00	(257.800,00)	99,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.545.000,00	41.287.200,00	(257.800,00)	99,37	
				JUMLAH BELANJA	24.284.958.793,00	23.771.801.781,00	(513.157.012,00)	97,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(24.200.958.793,00)	(23.722.871.781,00)	478.087.012,00	98,02	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.200.958.793,00)	(23.722.871.781,00)	478.087.012,00	98,02	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.040.459.896,00	5.925.708.988,00	(2.114.750.908,00)	73,69	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.364.835.742,00	4.199.089.841,00	(165.745.901,00)	96,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.715.197.121,28	3.610.574.525,00	(104.622.596,28)	97,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.662.087.121,28	3.557.464.525,00	(104.622.596,28)	97,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.662.087.121,28	3.557.464.525,00	(104.622.596,28)	97,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.662.087.121,28	3.557.464.525,00	(104.622.596,28)	97,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	53.110.000,00	53.110.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	53.110.000,00	53.110.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.110.000,00	53.110.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	225.527.602,00	222.699.352,00	(2.828.250,00)	98,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.771.275,00	6.081.020,00	(690.255,00)	89,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.771.275,00	6.081.020,00	(690.255,00)	89,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.771.275,00	6.081.020,00	(690.255,00)	89,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	49.908.049,00	48.326.455,00	(1.581.594,00)	96,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	49.908.049,00	48.326.455,00	(1.581.594,00)	96,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.908.049,00	48.326.455,00	(1.581.594,00)	96,83	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.572.390,00	23.357.942,00	(214.448,00)	99,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.572.390,00	23.357.942,00	(214.448,00)	99,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.572.390,00	23.357.942,00	(214.448,00)	99,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	145.275.888,00	144.933.935,00	(341.953,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	145.275.888,00	144.933.935,00	(341.953,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.275.888,00	144.933.935,00	(341.953,00)	99,76	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	83.560.000,00	63.753.500,00	(19.806.500,00)	76,29	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	8.015.000,00	0,00	(8.015.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	7.865.000,00	0,00	(7.865.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.865.000,00	0,00	(7.865.000,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	67.545.000,00	56.713.500,00	(10.831.500,00)	83,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	67.545.000,00	56.713.500,00	(10.831.500,00)	83,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.545.000,00	56.713.500,00	(10.831.500,00)	83,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.000.000,00	7.040.000,00	(960.000,00)	88,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.040.000,00	(960.000,00)	88,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.040.000,00	(960.000,00)	88,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	269.391.018,72	236.495.839,00	(32.895.179,72)	87,78	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	52.424.018,72	40.758.839,00	(11.665.179,72)	77,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.424.018,72	40.758.839,00	(11.665.179,72)	77,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.424.018,72	40.758.839,00	(11.665.179,72)	77,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	216.967.000,00	195.737.000,00	(21.230.000,00)	90,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	216.967.000,00	195.737.000,00	(21.230.000,00)	90,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.967.000,00	195.737.000,00	(21.230.000,00)	90,21	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	71.160.000,00	65.566.625,00	(5.593.375,00)	92,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.360.000,00	39.312.125,00	(47.875,00)	99,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.360.000,00	39.312.125,00	(47.875,00)	99,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.360.000,00	39.312.125,00	(47.875,00)	99,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.880.000,00	16.354.000,00	(5.526.000,00)	74,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.880.000,00	16.354.000,00	(5.526.000,00)	74,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.880.000,00	16.354.000,00	(5.526.000,00)	74,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	9.920.000,00	9.900.500,00	(19.500,00)	99,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.920.000,00	9.900.500,00	(19.500,00)	99,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.920.000,00	9.900.500,00	(19.500,00)	99,80	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.620.641.326,00	515.628.854,00	(1.105.012.472,00)	31,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.620.641.326,00	515.628.854,00	(1.105.012.472,00)	31,81	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014		RELASI MEDIA	260.877.000,00	208.170.771,00	(52.706.229,00)	79,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	260.877.000,00	208.170.771,00	(52.706.229,00)	79,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	260.877.000,00	208.170.771,00	(52.706.229,00)	79,79	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7.402.000,00	3.876.500,00	(3.525.500,00)	52,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	7.402.000,00	3.876.500,00	(3.525.500,00)	52,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.402.000,00	3.876.500,00	(3.525.500,00)	52,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019		MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK	2.270.000,00	1.230.000,00	(1.040.000,00)	54,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	2.270.000,00	1.230.000,00	(1.040.000,00)	54,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00	1.230.000,00	(1.040.000,00)	54,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021		PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	1.217.257.326,00	182.658.903,00	(1.034.598.423,00)	15,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	770.683.840,00	66.384.900,00	(704.298.940,00)	8,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.683.840,00	66.384.900,00	(704.298.940,00)	8,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2	BELANJA MODAL	446.573.486,00	116.274.003,00	(330.299.483,00)	26,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	446.573.486,00	116.274.003,00	(330.299.483,00)	26,03	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0023		PENYUSUNAN KONTEN	132.835.000,00	119.692.680,00	(13.142.320,00)	90,10	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	132.835.000,00	119.692.680,00	(13.142.320,00)	90,10	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.835.000,00	119.692.680,00	(13.142.320,00)	90,10	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.054.982.828,00	1.210.990.293,00	(843.992.535,00)	58,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.054.982.828,00	1.210.990.293,00	(843.992.535,00)	58,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016		PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI PEMERINTAH DAERAH	544.243.282,00	55.771.890,00	(488.471.392,00)	10,24	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	80.713.000,00	55.771.890,00	(24.941.110,00)	69,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.713.000,00	55.771.890,00	(24.941.110,00)	69,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	463.530.282,00	0,00	(463.530.282,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	463.530.282,00	0,00	(463.530.282,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0020		PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS YANG SESUAI DENGAN ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH DAERAH	412.258.200,00	382.345.764,00	(29.912.436,00)	92,74	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	382.008.200,00	352.345.764,00	(29.662.436,00)	92,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.008.200,00	352.345.764,00	(29.662.436,00)	92,23	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0020	5.2	BELANJA MODAL	30.250.000,00	30.000.000,00	(250.000,00)	99,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0020	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.250.000,00	30.000.000,00	(250.000,00)	99,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0023		KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN ATAU KOTA CERDAS	25.473.800,00	3.658.000,00	(21.815.800,00)	14,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0023	5.1	BELANJA OPERASI	25.473.800,00	3.658.000,00	(21.815.800,00)	14,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.473.800,00	3.658.000,00	(21.815.800,00)	14,35	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024		PENYELENGGARAAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	383.866.866,00	179.345.139,00	(204.521.727,00)	46,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1	BELANJA OPERASI	175.605.800,00	151.890.638,00	(23.715.162,00)	86,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.605.800,00	151.890.638,00	(23.715.162,00)	86,49	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	208.261.066,00	27.454.501,00	(180.806.565,00)	13,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.261.066,00	27.454.501,00	(180.806.565,00)	13,18	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030		PENYEDIAAN AKSES INTERNET UNTUK PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SPBE	689.140.680,00	589.869.500,00	(99.271.180,00)	85,59	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030	5.1	BELANJA OPERASI	590.637.880,00	589.869.500,00	(768.380,00)	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.637.880,00	589.869.500,00	(768.380,00)	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030	5.2	BELANJA MODAL	98.502.800,00	0,00	(98.502.800,00)	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.502.800,00	0,00	(98.502.800,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	8.040.459.896,00	5.925.708.988,00	(2.114.750.908,00)	73,69	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(8.040.459.896,00)	(5.925.708.988,00)	2.114.750.908,00	73,69	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.040.459.896,00)	(5.925.708.988,00)	2.114.750.908,00	73,69	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL YANG SESUAI DENGAN PRINSIP SATU DATA INDONESIA	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44	
				JUMLAH BELANJA	65.721.400,00	61.411.370,00	(4.310.030,00)	93,44	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(65.721.400,00)	(61.411.370,00)	4.310.030,00	93,44	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(65.721.400,00)	(61.411.370,00)	4.310.030,00	93,44	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85	
				JUMLAH BELANJA	6.551.000,00	6.410.600,00	(140.400,00)	97,85	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(6.551.000,00)	(6.410.600,00)	140.400,00	97,85	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(6.551.000,00)	(6.410.600,00)	140.400,00	97,85	

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	3.722.764.195,00	3.099.221.870,00	(623.542.325,00)	83,25	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.981.705.526,00	1.729.602.040,00	(252.103.486,00)	87,27	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.365.250.718,00	1.241.068.904,00	(124.181.814,00)	90,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.323.092.718,00	1.202.664.904,00	(120.427.814,00)	90,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.323.092.718,00	1.202.664.904,00	(120.427.814,00)	90,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.323.092.718,00	1.202.664.904,00	(120.427.814,00)	90,89	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	42.158.000,00	38.404.000,00	(3.754.000,00)	91,09	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	42.158.000,00	38.404.000,00	(3.754.000,00)	91,09	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.158.000,00	38.404.000,00	(3.754.000,00)	91,09	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	180.041.042,00	150.859.513,00	(29.181.529,00)	83,79	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.775.900,00	1.775.900,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.775.900,00	1.775.900,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.775.900,00	1.775.900,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.560.753,00	19.037.708,00	(1.523.045,00)	92,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.560.753,00	19.037.708,00	(1.523.045,00)	92,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.560.753,00	19.037.708,00	(1.523.045,00)	92,59	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.783.100,00	14.542.600,00	(240.500,00)	98,37	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.783.100,00	14.542.600,00	(240.500,00)	98,37	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.783.100,00	14.542.600,00	(240.500,00)	98,37	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	142.921.289,00	115.503.305,00	(27.417.984,00)	80,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	142.921.289,00	115.503.305,00	(27.417.984,00)	80,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.921.289,00	115.503.305,00	(27.417.984,00)	80,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	133.713.766,00	121.396.300,00	(12.317.466,00)	90,78	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	87.090.066,00	78.410.400,00	(8.679.666,00)	90,03	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.392.126,00	4.173.600,00	(218.526,00)	95,02	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.392.126,00	4.173.600,00	(218.526,00)	95,02	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	82.697.940,00	74.236.800,00	(8.461.140,00)	89,76	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.697.940,00	74.236.800,00	(8.461.140,00)	89,76	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	46.623.700,00	42.985.900,00	(3.637.800,00)	92,19	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	46.623.700,00	42.985.900,00	(3.637.800,00)	92,19	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.623.700,00	42.985.900,00	(3.637.800,00)	92,19	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	253.590.000,00	176.529.000,00	(77.061.000,00)	69,61	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.600.000,00	4.359.000,00	(5.241.000,00)	45,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	4.359.000,00	(5.241.000,00)	45,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	4.359.000,00	(5.241.000,00)	45,40	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	243.990.000,00	172.170.000,00	(71.820.000,00)	70,56	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	243.990.000,00	172.170.000,00	(71.820.000,00)	70,56	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.990.000,00	172.170.000,00	(71.820.000,00)	70,56	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	49.110.000,00	39.748.323,00	(9.361.677,00)	80,93	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	30.800.000,00	29.231.723,00	(1.568.277,00)	94,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.800.000,00	29.231.723,00	(1.568.277,00)	94,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	29.231.723,00	(1.568.277,00)	94,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	14.800.000,00	8.396.600,00	(6.403.400,00)	56,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.800.000,00	8.396.600,00	(6.403.400,00)	56,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	8.396.600,00	(6.403.400,00)	56,73	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.510.000,00	2.120.000,00	(1.390.000,00)	60,39	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.510.000,00	2.120.000,00	(1.390.000,00)	60,39	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	2.120.000,00	(1.390.000,00)	60,39	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	89.830.200,00	85.040.500,00	(4.789.700,00)	94,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	89.830.200,00	85.040.500,00	(4.789.700,00)	94,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.830.200,00	85.040.500,00	(4.789.700,00)	94,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.830.200,00	85.040.500,00	(4.789.700,00)	94,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.830.200,00	85.040.500,00	(4.789.700,00)	94,66	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	99.158.000,00	49.908.380,00	(49.249.620,00)	50,33	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.05.2.01		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.158.000,00	49.908.380,00	(49.249.620,00)	50,33	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.05.2.01.0001		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI	99.158.000,00	49.908.380,00	(49.249.620,00)	50,33	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.158.000,00	49.908.380,00	(49.249.620,00)	50,33	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.158.000,00	49.908.380,00	(49.249.620,00)	50,33	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.273.270.469,00	1.092.701.650,00	(180.568.819,00)	85,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	1.273.270.469,00	1.092.701.650,00	(180.568.819,00)	85,81	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0004		PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	94.750.242,00	77.600.800,00	(17.149.442,00)	81,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	94.750.242,00	77.600.800,00	(17.149.442,00)	81,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.750.242,00	77.600.800,00	(17.149.442,00)	81,90	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0008		PEMULIHAN USAHA MIKRO	1.073.536.227,00	1.015.100.850,00	(58.435.377,00)	94,55	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.073.536.227,00	1.015.100.850,00	(58.435.377,00)	94,55	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.073.536.227,00	1.015.100.850,00	(58.435.377,00)	94,55	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0015		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	104.984.000,00	0,00	(104.984.000,00)	0,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	104.984.000,00	0,00	(104.984.000,00)	0,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.984.000,00	0,00	(104.984.000,00)	0,00	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	278.800.000,00	141.969.300,00	(136.830.700,00)	50,92	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	278.800.000,00	141.969.300,00	(136.830.700,00)	50,92	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.08.2.01.0002		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	278.800.000,00	141.969.300,00	(136.830.700,00)	50,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	278.800.000,00	141.969.300,00	(136.830.700,00)	50,92	
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.08.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.800.000,00	141.969.300,00	(136.830.700,00)	50,92	
				JUMLAH BELANJA	3.722.764.195,00	3.099.221.870,00	(623.542.325,00)	83,25	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.722.764.195,00)	(3.099.221.870,00)	623.542.325,00	83,25	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.722.764.195,00)	(3.099.221.870,00)	623.542.325,00	83,25	

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	2.877.933.190,99	2.569.578.959,00	(308.354.231,99)	89,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.690.248.190,99	2.442.883.109,00	(247.365.081,99)	90,80	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.885.580.929,97	1.744.097.261,00	(141.483.668,97)	92,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.855.340.929,97	1.713.857.261,00	(141.483.668,97)	92,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.855.340.929,97	1.713.857.261,00	(141.483.668,97)	92,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.855.340.929,97	1.713.857.261,00	(141.483.668,97)	92,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	185.095.456,73	171.151.990,00	(13.943.466,73)	92,46	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.000.120,00	4.715.000,00	(285.120,00)	94,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.120,00	4.715.000,00	(285.120,00)	94,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.120,00	4.715.000,00	(285.120,00)	94,29	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	58.672.264,00	55.553.190,00	(3.119.074,00)	94,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.672.264,00	55.553.190,00	(3.119.074,00)	94,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.672.264,00	55.553.190,00	(3.119.074,00)	94,68	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.091.700,00	12.556.600,00	(7.535.100,00)	62,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.091.700,00	12.556.600,00	(7.535.100,00)	62,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.091.700,00	12.556.600,00	(7.535.100,00)	62,49	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	101.331.372,73	98.327.200,00	(3.004.172,73)	97,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	101.331.372,73	98.327.200,00	(3.004.172,73)	97,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.331.372,73	98.327.200,00	(3.004.172,73)	97,03	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	58.674.400,00	46.342.888,00	(12.331.512,00)	78,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	20.749.000,00	11.325.000,00	(9.424.000,00)	54,58	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	225.000,00	(75.000,00)	75,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	225.000,00	(75.000,00)	75,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	20.449.000,00	11.100.000,00	(9.349.000,00)	54,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.449.000,00	11.100.000,00	(9.349.000,00)	54,28	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	37.925.400,00	35.017.888,00	(2.907.512,00)	92,33	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	225.000,00	0,00	(225.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	0,00	(225.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	37.700.400,00	35.017.888,00	(2.682.512,00)	92,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.700.400,00	35.017.888,00	(2.682.512,00)	92,88	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	477.307.404,29	403.053.320,00	(74.254.084,29)	84,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	92.101.404,29	51.060.320,00	(41.041.084,29)	55,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.101.404,29	51.060.320,00	(41.041.084,29)	55,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.101.404,29	51.060.320,00	(41.041.084,29)	55,43	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	385.206.000,00	351.993.000,00	(33.213.000,00)	91,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	385.206.000,00	351.993.000,00	(33.213.000,00)	91,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.206.000,00	351.993.000,00	(33.213.000,00)	91,37	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	83.590.000,00	78.237.650,00	(5.352.350,00)	93,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	38.500.000,00	35.617.800,00	(2.882.200,00)	92,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.500.000,00	35.617.800,00	(2.882.200,00)	92,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	35.617.800,00	(2.882.200,00)	92,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	44.940.000,00	42.619.850,00	(2.320.150,00)	94,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	44.940.000,00	42.619.850,00	(2.320.150,00)	94,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.940.000,00	42.619.850,00	(2.320.150,00)	94,83	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	11.620.000,00	10.456.800,00	(1.163.200,00)	89,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.01		PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.240.000,00	3.671.600,00	(568.400,00)	86,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	4.240.000,00	3.671.600,00	(568.400,00)	86,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.240.000,00	3.671.600,00	(568.400,00)	86,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	3.671.600,00	(568.400,00)	86,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.02		PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	7.380.000,00	6.785.200,00	(594.800,00)	91,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.02.0004		PENYUSUNAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	7.380.000,00	6.785.200,00	(594.800,00)	91,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.380.000,00	6.785.200,00	(594.800,00)	91,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	6.785.200,00	(594.800,00)	91,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	36.310.000,00	8.567.400,00	(27.742.600,00)	23,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.03.2.01		PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.310.000,00	8.567.400,00	(27.742.600,00)	23,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.03.2.01.0002		PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.310.000,00	8.567.400,00	(27.742.600,00)	23,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.310.000,00	8.567.400,00	(27.742.600,00)	23,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.310.000,00	8.567.400,00	(27.742.600,00)	23,59	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	139.755.000,00	107.671.650,00	(32.083.350,00)	77,04	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	139.755.000,00	107.671.650,00	(32.083.350,00)	77,04	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	105.600.000,00	77.792.700,00	(27.807.300,00)	73,66	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	105.600.000,00	77.792.700,00	(27.807.300,00)	73,66	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.600.000,00	77.792.700,00	(27.807.300,00)	73,66	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0007		PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	8.990.000,00	4.716.800,00	(4.273.200,00)	52,46	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.990.000,00	4.716.800,00	(4.273.200,00)	52,46	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.990.000,00	4.716.800,00	(4.273.200,00)	52,46	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0008		PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	25.165.000,00	25.162.150,00	(2.850,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	25.165.000,00	25.162.150,00	(2.850,00)	99,98	
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.165.000,00	25.162.150,00	(2.850,00)	99,98	
				JUMLAH BELANJA	2.877.933.190,99	2.569.578.959,00	(308.354.231,99)	89,28	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.877.933.190,99)	(2.569.578.959,00)	308.354.231,99	89,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.877.933.190,99)	(2.569.578.959,00)	308.354.231,99	89,28	

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Arsip dan Perpustakaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	116.526.100,00	106.634.250,00	(9.891.850,00)	91,51	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	116.526.100,00	106.634.250,00	(9.891.850,00)	91,51	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.039.400,00	23.672.800,00	(1.366.600,00)	94,54	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0004		PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN	25.039.400,00	23.672.800,00	(1.366.600,00)	94,54	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.039.400,00	23.672.800,00	(1.366.600,00)	94,54	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.039.400,00	23.672.800,00	(1.366.600,00)	94,54	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	91.486.700,00	82.961.450,00	(8.525.250,00)	90,68	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0007		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	12.909.900,00	9.101.400,00	(3.808.500,00)	70,49	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	12.909.900,00	9.101.400,00	(3.808.500,00)	70,49	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.909.900,00	9.101.400,00	(3.808.500,00)	70,49	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010		SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT	78.576.800,00	73.860.050,00	(4.716.750,00)	93,99	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	78.126.800,00	73.410.050,00	(4.716.750,00)	93,96	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.126.800,00	73.410.050,00	(4.716.750,00)	93,96	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	5.2	BELANJA MODAL	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	116.526.100,00	106.634.250,00	(9.891.850,00)	91,51	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(116.526.100,00)	(106.634.250,00)	9.891.850,00	91,51	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(116.526.100,00)	(106.634.250,00)	9.891.850,00	91,51	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Arsip dan Perpustakaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.568.846.841,00	3.324.318.790,00	(244.528.051,00)	93,14	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.529.763.141,00	3.290.638.940,00	(239.124.201,00)	93,22	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.890.375.592,00	2.703.427.431,00	(186.948.161,00)	93,53	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.851.415.592,00	2.666.867.431,00	(184.548.161,00)	93,52	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.851.415.592,00	2.666.867.431,00	(184.548.161,00)	93,52	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.851.415.592,00	2.666.867.431,00	(184.548.161,00)	93,52	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	38.960.000,00	36.560.000,00	(2.400.000,00)	93,83	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	38.960.000,00	36.560.000,00	(2.400.000,00)	93,83	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.960.000,00	36.560.000,00	(2.400.000,00)	93,83	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	136.692.669,00	116.901.689,00	(19.790.980,00)	85,52	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.180.200,00	2.050.000,00	(130.200,00)	94,02	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.180.200,00	2.050.000,00	(130.200,00)	94,02	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.180.200,00	2.050.000,00	(130.200,00)	94,02	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	21.265.059,00	16.185.187,00	(5.079.872,00)	76,11	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.265.059,00	16.185.187,00	(5.079.872,00)	76,11	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.265.059,00	16.185.187,00	(5.079.872,00)	76,11	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.540.010,00	10.790.000,00	(3.750.010,00)	74,20	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.540.010,00	10.790.000,00	(3.750.010,00)	74,20	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.540.010,00	10.790.000,00	(3.750.010,00)	74,20	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	98.707.400,00	87.876.502,00	(10.830.898,00)	89,02	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	98.707.400,00	87.876.502,00	(10.830.898,00)	89,02	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.707.400,00	87.876.502,00	(10.830.898,00)	89,02	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	62.896.636,00	60.449.151,00	(2.447.485,00)	96,10	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	62.896.636,00	60.449.151,00	(2.447.485,00)	96,10	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	0,00	(450.000,00)	0,00	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	62.446.636,00	60.449.151,00	(1.997.485,00)	96,80	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.446.636,00	60.449.151,00	(1.997.485,00)	96,80	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	361.778.244,00	342.959.699,00	(18.818.545,00)	94,79	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	121.996.244,00	106.622.699,00	(15.373.545,00)	87,39	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	121.996.244,00	106.622.699,00	(15.373.545,00)	87,39	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.996.244,00	106.622.699,00	(15.373.545,00)	87,39	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	239.782.000,00	236.337.000,00	(3.445.000,00)	98,56	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	239.782.000,00	236.337.000,00	(3.445.000,00)	98,56	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.782.000,00	236.337.000,00	(3.445.000,00)	98,56	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	78.020.000,00	66.900.970,00	(11.119.030,00)	85,74	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	51.000.000,00	42.165.220,00	(8.834.780,00)	82,67	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	42.165.220,00	(8.834.780,00)	82,67	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	42.165.220,00	(8.834.780,00)	82,67	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	18.520.000,00	16.245.000,00	(2.275.000,00)	87,71	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.520.000,00	16.245.000,00	(2.275.000,00)	87,71	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.520.000,00	16.245.000,00	(2.275.000,00)	87,71	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	8.500.000,00	8.490.750,00	(9.250,00)	99,89	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.490.750,00	(9.250,00)	99,89	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.490.750,00	(9.250,00)	99,89	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	39.083.700,00	33.679.850,00	(5.403.850,00)	86,17	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.272.400,00	18.877.250,00	(5.395.150,00)	77,77	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	10.357.000,00	8.310.050,00	(2.046.950,00)	80,23	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.357.000,00	8.310.050,00	(2.046.950,00)	80,23	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.357.000,00	8.310.050,00	(2.046.950,00)	80,23	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003		PENGAWASAN ARSIP DINAMIS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	13.915.400,00	10.567.200,00	(3.348.200,00)	75,93	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	13.915.400,00	10.567.200,00	(3.348.200,00)	75,93	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.915.400,00	10.567.200,00	(3.348.200,00)	75,93	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.02		PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.811.300,00	14.802.600,00	(8.700,00)	99,94	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.02.0004		AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	14.811.300,00	14.802.600,00	(8.700,00)	99,94	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.811.300,00	14.802.600,00	(8.700,00)	99,94	
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.811.300,00	14.802.600,00	(8.700,00)	99,94	
				JUMLAH BELANJA	3.568.846.841,00	3.324.318.790,00	(244.528.051,00)	93,14	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(3.568.846.841,00)	(3.324.318.790,00)	244.528.051,00	93,14	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.568.846.841,00)	(3.324.318.790,00)	244.528.051,00	93,14	

DINAS PARIWISATA
PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.26.2.19.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05	
	3.26.2.19.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05	
	3.26.2.19.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05	
				JUMLAH PENDAPATAN	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	8.158.337.144,00	7.247.621.258,00	(910.715.886,00)	88,83	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.950.721.496,00	4.503.614.420,00	(447.107.076,00)	90,96	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.673.652.439,00	3.360.346.848,00	(313.305.591,00)	91,47	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.603.282.439,00	3.293.728.848,00	(309.553.591,00)	91,40	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.603.282.439,00	3.293.728.848,00	(309.553.591,00)	91,40	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.603.282.439,00	3.293.728.848,00	(309.553.591,00)	91,40	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	70.370.000,00	66.618.000,00	(3.752.000,00)	94,66	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	70.370.000,00	66.618.000,00	(3.752.000,00)	94,66	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.370.000,00	66.618.000,00	(3.752.000,00)	94,66	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	176.194.017,00	166.308.897,00	(9.885.120,00)	94,38	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.674.900,00	4.460.000,00	(3.214.900,00)	58,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.674.900,00	4.460.000,00	(3.214.900,00)	58,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.674.900,00	4.460.000,00	(3.214.900,00)	58,11	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	44.906.517,00	44.784.092,00	(122.425,00)	99,72	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.451.517,00	40.364.092,00	(87.425,00)	99,78	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.451.517,00	40.364.092,00	(87.425,00)	99,78	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.455.000,00	4.420.000,00	(35.000,00)	99,21	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.455.000,00	4.420.000,00	(35.000,00)	99,21	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.587.000,00	13.700.000,00	(2.887.000,00)	82,59	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.587.000,00	13.700.000,00	(2.887.000,00)	82,59	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.587.000,00	13.700.000,00	(2.887.000,00)	82,59	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	107.025.600,00	103.364.805,00	(3.660.795,00)	96,57	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	107.025.600,00	103.364.805,00	(3.660.795,00)	96,57	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.025.600,00	103.364.805,00	(3.660.795,00)	96,57	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.940.000,00	7.825.500,00	(114.500,00)	98,55	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.940.000,00	7.825.500,00	(114.500,00)	98,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	7.940.000,00	7.825.500,00	(114.500,00)	98,55	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.940.000,00	7.825.500,00	(114.500,00)	98,55	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.033.103.040,00	920.836.625,00	(112.266.415,00)	89,13	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	321.317.040,00	244.425.200,00	(76.891.840,00)	76,06	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	321.317.040,00	244.425.200,00	(76.891.840,00)	76,06	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	321.317.040,00	244.425.200,00	(76.891.840,00)	76,06	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	711.786.000,00	676.411.425,00	(35.374.575,00)	95,03	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	711.786.000,00	676.411.425,00	(35.374.575,00)	95,03	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.786.000,00	676.411.425,00	(35.374.575,00)	95,03	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	59.832.000,00	48.296.550,00	(11.535.450,00)	80,72	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	29.000.000,00	27.664.350,00	(1.335.650,00)	95,39	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	27.664.350,00	(1.335.650,00)	95,39	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	27.664.350,00	(1.335.650,00)	95,39	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	10.450.000,00	6.328.200,00	(4.121.800,00)	60,55	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.450.000,00	6.328.200,00	(4.121.800,00)	60,55	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	6.328.200,00	(4.121.800,00)	60,55	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	14.740.000,00	13.560.000,00	(1.180.000,00)	91,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.740.000,00	13.560.000,00	(1.180.000,00)	91,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.740.000,00	13.560.000,00	(1.180.000,00)	91,99	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.642.000,00	744.000,00	(4.898.000,00)	13,18	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.642.000,00	744.000,00	(4.898.000,00)	13,18	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.642.000,00	744.000,00	(4.898.000,00)	13,18	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	486.590.000,00	465.947.700,00	(20.642.300,00)	95,75	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.02		PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	486.590.000,00	465.947.700,00	(20.642.300,00)	95,75	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN MELALUI KEMITRAAN BERBASIS PENEGUHAN KEMANDIRIAN EKONOMI PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	486.590.000,00	465.947.700,00	(20.642.300,00)	95,75	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	486.590.000,00	465.947.700,00	(20.642.300,00)	95,75	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.590.000,00	465.947.700,00	(20.642.300,00)	95,75	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.571.025.648,00	2.129.204.958,00	(441.820.690,00)	82,81	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.101.961.843,00	833.394.523,00	(268.567.320,00)	75,62	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.101.961.843,00	833.394.523,00	(268.567.320,00)	75,62	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.088.994.823,00	833.394.523,00	(255.600.300,00)	76,52	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.088.994.823,00	833.394.523,00	(255.600.300,00)	76,52	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	12.967.020,00	0,00	(12.967.020,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.967.020,00	0,00	(12.967.020,00)	0,00	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.063.805,00	45.620.000,00	(86.443.805,00)	34,54	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0004		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	51.057.605,00	21.510.000,00	(29.547.605,00)	42,12	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.057.605,00	21.510.000,00	(29.547.605,00)	42,12	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.057.605,00	21.510.000,00	(29.547.605,00)	42,12	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0006		KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA	81.006.200,00	24.110.000,00	(56.896.200,00)	29,76	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	81.006.200,00	24.110.000,00	(56.896.200,00)	29,76	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.006.200,00	24.110.000,00	(56.896.200,00)	29,76	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.03		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	457.000.000,00	379.017.300,00	(77.982.700,00)	82,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0007		PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA BAGI YANG BERPRESTASI DAN/ATAU BERJASA DALAM MEMAJUKAN OLAHRAGA	457.000.000,00	379.017.300,00	(77.982.700,00)	82,93	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	457.000.000,00	379.017.300,00	(77.982.700,00)	82,93	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.000.000,00	379.017.300,00	(77.982.700,00)	82,93	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	850.000.000,00	849.038.335,00	(961.665,00)	99,88	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0006		PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT	850.000.000,00	849.038.335,00	(961.665,00)	99,88	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	850.000.000,00	849.038.335,00	(961.665,00)	99,88	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0006	5.1.05	Belanja Hibah	850.000.000,00	849.038.335,00	(961.665,00)	99,88	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.05		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	30.000.000,00	22.134.800,00	(7.865.200,00)	73,78	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.05.0006		PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI	30.000.000,00	22.134.800,00	(7.865.200,00)	73,78	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	22.134.800,00	(7.865.200,00)	73,78	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.05.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	22.134.800,00	(7.865.200,00)	73,78	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000,00	148.854.180,00	(1.145.820,00)	99,23	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	150.000.000,00	148.854.180,00	(1.145.820,00)	99,23	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0002		PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH	150.000.000,00	148.854.180,00	(1.145.820,00)	99,23	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	148.854.180,00	(1.145.820,00)	99,23	
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	148.854.180,00	(1.145.820,00)	99,23	
				JUMLAH BELANJA	8.158.337.144,00	7.247.621.258,00	(910.715.886,00)	88,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(7.826.337.144,00)	(7.021.664.258,00)	804.672.886,00	89,71	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.826.337.144,00)	(7.021.664.258,00)	804.672.886,00	89,71	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.26.2.19.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05	
	3.26.2.19.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05	
	3.26.2.19.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05	
				JUMLAH PENDAPATAN	332.000.000,00	225.957.000,00	(106.043.000,00)	68,05	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.456.971.843,00	663.021.350,00	(793.950.493,00)	45,50	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.078.949.163,00	377.993.350,00	(700.955.813,00)	35,03	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.078.949.163,00	377.993.350,00	(700.955.813,00)	35,03	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.078.949.163,00	377.993.350,00	(700.955.813,00)	35,03	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	453.250.585,00	377.143.350,00	(76.107.235,00)	83,20	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.250.585,00	377.143.350,00	(76.107.235,00)	83,20	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	625.698.578,00	850.000,00	(624.848.578,00)	0,13	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.686.200,00	850.000,00	(1.836.200,00)	31,64	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	623.012.378,00	0,00	(623.012.378,00)	0,00	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	307.133.000,00	220.337.000,00	(86.796.000,00)	71,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	307.133.000,00	220.337.000,00	(86.796.000,00)	71,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0007		PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	307.133.000,00	220.337.000,00	(86.796.000,00)	71,73	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	268.133.000,00	181.347.000,00	(86.786.000,00)	67,63	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.133.000,00	181.347.000,00	(86.786.000,00)	67,63	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	39.000.000,00	38.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	38.990.000,00	(10.000,00)	99,97	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	70.889.680,00	64.691.000,00	(6.198.680,00)	91,25	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.05.2.01		PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	70.889.680,00	64.691.000,00	(6.198.680,00)	91,25	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.05.2.01.0005		FASILITASI PROSES KREASI, PRODUKSI, DISTRIBUSI KONSUMSI DAN KONSERVASI EKONOMI KREATIF	70.889.680,00	64.691.000,00	(6.198.680,00)	91,25	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.889.680,00	64.691.000,00	(6.198.680,00)	91,25	
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.889.680,00	64.691.000,00	(6.198.680,00)	91,25	
				JUMLAH BELANJA	1.456.971.843,00	663.021.350,00	(793.950.493,00)	45,50	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.124.971.843,00)	(437.064.350,00)	687.907.493,00	38,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.124.971.843,00)	(437.064.350,00)	687.907.493,00	38,85	

DINAS PERTANIAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	303.536.000,00	300.342.000,00	(3.194.000,00)	98,94	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.536.000,00	300.342.000,00	(3.194.000,00)	98,94	
	3.27.2.09.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	303.536.000,00	300.342.000,00	(3.194.000,00)	98,94	
				JUMLAH PENDAPATAN	303.536.000,00	300.342.000,00	(3.194.000,00)	98,94	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	21.403.829.824,61	19.004.593.189,00	(2.399.236.635,61)	88,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.140.451.334,61	14.684.448.865,00	(456.002.469,61)	96,98	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.360.796.342,61	13.066.717.193,00	(294.079.149,61)	97,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.273.366.342,61	12.983.667.193,00	(289.699.149,61)	97,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.273.366.342,61	12.983.667.193,00	(289.699.149,61)	97,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	13.273.366.342,61	12.983.667.193,00	(289.699.149,61)	97,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	87.430.000,00	83.050.000,00	(4.380.000,00)	94,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	87.430.000,00	83.050.000,00	(4.380.000,00)	94,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.430.000,00	83.050.000,00	(4.380.000,00)	94,99	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	249.838.894,00	243.200.224,00	(6.638.670,00)	97,34	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	54.589.694,00	52.462.950,00	(2.126.744,00)	96,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.589.694,00	52.462.950,00	(2.126.744,00)	96,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.589.694,00	52.462.950,00	(2.126.744,00)	96,10	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.744.600,00	8.863.900,00	(1.880.700,00)	82,49	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.744.600,00	8.863.900,00	(1.880.700,00)	82,49	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.744.600,00	8.863.900,00	(1.880.700,00)	82,49	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	184.504.600,00	181.873.374,00	(2.631.226,00)	98,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	184.504.600,00	181.873.374,00	(2.631.226,00)	98,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.504.600,00	181.873.374,00	(2.631.226,00)	98,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.390.440.598,00	1.268.932.857,00	(121.507.741,00)	91,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	165.347.598,00	141.393.857,00	(23.953.741,00)	85,51	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	162.540.000,00	138.596.657,00	(23.943.343,00)	85,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.540.000,00	138.596.657,00	(23.943.343,00)	85,26	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.2	BELANJA MODAL	2.807.598,00	2.797.200,00	(10.398,00)	99,62	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.807.598,00	2.797.200,00	(10.398,00)	99,62	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.225.093.000,00	1.127.539.000,00	(97.554.000,00)	92,03	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.225.093.000,00	1.127.539.000,00	(97.554.000,00)	92,03	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.093.000,00	1.127.539.000,00	(97.554.000,00)	92,03	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	139.375.500,00	105.598.591,00	(33.776.909,00)	75,76	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	87.000.000,00	69.306.091,00	(17.693.909,00)	79,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.000.000,00	69.306.091,00	(17.693.909,00)	79,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	69.306.091,00	(17.693.909,00)	79,66	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.900.000,00	33.850.500,00	(12.049.500,00)	73,74	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	45.900.000,00	33.850.500,00	(12.049.500,00)	73,74	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	33.850.500,00	(12.049.500,00)	73,74	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	6.475.500,00	2.442.000,00	(4.033.500,00)	37,71	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.780.000,00	2.442.000,00	(1.338.000,00)	64,60	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	2.442.000,00	(1.338.000,00)	64,60	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	2.695.500,00	0,00	(2.695.500,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.695.500,00	0,00	(2.695.500,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.614.102.231,00	1.370.445.498,00	(243.656.733,00)	84,90	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02		PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	975.577.234,00	764.047.291,00	(211.529.943,00)	78,31	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002		PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	158.216.724,00	146.822.950,00	(11.393.774,00)	92,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	158.216.724,00	146.822.950,00	(11.393.774,00)	92,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.216.724,00	146.822.950,00	(11.393.774,00)	92,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003		PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN	249.393.835,00	198.778.925,00	(50.614.910,00)	79,70	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	249.393.835,00	198.778.925,00	(50.614.910,00)	79,70	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.393.835,00	198.778.925,00	(50.614.910,00)	79,70	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0004		PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN	567.966.675,00	418.445.416,00	(149.521.259,00)	73,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	567.966.675,00	418.445.416,00	(149.521.259,00)	73,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	567.966.675,00	418.445.416,00	(149.521.259,00)	73,67	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	420.967.197,00	396.731.198,00	(24.235.999,00)	94,24	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0008		PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	420.967.197,00	396.731.198,00	(24.235.999,00)	94,24	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0008	5.1	BELANJA OPERASI	420.967.197,00	396.731.198,00	(24.235.999,00)	94,24	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.967.197,00	396.731.198,00	(24.235.999,00)	94,24	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	217.557.800,00	209.667.009,00	(7.890.791,00)	96,37	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004		PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	217.557.800,00	209.667.009,00	(7.890.791,00)	96,37	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	217.557.800,00	209.667.009,00	(7.890.791,00)	96,37	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.557.800,00	209.667.009,00	(7.890.791,00)	96,37	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.251.789.574,00	1.043.592.201,00	(1.208.197.373,00)	46,34	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.197.930.254,00	213.149.607,00	(984.780.647,00)	17,79	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	277.815.005,00	103.505.907,00	(174.309.098,00)	37,25	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	277.815.005,00	103.505.907,00	(174.309.098,00)	37,25	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.815.005,00	103.505.907,00	(174.309.098,00)	37,25	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005		PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN	920.115.249,00	109.643.700,00	(810.471.549,00)	11,91	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	920.115.249,00	109.643.700,00	(810.471.549,00)	11,91	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	920.115.249,00	109.643.700,00	(810.471.549,00)	11,91	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	1.053.859.320,00	830.442.594,00	(223.416.726,00)	78,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	684.508.800,00	545.919.100,00	(138.589.700,00)	79,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	684.508.800,00	545.919.100,00	(138.589.700,00)	79,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	684.508.800,00	545.919.100,00	(138.589.700,00)	79,75	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA	111.563.320,00	39.081.947,00	(72.481.373,00)	35,03	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	102.600,00	0,00	(102.600,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.600,00	0,00	(102.600,00)	0,00	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	111.460.720,00	39.081.947,00	(72.378.773,00)	35,06	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.460.720,00	39.081.947,00	(72.378.773,00)	35,06	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI	257.787.200,00	245.441.547,00	(12.345.653,00)	95,21	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	257.787.200,00	245.441.547,00	(12.345.653,00)	95,21	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.787.200,00	245.441.547,00	(12.345.653,00)	95,21	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	401.089.113,00	319.026.461,00	(82.062.652,00)	79,54	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01		PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.550.775,00	32.958.856,00	(14.591.919,00)	69,31	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008		PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.550.775,00	32.958.856,00	(14.591.919,00)	69,31	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	47.550.775,00	32.958.856,00	(14.591.919,00)	69,31	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.550.775,00	32.958.856,00	(14.591.919,00)	69,31	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	253.371.318,00	194.778.855,00	(58.592.463,00)	76,87	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	253.371.318,00	194.778.855,00	(58.592.463,00)	76,87	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	253.371.318,00	194.778.855,00	(58.592.463,00)	76,87	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.371.318,00	194.778.855,00	(58.592.463,00)	76,87	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04		PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100.167.020,00	91.288.750,00	(8.878.270,00)	91,13	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002		PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	100.167.020,00	91.288.750,00	(8.878.270,00)	91,13	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.026.610,00	83.163.550,00	(8.863.060,00)	90,36	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.026.610,00	83.163.550,00	(8.863.060,00)	90,36	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.140.410,00	8.125.200,00	(15.210,00)	99,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.140.410,00	8.125.200,00	(15.210,00)	99,81	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	86.444.200,00	73.971.700,00	(12.472.500,00)	85,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	86.444.200,00	73.971.700,00	(12.472.500,00)	85,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	86.444.200,00	73.971.700,00	(12.472.500,00)	85,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.444.200,00	73.971.700,00	(12.472.500,00)	85,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.444.200,00	73.971.700,00	(12.472.500,00)	85,57	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.909.953.372,00	1.513.108.464,00	(396.844.908,00)	79,22	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.909.953.372,00	1.513.108.464,00	(396.844.908,00)	79,22	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005		PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.909.953.372,00	1.513.108.464,00	(396.844.908,00)	79,22	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.909.953.372,00	1.513.108.464,00	(396.844.908,00)	79,22	
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.909.953.372,00	1.513.108.464,00	(396.844.908,00)	79,22	
				JUMLAH BELANJA	21.403.829.824,61	19.004.593.189,00	(2.399.236.635,61)	88,79	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(21.100.293.824,61)	(18.704.251.189,00)	2.396.042.635,61	88,64	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.100.293.824,61)	(18.704.251.189,00)	2.396.042.635,61	88,64	

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
				JUMLAH PENDAPATAN	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.192.360.857,00	4.973.786.060,00	(218.574.797,00)	95,79	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.905.534.286,00	3.742.850.145,00	(162.684.141,00)	95,83	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.312.472.276,00	3.233.194.524,00	(79.277.752,00)	97,60	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.239.999.276,00	3.162.289.524,00	(77.709.752,00)	97,60	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.239.999.276,00	3.162.289.524,00	(77.709.752,00)	97,60	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.239.999.276,00	3.162.289.524,00	(77.709.752,00)	97,60	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	72.473.000,00	70.905.000,00	(1.568.000,00)	97,83	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	72.473.000,00	70.905.000,00	(1.568.000,00)	97,83	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.473.000,00	70.905.000,00	(1.568.000,00)	97,83	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	191.486.015,00	183.284.499,00	(8.201.516,00)	95,71	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.227.200,00	4.752.500,00	(474.700,00)	90,91	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.227.200,00	4.752.500,00	(474.700,00)	90,91	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.227.200,00	4.752.500,00	(474.700,00)	90,91	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.823.615,00	31.239.000,00	(584.615,00)	98,16	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.823.615,00	31.239.000,00	(584.615,00)	98,16	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.823.615,00	31.239.000,00	(584.615,00)	98,16	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.473.200,00	11.875.900,00	(597.300,00)	95,21	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.473.200,00	11.875.900,00	(597.300,00)	95,21	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.473.200,00	11.875.900,00	(597.300,00)	95,21	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	141.962.000,00	135.417.099,00	(6.544.901,00)	95,38	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	141.962.000,00	135.417.099,00	(6.544.901,00)	95,38	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.962.000,00	135.417.099,00	(6.544.901,00)	95,38	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	28.462.500,00	23.274.999,00	(5.187.501,00)	81,77	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.462.500,00	23.274.999,00	(5.187.501,00)	81,77	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	28.462.500,00	23.274.999,00	(5.187.501,00)	81,77	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.462.500,00	23.274.999,00	(5.187.501,00)	81,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	285.593.495,00	226.632.046,00	(58.961.449,00)	79,35	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	76.831.495,00	56.506.046,00	(20.325.449,00)	73,54	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.831.495,00	56.506.046,00	(20.325.449,00)	73,54	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.831.495,00	56.506.046,00	(20.325.449,00)	73,54	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	208.762.000,00	170.126.000,00	(38.636.000,00)	81,49	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	208.762.000,00	170.126.000,00	(38.636.000,00)	81,49	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.762.000,00	170.126.000,00	(38.636.000,00)	81,49	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	87.520.000,00	76.464.077,00	(11.055.923,00)	87,36	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	25.000.000,00	23.958.777,00	(1.041.223,00)	95,83	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	23.958.777,00	(1.041.223,00)	95,83	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	23.958.777,00	(1.041.223,00)	95,83	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	50.750.000,00	43.370.300,00	(7.379.700,00)	85,45	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	50.750.000,00	43.370.300,00	(7.379.700,00)	85,45	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.750.000,00	43.370.300,00	(7.379.700,00)	85,45	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.770.000,00	9.135.000,00	(2.635.000,00)	77,61	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.770.000,00	9.135.000,00	(2.635.000,00)	77,61	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.770.000,00	9.135.000,00	(2.635.000,00)	77,61	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.531.000,00	1.479.800,00	(51.200,00)	96,65	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.02.2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	1.531.000,00	1.479.800,00	(51.200,00)	96,65	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.02.2.01.0001		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	1.531.000,00	1.479.800,00	(51.200,00)	96,65	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.531.000,00	1.479.800,00	(51.200,00)	96,65	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.531.000,00	1.479.800,00	(51.200,00)	96,65	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	263.857.271,00	250.791.415,00	(13.065.856,00)	95,04	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	263.857.271,00	250.791.415,00	(13.065.856,00)	95,04	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	263.857.271,00	250.791.415,00	(13.065.856,00)	95,04	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	263.857.271,00	250.791.415,00	(13.065.856,00)	95,04	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.857.271,00	250.791.415,00	(13.065.856,00)	95,04	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	52.814.800,00	49.234.400,00	(3.580.400,00)	93,22	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.04.2.03		PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	52.814.800,00	49.234.400,00	(3.580.400,00)	93,22	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.04.2.03.0002		PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	52.814.800,00	49.234.400,00	(3.580.400,00)	93,22	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.814.800,00	49.234.400,00	(3.580.400,00)	93,22	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.814.800,00	49.234.400,00	(3.580.400,00)	93,22	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	968.623.500,00	929.430.300,00	(39.193.200,00)	95,95	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.01		PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	903.798.500,00	878.132.800,00	(25.665.700,00)	97,16	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.01.0003		PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	903.798.500,00	878.132.800,00	(25.665.700,00)	97,16	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	903.798.500,00	878.132.800,00	(25.665.700,00)	97,16	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	903.798.500,00	878.132.800,00	(25.665.700,00)	97,16	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.825.000,00	51.297.500,00	(13.527.500,00)	79,13	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.825.000,00	51.297.500,00	(13.527.500,00)	79,13	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.825.000,00	51.297.500,00	(13.527.500,00)	79,13	
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.825.000,00	51.297.500,00	(13.527.500,00)	79,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	5.192.360.857,00	4.973.786.060,00	(218.574.797,00)	95,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.177.000.857,00)	(4.968.076.060,00)	208.924.797,00	95,96	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.177.000.857,00)	(4.968.076.060,00)	208.924.797,00	95,96	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
				JUMLAH PENDAPATAN	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000		5	BELANJA DAERAH	204.836.682,00	146.606.400,00	(58.230.282,00)	71,57	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	8.009.800,00	7.070.000,00	(939.800,00)	88,26	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.02.2.02		PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	8.009.800,00	7.070.000,00	(939.800,00)	88,26	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.02.2.02.0001		FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	8.009.800,00	7.070.000,00	(939.800,00)	88,26	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.009.800,00	7.070.000,00	(939.800,00)	88,26	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.009.800,00	7.070.000,00	(939.800,00)	88,26	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	49.953.972,00	27.205.000,00	(22.748.972,00)	54,46	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	46.572.972,00	24.320.000,00	(22.252.972,00)	52,21	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	46.572.972,00	24.320.000,00	(22.252.972,00)	52,21	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.572.972,00	24.320.000,00	(22.252.972,00)	52,21	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.572.972,00	24.320.000,00	(22.252.972,00)	52,21	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02		PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	3.381.000,00	2.885.000,00	(496.000,00)	85,32	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02.0001		PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.381.000,00	2.885.000,00	(496.000,00)	85,32	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.381.000,00	2.885.000,00	(496.000,00)	85,32	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.381.000,00	2.885.000,00	(496.000,00)	85,32	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	71.675.850,00	41.531.400,00	(30.144.450,00)	57,94	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.01		MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	71.675.850,00	41.531.400,00	(30.144.450,00)	57,94	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.01.0003		PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	71.675.850,00	41.531.400,00	(30.144.450,00)	57,94	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	71.675.850,00	41.531.400,00	(30.144.450,00)	57,94	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.675.850,00	41.531.400,00	(30.144.450,00)	57,94	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75.197.060,00	70.800.000,00	(4.397.060,00)	94,15	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	75.197.060,00	70.800.000,00	(4.397.060,00)	94,15	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	75.197.060,00	70.800.000,00	(4.397.060,00)	94,15	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.197.060,00	70.800.000,00	(4.397.060,00)	94,15	
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.197.060,00	70.800.000,00	(4.397.060,00)	94,15	
				JUMLAH BELANJA	204.836.682,00	146.606.400,00	(58.230.282,00)	71,57	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(189.476.682,00)	(140.896.400,00)	48.580.282,00	74,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(189.476.682,00)	(140.896.400,00)	48.580.282,00	74,36	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
	3.31.3.30.2.07.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
				JUMLAH PENDAPATAN	15.360.000,00	5.710.000,00	(9.650.000,00)	37,17	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000		5	BELANJA DAERAH	581.094.500,00	524.808.028,00	(56.286.472,00)	90,31	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	581.094.500,00	524.808.028,00	(56.286.472,00)	90,31	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	581.094.500,00	524.808.028,00	(56.286.472,00)	90,31	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	113.625.000,00	97.483.900,00	(16.141.100,00)	85,79	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.625.000,00	97.483.900,00	(16.141.100,00)	85,79	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.625.000,00	97.483.900,00	(16.141.100,00)	85,79	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	222.802.200,00	189.957.400,00	(32.844.800,00)	85,25	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	222.802.200,00	189.957.400,00	(32.844.800,00)	85,25	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.802.200,00	189.957.400,00	(32.844.800,00)	85,25	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	244.667.300,00	237.366.728,00	(7.300.572,00)	97,01	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	244.667.300,00	237.366.728,00	(7.300.572,00)	97,01	
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.667.300,00	237.366.728,00	(7.300.572,00)	97,01	
				JUMLAH BELANJA	581.094.500,00	524.808.028,00	(56.286.472,00)	90,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(565.734.500,00)	(519.098.028,00)	46.636.472,00	91,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(565.734.500,00)	(519.098.028,00)	46.636.472,00	91,75	

SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	(783.479.482,00)	86,37	
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	(783.479.482,00)	86,37	
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04.2.02		REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	(783.479.482,00)	86,37	
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04.2.02.0010		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	(783.479.482,00)	86,37	
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	(783.479.482,00)	86,37	
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000.000,00	4.216.520.518,00	(783.479.482,00)	84,33	
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04.2.02.0010	5.1.05	Belanja Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	(783.479.482,00)	86,37	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.750.000.000,00)	(4.966.520.518,00)	783.479.482,00	86,37	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.750.000.000,00)	(4.966.520.518,00)	783.479.482,00	86,37	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Hukum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	313.599.682,00	222.310.044,00	(91.289.638,00)	70,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	229.769.582,00	186.310.044,00	(43.459.538,00)	81,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	146.299.582,00	134.850.044,00	(11.449.538,00)	92,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.318.573,00	13.199.357,00	(119.216,00)	99,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.318.573,00	13.199.357,00	(119.216,00)	99,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.318.573,00	13.199.357,00	(119.216,00)	99,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.785.409,00	6.658.000,00	(1.127.409,00)	85,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.785.409,00	6.658.000,00	(1.127.409,00)	85,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.785.409,00	6.658.000,00	(1.127.409,00)	85,51	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	125.195.600,00	114.992.687,00	(10.202.913,00)	91,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	125.195.600,00	114.992.687,00	(10.202.913,00)	91,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.195.600,00	114.992.687,00	(10.202.913,00)	91,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	47.680.000,00	27.016.600,00	(20.663.400,00)	56,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.280.000,00	6.756.600,00	(1.523.400,00)	81,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.280.000,00	6.756.600,00	(1.523.400,00)	81,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.280.000,00	6.756.600,00	(1.523.400,00)	81,60	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	39.400.000,00	20.260.000,00	(19.140.000,00)	51,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	39.400.000,00	20.260.000,00	(19.140.000,00)	51,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.400.000,00	20.260.000,00	(19.140.000,00)	51,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.540.000,00	10.193.400,00	(11.346.600,00)	47,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	18.250.000,00	8.313.400,00	(9.936.600,00)	45,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.250.000,00	8.313.400,00	(9.936.600,00)	45,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.250.000,00	8.313.400,00	(9.936.600,00)	45,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.290.000,00	1.880.000,00	(1.410.000,00)	57,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.290.000,00	1.880.000,00	(1.410.000,00)	57,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.290.000,00	1.880.000,00	(1.410.000,00)	57,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	83.830.100,00	36.000.000,00	(47.830.100,00)	42,94	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	83.830.100,00	36.000.000,00	(47.830.100,00)	42,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	11.830.100,00	0,00	(11.830.100,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.830.100,00	0,00	(11.830.100,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.830.100,00	0,00	(11.830.100,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	72.000.000,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	50,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	50,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	36.000.000,00	(36.000.000,00)	50,00	
				JUMLAH BELANJA	313.599.682,00	222.310.044,00	(91.289.638,00)	70,88	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(313.599.682,00)	(222.310.044,00)	91.289.638,00	70,88	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(313.599.682,00)	(222.310.044,00)	91.289.638,00	70,88	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Organisasi

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	340.572.659,00	230.619.713,00	(109.952.946,00)	67,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	340.572.659,00	230.619.713,00	(109.952.946,00)	67,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	18.140.000,00	15.890.000,00	(2.250.000,00)	87,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	18.140.000,00	15.890.000,00	(2.250.000,00)	87,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.140.000,00	15.890.000,00	(2.250.000,00)	87,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	15.890.000,00	(2.250.000,00)	87,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	99.962.659,00	95.131.390,00	(4.831.269,00)	95,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.217.059,00	11.284.253,00	(3.932.806,00)	74,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.217.059,00	11.284.253,00	(3.932.806,00)	74,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.217.059,00	11.284.253,00	(3.932.806,00)	74,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.074.000,00	6.749.200,00	(324.800,00)	95,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.074.000,00	6.749.200,00	(324.800,00)	95,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.074.000,00	6.749.200,00	(324.800,00)	95,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	77.671.600,00	77.097.937,00	(573.663,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	77.671.600,00	77.097.937,00	(573.663,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.671.600,00	77.097.937,00	(573.663,00)	99,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	46.160.000,00	42.279.000,00	(3.881.000,00)	91,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.800.000,00	4.389.000,00	(411.000,00)	91,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.389.000,00	(411.000,00)	91,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.389.000,00	(411.000,00)	91,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	41.360.000,00	37.890.000,00	(3.470.000,00)	91,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.360.000,00	37.890.000,00	(3.470.000,00)	91,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.360.000,00	37.890.000,00	(3.470.000,00)	91,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.875.000,00	17.016.382,00	(5.858.618,00)	74,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	18.615.000,00	12.970.397,00	(5.644.603,00)	69,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.615.000,00	12.970.397,00	(5.644.603,00)	69,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.615.000,00	12.970.397,00	(5.644.603,00)	69,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.260.000,00	4.045.985,00	(214.015,00)	94,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.260.000,00	4.045.985,00	(214.015,00)	94,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	4.045.985,00	(214.015,00)	94,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	153.435.000,00	60.302.941,00	(93.132.059,00)	39,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	56.150.000,00	22.497.541,00	(33.652.459,00)	40,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.150.000,00	22.497.541,00	(33.652.459,00)	40,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.150.000,00	22.497.541,00	(33.652.459,00)	40,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	30.320.000,00	20.495.700,00	(9.824.300,00)	67,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.320.000,00	20.495.700,00	(9.824.300,00)	67,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.320.000,00	20.495.700,00	(9.824.300,00)	67,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	36.365.000,00	10.199.200,00	(26.165.800,00)	28,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.365.000,00	10.199.200,00	(26.165.800,00)	28,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.365.000,00	10.199.200,00	(26.165.800,00)	28,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	30.600.000,00	7.110.500,00	(23.489.500,00)	23,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	7.110.500,00	(23.489.500,00)	23,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	7.110.500,00	(23.489.500,00)	23,23	
				JUMLAH BELANJA	340.572.659,00	230.619.713,00	(109.952.946,00)	67,71	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(340.572.659,00)	(230.619.713,00)	109.952.946,00	67,71	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(340.572.659,00)	(230.619.713,00)	109.952.946,00	67,71	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	279.573.922,00	263.110.957,00	(16.462.965,00)	94,11	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.687.922,00	166.221.657,00	(13.466.265,00)	92,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	24.150.000,00	19.526.000,00	(4.624.000,00)	80,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	24.150.000,00	19.526.000,00	(4.624.000,00)	80,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.150.000,00	19.526.000,00	(4.624.000,00)	80,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.150.000,00	19.526.000,00	(4.624.000,00)	80,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	107.392.922,00	103.166.204,00	(4.226.718,00)	96,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.722.122,00	20.576.954,00	(145.168,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.722.122,00	20.576.954,00	(145.168,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.722.122,00	20.576.954,00	(145.168,00)	99,29	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.141.800,00	5.141.700,00	(100,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.141.800,00	5.141.700,00	(100,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.141.800,00	5.141.700,00	(100,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	81.529.000,00	77.447.550,00	(4.081.450,00)	94,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	81.529.000,00	77.447.550,00	(4.081.450,00)	94,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.529.000,00	77.447.550,00	(4.081.450,00)	94,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	31.160.000,00	26.993.152,00	(4.166.848,00)	86,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.600.000,00	5.613.152,00	(986.848,00)	85,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	5.613.152,00	(986.848,00)	85,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	5.613.152,00	(986.848,00)	85,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	24.560.000,00	21.380.000,00	(3.180.000,00)	87,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.560.000,00	21.380.000,00	(3.180.000,00)	87,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.560.000,00	21.380.000,00	(3.180.000,00)	87,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.985.000,00	16.536.301,00	(448.699,00)	97,35	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	13.615.000,00	13.482.551,00	(132.449,00)	99,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.615.000,00	13.482.551,00	(132.449,00)	99,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.615.000,00	13.482.551,00	(132.449,00)	99,02	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.370.000,00	3.053.750,00	(316.250,00)	90,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.370.000,00	3.053.750,00	(316.250,00)	90,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.370.000,00	3.053.750,00	(316.250,00)	90,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	99.886.000,00	96.889.300,00	(2.996.700,00)	96,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	99.886.000,00	96.889.300,00	(2.996.700,00)	96,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	99.886.000,00	96.889.300,00	(2.996.700,00)	96,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.886.000,00	96.889.300,00	(2.996.700,00)	96,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.886.000,00	96.889.300,00	(2.996.700,00)	96,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	JUMLAH BELANJA	279.573.922,00	263.110.957,00	(16.462.965,00)	94,11	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(279.573.922,00)	(263.110.957,00)	16.462.965,00	94,11	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(279.573.922,00)	(263.110.957,00)	16.462.965,00	94,11	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Perekonomian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	272.757.009,00	193.679.802,00	(79.077.207,00)	71,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.296.409,00	167.168.302,00	(35.128.107,00)	82,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	21.500.000,00	19.690.000,00	(1.810.000,00)	91,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	21.500.000,00	19.690.000,00	(1.810.000,00)	91,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	19.690.000,00	(1.810.000,00)	91,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	19.690.000,00	(1.810.000,00)	91,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	66.367.509,00	65.097.802,00	(1.269.707,00)	98,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.111.709,00	12.731.981,00	(379.728,00)	97,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.111.709,00	12.731.981,00	(379.728,00)	97,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.111.709,00	12.731.981,00	(379.728,00)	97,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.686.000,00	3.209.000,00	(477.000,00)	87,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.686.000,00	3.209.000,00	(477.000,00)	87,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.686.000,00	3.209.000,00	(477.000,00)	87,05	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	49.569.800,00	49.156.821,00	(412.979,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.569.800,00	49.156.821,00	(412.979,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.569.800,00	49.156.821,00	(412.979,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	41.218.900,00	30.200.000,00	(11.018.900,00)	73,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	41.218.900,00	30.200.000,00	(11.018.900,00)	73,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	0,00	(300.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	40.918.900,00	30.200.000,00	(10.718.900,00)	73,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.918.900,00	30.200.000,00	(10.718.900,00)	73,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	45.300.000,00	37.843.800,00	(7.456.200,00)	83,54	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.800.000,00	4.003.800,00	(796.200,00)	83,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.003.800,00	(796.200,00)	83,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.003.800,00	(796.200,00)	83,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	40.500.000,00	33.840.000,00	(6.660.000,00)	83,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	33.840.000,00	(6.660.000,00)	83,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	33.840.000,00	(6.660.000,00)	83,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.910.000,00	14.336.700,00	(13.573.300,00)	51,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	21.250.000,00	8.646.700,00	(12.603.300,00)	40,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.250.000,00	8.646.700,00	(12.603.300,00)	40,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	8.646.700,00	(12.603.300,00)	40,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.660.000,00	5.690.000,00	(970.000,00)	85,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.660.000,00	5.690.000,00	(970.000,00)	85,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	5.690.000,00	(970.000,00)	85,43	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	70.460.600,00	26.511.500,00	(43.949.100,00)	37,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	70.460.600,00	26.511.500,00	(43.949.100,00)	37,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	24.290.600,00	16.139.500,00	(8.151.100,00)	66,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.290.600,00	16.139.500,00	(8.151.100,00)	66,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.290.600,00	16.139.500,00	(8.151.100,00)	66,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	42.670.000,00	10.372.000,00	(32.298.000,00)	24,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	42.670.000,00	10.372.000,00	(32.298.000,00)	24,30	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.670.000,00	10.372.000,00	(32.298.000,00)	24,30	
				JUMLAH BELANJA	272.757.009,00	193.679.802,00	(79.077.207,00)	71,00	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(272.757.009,00)	(193.679.802,00)	79.077.207,00	71,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(272.757.009,00)	(193.679.802,00)	79.077.207,00	71,00	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	948.190.351,00	883.285.481,00	(64.904.870,00)	93,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	948.190.351,00	883.285.481,00	(64.904.870,00)	93,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	29.050.000,00	28.920.000,00	(130.000,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.050.000,00	28.920.000,00	(130.000,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.050.000,00	28.920.000,00	(130.000,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00	28.920.000,00	(130.000,00)	99,55	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	364.575.951,00	340.107.095,00	(24.468.856,00)	93,28	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.895.951,00	19.834.245,00	(61.706,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.895.951,00	19.834.245,00	(61.706,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.895.951,00	19.834.245,00	(61.706,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	344.680.000,00	320.272.850,00	(24.407.150,00)	92,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	344.680.000,00	320.272.850,00	(24.407.150,00)	92,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.680.000,00	320.272.850,00	(24.407.150,00)	92,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	12.350.000,00	11.373.543,00	(976.457,00)	92,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.350.000,00	11.373.543,00	(976.457,00)	92,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.350.000,00	11.373.543,00	(976.457,00)	92,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	11.373.543,00	(976.457,00)	92,09	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	62.510.000,00	48.698.930,00	(13.811.070,00)	77,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	39.500.000,00	34.099.230,00	(5.400.770,00)	86,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.500.000,00	34.099.230,00	(5.400.770,00)	86,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	34.099.230,00	(5.400.770,00)	86,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.010.000,00	14.599.700,00	(8.410.300,00)	63,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.010.000,00	14.599.700,00	(8.410.300,00)	63,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.010.000,00	14.599.700,00	(8.410.300,00)	63,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	479.704.400,00	454.185.913,00	(25.518.487,00)	94,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	388.930.000,00	380.307.750,00	(8.622.250,00)	97,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	388.930.000,00	380.307.750,00	(8.622.250,00)	97,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.930.000,00	380.307.750,00	(8.622.250,00)	97,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	60.569.400,00	43.768.800,00	(16.800.600,00)	72,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.569.400,00	43.768.800,00	(16.800.600,00)	72,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.569.400,00	43.768.800,00	(16.800.600,00)	72,26	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	30.205.000,00	30.109.363,00	(95.637,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.205.000,00	30.109.363,00	(95.637,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.205.000,00	30.109.363,00	(95.637,00)	99,68	
				JUMLAH BELANJA	948.190.351,00	883.285.481,00	(64.904.870,00)	93,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(948.190.351,00)	(883.285.481,00)	64.904.870,00	93,15	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(948.190.351,00)	(883.285.481,00)	64.904.870,00	93,15	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010		5	BELANJA DAERAH	411.685.297,00	253.547.825,00	(158.137.472,00)	61,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	312.803.297,00	230.277.915,00	(82.525.382,00)	73,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	143.009.297,00	105.766.315,00	(37.242.982,00)	73,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.599.897,00	22.975.206,00	(1.624.691,00)	93,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.599.897,00	22.975.206,00	(1.624.691,00)	93,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.599.897,00	22.975.206,00	(1.624.691,00)	93,39	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.546.000,00	5.499.660,00	(46.340,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.546.000,00	5.499.660,00	(46.340,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.546.000,00	5.499.660,00	(46.340,00)	99,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	112.863.400,00	77.291.449,00	(35.571.951,00)	68,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	112.863.400,00	77.291.449,00	(35.571.951,00)	68,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.863.400,00	77.291.449,00	(35.571.951,00)	68,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	44.844.000,00	18.880.000,00	(25.964.000,00)	42,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	44.844.000,00	18.880.000,00	(25.964.000,00)	42,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	44.844.000,00	18.880.000,00	(25.964.000,00)	42,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.844.000,00	18.880.000,00	(25.964.000,00)	42,10	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	78.590.000,00	67.490.000,00	(11.100.000,00)	85,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	78.590.000,00	67.490.000,00	(11.100.000,00)	85,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	78.590.000,00	67.490.000,00	(11.100.000,00)	85,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.590.000,00	67.490.000,00	(11.100.000,00)	85,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.180.000,00	15.961.600,00	(8.218.400,00)	66,01	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	16.750.000,00	9.486.600,00	(7.263.400,00)	56,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.750.000,00	9.486.600,00	(7.263.400,00)	56,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	9.486.600,00	(7.263.400,00)	56,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.430.000,00	6.475.000,00	(955.000,00)	87,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.430.000,00	6.475.000,00	(955.000,00)	87,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.430.000,00	6.475.000,00	(955.000,00)	87,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	98.882.000,00	23.269.910,00	(75.612.090,00)	23,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	98.882.000,00	23.269.910,00	(75.612.090,00)	23,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	47.774.000,00	15.725.000,00	(32.049.000,00)	32,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.774.000,00	15.725.000,00	(32.049.000,00)	32,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.774.000,00	15.725.000,00	(32.049.000,00)	32,91	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	51.108.000,00	7.544.910,00	(43.563.090,00)	14,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.280.000,00	7.544.910,00	(4.735.090,00)	61,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.280.000,00	7.544.910,00	(4.735.090,00)	61,44	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	38.828.000,00	0,00	(38.828.000,00)	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.828.000,00	0,00	(38.828.000,00)	0,00	
				JUMLAH BELANJA	411.685.297,00	253.547.825,00	(158.137.472,00)	61,58	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(411.685.297,00)	(253.547.825,00)	158.137.472,00	61,58	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(411.685.297,00)	(253.547.825,00)	158.137.472,00	61,58	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Sumber Daya Alam

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012		5	BELANJA DAERAH	191.692.451,00	169.038.224,00	(22.654.227,00)	88,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.619.999,00	157.952.924,00	(10.667.075,00)	93,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	55.520.000,00	50.365.000,00	(5.155.000,00)	90,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	39.270.000,00	35.510.000,00	(3.760.000,00)	90,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.270.000,00	35.510.000,00	(3.760.000,00)	90,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.270.000,00	35.510.000,00	(3.760.000,00)	90,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	16.250.000,00	14.855.000,00	(1.395.000,00)	91,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	16.250.000,00	14.855.000,00	(1.395.000,00)	91,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	14.855.000,00	(1.395.000,00)	91,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	67.089.999,00	65.358.974,00	(1.731.025,00)	97,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.999.199,00	10.870.974,00	(128.225,00)	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.999.199,00	10.870.974,00	(128.225,00)	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.999.199,00	10.870.974,00	(128.225,00)	98,83	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	54.116.800,00	52.514.000,00	(1.602.800,00)	97,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	54.116.800,00	52.514.000,00	(1.602.800,00)	97,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.116.800,00	52.514.000,00	(1.602.800,00)	97,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.560.000,00	26.137.750,00	(422.250,00)	98,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	4.800.000,00	4.437.750,00	(362.250,00)	92,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.437.750,00	(362.250,00)	92,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.437.750,00	(362.250,00)	92,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	21.760.000,00	21.700.000,00	(60.000,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.760.000,00	21.700.000,00	(60.000,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.760.000,00	21.700.000,00	(60.000,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.450.000,00	16.091.200,00	(3.358.800,00)	82,73	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	16.000.000,00	12.751.200,00	(3.248.800,00)	79,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	12.751.200,00	(3.248.800,00)	79,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	12.751.200,00	(3.248.800,00)	79,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	3.450.000,00	3.340.000,00	(110.000,00)	96,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.450.000,00	3.340.000,00	(110.000,00)	96,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.340.000,00	(110.000,00)	96,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	23.072.452,00	11.085.300,00	(11.987.152,00)	48,04	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	23.072.452,00	11.085.300,00	(11.987.152,00)	48,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	7.279.984,00	2.823.200,00	(4.456.784,00)	38,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.279.984,00	2.823.200,00	(4.456.784,00)	38,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.279.984,00	2.823.200,00	(4.456.784,00)	38,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	7.279.984,00	3.558.200,00	(3.721.784,00)	48,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.279.984,00	3.558.200,00	(3.721.784,00)	48,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.279.984,00	3.558.200,00	(3.721.784,00)	48,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	8.512.484,00	4.703.900,00	(3.808.584,00)	55,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.512.484,00	4.703.900,00	(3.808.584,00)	55,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.512.484,00	4.703.900,00	(3.808.584,00)	55,25	
				JUMLAH BELANJA	191.692.451,00	169.038.224,00	(22.654.227,00)	88,18	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(191.692.451,00)	(169.038.224,00)	22.654.227,00	88,18	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(191.692.451,00)	(169.038.224,00)	22.654.227,00	88,18	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Umum

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	17.358.523.705,00	14.357.091.183,00	(3.001.432.522,00)	82,70	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.358.523.705,00	14.357.091.183,00	(3.001.432.522,00)	82,70	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	50.290.000,00	40.210.000,00	(10.080.000,00)	79,95	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	50.290.000,00	40.210.000,00	(10.080.000,00)	79,95	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	50.290.000,00	40.210.000,00	(10.080.000,00)	79,95	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.290.000,00	40.210.000,00	(10.080.000,00)	79,95	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.602.286.532,00	4.201.527.261,00	(400.759.271,00)	91,29	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	150.644.055,00	108.877.480,00	(41.766.575,00)	72,27	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.644.055,00	108.877.480,00	(41.766.575,00)	72,27	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.644.055,00	108.877.480,00	(41.766.575,00)	72,27	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	298.396.827,00	272.965.140,00	(25.431.687,00)	91,47	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	289.239.327,00	272.965.140,00	(16.274.187,00)	94,37	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	289.239.327,00	272.965.140,00	(16.274.187,00)	94,37	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.157.500,00	0,00	(9.157.500,00)	0,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.157.500,00	0,00	(9.157.500,00)	0,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	433.270.650,00	344.482.369,00	(88.788.281,00)	79,50	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	433.270.650,00	344.482.369,00	(88.788.281,00)	79,50	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	433.270.650,00	344.482.369,00	(88.788.281,00)	79,50	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.719.975.000,00	3.475.202.272,00	(244.772.728,00)	93,42	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.719.975.000,00	3.475.202.272,00	(244.772.728,00)	93,42	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.719.975.000,00	3.475.202.272,00	(244.772.728,00)	93,42	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.643.831.307,00	2.468.661.750,00	(175.169.557,00)	93,37	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.754.355.000,00	1.619.700.000,00	(134.655.000,00)	92,32	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.754.355.000,00	1.619.700.000,00	(134.655.000,00)	92,32	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.754.355.000,00	1.619.700.000,00	(134.655.000,00)	92,32	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	660.693.298,00	630.810.780,00	(29.882.518,00)	95,47	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	660.693.298,00	630.810.780,00	(29.882.518,00)	95,47	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	660.693.298,00	630.810.780,00	(29.882.518,00)	95,47	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	162.833.009,00	152.716.470,00	(10.116.539,00)	93,78	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	162.833.009,00	152.716.470,00	(10.116.539,00)	93,78	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.833.009,00	152.716.470,00	(10.116.539,00)	93,78	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	45.950.000,00	45.454.500,00	(495.500,00)	98,92	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	45.950.000,00	45.454.500,00	(495.500,00)	98,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.800.000,00	16.428.000,00	(372.000,00)	97,78	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.150.000,00	29.026.500,00	(123.500,00)	99,57	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.406.165.928,00	3.689.514.691,00	(716.651.237,00)	83,73	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.354.600.928,00	1.178.819.741,00	(175.781.187,00)	87,02	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.354.600.928,00	1.178.819.741,00	(175.781.187,00)	87,02	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.354.600.928,00	1.178.819.741,00	(175.781.187,00)	87,02	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.158.550.000,00	857.714.950,00	(300.835.050,00)	74,03	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.158.550.000,00	857.714.950,00	(300.835.050,00)	74,03	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.158.550.000,00	857.714.950,00	(300.835.050,00)	74,03	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.893.015.000,00	1.652.980.000,00	(240.035.000,00)	87,31	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.893.015.000,00	1.652.980.000,00	(240.035.000,00)	87,31	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.893.015.000,00	1.652.980.000,00	(240.035.000,00)	87,31	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.004.101.504,00	1.417.370.847,00	(586.730.657,00)	70,72	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	932.169.504,00	494.738.879,00	(437.430.625,00)	53,07	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	932.169.504,00	494.738.879,00	(437.430.625,00)	53,07	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.169.504,00	494.738.879,00	(437.430.625,00)	53,07	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	269.160.000,00	214.310.310,00	(54.849.690,00)	79,62	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	269.160.000,00	214.310.310,00	(54.849.690,00)	79,62	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.160.000,00	214.310.310,00	(54.849.690,00)	79,62	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	802.772.000,00	708.321.658,00	(94.450.342,00)	88,23	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	802.772.000,00	708.321.658,00	(94.450.342,00)	88,23	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.772.000,00	708.321.658,00	(94.450.342,00)	88,23	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.808.540.350,00	1.882.790.394,00	(925.749.956,00)	67,03	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	445.271.000,00	161.841.700,00	(283.429.300,00)	36,34	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	445.271.000,00	161.841.700,00	(283.429.300,00)	36,34	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	445.271.000,00	161.841.700,00	(283.429.300,00)	36,34	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	50.000.000,00	4.614.900,00	(45.385.100,00)	9,22	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	4.614.900,00	(45.385.100,00)	9,22	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	4.614.900,00	(45.385.100,00)	9,22	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	2.313.269.350,00	1.716.333.794,00	(596.935.556,00)	74,19	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.313.269.350,00	1.716.333.794,00	(596.935.556,00)	74,19	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.313.269.350,00	1.716.333.794,00	(596.935.556,00)	74,19	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	843.308.084,00	657.016.240,00	(186.291.844,00)	77,90	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	383.846.040,00	306.748.485,00	(77.097.555,00)	79,91	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	103.107.780,00	72.066.065,00	(31.041.715,00)	69,89	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.107.780,00	72.066.065,00	(31.041.715,00)	69,89	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	280.738.260,00	234.682.420,00	(46.055.840,00)	83,59	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.738.260,00	234.682.420,00	(46.055.840,00)	83,59	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	317.937.629,00	242.970.160,00	(74.967.469,00)	76,42	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.633.959,00	31.347.960,00	(20.285.999,00)	60,71	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.633.959,00	31.347.960,00	(20.285.999,00)	60,71	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	5.2	BELANJA MODAL	266.303.670,00	211.622.200,00	(54.681.470,00)	79,46	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	266.303.670,00	211.622.200,00	(54.681.470,00)	79,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH	141.524.415,00	107.297.595,00	(34.226.820,00)	75,81	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.907.125,00	16.890.870,00	(4.016.255,00)	80,79	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.907.125,00	16.890.870,00	(4.016.255,00)	80,79	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	5.2	BELANJA MODAL	120.617.290,00	90.406.725,00	(30.210.565,00)	74,95	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.617.290,00	90.406.725,00	(30.210.565,00)	74,95	
				JUMLAH BELANJA	17.358.523.705,00	14.357.091.183,00	(3.001.432.522,00)	82,70	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(17.358.523.705,00)	(14.357.091.183,00)	3.001.432.522,00	82,70	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.358.523.705,00)	(14.357.091.183,00)	3.001.432.522,00	82,70	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	547.805.719,00	422.466.879,00	(125.338.840,00)	77,11	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	363.415.719,00	341.479.224,00	(21.936.495,00)	93,96	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	221.853.219,00	218.234.924,00	(3.618.295,00)	98,36	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	10.296.419,00	10.294.750,00	(1.669,00)	99,98	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.296.419,00	10.294.750,00	(1.669,00)	99,98	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.296.419,00	10.294.750,00	(1.669,00)	99,98	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.453.600,00	36.453.200,00	(400,00)	99,99	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.453.600,00	36.453.200,00	(400,00)	99,99	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.453.600,00	36.453.200,00	(400,00)	99,99	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	175.103.200,00	171.486.974,00	(3.616.226,00)	97,93	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	175.103.200,00	171.486.974,00	(3.616.226,00)	97,93	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.103.200,00	171.486.974,00	(3.616.226,00)	97,93	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	15.687.500,00	15.180.000,00	(507.500,00)	96,76	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	15.687.500,00	15.180.000,00	(507.500,00)	96,76	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	15.687.500,00	15.180.000,00	(507.500,00)	96,76	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.687.500,00	15.180.000,00	(507.500,00)	96,76	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.025.000,00	79.886.700,00	(17.138.300,00)	82,33	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.600.000,00	7.936.700,00	(1.663.300,00)	82,67	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	7.936.700,00	(1.663.300,00)	82,67	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	7.936.700,00	(1.663.300,00)	82,67	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	87.425.000,00	71.950.000,00	(15.475.000,00)	82,29	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.425.000,00	71.950.000,00	(15.475.000,00)	82,29	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.425.000,00	71.950.000,00	(15.475.000,00)	82,29	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.710.000,00	10.037.600,00	(672.400,00)	93,72	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	9.250.000,00	8.582.100,00	(667.900,00)	92,77	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	8.582.100,00	(667.900,00)	92,77	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	8.582.100,00	(667.900,00)	92,77	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.460.000,00	1.455.500,00	(4.500,00)	99,69	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.460.000,00	1.455.500,00	(4.500,00)	99,69	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.455.500,00	(4.500,00)	99,69	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	184.390.000,00	80.987.655,00	(103.402.345,00)	43,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	154.390.000,00	50.987.655,00	(103.402.345,00)	33,02	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	83.515.000,00	30.372.655,00	(53.142.345,00)	36,36	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.515.000,00	30.372.655,00	(53.142.345,00)	36,36	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.515.000,00	30.372.655,00	(53.142.345,00)	36,36	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	51.950.000,00	1.900.000,00	(50.050.000,00)	3,65	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.950.000,00	1.900.000,00	(50.050.000,00)	3,65	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.950.000,00	1.900.000,00	(50.050.000,00)	3,65	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	18.925.000,00	18.715.000,00	(210.000,00)	98,89	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.925.000,00	18.715.000,00	(210.000,00)	98,89	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.925.000,00	18.715.000,00	(210.000,00)	98,89	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	547.805.719,00	422.466.879,00	(125.338.840,00)	77,11	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(547.805.719,00)	(422.466.879,00)	125.338.840,00	77,11	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(547.805.719,00)	(422.466.879,00)	125.338.840,00	77,11	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	15.132.414.508,00	10.136.793.184,00	(4.995.621.324,00)	66,98	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	464.559.746,00	387.422.810,00	(77.136.936,00)	83,39	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	46.650.000,00	46.170.000,00	(480.000,00)	98,97	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	46.650.000,00	46.170.000,00	(480.000,00)	98,97	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	46.650.000,00	46.170.000,00	(480.000,00)	98,97	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.650.000,00	46.170.000,00	(480.000,00)	98,97	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	137.759.746,00	116.132.573,00	(21.627.173,00)	84,30	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.694.272,00	1.669.000,00	(25.272,00)	98,50	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.694.272,00	1.669.000,00	(25.272,00)	98,50	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.694.272,00	1.669.000,00	(25.272,00)	98,50	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.699.474,00	23.438.686,00	(1.260.788,00)	94,89	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.699.474,00	23.438.686,00	(1.260.788,00)	94,89	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.699.474,00	23.438.686,00	(1.260.788,00)	94,89	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.774.000,00	7.842.200,00	(931.800,00)	89,37	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.774.000,00	7.842.200,00	(931.800,00)	89,37	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.774.000,00	7.842.200,00	(931.800,00)	89,37	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	102.592.000,00	83.182.687,00	(19.409.313,00)	81,08	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	102.592.000,00	83.182.687,00	(19.409.313,00)	81,08	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.592.000,00	83.182.687,00	(19.409.313,00)	81,08	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	227.880.000,00	178.161.800,00	(49.718.200,00)	78,18	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	9.600.000,00	8.221.800,00	(1.378.200,00)	85,64	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	8.221.800,00	(1.378.200,00)	85,64	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	8.221.800,00	(1.378.200,00)	85,64	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	218.280.000,00	169.940.000,00	(48.340.000,00)	77,85	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	218.280.000,00	169.940.000,00	(48.340.000,00)	77,85	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.280.000,00	169.940.000,00	(48.340.000,00)	77,85	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52.270.000,00	46.958.437,00	(5.311.563,00)	89,83	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	45.250.000,00	42.304.437,00	(2.945.563,00)	93,49	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.250.000,00	42.304.437,00	(2.945.563,00)	93,49	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	42.304.437,00	(2.945.563,00)	93,49	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.020.000,00	4.654.000,00	(2.366.000,00)	66,29	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.020.000,00	4.654.000,00	(2.366.000,00)	66,29	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	4.654.000,00	(2.366.000,00)	66,29	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.667.854.762,00	9.749.370.374,00	(4.918.484.388,00)	66,46	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.667.854.762,00	9.749.370.374,00	(4.918.484.388,00)	66,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	11.116.522.260,00	7.786.324.074,00	(3.330.198.186,00)	70,04	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.116.522.260,00	7.786.324.074,00	(3.330.198.186,00)	70,04	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.911.022.260,00	5.923.324.074,00	(2.987.698.186,00)	66,47	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	2.205.500.000,00	1.863.000.000,00	(342.500.000,00)	84,47	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	3.517.852.702,00	1.940.253.000,00	(1.577.599.702,00)	55,15	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.517.852.702,00	1.940.253.000,00	(1.577.599.702,00)	55,15	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.852.702,00	30.503.000,00	(10.349.702,00)	74,66	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.477.000.000,00	1.909.750.000,00	(1.567.250.000,00)	54,92	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	33.479.800,00	22.793.300,00	(10.686.500,00)	68,08	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.479.800,00	22.793.300,00	(10.686.500,00)	68,08	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.479.800,00	22.793.300,00	(10.686.500,00)	68,08	
				JUMLAH BELANJA	15.132.414.508,00	10.136.793.184,00	(4.995.621.324,00)	66,98	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(15.132.414.508,00)	(10.136.793.184,00)	4.995.621.324,00	66,98	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.132.414.508,00)	(10.136.793.184,00)	4.995.621.324,00	66,98	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Bagian Perencanaan dan Keuangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011		5	BELANJA DAERAH	14.734.710.980,00	14.294.695.353,00	(440.015.627,00)	97,01	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.734.710.980,00	14.294.695.353,00	(440.015.627,00)	97,01	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	12.459.170.535,00	12.317.528.097,00	(141.642.438,00)	98,86	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	12.418.680.535,00	12.277.038.097,00	(141.642.438,00)	98,85	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.418.680.535,00	12.277.038.097,00	(141.642.438,00)	98,85	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	12.418.680.535,00	12.277.038.097,00	(141.642.438,00)	98,85	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	208.112.015,00	160.895.802,00	(47.216.213,00)	77,31	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	814.880,00	730.000,00	(84.880,00)	89,58	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	814.880,00	730.000,00	(84.880,00)	89,58	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	814.880,00	730.000,00	(84.880,00)	89,58	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	31.434.335,00	27.504.942,00	(3.929.393,00)	87,49	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.434.335,00	27.504.942,00	(3.929.393,00)	87,49	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.434.335,00	27.504.942,00	(3.929.393,00)	87,49	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.986.000,00	9.983.216,00	(2.784,00)	99,97	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.986.000,00	9.983.216,00	(2.784,00)	99,97	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.986.000,00	9.983.216,00	(2.784,00)	99,97	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	165.876.800,00	122.677.644,00	(43.199.156,00)	73,95	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	165.876.800,00	122.677.644,00	(43.199.156,00)	73,95	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.876.800,00	122.677.644,00	(43.199.156,00)	73,95	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	97.724.300,00	85.359.499,00	(12.364.801,00)	87,34	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	6.655.000,00	6.160.500,00	(494.500,00)	92,56	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	6.655.000,00	6.160.500,00	(494.500,00)	92,56	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.655.000,00	6.160.500,00	(494.500,00)	92,56	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	91.069.300,00	79.198.999,00	(11.870.301,00)	86,96	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	91.069.300,00	79.198.999,00	(11.870.301,00)	86,96	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.069.300,00	79.198.999,00	(11.870.301,00)	86,96	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.069.264.396,00	987.256.248,00	(82.008.148,00)	92,33	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.200.000,00	5.264.760,00	(1.935.240,00)	73,12	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	5.264.760,00	(1.935.240,00)	73,12	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	5.264.760,00	(1.935.240,00)	73,12	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.062.064.396,00	981.991.488,00	(80.072.908,00)	92,46	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.062.064.396,00	981.991.488,00	(80.072.908,00)	92,46	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.062.064.396,00	981.991.488,00	(80.072.908,00)	92,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.430.000,00	20.140.875,00	(5.289.125,00)	79,20	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	16.500.000,00	14.839.500,00	(1.660.500,00)	89,93	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	14.839.500,00	(1.660.500,00)	89,93	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	14.839.500,00	(1.660.500,00)	89,93	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.930.000,00	5.301.375,00	(3.628.625,00)	59,36	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.930.000,00	5.301.375,00	(3.628.625,00)	59,36	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.930.000,00	5.301.375,00	(3.628.625,00)	59,36	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	875.009.734,00	723.514.832,00	(151.494.902,00)	82,68	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	875.009.734,00	723.514.832,00	(151.494.902,00)	82,68	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	875.009.734,00	723.514.832,00	(151.494.902,00)	82,68	
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	875.009.734,00	723.514.832,00	(151.494.902,00)	82,68	
				JUMLAH BELANJA	14.734.710.980,00	14.294.695.353,00	(440.015.627,00)	97,01	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(14.734.710.980,00)	(14.294.695.353,00)	440.015.627,00	97,01	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.734.710.980,00)	(14.294.695.353,00)	440.015.627,00	97,01	

SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	51.479.682.740,00	48.063.204.071,00	(3.416.478.669,00)	93,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.328.496.840,00	26.988.849.623,00	(1.339.647.217,00)	95,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.618.064.692,00	2.486.043.920,00	(132.020.772,00)	94,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.532.829.692,00	2.403.253.620,00	(129.576.072,00)	94,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.532.829.692,00	2.403.253.620,00	(129.576.072,00)	94,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.532.829.692,00	2.403.253.620,00	(129.576.072,00)	94,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	85.235.000,00	82.790.300,00	(2.444.700,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	85.235.000,00	82.790.300,00	(2.444.700,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.235.000,00	82.790.300,00	(2.444.700,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	739.224.358,00	620.126.963,00	(119.097.395,00)	83,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	15.002.510,00	14.789.044,00	(213.466,00)	98,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.002.510,00	14.789.044,00	(213.466,00)	98,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.510,00	14.789.044,00	(213.466,00)	98,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	316.453.048,00	299.475.127,00	(16.977.921,00)	94,63	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	180.200.670,00	168.294.127,00	(11.906.543,00)	93,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.200.670,00	168.294.127,00	(11.906.543,00)	93,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	136.252.378,00	131.181.000,00	(5.071.378,00)	96,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.252.378,00	131.181.000,00	(5.071.378,00)	96,27	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	49.999.800,00	42.459.615,00	(7.540.185,00)	84,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	49.999.800,00	42.459.615,00	(7.540.185,00)	84,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	42.459.615,00	(7.540.185,00)	84,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	357.769.000,00	263.403.177,00	(94.365.823,00)	73,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	357.769.000,00	263.403.177,00	(94.365.823,00)	73,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.769.000,00	263.403.177,00	(94.365.823,00)	73,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.234.583.590,00	1.137.493.700,00	(97.089.890,00)	92,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	820.000.000,00	764.900.000,00	(55.100.000,00)	93,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	820.000.000,00	764.900.000,00	(55.100.000,00)	93,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	820.000.000,00	764.900.000,00	(55.100.000,00)	93,28	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	145.263.720,00	143.822.700,00	(1.441.020,00)	99,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	145.263.720,00	143.822.700,00	(1.441.020,00)	99,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	145.263.720,00	143.822.700,00	(1.441.020,00)	99,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	269.319.870,00	228.771.000,00	(40.548.870,00)	84,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	(600.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	268.719.870,00	228.771.000,00	(39.948.870,00)	85,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.719.870,00	228.771.000,00	(39.948.870,00)	85,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.415.637.640,00	1.214.988.095,00	(200.649.545,00)	85,82	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	317.670.640,00	262.940.319,00	(54.730.321,00)	82,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	317.670.640,00	262.940.319,00	(54.730.321,00)	82,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.670.640,00	262.940.319,00	(54.730.321,00)	82,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.097.967.000,00	952.047.776,00	(145.919.224,00)	86,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.097.967.000,00	952.047.776,00	(145.919.224,00)	86,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.967.000,00	952.047.776,00	(145.919.224,00)	86,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	560.290.000,00	328.336.759,00	(231.953.241,00)	58,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	43.200.000,00	31.895.200,00	(11.304.800,00)	73,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.200.000,00	31.895.200,00	(11.304.800,00)	73,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	31.895.200,00	(11.304.800,00)	73,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	218.750.000,00	195.706.409,00	(23.043.591,00)	89,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	218.750.000,00	195.706.409,00	(23.043.591,00)	89,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.750.000,00	195.706.409,00	(23.043.591,00)	89,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	86.370.000,00	50.452.600,00	(35.917.400,00)	58,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	86.370.000,00	50.452.600,00	(35.917.400,00)	58,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.370.000,00	50.452.600,00	(35.917.400,00)	58,41	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	211.970.000,00	50.282.550,00	(161.687.450,00)	23,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	188.977.500,00	50.282.550,00	(138.694.950,00)	26,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.977.500,00	50.282.550,00	(138.694.950,00)	26,60	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	22.992.500,00	0,00	(22.992.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.992.500,00	0,00	(22.992.500,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	20.933.051.260,00	20.704.714.436,00	(228.336.824,00)	98,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	20.451.551.260,00	20.232.661.961,00	(218.889.299,00)	98,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.451.551.260,00	20.232.661.961,00	(218.889.299,00)	98,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	20.451.551.260,00	20.232.661.961,00	(218.889.299,00)	98,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	481.500.000,00	472.052.475,00	(9.447.525,00)	98,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	481.500.000,00	472.052.475,00	(9.447.525,00)	98,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.500.000,00	472.052.475,00	(9.447.525,00)	98,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	827.645.300,00	497.145.750,00	(330.499.550,00)	60,06	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	560.377.700,00	257.394.050,00	(302.983.650,00)	45,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	560.377.700,00	257.394.050,00	(302.983.650,00)	45,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.377.700,00	257.394.050,00	(302.983.650,00)	45,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	267.267.600,00	239.751.700,00	(27.515.900,00)	89,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1	BELANJA OPERASI	267.267.600,00	239.751.700,00	(27.515.900,00)	89,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.267.600,00	239.751.700,00	(27.515.900,00)	89,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.151.185.900,00	21.074.354.448,00	(2.076.831.452,00)	91,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	1.761.234.000,00	1.306.770.554,00	(454.463.446,00)	74,19	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	1.711.234.000,00	1.306.770.554,00	(404.463.446,00)	76,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.711.234.000,00	1.306.770.554,00	(404.463.446,00)	76,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.711.234.000,00	1.306.770.554,00	(404.463.446,00)	76,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.139.037.000,00	616.350.612,00	(522.686.388,00)	54,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	1.139.037.000,00	616.350.612,00	(522.686.388,00)	54,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.139.037.000,00	616.350.612,00	(522.686.388,00)	54,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.139.037.000,00	616.350.612,00	(522.686.388,00)	54,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	992.496.500,00	943.355.767,00	(49.140.733,00)	95,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007		PENGAWASAN PENGGUNAAN ANGGARAN	992.496.500,00	943.355.767,00	(49.140.733,00)	95,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	992.496.500,00	943.355.767,00	(49.140.733,00)	95,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.496.500,00	943.355.767,00	(49.140.733,00)	95,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	3.740.680.100,00	3.208.450.087,00	(532.230.013,00)	85,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	2.703.209.000,00	2.276.981.755,00	(426.227.245,00)	84,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.703.209.000,00	2.276.981.755,00	(426.227.245,00)	84,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.703.209.000,00	2.276.981.755,00	(426.227.245,00)	84,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	294.000.000,00	283.500.000,00	(10.500.000,00)	96,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	294.000.000,00	283.500.000,00	(10.500.000,00)	96,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	283.500.000,00	(10.500.000,00)	96,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	743.471.100,00	647.968.332,00	(95.502.768,00)	87,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	743.471.100,00	647.968.332,00	(95.502.768,00)	87,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.471.100,00	647.968.332,00	(95.502.768,00)	87,15	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	3.020.776.800,00	2.513.699.336,00	(507.077.464,00)	83,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	1.842.806.800,00	1.757.853.473,00	(84.953.327,00)	95,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.842.806.800,00	1.757.853.473,00	(84.953.327,00)	95,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.842.806.800,00	1.757.853.473,00	(84.953.327,00)	95,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	1.177.970.000,00	755.845.863,00	(422.124.137,00)	64,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.177.970.000,00	755.845.863,00	(422.124.137,00)	64,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.970.000,00	755.845.863,00	(422.124.137,00)	64,16	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	12.496.961.500,00	12.485.728.092,00	(11.233.408,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	12.496.961.500,00	12.485.728.092,00	(11.233.408,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.496.961.500,00	12.485.728.092,00	(11.233.408,00)	99,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.496.961.500,00	12.485.728.092,00	(11.233.408,00)	99,91	
				JUMLAH BELANJA	51.479.682.740,00	48.063.204.071,00	(3.416.478.669,00)	93,36	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(51.479.682.740,00)	(48.063.204.071,00)	3.416.478.669,00	93,36	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(51.479.682.740,00)	(48.063.204.071,00)	3.416.478.669,00	93,36	

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.764.188.188,00	4.405.027.771,00	(359.160.417,00)	92,46	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.462.211.188,00	4.173.871.071,00	(288.340.117,00)	93,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.407.659.004,00	3.244.807.968,00	(162.851.036,00)	95,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.354.109.004,00	3.193.527.968,00	(160.581.036,00)	95,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.354.109.004,00	3.193.527.968,00	(160.581.036,00)	95,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.354.109.004,00	3.193.527.968,00	(160.581.036,00)	95,21	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	53.550.000,00	51.280.000,00	(2.270.000,00)	95,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	53.550.000,00	51.280.000,00	(2.270.000,00)	95,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.550.000,00	51.280.000,00	(2.270.000,00)	95,76	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	452.583.685,00	432.728.952,00	(19.854.733,00)	95,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.551.513,00	7.628.680,00	(1.922.833,00)	79,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.551.513,00	7.628.680,00	(1.922.833,00)	79,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.551.513,00	7.628.680,00	(1.922.833,00)	79,86	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	80.540.572,00	76.318.911,00	(4.221.661,00)	94,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.540.572,00	76.318.911,00	(4.221.661,00)	94,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.540.572,00	76.318.911,00	(4.221.661,00)	94,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.025.000,00	20.249.639,00	(1.775.361,00)	91,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	22.025.000,00	20.249.639,00	(1.775.361,00)	91,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.025.000,00	20.249.639,00	(1.775.361,00)	91,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	340.466.600,00	328.531.722,00	(11.934.878,00)	96,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	340.466.600,00	328.531.722,00	(11.934.878,00)	96,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.466.600,00	328.531.722,00	(11.934.878,00)	96,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	104.068.899,00	88.134.999,00	(15.933.900,00)	84,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	96.068.899,00	80.364.999,00	(15.703.900,00)	83,65	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.270.500,00	0,00	(1.270.500,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.270.500,00	0,00	(1.270.500,00)	0,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	94.798.399,00	80.364.999,00	(14.433.400,00)	84,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.798.399,00	80.364.999,00	(14.433.400,00)	84,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	8.000.000,00	7.770.000,00	(230.000,00)	97,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.770.000,00	(230.000,00)	97,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.770.000,00	(230.000,00)	97,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	418.319.600,00	343.418.332,00	(74.901.268,00)	82,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	52.965.600,00	26.521.332,00	(26.444.268,00)	50,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.965.600,00	26.521.332,00	(26.444.268,00)	50,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.965.600,00	26.521.332,00	(26.444.268,00)	50,07	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	365.354.000,00	316.897.000,00	(48.457.000,00)	86,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	365.354.000,00	316.897.000,00	(48.457.000,00)	86,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.354.000,00	316.897.000,00	(48.457.000,00)	86,73	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	79.580.000,00	64.780.820,00	(14.799.180,00)	81,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	54.730.000,00	47.250.820,00	(7.479.180,00)	86,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.730.000,00	47.250.820,00	(7.479.180,00)	86,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.730.000,00	47.250.820,00	(7.479.180,00)	86,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24.850.000,00	17.530.000,00	(7.320.000,00)	70,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	24.850.000,00	17.530.000,00	(7.320.000,00)	70,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.850.000,00	17.530.000,00	(7.320.000,00)	70,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	31.605.000,00	21.597.800,00	(10.007.200,00)	68,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31.605.000,00	21.597.800,00	(10.007.200,00)	68,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31.605.000,00	21.597.800,00	(10.007.200,00)	68,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.605.000,00	21.597.800,00	(10.007.200,00)	68,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.605.000,00	21.597.800,00	(10.007.200,00)	68,33	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	270.372.000,00	209.558.900,00	(60.813.100,00)	77,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	187.557.000,00	131.057.200,00	(56.499.800,00)	69,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	187.557.000,00	131.057.200,00	(56.499.800,00)	69,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	187.557.000,00	131.057.200,00	(56.499.800,00)	69,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.557.000,00	131.057.200,00	(56.499.800,00)	69,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	82.815.000,00	78.501.700,00	(4.313.300,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	82.815.000,00	78.501.700,00	(4.313.300,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	82.815.000,00	78.501.700,00	(4.313.300,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.815.000,00	78.501.700,00	(4.313.300,00)	94,79	
				JUMLAH BELANJA	4.764.188.188,00	4.405.027.771,00	(359.160.417,00)	92,46	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(4.764.188.188,00)	(4.405.027.771,00)	359.160.417,00	92,46	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.764.188.188,00)	(4.405.027.771,00)	359.160.417,00	92,46	

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	913.536.200,00	782.682.711,00	(130.853.489,00)	85,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	913.536.200,00	782.682.711,00	(130.853.489,00)	85,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	832.020.900,00	726.062.211,00	(105.958.689,00)	87,26	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	95.037.800,00	74.838.950,00	(20.198.850,00)	78,74	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.037.800,00	74.838.950,00	(20.198.850,00)	78,74	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.037.800,00	74.838.950,00	(20.198.850,00)	78,74	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013		PERUMUSAN REKOMENDASI ATAS RENCANA PENETAPAN PERATURAN BARU DAN/ATAU EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN	736.983.100,00	651.223.261,00	(85.759.839,00)	88,36	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	736.983.100,00	651.223.261,00	(85.759.839,00)	88,36	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	736.983.100,00	651.223.261,00	(85.759.839,00)	88,36	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	81.515.300,00	56.620.500,00	(24.894.800,00)	69,45	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	81.515.300,00	56.620.500,00	(24.894.800,00)	69,45	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	81.515.300,00	56.620.500,00	(24.894.800,00)	69,45	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.515.300,00	56.620.500,00	(24.894.800,00)	69,45	
				JUMLAH BELANJA	913.536.200,00	782.682.711,00	(130.853.489,00)	85,67	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(913.536.200,00)	(782.682.711,00)	130.853.489,00	85,67	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(913.536.200,00)	(782.682.711,00)	130.853.489,00	85,67	

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	101.820.900.086,00	97.915.811.679,20	(3.905.088.406,80)	96,16	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	101.820.900.086,00	97.915.811.679,20	(3.905.088.406,80)	96,16	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	86.794.945.026,00	82.630.688.214,00	(4.164.256.812,00)	95,20	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	135.610.000,00	(64.390.000,00)	67,80	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.807.124.697,00	13.807.124.697,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1.018.830.363,00	1.342.388.768,20	323.558.405,20	131,75	
				JUMLAH PENDAPATAN	101.820.900.086,00	97.915.811.679,20	(3.905.088.406,80)	96,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	11.022.424.468,04	10.200.267.900,00	(822.156.568,04)	92,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.975.139.038,04	6.596.182.694,00	(378.956.344,04)	94,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.716.478.359,04	5.458.444.453,00	(258.033.906,04)	95,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.650.628.359,04	5.392.594.453,00	(258.033.906,04)	95,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.650.628.359,04	5.392.594.453,00	(258.033.906,04)	95,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.650.628.359,04	5.392.594.453,00	(258.033.906,04)	95,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	65.850.000,00	65.850.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	65.850.000,00	65.850.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.850.000,00	65.850.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	301.349.201,00	285.051.126,00	(16.298.075,00)	94,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.324.720,00	8.818.175,00	(506.545,00)	94,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.324.720,00	8.818.175,00	(506.545,00)	94,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.324.720,00	8.818.175,00	(506.545,00)	94,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	83.536.081,00	80.388.687,00	(3.147.394,00)	96,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.536.081,00	80.388.687,00	(3.147.394,00)	96,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.536.081,00	80.388.687,00	(3.147.394,00)	96,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	208.488.400,00	195.844.264,00	(12.644.136,00)	93,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	208.488.400,00	195.844.264,00	(12.644.136,00)	93,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.488.400,00	195.844.264,00	(12.644.136,00)	93,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	174.400.050,00	159.501.296,00	(14.898.754,00)	91,45	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	32.519.650,00	29.781.300,00	(2.738.350,00)	91,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	0,00	(375.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	32.144.650,00	29.781.300,00	(2.363.350,00)	92,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.144.650,00	29.781.300,00	(2.363.350,00)	92,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	141.880.400,00	129.719.996,00	(12.160.404,00)	91,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	225.000,00	0,00	(225.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	0,00	(225.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	141.655.400,00	129.719.996,00	(11.935.404,00)	91,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.655.400,00	129.719.996,00	(11.935.404,00)	91,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	615.974.428,00	533.967.295,00	(82.007.133,00)	86,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	113.804.652,00	105.410.350,00	(8.394.302,00)	92,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	113.804.652,00	105.410.350,00	(8.394.302,00)	92,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.804.652,00	105.410.350,00	(8.394.302,00)	92,62	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	502.169.776,00	428.556.945,00	(73.612.831,00)	85,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	502.169.776,00	428.556.945,00	(73.612.831,00)	85,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	502.169.776,00	428.556.945,00	(73.612.831,00)	85,34	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	166.937.000,00	159.218.524,00	(7.718.476,00)	95,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	137.095.000,00	132.395.524,00	(4.699.476,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	137.095.000,00	132.395.524,00	(4.699.476,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.095.000,00	132.395.524,00	(4.699.476,00)	96,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	29.842.000,00	26.823.000,00	(3.019.000,00)	89,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	29.842.000,00	26.823.000,00	(3.019.000,00)	89,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.842.000,00	26.823.000,00	(3.019.000,00)	89,88	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.047.285.430,00	3.604.085.206,00	(443.200.224,00)	89,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.047.285.430,00	3.604.085.206,00	(443.200.224,00)	89,04	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	20.372.100,00	9.064.900,00	(11.307.200,00)	44,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.372.100,00	9.064.900,00	(11.307.200,00)	44,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.372.100,00	9.064.900,00	(11.307.200,00)	44,49	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002		ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	142.720.160,00	127.967.154,00	(14.753.006,00)	89,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	142.720.160,00	127.967.154,00	(14.753.006,00)	89,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.720.160,00	127.967.154,00	(14.753.006,00)	89,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	514.488.145,00	450.940.731,00	(63.547.414,00)	87,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	514.488.145,00	450.940.731,00	(63.547.414,00)	87,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.488.145,00	450.940.731,00	(63.547.414,00)	87,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	1.857.200.000,00	1.704.945.969,00	(152.254.031,00)	91,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.857.200.000,00	1.704.945.969,00	(152.254.031,00)	91,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.857.200.000,00	1.704.945.969,00	(152.254.031,00)	91,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	86.764.400,00	65.000.300,00	(21.764.100,00)	74,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	86.764.400,00	65.000.300,00	(21.764.100,00)	74,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.764.400,00	65.000.300,00	(21.764.100,00)	74,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	173.432.200,00	160.253.154,00	(13.179.046,00)	92,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	173.432.200,00	160.253.154,00	(13.179.046,00)	92,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.432.200,00	160.253.154,00	(13.179.046,00)	92,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	142.107.000,00	104.401.000,00	(37.706.000,00)	73,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	142.107.000,00	104.401.000,00	(37.706.000,00)	73,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.107.000,00	104.401.000,00	(37.706.000,00)	73,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	588.426.925,00	508.586.858,00	(79.840.067,00)	86,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	588.426.925,00	508.586.858,00	(79.840.067,00)	86,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	588.426.925,00	508.586.858,00	(79.840.067,00)	86,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	117.009.500,00	86.716.840,00	(30.292.660,00)	74,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	117.009.500,00	86.716.840,00	(30.292.660,00)	74,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.009.500,00	86.716.840,00	(30.292.660,00)	74,11	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015		ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	404.765.000,00	386.208.300,00	(18.556.700,00)	95,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	176.265.000,00	162.265.800,00	(13.999.200,00)	92,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.265.000,00	162.265.800,00	(13.999.200,00)	92,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	228.500.000,00	223.942.500,00	(4.557.500,00)	98,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	1.942.500,00	(1.557.500,00)	55,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00	222.000.000,00	(3.000.000,00)	98,66	
				JUMLAH BELANJA	11.022.424.468,04	10.200.267.900,00	(822.156.568,04)	92,54	
				SURPLUS / (DEFISIT)	90.798.475.617,96	87.715.543.779,20	(3.082.931.838,76)	96,60	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	90.798.475.617,96	87.715.543.779,20	(3.082.931.838,76)	96,60	

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.340.626.654.488,46	1.374.362.811.577,58	33.736.157.089,12	102,51	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.546.295.230,00	5.052.916.748,58	(1.493.378.481,42)	77,18	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.546.295.230,00	5.052.916.748,58	(1.493.378.481,42)	77,18	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.330.080.359.258,46	1.365.309.894.829,00	35.229.535.570,54	102,64	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.263.938.865.949,00	1.294.527.978.607,00	30.589.112.658,00	102,42	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.141.493.309,46	70.781.916.222,00	4.640.422.912,54	107,01	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		4.3.02	Dana Darurat	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENDAPATAN	1.340.626.654.488,46	1.374.362.811.577,58	33.736.157.089,12	102,51	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	220.248.285.369,07	209.049.110.629,85	(11.199.174.739,22)	94,91	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.558.814.876,16	4.967.987.650,00	(590.827.226,16)	89,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.526.276.039,16	3.344.944.099,00	(181.331.940,16)	94,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.387.462.439,16	3.232.964.099,00	(154.498.340,16)	95,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.387.462.439,16	3.232.964.099,00	(154.498.340,16)	95,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.387.462.439,16	3.232.964.099,00	(154.498.340,16)	95,43	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	138.813.600,00	111.980.000,00	(26.833.600,00)	80,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	138.813.600,00	111.980.000,00	(26.833.600,00)	80,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.813.600,00	111.980.000,00	(26.833.600,00)	80,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.089.486.525,00	841.648.481,00	(247.838.044,00)	77,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.509.275,00	3.178.000,00	(2.331.275,00)	57,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.509.275,00	3.178.000,00	(2.331.275,00)	57,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.509.275,00	3.178.000,00	(2.331.275,00)	57,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	235.213.050,00	218.366.533,00	(16.846.517,00)	92,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	235.213.050,00	218.366.533,00	(16.846.517,00)	92,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.213.050,00	218.366.533,00	(16.846.517,00)	92,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.596.200,00	27.417.168,00	(1.179.032,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.596.200,00	27.417.168,00	(1.179.032,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.596.200,00	27.417.168,00	(1.179.032,00)	95,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	820.168.000,00	592.686.780,00	(227.481.220,00)	72,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	820.168.000,00	592.686.780,00	(227.481.220,00)	72,26	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	820.168.000,00	592.686.780,00	(227.481.220,00)	72,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	223.834.508,00	197.422.800,00	(26.411.708,00)	88,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	223.834.508,00	197.422.800,00	(26.411.708,00)	88,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	223.084.508,00	196.672.800,00	(26.411.708,00)	88,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.084.508,00	196.672.800,00	(26.411.708,00)	88,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	407.949.804,00	386.743.450,00	(21.206.354,00)	94,80	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.903.088,00	13.937.970,00	(4.965.118,00)	73,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.903.088,00	13.937.970,00	(4.965.118,00)	73,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.903.088,00	13.937.970,00	(4.965.118,00)	73,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	389.046.716,00	372.805.480,00	(16.241.236,00)	95,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	389.046.716,00	372.805.480,00	(16.241.236,00)	95,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.046.716,00	372.805.480,00	(16.241.236,00)	95,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	311.268.000,00	197.228.820,00	(114.039.180,00)	63,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	235.960.000,00	140.101.660,00	(95.858.340,00)	59,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	235.960.000,00	140.101.660,00	(95.858.340,00)	59,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.960.000,00	140.101.660,00	(95.858.340,00)	59,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	67.300.000,00	51.319.160,00	(15.980.840,00)	76,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	67.300.000,00	51.319.160,00	(15.980.840,00)	76,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.300.000,00	51.319.160,00	(15.980.840,00)	76,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	8.008.000,00	5.808.000,00	(2.200.000,00)	72,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	8.008.000,00	5.808.000,00	(2.200.000,00)	72,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.008.000,00	5.808.000,00	(2.200.000,00)	72,52	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	213.789.735.392,91	203.412.032.881,85	(10.377.702.511,06)	95,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.315.731.800,00	1.227.866.407,00	(87.865.393,00)	93,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	1.315.731.800,00	1.227.866.407,00	(87.865.393,00)	93,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.315.731.800,00	1.227.866.407,00	(87.865.393,00)	93,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.315.731.800,00	1.227.866.407,00	(87.865.393,00)	93,32	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	438.430.200,00	387.899.846,00	(50.530.354,00)	88,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	81.366.400,00	68.403.276,00	(12.963.124,00)	84,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	81.366.400,00	68.403.276,00	(12.963.124,00)	84,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.366.400,00	68.403.276,00	(12.963.124,00)	84,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02.0009		REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	357.063.800,00	319.496.570,00	(37.567.230,00)	89,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	357.063.800,00	319.496.570,00	(37.567.230,00)	89,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	357.063.800,00	319.496.570,00	(37.567.230,00)	89,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	328.660.000,00	249.776.706,00	(78.883.294,00)	75,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	63.606.000,00	51.590.210,00	(12.015.790,00)	81,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.606.000,00	51.590.210,00	(12.015.790,00)	81,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.606.000,00	51.590.210,00	(12.015.790,00)	81,10	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	166.488.000,00	140.777.588,00	(25.710.412,00)	84,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	166.488.000,00	140.777.588,00	(25.710.412,00)	84,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.488.000,00	140.777.588,00	(25.710.412,00)	84,55	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	64.316.000,00	57.408.908,00	(6.907.092,00)	89,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	64.316.000,00	57.408.908,00	(6.907.092,00)	89,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.316.000,00	57.408.908,00	(6.907.092,00)	89,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0010		PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	34.250.000,00	0,00	(34.250.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	34.250.000,00	0,00	(34.250.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	0,00	(34.250.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	211.153.875.392,91	201.416.120.288,85	(9.737.755.104,06)	95,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00	(3.594.779.739,00)	98,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00	(3.594.779.739,00)	98,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00	(3.594.779.739,00)	98,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	(4.592.480.757,06)	58,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	(4.592.480.757,06)	58,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	(4.592.480.757,06)	58,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0010		PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	11.197.982.264,00	9.647.487.656,00	(1.550.494.608,00)	86,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4	BELANJA TRANSFER	11.197.982.264,00	9.647.487.656,00	(1.550.494.608,00)	86,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0010	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.197.982.264,00	9.647.487.656,00	(1.550.494.608,00)	86,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	553.038.000,00	130.369.634,00	(422.668.366,00)	23,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	176.833.000,00	130.369.634,00	(46.463.366,00)	73,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	176.833.000,00	130.369.634,00	(46.463.366,00)	73,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.833.000,00	130.369.634,00	(46.463.366,00)	73,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	376.205.000,00	0,00	(376.205.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	376.205.000,00	0,00	(376.205.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	376.205.000,00	0,00	(376.205.000,00)	0,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	899.735.100,00	669.090.098,00	(230.645.002,00)	74,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	899.735.100,00	669.090.098,00	(230.645.002,00)	74,36	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	39.864.000,00	21.096.650,00	(18.767.350,00)	52,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.864.000,00	21.096.650,00	(18.767.350,00)	52,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.864.000,00	21.096.650,00	(18.767.350,00)	52,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	15.755.000,00	12.300.780,00	(3.454.220,00)	78,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.755.000,00	12.300.780,00	(3.454.220,00)	78,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.755.000,00	12.300.780,00	(3.454.220,00)	78,07	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0005		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	256.015.000,00	222.365.168,00	(33.649.832,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	256.015.000,00	222.365.168,00	(33.649.832,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.015.000,00	222.365.168,00	(33.649.832,00)	86,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	153.821.100,00	96.924.500,00	(56.896.600,00)	63,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	153.821.100,00	96.924.500,00	(56.896.600,00)	63,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.821.100,00	96.924.500,00	(56.896.600,00)	63,01	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	434.280.000,00	316.403.000,00	(117.877.000,00)	72,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	434.280.000,00	316.403.000,00	(117.877.000,00)	72,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434.280.000,00	316.403.000,00	(117.877.000,00)	72,85	
				JUMLAH BELANJA	220.248.285.369,07	209.049.110.629,85	(11.199.174.739,22)	94,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
				SURPLUS / (DEFISIT)	1.120.378.369.119,39	1.165.313.700.947,73	44.935.331.828,34	104,01	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	38.578.636.185,73	38.578.660.185,73	24.000,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.578.636.185,73	39.578.660.185,73	24.000,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.578.636.185,73	39.578.660.185,73	24.000,00	100,00	
				JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.578.636.185,73	39.578.660.185,73	24.000,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.10.0000		6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
				PEMBIAYAAN NETTO	38.578.636.185,73	38.578.660.185,73	24.000,00	100,00	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	1.158.957.005.305,12	1.203.892.361.133,46	44.935.355.828,34	103,87	

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.703.064.829,00	4.979.980.982,00	(723.083.847,00)	87,32	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.358.980.329,00	3.960.543.717,00	(398.436.612,00)	90,85	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.800.136.677,00	3.531.244.423,00	(268.892.254,00)	92,92	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.748.186.677,00	3.480.654.423,00	(267.532.254,00)	92,86	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.748.186.677,00	3.480.654.423,00	(267.532.254,00)	92,86	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.748.186.677,00	3.480.654.423,00	(267.532.254,00)	92,86	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	51.950.000,00	50.590.000,00	(1.360.000,00)	97,38	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	51.950.000,00	50.590.000,00	(1.360.000,00)	97,38	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.950.000,00	50.590.000,00	(1.360.000,00)	97,38	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	225.550.852,00	201.128.363,00	(24.422.489,00)	89,17	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.990.845,00	3.738.000,00	(1.252.845,00)	74,89	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.990.845,00	3.738.000,00	(1.252.845,00)	74,89	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.845,00	3.738.000,00	(1.252.845,00)	74,89	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	85.108.107,00	81.053.616,00	(4.054.491,00)	95,23	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	85.108.107,00	81.053.616,00	(4.054.491,00)	95,23	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.108.107,00	81.053.616,00	(4.054.491,00)	95,23	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.903.900,00	23.004.950,00	(5.898.950,00)	79,59	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.903.900,00	23.004.950,00	(5.898.950,00)	79,59	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.903.900,00	23.004.950,00	(5.898.950,00)	79,59	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	106.548.000,00	93.331.797,00	(13.216.203,00)	87,59	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	106.548.000,00	93.331.797,00	(13.216.203,00)	87,59	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.548.000,00	93.331.797,00	(13.216.203,00)	87,59	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	121.762.800,00	54.630.000,00	(67.132.800,00)	44,86	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	101.762.800,00	35.760.000,00	(66.002.800,00)	35,14	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	101.762.800,00	35.760.000,00	(66.002.800,00)	35,14	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.762.800,00	35.760.000,00	(66.002.800,00)	35,14	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	18.870.000,00	(1.130.000,00)	94,35	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.870.000,00	(1.130.000,00)	94,35	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.870.000,00	(1.130.000,00)	94,35	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	157.395.000,00	131.547.149,00	(25.847.851,00)	83,57	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.695.000,00	12.577.149,00	(2.117.851,00)	85,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.695.000,00	12.577.149,00	(2.117.851,00)	85,58	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.695.000,00	12.577.149,00	(2.117.851,00)	85,58	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	142.700.000,00	118.970.000,00	(23.730.000,00)	83,37	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	142.700.000,00	118.970.000,00	(23.730.000,00)	83,37	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.700.000,00	118.970.000,00	(23.730.000,00)	83,37	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	54.135.000,00	41.993.782,00	(12.141.218,00)	77,57	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	40.365.000,00	35.168.629,00	(5.196.371,00)	87,12	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	40.365.000,00	35.168.629,00	(5.196.371,00)	87,12	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.365.000,00	35.168.629,00	(5.196.371,00)	87,12	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	11.860.000,00	6.431.153,00	(5.428.847,00)	54,22	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.860.000,00	6.431.153,00	(5.428.847,00)	54,22	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.860.000,00	6.431.153,00	(5.428.847,00)	54,22	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.910.000,00	394.000,00	(1.516.000,00)	20,62	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.910.000,00	394.000,00	(1.516.000,00)	20,62	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.910.000,00	394.000,00	(1.516.000,00)	20,62	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.344.084.500,00	1.019.437.265,00	(324.647.235,00)	75,84	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	198.570.000,00	94.319.125,00	(104.250.875,00)	47,49	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	163.688.800,00	84.694.325,00	(78.994.475,00)	51,74	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	163.688.800,00	84.694.325,00	(78.994.475,00)	51,74	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.688.800,00	84.694.325,00	(78.994.475,00)	51,74	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	22.077.200,00	6.156.000,00	(15.921.200,00)	27,88	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.077.200,00	6.156.000,00	(15.921.200,00)	27,88	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.077.200,00	6.156.000,00	(15.921.200,00)	27,88	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0012		EVALUASI DATA, INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	12.804.000,00	3.468.800,00	(9.335.200,00)	27,09	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	12.804.000,00	3.468.800,00	(9.335.200,00)	27,09	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.804.000,00	3.468.800,00	(9.335.200,00)	27,09	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	522.372.400,00	385.414.790,00	(136.957.610,00)	73,78	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	19.615.300,00	6.089.800,00	(13.525.500,00)	31,04	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.615.300,00	6.089.800,00	(13.525.500,00)	31,04	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.615.300,00	6.089.800,00	(13.525.500,00)	31,04	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	92.805.500,00	51.980.030,00	(40.825.470,00)	56,00	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	92.805.500,00	51.980.030,00	(40.825.470,00)	56,00	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.805.500,00	51.980.030,00	(40.825.470,00)	56,00	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	409.951.600,00	327.344.960,00	(82.606.640,00)	79,84	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	409.951.600,00	327.344.960,00	(82.606.640,00)	79,84	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.951.600,00	327.344.960,00	(82.606.640,00)	79,84	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	603.797.300,00	527.192.700,00	(76.604.600,00)	87,31	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	354.500.000,00	347.410.600,00	(7.089.400,00)	98,00	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	354.500.000,00	347.410.600,00	(7.089.400,00)	98,00	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.500.000,00	347.410.600,00	(7.089.400,00)	98,00	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT	235.011.100,00	175.127.100,00	(59.884.000,00)	74,51	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	235.011.100,00	175.127.100,00	(59.884.000,00)	74,51	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.011.100,00	175.127.100,00	(59.884.000,00)	74,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0013		PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASN	14.286.200,00	4.655.000,00	(9.631.200,00)	32,58	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	14.286.200,00	4.655.000,00	(9.631.200,00)	32,58	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.286.200,00	4.655.000,00	(9.631.200,00)	32,58	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	19.344.800,00	12.510.650,00	(6.834.150,00)	64,67	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04.0003		EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	10.647.000,00	4.606.100,00	(6.040.900,00)	43,26	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.647.000,00	4.606.100,00	(6.040.900,00)	43,26	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.647.000,00	4.606.100,00	(6.040.900,00)	43,26	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	8.697.800,00	7.904.550,00	(793.250,00)	90,87	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.697.800,00	7.904.550,00	(793.250,00)	90,87	
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.697.800,00	7.904.550,00	(793.250,00)	90,87	
				JUMLAH BELANJA	5.703.064.829,00	4.979.980.982,00	(723.083.847,00)	87,32	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.703.064.829,00)	(4.979.980.982,00)	723.083.847,00	87,32	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.703.064.829,00)	(4.979.980.982,00)	723.083.847,00	87,32	

INSPEKTORAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	11.439.736.023,00	9.619.225.635,00	(1.820.510.388,00)	84,08	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.593.664.123,00	8.478.286.406,00	(1.115.377.717,00)	88,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.448.886.189,00	7.102.853.019,00	(346.033.170,00)	95,35	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.342.936.189,00	7.028.119.269,00	(314.816.920,00)	95,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.342.936.189,00	7.028.119.269,00	(314.816.920,00)	95,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.342.936.189,00	7.028.119.269,00	(314.816.920,00)	95,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	105.950.000,00	74.733.750,00	(31.216.250,00)	70,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	105.950.000,00	74.733.750,00	(31.216.250,00)	70,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.950.000,00	74.733.750,00	(31.216.250,00)	70,53	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	490.731.000,00	113.721.650,00	(377.009.350,00)	23,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	490.731.000,00	113.721.650,00	(377.009.350,00)	23,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	490.731.000,00	113.721.650,00	(377.009.350,00)	23,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.731.000,00	113.721.650,00	(377.009.350,00)	23,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	466.575.480,00	298.108.424,00	(168.467.056,00)	63,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	21.752.015,00	21.638.310,00	(113.705,00)	99,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.752.015,00	21.638.310,00	(113.705,00)	99,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.752.015,00	21.638.310,00	(113.705,00)	99,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	137.599.465,00	110.948.462,00	(26.651.003,00)	80,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	137.599.465,00	110.948.462,00	(26.651.003,00)	80,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.599.465,00	110.948.462,00	(26.651.003,00)	80,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	307.224.000,00	165.521.652,00	(141.702.348,00)	53,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	307.224.000,00	165.521.652,00	(141.702.348,00)	53,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.224.000,00	165.521.652,00	(141.702.348,00)	53,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	327.886.174,00	272.703.204,00	(55.182.970,00)	83,17	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	19.712.400,00	18.850.001,00	(862.399,00)	95,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	19.562.400,00	18.700.001,00	(862.399,00)	95,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.562.400,00	18.700.001,00	(862.399,00)	95,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	308.173.774,00	253.853.203,00	(54.320.571,00)	82,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	307.423.774,00	253.103.203,00	(54.320.571,00)	82,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	307.423.774,00	253.103.203,00	(54.320.571,00)	82,33	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	618.015.280,00	473.600.544,00	(144.414.736,00)	76,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	240.579.280,00	210.434.544,00	(30.144.736,00)	87,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	240.579.280,00	210.434.544,00	(30.144.736,00)	87,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.579.280,00	210.434.544,00	(30.144.736,00)	87,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	377.436.000,00	263.166.000,00	(114.270.000,00)	69,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	377.436.000,00	263.166.000,00	(114.270.000,00)	69,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.436.000,00	263.166.000,00	(114.270.000,00)	69,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	241.570.000,00	217.299.565,00	(24.270.435,00)	89,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	44.500.000,00	41.639.305,00	(2.860.695,00)	93,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.500.000,00	41.639.305,00	(2.860.695,00)	93,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	41.639.305,00	(2.860.695,00)	93,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	43.350.000,00	21.949.440,00	(21.400.560,00)	50,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	43.350.000,00	21.949.440,00	(21.400.560,00)	50,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.350.000,00	21.949.440,00	(21.400.560,00)	50,63	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	153.720.000,00	153.710.820,00	(9.180,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	153.720.000,00	153.710.820,00	(9.180,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.720.000,00	153.710.820,00	(9.180,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.603.834.900,00	1.050.862.619,00	(552.972.281,00)	65,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	1.312.154.700,00	808.927.619,00	(503.227.081,00)	61,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	498.370.000,00	306.990.000,00	(191.380.000,00)	61,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	498.370.000,00	306.990.000,00	(191.380.000,00)	61,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.370.000,00	306.990.000,00	(191.380.000,00)	61,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	346.415.000,00	281.508.700,00	(64.906.300,00)	81,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	346.415.000,00	281.508.700,00	(64.906.300,00)	81,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.415.000,00	281.508.700,00	(64.906.300,00)	81,26	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	7.701.000,00	0,00	(7.701.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.701.000,00	0,00	(7.701.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.701.000,00	0,00	(7.701.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	41.688.600,00	41.510.000,00	(178.600,00)	99,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	41.688.600,00	41.510.000,00	(178.600,00)	99,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.688.600,00	41.510.000,00	(178.600,00)	99,57	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	267.910.000,00	120.070.000,00	(147.840.000,00)	44,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	267.910.000,00	120.070.000,00	(147.840.000,00)	44,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.910.000,00	120.070.000,00	(147.840.000,00)	44,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0006		KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL	31.582.000,00	9.947.000,00	(21.635.000,00)	31,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.582.000,00	9.947.000,00	(21.635.000,00)	31,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.582.000,00	9.947.000,00	(21.635.000,00)	31,49	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	118.488.100,00	48.901.919,00	(69.586.181,00)	41,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	118.488.100,00	48.901.919,00	(69.586.181,00)	41,27	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.488.100,00	48.901.919,00	(69.586.181,00)	41,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	291.680.200,00	241.935.000,00	(49.745.200,00)	82,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	23.525.000,00	9.585.000,00	(13.940.000,00)	40,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.525.000,00	9.585.000,00	(13.940.000,00)	40,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.525.000,00	9.585.000,00	(13.940.000,00)	40,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	268.155.200,00	232.350.000,00	(35.805.200,00)	86,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	268.155.200,00	232.350.000,00	(35.805.200,00)	86,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.155.200,00	232.350.000,00	(35.805.200,00)	86,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	242.237.000,00	90.076.610,00	(152.160.390,00)	37,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	18.070.000,00	715.000,00	(17.355.000,00)	3,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.01.0002		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN	18.070.000,00	715.000,00	(17.355.000,00)	3,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.070.000,00	715.000,00	(17.355.000,00)	3,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.070.000,00	715.000,00	(17.355.000,00)	3,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	224.167.000,00	89.361.610,00	(134.805.390,00)	39,86	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.356.000,00	15.883.100,00	(57.472.900,00)	21,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.356.000,00	15.883.100,00	(57.472.900,00)	21,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.356.000,00	15.883.100,00	(57.472.900,00)	21,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0002		PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	25.145.000,00	13.005.910,00	(12.139.090,00)	51,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.145.000,00	13.005.910,00	(12.139.090,00)	51,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.145.000,00	13.005.910,00	(12.139.090,00)	51,72	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	70.810.000,00	41.544.200,00	(29.265.800,00)	58,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.810.000,00	41.544.200,00	(29.265.800,00)	58,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.810.000,00	41.544.200,00	(29.265.800,00)	58,66	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0004		PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	54.856.000,00	18.928.400,00	(35.927.600,00)	34,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	54.856.000,00	18.928.400,00	(35.927.600,00)	34,50	
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.856.000,00	18.928.400,00	(35.927.600,00)	34,50	
				JUMLAH BELANJA	11.439.736.023,00	9.619.225.635,00	(1.820.510.388,00)	84,08	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(11.439.736.023,00)	(9.619.225.635,00)	1.820.510.388,00	84,08	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.439.736.023,00)	(9.619.225.635,00)	1.820.510.388,00	84,08	

KECAMATAN BASO

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Baso

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.784.150.862,00	1.683.170.087,00	(100.980.775,00)	94,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.737.946.862,00	1.640.802.487,00	(97.144.375,00)	94,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.343.660.796,00	1.260.256.777,00	(83.404.019,00)	93,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.314.070.796,00	1.230.666.777,00	(83.404.019,00)	93,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.314.070.796,00	1.230.666.777,00	(83.404.019,00)	93,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.314.070.796,00	1.230.666.777,00	(83.404.019,00)	93,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	135.281.817,00	135.058.450,00	(223.367,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.784.660,00	3.763.500,00	(21.160,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.784.660,00	3.763.500,00	(21.160,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.784.660,00	3.763.500,00	(21.160,00)	99,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	11.054.663,00	11.051.500,00	(3.163,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.054.663,00	11.051.500,00	(3.163,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.054.663,00	11.051.500,00	(3.163,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	9.648.300,00	9.640.000,00	(8.300,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.648.300,00	9.640.000,00	(8.300,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.648.300,00	9.640.000,00	(8.300,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	110.794.194,00	110.603.450,00	(190.744,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	110.794.194,00	110.603.450,00	(190.744,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.794.194,00	110.603.450,00	(190.744,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.980.000,00	(20.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	228.073.609,00	216.852.910,00	(11.220.699,00)	95,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.475.609,00	26.484.912,00	(8.990.697,00)	74,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.475.609,00	26.484.912,00	(8.990.697,00)	74,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.475.609,00	26.484.912,00	(8.990.697,00)	74,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	192.598.000,00	190.367.998,00	(2.230.002,00)	98,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	192.598.000,00	190.367.998,00	(2.230.002,00)	98,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.598.000,00	190.367.998,00	(2.230.002,00)	98,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.930.640,00	8.654.350,00	(2.276.290,00)	79,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	10.200.640,00	7.959.350,00	(2.241.290,00)	78,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.200.640,00	7.959.350,00	(2.241.290,00)	78,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.640,00	7.959.350,00	(2.241.290,00)	78,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	730.000,00	695.000,00	(35.000,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	730.000,00	695.000,00	(35.000,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.000,00	695.000,00	(35.000,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.529.000,00	30.862.700,00	(3.666.300,00)	89,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	34.529.000,00	30.862.700,00	(3.666.300,00)	89,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	34.529.000,00	30.862.700,00	(3.666.300,00)	89,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.529.000,00	30.862.700,00	(3.666.300,00)	89,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.529.000,00	30.862.700,00	(3.666.300,00)	89,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000,00	3.498.000,00	(2.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000,00	3.498.000,00	(2.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	3.500.000,00	3.498.000,00	(2.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.498.000,00	(2.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.498.000,00	(2.000,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.250.000,00	1.188.000,00	(62.000,00)	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.250.000,00	1.188.000,00	(62.000,00)	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	1.250.000,00	1.188.000,00	(62.000,00)	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.188.000,00	(62.000,00)	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.188.000,00	(62.000,00)	95,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.925.000,00	6.818.900,00	(106.100,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.925.000,00	6.818.900,00	(106.100,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	1.050.000,00	1.049.400,00	(600,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.049.400,00	(600,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.049.400,00	(600,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	5.875.000,00	5.769.500,00	(105.500,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.875.000,00	5.769.500,00	(105.500,00)	98,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.875.000,00	5.769.500,00	(105.500,00)	98,20	
				JUMLAH BELANJA	1.784.150.862,00	1.683.170.087,00	(100.980.775,00)	94,34	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.784.150.862,00)	(1.683.170.087,00)	100.980.775,00	94,34	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.784.150.862,00)	(1.683.170.087,00)	100.980.775,00	94,34	

KECAMATAN AMPEK ANGKEK

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Ampek Angkek

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.196.410.955,00	2.005.004.047,00	(191.406.908,00)	91,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.150.761.455,00	1.971.134.547,00	(179.626.908,00)	91,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.833.273.654,00	1.689.894.905,00	(143.378.749,00)	92,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.803.283.654,00	1.659.904.905,00	(143.378.749,00)	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.803.283.654,00	1.659.904.905,00	(143.378.749,00)	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.803.283.654,00	1.659.904.905,00	(143.378.749,00)	92,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.990.000,00	29.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.990.000,00	29.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.990.000,00	29.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	135.748.801,00	124.201.752,00	(11.547.049,00)	91,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.121.350,00	2.999.476,00	(121.874,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.121.350,00	2.999.476,00	(121.874,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.121.350,00	2.999.476,00	(121.874,00)	96,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.003.659,00	18.067.676,00	(1.935.983,00)	90,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.003.659,00	18.067.676,00	(1.935.983,00)	90,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.003.659,00	18.067.676,00	(1.935.983,00)	90,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	15.720.000,00	13.635.650,00	(2.084.350,00)	86,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.720.000,00	13.635.650,00	(2.084.350,00)	86,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	13.635.650,00	(2.084.350,00)	86,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	96.903.792,00	89.498.950,00	(7.404.842,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	96.903.792,00	89.498.950,00	(7.404.842,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.903.792,00	89.498.950,00	(7.404.842,00)	92,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	159.711.200,00	137.295.446,00	(22.415.754,00)	85,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.001.200,00	13.545.446,00	(2.455.754,00)	84,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.001.200,00	13.545.446,00	(2.455.754,00)	84,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.001.200,00	13.545.446,00	(2.455.754,00)	84,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	143.710.000,00	123.750.000,00	(19.960.000,00)	86,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	143.710.000,00	123.750.000,00	(19.960.000,00)	86,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.710.000,00	123.750.000,00	(19.960.000,00)	86,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.027.800,00	19.742.444,00	(2.285.356,00)	89,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	14.675.000,00	14.337.500,00	(337.500,00)	97,70	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.675.000,00	14.337.500,00	(337.500,00)	97,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.675.000,00	14.337.500,00	(337.500,00)	97,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.960.000,00	1.076.944,00	(1.883.056,00)	36,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.960.000,00	1.076.944,00	(1.883.056,00)	36,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	1.076.944,00	(1.883.056,00)	36,38	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	4.392.800,00	4.328.000,00	(64.800,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	4.392.800,00	4.328.000,00	(64.800,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.392.800,00	4.328.000,00	(64.800,00)	98,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.530.000,00	18.794.100,00	(9.735.900,00)	65,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	28.530.000,00	18.794.100,00	(9.735.900,00)	65,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	28.530.000,00	18.794.100,00	(9.735.900,00)	65,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.530.000,00	18.794.100,00	(9.735.900,00)	65,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.530.000,00	18.794.100,00	(9.735.900,00)	65,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.224.500,00	8.228.400,00	(1.996.100,00)	80,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.224.500,00	8.228.400,00	(1.996.100,00)	80,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	10.224.500,00	8.228.400,00	(1.996.100,00)	80,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.224.500,00	8.228.400,00	(1.996.100,00)	80,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.224.500,00	8.228.400,00	(1.996.100,00)	80,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.445.000,00	6.397.000,00	(48.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.445.000,00	6.397.000,00	(48.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	1.650.000,00	1.623.000,00	(27.000,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.623.000,00	(27.000,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.623.000,00	(27.000,00)	98,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	4.795.000,00	4.774.000,00	(21.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.795.000,00	4.774.000,00	(21.000,00)	99,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.795.000,00	4.774.000,00	(21.000,00)	99,56	
				JUMLAH BELANJA	2.196.410.955,00	2.005.004.047,00	(191.406.908,00)	91,28	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.196.410.955,00)	(2.005.004.047,00)	191.406.908,00	91,28	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.196.410.955,00)	(2.005.004.047,00)	191.406.908,00	91,28	

KECAMATAN CANDUNG

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Candung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	1.807.656.309,00	1.732.443.400,00	(75.212.909,00)	95,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.781.016.309,00	1.708.437.900,00	(72.578.409,00)	95,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.463.649.816,00	1.403.117.697,00	(60.532.119,00)	95,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.433.259.816,00	1.372.727.697,00	(60.532.119,00)	95,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.433.259.816,00	1.372.727.697,00	(60.532.119,00)	95,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.433.259.816,00	1.372.727.697,00	(60.532.119,00)	95,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	30.390.000,00	30.390.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.390.000,00	30.390.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.390.000,00	30.390.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	135.590.993,00	131.836.050,00	(3.754.943,00)	97,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.187.600,00	3.071.000,00	(116.600,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.187.600,00	3.071.000,00	(116.600,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.187.600,00	3.071.000,00	(116.600,00)	96,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.898.673,00	13.889.300,00	(9.373,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.898.673,00	13.889.300,00	(9.373,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.898.673,00	13.889.300,00	(9.373,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.470.520,00	7.470.500,00	(20,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.470.520,00	7.470.500,00	(20,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.470.520,00	7.470.500,00	(20,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	111.034.200,00	107.405.250,00	(3.628.950,00)	96,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	111.034.200,00	107.405.250,00	(3.628.950,00)	96,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.034.200,00	107.405.250,00	(3.628.950,00)	96,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	144.389.000,00	136.627.278,00	(7.761.722,00)	94,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.110.000,00	10.101.918,00	(3.008.082,00)	77,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.110.000,00	10.101.918,00	(3.008.082,00)	77,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.110.000,00	10.101.918,00	(3.008.082,00)	77,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	131.279.000,00	126.525.360,00	(4.753.640,00)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	131.279.000,00	126.525.360,00	(4.753.640,00)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.279.000,00	126.525.360,00	(4.753.640,00)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.386.500,00	36.856.875,00	(529.625,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	23.365.000,00	22.835.625,00	(529.375,00)	97,73	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.365.000,00	22.835.625,00	(529.375,00)	97,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.365.000,00	22.835.625,00	(529.375,00)	97,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	11.181.500,00	11.181.250,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.181.500,00	11.181.250,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.181.500,00	11.181.250,00	(250,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.680.000,00	17.187.700,00	(2.492.300,00)	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	19.680.000,00	17.187.700,00	(2.492.300,00)	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	19.680.000,00	17.187.700,00	(2.492.300,00)	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.680.000,00	17.187.700,00	(2.492.300,00)	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.680.000,00	17.187.700,00	(2.492.300,00)	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.700.000,00	1.603.800,00	(96.200,00)	94,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.700.000,00	1.603.800,00	(96.200,00)	94,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	1.700.000,00	1.603.800,00	(96.200,00)	94,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.603.800,00	(96.200,00)	94,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.603.800,00	(96.200,00)	94,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.700.000,00	1.672.000,00	(28.000,00)	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	1.700.000,00	1.672.000,00	(28.000,00)	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	1.700.000,00	1.672.000,00	(28.000,00)	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.672.000,00	(28.000,00)	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.672.000,00	(28.000,00)	98,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.560.000,00	3.542.000,00	(18.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.560.000,00	3.542.000,00	(18.000,00)	99,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	525.000,00	511.500,00	(13.500,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	525.000,00	511.500,00	(13.500,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	511.500,00	(13.500,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	3.035.000,00	3.030.500,00	(4.500,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.035.000,00	3.030.500,00	(4.500,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	3.030.500,00	(4.500,00)	99,85	
				JUMLAH BELANJA	1.807.656.309,00	1.732.443.400,00	(75.212.909,00)	95,83	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.807.656.309,00)	(1.732.443.400,00)	75.212.909,00	95,83	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.807.656.309,00)	(1.732.443.400,00)	75.212.909,00	95,83	

KECAMATAN TILATANG KAMANG

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tilatang Kamang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	2.030.205.289,00	1.877.837.606,00	(152.367.683,00)	92,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.992.535.664,00	1.846.974.706,00	(145.560.958,00)	92,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.545.548.414,00	1.471.677.867,00	(73.870.547,00)	95,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.518.398.414,00	1.444.527.867,00	(73.870.547,00)	95,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.518.398.414,00	1.444.527.867,00	(73.870.547,00)	95,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.518.398.414,00	1.444.527.867,00	(73.870.547,00)	95,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	171.245.250,00	157.571.215,00	(13.674.035,00)	92,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.674.270,00	1.585.000,00	(89.270,00)	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.674.270,00	1.585.000,00	(89.270,00)	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.674.270,00	1.585.000,00	(89.270,00)	94,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.602.840,00	15.571.120,00	(31.720,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.602.840,00	15.571.120,00	(31.720,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.602.840,00	15.571.120,00	(31.720,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12.124.800,00	10.290.950,00	(1.833.850,00)	84,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	12.124.800,00	10.290.950,00	(1.833.850,00)	84,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.124.800,00	10.290.950,00	(1.833.850,00)	84,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	141.843.340,00	130.124.145,00	(11.719.195,00)	91,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	141.843.340,00	130.124.145,00	(11.719.195,00)	91,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.843.340,00	130.124.145,00	(11.719.195,00)	91,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	197.892.000,00	180.357.534,00	(17.534.466,00)	91,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.216.000,00	21.021.534,00	(6.194.466,00)	77,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.216.000,00	21.021.534,00	(6.194.466,00)	77,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.216.000,00	21.021.534,00	(6.194.466,00)	77,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	170.676.000,00	159.336.000,00	(11.340.000,00)	93,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	170.676.000,00	159.336.000,00	(11.340.000,00)	93,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.676.000,00	159.336.000,00	(11.340.000,00)	93,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	77.850.000,00	37.368.090,00	(40.481.910,00)	48,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	25.500.000,00	22.227.200,00	(3.272.800,00)	87,16	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	22.227.200,00	(3.272.800,00)	87,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	22.227.200,00	(3.272.800,00)	87,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.030.000,00	3.891.500,00	(1.138.500,00)	77,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.030.000,00	3.891.500,00	(1.138.500,00)	77,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	3.891.500,00	(1.138.500,00)	77,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	47.320.000,00	11.249.390,00	(36.070.610,00)	23,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	47.320.000,00	11.249.390,00	(36.070.610,00)	23,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.320.000,00	11.249.390,00	(36.070.610,00)	23,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.959.625,00	22.846.500,00	(5.113.125,00)	81,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	27.959.625,00	22.846.500,00	(5.113.125,00)	81,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	27.959.625,00	22.846.500,00	(5.113.125,00)	81,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.959.625,00	22.846.500,00	(5.113.125,00)	81,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.959.625,00	22.846.500,00	(5.113.125,00)	81,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	977.900,00	(1.522.100,00)	39,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	2.500.000,00	977.900,00	(1.522.100,00)	39,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	2.500.000,00	977.900,00	(1.522.100,00)	39,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	977.900,00	(1.522.100,00)	39,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	977.900,00	(1.522.100,00)	39,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.210.000,00	7.038.500,00	(171.500,00)	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.210.000,00	7.038.500,00	(171.500,00)	97,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	1.950.000,00	1.890.000,00	(60.000,00)	96,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.890.000,00	(60.000,00)	96,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	1.890.000,00	(60.000,00)	96,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	5.260.000,00	5.148.500,00	(111.500,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.260.000,00	5.148.500,00	(111.500,00)	97,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.260.000,00	5.148.500,00	(111.500,00)	97,88	
				JUMLAH BELANJA	2.030.205.289,00	1.877.837.606,00	(152.367.683,00)	92,49	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.030.205.289,00)	(1.877.837.606,00)	152.367.683,00	92,49	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.030.205.289,00)	(1.877.837.606,00)	152.367.683,00	92,49	

KECAMATAN KAMANG MAGEK

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Kamang Magek

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.715.473.301,00	1.636.818.158,00	(78.655.143,00)	95,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.662.413.301,00	1.584.800.658,00	(77.612.643,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.330.688.370,00	1.288.057.593,00	(42.630.777,00)	96,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.300.198.370,00	1.258.967.593,00	(41.230.777,00)	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.300.198.370,00	1.258.967.593,00	(41.230.777,00)	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.198.370,00	1.258.967.593,00	(41.230.777,00)	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	30.490.000,00	29.090.000,00	(1.400.000,00)	95,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.490.000,00	29.090.000,00	(1.400.000,00)	95,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.490.000,00	29.090.000,00	(1.400.000,00)	95,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	161.747.591,00	134.441.965,00	(27.305.626,00)	83,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.408.130,00	5.397.930,00	(10.200,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.408.130,00	5.397.930,00	(10.200,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.408.130,00	5.397.930,00	(10.200,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	29.792.591,00	22.422.150,00	(7.370.441,00)	75,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.792.591,00	22.422.150,00	(7.370.441,00)	75,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.792.591,00	22.422.150,00	(7.370.441,00)	75,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.292.870,00	3.866.350,00	(2.426.520,00)	61,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.292.870,00	3.866.350,00	(2.426.520,00)	61,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.292.870,00	3.866.350,00	(2.426.520,00)	61,44	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	118.754.000,00	101.255.535,00	(17.498.465,00)	85,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	118.754.000,00	101.255.535,00	(17.498.465,00)	85,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.754.000,00	101.255.535,00	(17.498.465,00)	85,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	26.500.000,00	26.469.450,00	(30.550,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	16.500.000,00	16.479.450,00	(20.550,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	16.500.000,00	16.479.450,00	(20.550,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.500.000,00	16.479.450,00	(20.550,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	120.032.340,00	117.829.050,00	(2.203.290,00)	98,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.782.340,00	26.039.050,00	(743.290,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.782.340,00	26.039.050,00	(743.290,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.782.340,00	26.039.050,00	(743.290,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.750.000,00	(250.000,00)	93,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	89.250.000,00	88.040.000,00	(1.210.000,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	89.250.000,00	88.040.000,00	(1.210.000,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.250.000,00	88.040.000,00	(1.210.000,00)	98,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	23.445.000,00	18.002.600,00	(5.442.400,00)	76,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	21.565.000,00	16.182.600,00	(5.382.400,00)	75,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.565.000,00	16.182.600,00	(5.382.400,00)	75,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.565.000,00	16.182.600,00	(5.382.400,00)	75,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.460.000,00	1.400.000,00	(60.000,00)	95,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.460.000,00	1.400.000,00	(60.000,00)	95,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.400.000,00	(60.000,00)	95,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.175.000,00	31.392.500,00	(782.500,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	32.175.000,00	31.392.500,00	(782.500,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	32.175.000,00	31.392.500,00	(782.500,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.175.000,00	31.392.500,00	(782.500,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.175.000,00	31.392.500,00	(782.500,00)	97,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.350.000,00	7.260.000,00	(90.000,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.350.000,00	7.260.000,00	(90.000,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	7.350.000,00	7.260.000,00	(90.000,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.350.000,00	7.260.000,00	(90.000,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	7.260.000,00	(90.000,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.500.000,00	4.480.000,00	(20.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	4.500.000,00	4.480.000,00	(20.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	4.500.000,00	4.480.000,00	(20.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.480.000,00	(20.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.480.000,00	(20.000,00)	99,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.035.000,00	8.885.000,00	(150.000,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.035.000,00	8.885.000,00	(150.000,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.450.000,00	(50.000,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	4.535.000,00	4.435.000,00	(100.000,00)	97,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.535.000,00	4.435.000,00	(100.000,00)	97,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.535.000,00	4.435.000,00	(100.000,00)	97,79	
				JUMLAH BELANJA	1.715.473.301,00	1.636.818.158,00	(78.655.143,00)	95,41	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.715.473.301,00)	(1.636.818.158,00)	78.655.143,00	95,41	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.715.473.301,00)	(1.636.818.158,00)	78.655.143,00	95,41	

KECAMATAN PALUPUH

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Palupuh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	1.943.742.649,08	1.636.856.911,00	(306.885.738,08)	84,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.935.261.761,50	1.631.875.211,00	(303.386.550,50)	84,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.390.695.614,00	1.195.463.031,00	(195.232.583,00)	85,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.361.505.614,00	1.166.493.031,00	(195.012.583,00)	85,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.361.505.614,00	1.166.493.031,00	(195.012.583,00)	85,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.361.505.614,00	1.166.493.031,00	(195.012.583,00)	85,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.190.000,00	28.970.000,00	(220.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.190.000,00	28.970.000,00	(220.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.190.000,00	28.970.000,00	(220.000,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	326.265.800,50	228.014.275,00	(98.251.525,50)	69,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.994.880,00	4.744.000,00	(250.880,00)	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.994.880,00	4.744.000,00	(250.880,00)	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.994.880,00	4.744.000,00	(250.880,00)	94,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	52.774.120,50	34.580.175,00	(18.193.945,50)	65,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	52.774.120,50	34.580.175,00	(18.193.945,50)	65,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.774.120,50	34.580.175,00	(18.193.945,50)	65,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	37.271.000,00	13.218.500,00	(24.052.500,00)	35,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	37.271.000,00	13.218.500,00	(24.052.500,00)	35,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.271.000,00	13.218.500,00	(24.052.500,00)	35,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	231.225.800,00	175.471.600,00	(55.754.200,00)	75,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	231.225.800,00	175.471.600,00	(55.754.200,00)	75,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.225.800,00	175.471.600,00	(55.754.200,00)	75,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	180.941.547,00	177.660.280,00	(3.281.267,00)	98,18	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.239.547,00	15.482.280,00	(757.267,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.239.547,00	15.482.280,00	(757.267,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.239.547,00	15.482.280,00	(757.267,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	164.702.000,00	162.178.000,00	(2.524.000,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	164.702.000,00	162.178.000,00	(2.524.000,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.702.000,00	162.178.000,00	(2.524.000,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.358.800,00	30.737.625,00	(6.621.175,00)	82,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	27.088.800,00	26.402.725,00	(686.075,00)	97,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.088.800,00	26.402.725,00	(686.075,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.088.800,00	26.402.725,00	(686.075,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.270.000,00	4.334.900,00	(5.935.100,00)	42,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.270.000,00	4.334.900,00	(5.935.100,00)	42,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	4.334.900,00	(5.935.100,00)	42,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.080.887,58	4.981.700,00	(99.187,58)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.080.887,58	4.981.700,00	(99.187,58)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	5.080.887,58	4.981.700,00	(99.187,58)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.080.887,58	4.981.700,00	(99.187,58)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.080.887,58	4.981.700,00	(99.187,58)	98,04	
				JUMLAH BELANJA	1.943.742.649,08	1.636.856.911,00	(306.885.738,08)	84,21	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.943.742.649,08)	(1.636.856.911,00)	306.885.738,08	84,21	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.943.742.649,08)	(1.636.856.911,00)	306.885.738,08	84,21	

KECAMATAN BANUHAMPU

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Banuhampu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	2.025.070.637,00	1.648.898.868,00	(376.171.769,00)	81,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.922.791.637,00	1.621.477.093,00	(301.314.544,00)	84,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.430.993.742,00	1.191.318.135,00	(239.675.607,00)	83,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.399.253.742,00	1.159.578.135,00	(239.675.607,00)	82,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.399.253.742,00	1.159.578.135,00	(239.675.607,00)	82,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.399.253.742,00	1.159.578.135,00	(239.675.607,00)	82,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	195.180.895,00	183.078.902,00	(12.101.993,00)	93,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.362.870,00	1.350.000,00	(12.870,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.362.870,00	1.350.000,00	(12.870,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.362.870,00	1.350.000,00	(12.870,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.339.151,00	25.653.644,00	(1.685.507,00)	93,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.339.151,00	25.653.644,00	(1.685.507,00)	93,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.339.151,00	25.653.644,00	(1.685.507,00)	93,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.861.674,00	5.495.000,00	(1.366.674,00)	80,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.861.674,00	5.495.000,00	(1.366.674,00)	80,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.861.674,00	5.495.000,00	(1.366.674,00)	80,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	159.617.200,00	150.580.258,00	(9.036.942,00)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	159.617.200,00	150.580.258,00	(9.036.942,00)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.617.200,00	150.580.258,00	(9.036.942,00)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	69.839.000,00	66.200.000,00	(3.639.000,00)	94,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	69.839.000,00	66.200.000,00	(3.639.000,00)	94,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	69.839.000,00	66.200.000,00	(3.639.000,00)	94,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.839.000,00	66.200.000,00	(3.639.000,00)	94,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	128.859.200,00	117.976.386,00	(10.882.814,00)	91,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17.582.000,00	14.104.391,00	(3.477.609,00)	80,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.582.000,00	14.104.391,00	(3.477.609,00)	80,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.582.000,00	14.104.391,00	(3.477.609,00)	80,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	111.277.200,00	103.871.995,00	(7.405.205,00)	93,34	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	111.277.200,00	103.871.995,00	(7.405.205,00)	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.277.200,00	103.871.995,00	(7.405.205,00)	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	97.918.800,00	62.903.670,00	(35.015.130,00)	64,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	42.600.000,00	37.994.978,00	(4.605.022,00)	89,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.600.000,00	37.994.978,00	(4.605.022,00)	89,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.600.000,00	37.994.978,00	(4.605.022,00)	89,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.317.000,00	4.908.692,00	(408.308,00)	92,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.317.000,00	4.908.692,00	(408.308,00)	92,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.317.000,00	4.908.692,00	(408.308,00)	92,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	50.001.800,00	20.000.000,00	(30.001.800,00)	39,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.001.800,00	20.000.000,00	(30.001.800,00)	39,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.001.800,00	20.000.000,00	(30.001.800,00)	39,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.165.000,00	13.140.650,00	(64.024.350,00)	17,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	77.165.000,00	13.140.650,00	(64.024.350,00)	17,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	77.165.000,00	13.140.650,00	(64.024.350,00)	17,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.165.000,00	13.140.650,00	(64.024.350,00)	17,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.165.000,00	13.140.650,00	(64.024.350,00)	17,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.484.000,00	7.759.775,00	(724.225,00)	91,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.484.000,00	7.759.775,00	(724.225,00)	91,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	8.484.000,00	7.759.775,00	(724.225,00)	91,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.484.000,00	7.759.775,00	(724.225,00)	91,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.484.000,00	7.759.775,00	(724.225,00)	91,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.680.000,00	0,00	(2.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	2.680.000,00	0,00	(2.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	2.680.000,00	0,00	(2.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.680.000,00	0,00	(2.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	0,00	(2.680.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.950.000,00	6.521.350,00	(7.428.650,00)	46,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.950.000,00	6.521.350,00	(7.428.650,00)	46,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	4.480.000,00	2.107.600,00	(2.372.400,00)	47,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.480.000,00	2.107.600,00	(2.372.400,00)	47,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	2.107.600,00	(2.372.400,00)	47,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	9.470.000,00	4.413.750,00	(5.056.250,00)	46,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	9.470.000,00	4.413.750,00	(5.056.250,00)	46,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	4.413.750,00	(5.056.250,00)	46,60	
				JUMLAH BELANJA	2.025.070.637,00	1.648.898.868,00	(376.171.769,00)	81,42	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.025.070.637,00)	(1.648.898.868,00)	376.171.769,00	81,42	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.025.070.637,00)	(1.648.898.868,00)	376.171.769,00	81,42	

KECAMATAN SUNGAI PUA

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Sungai Pua

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	1.809.671.088,00	1.624.342.491,00	(185.328.597,00)	89,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.773.036.088,00	1.601.467.691,00	(171.568.397,00)	90,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.406.836.461,00	1.301.461.047,00	(105.375.414,00)	92,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.376.446.461,00	1.272.271.047,00	(104.175.414,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.376.446.461,00	1.272.271.047,00	(104.175.414,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.376.446.461,00	1.272.271.047,00	(104.175.414,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	30.390.000,00	29.190.000,00	(1.200.000,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.390.000,00	29.190.000,00	(1.200.000,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.390.000,00	29.190.000,00	(1.200.000,00)	96,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	172.157.895,00	127.581.550,00	(44.576.345,00)	74,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.500.000,00	3.360.000,00	(140.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.360.000,00	(140.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.360.000,00	(140.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.680.234,00	16.402.000,00	(1.278.234,00)	92,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.680.234,00	16.402.000,00	(1.278.234,00)	92,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.680.234,00	16.402.000,00	(1.278.234,00)	92,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.136.926,00	6.639.550,00	(497.376,00)	93,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.136.926,00	6.639.550,00	(497.376,00)	93,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.136.926,00	6.639.550,00	(497.376,00)	93,03	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	139.940.735,00	97.280.000,00	(42.660.735,00)	69,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	139.940.735,00	97.280.000,00	(42.660.735,00)	69,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.940.735,00	97.280.000,00	(42.660.735,00)	69,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	172.328.332,00	156.869.094,00	(15.459.238,00)	91,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	31.728.332,00	25.416.094,00	(6.312.238,00)	80,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.728.332,00	25.416.094,00	(6.312.238,00)	80,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.728.332,00	25.416.094,00	(6.312.238,00)	80,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	140.600.000,00	131.453.000,00	(9.147.000,00)	93,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	140.600.000,00	131.453.000,00	(9.147.000,00)	93,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.600.000,00	131.453.000,00	(9.147.000,00)	93,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.713.400,00	15.556.000,00	(6.157.400,00)	71,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	16.683.400,00	12.776.000,00	(3.907.400,00)	76,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.683.400,00	12.776.000,00	(3.907.400,00)	76,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.683.400,00	12.776.000,00	(3.907.400,00)	76,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.030.000,00	2.780.000,00	(2.250.000,00)	55,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.030.000,00	2.780.000,00	(2.250.000,00)	55,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	2.780.000,00	(2.250.000,00)	55,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.185.000,00	12.141.600,00	(4.043.400,00)	75,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	16.185.000,00	12.141.600,00	(4.043.400,00)	75,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	16.185.000,00	12.141.600,00	(4.043.400,00)	75,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.185.000,00	12.141.600,00	(4.043.400,00)	75,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.185.000,00	12.141.600,00	(4.043.400,00)	75,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.525.000,00	3.545.200,00	(3.979.800,00)	47,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.525.000,00	3.545.200,00	(3.979.800,00)	47,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	7.525.000,00	3.545.200,00	(3.979.800,00)	47,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.525.000,00	3.545.200,00	(3.979.800,00)	47,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	3.545.200,00	(3.979.800,00)	47,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.125.000,00	0,00	(2.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	2.125.000,00	0,00	(2.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	2.125.000,00	0,00	(2.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.125.000,00	0,00	(2.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	0,00	(2.125.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.800.000,00	7.188.000,00	(3.612.000,00)	66,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.800.000,00	7.188.000,00	(3.612.000,00)	66,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	5.475.000,00	1.893.000,00	(3.582.000,00)	34,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.475.000,00	1.893.000,00	(3.582.000,00)	34,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	1.893.000,00	(3.582.000,00)	34,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	5.325.000,00	5.295.000,00	(30.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.325.000,00	5.295.000,00	(30.000,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	5.295.000,00	(30.000,00)	99,43	
				JUMLAH BELANJA	1.809.671.088,00	1.624.342.491,00	(185.328.597,00)	89,75	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.809.671.088,00)	(1.624.342.491,00)	185.328.597,00	89,75	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.809.671.088,00)	(1.624.342.491,00)	185.328.597,00	89,75	

KECAMATAN IV KOTO

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan IV Koto

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	1.633.008.836,00	1.491.855.290,00	(141.153.546,00)	91,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.593.793.836,00	1.454.454.790,00	(139.339.046,00)	91,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.247.157.626,00	1.135.259.942,00	(111.897.684,00)	91,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.221.017.626,00	1.109.639.942,00	(111.377.684,00)	90,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.221.017.626,00	1.109.639.942,00	(111.377.684,00)	90,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.221.017.626,00	1.109.639.942,00	(111.377.684,00)	90,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	26.140.000,00	25.620.000,00	(520.000,00)	98,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	26.140.000,00	25.620.000,00	(520.000,00)	98,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.140.000,00	25.620.000,00	(520.000,00)	98,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	145.614.210,00	137.738.518,00	(7.875.692,00)	94,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.640.675,00	6.924.738,00	(715.937,00)	90,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.640.675,00	6.924.738,00	(715.937,00)	90,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.640.675,00	6.924.738,00	(715.937,00)	90,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.668.535,00	20.465.530,00	(2.203.005,00)	90,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.668.535,00	20.465.530,00	(2.203.005,00)	90,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.668.535,00	20.465.530,00	(2.203.005,00)	90,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	5.858.000,00	5.402.100,00	(455.900,00)	92,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.858.000,00	5.402.100,00	(455.900,00)	92,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.858.000,00	5.402.100,00	(455.900,00)	92,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	109.447.000,00	104.946.150,00	(4.500.850,00)	95,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	109.447.000,00	104.946.150,00	(4.500.850,00)	95,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.447.000,00	104.946.150,00	(4.500.850,00)	95,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	35.501.000,00	33.488.850,00	(2.012.150,00)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.501.000,00	33.488.850,00	(2.012.150,00)	94,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	225.000,00	150.000,00	(75.000,00)	66,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	150.000,00	(75.000,00)	66,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	35.276.000,00	33.338.850,00	(1.937.150,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.276.000,00	33.338.850,00	(1.937.150,00)	94,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	148.206.000,00	136.163.180,00	(12.042.820,00)	91,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.624.000,00	17.288.180,00	(10.335.820,00)	62,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.624.000,00	17.288.180,00	(10.335.820,00)	62,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.624.000,00	17.288.180,00	(10.335.820,00)	62,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	120.582.000,00	118.875.000,00	(1.707.000,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	120.582.000,00	118.875.000,00	(1.707.000,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.582.000,00	118.875.000,00	(1.707.000,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.315.000,00	11.804.300,00	(5.510.700,00)	68,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15.165.000,00	9.654.300,00	(5.510.700,00)	63,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.165.000,00	9.654.300,00	(5.510.700,00)	63,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.165.000,00	9.654.300,00	(5.510.700,00)	63,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.000.000,00	32.203.000,00	(1.797.000,00)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	34.000.000,00	32.203.000,00	(1.797.000,00)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	34.000.000,00	32.203.000,00	(1.797.000,00)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	32.203.000,00	(1.797.000,00)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	32.203.000,00	(1.797.000,00)	94,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.215.000,00	5.197.500,00	(17.500,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.215.000,00	5.197.500,00	(17.500,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	5.215.000,00	5.197.500,00	(17.500,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.215.000,00	5.197.500,00	(17.500,00)	99,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.215.000,00	5.197.500,00	(17.500,00)	99,66	
				JUMLAH BELANJA	1.633.008.836,00	1.491.855.290,00	(141.153.546,00)	91,35	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.633.008.836,00)	(1.491.855.290,00)	141.153.546,00	91,35	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.633.008.836,00)	(1.491.855.290,00)	141.153.546,00	91,35	

KECAMATAN MATUR

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Matur

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	1.803.319.968,00	1.610.490.058,00	(192.829.910,00)	89,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.782.229.968,00	1.589.762.558,00	(192.467.410,00)	89,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.489.889.489,46	1.315.877.486,00	(174.012.003,46)	88,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.460.699.489,46	1.287.892.486,00	(172.807.003,46)	88,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.460.699.489,46	1.287.892.486,00	(172.807.003,46)	88,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.460.699.489,46	1.287.892.486,00	(172.807.003,46)	88,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.190.000,00	27.985.000,00	(1.205.000,00)	95,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.190.000,00	27.985.000,00	(1.205.000,00)	95,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.190.000,00	27.985.000,00	(1.205.000,00)	95,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	110.382.158,54	108.814.770,00	(1.567.388,54)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.079.630,00	3.074.500,00	(5.130,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.079.630,00	3.074.500,00	(5.130,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.079.630,00	3.074.500,00	(5.130,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.894.529,00	17.610.270,00	(284.259,00)	98,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.894.529,00	17.610.270,00	(284.259,00)	98,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.894.529,00	17.610.270,00	(284.259,00)	98,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.462.528,00	6.314.000,00	(148.528,00)	97,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.462.528,00	6.314.000,00	(148.528,00)	97,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.462.528,00	6.314.000,00	(148.528,00)	97,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	82.945.471,54	81.816.000,00	(1.129.471,54)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	82.945.471,54	81.816.000,00	(1.129.471,54)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.945.471,54	81.816.000,00	(1.129.471,54)	98,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	155.324.000,00	140.727.402,00	(14.596.598,00)	90,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.172.000,00	18.065.402,00	(5.106.598,00)	77,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.172.000,00	18.065.402,00	(5.106.598,00)	77,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.172.000,00	18.065.402,00	(5.106.598,00)	77,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	132.152.000,00	122.662.000,00	(9.490.000,00)	92,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.152.000,00	122.662.000,00	(9.490.000,00)	92,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.152.000,00	122.662.000,00	(9.490.000,00)	92,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.634.320,00	24.342.900,00	(2.291.420,00)	91,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	12.050.000,00	11.185.150,00	(864.850,00)	92,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.050.000,00	11.185.150,00	(864.850,00)	92,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.050.000,00	11.185.150,00	(864.850,00)	92,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.874.000,00	1.600.000,00	(274.000,00)	85,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.874.000,00	1.600.000,00	(274.000,00)	85,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.874.000,00	1.600.000,00	(274.000,00)	85,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	12.710.320,00	11.557.750,00	(1.152.570,00)	90,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	12.710.320,00	11.557.750,00	(1.152.570,00)	90,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.710.320,00	11.557.750,00	(1.152.570,00)	90,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.770.000,00	12.589.000,00	(181.000,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	12.770.000,00	12.589.000,00	(181.000,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	12.770.000,00	12.589.000,00	(181.000,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.770.000,00	12.589.000,00	(181.000,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.770.000,00	12.589.000,00	(181.000,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.320.000,00	8.138.500,00	(181.500,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.320.000,00	8.138.500,00	(181.500,00)	97,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	4.120.000,00	3.946.400,00	(173.600,00)	95,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.120.000,00	3.946.400,00	(173.600,00)	95,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	3.946.400,00	(173.600,00)	95,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	4.200.000,00	4.192.100,00	(7.900,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.192.100,00	(7.900,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.192.100,00	(7.900,00)	99,81	
				JUMLAH BELANJA	1.803.319.968,00	1.610.490.058,00	(192.829.910,00)	89,30	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.803.319.968,00)	(1.610.490.058,00)	192.829.910,00	89,30	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.803.319.968,00)	(1.610.490.058,00)	192.829.910,00	89,30	

KECAMATAN PALEMBAYAN

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Palembayan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	1.762.448.292,00	1.599.089.098,00	(163.359.194,00)	90,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.734.841.492,00	1.574.664.298,00	(160.177.194,00)	90,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.398.385.275,00	1.255.452.699,00	(142.932.576,00)	89,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.368.795.275,00	1.225.862.699,00	(142.932.576,00)	89,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.368.795.275,00	1.225.862.699,00	(142.932.576,00)	89,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.368.795.275,00	1.225.862.699,00	(142.932.576,00)	89,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	144.706.225,00	141.963.300,00	(2.742.925,00)	98,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.976.710,00	2.927.000,00	(49.710,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.976.710,00	2.927.000,00	(49.710,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.976.710,00	2.927.000,00	(49.710,00)	98,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	14.176.315,00	13.353.500,00	(822.815,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.176.315,00	13.353.500,00	(822.815,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.176.315,00	13.353.500,00	(822.815,00)	94,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	122.803.200,00	120.932.800,00	(1.870.400,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	122.803.200,00	120.932.800,00	(1.870.400,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.803.200,00	120.932.800,00	(1.870.400,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	169.609.992,00	156.806.225,00	(12.803.767,00)	92,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.679.992,00	13.676.225,00	(11.003.767,00)	55,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.679.992,00	13.676.225,00	(11.003.767,00)	55,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.679.992,00	13.676.225,00	(11.003.767,00)	55,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	144.930.000,00	143.130.000,00	(1.800.000,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	144.930.000,00	143.130.000,00	(1.800.000,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.930.000,00	143.130.000,00	(1.800.000,00)	98,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	22.140.000,00	20.442.074,00	(1.697.926,00)	92,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15.000.000,00	13.362.074,00	(1.637.926,00)	89,08	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	13.362.074,00	(1.637.926,00)	89,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	13.362.074,00	(1.637.926,00)	89,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.140.000,00	7.080.000,00	(60.000,00)	99,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.140.000,00	7.080.000,00	(60.000,00)	99,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	7.080.000,00	(60.000,00)	99,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.850.000,00	910.000,00	(2.940.000,00)	23,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	3.850.000,00	910.000,00	(2.940.000,00)	23,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	3.850.000,00	910.000,00	(2.940.000,00)	23,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000,00	910.000,00	(2.940.000,00)	23,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	910.000,00	(2.940.000,00)	23,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.575.000,00	15.548.500,00	(26.500,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.575.000,00	15.548.500,00	(26.500,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	15.575.000,00	15.548.500,00	(26.500,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.575.000,00	15.548.500,00	(26.500,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.575.000,00	15.548.500,00	(26.500,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.181.800,00	7.966.300,00	(215.500,00)	97,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.181.800,00	7.966.300,00	(215.500,00)	97,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	1.750.000,00	1.534.500,00	(215.500,00)	87,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.534.500,00	(215.500,00)	87,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.534.500,00	(215.500,00)	87,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	6.431.800,00	6.431.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	6.431.800,00	6.431.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.431.800,00	6.431.800,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.762.448.292,00	1.599.089.098,00	(163.359.194,00)	90,73	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.762.448.292,00)	(1.599.089.098,00)	163.359.194,00	90,73	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.762.448.292,00)	(1.599.089.098,00)	163.359.194,00	90,73	

KECAMATAN TANJUNG RAYA

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tanjung Raya

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		5	BELANJA DAERAH	2.182.863.879,00	1.904.508.876,12	(278.355.002,88)	87,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.053.288.879,00	1.842.580.876,12	(210.708.002,88)	89,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.597.185.649,00	1.456.050.495,12	(141.135.153,88)	91,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.566.445.649,00	1.425.310.495,12	(141.135.153,88)	90,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.566.445.649,00	1.425.310.495,12	(141.135.153,88)	90,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.566.445.649,00	1.425.310.495,12	(141.135.153,88)	90,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	158.638.494,00	145.314.750,00	(13.323.744,00)	91,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.375.150,00	4.237.000,00	(138.150,00)	96,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.375.150,00	4.237.000,00	(138.150,00)	96,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.375.150,00	4.237.000,00	(138.150,00)	96,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.978.638,00	22.947.800,00	(30.838,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.978.638,00	22.947.800,00	(30.838,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.978.638,00	22.947.800,00	(30.838,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.512.300,00	8.414.100,00	(8.098.200,00)	50,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.512.300,00	8.414.100,00	(8.098.200,00)	50,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.512.300,00	8.414.100,00	(8.098.200,00)	50,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	114.772.406,00	109.715.850,00	(5.056.556,00)	95,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	114.772.406,00	109.715.850,00	(5.056.556,00)	95,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.772.406,00	109.715.850,00	(5.056.556,00)	95,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	215.254.736,00	200.358.531,00	(14.896.205,00)	93,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	39.313.736,00	30.272.531,00	(9.041.205,00)	77,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.313.736,00	30.272.531,00	(9.041.205,00)	77,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.313.736,00	30.272.531,00	(9.041.205,00)	77,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	175.941.000,00	170.086.000,00	(5.855.000,00)	96,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	175.941.000,00	170.086.000,00	(5.855.000,00)	96,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.941.000,00	170.086.000,00	(5.855.000,00)	96,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	82.210.000,00	40.857.100,00	(41.352.900,00)	49,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	25.500.000,00	22.114.800,00	(3.385.200,00)	86,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	22.114.800,00	(3.385.200,00)	86,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	22.114.800,00	(3.385.200,00)	86,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.420.000,00	10.391.300,00	(2.028.700,00)	83,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.420.000,00	10.391.300,00	(2.028.700,00)	83,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	10.391.300,00	(2.028.700,00)	83,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	44.290.000,00	8.351.000,00	(35.939.000,00)	18,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	44.290.000,00	8.351.000,00	(35.939.000,00)	18,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.290.000,00	8.351.000,00	(35.939.000,00)	18,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122.750.000,00	55.639.300,00	(67.110.700,00)	45,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	122.750.000,00	55.639.300,00	(67.110.700,00)	45,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	122.750.000,00	55.639.300,00	(67.110.700,00)	45,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	122.750.000,00	55.639.300,00	(67.110.700,00)	45,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.750.000,00	55.639.300,00	(67.110.700,00)	45,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	875.000,00	693.000,00	(182.000,00)	79,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	875.000,00	693.000,00	(182.000,00)	79,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	875.000,00	693.000,00	(182.000,00)	79,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	875.000,00	693.000,00	(182.000,00)	79,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	693.000,00	(182.000,00)	79,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	875.000,00	716.100,00	(158.900,00)	81,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	875.000,00	716.100,00	(158.900,00)	81,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	875.000,00	716.100,00	(158.900,00)	81,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	875.000,00	716.100,00	(158.900,00)	81,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	716.100,00	(158.900,00)	81,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.075.000,00	4.879.600,00	(195.400,00)	96,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.075.000,00	4.879.600,00	(195.400,00)	96,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	1.225.000,00	1.051.600,00	(173.400,00)	85,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.225.000,00	1.051.600,00	(173.400,00)	85,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	1.051.600,00	(173.400,00)	85,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	3.850.000,00	3.828.000,00	(22.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.850.000,00	3.828.000,00	(22.000,00)	99,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	3.828.000,00	(22.000,00)	99,42	
				JUMLAH BELANJA	2.182.863.879,00	1.904.508.876,12	(278.355.002,88)	87,24	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.182.863.879,00)	(1.904.508.876,12)	278.355.002,88	87,24	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.182.863.879,00)	(1.904.508.876,12)	278.355.002,88	87,24	

KECAMATAN LUBUK BASUNG

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Lubuk Basung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		5	BELANJA DAERAH	1.978.918.077,00	1.734.085.610,00	(244.832.467,00)	87,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.963.430.077,00	1.724.477.710,00	(238.952.367,00)	87,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.484.890.119,00	1.281.908.832,00	(202.981.287,00)	86,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.454.100.119,00	1.251.118.832,00	(202.981.287,00)	86,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.454.100.119,00	1.251.118.832,00	(202.981.287,00)	86,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.454.100.119,00	1.251.118.832,00	(202.981.287,00)	86,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	127.167.508,00	125.372.772,00	(1.794.736,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.178.800,00	5.000.000,00	(178.800,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.178.800,00	5.000.000,00	(178.800,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.178.800,00	5.000.000,00	(178.800,00)	96,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.691.068,00	19.000.000,00	(691.068,00)	96,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.691.068,00	19.000.000,00	(691.068,00)	96,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.691.068,00	19.000.000,00	(691.068,00)	96,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.598.240,00	8.534.000,00	(64.240,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.598.240,00	8.534.000,00	(64.240,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.598.240,00	8.534.000,00	(64.240,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	96,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	92.199.400,00	91.398.772,00	(800.628,00)	99,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	92.199.400,00	91.398.772,00	(800.628,00)	99,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.199.400,00	91.398.772,00	(800.628,00)	99,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	40.453.250,00	36.876.000,00	(3.577.250,00)	91,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.453.250,00	16.911.000,00	(3.542.250,00)	82,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.303.250,00	16.761.000,00	(3.542.250,00)	82,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.303.250,00	16.761.000,00	(3.542.250,00)	82,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	19.965.000,00	(35.000,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.965.000,00	(35.000,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.965.000,00	(35.000,00)	99,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	270.842.000,00	245.747.593,00	(25.094.407,00)	90,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	38.168.000,00	20.683.593,00	(17.484.407,00)	54,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.168.000,00	20.683.593,00	(17.484.407,00)	54,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.168.000,00	20.683.593,00	(17.484.407,00)	54,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	232.674.000,00	225.064.000,00	(7.610.000,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	232.674.000,00	225.064.000,00	(7.610.000,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.674.000,00	225.064.000,00	(7.610.000,00)	96,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	40.077.200,00	34.572.513,00	(5.504.687,00)	86,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	20.077.200,00	17.882.513,00	(2.194.687,00)	89,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.077.200,00	17.882.513,00	(2.194.687,00)	89,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.077.200,00	17.882.513,00	(2.194.687,00)	89,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.360.000,00	13.050.000,00	(3.310.000,00)	79,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.360.000,00	13.050.000,00	(3.310.000,00)	79,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.360.000,00	13.050.000,00	(3.310.000,00)	79,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.918.000,00	2.184.000,00	(4.734.000,00)	31,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	6.918.000,00	2.184.000,00	(4.734.000,00)	31,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	6.918.000,00	2.184.000,00	(4.734.000,00)	31,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.918.000,00	2.184.000,00	(4.734.000,00)	31,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.918.000,00	2.184.000,00	(4.734.000,00)	31,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.750.000,00	2.473.900,00	(276.100,00)	89,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	2.750.000,00	2.473.900,00	(276.100,00)	89,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	2.750.000,00	2.473.900,00	(276.100,00)	89,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.473.900,00	(276.100,00)	89,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.473.900,00	(276.100,00)	89,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.120.000,00	4.950.000,00	(170.000,00)	96,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.120.000,00	4.950.000,00	(170.000,00)	96,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	1.400.000,00	1.320.000,00	(80.000,00)	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.320.000,00	(80.000,00)	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.320.000,00	(80.000,00)	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	3.720.000,00	3.630.000,00	(90.000,00)	97,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.720.000,00	3.630.000,00	(90.000,00)	97,58	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.630.000,00	(90.000,00)	97,58	
				JUMLAH BELANJA	1.978.918.077,00	1.734.085.610,00	(244.832.467,00)	87,62	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.978.918.077,00)	(1.734.085.610,00)	244.832.467,00	87,62	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.978.918.077,00)	(1.734.085.610,00)	244.832.467,00	87,62	

KECAMATAN AMPEK NAGARI

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Ampek Nagari

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		5	BELANJA DAERAH	1.932.305.721,00	1.727.444.557,00	(204.861.164,00)	89,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.903.355.721,00	1.698.819.557,00	(204.536.164,00)	89,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.454.606.902,00	1.303.106.093,00	(151.500.809,00)	89,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.454.606.902,00	1.303.106.093,00	(151.500.809,00)	89,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.454.606.902,00	1.303.106.093,00	(151.500.809,00)	89,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.454.606.902,00	1.303.106.093,00	(151.500.809,00)	89,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	217.051.379,00	197.947.275,00	(19.104.104,00)	91,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.656.000,00	7.605.000,00	(51.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.656.000,00	7.605.000,00	(51.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.656.000,00	7.605.000,00	(51.000,00)	99,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.539.779,00	15.340.000,00	(199.779,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.539.779,00	15.340.000,00	(199.779,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.539.779,00	15.340.000,00	(199.779,00)	98,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.930.000,00	8.915.000,00	(15.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.930.000,00	8.915.000,00	(15.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.930.000,00	8.915.000,00	(15.000,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	184.925.600,00	166.087.275,00	(18.838.325,00)	89,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	184.925.600,00	166.087.275,00	(18.838.325,00)	89,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.925.600,00	166.087.275,00	(18.838.325,00)	89,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	188.607.440,00	160.188.789,00	(28.418.651,00)	84,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	29.791.440,00	20.798.789,00	(8.992.651,00)	69,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.791.440,00	20.798.789,00	(8.992.651,00)	69,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.791.440,00	20.798.789,00	(8.992.651,00)	69,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	158.816.000,00	139.390.000,00	(19.426.000,00)	87,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	158.816.000,00	139.390.000,00	(19.426.000,00)	87,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.816.000,00	139.390.000,00	(19.426.000,00)	87,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.090.000,00	27.587.400,00	(5.502.600,00)	83,37	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	18.750.000,00	13.312.400,00	(5.437.600,00)	70,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.750.000,00	13.312.400,00	(5.437.600,00)	70,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	13.312.400,00	(5.437.600,00)	70,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	7.280.000,00	7.215.000,00	(65.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.280.000,00	7.215.000,00	(65.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	7.215.000,00	(65.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.200.000,00	13.135.000,00	(65.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	13.200.000,00	13.135.000,00	(65.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	13.200.000,00	13.135.000,00	(65.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.135.000,00	(65.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.135.000,00	(65.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.450.000,00	(50.000,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.750.000,00	8.550.000,00	(200.000,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.750.000,00	8.550.000,00	(200.000,00)	97,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	3.500.000,00	3.300.000,00	(200.000,00)	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.300.000,00	(200.000,00)	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.300.000,00	(200.000,00)	94,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	1.932.305.721,00	1.727.444.557,00	(204.861.164,00)	89,39	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.932.305.721,00)	(1.727.444.557,00)	204.861.164,00	89,39	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.932.305.721,00)	(1.727.444.557,00)	204.861.164,00	89,39	

KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tanjung Mutiara

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		5	BELANJA DAERAH	2.167.556.932,00	2.004.606.781,00	(162.950.151,00)	92,48	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.134.812.932,00	1.990.811.781,00	(144.001.151,00)	93,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.636.685.214,00	1.589.946.694,00	(46.738.520,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.607.095.214,00	1.560.356.694,00	(46.738.520,00)	97,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.607.095.214,00	1.560.356.694,00	(46.738.520,00)	97,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.607.095.214,00	1.560.356.694,00	(46.738.520,00)	97,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	151.421.498,00	122.887.283,00	(28.534.215,00)	81,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.272.610,00	1.916.685,00	(4.355.925,00)	30,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.272.610,00	1.916.685,00	(4.355.925,00)	30,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.272.610,00	1.916.685,00	(4.355.925,00)	30,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	22.745.888,00	22.458.498,00	(287.390,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.745.888,00	22.458.498,00	(287.390,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.745.888,00	22.458.498,00	(287.390,00)	98,73	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.960.000,00	12.049.800,00	(2.910.200,00)	80,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.960.000,00	12.049.800,00	(2.910.200,00)	80,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,00	12.049.800,00	(2.910.200,00)	80,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	107.443.000,00	86.462.300,00	(20.980.700,00)	80,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	107.443.000,00	86.462.300,00	(20.980.700,00)	80,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.443.000,00	86.462.300,00	(20.980.700,00)	80,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	39.508.500,00	27.814.500,00	(11.694.000,00)	70,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.628.500,00	5.272.500,00	(8.356.000,00)	38,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	0,00	(150.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	13.478.500,00	5.272.500,00	(8.206.000,00)	39,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.478.500,00	5.272.500,00	(8.206.000,00)	39,11	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	5.880.000,00	2.542.000,00	(3.338.000,00)	43,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.880.000,00	2.542.000,00	(3.338.000,00)	43,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	2.542.000,00	(3.338.000,00)	43,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	268.791.720,00	223.452.664,00	(45.339.056,00)	83,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	55.539.232,00	34.570.320,00	(20.968.912,00)	62,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.539.232,00	34.570.320,00	(20.968.912,00)	62,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.539.232,00	34.570.320,00	(20.968.912,00)	62,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	213.252.488,00	188.882.344,00	(24.370.144,00)	88,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	213.252.488,00	188.882.344,00	(24.370.144,00)	88,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.252.488,00	188.882.344,00	(24.370.144,00)	88,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.406.000,00	26.710.640,00	(11.695.360,00)	69,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	14.750.000,00	11.867.600,00	(2.882.400,00)	80,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.750.000,00	11.867.600,00	(2.882.400,00)	80,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	11.867.600,00	(2.882.400,00)	80,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.640.000,00	2.350.000,00	(5.290.000,00)	30,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.640.000,00	2.350.000,00	(5.290.000,00)	30,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	2.350.000,00	(5.290.000,00)	30,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	16.016.000,00	12.493.040,00	(3.522.960,00)	78,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	16.016.000,00	12.493.040,00	(3.522.960,00)	78,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.016.000,00	12.493.040,00	(3.522.960,00)	78,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.515.000,00	3.675.000,00	(8.840.000,00)	29,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	12.515.000,00	3.675.000,00	(8.840.000,00)	29,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	12.515.000,00	3.675.000,00	(8.840.000,00)	29,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.515.000,00	3.675.000,00	(8.840.000,00)	29,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.515.000,00	3.675.000,00	(8.840.000,00)	29,36	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.200.000,00	2.625.000,00	(5.575.000,00)	32,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.200.000,00	2.625.000,00	(5.575.000,00)	32,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	8.200.000,00	2.625.000,00	(5.575.000,00)	32,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.200.000,00	2.625.000,00	(5.575.000,00)	32,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	2.625.000,00	(5.575.000,00)	32,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.994.000,00	2.035.000,00	(2.959.000,00)	40,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	4.994.000,00	2.035.000,00	(2.959.000,00)	40,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	4.994.000,00	2.035.000,00	(2.959.000,00)	40,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.994.000,00	2.035.000,00	(2.959.000,00)	40,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.994.000,00	2.035.000,00	(2.959.000,00)	40,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.035.000,00	5.460.000,00	(1.575.000,00)	77,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.035.000,00	5.460.000,00	(1.575.000,00)	77,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	3.500.000,00	1.925.000,00	(1.575.000,00)	55,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	1.925.000,00	(1.575.000,00)	55,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	1.925.000,00	(1.575.000,00)	55,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	100,00	
				JUMLAH BELANJA	2.167.556.932,00	2.004.606.781,00	(162.950.151,00)	92,48	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(2.167.556.932,00)	(2.004.606.781,00)	162.950.151,00	92,48	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.167.556.932,00)	(2.004.606.781,00)	162.950.151,00	92,48	

KECAMATAN MALALAK

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Malalak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		5	BELANJA DAERAH	1.691.923.138,00	1.571.411.848,00	(120.511.290,00)	92,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.610.383.513,00	1.504.465.748,00	(105.917.765,00)	93,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.205.801.512,00	1.155.865.096,00	(49.936.416,00)	95,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.175.011.512,00	1.125.075.096,00	(49.936.416,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.175.011.512,00	1.125.075.096,00	(49.936.416,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.011.512,00	1.125.075.096,00	(49.936.416,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	207.258.151,00	190.897.500,00	(16.360.651,00)	92,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.396.600,00	3.500.000,00	(1.896.600,00)	64,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.396.600,00	3.500.000,00	(1.896.600,00)	64,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.396.600,00	3.500.000,00	(1.896.600,00)	64,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	20.275.871,00	18.000.000,00	(2.275.871,00)	88,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.275.871,00	18.000.000,00	(2.275.871,00)	88,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.275.871,00	18.000.000,00	(2.275.871,00)	88,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	19.775.880,00	13.605.000,00	(6.170.880,00)	68,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.775.880,00	13.605.000,00	(6.170.880,00)	68,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.775.880,00	13.605.000,00	(6.170.880,00)	68,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	161.809.800,00	155.792.500,00	(6.017.300,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	161.809.800,00	155.792.500,00	(6.017.300,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.809.800,00	155.792.500,00	(6.017.300,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	35.351.850,00	0,00	(35.351.850,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.351.850,00	0,00	(35.351.850,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	675.000,00	0,00	(675.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	0,00	(675.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	34.676.850,00	0,00	(34.676.850,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.676.850,00	0,00	(34.676.850,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	136.262.000,00	134.730.473,00	(1.531.527,00)	98,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	8.212.000,00	7.560.473,00	(651.527,00)	92,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.212.000,00	7.560.473,00	(651.527,00)	92,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.212.000,00	7.560.473,00	(651.527,00)	92,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	128.050.000,00	127.170.000,00	(880.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	128.050.000,00	127.170.000,00	(880.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.050.000,00	127.170.000,00	(880.000,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.710.000,00	22.972.679,00	(2.737.321,00)	89,35	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	21.450.000,00	20.672.679,00	(777.321,00)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.450.000,00	20.672.679,00	(777.321,00)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.450.000,00	20.672.679,00	(777.321,00)	96,37	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.260.000,00	2.300.000,00	(1.960.000,00)	53,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.260.000,00	2.300.000,00	(1.960.000,00)	53,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.260.000,00	2.300.000,00	(1.960.000,00)	53,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.439.625,00	17.506.300,00	(6.933.325,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	24.439.625,00	17.506.300,00	(6.933.325,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	24.439.625,00	17.506.300,00	(6.933.325,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.439.625,00	17.506.300,00	(6.933.325,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.439.625,00	17.506.300,00	(6.933.325,00)	71,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.250.000,00	4.300.000,00	(950.000,00)	81,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.250.000,00	4.300.000,00	(950.000,00)	81,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	5.250.000,00	4.300.000,00	(950.000,00)	81,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	4.300.000,00	(950.000,00)	81,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	4.300.000,00	(950.000,00)	81,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.400.000,00	33.234.800,00	(3.165.200,00)	91,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	36.400.000,00	33.234.800,00	(3.165.200,00)	91,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.05.2.01.0008		PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	36.400.000,00	33.234.800,00	(3.165.200,00)	91,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	36.400.000,00	33.234.800,00	(3.165.200,00)	91,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.05.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	33.234.800,00	(3.165.200,00)	91,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.450.000,00	11.905.000,00	(3.545.000,00)	77,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.450.000,00	11.905.000,00	(3.545.000,00)	77,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.06.2.01.0003		FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	15.450.000,00	11.905.000,00	(3.545.000,00)	77,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.450.000,00	11.905.000,00	(3.545.000,00)	77,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	11.905.000,00	(3.545.000,00)	77,05	
				JUMLAH BELANJA	1.691.923.138,00	1.571.411.848,00	(120.511.290,00)	92,87	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(1.691.923.138,00)	(1.571.411.848,00)	120.511.290,00	92,87	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.691.923.138,00)	(1.571.411.848,00)	120.511.290,00	92,87	

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KAB. AGAM

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.805.369.269,72	5.126.855.583,00	(678.513.686,72)	88,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.555.448.593,72	2.433.507.723,00	(121.940.870,72)	95,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.147.781.893,56	2.060.320.241,00	(87.461.652,56)	95,92	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.104.831.893,56	2.017.370.241,00	(87.461.652,56)	95,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.104.831.893,56	2.017.370.241,00	(87.461.652,56)	95,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.104.831.893,56	2.017.370.241,00	(87.461.652,56)	95,84	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	42.950.000,00	42.950.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	42.950.000,00	42.950.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.950.000,00	42.950.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	113.447.373,16	109.731.359,00	(3.716.014,16)	96,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.583.640,00	3.583.640,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.583.640,00	3.583.640,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.583.640,00	3.583.640,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	13.853.933,16	12.951.524,00	(902.409,16)	93,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.853.933,16	12.951.524,00	(902.409,16)	93,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.853.933,16	12.951.524,00	(902.409,16)	93,48	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.292.400,00	8.230.200,00	(2.062.200,00)	79,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.292.400,00	8.230.200,00	(2.062.200,00)	79,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.292.400,00	8.230.200,00	(2.062.200,00)	79,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	85.717.400,00	84.965.995,00	(751.405,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	85.717.400,00	84.965.995,00	(751.405,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.717.400,00	84.965.995,00	(751.405,00)	99,12	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	36.372.250,00	33.561.480,00	(2.810.770,00)	92,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	36.372.250,00	33.561.480,00	(2.810.770,00)	92,27	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	36.297.250,00	33.486.480,00	(2.810.770,00)	92,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.297.250,00	33.486.480,00	(2.810.770,00)	92,25	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	220.292.077,00	200.237.668,00	(20.054.409,00)	90,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	42.188.077,00	34.931.668,00	(7.256.409,00)	82,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.188.077,00	34.931.668,00	(7.256.409,00)	82,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.188.077,00	34.931.668,00	(7.256.409,00)	82,79	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	178.104.000,00	165.306.000,00	(12.798.000,00)	92,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	178.104.000,00	165.306.000,00	(12.798.000,00)	92,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.104.000,00	165.306.000,00	(12.798.000,00)	92,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.555.000,00	29.656.975,00	(7.898.025,00)	78,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	32.805.000,00	24.986.975,00	(7.818.025,00)	76,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.805.000,00	24.986.975,00	(7.818.025,00)	76,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.805.000,00	24.986.975,00	(7.818.025,00)	76,16	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	4.750.000,00	4.670.000,00	(80.000,00)	98,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.670.000,00	(80.000,00)	98,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.670.000,00	(80.000,00)	98,31	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.208.449.304,00	1.034.650.043,00	(173.799.261,00)	85,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.208.449.304,00	1.034.650.043,00	(173.799.261,00)	85,61	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	16.364.504,00	12.734.600,00	(3.629.904,00)	77,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.364.504,00	12.734.600,00	(3.629.904,00)	77,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.364.504,00	12.734.600,00	(3.629.904,00)	77,81	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	1.192.084.800,00	1.021.915.443,00	(170.169.357,00)	85,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.192.084.800,00	1.021.915.443,00	(170.169.357,00)	85,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.192.084.800,00	1.021.915.443,00	(170.169.357,00)	85,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	913.992.812,00	913.114.662,00	(878.150,00)	99,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	913.992.812,00	913.114.662,00	(878.150,00)	99,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	913.992.812,00	913.114.662,00	(878.150,00)	99,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	913.992.812,00	913.114.662,00	(878.150,00)	99,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.495.000,00	40.616.850,00	(878.150,00)	97,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	872.497.812,00	872.497.812,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.984.000,00	1.510.000,00	(1.474.000,00)	50,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.984.000,00	1.510.000,00	(1.474.000,00)	50,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	2.984.000,00	1.510.000,00	(1.474.000,00)	50,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.984.000,00	1.510.000,00	(1.474.000,00)	50,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.984.000,00	1.510.000,00	(1.474.000,00)	50,60	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	45.529.560,00	21.501.950,00	(24.027.610,00)	47,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	45.529.560,00	21.501.950,00	(24.027.610,00)	47,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	45.529.560,00	21.501.950,00	(24.027.610,00)	47,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	45.529.560,00	21.501.950,00	(24.027.610,00)	47,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.529.560,00	21.501.950,00	(24.027.610,00)	47,22	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.078.965.000,00	722.571.205,00	(356.393.795,00)	66,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.078.965.000,00	722.571.205,00	(356.393.795,00)	66,96	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	520.002.000,00	442.704.100,00	(77.297.900,00)	85,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	520.002.000,00	442.704.100,00	(77.297.900,00)	85,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.002.000,00	442.704.100,00	(77.297.900,00)	85,13	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	558.963.000,00	279.867.105,00	(279.095.895,00)	50,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	558.963.000,00	279.867.105,00	(279.095.895,00)	50,06	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	558.963.000,00	279.867.105,00	(279.095.895,00)	50,06	
				JUMLAH BELANJA	5.805.369.269,72	5.126.855.583,00	(678.513.686,72)	88,31	
				SURPLUS / (DEFISIT)	(5.805.369.269,72)	(5.126.855.583,00)	678.513.686,72	88,31	
				SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.805.369.269,72)	(5.126.855.583,00)	678.513.686,72	88,31	

BUPATI AGAM

BENNI WARLIS

LAMPIRAN I.4

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Lampiran 1.4 : Peraturan Daerah Kabupaten Agam
Nomor : 8 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

KAB. AGAM

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	996.516.732.250,78	970.664.933.485,00	57.325.123.335,90	47.817.119.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	629.147.298.540,72	626.526.152.073,00	15.344.250.885,00	14.729.268.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	629.147.298.540,72	626.526.152.073,00	15.344.250.885,00	14.729.268.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	559.581.477.223,11	560.358.244.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	556.914.345.133,11	558.008.603.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	556.803.775.133,11	557.905.091.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	110.570.000,00	103.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.274.246,00	338.794.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.913.520,00	11.911.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.454.426,00	67.138.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.760.300,00	69.670.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.146.000,00	190.072.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.205.501.644,00	1.893.229.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.999.644,00	178.017.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.570.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.963.932.000,00	1.703.691.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.356.200,00	97.616.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.410.000,00	46.692.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.930.200,00	34.925.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.016.000,00	15.998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	69.352.291.317,61	66.060.345.188,00	15.344.250.885,00	14.729.268.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	43.549.236.684,61	41.802.344.017,00	9.557.381.657,00	9.331.985.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.250.000,00	1.250.000,00	103.542.500,00	103.020.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	104.337.000,00	103.945.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	9.955.800,00	9.891.800,00	449.751.150,00	436.388.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	105.660.000,00	105.145.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.405.895.000,00	1.386.658.820,00	37.681.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	599.442.200,00	482.915.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	43.970.000,00	43.824.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.124.284.884,61	39.518.656.118,00	7.827.812.046,00	7.660.441.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000,00	197.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.002.000,00	7.201.600,00	930.091.993,00	924.508.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	42.110.000,00	41.504.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.666.800,00	7.581.200,00	104.165.000,00	103.680.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.407.783.907,00	13.293.716.701,00	5.629.172.820,00	5.240.130.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18.106.900,00	17.304.500,00	383.857.500,00	375.362.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	0,00	99.650.000,00	99.358.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	98.490.134,00	91.575.000,00	718.360.000,00	703.269.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	198.385.000,00	185.215.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	394.980.000,00	386.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	49.384.280,00	45.283.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	40.913.000,00	27.199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	13.502.456.893,00	12.437.551.584,00	3.917.743.107,00	3.554.567.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.737.700,00	9.481.300,00	509.562.213,00	507.572.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	95.335.000,00	93.617.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.108.499.226,00	7.784.743.879,00	96.428.000,00	96.315.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	90.317.700,00	88.659.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1.560.271.000,00	1.558.121.813,00	13.612.500,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	46.599.990,00	44.490.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.789.384.500,00	5.483.703.654,00	82.815.500,00	82.815.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	529.024.536,00	526.256.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	44.740.000,00	37.160.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	48.161.500,00	46.351.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.286.766.500,00	3.179.540.591,00	61.268.408,00	60.836.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.157.257.500,00	3.060.371.721,00	32.142.500,00	32.143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	24.120.000,00	23.511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	90.385.000,00	80.671.100,00	29.125.908,00	28.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.004.000,00	14.986.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	206.980.000,00	121.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	206.980.000,00	121.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	206.980.000,00	121.212.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	6.550.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.550.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.550.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	297.175.051.250,00	279.641.885.407,00	23.753.125.741,00	17.773.624.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	181.077.371.037,00	176.779.645.809,00	2.085.615.361,00	1.327.523.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.369.928.625,00	123.744.521.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	118.259.232.248,00	118.063.219.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	118.144.787.248,00	117.950.865.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	114.445.000,00	112.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	471.173.688,00	406.387.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.085.200,00	13.084.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.193.268,00	91.803.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.819.800,00	52.803.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.075.420,00	248.695.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.366.097.689,00	5.019.632.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.601.689,00	391.219.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.923.496.000,00	4.628.412.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.425.000,00	255.282.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.115.000,00	25.579.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.940.000,00	116.356.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.320.000,00	58.319.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.050.000,00	55.026.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.908.169.462,00	51.884.974.841,00	2.085.615.361,00	1.327.523.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.780.935.430,00	8.545.496.989,00	1.900.915.851,00	1.327.523.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	114.893.080,00	114.804.630,00	537.040.651,00	198.941.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	9.924.800,00	9.292.840,00	1.230.363.000,00	1.128.582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.656.117.550,00	8.421.399.519,00	133.512.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.097.316.532,00	43.310.605.602,00	184.699.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.673.000,00	13.847.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	18.136.700,00	8.952.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.056.600,00	9.624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.469.400,00	8.082.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.424.000,00	13.793.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.456.000,00	12.262.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	47.499.750,00	24.412.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.740.000,00	12.934.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	16.705.009,00	1.962.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.250.000,00	7.430.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	54.634.828,00	36.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.814.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	5.973.920,00	5.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.118.000,00	2.107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	277.800.100,00	260.031.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	276.676.000,00	143.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	105.871.000,00	81.480.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	216.864.000,00	196.350.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41.568.332.400,00	41.498.351.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	49.804.325,00	35.685.100,00	184.699.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.010.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	301.589.000,00	297.232.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.814.000,00	6.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.814.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	28.007.500,00	12.452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	18.949.000,00	7.002.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	933.485.000,00	587.534.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	13.349.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.917.500,00	28.872.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	8.589.000,00	8.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	11.223.500,00	10.788.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	10.105.000,00	9.589.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	964.544.950,00	380.738.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.654.950,00	2.056.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.654.950,00	2.056.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	960.890.000,00	378.682.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	960.890.000,00	378.682.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	634.728.000,00	569.410.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79.480.000,00	66.646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	79.480.000,00	66.646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	274.949.000,00	251.485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	274.949.000,00	251.485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	280.299.000,00	251.277.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	280.299.000,00	251.277.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah	64.605.938.000,00	60.527.458.531,00	14.427.966.000,00	11.434.515.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.597.938.000,00	60.517.024.031,00	12.066.250.000,00	9.133.927.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.486.000,00	60.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	64.486.000,00	60.977.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.232.268.000,00	1.222.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.232.268.000,00	1.222.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	63.301.184.000,00	59.233.746.031,00	12.066.250.000,00	9.133.927.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	63.301.184.000,00	59.233.746.031,00	12.066.250.000,00	9.133.927.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.000.000,00	10.434.500,00	2.361.716.000,00	2.300.587.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000,00	10.434.500,00	2.361.716.000,00	2.300.587.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	8.000.000,00	10.434.500,00	2.361.716.000,00	2.300.587.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Tiku	2.267.779.869,00	1.934.856.306,00	216.930.000,00	91.960.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.649.319.869,00	1.410.281.064,00	216.930.000,00	91.960.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.649.319.869,00	1.410.281.064,00	216.930.000,00	91.960.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.649.319.869,00	1.410.281.064,00	216.930.000,00	91.960.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	615.500.000,00	524.575.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	615.500.000,00	524.575.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.500.000,00	25.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.000.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.350.000,00	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	276.360.000,00	247.577.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.450.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.700.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.600.000,00	74.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	128.040.000,00	109.294.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Muaro Putuih	1.131.760.225,00	911.496.272,00	34.900.000,00	8.535.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	665.760.225,00	539.338.755,00	34.900.000,00	8.535.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	665.760.225,00	539.338.755,00	34.900.000,00	8.535.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	665.760.225,00	539.338.755,00	34.900.000,00	8.535.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	465.100.000,00	372.157.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	465.100.000,00	372.157.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	11.550.000,00	10.087.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.600.000,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.000.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	193.300.000,00	130.903.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.460.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	80.440.000,00	71.668.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	103.400.000,00	90.297.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	4.150.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Manggopoh	2.657.190.930,00	2.137.598.142,00	718.992.929,00	258.573.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.939.441.930,00	1.641.778.415,00	718.992.929,00	258.573.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.939.441.930,00	1.641.778.415,00	718.992.929,00	258.573.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.939.441.930,00	1.641.778.415,00	718.992.929,00	258.573.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	712.329.000,00	491.233.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	712.329.000,00	491.233.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.000.000,00	25.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.400.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	67.800.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	201.880.000,00	186.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.400.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.450.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	12.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	132.400.000,00	85.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.880.000,00	122.790.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.100.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	9.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.420.000,00	4.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.420.000,00	4.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.420.000,00	4.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Lubuk Basung	3.866.869.257,00	3.180.949.559,00	1.132.160.326,00	850.397.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.077.186.257,00	2.582.612.700,00	1.132.160.326,00	850.397.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.077.186.257,00	2.582.612.700,00	1.132.160.326,00	850.397.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.077.186.257,00	2.582.612.700,00	1.132.160.326,00	850.397.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	784.103.400,00	598.336.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	784.103.400,00	598.336.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	75.660.000,00	70.466.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.290.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	36.600.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	269.414.000,00	186.639.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.350.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.300.000,00	10.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	127.950.000,00	95.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.720.400,00	139.478.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.969.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.950.000,00	6.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.579.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.579.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.579.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Bawan	2.152.524.408,00	2.116.696.439,00	523.706.614,00	364.180.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.625.804.408,00	1.625.533.478,00	523.706.614,00	364.180.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.625.804.408,00	1.625.533.478,00	523.706.614,00	364.180.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.625.804.408,00	1.625.533.478,00	523.706.614,00	364.180.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	526.520.000,00	490.962.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	526.520.000,00	490.962.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.000.000,00	23.974.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.100.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.500.000,00	20.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	219.120.000,00	218.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.750.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.400.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	77.250.000,00	64.217.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	114.300.000,00	109.077.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Batu Kambing	1.411.184.936,00	1.116.160.443,00	100.000.000,00	98.178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	834.104.936,00	743.044.974,00	100.000.000,00	98.178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	834.104.936,00	743.044.974,00	100.000.000,00	98.178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	834.104.936,00	743.044.974,00	100.000.000,00	98.178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	573.080.000,00	371.632.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	573.080.000,00	371.632.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.800.000,00	7.989.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.600.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.600.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.150.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	197.830.000,00	123.301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.850.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	8.200.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.650.000,00	69.012.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	127.100.000,00	99.472.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.950.000,00	10.957.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	10.350.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.000.000,00	1.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000,00	1.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.000.000,00	1.482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Pasar Ahad	1.980.318.453,00	1.648.393.330,00	353.901.337,00	303.114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.432.798.453,00	1.235.832.966,00	353.901.337,00	303.114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.432.798.453,00	1.235.832.966,00	353.901.337,00	303.114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.432.798.453,00	1.235.832.966,00	353.901.337,00	303.114.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	541.345.000,00	408.119.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	541.345.000,00	408.119.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.400.000,00	17.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.550.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	165.220.000,00	119.203.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.950.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.100.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.102.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.448.000,00	85.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	125.525.000,00	97.003.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	4.550.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.400.000,00	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.175.000,00	4.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.175.000,00	4.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.175.000,00	4.441.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Maninjau	2.260.386.774,00	2.127.081.291,00	148.470.199,00	75.752.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.765.666.774,00	1.659.933.526,00	148.470.199,00	75.752.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.765.666.774,00	1.659.933.526,00	148.470.199,00	75.752.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.765.666.774,00	1.659.933.526,00	148.470.199,00	75.752.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	494.720.000,00	467.147.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	494.720.000,00	467.147.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.350.000,00	35.085.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.800.000,00	25.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.600.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.720.000,00	160.350.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.900.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.400.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15.150.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	91.950.000,00	87.126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	114.300.000,00	105.735.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Koto Alam	2.496.878.903,00	1.766.087.823,00	479.940.617,00	280.679.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.957.658.903,00	1.348.493.292,00	479.940.617,00	280.679.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.957.658.903,00	1.348.493.292,00	479.940.617,00	280.679.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.957.658.903,00	1.348.493.292,00	479.940.617,00	280.679.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	534.360.000,00	414.539.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	534.360.000,00	414.539.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.800.000,00	27.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.600.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	204.970.000,00	157.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.950.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18.200.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.600.000,00	12.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.400.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.900.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	109.440.000,00	91.271.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.000.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.860.000,00	3.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.860.000,00	3.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.860.000,00	3.055.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Palembayan	1.622.808.484,00	1.470.313.486,00	243.973.611,00	92.192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.055.748.484,00	1.004.333.676,00	243.973.611,00	92.192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.055.748.484,00	1.004.333.676,00	243.973.611,00	92.192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.055.748.484,00	1.004.333.676,00	243.973.611,00	92.192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	561.980.000,00	464.415.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	561.980.000,00	464.415.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.080.000,00	13.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.400.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.800.000,00	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.950.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	181.210.000,00	162.035.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.300.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.100.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.800.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	105.050.000,00	88.969.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.120.000,00	105.039.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	13.350.000,00	5.543.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.620.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	37.000.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.080.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.080.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.080.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Matur	2.424.951.559,00	2.031.530.301,00	336.730.628,00	261.485.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.908.711.559,00	1.667.666.156,00	336.730.628,00	261.485.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.908.711.559,00	1.667.666.156,00	336.730.628,00	261.485.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.908.711.559,00	1.667.666.156,00	336.730.628,00	261.485.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	509.660.000,00	358.126.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	509.660.000,00	358.126.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.695.000,00	44.304.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.400.000,00	12.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.600.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.250.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	139.690.000,00	112.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.600.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.600.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.300.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.700.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.750.000,00	53.769.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	124.320.000,00	83.122.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.580.000,00	5.737.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.580.000,00	5.737.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.580.000,00	5.737.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas IV Koto	2.520.479.659,00	2.130.502.616,00	327.488.472,00	308.452.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.871.579.659,00	1.573.844.366,00	327.488.472,00	308.452.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.871.579.659,00	1.573.844.366,00	327.488.472,00	308.452.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.871.579.659,00	1.573.844.366,00	327.488.472,00	308.452.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	646.200.000,00	554.826.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	646.200.000,00	554.826.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.800.000,00	16.688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.200.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.000.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	283.750.000,00	253.094.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.400.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.800.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1.900.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	117.900.000,00	89.781.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	144.600.000,00	137.563.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.800.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.400.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.700.000,00	1.831.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000,00	1.831.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.700.000,00	1.831.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Malalak	1.227.937.484,00	898.322.244,00	155.238.800,00	116.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	800.417.484,00	609.385.668,00	155.238.800,00	116.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	800.417.484,00	609.385.668,00	155.238.800,00	116.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	800.417.484,00	609.385.668,00	155.238.800,00	116.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	425.620.200,00	288.936.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	425.620.200,00	288.936.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	22.960.000,00	11.268.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.300.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.000.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.974.000,00	152.476.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.650.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.970.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.275.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	91.002.200,00	65.241.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.540.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	4.049.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.400.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.899.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.899.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.899.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Padang Luar	2.609.672.416,00	1.988.306.697,00	254.645.000,00	119.431.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.956.832.416,00	1.491.979.211,00	254.645.000,00	119.431.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.956.832.416,00	1.491.979.211,00	254.645.000,00	119.431.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.956.832.416,00	1.491.979.211,00	254.645.000,00	119.431.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	628.430.000,00	481.410.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	628.430.000,00	481.410.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.600.000,00	17.938.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.050.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.800.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.000.000,00	8.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.400.000,00	21.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	151.590.000,00	140.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.000.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.800.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	21.400.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	74.220.000,00	54.425.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.270.000,00	114.639.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	71.100.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.410.000,00	14.916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.410.000,00	14.916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	24.410.000,00	14.916.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016		Puskesmas Sungai Pua	2.456.711.737,00	2.203.715.447,00	196.765.480,00	152.659.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.768.551.737,00	1.663.496.727,00	196.765.480,00	152.659.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.768.551.737,00	1.663.496.727,00	196.765.480,00	152.659.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.768.551.737,00	1.663.496.727,00	196.765.480,00	152.659.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	683.720.000,00	536.052.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	683.720.000,00	536.052.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.150.000,00	29.016.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.000.000,00	21.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	275.610.000,00	199.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.500.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.900.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115.350.000,00	94.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.960.000,00	123.505.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.950.000,00	1.461.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	4.440.000,00	4.166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.440.000,00	4.166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0016	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.440.000,00	4.166.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Puskesmas Lasi	2.179.720.200,00	1.756.563.147,00	369.740.041,00	232.582.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.438.780.200,00	1.208.502.250,00	369.740.041,00	232.582.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.438.780.200,00	1.208.502.250,00	369.740.041,00	232.582.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.438.780.200,00	1.208.502.250,00	369.740.041,00	232.582.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	737.490.000,00	548.060.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	737.490.000,00	548.060.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.000.000,00	31.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	45.400.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	12.700.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	269.040.000,00	233.340.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3.200.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.400.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.100.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	21.600.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	142.550.000,00	100.942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	159.850.000,00	137.519.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.200.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018		Puskesmas biaro	3.379.023.891,00	3.219.508.271,00	370.292.189,00	360.657.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.680.123.891,00	2.625.154.927,00	370.292.189,00	360.657.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.680.123.891,00	2.625.154.927,00	370.292.189,00	360.657.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.680.123.891,00	2.625.154.927,00	370.292.189,00	360.657.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	689.800.000,00	587.717.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	689.800.000,00	587.717.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.750.000,00	29.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.950.000,00	25.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.600.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286.600.000,00	268.674.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5.600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.250.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.450.000,00	14.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.300.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	106.000.000,00	84.781.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	140.000.000,00	122.176.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	14.600.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.100.000,00	6.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.100.000,00	6.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0018	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.100.000,00	6.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019		Puskesmas Baso	2.789.203.358,00	2.100.972.681,00	400.000.000,00	295.960.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.092.383.358,00	1.646.664.153,00	400.000.000,00	295.960.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.092.383.358,00	1.646.664.153,00	400.000.000,00	295.960.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.092.383.358,00	1.646.664.153,00	400.000.000,00	295.960.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	691.100.000,00	454.308.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	691.100.000,00	454.308.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.600.000,00	33.719.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	53.350.000,00	29.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.000.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.800.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.920.000,00	109.041.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.400.000,00	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.600.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.300.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	118.300.000,00	91.718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	157.980.000,00	132.609.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	10.300.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	39.600.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0019	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020		Puskesmas Padang Tarok	1.515.752.201,00	1.132.235.977,00	148.837.500,00	95.422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	946.502.201,00	736.741.869,00	148.837.500,00	95.422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	946.502.201,00	736.741.869,00	148.837.500,00	95.422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	946.502.201,00	736.741.869,00	148.837.500,00	95.422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	566.325.000,00	395.494.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	566.325.000,00	395.494.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.000.000,00	24.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.600.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	20.200.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.550.000,00	120.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.150.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.900.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.650.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.800.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.450.000,00	57.704.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	128.975.000,00	99.079.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12.700.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	7.700.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0020	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021		Puskesmas Magek	2.342.414.837,00	1.593.984.059,00	238.976.275,00	193.233.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.749.334.837,00	1.152.494.280,00	238.976.275,00	193.233.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.749.334.837,00	1.152.494.280,00	238.976.275,00	193.233.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.749.334.837,00	1.152.494.280,00	238.976.275,00	193.233.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	589.125.000,00	441.239.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	589.125.000,00	441.239.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.260.000,00	38.586.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	28.400.000,00	20.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.300.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	145.380.000,00	112.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.400.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.700.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	101.800.000,00	63.643.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	126.745.000,00	106.829.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	83.290.000,00	61.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.955.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.955.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0021	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.955.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022		Puskesmas Pakan Kamis	3.059.001.665,00	2.076.055.411,00	192.603.000,00	165.912.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.357.061.665,00	1.596.713.929,00	192.603.000,00	165.912.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.357.061.665,00	1.596.713.929,00	192.603.000,00	165.912.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.357.061.665,00	1.596.713.929,00	192.603.000,00	165.912.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	695.360.000,00	473.835.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	695.360.000,00	473.835.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.200.000,00	11.869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	59.850.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.200.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.300.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	214.640.000,00	152.841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	6.750.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.800.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.300.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.600.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	110.200.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.720.000,00	123.828.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	2.500.000,00	2.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.900.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.580.000,00	5.505.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.580.000,00	5.505.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0022	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.580.000,00	5.505.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023		Puskesmas Kapau	1.188.101.987,00	1.057.453.387,00	205.251.362,00	198.583.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	640.056.987,00	573.121.986,00	205.251.362,00	198.583.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	640.056.987,00	573.121.986,00	205.251.362,00	198.583.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	640.056.987,00	573.121.986,00	205.251.362,00	198.583.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	544.084.000,00	481.291.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	544.084.000,00	481.291.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.600.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.100.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.800.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.100.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.560.000,00	123.627.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.600.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.000.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.064.000,00	70.587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	127.560.000,00	121.976.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.800.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.961.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.961.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0023	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.961.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024		Puskesmas Palupuh	1.951.068.980,00	1.735.997.738,00	90.000.000,00	87.633.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.410.663.980,00	1.226.257.087,00	90.000.000,00	87.633.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.410.663.980,00	1.226.257.087,00	90.000.000,00	87.633.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.410.663.980,00	1.226.257.087,00	90.000.000,00	87.633.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	540.105.000,00	509.440.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	540.105.000,00	509.440.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	42.600.000,00	42.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	46.800.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117.700.000,00	116.103.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4.100.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.700.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.000.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	120.008.000,00	112.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	130.769.000,00	119.959.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.036.000,00	5.972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0024	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32.317.899.281,92	29.392.502.627,00	17.593.199.469,90	14.850.821.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	32.317.899.281,92	29.392.502.627,00	17.593.199.469,90	14.850.821.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.142.184.138,91	8.411.931.431,00	62.615.960,00	58.474.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.256.819.542,04	6.844.342.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.968.749.542,04	6.579.328.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	288.070.000,00	265.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	318.688.868,47	312.872.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.834.312,47	87.833.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.642.556,00	25.373.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.212.000,00	199.664.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	62.615.960,00	58.474.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	62.615.960,00	58.474.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.164.339.690,00	858.190.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.009.690,00	145.739.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	955.330.000,00	712.450.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.336.038,40	396.526.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	356.082.970,00	350.276.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.602.000,00	22.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.651.068,40	23.647.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.179.591.850,00	1.022.159.498,00	1.200.000.000,00	1.198.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	165.478.750,00	139.511.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	165.478.750,00	139.511.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.014.113.100,00	882.648.438,00	1.200.000.000,00	1.198.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.014.113.100,00	882.648.438,00	1.200.000.000,00	1.198.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.313.008.488,00	7.198.003.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.313.008.488,00	7.198.003.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	153.385.488,00	108.499.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	7.159.623.000,00	7.089.504.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.923.864.187,01	7.887.872.143,00	3.883.399.289,90	3.733.202.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.923.864.187,01	7.887.872.143,00	3.883.399.289,90	3.733.202.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.923.864.187,01	7.887.872.143,00	3.883.399.289,90	3.733.202.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.628.592.618,00	4.818.534.775,00	12.447.184.220,00	9.861.107.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5.628.592.618,00	4.818.534.775,00	12.447.184.220,00	9.861.107.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	2.118.941.600,00	2.001.112.672,00	10.446.530.700,00	9.761.629.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	300.000.000,00	180.039.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	319.101.018,00	217.374.760,00	2.000.653.520,00	99.478.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	2.890.550.000,00	2.420.008.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	80.598.000,00	9.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	80.598.000,00	9.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	80.598.000,00	9.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50.060.000,00	44.335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	50.060.000,00	44.335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	1.03.5.05.0.00.01.0000	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	50.060.000,00	44.335.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.735.028.347,00	7.423.001.411,00	11.845.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.735.028.347,00	7.423.001.411,00	11.845.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.494.349.147,00	3.290.990.129,00	4.840.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.116.976.475,00	2.929.927.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.853.275.475,00	2.673.886.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	263.701.000,00	256.040.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.789.783,00	194.782.515,00	4.840.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.785.183,00	57.633.665,00	4.840.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.759.600,00	16.660.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.245.000,00	120.487.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.115.289,00	89.310.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.805.289,00	45.750.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.310.000,00	43.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.467.600,00	76.969.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.500.000,00	49.082.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.950.000,00	23.887.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.017.600,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	332.938.700,00	281.388.097,00	7.005.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	56.098.000,00	42.269.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	7.588.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	48.510.000,00	39.619.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	102.357.600,00	85.523.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	3.507.600,00	1.243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	98.850.000,00	84.280.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	174.483.100,00	153.595.547,00	7.005.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	174.483.100,00	153.595.547,00	7.005.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	317.713.000,00	313.298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	35.683.000,00	33.104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	35.683.000,00	33.104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	282.030.000,00	280.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	282.030.000,00	280.193.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.394.620.000,00	1.393.936.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.394.620.000,00	1.393.936.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.394.620.000,00	1.393.936.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.195.407.500,00	2.143.387.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.195.407.500,00	2.143.387.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	127.895.000,00	109.612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	2.067.512.500,00	2.033.774.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.836.590.214,14	18.517.660.534,00	595.190.840,00	432.551.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.508.331.949,14	4.996.977.958,00	250.000.000,00	249.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.800.248.629,14	4.458.112.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.072.648.027,14	2.892.003.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.023.138.027,14	2.842.813.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.510.000,00	49.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	292.992.434,00	264.536.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.146.000,00	3.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.138.834,00	56.113.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.316.600,00	15.316.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	218.391.000,00	190.009.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.047.535.168,00	937.796.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.839.168,00	40.089.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.540.000,00	16.426.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	982.156.000,00	881.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.073.000,00	223.776.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.615.000,00	31.676.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.930.000,00	164.618.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.528.000,00	27.481.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	708.083.320,00	538.865.166,00	250.000.000,00	249.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	27.986.080,00	27.567.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	27.986.080,00	27.567.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	143.647.640,00	141.039.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	48.932.708,00	48.110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3.008.200,00	2.723.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	91.706.732,00	90.205.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	163.407.000,00	120.578.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	37.851.700,00	13.273.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	118.480.300,00	101.438.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	7.075.000,00	5.866.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	373.042.600,00	249.680.017,00	250.000.000,00	249.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	373.042.600,00	249.680.017,00	250.000.000,00	249.644.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.328.258.265,00	13.520.682.576,00	345.190.840,00	182.907.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.956.645.465,00	11.448.203.223,00	99.824.500,00	29.450.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.819.597.673,00	9.361.979.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.767.187.673,00	9.309.569.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.410.000,00	52.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.313.558,00	213.582.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.830.510,00	13.761.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.728.448,00	35.251.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.400,00	7.130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.755.200,00	157.439.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000,00	300.000,00	99.824.500,00	29.450.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000,00	300.000,00	99.824.500,00	29.450.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.835.412.234,00	1.810.039.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.119.000,00	75.177.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.751.293.234,00	1.734.861.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.022.000,00	62.301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.300.000,00	8.799.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000,00	20.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.020.000,00	13.057.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.202.000,00	19.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.183.172.000,00	1.113.922.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.151.792.000,00	1.084.901.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	901.581.800,00	862.153.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	173.710.200,00	173.409.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	76.500.000,00	49.338.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	31.380.000,00	29.020.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	10.380.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21.000.000,00	20.140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.188.440.800,00	958.556.583,00	245.366.340,00	153.457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.033.109.000,00	852.994.383,00	245.366.340,00	153.457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	829.911.000,00	659.881.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	148.000.000,00	147.825.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	16.150.000,00	8.000.000,00	245.366.340,00	153.457.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	39.048.000,00	37.287.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	6.132.800,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	6.132.800,00	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	85.769.000,00	57.287.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	56.525.500,00	48.363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	29.243.500,00	8.924.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	63.430.000,00	45.034.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	63.430.000,00	45.034.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.304.864.617,00	9.163.781.433,00	27.511.400,00	24.404.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		Dinas Sosial	4.554.864.617,00	4.197.260.915,00	27.511.400,00	24.404.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.552.728.239,00	3.348.984.475,00	27.511.400,00	24.404.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.679.142.958,00	2.536.743.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.626.832.958,00	2.490.526.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.310.000,00	46.217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.675.716,00	163.414.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.178.451,00	5.764.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.155.665,00	46.474.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.705.300,00	13.692.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.636.300,00	97.482.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	27.511.400,00	24.404.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	27.511.400,00	24.404.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.744.565,00	571.097.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.986.565,00	46.632.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.758.000,00	524.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.165.000,00	77.729.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.345.000,00	21.233.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.500.000,00	37.185.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.850.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.470.000,00	12.210.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	227.522.555,00	203.941.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	227.522.555,00	203.941.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	114.500.000,00	110.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	37.488.800,00	27.235.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75.533.755,00	65.745.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	306.748.600,00	262.672.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	299.413.600,00	256.363.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	89.542.400,00	84.029.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	32.400.000,00	30.991.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	47.008.500,00	34.729.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.654.100,00	2.339.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.388.800,00	8.172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	42.710.500,00	35.777.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	417.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.969.500,00	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	39.000.000,00	29.584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.143.700,00	2.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	29.179.100,00	26.734.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	7.335.000,00	6.309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.950.000,00	1.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	5.385.000,00	5.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	202.428.500,00	183.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	202.428.500,00	183.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	202.428.500,00	183.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	256.053.523,00	189.282.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	166.135.632,00	118.104.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	99.922.182,00	66.873.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	26.062.500,00	25.825.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	35.402.500,00	20.702.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	695.750,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	4.052.700,00	4.017.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	89.917.891,00	71.178.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	89.917.891,00	71.178.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	9.383.200,00	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.383.200,00	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.383.200,00	9.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005		Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	4.01.1.06.0.00.01.0005	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.750.000.000,00	4.966.520.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	101.568.328.205,43	92.080.155.503,00	5.723.483.267,56	2.860.608.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.163.898.357,00	4.950.511.061,00	28.462.500,00	23.274.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	5.163.898.357,00	4.950.511.061,00	28.462.500,00	23.274.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.877.071.786,00	3.719.575.146,00	28.462.500,00	23.274.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.312.472.276,00	3.233.194.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.239.999.276,00	3.162.289.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72.473.000,00	70.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	191.486.015,00	183.284.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.227.200,00	4.752.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.823.615,00	31.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.473.200,00	11.875.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.962.000,00	135.417.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	28.462.500,00	23.274.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	28.462.500,00	23.274.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.593.495,00	226.632.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.831.495,00	56.506.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.762.000,00	170.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.520.000,00	76.464.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	23.958.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.750.000,00	43.370.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.770.000,00	9.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.531.000,00	1.479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.531.000,00	1.479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1.531.000,00	1.479.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	263.857.271,00	250.791.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	263.857.271,00	250.791.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	263.857.271,00	250.791.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	52.814.800,00	49.234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	52.814.800,00	49.234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	52.814.800,00	49.234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	968.623.500,00	929.430.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	903.798.500,00	878.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	903.798.500,00	878.132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	64.825.000,00	51.297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	3.31.3.30.2.07.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.825.000,00	51.297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.663.168.823,00	5.272.398.303,00	59.214.500,00	58.695.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.663.168.823,00	5.272.398.303,00	59.214.500,00	58.695.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.582.090.173,00	4.264.087.476,00	59.214.500,00	58.695.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.934.510.725,00	3.676.795.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.865.580.725,00	3.611.397.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.930.000,00	65.398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.854.619,00	157.480.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.697.600,00	9.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.744.609,00	43.413.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.362.410,00	100.320.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	59.214.500,00	58.695.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	19.189.500,00	18.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	40.025.000,00	39.815.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.175.000,00	303.398.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.719.000,00	86.662.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.456.000,00	216.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.549.829,00	126.412.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.115.000,00	19.032.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.274.000,00	84.758.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.674.829,00	8.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.486.000,00	13.971.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	358.528.000,00	293.988.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	18.950.000,00	13.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	18.950.000,00	13.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.578.000,00	38.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	39.578.000,00	38.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	242.044.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.000.000,00	242.044.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	76.401.451,00	73.937.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.813.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	47.813.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26.401.451,00	26.123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.401.451,00	26.123.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	150.000.000,00	147.448.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	147.448.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	147.448.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	14.324.000,00	13.809.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.324.000,00	13.809.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.324.000,00	13.809.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	130.484.000,00	128.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	130.484.000,00	128.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	130.484.000,00	128.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	351.341.199,00	350.685.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000,00	51.362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51.500.000,00	51.362.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.821.199,00	230.525.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.082.650,00	26.901.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	203.738.549,00	203.624.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.020.000,00	68.797.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69.020.000,00	68.797.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.180.751.406,00	3.923.952.491,00	76.440.700,00	70.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.180.751.406,00	3.923.952.491,00	76.440.700,00	70.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.573.315.370,00	3.387.416.223,00	76.440.700,00	70.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.652.276.514,00	2.542.533.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.596.051.514,00	2.486.641.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	56.225.000,00	55.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.492.256,00	188.161.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.361.480,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.984.576,00	47.749.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.981.800,00	16.698.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.164.400,00	121.363.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	76.440.700,00	70.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	76.440.700,00	70.244.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.607.500,00	537.116.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.091.500,00	69.546.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.516.000,00	467.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.939.100,00	119.604.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.783.100,00	97.681.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.050.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.106.000,00	14.932.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	457.118.110,00	415.835.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	160.748.710,00	146.282.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	66.427.000,00	59.320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	89.521.710,00	82.216.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	4.800.000,00	4.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	257.899.600,00	234.700.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	257.899.600,00	234.700.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	38.469.800,00	34.852.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	38.469.800,00	34.852.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	120.562.536,00	92.719.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	4.774.400,00	2.293.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4.774.400,00	2.293.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.788.136,00	90.425.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.704.075,00	18.727.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	67.539.021,00	62.933.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	9.255.040,00	2.308.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	8.290.000,00	6.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	29.755.390,00	27.980.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	29.755.390,00	27.980.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.02.0000	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	29.755.390,00	27.980.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	132.340.900,00	127.845.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	132.340.900,00	127.845.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	53.437.900,00	52.334.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.437.900,00	52.334.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	53.437.900,00	52.334.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	29.734.000,00	28.881.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.734.000,00	28.881.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.734.000,00	28.881.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	49.169.000,00	46.629.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	49.169.000,00	46.629.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	49.169.000,00	46.629.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	15.500.324.033,44	12.916.089.824,00	499.691.625,56	414.881.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	15.500.324.033,44	12.916.089.824,00	499.691.625,56	414.881.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.898.718.339,00	4.490.351.186,00	4.840.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.770.148.308,00	3.586.262.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.689.791.308,00	3.509.854.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	80.357.000,00	76.407.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.238.587,00	190.537.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.703.137,00	47.118.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.851.600,00	14.629.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.683.850,00	128.789.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	4.840.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	4.840.000,00	3.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.651.444,00	672.208.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.229.444,00	212.769.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.422.000,00	459.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.680.000,00	41.341.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.500.000,00	29.502.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000,00	11.839.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	121.729.240,00	120.174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	121.729.240,00	120.174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	121.729.240,00	120.174.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.064.998.306,44	855.456.587,00	129.971.485,56	117.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.009.553.966,44	824.764.387,00	116.358.985,56	104.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	24.237.100,00	10.238.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28.989.300,00	27.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	956.327.566,44	786.893.787,00	116.358.985,56	104.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	55.444.340,00	30.692.200,00	13.612.500,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	55.444.340,00	30.692.200,00	13.612.500,00	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.290.602.455,00	1.173.301.186,00	30.039.560,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.290.602.455,00	1.173.301.186,00	30.039.560,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.290.602.455,00	1.173.301.186,00	30.039.560,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	25.935.600,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	25.935.600,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	25.935.600,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	94.242.000,00	70.337.500,00	17.400.000,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.242.000,00	70.337.500,00	17.400.000,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	64.160.400,00	43.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30.081.600,00	26.852.500,00	17.400.000,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	7.991.730.893,00	6.192.561.565,00	317.440.580,00	274.858.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.991.730.893,00	6.192.561.565,00	317.440.580,00	274.858.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	7.961.273.743,00	6.166.475.305,00	317.440.580,00	274.858.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	30.457.150,00	26.086.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	12.327.200,00	10.847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	12.327.200,00	10.847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	12.327.200,00	10.847.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.983.460.516,00	4.659.534.571,00	327.040.000,00	304.544.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.983.460.516,00	4.659.534.571,00	327.040.000,00	304.544.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.825.173.316,00	3.601.654.166,00	327.040.000,00	304.544.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.880.048.333,00	2.724.120.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.830.128.333,00	2.675.607.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.920.000,00	48.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.570.819,00	166.575.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.836.021,00	8.447.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.030.826,00	50.709.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.648.000,00	21.868.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.055.972,00	85.549.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000,00	75.000,00	327.040.000,00	304.544.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	18.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000,00	75.000,00	308.593.000,00	304.544.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524.680.664,00	494.318.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.393.200,00	76.531.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.287.464,00	417.787.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.798.500,00	216.564.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.242.500,00	24.046.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.200.000,00	10.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.520.000,00	8.098.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.836.000,00	173.522.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.031.935.700,00	935.557.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	19.605.000,00	16.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19.605.000,00	16.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1.012.330.700,00	919.280.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1.012.330.700,00	919.280.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	126.351.500,00	122.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	126.351.500,00	122.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	126.351.500,00	122.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.285.663.279,00	7.102.588.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	8.285.663.279,00	7.102.588.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.666.919.884,00	4.366.801.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.183.450.208,00	2.070.228.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.141.550.208,00	2.028.549.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.900.000,00	41.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.255.040,00	211.145.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.138.980,00	3.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.072.444,00	44.954.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.228.616,00	15.807.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.815.000,00	146.785.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.161.963.636,00	2.022.120.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.311.636,00	145.105.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.951.652.000,00	1.877.015.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.251.000,00	63.305.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.215.000,00	22.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.800.000,00	13.652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.676.000,00	12.429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.560.000,00	14.548.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	80.065.000,00	68.400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	80.065.000,00	68.400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	80.065.000,00	68.400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	498.783.926,00	413.972.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	498.783.926,00	413.972.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	77.527.226,00	64.310.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	110.257.800,00	72.243.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	41.702.500,00	40.869.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	208.363.000,00	181.246.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	34.438.200,00	29.669.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	26.495.200,00	25.633.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.039.894.469,00	2.253.413.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.039.894.469,00	2.253.413.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.099.512.600,00	1.526.739.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	940.381.869,00	726.674.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.352.310.161,00	5.796.038.112,00	3.134.376.612,00	1.522.040.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.352.310.161,00	5.796.038.112,00	3.134.376.612,00	1.522.040.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	297.435.000,00	269.377.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	55.635.000,00	49.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	55.635.000,00	49.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	241.800.000,00	219.407.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	88.200.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	153.600.000,00	131.807.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.470.883.476,00	2.970.119.772,00	3.134.376.612,00	1.522.040.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.376.716.088,00	1.185.676.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	79.906.088,00	77.572.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	722.720.000,00	685.282.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	320.000.000,00	300.087.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	67.750.000,00	67.746.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	186.340.000,00	54.987.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	582.000.000,00	581.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	582.000.000,00	581.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.108.607.388,00	887.198.492,00	3.134.376.612,00	1.522.040.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000,00	12.414.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	899.762.000,00	788.411.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	159.795.388,00	74.622.742,00	3.134.376.612,00	1.522.040.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	403.560.000,00	315.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	403.560.000,00	315.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.583.991.685,00	2.556.541.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	105.200.000,00	79.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	40.200.000,00	22.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	65.000.000,00	57.462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.478.791.685,00	2.476.809.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.113.000.000,00	1.111.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.365.791.685,00	1.365.309.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24.284.958.793,00	23.771.801.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	24.284.958.793,00	23.771.801.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.818.816.107,00	5.414.525.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.005.272.771,00	3.707.759.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.904.961.771,00	3.607.981.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100.311.000,00	99.778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.061.686,00	266.947.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.784.100,00	13.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.188.340,00	79.187.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.225.246,00	19.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.864.000,00	154.834.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.336.175.600,00	1.243.298.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.095.600,00	77.638.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.251.080.000,00	1.165.660.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.306.050,00	196.519.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.443.750,00	83.835.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.080.000,00	50.901.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.782.300,00	61.782.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18.424.597.686,00	18.315.988.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	36.414.400,00	36.283.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	36.414.400,00	36.283.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	17.484.504.686,00	17.383.933.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	929.156.802,00	922.426.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	16.555.347.884,00	16.461.507.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	42.355.000,00	42.162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	42.355.000,00	42.162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	108.529.000,00	106.809.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	108.529.000,00	106.809.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	369.421.700,00	364.446.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	369.421.700,00	364.446.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.280.000,00	31.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.280.000,00	31.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	352.092.900,00	351.126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	352.092.900,00	351.126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	41.545.000,00	41.287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	41.545.000,00	41.287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	41.545.000,00	41.287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.717.932.262,00	5.695.266.984,00	1.322.527.634,00	230.442.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	6.717.932.262,00	5.695.266.984,00	1.322.527.634,00	230.442.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.289.425.742,00	4.142.376.341,00	75.410.000,00	56.713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.715.197.121,28	3.610.574.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.662.087.121,28	3.557.464.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53.110.000,00	53.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.527.602,00	222.699.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.771.275,00	6.081.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.908.049,00	48.326.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.572.390,00	23.357.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.275.888,00	144.933.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.150.000,00	7.040.000,00	75.410.000,00	56.713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	150.000,00	0,00	7.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	67.545.000,00	56.713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.391.018,72	236.495.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.424.018,72	40.758.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.967.000,00	195.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.160.000,00	65.566.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.360.000,00	39.312.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.880.000,00	16.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.920.000,00	9.900.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.174.067.840,00	399.354.851,00	446.573.486,00	116.274.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.174.067.840,00	399.354.851,00	446.573.486,00	116.274.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	260.877.000,00	208.170.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	7.402.000,00	3.876.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2.270.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	770.683.840,00	66.384.900,00	446.573.486,00	116.274.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	132.835.000,00	119.692.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.254.438.680,00	1.153.535.792,00	800.544.148,00	57.454.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.254.438.680,00	1.153.535.792,00	800.544.148,00	57.454.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	80.713.000,00	55.771.890,00	463.530.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	382.008.200,00	352.345.764,00	30.250.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	25.473.800,00	3.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	175.605.800,00	151.890.638,00	208.261.066,00	27.454.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	590.637.880,00	589.869.500,00	98.502.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.593.442.555,00	2.981.999.170,00	129.321.640,00	117.222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.593.442.555,00	2.981.999.170,00	129.321.640,00	117.222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.852.383.886,00	1.612.379.340,00	129.321.640,00	117.222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.365.250.718,00	1.241.068.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.323.092.718,00	1.202.664.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42.158.000,00	38.404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.041.042,00	150.859.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.775.900,00	1.775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.560.753,00	19.037.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.783.100,00	14.542.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.921.289,00	115.503.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.392.126,00	4.173.600,00	129.321.640,00	117.222.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.392.126,00	4.173.600,00	82.697.940,00	74.236.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	46.623.700,00	42.985.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.590.000,00	176.529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	4.359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243.990.000,00	172.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.110.000,00	39.748.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.800.000,00	29.231.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.800.000,00	8.396.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.510.000,00	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	89.830.200,00	85.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	89.830.200,00	85.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	89.830.200,00	85.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	99.158.000,00	49.908.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.158.000,00	49.908.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	99.158.000,00	49.908.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.273.270.469,00	1.092.701.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.273.270.469,00	1.092.701.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	94.750.242,00	77.600.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	1.073.536.227,00	1.015.100.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	104.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	278.800.000,00	141.969.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	278.800.000,00	141.969.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.0.00.0.00.10.0000	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	278.800.000,00	141.969.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.819.783.790,99	2.523.461.071,00	58.149.400,00	46.117.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.819.783.790,99	2.523.461.071,00	58.149.400,00	46.117.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.632.098.790,99	2.396.765.221,00	58.149.400,00	46.117.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.885.580.929,97	1.744.097.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.855.340.929,97	1.713.857.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.095.456,73	171.151.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.120,00	4.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.672.264,00	55.553.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.091.700,00	12.556.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.331.372,73	98.327.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	525.000,00	225.000,00	58.149.400,00	46.117.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	300.000,00	225.000,00	20.449.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.000,00	0,00	37.700.400,00	35.017.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	477.307.404,29	403.053.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.101.404,29	51.060.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.206.000,00	351.993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.590.000,00	78.237.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.500.000,00	35.617.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.940.000,00	42.619.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	11.620.000,00	10.456.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.240.000,00	3.671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.240.000,00	3.671.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	7.380.000,00	6.785.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	7.380.000,00	6.785.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	36.310.000,00	8.567.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	36.310.000,00	8.567.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	36.310.000,00	8.567.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	139.755.000,00	107.671.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	139.755.000,00	107.671.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	105.600.000,00	77.792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	8.990.000,00	4.716.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.03.0000	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	25.165.000,00	25.162.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.132.975.124,00	7.235.375.758,00	25.362.020,00	12.245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8.132.975.124,00	7.235.375.758,00	25.362.020,00	12.245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.938.326.496,00	4.491.368.920,00	12.395.000,00	12.245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.673.652.439,00	3.360.346.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.603.282.439,00	3.293.728.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.370.000,00	66.618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.739.017,00	161.888.897,00	4.455.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.674.900,00	4.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.451.517,00	40.364.092,00	4.455.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.587.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.025.600,00	103.364.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	7.940.000,00	7.825.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	7.940.000,00	7.825.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.103.040,00	920.836.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	321.317.040,00	244.425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	711.786.000,00	676.411.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.832.000,00	48.296.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.000.000,00	27.664.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.450.000,00	6.328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.740.000,00	13.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.642.000,00	744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	486.590.000,00	465.947.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	486.590.000,00	465.947.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	486.590.000,00	465.947.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.558.058.628,00	2.129.204.958,00	12.967.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.088.994.823,00	833.394.523,00	12.967.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.088.994.823,00	833.394.523,00	12.967.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.063.805,00	45.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	51.057.605,00	21.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	81.006.200,00	24.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	457.000.000,00	379.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	457.000.000,00	379.017.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	850.000.000,00	849.038.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	850.000.000,00	849.038.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	30.000.000,00	22.134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	30.000.000,00	22.134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000,00	148.854.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	148.854.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	3.26.2.19.0.00.02.0000	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	148.854.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	65.721.400,00	61.411.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	65.721.400,00	61.411.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	65.721.400,00	61.411.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	65.721.400,00	61.411.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	65.721.400,00	61.411.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	6.551.000,00	6.410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	6.551.000,00	6.410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	6.551.000,00	6.410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.551.000,00	6.410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.551.000,00	6.410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.062.569.500,00	1.685.416.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.062.569.500,00	1.685.416.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	354.775.000,00	198.933.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	354.775.000,00	198.933.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	354.775.000,00	198.933.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	440.000.000,00	439.997.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	440.000.000,00	439.997.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	440.000.000,00	439.997.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	253.020.000,00	247.241.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	253.020.000,00	247.241.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	253.020.000,00	247.241.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.014.774.500,00	799.243.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.014.774.500,00	799.243.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	610.342.000,00	400.986.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	304.432.500,00	298.507.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	100.000.000,00	99.750.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	116.076.100,00	106.184.250,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000		Dinas Arsip dan Perpustakaan	116.076.100,00	106.184.250,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	116.076.100,00	106.184.250,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.039.400,00	23.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.039.400,00	23.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.036.700,00	82.511.450,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	12.909.900,00	9.101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	78.126.800,00	73.410.050,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.506.400.205,00	3.263.869.639,00	62.446.636,00	60.449.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000		Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.506.400.205,00	3.263.869.639,00	62.446.636,00	60.449.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.467.316.505,00	3.230.189.789,00	62.446.636,00	60.449.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.890.375.592,00	2.703.427.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.851.415.592,00	2.666.867.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.960.000,00	36.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.692.669,00	116.901.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.180.200,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.265.059,00	16.185.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.540.010,00	10.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.707.400,00	87.876.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000,00	0,00	62.446.636,00	60.449.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450.000,00	0,00	62.446.636,00	60.449.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.778.244,00	342.959.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.996.244,00	106.622.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.782.000,00	236.337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.020.000,00	66.900.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.000.000,00	42.165.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.520.000,00	16.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.500.000,00	8.490.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	39.083.700,00	33.679.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	24.272.400,00	18.877.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	10.357.000,00	8.310.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	13.915.400,00	10.567.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	14.811.300,00	14.802.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	2.24.2.23.0.00.02.0000	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	14.811.300,00	14.802.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	23.437.768.771,61	20.532.163.324,00	789.802.806,00	89.844.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	580.838.728,00	282.978.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	580.838.728,00	282.978.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	58.236.860,00	55.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.236.860,00	55.798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	10.275.000,00	9.586.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	47.961.860,00	46.211.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	393.046.500,00	109.222.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	293.721.600,00	12.297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	293.721.600,00	12.297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	99.324.900,00	96.924.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.324.900,00	96.924.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.179.000,00	3.732.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	4.179.000,00	3.732.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	4.179.000,00	3.732.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125.376.368,00	114.226.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	125.376.368,00	114.226.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.653.568,00	65.494.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.02.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.722.800,00	48.732.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	792.273.265,00	623.181.350,00	664.698.578,00	39.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	792.273.265,00	623.181.350,00	664.698.578,00	39.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	453.250.585,00	377.143.350,00	625.698.578,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	453.250.585,00	377.143.350,00	625.698.578,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	453.250.585,00	377.143.350,00	625.698.578,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	268.133.000,00	181.347.000,00	39.000.000,00	38.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	268.133.000,00	181.347.000,00	39.000.000,00	38.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	268.133.000,00	181.347.000,00	39.000.000,00	38.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	70.889.680,00	64.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	70.889.680,00	64.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	3.26.2.19.0.00.02.0000	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	70.889.680,00	64.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	21.278.725.596,61	18.954.588.842,00	125.104.228,00	50.004.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	21.278.725.596,61	18.954.588.842,00	125.104.228,00	50.004.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.134.948.236,61	14.681.651.665,00	5.503.098,00	2.797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.360.796.342,61	13.066.717.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.273.366.342,61	12.983.667.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	87.430.000,00	83.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.838.894,00	243.200.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.589.694,00	52.462.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.744.600,00	8.863.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.504.600,00	181.873.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.633.000,00	1.266.135.657,00	2.807.598,00	2.797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.540.000,00	138.596.657,00	2.807.598,00	2.797.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.225.093.000,00	1.127.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.680.000,00	105.598.591,00	2.695.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.000.000,00	69.306.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.900.000,00	33.850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.780.000,00	2.442.000,00	2.695.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.614.102.231,00	1.370.445.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	975.577.234,00	764.047.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	158.216.724,00	146.822.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	249.393.835,00	198.778.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	567.966.675,00	418.445.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	420.967.197,00	396.731.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	420.967.197,00	396.731.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	217.557.800,00	209.667.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	217.557.800,00	209.667.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.140.328.854,00	1.004.510.254,00	111.460.720,00	39.081.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.197.930.254,00	213.149.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	277.815.005,00	103.505.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	920.115.249,00	109.643.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	942.398.600,00	791.360.647,00	111.460.720,00	39.081.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	684.508.800,00	545.919.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	102.600,00	0,00	111.460.720,00	39.081.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	257.787.200,00	245.441.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	392.948.703,00	310.901.261,00	8.140.410,00	8.125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	47.550.775,00	32.958.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.550.775,00	32.958.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	253.371.318,00	194.778.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	253.371.318,00	194.778.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	92.026.610,00	83.163.550,00	8.140.410,00	8.125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	92.026.610,00	83.163.550,00	8.140.410,00	8.125.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	86.444.200,00	73.971.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	86.444.200,00	73.971.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	86.444.200,00	73.971.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.909.953.372,00	1.513.108.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.909.953.372,00	1.513.108.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	3.27.2.09.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.909.953.372,00	1.513.108.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	204.836.682,00	146.606.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	204.836.682,00	146.606.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	8.009.800,00	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8.009.800,00	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8.009.800,00	7.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	49.953.972,00	27.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	46.572.972,00	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	46.572.972,00	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.381.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.381.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	71.675.850,00	41.531.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	71.675.850,00	41.531.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	71.675.850,00	41.531.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75.197.060,00	70.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	75.197.060,00	70.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	75.197.060,00	70.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	581.094.500,00	524.808.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000		Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	581.094.500,00	524.808.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	581.094.500,00	524.808.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	581.094.500,00	524.808.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	113.625.000,00	97.483.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	222.802.200,00	189.957.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	3.31.3.30.2.07.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	244.667.300,00	237.366.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	97.079.329.828,00	85.086.155.422,00	4.931.879.195,00	4.403.687.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	46.992.875.556,00	38.291.626.051,00	3.538.650.727,00	3.135.012.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		Bagian Hukum	313.599.682,00	222.310.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	229.769.582,00	186.310.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.299.582,00	134.850.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.318.573,00	13.199.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.785.409,00	6.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.195.600,00	114.992.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.680.000,00	27.016.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.280.000,00	6.756.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.400.000,00	20.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.540.000,00	10.193.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.250.000,00	8.313.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.290.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	83.830.100,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	83.830.100,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	11.830.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	72.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		Bagian Organisasi	340.572.659,00	230.619.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	340.572.659,00	230.619.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.140.000,00	15.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.140.000,00	15.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.962.659,00	95.131.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.217.059,00	11.284.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.074.000,00	6.749.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.671.600,00	77.097.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.160.000,00	42.279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.360.000,00	37.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.875.000,00	17.016.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.615.000,00	12.970.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	4.045.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	153.435.000,00	60.302.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	56.150.000,00	22.497.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.320.000,00	20.495.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	36.365.000,00	10.199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	30.600.000,00	7.110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		Bagian Administrasi Pembangunan	279.573.922,00	263.110.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	179.687.922,00	166.221.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.150.000,00	19.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.150.000,00	19.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.392.922,00	103.166.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.722.122,00	20.576.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.141.800,00	5.141.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.529.000,00	77.447.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.160.000,00	26.993.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	5.613.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.560.000,00	21.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.985.000,00	16.536.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.615.000,00	13.482.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.370.000,00	3.053.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	99.886.000,00	96.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	99.886.000,00	96.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	99.886.000,00	96.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		Bagian Perekonomian	231.838.109,00	163.479.802,00	40.918.900,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	161.377.509,00	136.968.302,00	40.918.900,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.500.000,00	19.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.500.000,00	19.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.367.509,00	65.097.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.111.709,00	12.731.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.686.000,00	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.569.800,00	49.156.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000,00	0,00	40.918.900,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000,00	0,00	40.918.900,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.300.000,00	37.843.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.003.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.500.000,00	33.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.910.000,00	14.336.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.250.000,00	8.646.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.660.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	70.460.600,00	26.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	70.460.600,00	26.511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	24.290.600,00	16.139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	42.670.000,00	10.372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	948.190.351,00	883.285.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	948.190.351,00	883.285.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.050.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.050.000,00	28.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.575.951,00	340.107.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.895.951,00	19.834.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	344.680.000,00	320.272.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.350.000,00	11.373.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.350.000,00	11.373.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.510.000,00	48.698.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.500.000,00	34.099.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.010.000,00	14.599.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	479.704.400,00	454.185.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	388.930.000,00	380.307.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	60.569.400,00	43.768.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	30.205.000,00	30.109.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	328.013.297,00	234.667.825,00	83.672.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	267.959.297,00	211.397.915,00	44.844.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.180.000,00	22.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.009.297,00	105.766.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.599.897,00	22.975.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.546.000,00	5.499.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.863.400,00	77.291.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	44.844.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	44.844.000,00	18.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.590.000,00	67.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.590.000,00	67.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.180.000,00	15.961.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.750.000,00	9.486.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.430.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	60.054.000,00	23.269.910,00	38.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60.054.000,00	23.269.910,00	38.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	47.774.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0010	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12.280.000,00	7.544.910,00	38.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012		Bagian Sumber Daya Alam	191.692.451,00	169.038.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	168.619.999,00	157.952.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.520.000,00	50.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.270.000,00	35.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.250.000,00	14.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.089.999,00	65.358.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.999.199,00	10.870.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.974.000,00	1.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.116.800,00	52.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.560.000,00	26.137.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.437.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.760.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.450.000,00	16.091.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.000.000,00	12.751.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	23.072.452,00	11.085.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	23.072.452,00	11.085.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	7.279.984,00	2.823.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	7.279.984,00	3.558.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0012	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	8.512.484,00	4.703.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001		Bagian Umum	14.057.875.678,00	11.371.698.088,00	3.300.648.027,00	2.985.393.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.057.875.678,00	11.371.698.088,00	3.300.648.027,00	2.985.393.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.290.000,00	40.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	50.290.000,00	40.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.593.129.032,00	4.201.527.261,00	9.157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.644.055,00	108.877.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	289.239.327,00	272.965.140,00	9.157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	433.270.650,00	344.482.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.719.975.000,00	3.475.202.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.980.000,00	2.623.831.307,00	2.448.681.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	1.754.355.000,00	1.619.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	660.693.298,00	630.810.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	162.833.009,00	152.716.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	45.950.000,00	45.454.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.406.165.928,00	3.689.514.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.354.600.928,00	1.178.819.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.158.550.000,00	857.714.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.893.015.000,00	1.652.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.004.101.504,00	1.417.370.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	932.169.504,00	494.738.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.160.000,00	214.310.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	802.772.000,00	708.321.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.808.540.350,00	1.882.790.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	445.271.000,00	161.841.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000,00	4.614.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.313.269.350,00	1.716.333.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	175.648.864,00	120.304.895,00	667.659.220,00	536.711.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	103.107.780,00	72.066.065,00	280.738.260,00	234.682.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	51.633.959,00	31.347.960,00	266.303.670,00	211.622.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0001	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	20.907.125,00	16.890.870,00	120.617.290,00	90.406.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003		Bagian Tata Pemerintahan	532.118.219,00	407.286.879,00	15.687.500,00	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	347.728.219,00	326.299.224,00	15.687.500,00	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.140.000,00	18.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.853.219,00	218.234.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.296.419,00	10.294.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.453.600,00	36.453.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.103.200,00	171.486.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	15.687.500,00	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	15.687.500,00	15.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.025.000,00	79.886.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	7.936.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.425.000,00	71.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.710.000,00	10.037.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.250.000,00	8.582.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.455.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	184.390.000,00	80.987.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	154.390.000,00	50.987.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	83.515.000,00	30.372.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	51.950.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	18.925.000,00	18.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0003	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005		Bagian Kesejahteraan Rakyat	15.132.414.508,00	10.136.793.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	464.559.746,00	387.422.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.650.000,00	46.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	46.650.000,00	46.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.759.746,00	116.132.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.694.272,00	1.669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.699.474,00	23.438.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.774.000,00	7.842.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.592.000,00	83.182.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.880.000,00	178.161.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000,00	8.221.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.280.000,00	169.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.270.000,00	46.958.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.250.000,00	42.304.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.020.000,00	4.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.667.854.762,00	9.749.370.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.667.854.762,00	9.749.370.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11.116.522.260,00	7.786.324.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	3.517.852.702,00	1.940.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0005	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	33.479.800,00	22.793.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011		Bagian Perencanaan dan Keuangan	14.636.986.680,00	14.209.335.854,00	97.724.300,00	85.359.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.636.986.680,00	14.209.335.854,00	97.724.300,00	85.359.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.459.170.535,00	12.317.528.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.418.680.535,00	12.277.038.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.112.015,00	160.895.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	814.880,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.434.335,00	27.504.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.986.000,00	9.983.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.876.800,00	122.677.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	97.724.300,00	85.359.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	6.655.000,00	6.160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	91.069.300,00	79.198.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.069.264.396,00	987.256.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	5.264.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.062.064.396,00	981.991.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.430.000,00	20.140.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	14.839.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.930.000,00	5.301.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	875.009.734,00	723.514.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	4.01.1.06.0.00.01.0011	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	875.009.734,00	723.514.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	50.086.454.272,00	46.794.529.371,00	1.393.228.468,00	1.268.674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	50.086.454.272,00	46.794.529.371,00	1.393.228.468,00	1.268.674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.935.268.372,00	25.720.174.923,00	1.393.228.468,00	1.268.674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.618.064.692,00	2.486.043.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.532.829.692,00	2.403.253.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	85.235.000,00	82.790.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	602.971.980,00	488.945.963,00	136.252.378,00	131.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.002.510,00	14.789.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.200.670,00	168.294.127,00	136.252.378,00	131.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.999.800,00	42.459.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	357.769.000,00	263.403.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000,00	0,00	1.233.983.590,00	1.137.493.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	820.000.000,00	764.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	145.263.720,00	143.822.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.000,00	0,00	268.719.870,00	228.771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.415.637.640,00	1.214.988.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.670.640,00	262.940.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.097.967.000,00	952.047.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.297.500,00	328.336.759,00	22.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.200.000,00	31.895.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.750.000,00	195.706.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.370.000,00	50.452.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.977.500,00	50.282.550,00	22.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.933.051.260,00	20.704.714.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.451.551.260,00	20.232.661.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	481.500.000,00	472.052.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	827.645.300,00	497.145.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	560.377.700,00	257.394.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	267.267.600,00	239.751.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	23.151.185.900,00	21.074.354.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.761.234.000,00	1.306.770.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.711.234.000,00	1.306.770.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.139.037.000,00	616.350.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	1.139.037.000,00	616.350.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	992.496.500,00	943.355.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	992.496.500,00	943.355.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.740.680.100,00	3.208.450.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.703.209.000,00	2.276.981.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000,00	283.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	743.471.100,00	647.968.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.020.776.800,00	2.513.699.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.842.806.800,00	1.757.853.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.177.970.000,00	755.845.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	12.496.961.500,00	12.485.728.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.496.961.500,00	12.485.728.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	30.675.677.904,20	27.304.708.110,00	821.945.757,00	696.241.595,00	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00
5.01			PERENCANAAN	4.669.389.789,00	4.324.662.772,00	94.798.399,00	80.364.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.669.389.789,00	4.324.662.772,00	94.798.399,00	80.364.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.367.412.789,00	4.093.506.072,00	94.798.399,00	80.364.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.407.659.004,00	3.244.807.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.354.109.004,00	3.193.527.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53.550.000,00	51.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.583.685,00	432.728.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.551.513,00	7.628.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.540.572,00	76.318.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.025.000,00	20.249.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.466.600,00	328.531.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.270.500,00	7.770.000,00	94.798.399,00	80.364.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.270.500,00	0,00	94.798.399,00	80.364.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.319.600,00	343.418.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.965.600,00	26.521.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.354.000,00	316.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.580.000,00	64.780.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.730.000,00	47.250.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.850.000,00	17.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	31.605.000,00	21.597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	31.605.000,00	21.597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	31.605.000,00	21.597.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	270.372.000,00	209.558.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	187.557.000,00	131.057.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	187.557.000,00	131.057.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	82.815.000,00	78.501.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.815.000,00	78.501.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02			KEUANGAN	19.491.449.886,20	17.253.141.645,00	625.384.558,00	580.116.596,00	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Pendapatan Daerah	10.620.124.418,04	9.816.824.104,00	402.300.050,00	383.443.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.801.338.988,04	6.436.681.398,00	173.800.050,00	159.501.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.716.478.359,04	5.458.444.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.650.628.359,04	5.392.594.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	65.850.000,00	65.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.349.201,00	285.051.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.324.720,00	8.818.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.536.081,00	80.388.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.488.400,00	195.844.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000,00	0,00	173.800.050,00	159.501.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	375.000,00	0,00	32.144.650,00	29.781.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.000,00	0,00	141.655.400,00	129.719.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.974.428,00	533.967.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.804.652,00	105.410.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.169.776,00	428.556.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.937.000,00	159.218.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.095.000,00	132.395.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.842.000,00	26.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.818.785.430,00	3.380.142.706,00	228.500.000,00	223.942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.818.785.430,00	3.380.142.706,00	228.500.000,00	223.942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20.372.100,00	9.064.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	142.720.160,00	127.967.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	514.488.145,00	450.940.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.857.200.000,00	1.704.945.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	86.764.400,00	65.000.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	173.432.200,00	160.253.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	142.107.000,00	104.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	588.426.925,00	508.586.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	117.009.500,00	86.716.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	176.265.000,00	162.265.800,00	228.500.000,00	223.942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000		Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.871.325.468,16	7.436.317.541,00	223.084.508,00	196.672.800,00	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.335.730.368,16	4.771.314.850,00	223.084.508,00	196.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.526.276.039,16	3.344.944.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.387.462.439,16	3.232.964.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	138.813.600,00	111.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.089.486.525,00	841.648.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.509.275,00	3.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.213.050,00	218.366.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.596.200,00	27.417.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	820.168.000,00	592.686.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	750.000,00	750.000,00	223.084.508,00	196.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750.000,00	750.000,00	223.084.508,00	196.672.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.949.804,00	386.743.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.903.088,00	13.937.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389.046.716,00	372.805.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.268.000,00	197.228.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.960.000,00	140.101.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.300.000,00	51.319.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.008.000,00	5.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.635.860.000,00	1.995.912.593,00	0,00	0,00	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.315.731.800,00	1.227.866.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.315.731.800,00	1.227.866.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	438.430.200,00	387.899.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	81.366.400,00	68.403.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	357.063.800,00	319.496.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	328.660.000,00	249.776.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	63.606.000,00	51.590.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	166.488.000,00	140.777.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	64.316.000,00	57.408.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	34.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.197.982.264,00	9.647.487.656,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	553.038.000,00	130.369.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	176.833.000,00	130.369.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	376.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	899.735.100,00	669.090.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	899.735.100,00	669.090.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	39.864.000,00	21.096.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.755.000,00	12.300.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	256.015.000,00	222.365.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	153.821.100,00	96.924.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.10.0000	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	434.280.000,00	316.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	5.601.302.029,00	4.944.220.982,00	101.762.800,00	35.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.601.302.029,00	4.944.220.982,00	101.762.800,00	35.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.257.217.529,00	3.924.783.717,00	101.762.800,00	35.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.800.136.677,00	3.531.244.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.748.186.677,00	3.480.654.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.950.000,00	50.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.550.852,00	201.128.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.845,00	3.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.108.107,00	81.053.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.903.900,00	23.004.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.548.000,00	93.331.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	18.870.000,00	101.762.800,00	35.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	101.762.800,00	35.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	18.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.395.000,00	131.547.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.695.000,00	12.577.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.700.000,00	118.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.135.000,00	41.993.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.365.000,00	35.168.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.860.000,00	6.431.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.910.000,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.344.084.500,00	1.019.437.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	198.570.000,00	94.319.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	163.688.800,00	84.694.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	22.077.200,00	6.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12.804.000,00	3.468.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	522.372.400,00	385.414.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	19.615.300,00	6.089.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	92.805.500,00	51.980.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	409.951.600,00	327.344.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	603.797.300,00	527.192.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	354.500.000,00	347.410.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	235.011.100,00	175.127.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	14.286.200,00	4.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	19.344.800,00	12.510.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.647.000,00	4.606.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	5.04.5.03.5.05.01.0000	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	8.697.800,00	7.904.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	913.536.200,00	782.682.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	913.536.200,00	782.682.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	913.536.200,00	782.682.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	832.020.900,00	726.062.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	95.037.800,00	74.838.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	736.983.100,00	651.223.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	81.515.300,00	56.620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	81.515.300,00	56.620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.112.749.849,00	9.347.422.431,00	326.986.174,00	271.803.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	11.112.749.849,00	9.347.422.431,00	326.986.174,00	271.803.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000		Inspektorat Daerah	11.112.749.849,00	9.347.422.431,00	326.986.174,00	271.803.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.266.677.949,00	8.206.483.202,00	326.986.174,00	271.803.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.448.886.189,00	7.102.853.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.342.936.189,00	7.028.119.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	105.950.000,00	74.733.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	490.731.000,00	113.721.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	490.731.000,00	113.721.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466.575.480,00	298.108.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.752.015,00	21.638.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.599.465,00	110.948.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	307.224.000,00	165.521.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900.000,00	900.000,00	326.986.174,00	271.803.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	150.000,00	150.000,00	19.562.400,00	18.700.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	750.000,00	750.000,00	307.423.774,00	253.103.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.015.280,00	473.600.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.579.280,00	210.434.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.436.000,00	263.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.570.000,00	217.299.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.500.000,00	41.639.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.350.000,00	21.949.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	153.720.000,00	153.710.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.603.834.900,00	1.050.862.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.312.154.700,00	808.927.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	498.370.000,00	306.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	346.415.000,00	281.508.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	7.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	41.688.600,00	41.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	267.910.000,00	120.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	31.582.000,00	9.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	118.488.100,00	48.901.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	291.680.200,00	241.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	23.525.000,00	9.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	268.155.200,00	232.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	242.237.000,00	90.076.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	18.070.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	18.070.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	224.167.000,00	89.361.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	73.356.000,00	15.883.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	25.145.000,00	13.005.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70.810.000,00	41.544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.02.0000	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	54.856.000,00	18.928.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	30.274.652.333,08	27.350.811.886,12	190.073.600,00	138.051.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01			KECAMATAN	30.274.652.333,08	27.350.811.886,12	190.073.600,00	138.051.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Baso	1.784.150.862,00	1.683.170.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.737.946.862,00	1.640.802.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.343.660.796,00	1.260.256.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.314.070.796,00	1.230.666.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.281.817,00	135.058.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.784.660,00	3.763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.054.663,00	11.051.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.648.300,00	9.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.794.194,00	110.603.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.073.609,00	216.852.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.475.609,00	26.484.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.598.000,00	190.367.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.930.640,00	8.654.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.200.640,00	7.959.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.529.000,00	30.862.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.529.000,00	30.862.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.529.000,00	30.862.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.500.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000,00	3.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.250.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.250.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.250.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.925.000,00	6.818.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.925.000,00	6.818.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.050.000,00	1.049.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.875.000,00	5.769.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Ampek Angkek	2.196.410.955,00	2.005.004.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.150.761.455,00	1.971.134.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.833.273.654,00	1.689.894.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.803.283.654,00	1.659.904.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.990.000,00	29.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.748.801,00	124.201.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.121.350,00	2.999.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.003.659,00	18.067.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.720.000,00	13.635.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.903.792,00	89.498.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.711.200,00	137.295.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.001.200,00	13.545.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.710.000,00	123.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.027.800,00	19.742.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.675.000,00	14.337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.960.000,00	1.076.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.392.800,00	4.328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	28.530.000,00	18.794.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.530.000,00	18.794.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.530.000,00	18.794.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.224.500,00	8.228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.224.500,00	8.228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.224.500,00	8.228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.445.000,00	6.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.445.000,00	6.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.650.000,00	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.795.000,00	4.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Candung	1.807.656.309,00	1.732.443.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.781.016.309,00	1.708.437.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.463.649.816,00	1.403.117.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.433.259.816,00	1.372.727.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.390.000,00	30.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.590.993,00	131.836.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.187.600,00	3.071.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.898.673,00	13.889.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.470.520,00	7.470.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.034.200,00	107.405.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.389.000,00	136.627.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.110.000,00	10.101.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.279.000,00	126.525.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.386.500,00	36.856.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.365.000,00	22.835.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.181.500,00	11.181.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.680.000,00	17.187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.680.000,00	17.187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.680.000,00	17.187.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.700.000,00	1.603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.700.000,00	1.603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.700.000,00	1.603.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.700.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.700.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.700.000,00	1.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.560.000,00	3.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.560.000,00	3.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	525.000,00	511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.035.000,00	3.030.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Tilatang Kamang	2.030.205.289,00	1.877.837.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.992.535.664,00	1.846.974.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.545.548.414,00	1.471.677.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.518.398.414,00	1.444.527.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.150.000,00	27.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.245.250,00	157.571.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.674.270,00	1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.602.840,00	15.571.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.124.800,00	10.290.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.843.340,00	130.124.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.892.000,00	180.357.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.216.000,00	21.021.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.676.000,00	159.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.850.000,00	37.368.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.500.000,00	22.227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000,00	3.891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.320.000,00	11.249.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.959.625,00	22.846.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.959.625,00	22.846.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	27.959.625,00	22.846.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	977.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.500.000,00	977.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.500.000,00	977.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.210.000,00	7.038.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.210.000,00	7.038.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.950.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.260.000,00	5.148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Kamang Magek	1.698.973.301,00	1.620.338.708,00	16.500.000,00	16.479.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.645.913.301,00	1.568.321.208,00	16.500.000,00	16.479.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.330.688.370,00	1.288.057.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.300.198.370,00	1.258.967.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.490.000,00	29.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.747.591,00	134.441.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.408.130,00	5.397.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.792.591,00	22.422.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.292.870,00	3.866.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.754.000,00	101.255.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	9.990.000,00	16.500.000,00	16.479.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	16.500.000,00	16.479.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.032.340,00	117.829.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.782.340,00	26.039.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.250.000,00	88.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.445.000,00	18.002.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.565.000,00	16.182.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	32.175.000,00	31.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.175.000,00	31.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	32.175.000,00	31.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.350.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.350.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.350.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.500.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.500.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.500.000,00	4.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.035.000,00	8.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.035.000,00	8.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.535.000,00	4.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Palupuh	1.943.742.649,08	1.636.856.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.935.261.761,50	1.631.875.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.390.695.614,00	1.195.463.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.361.505.614,00	1.166.493.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.190.000,00	28.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.265.800,50	228.014.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.994.880,00	4.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.774.120,50	34.580.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.271.000,00	13.218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.225.800,00	175.471.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.941.547,00	177.660.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.239.547,00	15.482.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.702.000,00	162.178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.358.800,00	30.737.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.088.800,00	26.402.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.270.000,00	4.334.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.080.887,58	4.981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.080.887,58	4.981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.080.887,58	4.981.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Banuhampu	1.955.231.637,00	1.582.698.868,00	69.839.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.852.952.637,00	1.555.277.093,00	69.839.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.430.993.742,00	1.191.318.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.399.253.742,00	1.159.578.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.180.895,00	183.078.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.362.870,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.339.151,00	25.653.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.861.674,00	5.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.617.200,00	150.580.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	69.839.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	69.839.000,00	66.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.859.200,00	117.976.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.582.000,00	14.104.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.277.200,00	103.871.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.918.800,00	62.903.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.600.000,00	37.994.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.317.000,00	4.908.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.001.800,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.165.000,00	13.140.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.165.000,00	13.140.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	77.165.000,00	13.140.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.484.000,00	7.759.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.484.000,00	7.759.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.484.000,00	7.759.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.950.000,00	6.521.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.950.000,00	6.521.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.480.000,00	2.107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.470.000,00	4.413.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Sungai Pua	1.809.671.088,00	1.624.342.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.773.036.088,00	1.601.467.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.406.836.461,00	1.301.461.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.376.446.461,00	1.272.271.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.390.000,00	29.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.157.895,00	127.581.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.680.234,00	16.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.136.926,00	6.639.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.940.735,00	97.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.328.332,00	156.869.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.728.332,00	25.416.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.600.000,00	131.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.713.400,00	15.556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.683.400,00	12.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.185.000,00	12.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.185.000,00	12.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16.185.000,00	12.141.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.525.000,00	3.545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.525.000,00	3.545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.525.000,00	3.545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.800.000,00	7.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.800.000,00	7.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.475.000,00	1.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.325.000,00	5.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan IV Koto	1.597.732.836,00	1.458.516.440,00	35.276.000,00	33.338.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.558.517.836,00	1.421.115.940,00	35.276.000,00	33.338.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.247.157.626,00	1.135.259.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.221.017.626,00	1.109.639.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.140.000,00	25.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.614.210,00	137.738.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.640.675,00	6.924.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.668.535,00	20.465.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.858.000,00	5.402.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.447.000,00	104.946.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225.000,00	150.000,00	35.276.000,00	33.338.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.000,00	150.000,00	35.276.000,00	33.338.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.206.000,00	136.163.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.624.000,00	17.288.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.582.000,00	118.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.315.000,00	11.804.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.165.000,00	9.654.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.000.000,00	32.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.000.000,00	32.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.000.000,00	32.203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.215.000,00	5.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.215.000,00	5.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.215.000,00	5.197.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Matur	1.803.319.968,00	1.610.490.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.782.229.968,00	1.589.762.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.489.889.489,46	1.315.877.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.460.699.489,46	1.287.892.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.190.000,00	27.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.382.158,54	108.814.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.079.630,00	3.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.894.529,00	17.610.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.462.528,00	6.314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.945.471,54	81.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.324.000,00	140.727.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.172.000,00	18.065.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.152.000,00	122.662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.634.320,00	24.342.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.050.000,00	11.185.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.874.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.710.320,00	11.557.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.770.000,00	12.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.770.000,00	12.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.770.000,00	12.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.320.000,00	8.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.320.000,00	8.138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.120.000,00	3.946.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.200.000,00	4.192.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Palembayan	1.762.448.292,00	1.599.089.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.734.841.492,00	1.574.664.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.398.385.275,00	1.255.452.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.368.795.275,00	1.225.862.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.706.225,00	141.963.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.976.710,00	2.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.176.315,00	13.353.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.803.200,00	120.932.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.609.992,00	156.806.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.679.992,00	13.676.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144.930.000,00	143.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.140.000,00	20.442.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	13.362.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.140.000,00	7.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.850.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.850.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.850.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.575.000,00	15.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.575.000,00	15.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.575.000,00	15.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.181.800,00	7.966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.181.800,00	7.966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.750.000,00	1.534.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.431.800,00	6.431.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000		Kecamatan Tanjung Raya	2.182.863.879,00	1.904.508.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.053.288.879,00	1.842.580.876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.597.185.649,00	1.456.050.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.566.445.649,00	1.425.310.495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.638.494,00	145.314.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.375.150,00	4.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.978.638,00	22.947.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.512.300,00	8.414.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.772.406,00	109.715.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.254.736,00	200.358.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.313.736,00	30.272.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.941.000,00	170.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.210.000,00	40.857.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.500.000,00	22.114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.420.000,00	10.391.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.290.000,00	8.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122.750.000,00	55.639.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	122.750.000,00	55.639.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	122.750.000,00	55.639.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	875.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	875.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	875.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	875.000,00	716.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	875.000,00	716.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	875.000,00	716.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.075.000,00	4.879.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.075.000,00	4.879.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.225.000,00	1.051.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.12.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.850.000,00	3.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000		Kecamatan Lubuk Basung	1.958.614.827,00	1.717.324.610,00	20.303.250,00	16.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.943.126.827,00	1.707.716.710,00	20.303.250,00	16.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.484.890.119,00	1.281.908.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.454.100.119,00	1.251.118.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.167.508,00	125.372.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.178.800,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.691.068,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.598.240,00	8.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.199.400,00	91.398.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.150.000,00	20.115.000,00	20.303.250,00	16.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000,00	150.000,00	20.303.250,00	16.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.842.000,00	245.747.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.168.000,00	20.683.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.674.000,00	225.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.077.200,00	34.572.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.077.200,00	17.882.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.360.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.918.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.918.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.918.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.750.000,00	2.473.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.750.000,00	2.473.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.750.000,00	2.473.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.120.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.120.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.400.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.720.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000		Kecamatan Ampek Nagari	1.932.305.721,00	1.727.444.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.903.355.721,00	1.698.819.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.454.606.902,00	1.303.106.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.454.606.902,00	1.303.106.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.051.379,00	197.947.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.656.000,00	7.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.539.779,00	15.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.930.000,00	8.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.925.600,00	166.087.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.607.440,00	160.188.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.791.440,00	20.798.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.816.000,00	139.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.090.000,00	27.587.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.750.000,00	13.312.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.280.000,00	7.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.200.000,00	13.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.200.000,00	13.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.200.000,00	13.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.500.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.500.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.500.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.500.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.500.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.750.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.750.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.14.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000		Kecamatan Tanjung Mutiara	2.154.078.432,00	1.999.334.281,00	13.478.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.121.334.432,00	1.985.539.281,00	13.478.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.636.685.214,00	1.589.946.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.607.095.214,00	1.560.356.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.421.498,00	122.887.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.272.610,00	1.916.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.745.888,00	22.458.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.960.000,00	12.049.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.443.000,00	86.462.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.030.000,00	22.542.000,00	13.478.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000,00	0,00	13.478.500,00	5.272.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.880.000,00	2.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.791.720,00	223.452.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.539.232,00	34.570.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.252.488,00	188.882.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.406.000,00	26.710.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.750.000,00	11.867.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.640.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.016.000,00	12.493.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.515.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.515.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12.515.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.200.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.200.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.200.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.994.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.994.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.994.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.035.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.035.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.500.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.15.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000		Kecamatan Malalak	1.657.246.288,00	1.571.411.848,00	34.676.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.575.706.663,00	1.504.465.748,00	34.676.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.205.801.512,00	1.155.865.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.175.011.512,00	1.125.075.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.790.000,00	30.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.258.151,00	190.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.396.600,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.275.871,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.775.880,00	13.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.809.800,00	155.792.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	675.000,00	0,00	34.676.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	675.000,00	0,00	34.676.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.262.000,00	134.730.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.212.000,00	7.560.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.050.000,00	127.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.710.000,00	22.972.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.450.000,00	20.672.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.260.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.439.625,00	17.506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.439.625,00	17.506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.439.625,00	17.506.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.250.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.250.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.250.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.400.000,00	33.234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.400.000,00	33.234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36.400.000,00	33.234.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.450.000,00	11.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.450.000,00	11.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.16.0000	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15.450.000,00	11.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.769.072.019,72	5.093.369.103,00	36.297.250,00	33.486.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.769.072.019,72	5.093.369.103,00	36.297.250,00	33.486.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.769.072.019,72	5.093.369.103,00	36.297.250,00	33.486.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.519.151.343,72	2.400.021.243,00	36.297.250,00	33.486.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.147.781.893,56	2.060.320.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.104.831.893,56	2.017.370.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42.950.000,00	42.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.447.373,16	109.731.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.583.640,00	3.583.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.853.933,16	12.951.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lamp II

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.292.400,00	8.230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.717.400,00	84.965.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.000,00	75.000,00	36.297.250,00	33.486.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000,00	75.000,00	36.297.250,00	33.486.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.292.077,00	200.237.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.188.077,00	34.931.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.104.000,00	165.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.555.000,00	29.656.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.805.000,00	24.986.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000,00	4.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.208.449.304,00	1.034.650.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.208.449.304,00	1.034.650.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16.364.504,00	12.734.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.192.084.800,00	1.021.915.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	913.992.812,00	913.114.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	913.992.812,00	913.114.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	913.992.812,00	913.114.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.984.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.984.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.984.000,00	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	45.529.560,00	21.501.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45.529.560,00	21.501.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	45.529.560,00	21.501.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.078.965.000,00	722.571.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.078.965.000,00	722.571.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	520.002.000,00	442.704.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	558.963.000,00	279.867.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jumlah	1.296.434.311.161,82	1.237.459.769.264,09	70.145.591.385,46	56.310.843.328,00	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Lampiran II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN AGAM
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. AGAM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PERIODE 1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	V.5.2.1	39.578.636.185,73	48.620.328.848,02
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	V.5.2.2	39.578.636.185,73	48.620.328.848,02
3	**Sub Total**		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	V.5.2.3	115.487.873.110,54	39.442.141.655,73
5	**Sub Total**		**115.487.873.110,54**	**39.442.141.655,73**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Ini	V.5.2.4	24.000,00	136.494.530,00
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
8	Lain-lain		-	-
9	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	V.5.2.5	**115.487.897.110,54**	**39.578.636.185,73**

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL

Lampiran III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN AGAM
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 19 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. AGAM
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6	7
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	**PENDAPATAN**	V.5.4.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	V.5.4.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.5.4.1.a.1)	88.006.060.942,56	52.109.302.632,44	35.896.758.310,12	68,89
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.5.4.1.a.2)	99.346.097.527,04	99.027.652.525,35	318.445.001,69	0,32
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.4.1.a.3)	15.488.312.387,45	13.948.262.975,27	1.540.049.412,18	11,04
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.5.4.1.a.4)	6.745.838.578,63	10.089.557.244,70	(3.343.718.666,07)	(33,14)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		209.586.309.435,68	175.174.775.377,76	34.411.534.057,92	19,64
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	V.5.4.1.b				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	V.5.4.1.b.1)				
10	Dana Bagi Hasil Pajak		14.595.966.000,00	10.532.767.000,00	4.063.199.000,00	38,58
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.917.833.000,00	10.330.258.000,00	(8.412.425.000,00)	(81,43)
12	DBH Lainnya		3.307.702.000,00	-	3.307.702.000,00	100,00
13	Dana Alokasi Umum		893.639.603.961,00	860.911.170.294,00	32.728.433.667,00	3,80
14	Dana Alokasi Khusus		282.905.595.096,00	295.394.632.563,00	(12.489.037.467,00)	(4,23)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.196.366.700.057,00	1.177.168.827.857,00	19.197.872.200,00	1,63
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	V.5.4.1.b.2)				
17	Dana Insentif Daerah		-	7.527.067.000,00	(7.527.067.000,00)	(100,00)
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		-	7.527.067.000,00	(7.527.067.000,00)	(100,00)
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	V.5.4.1.b.3)				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		60.064.036.730,00	80.402.335.320,00	(20.338.298.590,00)	(25,30)
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		5.899.970.000,00	-	5.899.970.000,00	100,00
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		-	-	-	-
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		65.964.006.730,00	80.402.335.320,00	(14.438.328.590,00)	(17,96)
25	Jumlah Pendapatan Transfer		1.262.330.706.787,00	1.265.098.230.177,00	(2.767.523.390,00)	(0,22)
26	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	V.5.4.1.c				
27	Pendapatan Hibah		21.981.189.877,96	27.128.813.281,47	(5.147.623.403,51)	(18,97)
28	Pendapatan Dana Darurat		4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	100,00
29	Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		25.981.189.877,96	27.128.813.281,47	(1.147.623.403,51)	(4,23)
31	**JUMLAH PENDAPATAN**		**1.497.898.206.100,64**	**1.467.401.818.836,23**	**30.496.387.264,41**	**2,08**
32	**BEBAN**	V.5.4.2				
	BEBAN OPERASI					
33	Beban Pegawai	V.5.4.2.a	870.940.592.460,88	776.863.872.661,91	94.076.719.798,97	12,11
34	Beban Persediaan	V.5.4.2.b	125.127.874.004,32	126.374.040.785,48	(1.246.166.781,16)	(0,99)
35	Beban Jasa	V.5.4.2.c	177.546.959.895,63	235.780.273.651,19	(58.233.313.755,56)	(24,70)
36	Beban Pemeliharaan	V.5.4.2.d	12.374.666.112,00	6.610.660.951,00	5.764.005.161,00	87,19
37	Beban Perjalanan Dinas	V.5.4.2.e	40.987.761.000,00	51.848.808.801,00	(10.861.047.801,00)	(20,95)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6	7
38	Beban Hibah	V.5.4.2.f	17.601.218.438,00	66.843.582.628,00	(49.242.364.190,00)	(73,67)
39	Beban Bantuan Sosial	V.5.4.2.g	3.421.750.000,00	5.615.000.000,00	(2.193.250.000,00)	(39,06)
40	Beban Penyusutan dan Amortisasi	V.5.4.2.h	129.885.492.711,69	134.778.675.089,96	(4.893.182.378,27)	(3,63)
41	Beban Penyisihan Piutang	V.5.4.2.i	2.999.808.942,01	3.889.438.333,45	(889.629.391,44)	(22,87)
42	Beban Transfer	V.5.4.2.j	95.712.430.323,00	92.564.903.579,00	3.147.526.744,00	3,40
43	Beban Lain-lain		-	-	-	-
44	**JUMLAH BEBAN**		**1.476.598.553.887,53**	**1.501.169.256.480,99**	**(24.570.702.593,46)**	**(1,64)**
45	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**		**21.299.652.213,11**	**(33.767.437.644,76)**	**55.067.089.857,87**	**(163,08)**
46	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**					
47	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	V.5.4.3	515.732.645,70	45.834.676,76	469.897.968,94	1.025,20
48	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	76.516.416	(76.516.416,00)	(100,00)
49	Defisit Penjualan Aset Non lancar		-	16.830.905,40	(16.830.905,40)	(100,00)
50	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		9.315.503.865,85	872.881.857,94	8.442.622.007,91	967,21
51						
52	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**		(8.799.771.220,15)	(767.361.670,58)	(8.032.409.549,57)	1.046,76
53	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**		12.499.880.992,96	(34.534.799.315,34)	47.034.680.308,30	(136,20)
	POS LUAR BIASA					
54	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
55	Beban Luar Biasa	V.5.4.4	6.426.717.278,85	3.157.818.416,00	3.268.898.862,85	103,52
56	**JUMLAH POS LUAR BIASA**		(6.426.717.278,85)	(3.157.818.416,00)	(3.268.898.862,85)	103,52
57	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	V.5.4.5	6.073.163.714,11	(37.692.617.731,34)	43.765.781.445,45	(116,11)

BUPATI AGAM,

BENNY WARLIS

Lampiran III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN AGAM
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 19 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. AGAM
LAPORAN OPERASIONAL (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6	7
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	**PENDAPATAN**	V.5.4.1				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	V.5.4.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.5.4.1.a.1)	88.006.060.942,56	52.109.302.632,44	35.896.758.310,12	68,89
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.5.4.1.a.2)	99.346.097.527,04	99.027.652.525,35	318.445.001,69	0,32
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.4.1.a.3)	15.488.312.387,45	13.948.262.975,27	1.540.049.412,18	11,04
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.5.4.1.a.4)	6.745.838.578,63	10.089.557.244,70	(3.343.718.666,07)	(33,14)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		209.586.309.435,68	175.174.775.377,76	34.411.534.057,92	19,64
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	V.5.4.1.b				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	V.5.4.1.b.1)				
10	Dana Bagi Hasil Pajak		14.595.966.000,00	10.532.767.000,00	4.063.199.000,00	38,58
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.917.833.000,00	10.330.258.000,00	(8.412.425.000,00)	(81,43)
12	DBH Lainnya		3.307.702.000,00	-	3.307.702.000,00	100,00
13	Dana Alokasi Umum		893.639.603.961,00	860.911.170.294,00	32.728.433.667,00	3,80
14	Dana Alokasi Khusus		282.905.595.096,00	295.394.632.563,00	(12.489.037.467,00)	(4,23)
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.196.366.700.057,00	1.177.168.827.857,00	19.197.872.200,00	1,63
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	V.5.4.1.b.2)				
17	Dana Insentif Daerah		-	7.527.067.000,00	(7.527.067.000,00)	(100,00)
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
19	Dana Penyesuaian		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		-	7.527.067.000,00	(7.527.067.000,00)	(100,00)
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	V.5.4.1.b.3)				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		60.064.036.730,00	80.402.335.320,00	(20.338.298.590,00)	(25,30)
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		5.899.970.000,00	-	5.899.970.000,00	100,00
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		-	-	-	-
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		65.964.006.730,00	80.402.335.320,00	(14.438.328.590,00)	(17,96)
25	Jumlah Pendapatan Transfer		1.262.330.706.787,00	1.265.098.230.177,00	(2.767.523.390,00)	(0,22)
26	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	V.5.4.1.c				
27	Pendapatan Hibah		21.981.189.877,96	27.128.813.281,47	(5.147.623.403,51)	(18,97)
28	Pendapatan Dana Darurat		4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	100,00
29	Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		25.981.189.877,96	27.128.813.281,47	(1.147.623.403,51)	(4,23)
31	**JUMLAH PENDAPATAN**		**1.497.898.206.100,64**	**1.467.401.818.836,23**	**30.496.387.264,41**	**2,08**
32	**BEBAN**	V.5.4.2				
	BEBAN OPERASI					
33	Beban Pegawai	V.5.4.2.a	870.940.592.460,88	776.863.872.661,91	94.076.719.798,97	12,11
34	Beban Persediaan	V.5.4.2.b	125.127.874.004,32	126.374.040.785,48	(1.246.166.781,16)	(0,99)
35	Beban Jasa	V.5.4.2.c	177.546.959.895,63	235.780.273.651,19	(58.233.313.755,56)	(24,70)
36	Beban Pemeliharaan	V.5.4.2.d	12.374.666.112,00	6.610.660.951,00	5.764.005.161,00	87,19
37	Beban Perjalanan Dinas	V.5.4.2.e	40.987.761.000,00	51.848.808.801,00	(10.861.047.801,00)	(20,95)

LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN AGAM

Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAH KAB. AGAM
KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal	V.5.6.1.	2.110.922.733.390,70	2.158.147.032.593,10
2	Surplus/defisit LO	V.5.6.2.	6.073.163.714,11	(37.692.617.731,34)
3	**Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (yang mengkoreksi langsung nilai ekuitas:**	**V.5.6.3.**	**3.371.981.428,14**	**(9.531.681.471,06)**
	a Mutasi aset (masuk)		6.684.918.154,00	12.523.435.865,51
	b Mutasi aset (keluar)		(6.684.918.154,00)	(12.523.435.865,51)
	c Koreksi Persediaan		1.748.497.309,89	470.529.659,06
	d Koreksi Piutang		6.893.958.108,14	3.530.956.023,00
	e Koreksi Penyisihan Piutang		130.560.988,05	113.299.093,75
	f Koreksi Aset Tetap		7.248.486.405,01	(0,40)
	g Koreksi Penyusutan Aset Tetap		(3.399.762.335,77)	(2.496.977.834,81)
	h Koreksi Aset Lain-lain		(90.000.000,00)	-
	i Koreksi Penyusutan Aset Lain-lain		90.000.000,00	(1.707.016,47)
	j Koreksi Utang		(10.552.544.280,74)	(13.003.850.828,02)
	k Koreksi Pendapatan		-	12.376.666,68
	l Koreksi Beban		79.616,96	654.278,48
	m Koreksi Ekuitas Lainnya		1.302.705.616,60	1.843.038.487,67
4	**EKUITAS AKHIR**	**V.5.6.4.**	**2.120.367.878.532,95**	**2.110.922.733.390,70**

BUPATI AGAM,

H. ERI NUWARLIS

LAMPIRAN V

NERACA

Lampiran V : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN AGAM
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. AGAM
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
ASET	**V.5.3.1**		
ASET LANCAR	V.5.3.1.a		
Kas dan Setara Kas	V.5.3.1.a.1)	**115.498.814.297,54**	**39.580.138.735,73**
Kas	V.5.3.1.a.1).a)	**115.498.814.297,54**	**39.580.138.735,73**
Kas di Kas Daerah	V.5.3.1.a.1).a).(1)	86.094.569.571,69	3.372.232.042,59
Kas di Bendahara Penerimaan	V.5.3.1.a.1).a).(2)	-	91.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.5.3.1.a.1).a).(3)	26.159.960,71	78.059.123,00
Kas di BLUD	V.5.3.1.a.1).a).(4)	25.953.143.252,53	33.286.848.002,53
Kas Lainnya	V.5.3.1.a.1).a).(5)	-	700.000,00
Kas Dana BOSP	V.5.3.1.a.1).a).(6)	329.265.124,61	466.489.210,61
Kas Dana BOK Puskesmas	V.5.3.1.a.1).a).(7)	3.095.676.388,00	2.375.719.357,00
Setara Kas		-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang	V.5.3.1.a.2)	**65.141.850.208,38**	**60.503.036.719,20**
Piutang Pajak	V.5.3.1.a.2).a)	45.236.530.113,19	39.676.891.767,19
Piutang Retribusi	V.5.3.1.a.2).b)	17.791.130.104,00	17.022.163.356,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	V.5.3.1.a.2).c)	983.807.401,05	1.233.868.734,91
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	V.5.3.1.a.2).d).(1)	6.554.663.000,00	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.3.1.a.2).d).(2)	22.253.597.234,00	27.071.506.726,00
Uang Muka	V.5.3.1.a.2).e)	355.115.335,00	682.230.860,00
Penyisihan Piutang	V.5.3.1.a.2).f)	(28.032.992.978,86)	(25.183.624.724,90)
Beban Dibayar Dimuka	V.5.3.1.a.3)	**427.707.995,04**	**405.137.349,68**
Beban Barang Dibayar Dimuka		-	-
Beban Jasa Dibayar Dimuka	V.5.3.1.a.3)	427.707.995,04	405.137.349,68
Bagian Lancar Pinjaman		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Persediaan	V.5.3.1.a.4)	98.067.093.623,94	**88.458.714.456,90**
Jumlah Aset Lancar		***279.135.466.124,90***	***188.947.027.261,51***
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.5.3.1.b.		
Investasi Nonpermanen	V.5.3.1.b.1)		
Pinjaman Jangka Panjang		-	-
Investasi Dalam Surat Utang Negara		-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	V.5.3.1.b.1)	4.925.506.331,00	4.925.506.331,00
Dana Bergulir Tak Tertagih	V.5.3.1.b.1)	(4.223.058.998,00)	(4.224.305.907,00)
Jumlah Investasi Nonpermanen		***702.447.333,00***	***701.200.424,00***
Investasi Permanen	V.5.3.1.b.2)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.5.3.1.b.2)	104.741.157.939,23	100.758.535.541,18
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		***104.741.157.939,23***	***100.758.535.541,18***
Jumlah Investasi Jangka Panjang		***105.443.605.272,23***	***101.459.735.965,18***
ASET TETAP	V.5.3.1.c.		
Tanah	V.5.3.1.c.1)	318.246.531.814,91	317.496.019.164,91
Peralatan dan Mesin	V.5.3.1.c.2)	468.099.741.710,15	436.250.802.336,74
Gedung dan Bangunan	V.5.3.1.c.3)	1.091.013.691.748,07	1.085.761.614.251,40
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	V.5.3.1.c.4)	2.505.187.189.246,65	2.484.919.419.058,65
Aset Tetap Lainnya	V.5.3.1.c.5)	67.719.513.461,93	60.676.950.106,93
Konstruksi dalam Pengerjaan	V.5.3.1.c.6)	6.614.034.885,01	10.293.528.375,50
Akumulasi Penyusutan	V.5.3.1.c.7)	(2.695.477.579.788,60)	(2.566.906.891.473,43)
Nilai Buku Aset Tetap		***1.761.403.123.078,12***	***1.828.491.441.820,70***
DANA CADANGAN	V.5.3.1.d.	-	-
ASET LAINNYA	V.5.3.1.e.		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	V.5.3.1.e.1)	6.500.837.500,00	6.500.837.500,00
Aset Tak Berwujud	V.5.3.1.e.2)	12.396.963.737,82	11.150.179.067,82
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	V.5.3.1.e.2)	(7.855.927.493,89)	(6.734.521.866,46)
Aset Lain-lain	V.5.3.1.e.3)	107.305.977.986,15	124.681.739.581,42
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	V.5.3.1.e.3)	(60.767.087.753,50)	(68.496.401.819,67)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	V.5.3.1.e.4)	-	132.384.000,00
Jumlah Aset Lainnya		***57.580.763.976,58***	***67.234.216.463,11***
JUMLAH ASET		**2.203.562.958.451,83**	**2.186.132.421.510,50**

URAIAN	REF.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN	**V.5.3.2**		
Kewajiban Jangka Pendek	V.5.3.2.a.		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	V.5.3.2.a.1)	10.917.187,00	802.550,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.5.3.2.a.2)	403.182.744,58	303.229.311,03
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	V.5.3.2.a.3)	-	-
Utang Belanja	V.5.3.2.a.4)	71.766.482.987,30	74.682.384.053,77
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.5.3.2.a.5)	11.014.497.000,00	223.272.205,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		*83.195.079.918,88*	*75.209.688.119,80*
Kewajiban Jangka Panjang	V.5.3.2.b.		
Hutang Dalam Negeri Pemerintah Pusat		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah Kewajiban		*83.195.079.918,88*	*75.209.688.119,80*
EKUITAS			
EKUITAS	V.5.3.3		
Ekuitas	V.5.3.3	**2.120.367.878.532,95**	**2.110.922.733.390,70**
Ekuitas		2.120.367.878.532,95	2.110.922.733.390,70
JUMLAH EKUITAS		**2.120.367.878.532,95**	**2.110.922.733.390,70**
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		**2.203.562.958.451,83**	**2.186.132.421.510,50**

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS

Lampiran VI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN AGAM
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 10 Agustus 2026

PEMERINTAHAN KAB. AGAM

LAPORAN ARUS KAS (KONSOLIDASI)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(Dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**V.5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas**	**V.5.5.1.a**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	V.5.5.1.1)	82.630.684.214,00	46.865.864.045,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.5.1.1)	99.084.402.933,00	93.939.107.790,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.5.1.1)	13.807.124.697,00	13.723.582.467,00
6	Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.5.5.1.1)	6.723.734.982,78	10.129.413.984,71
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	V.5.5.1.2)	17.991.229.000,00	12.317.757.000,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.5.5.1.2)	1.962.656.000,00	10.837.882.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.5.5.1.2)	893.639.603.961,00	860.911.170.294,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	V.5.5.1.2)	282.905.595.096,00	295.394.632.563,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	V.5.5.1.2)	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian (DID dan Dana Desa)	V.5.5.1.2)	98.028.894.550,00	101.679.525.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Pemerintah Provinsi)	V.5.5.1.3)	64.881.946.222,00	80.074.349.068,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	V.5.5.1.3)	5.899.970.000,00	-
16	Penerimaan Hibah	V.5.5.1.4)	4.000,00	738.000.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat	V.5.5.1.4)	4.000.000.000,00	-
18	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	-
19	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**1.571.555.845.655,78**	**1.526.611.284.211,71**
20	**Arus Keluar Kas**	**V.5.5.1.b**		
21	Pembayaran Pegawai		866.021.568.444,12	750.224.137.285,00
22	Pembayaran Barang		350.426.013.362,00	388.176.440.957,00
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		17.590.437.458,00	66.843.582.628,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		3.421.750.000,00	5.615.000.000,00
27	Pembayaran Tak Terduga		6.522.478.271,85	3.157.818.416,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		9.169.969.784,00	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		477.517.872,00	-
30	Pembayaran Bantuan Keuangan		185.246.154.361,00	181.824.106.600,00
31	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**1.438.875.889.552,97**	**1.395.841.085.886,00**
32	***Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi***		**132.679.956.102,81**	**130.770.198.325,71**
33	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**V.5.5.2**		
34	**Arus Masuk Kas**	**V.5.5.2.a**		
35	Pencairan Dana Cadangan		-	-
36	Penjualan atas Tanah		-	-
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	3.024.000,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
40	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
41	Penjualan atas Aset Lainnya		-	56.565.593,00
42	Penjualan Aset Lain-Lain		540.124.150,00	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
44	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**540.124.150,00**	**59.589.593,00**
45	**Arus Keluar Kas**	**V.5.5.2.b**		
46	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
47	Perolehan Tanah		-	-
48	Perolehan Peralatan dan Mesin		27.846.028.860,00	29.175.409.504,00
49	Perolehan Bangunan dan Gedung		7.072.853.014,00	24.250.418.079,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		15.512.561.406,00	79.222.627.499,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.657.400.048,00	5.488.641.329,00
52	Perolehan Aset Lainnya		222.000.000,00	870.878.700,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
55	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**57.310.843.328,00**	**140.007.975.111,00**
56	***Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi***		**(56.770.719.178,00)**	**(139.948.385.518,00)**

NO.	URAIAN	REF.	2025 (AUDITED)	2024 (AUDITED)
57	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	V.5.5.3		
58	**Arus Masuk Kas**			
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
68	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
69	**Arus Keluar Kas**			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
79	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	-
80	***Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan***		-	-
81	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	V.5.5.4		
82	**Arus Masuk Kas**	V.5.5.4.a		
83	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		30.102.352.388,00	31.118.153.229,00
84	Kas Lainnya yang berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan yang harus disetorkan kembali		-	700.000,00
85	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**30.102.352.388,00**	**31.118.853.229,00**
86	**Arus Kas Keluar**	V.5.5.4.b		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		30.092.237.751,00	31.117.350.679,00
88	Penyetoran Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran serta Kas Lainnya pada Bendahara BOS ke Rekening Kas Daerah		-	-
89	Pengeluaran penerimaan yang bukan merupakan pendapatan daerah yang berada pada Kas Daerah		700.000,00	6.175.500,00
90	**Jumlah Arus Kas Keluar**		**30.092.937.751,00**	**31.123.526.179,00**
91	***Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris***		**9.414.637,00**	**(4.672.950,00)**
92	**Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode ini**	V.5.5.5	**75.918.651.561,81**	**(9.182.860.142,29)**
93	**Saldo Awal Kas**	V.5.5.6	**39.580.138.735,73**	**48.626.504.348,02**
94	Saldo Awal Kas di Kas Daerah		3.372.232.042,59	80.495.125,88
95	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		91.000,00	1.196.000,00
96	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		78.059.123,00	9.330.035,00
97	Saldo Awal Kas di BLUD		33.286.848.002,53	42.595.590.863,53
98	Saldo Awal Kas pada Bendahara BOSP		466.489.210,61	636.714.921,61
99	Saldo Awal Kas Lainnya		700.000,00	6.175.500,00
100	Saldo Awal Kas BOK Pada Puskesmas		2.375.719.357,00	5.297.001.902,00
101	**Koreksi Saldo Awal**	V.5.5.7	**24.000,00**	**136.494.530,00**
102	Koreksi saldo awal pada Bendahara BOSP dan BLUD		24.000,00	136.494.530,00
103	**Saldo Akhir Kas**	V.5.5.8	**115.498.814.297,54**	**39.580.138.735,73**
104	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		86.094.569.571,69	3.372.232.042,59
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	91.000,00
106	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		26.159.960,71	78.059.123,00
107	Saldo Akhir Kas di BLUD		25.953.143.252,53	33.286.848.002,53
108	Saldo Akhir Kas pada Bendahara BOSP		329.265.124,61	466.489.210,61
109	Saldo Akhir Kas Dana BOK pada Puskesmas		3.095.676.388,00	2.375.719.357,00
110	Saldo Akhir Kas Lainnya		-	700.000,00

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAHAN KAB. AGAM

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan valid baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, entitas pelaporan dalam hal ini Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) harus menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD tersebut harus *direview* oleh Inspektorat sebelum diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah dilaksanakan penyusunan LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Agam ini disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam selama Tahun Anggaran 2025 meliputi informasi mengenai pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025, disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Agam;
b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Agam;
c. menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Agam mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Agam untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah
h. Kabupaten Agam dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pengelolaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 22);
22. Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 50);
24. Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 9);
26. Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Agam Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 27).

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam termasuk BLUD. Laporan keuangan ini terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran *(Budgeting Reports)*, Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

I. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari:
   1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
      LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah yang berdasarkan pada:
      a. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah) serta Belanja Modal yang didasarkan pada LRA SKPD; dan
      b. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial) serta Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) yang didasarkan pada LRA SKPKD.
   2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
      Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

II. Laporan Finansial, yang terdiri dari
   1. Neraca
      Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penyajian Neraca berdasarkan entitasnya adalah sebagai berikut:
      a. Neraca SKPD, mencakup informasi tentang Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas.
      b. Neraca BLUD, menyajikan informasi tentang Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.
      c. Neraca SKPKD menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi, Kewajiban dan Ekuitas.

      Neraca Pemerintah Daerah dihasilkan dari konsolidasi Neraca seluruh SKPD (termasuk BLUD) dan SKPKD.
   2. Laporan Operasional (LO)
      Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus.defisit kegiatan operasional, dan kegiatan non operasional yang tergambar dari surplus/defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

      Penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Agam dilakukan dengan cara mengkompilasi LO seluruh entitas akuntansi termasuk BLUD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan SKPKD.

3. Laporan Arus Kas (LAK)
   Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2025. Laporan Arus Kas mencakup data penerimaan dan pengeluaran melalui Kas Umum Daerah, termasuk data pengesahan BUD atas transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas serta penerimaan dan penggunaan dana yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke entitas akuntansi/pihak lain sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Penyusunan LPE dilakukan dengan cara mengkompilasi LPE seluruh SKPD termasuk BLUD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan SKPKD.

III. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi serta penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.3.2 Kebijakan Konversi

Dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025, masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan
6.1 Pembentukan Kabupaten Agam
6.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam
6.3 Letak Geografis
6.4 Pemerintah
6.5 Kebijakan Pemerintahan Kabupten Agam dalam rangka Pemenuhan Mandatory Spending
6.6 Bencana Hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Agam pada tahun 2025, Dampak Bencana dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam
6.7 Informasi Lainnya

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan di tingkat nasional, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi seperti mengendalikan inflasi dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini berdampak langsung pada kondisi ekonomi daerah, seperti daya beli masyarakat, iklim investasi dan tersedianya lapangan kerja di wilayah tersebut.

Penilaian atas keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pemerintahan melalui pelaksanaan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah, dapat diukur dari pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan melalui RKPD dan KUA-PPAS beserta perubahannya. Indikator yang digunakan antara lain adalah indikator makro ekonomi, yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator ini dinilai menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan gambaran capaian kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Data capaian Indikator Makro yang merujuk pada dokumen "*Kabupaten Agam Dalam Angka 2026*" dan "*Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026*" yang telah dirilis oleh BPS Kabupaten Agam dan BPS Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Februari 2026, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 2.1.1
Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten Agam
Tahun: 2021-2025

INDIKATOR EKONOMI	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	3,7	4,21	4,52	4,12	2,99
INDEKS GINI GINI RATIO)	0,272	0,298	0,255	0,249	0,232
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	6,85	6,22	6,6	6,83	5,97
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	5,06	4,93	4,96	4,73	4,71
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	72,57	73,29	74,44	75,08	76,04

Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, pendapatan per kapita, konsumsi, investasi, dan variabel ekonomi makro lainnya. Penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan dari sisi sektoral (PDRB menurut

Lapangan Usaha), pendekatan dari sisi penggunaan (PDRB menurut Pengeluaran) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan).

Pertumbuhan ekonomi daerah memperlihatkan proses peningkatan kegiatan ekonomi di suatu wilayah, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Sementara untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi dilakukan berdasarkan perubahan PDRB tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berikut adalah PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2021 s.d tahun 2025 dengan tahun dasar 2010, menurut lapangan usaha yang menopang struktur perekonomian Kabupaten Agam:

Tabel 2.1.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010)
Menurut Lapangan Usaha
Tahun: 2021-2025

(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.496	4.596	4.738	4.823	4.935
Pertambangan dan Penggalian	519	535	555	580	587
Industri Pengolahan	1.641	1.729	1.843	1.907	1.998
Pengadaan Listrik dan Gas	4	4	4	4	4
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8	8	8	9	9
Konstruksi	1.105	1.149	1.218	1.256	1.240
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.902	3.057	3.189	3.350	3.466
Transportasi dan Pergudangan	982	1.021	1.079	1.161	1.179
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94	110	119	125	128
Informasi dan Komunikasi	1.146	1.233	1.320	1.400	1.466
Jasa Keuangan dan Asuransi	188	195	200	212	230
Real Estate	276	292	311	328	348
Jasa Perusahaan	6	6	6	6	7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	559	554	566	616	629
Jasa Pendidikan	721	764	779	803	834
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	188	198	209	221	236
Jasa lainnya	109	121	131	146	157
Produk Domestik Regional Bruto	**14.943**	**15.572**	**16.276**	**16.947**	**17.453**

Catatan :
**) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026

Pada tahun 2025, terjadi peningkatan nilai PDRB sebesar 506 miliar rupiah, jika dibandingkan tahun 2024. Peningkatan nilai PDRB tidak diikuti oleh peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE tahun 2025 sebesar 2,99% mengalami penurunan sebesar 1,13% jika dibandingkan dengan LPE tahun 2024. Penurunan LPE tersebut menggambarkan adanya perlambatan dalam aktivitas ekonomi daerah yang dapat menyebabkan penurunan investasi, kesempatan kerja yang lebih sedikit dan melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi

ini juga bisa mengindikasikan adanya tantangan dalam perekonomian daerah yang perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat.

Adapun Laju Pertumbuhan pada masing-masing sektor lapangan usaha dari tahun 2021 s.d tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010)
Menurut Lapangan Usaha
Tahun: 2021-2025

(%)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,35	2,21	3,10	1,79	2,33
Pertambangan dan Penggalian	2,97	3,06	3,73	4,51	1,17
Industri Pengolahan	2,81	5,39	6,60	3,43	4,78
Pengadaan Listrik dan Gas	3,03	4,02	5,40	5,26	3,43
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,93	2,71	2,41	8,49	(1,64)
Konstruksi	1,52	3,98	6,02	3,09	(1,26)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,42	5,36	4,31	5,05	3,46
Transportasi dan Pergudangan	4,33	3,95	5,74	7,60	1,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,20	16,86	8,26	4,82	2,64
Informasi dan Komunikasi	5,87	7,67	7,01	6,09	4,67
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,93	3,90	2,73	5,87	8,63
Real Estate	2,50	5,90	6,50	5,33	6,07
Jasa Perusahaan	1,30	6,45	6,71	3,73	6,49
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,55	(0,92)	2,10	8,90	2,02
Jasa Pendidikan	2,08	5,97	1,95	3,08	3,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,92	5,30	5,41	5,81	6,73
Jasa lainnya	4,84	10,73	8,14	11,06	8,12
Produk Domestik Regional Bruto	**3,70**	**4,21**	**4,52**	**4,12**	**2,99**

Catatan :
**) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,63% yang diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,12% dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,73%.

Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha Konstruksi sebesar (1,26%), lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar (1,64%) dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesarv 1,17%.

PDRB menurut pendekatan penggunaan atau pengeluaran merupakan jumlah keseluruhan komponen pengeluaran oleh pelaku ekonomi. Komponen-komponen pengeluaran tersebut adalah: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT), Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori dan Net Ekspor Barang dan Jasa. Berikut adalah perhitungan dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2010) menurut Jenis Pengeluaran selama tahun 2021 s.d tahun 2025:

Tabel 2.1.4
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010)
Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun: 2021-2025

(Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	7.471,26	7.763,05	8.015,96	8.338,54	8.468,09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	169,29	168,40	176,75	190,70	201,85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	994,67	972,98	993,90	1.012,43	990,89
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.130,50	4.339,42	4.730,73	4.871,50	4.669,66
Perubahan Inventori	9,62	23,26	(18,62)	(80,19)	(75,34)
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.167,22	2.305,10	2.377,26	2.613,60	3.197,87
Produk Domestik Regional Bruto	**14.942,56**	**15.572,21**	**16.275,98**	**16.946,60**	**17.453,03**

Catatan :
**) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026.

Tabel 2.1.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2010)
Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun: 2021-2025

(%)

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	1,74	3,91	3,26	4,02	1,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,79	(0,53)	4,96	7,89	5,70
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,85	(2,18)	2,15	1,86	(1,80)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,86	5,06	9,02	2,98	(4,15)
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	16,68	6,36	3,13	9,94	22,15
Produk Domestik Regional Bruto	**3,70**	**4,21**	**4,52**	**4,12**	**2,99**

Catatan :
**) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026.

Untuk tahun 2025, LPE Kabupaten Agam menempati urutan keenam belas setelah Kabupaten Sijunjung jika disandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Sumatera Barat dan berada dibawah rata-rata Provinsi dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mencapai 3,37 %. Penyandingan LPE Kabupaten, Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, disajikan sebagai berikut:

Grafik II.1
Penyandingan LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

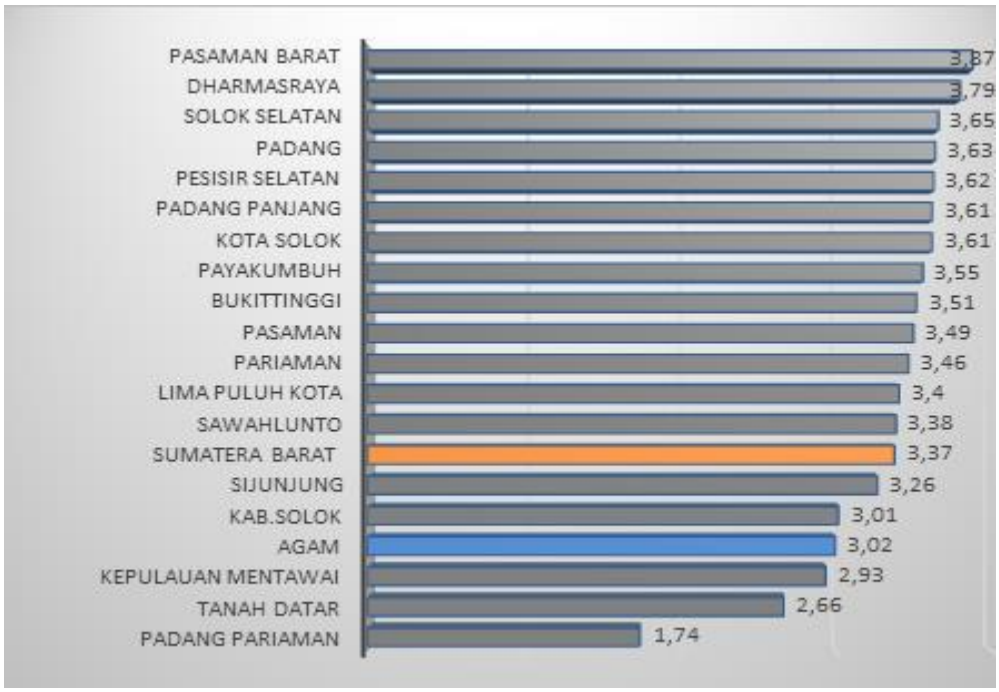

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2026), 2026

Selanjutnya untuk penyandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 s.d 2025, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.2
PenyandinganLPE Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2021 - 2025

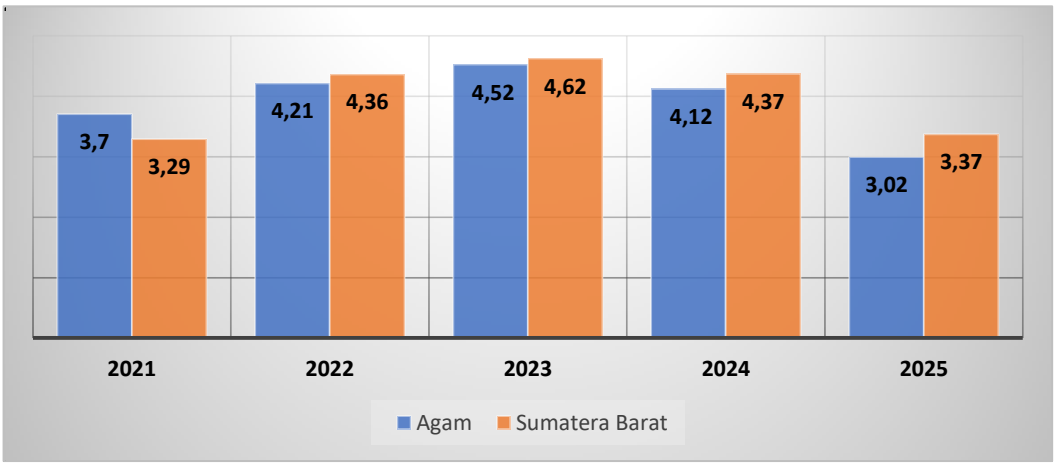

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat dalam Angka 2026), 2026

Selanjutnya untuk melihat perkembangan struktur perekonomian Kabupaten Agam, dapat digunakan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selama tahun 2025, PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Tahun: 2021 - 2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.331	6.867	7.403	7.942	8.571
Pertambangan dan Penggalian	779	838	950	1.000	1.024
Industri Pengolahan	2.122	2.390	2.711	2.891	3.127
Pengadaan Listrik dan Gas	5	5	6	6	6
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11	11	12	13	13
Konstruksi	1.969	2.203	2.439	2.538	2.515
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.059	4.722	5.146	5.529	5.857
Transportasi dan Pergudangan	1.371	1.539	1.768	1.888	1.921
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	171	208	237	248	267
Informasi dan Komunikasi	1.273	1.452	1.581	1.682	1.797
Jasa Keuangan dan Asuransi	275	302	316	338	373
Real Estate	403	450	512	550	594
Jasa Perusahaan	7	8	9	10	11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.045	1.101	1.156	1.245	1.271
Jasa Pendidikan	.165	1.315	1.395	1.453	1.555
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	288	317	347	373	404
Jasa lainnya	167	197	224	256	285
Produk Domestik Regional Bruto	**21.440**	**23.925**	**26.212**	**27.962**	**29.591**

Catatan :
**) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026.

Untuk melihat struktur perekonomian di Kabupaten Agam, dapat dilihat pada tabel distribusi persentase PDRB berdasarkan harga berlaku berikut:

Tabel 2.1.7
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam
Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha
Tahun: 2021 - 2025

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,53	28,70	28,24	28,40	28,97
Pertambangan dan Penggalian	3,63	3,50	3,62	3,58	3,46
Industri Pengolahan	9,90	9,99	10,34	10,34	10,57
Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Konstruksi	9,18	9,21	9,31	9,08	8,50

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	2	3	4	5	6
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,93	19,74	19,63	19,77	19,79
Transportasi dan Pergudangan	6,39	6,43	6,74	6,75	6,49
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,80	0,87	0,91	0,89	0,90
Informasi dan Komunikasi	5,94	6,07	6,03	6,02	6,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,28	1,26	1,21	1,21	1,26
Real Estate	1,88	1,88	1,95	1,97	2,01
Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,87	4,60	4,41	4,45	4,29
Jasa Pendidikan	5,43	5,50	5,32	5,20	5,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,32	1,32	1,33	1,37
Jasa lainnya	0,78	0,82	0,85	0,92	0,96
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Catatan :
**) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur perekonomian masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 28,97% disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,79% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 10,57%. Sementara sektor yang paling rendah dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah pada tahun 2025 berturut-turut adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,02%, sektor Jasa Perusahaan sebesar 0,04% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,05%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan struktur perekonomian Kabupaten Agam pada tahun 2024.

2.1.2 Nilai PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita menunjukkan pendapatan rata-rata setiap penduduk, yang digunakan sebagai indikator kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Nilai ini dihitung dengan membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduknya.

Pada tahun 2025, PDRB Per Kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar 52,21 juta rupiah, mengalami peningkatan sebesar 2,19 juta rupiah dari 50,02 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2024. Grafik berikut menyajikan perkembangan dan perbandingan nilai PDRB per Kapita Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 s.d tahun 2025:

Grafik II.3
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun: 2021 -2025

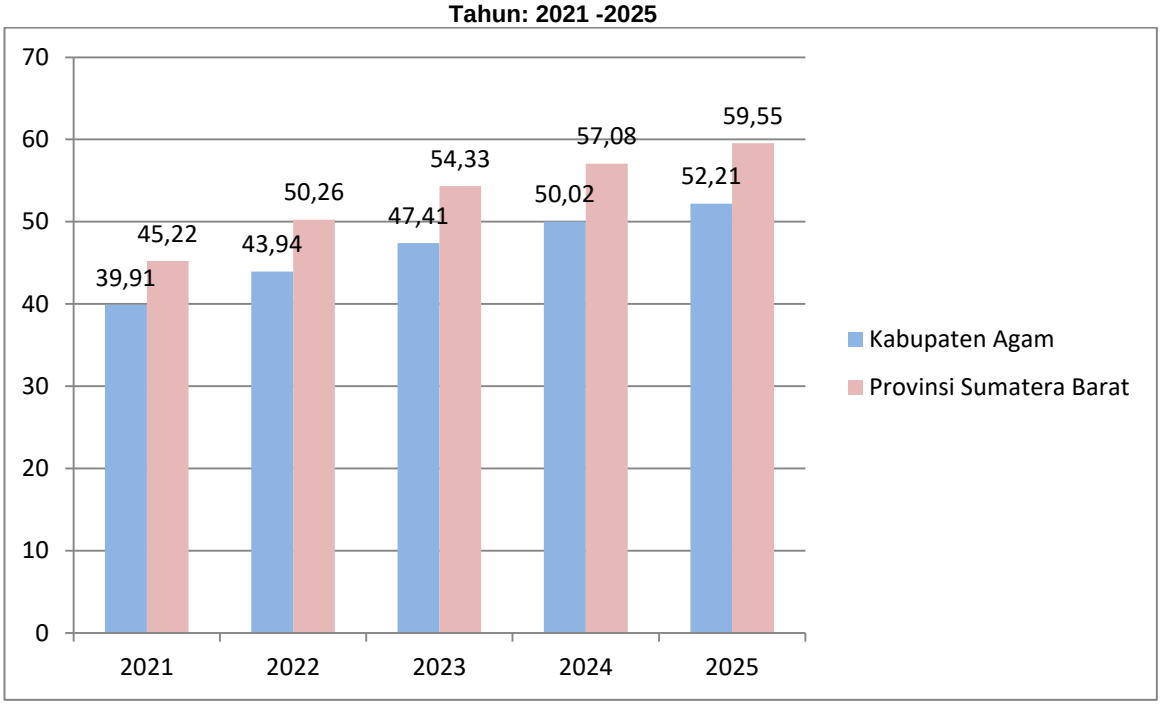

Sumber: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain.

Berdasarkan grafik diatas, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Agam atas dasar harga berlaku selama tahun 2021 s.d tahun 2025, mengalami kenaikan setiap tahun. Tren kenaikan ini juga berlaku untuk Provinsi Sumatera Barat. Walaupun demikian, PDRB Per Kapita Kabupaten Agam masih berada dibawah PDRB Per Kapita Provinsi Sumatera Barat.

2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Rasio) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Gini Rasio dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (>0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (0,35<0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (0,20<0,35).

Pada tahun 2025, ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Agam turun dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tergambar dengan semakin turunnya angka gini rasio dari 0,255 pada tahun 2023 menjadi 0,249 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Agam berada pada tingkat ketimpangan rendah. Sementara untuk provinsi, angka gini rasio mengalami peningkatan dari 0,280 pada tahun 2023 menjadi 0,283 pada tahun 2024. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020 s.d tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:

Grafik II.4
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2021-2025

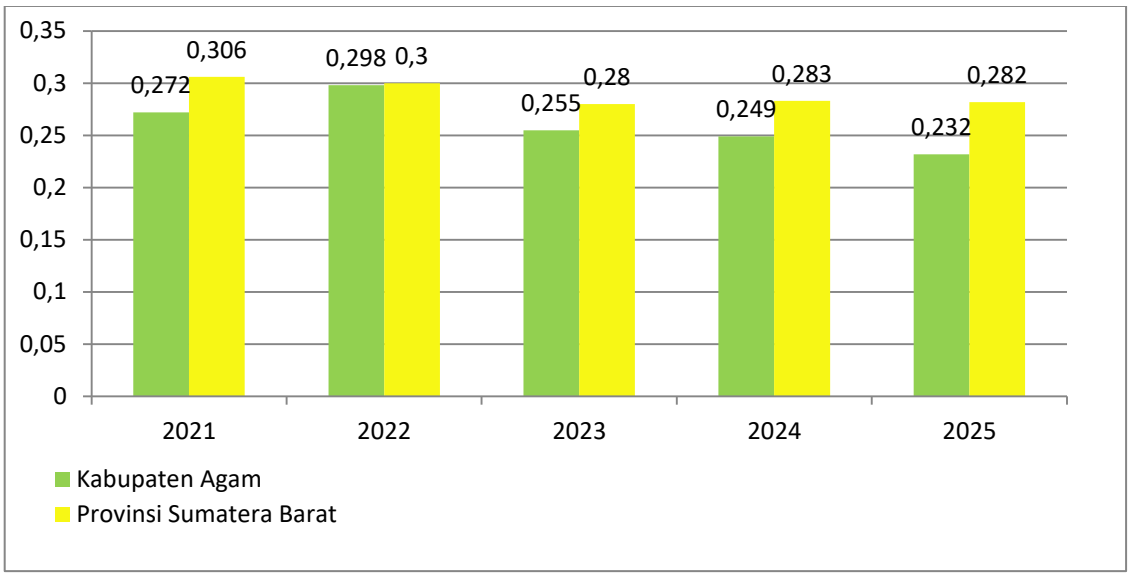

Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026

Berdasarkan grafik diatas, Gini Rasio Kabupaten Agam cendrung turun setiap tahunnya terhitung tahun 2022. Untuk tahun 2025, Gini Rasio Kabupaten Agam turun sebesar 0,017 dari tahun 2024 sebesar 0,249.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan serta penyandingan data gini rasio pada kabupaten dan kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2025, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik II.5
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

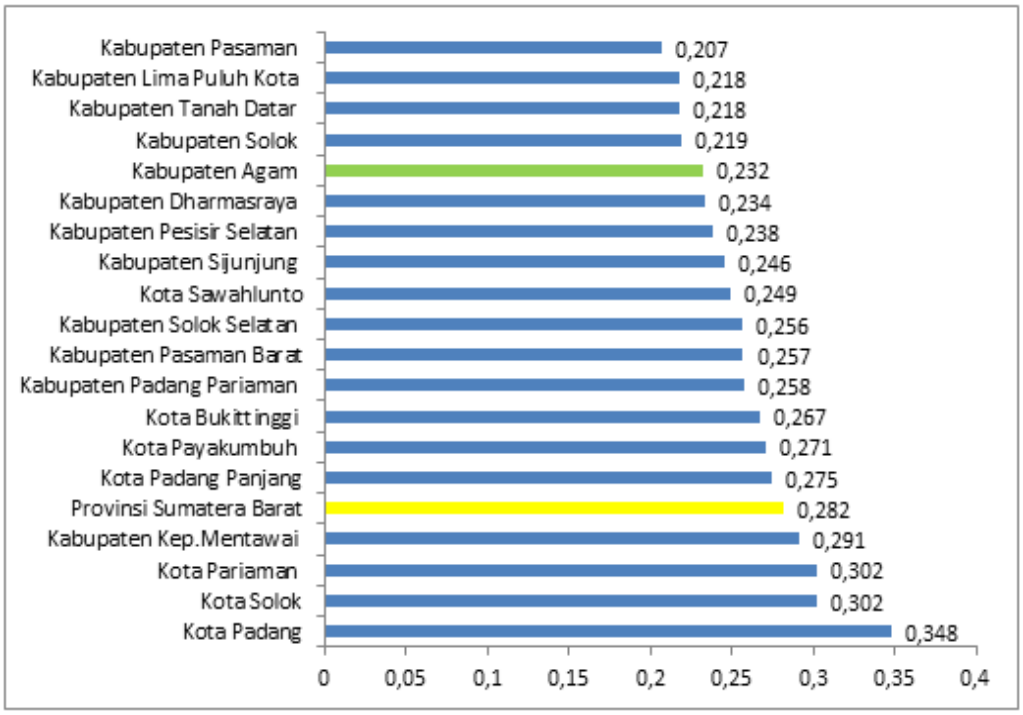

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Gini Ratio by Regency Municipality in Sumatera Barat, 2025), 2026

Untuk tahun 2025, dengan mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2025 dan Perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2025, Gini Rasio ditargetkan sebesar ***0,248*** dengan capaian sebesar **0,232**.

2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2025, BPS menetapkan garis kemiskinan Kabupaten Agam sebesar Rp570.317,00/kapita/bulan. Berdasarkan penetapan tersebut, terdapat 30,57 ribu jiwa di Kabupaten Agam yang dinyatakan miskin atau setara dengan 5,97% dari jumlah penduduk Kabupaten Agam. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, dimana jumlah penduduk miskin sebesar 34,82 ribu jiwa atau 6,83% dari jumlah penduduk di Kabupaten Agam.

Perkembangan jumlah penduduk miskin secara persentase di Kabupaten Agam yang disandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2021 s.d tahun 2025), disajikan pada grafik berikut:

Grafik II.6
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2021-2025

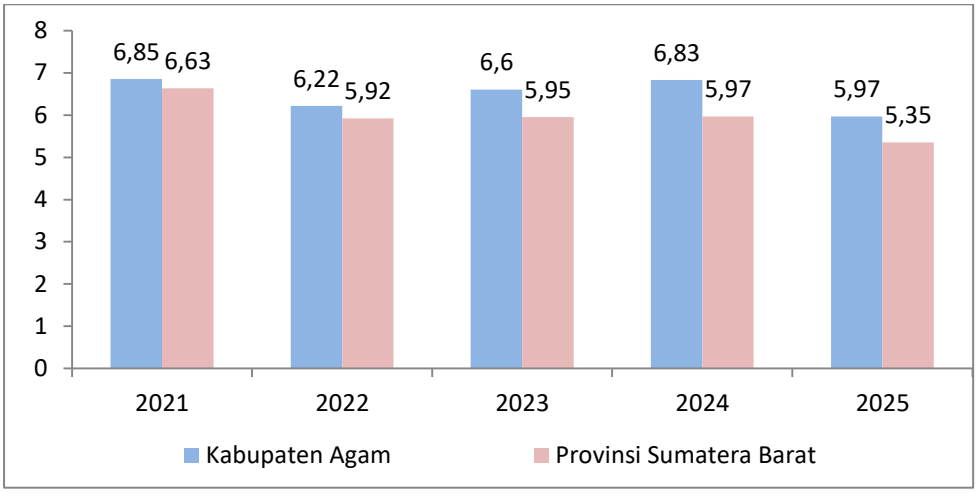

Sumber: BPS Kabupaten Agam (Kabupaten Agam dalam Angka 2026), 2026

Berdasarkan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2025, Angka Kemiskinan di Kabupaten Agam ditargetkan turun menjadi ***6,50%*** pada tahun 2025 dengan capaian sebesar **5,97%.**

Secara rata-rata, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 5,35%, Kabupaten Agam sendiri masih berada diatas rata-rata Provinsi dan menempati posisi kedelapan tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota diwilayah Provinsi Sumatera Barat. Untuk melihat perbandingan persentase jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi pada tahun 2024, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik II.7
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten dan Kota
Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

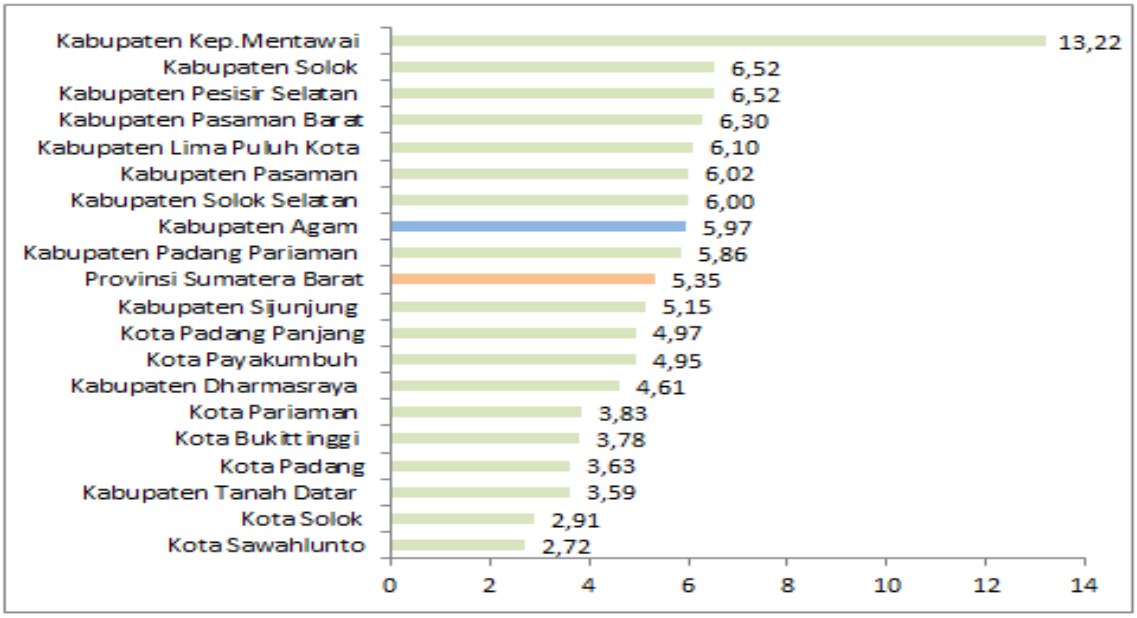

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026), 2026

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kinerja ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Sebaliknya pembangunan ekonomi diharapkan mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern, dan pada umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendidikan masyarakat merosot. Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang berpengaruh pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari.

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2025 mencapai angka 4,71%. Artinya terdapat 4,71% penduduk yang termasuk angkatan kerja tidak terserap lapangan kerja. Dibanding capaian tahun 2024 sebesar 4,73%, tingkat pengangguran di Kabupaten Agam mengalami penurunan sebesar 0,02%.

Sementara untuk Provinsi Sumatera Barat, tingkat pengangguran mengalami penurunan pada tahun 2025 dengan capaian 5,62% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 5,75%. Gambaran tingkat pengangguran terbuka selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2021 s.d tahun 2025) di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.8
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2021 – 2025

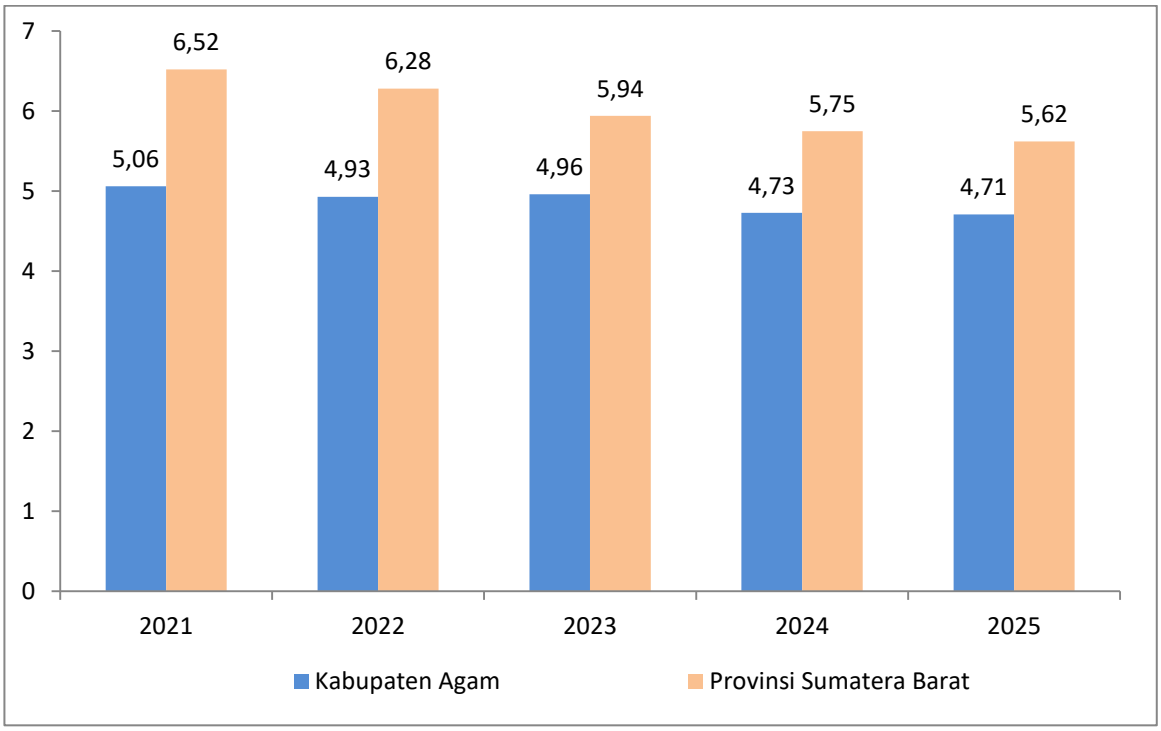

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026), 2026

Berdasarkan Perubahan KUA tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Agam ditargetkan turun menjadi ***4,71%*** pada tahun 2025, dengan capaian **4,71% (sesuai dengan target).**

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat; 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Perhitungan IPM mulai tahun 2015 telah mengunakan metode baru dengan mengunakan variabel Angka Usia Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita.

IPM Kabupaten Agam mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Untuk tahun 2025, IPM Kabupaten Agam sebesar 76,04 dan meningkat sebesar 0,96 jika dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan capaian selama periode lima tahun terakhir (tahun 2021 s.d tahun 2025), IPM Kabupaten Agam berada pada rentang angka indeks 70 – 80, sehingga berada di kelompok tinggi. Semakin tinggi angka IPM, mengambarkan kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Jika dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat, IPM Kabupaten Agam lebih rendah dimana IPM Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 adalah sebesar 77,27. Untuk lebih jelasnya perkembangan IPM Kabupaten Agam selama tahun 2021 s.d 2025 yang disandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.9
Perkembangan IPM Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2021-2025

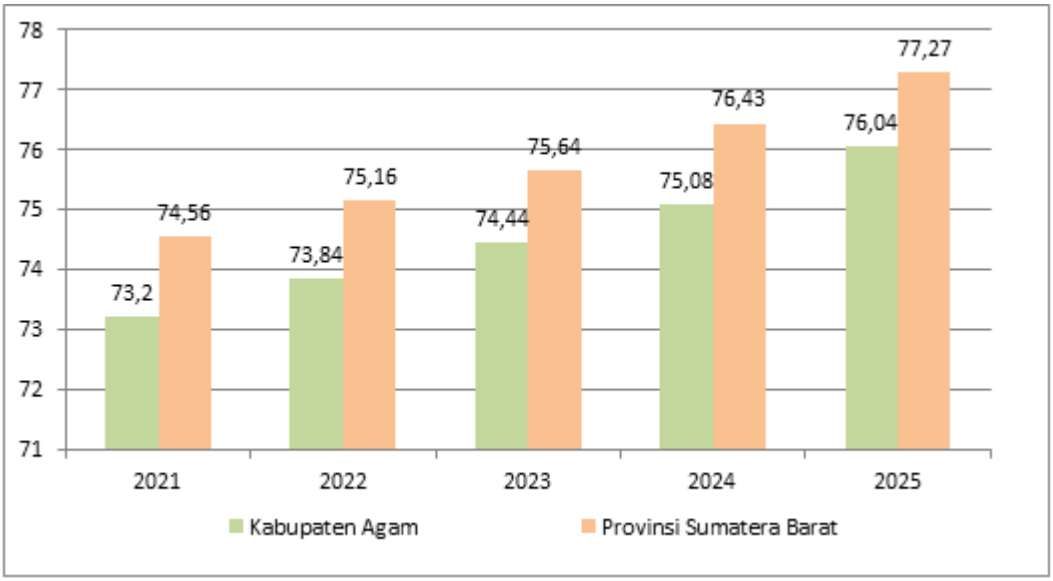

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026), 2026

Sebagai bagian dari indikator capaian makro daerah, capaian IPM dapat dibandingkan dan dijadikan tolak ukur keberhasilan daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Pada tahun 2025, capaian IPM Kabupaten Agam menduduki peringkat 9 dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat sebagaimana yang tergambar pada grafik berikut:

Grafik II.10
Perkembangan IPM Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2025

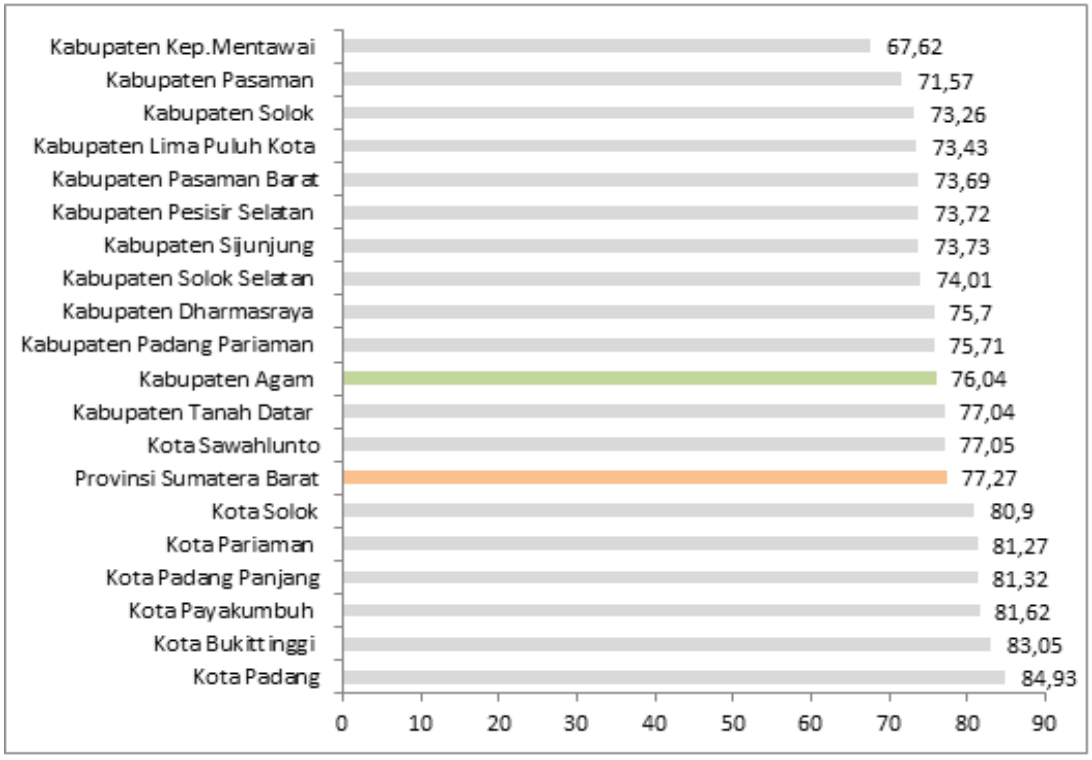

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat (Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026), 2026

Berdasarkan Perubahan KUA tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2025, IPM Kabupaten Agam diproyeksi meningkat menjadi ***75,75*** pada tahun 2025 dengan capaian sebesar **76,04.**

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Dari hasil evaluasi penerimaan pendapatan daerah, pelaksanaan program kegiatan s.d Triwulan I tahun anggaran 2025, program unggulan Kepala Daerah, penyesuaian terhadap pagu definitif Dana Perimbangan, serta perubahan arah kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan provinsi tahun 2025, maka untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Agam dengan lebih efisien dan efektif dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan keuangan daerah melalui Perubahan RKPD tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan Perubahan KUA-PPAS tahun anggaran 2025.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah:

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Agam diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber pendapatan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan keuangan daerah, sumber utama pendapatan daerah masih pada Dana Transfer Umum (DTU).

Arah kebijakan pendapatan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang dimuat dalam RPJMD 2021 - 2026 masih relevan atau dapat dipakai pada tahun rencana. Disamping itu, arah kebijakan pendapatan daerah juga ditentukan melalui analisis perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam.

Pada Perubahan RKPD tahun 2025, arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam untuk masing-masing jenis pendapatan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
   a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
   b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam melalui pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatakan akurasi data base pajak dan retribusi secara bertahap.
   c. Revitalisasi sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, berupa pembayaran non tunai dengan pemanfaatan IT dan sistem jemput bola.
   d. Mengkaji dan melengkapi regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
   e. Meningkatkan edukasi kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan pendekatan persuasif melalui penyuluhan/sosialisasi pajak menggunakan media baliho maupun media elektronik serta jika diperlukan untuk melakukan tindakan represif terhadap penunggak retribusi dan pajak daerah berupa penertiban pemberlakuan sanksi denda, bunga dan atau kenaikan pajak terutang sesuai diatur dalam regulasi.
   f. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional.

g. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
h. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
i. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
j. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
k. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi).
l. Menerapkan reward dan punishment kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku.

2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer, meliputi:
   a. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah ASN dan lain-lain.
   b. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readinees criteria untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat.
   c. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
   d. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan dan mentaati kewajiban pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib.
   e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi dan penghitungan besaran alokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta berusaha untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan melalui hibah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah:

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melaluai efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam serta Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan pada Perubahan RKPD tahun 2025 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan untuk Belanja Operasi
   Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja dan kondisi kerja pegawai serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Arah kebijakan untuk Belanja Modal
   Belanja Modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koodinasi dengan PD terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Arah kebijakan untuk Belanja Tidak terduga
   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Arah kebijakan untuk Belanja Transfer
   Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Nagari. Belanja transfer dianggarkan pada PD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Nagari.
   - Kebijakan Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Nagari diatur dengan ketentuan mengalokasikan anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah nagari paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pembiayaan dapat dibedakan atas kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah**,** dengan uraian sebagai berikut:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dilakukan dalam bentuk melakukan penyesuaian terhadap penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun lalu yang telah ditetapkan melalui LHP BPK RI atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap LKPD Kabupaten Agam tahun anggaran 2024. Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan semula sebesar Rp57.976.410.207,69 berkurang sebesar Rp18.397.774.021,96 menjadi Rp39.578.636.185,73.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui analisis terhadap perusahaan daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD maupun yang mendukung proses pembangunan di Kabupaten Agam. Untuk tahun 2025, pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Nagari dialokasikan sebesar Rp1.000.000.000,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dengan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun 2025 dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 Triwulan I dan identifikasi isu-isu strategis dan dukungan terhadap visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah memperhatikan prakiraan maju pada RKPD Tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Relevansi keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
2. Relevansi keterkaitan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan provinsi.
3. Relevansi terhadap program prioritas dan program unggulan Kepala Daerah yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

4. Relevansi terhadap hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024, Capaian SPM, Indikator Kinerja Daerah dan capaian terhadap Program Prioritas Kepala Daerah.
5. Relevansi terhadap isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Agam untuk tahun 2025 yang ditetapkan melalui Perubahan RKPD , adalah sebagai berikut:

1. Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai".

   Arah kebijakan prioritas pembangunan untuk prioritas ini pada tahun 2025, adalah:
   1) Penguatan pendidikan keagamaan, kelembagaan dan kehidupan sosial religius masyarakat.
   2) Penguatan dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.
   3) Peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

   Arah kebijakan prioritas pembangunan untuk prioritas ini pada tahun 2025, adalah:
   1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, berbasis kinerja, dan didukung oleh penguatan pengawasan internal serta pemanfaatan teknologi informasi.
   2) Penguatan sistem pelayanan publik berbasis digital, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing.

   Arah kebijakan prioritas pembangunan untuk prioritas ini pada tahun 2025, adalah:
   1) Peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pendidikan yang mendorong pembentukan karakter dan daya saing peserta didik.
   2) Penguatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata dan responsif melalui pendekatan promotif dan preventif.
   3) Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang inklusif melalui pemberdayaan pemuda dan kesetaraan gender.
4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan.

   Arah kebijakan prioritas pembangunan untuk prioritas ini pada tahun 2025, adalah:
   1) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan melalui penguatan kapasitas produksi, sistem agribisnis dan kemitraan.
   2) Penguatan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha mikro melalui penguatan daya saing, inovasi, serta sinergi antar sektor berbasis potensi lokal dan budaya.
   3) Peningkatan daya tarik dan realisasi investasi melalui penataan iklim usaha, penguatan infrastruktur pendukung, pemanfaatan potensi lokal, serta promosi dan kemitraan.
   4) Peningkatan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.
   5) Peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif.
   6) Penguatan sistem perlindungan sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.
   7) Pengembangan Infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi wilayah pesisir.
5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhanmitigasi bencana.

Arah kebijakan prioritas pembangunan untuk prioritas ini pada tahun 2025, adalah:

1) Penguatan pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung pembangunan ramah lingkungan dan ketahanan ekosistem.
2) Penguatan kapasitas ketahanan wilayah terhadap bencana, perubahan iklim, serta ketahanan air, pangan, dan energi.
3) Meningkatnya kualitas infrastruktur yang tangguh dan merata.
4) Meningkatnya konektivitas wilayah.
5) Meningkatnya pemukiman rumah layak huni.

6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

   Arah kebijakan prioritas pembangunan untuk prioritas ini pada tahun 2025, adalah:

   - Pemberdayaan nagari melalui penguatan tata kelola, ekonomi lokal, kapasitas SDM, dan pemanfaatan potensi sumber daya berbasis kearifan local.

Memperhatikan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2025-2029, maka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada akhir tahun 2025, dirumuskan melalui indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Agam
Tahun 2025

NO		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Keterangan
Misi I : Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai”					
	1	Persentase Nagari Dengan Level Madani V	18,48%	21%	Sangat Tinggi
	2	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Agama	76,53%	77,04%	Sangat Tinggi
	3	Tingkat Penerapan Nilai-Nilai Adat, Budaya, dan Kearifan Lokal	63,70%	62,42 %	Sangat Tinggi
	4	Indeks Keamanan	79,45	64,63	Tinggi
Misi II : Tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional					
	5	Indeks Reformasi Birokrasi	79 (BB)		Data Capaian Belum Rilis
	6	Maturitas SPIP	3,16	2,74	Tinggi
	7	Nilai SAKIP	68,61 (B)	67,45 (B)	Sangat Tinggi
	8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77,50	69,7 (B)	Tinggi
	9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,66	2,96	Sangat Tinggi
	10	Indeks Sistem Merit	270		Data Capaian Belum Rilis
	11	EPPD	3,581		Data Capaian Belum Rilis
	12	Indeks Pelayanan Publik	3,50	3,78 (B)	Sangat Tinggi
Misi III : Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing					
	13	IPM	75,75	76,04	Sangat Tinggi
	14	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,75	9,57	Sangat Tinggi
	15	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,4	14,26	Sangat Tinggi
	16	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,51	74,63	Sangat Tinggi
	17	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,33		Data Capaian Belum Rilis

NO		Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Keterangan
	18	Indeks Daya Saing Pemuda Olahraga	61,62	53,92	Tinggi
Misi IV : Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan					
	19	Laju pertumbuhan ekonomi	4,41%	2,99%	Sedang
	20	IDSD	3,64	3,70	Sangat Tinggi
	21	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	82,61	88,51	Sangat Tinggi
	22	Rasio PDRB Industri Pengolahan	10,44%	10,57%	Sangat Tinggi
	23	Rasio Kewirausahaan	3,89	5,23	Sangat Tinggi
	24	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0,96%	0,90%	Sangat Tinggi
	25	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (Jasa Lainnya)	0,93%	0,96%	Sangat Tinggi
	26	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	30,02		Data Capaian Belum Rilis
	27	Gini Rasio	0,248	0,232	Sangat Tinggi
	28	Pendapatan Per Kapita (Ribu)	57.850	52.370	Sangat Tinggi
	29	Tingkat Kemiskinan	6,50%	5,97%	Sangat Tinggi
	30	Indeks Ketahanan Pangan	86,93	71,60	Tinggi
	31	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,88	4.71	Sangat Tinggi
	32	Produktivitas tenaga kerja	98,35	96,17	Sangat Tinggi
	33	Indeks Kesejahteraan Sosial	50,50		Data Capaian Belum Rilis
Misi V: Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana					
	34	Indeks Risiko Bencana (IRB)	200,28	240,30	Sangat Tinggi
	35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,93	78,96	Sangat Tinggi
	36	Indeks Ketahanan Daerah	0,55	0,34	Rendah
	37	Indeks Pembangunan Infrastruktur	41,52	36,02	Tinggi
	38	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	15,40	5,45	Sangat Rendah
	39	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman (Perpipaan)	19,25	13,35	Sedang
	40	Jalan dalam kondisi mantap	60%	58,37%	Sangat Tinggi
	41	Indeks Konvektivitas	69,00	68,50	Sangat Tinggi
	42	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	73,75	65,82	Tinggi
Misi VI: Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan Masyarakat					
	43	Persentase Desa Mandiri (Indeks Desa)	46,37%	58,69 %	Sangat Tinggi
	44	Jumlah Nagari Mandiri	43 Nagari	54 Nagari	Sangat Tinggi

Sumber: Bappeda Kabupaten Agam (Buku II LKPJ Bupati Tahun 2025), 2026

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Sebagai salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, APBD juga merupakan bagian dari rencana keuangan tahunan, yang menjamin ketersediaan sumber-sumber keuangan daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Untuk tahun anggaran 2025, pada awalnya Belanja Daerah dianggarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.630.294.453.378,69 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 yang direncanakan akan didanai oleh penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp1.573.318.043.171,00 serta penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp57.976.410.207,69.

Anggaran Belanja Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Operasi sebesar Rp1.331.857.645.462,69, Belanja Modal sebesar Rp91.618.407.935,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp8.400.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp198.418.399.981,00.

Adapun proyeksi penerimaan pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp207.819.815.431,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.365.498.227.740,00.

Selama tahun 2025 dan sebelum penetapan perubahan APBD, terjadi dua kali pergeseran APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Agam dengan rincian sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 3).
- Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 9).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan hasil audit BPK RI atas LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024, serta dalam rangka menindaklanjuti regulasi yang terkait dengan penganggaran, Pengeluaran Daerah kemudian disesuaikan dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menjadi sebesar Rp1.572.333.777.940,19, yang terdiri dari Belanja Daerah sebesar Rp1.571.333.777.940,19 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Belanja daerah direncanakan akan didanai oleh penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp1.532.755.141.754,46 serta penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp39.578.636.185,73. Adapun proyeksi penerimaan pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp205.074.782.496,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.327.680.359.258,46.

Setelah penetapan Perda perubahan APBD, terjadi satu kali pergeseran APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pergeseran setelah perubahan Perda ini, menjadi pedoman untuk merealisasikan anggaran dan menyajikannya pada Laporan Realisasi Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam. Kondisi ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain menyebutkan bahwa :

- Jika Pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, Pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD

Selama Tahun Anggaran 2025, realisasi sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Agam yang yang direncanakan melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 27 Tahun 2025 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	**Pendapatan**	**1.539.155.141.754,46**	**1.572.095.969.805,78**	**102,14**
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	205.074.782.496,00	202.786.070.976,78	98,89
4.2.	Pendapatan Transfer	1.330.080.359.258,46	1.365.309.894.829,00	102,64
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.000.000.000,00	4.000.004.000,00	100,00
5.	**Belanja**	**1.577.733.777.940,19**	**1.495.186.732.880,97**	**94,77**
5.1	Belanja Operasi	1.296.434.311.161,82	1.237.459.769.264,12	95,45
5.2	Belanja Modal	70.145.591.385,46	56.310.843.328,00	80,28
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	58,68
5.4	Belanja Transfer	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00	97,43
	Surplus/(Defisit)	**(38.578.636.185,73)**	**76.909.236.924,81**	**(199,36)**
6	**Pembiayaan**	**38.578.636.185,73**	**38.578.636.185,73**	**100,00**
6.1	Penerimaan	39.578.636.185,73	39.578.636.185,73	100,00
6.2	Pengeluaran	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.572.095.969.805,78 atau 102,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.539.155.141.754,46.

Adapun pendapatan daerah yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp202.786.070.976,78 atau 98,88% dari anggarannya sebesar Rp205.074.782.496,00. Sementara untuk pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer, terealisasi sebesar Rp1.365.309.894.829,00 dari anggaran sebesar Rp1.330.080.359.258,46 atau 102,64%. Untuk

pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp4.000.004.000,00 atau 100,00%.

Selama tahun 2025, Belanja Daerah direalisasikan sebesar Rp1.495.186.732.880,97 atau 94,77% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.577.733.777.940,19, sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar Rp82.547.045.059,22. Belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Selama tahun anggaran 2025, realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp1.237.459.769.264,12 atau 95,45% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.296.434.311.161,82. Rincian dari realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.01	Belanja Pegawai	875.183.897.096,37	866.021.568.444,12	98,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	397.902.349.897,45	350.426.013.362,00	88,06
5.1.03	Belanja Hibah	18.359.064.168,00	17.590.437.458,00	95,81
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	4.989.000.000,00	3.421.750.000,00	68,59
	Jumlah	**1.296.434.311.161,82**	**1.237.459.769.264,12**	**95,45**

b. Belanja Modal

Selama tahun anggaran 2025, realisasi belanja modal adalah sebesar Rp56.310.843.328,00 atau 80,28 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp70.145.591.385,46. Rincian dari realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.055.539.686,56	27.846.028.860,00	79,43
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.361.821.684,90	7.072.853.014,00	84,59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.631.351.368,00	15.512.561.406,00	75,19
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.871.878.646,00	5.657.400.048,00	96,35
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00	222.000.000,00	98,67
	Jumlah	**70.145.591.385,46**	**56.310.843.328,00**	**80,28**

c. Belanja Tidak Terduga

Selama tahun anggaran 2025, realisasi belanja tidak terduga adalah sebesar Rp6.522.478.271,85 atau 58,68% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp11.114.959.028,91.

d. Belanja Transfer

Selama tahun anggaran 2025, realisasi belanja transfer adalah sebesar Rp194.893.642.017,00 atau 97,43% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp200.038.916.364,00. Belanja ini direalisasikan untuk belanja bagi hasil pajak daerah, belanja bagi hasil retribusi daerah dan belanja bantuan keuangan berupa Alokasi Dana

Desa (ADD) kepada 92 (sembilan puluh dua) Nagari yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Untuk capaian kinerja keuangan, baik pendapatan maupun belanja pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam selama Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
I	**Pendapatan**				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	94.460.423.180,00	97.605.895.449,00	(3.145.472.269,00)	103,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	470.000.000,00	550.021.910,00	(80.021.910,00)	117,03
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	139.800.000,00	143.800.000,00	(4.000.000,00)	102,86
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	38.840.000,00	22.308.000,00	16.532.000,00	57,44
6	Dinas Lingkungan Hidup	862.128.000,00	912.882.190,00	(50.754.190,00)	105,89
7	Dinas Perhubungan	84.000.000,00	48.930.000,00	35.070.000,00	58,25
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	332.000.000,00	225.957.000,00	106.043.000,00	68,06
9	Dinas Pertanian	303.536.000,00	300.342.000,00	3.194.000,00	98,95
10	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	15.360.000,00	5.710.000,00	9.650.000,00	37,17
11	Badan Pendapatan Daerah	101.820.900.086,00	97.915.811.679,20	3.905.088.406,80	96,16
12	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.340.626.654.488,46	1.374.362.811.577,58	(33.738.661.531,12)	102,52
	Total Pendapatan	**1.539.155.141.754,46**	**1.572.095.969.805,78**	**(32.940.828.051,32)**	**102,14**
II	**Belanja**				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	646.554.118.925,72	642.940.837.111,00	3.613.281.814,72	99,44
2	Dinas Kesehatan	320.928.176.991,00	297.415.509.495,00	23.512.667.496,00	92,67
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	49.911.098.751,82	44.243.324.037,00	5.667.774.714,82	88,64
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.879.214.247,00	7.557.297.066,00	321.917.181,00	95,91
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.758.331.949,14	5.246.621.958,00	511.709.991,14	91,11
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.673.449.105,00	13.703.590.077,00	969.859.028,00	93,39
7	Dinas Sosial	4.582.376.017,00	4.221.665.315,00	360.710.702,00	92,13
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.209.070.096,00	12.649.172.229,00	2.559.897.867,00	83,17
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.838.030.834,00	4.277.175.695,00	560.855.139,00	88,41
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.000.015.659,00	13.330.971.024,00	2.669.044.635,00	83,32
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.310.500.516,00	4.964.079.479,00	346.421.037,00	93,48
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	8.285.663.279,00	7.102.588.370,00	1.183.074.909,00	85,72

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
13	Dinas Perhubungan	24.284.958.793,00	23.771.801.781,00	513.157.012,00	97,89
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.112.732.296,00	5.993.530.958,00	2.119.201.338,00	73,88
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.722.764.195,00	3.099.221.870,00	623.542.325,00	83,25
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.877.933.190,99	2.569.578.959,00	308.354.231,99	89,29
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.685.372.941,00	3.430.953.040,00	254.419.901,00	93,10
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	9.615.308.987,00	7.910.642.608,00	1.704.666.379,00	82,27
19	Dinas Pertanian	21.403.829.824,61	19.004.593.189,00	2.399.236.635,61	88,79
20	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	5.978.292.039,00	5.645.200.488,00	333.091.551,00	94,43
21	Sekretariat Daerah	56.281.526.283,00	46.393.159.163,00	9.888.367.120,00	82,43
22	Sekretariat DPRD	51.479.682.740,00	48.063.204.071,00	3.416.478.669,00	93,36
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.677.724.388,00	5.187.710.482,00	490.013.906,00	91,37
24	Badan Pendapatan Daerah	11.022.424.468,04	10.200.267.900,00	822.156.568,04	92,54
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	220.248.285.369,07	209.049.110.629,85	11.199.174.739,22	94,92
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.703.064.829,00	4.979.980.982,00	723.083.847,00	87,32
27	Inspektorat Daerah	11.439.736.023,00	9.619.225.635,00	1.820.510.388,00	84,09
28	Kecamatan Baso	1.784.150.862,00	1.683.170.087,00	100.980.775,00	94,34
29	Kecamatan Ampek Angkek	2.196.410.955,00	2.005.004.047,00	191.406.908,00	91,29
30	Kecamatan Candung	1.807.656.309,00	1.732.443.400,00	75.212.909,00	95,84
31	Kecamatan Tilatang Kamang	2.030.205.289,00	1.877.837.606,00	152.367.683,00	92,49
32	Kecamatan Kamang Magek	1.715.473.301,00	1.636.818.158,00	78.655.143,00	95,41
33	Kecamatan Palupuh	1.943.742.649,08	1.636.856.911,00	306.885.738,08	84,21
34	Kecamatan Banuhampu	2.025.070.637,00	1.648.898.868,00	376.171.769,00	81,42
35	Kecamatan Sungai Pua	1.809.671.088,00	1.624.342.491,00	185.328.597,00	89,76
36	Kecamatan IV Koto	1.633.008.836,00	1.491.855.290,00	141.153.546,00	91,36
37	Kecamatan Matur	1.803.319.968,00	1.610.490.058,00	192.829.910,00	89,31
38	Kecamatan Palembayan	1.762.448.292,00	1.599.089.098,00	163.359.194,00	90,73
39	Kecamatan Tanjung Raya	2.182.863.879,00	1.904.508.876,12	278.355.002,88	87,25
40	Kecamatan Lubuk Basung	1.978.918.077,00	1.734.085.610,00	244.832.467,00	87,63
41	Kecamatan Ampek Nagari	1.932.305.721,00	1.727.444.557,00	204.861.164,00	89,40
42	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.167.556.932,00	2.004.606.781,00	162.950.151,00	92,48
43	Kecamatan Malalak	1.691.923.138,00	1.571.411.848,00	120.511.290,00	92,88
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.805.369.269,72	5.126.855.583,00	678.513.686,72	88,31
	Total Belanja	**1.577.733.777.940,19**	**1.495.186.732.880,97**	**82.547.045.059,22**	**94,77**

Defisit ditargetkan sebesar (Rp38.578.636.185,73) yang akan ditutupi oleh Pembiayaan Netto sebesar Rp38.578.636.185,73. Adapun Pembiayaan Netto ini terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu, dimana Penerimaan Pembiayaan dianggarkan

sebesar Rp39.578.636.185,73 dan terealisasi sebesar Rp39.578.636.185,73 atau 100% dengan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan direalisasikan 100%.

Pada tahun 2025, terdapat koreksi SiLPA tahun lalu yang secara akumulasi menambah jumlah SiLPA pada tahun berjalan sebesar Rp24.000,00. Penjelasan mengenai Koreksi SiLPA ini secara lebih rinci dapat dilihat pada Bab V, 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada poin 5 terkait penjelasan SiLPA pada halaman 94 s.d 99**.**

3.2 Hambatan dan Kendala yang ditemui dalam Pencapaian Target Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja keuangan, khususnya pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025, antara lain adalah:

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah
b. Pendataan wajib pajak dan pemutakhiran data pajak daerah serta retribusi daerah belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh.
c. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih lemah, karena belum diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi
d. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PAD terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
e. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah masih rendah
f. Adanya perubahan ketentuan dan aturan yang harus ditindak lanjuti segera melalui Peraturan Kepala Daerah selama tahun 2025.

Sehubungan dengan hambatan tersebut diatas, ada beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

a. Telah dimintakan komitmen kepada masing masing OPD pengelola PAD untuk melakukan peningkatan penerimaan PAD yang dituangkan dalam Pakta Integritas antara Kepala OPD Pengelola PAD dengan Bupati.
b. Melakukan perluasan cakupan objek pajak daerah terutama terhadap sumber-sumber baru yang belum terjangkau sebelumnya.
c. Pada tahun 2025, dilakukan pemutakhiran data PBB P2 dilapangan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Di tahun 2025 dipilih 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Baso dan Kecamatan Canduang. Selain itu juga dilakukan pendataan ulang objek pajak makanan dan minuman, pajak reklame serta pajak air tanah, Pajak MBLB namun belum seluruh Kecamatan yang terjangkau.
d. Telah dilakukan tindak lanjut kerjasama dalam pengawasan bersama antara Bapenda dengan Ditjen Pajak kanwil Sumbar Jambi dengan memanfaatkan pertukaran data yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk 7 (satu) orang Wajib Pajak, 1 (satu) orang diantaranya sudah ketahap penetapan pelunasan.
e. Telah dikirim personil untuk peningkatan kualitas perpajakan pada diklat yang diadakan oleh pihak eksternal seperti PKN-STAN dan DJP serta mengusulkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM melalui anjab ABK, dengan telah diterbitkannya SK pelimpahan wewenang dari Bupati ke Kepala Badan terkait dengan Pemeriksa Pajak dan Juru Sita.
f. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui penggunaan kanal pembayaran non-tunai.

g. Melakukan Pemantauan transaksi wajib pajak melalui Pemasangan Alat Pemantau Transaksi (Tapping Box) serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap pemasangan dan kinerja Tapping Box melalui Dashboard Online Transaction Monitoring (OTM), sehingga kondisi perangkat dan transaksi dapat diawasi setiap saat secara real time.
h. Menjadikan ASN sebagai contoh dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah (hak ASN dikaitkan dengan kewajiban pajak daerah).
i. Dalam rangka optimalisasi penerimaan dan meringankan beban masyarakat, Bapenda memberikan Pembebasan sanksi/denda PBB-P2 dan Diskon BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
j. Melakukan pengembangan aplikasi pengelolaan pajak daerah berupa Aplikasi Info PBB, serta implementasi penggunaan Aplikasi Monitoring Evaluasi PAD dan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
k. Melakukan Penilaian Individu PBB P-2 Buku 4,5 untuk 10 Wajib Pajak.
l. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah ASN dan lain-lain.
m. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readinees criteria untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat.
n. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
o. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan dan mentaati kewajiban pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib;
p. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi dan penghitungan besaran alokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan entitas akuntansi dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2025, entitas akuntansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam adalah seluruh Perangkat Daerah sebanyak 44 (empat puluh empat) entitas.

4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Agam merupakan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Agam selaku entitas pelaporan yang disusun dan disajikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan data APBD dan pelaksanaan APBD serta bersumber dari transaksi keuangan pada seluruh SKPD dan SKPKD (BUD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, termasuk transaksi keuangan yang tidak melalui RKUD. Transaksi keuangan yang tidak melalui RKUD meliputi antara lain transaksi yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan yang dialokasikan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Desa.

Laporan keuangan entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan entitas lainnya, tidak termasuk ke dalam LKPD Kabupaten Agam. Namun demikian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada BUMD, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi adalah prinsip-prinsip yang menentukan kapan pengaruh transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 adalah basis akrual dan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual ini digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban pada Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca.

Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima atau dibayarkan. Basis Kas ini digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pendapatan LRA diukur sebesar nilai nominal yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Kas di Bendahara Penerimaan berdasarkan azas bruto serta nilai nominal berdasarkan pengesahan yang dilakukan oleh BUD untuk transaksi pendapatan yang tidak melalui RKUD. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dibayarkan/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan azas bruto serta nilai nominal berdasarkan pengesahan yang dilakukan oleh BUD untuk transaksi belanja yang tidak melalui RKUD.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Adapun tujuan khusus dari penerapan kebijakan akuntansi ini adalah untuk memberikan acuan bagi:

a. Penyusun laporan keuangan, dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
b. Pemeriksa, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
c. Pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Akun

a. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan-LRA

1) Defenisi:
   Pendapatan -LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2) Pengakuan:
   Pendapatan-LRA diakui pada saat:
   a) Diterima pada RKUD;
   b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD;
   c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan yang tidak melalui RKUD oleh BUD; dan

d) Diterima entitas lain diluar Pemerintah Kabupaten Agam atas nama BUD.

3) Pengukuran:

a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

c) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4) Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatannya.

b. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan-LO

a) Defenisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Agam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b) Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

c) Pengukuran

Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d) Penyajian

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatannya.

c. Kebijakan Akuntansi untuk Belanja

1) Defenisi

Belanja merupakan semua pengeluaran dari RKUD oleh BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;

b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;

c) Pengeluaran belanja melalui selain bendahara pengeluaran SKPD (bendahara khusus yang bersumber dari Dana BOSP, Dana BOK Puskesmas dan Dana BLUD), pengakuannya terjadi pada saat surat pengesahan belanja (SPB) dan atau surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) diterbitkan oleh BUD.

3) Pengukuran

Belanja diukur sebesar pengeluaran kas dari RKUD dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan serta tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4) Penyajian

Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

d. Kebijakan Akuntansi untuk Beban

1) Defenisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Pengakuan

Beban diakui pada saat:

a) Timbulnya kewajiban
b) Terjadinya Konsumsi Aset
c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

3) Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

4) Penyajian

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan, beban transfer, dan beban tak terduga.

e. Kebijakan Akuntansi untuk Pembiayaan

1) Defenisi

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Agam, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2) Pengakuan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD Kas Daerah (RKUD) serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

3) Pengukuran

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) sebesar kas yang telah diterima pada RKUD, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan melalui RKUD.

Pembiayaan yang diterima dengan mata uang asing diukur dengan dikonversi terlebih dulul ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4) Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

f. Kebijakan Akuntansi untuk Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a) **Kas dan Setara Kas**

(1) Defenisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid berjangka dibawah 3 (tiga) bulan yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(2) Pengakuan

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara/RKUD dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/RKUD.

(3) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(4) Penyajian

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b) **Investasi jangka pendek**

(1) Defenisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

(2) Pengakuan

Investasi Jangka Pendek diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

(3) Pengukuran

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan

(4) Penyajian

Investasi Jangka Pendek disajikan di Neraca

c) **Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

(1) Defenisi

(a) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain piutang pajak, piutang retribusi, piutang denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang

diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

(b) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penyisihan piutang tidak tertagih ini diperhitungkan agar piutang di neraca dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

(2) Pengakuan

(a) Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- Telah diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

(b) Penyisihan piutang tidak tertagih, dilakukan melalui estimasi pada akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode pelaporan sesuai perkembangan kualitas piutang.

(3) Pengukuran

(a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal tagihan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

(b) Penyisihan piutang tidak tertagih, dihitung sesuai dengan kualitas piutang pada tanggal pelaporan.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat), dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- Kualitas Piutang Diragukan;
- Kualitas Piutang Macet

Disamping itu, pengelompokan umur piutang berdasarkan jenis piutang juga menentukan kualitas piutang, seperti yang diatur sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Umur Piutang		Taksiran Piutang Tidak Tertagih
		Pajak	Retribusi	
1	Lancar	<1 tahun	≤1 bulan	0,50%
2	Kurang Lancar	1 - 3 tahun	>1 - 3 bulan	10%
3	Diragukan	>3 - 5 tahun	>3 - 12 bulan	50%
4	Macet	>5 tahun	>12 bulan	100%

(4) Penyajian

Piutang disajikan pada Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, berdasarkan jenis piutang.

d) **Persediaan**

(1) Defenisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

(a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukurdengan andal;

(b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;

(c) Akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname) dengan menggunakan pendekatan beban.

(3) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

(a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

(4) Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar di Neraca.

2) Aset non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Agam atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

a) Investasi jangka panjang

(1) Defenisi:

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

- Investasi Non Permanen

  Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- Investasi Permanen

  Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

(2) Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

(3) Pengukuran

(a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

(b) Investasi nonpermanen

- Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Pengukuran investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jikai nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkanapabila tidak diketahui nilai wajarnya.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(4) Penyajian

Investasi Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen, disajikan pada Neraca setelah kelompok Aset Lancar.

b) Aset tetap

(1) Defenisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:

(a) Tanah;
(b) Peralatan dan Mesin;
(c) Gedung dan Bangunan;
(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
(e) Aset Tetap Lainnya; dan
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

(2) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
(e) Memenuhi batasan minimal perolehan aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya dari aset tetap yang telah ditetapkan. Ketentuan batas minimal perolehan untuk Aset Tetap adalah :

- Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp750.000,00.
  Ketentuan ini tidak berlaku untuk alat kesehatan. Batas minimal perolehan untuk alat kesehatan adalah sebesar Rp200.000,00.
- Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp20.000.000,00.
- Aset Tetap Lainnya selain Buku adalah sebesar Rp750.000,00.
- Ketentuan batas minimal perolehan tidak berlaku untuk Tanah serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Nilai pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi menambah nilai aset yang bersangkutan, diatur sebagai berikut:

- Pemeliharaan tersebut memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- Pemeliharaan tersebut tidak bersifat rutin;
- Pemeliharaan tersebut tidak untuk mempertahankan kondisi fisik aset tetap;

- Khusus untuk pemeliharaan gedung dan bangunan termasuk aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang akan dikapitalisasi menjadi penambah aset tetap adalah minimal sebesar Rp10.000.000,00;
- Pengeluaran anggaran untuk belanja pemeliharaan akan dikelompokan ke dalam belanja modal.

Barang yang nilai perolehannya dibawah nilai satuan minimum tetap dicatat dalam buku inventaris, namun tidak menambah nilai aset pada neraca dan disajikan sebagai aset "*extracoumptable*".

Nilai penyusutan aset tetap untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut

(3) Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan aset tetap dihitung setiap periode (Semesteran atau tahunan) dengan menggunakan Metode Garis Lurus berdasarkan masa manfaat masing-masing aset.

(4) Penyajian

Aset tetap disajikan di Neraca setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

c) Aset Lainnya

(1) Defenisi

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset non lancar. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tagihan tuntutan kerugian daerah, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tak berwujud dan kas yang dibatasi penggunaannya.

(a) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke RKUD atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

(b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah (TP/TGR) merupakan sejumlah uang atau barang yang dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik segaja maupun lalai.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

(c) Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan

yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(d) Aset tak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (*copyright*), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat Aset Tak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Metode amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai residu, dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud secara merata setiap periode/tahun selama masa manfaat. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas, diatur sebagai berikut:

Tabel 4.4.1
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat
1.	Aset Tidak Berwujud	
1.1	Software	
	Software/Aplikasi	5
1.2	Hak Cipta dan Paten	
	Hak Cipta	25
	Paten	20
1.3	Lisensi dan *Franchise*	
	Lisensi	10
	Franchise	5
1.4	Hasil Kajian	
	Hasil Kajian/Penelitian	10
	Data Perencanaan	5

(e) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kabupaten Agam yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Agam, dan piutang tidak tertagih (macet).

Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan nilai penyusutan atas aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain.

(2) Pengakuan

(a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran diakui diakui setelah diterbitkannya SK pelelangan aset tersebut/dokumen yang disamakan.

(b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah diakui setelah diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan dan/atau pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

(d) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud (ATB) diakui pada saat terjadinya pengeluaran atas kegiatan/aktifitas untuk pengadaan ATB, dengan syarat harus memenuhi kriteria berikut:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

(e) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

(3) Pengukuran

(a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

i. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan atas aset yang bersangkutan.

ii. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

iii. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

iv. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

(d) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud (ATB) diukur sesuai dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

(e) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain dicatat sebesar nilai tercatat pada saat aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan daripenggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam assetlain-lain

(4) Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset pada Neraca.

g. Kebijakan Akuntansi untuk Kewajiban

1) Defenisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Agam. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi utang belanja pegawai, utang belanja barang, utang belanja jasa, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.Saat ini Pemerintah Kabupaten Agam tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

3) Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban pemerintah daerah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4) Penyajian
Kewajiban disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban.

h. Kebijakan Akuntansi untuk Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

2. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

a. Defenisi

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan BLUD

1) Tujuan Umum
Tujuan umum Laporan Keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2) Tujuan Spesifik
Tujuan pelaporan keuangan BLUD secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f) menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU; dan
g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

c. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

d. Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran;
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3) Neraca;
4) Laporan Operasional;
5) Laporan Arus Kas;
6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan

e. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
2) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
3) Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
4) Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

f. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah Menjadi Satuan Kerja Biasa

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

3. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

a. Defenisi

Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

1) disediakan oleh mitra, yang:
   a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
   b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
   a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
   b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

b. Pengakuan

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa, apabila :

1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

c. Pengukuran

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas Aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagai aset konsesi jasa, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa berdasarkan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan yang mengatur Aset Tetap atau yang mengatur Aset Tak Berwujud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan yang mengatur Aset Tetap atau yang mengatur Aset Tak Berwujud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

Pengakuan kewajiban atas aset jasa konsesi, pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra, dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada hukum perjanjian yang relevan. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan

d. Penyajian

Aset konsesi disajikan sebagai bagian dari aset non lancar di Neraca.

4. Kebijakan Akuntansi Properi Investasi

a. Defenisi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang

dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

b. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Setelah pengakuan awal, properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

d. Penyajian

Properti investasi diklasifikasikan dan disajikan sebagai aset non lancar, di Neraca.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-sldo akun LRA untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025, sebagimana disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Agam dengan penjelasan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode Tahun Anggaran (TA) yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah anggaran pendapatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.539.155.141.754,46 dengan realisasi sebesar Rp1.572.095.969.805,78 atau 102,14%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.425.096.001,07 atau 2,98% dari realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp1.526.670.873.804,71, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.01
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	**PENDAPATAN**	**1.539.155.141.754,46**	**1.572.095.969.805,78**	**102,14**	**1.526.670.873.804,71**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	205.074.782.496,00	202.786.070.976,78	98,88	164.717.557.879,71
1.2	Pendapatan Transfer	1.330.080.359.258,46	1.365.309.894.829,00	102,65	1.361.215.315.925,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.000.000.000,00	4.000.004.000,00	100,00	738.000.000,00

Kontribusi masing-masing jenis Pendapatan terhadap Pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam TA 2025 dan 2024 digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 5.1.01
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

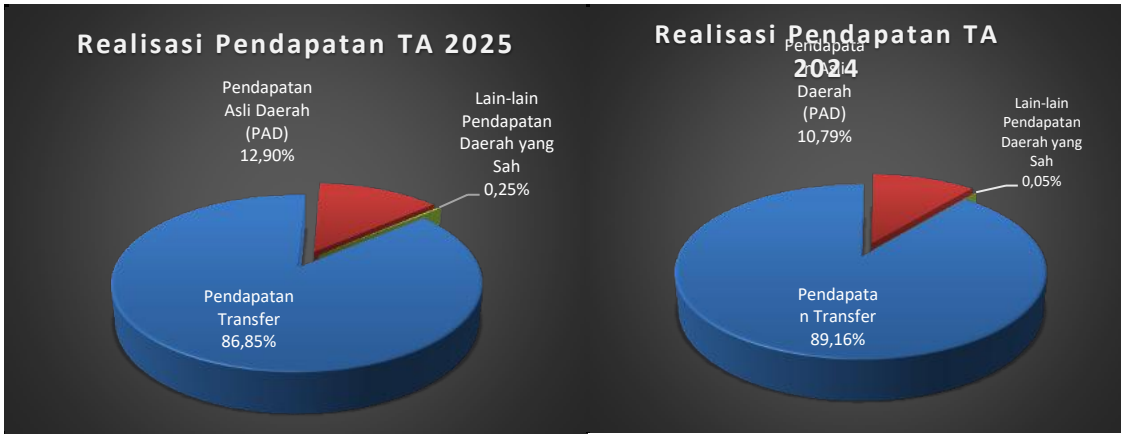

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target penerimaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 359 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Agam Nomor 41 Tahun 2025 tentang Target Triwulanan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025.

Selama tahun 2025, pendapatan atas pajak daerah terealisasi sebesar Rp82.630.684.214,00, sedangkan untuk tahun 2024 terealisasi sebesar Rp46.865.864.045,00. Penerimaan pajak daerah ini mengalami kenaikan sebesar Rp35.764.820.169,00 atau 76,31%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.02
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hotel	0,00	0,00	0,00	331.919.850,00
	PBJT-Jasa Perhotelan	1.500.000.000,00	2.312.421.071,00	154,16	817.836.662,00
	Jumlah Pajak Hotel dan PBJT-Jasa Perhotelan	**1.500.000.000,00**	**2.312.421.071,00**	**154,16**	**1.149.756.512,00**
2	Restoran	0,00	0,00	0,00	2.083.816.822,00
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.000.000.000,00	5.936.481.066,00	118,72	3.339.997.997,00
	Jumlah Pajak Restoran dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman	**5.000.000.000,00**	**5.936.481.066,00**	**118,72**	**5.423.814.819,00**
3	Hiburan	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	60.000.000,00	64.244.495,00	107,07	20.694.083,00
	Jumlah Pajak Hiburan dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	**60.000.000,00**	**64.244.495,00**	**107,07**	**32.194.083,00**
4	Reklame	1.026.500.000,00	997.888.322,00	97,21	835.653.876,00
5	Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	9.423.856.647,00
	PBJT-Tenaga Listrik	21.550.000.000,00	22.085.127.869,00	102,48	13.542.375.728,00
	Jumlah Pajak Penerangan Jalan dan PBJT-Tenaga Listrik	**21.550.000.000,00**	**22.085.127.869,00**	**102,48**	**22.966.232.375,00**
6	Air Tanah	450.000.000,00	514.128.154,00	114,25	546.290.234,00
7	Sarang Burung Walet	2.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.357.399.593,00	733.917.479,00	21,85	641.741.994,00
9	PBB-P2	11.000.000.000,00	5.552.631.653,00	50,47	4.234.834.265,00
10	BPHTB	8.955.203.933,00	9.489.443.730,00	105,96	11.026.603.526,00
11	PBJT-Jasa Parkir	20.000.000,00	20.586.293,00	102,93	8.742.361,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	21.459.046.658,00	24.796.528.682,00	115,55	0,00

No	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	9.666.794.842,00	10.127.285.400,00	104,76	0,00
Jumlah Pajak Daerah		**86.794.945.026,00**	**82.630.684.214,00**	**95,20**	**46.865.864.045,00**

Terdapat perbedaan penyajian rincian PAD pada tahun 2024 dengan tahun 2025. Hal tersebut karena terdapat perubahan nomenklatur pajak daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tanggal 15 Desember 2023 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF yang selanjutnya diatur melalui Perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dilakukan melalui pergeseran anggaran tahun 2024 sehingga terdapat realisasi pada nomenklatur pajak daerah sebelum pergeseran dengan sesudah pergeseran anggaran.

Selain itu sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, terdapat juga penambahan jenis pajak baru yang diterapkan pada tahun 2025 yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB, dimana sebelum diterapkan Opsen Pajak ini Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat Bagi Hasil dari kedua jenis pajak ini. Sehingga jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten pada tahun 2025, terdiri dari 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah, yaitu:

1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah
3. Pajak Sarang Burung Walet
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi:
   - PBJT-Jasa Perhotelan
   - PBJT-Makanan dan/atau Minuman
   - PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
   - PBJT-Tenaga Listrik
   - PBJT-Jasa Parkir
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Adapun rincian dari pajak daerah untuk setiap jenis yang dikelompokan sesuai dengan nomenklatur baru, adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Perhotelan

Pajak Hotel dan PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2025 dan 2024 terealisasi sebesar Rp2.312.421.071,00 dan Rp1.149.756.512,00, berasal dari:

Tabel 5.1.1.03
Rincian Realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Bertambah/ Berkurang	%
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hotel Balcone	1.321.964.863,00	754.457.078,00	567.507.785,00	75,22
2	Hotel Nuansa Maninjau	658.093.403,00	3.926.251,00	654.167.152,00	16661,37
3	Hotel Sakura Syariah	148.311.135,00	47.679.683,00	100.631.452,00	211,06
4	Hotel Muara	113.331.179,00	121.159.846,00	(7.828.667,00)	(6,46)
5	Rumah Pakan Kamih	40.980.000,00	20.600.000,00	20.380.000,00	98,93
6	Hotel Maninjau Indah	1.631.207,00	10.693.341,00	(9.062.134,00)	(84,75)
7	Lawang Adventure Park	4.410.000,00	2.250.000,00	2.160.000,00	96,00
8	Hotel Sultan Syariah	1.484.000,00	764.700,00	719.300,00	94,06
9	Hotel Wahid	1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	25,00
10	Hotel Pakoan Indah	621.941,00	4.881.376,00	(4.259.435,00)	(87,26)
11	PBJT Hotel, Home stay dan Kegiatan OPD lainnya	20.343.343,00	182.344.237,00	(162.000.894,00)	(88,84)
	Jumlah	**2.312.421.071,00**	**1.149.756.512,00**	**1.162.664.559,00**	**101,12**

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi peningkatan penerimaan PBJT Perhotelan sebesar Rp1.162.664.559,00 atau 101,12%. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pelunasan piutang pajak oleh Hotel Nuansa Maninjau dan peningkatan penerimaan pajak dari Hotel Balcone. Selain itu, terdapat upaya kerjasama pengawasan bersama antara Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jendral Perimbanga Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam hal pelaporan dan penyetoran pajak pusat dan daerah yang menyebabkan peningkatan nilai ketetapan pajak PBJT Perhotelan.

b) Pajak Restoran dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Pajak Restoran dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2025 dan 2024 terealisasi sebesar Rp5.936.481.066,00 dan Rp5.423.814.819,00, berasal dari:

Tabel 5.1.1.04
Rincian Realisasi PBJT Makanan dan/atau Minuman Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Bertambah/ Berkurang	%
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	PT Richeese Factory	731.828.088,00	987.966.602,00	(256.138.514,00)	(25,93)
2	Restoran Hotel Nuansa Maninjau	515.822.305,00	0,00	515.822.305,00	100,00
3	Restoran Hotel Balcone	486.385.412,00	401.172.299,00	85.213.113,00	21,24
4	PT Fast Food Indonesia / Kfc	483.325.786,00	616.701.626,00	(133.375.840,00)	(21,63)
5	PT Dom Pizza Indonesia	424.131.468,00	227.229.265,00	196.902.203,00	86,65
6	PT Foods Beverages Indonesia	175.456.065,00	177.585.229,00	(2.129.164,00)	(1,20)
7	Restoran Hotel Sakura Syariah	145.457.302,00	265.460.526,00	(120.003.224,00)	(45,21)
8	PT Sebastian Citra Indonesia (Roti O)	138.736.899,00	128.590.925,00	10.145.974,00	7,89
9	Lapau Kapau	109.985.850,00	156.285.310,00	(46.299.460,00	(29,62)
10	Dbesto Tanjung Alam	105.041.130,00	257.588.266,00	(152.547.136,00)	(59,22)
11	PBJT Rumah Makan, Kafe dan Kegiatan OPD lainnya	2.620.310.761,00	2.205.234.771,00	415.075.990,00	18,82
	Jumlah	**5.936.481.066,00**	**5.423.814.819,00**	**512.666.247,00**	**9,45**

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp512.666.247,00 atau 9,45%. Secara total peningkatan penerimaan PBJT makan dan minuman terjadi karena adanya pelunasan piutang yang dilakukan oleh Hotel Nuansa Maninjau pada bulan Desember 2025, serta optimalisasi pemungutan PBJT makan dan minuman pada tahun 2025.

c) Pajak Hiburan dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Pajak Hiburan dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2025 dan 2024 terealisasi sebesar Rp64.244.495,00 dan Rp32.194.083,00, terdiri dari:

Tabel 5.1.1.05
Rincian Realisasi PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Bertambah/ Berkurang	%
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Tambunai Waterpark	15.451.400,00		15.451.400,00	100,00
2	Pesta Nelayan Pasia Tiku	13.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	18,18
3	PT Zocorindo Puri Asri (Soul Puncak Lawang)	11.126.089,00	2.660.000	8.466.089,00	318,27
4	Lawang Adventure Park	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	100,00
5	Tabek Mandi Sikabu	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	100,00
6	PT Zocorindo Puri Asri (Soul Puncak Lawang)	5.022.961,00	14.188.900,00	(9.165.939,00)	(64,60)
7	Hotel Sakura Syariah	4.337.545,00	2.845.183,00	1.492.362,00	52,45
8	Lawang Adventure Park	2.236.500,00	0,00	2.236.500,00	100,00
9	Mirga Radekos Tri Putra	810.000,00	1.000.000,00	(190.000,00)	(19,00)
10	Pasar Malam Simpang IV Tangah Lubuk Basung	300.000,00	500.000,00	(200.000,00)	(40,00)
11	Pemandian/Kolam Renang Parik Indah	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
12	Chory sebesar	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	Jumlah	**64.244.495,00**	**32.194.083,00**	**32.050.412,00**	**99,55**

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp32.050.412,00 atau 99,55%. Peningkatan ini terjadi karena adanya upaya optimalisasi pemungutan PBJT Kesenian dan Hiburan dari objek pajak yang menyediakan jasa hiburan seperti tempat wisata, pemandian/kolam renang, dan event olah raga.

d) Pajak Reklame

Pada tahun 2025 dan tahun 2024 realisasi Pajak Reklame terealisasi sebesar Rp997.888.322,00 dan Rp835.653.876,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.1.06
Rincian Pajak Reklame Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Bertambah/ Berkurang	%
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	PT Djarum	99.385.000,00	85.886.000,00	13.499.000,00	15,72
2	CV Sonic Advertising	19.804.000,00	9.750.000,00	10.054.000,00	103,12
3	CV Projeka	47.506.000,00	62.482.000,00	(14.976.000,00)	(23,97)
4	PT Citra Media Nusantara	170.431.000,00	179.688.750,00	(9.257.750,00)	(5,15)
5	CV Kade Advertising	24.268.963,00	25.790.935,00	(1.521.972,00)	(5,90)
6	PT Ceria Media Serasi	112.060.625,00	41.448.400,00	70.612.225,00	170,36
7	CV Arvindo Bangun Mulia	52.289.750,00	85.360.000,00	(33.070.250,00)	(38,74)
8	PT Jasa Utama Prima Promosindo	14.300.000,00	12.500.000,00	1.800.000,00	14,40
9	PT Astra Internasional Tbk (Auto 2000)	12.624.750,00	12.624.000,00	750,00	0,01
10	PT Duta Abadi Primantara	10.620.000,00	9.900.000,00	720.000,00	7,27
11	Pajak Reklame Lainnya	434.598.234,00	310.223.791,00	124.374.443,00	40,09
	Jumlah	**997.888.322,00**	**835.653.876,00**	**162.234.446,00**	**19,41**

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp162.234.446,00 atau 19,41% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Peningkatan ini akibat dari dilakukannya penertiban pajak reklame di lapangan

guna menertibkan reklame yang ditayangkan tanpa izin dan tidak melakukan pembayaran pajak reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan dan PBJT-Tenaga Listrik.

Pajak Penerangan Jalan dan PBJT-Tenaga Listrik tahun 2025 dan 2024 terealisasi sebesar Rp22.085.127.869,00 dan Rp22.966.232.375,00. terdiri dari:

Tabel 5.1.1.07
Pajak Penerangan Jalan dan PBJT-Tenaga Listrik Pada tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Bertambah/ Berkurang	%
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	PBJT Tenaga Listrik dari Sumber Lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	21.770.260.204,00	22.665.853.785,00	(895.593.581,00)	(3,95)
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	314.867.665,00	300.378.590,00	14.489.075,00	4,82
-	PT Karya Agung Megah Utama Kamu (Kamu/Pom)	10.191.766,00	14.061.646,00	(3.869.880,00)	(27,52)
-	PT Bukit Sawit Semesta	64.620.150,00	68.224.556,00	(3.604.406,00)	(5,28)
-	PT Mutiara Agam	53.702.137,00	34.917.925,00	18.784.212,00	53,80
-	PT AMP Plantation	72.730.090,00	89.749.302,00	(17.019.212,00)	(18,96)
-	PT Perkebunan Pelalu Raya	113.623.522,00	93.425.161,00	20.198.361,00	21,62
	Jumlah	**22.085.127.869,00**	**22.966.232.375,00**	**(881.104.506,00)**	**(3,84)**

Realisasi PBJT Tenaga Listrik selama tahun 2025, mengalami penurunan sebesar Rp881.104.506,00 atau 3,84% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 penurunan penerimaan ini dikarenakan adanya program discount pembayaran Listrik sebesar 50% selama 3 bulan pada tahun 2025.

f) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah tahun 2025 dan 2024 terealisasi sebesar Rp514.128.154,00 dan Rp546.290.234,00, terdiri dari:

Tabel 5.1.1.08
Rincian Pajak Air Tanah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024	Bertambah/ Berkurang	%
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	PT Japfa Comfeed Indonesia/II	183.774.449,00	200.505.664,00	(16.731.215,00)	(8,34)
2	The Balcone Hotel And Resort	95.003.557,00	163.151.020,00	(68.147.463,00)	(41,77)
3	PT AMP Plantation	73.525.156,00	60.361.256,00	13.163.900,00	21,81
4	PT Kamu	47.711.840,00	43.735.900,00	3.975.940,00	9,09
5	PT Karya Agung Megah Utama (Kamu/Pom)	44.027.812,00	22.588.305,00	21.439.507,00	94,91
6	Rsia Rizki Bunda sebesar	23.981.871,00	28.527.565,00	(4.545.694,00)	-15,93
7	Hotel Nuansa Maninjau Indah	15.343.520,00		15.343.520,00	
8	PT Astra International Tbk (Auto 2000)	6.825.495,00	8.015.038,00	(1.189.543,00)	-14,84
9	PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera	6.031.872,00	4.825.760,00	1.206.112,00	24,99
10	PT Mutiara Agam	5.622.639,00	3.791.110,00	1.831.529,00	48,31
11	Dari wajib pajak lainnnya	12.279.943,00	10.788.616,00	1.491.327,00	13,82
	Jumlah	**514.128.154,00**	**546.290.234,00**	**-32.162.080,00**	**-5,89**

Realisasi Pajak Air Tanah selama tahun 2025, mengalamai penurunan sebesar Rp32.162.080,00 atau 5,89% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp546.290.234,00. Hal ini dikarenakan salah satu sumber penerimaan

pajak air tanah yang besar pada tahun sebelumnya adalah dari Hotel Balcone. Besarnya pembayaran pajak air tanah pada Hotel Balcone disebabkan pemakaian air tanah yang besar akibat banyak terjadi kebocoran pada pipa pipa, namun pada bulan Februari tahun 2025 pihak Hotel Balcone melakukan perbaikan pipa tersebut sehingga sehingga pemakaian air tanah mulai berkurang dan berkurangnya nilai pajak atas pemakaian air tanah tersebut.

g) Pajak Sarang Burung Walet

Pada tahun 2025 Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp2.750.000.000,00 tetapi tidak terealisasi. Pajak Sarang Burung Walet budidaya yang dikelola pada bangunan yang diperuntukkan khusus, berlokasi di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan Lubuk Basung.

Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2025 tidak terealisasi, disebabkan sangat kurangnya kesadaran para wajib pajak sarang burung walet untuk membayar pajak tersebut, walaupun telah dilakukan pendataan ulang sarang burung walet pada Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan Lubuk Basung, dan telah dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pajak sarang burung walet dan perhitungan serta cara pembayarannya, tetapi sampai akhir tahun 2025 tetap tidak ada realisasi pajak sarang burung walet tersebut.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada tahun 2025 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp3.357.399.593,00 dan terealisasi sebesar Rp733.917.479,00 atau 21,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp641.741.994,00 terjadi peningkatan sebesar Rp92.175.485,00 atau 14,36%.

Realisasi pajak MBLB ini berasal dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Agam, namun sebagian besar berasal dari kegiatan fisik pada OPD dan Pemerintah Nagari, dengan rincian antara lain:

1. CV Lambah Daerah Sejahtera sebesar Rp5.000.000,00;
2. PT Antasena Tambang Makmur sebesar Rp20.226.240,00;
3. PT Batang Palupuah Jaya sebesar Rp1.120.000,00;
4. CV Dharma Kartapura sebesar Rp44.462.249,00;
5. PT Bakapindo sebesar Rp64.616.000,00; dan
6. Selebihnya dari kegiatan fisik OPD dan Pemerintah Nagari sebesar 598.492.990,00.

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.552.631.653,00 atau 50,47% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp11.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.09
Rincian Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2025 dan 2024

NO	KECAMATAN	KETETAPAN 2025	REALISASI		REALISASI TAHUN 2024
			TAHUN 2025	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	B a s o	542.734.466,00	280.253.054,00	51,64	218.221.768,00

NO	KECAMATAN	KETETAPAN 2025	REALISASI		REALISASI TAHUN 2024
			TAHUN 2025	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2	Ampek Angkek	1.451.638.072,00	705.056.177,00	48,57	404.000.693,00
3	Candung	439.665.325,00	189.902.357,00	43,19	145.413.126,00
4	Tilatang Kamang	1.385.228.848,00	760.719.099,00	54,92	409.019.366,00
5	Kamang Magek	545.215.823,00	204.782.750,00	37,56	105.996.328,00
6	Palupuh	224.446.760,00	133.082.640,00	59,29	190.768.897,00
7	Banuhampu	1.385.168.520,00	474.729.256,00	34,27	450.551.097,00
8	Sungai Puar	210.572.769,00	122.857.761,00	58,34	100.690.763,00
9	IV Koto	415.266.813,00	192.947.933,00	46,46	151.954.580,00
10	Malalak	170.218.573,00	77.780.265,00	45,69	55.709.272,00
11	M a t u r	369.818.173,00	151.002.561,00	40,83	109.625.904,00
12	Palembayan	677.454.262,00	544.817.046,00	80,42	503.459.798,00
13	Tanjung Raya	726.254.225,00	384.219.584,00	52,90	358.862.555,00
14	Lubuk Basung	2.189.429.114,00	847.844.247,00	38,72	600.607.177,00
15	Ampek Nagari	261.209.802,00	136.944.781,00	52,43	106.326.820,00
16	Tanjung Mutiara	423.252.042,00	345.692.142,00	81,68	323.626.121,00
	JUMLAH	**11.417.573.587,00**	**5.552.631.653,00**	**48,63**	**4.234.834.265,00**

Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2025 sebesar Rp5.552.631.653,00 termasuk penerimaan piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp362.311.788,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.10
Rincian Penerimaan PBB P2 Tahun 2025

No	Tahun Pajak	Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Penerimaan Piutang PBB-P2 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2025	5.082.558.523,00		5.082.558.523,00
2	2024		200.143.538,00	200.143.538,00
3	2023		99.646.133,00	99.646.133,00
4	2022		41.707.993,00	41.707.993,00
5	2021		40.063.361,00	40.063.361,00
6	2020		20.750.799,00	20.750.799,00
7	2019		10.830.088,00	10.830.088,00
8	2018		8.465.332,00	8.465.332,00
9	2017		6.882.078,00	6.882.078,00
10	<2016		41.583.808,00	41.583.808,00
Penerimaan PBB P2				**5.552.631.653,00**

Adapun permasalahan yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan PBB-P2 Tahun 2025 sesuai dengan target, antara lain:

(1) Data base PBB-P2 sedang dalam proses pemutakhiran;
(2) Peta blok yang diberikan KPP Pratama sedang dalam perbaikan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan; dan
(3) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak, serta peran dan tanggung jawab petugas/kolektor yang masih kurang.

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Target penerimaan BPHTB Tahun 2025 adalah sebesar Rp8.955.203.933,00 dengan realisasi sebesar Rp9.489.443.730,00 atau 105,96%. Jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp11.026.603.526,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.537.159.796,00 atau 13,94%.

Adapun penyebab terjadinya penurunan penerimaan pajak ini salah satunya karena realisasi BPHTB sangat dipengaruhi oleh dinamika transaksi jual beli tanah dan bangunan di masyarakat. Pada Tahun 2025 terjadi perlambatan aktivitas transaksi properti, yang berdampak langsung terhadap penurunan pengurusan BPHTB. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu juga diakibatkan oleh kebijakan nasional yang memberikan pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

k) PBJT-Jasa Parkir

Pada tahun 2025, PBJT-Jasa Parkir ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.586.293,00 atau 102,93%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.742.361,00, terjadi peningkatan sebesar Rp11.843.932,00 atau 135,48%.

Peningkatan realisasi ini karena adanya penambahan objek pajak baru yang pada tahun 2025 yang sebelumnya belum terdata, yaitu parkir di tempat wisata Tambunai di Kecamatan Sungai Pua.

l) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB merupakan jenis pajak yang baru dikelola oleh Kabupaten/Kota mulai tahun 2025, sebagaimana yang diamanatkan pada Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Opsen PKB ini merupakan bentuk sinergi kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Target pajak PKB ditetapkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 973/30/Renbang-Bapenda/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Proporsi dan Perkiraan Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Masing-Masing Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2025, ditetapkan target Kabupaten Agam sebesar Rp21.459.046.658,00.

Dari target sebesar Rp21.459.046.658,00 pada tahun 2025, realisasi Opsen PKB sebesar Rp24.769.528.682,00 atau 115,55%. Realisasi melebihi dari target yang ditetapkan dikarenakan optimalnya kinerja pemungutan opsen PKB ini dan sinergi yang efektif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Agam.

m) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Sama halnya dengan Opsen PKB, Opsen BBNKB ini merupakan objek pajak yang baru diimplementasikan tahun 2025, dengan penetapan besaran target yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Opsen BBN KB untuk Kabupaten Agam Tahun 2025 sebesar Rp9.666.794.842,00, dengan realisasi sebesar Rp10.127.285.400,00 atau sebesar 104,76%. Capaian realisasi yang melebihi target ini juga merupakan hasil dari

kolaborasi yang terintegrasi, termasuk pertukaran data, kegiatan operasi bersama, serta sosialisasi terpadu, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Agam.

2) Pendapatan Retribusi Derah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2025 Rp99.084.402.933,00 atau 103,05% dari anggaran sebesar Rp96.151.303.597,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.145.295.143,00 atau 5,48% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp93.939.107.790,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.1.11
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Jasa Umum	94.549.163.597,00	97.599.739.623,00	103,22	92.712.863.490,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.202.140.000,00	993.066.400,00	82,60	921.221.900,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	400.000.000,00	491.596.910,00	122,89	305.022.400,00
Jumlah		**96.151.303.597,00**	**99.084.402.933,00**	**103,05**	**93.939.107.790,00**

Penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah terdiri dari:

a) Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp97.599.739.623,00 dan Rp92.712.863.490,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.886.876.133,00 atau 5,27% dari realisasi tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.12
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pelayanan Kesehatan	93.684.139.597,00	96.737.341.833,00	103,25	91.837.156.126,00
2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	732.128.000,00	792.270.790,00	108,21	811.116.364,00
3	Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	12.750.000,00	25,50	6.750.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	52.896.000,00	46.952.000,00	88,76	49.591.000,00
5	Pelayanan Kebersihan	30.000.000,00	10.425.000,00	34,75	8.250.000,00
Jumlah		**94.549.163.597,00**	**97.599.739.623,00**	**103,22**	**92.712.863.490,00**

Penerimaan dari Retribusi Jasa Umum, meliputi:

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2025 Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp93.684.139.597,00 dengan realisasi sebesar Rp96.737.341.833,00 atau

103,25%. Retribusi ini mengalami peningkatan sebesar Rp4.900.185.707,00 atau 5,34% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Retribusi ini merupakan retribusi yang berasal dari BLUD RSUD dan Puskesmas yang dikelola oleh Dinas Kesehatan.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pada tahun 2025 Retribusi Pelayanan Persampahan ditargetkan sebesar Rp732.128.000,00 dengan realisasi sebesar Rp792.270.790,00 atau 108,21%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.845.574,00 atau 2,32% dari penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp811.116.364,00. Pengelola Retribusi Pelayanan Persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

Pada tahun 2025 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.750.000,00 atau 25,50%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.000.000,00 atau 88,89% dari realisasi tahun sebelumnya. Pengelola Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yaitu Dinas Perhubungan.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar

Pada tahun 2024, Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp52.896.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.952.000,00 atau 8,76%. Realisasi retribusi ini mengalami penurunan sebesar Rp2.639.000,00 atau 5,32% dari realisasi tahun sebelumnya. Pengelola Retribusi Pelayanan Pasar yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan ketenagakerjaan.

(5) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pada tahun 2025, untuk Retribusi Pelayanan Kebersihan ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.425.000,00 atau 34,75%. Pengelola Penerimaan Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.

b) Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp993.066.400,00 dan Rp921.221.900,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp71.844.500,00 atau 7,80% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Adapun rincian realisasi pendapatan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.13
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	199.800.000,00	202.550.000,00	101,37	448.877.400,00
2	Pasar Grosir/Pertokoan	25.200.000,00	26.880.000,00	106,66	2.205.000,00
3	Retribusi Terminal	21.000.000,00	13.978.000,00	66,56	10.850.500,00
4	Tempat Khusus Parkir	83.800.000,00	38.474.000,00	45,91	22.169.000,00
5	Rumah Potong Hewan	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80	246.400.000,00

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
6	Tempat Rekreasi & Olahraga	235.000.000,00	172.359.000,00	73,34	140.895.000,00
7	Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.340.000,00	13.058.000,00	64,19	18.840.000,00
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	8.985.000,00
9	Retribusi Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	362.000.000,00	276.267.400,00	76,31	13.000.000,00
Jumlah		**1.202.140.000,00**	**993.066.400,00**	**82,60**	**921.221.900,00**

Penerimaan yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha. terdiri dari:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pada Tahun 2025 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp199.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp202.550.000,00 atau 101,37%. Jika dibandingkan dengan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp246.327.400,00 atau 54,88%.

SKPD Pengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp1.500.000,00.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berupa Retribusi Pemakaian Alat dengan realisasi sebesar Rp48.000.000,00.
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Retribusi Retribusi Pemakaian Ruangan dengan realisasi sebesar Rp143.800.000,00.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, berupa Retribusi Pemakaian Alat dengan realisasi sebesar Rp9.250.000,00.

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan perubahan dari nomenklatur Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha yang diubah pada tahun 2024. Pada Tahun 2025 Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ini ditargetkan sebesar Rp25.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp26.880.000,00 atau 106,66%, SKPD pengelola Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ini Adalah Dinas Perhubungan.

(3) Retribusi Retribusi Terminal

Pada tahun 2025, Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp21.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.978.000,00 atau 66,56%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.127.500,00 atau 28,82% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp10.850.500,00,00. Pengelola Retribusi Terminal adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

(4) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pada tahun 2025, Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp83.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.474.000,00 atau 45,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp22.169.000,00, realisasi retribusi ini mengalami peningkatan sebesar Rp16.305.000,00 atau 73,55%

SKPD Pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu:

- Dinas Kesehatan pada RSUD dengan Anggaran sebesar Rp15.000.000,00 tidak ada realisasinya.
- Dinas Perhubungan dengan realisasinya sebesar Rp9.300.000,00.
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dengan realisasi sebesar Rp29.174.000,00.

(5) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pada tahun 2025 Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp249.500.000,00 atau 99,80% dari target sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.100.000,00 atau 1,26% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp246.400.000,00. SKPD Pengelola Retribusi Rumah Potong Hewan yaitu Dinas Pertanian.

(6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pada tahun 2025, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditargetkan sebesar Rp235.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp172.359.000,00 atau 73,34%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp31.464.000,00 atau 22,33% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp140.895.000,00. SKPD Pengelola Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pada tahun 2025 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp20.340.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.058.000,00 atau 64,19%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.782.000,00 atau 30,69% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp18.840.000,00. SKPD Pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

(8) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Pada tahun 2025 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditargetkan sebesar Rp362.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp276.267.400,00 atau 76,31%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp263.267.400,00 dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp13.000.000,00.

SKPD Pengelola Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yaitu:

- Dinas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp5.000.000,00 tidak ada realisasinya;
- Dinas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar Rp120.611.400,00;
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan dengan realisasi sebesar Rp10.446.000,00;
- Dinas Pertanian dengan realisasi sebesar Rp9.600.000,00; dan

- Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp135.610.000,00.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pada Tahun 2025 dan 2024, Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp491.596.910,00 dan Rp305.022.400,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp186.574.510,00 atau 61,17% dari realisasi tahun 2024. SKPD Pengelola Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3) Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp13.807.124.697,00 dengan realisai sebesar Rp13.807.124.697,00 atau 100%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp83.542.230,00 atau 0,61% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp13.723.582.467,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025 berasal dari penerimaan Bagian Laba yang dibagikan pada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 Perseroan Terbatas Bank Nagari Agenda I (Pertama), Nomor: 144 Tanggal 21 Maret 2025.

4) Lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.321.409.176,00 dengan realisasi sebesar Rp7.263.859.132,78 atau 87,29%. Realisasi tahun ini mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp2.925.144.444,93 atau 28.71% dari realisasi tahun 2024, dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.14
Rincian Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	540.124.150,00	1.080,24	59.589.593,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	192.961.000,00	96,48	191.924.000,00
3	Jasa Giro	2.128.264.935,00	1.311.483.326,00	61,62	2.366.116.565,00
4	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	480.819.894,00	96,16	215.322.572,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.000.000.000,00	1.831.188.469,36	61,03	5.846.192.274,71
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	220.000.000,00	159.757.957,00	72,61	184.691.657,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	297.830.363,00	570.973.679,20	191,71	88.290.732,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	1.546.295.230,00	1.576.235.919,22	101,93	383.737.446,00
11	Pendapatan Jasa Layanan BLUD (Jasa Giro)	128.018.648,00	600.314.738,00	468,92	853.138.738,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**8.321.409.176,00**	**7.263.859.132,78**	**87,29**	**10.189.003.577,71**

Masih rendahnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025, disebabkan beberapa kendala antara lain:

1. Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak daerah ke tingkat kecamatan belum dilaksanakan secara efektif.
2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.
3. Pendataan wajib pajak dan pemutakhiran data pajak daerah serta retribusi daerah belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh.
4. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih lemah, karena belum diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi
5. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PAD terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
6. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah masih rendah.
7. Adanya perubahan ketentuan dan aturan yang harus ditindak lanjuti segera melalui Peraturan Kepala Daerah selama tahun 2025.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. Melakukan perluasan cakupan objek pajak daerah terutama terhadap sumber-sumber baru yang belum terjangkau sebelumnya.
2. Berupaya mendorong kecamatan untuk melakukan penagihan pajak dengan cara melalui monitorig dan evalusi serta pendampingan oleh personil Bapenda beserta penyediaan biaya operasional pemungutan pajak di lapangan untuk Kecamatan.
3. Pada tahun 2025, dilakukan pemutakhiran data PBB P2 dilapangan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Di tahun 2025 dipilih 3 Kecamatan yaitu Kec. Baso dan Kec. Canduang. Selain itu juga dilakukan pendataan ulang objek pajak makanan dan minuman, pajak reklame serta pajak air tanah, namun belum seluruh Kecamatan yang terjangkau.
4. Telah dilakukan kerjasama pengawasan bersama antara Bapenda dengan Ditjen Pajak kanwil Sumbar Jambi dan DJPK.
5. Telah dikirim personil untuk peningkatan kualitas perpajakan pada diklat yang diadakan oleh pihak eksternal seperti STAN dan DJP untuk pemeriksa pajak dan juru sita pajak serta mengusulkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM melalui anjab ABK.
6. Telah dikirim personil untuk peningkatan kualitas perpajakan pada diklat yang diadakan oleh pihak eksternal seperti STAN dan DJP serta mengusulkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM melalui anjab ABK.
7. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui media cetak dan media sosial, penyuluhan langsung ke lapangan (wajib pajak), melakukan pertemuan dengan wajib pajak dengan melibatkan aparatur dari Kejaksaan Negeri Agam dan Polres Agam.
8. Menyiapkan beberapa Peraturan Bupati sebagai amanat dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Selama tahun 2025. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.330.080.359.258,46 dengan realisasi sebesar Rp1.365.309.894.829,00 atau 102,65%. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam Rangka Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595//SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam. Pendapatan transfer dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.196.499.084.057,00 atau 102,88% dari anggaran sebesar Rp1.162.999.457.949,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Pada tahun 2025 dan 2024, Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp14.683.527.000,00 d n Rp12.317.757.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.15
Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.229.061.000,00	5.736.762.000,00	109,71	4.623.153.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	8.382.289.000,00	8.339.090.250,00	99,48	7.446.333.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	333.878.750,00	0,00	0,00
4	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	263.408.000,00	273.796.000,00	103,94	248.271.000,00
Jumlah		**13.874.758.000,00**	**14.683.527.000,00**	**105,83**	**12.317.757.000,00**

b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Sumber Daya Alam)

Pada tahun 2025 dan tahun 2024, dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) terealisasi sebesar Rp1.962.656.000,00 dan Rp10.837.882.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.16
Rincian Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Sumber Daya Alam) Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	210.884.000,00	220.664.000,00	104,64	252.064.000,00
2	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	583.619.000,00	678.787.000,00	116,31	1.145.552.000,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	32.034.000,00	34.759.000,00	108,51	8.058.204.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam	1.028.446.000,00	1.028.446.000,00	100,00	1.382.062.000,00

	(SDA) Perikanan				
	Jumlah	**1.854.983.000,00**	**1.962.656.000,00**	**105,80**	**10.837.882.000,00**

c) Bagi Hasil Lainnya

Pada tahun 2025 realisasi penerimaan dana bagi hasil lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Agam merupakan penerimaan DBH Sawit sebesar Rp3.307.702.000,00 atau 100% dari anggaran. Pada tahun 2024, realisasi DBH Sawit sebesar Rp8.058.204.000,00 dicatat pada rekening DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

d) Dana Alokasi Umum (DAU)

Selama tahun 2025 dan 2024, realisasi DAU masing-masing sebesar Rp893.639.603.961,00 dan Rp860.911.170.294,00. Nilai Realisasi DAU pada tahun 2025 meningkat sebesar Rp32.728.433.667,00 atau 3,80% dari realisasi tahun 2024.

Tabel 5.1.1.17
Rincian Dana Alokasi Umum Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	**Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya**	**773.645.573.000,00**	**805.467.182.954,00**	**104,11**	**860.911.170.294,00**
2	**Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya**	**89.681.204.000,00**	**88.172.421.007,00**	**98,32**	**112.591.657.294,00**
-	Penggajian formasi PPPK	6.272.472.000,00	4.763.689.007,00	75,95	28.952.515.294,00
-	Bidang Pendidikan	50.266.849.000,00	50.266.849.000,00	100,00	45.935.381.000,00
-	Bidang Kesehatan	33.141.883.000,00	33.141.883.000,00	100,00	14.606.555.000,00
-	Bidang Pekerjaan Umum				23.097.206.000,00
	Jumlah	**863.326.777.000,00**	**893.639.603.961,00**	**103,51**	**860.911.170.294,00**

e) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp280.635.237.949,00 dan terealisasi sebesar Rp282.905.595.096,00 atau 100,81%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.489.037.467,00 atau 4,23% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp295.394.632.563,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.18
Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
I	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**16.072.042.000,00**	**14.276.769.310,00**	**88,82**	**58.347.668.989,00**
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.560.271.000,00	1.560.271.000,00	100,00	1.175.015.509,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	321.673.000,00	306.107.926,00	95,16	3.657.435.000,00

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	236.224.000,00	230.589.459,00	97,61	3.399.533.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.159.623.000,00	7.159.623.000,00	100,00	1.105.631.633,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	763.948.235,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3.600.079.000,00	3.437.169.398,00	95,47	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	3.194.172.000,00	1.583.008.527,00	49,56	506.892.650,00
8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	10.039.246.147,00
9	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.498.000.156,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	14.895.121.700,00
11	DAK Fisik-Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	7.764.275.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	2.747.000.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	110.400.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan danKB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	10.685.169.959,00
II	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**264.563.195.949,00**	**268.628.825.786,00**	**101,53**	**237.046.963.574,00**
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	60.411.800.000,00	60.115.721.137,00	99,50	60.896.188.737,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.865.750.000,00	2.865.750.000,00	100,00	3.012.500.000,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	164.619.153.000,00	172.769.056.133,00	104,95	137.328.264.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.142.477.000,00	566.500.000,00	49,59	3.265.843.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.626.800.000,00	5.587.217.526,00	99,29	5.608.909.700,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.099.400.000,00	3.092.515.021,00	99,77	3.121.300.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	992.220.255,00	992.220.255,00	100,00	655.476.970,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.547.158.924,00	5.547.158.924,00	100,00	5.074.211.343,00
8	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	575.284.245,00
9	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	1.095.375.880,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	421.654.680,00
11	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	0,00	
12	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	386.514.338,00	386.514.358,00	100,00	367.218.032,00
	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.165.750.000,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	718.618.575,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.234.791.789,00	4.234.791.789,00	100,00	7.464.989.314,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	628.728.000,00	628.728.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.491.532.643,00	11.491.532.643,00	100,00	7.441.129.098,00
	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	351.120.000,00	351.120.000,00	100,00	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) (I+II)		**280.635.237.949,00**	**282.905.595.096,00**	**100,81**	**295.394.632.563,00**

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp98.028.894.550,00 atau sebesar 97,12% dari anggaran sebesar Rp100.939.408.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.650.630.450,00 atau 3,59%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yakni sebesar Rp101.679.525.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.19
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Desa	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	97,12	94.152.458.000,00
2	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	7.527.067.000,00
Jumlah		**100.939.408.000,00**	**98.028.894.550,00**	**97,12**	**101.679.525.000,00**

Pendapatan ini tidak terealisasi 100% pada tahun 2025, disebabkan karena tidak salurnya Dana Desa ***Non Earmark Tahap II*** sebesar Rp2.910.513.450,00. Kondisi ini terjadi sebagai akibat dari tidak terakomodirnya pengajuan dokumen persyaratan salur Tahap II untuk Dana Desa Non Earmark, oleh pemerintah nagari di Kabupaten Agam melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) TKD. Dari kendala yang ditemui dan setelah melakukan beberapa kali konsultasi dengan KPPN Bukittinggi (konsultasi terakhir pada tanggal 13 November 2025), aplikasi tetap tidak bisa digunakan untuk pengajuan dokumen persyaratan salur Tahap II. Kemudian terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 25 November 2025. Berdasarkan ketentuan pada PMK ini, pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II paling lambat tanggal 17 September 2025, jika melewati tanggal ini maka Dana Desa Non Earmark tidak akan disalurkan kepada pemerintah desa.

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut:

a) **Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi**

Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp63.741.493.309,46 dengan realisasi sebesar Rp64.881.946.222,00 atau 101.79%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.192.402.846,00 atau

18,97% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp80.074.349.068,00. Rincian pendapatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.20
Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.202.076.974,00	5.339.563.186,00	102,64	18.872.307.712,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.860.872.309,00	1.981.119.814,00	106,46	8.603.716.296,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.573.871.943,46	33.153.744.928,00	105,00	29.085.373.814,0
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	624.522.301,00	734.505.387,00	117,61	451.565.111,00
5	Bagi hasil pajak rokok	24.480.149.782,00	23.673.012.907,00	96,70	23.061.386.135,00
Jumlah		**63.741.493.309,46**	**64.881.946.222,00**	**101,79**	**80.074.349.068,00**

Penerimaan pendapatan selama tahun 2025 sebesar Rp64.881.946.222,00 atau 67,68% sudah termasuk penerimaan piutang tahun 2024 yang merupakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil untuk Pemerintah Kabupaten Agam selama tahun 2024 sebesar Rp27.071.506.726,00. Penyampaian Pagu Bagi Hasil Pajak Prov Pada APBD-P Prov Sumbar TA 2025 disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Nomor : 900.1.14.3/621/Sekrt/BPKAD/2025 tanggal 18 September 2025.

b) Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp5.899.970.000,00 atau 245,83% dari anggaran sebesar Rp2.400.000.000,00. Rincian pendapatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.21
Rincian Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	750.000.000,00	4.179.970.000,00	557,33	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000,00	1.720.000.000,00	104,24	0,00
-	Pemkab Lahat		100.000.000,00		0,00
-	Pemkab Paser		1.500.000.000,00		0,00
-	Pemka. Solok Selatan		20.000.000,00		0,00
-	Peduli Bencana Sumut,Aceh,Sumbar Donasi Masyarakat Kab Lahat		100.000.000,00		0,00
Jumlah		**2.400.000.000,00**	**5.899.970.000,00**	**245,83**	**0,00**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan Bantuan Keuangan untuk Bantuan Bencana Alam di Kabupaten Agam yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan untuk penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Agam selama tahun 2025. Penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan melalui mekanisme Belanja Tidak Terduga yang dialokasikan pada pergeseran setelah Perubahan APBD tahun anggaran 2025.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang bersumber antara lain dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2025, pendapatan ini terealisasi sebesar Rp4.000.004.000,00 dari target sebesar Rp4.000.000.000,00. Sementara untuk tahun 2024, pendapatan ini terealisasi sebesar Rp738.000.000,00 atau 98,40% dari target sebesar Rp750.000.000,00.

Rincian dari Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1.22
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	738.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**4.000.000.000,00**	**4.000.004.000,00**	**100,00**	**738.000.000,00**

Dana Darurat yang ditargetkan pada tahun anggaran 2025 merupakan dana bantuan dari Presiden bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdampak bencana alam yang melanda wilayah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat pada akhir tahun 2025. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas yang terkait dengan penanganan bencana alam, khususnya kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah kabupaten/kota seperti untuk percepatan pemulihan pasca bencana, tanggap darurat, serta mendukung pembangunan daerah yang terdampak bencana. Dana Darurat diterima Pemerintah Kabupaten Agam melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Agam sebesar Rp4.000.000.000,00 pada tanggal 12 Desember 2025.

5.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.300.293.090.863,97 dan Rp1.353.024.954.397,00. Realisasi Belanja Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.731.863.533,03 atau 3,90%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.01
Rincian Belanja Tahun 2025 dan 2024

Belanja Daerah		2025			2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
a.	Belanja Operasi	1.296.434.311.161,82	1.237.459.769.264,12	95,45	1.210.859.160.870,00

b.	Belanja Modal	70.145.591.385,46	56.310.843.328,00	80,28	139.007.975.111,00
c.	Belanja Tak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	58,68	3.157.818.416,00
	Jumlah	**1.377.694.861.576,19**	**1.300.293.090.863,97**	**94,38**	**1.353.024.954.397,00**

Perbandingan masing-masing jenis belanja terhadap belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 dan 2024 digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 5.2.01
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024

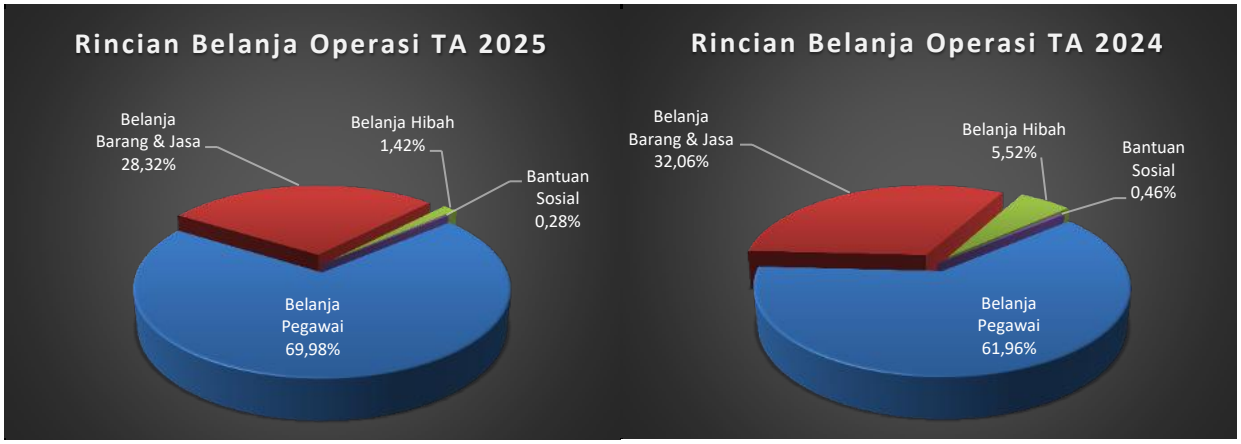

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.237.459.769.264,12 dan Rp1.210.859.160.870,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 bertambah sebesar Rp26.600.608.394,12, atau 2,20% dari realisasi belanja pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.02
Rincian Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Operasi	2025		%	2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Belanja Pegawai	875.183.897.096,37	866.021.568.444,12	98,95	750.224.137.285,00
2.	Belanja Barang & Jasa	397.902.349.897,45	350.426.013.362,00	88,07	388.176.440.957,00
3.	Belanja Hibah	18.359.064.168,00	17.590.437.458,00	95,81	66.843.582.628,00
4.	Bantuan Sosial	4.989.000.000,00	3.421.750.000,00	68,59	5.615.000.000,00
Jumlah		**1.296.434.311.161,82**	**1.237.459.769.264,12**	**95,45**	**1.210.859.160.870,00**

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati.

Belanja Pegawai tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp875.183.897.096,37 dengan realisasi sebesar Rp866.021.568.444,12 atau 98,95%. Realisasi tersebut bertambah sebesar Rp115.797.431.159,12 atau 15,44% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp750.224.137.285,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.03
Rincian Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Pegawai	Tahun 2025		Rasio %	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	535.670.468.546,50	528.577.332.441,12	98,68	504.414.798.559,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	277.454.524.887,87	278.364.064.458,00	100,33	77.440.634.821,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	146.827.997.297,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	20.199.551.260,00	19.980.661.961,00	98,92	17.158.200.732,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.003.391.115,00	864.613.270,00	86,17	387.068.089,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	952.000.000,00	802.385.743,00	84,28	776.635.980,00
7	Belanja Pegawai BLUD	39.903.961.287,00	37.432.510.571,00	93,81	3.218.801.807,00
	Jumlah	**875.183.897.096,37**	**866.021.568.444,12**	**98,95**	**750.224.137.285,00**

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp397.902.349.897,45 dengan realisasi sebesar Rp350.426.013.362,00 atau 88.07%. Realisasi tersebut berkurang sebesar Rp37.750.427.595,00 atau 9,73% dari realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp388.176.440.957,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.04
Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Barang	Tahun 2025		Rasio %	Tahun 2024 Realisasi Rp
		Anggaran Rp	Realisasi Rp		
1	Belanja Barang	71.808.378.009,70	61.596.825.442,00	85,78	67.096.493.920,00
2	Belanja Jasa	149.312.901.552,01	132.985.071.816,00	89,06	127.606.648.974,00
3	Belanja Pemeliharaan	11.698.695.237,40	9.368.756.932,00	80,08	7.739.589.970,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	33.668.508.350,73	30.097.217.498,00	89,39	47.728.396.373,00
5	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	13.384.936.400,00	10.806.164.813,00	80,73	7.672.058.463,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	49.657.585.443,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	50.242.317.421,61	47.593.235.946,00	94,73	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.764.900.000,00	4.607.050.000,00	68,10	0,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.021.712.926,00	53.371.690.915,00	87,46	80.675.667.814,00
	Jumlah	**397.902.349.897,45**	**350.426.013.362,00**	**88,07**	**388.176.440.957,00**

Pada tahun 2025, realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja melebihi pagu anggaran, dimana realisasi belanjanya sebesar Rp2.493.718.023,00 atau 100,57% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp2.479.391.158,00. Hal tersebut terjadi karena ketidaksesuaian jadwal perubahan pada RKAS BOS dan keterlambatan pengajuan anggaran perubahan dari sekolah.

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp18.359.064.168,00 dengan realisasi sebesar Rp17.590.437.458,00 atau 95,81%. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp49.253.145.170,00 atau 73,68% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp66.843.582.628,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.05
Rincian Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Hibah	Tahun 2025		Rasio %	Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga. Organisasi Kemasyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	4.155.500.000,00	3.810.892.515,00	91,71	61.252.913.542,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	4.818.365.556,00	4.796.912.956,00	99,55	4.721.047.723,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	872.497.812,00	872.497.812,00	100,00	869.621.363,00
	Belanja Hibah Dana BOSP	8.512.700.800,00	8.110.134.175,00	95,27	0,00
Jumlah		**18.359.064.168,00**	**17.590.437.458,00**	**95,81**	**66.843.582.628,00**

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.989.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.421.750.000,00 atau 68,59%. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp2.193.250.000,00 atau 39,06% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.615.000.000,00, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.06
Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.989.000.000,00	3.421.750.000,00	68,59	5.615.000.000,00
	Jumlah	**4.989.000.000,00**	**3.421.750.000,00**	**68,59**	**5.615.000.000,00**

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dengan realisasi sebesar Rp3.421.750.000,00 tersebar pada OPD berikut:

1. Sekretariat Daerah pada bagian Kesra terealisasi sebesar Rp1.909.750.000,00. dari anggaran Rp3.477.000.000,00.
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan realisasi sebesar Rp1.512.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.512.000.000,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan Aset Tetap Daerah. Belanja Modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp70.145.591.385,46 dengan realisasi sebesar Rp56.310.843.328,00 atau 80,28%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp82.697.131.783,00 atau 59,49% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp139.007.975.111,00, dengan rincian sebai berikut.

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp35.055.539.686,56 dengan realisasi sebesar Rp27.846.028.860,00 atau 79,43%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.329.380.644,00 atau 4,56% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp29.175.409.504,00. Adapun rincian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 dan tahun 2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.07

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	BM Pengadaan Alat-alat Besar	5.255.000,00	0,00	0,00	0,00
2	BM Pengadaan Modal Alat Angkutan	3.193.355.000,00	2.988.800.000,00	93,59	2.995.292.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	60.191.095,00	50.746.100,00	84,31	1.149.888.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	184.540.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.721.738.740,00	3.055.462.513,00	82,10	1.570.039.043,00
6	Belanja Modal Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar	535.082.818,00	177.868.503,00	33,24	66.010.000,00
7	BM Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.162.525.910,00	389.243.000,00	18,00	8.014.680.714,00
8	BM Pengadaan Alat Laboraturium	296.761.380,60	290.075.559,00	97,75	650.261.170,00
9	Belanja Modal Komputer	3.596.949.255,96	2.352.484.729,00	65,40	2.455.879.868,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	1.989.200,00
11	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	125.200.000,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	5.286.375.373,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.153.794.507,00	5.836.914.566,00	94,85	
13	BM Peralatan dan Mesin BLUD	15.329.885.980,00	12.704.433.890,00	82,87	6.675.254.136,00
Jumlah		**35.055.539.686,56**	**27.846.028.860,00**	**79,43**	**29.175.409.504,00**

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.361.821.684,90 dengan realisasi sebesar Rp7.072.853.014,00 atau 84,59%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.177.565.065,00 atau 70,83% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp24.250.418.079,00. Adapun rincian dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2025 dan tahun 2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.08
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	7.422.563.284,90	6.306.913.218,00	84,97	22.629.553.971,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	49.964.417,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	939.258.400,00	765.939.796,00	81,55	1.570.899.691,00
	Jumlah	**8.361.821.684,90**	**7.072.853.014,00**	**84,59**	**24.250.418.079,00**

3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JJI) tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp20.631.351.368,00 dengan realisasi sebesar Rp15.512.561.406,00 atau 75,19%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp63.710.066.093,00 atau 80,42% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp79.222.627.499,00. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal JJI pada tahun 2025 dan tahun 2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.09
Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	13.269.390.250,00	12.478.154.682,00	94,04	55.846.049.272,00
2	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.	2.175.653.520,00	274.136.410,00	12,60	14.085.442.377,00
4	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	1.200.000.000,00	1.198.036.000,00	99,84	9.281.145.850,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	75.000.000,00	74.986.000,00	99,98	0,00
6	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	16.500.000,00	16.479.450,00	99,88	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	892.000.000,00	829.082.000,00	92,95	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.807.598,00	2.797.200,00	99,63	0,00
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	3.000.000.000,00	638.889.664,00	21,30	9.990.000,00
Jumlah		**20.631.351.368,00**	**15.512.561.406,00**	**75,19**	**79.222.627.499,00**

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.871.878.646,00 dengan realisasi sebesar Rp5.657.400.048,00 atau 96,35%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp168.758.719,00 atau 3,07% dari tahun 2024 sebesar Rp5.488.641.329,00. Adapun rincian realisasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 dan 2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.10
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Belanja Modal Alat Musik	29.150.000,00	29.026.500,00	99,58	27.500.000,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	99.360.000,00	99.069.565,00	99,71	378.674.750,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	5.082.466.579,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	36.650.000,00	36.250.000,00	98,91	0,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	5.706.718.646,00	5.493.053.983,00	96,26	0,00
	Jumlah	**5.871.878.646,00**	**5.657.400.048,00**	**96,35**	**5.488.641.329,00**

5) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp225.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp222.000.000,00 atau 98,67%. Realisasi tersebut mengalami

penurunan sebesar Rp648.878.700,00 atau 74,51% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp870.878.700,00. Adapun rincian realisasi dari Belanja Modal Aset Aset Lainnya tahun 2025 dan 2024 tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.11
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	225.000.000,00	222.000.000,00	98,66	450.000.000,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	00,00	0,00	0,00	420.878.700,00
	Jumlah	**225.000.000,00**	**222.000.000,00**	**98,66**	**870.878.700,00**

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp11.114.959.028,91 dan direalisasikan sebesar Rp6.522.478.271,85 atau 58,68%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.364.659.855,85 atau 106,55% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.157.818.416,00, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2. 12
Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 dan 2024

Belanja Tidak Terduga	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	11.114.959.028,91	6.522.478.271,85	58,68	3.157.818.416,00
Jumlah	**11.114.959.028,91**	**6.522.478.271,85**	**58,68**	**3.157.818.416,00**

Belanja Tidak Terduga tahun 2025 digunakan sepenuhnya untuk penanganan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Agam selama tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2. 13
Rincian Pengunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Penanganan bencana alam banjir di Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua Kab Agam	150.000.000,00
2	Penanganan bencana alam banjir bandang di Jorong Anak Air Dadok Nagari Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung	494.153.705,00
3	Penanganan Biaya Hidup dan Biaya Proses Kepindahan Masyarakat Relokasi Korban Bencana Kabupaten Agam Tahun 2025	93.494.324,00
4	Tanggap darurat kejadian bencana alam tanah longsor di Jorong Lurah Nagari Panampung Kecamatan Ampek Angkek (Perbaikan abutmen Jembatan Batang Gadang)	67.776.000,00
5	Tanggap darurat kejadian bencana alam tanah longsor di Jorong Lambeh Nagari Ampek Koto Palembayan Kecamatan Palembayan (Pekerjaan Pengaman Badan Jalan)	72.024.834,00
6	Tanggap darurat kejadian bencana alam tanah longsor di Jorong Koto Tinggi Nagari Ampek Koto Palembayan Kecamatan Palembayan (Pekerjaan Badan Jalan)	77.035.571,00
7	Tanggap darurat kejadian bencana alam banjir di Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek (Pekerjaan Normalisasi Sungai Batang Katiak Nagari Batu Taba)	189.695.500,00
8	Tanggap darurat kejadian bencana alam kebakaran hutan dan lahan di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso	55.313.400,00
9	Penanganan tanggap darurat banjir, banjir bandang,tanah longsor dan angin kencang di Kab Agam tahun 2025 (Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 Tahap I)	1.072.430.000,00

10	Penanganan tanggap darurat banjir,banjir bandang,tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Agam tahun 2025 (Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 Tahap II)	3.522.823.840,29
11	Penanganan tanggap darurat banjir,banjir bandang,tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Agam tahun 2025, bencana yang terjadi sebelum Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025 Tahap II)	727.731.097,56
JUMLAH		**6.522.478.271,85**

Untuk Tahun Anggaran 2025, Belanja Tidak Terduga dialokasikan pada APBD Murni sebesar Rp4.714.950.028,91. Namun kemudian terjadi pergeseran anggaran sebesar Rp6.400.000,00 sehingga alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga menjadi Rp11.114.959.028,91. Penambahan alokasi belanja ini bersumber dari Dana Darurat (bantuan presiden untuk bencana yang melanda Kabupaten Agam pada Akhir Tahun 2025) dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp750.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.650.000.000,00.

5.1.3 Transfer

Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah nagari. Transfer tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp200.038.916.364,00 dan direalisasikan sebesar Rp194.893.642.017,00 atau 97,43%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp13.069.535.417,00 atau 7,19% dari realisasi transfer tahun 2024 sebesar Rp181.824.106.600,00. Adapun rincian realisasi Transfer tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3.01
Rincian Transfer Tahun 2025 dan 2024

Belanja Transfer	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari	11.197.982.264,00	9.647.487.656,00	86,15	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	188.840.934.100,00	185.246.154.361,00	98,10	181.824.106.600,00
Jumlah	**200.038.916.364,00**	**194.893.642.017,00**	**97,43**	**181.824.106.600,00**

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari merupakan dana untuk Nagari yang bersumber dari APBD yang berasal dari realisasi pajak dan retribusi daerah dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp9.647.487.656,00. Nilai tersebut merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2023 dan tahun 2024 yang sudah diakui sebagai utang belanja pada tahun sebelumnya dengan rincian:

1. DBH Tahun 2023 sebesar Rp4.754.232.677,00 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2024.
2. DBH Tahun 2024 sebesar Rp4.893.254.979,00 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2025.

Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa tidak terealisasi 100% dan menyisakan anggaran sebesar Rp5.145.274.347,00 pada tahun 2025, disebabkan karena:

1. penerimaan dana desa tidak terealisasi sebesar Rp2.910.513.450,00, sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan Pendapatan Transfer-Dana Desa sebelumnya, dan

2. tidak direalisasikannya belanja bantuan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADN) pada 4 (empat) Nagari sebesar Rp684.266.289,00 karena tidak terpenuhinya persyaratan salur ADN tahap III sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati Agam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 16 Desember 2025 mengacu pada Surat Sekretaris Daerah Nomor 400.10.2.4/774/DPMD/XI/2025 Perihal: Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Nagari Tiku Lima Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, sebesar Rp225.284.908,00;
   b. Nagari Sipinang, Kecamatan Palembayan sebesar Rp67.467.512,00;
   c. Nagarai Salareh Aia, Kecamatan Palembayan sebesar Rp99.414.605,00; dan
   d. Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari sebesar Rp292.099.264,00.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.01
Rincian Pembiayaan Tahun 2025 dan 2024

No	Pembiayaan	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Penerimaan Pembiayaan	39.578.636.185,73	39.578.636.185,73	100,00	48.620.328.848,02
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	**38.578.636.185,73**	**38.578.636.185,73**	**100,00**	**47.620.328.848,02**

Realisasi pembiayaan netto didapat dari penerimaan pembiayaan yang dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan netto tahun 2025 dan tahun 2024, masing-masing adalah sebesar Rp38.578.636.185,73 dan Rp47.620.328.848,02 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp39.578.636.185,73 dan terealisasi sebesar Rp39.578.636.185,73 atau 100,00%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.041.692.662,29 atau 18,60% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp48.620.328.848,02.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pada tahun 2025 pengeluaran pembiayaan direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% dalam bentuk penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari. Realisasi tersebut sama dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk tahun 2025 dan tahun 2024, pembiayaan netto adalah sebesar Rp38.578.636.185,73 dan Rp47.620.328.848,02.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menunjukkan kelebihan pendapatan dan penerimaan atas belanja dan pengeluaran daerah. Berdasarkan perhitungan APBD tahun 2025 dan tahun 2024, menunjukkan bahwa SiLPA tahun 2025 dan SiLPA tahun 2024 masing-masing sebesar Rp115.487.873.110,54 dan Rp39.442.141.655,73.

Terdapat koreksi SiLPA tahun 2025 dan 2024 yang merupakan penyesuaian Silpa Tahun Lalu sebagai akibat kekurangan atau kelebihan pengakuan pencatatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi SiLPA pada tahun 2025 sebesar Rp24.000,00, merupakan hasil verikasi belanja oleh Tim ARKAS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang menambah kembali Kas Dana BOSP dalam tahun berjalan.
- Koreksi SiLPA pada tahun 2024 sebesar Rp136.494.530,00, merupakan koreksi atas dana BLUD, berupa kelebihan pengakuan Belanja pada belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lubuk Basung.

Dengan terjadinya koreksi SiLPA tahun lalu, maka SiLPA setelah koreksi pada tahun 2025 dan 2024, masing-masing menjadi Rp115.487.897.110,54 dan Rp39.578.636.185,73. Nilai SILPA tahun 2025 dan 2024, tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5.01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 dan 2024

No	Perhitungan Daerah	Tahun 2025			Tahun 2024 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Pendapatan Daerah	1.539.155.141.754,46	1.572.095.969.805,78	102,14	1.526.670.873.804,71
2	Belanja	1.377.694.861.576,19	1.300.293.090.863,97	94,38	1.353.024.954.397,00
3	Transfer	200.038.916.364,00	194.893.642.017,00	97,43	181.824.106.600,00
4	**Surplus (Defisit)**	**(38.578.636.185,73)**	**76.909.236.924,81**	**(199,36)**	**(8.178.187.192,29)**
5	Penerimaan Pembiayaan	39.578.636.185,73	39.578.636.185,73	100,00	48.620.328.848,02
6	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
7	**Pembiayaan Netto**	**38.578.636.185,73**	**38.578.636.185,73**	**100,00**	**47.620.328.848,02**
8	**SiLPA sebelum koreksi**		**115.487.873.110,54**		**39.442.141.655,73**
9	Koreksi SiLPA		24.000,00		136.494.530,00
10	**SiLPA setelah koreksi**		**115.487.897.110,54**		**39.578.636.185,73**

Adapun rincian SiLPA tahun 2025 dan tahun 2024, tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5.02
Rincian SiLPA yang tersedia Per 31 Des 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru	2.453.410.144,00	0,00	100,00
2	Sisa DAK Fisik (Reguler dan Penugasan)	1.309.378.631,00	0,00	100,00
3	Sisa DAK Non Fisik	2.208.357.724,00	0,00	100,00
4	Sisa Dana tambahan penghasilan	235.572.004,00	0,00	100,00
5	Sisa DBH CHT	251.441.644,00	0,00	100,00
6	Sisa DBH Sawit	1.756.465.088,00	0,00	100,00
7	Sisa DAU Arahan (yang ditentukan penggunaannya)	10.848.737.202,00	3.372.232.042,59	221,71
8	Kas Daerah Murni (yang berasal dari sisa DAU. Koreksi SiLPA dan PAD. termasuk yang masih berada pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan)	28.153.992.561,40	78.150.123,00	35925,53
9	Sisa TPG dari DAU Tambahan	32.290.020.000,00	0,00	100,00
10	Sisa Keterlanjuran Pembayaran Gaji Pokok Sertifikasi	4.589.135,00	0,00	100,00
11	Sisa Bantuan Keuangan Khusus	5.899.970.000,00		
12	Sisa Dana darurat (Banpes)	694.395.399,00	0,00	100,00
13	Setoran sekolah Regroping	14.400.000,00		
14	Kas di BLUD RSUD	20.617.288.700,53	25.763.324.039,53	(19,97)
15	Kas di BLUD Dinkes (Puskesmas)	5.324.937.365,00	7.522.721.413,00	(29,22)
16	Kas Dana BOK Puskesmas	3.095.676.388,00	2.375.719.357,00	30,30
18	Kas pada Bendahara BOSP	329.265.124,61	466.489.210,61	(29,42)
	Jumlah SiLPA	**115.487.897.110,54**	**39.578.636.185,73**	**191,79**

Rincian SiLPA tahun 2024 diatas, pada kondisi sebenarnya terdapat sisa Dana Transfer Umum serta Dana Transfer Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp40.111.150.437,41, dengan rincian sebagai berikut:

➢ DAU Arahan (yang ditentukan penggunaannya)	Rp	3.711.722.645,41
➢ Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit	Rp	1.512.962.770,00
➢ Insentif Fiskal	Rp	1.726.024.969,00
➢ Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	1.107.056.997,00
➢ Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	6.330.308.087,00
➢ Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	205.599.669,00
➢ Dana THR Guru Tahun 2024	Rp	25.517.475.300,00
Jumlah SiLPA yang bersumber dari Dana Transfer yang telah ditentukan penggunaannya	**Rp**	**40.111.150.437,41**

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan SILPA Tahun 2025 dan 2024 diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. DAU Arahan (yang ditentukan penggunaannya) sebesar Rp10.848.737.202,00

Sisa tersebut merupakan sisa DAU Arahan yang tersedia di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dengan rincian:

➢ DAU Kesehatan Penyaluran Tahun 2025	Rp	3.154.768.400,00

➢ DAU Pendidikan Penyaluran Tahun 2025	Rp	5.149.677.131,00
➢ Sisa DAU Kesehatan Penyaluran Tahun 2024	Rp	27.036.228,00
➢ Sisa DAU Pekerjaan Umum Penyaluran Tahun 2024	Rp	2.028.352.574,00
➢ Sisa DAU Pendidikan Penyaluran Tahun 2024	Rp	488.902.869,00
Jumlah SiLPA	**Rp**	**10.848.737.202,00**

b. DAK Non Fisik sebesar Rp4.897.339.872,00

Sisa tersebut merupakan penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2025 dan kompensasi dari Sisa DAK Non Fisik Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut.

➢ Sisa TPG Penyaluran Tahun 2024	Rp	2.453.410.144,00
➢ Sisa Tamsil Penyaluran Tahun 2024	Rp	235.572.004,00
➢ Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Rp	215.531.028,00
➢ Bantuan Operasional Kesehatan	Rp	1.431.951.283,00
➢ BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Rp	63.127.815,00
➢ Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Rp	463.268.768,00
➢ Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp	2.938.830,00
➢ Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	31.540.000,00
Jumlah SiLPA	**Rp**	**4.897.339.872,00**

Sejak Tahun 2025, pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) kepada guru langsung dilakukan melalui RKUN ke rekening masing-masing Guru sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah. Sehingga, sisa DAK Non Fisik berupa TPG dan Tamsil tahun 2024 tersebut belum dilakukan penyaluran. Selanjutnya pada tahun 2026, untuk menindaklanjuti surat dari Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-3/PK/PK.3/2026 tanggal 17 Maret 2026 perihal Penjelasan atas Penggunaan Sisa Dana Tunjangan Guru ASND TA 2024 di RKUD untuk Pembayaran Kurang Salur Tunjangan Guru ASND Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia tentang Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Tahun 2025, maka sisa dana ini telah disalurkan pada tahun 2026 sebesar Rp1.346.826.174,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) SP2D Nomor 13.08/04.0000025/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P2 /3/2026 Tanggal 17 Maret 2026 sebesar Rp753.687.688,00 untuk pembayaran kekurangan (Carry Over) TPG Tahun 2025 bagi PNS Pengawas dan Guru TK, SD dan SMP se-Kabupaten Agam.
2) SP2D Nomor 13.08/04.0000026/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P2 /3/2026 Tanggal 17 Maret 2026 sebesar Rp445.436.888,00 untuk pembayaran Kekurangan (Carry Over) TPG Tahun 2025 bagi PPPK Guru TK, SD dan SMP se-Kabupaten Agam.
3) SP2D Nomor 13.06/04.000039/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P3 /5/2026 tanggal 7 Mei 2026 sebesar Rp147.701.598,00 untuk pembayaran kekurangan (Carry Over) TPG Tahap 2 Tahun 2025 bagi PNS Pengawas dan Guru TK, SD dan SMP se Kabupaten Agam.

Sehingga dengan demikian, per tanggal 7 Mei 2026 sisa DAK Non Fisik TPG dan Tamsil yang tersedia di Kas Daerah adalah masing-masing sebesar Rp1.106.583.970,00 dan Rp235.572.004,00. Adapun sisa DAK Non Fisik lainnya akan dilakukan kompensasi pada penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2026.

c. DAK Fisik sebesar Rp1.309.378.631,00

Sisa tersebut merupakan penyaluran DAK Fisik Tahun 2025 sebesar Rp170.182.495,00 dan sisa DAK Fisik Tahun 2024 sebesar Rp1.139.196.136,00, dengan rincian sebagai berikut.

I.	**Disdikbud**				
➢	Sub Bidang PAUD			Rp	9.848.387,00
	Sisa 2025	Rp	2.149.187,00		
	Sisa 2024	Rp	7.699.200,00		
➢	Sub Bidang SD			Rp	48.334.400,00
	Sisa 2025	Rp	7.983.400,00		
	Sisa 2024	Rp	40.351.000,00		
➢	Sub Bidang SMP			Rp	471.000,00
	Sisa 2025	Rp	29.700,00		
	Sisa 2024	Rp	441.300,00		
➢	Sub Bidang SKB (Sisa 2024)			Rp	7.632.450,00
II.	**Dinkes**				
➢	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan			Rp	8.877.301,00
	Sisa 2025	Rp	4.815.500,00		
	Sisa 2024	Rp	4.061.801,00		
III.	**Dinas KBP3A**				
➢	Sub Bidang Keluarga Bencana			Rp	85.093.180,00
	Sisa 2025	Rp	85.085.858,00		
	Sisa 2024	Rp	7.322,00		
IV.	**Dinas PUTR**				
➢	Sanitasi (Sisa 2025)			Rp	70.118.850,00
➢	Bidang Jalan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Sisa 2024)			Rp	144.300,00
➢	Bidang Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (Sisa 2024)			Rp	153.270.850,00
➢	Sub Bidang Irigasi- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Sisa 2024)			Rp	10.275.000,00
V.	**Dinas Pertanian**				
➢	Bidang Pertanian- Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Sisa 2024)			Rp	138.887.650,00
VI.	**Dinas Pariwisata**				
➢	Bidang Pariwisata (Sisa 2024)			Rp	483.687.263,00
VII.	**DKPP**				
➢	Bidang Kelautan dan Perikanan (Sisa 2024)			Rp	292.738.000,00
Jumlah SiLPA				**Rp**	**1.309.378.631,00**

Diantara nilai tersebut, terdapat sisa pekerjaan fisik tahun 2024 yang tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut.

1) Sisa dana Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya pada Dinas Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp166.100.000,00 dan hanya terealisasi sebesar Rp41.212.500,00. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Pengadaan Tong Silase dengan target 302 unit, realisasi 75 unit dan tidak terealisasi 227 unit. Tidak terealisasinya pengadaan ini disebabkan karena Tong Silase tidak cukup tersedia sesuai spesifikasi, sampai waktu pelaksanaan kontrak berakhir.
2) Sisa Dana pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifiksasi Lokasi, pada Dinas Pertanian. Kegiatan tersebut merupakan Perencanaan Screenhouse Modern dengan anggaran sebesar Rp40.000.000,00. Kegiatan tersebut telah diproses pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan sudah berkontrak dengan dengan Pihak Ketiga, namun disarankan untuk tidak dilaksanakan dan dibayarkan karena bangunan screenhouse adalah barang rakitan yang pengadaan komponennya terpasang langsung bentuk barang jadi / built up, jadi tidak membutuhkan perencanaan.
3) Sisa dana Sub Kegiatan Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota pada Dinas Pariwisata sebesar Rp483.687.263,00. Kegiatan tersebut merupakan Pembangunan Boardwalk yang gagal atau tidak terlaksana, karena tidak adanya kesepakatan dalam upaya pembebasan lahan dengan pemilik lahan dengan alasan mereka tidak menyetujui pembangunan yang akan dilaksanakan di Kawasan Tapian Kualo.

Adapun sisa dana lainnya merupakan sisa dana operasional penunjang yang selanjutnya akan dilakukan rekonsiliasi ke KPPN untuk diusulkan menjadi kegiatan lainnya di DAK Fisik.

d. Sisa TPG dari DAU Tambahan sebesar Rp32.290.020.000,00

Nilai tersebut merupakan DAU Tambahan untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13 bgai Guru ASN Daerah yang masuk pada Kas Daerah tanggal 31 Desember 2025. Nilai tersebut telah direalisasikan pada Tahun 2026 sebesar Rp32.156.021.248,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) SP2D Nomor 13.06/04.0/000008/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P1/2/2026 tanggal 6 Februari 2026 sebesar Rp11.694.245.700,00;
2) SP2D Nomor 13.06/04.0/000009/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P1/2/2026 tanggal 6 Februari 2026 sebesar Rp4.605.443.700,00;
3) SP2D Nomor 13.06/04.0/000018/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P1/3/2026 tanggal 6 Maret 2026 sebesar Rp11.247.583.748,00; dan
4) SP2D Nomor 13.06/04.0/000017/LS/1.01.2.22.0.00.02.0000/P1/3/2026 tanggal 6 Maret 2026 sebesar Rp4.608.748.100,00.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

5.2.1 SAL Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal untuk tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp39.578.636.185,73 dan Rp48.620.328.848,02**,** dengan rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

a. SAL Awal Tahun 2025 merupakan SAL Akhir pada tahun sebelumnya yakni tahun 2024, yang terdiri dari:

• SAL pada Kas di Kas Daerah	: Rp 3.372.232.042,59
• SAL pada Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp 78.059.123,00
• SAL pada Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp 91.000,00
• SAL pada Kas di BLUD-RSUD	: Rp25.763.324.039,53
• SAL pada Kas di BLUD-Puskesmas	: Rp 7.522.721.413,00
• SAL pada Kas Dana BOK Puskesmas	: Rp 2.375.719.357,00
• SAL pada Kas Dana BOSP	: Rp 466.489.210,61
Jumlah	: Rp39.578.636.185,73

b. SAL Awal Tahun 2024 merupakan SAL Akhir pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023, yang terdiri dari:

• SAL pada Kas di Kas Daerah	: Rp 80.495.125,88
• SAL pada Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp 9.330.035,00
• SAL pada Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp 1.196.000,00
• SAL pada Kas di BLUD-RSUD	: Rp32.620.465.382,53
• SAL pada Kas di BLUD-Puskesmas	: Rp 9.975.125.481,00
• SAL pada Kas Dana BOK Puskesmas	: Rp 5.297.001.902,00
• SAL pada Kas Dana BOSP	: Rp 636.714.921,61
Jumlah	: Rp48.620.328.848,02

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar SAL Akhir Tahun 2024 dan SAL Akhir Tahun 2023 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Tahun 2024. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp39.578.636.185,73 dan Rp48.620.328.848,02.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Tahun 2024 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebelum koreksi sebesar Rp115.487.873.110,54 dan Rp39.442.141.655,73.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya pada tahun 2025 sebesar Rp24.000,00 merupakan koreksi atas SiLPA tahun lalu karena adanya koreksi terhadap belanja BOSP tahun sebelumnya sebagai tindak lanjut hasil Verikasi Belanja oleh Tim ARKAS Kemendikdasmen pada SD Negeri 53 Siguhung, Kec. Lubuk Basung. Koreksi tersebut menambah SILPA Tahun 2025.

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp136.494.530,00 merupakan koreksi atas SiLPA tahun lalu sebagai akibat adanya koreksi terhadap Belanja BLUD berupa kelebihan pengakuan jasa pelayanan kesehatan yang mempengaruhi SAL pada Kas di Bendahara BLUD. Koreksi tersebut menambah SILPA Tahun 2024.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir untuk tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp115.487.897.110,54 dan Rp39.578.636.185,73, dengan rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

a. SAL Akhir Tahun 2025, terdiri dari:

- SAL pada Kas di Kas Daerah : Rp 86.094.569.571,69
- SAL pada Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp 26.159.960,71
- SAL pada Kas di Bendahara Penerimaan : Rp 0,00
- SAL pada Kas di BLUD-RSUD : Rp 20.617.288.700,53
- SAL pada Kas di BLUD-Puskesmas : Rp 5.324.937.365,00
- SAL pada Kas Dana BOK Puskesmas : Rp 3.095.676.388,00
- SAL pada Kas Dana BOSP : Rp 329.265.124,61

Jumlah : Rp115.487.897.110,54

b. SAL Akhir Tahun 2024, terdiri dari:

- SAL pada Kas di Kas Daerah : Rp 3.372.232.042,59
- SAL pada Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp 78.059.123,00
- SAL pada Kas di Bendahara Penerimaan : Rp 91.000,00
- SAL pada Kas di BLUD-RSUD : Rp 25.763.324.039,53
- SAL pada Kas di BLUD-Puskesmas : Rp 7.522.721.413,00
- SAL pada Kas Dana BOK Puskesmas : Rp 2.375.719.357,00
- SAL pada Kas Dana BOSP : Rp 466.489.210,61

Jumlah : Rp 39.578.636.185,73

5.3. Neraca

Posisi keuangan Per 31 Desember 2025 menyajikan nilai Aset sebesar Rp2.203.562.958.451,83, Kewajiban sebesar Rp83.195.079.918,88, dan Ekuitas sebesar Rp2.120.367.878.532,95**.**

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.203.562.958.451,83 dan Rp2.186.132.421.510,50, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.01
Rincian Aset Per 31 Des 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Aset Lancar	279.135.466.124,90	188.947.027.261,51	47,73
2	Investasi Jangka Panjang	105.443.605.272,23	101.459.735.965,18	3,93
3	Aset Tetap	1.761.403.123.078,12	1.828.491.441.820,70	(3,67)
4	Aset Lainnya	57.580.763.976,58	67.234.216.463,11	(14,36)
Jumlah Aset		**2.203.562.958.451,83**	**2.186.132.421.510,50**	**(0,80)**

a. Aset Lancar

Jumlah aset lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp279.135.466.124,90 dan Rp188.947.027.261,51, yang terdiri atas:

Tabel 5.3.1.02
Rincian Aset Lancar Per 31 Des 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Kas dan Setara Kas	115.498.814.297,54	39.580.138.735,73	191,81
2	Piutang	93.174.843.187,24	85.686.661.444,10	8,74
3	Penyisihan Piutang	(28.032.992.978,86)	(25.183.624.724,90)	11,31
4	Beban dibayar dimuka	427.707.995,04	405.137.349,68	5,57
5	Persediaan	98.067.093.623,94	88.458.714.456,90	10,86
Jumlah Aset Lancar		**279.135.466.124,90**	**188.947.027.261,51**	**47,73**

1) Kas dan Setara Kas

Nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp115.498.814.297,54 dan Rp39.580.138.735,73, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah

Kas Daerah merupakan kas yang berada dibawah penguasaaan BUD yang disimpan dalam rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yg ditujukan untuk menampung seluruh penrimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang sudah ditentukan, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 307 Tahun 2022 tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah dan Keputusan Bupati Agam Nomor 8 tahun 2025 tentang Nomor Rekening Penerimaan dan Nomor Rekening Pengeluaran Pada PT Bank Nagari tahun Anggaran 2025.

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp86.094.569.571,69 dan Rp3.372.232.042,59. Rincian Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.03
Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Des 2025 dan 2024

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Bank Nagari Cab. Lb. Basung			
1	Rekening Kas Umum Daerah	1600.0101,002.01.0	86.077.774.771,69	3.372.232.042,59
2	Rekening (Penampung) Opsen Pajak PKB	1600.0101,00745.0	16.794.800,00	0,00
3	Penampung Opsen Pajak BBNKB	1600.0101.00746.1	0,00	0,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1600.0101.00175.9	0,00	0,00
5	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1600.0101.00196.6	0,00	0,00
Jumlah			**86.094.569.571,69**	**3.372.232.042,59**

Rincian SiLPA pada Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.094.569.571,69, terdiri dari:

- Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru :Rp 2.453.410.144,00
- Sisa DAK Fisik (Reguler dan Penugasan) :Rp 1.309.378.631,00
- Sisa DAK Non Fisik :Rp 2.208.357.724,00
- Sisa Dana tambahan penghasilan :Rp 235.572.004,00
- Sisa DBH CHT :Rp 251.441.644,00

- Sisa DBH Sawit :Rp 1.756.465.088,00
- Sisa DAU arahan :Rp 10.848.737.202,00
- Sisa TPG dari DAU Tambahan :Rp 32.290.020.000,00
- Sisa Keterlanjuran Pembayaran Gaji Pokok Sertifikasi :Rp 4.589.135,00
- Sisa Bantuan Keuangan Khusus :Rp 5.899.970.000,00
- Sisa Dana darurat (Banpes) :Rp 694.395.399,00
- Setoran sekolah Regroping :Rp 14.400.000,00
- Opsen Pajak Pada Kas penampung :Rp 16.794.800,00
- Kas Daerah Murni (DAU :Rp 28.111.037.800,69

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp91.000,00.

Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2024 sejumlah Rp91.000,00 merupakan penerimaan Pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang masih berada pada Petugas Pemungut Pajak dari Kecamatan Palupuah yang membantu Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Januari 2025.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp26.159.960,71 dan Rp78.059.123,00, merupakan sisa UYHD Tahun 2025 dan 2024 yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024.

Rincian Sisa UYHD pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024, adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.04
Rincian Sisa UYHD (UP/LS) di Bendahara Pengeluaran Per 31 Des 2025 dan 2024
Beserta tanggal penyetoran ditahun berikutnya

No	Unit Kerja	2025 (Rp)	Tanggal disetor	2024 (Rp)	Tanggal disetor
1	Sekretariat Daerah	0,00		0,00	
2	Kecamatan Banuhampu	0,00		0,00	
3	Dinas Sosial	0,00		0,00	
4	Kecamatan Tanjung Mutiara	160.000,00	9 Januari 2026	0,00	
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			75.789.123,00	1 Januari 2025
6	Dinas Kesehatan			2.270.000,00	15 Januari 2025
7	Badan Keuangan Dan Aset / BTT	25.999.960,71	30 April 2026		
Sisa Kas UP/LS pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2025 dan 2024		**26.159.960,71**		**78.059.123,00**	

d) Kas di BLUD

Rekening Kas BLUD ditetapkan melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 8 tahun 2025 tentang Nomor Rekening Penerimaan dan Nomor Rekening Penegeluaran Pada PT Bank Nagari dan Keputusan Bupati Agam Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Rekening Giro Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah Lubuk Basung dan Bank Nagari Cabang Lubuk Basung.

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.953.143.252,53 yang bersumber dari BLUD Puskesmas sebesar Rp5.324.937.365,00 dan BLUD RSUD Lubuk Basung sebesar Rp20.628.205.887,53, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.05
Rincian Saldo Kas di BLUD Puskesmas Per 31 Des 2025

NO	Puskesmas/FKTP	2025 (Rp)	KAS TUNAI	SALDO DI REKENING KORAN
1	Puskesmas Tiku	484.972.276,00	25.000,00	484.947.276,00
2	Puskesmas Muaro Putuih	144.280.795,00	0,00	144.280.795,00
3	Puskesmas Manggopoh	391.308.212,00	1.380.000,00	391.308.212,00
4	Puskesmas Lubuk Basung	486.691.774,00	0,00	485.311.774,00
5	Puskesmas Bawan	292.616.620,00	96.897.704,00	195.718.916,00
6	Puskesmas Batukambing	33.293.262,00	0,00	33.293.262,00
7	Puskesmas Pasar Ahad	199.439.718,00	0,00	199.439.718,00
8	Puskesmas Maninjau	10.284.517,00	0,00	10.284.517,00
9	Puskesmas Koto Alam	497.720.362,00	0,00	497.720.362,00
10	Puskesmas Palembayan	6.743.664,00	0,00	6.743.664,00
11	Puskesmas Matur	34.423.218,00	692.000,00	33.731.218,00
12	Puskesmas Iv Koto	341.454.410,00	0,00	341.454.410,00
13	Puskesmas Malalak	105.036.596,00	0,00	105.036.596,00
14	Puskesmas Padang Luar	529.870.810,00	0,00	529.870.810,00
15	Puskesmas Sungai Puar	61.857.900,00	0,00	61.857.900,00
16	Puskesmas Lasi	56.459.338,00	0,00	56.459.338,00
17	Puskesmas Biaro	45.671.886,00	0,00	45.671.886,00
18	Puskesmas Baso	347.498.555,00	95.000,00	347.403.555,00
19	Puskesmas Padang Tarok	221.655.879,00	0,00	221.655.879,00
20	Puskesmas Magek	403.540.647,00	0,00	403.540.647,00
21	Puskesmas Pakan Kamis	458.808.875,00	822.000,00	457.986.875,00
22	Puskesmas Kapau	11.730.567,00	0,00	11.730.567,00
23	Puskesmas Palupuh	159.577.484,00	0,00	159.577.484,00
Jumlah		**5.324.937.365,00**	**99.911.704,00**	**5.225.025.661,00**

Sementara untuk Kas di BLUD RSUD Lubuk Basung Per 31 Desember 2025, sebesar Rp20.628.205.887,53 terdiri dari:

- Kas Tunai
  - Bend. Penerimaan :Rp 2.742.829,00
  - Bend. Pengeluaran :Rp 9.917.555,19

  Jumlah Kas Tunai : Rp 12.660.384,19
- Kas di rekening Bank
  - Bank Nagari : Rp 272.965.467,34
  - Bank BNI : Rp20.342.580.036,00

  Jumlah Kas di rekening Bank : Rp20.615.545.503,34

  Jumlah Kas di BLUD : Rp20.628.205.887,53

Saldo Kas di BLUD RSUD Lubuk Basung per 31 Desember 2025, sebesar Rp20.628.205.887,53 tersebut diantaranya terdapat nilai yang merupakan utang PFK berupa PPN dan PPH yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp10.917.187,00. Atas nilai tersebut telah dilakukan penyetoran tanggal 12

dan 13 Mei 2026. Sehingga nilai Kas di BLUD RSUD Lubuk Basung yang merupakan kas murni milik BLUD RSUD Lubuk Basung dan menjadi bagian SILPA adalah sebesar Rp20.617.288.700,53.

Kas di BLUD RSUD Lubuk Basung Per 31 Desember 2024, sebesar Rp25.774.503.776,53 terdiri dari:

- Kas Tunai
  - Bend. Penerimaan :Rp 10.853.044,00
  - Bend. Pengeluaran :Rp 14.046.146,19

  Jumlah Kas Tunai :Rp 24.899.190,19
- Kas di rekening Bank
  - Bank Nagari : Rp 177.484.158,34
  - Bank BNI : Rp 25.561.743.241,00

  Jumlah Kas di rekening Bank : Rp25.739.227.399,34

  Jumlah Kas di BLUD : Rp25.764.126.589,53

e) Kas Lainnya

Kas pada Kas lainnya pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp700.000,00. Kas lainnya tahun 2024 sebesar Rp700.000,00 merupakan double setoran Retribusi Tempat Rekreasi (objek pendapatan di Dinas Pemuda dan olah Raga Pariwisata)yang masuk ke Kas Daerah yang telah dipindahbukukan kembali kepada Bendahara Penerima pada tanggal 21 Januari 2025.

f) Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan saldo kas penyelenggaraan Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri setingkat SD dan SMP serta BOP PAUD Negeri dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Negeri selama Tahun 2025 dan 2024 yang berasal Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Rekening BOS ditetapkan melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 416 tahun 2024 tentang Nomor Rekening Penerimaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar, sekolah Menengah Pratama, Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025.

Saldo Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp329.265.124,61 dan Rp466.489.210,61, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.06
Rincian Kas pada Bendahara BOSP dan BOP PAUD
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Sekolah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Sekolah Dasar	207.681.539,61	228.996.929,61
2	SMP	114.718.028,00	237.190.653,00
3	BOP PAUD	6.691.686 ,00	301.628,00
-	Sisa Kas Tahap I pada KB yang tutup karena bencana dan belum disetorkan ke Kasda Per 31 Desember 2025	6.600.000,00	
-	Jasa Giro di rekening bendahara BOSP yang	91.686,00	

No	Jenis Sekolah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	belum dipindahbukukan ke Kasda Per 31 Desember 2025		
4	Pendidikan Kesetaraan (Jasa Giro pada SPF SKB yang belum disetor per 31 Desember 225)	173.871,00	0,00
	Jumlah	**329.265.124,61**	**466.489.210,61**

Rincian saldo kas Dana BOSP Per 31 Desember 2025 berdasarkan seluruh transaksi termasuk transaksi untuk Swasta pada masing-masing tingkatan dan kelompok penerima DAK Non Fisik BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan selama tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut:

1. Kas BOSP pada Bendahara SD:

➢ Saldo Awal			Rp	228.996.929,61
➢ Penerimaan selama tahun 2025			Rp	46.338.598.802,00
Pengembalian ke Kas atas temuan Inspektorat pada SDN 18 Ladang Laweh Kec. Banuhampu	Rp	5.523.949,00		
Pengembalian ke Kas atas hasil verifikasi Kemendikdasmen pada SDN 53 Siguhung Kec. Lubuk Basung	Rp	24.000,00		
DAK Non Fisik	Rp	46.333.050.853,00		
➢ Pengeluaran selama tahun 2025			Rp	46.359.914.192,00
Sisa Kas			**Rp**	**207.681.539,61**

2. Kas BOSP pada Bendahara SMP:

➢ Saldo Awal			Rp	237.190.653,00
➢ Penerimaan selama tahun 2025			Rp	16.688.830.634,00
Pengembalian ke Kas atas temuan Inspektorat pada SMPN 2 Kec Ampek Nagari	Rp	20.283.000,00		
Pengembalian ke Kas atas temuan Inspektorat pada SMPN 3 Kec Tanjung Mutiara	Rp	20.127.350,00		
DAK Non Fisik	Rp	16.648.420.284,00		
➢ Pengeluaran selama tahun 2025			Rp	16.811.303.259,00
Sisa Kas			**Rp**	**114.718.028,00**

3. Kas BOSP pada Bendahara PAUD:

➢ Saldo Awal	Rp	301.628,00

➢ Penerimaan selama tahun 2025			Rp	5.572.909.212,00
Pengembalian ke Kas atas PAUD yang regrouping/tutup:	**Rp**	**(14.400.000,00)**		
1) TK Islam Darul Hikmah Jambu Air Kec Banuhampu	Rp	9.000.000,00		
2) KB Anak Pintar Kec. Palembayan	Rp	4.200.000,00		
3) PUD Nurul Hikmah Kampung Baru Pakan Sinayan Kec. Kamang Magek	Rp	600.000,00		
4) TK Al Munawarah Kec. Lubuk Basung	Rp	600.000,00		
DAK Non Fisik	Rp	5.587.217.526,00		
Penerimaan Jasa Giro yang belum disetor ke Kasda	Rp	91.686,00		
➢ Pengeluaran selama tahun 2025			Rp	5.566.519.154,00
Sisa Kas			**Rp**	**6.691.686,00**

Saldo akhir Kas BOSP pada Bendahara PAUD terdiri dari saldo kas pada KB Aisyah Nagari Kayu Pasak Salareh Aia Kecamatan Palembayan sebesar Rp6.600.000,00 yang merupakan KB Swasta namun tidak beroperasi lagi karena terdampak bencana. Sesuai dengan ketentuan, maka saldo kas ini telah disetorkan ke rekening RKUD pada tanggal 31 Maret 2026. Selain itu sebesar Rp91.686,00 merupakan jasa giro tahun 2025 yang masuk pada rekening PAUD Negeri dan baru disetorkan Kas Daerah pada tanggal 5 Mei 2026 dengan rincian:

Tabel: 5.3.1.07
Jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah Tahun 2025

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Jasa Giro
1	02000207057284	TK. Negeri Pembina Ampek Angkek	7.296,00
2	16000210214807	TK. Negeri Pembina Lubuk Basung	1.609,00
3	71000220647182	TK Negeri Melati	34.723,00
4	16000210221541	TK Negeri Dharmawanita	29.716,00
5	02060210035800	TK Negeri Lawang	6.378,00
6	02020207004793	TK Negeri Pembina Baso	7.126,00
7	02000207059314	TK Negeri Pembina Kamang Magek	4.838,00
Total			**91.686,00**

4. Kas BOSP pada Bendahara Satuan Pendidikan Kesetaraan:

➢ Saldo Awal			Rp	0,00
➢ Penerimaan selama tahun 2025			Rp	3.092.688.892,00
DAK Non Fisik	Rp	3.092.515.021,00		
Jasa Giro tahun 2025 pada		173.871,00		

SPNF SKB disetorkan tanggal 5 Mei 2026

- Pengeluaran selama tahun 2025 — Rp 3.092.515.021,00

Sisa Kas — **Rp 173.871,00**

(Penyajian Laporan Dana* BOSP *untuk Tahun Anggaran 2025 terdapat pada Lampiran I)

g) Kas Dana BOK Puskesmas

Rekening Kas Dana BOK ditetapkan melalui Keputusan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2025 tentang Nomor rekening Penerimaan dana Bantuan Operasi Kesehatan Puskesamas tahun Anggaran 2025 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), serta Keputusan Bupati Agam Nomor 281 tahun 2025 tentang Penetapan rekening dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di kabupaten Agam.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.095.676.388,00 dan Rp2.375.719.357,00. Berdasarkan rekonsiliasi dengan saldo pada rekening BNI diketahui saldo Kas Dana BOK Puskesmas di BNI adalah sebesar Rp3.098.180.830,00. Terdapat selisih sebesar Rp2.504.442,00 yang merupakan kesalahan transfer oleh Bank BNI berupa double transfer untuk jasa giro desember yang kemudian telah ditarik kembali oleh BNI pada 2 Januari 2026. Saldo Kas Dana BOK Puskesmas dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.08
Saldo Kas BOK Puskesmas
Per 31 Desember 2025

No	Unit Organisasi	Saldo Kas Dana Bok Puskesmas 2024	Dana Salur 2025	Realisasi Belanja Sd Desember 2025	Saldo Kas Dana Bok Puskesmas 2025	Kesalahan Transfer Jasa Giro oleh BNI	Saldo Direk BNI
1	Puskesmas Tiku	144.212.592,00	474.247.408,00	524.575.242,00	93.884.758,00	83.749,00	93.968.507,00
2	Puskesmas Muaro Putuih	53.415.188,00	412.584.812,00	372.157.517,00	93.842.483,00	69.867,00	93.912.350,00
3	Puskesmas Manggopoh	227.993.780,00	489.755.220,00	495.819.727,00	221.929.273,00	178.506,00	222.107.779,00
4	Puskesmas Lubuk Basung	154.082.131,00	635.600.869,00	598.336.859,00	191.346.141,00	142.351,00	191.488.492,00
5	Puskesmas Bawan	11.222.677,00	515.497.323,00	491.162.961,00	35.557.039,00	32.938,00	35.589.977,00
6	Puskesmas Batukambing	118.108.569,00	458.971.431,00	373.115.469,00	203.964.531,00	160.762,00	204.125.293,00
7	Puskesmas Pasar Ahad	149.904.941,00	397.615.059,00	412.560.364,00	134.959.636,00	102.751,00	135.062.387,00
8	Puskesmas Maninjau	59.232.636,00	435.487.364,00	467.147.765,00	27.572.235,00	29.210,00	27.601.445,00
9	Puskesmas Koto Alam	41.263.890,00	497.956.110,00	417.594.531,00	121.625.469,00	82.231,00	121.707.700,00
10	Puskesmas Palembayan	46.949.243,00	520.110.757,00	465.979.810,00	101.080.190,00	68.823,00	101.149.013,00
11	Puskesmas Matur	129.597.892,00	386.642.108,00	363.864.145,00	152.375.855,00	121.504,00	152.497.359,00
12	Puskesmas Iv Koto	58.812.012,00	590.087.988,00	556.658.250,00	92.241.750,00	74.488,00	92.316.238,00
13	Puskesmas Malalak	79.957.830,00	347.562.170,00	288.936.576,00	138.583.424,00	95.505,00	138.678.929,00
14	Puskesmas Padang Luar	154.099.000,00	498.741.000,00	496.327.486,00	156.512.514,00	149.665,00	156.662.179,00
15	Puskesmas Sungai Puar	85.652.389,00	602.507.611,00	540.218.720,00	147.941.280,00	130.584,00	148.071.864,00
16	Puskesmas Lasi	80.166.173,00	660.773.827,00	548.060.897,00	192.879.103,00	161.074,00	193.040.177,00
17	Puskesmas Biaro	112.079.758,00	586.820.242,00	594.353.344,00	104.546.656,00	90.466,00	104.637.122,00
18	Puskesmas Baso	195.357.749,00	501.462.251,00	454.308.528,00	242.511.472,00	204.019,00	242.715.491,00
19	Puskesmas Padang Tarok	140.332.130,00	428.917.870,00	395.494.108,00	173.755.892,00	133.271,00	173.889.163,00
20	Puskesmas Magek	103.037.736,00	490.042.264,00	441.489.779,00	151.590.221,00	123.380,00	151.713.601,00

No	Unit Organisasi	Saldo Kas Dana Bok Puskesmas 2024	Dana Salur 2025	Realisasi Belanja Sd Desember 2025	Saldo Kas Dana Bok Puskesmas 2025	Kesalahan Transfer Jasa Giro oleh BNI	Saldo Direk BNI
21	Puskesmas Pakan Kamis	104.980.159,00	596.959.841,00	479.341.482,00	222.598.518,00	169.945,00	222.768.463,00
22	Puskesmas Kapau	87.009.216,00	461.035.784,00	484.331.401,00	63.713.599,00	56.812,00	63.770.411,00
23	Puskesmas Palupuh	38.251.666,00	502.153.334,00	509.740.651,00	30.664.349,00	42.541,00	30.706.890,00
	Jumlah	**2.375.719.357,00**	**11.491.532.643,00**	**10.771.575.612,00**	**3.095.676.388,00**	**2.504.442,00**	**3.098.180.830,00**

2) Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp65.141.850.208,38 dan Rp60.503.036.719,20, rincian terdiri dari:

Tabel 5.3.1.09
Rincian Piutang Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan %
1	Piutang Pajak	45.236.530.113,19	39.676.891.767,19	14,01
2	Piutang Retribusi	17.791.130.104,00	17.022.163.356,00	4,52)
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	983.807.401,05	1.233.868.734,91	(20,27)
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.554.663.000,00	0,00	100,00
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	22.253.597.234,00	27.071.506.726,00	(17,80)
6	Piutang Lainnya	355.115.335,00	682.230.860,00	(47,95)
Jumlah Piutang Bruto		**93.174.843.187,24**	**85.686.661.444,10**	**8,74**
7	Penyisihan Piutang	(28.032.992.978,86)	(25.183.624.724,90)	11,31
Jumlah Piutang		**65.141.850.208,38**	**60.503.036.719,20**	**7,67**

a) Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp45.236.530.113,19 dan Rp39.676.891.767,19. Terdapat kenaikan sebesar Rp5.559.638.346,00 atau 14,01%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.10
Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan %
1	Pajak Reklame	93.758.206,00	83.769.699,00	11,92
2	Pajak Penerangan Jalan	0,00	845.196,00	(100)
3	Pajak Air Tanah	12.839.131,00	26.761.868,00	(52,02)
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	294.077.044,00	253.670.774,00	15,93
5	Pajak PBB	44.056.154.998,19	38.135.608.522,19	15,52
6	Piutang PBJT-Restoran	303.917.882,00	515.822.305,00	(41,08)
7	Piutang PBJT-Hotel	458.823.488,00	660.413.403,00	(30,52)
8	Piutang PBJT-Jasa Parkir	2.086.364,00	0,00	100,00
9	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	14.873.000,00	0,00	100,00
Jumlah Piutang Pajak		**45.236.530.113,19**	**39.676.891.767,19**	**14,01**

(1) Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp93.758.206,00 dan Rp83.769.699,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	83.769.699,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	(4.540.247,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	14.528.754,00
Saldo Akhir	**Rp**	**93.758.206,00**

(2) Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp845.196,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	845.196,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	(845.196,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Akhir	**Rp**	**0,00**

(3) Piutang Pajak Air Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp12.839.131,00 dan Rp26.761.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	26.761.868,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	(15.975.423,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	2.052.686,00
Saldo Akhir	**Rp**	**12.839.131,00**

(4) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp294.077.044,0 dan Rp253.670.774,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	253.670.774,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	40.406.270,00
Saldo Akhir	**Rp**	**294.077.044,00**

(5) Piutang PBB-P2 Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp44.056.154.998,19 dan Rp38.135.608.522,19 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	38.135.608.522,19
Koreksi Penambahan Piutang	Rp	53.597.588,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	470.073.130,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	6.337.022.018,00
Saldo Akhir	**Rp**	**44.056.154.998,19**

Penjelasan Piutang PBB-P2 adalah sebagai berikut :

(a) Penerimaan Piutang PBB-P2 sebesar Rp470.073.130,00 merupakan penerimaan piutang dari Tahun 2015 s.d Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan Piutang Tahun 2024 sebesar	Rp	200.143.538,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2023 sebesar	Rp	99.646.133,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2022 sebesar	Rp	41.707.993,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2021 sebesar	Rp	40.063.361,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2020 sebesar	Rp	20.750.799,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2019 sebesar	Rp	10.830.088,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2018 sebesar	Rp	8.465.332,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2017 sebesar	Rp	6.882.078,00

- Penerimaan Piutang Tahun <2016 sebesar Rp 41.583.808,00

Jumlah **Rp 470.073.130,00+**

(b) Jumlah Penambahan Piutang PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp6.337.022.018,00 berasal dari:

- Ketetapan PBB P2 Tahun 2025 sebesar Rp11.419.580.541,00
- Penerimaan/Realisasi PBB P2 tahun 2025 (Rp5.082.558.523,00)

Jumlah **Rp 6.337.022.018,00**

(c) Saldo akhir Piutang PBB P2 sebesar Rp44.056.154.998,19, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.11
Saldo Akhir Piutang PBB P2 Per 31 Desember 2025

No	Tahun Pajak	Jumlah SPPT	Nilai Piutang (Rp)	Umur Piutang	Klasifikasi Piutang
1	2025	314.139	6.337.022.018,00	≤ 1 tahun	Piutang Lancar
2	2024	309.112	5.119.758.344,00	1-3 tahun	Piutang Kurang Lancar
3	2023	299.094	5.371.635.395,00	1-3 tahun	Piutang Kurang Lancar
4	2022	297.922	2.264.446.503,18	1-3 tahun	Piutang Kurang Lancar
5	2021	296.166	2.156.457.831,69	3-4 tahun	Piutang Diragukan
6	2020	292.348	2.213.673.636,67	3-4 tahun	Piutang Diragukan
7	2019	291.712	2.004.638.765,14	≥ 5 tahun	Piutang Macet
8	2018	288.881	1.821.088.574,00	≥ 5 tahun	Piutang Macet
9	2017	290.168	1.797.828.039,00	≥ 5 tahun	Piutang Macet
10	<2016	289.495	14.969.605.891,51	≥ 5 tahun	Piutang Macet
Jumlah			**44.056.154.998,19**		

(6) Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp779.700.734 dan Rp1.176.235.708,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	1.176.235.708,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	1.174.065.708,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	777.530.734,00
Saldo Akhir	**Rp**	**779.700.734,00**

Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Per 31 Desember 2025 terdiri dari:

- Piutang PBJT-Restoran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp303.917.882,00 dan Rp515.822.305,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	515.822.305,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	515.822.305,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	303.917.882,00
Saldo Akhir	**Rp**	**303.917.882,00**

- Piutang PBJT-Hotel per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp458.823.488,00 dan Rp660.413.403,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	660.413.403,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	658.243.403,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	456.653.488,00
Saldo Akhir	**Rp**	**458.823.488,00**

- Piutang PBJT-Jasa Parkir per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.086.364,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	0,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	2.086.364,00
Saldo Akhir	**Rp**	**2.086.364,00**

- Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp14.873.000,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	0,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	14.873.000,00
Saldo Akhir	**Rp**	**14.873.000,00**

b) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp17.791.130.104,00 dan Rp17.022.163.356,00, dengan rincian :

Tabel 5.3.1.12
Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	666.148.400,00	522.726.000,00	27,44
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	13.939.479.296,00	14.622.085.791,00	(4,67)
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.438.511.255,00	204.660.051,00	602,88
4	Pelayanan Pemeriksaandan/atau Pengujian Alat Pemadam	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
5	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	48.961.214,00	48.961.214,00	0,00
6	Penyewaan Tanah dan Bangunan	67.680.000,00	50.430.000,00	34,21
7	Pemakaian Laboratorium	0,00	46.400,00	(100,00)
8	Retribusi Pemakaian Ruangan	16.800.000,00	8.075.000,00	108,05
9	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	100,00
10	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol/ Perizinan Tertentu Lainnya	11.217.800,00	11.217.800,00	0,00
11	Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	54.509.600,00	54.509.600,00	0,00
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	264.712.539,00	216.341.500,00	22,36
Jumlah Piutang Retribusi		**17.791.130.104,00**	**17.022.163.356,00**	**4,52**

(1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp666.148.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.13
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas per 31 Desember 2025

No	Puskesmas	NON KAPITASI	PROLANIS	PROMOTIF	Jumlah
1	Puskesmas Tiku	8.940.000	2.668.000	0,00	11.608.000,00
2	Puskesmas Muaro Putuih	24.120.000	-	0,00	24.120.000,00
3	Puskesmas Manggopoh	10.180.000	-	0,00	10.180.000,00
4	Puskesmas Lubuk Basung	12.230.000	2.690.000	0,00	14.920.000,00

No	Puskesmas	NON KAPITASI	PROLANIS	PROMOTIF	Jumlah
5	Puskesmas Bawan	60.480.000		0,00	60.480.000,00
6	Puskesmas Batukambing	15.300.000		0,00	15.300.000,00
7	Puskesmas Pasar Ahad	16.320.000		0,00	16.320.000,00
8	Puskesmas Maninjau	46.523.200	3.350.000	0,00	49.873.200,00
9	Puskesmas Koto Alam	113.988.000	-	0,00	113.988.000,00
10	Puskesmas Palembayan	51.630.600		0,00	51.630.600
11	Puskesmas Matur	99.765.600	1.920.000	0,00	101.685.600,00
12	Puskesmas IV Koto	20.816.000	5.810.000	0,00	26.626.000,00
13	Puskesmas Malalak		2.130.000	0,00	2.130.000,00
14	Puskesmas Padang Luar	8.115.000	-	0,00	8.115.000,00
15	Puskesmas Sungai Puar	8.706.000	1.164.000	0,00	9.870.000,00
16	Puskesmas Lasi	-	2.740.000	0,00	2.740.000,00
17	Puskesmas Biaro	57.796.000	3.280.000	1.110.000,00	62.186.000,00
18	Puskesmas Baso	40.228.000		0,00	40.228.000,00
19	Puskesmas Padang Tarok			0,00	0,00
20	Puskesmas Magek	1.280.000	3.300.000	0,00	4.580.000,00
21	Puskesmas Pakan Kamis	16.160.000	-	0,00	16.160.000,00
22	Puskesmas Kapau	560.000	-	0,00	560.000,00
23	Puskesmas Palupuh	22.848.000	-	0,00	22.848.000,00
Jumlah		**635.986.400,00**	**29.052.000,00**	**1.110.000,00**	**666.148.400,00**

(2) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.939.479.296,00, dengan rincian sebagai berikut:

- BPJS Kesehatan sebesar Rp13.140.248.133,00;
- Ambulance BPJS sebesar Rp79.286.000,00;
- BPJS Naker sebesar Rp103.112.174,00;
- Jasa Raharja sebesar Rp429.480.081,00;
- PT MA Rp1.811.829,00;
- In Health Rp373.082,00;
- Rizki Bunda sebesar Rp104.241.700,00;
- Keracunan Mbg Rp30.925.611,00;
- Mutiara Biru Rp4.494.000,00;
- PT Taspen sebesar Rp1.110.686,00; dan
- Klinik Siti Manggopoh sebesar Rp44.396.000,00.

(3) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.438.511.255,00 dan Rp204.660.051,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	204.660.051,00
Koreksi	Rp	530.483.649,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	703.367.555,00
Saldo Akhir	**Rp**	**1.438.511.255,00**

(4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.510.000,00 dan Rp1.510.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	1.510.000,00

Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Akhir	**Rp**	**1.510.000,00**

(5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp48.961.214,00 dan Rp48.961.214,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	48.961.214,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Akhir	**Rp**	**48.961.214,00**

(6) Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp67.680.000,00 dan Rp50.430.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	50.430.000,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	(23.900.000,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	41.150.000,00
Saldo Akhir	**Rp**	**67.680.000,00**

(7) Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp46.400,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	46.400,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	(46.400,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Akhir	**Rp**	**0,00**

(8) Piutang Retribusi Pemakaian Pemakaian Ruangan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp16.800.000,00 dan Rp8.075.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	8.075.000,00
Koreksi saldo awal	Rp	1.875.000,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	(12.150.000,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	19.000.000,00
Saldo Akhir	**Rp**	**16.800.000,00**

(9) Piutang Retribusi Pasar Gosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.281.600.000,00 dan Rp1.281.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	1.281.600.000,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Akhir	**Rp**	**1.281.600.000,00**

Untuk Pasar Gosir dan/atau Pertokoan yang berada di Terminal Antokan Lubuk Basung, belum dipungut retribusinya atau diakui sebagai piutang retribusi, walaupun telah ada Putusan Pengadilan yang telah *Inkracht* tetapi belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SKRD atau Surat Tagihan kepada Wajib Retribusi. Terdapat potensi penerimaan pendapatan retribusi sebesar Rp529.200.000,00, dengan rincian toko sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.14
Rekapitulasi Toko/ Kios pada Terminal Antokan yang Telah digugat ke Pengadilan Negeri

No	Klasifikasi Toko/ Kios	Nomor Toko/ Kios	Nilai Tagihan Berdasarkan Putusan PN/Akta Perdamaian (Rp)	Keterangan
1	Toko tidak bertingkat yang menghadap ke arah pasar/ teriminal	No. 14	64.800.000,00	Pasal 1 Akta Perdamaian No. 36/pdt.G/2016/PN Lbb menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan tagihan biaya sewa ruko nomor 14 yang berada diatas sertipikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). 2) Sdr. JUMADI. R telah melakukan pembayaran retribusi jasa usaha di pertokoan Terminal Antokan Lubuk Basung Bulan Maret s/d Mei 2017 sebesar Rp. 3.600.000,- berdasarkan SKRD 003407
		No. 15	64.800.000,00	Pasal 1 Akta Perdamaian No. 40/PDT.G/2016/PN Lbb menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan tagihan biaya sewa ruko nomor 15 yang berada diatas sertipikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). 2) Sdr. Hj. ERMA DARWIN telah melakukan pembayaran retribusi jasa usaha di pertokoan Terminal Antokan Lubuk Basung Bulan Maret s/d Mei 2017 sebesar Rp. 3.600.000,- berdasarkan SKRD 003406
		No. 22	0,00	Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 34/PDT.G/2016/PN Lbb, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
		No. 25	64.800.000,00	Pasal 1 Akta Perdamaian No. 35/PDT.G/2016/PN Lbb menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan tagihan biaya sewa ruko nomor 25 yang berada diatas sertipikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
		No. 28	64.800.000,00	Pasal 1 Akta Perdamaian No. 41/Pdt.G/2016/PN Lbb menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan tagihan biaya sewa ruko nomor 28 yang berada diatas sertipikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
		No. 36	18.000.000,00	Pada halaman 58 Putusan Perkara Perdata Nomor 30/PDT.G/2018/PN Lbb point 8 "Menghukum Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada halaman 52 "Tergugat B wajib membayar ganti yang dapat ditagih selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2014, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta)".
		No. 40	36.000.000,00	Pada halaman 24 Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 35/PDT.G/2019/PT.PDG point 10 menghukum tergugat II sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 36.000.000,,- (tiga puluh enam juta rupiah).
		No. 41		
		No. 47	18.000.000,00	Pada halaman 17 Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 40/PDT.G/2019/PT.PDG tergugat II/Pembanding wajib membayar retribusi yang dapat ditagih selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2013, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai ganti rugi yang harus dibayar Tergugat II/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding.
		No. 50	18.000.000,00	Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 37/PDT.G/2019/PT.PDG halaman 11 poin 8 menghukum Tergugat II, sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sekarang terbanding sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
		No. 51	36.000.000,00	Pasal 4 Akta Perdamaian No. 41/Pdt.G/2020/PN Lbb menyatakan,

No	Klasifikasi Toko/ Kios	Nomor Toko/ Kios	Nilai Tagihan Berdasarkan Putusan PN/Akta Perdamaian (Rp)	Keterangan
		No. 52		Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun untuk setiap petak tokonya;
		No. 53	18.000.000,00	Pasal 4 Akta Perdamaian No. 43/Pdt.G/2020/PN Lbb menyatakan, Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun untuk 1 (satu) petak tokonya;
		No. 54	18.000.000,00	Pada halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 202/PDT/2019/PT PDG point 8 "Menghukum Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah rupiah)".
		No. 60	18.000.000,00	Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 28/PDT.G/2019/PT.PDG halaman 10 poin 8 menghukum Tergugat II, sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sekarang terbanding sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2	Toko yang berada di sisi kiri dan kanan pasar	No. 3	28.800.000,00	Pada halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 204/PDT/2019/PT PDG point 2 "Menguatan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Lbb tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut".
		No. 4	14.400.000,00	Pasal 4 Akta Perdamaian No. 42/Pdt.G/2020/PN Lbb menyatakan, Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun untuk 1 (satu) petak tokonya;
		No. 5	18.000.000,00	Pada halaman 49 Putusan Perkara Perdata Nomor 32/PDT.G/2018/PN Lbb point 8 "Menghukum Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada halaman 44 "Tergugat B wajib membayar ganti yang dapat ditagih selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2014, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta)".
		No. 7	28.800.000,00	Pada halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 201/PDT/2019/PT PDG point 8 "Menghukum Pembanding semula Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)".
Total			**529.200.000,00**	

(10) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu pada rekening Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang sebelumnya merupakan Retribusi Izin Gangguan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.217.800,00 dan Rp11.217.800,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	11.217.800,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Akhir	**Rp**	**11.217.800,00**

(11) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp54.509.600,00 dan Rp54.509.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	54.509.600,00

Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Akhir	**Rp**	**54.509.600,00**

(12) Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp264.712.539,00 dan Rp216.341.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	216.341.500,00
Reklasifikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rp	241.444,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2025	Rp	31.299.544,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	79.429.139,00
Saldo Akhir	**Rp**	**264.712.539,00**

c) Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp983.807.401,05 dan Rp1.233.868.734,91 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.1.15
Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan %
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	22.060.275,00	22.060.275,00	0,00
2	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	48.127.000,00	48.127.000,00	0,00
3	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	825.836.482,05	1.020.065.410,91	(19,04)
4	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	76.230.600,00	76.230.600,00	0,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	11.553.044,00	11.553.044,00	0,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	0,00	55.832.405,00	(100)
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah		**983.807.401,05**	**1.233.868.734,91**	**(20,27)**

(1) Piutang Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan pada Badan Pendapatan Daerah, merupakan piutang atas penjualan Perumahan milik Pemda (Tahun 1994) di Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu sebesar Rp22.060.275,00 dengan rincian:

Tabel 5.3.1.16
Piutang Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
Per 31 Desember 2025

No	Nama	(Rp)
1	Ir. Mawardi Jamzai	3.544.100,00
2	Refrizal	2.502.500,00
3	Nurman	2.618.875,00
4	Syafnir	4.694.725,00
5	Anwar	3.746.000,00
6	Asnita	4.954.075,00
	Jumlah	**22.060.275,00**

(2) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp48.127,000,00 dan Rp48.127,000,00. Piutang ini

merupakan piutang yang belum dilunasi berdasarkan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Ganti Kerugian Daerah yang diterbitkan selama Tahun 2019.

***(Penyajian selengkapnya Rincian dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Tahun 2025 terdapat pada Lampiran II)*.**

(3) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp825.836.482,05 merupakan sanksi denda yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2024)	Rp	1.020.065.410,91
Koreksi nilai piutang	Rp	89.302.627,96
Penerimaan Piutang sebelum Tahun 2025 (Koreksi Ekuitas)	Rp	283.531.556,82
Penambahan Piutang selama Tahun 2025	Rp	0,00
Saldo Akhir	**Rp**	**825.836.482,05**

(4) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2025 sebesar Rp76.230.600,00 merupakan piutang jaminan pelaksanan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan rincian sebagai berikut.

- Jaminan pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Infrastruktur Kawasan bBukik Siriah Aia Taganang (CV Cipta Muda pratama), tahun pekerjaan 2013 dengan nilai jaminan sebesar Rp34.989.100,00; dan
- Jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Drainase Simpang Tembok Ujuang Labuah (CV Elya Murni), tahun pekerjaan 2014 dengan nilai jaminan sebesar Rp41.241.500,00.

(5) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan keterlanjuran pembayaran Sertifikasi Guru Tahun 2012 atas dua orang guru dengan nilai total nilai sebesar Rp11.553.044,00.

(6) Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp55.832.405,00. Rekening Piutang BLUD RSUD Lubuk Basung sebesar Rp55.832.405,00, dilakukan koreksi pada Rekening Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai perubahan Nomenklatur terbaru.

d) Piutang Transfer

(1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Bagi Hasil Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp6.554.663.000,00 dan Rp0,00, terdiri dari:

Tabel 5.3.1.17
Rincian Piutang Transfer Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan %
1	Piutang DBH Pajak	**6.009.389.000,00**	0,00	100,00
	Piutang DBH PBB	1.675.243.000,00	0,00	100,00
	Piutang DBH PPh Pasal 21	3.738.714.000,00	0,00	100,00
	Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	501.274.000,00	0,00	100,00
	Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	94.158.000,00	0,00	100,00
2	Piutang DBH Sumber Daya Alam (SDA)	**545.274.000,00**	0,00	100,00
	Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	177.193.000,00	0,00	100,00
	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	384.000,00	0,00	100,00
	Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	365.593.000,00	0,00	100,00
	Piutang DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.104.000,00	0,00	100,00
Jumlah Piutang Transfer		**6.554.663.000,00**	**0,00**	**100,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Transfer Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

(2) Piutang Transfer antar daerah merupakan Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi dengan saldo per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp22.253.597.234,00 dan Rp27.071.506.726,00. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pemerintah Provinsi merupakan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Tahun 2025 sesuai Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/023/PPD-Bapenda/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. Rincian kekurangan salur dana bagi hasil Provinsi disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.18
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan %
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	5.202.076.974,00	(100,00)
2	Bagi Hasil Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	1.860.872.309,00	(100,00)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.180.540.808,00	19.942.062.284,00	(100,00)
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	73.056.426,00	66.495.159,00	(100,00)
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pemerintah Provinsi		**22.253.597.234,00**	**27.071.506.726,00**	**(100,00)**

Penurunan piutang transfer antar daerah disebabkan perubahan mekanisme pemungunan PKB dan BBNKB yang sebelumnya menggunakan mekanisme

transfer menjadi mekanisme opsen. Sehingga atas dua pajak tersebut tidak terdapat pencatatan piutang.

e) Piutang Lainnya

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sisa uang muka atas pekerjaan fisik yang mengalami pemutusan kontrak yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025. Saldo Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp355.115.335,00 dan Rp682.230.860,00.

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 sebesar Rp355.115.335,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan merupakan uang muka Pembangunan Puskesmas Manggopoh dengan saldo awal sebesar Rp446.532.610,00, dan telah dilakukan penyelesaian selama tahun 2025 sebesar Rp327.115.525,00, sehingga tersisa sebesar Rp119.417.085,00.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp235.698.250, dengan rincian:
  - Rekonstruksi Jembatan Labuhan Nagari Tiku V Jprong Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar Rp80.137.787,00.
  - Rekontruksi Jembatan Kampung Darek Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar Rp155.560.463,00.

f) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan melalui estimasi pada akhir periode yang dibentuk sebesar persentase berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih, tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Pencatatan transaksi nilai penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih penghitungannya dilakukan berdasarkan "umur piutang", sebagaiaman diuraikan pada BAB IV halaman 71. Nilai penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp28.032.992.978,86) dan (Rp25.183.624.724,90) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.19
Nilai Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Rincian Penyisihan Piutang	Jumlah (Rp)	
		2025	2024
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	(143.814.422,70)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	0,00	(102.601.402,50)
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(14.402.306,47)	(10.324.995,50)
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	(4.225,98)
4	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(1.667.365,83)	(3.194.613,92)

No	Rincian Penyisihan Piutang	Jumlah (Rp)	
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(148.640.496,55)	(107.244.851,33)
6	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(24.085.496.138,14)	(21.687.705.438,31)
7	Piutang PBJT-Restoran	(1.519.589,41)	0,00
8	Piutang PBJT-Hotel	(2.500.267,44)	0,00
9	Piutang PBJT-Jasa Parkir	(10.431,82)	0,00
10	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	(74.365,00)	0,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.843.001.617,15)	(1.942.993.039,75)
12	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(935.680.401,05)	(1.185.741.734,91)
Jumlah		**(28.032.992.978,86)**	**(25.183.624.724,90)**

(Rincian piutang dan Penyisihan Piutang untuk Tahun Anggaran 2025 Penyajian selengkapnya nilai Piutang terdapat pada Lampiran III).

3) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah atas beban atau pengeluaran tertentu kepada Pihak Ketiga untuk periode waktu berikutnya.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp427.707.995,04 dan sebesar Rp405.137.349,68. Beban jasa dibayar dimuka berasal dari premi asuransi kendaraan bermotor yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Agam dan pembayaran sewa dan pajak kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo.

Rincian beban dibayar dimuka per SKPD disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.20
Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka pada SKPD Per 31 Desember 2025

No		SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024
I	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.471.758,34	3.013.879,18
	2	Dinas Kesehatan	46.409.341,72	15.248.045,90
	3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13.003.299,41	5.182.519,24
	4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.446.103,57	3.706.886,25
	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.497.350,00	1.731.761,67
	6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.496.458,33	3.807.654,17
	7	Dinas Sosial	5.269.287,92	3.991.500,00
	8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.834.301,34	10.555.394,19
	9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.295.152,81	3.502.850,42
	10	Dinas Lingkungan Hidup	15.687.853,39	8.006.955,00
	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.796.703,33	2.021.881,15
	12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	3.356.950,00	1.766.497,89
	13	Dinas Perhubungan	115.998.493,12	121.834.352,69
	14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.461.466,67	2.199.980,01
	15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.025.432,17	893.279,95
	16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.421.791,64	971.224,97
	17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.010.808,34	3.306.295,84
	18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4.756.833,33	4.128.384,20
	19	Dinas Pertanian	3.226.441,68	982.945,73

No		SKPD	Tahun 2025	Tahun 2024
	20	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	6.790.375,58	3.700.250,01
	21	Sekretariat Daerah	17.907.973,95	104.360.915,52
	22	Sekretariat DPRD	34.178.707,02	27.708.601,26
	23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.486.666,67	11.244.821,67
	24	Badan Pendapatan Daerah	13.172.316,51	8.270.693,76
	25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.541.502,22	10.454.393,76
	26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.660.126,34	8.256.331,68
	27	Inspektorat Daerah	6.703.270,25	4.770.016,59
	28	Kecamatan Baso	163.233,35	31.166,67
	29	Kecamatan Ampek Angkek	252.566,67	166.833,33
	30	Kecamatan Candung	1.498.066,67	149.425,01
	31	Kecamatan Tilatang Kamang	2.549.483,34	825.245,82
	32	Kecamatan Kamang Magek	3.788.475,00	4.651.741,64
	33	Kecamatan Palupuh	2.613.633,36	122.500,02
	34	Kecamatan Banuhampu	4.513.608,33	3.793.745,81
	35	Kecamatan Sungai Pua	670.033,32	551.058,30
	36	Kecamatan IV Koto	3.438.425,00	3.361.597,92
	37	Kecamatan Matur	252.000,00	261.512,51
	38	Kecamatan Palembayan	5.190.643,75	4.399.052,07
	39	Kecamatan Tanjung Raya	1.422.550,00	816.174,97
	40	Kecamatan Lubuk Basung	4.909.402,04	4.281.510,41
	41	Kecamatan Ampek Nagari	185.266,67	125.083,34
	42	Kecamatan Tanjung Mutiara	3.434.166,66	2.526.770,83
	43	Kecamatan Malalak	1.142.063,17	981.395,00
	44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.777.612,06	2.474.223,33
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka		**427.707.995,04**	**405.137.349,68**

Khusus untuk Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Dinas Perhubungan, merupakan beban dibayar dimuka atas sewa tanah yang diperhitungkan selama 30 (tiga puluh) tahun. terhitung sejak tanggal 20 November 2006 sampai dengan 20 November 2036. Sewa tanah ini dilakukan melalui perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan Jawanis, Raunas dan Dahril Bilang Marajo yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 20 November 2006. Penyewaan tanah ini direncanakan untuk mendirikan Bangunan Permanen Fasilitas Pos TPR Koto Hilalang dengan biaya sewa lebih kurang Rp10.000.000,00/tahun. Pada tahun 2006, uang sewa telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp300.000.000,00.

4) Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Agam dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun, termasuk Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga. Metode penilaian Persediaan menggunakan FIFO *(First in First Out)*. Saldo Persediaan disajikan berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp98.067.093.623,94 dan Rp88.458.714.456,90 yang tersebar pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Rincian Persediaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.21
Rincian Persediaan SKPD Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	988.860.324,62
2	Dinas Kesehatan	19.946.797.099,15
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	57.823.074.884,86
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.090.229.761,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.627.293.100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	279.128.174,00
7	Dinas Sosial	48.905.660,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	152.710.144,14
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	275.403.231,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	403.200.836,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	479.728.268,14
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	258.000,00
13	Dinas Perhubungan	204.660.391,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14.966.590,00
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.276.500,00
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	258.565,00
17	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	91.978.000,00
18	Dinas Pertanian	324.726.958,03
19	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	1.330.000,00
20	Sekretariat Daerah	9.375.253,00
21	Sekretariat DPRD	31.135.500,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.143.994,00
23	Badan Pendapatan Daerah	193.814.530,00
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.857.941,00
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	652.680,00
26	Inspektorat Daerah	29.099.530,00
27	Kecamatan Ampek Angkek	2.731.612,00
28	Kecamatan Tilatang Kamang	665.000,00
29	Kecamatan Kamang Magek	634.000,00
30	Kecamatan Banuhampu	4.055.000,00
31	Kecamatan Sungai Pua	3.507.000,00
32	Kecamatan IV Koto	6.295.997,00
33	Kecamatan Tanjung Raya	344.100,00
34	Kecamatan Lubuk Basung	100.000,00
35	Kecamatan Ampek Nagari	1.961.000,00
36	Kecamatan Malalak	934.000,00
Jumlah		**98.067.093.623,94**

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.22
Rincian Jenis Persediaan Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Bahan	3.308.793.436,28	1.721.376.593,50
2	Suku Cadang	20.018.570,00	32.899.850,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.691.844.205,11	1.710.736.145,69
4	Obat-obatan	17.311.996.680,24	16.595.067.324,25
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	75.701.755.373,31	68.270.062.341,46
6	Natura dan Pakan	32.685.359,00	128.572.202,00
Jumlah		**98.067.093.623,94**	**88.458.714.456,90**

(Penyajian selengkapnya nilai Persediaan untuk Tahun Anggaran 2025 terdapat pada Lampiran IV).

Dari nilai Persediaan yang disajikan pada tabel diatas, diantaranya terdiri dari persediaan untuk dijual/diserahkan sebesar Rp75.701.755.373,31 yang tersebar pada SKPD berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp635.216.977,62;
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp69.043.184,00;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp57.821.724.934,86;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.089.593.761,00;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp14.608.829.350,00;
6. Dinas Sosial sebesar Rp48.905.660,00;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp152.710.144,14;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp14.840.700,00;
9. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp91.978.000,00;
10. Dinas Pertanian sebesar Rp162.555.136,69; dan
11. Sekretariat Daerah sebesar Rp6.357.525,00.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp105.443.605.272,23 dan Rp101.459.735.965,18 yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.23
Rincian Investasi Jangka Panjang

	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (%)
1	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**			
	- Dana bergulir	4.925.506.331,00	4.925.506.331,00	0,00
	- Dana bergulir Tak tertagih	(4.223.058.998,00)	(4.224.305.907,00)	(0,03)
	Jumlah Investasi Non Permanen	**702.447.333,00**	**701.200.424,00**	**0,18**
2	**Investasi Jangka Panjang Permanen**			
	- PT Bank Nagari	70.243.253.179,00	69.243.253.179,00	1,44
	- PDAM Kabupaten Agam	31.673.005.760,23	28.690.383.362,18	10,40
	- PT Balairung Citra Jaya Sumbar	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**104.741.157.939,23**	**100.758.535.541,18**	**3,95**

	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (%)
	Permanen			
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**105.443.605.272,23**	**101.459.735.965,18**	**3,93**

1) **Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Saldo Investasi Non Permanen merupakan jumlah dana bergulir per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp702.447.333,00 dan Rp701.200.424,00. Penilaian dan penyajian Dana Bergulir dalam Laporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yakni nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Reliazable Value)*.

Pengalokasian Dana Bergulir melalui APBD Kabupaten Agam dimulai dari tahun 2001 s.d 2007, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.033.000.000,00 dengan rincian pengelola awal sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.24
Pengelola Awal Dana Bergulir Kabupaten Agam

Bank Pelaksana / BMT	TAHUN REALISASI							
	2001 (Rp)	2002 (Rp)	2003 (Rp)	2004 (Rp)	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bank Nagari	73,000,000,00	316,000,000,00	296.500,000,00	675,000,000,00	202,000,000,00	616.200,000,00	384.500,000,00	2.563.200,000,00
BPR Manggopoh	138,000,000,00	246.500,000,00	123.500,000,00	5,000,000,00	110,000,000,00	152.300,000,00	254.500,000,00	1.029.800,000,00
BPR Tilatang Kamang	12,000,000,00	50.500,000,00	191.500,000,00	20,000,000,00	93.500,000,00	94,000,000,00	148,000,000,00	609.500,000,00
BPR Panampuang	70,000,000,00	127,000,000,00	138.500,000,00	50,000,000,00	94.500,000,00	137.500,000,00	213,000,000,00	830.500,000,00
Grand Total	293,000,000,00	740,000,000,00	750,000,000,00	750,000,000,00	500,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	5.033,000,000,00

Bank Penyalur melakukan penagihan atas dana bergulir dan hasil tagihan disetorkan kembali ke Rekening Pokok Angsuran Dana Bergulir pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung dengan Nomor 1600.0210.05176-0 an. Angsuran Pokok Dana Bergulir Agam, sementara bunga yang diterima disetorkan ke rekening bunga dana bergulir pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung dengan Nomor 1600.0210.05184-1 an. Bunga Dana Bergulir. Perkembangan pengelolaan dana bergulir pada 4 (empat) Bank Pengelola Awal s.d 31 Desember 2025 berdasarkan nilai yang tertagih dan tunggakannya, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.25
Rekapitulasi Jumlah Pengurangan Pokok Dana Bergulir dan Pokok Dana Bergulir yang Tertunggak

No	Bank Pelaksana	Pokok Dana Bergulir	Pengurangan Pokok Dana Bergulir	Pokok Dana Bergulir yang tertunggak
1	Bank Nagari	2.563.200.000,00	1.051.098.744,00	1.512.101.256,00
2	BPR Manggopoh	1.029.800.000,00	362.777.159,00	667.022.841,00
3	BPR Tilatang Kamang	609.500.000,00	233.844.828,00	375.655.172,00
4	BPR Panampuang	830.500.000,00	343.486.110,00	487.013.890,00
	Jumlah	**5.033.000.000,00**	**1.991.206.841,00**	**3.041.793.159,00**

Pengurangan Pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.991.206.841,00 berasal dari tertagihnya Pokok Dana Bergulir sebesar Rp1.883.713.172,00 dan crash program yaitu pemberian keringanan berupa pemotongan pokok utang terhadap debitur sebesar Rp107.493.669,00. Atas nilai pokok dana bergulir yang tertagih sebesar Rp1.883.713.172,00 tersebut disalurkan kembali secara bertahap ke BMT Agam Madani Nagari Lubuk Basung sebesar Rp1.269.500.000,00 dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.26
Uraian Dana Pokok Yang Diterima BMT Lubuk Basung

NO	TGL PELIMPAHAN	JUMLAH (RP)	DASAR/SRT TKDB
1	26 Mei 2008	106.000.000,00	No. 028/TKDB-Ag/2008
2	10 Juni 2008	56.000.000,00	No.029/TKDB-Ag/2008
3	8 Agustus 2008	104.000.000,00	No. 038/TKDB-Ag/2008
4	19 September 2008	160.000.000,00	No.042/TKDB-Ag/2008
5	28 Mei 2009	340.000.000,00	No.06/TKDB-Ag/2009
6	14 Januari 2010	384.000.000,00	No. 01/TKDB-Ag/2010
7	22 Februari 2010	18.500.000,00	No. 03/TKDB-Ag/2010
8	21 Mei 2010	101.000.000,00	No. 05/TKDB-Ag/2010
	JUMLAH	**1.269.500.000,00**	

BMT Agam Madani Nagari Lubuk Basung sampai dengan 31 Desember 2025 melakukan penyaluran atas dana bergulir sebesar Rp1.269.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyaluran dana bergulir dengan umur piutang diatas 2 tahun sebesar Rp1.180.971.839,00;
b. Penyaluran dana bergulir dengan umur piutang diantara 1 s.d 2 tahun sebesar Rp588.000,00;
c. Penyaluran dana bergulir tahun 2025 sebesar Rp7.666.000,00;
d. Pengembalian pokok dana bergulir yang belum disetor ke rekening Angsuran Dana Bergulir sebesar Rp11.887.835,00;
e. Pengembalian pokok yang telah disetor ke rekening Angsuran Dana Bergulir sebesar Rp68.386.326,00.

Sehingga sisa dana bergulir yang pada BMT Agam Madani Nagari Lubuk Basung yang belum tertagihkan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.189.225.839,00.

Sampai dengan 31 Desember 2025, total dana bergulir yang masih belum tertagih pada Bank Pengelola berjumlah sebesar Rp4.231.018.998,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.27
Sisa Dana Bergulir yang Belum Tertagih per 31 Desember 2025

NO	Bank Pelaksana	Sisa Dana Bergulir (RP)
1	Bank Nagari	1.512.101.256,00
2	BPR Manggopoh	667.022.841,00
3	BPR Tilatang Kamang	375.655.172,00
4	BPR Panampuang	487.013.890,00
5	BMT Agam Madani Nagari Lubuk Basung	1.189.225.839,00

NO	Bank Pelaksana	Sisa Dana Bergulir (RP)
	JUMLAH	**4.231.018.998,00**

Selama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan percepatan pengembalian pokok dana bergulir, diantaranya:

a. Melakukan pelacakan, penagihan dan penelitian lapangan kepada penanggung hutang untuk dapat melakukan pendekatan kepada debitur dalam penyelesaian piutang dan melihat kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran
b. Melakukan serah terima barang jaminan dengan debitur yang telah melakukan pelunasan yang dilengkapi oleh dokumen bukti bahwa debitur telah melakukan penyelesaian
c. Melaksanakan rekonsiliasi data dengan KPKNL Bukittinggi
d. Menghubungi serta mengingatkan debitur dengan jumlah piutang dibawah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) agar melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya dan melakukan update data angsuran.
e. Memeriksa dokumen perjanjian kredit beserta kelengkapan dan meminta kepada bank penyalur untuk dilengkapi.

Berdasarkan kebijakan akuntansi sebagai dasar penyajian Dana Bergulir, penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih diperoleh dengan membuat penyisihan untuk setiap kategori Kolektibilitas Piutang Dana Bergulir dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.28
Kriteria Kolektabilitas Dana Bergulir Kabupaten Agam

No	Kriteria	Kondisi	Penyisihan (%)
1.	Lancar	Tidak terjadi tunggakan	0
2.	Diragukan dapat ditagih	Tunggakan sampai 1 tahun	10
3.	Macet/Tidak dapat ditagih	Tunggakan lebih dari 1 tahun s.d 2 tahun	50
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 2 tahun	100

Rekapitulasi pengelompokan penyisihan piutang dana bergulir per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.29
Rekapitulasi Pengelompokan Penyisihan Piutang Pokok Dana Bergulir
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

NO	BANK PELAKSANA	LANCAR	DIRAGUKAN TERTAGIH (S.D 1 TAHUN)	TIDAK DAPAT DITAGIH (≥ 1 TAHUN ≤ 2 TAHUN)	MACET (≥ 2 Tahun)	JUMLAH PENYISIHAN
		0%	10%	50%	100%	
1	Bank Nagari Cab Lubuk Basung	-	-	-	1.512.101.256,00	1.512.101.256,00
2	BMT Agam Madani Lubuk Basung	-	-	294.000,00	1.180.971.839,00	1.181.265.839,00
3	BPR Manggopoh	-	-	-	667.022.841,00	667.022.841,00
4	BPR Tialang Kamang	-	-	-	375.655.172,00	375.655.172,00
5	BPR Panampuang	-	-	-	487.013.890,00	487.013.890,00
	Jumlah	**-**	**-**	**294.000,00**	**4.222.764.998,00**	**4.223.058.998,00**

Berdasarkan perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diatas, maka penyajian nilai investasi non permanen (Dana Bergulir) adalah sebagai berikut:

Dana Bergulir	Rp	5.033.000.000,00
Keringanan Utang (crash program)	Rp	(107.493.669,00)
Sisa pokok dana bergulir	Rp	4.925.506.331,00
Penyisihan dana bergulir	Rp	(4.223.058.998,00)
NPV dana bergulir	**Rp**	**702.447.333,00**

Nilai penerimaan angsuran pokok dana bergulir s.d Desember 2025 yang telah disetorkan ke Rekening Angsuran Pokok Dana Bergulir dan Bunga Dana Bergulir sesuai saldo rekening bank per 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp704.187.572,00 dan Rp42.431.086,00. Sementara jumlah penerimaan angsuran pokok yang seharusnya masuk ke rekening angsuran pokok adalah sebesar Rp682.599.498,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Dana Bergulir	Rp	5.033.000.000,00
Keringanan Utang (crash program)	Rp	(107.493.669,00)
Sisa pokok dana bergulir	Rp	4.925.506.331,00
Jumlah pokok belum tertagih	Rp	(4.231.018.998,00)
Jumlah pengembalian pokok seharusnya	Rp	694.487.333,00
Pengembalian pokok yang belum ditransfer ke rekening angsuran oleh BMT Agam Madani Nagari Lubuk Basung	Rp	(11.887.835,00)
Jumlah angsuran pokok di rekening seharusnya	**Rp**	**682.599.498,00**

Perbedaan nilai tersebut antara lain disebabkan oleh kesalahan transfer angsuran pokok dana bergulir yang masuk ke rekening bunga dana bergulir dan sebaliknya, serta terdapat bunga tabungan yang masuk ke rekening angsuran pokok. Sampai dengan 31 Desember 2025, belum pernah dilakukan rekonsiliasi dengan Bank Nagari, Bank Pengelola dan Pemerintah Kabupaten Agam untuk menelusuri perbedaan tersebut.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp104.741.157.939,23 dan Rp100.758.535.541,18. Adapun rincian dari saldo Investasi Permanen Per 31 Desember 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.30
Rincian Investasi Permanen Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Penyertaan Modal Pemda (Rp) Tahun 2025	Penyertaan Modal Pemda (Rp) Tahun 2024	% Kepemilikan
1	Bank Nagari	70.243.253.179,00	69.243.253.179,00	3,60
2	PDAM Kabupaten Agam	31.673.005.760,23	28.690.383.362,18	100,00
3	PT Balairung Citra Jaya Sumbar	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	1,72
	Jumlah	**104.741.157.939,23**	**100.758.535.541,18**	

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp104.705.949.976,92, yang terbagi pada:

a) Bank Nagari

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam pada PT Bank Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Per 31/12/2024	Rp	69.243.253.179,00
Penambahan Penyertaan Modal 2025	Rp	1.000.000.000,00
Saldo akhir Per 31/12/2025	Rp	**70.243.253.179,00**

Pada Tahun 2025, ada penambahan penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000,00, sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada PT Bank Nagari Per 31 Desember 2025 bertambah menjadi sebesar Rp70.243.253.179,00, yang terdiri dari 69,243 lembar saham seri A dengan porsi kepemilikan menjadi sebesar 3,60%. Berdasarkan data dan laporan dari Bank Nagari Per 31 Desember 2025, disebutkan bahwa posisi saham Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025, menurut data Bank adalah sebesar Rp70.243,000,000,00 sehingga terdapat selisih penyajian sebesar Rp253.179,00. Selisih ini disebabkan karena pada tahun 2007 terjadi perubahan jenis saham dari saham biasa ke saham seri A, yang menimbulkan tambahan biaya/cost pada Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp253.179,00. Tambahan biaya ini diakui dan disajikan sebagai penambah biaya perolehan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap Bank Nagari.

b) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada Perumda Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam (selanjutnya disebut dengan Perumda) sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp2.765.178.281,00. Pada TA 2016, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk Non Kas ke Perumda sebesar Rp22.724.527.144,00 yang merupakan kebijakan penghapusan Utang PDAM oleh Pemerintah Pusat melalui Hibah Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Agam yang nantinya akan dianggap sebagai penambah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada Perumda berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah dalam bentuk Non Kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, dimana pada lampirannya disebutkan bahwa alokasi hibah untuk penyelesaian piutang negara bagi Kabupaten Agam adalah sebesar Rp22.724.529.000,00. Surat ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Penambahan penyertaan modal (Non Kas) pada Perumda melalui penerbitan SP2D Nomor: 531/LS-BUD/PPKD/2016 pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nilai

sebesar Rp22.724.527.144,00 sesuai dengan nilai SPM No.00011A/925261/2016 tanggal 25 November 2016 dan SP2D Nomor: 160191304021596 tanggal 29 November 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp25.489.705.425,00. Terdapat selisih nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam yang disajikan di Neraca Pemda dengan Neraca Perumda sebesar Rp1.856,00 yang disebabkan karena PDAM mencatat penambahan nilai penyertaan modal Pemda mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016, sebesar Rp22.724.529.000,00, sementara nilai penambahan penyertaan modal yang disajikan pada Neraca Pemda berdasarkan nilai SP2D Nomor: 531/LS-BUD/PPKD/2016 yang diterbitkan sebesar Rp22.724.527.144,00.

Kemudian pada tahun 2017, nilai penyertaan modal Pemda pada Neraca Pemerintah Kabupaten Agam menjadi sebesar Rp27.362.614.189,00 yang disebabkan karena terjadi penambahan nilai penyertaan modal yang berasal dari Modal Hibah sebesar Rp1.872.908.764,00 yang sebelumnya tidak diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam oleh Perumda.

Selanjutnya tahun 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Agam berupa Pipa Distribusi PDAM senilai Rp4.994.891.000,00 yang berasal dari Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Persediaan Pemerintah Kabupaten Agam berupa Pipa Distribusi PDAM kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2020 Nomor: 600/83/Aset/DPUTR-AG/2020. Persediaan yang diserahterimakan ini berasal dari Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Tahun Anggaran 2019 “Peningkatan Pipa Distribusi PDAM Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam” pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.

Pada tahun 2023, Perumda telah mengakui penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp11.259.862.947,15 yang terdiri dari penambahan nilai penyertaan modal Pemda sebesar Rp8.003.468.047,15 selama tahun 2023 berdasarkan pada Berita Acara Mutasi Barang Nomor:000.2.3.2/133/DPUTR-AG/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diserahterimakan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dengan Direktur Perumda Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam. Sementara sisanya merupakan penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.256.394.900,00 yang berasal dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun sebelumnya, sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam menjadi sebesar Rp43.617.368.136,15.

Untuk tahun 2024, Perumda telah mengakui penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp3.239.308.325,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara antara Dinas PUTR dengan Perumda, Nomor 01/CK/DPUTR-AG/2024 tanggal 16 Januari 2024 berupa aset Gedung dan Peralatan/Mesin Pengolahan AMDK.

Disamping itu, berdasarkan Laporan Keuangan Perumda tahun 2024 (Audited), Penyertaan Modal yang sebelumnya “*belum ditetapkan statusnya*” telah ditetapkan statusnya sebagai bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar

Rp2.370.616.122,00, sehingga menambah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam menjadi sebesar Rp49.227.292.583,15.

Penambahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam dari tahun 2017 sd tahun 2025 ini, belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Saat ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam, sedang dalam tahap ***Pembahasan Bersama*** dengan DPRD Kabupaten Agam.

Berikut data penyertaan modal pada Perumda Per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagaimana yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.1.31
Rekapitulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada Perumda Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	**Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2022:**	
1	Penyertaan Modal Pemda awal (s.d tahun 2015)	2.765.178.281,00
2	Bentuk Non Kas hibah Pusat	22.724.527.144,00
	Perda Penyertaan Modal untuk PDAM	**25.489.705.425,00**
3	Modal Hibah (atas rekomendasi tim BPK)	1.872.908.764,00
4	Peningkatan Pipa Distribusi PDAM, Nagari Lubuk Basung (PUTR) berdasarkan BAST DPUTR dengan PDAM tahun 2021	4.994.891.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2022	**32.357.505.189,00**
II	**Penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2023:**	
1	Proyek Stimulus Lubuk Basung	3.256.394.900,00
2	Proyek pengembangan jaringan perpipaan (Pernyertaan Modal Pemerintah yang belum ditetapkan)	1.793.000.000,00
3	Pengembangan jaringan perpipaan Lubuk Basung	105.883.117,32
4	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Nagari Garagahan, Lubuk Basung	1.616.000.000,00
5	Perbaikan Intake PDAM PDAM Arikia dan Silasung Jorong Lubuk Sao Nagari Tj. Sani	177.916.163,83
6	Air Bersih Tengkong-Tengkong, Lubuk Basung	199.800.000,00
7	Pengembangan SPAM di Kawasan Nelayan Kab. Agam	493.135.199,00
8	Bantuan Program PDAM Kabupaten Agam	2.691.834.567,00
9	Optimalisasi SPAM IKK untuk MBR, IKK Lubuk Basung	925.899.000,00
	Jumlah penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2023 berdasarkan BAST DPUTR dengan PDAM	**11.259.862.947,15**
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2023	**43.617.368.136,15**
III	**Penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2024:**	
1	Rehap Gedung pengolahan AMDK	692.271.000,00
2	Mesin untuk pengolahan AMDK	2.302.917.000,00
3	Pengawasan Rehap Gedung pengolahan AMDK	96.914.900,00
4	Belanja Penambahan Daya Listrik Rehab Gedung Pengolahan AMDK	147.205.425,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Jumlah penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2024 berdasarkan BAST DPUTR dengan PDAM	**3.239.308.325,00**
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2024	**46.856.676.461,15**
IV	**Penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2025:**	
1	Akumulasi biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih di Kab Agam yang dibiayai melalui proyek peningkatan Sarana Air Bersih Prov Sumbar (1990-1998)	2.126.343.122,00
2	Penyertaan Pemprov melalui proyek Peningkatan Sarana Air Bersih	244.273.000,00
	Penyertaan Modal yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2024 (Audited)	**2.370.616.122,00**
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2025	**49.227.292.583,15**
Total Penyertaan Modal PDAM yang diakui sebagai dasar penyajian nilai penyertaan modal Pemda pada Neraca Pemerintah Kabupaten Agam		**49.227.292.583,15**
Total Penyertaan Modal PDAM milik Pemda (menurut Laporan Keuangan PDAM tahun 2025-Aaudited)		**49.227.294.439,15**
Selisih		**(1.856,00)**

Penambahan nilai penyertaan modal Pemda pada tahun 2025 diikuti dengan peningkatan persentase komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Agam, dari sebelumnya sebesar 95,18% menjadi 100,00% sehingga penyajian penyertaan modal di Neraca menggunakan metode ekuitas (equity method). Salah satu konsekuensi penerapan equity method adalah pengakuan Laba/Rugi Perusahaan akan menambah/mengurangi penyajian nilai penyertaan modal sebesar komposisi kepemilikan Pemda.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2025 (Audited), Perumda membukukan akumulasi kerugian sebesar Rp19.235.474.513,37 dan laba selama tahun berjalan sebesar Rp1.681.187.690,45. Kondisi ini mengakibatkan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perumda Per 31 Desember 2025 disajikan menjadi sebesar Rp31.673.005.760,23, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo awal (Per 31 Desember 2024)	Rp28.690.383.362,18
Penambahan:	
- Bagian dari Laba TA 2025 (A*udited*)	Rp 1.681.187.690,45
- Koreksi atas akumulasi kerugian s.d tahun lalu	Rp 1.301.434.707,60
Saldo akhir Per 31 Desember 2025	**Rp31.673.005.760,23**

c) PT Balairung Citra Jaya Sumbar

Penyertaan modal ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diinvestasikan ke PT Balairung Citra Jaya Sumbar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.824.899.000,00. Selama Tahun 2025, tidak ada penambahan penyertaan modal sehingga nilai penyertaan masih sama dengan tahun lalu yakni Rp2.824.899.000,00, yang terdiri dari:

- Seri A= 1.694 lembar @ 1,000,000,00 Rp 1.694,000.000,00
- Seri B =1.130.899 lembar @ 1,000,00 Rp 1.130.899.000,00

Jumlah **Rp 2.824.899.000,00**

Penyertaan Modal pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar dilaksanakan dengan tiga kali penyertaan modal yaitu Tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00. Tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Tahun 2011 sebesar Rp824.899.000,00, sehingga total investasi Pemerintah Kabupaten Agam pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar adalah sebesar Rp2.824.899.000,00. Penyajian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam ke PT. Balairung Citra Jaya Sumbar menggunakan metode biaya *(cost method)* karena komposisi penyertaan modal hanya 1,72% dari total modal disetor Per 31 Desember 2025 berdasarkan Laporan Keuangan PT Balairung Citra Jaya Tahun 2025.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perencanaan, perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.761.403.123.078,12 dan Rp1.828.491.441.820,70. Aset Tetap tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp67.088.318.742,58 atau 3,67% dari nilai tahun sebelumnya. Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.32
Mutasi Aset Tetap (dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Akhir	Tahun 2025		Saldo Akhir 31 Des 2025
		31 Des 2024	Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	317.496.019.164,91	1.047.537.260,00	297.024.610,00	318.246.531.814,91
2	Peralatan dan Mesin	436.250.802.336,74	43.121.899.116,03	11.272.959.742,62	468.099.741.710,15
3	Gedung dan Bangunan	1.085.761.614.251,40	7.485.932.311,50	2.233.854.814,83	1.091.013.691.748,07
4	Jalan Jaringan dan Irigasi	2.484.919.419.058,65	22.054.551.538,00	1.786.781.350,00	2.505.187.189.246,65
5	Aset Tetap Lainnya	60.676.950.106,93	7.221.171.098,00	178.607.743,00	67.719.513.461,93
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.293.528.375,50	505.435.257,01	4.184.928.747,50	6.614.034.885,01
Total Aset Tetap		**4.395.398.333.294,13**	**81.436.526.580,54**	**19.954.157.007,95**	**4.456.880.702.866,72**
Akumulasi Penyusutan		**(2.566.906.891.473,43)**	**(136.602.647.808,75)**	**(8.031.959.493,58)**	**(2.695.477.579.788,60)**
Nilai Buku aset Tetap		**1.828.491.441.820,70**	**-55.166.121.228,21**	**11.922.197.514,37**	**1.761.403.123.078,12**

Rincian Aset Tetap per komponen masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran V.**

1) Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp318.246.531.814,91 dan Rp317.496.019.164,91. Nilai Tanah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp750.512.650,00 atau 0,24% dari saldo tahun sebelumnya.

Mutasi penambahan dan pengurangan Tanah Per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.33
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tanah (dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 *(audited)*	**317.496.019.164,91**
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2025	**317.496.019.164,91**
2	**Mutasi Penambahan**	
	Mutasi Masuk Antar SKPD	222.343.630,00
	Reklas JJI ke Tanah	725.700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	35.593.630,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**983.637.260,00**
3	**Mutasi Pengurangan**	
	Mutasi Keluar Antar SKPD	222.343.630,00
	Hibah Keluar	10.780.980,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**233.124.610,00**
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	**318.246.531.814,91**

Penambahan tanah sebesar Rp983.637.260,00, yang merupakan:

- Mutasi masuk antar SKPD yang terdapat pada Badan Pendapaan Daerah sebesar Rp186.750.000,00 yang berasal dari mutasi Dinas Sosial berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dan Dinas PUTR sebesar Rp35.593.630,00 yang merupakan mutasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atas penilaian tanah jalan menuju masjid sirah di kecamatan Tanjung Mutiara.
- Reklasifikasi Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp725.700.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang karena adanya kesalahan anggaran yang berasal dari belanja Jalan Irigasi dan Jaringan yang direalisasikan ke belanja Tanah Jalan dan Jembatan yang menuju Mesjid Sirah di Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara.
- Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp35.593.630,00 yang berasal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pengurangan tanah sebesar Rp233.124.610,00, yang merupakan:

- Mutasi antar SKPD, terjadi karena perpindahan aset dari Dinas Sosial sebesar Rp186.750.000,00 yang dimutasikan ke Badan Pendapaan Daerah dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp35.593.630,00 dimutasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Hibah keluar sebesar Rp10.780.980,00. Yang berasal dari Dinas Kesehatan untuk dihibahkan kenagari batu taba, untuk pembangunan gedung posyandu.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp468.099.741.710,15 dan Rp436.250.802.336,74. Nilai Peralatan dan Mesin tahun

2025 mengalami peningkatan sebesar Rp31.848.939.373,41 atau 7,30% dari nilai tahun sebelumnya.

Mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.34
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin (dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 *(audited)*	436.250.802.336,74
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2025	**436.250.802.336,74**
2	**Mutasi Penambahan**	
	Belanja Modal	27.846.028.860,00
	Barang belum tercatat	63.880.500,00
	Mutasi Masuk Antar SKPD	6.404.103.094,00
	Dari Dana BTT	95.760.993,00
	Pendapatan Hibah	7.717.972.166,00
	Reklas / Kapitalisasi dari Belanja Barang jasa	128.628.478,00
	Reklas dari Aset tetap Lainnya	67.668.618,00
	Reklas dari Aset Lainnya	797.856.407,03
	Jumlah Mutasi Penambahan	**43.121.899.116,03**
3	**Mutasi Pengurangan**	
	Mutasi Keluar Antar SKPD	6.404.103.094,00
	Penghapusan	1.735.001.037,09
	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	27.345.800,00
	Reklas ke Aset Lainnya	1.289.808.978,03
	Reklas ke Extracomtable	1.490.000,00
	Belanja Modal yang menjadi Aset Extracomtable	1.638.286.888,50
	Belanja Modal yang menjadi Habis Pakai	176.923.945,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**11.272.959.742,62**
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	**468.099.741.710,15**

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.121.899.116,03, terdiri dari:

a) Dari Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp27.846.028.860,00 terdapat pada SKPD yaitu:

(1).	Sekretariat Daerah	Rp	3.105.986.094,00
(2).	Sekretariat DPRD	Rp	1.268.674.700,00
(3).	Inspektorat	Rp	271.803.204,00
(4).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	7.345.365.849,00

(5).	Dinas Kesehatan	Rp	13.003.933.890,00
(6).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp	148.016.773,00
(7).	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	500.391.227,00
(8).	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Rp	23.274.999,00
(9).	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Rp	117.222.700,00
(10).	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	414.881.200,00
(11).	Dinas Pertanian	Rp	39.081.947,00
(12).	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	Rp	46.117.888,00
(13).	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Rp	52.085.500,00
(14).	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Rp	70.244.500,00
(16).	Dinas Sosial	Rp	24.404.400,00
(17).	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	6.450.000,00
(18).	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp	182.907.501,00
(20).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	304.544.908,00
(22).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	230.442.004,00
(23).	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp	60.899.151,00
(24).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	80.364.999,00
(25).	Badan Keuangan Aset Daerah	Rp	196.672.800,00
(26).	Badan Pendapatan Daerah	Rp	161.443.796,00
(27).	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	35.760.000,00
(28).	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp	33.486.480,00
(29).	Kecamatan Tanjung Mutiara	Rp	5.272.500,00
(30).	Kecamatan Lubuk Basung	Rp	16.761.000,00
(31).	Kecamatan IV Koto	Rp	33.338.850,00
(32).	Kecamatan Banuhampu	Rp	66.200.000,00

b) Barang belum tercatat yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Rp63.880.500,00.

c) Mutasi antar SKPD sebesar Rp6.404.103.094,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.35
Rincian Peralatan dan Mesin Mutasi barang antar SKPD (dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	403.000.000,00	Mutasi dari Dinas Inspektorat berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
		463.500.000,00	Mutasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.
		403.300.000,00	Mutasi dari Dinas Kesehatan berupa 1 (satu) Kendaraan Roda Empat.
		304.570.040,00	Mutasi Dari Badan Pendapatan Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.
		133.930.375,00	Mutasi Dari Dinas Komunikasi dan Informatika berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.
2	Inspektorat	497.354.000,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.
3	Dinas Kesehatan	357.559.500,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	59.657.123,00	Mutasi Dari Pertanian berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	125.000.000,00	Mutasi dari Dinas Kesehatan berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
		22.191.725,00	Mutasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua.
6	Dinas Lingkungan Hidup	192.505.106,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
7	Dinas Pertanian	578.460.300,00	Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	24.586.500,00	Mutasi Dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa 1 (satu) Unit Tablet PC.
9	Dinas Sosial	14.135.000,00	Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 1 (satu) Unit Kendaraan roda dua
10	Dinas Perhubungan	34.890.000,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua
		22.191.725,00	Mutasi dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua.
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	190.500.000,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	123.152.850,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
13	Dinas Arsip dan Perpustakaan	249.425.000,00	Mutasi Dari Inspektorat berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	360.412.200,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
15	Badan Keuangan dan Aset Daerah	352.279.000,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
		105.000.000,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
		90.000.000,00	Mutasi Dari Dinas Kesehatan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
		51.780.000,00	Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
		146.970.000,00	Mutasi Dari Dinas Kesehatan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
		5.500.000,00	Mutasi Dari Kecamatan Kamang Magek berupa 1 (satu) Unit Kendaraan dua.
		379.835.650,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
16	Badan Pendapatan Daerah	360.138.000,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
		352.279.000,00	Mutasi Dari Badan Keuangan dan Aset berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).

d) Dari dana BTT sebesar Rp95.760.993,00 yang merupakan Belanja Tak Terduga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

e) Pendapatan Hibah sebesar Rp7.717.972.166,00 merupakan penerimaan barang hibah dengan rincian sebagai berikut:

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35.519.000,00 yang berasal dari Sumbangan dan Kenang-kenangan Siswa/ Alumni.

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp24.500.000,00 yang berasal dari Koperasi Pegawai negeri (KPPNS).

(3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp7.657.953.166,00 yang berasal dari BNPB Nasional.

f) Reklas/Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp128.628.478,00 merupakan kapitalisasi Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin nilainya memenuhi batas kapitalisasi aset. Kapitalisasi belanja pemeliharaan ini terdapat pada SKPD:

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp55.894.328,00 yang berasal dari belanja barang dan jasa BOS, namun yang direalisasikan untuk pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

(2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.173.600,00 yang direklas dari Belanja Barang dan Jasa namun direalisasikan untuk pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

(3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.700.000,00 yang direklas dari Belanja Barang dan Jasa namun direalisasikan untuk pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan belanja pemeliharaan sebesar Rp11.377.500,00.

(4) Sekretariat Daerah dari belanja pemeliharaan sebesar Rp28.338.550,00.

(5) Sekretariat DPRD dari belanja pemeliharaan Rp14.543.000,00.

(6) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari belanja pemeliharaan Rp2.000.000,00.

(7) Dinas Arsip dan Perpustakaan dari belanja pemeliharaan Rp9.601.500,00.

g) Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp67.668.618,00 terdiri dari Sekretariat Daerah sebesar Rp29.026.500,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp38.642.118,00.

h) Reklasifikasi dari aset lainnya sebesar Rp797.856.407,03 merupakan aset rusak berat yang diketahui masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan berdasarkan hasil verifikasi, sehingga direkomendasikan untuk direklas ke aset tetap, terdapat pada SKPD:

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp700.943.407,03;

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp90.000.000,00; dan

(3) Kecamatan Candung sebesar Rp6.913.000,00.

Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.272.959.742,62 terdiri dari:

a) Mutasi antar SKPD sebesar Rp6.404.103.094,00 terjadi karena perpindahan aset dari SKPD sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.3.1.54.

b) Penghapusan selama tahun 2025 sebesar Rp1.735.001.037,09 terjadi karena adanya barang rusak berat dan diusulkan penghapusan, yang terdapat pada SKPD berikut:

Tabel 5.3.1.36
Rincian Penghapusan Aset (dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	47.671.500,00
2	Inspektorat	77.042.673,00
3	Dinas Kesehatan	407.776.492,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.000.000,00
5	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	133.120.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	484.637.000,00
7	Dinas Pertanian	154.647.050,00
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	113.397.591,00
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	80.905.081,09
10	Badan Keuangan Aset Daerah	212.668.650,00
11	Kecamatan Lubuk Basung	19.135.000,00
Jumlah		**1.735.001.037,09**

c) Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp1.318.644.778,03 terdiri dari :

(1) Reklas ke Aset Tetap lainnya disebabkan adanya kesalahan anggaran sebesar Rp27.345.800,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.025.800,00 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.320.000,00; dan

(2) Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset lainnya merupakan barang rusak berat yang direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp1.289.808.978,03, terdapat pada SKPD yaitu :

(1).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	448.178.209,03
	Dinas Pengendalian Penduduk		
(2).	Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.	612.964.000,00
(3).	Dinas Lingkungan Hidup	Rp.	143.587.860,00

(4).	Dinas Perhubungan	Rp.	27.798.909,00
(5).	Kecamatan Tilatang Kamang	Rp.	9.000.000,00
(6).	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp.	48.280.000,00

(3) Reklas ke Aset Extracomtable pada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp49.770.000,00.

d) Belanja Modal yang menjadi Aset Extracomtable sebesar Rp1.638.286.888,50 terjadi karena adanya belanja modal yang nilainya tidak memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap yang terdapat pada:

(a).	Sekretariat Daerah	Rp	17.350.700,00
(b).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.268.694.405,50
(c).	Dinas Kesehatan	Rp	292.162.186,00
(d).	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	23.391.996,00
(e).	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Rp	1.287.600,00
(f).	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Rp	1.300.000,00
(g).	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp	1.700.000,00
(h).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	9.750.001,00
(i).	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp	450.000,00
(j).	Kecamatan Banuhampu	Rp	22.200.000,00

e) Belanja Modal yang menjadi Aset Barang Habis Pakai sebesar Rp176.923.945,00 yang merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk membeli barang habis pakai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp23.466.445,00 dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp153.457.500,00.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.091.013.691.748,07 dan Rp1.085.761.614.251,40. Nilai Gedung dan Bangunan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp5.252.077.496,67 atau 0,48% dari nilai tahun sebelumnya.

Mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.37
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan (dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 *(audited)*	1.085.761.614.251,40
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2025	**1.085.761.614.251,40**
2	**Mutasi Penambahan**	
	Belanja Modal	7.072.853.014,00
	Mutasi Antar SKPD	79.090.060,00
	Pendapatan Hibah	56.444.000,00
	Reklas / Kapitalisasi dari Belanja Barang jasa	47.282.490,00

No	Uraian	Jumlah
	Reklas dari Aset tetap JJI	16.479.450,00
	Reklas dari Aset Tetap KDP	213.783.297,50
	Jumlah Mutasi Penambahan	**7.485.932.311,50**
3	**Mutasi Pengurangan**	
	Mutasi antar SKPD	79.090.060,00
	Penghapusan	1.163.906.228,83
	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	874.873.193,00
	Reklas ke KDP	81.455.557,00
	Koreksi utang belanja	9.925.126,00
	Belanja Modal yang menjadi Aset Extracomtable	24.604.650,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**2.233.854.814,83**
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	**1.091.013.691.748,07**

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.485.932.311,50 terdiri dari:

a) Dari Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp7.072.853.014,00 terdapat pada SKPD yaitu :

(1)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.791.779.148,00
(2)	Dinas Kesehatan	Rp	3.265.468.534,00
(3)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp	927.135.545,00
(4)	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	1.080.344.587,00
(5)	Dinas Pertanian	Rp	8.125.200,00

b) Mutasi antar SKPD sebesar Rp79.090.060,00 terdapat pada:

Tabel 5.3.1.38
Rincian mutasi antar SKPD (dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Badan Pendapatan Daerah	79.090.060,00	Mutasi dari Dinas Sosial berupa Bangunan Rumah Negara.

c) Pendapatan Hibah sebesar 56.444.000,00 terdiri dari :

Tabel 5.3.1.39
Rincian Hibah (dalam rupiah)

SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.444.000,00	Hibah dari Komite berupa Gedung Pentas Seni pada SMPN 1 Tajung Mutiara dengan Nomor BAST 425/004/SMPN 1 Tanjung Mutiara-TM/2025.

d) Reklas /Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp47.282.490,00 merupakan belanja pemeliharaan yang nilainya memenuhi batas kapitalisasi aset, yaitu pada SKPD:

(1).	Sekretariat Daerah	Rp	33.770.640,00
(2).	Inspektorat	Rp	11.471.850,00
(3).	Kecamatan Ampek Nagari	Rp	2.040.000,00

e) Aset yang Reklasifikasi sebesar Rp230.262.747,50 terdiri dari:

(1) Reklas dari Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp16.479.450,00 terdapat pada Kecamatan Kamang Magek yang merupakan kesalahan penganggaran pada belanja modal Jalan Jaringan dan Irigasi.

(2) Reklas dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan atas pekerjaan fisik yang telah selesai pada tahun 2025 sebesar Rp213.783.297,50 terdapat pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp112.662.297,50; dan
- Dinas Kesehatan sebesar Rp101.121.000,00.

Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.233.854.814,83 terdiri dari:

a) Mutasi keluar Antar SKPD sebesar Rp79.090.060,00 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5.3.1.61.

b) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp1.163.906.228,83 yang terdapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas bangunan yang rusak berat dan tidak layak huni.

c) Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp874.873.193,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan ke Aset Tetap Lainnya.

d) Reklas ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp81.455.557,00 atas kesalahan penganggaran belanja yang terdapat pada SKPD sebagai berikut:

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.418.871,00;

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp24.774.334,00; dan

(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp52.262.352,00.

e) Koreksi utang belanja sebesar Rp9.925.126,00 terdapat pada Dinas Kesehatan yang merupakan gedung bangunan Puskesmas Manggopoh setelah direviu kejaksaan sehingga adanya pengurangan nilai bangunan tersebut.

f) Belanja Modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp24.604.650,00 karena tidak memenuhi batasan kapitalisasi sebagai Aset Tetap pada Dinas Pertanian sebesar Rp8.125.200,00 dan Kecamatan Kamang Magek sebesar Rp16.479.450,00.

4) Jalan Jaringan dan Irigasi

Jalan Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.505.187.189.246,65 dan Rp2.484.919.419.058,65. Nilai Jalan Jaringan dan Irigasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp20.267.770.188,00 atau 0,82% dari nilai tahun sebelumnya.

Mutasi penambahan dan pengurangan jalan jaringan dan irigasi per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.40
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan. Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 *(audited)*	2.484.919.419.058,65
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2025	**2.484.919.419.058,65**
2	**Mutasi Penambahan**	
	Belanja Modal	15.512.561.406,00
	Utang belanja yang menjadi asset	1.900.653.520,00
	Mutasi Antar SKPD	14.975.000,00
	Reklas / Kapitalisasi dari Belanja Barang jasa	655.216.162,00
	Reklas Antar Aset Tetap KDP ke JJI	3.971.145.450,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**22.054.551.538,00**
3	**Mutasi Pengurangan**	
	Mutasi Antar SKPD	14.975.000,00
	Penghapusan	403.200.000,00
	Reklas Antar Aset Tetap JJI ke Tanah	725.700.000,00
	Reklas Antar Aset Tetap JJI ke Gedung	16.479.450,00
	Reklas Antar Aset Tetap JJI ke KDP	423.979.700,00
	Pembayaran utang belanja	2.797.200,00
	Belanja Modal menjadi Aset Tak Berwujud	199.650.000,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**1.786.781.350,00**
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	**2.505.187.189.246,65**

Penambahan Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp22.054.551.538,00 terdiri dari:

a) Dari Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp15.512.561.406,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut :

(1).	Dinas Kesehatan	Rp	1.467.971.664,00
(2).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp	13.775.669.092,00
(3).	Dinas Pertanian	Rp	2.797.200,00
(4).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Rp	249.644.000,00
(5).	Kecamatan Kamang Magek	Rp	16.479.450,00

b) Utang belanja yang menjadi Aset sebesar Rp1.900.653.520,00 yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

c) Mutasi Antar SKPD pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp.14.975.000,00 yang dimutasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan berupa Sumur dengan pompa (bangunan pengambilan pengembangan sumber air).

d) Reklas /Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp655.216.162,00 terdiri dari:

(1) Dari belanja pemeliharaan sebesar Rp247.546.313,00 karena pemeliharaan Jalan Jaringan dan Irigasi yang anggaranya berada pada rekening belanja Barang dan Jasa dengan nilai memenuhi batas Kapitalisasi Aset. Kapitalisasi belanja pemeliharaan ini terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

(2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp26.347.500,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kesalahan penganggaran dari Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan Jalan Jaringan dan Irigasi;

(3) Belanja Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat sebesar Rpp81.322.349,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan belanja jalan lingkung perumahan dama gadang.

e) Reklas dari Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp3.971.145.450,00 merupakan reklas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atas Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2024 yang selesai pengerjaannya ditahun 2025.

Mutasi pengurangan Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.786.781.350,00 terdiri dari:

a) Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp.14.975.000,00 yang berasal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang dimutasi ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan berupa Sumur dengan pompa (bangunan pengambilan pengembangan sumber air).

b) Penghapusan sebesar Rp403.200.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

c) Reklas ke Aset Tanah sebesar Rp725.700.000,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

d) Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.479.450,00 pada Kecamatan Kamang Magek.

e) Reklas ke KDP sebesar Rp423.979.700,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp74.447.700,00, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp99.888.000,00 dan Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp249.644.000,00.

f) Pembayaran utang belanja sebesar Rp2.797.200,00 pada Dinas Pertanian yang merupakan utang belanja tahun 2024 yang dibayar tahun 2025.

g) Belanja Modal menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp199.650.000,00 yang merupakan belanja modal tahun 2025 yang direalisasikan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp67.719.513.461,93 dan Rp60.676.950.106,93. Nilai Aset Tetap Lainnya tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.042.563.355,00 atau 11,61% dari nilai tahun sebelumnya.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.41
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya (dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 *(audited)*	60.676.950.106,93
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2025	**60.676.950.106,93**
2	**Mutasi Penambahan**	
	Belanja Modal	5.657.400.048,00
	Reklas Antar Aset tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya	874.873.193,00
	Reklas Antar Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	27.345.800,00
	Reklas / Kapitalisasi dari Belanja Barang jasa	661.552.057,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**7.221.171.098,00**
3	**Mutasi Pengurangan**	
	Reklas Antar Aset tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	67.668.618,00
	Belanja Modal menjadi Aset Lainnya	19.500.000,00
	Belanja Modal menjadi Aset Extracomtable	89.241.605,00
	Belanja Modal menjadi Aset Habis Pakai	2.197.520,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**178.607.743,00**
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	**67.719.513.461,93**

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.221.171.098,00 terdiri dari:

a) Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp5.657.400.048,00, terdapat pada:
   - Sekretariat Daerah sebesar Rp29.026.500,00;
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp99.069.565,00;
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp5.493.053.983,00; dan
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp36.250.000,00.

b) Reklas dari Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp874.873.193,00 merupakan aset tetap renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

c) Reklas dari Aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp27.345.800,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp26.025.800,00 dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.320.000,00; dan

d) Reklas /Kapitalisasi dari Belanja Barang jasa sebesar Rp661.552.057,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mutasi pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp178.607.743,00 terdiri dari:

a) Reklas Antar Aset tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.668.618,00 terdapat pada:

(1) Sekretariat Daerah sebesar Rp29.026.500,00 yang merupakan belanja modal yang dianggarkan di Aset Tetap Lainnya tetapi yang direalisasikan Peralatan dan Mesin;

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp38.642.118,00 yang merupakan belanja modal yang dianggarkan di Aset Tetap Lainnya tetapi yang direalisasikan Peralatan dan Mesin.

b) Belanja Modal yang tidak menjadi Aset sebesar Rp110.939.125,00 karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, berada pada SKPD sebagai berikut:

- Belanja Modal menjadi Aset Lainnya sebesar Rp19.500.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Belanja Modal menjadi Aset Extracomtable Rp89.241.605,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Belanja Modal menjadi Aset Habis Pakai sebesar Rp2.197.520,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belanja Bos yang direklas ke Barang Habis Pakai.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Kabupaten Agam sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp6.614.034.885,01 dan Rp10.293.528.375,50. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.679.493.490,49 atau 35,75% dari nilai tahun sebelumnya.

Mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.42
Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024 *(audited)*	10.293.528.375,50
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2025	**10.293.528.375,50**
2	**Mutasi Penambahan**	
	Reklas Antar Aset tetap Gedung dan Bangunan ke KDP	81.455.557,00
	Reklas Antar Aset tetap JJI ke KDP	423.979.700,00
	Penyesuaian perbedaan nilai antara nilai SIPD dan SIPKD	0,01
	Jumlah Mutasi Penambahan	**505.435.257,01**
3	**Mutasi Pengurangan**	
	Reklas Antar Aset tetap KDP ke Gedung dan Bangunan	213.783.297,50
	Reklas Antar Aset tetap KDP ke JJI	3.971.145.450,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**4.184.928.747,50**
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	**6.614.034.885,01**

Mutasi penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp505.435.257,01 terdiri dari:

a) Reklas dari Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp81.455.557,00 yang merupakan utang belanja modal yang belum selesai pengerjaannya sehingga direklas ke Kontruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari:
   - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.418.871,00.
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp24.774.334,00.
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp52.262.352,00.

b) Reklas dari Aset tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp423.979.700,00 yang merupakan utang belanja modal yang belum selesai pengerjaannya sehingga direklas ke Kontruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari:
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp99.888.000,00.
   - Dinas Kesehatan sebesar Rp74.447.700,00.
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp249.644.000,00.

c) Penyesuaian perbedaan nilai antara nilai SIPD dan SIPKD karena perbedaan pengambilan dua angka dibelakang koma sebesar Rp0,01.

Pengurangan KDP di Tahun 2025 sebesar Rp4.184.928.747,50 dengan rincian sebagai berikut:

a) Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp213.783.297,50 atas pekerjaan yang telah selesai fisiknya pada tahun 2025, terdapat pada:
   (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp112.662.297,50; dan
   (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp101.121.000,00.

b) Reklas ke Jalan Jaringan dan Irigasi terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp3.971.145.450,00 atas pekerjaan yang telah selesai fisiknya tahun 2025.

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.2.695.477.579.788,60 dan Rp2.566.906.891.473,43. Tahun 2015 merupakan tahun pertama Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penyusutan Aset Tetap. Ketentuan tentang Penyusutan Aset Tetap ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penyusutan Aset Tetap, yang telah diubah pada tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan telah diubah lagi dengan Nomor 56 Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Agam diatas ditetapkan bahwa:

a) Nilai yang disusutkan pertama kali merupakan nilai buku Per 31 Desember 2014;
b) Untuk perhitungan penyusutan pertama kali, nilai buku langsung dibagi dengan masa manfaat aset tetap yang dihitung mulai pada tahun perolehan aset tetap tersebut;

c) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan;
d) Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi oleh tim penilai yang dibentuk melalui Keputusan Bupati atau penilai independen;
e) Penambahan masa manfaat suatu Aset Tetap akibat adanya Renovasi tidak diberlakukan untuk renovasi aset tetap yang dilaksanakan sebelum tahun 2015;
f) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap. maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan;
g) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
h) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari. maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut dengan melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i) Penyesuaian meliputi atas:
   (1) nilai yang dapat disusutkan.
   (2) nilai akumulasi penyusutan.
j) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus; dan
k) Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

Tabel 5.3.1.43
Rekap Penyusutan Aset Tetap (dalam rupiah)

No	Sub Bidang Barang	Akumulasi Penyusutan Tahun per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan Tahun per 31 Desember 2025	Peningkatan Persentasi (%)
1	Peralatan dan Mesin	344.643.880.004,88	379.722.291.792,03	10,18
2	Gdung dan Bangunan	405.630.114.848,17	424.614.515.417,65	4,68
3	Jalan Jaringan dan Irigasi	1.813.090.380.967,89	1.887.164.112.178,66	4,09
4	Aset Tetap Lainnya	3.542.515.652,49	3.976.660.400,26	12,26
	TOTAL	**2.566.906.891.473,43**	**2.695.477.579.788,60**	**5,01**

d. Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Agam tidak melakukan pembentukan dana cadangan pada Tahun 2025.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp126.203.779.223,97 dan Rp142.465.140.149,24 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.1.44
Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo awal Per 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan Tahun 2025	Pengurangan Tahun 2025	Saldo Akhir Per 31 Desember 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.500.837.500,00	0,00	0	6.500.837.500,00	0	6.500.837.500,00
2	Aset Tidak Berwujud	11.150.179.067,82	1.246.784.670,00	0	12.396.963.737,82	(7.855.927.493,89)	4.541.036.243,93
3	Aset Lain-lain	124.681.739.581,42	1.335.334.978,04	18.711.096.573,31	107.305.977.986,15	(60.767.087.753,50)	46.538.890.232,65
4	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	132.384.000,00	0	132.384.000,00	0	0	0
Jumlah		**142.465.140.149,24**	**2.582.119.648,04**	**18.843.480.573,31**	**126.203.779.223,97**	**(68.623.015.247,39)**	**57.580.763.976,58**

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp6.500.837.500,00, merupakan aset Pemerintah Kabupaten Agam yang dikerjasamakan dengan PT BARETTA MUDA PRATAMA dalam bentuk Bangun Guna Serah, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/HUK/PERJJ-1997 tanggal 20 Februari 1997 dan Addendum tanggal 4 Januari 2008. Objek kemitraan ini adalah tanah eks Kantor Bupati Agam yang berlokasi di Depan Jam Gadang Bukittinggi. Perjanjian kerjasama berlaku selama 30 tahun dan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.382 atas tanah yang menjadi objek perjanjian.

2) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.396.963.737,82 dan Rp11.150.179.067,82.

Tabel 5.3.1.45
Rincian Aset Tak Bewujud

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2024			Per 31 Desember 2025			Peningkatan Persentasi (%)
		Jumlah Aset	Nilai aset	Akumulasi	Jumlah Aset	Nilai aset	Akumulasi	
1	Kajian	15	5.384.237.569,82	2.186.237.059,46	16	6.189.872.239,82	2.925.693.882,22	2,07
2	Software	356	5.765.941.498,00	4.548.284.807,00	359	6.187.591.498,00	4.926.683.611,67	3,55
3	Hak Cipta				6	19.500.000,00	3.550.000,00	100
	TOTAL	**371**	**11.150.179.067,82**	**6.734.521.866,46**	**381**	**12.396.963.737,82**	**7.855.927.493,89**	**2,84**

Mutasi penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.246.784.670,00 selama tahun 2025 yang terdapat pada SKPD:

Tabel 5.3.1.46
Penambahan Aset Tak Berwujud selama Tahun 2025

No	SKPD	Nama Aset Tak Berwujud		Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	Instrumen Musik Dan Tari	3.500.000,00

No	SKPD	Nama Aset Tak Berwujud		Nilai (Rp)
		-	Kumpulan Karya Musik(Skore)	13.000.000,00
		-	Condeset Skore	3.000.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	Penyusunan Dokumen RDTR Wilayah Perencanaan Tilatang Kamang	805.634.670,00
		-	Aplikasi E-Paksi Paket I	99.830.000,00
		-	Aplikasi E-Paksi Paket I	99.820.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah	-	Pengembangan Aplikasi - Integrasi Tanda Tangan Elektronik	222.000.000,00
Jumlah Penambahan Aset Tak Berwujud Tahun 2025				**1.246.784.670,00**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penyajian Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.855.927.493,89 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.1.47
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo Awal Amortisasi 31 Desember 2024	Penambahan Akumulasi Amortisasi	Pengurangan Akumulasi Amortisasi	Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2025
1	Sekretariat Daerah	284.807.766,67	58.000.000,00	0	342.807.766,67
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	712.695.566,66	10.305.000,00	0	723.000.566,66
3	Dinas Kesehatan	1.136.632.652,82	152.393.247,40	0	1.289.025.900,22
4	Dinas Pekerjaan Umum dna Tata Ruang	1.507.983.959,82	486.454.112,03	0	1.994.438.071,85
5	Dinas Lingkungan Hidup	41.393.760,00	19.794.240,00	0	61.188.000,00
6	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	298.755.000,00	0	0	298.755.000,00
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	380.954.610,00	194.800.590,00	0	575.755.200,00
8	Dinas Perhubungan	94.360.000,00	31.776.000,00	0	126.136.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.498.750,00	0	0	10.498.750,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.015.800,00	0	0	56.015.800,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	966.704.110,82	0	0	966.704.110,82
12	Badan Keuangan Aset Daerah	53.009.600,00	11.988.000,00	0	64.997.600,00

No	Uraian	Saldo Awal Amortisasi 31 Desember 2024	Penambahan Akumulasi Amortisasi	Pengurangan Akumulasi Amortisasi	Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2025
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.539.500,00	0	0	149.539.500,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.803.174,00	0	0	8.803.174,00
15	Sekretariat DPRD	6.066.666,67	5.600.000,00	0	11.666.666,67
16	Badan Pendapatan Daerah	1.004.642.000,00	140.298.000,00	0	1.144.940.000,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	21.658.949,00	9.996.438,00	0	31.655.387,00
	Total	**6.734.521.866,46**	**1.121.405.627,43**	**0,00**	**7.855.927.493,89**

Rincian Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud per masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran VI.**

3) Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang dinilai sudah tidak produktif dan masih dalam penelusuran serta aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp107.305.977.986,15 dan Rp124.681.739.581,42.

Mutasi aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Per 31 Desember 2024	Rp	124.681.739.581,42
Penambahan selama Tahun 2025	Rp	1.335.334.978,03
Pengurangan selama Tahun 2025 dengan rincian:		
- Mutasi	Rp	45.400.000,00
- Penghapusan	Rp	17.730.747.089,28
- Reklasifikasi	Rp	926.001.484,02
- Koreksi Pencatatan	Rp	2.035.000,00
- Belanja Modal yang menjadi Aset Lainnya	Rp	6.913.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2025	Rp	107.305.977.986,15
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(60.767.087.753,50)
Nilai Buku Aset Lain-lain	Rp	46.538.890.232,65

Aset Lain-Lain ini, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.48
Rincian Aset Lain-Lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Barang Rusak Berat (RB)	55.424.378.113,62
2	Barang hilang dalam penelusuran (Hilang)	8.198.887.145,90
3	Mutasi ke SKPD lain (Mutasi)	1.317.319.600,00
4	Bukan Milik Pemerintah Daerah (BMD)	13.698.498.206,11
5	Barang yang akan diserahkan	27.981.103.606,52
6	Barang salah pencatatan/Doubel Catat	685.791.314,00
	Jumlah	**107.305.977.986,15**

Rincian daftar Aset Lain-Lain pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Per31 Desember Tahun 2025 dan penyusutannya pada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, dapat disajikan pada **Lampiran VII.**

4) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp132.384.000,00 merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF TKD Pemda yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Dana tersebut tersimpan di Rekening "Rek Lain BI TDF TKD Kab Agam dengan Nomor rekening 519000216980 pada kantor pusat Bank Indonesia.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Agam terbagi menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp83.195.079.918,88 dan Rp75.209.688.119,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.01
Rincian Kewajiban

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Kewajiban Jangka Pendek	83.195.079.918,88	75.209.688.119,80	10,62
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		**83.195.079.918,88**	**75.209.688.119,80**	**10,62**

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp83.195.079.918,88 dan Rp75.209.688.119,80 yang terdiri atas:

Tabel 5.3.2.02
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10.917.187,00	802.550,00	1260,31
2	Pendapatan Diterima Dimuka	403.182.744,58	303.229.311,03	32,96
3	Utang Belanja	71.766.482.987,30	74.682.384.053,77	(3,90)
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.014.497.000,00	223.272.205,00	4833,21
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**83.195.079.918,88**	**75.209.688.119,80**	**10,62**

1) **Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum. Utang PFK merupakan utang atas pemotongan Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp10.917.187,00 dan Rp802.550,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.2.03
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)	
			2025	2024
1	RSUD Lubuk Basung	Utang PPN	9.543.930,00	0,00
		Utang PPh Pasal 22	1.208.257,00	0,00
		Utang PPh Pasal 21	165.000,00	802.550,00
	Jumlah		**10.917.187,00**	**802.550,00**

2) **Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah daerah, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp403.182.744,58 dan Rp303.229.311,03. Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 sebesar Rp403.182.744,58 berasal dari:

a. Pendapatan Pajak diterima dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp286.490.014,50 merupakan penerimaan pajak reklame.

b. Pendapatan sewa ATM BNI di RSUD sebesar Rp2.916.666,61.

c. Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah berupa sewa tanah oleh Koperasi Sariah Pegawai Negeri Agam Madani, di lingkungan kantor Bupati Agam sebesar Rp11.829.396,78.

d. Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah berupa Sewa ATM oleh Bank Nagari Lubuk Basung di Pasar Lama Lubuk Basung sebesar Rp18.011.333,35.

e. Pendapatan Sewa bangunan kantor oleh Bank Nagari Lubuk Basung, di Pasar Lama Lubuk Basung sebesar Rp83.935.333,34.

3) **Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat**

Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 tidak mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Pusat.

4) **Utang Belanja**

Utang belanja merupakan utang pemerintah daerah yang timbul karena aktivitas rutin yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Utang belanja ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing entitas selama1 (satu) bulan/periode, baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau periode berikutnya.

Utang belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp71.766.482.987,30 dan Rp74.682.384.053,77, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.04
Rincian Utang SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember 2025

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.920.766.520,00
2	Dinas Kesehatan	20.226.418.854,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.206.293.130,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	135.998.093,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	224.359.735,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	367.337.197,00
7	Dinas Sosial	116.246.485,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	319.969.045,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	198.517.984,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	269.182.432,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80.344.558,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	157.758.871,00
13	Dinas Perhubungan	109.684.200,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	150.058.431,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100.515.791,00
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	129.421.641,00
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	148.580.943,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	158.192.462,00
19	Dinas Pertanian	489.092.310,00
20	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	222.645.135,00
21	Sekretariat Daerah	729.566.546,00
22	Sekretariat DPRD	166.899.611,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	260.564.079,00
24	Badan Pendapatan Daerah	1.018.827.757,30
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.751.236.397,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	223.969.263,00
27	Inspektorat Daerah	204.064.397,00
28	Kecamatan Baso	33.380.263,00
29	Kecamatan Ampek Angkek	35.786.446,00
30	Kecamatan Candung	29.576.923,00
31	Kecamatan Tilatang Kamang	35.421.745,00
32	Kecamatan Kamang Magek	35.686.206,00
33	Kecamatan Palupuh	27.903.967,00
34	Kecamatan Banuhampu	30.167.259,00
35	Kecamatan Sungai Pua	27.721.643,00
36	Kecamatan IV Koto	27.246.561,00
37	Kecamatan Matur	47.275.139,00
38	Kecamatan Palembayan	29.444.124,00
39	Kecamatan Tanjung Raya	33.116.241,00
40	Kecamatan Lubuk Basung	34.223.734,00
41	Kecamatan Ampek Nagari	36.055.495,00
42	Kecamatan Tanjung Mutiara	45.696.525,00

No	SKPD	Jumlah
43	Kecamatan Malalak	30.412.657,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	140.856.192,00
	JUMLAH	**71.766.482.987,30**

Tabel 5.3.2.05
Rincian Utang SKPD Berdasarkan Jenis Belanja
Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025

NO	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Utang Belanja Pegawai	47.845.165.608,30	44.620.807.101,77
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	13.423.657.803,00	19.863.767.621,00
3	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	445.688.931,00
4	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.002.489.064,00	104.632.744,00
5	Utang Belanja Bagi Hasil	8.495.170.512,00	9.647.487.656,00
TOTAL		**71.766.482.987,30**	**74.682.384.053,77**

(*Penyajian selengkapnya nilai Utang belanja Pemerintah Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2025 terdapat pada Lampiran VIII)*.

Utang belanja Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp71.766.482.987,30 diantaranya terdapat utang pada Dinas Kesehatan (BLUD) sebesar Rp20.226.418.854,00 yang dijelaskan pada **Lampiran IX.**

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11.014.497.000,00 dan Rp223.272.205,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada akhir tahun 2025, terdiri dari:

a) Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha

Utang kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp700.000,00. Utang tahun 2024 disebabkan oleh terjadinya double transaksi setoran Retribusi Tempat Rekreasi ke Kas Daerah yaitu pada tanggal 7 dan 14 November 2024 sebesar Rp700.000,00 dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kelebihan pembayaran tersebut telah dipindahbukukan dari Rekening Kasda ke Rekening Bendahara Penerima pada tanggal 21 Januari 2025.

b) Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp11.014.497.000,00 dan Rp222.572.205,00. Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2025 dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 120 tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.2.06
Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	728.729.000,00	
2	Utang Kelebihan Pembayaran Dana	11.174.000,00	

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		
3	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	11.440.000,00	722.577,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	21.143.000,00	2.295.297,00
5	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	202.451.588,00
6	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	23.089.000,00	17.102.743,00
7	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.471.711.000,00	
8	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sawit	8.747.211.000,00	
JUMLAH		**11.014.497.000,00**	**222.572.205,00**

b. Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2025.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.120.367.878.532,95 dan Rp2.110.922.733.390,70. Penyajian nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 meningkat sebesar Rp9.445.145.142,25 atau 0,45 % jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2024. Peningkatan nilai ekuitas ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo awal : Rp 2.110.922.733.390,70
- Surplus / defisit LO : Rp 6.073.163.714,11
- Dampak akumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar selama Tahun 2025 : Rp 3.371.981.428,14

  Saldo Akhir : Rp 2.120.367.878.532,95

5.4. Laporan Operasional

5.4.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Agam dan telah diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi selama tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.497.898.206.100,64 dan Rp1.467.401.818.836,23, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.01
Rincian Pendapatan-LO

No	Pendapatan LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	209.586.309.435,68	175.174.775.377,76	19,64
2	Pendapatan Transfer	1.262.330.706.787,00	1.265.098.230.177,00	(0,22)
3	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.981.189.877,96	27.128.813.281,47	(4,23)
Jumlah		**1.497.898.206.100,64**	**1.467.401.818.836,23**	**2,08**

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Laporan Operasional untuk periode tahun 2025 dan 2024. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 dan 2024 terealisasi masing-masing sebesar Rp209.586.309.435,68 dan Rp175.174.775.377,76 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.02
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	88.006.060.942,56	52.109.302.632,44	68,89
2	Pendapatan Retribusi Daerah	99.346.097.527,04	99.027.652.525,35	0,32
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.488.312.387,45	13.948.262.975,27	11,04
4	Lain – Lain PAD Yang Sah	6.745.838.578,63	10.089.557.244,70	(33,14)
Jumlah		**209.586.309.435,68**	**175.174.775.377,76**	**19,64**

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025. Pengakuan pendapatan pajak adalah sebesar ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang diterbitkan selama tahun 2025 dan penerimaan pajak yang berdasarkan ***Self Assestment***, tidak termasuk penerimaan atas piutang tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 dan 2024 terealisasi sebesar Rp88.006.060.942,56 dan Rp52.109.302.632,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.03
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Tren
		(Rp)	(Rp)	%
1.	Hotel	0,00	442.575.163,00	(100,00)
2.	Restoran	0,00	2.094.888.484,00	(100,00)
3.	Hiburan	0,00	11.500.000,00	(100,00)
4.	Reklame	877.212.799,56	858.922.357,44	2,13
5.	Penerangan Jalan	0,00	9.423.856.647,00	(100,00)
6.	Air Tanah	500.205.417,00	523.324.847,00	(4,42)
7.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	774.323.749,00	653.282.979,00	18,53
8.	PBBP2	11.419.580.541,00	9.501.138.559,00	20,19
9.	BPHTB	9.489.443.730,00	11.026.603.526,00	(13,94)
10.	PBJT	30.021.480.624,00	17.573.210.070,00	70,84
11.	PKB	24.796.528.682,00	0,00	100,00
12.	BBNKB	10.127.285.400,00	0,00	100,00
	Jumlah	**88.006.060.942,56**	**52.109.302.632,44**	**68,89**

Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran, penyajian realisasi jenis Pajak Daerah-LRA, penyajian realisasi jenis Pajak Daerah-LO juga digabungkan dengan nomenklatur barunya yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang sejenis.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA selama tahun 2025 sebesar Rp82.630.684.214,00, realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan lebih

sebesar Rp5.375.376.728,56. Perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.04
Rincian Selisih Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penerimaan Piutang	(1.650.156.184,00)
2.	Pengakuan Piutang	7.156.196.942,00
3.	Pendapatan Diterima Dimuka	(130.335.529,44)
4.	Koreksi Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024 yang diterima tahun 2025	(328.500,00)
Jumlah		**5.375.376.728,56**

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Pengelola yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 dan 2024 terealisasi sebesar Rp99.346.097.527,04 dan Rp99.027.652.525,35, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.05
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Pendapatan Retribusi Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	96.195.016.033,00	96.850.774.728,00	(0,68)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.495.638.345,00	801.966.364,00	86,50
3	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.750.000,00	6.750.000,00	88,89
4	Pelayanan Pasar	46.952.000,00	49.591.000,00	(5,32)
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	10.425.000,00	8.250.000,00	26,36
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	209.400.000,00	488.931.000,00	(57,17)
7	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	26.880.000,00	2.205.000,00	1.119,05
8	Retribusi Terminal	13.978.000,00	10.850.500,00	28,82
9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.474.000,00	22.169.000,00	73,55
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	249.500.000,00	246.400.000,00	1,26
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	172.359.000,00	140.895.000,00	22,33
12	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Perikanan	13.058.000,00	18.840.000,00	(30,69)
13	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	8.985.000,00	(100)
14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	0,00	9.000.000,00	(100)
15	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	301.819.500,04	5.083.333,35	5.837,43
16	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	559.847.649,00	356.961.600,00	56,84
	Jumlah	**99.346.097.527,04**	**99.027.652.525,35**	**0,32**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA selama tahun 2025 sebesar Rp99.084.402.933,00, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan lebih besar sebesar Rp261.694.594,04. Perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.06
Rincian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah di LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penerimaan Piutang	(15.137.516.563,00)
2.	Pengakuan Piutang	15.390.932.657,00
3.	Pendapatan Diterima Dimuka	8.208.500,04
4.	Kompensasi pendapatan diterima dimuka tahun 2024	70.000,00
Jumlah		261.694.594,04

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO untuk tahun 2025 terealisasi sebesar Rp15.488.312.387,45 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp13.807.124.697,00 dan pada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam sebesar Rp1.681.187.690,45. Pada tahun 2024 pendapatan ini terealisasi sebesar Rp13.948.262.975,27 yang terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp13.723.582.467,00 dan pada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam sebesar Rp224.680.508,27.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp6.745.838.578,63 dan Rp10.089.557.244,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.07
Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO

No	Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	1.343.393,00	(100)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	215.064.595,85	150.723.866,99	42,69
3	Penerimaan Jasa Giro	1.311.483.326,00	2.366.116.565,00	(44,57)
4	Pendapatan Bunga	480.819.894,00	215.322.572,00	123,3
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.831.188.469,36	5.846.192.274,71	(68,68)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	159.757.957,00	184.691.657,00	(13,5)
7	Pendapatan Denda Pajak	570.973.679,20	88.290.732,00	546,7
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.576.235.919,22	383.737.446,00	310,76
9	Pendapatan BLUD	600.314.738,00	853.138.738,00	(29,63)
Jumlah		**6.745.838.578,63**	**10.089.557.244,70**	**(33,14)**

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA selama tahun 2025 sebesar Rp7.263.859.132,78, realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO disajikan kurang sebesar Rp518.020.554,15. Perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.08
Rincian Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah di LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan Diterima Dimuka	22.173.595,85
2.	Kompensasi pendapatan diterima dimuka tahun 2024	(70.000,00)

3.	Hasil Penjualan BMD-LO yang disajikan untuk penghitungan Surplus/Defisit Penjualan BMD Kegiatan Non Operasional	(540.124.150,00)
Jumlah		**(518.020.554,15)**

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Adapun Realisasi Pendapatan Transfer untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.262.330.706.787,00 dan Rp1.265.098.230.177,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.09
Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Pendapatan Transfer	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.196.366.700.057,00	1.177.168.827.857,00	1,63
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	7.527.067.000,00	(100,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	65.964.006.730,00	80.402.335.320,00	(17,96)
	Jumlah	**1.262.330.706.787,00**	**1.265.098.230.177,00**	**(0,22)**

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Akun ini menggambarkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan selama tahun 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp1.196.366.700.057,00 dan Rp1.177.168.827.857,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.10
Rincian Transfer Pemerintah Pusat –LO

No.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	14.595.966.000,00	10.532.767.000,00	38,58
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	1.917.833.000,00	10.330.258.000,00	(81,43)
3.	Dana Bagi Hasil Lainnya	3.307.702.000,00	0,00	100
4.	Dana Alokasi Umum	893.639.603.961,00	860.911.170.294,00	3,80
5.	Dana Alokasi Khusus	282.905.595.096,00	295.394.632.563,00	(4,23)
	Jumlah	**1.196.366.700.057,00**	**1.177.168.827.857,00**	**1,63**

Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LRA selama tahun 2025 sebesar Rp1.196.499.084.057,00, realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO kurang sebesar Rp132.384.000,00. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya penerimaan Dana Bagi Hasil TDF tahun 2024.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Akun ini menggambarkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dalam bentuk Dana Penyesuaian selama tahun 2025 dan 2024 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dan Rp7.527.067.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.11
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	0,00	7.527.067.000,00	(100,00)
Jumlah	0,00	**7.527.067.000,00**	**(100,00)**

Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA selama TA 2025 sebesar Rp98.028.894.550,00, realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO disajikan kurang sebesar Rp9[8.028.894.550,00. Hal ini dipengaruhi oleh adanya transfer Dana Desa yang langsung disalurkan kepada Pemerintah Nagari dan tidak diakui sebagai hak Pemerintah Daerah.

3) Transfer Pemerintah Provinsi-LO

Akun ini menggambarkan penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi selama tahun 2025 dan 2024 yang terealisasi sebesar Rp65.964.006.730,00 dan Rp80.402.335.320,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.12
Rincian Transfer Pemerintah Provinsi –LO

No	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	137.486.212,00	18.143.411.042,00	(99,24)
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	120.247.505,00	8.098.838.399,00	(98,52)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.392.223.452,00	34.153.497.020,00	3,63
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	741.066.654,00	482.907.747,00	53,46
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	23.673.012.907,00	19.523.681.112,00	21,25
6	Bantuan Keuangan	5.899.970.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	**65.964.006.730,00**	**80.402.335.320,00**	**(17,96)**

Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA selama tahun 2025 sebesar Rp70.781.916.222,00, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO disajikan kurang sebesar Rp4.817.909.492,00. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pengakuan piutang DBH pada tahun 2025 sebesar Rp22.253.597.234,00 dan penerimaan Piutang DBH di tahun 2024 sebesar Rp27.071.506.726,00.

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Akun ini menggambarkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari penerimaan hibah dan penerimaan lainnya. Pada tahun 2025 dan 2024, Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terealisasi sebesar Rp 25.981.189.877,96 dan Rp27.128.813.281,47, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.13
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah –LO

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
I	**Pendapatan Hibah**	**21.981.189.877,96**	**27.128.813.281,47**	**(18,97)**
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.392.072.256,00	6.761.355.350,16	38,91
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	6.336.747.759,15	20.319.632.931,31	(68,81)

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	1.160.459.500,00	47.825.000,00	2.326,47
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	5.091.910.362,81	0,00	100,00
II	**Dana Darurat**	**4.000.000.000,00**	0,00	**100,00**
1	Dana Darurat-LO	4.000.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah	**25.981.189.877,96**	**27.128.813.281,47**	**(4,23)**

Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA selama tahun 2025 sebesar Rp4.000.004.000,00, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO disajikan lebih sebesar Rp21.981.185.877,96. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh:

Tabel 5.4.1.14
Rincian Selisih Pendapatan Daerah yang Sah di LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
I	**Pengakuan pendapatan hibah berupa aset**	**116.463.000,00**
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91.963.000,00
2.	Dinas Kesehatan	24.500.000,00
II	**Pengakuan pendapatan hibah berupa Persediaan**	**21.864.722.877,96**
1.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	341.231.006,00
2.	Dinas Kesehatan	3.611.632.521,96
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.911.859.350,00
Jumlah		**21.981.185.877,96**

5.4.2 Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Penyajian beban berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikelompokan menjadi:

a. Beban Pegawai;
b. Beban Persediaan;
c. Beban Jasa;
d. Beban Pemeliharaan;
e. Beban Perjalanan Dinas;
f. Beban Hibah;
g. Beban Bantuan Sosial;
h. Beban Penyusutan dan Amortisasi;
i. Beban Penyisihan Piutang;
j. Beban Transfer; dan
k. Beban Lain-lain.

Untuk penjelasan selisih penyajian Belanja dengan Beban pada kelompok huruf b sampai dengan huruf e tidak dilakukan berdasarkan rincian sub rekening, karena penyajian belanja pada Laporan Realisasi Anggaran hanya dikelompokan menjadi kelompok Belanja Barang dan Jasa, sehingga untuk selisih berdasarkan pengelompokan beban, maka belanja juga dimaping berdasarkan pengelompokan beban terlebih dahulu.

Selama tahun 2025 dan 2024, beban dapat direalisasikan masing-masing sebesar Rp1.476.598.553.887,53 dan Rp1.501.169.256.480,99, dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Realisasi beban pegawai tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp870.940.592.460,88 dan Rp776.863.872.661,91, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.01
Rincian Beban Pegawai

No	Beban Pegawai	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	532.817.341.488,00	504.647.712.606,12	5,58
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	315.973.134.255,77	72.743.030.807,00	334,37
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya ASN	368.543.200,67	171.315.171.757,02	(99,78)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.980.661.961,00	17.158.200.732,00	16,45
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	998.525.812,44	442.135.802,77	125,84
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	802.385.743,00	776.635.980,00	3,32
7	Beban Pegawai BLUD	0,00	9.780.984.977,00	(100,00)
	Jumlah	**870.940.592.460,88**	**776.863.872.661,91**	**12,11**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai LRA selama tahun 2025 sebesar Rp866.021.568.444,12, realisasi Beban Pegawai disajikan lebih besar Rp4.919.024.016,76 yang disebabkan oleh:

Tabel 5.4.2.02
Rincian Selisih Beban Pegawai di LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	**Pembayaran dan pengakuan utang belanja**	**3.461.957.690,76**
	a. pengakuan utang belanja pegawai 2025	47.845.165.608,30
	b. Pembayaran utang belanja pegawai 2024	(44.620.807.101,77)
	c. Koreksi utang belanja pegawai	237.599.184,23
2.	Pembayaran Utang Jasa Pelayanan BLUD (Utang Belanja Pegawai) yang dibebankan ke Beban Barang dan Jasa BLUD	1.456.691.326,00
3.	Utang Belanja Pegawai yang dibayarkan pada Barang dan jasa (Honorarium pada Dinas Pertanian)	375.000,00
	Jumlah	**4.919.024.016,76**

b. Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp125.127.874.004,32 dan Rp126.374.040.785,48, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.03
Rincian Beban Persediaan

No	Beban Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend %
I.	Beban Barang Pakai Habis	123.296.572.960,81	126.337.453.335,48	(2,41)
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	25.796.100,00	36.587.450,00	(29,49)
3.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.805.504.943,51	0,00	100,00
	Jumlah	**125.127.874.004,32**	**126.374.040.785,48**	**(0,99)**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang LRA yang menghasilkan persediaan selama tahun 2025 sebesar Rp 61.596.825.442,00, realisasi Beban Persediaan-LO disajikan sebesar Rp125.127.874.004,32. Terdapat selisih antara belanja yang

menghasilkan persediaan dengan beban persediaan sebesar Rp63.531.048.562,32, yang disebabkan oleh:

Tabel 5.4.2.04
Rincian Selisih Beban Persediaan di LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pengakuan dan pemakaian persediaan	9.304.561.426,46
2.	Reklasifikasi dari Belanja Modal ke beban bahan lainnya	179.121.465,00
3.	Reklasifikasi ke aset tetap	(54.848.228,00)
4.	Pengakuan dan pembayaran utang	(73.979.496,00)
5.	Persediaan dari Belanja BOSP	16.845.481.026,00
6.	Reklas beban dari Beban Barjas BLUD ke Beban Barang Pakai Habis	1.454.499,00
7.	Beban Persediaan Beban Barang Tak Habis Pakai yang berasal dari dari belanja BOSP	25.421.100,00
8.	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.759.944.943,51
9.	Koreksi Saldo awal Persediaan	(97.234.890,11)
10.	Pendapatan Hibah	4.416.192.135,46
11.	Persediaan yang berasal dari belanja BLUD	30.196.040.816,00
12.	Persediaan yang berasal dari Belanja Jasa diserahkan ke Masyarakat (Dinas Perkim)	1.028.893.765,00
Jumlah		**63.531.048.562,32**

c. Beban Jasa

Selama tahun 2025 dan 2024, Beban Jasa terealisasi sebesar Rp 177.546.959.895,63 dan Rp235.780.273.651,19, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.05
Rincian Beban Jasa

No	Beban Jasa	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend %
1.	Beban Jasa Kantor	118.137.901.843,56	108.328.911.229,84	9,05
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	38.000.628.458,96	36.958.911.972,33	2,82
3.	Beban Sewa Tanah	48.620.000,00	60.300.000,00	(19,37)
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.798.445.516,00	1.343.724.334,00	33,84
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	4.559.272.300,11	5.349.767.166,63	(14,78)
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	55.590.000,00	(100,00)
7.	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00	79.000.000,00	1,27
8.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.099.643.829,00	2.580.460.827,00	(18,63)
9.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	126.000.000,00	254.505.000,00	(50,49)
10.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	343.850.000,00	297.350.000,00	15,64
11.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan	2.558.480.400,00	1.239.315.000,00	106,44
12.	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.574.797.810,00	1.684.066.900,00	52,89
13.	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.219.319.738,00	4.220.074.166,00	71,07
14.	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	73.328.297.055,39	(100,00)
	Jumlah Beban Jasa	177.546.959.895,63	235.780.273.651,19	(24,70)

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa (termasuk dengan Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat) LRA selama tahun 2025 sebesar Rp143.791.236.629,00, realisasi Beban Jasa disajikan sebesar Rp177.546.959.895,63. Terdapat selisih antara belanja jasa dengan beban jasa sebesar Rp33.755.723.266,63 yang disebabkan oleh:

Tabel 5.4.2.06
Rincian Selisih Beban Jasa di LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Beban dibayar dimuka	(24.746.853,37)
2.	Reklas dari belanja BLUD ke masing-masing beban jasa	18.350.436.165,00
3.	Reklas dari belanja BOSP ke masing-masing beban jasa	25.018.118.803,00
4.	Pembayaran utang	(21.105.509.218,00)
5.	Pengakuan utang	13.378.300.305,00
6.	Kapitalisasi belanja jasa menjadi aset (PUTR dan Dinas Pendidikan)	(831.982.170,00)
7.	Persediaan yang berasal dari belanja jasa diserahkan	(1.028.893.765,00)
Jumlah		**33.755.723.266,63**

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp12.374.666.112,00 dan Rp6.610.660.951,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.07
Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend %
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.099.385.957,00	3.825.718.480,00	59,43
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.390.030.197,00	954.763.456,00	255,06
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.815.222.758,00	1.777.603.765,00	58,37
4.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	70.027.200,00	52.575.250,00	33,19
Jumlah		**12.374.666.112,00**	**6.610.660.951,00**	**87,19**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan LRA selama tahun 2025 sebesar Rp9.368.756.932,00, realisasi Beban Pemeliharaan disajikan sebesar Rp12.374.666.112,00. Terdapat selisih lebih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan sebesar Rp3.005.909.180,00, yang disebabkan oleh:

Tabel 5.4.2.08
Rincian Selisih Beban Pemeliharaan di LO dan LRA

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Reklas dari belanja BOS ke masing-masing beban pemeliharaan	1.357.791.753,00
2.	Reklas dari belanja BLUD ke masing-masing beban pemeliharaan	2.879.684.697,00
3.	Kapitalisasi belanja pemeliharaan menjadi aset	(1.031.236.110,00)
4.	Pelunasan utang Dinas Pertanian	(192.473.660,00)
5.	Reklas beban pemeliharaan ke beban barang	(7.857.500,00)
Jumlah		**3.005.909.180,00**

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas selama TA 2025 dan 2024 direalisasikan sebesar Rp40.987.761.000,00 dan Rp51.848.808.801,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.09
Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend %
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	22.856.185.644,00	29.905.796.943,00	(23,57)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.908.753.046,00	21.493.306.858,00	(16,68)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	215.870.000,00	447.735.000,00	(51,79)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.952.310,00	1.970.000,00	252,91
Jumlah		**40.987.761.000,00**	**51.848.808.801,00**	**(20,95)**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas selama tahun 2025 sebesar Rp30.097.217.498,00, Beban Perjalanan Dinas disajikan lebih besar yakni Rp40.987.761.000,00. Terdapat selisih antara belanja dan beban Perjalanan Dinas sebesar Rp10.890.543.502,00 yang disebabkan oleh:

Tabel 5.4.2.10
Rincian Selisih Belanja dan Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Reklas dari belanja BOS ke masing-masing beban perjalanan dinas	4.349.123.264,00
2.	Reklas dari belanja BLUD ke masing-masing beban perjalanan dinas	1.934.370.238,00
3.	Reklas dari belanja BOK ke masing-masing beban perjalanan dinas	4.607.050.000,00
Jumlah		**10.890.543.502,00**

f. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah tahun 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp17.601.218.438,00 dan Rp66.843.582.628,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.11
Rincian Beban Hibah

No	Beban Hibah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend (%)
I	**Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**3.821.673.495,00**	**57.404.263.542,00**	**(93,34)**
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.772.635.160,00	54.921.783.101,00	(94,95)
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	49.879.000,00	0,00	100,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	999.159.335,00	2.482.480.441,00	(59,75)
II	**Beban Hibah Dana BOS**	**4.796.912.956,00**	**8.569.697.723,00**	**(44,02)**
1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	4.796.912.956,00	8.569.697.723,00	(44,02)
III	**Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**872.497.812,00**	**869.621.363,00**	**0,33**
1	Beban Hibah Bantuan Keuangan KepadaPartai Politik	872.497.812,00	869.621.363,00	0,33
IV	**Beban Hibah Dana BOSP**	**8.110.134.175,00**	**0,00**	**100,00**
1	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	5.283.919.154,00	0,00	100,00

No	Beban Hibah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend (%)
2	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.826.215.021,00	0,00	100,00
	Jumlah	**17.601.218.438,00**	**66.843.582.628,00**	**(73,67)**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah LRA, selama tahun 2025 sebesar Rp17.590.437.458,00, beban hibah disajikan lebih kecil sebesar Rp10.780.980,00 yang disebabkan karena adanya hibah tanah dari Puskesmas Biaro ke Nagari Batu Taba untuk pembangunan Gedung Posyandu.

g. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.421.750.000,00 dan Rp5.615.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.12
Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend (%)
I	**Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu**	**3.421.750.000,00**	**5.615.000.000,00**	**(39,06)**
I.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.421.750.000,00	5.615.000.000,00	(39,06)
	Jumlah	**3.421.750.000,00**	**5.615.000.000,00**	**(39,06)**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial selama tahun 2025 sebesar Rp3.421.750.000,00, Beban Bantuan Sosial disajikan sama dan tidak ada selisih dengan Belanja.

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp129.885.492.711,69 dan Rp134.778.675.089,96, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.13
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.410.854.208,94	32.401.723.597,52	3,11
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.455.713.964,34	19.308.983.793,69	0,76
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	74.143.457.616,48	9.775.112.867,86	(7,06)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	425.738.691,99	877.422.560,94	(51,48)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.328.322.602,51	0,00	100,00
6	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.121.405.627,43	972.769.266,23	15,28
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	1.442.663.003,72	(100,00)
	Jumlah	**129.885.492.711,69**	**134.778.675.089,96**	**(3,63)**

Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan beban penyusutan tahun berjalan untuk Aset Lain-Lain Rusak Berat dan Aset Lain-Lain – Aset Tetap yang Tidak Dipergunkan untuk Kegiatan Operasional. Pada SIPD tidak terdapat kode rekening untuk beban penyusutan aset lain-lain, sehingga untuk mengakui nilai

penyusutan tahun berjalan atas aset lain-lain, digunakan rekening Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

i. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.999.808.942,01 dan Rp3.889.438.333,45, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.14
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Trend %
I	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**	**2.447.184.274,36**	**2.668.690.549,10**	**(8,30)**
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	102.227.519,63	(100,00)
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	74.482.921,08	(100,00)
3	Beban Penyisihan Pajak Reklame	4.100.012,21	3.403.945,37	20,45
4	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	0,00	4.225,98	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	10.263,43	2.306.460,30	(99,56)
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	41.395.645,22	18.952.977,47	118,41
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.397.790.699,83	2.467.312.499,27	(2,82)
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.887.653,67	0,00	100,00
II	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**	**552.624.667,65**	**472.842.567,49**	**16,87**
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	442.579.977,85	393.633.956,49	12,43
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	48.207.500,00	26.915.198,00	79,11
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	61.837.189,80	52.293.413,00	18,25
III	**Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**0,00**	**747.905.216,86**	**(100,00)**
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	747.905.216,86	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	100,00
Jumlah		**2.999.808.942,01**	**3.889.438.333,45**	**(22,87)**

j. Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer tahun 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp95.712.430.323,00 dan Rp92.564.903.579,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.15
Rincian Beban Transfer

No	Beban Transfer	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.261.527.372,00	4.684.859.524,00	76,35
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	233.643.140,00	208.395.455,00	12,12
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus DaerahProvinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	87.217.259.811,00	87.671.648.600,00	(0,52)
	Jumlah	**95.712.430.323,00**	**92.564.903.579,00**	**3,40**

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer selama tahun 2025 sebesar Rp194.893.642.017,00, realisasi Beban Transfer disajikan lebih kecil sebesar Rp99.181.211.694,00. Perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.16
Rincian Selisih Belanja dan Beban Transfer

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Alokasi Dana Desa	98.028894.550,00
2	Pembayaran Utang Transfer	(8.495.170.512,00)
3	Pengakuan Utang Transfer	9.647.487.656,00
	Jumlah	**99.181.211.694,00**

5.4.3 Surplus defisit Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2025 dan 2024, terjadi Defisit dari Kegiatan Non Operasional masing-masing sebesar Rp8.799.771.220,15 dan Rp767.361.670,58, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3.01
Rincian Surplus defisit Kegiatan Non Operasional

No	Surplus.defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
I	**Surplus dari Kegiatan Non Operasional**	**515.732.645,70**	**122.351.092,76**	**321,52**
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	**515.732.645,70**	**122.351.092,76**	**321,52**
	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	**515.732.645,70**	**45.834.676,76**	**1.025,20**
	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin–LO	0,00	1.158.625,00	(100,00)
	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan–LO	3.750.000,00	0,00	100,00
	Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO	511.982.645,70	44.676.051,76	1.045,99
	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	**0,00**	**76.516.416,00**	**(100,00)**
	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO	0,00	76.516.416,00	(100,00)
	Jumlah	**515.732.645,70**	**122.351.092,76**	
II	**Defisit dari Kegiatan Non Operasional**	**9.315.503.865,85**	**889.712.763,34**	**947,02**
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	**9.315.503.865,85**	**889.712.763,34**	**947,02**
	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	**314.083.974,92**	**6.830.905,40**	**1.766,11**
	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	1.260.775,00	0,00	100,00
	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan–LO	0,00	16.830.905,40	(100,00)
	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	312.823.199,92	0,00	100,00
	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	**9.001.419.890,93**	**872.881.857,94**	**931,23**
	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan – LO	688.676.496,66	114.242.455,62	502,82
	Defisit Penghapusan Jalan, Jaringan, dan Irigasi–LO	0,00	35.912.268,00	(100,00)
	Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya-LO	0,00	719.956.134,32	(100,00)
	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	8.312.743.394,27	2.771.000,00	299.890,74
	Jumlah	**9.315.503.865,85**	**889.712.763,34**	**947,02**
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(8.799.771.220,15)**	**(767.361.670,58)**	**1.046,76**

5.4.4 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban tidak terduga yang dipergunakan untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Beban Tidak Terduga untuk tahun 2025 dan 2024, masing-masing terealisasi sebesar Rp6.426.717.278,85 dan Rp3.157.818.416,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga pada LRA selama tahun 2025 sebesar Rp6.522.478.271,85, terdapat selisih kurang penyajian Beban Tidak Terduga sebesar Rp95.760.993,00 yang disebabkan oleh pembelian aset tetap yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga dan diakui sebagai penambahan aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4.01
Rincian Selisih Belanja Tidak Terduga dengan Beban Tidak Terduga

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	73.425.993,00
2.	Personal Komputer	15.561.500,00
3.	Peralatan Personal Komputer	6.773.500,00
Jumlah		**95.760.993,00**

5.4.5 Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Untuk tahun 2025 dan 2024, Surplus/defisit-LO adalah sebesar Rp6.073.163.714,11 dan (Rp37.692.617.731,34). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp43.765.781.445,45 atau 116,11%, dari sebelumnya defisit pada tahun 2024 menjadi surplus pada tahun 2025.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 disajikan dengan pendekatan afektasi belanja dan pendapatan bersih yang terealisasi selama tahun 2025 dan mencerminkan seluruh transaksi penerimaan pendapatan dan pengeluaran/belanja, termasuk realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BLUD, Dana BOSP, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Bantuan Operasional Kesehatann (BOK) Puskesmas beserta Penerimaan Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa yang bersumber dari APBN.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Agam selama tahun 2025 dan 2024, disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2025 dan tahun 2024, adalah sebesar Rp132.679.956.102,81 dan Rp130.770.198.325,71, terdiri dari:

Tabel 5.5.1.01
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	1.571.555.845.655,78	1.526.611.284.211,71	2,94
2	Arus Keluar Kas	1.438.875.889.552,97	1.395.841.085.886,00	3,08
	Jumlah	**132.679.956.102,81**	**130.770.198.325,71**	**1,40**

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arus Masuk Kas tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.571.555.845.655,78 dan Rp1.526.611.284.211,71. Terjadi kenaikan pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp44.944.561.444,07 atau 2,94%. Rincian lebih lanjut arus masuk kas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.1.02
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	202.245.946.826,78	164.657.968.286,71	22,83
2	Transfer dari Pemerintah Pusat	1.294.527.978.607,00	1.281.140.966.857,00	1,04
3	Transfer dari Pemerintah Provinsi	70.781.916.222,00	80.074.349.068,00	(11,60)
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.000.004.000,00	738.000.000,00	442,01
Jumlah		**1.571.555.845.655,78**	**1.526.611.284.211,71**	**2,94**

1) Pendapatan Asli Daerah

Arus masuk kas yang berasal dari transaksi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebesar Rp202.245.946.826,78 dan Rp164.657.968.286,71, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.03
Rincian Arus Masuk Kas-Pendapatan Asli Daerah

No.	Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Pajak Daerah	82.630.684.214,00	46.865.864.045,00	76,31
2	Retribusi Daerah	99.084.402.933,00	93.939.107.790,00	5,48
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.807.124.697,00	13.723.582.467,00	0,61
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.723.734.982,78	10.129.413.984,71	(33,62)
Jumlah		**202.245.946.826,78**	**164.657.968.286,71**	**22,83**

2) Transfer dari Pemerintah Pusat

Arus masuk kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat selama Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.294.527.978.607,00 dan Rp1.281.140.966.857,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.04
Rincian Arus Masuk Kas -Transfer dari Pemerintah Pusat

No	Transfer dari Pemerintah Pusat	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren %
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat	17.991.229.000,00	12.317.757.000,00	46,06
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam dari Pusat	1.962.656.000,00	10.837.882.000,00	(81,89)
3	Dana Alokasi Umum	893.639.603.961,00	860.911.170.294,00	3,80
4	Dana Alokasi Khusus	282.905.595.096,00	295.394.632.563,00	(4,23)
5	Dana Penyesuaian	98.028.894.550,00	101.679.525.000,00	(3,59)
Jumlah		**1.294.527.978.607,00**	**1.281.140.966.857,00**	**1,04**

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi

Arus masuk kas yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi merupakan penerimaan transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama tahun 2025 dan 2024, pendapatan transfer ini terealisasi sebesar Rp70.781.916.222,00 dan Rp80.074.349.068,00, terjadi penurunan arus masuk kas pada tahun 2024 sebesar Rp9.292.432.846,00 atau 11,60%.

Berikut adalah rincian arus masuk kas yang bersumber pada Transfer dari Pemerintah Provinsi:

a) Pendapatan Bagi Hasil, berupa bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.05
Rincian Arus Masuk Kas - Transfer Bagi Hasil Pajak

No.	Transfer dari Pemerintah Provinsi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.339.563.186,00	18.872.307.712,00	(71,71)
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.981.119.814,00	8.603.716.296,00	(76,97)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	33.153.744.928,00	29.085.373.814,00	13,99
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	734.505.387,00	451.565.111,00	62,66
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	23.673.012.907,00	23.061.386.135,00	3,82
Jumlah		**64.881.946.222,00**	**80.074.349.068,00**	**(18,97)**

b) Bantuan Keuangan

Pada tahun 2025 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terealisasi sebesar Rp5.899.970.000,00 atau 245,83% dari anggaran Rp2.400.000.000,00. Pada tahun 2024, tidak ada penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selama tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.000.004.000,00 merupakan arus masuk kas bersumber dari Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana dan kelebihan pembayaran pajak BPHTB dari Wajib Pajak. Pada tahun 2024, terealisasi sebesar Rp738.000.000,00 arus masuk kas bersumber dari Pendapatan Hibah Sanitasi.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.438.875.889.552,97 dan Rp1.395.841.085.886,00. Terjadi kenaikan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp43.034.803.666.97 atau 3,08%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.1.06
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Pembayaran Pegawai	866.021.568.444,12	750.224.137.285,00	15,44
2	Pembayaran Barang	350.426.013.362,00	388.176.440.957,00	(9,73)
3	Pembayaran Hibah	17.590.437.458,00	66.843.582.628,00	(73,67)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	3.421.750.000,00	5.615.000.000,00	(39,06)
5	Pembayaran Tak Terduga	6.522.478.271,85	3.157.818.416,00	106,55

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	9.169.969.784,00	0,00	100,00
6	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	477.517.872,00	0,00	100,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	185.246.154.361,00	181.824.106.600,00	1,88
Jumlah		**1.438.875.889.552,97**	**1.395.841.085.886,00**	**3,08**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp56.770.719.178,00) dan (Rp139.948.385.518,00). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.2.01
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	540.124.150,00	59.589.593,00	806,41
2	Arus Keluar Kas	57.310.843.328,00	140.007.975.111,00	(59,07)
Jumlah		**(56.770.719.178,00)**	**(139.948.385.518,00)**	**(59,43)**

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp540.124.150,00 dan Rp59.589.593,00. Terjadi peningkatan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp480.534.557,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.2.02
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	3.024.000,00	(100)
2	Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	56.565.593,00	(100)
3	Penjualan Aset Lain-Lain	540.124.150,00	0,00	100
Jumlah		**540.124.150,00**	**59.589.593,00**	**806,41**

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp57.310.843.328,00 dan Rp140.007.975.111,00. Terjadi penurunan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp82.697.131.783,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.2.03
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Perolehan Peralatan dan Mesin	27.846.028.860,00	29.175.409.504,00	(4,56)
2	Perolehan Gedung dan Bangunan	7.072.853.014,00	24.250.418.079,00	(70,83)
3	Perolehan Jalan. Irigasi & Jaringan	15.512.561.406,00	79.222.627.499,00	(80,42)
4	PerolehanAset Tetap Lainnya	5.657.400.048,00	5.488.641.329,00	3,07
5	Perolehan Aset Lainnya	222.000.000,00	870.878.700,00	(74,51)
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah		**57.310.843.328,00**	**140.007.975.111,00**	**(59,07)**

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Agam tidak memiliki Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan selama tahun 2025 dan tahun 2024.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp9.414.637,00 dan (Rp4.672.950,00). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.4.01
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	30.102.352.388,00	31.118.853.229,00	(3,26)
2	Arus Keluar Kas	30.092.937.751,00	31.123.526.179,00	(3,31)
Jumlah		**(9.414.637,00)**	**(4.672.950,00)**	**(301,47)**

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Tahun 2024 merupakan aktivitas yang menampung transaksi penerimaan PFK serta penerimaan Kas Daerah yang bukan termasuk ke dalam kelompok aktivitas operasi dan aktitvitas investasi. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sebesar Rp30.102.352.388,00 dan Rp31.118.853.229,00. Terjadi penurunan terhadap Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris selama Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.016.500.841,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.4.02
Rincian Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.102.352.388,00	31.118.153.229,00	(3,26)
2	Kas Lainnya yang berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan yang harus disetorkan Kembali	0,00	700.000,00	(100,00)
Jumlah		**30.102.352.388,00**	**31.118.853.229,00**	**(3,27)**

b. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp30.092.937.751,00 dan Rp31.123.526.179,00. Terjadi penurunan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.030.588.428,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.4.03
Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.092.237.751,00	31.117.350.679,00	(3,29)
2	Pengeluaran penerimaan yang bukan merupakan pendapatan daerah yang berada pada Kas Daerah	700.000,00	6.175.500,00	(88,66)
Jumlah		**30.092.937.751,00**	**31.123.526.179,00**	**(3,31)**

5.5.5 Kenaikan Atau Penurunan Kas

Selama tahun 2025 terjadi Penambahan Kas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.918.651.561,81 dan selama tahun 2024 terjadi Penurunan Kas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.182.860.142,29. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun 2025 dan tahun 2024, arus masuk kas lebih besar daripada arus keluar kas. Jika dibandingkan dengan penurunan kas pada tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar Rp85.101.511.704,10.

5.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas Pemerintah Kabupaten Agam Per 1 Januari 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp39.580.138.735,73 dan Rp48.626.504.348,02. Penyajian saldo awal ini berasal dari Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6.01
Rincian Saldo Awal Kas

No.	Uraian	1 Januari 2025 (Rp)	1 Januari 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	3.372.232.042,59	80.495.125,88	4089,36
2	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	91.000,00	1.196.000,00	(92,39)
3	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	78.059.123,00	9.330.035,00	736,64
4	Saldo Awal Kas di BLUD	33.286.848.002,53	42.595.590.863,53	(21,85)
5	Saldo Awal Kas BOK pada Puskesmas	2.375.719.357,00	5.297.001.902,00	(55,15)
6	Saldo Awal Kas pada Bendahara BOS	466.489.210,61	636.714.921,61	(26,73)
7	Saldo Awal Kas Lainnya	700.000,00	6.175.500,00	(88,66)
	Jumlah	**39.580.138.735,73**	**48.626.504.348,02**	**(18,60)**

5.5.7 Koreksi Saldo Awal Kas

Koreksi Saldo Awal Kas Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp24.000,00 dan Rp136.494.530,00. Koreksi Saldo Awal Per 31 Desember 2025 BOSP tahun sebelumnya sebagai tindak lanjut hasil verikasi belanja oleh Tim ARKAS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang menambah kembali Kas Dana BOSP dalam tahun berjalan, sementara koreksi saldo awal Per 31 Desember 2024 merupakan koreksi atas saldo awal pada Kas BLUD sebagai akibat dari terjadinya pengembalian kas atas koreksi belanja tahun lalu.

5.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp115.498.814.297,54 dan Rp39.580.138.735,73. Terjadi peningkatan atas Saldo Kas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.918.675.561,81 atau 191,81%, jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024. Rincian lebih lanjut Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.7.01
Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
1	Saldo akhir Kas di Kas Daerah	86.094.569.571,69	3.372.232.042,59	2452,62
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	91.000,00	(100,00)
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	26.159.960,71	78.059.123,00	(66,49)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	25.953.143.252,53	33.286.848.002,53	(22,03)
5	Saldo Akhir Kas Dana BOK pada Puskesmas	3.095.676.388,00	2.375.719.357,00	30,30
7	Saldo Akhir Kas Dana BOSP	329.265.124,61	466.489.210,61	(29,42)

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Tren (%)
8	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	700.000,00	1957,14
Saldo Akhir Kas		**115.498.814.297,54**	**39.580.138.735,73**	**191,81**

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.110.922.733.390,70 dan Rp2.158.147.032.593,10 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2025 dan tahun 2024;
2. Surplus/defisit - LO Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar defisit Rp6.073.163.714,11 dan surplus (Rp37.692.617.731,34). Nilai Surplus/Defisit ini akan menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Agam pada Tahun 2025 dan 2024;
3. Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar selama tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.371.981.428,14 dan (Rp9.531.681.471,06), merupakan koreksi atas transaksi tahun lalu yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.6.01
Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Mutasi aset (masuk)	6.684.918.154,00	12.523.435.865,51
2	Mutasi aset (keluar)	(6.684.918.154,00)	(12.523.435.865,51)
3	Koreksi Persediaan	1.748.497.309,89	470.529.659,06
4	Koreksi Piutang	6.893.958.108,14	3.530.956.023,00
5	Koreksi Penyisihan Piutang	130.560.988,05	113.299.093,75
6	Koreksi Aset Tetap	7.248.486.405,01	(0,40)
7	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	(3.399.762.335,77)	(2.496.977.834,81)
8	Koreksi Aset Lain-lain	(90.000.000,00)	0,00
9	Koreksi Penyusutan Aset Lain-lain	90.000.000,00	(1.707.016,47)
10	Koreksi Utang	(10.552.544.280,74)	(13.003.850.828,02)
11	Koreksi Pendapatan	0,00	12.376.666,68
12	Koreksi Beban	79.616,96	654.278,48
13	Koreksi Ekuitas Lainnya	1.302.705.616,60	1.843.038.487,67
Jumlah		**3.371.981.428,14**	**(9.531.681.471,06)**

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.120.367.878.532,95 dan Rp2.110.922.733.390,70. Jika dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024, saldo Ekuitas Akhir tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.445.145.142,25 atau 0,45%.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. Pembentukan Kabupaten Agam

Kabupaten Agam dengan ibukota pada awalnya berada di Bukittinggi, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20).

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah pindah ke Lubuk Basung yang dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi ke Kota Lubuk Basung di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

Selanjutnya pada tahun 2024, terbit Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat, menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur wilayah dan pemerintahan di Kabupaten Agam.

6.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam

Visi Kabupaten Agam untuk Jangka Menengah (2025-2029) adalah ***"Agam Madani yang Maju, Adil dan Sejahtera"*** . Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Adapun ***Misi*** yang ditetapkan dalam mendukung Visi Kabupaten Agam untuk 5 (lima) tahun ini, adalah sebagai berikut:

1. Tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, syarak mangato adat mamakai"
2. Tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas, inovatif dan berdaya saing
4. Ekonomi yang tangguh dan berkeadilan
5. Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, dan meningkatkan ketangguhan mitigasi bencana
6. Pengembangan wilayah berbasis nagari untuk membangun kemandirian, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat

6.3. Letak Geografis

Kabupaten Agam terletak antara 00º01'34"–00º28'43" Lintang Selatan dan 99º46'39"-100º32'50" Bujur Timur yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- Sebelah Barat : Selat Mentawai.

Berikut adalah Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Agam:

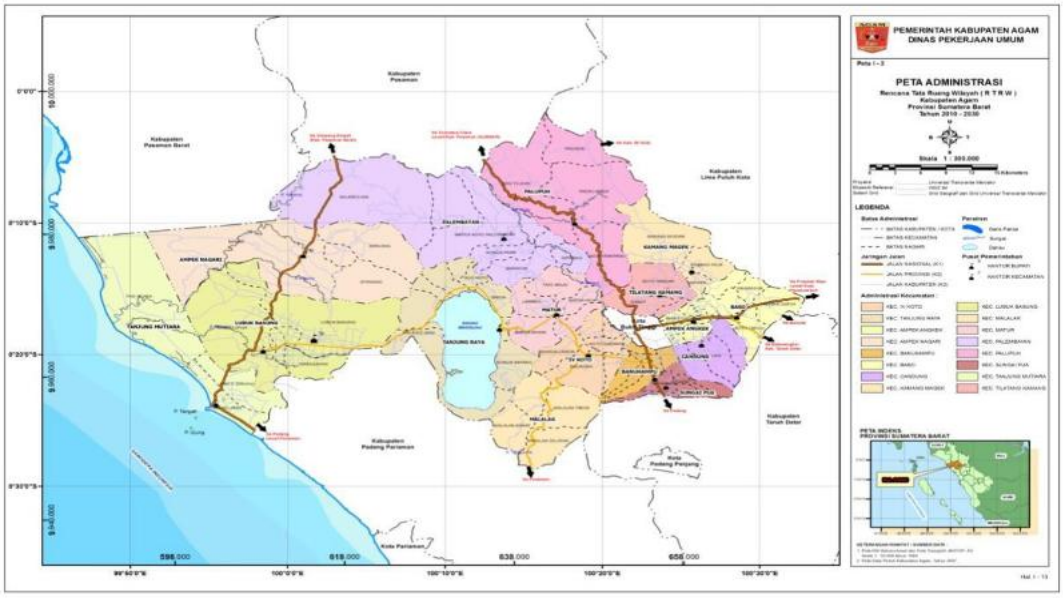

Luas wilayah Kabupaten Agam tercatat 2.232,30 km², atau setara dengan 5,29% dari luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.297.30 km². Topografi daerah Kabupaten Agam terdiri dari wilayah datar dengan kemiringan antara 0^0-3^0 dengan luas 662 km^2, wilayah datar berombak dengan kemiringan 3^0-8^0 dengan luas 153 km^2, wilayah dataran berombak dan bergelombang dengan kemiringan antara 8^0-15^0 dengan luas 801 km^2 serta wilayah bukit bergunung dengan kemiringan lebih dari 15^0 dengan luas 153 km^2.

Kawasan Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi.

Selain ada laut, sungai, danau dan hutan, di Kabupaten Agam juga terdapat dua gunung yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang dengan ketinggian masing-masing: 2.891 meter dan 2.877 meter dari permukaan laut.

6.4. Pemerintahan

6.4.1. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam hal ini adalah Bupati yang dibantu oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bersama DPRD, dengan susunan sebagai berikut:

I. Pemerintah Kabupaten Agam:
   1. Bupati Agam : Ir.H.BENNI WARLIS, M.M
   2. Wakil Bupati Agam : H.MUHAMMAD IQBAL,S.E.,M.Com
   3. Sekretaris Daerah : Dr. MHD.LUTFI AR, S.H, M.Si

II. DPRD Kabupaten Agam
   1. Ketua DPRD Kabupaten Agam : H. ILHAM, Lc.,M.A
   2. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Agam : HENRIZAL
   3. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Agam : MUHAMMAD RISMAN
   4. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Agam : ADERIA, S.P., M.M

Dalam kelembagaan DPRD Kabupaten Agam, terdapat 7 (tujuh) fraksi dengan jumlah Anggota masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Agam untuk Periode Tahun 2024 s/d 2029 adalah sebagai berikut:

1. Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	:	9 kursi
2. Partai Partai Amanat Nasional (PAN)	:	7 kursi
3. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	:	6 kursi
4. Partai Demokrat	:	6 kursi
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	:	5 kursi
6. Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	:	5 kursi
7. Partai Golongan Karya (Golkar)	:	4 kursi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	:	1 kursi
Partai Bulan Bintang (PBB)	:	1 kursi
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	:	1 kursi
Jumlah keanggotan DPRD	**:**	**45 kursi**

Selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, Bupati dan DPRD juga dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah
b. Sekretariat DPRD
c. Inspektorat Daerah
d. Dinas Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) dinas, yang terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    2. Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas serta Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan)
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
    4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
    6. Dinas Lingkungan Hidup
    7. Dinas Pertanian
    8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
    9. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
    10. Dinas Sosial
    11. Dinas Perhubungan
    12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
    14. Dinas Komunikasi dan Informatika
    15. Dinas Arsip dan Perpustakaan
    16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
    17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
    18. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    19. Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah
e. Badan Daerah sebanyak 6 (enam) badan, yang terdiri dari:
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
    3. Badan Pendapatan Daerah

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

f. Kecamatan sebanyak 16 (enam belas), yang terdiri dari:
1. Kecamatan Baso
2. Kecamatan IV Angkat
3. Kecamatan Candung
4. Kecamatan Tilatang Kamang
5. Kecamatan Kamang Magek
6. Kecamatan Palupuh
7. Kecamatan Banuhampu
8. Kecamatan Sungai Pua
9. Kecamatan IV Koto
10. Kecamatan Matur
11. Kecamatan Tanjung Raya
12. Kecamatan Palembayan
13. Kecamatan Lubuk Basung
14. Kecamatan IV Nagari
15. Kecamatan Tanjung Mutiara
16. Kecamatan Malalak

Disamping RSUD Lubuk Basung, terdapat 23 Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut:

1. Puskemas Tiku;
2. Puskesmas Muaro Putuih;
3. Puskesmas Lubuk Basung;
4. Puskesmas Manggopoh;
5. Puskesmas Bawan;
6. Puskesmas Batu Kambing;
7. Puskesmas Maninjau;
8. Puskesmas Pasar Ahad;
9. Puskesmas Matur;
10. Puskesmas IV Koto;
11. Puskesmas Malalak;
12. Puskesmas Padang Lua;
13. Puskesmas Sungai Pua;
14. Puskesmas Biaro;
15. Puskesmas Lasi;
16. Puskesmas Baso;
17. Puskesmas Padang Tarok;
18. Puskesmas Pakan Kamis;
19. Puskesmas Kapau;
20. Puskesmas Magek;
21. Puskesmas Palembayan;
22. Puskesmas Koto Alam; dan
23. Puskesmas Palupuh.

6.4.2. Pemerintahan Nagari

Pemerintahan Nagari merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah, yang berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan setingkat dengan pemerintahan desa yang memiliki batas wilayah, harta kekayaan sendiri, dan berwenang mengatur rumah tangganya berdasarkan adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah), diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Pemerintah Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari.

Adapun jumlah Nagari yang berada pada seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam adalah 92 (sembilan puluh dua) nagari setelah terjadinya pemekaran atas 82 (delapan puluh dua) nagari sebelumnya. Penetapan penambahan nagari, berdasarkan pada Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146/4994/BPD tanggal 23 September 2022 Perihal Pemberian 10 (sepuluh) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Agam, 25 (dua puluh lima) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Pasaman, 12 (dua belas) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Pemekaran Nagari ini terjadi di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Baso, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Kamang Magek dengan total penambahan sebanyak 10 (sepuluh) nagari.

6.4.3. Kepegawaian

Aparatur Sipil Negeri (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Per 31 Desember 2025 secara keseluruhan berjumlah 7.534 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) orang, yang dapat dirinci berdasarkan:

1. Jenis Kelamin

   ASN Kabupaten Agam terdiri dari ASN Laki-Laki sebanyak 1.813 (seribu delapan ratus tiga belas) orang dan ASN perempuan sebanyak 5.721 (lima ribu tujuh ratus dua puluh satu) orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 6.1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember 2025

No	ASN	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah Total (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	1242	3538	4780
2	PPPK	571	2183	2754
JUMLAH		**1813**	**5721**	**7534**

Sumber: Data ASN kondisi 31 Desember 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

2. Jabatan

   Jabatan ASN Kabupaten Agam terdiri dari Fungsional, Pelaksana dan Struktural dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 6.1.2
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember 2025

No	Jabatan	ASN (Orang)		Jumlah Total (Orang)
		PNS	PPPK	
1	Fungsional	3767	2332	6099
2	Pelaksana	658	422	1080

No	Jabatan	ASN (Orang)		Jumlah Total (Orang)
		PNS	PPPK	
3	**Struktural**			
	- Eselon II	27	-	27
	- Eselon III	167	-	167
	- Eselon IV	161	-	161
JUMLAH		**4780**	**2754**	**7534**

Sumber: Data ASN kondisi 31 Desember 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

3. Pendidikan

Latar belakang pendidikan ASN Kabupaten Agam bervariasi, mulai dari Tamatan SD sampai dengan Starata3 (S3)/Sederajat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 6.1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember 2025

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah Total (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sampai dengan SD	13	13	26
2	SMP/Sederajat	49	-	49
3	SLTA/Sederajat	296	179	475
4	Diploma I	4	-	4
5	Diploma II	26	-	26
6	Diploma III	537	318	855
7	Diploma IV	141	17	158
8	Strata 1 (S1) /Sederajat	3207	2153	5360
9	Strata 2 (S2)/Sederajat	505	74	579
10	Strata 3 (S3)/Sederajat	2	-	2
Jumlah		**4780**	**2754**	**7534**

Sumber: Data ASN kondisi 31 Desember 2025
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

6.5. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Agam dalam rangka Pemenuhan Mandatory Spending pada:

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Kebijakan mandatory spending dalam tata kelola pemerintah daerah meliputi:

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD;
b. Alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% dari APBD (diluar Gaji ASN);
c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah; dan
d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah,setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.

Selama tahun 2025, pengalokasian anggaran untuk mandatory Spending adalah sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut dengan pembanding alokasi tahun 2024:

Tabel: 6.1.4
Pengalokasian anggaran untuk Mandatory Spending Pemerintah Kabupaten Agam

NO	Jenis Mandatory	% Alokasi sesuai ketentuan Regulasi	Pengalokasian pada APBD-P Tahun 2024	Pengalokasian pada APBD-P Tahun 2025
1.	Belanja Fungsi Pendidikan	Minimal 20% dari total Belanja Daerah	39,70%	43,55%
2.	Belanja Fungsi Kesehatan	Sebelumnya minimal 10% dari total Belanja Daerah di luar gaji (menye suaikan dengan UU Kesehatan baru, sesuai dengan kebutuhan)	29,02%	38,61%
3.	Dana Desa	Minimal 10% dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dikurangi DAK	10%	10%
4.	Belanja Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat	25% dari Dana Transfer Umum	26,96%	35,29%
5.	Belanja Pengawasan	Minimal 0,75% dari total belanja daerah	0,65%	0,26%
6.	Anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Minimal 0,16% dari total belanja daerah	0,03%	0,04%

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa belum semua belanja wajib mandatory yang bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Agam, khususnya belanja pengawasan dan belanja untuk pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah. Terjadinya kondisi ini tidak terlepas dari masih tingginya ketergantungan kepada Pemerintah Pusat sehingga ketika terjadi pengurangan dan atau keterlambatan penyaluran Dana Transfer maka pembiayaan untuk belanja wajib sulit untuk terpenuhi sesuai dengan ketentuan.

Selama tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengalokasikan dan merealisasikan dana mandatory (mandatory spending) dengan uraian sebagaimana tercantum **pada Lampiran X.**

6.6. Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Agam pada tahun 2025, Dampak Bencana dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam

Kabupaten Agam dilanda bencana hidrometeorologi parah, meliputi banjir bandang (galodo), tanah longsor, dan angin kencang akibat curah hujan tinggi terutama di wilayah perbukitan sejak akhir November 2025. Bencana ini berdampak pada 16 kecamatan, menyebabkan korban jiwa, kerusakan ribuan rumah, serta kerugian infrastruktur yang mencapai triliunan rupiah. Berdasarkan data bencana Kabupaten Agam yang dirilis oleh BPBD Kabupaten Agam pada tanggal 6 Januari 2026 Pukul 20.00 WIB, disebutkan bahwa terdapat korban, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.5
Data Korban akibat Bencana Hidrometeorologi
Di Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Korban (Orang)			
		Meninggal Dunia	Belum ditemukan	Mengungsi	Jumlah
1	Malalak	16	2	280	298
2	Matur	1	0	192	193
3	Tanjung Raya	10	2	1802	1814

4	Palupuh	1	0	198	199
5	Palembayan	136	32	737	905
6	Ampek Nagari	1	0	0	1
7	Lubuk Basung	0	1	0	1
8	IV Koto	0	0	12	12
	Jumlah Korban	**165**	**37**	**3221**	**3423**

Sumber: Posko Data Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Agam, 2026

Sementara untuk data kerusakan dan kerugian akibat bencana ini, diperkirakan sebesar Rp6.945.895.509.688,00, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.6
Data Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana Hidrometeorologi
Di Kabupaten Agam

No	Sektor	Jumlah (Rp)
1	Perumahan	608.683.440.000,00
2	Infrastruktur	5.671.836.732.528,00
3	Ekonomi	564.865.997.000,00
4	Sosial	75.509.801.000,00
5	Lintas Sektor	24.999.539.160,00
	Jumlah	**6.945.895.509.688,00**

Sumber: Posko Data Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Agam, 2026

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam terhitung dari mulai terjadinya bencana, antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Agam yang dikoordinir oleh BPBD, bersama dengan TNI/Polri, dan Basarnas melakukan evakuasi, membuka akses jalan, dan menetapkan masa darurat serta peralihan ke pemulihan.

   Penetapan status tanggap Darurat dilakukan melalui Keputusan Bupati Agam, sebagai berikut:
   - Keputusan Bupati Agam Nomor 387 Tahun 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Agam Tahun 2025, tanggal 23 November 2025. Melalui keputusan ini, ditetapkan bahwa masa tanggap darurat dimulai dari tanggal 23 November 2025 sampai dengan 22 Desember 2025 dan dapat diperpanjang dan atau diubah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
   - Keputusan Bupati Agam Nomor 434 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Agam Tahun 2025, tanggal 23 Desember 2025. Melalui keputusan ini, ditetapkan perpanjangan tanggap darurat dimulai dari tanggal 23 Desember 2025 sampai dengan 5 Januari 2026.
2. Membentuk dan mengaktifkan Posko Bencana sebanyak 14 posko darurat bencana hidrometeorologi yang terdiri dari satu pos utama di Balairung Rumah Jabatan Bupati Agam dan 13 pos lapangan di kecamatan-kecamatan terdampak. Posko ini dipakai sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan distribusi bantuan serta monitoring kondisi warga.
3. Melakukan asesmen cepat dan kaji cepat di lokasi terdampak sejak awal kejadian bersama dengan BNPB dan instansi lain, untuk menentukan langkah penanganan lanjutan.
4. Mengungsikan warga terdampak ke tempat yang lebih aman di sejumlah kecamatan, terus memantau kondisi pengungsi serta kebutuhan tanggap darurat, termasuk makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara.

5. Memobilisasi logistik untuk memenuhi kebutuhan pengungsi bersama dengan BNPB, termasuk bantuan makanan, air bersih, tenda, dan peralatan darurat lainnya.
6. Melakukan Rekonstruksi & Rehabilitasi Infrastruktur, dalam bentuk:
   - membuka akses jalan yang tertutup material longsor, memperbaiki infrastruktur yang rusak, serta menjaga konektivitas wilayah terdampak
   - memasang jembatan Bailey dan boreholes serta merehabilitasi fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah dalam rangka stabilisasi kondisi pascabencana
   - membangun rumah hunian sementara (huntara) bagi warga yang terdampak, dalam hal ini TNI Kodim 0304/Agam juga terlibat termasuk membantu kegiatan sosial lain untuk warga terdampak
7. Melakukan pembersihan dan pemulihan lingkungan dalam bentuk membersihan material longsoran, pohon tumbang, serta penyumbatan sungai dan drainase untuk meminimalkan risiko bencana susulan, bersama dengan Tim Gabungan yang melibatkan banyak pihak, diantaranya dari Pegawai, TNI/Polri dan juga masyarakat.
8. Melakukan pemantauan kondisi cuaca dan curah hujan bekerja sama dengan BMKG dan BNPB secara terus menerus, guna memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat untuk mengurangi korban saat terjadi hujan ekstrem.

Beberapa upaya selanjutnya yang sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, antara lain:

1. Penyediaan Hunian Sementara (Huntara)
   Pemerintah pusat dan daerah sedang membangun hunian sementara (117 unit Huntara) di Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan untuk warga yang kehilangan rumah atau terdampak langsung.
2. Rehabilitasi & Rekonstruksi Infrastruktur
   - melaksanakan perbaikan infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum sebagai bagian dari pemulihan wilayah terdampak
   - membuka kembali akses jalan yang putus dengan dukungan TNI/Brimob dan masyarakat,untuk menghubungkan kembali desa-desa yang terisolasi.
3. Rencana Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
   - mengajukan R3P senilai sekitar Rp3,53 triliun, yang akan dipakai untuk rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap dalam 3 tahun (2026–2028) agar kegiatan pemulihan terarah dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen R3P juga didampingi oleh BNPB, untuk memastikan langkah pemulihan sinkron antara pusat, provinsi, dan daerah
4. Pemulihan Layanan Dasar
   - memulihkan layanan pendidikan, termasuk pembersihan sekolah dan bantuan untuk kembali mengaktifkan kegiatan belajar mengajar.
   - meningkatkan layanan kesehatan dan fasilitas dasar lainnya dengan dukungan instansi terkait.

Dalam penanganan pada masa tanggap darurat, Pemerintah Kabupaten Agam menerima banyak bantuan baik dalam bentuk uang maupun barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah lainnya, kelompok masyarakat serta individu.

Penerimaan bantuan dalam bentuk uang yang disetorkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) , antara lain berasal dari:

- Bantuan Presiden sebesar Rp4.000.000.000,00;
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp Rp4.129.970.000,00;
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp50.000.000,00;

- Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp20.000.000,00; dan
- Peduli Bencana Sumut, Aceh, Sumbar, Donasi Masyarakat Kab Lahat, sebesar Rp100.000.000,00

Adapun untuk penyaluran dana bantuan keuangan yang diterima melalui RKUD ini, dilakukan penyesuaian terhadap alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pergeseran anggaran setelah penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga alokasi untuk BTT semula sebesar Rp4.714.959.028,91 pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 bertambah sebesar Rp6.400.000.000,00 menjadi sebesar Rp11.114.959.028,91.

Disamping melalui RKUD, juga telah ditetapkan rekening penampung bencana alam dengan nomor rekening 1600.0207.12345.6 atas nama "Bencana Hidrometeorologi Kab. Agam" pada PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Basung dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 397 Tahun 2025 tanggal 28 November 2025, yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Agam. Pemanfaatan dana bantuan ini dikerjasamakan dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Agam.

6.7. Informasi Lainnya

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata, pada tahun 2023 telah dilakukan penilaian appraisal tanah untuk pembangunan jalan dan jembatan menuju kawasan Objek Wisata Pasia Tiku. Penilaian ini dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan yang ditugaskan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam dengan biaya appraisal sebesar Rp35.593,630,00 yang dikapitalisir menambah nilai aset tanah untuk jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Per 31 Desember 2025.

Kemudian kegiatan appraisal ini dilanjutkan dengan penganggaran pembebasan lahannya pada tahun 2024 melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam. Lahan yang akan dibebaskan ini berlokasi di jalan raya Tiku Jorong Pasie Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara dengan luas 1.922 m2 dengan sertifikat hak milik an. Eli Zabidar. Pekerjaan pembebasan lahan ini tidak terlaksana pada tahun 2024, karena pemiliknya meninggal dunia dan sertifikat tanah tersebut harus diproses turun warisnya terlebih dulu.

Selanjutnya pada tahun 2025, pembebasan lahan tanah dianggarkan kembali pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melalui rekening "Belanja Modal Jalan Kabupaten (5.2.04.01.01.0003)" sebesar Rp725.700.000,00 dan direalisasikan belanjanya pada tanggal 17 November 2025 melalui SP2D Nomor 13.06/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.5.05.0.00.01.0000/12/2025, dan direklasifikasi ke Aset Tanah untuk Jalan Per 31 Desember 2025. Untuk sertifikat kepemilikan lahan ini sedang dalam proses pengurusan balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

BAB VII
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disusun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Agam tahun anggaran 2025 yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagai bagian dari LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025, CaLK memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai kebijakan dan asumsi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh Stakeholder. Disamping itu, CaLK ini juga menjelaskan Laporan Keuangan yang terdapat pada Onface (lembar muka) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penyajian dan pengungkapan yang tertuang dalam CaLK ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai keberhasilan dan capaian kinerja serta pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam selama Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan/Stakeholder dalam menyusun perencanaan dan menyelenggarakan pembangunan sebagai upaya bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam.

Keberhasilan dan prestasi yang telah diperoleh selama ini, tidak membuat Pemerintah Kabupaten Agam berpuas diri. Pemerintah Kabupaten Agam akan terus berkomitmen dan melakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan serta penyempurnaan baik dari sisi regulasi maupun dari peningkatan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kualitas laporan keuangan di tahun-tahun yang akan datang semakin baik.

BUPATI AGAM.

BUPATI AGAM

BENNI WARLIS

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi Pengurangan dan Penambahan Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6-7
1		**Piutang Pajak :**	**39.676.891.767,19**	**53.597.588,00**	**7.154.581.098,00**	**1.665.499.704,00**	**45.236.530.113,19**
a	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Mineral Bukan Logam	253.670.774,00		40.406.270,00		294.077.044,00
b	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Air Tanah	26.761.868,00		2.052.686,00	15.975.423,00	12.839.131,00
c	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Reklame	83.769.699,00		14.528.754,00	4.540.247,00	93.758.206,00
d	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PBB	38.135.608.522,19	53.597.588,00	6.337.022.018,00	470.073.130,00	44.056.154.998,19
e	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Penerangan Jalan	845.196,00			845.196,00	-
f	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang PBJT-Restoran	515.822.305,00		303.917.882,00	515.822.305,00	303.917.882,00
g	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang PBJT-Hotel	660.413.403,00		456.653.488,00	658.243.403,00	458.823.488,00
h	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang PBJT-Jasa Parkir			2.086.364,00		2.086.364,00
i	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan			14.873.000,00		14.873.000,00
2		**Piutang Retribusi :**	**17.022.163.356,00**	**491.855.098,00**	**15.374.443.913,00**	**15.097.332.263,00**	**17.791.130.104,00**
a	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Retribusi IMB	-				-
b	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Puskesmas	522.726.000,00		666.148.400,00	522.726.000,00	666.148.400,00
c	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.622.085.791,00	(40.744.995,00)	13.865.348.819,00	14.507.210.319,00	13.939.479.296,00
d	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Izin Trayek	54.509.600,00				54.509.600,00
c	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Retribusi Pengendalian Menara	48.961.214,00				48.961.214,00
f	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Izin Gangguan (HO)	11.217.800,00	(11.217.800,00)			-
g	DINAS KOPERASI	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.281.600.000,00				1.281.600.000,00
h	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.510.000,00				1.510.000,00
i	BADAN KEUANGAN DAERAH	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.330.000,00	(22.330.000,00)			-
j		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	28.100.000,00	22.330.000,00	41.150.000,00	23.900.000,00	67.680.000,00
k	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Retribusi Pemakaian Ruangan	8.075.000,00	1.875.000,00	19.000.000,00	12.150.000,00	16.800.000,00
l	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pemakaian Laboratorium	46.400,00			46.400,00	-
m	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	204.660.051,00	530.483.649,00	703.367.555,00		1.438.511.255,00
n	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Persetujuan Bangunan Gedung	216.341.500,00	241.444,00	79.429.139,00	31.299.544,00	264.712.539,00
o	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya	-	11.217.800,00			11.217.800,00
3		**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	-	-	-	-	-
	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Laba (deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) pada Bank Nagari	-	-	-	-	-
4		**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**1.233.868.734,91**	**33.470.222,96**	-	**283.531.556,82**	**983.807.401,05**
a	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Pendapatan Bunga (remunerasi TDF-TKD)	-	-			-
b	DINAS KESEHATAN	Piutang BLUD DINKES (Puskesmas)	-				-
c	RSUD	Piutang BLUD RSUD	55.832.405,00	(55.832.405,00)			-
d	BADAN KEUANGAN DAERAH	Jaminan Pelaksanaan	76.230.600,00				76.230.600,00
e	BADAN KEUANGAN DAERAH	Denda Keterlambatan	1.020.065.410,91	89.302.627,96		283.531.556,82	825.836.482,05
f	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kelebihan Pembayaran Sertifikasi Guru	11.553.044,00				11.553.044,00
g	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	22.060.275,00	-			22.060.275,00
h	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	48.127.000,00	-			48.127.000,00
5		**Piutang Dana Transfer**	**27.071.506.726,00**	-	**28.808.260.234,00**	**27.071.506.726,00**	**28.808.260.234,00**
		Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	-	**6.554.663.000,00**	-	**6.554.663.000,00**
a	BADAN KEUANGAN DAERAH	DBH PBB	-		1.675.243.000,00		1.675.243.000,00
b	BADAN KEUANGAN DAERAH	DBH PPh Pasal 21	-		3.738.714.000,00	-	3.738.714.000,00
c	BADAN KEUANGAN DAERAH	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN			501.274.000,00		501.274.000,00
d	BADAN KEUANGAN DAERAH	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			94.158.000,00		94.158.000,00
e	BADAN KEUANGAN DAERAH	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi			177.193.000,00		177.193.000,00
f	BADAN KEUANGAN DAERAH	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent			384.000,00		384.000,00
g	BADAN KEUANGAN DAERAH	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty			365.593.000,00		365.593.000,00
h	BADAN KEUANGAN DAERAH	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			2.104.000,00		2.104.000,00
		Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	**27.071.506.726,00**	-	**22.253.597.234,00**	**27.071.506.726,00**	**22.253.597.234,00**
a	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.202.076.974,00			5.202.076.974,00	-
b	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.860.872.309,00			1.860.872.309,00	-
c	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.942.062.284,00		22.180.540.808,00	19.942.062.284,00	22.180.540.808,00
d	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	66.495.159,00		73.056.426,00	66.495.159,00	73.056.426,00
6		**PIUTANG LAINNYA**	**682.230.860,00**	-	-	**327.115.525,00**	**355.115.335,00**
	DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS KESEHATAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	682.230.860,00			327.115.525,00	355.115.335,00
		Jumlah	**85.686.661.444,10**	**578.922.908,96**	**51.337.285.245,00**	**44.441.985.774,82**	**93.174.843.187,24**

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	**Piutang Pajak :**	**45.236.530.113,19**	**24.254.310.960,66**	**20.982.219.152,53**
a	Pajak Mineral Bukan Logam	294.077.044,00	148.640.496,55	145.436.547,45
b	Pajak Air Tanah	12.839.131,00	1.667.365,83	11.171.765,17
c	Pajak Reklame	93.758.206,00	14.402.306,47	79.355.899,53
d	PBB	44.056.154.998,19	24.085.496.138,14	19.970.658.860,05
e	Pajak Penerangan Jalan	-		-
f	Piutang PBJT-Restoran	303.917.882,00	1.519.589,41	302.398.292,59
g	Piutang PBJT-Hotel	458.823.488,00	2.500.267,44	456.323.220,56
h	Piutang PBJT-Jasa Parkir	2.086.364,00	10.431,82	2.075.932,18
i	Piutang PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	14.873.000,00	74.365,00	14.798.635,00
2	**Piutang Retribusi :**	**17.791.130.104,00**	**2.843.001.617,15**	**14.948.128.486,85**
a	Retribusi IMB	-		-
b	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Puskesmas	666.148.400,00	66.614.840,00	599.533.560,00
c	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	13.939.479.296,00	164.223.046,80	13.775.256.249,20
d	Retribusi Izin Trayek	54.509.600,00	54.509.600,00	-
e	Retribusi Pengendalian Menara	48.961.214,00	48.961.214,00	-
f	Retribusi Izin Gangguan (HO)	-		-
g	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	-
h	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.510.000,00	1.510.000,00	-
i	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-		-
j	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	67.680.000,00	62.925.000,00	4.755.000,00
k	Retribusi Pemakaian Ruangan	16.800.000,00	9.348.500,00	7.451.500,00
l	Retribusi Pemakaian Laboratorium	-		-
m	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.438.511.255,00	944.442.259,05	494.068.995,95
n	Persetujuan Bangunan Gedung	264.712.539,00	197.649.357,30	67.063.181,70
o	Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya	11.217.800,00	11.217.800,00	-
3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	-		-
	Bagian Laba (deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) pada Bank Nagari	-		-
4	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**983.807.401,05**	**935.680.401,05**	**48.127.000,00**
a	Piutang Pendapatan Bunga (remunerasi TDF-TKD)	-		-
b	Piutang BLUD DINKES (Puskesmas)	-		-
c	Piutang BLUD RSUD	-		-
d	Jaminan Pelaksanaan	76.230.600,00	76.230.600,00	-
e	Denda Keterlambatan	825.836.482,05	825.836.482,05	-
f	Kelebihan Pembayaran Sertifikasi Guru	11.553.044,00	11.553.044,00	-
g	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	22.060.275,00	22.060.275,00	-
h	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	48.127.000,00		48.127.000,00
5	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**6.554.663.000,00**	-	**6.554.663.000,00**
a	DBH PBB	1.675.243.000,00		1.675.243.000,00
b	DBH PPh Pasal 21	3.738.714.000,00		3.738.714.000,00
c	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	501.274.000,00		501.274.000,00
d	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	94.158.000,00		94.158.000,00
e	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	177.193.000,00		177.193.000,00
f	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	384.000,00		384.000,00
g	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	365.593.000,00		365.593.000,00
h	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSI	2.104.000,00		2.104.000,00
6	**Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi**	**22.253.597.234,00**	-	**22.253.597.234,00**
a	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-		-
b	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-		-
c	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.180.540.808,00		22.180.540.808,00
d	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	73.056.426,00		73.056.426,00
7	**PIUTANG LAINNYA**	**355.115.335,00**	-	**355.115.335,00**
	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	355.115.335,00		355.115.335,00
	Jumlah	**93.174.843.187,24**	**28.032.992.978,86**	**65.141.850.208,38**

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN
PENYISIHAN DANA BERGULIR

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	BANK PENGELOLA	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	Bank Nagari Cab Lubuk Basung	1.512.101.256,00	1.512.101.256,00	-
		BMT Agam Madani Lubuk Basung	1.189.225.839,00	1.181.265.839,00	7.960.000,00
		BPR Manggopoh	667.022.841,00	667.022.841,00	-
		BPR Tilatang Kamang	375.655.172,00	375.655.172,00	-
		BPR Panampuang	487.013.890,00	487.013.890,00	-
			4.231.018.998,00	**4.223.058.998,00**	**7.960.000,00**
		Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir	682.599.498,00		682.599.498,00
		Penerimaan Pokok Dana Bergulir pada BMT Agam Madani Lubuk Basung	11.887.835,00	-	11.887.835,00
			-		-
GRAND TOTAL			**4.925.506.331,00**	**4.223.058.998,00**	**702.447.333,00**

BUPATI AGAM ,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali/Dihapuskan Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
		I. INVESTASI NON PERMANEN										
1.	2007	Dana Bergulir		Dana Bergulir	5.033.000.000,00	5.033.000.000,00	-	5.033.000.000,00			107.493.669,00	4.925.506.331,00
		Dana Bergulir Tidak Tertagih		Dana Bergulir Tak tertagih			(4.223.058.998,00)	(4.223.058.998,00)				(4.223.058.998,00)
		TOTAL INVESTASI NON PERMANEN										**702.447.333,00**
		II. INVESTASI PERMANEN										
2.	2016	Bank Nagari Lb Basung		Investasi Jgk Pnjg	69.243.253.179,00	69.243.253.179,00	1.000.000.000,00	70.243.253.179,00				70.243.253.179,00
	2016	PDAM		Investasi Jgk Pnjg	28.690.383.362,18	28.690.383.362,18	1.301.434.707,60	29.991.818.069,78		1.681.187.690,45		31.673.005.760,23
3	2011	PT Balairung Citra Jaya Sumbar		Investasi Jgk Pnjg	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	-	2.824.899.000,00	-			2.824.899.000,00
		TOTAL INVESTASI PERMANEN										**104.741.157.939,23**
					-							-
JUMLAH					**105.791.535.541,18**	**105.791.535.541,18**	**(1.921.624.290,40)**	**103.869.911.250,78**	-	**1.681.187.690,45**	**107.493.669,00**	**105.443.605.272,23**

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SKPD	SALDO AWAL	TAMBAH	KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	87.583.726.107,49	4.934.448.699,00	3.047.675.006,00	89.470.499.800,49
2	Sekretariat DPRD	19.232.549.342,00	1.283.217.700,00	-	20.515.767.042,00
3	Inspektorat	12.667.539.377,00	780.629.054,00	729.467.673,00	12.718.700.758,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	871.857.848.683,95	16.511.617.923,54	3.260.833.499,86	885.108.633.107,63
5	Dinas Kesehatan	377.122.348.831,58	18.446.026.622,00	1.686.257.818,00	393.882.117.635,58
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.596.661.951.880,45	22.818.140.991,00	6.330.718.995,00	2.613.149.373.876,45
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaa	16.244.544.582,00	1.580.735.814,00	1.280.731.296,00	16.544.549.100,00
8	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	6.540.217.327,50	38.249.999,00	133.120.000,00	6.445.347.326,50
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	489.047.450,00	268.588.025,00	1.287.600,00	756.347.875,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	44.001.512.901,00	685.344.306,00	628.224.860,00	44.058.632.347,00
11	Dinas Pertanian	38.021.047.170,43	628.464.647,00	225.226.573,00	38.424.285.244,43
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kete	3.318.912.871,00	70.704.388,00	14.975.000,00	3.374.642.259,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	118.684.633.714,90	53.405.500,00	116.017.591,00	118.622.021.623,90
14	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	21.829.889.595,13	70.244.500,00	126.778.531,09	21.773.355.564,04
15	Dinas Sosial	4.523.540.987,00	38.539.400,00	265.840.060,00	4.296.240.327,00
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21.194.319.504,12	425.365.979,00	37.293.630,00	21.582.391.853,12
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.697.007.096,50	182.907.501,00	153.457.500,00	12.726.457.097,50
18	Dinas Perhubungan	22.369.532.418,20	57.081.725,00	27.798.909,00	22.398.815.234,20
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.015.623.754,00	304.544.908,00	-	4.320.168.662,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	8.179.144.665,60	190.500.000,00	-	8.369.644.665,60
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.630.898.230,23	353.594.854,00	143.680.376,00	7.840.812.708,23
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	13.155.754.855,00	319.925.651,00	48.730.000,00	13.426.950.506,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.330.456.049,00	440.777.199,00	304.570.040,00	2.466.663.208,00
24	Badan Keuangan Aset Daerah	8.013.009.309,00	1.328.037.450,00	1.053.034.150,00	8.288.012.609,00
25	Badan Pendapatan Daerah	5.715.921.770,25	1.139.700.856,00	-	6.855.622.626,25
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.654.900.517,00	35.760.000,00	-	1.690.660.517,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.026.244.360,00	33.486.480,00	-	2.059.730.840,00

NO.	SKPD	SALDO AWAL	TAMBAH	KURANG	SALDO AKHIR
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	4.614.461.111,00	8.253.002.159,00	249.644.000,00	12.617.819.270,00
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.999.831.642,00	5.272.500,00	-	3.005.104.142,00
30	Kecamatan Lubuk Basung	4.394.326.887,80	16.761.000,00	19.135.000,00	4.391.952.887,80
31	Kecamatan Ampek Nagari	2.720.148.381,00	2.040.000,00	-	2.722.188.381,00
32	Kecamatan Tanjung Raya	4.241.550.549,00	-	-	4.241.550.549,00
33	Kecamatan Matur	4.998.153.393,00	-	-	4.998.153.393,00
34	Kecamatan IV Koto	4.311.146.989,00	33.338.850,00	-	4.344.485.839,00
35	Kecamatan Malalak	1.477.186.274,00	-	-	1.477.186.274,00
36	Kecamatan Banuhampu	4.679.287.110,00	66.200.000,00	22.200.000,00	4.723.287.110,00
37	Kecamatan Sungai Pua	4.459.116.230,00	-	-	4.459.116.230,00
38	Kecamatan Ampek Angkek	3.925.548.114,00	-	-	3.925.548.114,00
39	Kecamatan Candung	4.771.432.468,00	6.913.000,00	-	4.778.345.468,00
40	Kecamatan Baso	3.218.574.473,00	-	-	3.218.574.473,00
41	Kecamatan Tilatang Kamang	3.504.688.930,00	-	9.000.000,00	3.495.688.930,00
42	Kecamatan Kamang Magek	5.630.745.519,00	32.958.900,00	38.458.900,00	5.625.245.519,00
43	Kecamatan Palembayan	3.178.483.236,00	-	-	3.178.483.236,00
44	Kecamatan Palupuh	4.511.528.637,00	-	-	4.511.528.637,00
Jumlah		**4.395.398.333.294,13**	**81.436.526.580,54**	**19.954.157.007,95**	**4.456.880.702.866,72**
Akumulasi Penyusutan		**(2.566.906.891.473,43)**	**(136.602.647.808,75)**	**(8.031.959.493,58)**	**(2.695.477.579.788,60)**
Nilai Buku Aset Tetap		**1.828.491.441.820,70**	**-55.166.121.228,21**	**11.922.197.514,37**	**1.761.403.123.078,12**

BUPATI AGAM ,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	MUTASI		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	317.496.019.164,91	1.047.537.260,00	297.024.610,00	318.246.531.814,91
2	Peralatan dan Mesin	436.250.802.336,74	43.121.899.116,03	11.272.959.742,62	468.099.741.710,15
3	Gedung dan Bangunan	1.085.761.614.251,40	7.485.932.311,50	2.233.854.814,83	1.091.013.691.748,07
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.484.919.419.058,65	22.054.551.538,00	1.786.781.350,00	2.505.187.189.246,65
5	Aset Tetap Lainnya	60.676.950.106,93	7.221.171.098,00	178.607.743,00	67.719.513.461,93
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.293.528.375,51	505.435.257,00	4.184.928.747,50	6.614.034.885,01
Total Aset Tetap		**4.395.398.333.294,14**	**81.436.526.580,53**	**19.954.157.007,95**	**4.456.880.702.866,72**
Akumulasi Penyusutan		**(2.566.906.891.473,43)**	**(136.602.647.808,75)**	**(8.031.959.493,58)**	**(2.695.477.579.788,60)**
Nilai Buku aset Tetap		**1.828.491.441.820,71**	**-55.166.121.228,22**	**11.922.197.514,37**	**1.761.403.123.078,12**

BUPATI AGAM ,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	386.485.810,00		4.418.871,00				112.662.297,49				278.242.383,51
2	DINAS KESEHATAN	296.375.725,00		24.774.334,00	74.447.700,00			101.121.000,00				294.476.759,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	7.331.968.513,50		52.262.352,00	99.888.000,00				3.971.145.450,00			3.512.973.415,50
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.078.380,00										97.078.380,00
5	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	99.378.750,00										99.378.750,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.082.241.197,00			249.644.000,00							2.331.885.197,00
	TOTAL	**10.293.528.375,50**	**-**	**81.455.557,00**	**423.979.700,00**	**-**	**-**	**213.783.297,49**	**3.971.145.450,00**	**-**	**-**	**6.614.034.885,01**

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SKPD	Saldo Awal	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.646.752.226,00	67.906.000,00	48.406.000,00	3.666.252.226,00
2	Dinas Kesehatan	1.751.385.313,00	-	-	1.751.385.313,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.950.850.081,00	1.005.284.670,00	-	4.956.134.751,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	56.683.760.020,28	448.178.209,03	15.336.731.511,26	41.795.206.718,05
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.221.301.335,98	-	2.012.110.207,05	10.209.191.128,93
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27.123.364.326,49	-	-	27.123.364.326,49
7	Dinas Sosial	111.160.056,00	612.964.000,00	612.964.000,00	111.160.056,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	343.107.405,00	45.400.000,00	-	388.507.405,00
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-
10	Dinas Lingkungan Hidup	571.872.008,00	143.587.860,00	159.491.236,00	555.968.632,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.352.027.381,38	-	-	12.352.027.381,38
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	398.085.354,00	-	105.400.669,00	292.684.685,00
13	Dinas Perhubungan	1.401.958.179,37	-	6.411.250,00	1.395.546.929,37
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.216.019.128,86	-	-	1.216.019.128,86
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	111.304.175,00	-	4.000.000,00	107.304.175,00
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	340.690.000,00	-	-	340.690.000,00
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	13.400.000,00	-	13.400.000,00	-
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	7.456.695.344,00	27.798.909,00	45.000.000,00	7.439.494.253,00
19	Dinas Pertanian	127.563.575,00	-	-	127.563.575,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	34.480.500,00	-	-	34.480.500,00
21	Sekretariat Daerah	7.238.130.929,06	-	-	7.238.130.929,06
22	Sekretariat DPRD	126.530.083,00	-	-	126.530.083,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000.035.610,82	-	33.331.500,00	966.704.110,82
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	76.985.600,00	-	-	76.985.600,00
25	Badan Pendapatan Daerah	1.816.962.500,00	222.000.000,00	-	2.038.962.500,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	179.545.600,00	-	14.135.000,00	165.410.600,00
27	Inspektorat	118.321.550,00	-	24.425.000,00	93.896.550,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	720.727.900,00	-	-	720.727.900,00
29	Kecamatan Baso	115.923.600,00	-	33.729.000,00	82.194.600,00
30	Kecamatan Ampek Angkek	195.157.445,00	-	-	195.157.445,00
31	Kecamatan Candung	136.759.300,00	-	-	136.759.300,00
32	Kecamatan Tilatang Kamang	261.628.200,00	-	97.883.200,00	163.745.000,00
33	Kecamatan Kamang Magek	20.218.250,00	-	-	20.218.250,00
34	Kecamatan Palupuh	17.289.500,00	-	-	17.289.500,00
35	Kecamatan Banuhampu	159.185.855,00	-	-	159.185.855,00
36	Kecamatan Sungai Pua	88.614.700,00	-	-	88.614.700,00
37	Kecamatan IV Koto	159.543.000,00	-	152.765.000,00	6.778.000,00
38	Kecamatan Matur	-	-	-	-
39	Kecamatan Palembayan	23.733.867,00	-	6.913.000,00	16.820.867,00
40	Kecamatan Tanjung Raya	6.686.250,00	-	-	6.686.250,00
41	Kecamatan Lubuk Basung	-	9.000.000,00	-	9.000.000,00
42	Kecamatan Ampek Nagari	-	-	-	-
43	Kecamatan Tanjung Mutiara	11.000.000,00	-	-	11.000.000,00
44	Kecamatan Malalak	-	-	-	-
TOTAL ASET LAINNYA		142.332.756.149,24	2.582.119.648,03	18.711.096.573,31	126.203.779.223,97
AKUMULASI PENYUSUTAN		(75.230.923.686,13)	(3.774.138.163,14)	(10.382.046.601,88)	(68.623.015.247,39)
NILAI BUKU ASET LAINNYA		**67.101.832.463,11**	**(1.192.018.515,11)**	**8.329.049.971,43**	**57.580.763.976,58**

BUPATI AGAM ,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan Yang direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer Ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				-	-	-	-	-

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	5	6	7
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	802.550,00	10.752.187,00	637.550,00	10.917.187,00
2	Pendapatan diterima dimuka	303.229.311,03	630.986.958,27	531.033.524,72	403.182.744,58
3	Hutang Bunga	0			-
4	Hutang Jasa Bank	0			-
5	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	0			-
6	Utang Belanja	74.682.384.053,77	178.705.308.975,78	181.621.210.042,25	71.766.482.987,30
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	223.272.205,00	11.008.776.383,00	217.551.588,00	11.014.497.000,00
	Jumlah	**75.209.688.119,80**	**190.355.824.504,05**	**182.370.432.704,97**	**83.195.079.918,88**

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Hutang Dalam Negeri Pemerintah Pusat	-			-
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-			-
3	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-			-
	Jumlah	-			-

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XIX

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					-	-	-	
					-	-	-	
	JUMLAH		-	-	-	-	-	

BUPATI AGAM,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XX
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
TERDIRI ATAS :

LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA)
BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN XX.1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM :
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	Bidang Air Bersih			13.210.285.890,48	19.129.489.251,69	168.769.847,00	32.508.544.989,17	835.537.372,94	-	835.537.372,94	50.908.482.129,60	-	-	-	(19.235.474.513,37)	31.673.007.616,23	100,00%	24.252.996.594,23
	Perusahaan Daerah Air Minum			13.210.285.890,48	19.129.489.251,69	168.769.847,00	32.508.544.989,17	835.537.372,94	-	835.537.372,94	50.908.482.129,60				(19.235.474.513,37)	31.673.007.616,23	100,00%	24.252.996.594,23
	Jumlah			**13.210.285.890,48**	**19.129.489.251,69**	**168.769.847,00**	**32.508.544.989,17**	**835.537.372,94**	**-**	**835.537.372,94**	**50.908.482.129,60**	**-**	**-**	**-**	**(19.235.474.513,37)**	**31.673.007.616,23**	**100,00%**	**24.252.996.594,23**

BUPATI AGAM ,

BENNI WARLIS

LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI)
BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN XX.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR : 3 Tahun 2026
TANGGAL : 10 Agustus 2026

KABUPATEN AGAM

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

No.	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban Diluar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDAM			14.509.883.098,00	12.658.003.509,45	1.851.879.588,55	197.053.950,84	-	2.048.933.539,39
	Jumlah			**14.509.883.098,00**	**12.658.003.509,45**	**1.851.879.588,55**	**197.053.950,84**	-	**2.048.933.539,39**

BUPATI AGAM ,

BENNI WARLIS

LAPORAN KEUANGAN BUMD TAHUN ANGGARAN 2025

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

BESERTA

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM
LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	2
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	3
LAPORAN ARUS KAS	4
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANTOKAN
Jln. Dr. Mohd Hatta No.531 Lubuk Basung, 26415 - Telp. (0752) 8701910
HP. 081266602112 Fax (0752) 66363 e-mail : agampdam@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM

Atas nama Manajemen, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jevie C. Eka Putra,S.T.,M.T.
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM**
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP).
3. Kami menjamin bahwa
   a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar.
   b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
   c. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian dalam **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM**
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Lubuk Basung, 6 Maret 2026
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM

PERUMDA AIR MINUM TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM
10000 METERAI TEMPEL F6C6EANX222967104

Jevie C. Eka Putra,S.T.,M.T.
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00063/2.0946/AU.8/04/0996-1/1/III/2026

Dewan Pengawas dan Direktur
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam (Perusahaan) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka pembanding laporan keuangan terlampir, diaudit oleh auditor independen lain dengan opini tanpa modifikasian pada tanggal 14 Juli 2025.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Dipindai dengan CamScanner

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan standar audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit.

Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP JOJO SUNARJO & REKAN
NIU-KAP : KEP-440/KM.1/2013

00063

Ridwan Saleh, M.Ak, CA, CPA
Izin Akuntan Publik No. AP. 0996

6 Maret 2026

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	CAT	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR			
- Kas dan Bank	2a, 3	8.775.869.086,38	7.263.680.205,61
- Piutang Usaha	2c, 4	6.982.561.100,00	6.198.036.800,00
Penyisihan Piutang	2c, 4	*(3.444.664.712,50)*	*(3.444.664.712,50)*
- Persediaan	2d, 5	896.520.416,60	428.771.670,45
Jumlah Asset Lancar		**13.210.285.890,48**	**10.445.823.963,56**
ASET TIDAK LANCAR			
- **Aset Tetap**	2f, 6		
Harga Perolehan		48.929.619.771,25	46.604.893.713,10
Akumulasi Penyusutan		(29.800.130.519,56)	(27.051.983.963,88)
Nilai Buku Asset Tetap		**19.129.489.251,69**	**19.552.909.749,22**
- Aset Lainnya	7	168.769.847,00	168.769.847,00
JUMLAH ASET		**32.508.544.989,17**	**30.167.503.559,78**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
- Utang Usaha	8	226.108.000,00	-
- Utang Non Usaha	9	82.895.440,00	129.726.085,00
- Utang Pajak	10	526.533.932,94	45.957.549,00
Jumlah Kewajiban Lancar		**835.537.372,94**	**175.683.634,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
- Utang Iuran Pensiun		-	-
		-	-
EKUITAS			
- Penyertaan Modal Pemda	12	49.227.294.439,15	47.354.385.675,15
- Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya	12	-	-
- Hibah	12	-	1.872.908.764,00
- Laba (Rugi) Ditahan	13	(19.235.474.513,37)	(19.322.308.896,03)
- Laba (rugi) Periode Berjalan	13	1.681.187.690,45	86.834.382,66
Jumlah Ekuitas		**31.673.007.616,23**	**29.991.819.925,78**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**32.508.544.989,17**	**30.167.503.559,78**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

URAIAN	CAT	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha			
- Pendapatan Penjualan Air	2i, 14	12.765.336.500,00	12.806.297.673,00
- Pendapatan Penjualan Non Air	2i, 15	1.744.546.598,00	1.062.524.942,00
Jumlah Pendapatan Usaha		**14.509.883.098,00**	**13.868.822.615,00**
BEBAN OPERASIONAL			
- Beban Operasional	2j, 16	9.909.856.953,77	11.738.673.659,85
- Beban Penyusutan	2j, 16	2.748.146.555,68	2.659.265.889,00
Jumlah Beban		**12.658.003.509,45**	**14.397.939.548,85**
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
- Pendapatan Lain-Lain	17	197.053.950,84	661.193.922,51
- Beban Lain-Lain	17	-	-
		197.053.950,84	**661.193.922,51**
LABA RUGI SEBELUM PENYUSUTAN		**4.797.080.095,07**	-
LABA / RUGI OPERASIONAL		**2.048.933.539,39**	**132.076.988,66**
PAJAK PPH 25		367.745.848,94	45.242.606,00
LABA / RUGI BERSIH		**1.681.187.690,45**	**86.834.382,66**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No.	Uraian	Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang Dipisahkan	Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Hibah	Saldo Laba	Jumlah
1.	**Saldo Akhir per 31 Desember 2023**	**30.484.598.281,00**	**13.630.479.069,15**	**1.872.908.764,00**	**(19.322.308.896,03)**	**26.665.677.218,12**
	Penambahan Modal Pemerintah	16.869.787.394,15				**16.869.787.394,15**
	Laba Rugi Tahun Berjalan 2024		(13.630.479.069,15)		86.834.382,66	**(13.543.644.686,49)**
2.	**Saldo Akhir per 31 Desember 2024**	**47.354.385.675,15**	**-**	**1.872.908.764,00**	**(19.235.474.513,37)**	**29.991.819.925,78**
	Penyertaan Pemda	1.872.908.764,00		(1.872.908.764,00)		-
	Penyertaan Pemda yang Belum Ditetapkan		-			-
	Laba Rugi Desember 2025				1.681.187.690,45	1.681.187.690,45
3.	**Saldo per 31 Desember 2025**	**49.227.294.439,15**	**-**	**-**	**(17.554.286.822,92)**	**31.673.007.616,23**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	1.681.187.690,45	86.834.382,66
Ditambah (Dikurangi) Transaksi Non Kas		
- Beban Penyusutan Aktiva Tetap	2.748.146.555,68	2.659.265.889,00
- Beban Penyisihan Piutang Usaha	-	(512.171.283,25)
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	**4.429.334.246,13**	**2.233.928.988,41**
(Kenaikan) / Penurunan dalam Asset Lancar		
- Piutang Usaha	(784.524.300,00)	(988.645.623,00)
- Persediaan	(467.748.746,15)	(71.804.103,11)
- Aset Lain lain	-	-
Jumlah (Kenaikan) / Penurunan dalam Asset Lancar	**(1.252.273.046,15)**	**(1.060.449.726,11)**
Kenaikan / (Penurunan) dalam Kewajiban Jangka Pendek		
- Utang Usaha	226.108.000,00	-
- Utang Non Usaha	(46.830.645,00)	(67.124.270,00)
- Titipan Retribusi/Pajak Air		
- Utang Pajak	480.576.383,94	41.788.813,00
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) dlm Kewajiban Jangka Pendek	**659.853.738,94**	**(25.335.457,00)**
Kenaikan / (Penurunan) dalam Kewajiban Jangka Panjang		
- Utang Iuran Pensiun	-	-
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) dlm Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**3.836.914.938,92**	**1.148.143.805,30**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
- (Kenaikan) / Penurunan Imbalan Pasca Kerja		
- (Kenaikan) / Penurunan Asset Tetap	(2.324.726.058,15)	(3.909.654.761,69)
- (Kenaikan) / Penurunan Asset Lain-Lain		
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(2.324.726.058,15)**	**(3.909.654.761,69)**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
- Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan	1.872.908.764,00	16.869.787.394,15
- Kenaikan / (Penurunan) Hibah	(1.872.908.764,00)	-
- Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Pemerintah Pusat yg Belum Ditetapkan	-	(13.630.479.069,15)
- Kenaikan / (Penurunan) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	-	-
- Kenaikan / (Penurunan) Uang Jaminan	-	-
- Kenaikan / (Penurunan) Kekayaan	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**-**	**3.239.308.325,00**

Dipindai dengan CamScanner

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN KABUPATEN AGAM
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	**1.512.188.880,77**	**477.797.368,61**
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	7.263.680.205,78	6.785.882.837,17
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	**8.775.869.086,55**	**7.263.680.205,78**

Lihat catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dipindai dengan CamScanner

1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Direksi Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk 31 Desember 2024 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP) dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan telah menerapkan SAK EP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perusahaan.

Laporan keuangan Perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank. Kas besar dan kas kecil Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam dikelola dengan menggunakan sistem imprest fund (dana tetap). Kas besar dan kas kecil Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional Perumda Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunannya, disajikan sebagai "kas dan deposito berjangaka yang dibatasi penggunaannya"

c. Piutang Usaha

Piutang disajikan dengan nilai wajar yang dapat direalisasikan, Berdasarkan pengalaman dan data historis, perusahaan menetapkan estimasi kerugian piutang usaha tak tertagih sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK-EP) yaitu perhitungan penyisihan piutang rekening air berdasarkan persentase tidak tertagihnya piutang rekening air berdasarkan periode umur piutang: 3 -6 bulan di sisihkan sebesar 25%, 6-12 bulan 50%, 12-24 bulan sebesar 75% dan diatas 24 bulan sebesar 100%

d. Persediaan

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan bahan instalasi dan bahan kimia adalah Perpetual Inventory Method. Dasar penilai persediaan adalah harga perolehan. Dalam SAK EP adanya indikasi Penurunan Nilai Persediaan disebabkan keusangan atau kerusakan fisik dari persediaan.

Dipindai dengan CamScanner

e. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi berdasarkan periode penggunaannya dengan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan atau harga belinya termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Aset tetap yang berasal dari pengalihan harta Dinas/Instalasi Pemerintah lain, nilainya ditetapkan atas dasar penilaian kembali oleh Tim Penilai. Aset tetap harus diukur secara keseluruhan baik aset tetap produktif maupun aset tetap tidak produktif (SAK EP). Penyusutan aset tetap sebelum tahun buku 1991 dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) sesuai dengan taksiran masa manfaat aset yang bersangkutan, tanpa memperhitungkan nilai residu atau sisanya. Sejak tahun 2000, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah No. 8 tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), penyusunan aset tetap mengacu pada Undang-undang Perpajakan No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 sebagai berikut :

	Masa Manfaat
Instalasi Sumber Air	5 & 20 tahun
Instalasi pompa dan pembangkit	8, 15 & 20 tahun
Instalasi Pengelohan Air	4, 5 & 20 tahun
Instalasi Transmisi dan Distribusi	4, 5, 8, 10 & 20 tahun
Peralatan dan Perlengkapan	4 tahun
Kendaraan dan alat angkut	5 & 8 tahun
Inventaris dan peralatan kantor	4, 8 & 20 tahun
Inventaris air minum	8 tahun

Pengeluaran untuk suatu aset tetap dengan maksud untuk menambahan nilai ekonomi, menambahan kapasitas, atau menambah masa manfaat ditambah pada nilai aset yang bersangkutan.

g. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang besumber dari informasi internal dan ekternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasilan kas. Jika indikasi tersebut ada, entitas mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

h. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Dipindai dengan CamScanner

i. Pengakuan Pendapatan

Seluruh pendapatan, baik pendapatan usaha maupun pendapatan non usaha diakui pada saat timbulnya transaksi dan/atau pada masa prestasi dinikmati, yaitu :

1. Pendapatan penjualan air diakui, dicatat dan dilaporkan pada saat rekening tagihan air diterbitkan.
2. Pendapatan sambungan baru dan pendapatan penjualan air lainnya diakui dan dicatat seluruhnya sebagai pendapatan tahun berjalan dengan memperhatikan ketentuan berikut ini :
   - Jika menurut prosedur yang berlaku pelanggan/calon pelanggan disyaratkan membayar kewajibannya secara tunai maka pendapatan dicatat dan diakui pada saat pembayaran. Oleh karenanya, transaksi seperti ini tidak perlu dilakukan pencatatan kedalam rekening piutang.
   - Jika menurut ketentuan yang berlaku pelanggan dapat memenuhi kewajibannya dengan cara secara mengangsur maka pengakuan serta pencatatan pendapatan dilakukan pada saat ditandatangani kontrak sambungan baru dengan mendebet sambungan baru yang akan diterima dan mengkredit pendapatan sambungan baru, selanjutnya angsuran pembayaran yang jatuh 1 (satu) tahun mendatang direklasifikasi ke Piutang Rekening Non Air.
3. Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan dicatat pada saat denda tersebut diterima.

j. Pengakuan Beban

Pada dasarnya beban diakui, dicatat dan dilaporan dalam periode terjadinya transaksi. Pembebanan biaya-biaya yang bersifat periodik dikaitkan dengan periode dimana biaya tersebut menjadi beban, walaupun pembayarannya belum dilakukan ataupun dibayarkan dimuka.

k. Pajak penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui adanya pajak tangguhan.

l. Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja sebagaimana diatur dalam SAK EP Bab 28 "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pasca kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalan program imbalan pasti.

Perusahaan mampu untuk menggunakan metode projected unut credit untuk mengukur kewajiban imbalan pasti dan beban terkait. Sehingga Perusahaan dalan menghitung kewajiban tersebut menggunakan asumsi aktuarial dan asumsi keuangan dalam menentukan kewajiban imbalan pasca kerja, biaya jasa kini, bunga atas kewajiban imbalan, dan keuntungan atau kerugian aktuarial. Tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pasar obligasi pemerintah pada tanggal pelaporan.

m. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti, perusahaan tidak mengakui kewajiban kontinjensi sebagai kewajiban. Kewajiban kontinjensi diungkapkan pada tanggal laporan, uraian dan sifat kewajiban jika praktis dilakukan.

Dipindai dengan CamScanner

n. Bunga Pinjaman Jangka Panjang

Beban bunga atas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk membiaya proyek konstruksi dibukukan sebagai penambahan biaya kontruksi selama masa pembangunan sampai proyek tersebut dinyatakan selesai dan beroperasi. Setelah masa kontruksi selesai, bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya tahun berjalan dalam kelompok biaya umum.

INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS LAPORAN KEUANGAN

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
3. KAS DAN BANK	**8.775.869.086,38**	**7.263.680.205,61**
Jumlah tersebut merupakan saldo kas/ bank per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:		
- Kas Kecil	4.900.000,00	4.900.000,00
- Kas Besar	15.000.000,00	15.000.000,00
- Bank Nagari Cabang Lb Basung, No Rek: 1600.0101.00853-4	197.732.363,30	315.586.261,30
- Bank Nagari Cabang Lb Basung, No Rek: 1600.0101.00851-9	102.896.519,86	384.423.291,86
- Bank Nagari Cabang Lb Basung, No Rek: 1600.0101.00537-6	710.905.333,42	453.246.401,00
- Bank Nagari Cabang Lb Basung, No Rek: 1600.0101.00713-3	22.968.696,09	160.014.789,09
- Bank Nagari Cabang Lb. Basung No Rek 1600.0302.00392-1	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
- BRI Capem Lb Basung, No Rek: 00000667-01-000031-30-2	1.178.185.379,25	484.004.841,25
- BRI Depo 066701000990409	2.000.000.000,00	-
- Bank BTN Pos Norek 00010035-01-57-001293-6	8.954.157,70	9.068.609,04
- BNI Capem Lb. Basung No Rek 0635710850	150.239.596,00	495.280.574,00
- BNI Deposito Kapitalisasi No. Rek 1818797408	-	2.047.672.905,00
- Depo Swap 375066	3.000.000.000,00	-
- BNI No Rek 8126660218	857.500,00	-
- Bank Mandiri Cabang Bukittinggi	201.193.024,52	712.855.402,07
- Bank Mandiri No rek. 1110075180808	50.172.561,00	50.144.119,71
- Bank Syariah Indonesia 7244052309	131.863.955,24	131.483.011,29
Jumlah	**8.775.869.086,38**	**7.263.680.205,61**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
4. PIUTANG USAHA	**6.982.561.100,00**	**6.198.036.800,00**
Jumlah tersebut merupakan saldo piutang air per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:		
Piutang Usaha	6.982.561.100,00	6.198.036.800,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	*(3.444.664.712,50)*	*(3.444.664.712,50)*
Jumlah Piutang Bersih	**3.537.896.387,50**	**2.753.372.087,50**

Dipindai dengan CamScanner

Rincian piutang air menurut unit kerja:

- Lubuk Basung	3.698.537.800,00	3.131.624.200,00
- Tiku	171.364.550,00	161.005.200,00
- Batu Kambing	1.383.509.350,00	1.328.029.450,00
- Maninjau	1.115.158.100,00	967.957.600,00
- Matur	48.782.950,00	51.779.400,00
- IV. Koto	18.366.850,00	17.161.500,00
- IV. A Candung	55.758.950,00	53.324.500,00
- Baso	388.990.400,00	396.920.450,00
- Sungai Puar	102.092.150,00	90.234.500,00
Jumlah	**6.982.561.100,00**	**6.198.036.800,00**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
5. PERSEDIAAN	**896.520.416,60**	**428.771.670,45**

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahan Kimia	33.300.000,00	6.660.000,00
- Bahan Instalasi	863.220.416,60	422.111.670,00
Jumlah	**896.520.416,60**	**428.771.670,00**

Bahan Kimia terdiri dari:

- Kaporit	33.300.000,00	-
- Alumunium Sulfat	-	6.660.000,00
Jumlah	**33.300.000,00**	**6.660.000,00**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
6. ASET TETAP	**19.129.489.251,69**	**19.552.909.749,22**

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

31 Desember 2025

HARGA PEROLEHAN	31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Tanah dan Penyempurnaan Tanah	300.996.000,00			300.996.000,00
Instalasi Sumber Air	652.814.192,00	9.024.000,00		661.838.192,00
Instalasi Pompa dan Pembangkit	1.442.351.090,00	784.456.782,00		2.226.807.872,00
Instalasi Pengolahan Air	5.398.721.000,00	38.049.500,00		5.436.770.500,00
Instalasi Transmisi dan Distribusi	33.343.690.690,00	1.032.824.996,15		34.376.515.686,15
Bangunan / Gedung	-	6.069.000,00		6.069.000,00
Peralatan dan Perlengkapan	55.745.000,00	42.895.000,00		98.640.000,00
Kendaraan dan Alat Angkut	1.290.960.676,00	228.050.000,00		1.519.010.676,00
Inventaris dan Peralatan Kantor	880.306.740,00	183.356.780,00		1.063.663.520,00
AMDK	3.239.308.325,00	-		3.239.308.325,00
Jumlah	**46.604.893.713,00**	**2.324.726.058,15**	**-**	**48.929.619.771,15**

Dipindai dengan CamScanner

AKUMULASI PENYUSUTAN	31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2025
Tanah dan Penyempurnaan Tanah	-			-
Instalasi Sumber Air	542.380.182,00	18.900.031,10		561.280.213,10
Instalasi Pompa dan Pembangkit	1.193.559.899,00	43.228.609,67		1.236.788.508,67
Instalasi Pengolahan Air	4.526.805.350,00	229.888.038,00		4.756.693.388,00
Instalasi Transmisi dan Distribusi	18.383.766.743,00	1.926.731.457,54		20.310.498.200,54
Bangunan / Gedung		75.862,50		75.862,50
Peralatan dan Perlengkapan	31.020.938,00	17.019.687,50		48.040.625,50
Kendaraan dan Alat Angkut	1.216.570.159,00	39.016.698,75		1.255.586.857,75
Inventaris dan Peralatan Kantor	752.967.152,00	68.372.630,00		821.339.782,00
AMDK	404.913.541,00	404.913.540,63		809.827.081,63
Jumlah	**27.051.983.964,00**	**2.748.146.555,68**	**-**	**29.800.130.519,68**
Nilai Buku	**19.552.909.749,00**			**19.129.489.251,47**

31 Desember 2024

HARGA PEROLEHAN	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
Tanah dan Penyempurnaan Tanah	300.996.000,00		-	300.996.000,00
Instalasi Sumber Air	652.814.192,00	-	-	652.814.192,00
Instalasi Pompa dan Pembangkit	1.288.461.090,00	153.890.000,00	-	1.442.351.090,00
Instalasi Pengolahan Air	5.398.721.000,00	-	-	5.398.721.000,00
Instalasi Transmisi dan Distribusi	32.892.306.253,00	451.384.437,00	-	33.343.690.690,00
Peralatan dan Perlengkapan	37.125.000,00	18.620.000,00	-	55.745.000,00
Kendaraan dan Alat Angkut	1.290.960.676,00	-	-	1.290.960.676,00
Inventaris dan Peralatan Kantor	833.854.740,00	46.452.000,00	-	880.306.740,00
AMDK	-	3.239.308.325,00	-	3.239.308.325,00
Jumlah	**42.695.238.951,00**	**3.909.654.762,00**	**-**	**46.604.893.713,00**

AKUMULASI PENYUSUTAN	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
Tanah dan Penyempurnaan Tanah	-			-
Instalasi Sumber Air	523.479.696,00	18.900.486,00		542.380.182,00
Instalasi Pompa dan Pembangkit	1.143.111.727,00	50.448.172,00		1.193.559.899,00
Instalasi Pengolahan Air	4.297.454.000,00	229.351.350,00		4.526.805.350,00
Instalasi Transmisi dan Distribusi	16.534.918.847,00	1.848.847.896,00		18.383.766.743,00
Peralatan dan Perlengkapan	18.562.500,00	12.458.438,00		31.020.938,00
Kendaraan dan Alat Angkut	1.180.671.168,00	35.898.991,00		1.216.570.159,00
Inventaris dan Peralatan Kantor	694.520.136,00	58.447.016,00		752.967.152,00
AMDK	-	404.913.541,00		404.913.541,00
Jumlah	**24.392.718.074,00**	**2.659.265.890,00**	**-**	**27.051.983.964,00**
Nilai Buku	**18.302.520.877,00**			**19.552.909.749,00**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
7. ASET LAINNYA	**168.769.847,00**	**168.769.847,00**
Jumlah tersebut saldo aset lainnya per 31 Desember 2025, dengan rincian:		
Pembayaran Dimuka Pemda	55.000.000,00	55.000.000,00
Perpipaan Tidak Dipakai (BNPB)	113.769.847,00	113.769.847,00
Jumlah	**168.769.847,00**	**168.769.847,00**

Dipindai dengan CamScanner

Pembayaran dimuka kepada Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 13 Desember 2013 dan 2012 yang merupakan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum diakui sebagai pembagian laba kepada pemerintah daerah karena perusahaan masih mengalami kerugian dan cakupan pelayanan belum mecapai batasan yang diwajibkan.

Rincian Perpipaan Tidak Dipakai (BNPB):		
Pipa PVC 250	79.607.419,00	79.607.419,00
Pipa PVC 100	34.162.428,00	34.162.428,00
Jumlah	**113.769.847,00**	**113.769.847,00**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
8. HUTANG USAHA	226.108.000,0000	-
Jumlah tersebut merupakan hutang usaha per 31 Desember 2025	226.108.000,0000	-
Jumlah	**226.108.000,0000**	**-**

Dengan rincian sebagai berikut:

1. OP No: 39/PIPA&ACC/P/PERUMDAM-AG/XII-2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	117.850.000,00
2. Pembelian 2 Unit Panel Listrik Pump Dosing,1 Unit Panel Listrik MDP Dengan Surat Pesanan No:26/PANEL&KABELSIGUHUNG/PERUMDAM-AG/XII-2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	108.258.000,00
Jumlah	**226.108.000,0000**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
9. HUTANG NON USAHA	**82.895.440,00**	**129.726.085,00**
Jumlah tersebut merupakan hutang non usaha per 31 Desember 2025	82.895.440,00	129.726.085,00
Jumlah	**82.895.440,00**	**129.726.085,00**

Dengan rincian sebagai berikut:	**Jumlah**
1. Konsultan AMDK CV Jasa Insani	33.025.000,00
2. Pelaksanaan Layanan Jasa Teknis Pelatihan, Konsultasi dan Sertifikasi Produk Air Mineral Dalam Kemasan SPK No: 11/SPK/PERUMDAM-AG/XII-2024	20.703.690,00
3. Makan Pembersihan Sumber Tabek Barawak Bulan November 2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit Sungai Pua Bulan Desember 25	150.000,00
4. Pembelian 57 Helai Rompi Dinas Parasut Dengan Surat Pesanan No: 21/ROMPI DINAS/PERUMDAM-AG/XI-2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	7.196.500,00
5. Pembelian 2 Unit Panel Listrik Pump Dosing,1 Unit Panel Listrik MDP Dengan Surat Pesanan No:26/PANEL&KABELSIGUHUNG/PERUMDAM-AG/XII-	

Dipindai dengan CamScanner

2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	2.500,00
6. Pembelian 1 Fiting Lampu Depan, 2 Bola Lampu Depan, Ganti Oli dan Service Kendaraan Dinas BA 2137 TQ PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	155.000,00
7. Piket Siang Hari Libur IPA Siguhung PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	1.200.000,00
8. Piket Malam IPA Siguhung PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	1.600.000,00
9. Kas Kecil No: 13/VKK/PERUMDAM-AG/U.IV.A/XII-2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit IV Angkek Bulan Desember 2025	142.000,00
10. Upah Pekerja Harian Perbaikan Pipa Dinas & Trandist Tgl 29 sd 31 Desember 2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	1.380.000,00
111. Piket Siang Hari Libur Kantor PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	1.200.000,00
12. Piket Siang Trandist PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit Tiku Bulan Desember 2025	600.000,00
13. Piket Malam Kantor PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	1.000.000,00
14. SPPD Dalam Provinsi PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	325.000,00
15. Piket Siang Trandist PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit Batu Kambing Bulan Desember 2025	600.000,00
16. Reward 5% Tagihan Tunggakan Hublang PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit Batu Kambing Bulan Desember 2025	484.910,00
17. Upah Harian Bagian Adm Keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	1.890.000,00
18. Upah Harian Bagian Adm Keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	1.890.000,00
19. Pembayaran Tagihan Pemakaian Kartu Halo PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	6.721.754,00
20. Reward 5% Tagihan Tunggakan Hublang PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	1.789.086,00
21. Upah Penggantian Water Meter Sebanyak 36 Sambugan @Rp15000 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit Sungai Pua Bulan Desember 2025	540.000,00
22. Upah Penggantian Water Meter Sebanyak 11 Sambungan @Rp15000 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit IV Angkek Bulan Desember 2025	165.000,00
23. Upah Penggantian Water Meter Sebanyak 9 Sambungan @Rp15000 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit Baso Bulan Desember 2025	135.000,00
Jumlah	**82.895.440,00**

Dipindai dengan CamScanner

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
10. HUTANG PAJAK	**526.533.932,94**	**45.957.549,00**
Dengan rincian sebagai berikut:	**Jumlah**	
1. Pembayaran SP2DK Nomor S-560/P2DK/KPP.2703/2025 dan Berita Acara Nomor BA-178/KPP.2703/2025 (Pajak)	133.103.104,00	
2. Makan Pembersihan Sumber Tabek Barawak Bulan November 2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit Sungai Pua Bulan Desember 25	15.000,00	
3. OP No: 39/PIPA&ACC/P/PERUMDAM-AG/XII-2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	12.963.500,00	
4. Pembelian 57 Helai Rompi Dinas Parasut Dengan Surat Pesanan No: 21/ROMPI DINAS/PERUMDAM-AG/XI-2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	790.900,00	
5. Pembelian 2 Unit Panel Listrik Pump Dosing,1 Unit Panel Listrik MDP Dengan Surat Pesanan No:26/PANEL&KABELSIGUHUNG/PERUMDAM-AG/XII-2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2025	11.908.380,00	
6. Kas Kecil No: 13/VKK/PERUMDAM-AG/U.IV.A/XII-2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit IV Angkek Bulan Desember 2025	7.200,00	
7. Pajak badan tahun 2025	367.745.848,94	
Jumlah	**526.533.932,94**	

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
11. IMBALAN PASCA KERJA	-	-
Jumlah tersebut merupakan kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2025		
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	-	-
Jumlah	-	-

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
12. MODAL PENYERTAAN DAN HIBAH	**49.227.294.439,15**	**49.227.294.439,15**
Jumlah tersebut merupakan modal penyertaan dan hibah sampai dengan 31 Desember 2025, terdiri dari:		
- Penyertaan Modal Pemda	49.227.294.439,15	47.354.385.675,15
- Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan Statusnya	-	-
- Hibah	-	1.872.908.764,00
Jumlah	**49.227.294.439,15**	**49.227.294.439,15**

Dipindai dengan CamScanner

Penyertaan Modal Pemda Tahun 2025 terdiri dari:	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
1. Penyertaan berupa kas dan bantuan proyek:	2.765.178.281,00	
- Rp. 1.778.840.164.96 modal dasar tahun 1991		
- Rp. 146.524.233.50 modal lancar tahu 1991		
- Rp. 371.458.882.47		
- Rp. 111.275.000.00 SPM BPDI-02/SKOMP/PAB.PI P-AG/II/98		
- Rp. 120.080.000.00 BA No. 01.DA/AG.1999 Tanggal 21 April 1999		
- Rp. 212.000.000.00 Bantuan Penyertaan Modal TK. II 2002		
- Rp. 25.000.000.00 Biaya Operasional Unit Matur Tahun 2002		
2. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016, Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah Kepada PDAM Kabupaten Agam, BAB I Pasal 3 (1): Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah pada PDAM adalah sebesar Rp. 22.724.529.000.00	22.724.529.000,00	
3. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum, Peningkatan Pipa Distribusi PDAM Nagari Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Nomor: 600/83/Aset/DPUTR-AG/2020 Tanggal 31 Januari 2020 dan Nomor: 690/05-B/PDAM-AG/I-2020 Tanggal 31 januari 2020	4.994.891.000,00	
4. STPS/SATKER/PKPAM-SB/I-2010 tanggal 18 Januari 2010	3.256.394.900,00	
5. Ditetapkan Tahun Buku 2020 sebesar Rp. 1.793.000.000 merupakan penambahan aktiva tetap yang berasal dari Proyek Pengembangan Jaringan Perpipaan Lubuk Basung sesuai SPK No. 3.1.07.5/Add-2/SP/DPUTR-AG/2020, Tanggal 23 November 2020	1.793.000.000,00	
6. Berita Acara Mutasi Barang Nomor: 0002.3.2/133/DPUTR-AG/2023 terdiri dari:		
a Pengembangan jaringan perpipaan Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung	105.883.117,32	
b Pengembangan jaringan distribusi dan sabumbungan rumah (SR) Nagari Garagahan Kec. Lubuk Basung	1.616.000.000,00	
c Perbaikan Intake PDAM Arikia dan Silasuang Jorong Lubuak Sao Nagari Tanj. Sani Kec. Tanjung Raya	177.916.163,83	
c Air besih Tengkong-Tengkong kec. Lubuk Basung	199.800.000,00	
d Pengembangan SPAM di Kws Nelayan Kab. Agam (PAMS.AM-23)	493.135.199,00	
e Bantuan program PDAM Kab. Agam (PAMS-AM-8)	2.691.834.567,00	
f Optimalisasi Spam IKK untuk MBR, IKK Lubuk Basung Kab. Agam (PMKPAM.SKPA.SB-37)	925.899.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

		DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
7	Jumlah tersebut merupakan akumulasi biaya pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih di Kabupaten Dati II Agam oleh proyek peningkatan Sarana Air Bersih Propinsi Sumatera Barat 1 April 1990 s/d 31 Desember 1998 dan 31 Desember 1997.	2.126.343.122,00	
8	Penyertaan Modal Pemerintah TK. I melalui Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Tahun 1998.	244.273.000,00	
	Berita acara Serah Terima Sementara Aset Gedung No: 01/CK/DPUTR-AG/2024 terdiri dari:	3.239.308.325,00	
	1 Rehab gedung pengolahan AMDK (gedung)		
	2 Rehab gedung pengolahan AMDK (Mesin)		
	3 Pengawasan rehab gedung pengolahan AMDK		
	4 Belanja penambahan daya listrik rehab gedung pengolahan AMDK		
9	Hibah	1.872.906.908,00	
	Total Penyertaan Modal Pemerintah	**49.227.292.583,15**	

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
13. SALDO LABA/(RUGI)	**(17.554.286.822,92)**	**(19.235.474.513,37)**
Jumlah tersebut merupakan saldo laba/(Rugi) per 31 Desember 2025, dengan rincian:		
Laba / (Rugi) Ditahan	(19.235.474.513,37)	(19.322.308.896,03)
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	1.681.187.690,45	86.834.382,66
Jumlah	**(17.554.286.822,92)**	**(19.235.474.513,37)**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
14. PENDAPATAN PENJUALAN AIR		
Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan 31 Desember 2025	**14.509.883.098,00**	**13.868.822.615,00**
Rincian lebih lanjut atas rekening penjualan air		
Harga Air	11.241.568.500,00	11.310.616.673,00
Administrasi dan Dana Meter	1.518.488.000,00	1.494.296.000,00
Mobil Tanki	5.280.000,00	1.385.000,00
Jumlah	**12.765.336.500,00**	**12.806.297.673,00**
Penjualan Non Air	1.744.546.598,00	1.062.524.942,00
Total Penjualan Air	**14.509.883.098,00**	**13.868.822.615,00**

Dipindai dengan CamScanner

A. Rincian per Kelompok Pelanggan:

- Industri	6.823.800,00	6.958.050,00
- Instansi Pemerintah	584.646.950,00	730.451.700,00
- Niaga Besar	51.594.450,00	57.012.950,00
- Niaga Kecil	1.649.234.450,00	1.617.950.650,00
- Rumah Tangga Menengah	1.764.611.550,00	2.047.702.650,00
- Rumah Tangga Mewah	8.404.738.200,00	8.051.677.373,00
- Sosial Khusus	279.806.100,00	277.614.600,00
- Sosial Umum	18.601.000,00	15.544.700,00
- Air Tanki	5.280.000,00	1.385.000,00
Jumlah	**12.765.336.500,00**	**12.806.297.673,00**
Penjualan Air Lainnya	1.744.546.598,00	1.062.524.942,00
Total	**14.509.883.098,00**	**13.868.822.615,00**

B. Rincian per Unit Kerja

- Lubuk Basung	8.763.831.100,00	8.875.444.273,00
- Tiku	278.163.250,00	264.133.350,00
- Batu Kambing	801.168.350,00	812.280.100,00
- Maninjau	1.201.187.750,00	1.221.056.750,00
- Matur	379.839.100,00	380.238.900,00
- IV. Koto	140.002.250,00	129.247.400,00
- IV. A Candung	341.568.500,00	344.450.800,00
- Baso	552.898.500,00	492.676.050,00
- Sungai Puar	301.397.700,00	285.385.050,00
- Air Tanki	5.280.000,00	1.385.000,00
Jumlah	**12.765.336.500,00**	**12.806.297.673,00**
Penjualan Air Lainnya	1.744.546.598	1.062.524.942
Total	**14.509.883.098,00**	**13.868.822.615,00**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
15. PENDAPATAN PENJUALAN NON AIR	**1.744.546.598,00**	**1.062.524.942,00**
- Penjualan Non Air Lainnya - Non Tanki Mobil Air	489.000,00	1.055.000,00
- Pendapatan Balik Nama	2.400.000,00	3.000.000,00
- Pendaftaran Sambungan Baru	3.200.000,00	3.430.000,00
- Pemasangan Sambungan Baru	846.993.850,00	579.619.980,00
- Penyambungan Kembali	29.682.700,00	26.016.300,00
- Pendapatan Penggantian Water Meter	3.665.878,00	510.700,00
- Pindah Alamat	1.200.000,00	2.000.000,00
- Pendapatan Denda	460.371.400,00	400.531.050,00
- Pendapatan Non Air Lainnya	396.543.770,00	46.361.912,00
Jumlah	**1.744.546.598,00**	**1.062.524.942,00**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024

Dipindai dengan CamScanner

16. BEBAN OPERASIONAL	**12.657.861.009,45**	**14.397.939.548,85**

Jumlah tersebut merupakan beban operasional per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
- Beban Pegawai	5.344.351.587,00	8.181.631.606
- Beban Retribusi Air Baku	6.146.039,00	7.058.917
- Beban Bahan Bakar	69.077.000,00	93.902.800
- Beban Listrik	594.941.183,00	495.814.481
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	150.516.000,00	200.217.000
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu	479.000,00	130.000
- Beban Pemakaian Bahan Instalasi	29.826.400,00	16.218.900
- Beban Pemeliharaan	1.319.043.921,70	753.901.715
- Beban Kantor	294.152.379,00	250.271.607
- Beban Hubungan Langganan	165.957.900,00	195.080.915
- Beban Penelitian dan Pengembangan	149.040.543,00	8.392.000
- Beban Keuangan	561.431.523,00	274.126.460
- Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	-	-
- Beban Operasi Lainnya	443.690.632,00	376.403.188
- Beban Administrasi dan Umum Lainnya	739.094.410,07	682.389.508
- Beban Pengembangan AMDK	41.965.936,00	203.134.563
Jumlah	**9.909.714.453,77**	**11.738.673.659,85**
- Beban Penyusutan Akt tetap	2.748.146.555,68	2.659.265.890,00
Jumlah Seluruhnya	**12.657.861.009,45**	**14.397.939.549,85**

•) **Rincian Beban Pegawai**

Gaji Karyawan Sumber	-	-
Gaji Karyawan Pengolahan	131.886.518,00	47.089.442,00
Gaji Karyawan Trandis	1.077.577.728,00	1.385.036.756,00
Gaji Karyawan Administrasi dan Umum	4.134.887.341,00	6.749.505.408,00
Jumlah	**5.344.351.587,00**	**8.181.631.606,00**

Catatan:

Beban gaji pegawai adm dan umum terdiri dari:

a Beban gaji	
Sumber	-
Pengolahan	131.886.518,00
Trandis	1.077.577.728,00
Administrasi dan Umum	2.138.905.032,00
b Beban iuran pensiun	1.570.331.437,00
c Beban lembur	1.860.000,00
d Beban pakaian dinas	38.845.500,00
e Beban bantuan dan sumbangan	9.100.000,00
f Beban pendidikan dan pelatihan	92.509.300,00
g Beban rupa-rupa lainnya	283.336.072,00
Total	**5.344.351.587,00**

•) **Rincian Beban Air Baku**

Beban Retribusi Air Baku Sumber	6.146.039,00	7.058.917,00
Jumlah	**6.146.039,00**	**7.058.917,00**

Dipindai dengan CamScanner

•) **Rincian Beban Bahan Bakar**		
Beban Bahan Bakar Sumber	15.548.000,00	9.143.000,00
Beban Bahan Bakar Pengolahan	4.715.000,00	3.588.500,00
Beban Bahan Bakar Transmisi dan Distribusi	48.814.000,00	81.171.300,00
Beban Bahan Bakar	-	-
Jumlah	**69.077.000,00**	**93.902.800,00**
•) **Rincian Beban Listrik**		
Beban Listrik Sumber	594.941.183,00	495.814.481,00
Beban Listrik Transmisi dan Distribusi	-	-
Jumlah	**594.941.183,00**	**495.814.481,00**
•) **Rincian Beban Bahan Kimia**		
Beban Bahan Kimia Pengolahan	150.516.000,00	200.217.000,00
Jumlah	**150.516.000,00**	**200.217.000,00**
•) **Rincian Beban Bahan Pembantu**		
Beban Bahan Pembantu Sumber	479.000	-
Beban Bahan Pembantu Pengolahan	-	130.000,00
Jumlah	**479.000**	**130.000**
•) **Rincian Beban Bahan Instalasi**		
Beban Bahan Instalasi Transmisi dan Distribusi	29.826.400,00	16.218.900,00
Beban Bahan Instalasi	-	-
Jumlah	**29.826.400,00**	**16.218.900,00**
•) **Rincian Beban Pemeliharaan**		
Pemeliharaan Sumber Air	349.960.860,50	243.158.315,00
Pemeliharaan Pengolahan Air	40.888.525,00	2.154.030,00
Pemeliharan Transmisi Distribusi	752.022.569,20	374.403.662,00
Pemeliharaan Umum Administrasi	176.171.967,00	134.185.708,00
Jumlah	**1.319.043.921,70**	**753.901.715,00**
•) **Rincian Beban Kantor**		
Beban Kantor	294.152.379,00	250.271.607,00
Jumlah	**294.152.379,00**	**250.271.607,00**
•) **Rincian Hubungan Langganan**		
Beban Hubungan Langganan	165.957.900,00	195.080.915,00
Jumlah	**165.957.900,00**	**195.080.915,00**
•) **Rincian Beban Penelitian dan Pengembangan**		
Beban Penelitian dan Pengembangan	149.040.543,00	203.134.563,00
Jumlah	**149.040.543,00**	**203.134.563,00**
•) **Rincian Beban Keuangan**		
Beban Keuangan	561.431.523,00	274.126.459,70
Jumlah	**561.431.523,00**	**274.126.459,70**

Dipindai dengan CamScanner

•) **Rincian Beban Penyisihan Piutang**		
Beban Beban Penyisihan Piutang	-	-
Jumlah	-	-
•) **Rincian Beban Operasional Lainnya**		
Beban Operasional Lainnya Sumber	174.461.712	124.869.687
Beban Operasional Lainnya Pengolahan	3.082.500	12.179.000
Beban Operasional Lainnya Transmisi dan Distribusi	266.146.420,00	239.354.500,00
Beban Operasional Lainnya	-	-
Jumlah	**443.690.632,00**	**376.403.187,00**
•) **Rincian Beban Administrasi dan Umum Lainnya**		
Administrasi dan Umum Lainnya	739.094.410,07	682.389.508
Jumlah	**739.094.410,07**	**682.389.508,34**
•) **Rincian Beban AMDK**		
Beban Pengembangan AMDK	41.965.936,00	203.134.563
Jumlah	**41.965.936,00**	**203.134.563,00**
•) **Rincian Beban Penyusutan**		
- Beban Penyusutan Instalasi Sumber	18.900.031,10	18.900.031,10
- Beban Penyusutan Instalasi Pompa	43.228.609,67	50.448.172,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan	229.888.038,00	229.351.350,00
- Beban Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi	1.926.731.457,54	1.848.847.896,00
Beban Penyusutan Umum	75.862,50	-
- Beban Penyusutan Kendaraan	39.016.698,75	35.898.991,00
- Beban Penyusutan Peralatan & Perlengkapan	17.019.687,50	12.458.438
- Beban Penyusutan Inventaris Kantor	68.372.630,00	58.447.016,00
- Beban Penyusutan AMDK	404.913.540,63	404.913.541,00
Jumlah	**2.748.146.555,68**	**2.659.265.435,10**

	DESEMBER 2025	DESEMBER 2024
17. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	**197.053.950,84**	**661.193.922,51**
Jumlah tersebut merupakan beban non operasional Per 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut:		
- **Pendapatan Non Operasional**		
- Pendapatan Jasa Giro	197.053.950,84	149.022.639,26
- Penyesuaian Persediaan Bahan Instalasi	-	-
- Penyesuaian Persediaan Bahan Kimia	-	-
- Pendapatan Non Operasional Lainnya	-	512.171.283,25
Jumlah	**197.053.950,84**	**661.193.922,51**
- **Beban Non Operasional**		
- Beban Penyesuaian Kas	-	-
- Beban Penyesuaian Tanki Air	-	-
Jumlah	-	-
Jumlah seluruhnya	**197.053.950,84**	**661.193.922,51**

Dipindai dengan CamScanner

PENGUNGKAPAN LAINNYA

18. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Agam yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2024.

b. Bidang Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2024 Perumda Air Minum Tirta Antokan bergerak di bidang usaha penyelenggara SPAM di daerah meliputi SPAM jaringan perpipaan dan / atau SPAM bukan jaringan perpipaan dan dapat membentuk usaha lainnya.

c. Modal Dasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2024 , modal Perumda Air Minum Tirta Antokan terdiri dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

d. Susunan Pengurus

Keputusan Bupati Agam Nomor 140 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Antokan Masa Jabatan Tahun 2025 Sampai Dengan 2030.

- Direktur	: Jevie. C. Eka Putra, ST. MT
- Plt. Kepala Bagian Teknik	: Destaman, S.AP
- Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	: Oktafiandry. P, SE
- Kepala Bagian Hubungan & Langganan	: Destaman, S.AP

Keputusan Bupati Agam Nomor 357 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Antokan Masa Jabatan 2025-2029.

- Dewan Pengawas	: Satria, S.Sos., M.Si

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2025 sebagaimana berikut dibawah ini:

- Direktur	:	1
- Pegawai Tetap	:	36
- Pegawai Tidak Tetap	:	3
- THL	:	18
Jumlah		58

e. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

f. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perumda Air Minum Kabupaten Agam bertanggung jawab atas laporan keuangan yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal 6 Maret 2026.

Dipindai dengan CamScanner

PT. BANK NAGARI

Bank Nagari

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Financial Audited Statements

for the year ended December 31, 2025

PT. Bank Nagari

	Halaman/ *Pages*	
Daftar Isi		***Table of Contents***
Surat Pernyataan Direksi		***Director's Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***
Laporan Keuangan		***Financial Statements***
Laporan Posisi Keuangan	1 - 3	*Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	4	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	5	*Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	6 - 7	*Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan	8 - 199	*Notes to the Financial Statement*

***

Bank Nagari

bpd bersama membangun indonesia

PT BANK NAGARI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2025 DAN 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

No. DIR/ .047

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1 Nama : GUSTI CANDRA
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No 21 Padang
Alamat Domisili : Komplek Mutiara Bingkuang Blok A. No. 2, RT/RW 001/004 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Padang
Telepon : (0751) 31577
Jabatan : Direktur Utama

2 Nama : RONI EDRIAN
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No 21 Padang
Alamat Domisili : Aur Duri Indah 1 No. 35, RT/RW 003/003 Kelurahan Parak Gadang Timur, Padang
Telepon : (0751) 31577
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan Bahwa :

1. Kami Bertanggung Jawab Atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan PT Bank Nagari;
2. Laporan Keuangan PT Bank Nagari telah disusun dan Disajikan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Nagari telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Bank Nagari tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Nagari.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT BANK NAGARI

DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENT AS OF
DECEMBER 31, 2025 AND 2024 AND FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024

No. DIR/ .047

We, the undersigned:

1 Name : GUSTI CANDRA
Office Address : Jl. Pemuda No 21 Padang
Residential Address : Komplek Mutiara Bingkuang Blok A. No. 2, RT/RW 001/004 Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Padang
Telephone : (0751) 31577
Title : President Director

2 Name : RONI EDRIAN
Office Address : Jl. Pemuda No 21 Padang
Residential Address : Aur Duri Indah 1 No. 35, RT/RW 003/003 Kelurahan Parak Gadang Timur, Padang
Telephone : (0751) 31577
Title : Director of Finance

Declare that :

1. *We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Bank Nagari;*
2. *The financial statements of PT Bank Nagari have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the financial statements of PT Bank Nagari have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The financial statements of PT Bank Nagari do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. *We are responsible for PT Bank Nagari internal control system.*

This statement has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/ *For and on behalf of the Board of Directors*

Padang, 20 FEB 2026

METERAI TEMPEL 10000 6CB4AANX270526001

Bank Nagari DIREKSI

GUSTI CANDRA
Direktur Utama
/President Director

RONI EDRIAN
Direktur Keuangan
/Director of Finance

PT. Bank Nagari
Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117
Sumatera Barat
INDONESIA
Tel. (0751) 31577 (4 Saluran), 31578, 31581, 31582, 34115
Fax. (0751) 37749, 31491
Kotak Pos 111
website : www.banknagari.co.id

PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/KM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

Laporan Auditor Independen

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT Bank Nagari

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Nagari ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026

To the Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Bank Nagari

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Nagari (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN & REKAN is a member of PKF Global, the network of member firms of PKF International Limited, each of which is a separate and independent legal entity and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm(s).

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (continued)

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditors' Report (continued)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (continued)

Other information (continued)

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Independent Auditors' Report (continued)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

Independent Auditors' Report (continued)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Bank.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditors' Report (continued)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditors' Report (continued)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditors' Report (continued)

No.: 00167/2.1133/AU.1/07/1192-2/1/II/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

00167

Gideon, CPA
Registrasi Akuntan Publik/*Public Accountant Registration* No.AP.1192

20 Februari 2026 / *February 20, 2026*

PT BANK NAGARI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2025
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2025
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ASET				***ASSETS***
Kas	2.c, 2.e, 2.g, 4	557.484.179.498	523.298.458.711	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.c, 2.e, 2.h, 5	585.097.252.020	853.044.633.798	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	2.e, 2.c, 2.h, 6			*Current accounts with other banks*
Pihak ketiga		8.541.575.589	14.352.928.693	*Third parties*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.222.586)	(2.155.067)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah giro pada bank lain		8.539.353.003	14.350.773.626	*Total current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pihak ketiga	2.e, 2.i, 7	1.446.583.452.624	874.927.154.594	*Placement with Bank Indonesia and other banks third parties*
Efek - efek untuk tujuan investasi	2.e, 2.j, 8	1.981.455.465.117	4.003.649.364.308	*Marketable securities for investment purposes*
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pihak ketiga	2.e, 2.k, 9	3.106.207.303.473	575.748.691.871	*Marketable securities purchased Under agreement to resell Third parties*
Pinjaman yang diberikan	2.e, 2.l, 2.d, 10			*Loans*
Pihak berelasi		39.357.846.062	29.147.121.076	*Related parties*
Pihak ketiga		25.230.209.388.501	25.521.676.467.114	*Third parties*
Jumlah pinjaman yang diberikan		25.269.567.234.563	25.550.823.588.190	*Total loans*
Dikurangi:				*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai		(539.507.650.751)	(509.853.185.186)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah pinjaman yang diberikan		24.730.059.583.812	25.040.970.403.004	*Total loans*
Penyertaan saham	2.e, 2.m, 11	2.720.090.450	2.641.053.571	*Investment in shares*
Aset tetap	2.o, 12	616.589.533.747	610.361.074.163	*Fixed assets*
Dikurangi: akumulasi penyusutan		(221.627.006.424)	(197.840.855.351)	*Less: accumulated depreciation*
Jumlah aset tetap		394.962.527.323	412.520.218.812	*Total fixed assets*
Aset takberwujud	13	22.697.033.804	22.374.733.804	*Intangible assets*
Dikurangi: akumulasi penyusutan		(21.633.229.697)	(21.125.372.064)	*Less: accumulated depreciation*
Jumlah aset takberwujud		1.063.804.107	1.249.361.740	*Total intangible assets*
Aset hak guna	2.o, 14	106.081.483.760	106.354.137.677	*Right-of-use of assets*
Aset pajak tangguhan	2.y, 36.c	228.597.878.178	230.986.012.373	*Deffered tax assets*
Aset lain-lain	2.n, 2.q, 15	339.227.450.282	318.074.641.200	*Other assets*
JUMLAH ASET		**33.488.079.823.647**	**32.957.814.905.285**	***TOTAL ASSETS***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	2.r, 16	363.574.535.090	335.473.578.554	*Obligations due immediately*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
Giro - giro wadiah				*Current accounts - wadhia*
Pihak berelasi	2.d, 2.s, 17, 40	1.107.186.442.258	444.984.391.075	*Related parties*
Pihak ketiga		1.409.132.187.790	1.327.979.770.444	*Third parties*
Jumlah giro - giro wadiah		2.516.318.630.048	1.772.964.161.519	*Total current accounts - wadhia*
Tabungan - tabungan wadiah				*Savings - wadhia*
Pihak berelasi	2.d, 2.s, 17, 40	3.167.676.753	14.256.945.893	*Related parties*
Pihak ketiga		7.291.955.277.228	7.222.640.212.529	*Third parties*
Jumlah tabungan - tabungan wadiah		7.295.122.953.981	7.236.897.158.422	*Total savings - wadhia*
Deposito berjangka				*Time deposits*
Pihak berelasi	2.d, 2.s, 17, 40	5.608.000.000	5.403.000.000	*Related parties*
Pihak ketiga		12.454.383.867.526	13.123.427.010.618	*Third parties*
Jumlah deposito berjangka		12.459.991.867.526	13.128.830.010.618	*Total time deposits*
		22.271.433.451.555	22.138.691.330.559	
Simpanan dari bank lain	2.d, 2.t, 18	180.299.767.147	159.134.213.861	*Deposits from other banks*
Utang pajak	2.y, 36.a	33.273.512.642	32.493.973.476	*Taxes payable*
Liabilitas sewa	20	99.038.635.175	95.995.669.205	*Lease liabilities*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	21	914.873.484	1.104.728.386	*Allowance for possible on Commitments and contingencies*
Pinjaman yang diterima	2.u, 19	908.542.001.150	780.653.379.943	*Borrowings*
Imbalan kerja	2.x, 39	390.080.708.718	308.681.229.231	*Employee benefits*
Liabilitas lain-lain	2.p, 22	334.131.244.568	356.082.736.072	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**24.581.288.729.529**	**24.208.310.839.287**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank	23.a			*Non banks*
Pihak berelasi		345.946.284.104	584.620.863.812	*Related parties*
Pihak ketiga		4.221.735.773.791	3.960.048.506.048	*Third parties*
		4.567.682.057.895	4.544.669.369.860	
Bank	23.b	33.942.347.986	26.460.022.316	*Banks*
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		**4.601.624.405.881**	**4.571.129.392.176**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar Seri A: 3.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham dan Seri B: 20.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100.000 per saham pada tahun 2025 dan 2024				*Authorized capital Series A: 3,000,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share and Series B: 20,000,000 shares with a par value of Rp100,000 per share in 2025 and 2024*
Modal ditempatkan dan disetor 1.921.371 dan 1.904.573 pada tahun 2025 dan 2024	2.z, 24	1.921.371.000.000	1.904.573.000.000	*Issued and paid up capital 1,921,371 and 1,904,573 in 2025 and 2024*
Tambahan modal disetor	24	8.913.038.842	4.884.038.842	*Additional paid-in capital*
Keuntungan atas liabilitas Imbalan pasca kerja - bersih	2.x, 39	13.504.019.915	15.683.528.443	*Gain on employee benefits*
Surplus revaluasi aset tetap	25	168.230.047.842	170.853.322.254	*Fixed assets revaluation surplus*
Saldo laba yang ditentukan penggunaannya	26	1.692.622.549.642	1.531.201.865.502	*Appropriated retained earnings*
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaanya		500.526.031.996	551.178.918.781	*Unappropriated retained earnings*
JUMLAH EKUITAS		**4.305.166.688.237**	**4.178.374.673.822**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**33.488.079.823.647**	**32.957.814.905.285**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK NAGARI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the year ended December 31, 2025
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	2.v, 27	2.991.416.558.037	2.982.746.754.160	*Interest income and sharia income*
Beban bunga dan beban syariah	2.v, 29	(1.181.232.342.653)	(1.206.006.378.278)	*Interest expense and sharia expense*
Jumlah pendapatan bunga dan pendapatan syariah - bersih		**1.810.184.215.384**	**1.776.740.375.882**	***Total interest income and sharia income - net***
Pendapatan operasional lainnya	2.w, 28	**213.033.445.988**	**221.218.588.387**	***Other operating income***
Beban operasional lainnya				***Other operating expenses***
Tenaga kerja	30	(832.877.879.500)	(852.036.824.221)	*Employee*
Umum dan administrasi	31	(442.612.448.685)	(444.112.182.844)	*General and administrative*
Pembentukan:				*allowance for:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	32	(216.642.159.017)	(75.468.340.043)	*Impairment losses*
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	2.ac, 33	189.854.902	205.726.146	*Commitment and contingencies*
Jumlah beban operasional lainnya		**(1.491.942.632.300)**	**(1.371.411.620.962)**	***Total other operating expenses***
LABA OPERASIONAL		**531.275.029.072**	**626.547.343.307**	***OPERATING INCOME***
Pendapatan (beban) bukan operasional				***Non-operating income (expenses)***
Pendapatan non operasional	34	100.305.051.078	79.406.626.560	*Non-operating income*
Beban non operasional	35	(3.515.848.724)	(1.431.227.741)	*Non-operating expenses*
Jumlah pendapatan bukan operasional - bersih		**96.789.202.354**	**77.975.398.819**	***Total non-operating Income - net***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		**628.064.231.426**	**704.522.742.126**	***INCOME BEFORE TAX EXPENSE***
Penghasilan (beban) pajak				***Income (expense) tax***
Pajak kini	2.y, 36.b	(140.268.578.120)	(152.520.121.600)	*Current tax expense*
Manfaat (beban) pajak tangguhan	2.y, 36.d	(3.002.867.370)	(13.933.673.393)	*Deffered tax income (expense)*
Total beban pajak		**(143.271.445.490)**	**(166.453.794.993)**	***Total income tax expenses***
LABA TAHUN BERJALAN		**484.792.785.936**	**538.068.947.133**	***INCOME FOR THE YEAR***
Penghasilan komprehensif lain				***Other comprehensive income***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit loss***
Kerugian aktuarial atas program imbalan kerja		(2.794.241.703)	(4.143.184.886)	*Actuarial gain (losses) for employee benefit*
Pajak penghasilan terkait		614.733.175	911.500.676	*Related income tax*
Jumlah penghasilan komprehensif lain - bersih setelah pajak		**(2.179.508.528)**	**(3.231.684.210)**	***Total other comprehensive income - net tax***
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**482.613.277.408**	**534.837.262.923**	***COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	**25, 37**	254.308	287.895	***EARNING PER SHARES***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

PT BANK NAGARI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
December 31, 2025
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset/ *Aset revaluation reserve*	Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti setelah dikurangi pajak tangguhan/ *Actuarial gains (losses) on defined benefit plans after deducting deferred tax*	Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*		Tidak ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
						Cadangan umum dan bertujuan khusus/ *General and aim reserve*				
Saldo 31 Desember 2023		**1.849.067.000.000**	**10.884.038.842**	**173.476.596.666**	**18.915.212.653**	**1.374.071.325.154**		**534.255.165.063**	**3.960.669.338.379**	***Balance as of December 31, 2023***
Setoran modal	2.aa, 24	49.506.000.000	-	-	-	-		-	49.506.000.000	*Paid-in capital*
Reklasifikasi setoran modal		6.000.000.000	(6.000.000.000)	-	-	-		-	-	*Reclasification paid-in capital*
Pembagian laba tahun 2023:										*Distribution of 2023 net income:*
Dividen	2.ab	-	-	-	-	-		(366.637.927.479)	(366.637.927.479)	*Dividend*
Cadangan	26	-	-	-	-	157.130.540.348		(157.130.540.348)	-	*Reserve*
Laba komprehensif periode berjalan	2.ac, 2.ae	-	-	-	(3.231.684.210)	-		538.068.947.133	534.837.262.923	*Comprehensive income for the period*
Surplus revaluasi dipindahkan ke saldo laba	25	-	-	(2.623.274.412)	-	-		2.623.274.412	-	*Revaluation surplus transferred to retained earnings*
Saldo 31 Desember 2024		**1.904.573.000.000**	**4.884.038.842**	**170.853.322.254**	**15.683.528.443**	**1.531.201.865.502**		**551.178.918.781**	**4.178.374.673.822**	***Balance as of December 31, 2024***
Setoran modal	2.aa, 24	-	20.827.000.000	-	-	-		-	20.827.000.000	*Paid-in capital*
Reklasifikasi setoran modal		16.798.000.000	(16.798.000.000)	-	-	-		-	-	*Reclasification paid-in capital*
Pembagian laba tahun 2024:										*Distribution of 2024 net income:*
Dividen	2.ab	-	-	-	-	-		(376.648.262.993)	(376.648.262.993)	*Dividend*
Cadangan	26	-	-	-	-	161.420.684.140		(161.420.684.140)	-	*Reserve*
Laba komprehensif periode berjalan	2.ac, 2.ae	-	-	-	(2.179.508.528)	-		484.792.785.936	482.613.277.408	*Comprehensive income for the period*
Surplus revaluasi dipindahkan ke saldo laba	25	-	-	(2.623.274.412)	-	-		2.623.274.412	-	*Revaluation surplus transferred to retained earnings*
Saldo 31 Desember 2025		**1.921.371.000.000**	**8.913.038.842**	**168.230.047.842**	**13.504.019.915**	**1.692.622.549.642**		**500.526.031.996**	**4.305.166.688.237**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITES***
OPERASI				
Pendapatan bunga, provisi dan komisi	27	2.911.168.153.247	2.925.673.135.835	*Interest Income, provision and commission*
Beban bunga dan beban pembayaran lainnya yang dibayar	29	(1.183.304.857.835)	(1.202.562.738.834)	*Interest expense and Other expense*
Pembayaran beban karyawan	30	(864.401.072.458)	(912.038.368.243)	*Employee expense*
Pembayaran beban umum dan administrasi	31	(372.455.048.731)	(382.797.473.002)	*General and administrative expense*
Pendapatan operasional lainnya	28	212.610.632.558	221.307.516.987	*Other operating revenues*
Pendapatan non-operasional lainnya	34, 35	96.799.737.784	78.054.426.655	*Non-operating revenue*
Pajak penghasilan	36	(131.757.352.324)	(165.322.268.644)	*Income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		668.660.192.241	562.314.230.754	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				*Changes in Operating assets and liabilties:*
Penurunan/ (kenaikan) aset operasi				*Decrease/ (increase) in operating assets*
Kredit yang diberikan	10	176.025.212.607	(1.627.832.975.043)	*Loans*
Aset hak guna	14	(41.236.746.844)	(112.877.193.516)	*Right-to-use assets*
Aset lain-lain	15	(27.540.521.737)	(76.142.738.635)	*Others assets*
Kenaikan/ (penurunan) aset operasi				*Increase/ (decrease) operating assets*
Liabilitas segera	16	28.100.956.536	(140.194.707.186)	*Obligations due immediately*
Simpanan dari nasabah	17	132.742.120.996	(245.269.095.532)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	18	21.165.553.286	(4.360.132.338)	*Deposits from other banks*
Liabilitas sewa	20	3.042.965.970	71.730.978.233	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	22	85.814.077.046	(864.481.164)	*Other liabilities*
Dana syirkah temporer	23	30.495.013.705	992.384.238.669	*Temporary syirkah funds*
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan operasi		**1.077.268.823.806**	**(581.111.875.758)**	***Net cash provided from (used for) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	9	(2.528.566.483.806)	(286.326.391.846)	*Effects purchased with the promise of resale*
Efek-efek untuk tujuan investasi	8	2.022.193.899.191	(1.458.659.760.775)	*Effects for investment purposes*
Pembelian aset tetap	12	(10.358.779.155)	(9.637.983.165)	*Purchase of fixed asset*
Pembelian aset takberwujud	13	(322.300.000)	(449.700.000)	*Purchase of intangible assets*
Arus kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi		**(517.053.663.770)**	**(1.755.073.835.786)**	***Net cash used for investing activities***

PT BANK NAGARI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2025
(Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK NAGARI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2025
(Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVTIES***
Kenaikan setoran modal	24	20.827.000.000	49.506.000.000	*Increase paid in capital*
Pembayaran dividen dan dana	26	(376.648.262.993)	(366.637.927.479)	*Payment for dividend and prosperity*
Kenaikan pinjaman yang diterima	20	127.888.621.207	220.444.261.192	*Increase in borrowings*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(227.932.641.786)**	**(96.687.666.287)**	***Net cash used for financing activites***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		332.282.518.250	(2.432.873.377.831)	***NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4	2.265.393.643.451	4.698.267.021.282	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**2.597.676.161.701**	**2.265.393.643.451**	***CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Cash and cash equivalents:*
Kas	4	557.484.179.498	523.298.458.711	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	5	585.097.252.020	853.044.633.798	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	6	8.541.575.589	14.352.928.693	*Current account with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7	1.446.553.154.594	874.697.622.249	*Placement with other banks and Bank Indonesia*
Jumlah		**2.597.676.161.701**	**2.265.393.643.451**	***Total***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements taken as a whole

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Bank Nagari ("Bank") didirikan dan memulai usaha komersial dengan akta No.9 tanggal 12 Maret 1962 yang dibuat dihadapan Hasan Qalby, wakil notaris di Padang dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 1973 tanggal 8 November 1973. Atas dasar Peraturan Daerah tersebut nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Perubahan bentuk badan hukum tersebut telah mendapat persetujuan oleh Gubernur Bank Indonesia No.9/36/KEP.GBI/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pengalihan Izin Usaha Bank karena Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/601KEP/DIR tanggal 7 Januari 1991, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat disetujui untuk beroperasi sebagai Bank Devisa. Status sebagai bank devisa tersebut terhitung sejak tanggal 29 September 2000 dicabut berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.2/7/KEP.DGS/2000 tanggal 29 September 2000 tentang Pencabutan Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai Bank Devisa. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.9/20/KEP.DpG/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Bank disetujui untuk beroperasi sebagai Bank Devisa.

Tugas pokok Bank adalah membantu mendorong pembangunan daerah di segala bidang dan menambah sumber pendapatan daerah serta menunjang pengembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan mempertinggi taraf hidup rakyat.

Kegiatan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat meliputi kegiatan penghimpunan dana, perkreditan, pemegang kas daerah dan pembinaan LPN (Lumbung Pitih Nagari).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Bank Nagari the "Bank" was established and started a commercial business with deed No.9 dated March 12, 1962 drawn up before Hasan Qalby, deputy notary in Padang under the name PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. The Level I Regional Government of West Sumatera issued Regional Regulation No.4 of 1973 dated November 8, 1973. On the basis of this Regional Regulation, the name PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat became a Regional Company (PD) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

The change in the form of the legal entity has been approved by the Governor of Bank Indonesia No.9/36/KEP.GBI/2007 dated July 31, 2007 concerning the Transfer of Bank Business License due to the Change of Legal Entity Form of Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat to PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat called Bank Nagari.

Based on Bank Indonesia Decree No.23/601KEP/DIR dated January 7, 1991, the Regional Development Bank of West Sumatera was approved to operate as a Foreign Exchange Bank. The status as a foreign exchange bank was revoked as of September 29, 2000 based on the Decree of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia No.2/7/KEP.DGS/2000 dated September 29, 2000 concerning the Revocation of the Appointment of the Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat as a Foreign Exchange Bank. Subsequently, based on the Decree of the Deputy Governor of Bank Indonesia No.9/20/KEP.DpG/2007 dated October 11, 2007 the Bank was approved to operate as a Foreign Exchange Bank.

The main task of the Bank is to help encourage regional development in all fields and increase regional income sources as well as support the development of the business world and economic growth with the aim of improving people's living standards.

The activities of the Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat include fund raising, credit, regional treasury holders and LPN (Lumbung Pitih Nagari) development.

In accordance with the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to carry out general banking activities in accordance with applicable laws and regulations, including providing financing and/or carrying out other activities based on sharia principles.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Keputusan Rapat yang diaktakan dengan akta notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn., No.13 tanggal 21 Juli 2021, menjelaskan bahwa nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari diubah menjadi PT Bank Nagari. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.244 tanggal 22 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Andika, S.H., M.Kn., Notaris di Padang, telah mendapat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0257258 tanggal 23 Desember 2025.

Bank memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.9/50/DPbS/Pdg tanggal 26 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Meeting Resolution which was notarized by notarial deed Helsi Yasin, SH., M.Kn., No.13 dated July 21, 2021, explained that the name of the PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat called Bank Nagari was changed to PT Bank Nagari. The Bank's Articles of Association have been amended several times, most recently the Bank's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No.244 dated December 22, 2025 of Andika, S.H., M.Kn., Notary in Padang, and approved with Decree of Approval of Amendment to the Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.03-0257258 dated December 23, 2025.

The Bank commenced its sharia banking activities with the receipt of Bank Indonesia letter No.9/50/DPbS/Pdg dated April 26, 2007 concerning Principle Approval for the Opening of Bank Sharia Branch Offices in the Bank's commercial activities.

b. Jaringan kantor

Kantor pusat Bank berlokasi di Jl. Pemuda No.21, Padang, Sumatera Barat. Dikarenakan pada tahun 2009 Sumatera Barat mengalami bencana Gempa, maka Bank Nagari memiliki kantor Pusat II yang berlokasi di Jl. Pagambiran Ampalu Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat.

Unit Usaha Syariah berkantor Jl. Pemuda No.21, Padang, Sumatera Barat.

Bank memiliki kantor-kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional dan anjungan tunai mandiri (ATM). Kantor kas konvensional, *payment point*, mobil oto *banking*, mobil kas dan sepeda motor unit menjadi kantor fungsional sesuai POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang bank umum. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah jaringan kantor adalah sebagai berikut:

b. Office network

The Bank's head office is located on Jl. Pemuda No.21, Padang, West Sumatera. Due to the 2009 earthquake in West Sumatra, Bank Nagari has a Head Office II which is located on Jl. Pagambiran Ampalu Nan XX, Lubuk Begalung, Padang City, West Sumatera.

The Sharia Business Unit has an office at the Head Office on Jl. Pemuda No.21, Padang, West Sumatera.

The Bank has branch offices, additional branch offices, functional offices, and mandiri cash platforms (ATMs). Conventional cash office, payment point, oto banking car, cash car, and motorcycle unit become functional offices in accordance with POJK No.12/POJK.03/2021 concerning commercial banks. On December 31, 2025 and 2024, the number of the Bank' operational office are as follows:

	2025	**2024**	
Kantor cabang konvensional	29	29	*Conventional branch offices*
Kantor cabang pembantu konvensional	91	94	*Conventional sub branch offices*
Kantor fungsional	79	73	*Functional offices*
Kantor cabang syariah	5	5	*Sharia branch offices*
Kantor cabang pembantu syariah	10	8	*Sharia sub branch offices*
Layanan syariah	119	117	*Sharia services*
Mesin ATM dan CRM	328	328	*ATM machine and CRM*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Organisasi dan struktur manajemen

Keputusan Rapat yang diaktakan dengan akta notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn., No.15 tanggal 25 Juni 2024, menetapkan dan mengangkat Direksi Bank periode tahun 2024 - 2028. Sedangkan jabatan Direktur Kredit dan Syariah dirangkap sementara oleh Direktur Utama sampai ditetapkan dan diangkatnya pada Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Akta tersebut telah dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0224766 tanggal 11 Juli 2024.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.151 tanggal 21 Maret 2025, menetapkan dan mengangkat Saudara Hafid Dauli sebagai Direktur Kredit dan Syariah periode tahun 2024 - 2028. Akta tersebut telah dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0170134 tanggal 26 Maret 2025. Pengangkatan tersebut telah efektif disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.SR-93/KO.1531/2025 tanggal 7 Juli 2025.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Organization and management structure

The Meeting Resolution which was notarized by notarial deed Helsi Yasin, SH., M.Kn., No. 15 dated Juni 25, 2024, the Bank's Board of Directors for the period 2024 - 2028 has been appointed and designated. Meanwhile, the positions of Credit and Sharia Directors are temporarily held by the President Director until they are appointed and confirmed at the next General Meeting of Shareholders. The deed has been recorded in the administration system of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.09-0224766 dated July 11, 2024.

Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.151 dated March 21, 2025, Mr. Hafid Dauli as Director of Credit and Sharia for the period 2024 - 2028 has been appointed and designated. The deed has been recorded in the administration system of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.09-0170134 dated March 26, 2025. The appointment has been effectively approved by the Financial Services Authority in Letter No.SR-93/KO.1531/2025 dated July 7, 2025.

The composition of Board of Commissioner and Board of Directors as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	**2024**	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Andri Yulika, SH., M.Hum. CGCAE	Andri Yulika, SH., M.Hum. CGCAE	*President Commissioner*
Komisaris Independen	Manar Fuadi, SE., MM., QIA	Manar Fuadi, SE., MM., QIA	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Edrizanof, SE., Akt.	Edrizanof, SE., Akt.	*Independent Commissioner*
Dewan Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Gusti Candra, SP., MM.	Gusti Candra, SP., MM.	*President Director*
Direktur Kredit dan Syariah	Hafid Dauli, S.Pt., CRM[1]	Gusti Candra, SP., MM.	*Credit and Sharia Director*
Direktur Keuangan	Roni Edrian, SE., MM.	Roni Edrian, SE., MM.	*Finance Director*
Direktur Kepatuhan	Sukardi, S.Pt.	Sukardi, S.Pt.	*Compliance Director*
Direktur Operasional	Zilfa Efrizon, SE	Zilfa Efrizon, SE	*Operational Director*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Organisasi dan struktur manajemen (lanjutan)

(1) Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.151 tanggal 21 Maret 2025, menetapkan dan mengangkat Hafid Dauli sebagai Direktur Kredit dan Syariah periode tahun 2024 - 2028. Akta tersebut telah dicatat dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0170134 tanggal 26 Maret 2025.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Organization and management structure (continued)

(1) Based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.151 dated March 21, 2025, Hafid Dauli as Director of Credit and Sharia for the period 2024 - 2028 has been appointed and designated. The deed has been recorded in the administration system of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-AH.01.09-0170134 dated March 26, 2025.

The composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Komite Audit		***Board of Commissioners***
Ketua	Manar Fuadi, SE., MM., QIA	*Chairman*
Anggota	Oskar, SE., MM.	*Member*
Anggota	DR. Muhammad Hasbi, SH., M.H	*Member*

	2025	**2024**	
Komite Pemantau Risiko			***Risk Monitoring Committee***
Ketua	Edrizanof, SE., Akt.	Edrizanof, SE., Akt.	*Chairman*
Anggota	Yoni Taslan, SE., MM.(1)	Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs., M.Si.	*Member*
Anggota	M. Fany Alfarisi, SE., MS Fin., Phd.(2)	Yoni Taslan, SE., MM.	*Member*
Anggota	-	M. Fany Alfarisi, SE., MS Fin., Phd.	*Member*

(1) Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/333/DIR/HC/04-2025 tanggal 30 April 2025.

(2) Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/334/DIR/HC/04-2025 tanggal 30 April 2025.

(1) Appointed based on the Board of Directors Decree No.SK/333/DIR/HC/04-2025 dated April 30, 2025.

(2) Appointed based on the Board of Directors Decree No.SK/334/DIR/HC/04-2025 dated April 30, 2025.

	2025	**2024**	
Komite Remunerasi dan Nominasi			***Nomination and Remuneration Committee***
Ketua	Manar Fuadi, SE., MM., QIA(1)	Manar Fuadi, SE., MM., QIA	*Chairman*
Anggota	Andri Yulika, SH., M.Hum. CGCAE(1)	Andri Yulika, SH., M.Hum. CGCAE	*Member*
Anggota	Edrizanof, SE., Akt(1)	Edrizanof, SE., Akt	*Member*
Anggota	Oktra Firdaus, SE., MM., CRM(1)	Yunasrul, SE., MM.	*Member*
Anggota	Busnel Watson, ST., MM(1)	Busnel Watson, ST., MM	*Member*

(1) Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/552/DIR/HC/09-2025 tanggal 1 September 2025.

(1) Appointed based on the Board of Directors Decree No.SK/552/DIR/HC/09-2025 dated September 1, 2025.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Organisasi dan struktur manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/346/DIR/HC/05-2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari periode 2023 - 2026.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Nagari telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI melalui surat No.U-0014/DSN-MUI/I/2023 tanggal 4 Januari 2023.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah		***Sharia Supervisory Board***
Ketua	Prof. Dr. Yasri, MS	*Chairman*
Anggota	Dr. Rozalinda, M.Ag	*Member*

d. Susunan karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank memiliki karyawan masing-masing sebanyak 1.863 dan 1.845 orang (tidak diaudit).

e. Penerbitan laporan keuangan

Laporan keuangan ini diotorisasi untuk terbit pada tanggal 20 Februari 2026. Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengotorisasi Laporan Keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang telah diterapkan secara konsisten kecuali sebagaimana yang dijelaskan oleh Bank dalam penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

1. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Organization and management structure (continued)

The composition of the Sharia Supervisory Board is accordance with the Decree of the Board of Directors No.SK/346/DIR/HC/05-2023 dated May 31, 2023 regarding the Appointment of the Sharia Supervisory Board of Bank Nagari for the period 2023 - 2026.

The composition of the Sharia Supervisory Board in 2023 of Bank Nagari has received a recommendation from the MUI National Sharia Board through letter No.U-0014/DSN-MUI/I/2023 dated January 4, 2023.

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

d. The composition of employees

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has 1,863 and 1,845 employees, respectively (unaudited).

e. Issuance of financial statements

The accompanying financial statements are authorized to issue on February 20, 2026. The Board of Directors is fully responsible for the authorization of the Financial Statements.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the financial statements

Statements of compliance

The Bank's financial statements were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI).

The significant accounting policies have been consistently applied by the Bank, except as explained below, in the presentation of the financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024.

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis dan disusun dengan dasar akrual (kecuali laporan arus kas, pendapatan dari istishna dan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah), terkecuali untuk yang berikut ini:

1. Instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar;
2. Instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur pada nilai wajar;
3. Aset keuangan tersedia untuk dijual yang diukur pada nilai wajar;
4. Aset keuangan dan liabilitas yang diakui ditunjuk sebagai lindung nilai dalam kualifikasi hubungan lindung nilai wajar disesuaikan untuk perubahan nilai wajar diatribusikan pada risiko lindung nilai;
5. Liabilitas untuk imbalan pasti diakui sebesar nilai kini imbalan pasti dikurang total dari perencanaan, ditambah keuntungan aktuarial yang diakui, dikurangi biaya jasa di masa lalu yang belum diakui dan kerugian aktuarial yang belum diakui.

Unit Usaha Syariah, yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 401 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402 "Akuntansi *Murabahah*", PSAK 405 "Akuntansi *Mudharabah* PSAK 406 "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK 407 "Akuntansi *Ijarah*" dan PSAK 410 "Akuntansi *Sukuk* Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan standar akuntansi keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas termasuk kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan investasi surat-surat berharga yang jatuh tempo dalam tiga bulan tanggal akuisisi, selama mereka tidak dijaminkan sebagai jaminan atas pinjaman atau dibatasi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Statements of compliance (continued)

The financial statements have been prepared on historical cost basis and accrual basis of accounting (except for statement of cash flows, revenue from istishna and profit sharing for mudharabah and musyarakah financing), except for the following:

1. *Derivative financial instruments are measured at fair value;*
2. *Financial instruments at fair value through profit or loss are measured at fair value;*
3. *Available-for-sale financial assets are measured at fair value;*
4. *Recognized financial assets and financial liabilities designated as hedging items in qualifying fair value hedging relationship are adjusted for changes in fair value attributable to the risk being hedged;*
5. *The defined benefit liabilities is recognized at the present value of the defined benefit net of the total plan assets, plus recognized actuarial gains, less unrecognized past service cost and unrecognized actuarial losses.*

The Sharia Business Unit, which is engaged in sharia banking, presents financial statements in conformity with sharia accounting principles in accordance with PSAK 401, "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK 402 "Accounting for Murabahah", PSAK 405 "Accounting for Mudharabah", PSAK 406 "Accounting for Musyarakah", PSAK 407 "Accounting for Ijarah", and PSAK 410 "Accounting for Sukuk", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI) and other Statements of Financial Accounting Standards established by the Indonesian Institute of Accountants and also accounting and reporting guidelines prescribed by the Indonesian banking regulatory authority.

The statement of cash flows is prepared using direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities. For the purpose of statement of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, financial assets held for trading and investment securities that mature within three months since the date of acquisition, provided that they are not being pledged as collateral for borrowings or restricted for use.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Statements of Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affect:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Pernyataan kepatuhan (lanjutan)

Penerapan kebijakan akuntansi:

1. Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
2. Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut.

Informasi tentang bagian yang signifikan dari estimasi ketidakpastian dan kritik penilaian dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang memiliki efek signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Informasi tentang bagian yang signifikan dari estimasi ketidakpastian dan kritik penilaian dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang memiliki efek signifikan pada jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dalam Rupiah penuh.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Statements of compliance (continued)

The application of accounting policies:

1. *The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements:*
2. *The reported amounts of income and expenses during the reporting period,*

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised and in any future period affected.

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the financial statements are described in Note 3.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards

Information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognized in the financial statements are described in Note 3.

The reporting currency used for the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are in full amount of Rupiah.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025.

- PSAK 117, “Kontrak Asuransi”, yang diadopsi dari IFRS 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115.
- PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran". Penerapan lebih dini diperkanankan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (”DSAK-IAI”) telah menerbitkan standar baru sebagai berikut:

- PSAK 118: “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan” yang akan menggantikan PSAK 201: “Penyajian Laporan Keuangan”

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Penjabaran transaksi dan saldo dalam valuta asing

Transaksi-transaksi dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank, dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Saldo akhir tahun aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan menggunakan kurs tutup Bank Indonesia pada pukul 17.00 WIB.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam valuta asing dan dari penjabaran aset moneter dan liabilitas moneter dalam valuta asing diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to the Statements of Financial Accounting Standards and Interpretations of Financial Accounting Standards (continued)

The following are financial accounting standart, amandements and interpretations of statements of financial accounting standart which become effective starting January 1, 2025.

- *PSAK 117, “Insurance Contracts”, adopted from IFRS 17, early application is permitted for entities that have also applied PSAK 109 and PSAK 115.*
- *Amandment PSAK 221, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on the Lock of Convertibility". Early application is permitted.*

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) has issued the following new standards, as follows:

- *PSAK 118: “Presentation and Disclosure in Financial Statements” which will replace PSAK 201: “Presentation in Financial Statements”*

The above standard will be effective on 1 January 2027 and early adoption is permitted.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial years.

c. Foreign currency transactions and balances

Transactions in foreign currencies are translated into Rupiah, the Bank's functional currency, using the rates prevailing at the transaction date.

Year-end balances of monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates as of reporting (closing) date as determined by Bank Indonesia closing rate at 17:00 Western Indonesian Time.

Foreign Exchange gains and losses arising from foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and monetary liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statements of comprehensive income for the year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

c. Penjabaran transaksi dan saldo dalam valuta asing (lanjutan)

Perubahan nilai wajar efek moneter yang didenominasikan dalam mata uang asing yang diklasfikasikan sebagai tersedia untuk dijual dianalisa antara selisih pejabaran yang timbul dari perubahan niai tercatat efek lainnya. Selisih penjabaran terkait dengan perubahan biaya perolehan diamortisasi diakui di dalam laporan laba rugi, dan perubahan nilai tercatat lainnya diakui pada laba komprehensif lainnya.

Selisih penjabaran aset dan liabilitas keuangan non-meneter yang dicatat pada nilai wajar diakui sebagai bagian keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar. Sebagai contoh, selisih pejabaran aset dan liabilitas keuangan non-moneter seperti ekuitas yang dimiliki dan dicatat pada nilai wajar melaui laporan laba-rugi sebagai bagian keuntungan atau kerugian nilai wajar dan selisih pejabarannya pada aset non-moneter seperti tersedia ekuitas yang diklasifkasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam pendapatan komprehensif lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Foreign currency transactions and balances (continued)

Changes in the fair value of monetary securities denominated inforeigncurrency classified as available-for-sale are analysed between translation differences resulting from changes in the amortised cost of the security and other changes in the carrying amount of the security. Translation differences related to changes inamortised cost are recognised in profit or loss, and other changes in carrying amount are recognised in other comprehensive income.

Translation differences on non-monetary financial assets and liabilities carried at fair value are reported as part of the fair value gain or loss. For example, translation differences on non-monetary financial assets and liabilities such as equities held at fair value through profit or loss are recognised in profit or loss as part of the fair value gainor loss and translation differences on non-monetary assets such as equities classified as available-for-sale financial assets are recognised in other comprehensive income.

As of December 31, 2025 and 2024, the foreign currency exchange rates used for translation of foreign currencies to Rupiah are as follows (amounts in full Rupiah):

	2025	**2024**	
1 Dolar Amerika Serikat (USD)	16.675,00	16.095,00	*1 United States Dollar (USD)*
1 Dolar Singapura (SGD)	12.965,05	11.844,58	*1 Singaporean Dollar (SGD)*
1 Yen Jepang (YEN)	106,50	103,03	*1 Japanese Yen (YEN)*
1 Riyal Saudi Arabia (SAR)	4.474,25	4.284,00	*1 Saudi Arabian Riyal (SAR)*
1 Euro (EUR)	19.571,45	16.758,12	*1 Euro (EUR)*
1 Ringgit Malaysia (RM)	4.108,16	3.597,86	*1 Malaysian Ringgit (MYR)*
1 Dolar Australia (AUSD)	11.152,24	10.013,51	*1 Australian Dollar (AUSD)*

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan Bank

d. Transaction with related parties

In its normal course of business, the Bank makes transactions with related parties as defined in PSAK 224 "Related Party Disclosure". This revised PSAK requires the disclosures of relationship, transaction, and balance with related parties, including commitments, in the financial statements.

Implementation of the revised PSAK has an impact to the related disclosure in the financial statements of the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

1) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a);
   g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf 1).a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transaction with related parties (continued)

The Bank considers the following as their related parties:

1) A person or a close member of such person's family is related to the reporting entity if that person:
   a. has control or joint control over the reporting entity;
   b. has significant influence over the reporting entity; or
   c. is a member of the key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.

2) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
   a. The entity and the reporting entity are members of the same Bank (which means that each parent, subsidiary, and fellow subsidiary is related to the others);
   b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Bank in which the other entity is a member);
   c. Both entities are joint ventures of the same third party;
   d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers entity are also related to the reporting entity;
   f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in paragraph a);
   g. The person identified in 1).a) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or the parent of the entity).

The transactions are made under the terms agreed by both parties, where such terms may not the same as other transactions made with unrelated parties.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 40. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dengan Pemerintah Daerah, diungkapkan juga pada Catatan 40.

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, kredit dan efek-efek untuk tujuan investasi.

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari simpanan dari bank-bank, simpanan dari nasabah dan pinjaman yang diberikan.

i. Klasifikasi

Aset produktif Bank terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, efek-efek untuk tujuan investasi, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*, tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, komitmen dan kontijensi.

Termasuk ke dalam komitmen dan kontijensi pada rekening administratif, antara lain terdiri dari penerbitan jaminan (bank garansi) dan komitmen fasilitas tarik atau komitmen/fasilitas kredit yang belum digunakan.

Bank mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan; dan
- model bisnis Bank dalam mengelola aset keuangan.

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal:

a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
c. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transaction with related parties (continued)

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to financial statements and the details are presented in Note 40. Furthermore, material balances and transactions between the Bank and the Local Government are also disclosed in Note 40.

e. Financial assets and financial liabilities

The Bank's financial assets mainly consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, loans and marketable securities for investment purposes.

The Bank's financial liabilities mainly consist of deposits from banks, deposits from customers and borrowing.

i. Classification

The Bank's earning assets consists current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia, placements with other banks, marketable securities for investment purposes, securities purchased with agreements to resell (reverse repo), acceptance receivables, loans, commitments and contingencies.

Included in commitments and contingencies in administrative accounts, among others consist of issuance of guarantees (bank guarantee) and commitment to withdrawal facilities or commitments / unused credit facilities.

The Bank classifies financial assets so that after initial recognition financial assets are measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, using two bases, namely:

- *characteristics of the financial assets's contractual cash flow; and*
- *Bank's business model in managing financial assets.*

The Bank classifies its financial assets into the following categories at initial recognition:

a. Financial assets measured at fair value through profit or losses;
b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
c. Financial assets measured at amortized cost.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pokok pinjaman untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian kredit biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Bank menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari *de minimis* atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo maka dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit Loss* (FVTPL).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

i. Classification (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

a. financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and

b. the contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

The principal for this test is defined as the fair value of a financial asset on initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there is a repayment of principal or amortization of premiums/discounts).

The most significant element of interest in a credit agreement is usually a consideration of the time value of money and credit risk. To make an SPPI assessment, the Bank applies judgment and pays attention to relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated and the period when the interest rate is set.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

a. Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and

b. The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Contractual terms that provide more than de minimis exposure to risk or volatility in contractual cash flows unrelated to the basis of the loan arrangement, do not give rise to SPPI's contractual cash flows of the outstanding amount in such cases, financial assets are required to be measured at Fair Value through Profit Losses (FVTPL).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi (lanjutan)

Klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Akan tetapi, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Saat pengakuan awal Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

PSAK 109 mensyaratkan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dilakukan untuk setiap instrumen pada saat pengakuan awal dan modifikasi kontrak yang signifikan.

Dalam hal ini, Bank menentukan pendekatan berikut:

- Aset keuangan yang homogen : Aset keuangan yang homogen memiliki persyaratan kontraktual yang identik antara satu dengan lainnya. Bank melakukan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ini secara kelompok sebagai bagian dari produk program; dan

- Aset keuangan yang tidak homogen : Aset keuangan yang tidak homogen memiliki persyaratan kontraktual yang berbeda antara satu dengan lainnya. Bank melakukan evaluasi atas karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ini secara individual kontrak per kontrak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

i. Classification (continued)

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss. At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

At initial recognition, the Bank can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

PSAK 109 requires an evaluation of the contractual cash flow characteristics of financial assets for each instrument at initial recognition and significant contract modifications.

In this matter, The Bank determines this approach:

- *Homogeneous financial assets : The homogeneous financial assets have identical contractual requirements between each other.The Bank will evaluates the characteristics of the contractual cash flow from the financial assets in Bank as part of the program's product; and*

- *Non-homogeneous financial assets : The non-homogeneous financial assets have different contractual requirements between each other. The Bank will evaluate the contractual cash flow characteristics of this financial assets individually on contract-based.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Model bisnis Bank mengacu pada bagaimana masing-masing unit bisnis di Bank mengelola aset keuangan untuk menghasilkan arus kas. Artinya, model bisnis Bank menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari memperoleh arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya.

Evaluasi model bisnis diperlukan apabila aset keuangan memenuhi kriteria SPPI, untuk menentukan apakah diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank (misalnya pengurus bank yang tertuang dalam AD/ART);
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi atau dinilai kinerjanya (*Key Performance Indicator* (KPI) (sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

i. Classification (continued)

Valuation of business model

The Bank's business model refers to how each business unit in the Bank manages financial assets to generate cash flow. That is, the Bank's business model determines whether cash flows will result from obtaining contractual cash flows, selling financial assets or both.

Evaluation of thebusiness model is required when a financial asset meets the SPPI criteria, to determine whether it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank's key management personnel (for example bank managements as stipulated in the statutes);*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How the business manager compensated or assessed for their performance (through Key Performance Indicator (KPI) (for example, is the compensation based on the fair value of the financial assets manger or based on contractual cash flow obtained).*

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage* ;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori berikut pada saat pengakuan awal;

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
b. Liabilitas keuangan lainnya
   Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

i. Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest

For the purpose of this valuation, principal is defined as the fair value of financial assets at initial recognition. Interest is defined as compensation for the time value of money and credit risk in relation to the principal amount owed over a certain period of time and also the risk and standard borrowing costs, as well as profit margins.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers:

- *Contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow;*
- *Leverage feature;*
- *Terms of advance payment and contractual extension;*
- *Requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

a. Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
b. Other financial liabilities
   Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)
i. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan;

b. Liabilitas keuangan lainnya
Kategori untuk diperdagangkan adalah aset dan liabilitas yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position-taking* .

Bank telah menetapkan aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada keadaan berikut:

a. Aset atau liabilitas dikelola, dievaluasi, dan dilaporkan secara internal pada nilai wajar;
b. Penetapan ini menghilangkan atau secara signifikan mengurangi ketidakcocokan akuntansi yang dinyatakan akan muncul;
c. Aset atau liabilitas derivatif berisi *embedded derivative* yang secara signifikan mengubah arus kas yang lain akan diperlukan di bawah kontrak.

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan *non-derivative* yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan *non-derivative* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)
i. Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

a. Fair value through profit and loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held for trading;

b. Other financial liabilities
Held-for-trading are those financial assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or held as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position-taking.

The Bank has designated financial assets and liabilities at fair value through profit or loss in the following circumstances:

a. The assets or liabilities are managed, evaluated and reported internally on a fair value basis;
b. The designation eliminates or significantly reduces an accounting mismatch which would otherwise arise;
c. The derivative asset or liability contains an embedded derivative that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required under the contract.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets.

Held-to-maturity category consists of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which Bank has the positive intention and ability to hold until maturity. Investments intended to be held for an undetermined period are not included in this classification.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non-derivative* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, kecuali:

a. Yang dimaksudkan oleh Bank untuk segera dijual dalam waktu dekat yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif;

b. Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau

c. Dalam hal Bank mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif saat pengakuan liabilitas.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat pengukuran awal.

ii. Pengakuan awal

Bank pada pengakuan awal mengakui kredit yang diberikan, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, deposito dan surat utang yang diterbitkan pada tanggal awal mula. Pada pembelian dan penjualan yang lazim, aset keuangan diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset. Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya (termasuk aset dan liabilitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan di mana Bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

i. Classification (continued)

Evaluation of contractual cash flows obtained solely from payment of principal and interest (continued)

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

a. Those that the Bank intends to sell immediately or in the short term which are classified as held for trading, and those that in the initial recognition are designated as measured at fair value through comprehensive income;

b. Those that the Bank upon initial recognition designates as available-for-sale investments; or

c. Those for which Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables which value have declined, which shall be classified as available-for-trading.

Other financial liabilities are the financial liabilities that are not held for trading nor designated at fair value through comprehensive profit and loss upon the liability recognition.

Management determines the classification of its financial assets and liabilities at initial recognition.

ii. Early recognition

The Bank initially recognizes loans receivables, placements with Bank Indonesia and other banks, deposits and debt securities issued on date of origination. Regular way purchases and sales of financial assets are recognized on trade date at which the Bank commits to purchase or sell the asset. All other financial assets and liabilities (including assets and liabilities designated at fair value through profit and loss) are initially recognized on the trade date at which the Bank becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ii. Pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah (untuk *item* yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.

Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

iii. Pengakuan setelah pengukuran awal

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

iv. Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
   - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
   - Bank mentransfer hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Setiap hak atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

ii. Early recognition (continued)

Financial assets or financial liabilities are measured at fair value plus (for items not subsequently measured at fair value through profit and loss) transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification. Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability and they are incremental cost that would not have been incurred if the instruments have not been acquired or issued.

In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the life of the instruments based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets, or interest expense for transaction cost related to financial liabilities.

iii. Subsequent measurement

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities held at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

iv. Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:
   - *when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire; or*
   - *when Bank transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial assets are transferred. Any rights over the transferred financial assets that is created or retained by the Bank is recognized as a separate asset or liability in the statement of financial position.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iv. Penghentian pengakuan (lanjutan)

Bank masuk ke dalam transaksi dimana transfer aset diakui pada laporan posisi keuangan, namun tetap, baik semua atau secara substansial seluruh risiko dan imbalan aset yang ditransfer atau sebagian dari mereka. Jika semua risiko dan manfaat secara substansial dipertahankan, maka transfer aset tidak dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan. Pengalihan aktiva dengan retensi dari semua atau secara substansial seluruh risiko dan imbalan termasuk, misalnya, pinjaman sekuritas dan transaksi pembelian kembali.

Saat aset tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan tingkat yang sama aset total *return swap* yang ditransfer, transaksi tersebut dicatat sebagai transaksi pembiayaan dijamin dengan transaksi pembelian kembali, Bank mempertahankan semua atau secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan seperti aset.

Dalam transaksi dimana Bank secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Bank menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank menghapusbukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank menentukan bahwa kredit atau surat berharga tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur penerbit aset keuangan sehingga debitur penerbit tidak lagi dapat melunasi liabilitasnya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur kredit.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

iv. Derecognition (continued)

The Bank enters into transactions whereby it transfers assets recognized on its statement of financial position, but retains either all or substantially all of the risks and rewards of the transferred assets or a portion of them. If substantially all risks and rewards are retained, then the transferred assets are not derecognized from the statement of financial position. Transfers of assets with retention of all or substantially all risks and rewards include, for example, securities lending and repurchase transactions.

When assets are sold to third party with concurrent total rate of return swap on the transferred assets, the transaction is accounted for as a secured financing transaction similar to repurchase transactions, as the Bank retains all or substantially all the risks and rewards of ownership of such assets.

In a transaction in which the Bank neither retains nor transfer substantially all the risks and rewards of ownership of a financial assets, the Bank derecognizes the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations arising or retained in the transfer are recognized separately as assets or liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is still retained, the Bank continues to recognize the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank writes-off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank determines that the financial asset is uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of the debtor issuing financial asset such that the debtor can no longer pay the obligation, or that the proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

iv. Penghentian pengakuan (lanjutan)

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

v. Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

iv. Derecognition (continued)

b. Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

v. Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

v. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

vi. Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jiika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

v. Income and expense recognition (continued)

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of fair value through other comprehensive income financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

vi. Reclassification of financial assets

Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reclassification of financial asseets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

vi. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

vii. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam posisi keuangan jika, dan hanya jika, Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

viii. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Cadangan yang wajib dibentuk Bank jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Jumlah cadangan kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

vi. Reclassification of financial assets (continued)

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted agains the fair value.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

vii. Offsetting

Financial assets and financial liabilities can be offset and the net amount is presented in the balance sheets if, and only if, the Bank has the right to a legal force to offset the amount that has been recognized and intends to settle on a net basis or to realize its assets and settle liabilities simultaneously.

Revenue and expenses are presented net only if permitted by accounting standards.

viii. Amortized cost measurement

Amortized cost from the financial asset or financial liability is the amount of assets or financial liabilities measured at initial recognition minus principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method, calculated from the difference between initial value and maturity value, and net allowance for impairment losses.

Allowance shall be established by Bank if there is objective evidence of impairment in value of financial assets or Bank of financial assets as a result of one or more events occurring subsequent to initial recognition these assets (adverse events) and have an impact on the estimated future cash flows front. Total allowance for losses is measured as the difference between the carrying value of financial assets with the present value of estimated future cash flows discounted using the effective interest rate beginning of the financial asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ix. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek *(dealer)*, perantara efek *(broker)*, kelompok industri, badan pengawas *(pricing service or regulatory agency)*, dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari Interdealer *Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* dari *Bloomberg* atau *Reuters* pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan diatas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umum diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter*, *unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

ix. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry Bank, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market-observable.

Fore more complex intruments, the Bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over the counter market, unlisted debt securities (including those weith embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

ix. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada *level* hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: *Input* selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga);
- Tingkat 3: *Input* untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK 109 memperkenalkan konsep evaluasi model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan evaluasi karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam menentukan klasifikasi aset keuangan. PSAK 109 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (12-*month* ECL) atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime* ECL). *Lifetime* ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

ix. Fair value measurement (continued)

In cases when the fair value of unlisted equity instruments cannot be determined reliably, the instruments are carried at cost less impairment value. The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on following:

- *Level 1: Quoted prices in active market for the identical financial asset or liability;*
- *Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);*
- *Level 3: Inputs for the financial assets or liability that are not based on observable market data (unobservable information).*

x. Allowance for impairment losses on financial assets

Impairment of financial assets

PSAK 109 introduces business model evaluation concept in managing financial assets and evaluating the characteristics of the contractual cash flow from the financial assets in deciding financial assets classification. PSAK 109 requires allowance for lossess to be recognized as much as expected credit loss of 12 months)(12-month ECL) or expected credit loss over the life of the financial assets (lifetime ECL). Lifetime ECL is expected credit loss derived from all possible default events over the life of an financial instrument, while ECL 12 month is portion of the expected credit loss derived from the possible default in 12 months after the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank akan mengukur cadangan kerugian instrument keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur *(lifetime)* instrumen keuangan, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Bank akan mengakui cadangan kerugian sejumlah *lifetime* ECL, kecuali dalam kondisi berikut, dimana cadangan kerugian sejumlah ECL 12 bulan yang akan diakui:

- Instrumen keuangan dengan risiko kredit rendah atau ekuivalen dengan tingkat risiko negara Republik Indonesia; dan
- Instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketentuan-ketentuan atas penurunan nilai sesuai PSAK 109 sangat kompleks dan memerlukan pertimbangan-pertimbangan, estimasi-estimasi serta asumsi-asumsi manajemen, terutama untuk area-area berikut ini:

- Evaluasi apakah risiko kredit dari suatu instrumen telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal; dan
- Memasukkan informasi yang bersifat *forward looking* dalam pengukuran ECL.

Bank menganggap sekuritas investasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dan dana yang ditempatkan pada Bank Indonesia memiliki risiko kredit yang rendah, karena pokok dan bunga investasi pemerintah tersebut dijamin oleh pemerintah dan tidak ada kerugian yang pernah terjadi. Hal ini juga berlaku atas instrumen keuangan berupa kredit dengan proyek yang dijamin oleh pemerintah. Bank tidak menerapkan pengecualian risiko kredit yang rendah untuk instrumen keuangan lainnya.

Instumen keuangan *stage* 1, mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan resiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki resiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

At each reporting date, the Bank will measure the allowance for financial instrument losses at the amount of expected credit losses over the life of the financial instrument, if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition. The bank will recognize a reserve for losses in the amount of ECL lifetime, except in the following circumstances, where the allowance for losses of 12 months ECL will be recognized:

- *Financial instruments with low credit risk or equivalent to the level of risk in the Republic of Indonesia; and*
- *Financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition.*

The provisions for impairment in accordance with PSAK 109 are very complex and require management judgments, estimates and assumptions, especially for the following areas:

- *Evaluate whether the credit risk of an instrument has increased significantly since initial recognition; and*
- *Include forward looking information in ECL measurements.*

The Bank considers government investment securities denominated in Rupiah currency and funds placed with Bank Indonesia to have low credit risk, because the principal and interest of the government investment are guaranteed by the government and no losses have occurred. This also applies to financial instruments in the form of credit with projects guaranteed by the government. The Bank does not apply low credit risk exemptions for other financial instruments.

Stage 1 financial instruments include financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition or have a low credit risk at the reporting date. For these assets, a 12 month ECL calculation will apply.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)
Instrumen keuangan *stage* 2, mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa resiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.

Instrumen keuangan *Stage* 3, mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar.

- Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekskpektasian pada investasi instrumen ekuitas;
- Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan;
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)
Stage 2 financial instruments, including financial instruments that experience an increase in credit risk since initial recognition (unless the Bank feels credit risk is low at the reporting date) but has not been proven to have any objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL calculations will apply. ECL lifetime is the expected credit loss expected from all default events that may occur during the estimated life of the financial instrument.

Stage 3 financial instruments, including financial instruments that have been shown to be objectively impaired at the reporting date. This stage is usually filled by debtors who experience defaults.

- *The Bank recognize the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss;*
- *There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments;*
- *The Bank measure the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses;*
- *debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- *other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Bank considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian
Kerugian kredit ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset keuangan yang direstrukturisasi
Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Measurement of expected credit losses
Expected credit loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- *Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank);*
- *Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- *For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Bank;*
- *For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

Restructured financial assets
If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

- *If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang direstrukturisasi (lanjutan)

- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Restructured financial assets (continued)

- *If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.*

Credit-impaired financial assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit impaired (worsening). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

- *Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;*
- *Breach of contract, such as a default or arrears;*
- *The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;*
- *It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization; or*
- *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties;*
- *Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang memiliki nilai plafon lebih dari Rp15.000.000.000 dan memiliki hari tunggakan; atau
- Pinjaman komersil yang diberikan memiliki nilai diatas Rp200.000.000 dan memiliki hari tunggakan lebih dari 90 hari;
- Pinjaman yang direstrukturisasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Purchased or originated kredit impaired financial assets - POCI

Financial assets are catergorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- *Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;*
- *Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;*
- *Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.*

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated bye impairment through individual methode, if one of the following criterias is met:

- *Loans with plafond amount over Rp15,000,000,000 and overdue date; or*
- *Commercial loan with a plafond amounted above Rp200,000,000 and overdue dates over 90 days;*
- *Loans that are restructured.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have insignificant value; or*
- *Restructured loans which individually have insignificant value.*

At each consolidated statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

a. significant financial difficulty of the issuer or obligor;
b. a breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
c. the lender, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;
d. it becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
e. the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties;

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

- memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Bank akan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Collective impairment calculation (continued)

f. observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:

- *adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and*
- *national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.*

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months, for exceptional cases, longer periods are needed.

The Bank first assesses whether the financial asset is individually significant. If the financial asset considered individually significant, the Bank will determines whether there is an objective evidence of individual impairment exist or not. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a Bank of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
2. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

a) Financial assets carried at amortized cost

Individual Impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

1. *Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or*
2. *Restructured loans which individually have significant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Corporate and middle loans in which collectibility is classified as substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured corporate and middle loans.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial assets has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual (lanjutan)

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
2. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau
3. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

a) Financial assets carried at amortized cost (continued)

Individual Impairment calculation (continued)

If the terms of the loans, receivables or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

1. *Loans which individually have insignificant value;*
2. *Loans which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or*
3. *Restructured loans which individually have insignificant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) Corporate and middle loans in which collectibility is classified as current and special mention, and have never been restructured; or (b) Retail and consumer loans.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik seperti, *migration analysis method*, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

Untuk pinjaman, Bank menerapkan migration analysis method dengan menggunakan data historis selama 5 tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

a) Financial assets carried at amortized cost (continued)

Collective impairment calculation (continued)

Calculation of allowance for impairment losses on loans are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Financial assets are Banked on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis, to assess the allowance for impairment losses.

The Bank migration analysis method using 5 years historical data to compute the Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

1. *Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral; or*
2. *Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.*

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (lanjutan)

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

b) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dapat dibalik melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

a) Financial assets carried at amortized cost (continued)

Collective impairment calculation (continued)

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through profit or loss.

b) Financial assets classified as available-for-sale

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset or a Bank of financial assets is impaired.

In the case of equity instruments classified as available-for-sale financial assets, a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified asavailable-for-sale securities increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in statement of consolidated profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed and recognized in the period it occurred.

Impairment losses recognized in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available-for-sale shall not be reversed through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

x. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

c) Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and financial liabilities (continued)

x. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

c) Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

Cadangan kerugian penurunan nilai akad murabahah

Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai akad murabahah secara kolektif dan individual.

Sesuai dengan PSAK 402 "Akuntansi *Murabahah*", PSAK 55 "Instrumen Keuangan", dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK 402 "Penurunan Nilai Piutang *Murahabah*".

Penyisihan kerugian minimum atas aset produktif adalah sebagai berikut:

Allowance of impairment losses on murabahah contracts

Bank calculates the allowance for impairment losses on murabahah contracts collectively and individually.

Accordance with PSAK 402 "Accounting for Murabahah", PSAK 55 "Financial Instruments", and Indonesian Islamic Banking Accounting Guidelines (PAPSI), the Bank calculates individual CKPN for murabahah receivables in accordance with the provisions in ISAK 402 "Decrease in Value of Murabahah Receivables".

Minimum allowance for possible losses on earning assets is as follows:

	Persentase minimum penyisihan kerugian/ *Percentage of minimum allowance of impairment*	
Lancar	1%	*Current*
Dalam Perhatian Khusus	5%	*Special Mention*
Kurang Lancar	15%	*Substandard*
Diragukan	50%	*Doubtful*
Macet	100%	*Loss*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Klasifikasi instrumen keuangan

f. Classification of financial instruments

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109/ ***Category as defined by*** **PSAK 109**		**Golongan (ditentukan oleh Bank)/** ***Classes (as determined by the Bank)***	**Sub golongan/** ***Subclasses***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss*	Kas/ Cash	
		Penyertaan saham/ *Equity investment*	
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	
		Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ *Placement with Other Banks and Bank Indonesia*	
		Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Securities purchased under agreements to resell*	
		Pinjaman yang diberikan/*Loans*	
		Efek-efek untuk tujuan investasi/ *Marketable securities for investment purposes*	
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*	Liabilities keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas Segera/ *Obligation due immediately*	
		Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*	
		Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	
		Beban yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*	
		Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	
		Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

g. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash, demand deposits at Bank Indonesia, other banks, deposits can be withdrawn at any time, and other highly liquid short-term investments with original maturities of three months or less.

h. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Entitas yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, giro pada Bank Indonesia dan Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

h. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

The current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Entity that engages in sharia banking presents current accounts with Bank Indonesia and other Banks at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

i. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan tabungan.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

j. Efek-efek untuk tujuan investasi

Efek-efek terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara, Surat Utang Negara, Sukuk Bank Indonesia dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan diklasifikasikan pada biaya perolehan yang diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK No. 410 tentang “Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consist of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI) and savings accounts.

Placements with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Placements with other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

j. Marketable securities for investment purposes

Marketable securities consist of Sharia Government Securities, Government Debenture Debt, Bank Indonesia Sukuk, and Bank Indonesia Rupiah Securities.

At initial recognition, the marketable securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., amortized cost, fair value through other comprehensive income or at fair value through profit or loss.

Refer to Note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Sharia Securities areproof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities followingsharia principles.

The Bank defined the classification of investment in marketable securities, specifically sukuk, based on busines model in accordance with PSAK No. 410 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- *At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*
- *At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

j. Efek-efek untuk tujuan investasi (lanjutan)

- Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

k. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Lihat catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

l. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah

Pinjaman yang diberikan

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Pinjaman yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Marketable securities for investment purposes (continued)

- *At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.*

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

k. Securities purchased under agreements to resell

Securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities purchased under agreements to resell are presented as assets in the consolidated statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Refer to note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

l. Loans and sharia financing

Loans

Loans are the provision of money or bills that can be compared to cash based on an agreement with the borrower borrowing which requires debtors to pay off the debt with interest after a certain period of time.

Loans are classified as amortized cost.

Loans are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

I. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Pinjaman sindikasi dan pinjaman penerusan dicatat sesuai dengan porsi pinjaman yang risikonya ditanggung oleh Bank.

Lihat catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru. Saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai kredit menunggak.

Manajemen secara berkelanjutan mereviu kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. Penerimaan pembayaran pembiayaan/piutang syariah yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian selama tahun berjalan. Pelunasan kemudian atau penggantian asuransi atas kredit yang telah dihapusbukukan dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian penurunan nilai kredit di laporan posisi keuangan.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan yang diberikan meliputi pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari piutang syariah, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* .

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Loans and sharia financing (continued)

Syndicated loans and two step loans are recorded according to the proportion of risks borne by the Bank.

Refer to note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and the agreement of new loans conditions. When the loan terms have been renegotiated or modified (restructured loans), any impairment is measured using the original effective interest rate (EIR) as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered past due.

Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and the future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, calculated using the loan original effective interest rate

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection or when the Bank's relationship with the borrowers has ceased. When loans are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses. The recoveries of written-off loans in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses account. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as other operating income. Recovery of Sharia Financing/ Receivables previously written off is recorded as an addition to the allowance for impairment losses in the current year. Subsequent recoveries or proceeds from insurance claims are credited to the allowance for impairment losses in the balance sheet.

Sharia financing

Loans include sharia financing, which consists mainly of sharia receivables, Mudharabah financing and musyarakah financing.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

I. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dan nasabah dimana Bank Nagari Syariah menyediakan dana, sedangkan nasabah bertindak selaku pengelola, yang dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil (nisbah) dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad antara Bank Nagari Syariah dan nasabah untuk melakukan usaha tertentu dalam suatu kemitraan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad *ijarah* , *murabahah* dan *qardh* .

Ijarah adalah sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Loans and sharia financing (continued)

Sharia financing (continued)

Mudharabah financing is an agreement between Bank Nagari Syariah and the customer in which Bank Nagari Syariah as the owner of the fund and the customer as the business executor, is conducted based on revenue sharing (nisbah) principle with agreed revenue sharing ratio.

Musyarakah financing is an agreement between Bank Nagari Syariah and the customer to have a joint venture in a partnership where each party contributes funds with profit and loss sharing based on agreement and losses will be borne proportionally based on capital contribution.

Mudharabah and musyarakah financing are stated in the statements of financial position at fair value and if the fair value is higher than the book value, the margin is recorded as deferred income and amortized using straight-line method over the period of financing or recorded as a loss in the same period if the fair value is less than the book value.

Sharia receivables are bills arising from transactions based on ijarah, murabahah and qardh contracts.

Ijarah is a leasing arrangement of goods and/or services between the owner of a leased object (lessor) and lessee including the right to use the leased object, for the purpose of obtaining a return on the leased object. Ijarah muntahiyah bittamlik is a leasing arrangement between the lessor and lessee to obtain profit on the leased object being leased with an option to transfer ownership of the leased object through purchase/sale or giving (hibah) at certain time according to the lease agreement (akad).

Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus transaction costs that are directly attributable and additional costs to obtain financial assets, and after initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method less allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

l. Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)
Pinjaman qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

m. Penyertaan saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan non-publik yang bergerak di bidang jasa keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang.

Investasi dalam saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang dimiliki untuk dijual dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.

n. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa

Aset tetap
Bank menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap. Bank melakukan penilaian kembali atas seluruh aset tetap yang dimiliki dengan menggunakan jasa dari independen eksternal yang telah terdaftar.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah di kreditkan pada “surplus revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lainnya. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap “surplus revaluasi aset tetap” sebagai bagian dari laba komprehensif; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi setiap periode pelaporan.

Surplus revaluasi, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai “surplus revaluasi aset tetap” pada laba komprehensif lainnya.

Selain tanah dan bangunan, aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya tersebut sudah termasuk harga pembelian dan biaya apapun yang langsung dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar mampu beroperasi dalam cara yang dimaksudkan oleh manajemen.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Loans and sharia financing (continued)

Sharia financing (continued)
Funds of qardh is borrowing funds without an agreed commitment of benefits where the borrower is obligated to repay the principal simultaneously or in installments in certain periods.

m. Investment in shares

Equity investments represent investment in no publicly listed companies engaged in the financial services industry that is not through the capital market held for long term purposes.

Investments in shares classified as financial asset which held for sale is measured at fair value through profit or loss.

n. Prepaid expense

Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.

o. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities

Fixed assets
Bank applies revaluation model as accounting policy for fixed assets. Bank revalued all fixed assets using external independent valuer service that has been registered.

Increases in the carrying amount arising on revaluation on land and building are credited to”fixed assets revaluation surplus” as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against “fixed assets revaluation surplus” as part of other comprehensive income; all other decreases are charged to the profit or loss.

The revaluation surplus, was credited to other comprehensive income and is shown as “fixed assets revaluation surplus” in other comprehensive income.

Other than land and building, fixed assets are initially recognized at cost. Cost includes its purchase price and any cost directly attributable to bringing asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dilakukan dengan mengurangkan biaya dengan akumulasi depresiasi dan kerugian penurunan nilai. Biaya penggantian bagian aset tetap diakui pada jumlah yang tercatat, jika kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkandung di dalam bagian yang akan mengalir ke Bank dan biaya dapat diukur secara handal.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk di gunakan sesuai maksud penggunaanya dan diukur dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, kecuali penyusutan atas bangunan yang di hitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Fixed assets (continued)

After initial measurement, fixed assets are measured using cost model, i.e. carried at its cost less any accumulated depreciation and any impairment losses. The cost of replacing a part of an item of fixed assets is recognized in the carrying amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow to the Bank and its cost can be measured reliably.

Depreciation of an asset starts when it is available for use and measured using the double declining balance method, except for depreciation of building which is calculated using the straight line method.

The estimated useful lives of the assets are as follows:

	Masa manfaat/ Tahun *useful life/ Year*	Persentase/ *Percentage*	
Gedung kantor	20	5%	*Buildings*
Rumah dinas	20	5%	*Official house*
Kendaraan	4 - 8	25% - 50%	*Vehicles*
Mesin-mesin	4 - 8	25% - 50%	*Machinery*
Alat komunikasi	4 - 8	25% - 50%	*Telecommunication*
Perabot kantor	4 - 8	25% - 50%	*Office furnitures*
Perabot rumah tangga kantor	4 - 8	25% - 50%	*Household furnitures office*
Hardware komputer	4 - 8	25% - 50%	*Computer hardware*

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the Derecognition of the asset is directly included in the profit or loss when the item is derecognized.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

The asset residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each year end and adjusted prospectively if necessary.

Metode penyusutan, masa manfaat dan nilai sisa dinilai pada setiap akhir tahun keuangan dan disesuaikan jika perlu.

Depreciation methods, useful lives and residual values are reassessed at each financial year end and adjusted if appropriate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)
Bila nilai tercatat aset tetap lebih besar daripada perkiraan jumlah terpulihkan, maka dicatat pada jumlah terpulihkan dan kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya.

Aset dalam penyelesaian
Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

Aset hak guna dan liabilitas sewa
PSAK 116 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi *lessee* dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi *lessee* , persyaratan untuk akuntansi *lessor* sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 116 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

a. Dampak definisi baru dari sewa
Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 116 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasian dan lessee memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Fixed assets (continued)
When the carrying amount of property and equipment is greater than it estimated recoverable amount, it is write down to its recoverable amount and the impairment losses are recognized in profit or loss.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs.

Construction In progress
The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

Right-of-use assets and lease liabilities
PSAK 116 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of PSAK 116 on the consolidated financial statements is described below.

a. Impact of the new definition of a lease
The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 116 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in PSAK 30, which are risk and reward concept.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

b. Dampak pada akuntansi sewa
Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 236 Penurunan nilai aset.

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

b. Impact on lessee accounting
The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and lowvalue asset leases. The Bank recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Bank recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-ofuse assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with PSAK 236.

On the initial of lease date, the Bank recognized lease liabilities which measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that depends on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not depends on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

o. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)
Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 116 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK 116 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

a. Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;

b. Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan

c. Memisahkan jumlah pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Bank mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Bank menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Fixed assets, right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)
In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by PSAK 116 will be treated the same as operating leases in PSAK 30. The Bank will recognized these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of PSAK 116 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

a. Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the consolidated statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;

b. Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and

c. Separates the total amount of cash paid within operating activities) in the consolidated statement of cash flows.

p. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Bank assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Bank shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Bank determines the recoverable amount of the asset's cash generating unit.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas.

Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

q. Aset lain-lain

Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, tagihan transaksi ATM, biaya dibayar di muka, uang muka operasional, tagihan kepada pihak ketiga, aset pengampunan pajak, persediaan dan perlengkapan kantor, uang muka pajak, tagihan lain, uang jaminan, persekot, penampungan selisih kas teller operasional dan lain- lain.

r. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah pemindah bukuan, baik dari nasabah maupun dari bank lain.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Lihat catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

s. Simpanan nasabah

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Impairment of non-financial assets (continued)

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit.

Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured.

If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognised immediately in profit or loss.

An impairment loss recognised in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

q. Other assets

Other assets include Interests receivable, ATM transaction receivables, prepaid expenses, operational advances, third parties receivable, tax amnesty assets, inventories and office supplies, tax advances, other bills, security deposit, advance payments, operational teller cash difference storace and others.

r. Liabilities due immediately

Liabilities due Immediately are recorded when the liabilities or upon receipt of transfer orders from customer or other banks.

Liabilities due immediately are stated at amortized cost.

Refer to note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

s. Deposits from customers

Demand deposits are deposit from customers that may be used as instrument of payment and can be withdrawn every time.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

s. Simpanan nasabah (lanjutan)

Termasuk di dalam giro adalah giro *wadiah*. Giro *wadiah* dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui efek dan bilyet giro. Giro *wadiah* serta tabungan *wadiah* mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan Bank. Simpanan nasabah dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan memenuhi persyaratan yang disepakati.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Lihat catatan 2e untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

t. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar jumlah liabilitas kepada bank lain tersebut, kecuali sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari total simpanan yang diterima.

Simpanan dari bank lain dinyatakan sesuai jumlah liabilitas terhadap nasabah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Deposits from customers (continued)

Included in demand deposits accounts are wadiah demand deposits. Wadiah demand deposits can be used as an instrument of payment and may be withdrawn at any time by check and order of payment. Demand deposits and savings wadiah may get bonus at the discretion of the Bank. Customer deposits in current accounts and savings wadiah are stated as Bank's liabilities.

Saving are deposit from customers and can be withdrawn over the counter under terms agreement.

Time deposits represent deposits of customers who may only be withdrawn at any given time in accordance with agreements between the customer and the Bank.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits and temporary syirkah fund that are stated as the Bank's and liabilities to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Refer to note 2e for the accounting policies of financial assets and liabilities.

t. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in current accounts, savings deposits, and time deposits. Deposits from other banks are stated at the amount of liabilities to other banks, except certificates of deposit are stated at nominal value net of unamortized interest.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah current accounts.

Deposits from other banks are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

Deposits from other banks are stated at Bank's liability to the customer.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

u. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Borrowings

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or another party to liability in accordance with the terms of repayment of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

v. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah; beban bunga dan beban syariah

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang dikenakan suku bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (*impairment*).

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

v. Interest income and sharia income; interest expense and sharia income

Conventional

Interest income and expense for all interestbearing financial instruments are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial assets and financial liabilities (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 days or more, or where reasonable doubt exists as to its timely collection, are generally classified as impaired loans.

If a financial asset or Bank of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

v. Pendapatan bunga dan pendapatan syariah; beban bunga dan beban syariah (lanjutan)

Syariah

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri dari marjin murabahah, pendapatan ijarah (sewa), bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta pendapatan qardh. Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil mudharabah dan beban bonus wadiah.

Marjin *murabahah* dan pendapatan *ijarah* diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi *qardh* diakui pada saat diterima.

Pendapatan operasi syariah utama terdiri dari pendapatan dari transaksi *murabahah* dan *istishna* pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pendapatan dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan lainnya. Pendapatan dari transaksi *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang. Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai *(cash basis)*. Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah*.

w. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Interest income and sharia income; interest expense and sharia income (continued)

Sharia

Interest income and expense include sharia income and expense. Sharia income represents profit from murabahah margin, lease income from ijarah, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and income from qardh. Sharia expenses consist of mudharabah profit sharing expenses and wadiah bonus expenses.

Murabahah margin and ijarah income are recognized over the period of the agreement based on accrual basis. Mudharabah and musyarakah income is recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah). Qardh income is recognized upon receipt.

The main sharia operating income consists of income from murabahah and istishna transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from ijarah muntahiyah bittamlik and other income. Income from istishna is recognized upon delivery of goods. Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Wadiah Certificates, placements with other Sharia banks, and revenue sharing from Sharia securities. Other main operating income is recognized upon collection.

Sharia expense represents revenue sharing for third party fund using the revenue sharing principle based on pre-determined nisbah in accordance with mudharabah mutlaqah principle.

w. Fees and commission income

Significant fees and commission income directly related to lending activities, or fees and commission income which relate to a specific period, are amortized over the term of the underlying contract using effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

w. Pendapatan provisi dan komisi (lanjutan)

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan pembiayaan diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

Biaya lainnya dan pendapatan komisi, termasuk biaya servis rekening, biaya manajemen investasi, komisi penjualan, biaya penempatan dan biaya sindikasi diakui sebagai layanan terkait dilakukan. Komitmen pinjaman tidak diharapkan untuk ditarik kembali dari pinjaman, biaya komitmen pinjaman diakui atas metode garis lurus selama periode komitmen.

Biaya lainnya dan biaya komisi terkait terutama untuk biaya transaksi dan pelayanan yang dibebankan sebagai layanan yang diterima.

x. Imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 219 "Imbalan Kerja", yang mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas imbalan kerja, baik jangka pendek (misalnya pembayaran cuti tahunan, pembayaran cuti sakit) dan jangka panjang (misalnya, pembayaran cuti besar, manfaat kesehatan pasca-kerja). Bank juga mengakui kewajiban dan beban pada saat karyawan telah memberikan jasa serta entitas telah menerima manfaat ekonomi dari jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, cuti berimbalan jangka panjang, uang pisah, dan uang penghargaan, diatur berdasarkan Peraturan Perusahaan yang telah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020.

Bank memiliki program pensiun imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih,seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (“Dana Pensiun”).

Biaya imbalan pasca-kerja yang diakui selama tahun berjalan terdiri dari biaya jasa kini, bunga atas liabilitas, keuntungan atau kerugian aktuaria dan biaya jasa lalu dan dikurangi dengan iuran pegawai dan hasil yang diharapkan dari aset program.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Fees and commission income (continued)

Fees and commission income related to financing activities are recognized as part of interest income.

Other fees and commission income, including account servicing fees, investment management fees, sales commission, placement fees and syndication fees are recognized as the related services performed. When a loan commitment is not expected to result in the draw-down of a loan, loan commitment fees are recognized on a straight-line basis over the commitment period.

Other fees and commission expense related mainly to transaction and service fees which are expense as the services are received.

x. Employee benefits

The Bank adopted PSAK 219 "Employee Benefits". which regulates the accounting and disclosure for employee benefits, both short-term (e.g., paid annual leave, paid sick leave) and long-term (e.g., long-service leave, post-employment medical benefits). The Bank also recognize liability and expense when an employee has provided service and the entity consumes economic benefit arising from the service.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they become payable to the employees based on accrual basis.

Long-term and post-employment benefit

Long-term and post-employment employee benefits, such as pension, long service leave, severance pay and service pay, are organized based on the Company Regulations which are in accordance with the Labor Law No.11 Year 2020.

Bank has defined benefit and defined contribution

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation. This plan is managed by Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (“Dana Pensiun”).

The post-employment benefits expense recognized during the current year consists of current service cost, interest on obligation, actuarial gains or losses and past service costs and reduced by employees’ contributions and expected return on plan assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

x. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja (lanjutan)

Bank diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Karena Undang-undang ketengakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung minimal imbalan pension, pada dasarnya program pension berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris yang independen dengan menggunakan *metode projected unit credit.*

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam Rupiah dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Employee benefits (continued)

Long-term and post-employment benefit (continued)

Bank is required to provide minimum pension benefits as stipulated in the Labor Law No. 11 Tahun 2020 which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Labor Law No. 11 Tahun 2020 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labor Law represent defined benefit plans.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in Rupiah in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Past-service costs are recognized immediately in profit or loss.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

x. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja (lanjutan)

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan dan uang pisah. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Sedangkan imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang samadengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan jubilee dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

Sehubungan dengan manfaat pensiun, Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya. Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank Nagari yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Pendirian Dana Pensiun Bank Nagari telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan melalui suratnya No.143/KM.17/1994 tanggal 18 Juni 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No.KEP- 394/KM.10/2010 tanggal 13 Mei 2011.

Program pensiun manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi.

Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar dan sisanya di tanggung oleh Bank.

Beban liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode *vesting*.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Employee benefits (continued)

Long-term and post-employment benefit (continued)

Bank also provides other post-employment benefits, such as service pay and separation pay. The service pay benefit vests when the employees reach their retirement age. The separation pay benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Other long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are charged and credited to profit or loss.

In relation to the pension benefits, the Bank has a defined benefit plan for all its permanent employees. The defined benefit plan is funded through payments to Dana Pensiun Bank Nagari as determined by periodic actuarial calculations. The establishment of Dana Pensiun Bank Nagari was approved by the Minister of Finance through the letter No.143/KM.17/1994 dated June 18, 1994 which was changed by the last Minister of Finance Decision Letter No.KEP- 394/KM.10/2010 dated May 13, 2011.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement which usually depends on one or more factors, such as age, years of service and total compensation.

The total employee contribution in this pension program is 5% of the basic salary and the remaining amount required to fund the plan is borne by the Bank.

Past service costs are recognized immediately in the statements of comprehensive income, unless the payments of the benefits are conditional on whether the employees remain working for a specified period of time (vesting period). In this case, the past service costs are amortized on a straight-line method over the vesting period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

x. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja (lanjutan)

Berdasarkan PSAK 219, liabilitas imbalan kerja merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung secara periodik oleh aktuaris independen dengan menggunakan *metode projected unit credit.*

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan acuan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan jangka waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi actuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode di mana beban tersebut terjadi.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan manfaat minimal tertentu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah program manfaat pasti. Perhitungan manfaat pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukkan bahwa perkiraan manfaat yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi manfaat pensiun minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karena itu, Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas manfaat pensiun yang disediakannya.

Pada tahun 2022, Bank mengalihkan imbalan manfaat lain berupa dana santunan kematian dan dana kompensasi pasca kerja dari perusahaan asuransi kepada Dana Pensiun PT Bank Nagari sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.SK/046/DIRT/12-2021 tentang Peraturan Dana Pensiun tanggal 6 Desember 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-72/NB.1/2021 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun PT Bank Nagari tanggal 27 Desember 2021.

Program manfaat jangka panjang lainnya

Di luar program pensiun manfaat pasti, Bank juga memberikan imbalan yang bersifat jangka panjang lainnya yaitu meliputi Tunjangan Hari Tua (THT), uang Penghargaan Masa Kerja (PMK), Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan Cuti Besar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Employee benefits (continued)

Long-term and post-employment benefit (continued)

Based on PSAK 219 the employee benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at the statements of financial position date less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated periodically by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

The Bank are required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with The Labor Law. Since The Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, pension plans under The Labor Law are in substance defined benefit plans. The calculation of the benefit obligation performed by the actuary shows that the expected benefits provided by the Bank's pension plan will exceed the minimum requirements of The Labor Law, therefore, no adjustment is needed in relation to the benefits under the Bank's pension plan.

In 2022, the Bank transferred other benefits which consists of death benefits and post-employment compensation funds from insurance company to Dana Pensiun PT Bank Nagari in accordance with Directors' Decree No.SK/046/DIRT/12-2021 regarding Pension Fund Regulations dated December 6, 2021 which has been approved with Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No.KEP-72/NB.1/2021 regarding Ratification of PT Bank Nagari Pension Fund Regulations December 27, 2021.

Other long-term benefit plan

Other than pension benefits, the Bank also provide a lump-sum benefit for Employees Reaching Pension Age (THT), Service Reward Benefits (PMK), Pension Preparation Period (MPP), and Annual Leave to its employees.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

x. Imbalan kerja (Lanjutan)

Program manfaat jangka panjang lainnya (lanjutan)

Seperti halnya manfaat pensiun, liabilitas dan beban pendanaan THT, PMK, MPP dan Cuti Besar dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

y. Perpajakan

Bank menerapkan PSAK 212 "Pajak Penghasilan".

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui menggunakan metode posisi keuangan untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum digunakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Employee benefits (Continued)

Other long-term benefit plan (continued)

Similar to pension benefits, THT, PMK, MPP and Annual Leave liabilities and expenses are calculated by independent actuaries using the projected unit credit method.

y. Taxation

The Bank applied PSAK 212 "Accounting for Income Tax".

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized, using the statement of financial position method, for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Deferred Income Tax Benefit (Expense)" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

z. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

Bank mengklasifikasikan instrumen modal sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi ketentuan kontrak dari instrumen. Saham Bank diklasifikasikan sebagai ekuitas ketika tidak ada liabilitas kontrak untuk mentransfer kas atau aset keuangan lainnya.

aa. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ab. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

ac. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadinya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui namun diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

ad. Laba per saham

Bank menerapkan PSAK 233 "Laba per Saham".

Laba operasional per saham dasar dihitung dengan membagi laba operasional dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Bank tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Oleh karena itu laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi komprehensif.

ae. Informasi segmen usaha

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Share capital

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

The Bank classifies capital instruments as financial liabilities or equity instruments in accordance with the substance of the contractual terms of the instruments. The Bank's shares are classified as equity when there is no contractual obligation to transfer cash or other financial assets.

aa. Dividend

Dividends distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

ab. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

ac. Contingency asset and liabilities

Contingent liabilities are not recognized in the financial statement but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

ad. Earnings per share

The Bank adopted PSAK 233 "Earning per Share".

Operating profit per share is calculated by dividing operating profit by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

The Bank has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025 and 2024, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the statements of comprehensive income.

ae. Business segment information

Segment information is disclosed to enable users of financial statement to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank are involved in and the economic environment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan)

ae. Informasi segmen usaha (lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
2. Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
3. Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Business segment information (continued)

An operating segment is a component of an entity:

1. *That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);*
2. *Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and*
3. *For which discrete financial information is available.*

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

- Usaha yang berkelanjutan
  Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memilki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

3. USE THE CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

The preparation of the financial statement requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses , assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgement

The following judgments are made by management in the process of applying the accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

- *Going concern*
  The Bank's management has assessed the Bank's ability to continue as a going concern and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition to that, management is not aware of any material uncertainty that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements have been prepared on going concern basis.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

- Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
  Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti diungkapkan pada catatan 2.e

- Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar.
  Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi pada apakah aset keuangan yang dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length* .

- Kontinjensi
  Ketika Bank sedang terlibat dalam proses hukum, perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

- Penilaian mata uang fungsional
  PSAK 221 mengharuskan manajemen untuk menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling mewakili dampak ekonomi dari suatu transaksi, kejadian dan kondisi-kondisi yang relevan terhadap entitas. Dalam membuat pertimbangan tersebut, Bank dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  a. Mata uang yang mempengaruhi harga jual atas instrumen keuangan dan jasa-jasa lainnya (biasanya dari mata uang atas harga jual instrumen keuangan dan jasa-jasa yang telah diselesaikan);
  b. Mata uang atas dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan; dan
  c. Mata uang atas yang biasa diterima dari aktivitas operasi.

3. USE THE CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Judgement (continued)

- *Classification of financial assets and financial liabilities*
  The Bank determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the accounting policies disclosed in note 2.e.

- *Financial assets not quoted in an active market.*
  The Bank classify financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

- *Contingency*
  When the Bank are currently involved in legal proceedings, the estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.

- *Assessment of functional currency*
  PSAK 221 requires management to use its judgment to determine the entity's functional currency such that it most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions that are relevant to the entity. In making this judgment, the Bank considers the following:

  a. The currency that mainly influences sales prices for financial instruments and services (this will often be the currency in which sales prices for its financial instruments and services are denominated and settled);
  b. The currency in which funds from financing activities are generated; and
  c. The currency in which receipts from operating activities are usually retained.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi dan estimasi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Penurunan nilai instrumen keuangan

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya diamortisasi berdasarkan PSAK 109 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK 109 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai, penilaian manajemen berikut diperlukan:

i. Penentuan apakah aset mengalami penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu seperti, antara lain, kesulitan keuangan debitur, penurunan kualitas kredit; dan
ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang mencerminkan:
   a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi kemungkinan dari berbagai hasil;
   b. Nilai waktu dari uang; dan
   c. Informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada tanggal pelaporan tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Penghitungan kerugian kredit ekspektasian Bank berdasarkan PSAK 109 adalah keluaran dari model kompleks dengan sejumlah asumsi mendasar mengenai pilihan input variabel dan saling ketergantungannya. Elemen-elemen dari model kerugian kredit ekspektasian yang dianggap sebagai pertimbangan dan estimasi akuntansi meliputi:

3. USE THE CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Estimates and assumption

The key estimates and assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based their assumptions and estimates on parameters available when the financial statement were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Impairment losses on financial instruments

The Bank review their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortised cost under PSAK 109 which required to recognise the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. PSAK 109 incorporates forward-looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation.

In carrying out the impairment review, the following management's judgements are required:

i. Determination whether the assets is impaired based on certain indicators such as, amongst others, financial difficulties of the debtor's, deterioration of the credit quality of the debtor's; and
ii. Determination of expected credit life that reflect:
   a. An unbiased and probability-weighted amount that is determined by evaluating a range of possible outcomes;
   b. The time value of money; and
   c. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Bank's expected credit loss calculations under PSAK 109 are outputs of complex models with a number of underlying assumptions regarding the choice of variable inputs and their interdependencies. Elements of the expected credit loss models that are considered accounting judgements and estimates include:

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Penurunan nilai instrumen keuangan (lanjutan)

a. Model penilaian kredit internal, yang menetapkan *probability of default* untuk tingkat individual;
b. Kriteria penilaian jika ada peningkatan risiko kredit yang signifikan dan oleh karena itu cadangan untuk aset keuangan harus diukur berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur dan penilaian kualitatif;
c. Pengembangan model kerugian kredit ekspektasian, termasuk berbagai formula dan pilihan input;
d. Penentuan asosiasi antara skenario makro ekonomi dan, input ekonomi, seperti produk domestik bruto (PDB) dan nilai agunan, dan pengaruhnya terhadap *probability of defaults*, *exposure at defaults* dan *loss given defaults*; dan
e. Pemilihan skenario *forward-looking* untuk makroekonomi dan bobot probabilitasnya, untuk mendapatkan input ekonomi ke dalam model kerugian kredit ekspektasian.

3. USE THE CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Impairment losses on financial instruments (continued)

a. Internal credit grading model, which assigns PDs to the individual grades;
b. Criteria for assessing if there has been a significant increase in credit risk and so allowances for financial assets should be measured on a life time expected credit loss basis and the qualitative assessment;
c. Development of expected credit loss models, including the various formulas and the choice of inputs;
d. Determination of associations between macroeconomic scenarios and, economic inputs, such as gross domestic product (GDP) and collateral values and the effect on probability of defaults, exposure at defaults and loss given defaults; and
e. Selection of forward-looking macroeconomic scenarios and their probability weightings, to derive the economic inputs into the expected credit loss models.

Imbalan jangka panjang dan pasca kerja

Program-program imbalan jangka panjang dan pasca kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Long term and post-employment benefits

Long term and post employee benefit programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increase rate, mortality rate, resignation rates and others.

Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

Revaluasi atas tanah

Bank menggunakan spesialis penilai independen untuk menilai nilai wajar atas tanah dan bangunan. Tanah dinilai berdasarkan referensi atas bukti berdasarkan pasar, menggunakan nilai yang dapat diukur setelah disesuaikan dengan faktor pasar spesifik seperti lokasi dan kondisi dari tanah.

Revaluation of land

The Bank engaged an independent valuation specialist to assess fair value for revalued land and building. Lands were valued by reference to market-based evidence, using comparable prices adjusted for specific market factors such as location and condition of the land.

Penyusutan dan estimasi umur manfaat aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda, kecuali penyusutan atas bangunan yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Depreciation and estimated useful life of fixed assets

The cost of fixed assets is depreciated using the double declining balance method, except for depreciation of building which is calculated using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets. The Bank's management estimates the economic useful lives of property and equipment between 4 (four) to 20 (twenty) years.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan *(recoverable)* pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3. USE THE CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognised for over the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics.

4. KAS / *4. CASH*

	2025	2024	
Rupiah	557.157.269.524	523.120.476.567	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	241.370.625	44.663.625	*United States Dollar*
Euro Eropa	70.555.077	114.960.703	*European Euro*
Dolar Australia	6.914.389	3.604.864	*Australian Dollar*
Riyal Saudi Arabia	5.257.244	6.210.874	*Saudi Arabian Riyal*
Dolar Singapura	1.594.701	568.540	*Singapore Dollar*
Yen Jepang	745.500	7.315.130	*Japanese Yen*
Ringgit Malaysia	472.438	658.408	*Malaysian Ringgit*
Sub jumlah	326.909.974	177.982.144	*Sub total*
Jumlah	**557.484.179.498**	**523.298.458.711**	***Total***

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sejumlah Rp188.145.650.000 dan Rp178.389.659.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Rupiah balance includes cash in ATM's (Automatic Teller Machine) of Rp188,145,650,000 and Rp178,389,659,000 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	2025	2024	
Rupiah	584.883.561.895	852.795.322.248	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	213.690.125	249.311.550	*United States Dollar*
Jumlah	**585.097.252.020**	**853.044.633.798**	***Total***

6. GIRO PADA BANK LAIN / *6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan bank / *a. Based on currency, type and counterparty bank*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.834.967.915	8.228.618.943	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	172.624.862	165.806.542	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Tbk	137.614.911	137.407.400	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Bali	31.873.540	32.113.540	*PT Bank Pembangunan Daerah Bali*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	27.368.803	29.968.803	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	25.320.870	25.257.653	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Aceh Syariah	19.541.416	19.541.416	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	9.798.972	9.908.972	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.378.443	3.678.443	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	512.557	512.557	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
Sub jumlah	3.263.002.289	8.652.814.269	*Sub total*

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan bank (lanjutan)

a. Based on currency, type and counterparty bank (continued)

	2025	2024	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Dolar Amerika Serikat			***United States Dollar***
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.505.897.239	4.022.369.371	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.553.518.537	1.499.483.110	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	219.157.524	178.261.943	*PT Bank Central Asia Tbk*
Sub jumlah	5.278.573.300	5.700.114.424	*Sub total*
Jumlah	8.541.575.589	14.352.928.693	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.222.586)	(2.155.067)	*Allowances for impairment losses*
Jumlah - bersih	**8.539.353.003**	**14.350.773.626**	***Total - net***

b. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh giro pada bank lain merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

b. By related party and third party

As of December 31, 2025 and 2024, current accounts with other banks are all transactions with third parties.

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai giro pada bank lain secara individual berdasarkan bukti objektif adanya penurunan nilai.

Bank assessed impairment in current accounts with other banks individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025					
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	14.187.122.151	-	-	165.806.542	14.352.928.693	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	(5.818.171.424)	-	-	6.818.320	(5.811.353.104)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**8.368.950.727**	**-**	**-**	**172.624.862**	**8.541.575.589**	***Ending balance***

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	2024					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	14.989.889.637	-	-	38.003.044	15.027.892.681	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	(802.767.486)	-	-	127.803.498	(674.963.988)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**14.187.122.151**	**-**	**-**	**165.806.542**	**14.352.928.693**	***Ending balance***

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2025					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	(1.775.037)	-	-	(380.030)	(2.155.067)	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	(67.519)	-	-	-	(67.519)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**(1.842.556)**	**-**	**-**	(380.030)	**(2.222.586)**	***Ending balance***

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

c. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

	2 0 2 4					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	(8.096.166)	-	-	(380.030)	(8.476.196)	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	6.321.129	-	-	-	6.321.129	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**(1.775.037)**	-	-	(380.030)	**(2.155.067)**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penempatan pada bank lain telah memadai untuk diakui pada 31 Desember 2025 dan 2024.

Management believes that allowance is sufficient for impairment losses on placement with other banks to be recognized as at December 31, 2025 and 2024.

d. Kisaran suku bunga

d. Range interest rates

	Rupiah/ *Rupiah*	**Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar***	
2 0 2 5	0,00% - 1,00%	0,00% - 0,00%	*2 0 2 5*
2 0 2 4	0,00% - 1,90%	0,00% - 0,00%	*2 0 2 4*

Pendapatan jasa giro konvensional yang diterima dari giro pada bank lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp97.430.906 dan Rp15.579.036.119.

Interest income received conventional from current account with other banks for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rpp97,430,906 dan Rp15,579,036,119.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang, jenis dan bank

a. Based on currency, type and counterparty bank

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Bank Indonesia			***Bank Indonesia***
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)	1.121.583.402.624	874.927.104.594	*Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI)*
Sub jumlah	1.121.583.402.624	874.927.104.594	*Sub total*
Bank Umum Konvensional / Syariah			***Conventional / Sharia Bank***
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")			*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	100.000.000.000	-	*PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	80.000.000.000	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	75.000.000.000	-	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	70.000.000.000	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Sub Jumlah	325.000.000.000	-	*Sub Total*
Tabungan			*Savings accounts*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	50.000	50.000	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Sub Jumlah	50.000	50.000	*Sub Total*
Jumlah	**1.446.583.452.624**	**874.927.154.594**	***Total***

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan transaksi dengan mata uang Rupiah.

All placements at Bank Indonesia and other banks are transactions denominated in Rupiah.

b. Berdasarkan hubungan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan pada pihak ketiga.

b. Based on relationship

As of December 31, 2025 and 2024, the placements with Bank Indonesia and other banks are all with third parties.

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

Bank assessed impairment in placements with Bank Indonesia and other banks individually based on whether an objective evidence of impairment exist.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) / ***7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)***

c. Nilai tercatat bruto / ***c. Gross carrying amount***

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	874.927.154.594	-	-	-	874.927.154.594	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	246.656.298.030	-	-	325.000.000.000	571.656.298.030	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**1.121.583.452.624**	**-**	**-**	**325.000.000.000**	**1.446.583.452.624**	***Ending balance***

	2024					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	2.693.753.558.200	-	-	-	2.693.753.558.200	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	(1.818.826.403.606)	-	-	-	(1.818.826.403.606)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**874.927.154.594**	**-**	**-**	**-**	**874.927.154.594**	***Ending balance***

d. Penempatan pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

d. Placements with other banks pledged as collateral

There were no placements with other banks pledged as collateral for the years ended December 31, 2025 and 2024.

e. Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 memiliki jatuh tempo sampai dengan satu bulan.

e. Classification of placement's period by residual period to maturity date

All placements at Bank Indonesia and other banks on December 31, 2025 and 2024 have maturities of up to one month.

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan) / *7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)*

f. Tingkat suku bunga/ bagi hasil per tahun / ***f. Annual interest rates/ profit sharing***

	2025	2024	
Rupiah	0% - 4,89%	0% - 5,25%	*Rupiah*

8. EFEK - EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI / *8. MARKETABLE SECURITIES FOR INVESTMENT PURPOSE*

a. Berdasarkan jenis dan mata uang / ***a. Based on type and currencies***

	2025		
	Nilai nominal/ ***Nominal value***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***	
Biaya perolehan diamortisasi			***Amortized cost***
Rupiah			***Rupiah***
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	742.020.000.000	725.324.785.491	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Sukuk Bank Indonesia	671.010.000.000	671.010.000.000	*Bank Indonesia Sukuk*
Surat Utang Negara	510.000.000.000	510.271.961.232	*Government Debenture Debt*
Surat Berharga Syariah Negara	75.000.000.000	74.848.718.394	*Sharia Government Securities*
Jumlah	**1.998.030.000.000**	**1.981.455.465.117**	***Total***

	2024		
	Nilai nominal/ ***Nominal value***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***	
Biaya perolehan diamortisasi			***Amortized cost***
Rupiah			***Rupiah***
Surat Berharga Syariah Negara	1.517.783.000.000	1.517.783.000.000	*Sharia Government Securities*
Surat Utang Negara	1.074.580.000.000	1.069.419.090.611	*Government Debenture Debt*
Sukuk Bank Indonesia	773.578.000.000	753.623.569.225	*Bank Indonesia Sukuk*
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	660.000.000.000	662.823.704.472	*Bank Indonesia Rupiah Securities*
Jumlah	**4.025.941.000.000**	**4.003.649.364.308**	***Total***

b. Berdasarkan hubungan / ***b. Based on relationship***

	2025	2024	
Pihak ketiga			***Third parties***
Bank Indonesia	1.396.334.785.491	2.271.406.569.225	*Bank Indonesia*
Obligasi Pemerintah	585.120.679.626	1.732.242.795.083	*Government Bonds*
Jumlah	**1.981.455.465.117**	**4.003.649.364.308**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh surat berharga merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

As of December 31, 2025 and 2024, all marketable securities represent transactions with third parties.

c. Berdasarkan penerbit / ***c. Based on issuer***

	2025	2024	
Biaya perolehan diamortisasi			***Amortized cost***
Bank Indonesia			***Bank Indonesia***
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia	725.324.785.491	753.623.569.225	*Sekuritas Rupiah Bank Indonesia*
Sukuk Bank Indonesia	671.010.000.000	1.517.783.000.000	*Bank Indonesia Sukuk*
Sub jumlah	1.396.334.785.491	2.271.406.569.225	*Sub total*

8. EFEK - EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES FOR INVESTMENT PURPOSE (continued)

c. Berdasarkan penerbit (lanjutan

c. Based on issuer (continued)

	2025	2024	
Obligasi Pemerintah			***Government Bonds***
Rupiah			***Rupiah***
FR 0086	410.070.707.318	410.250.583.991	*FR 0086*
FR 0084	100.201.253.914	101.842.008.880	*FR 0084*
PBS 032	74.848.718.394	74.551.817.412	*PBS 032*
PBS 017	-	646.619.467.325	*PBS 017*
PBS 036	-	348.247.805.874	*PBS 036*
FR 0081	-	150.731.111.601	*FR 0081*
Sub jumlah	585.120.679.626	1.732.242.795.083	*Sub total*
Jumlah	**1.981.455.465.117**	**4.003.649.364.308**	***Total***

d. Nilai tercatat bruto

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

d. Gross carrying amount

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	2025					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	2.485.866.364.308	-	-	1.517.783.000.000	4.003.649.364.308	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eskposur dan pengukuran	(1.175.420.899.191)	-	-	(846.773.000.000)	(2.022.193.899.191)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**1.310.445.465.117**	-	-	**671.010.000.000**	**1.981.455.465.117**	***Ending balance***

8. EFEK - EFEK UNTUK TUJUAN INVESTASI (lanjutan)

8. MARKETABLE SECURITIES FOR INVESTMENT PURPOSE (continued)

d. Nilai tercatat bruto (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Gross carrying amount (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

	2024					
	Stage 1	*Stage* 2	*Stage* 3	Syariah/ *Sharia*	Jumlah/ *Total*	
Saldo awal	2.144.991.603.533	-	-	399.998.000.000	2.544.989.603.533	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	340.874.760.775	-	-	1.117.785.000.000	1.458.659.760.775	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**2.485.866.364.308**	**-**	**-**	**1.517.783.000.000**	**4.003.649.364.308**	***Ending balance***

e. Tingkat suku bunga per tahun

e. Annual interest rates

	2025	2024	
Suku Bunga:			*Interest Rates:*
Rupiah	4,60% - 7,28%	4,88% - 7,50%	*Rupiah*

f. Klasifikasi surat berharga berdasarkan sisa umur

f. Classification of owned securities until maturity date

	2025	2024	
Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	431.208.733.995	968.455.755.288	*1 month or less*
1 - 3 bulan	192.751.253.914	287.783.000.000	*1 to 3 months*
3 - 12 bulan	1.357.495.477.208	2.160.766.198.737	*3 to 12 months*
12 - 60 bulan	-	586.644.410.283	*12 to 60 months*
Jumlah	**1.981.455.465.117**	**4.003.649.364.308**	***Total***

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Securities purchased under agreements to sell as of December 31, 2025 and 2024 consist of:

2 0 2 5

Nama pihak penjual/ ***Counterparty***	**Jenis efek/** ***Type of security***	**Nilai nominal/** ***Nominal amount***	**Tanggal mulai/** ***Value date***	**Tanggal jatuh tempo/** ***Maturity date***	**Nilai penjualan kembali/** ***Resale amount***	**Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/** ***Unamortized interest***	**Nilai tercatat/** ***Carrying value***
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	FR0086	800.000.000.000	24 Desember/ *December 24,* 2025	7 Januari/ *January 7,* 2026	795.864.574.833	633.198.180	795.231.376.653
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0091	400.000.000.000	31 Desember/ *December 31,* 2025	7 Januari/ *January 7,* 2026	402.696.964.032	325.758.943	402.371.205.089
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	FR0087	400.000.000.000	19 Desember/ *December 19,* 2025	2 Januari/ *January 2,* 2026	392.877.044.386	52.549.118	392.824.495.268
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	IDSR180926364S	400.000.000.000	30 Desember/ *December 30,* 2025	6 Januari/ *January 6,* 2026	386.542.276.384	257.488.868	386.284.787.516
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	FR0103	400.000.000.000	31 Desember/ *December 31,* 2025	6 Januari/ *January 6,* 2026	385.515.166.882	244.921.464	385.270.245.418
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	FR0096	200.000.000.000	29 Desember/ *December 29,* 2025	5 Januari/ *January 5,* 2026	200.895.727.840	107.065.878	200.788.661.962
PT Bank Nationalnobu Tbk	IDSR170726364S	200.000.000.000	30 Desember/ *December 30,* 2025	6 Januari/ *January 6,* 2026	194.923.498.957	129.845.128	194.793.653.829
PT Bank Nationalnobu Tbk	IDSR170726364S	150.000.000.000	30 Desember/ *December 30,* 2025	6 Januari/ *January 6,* 2026	146.192.624.218	97.383.845	146.095.240.373
Dipindahkan/ *Carried forward*		**2.950.000.000.000**			**2.905.507.877.532**	**1.848.211.424**	**2.903.659.666.108**

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL (continued)

2 0 2 5

Nama pihak penjual/ *Counterparty*	Jenis efek/ *Type of security*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Tanggal mulai/ *Value date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai penjualan kembali/ *Resale amount*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Pindahan/ *Brought forward*		**2.950.000.000.000**			**2.905.507.877.532**	**1.848.211.424**	**2.903.659.666.108**
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	FR0091	150.000.000.000	30 Desember/ *December 30,* 2025	6 Januari/ *January 6,* 2026	144.650.737.466	96.356.742	144.554.380.724
Bank Indonesia	VR0070	59.248.000.000	31 Desember/ *December 31,* 2025	7 Januari/ *January 7,* 2026	58.039.164.940	45.908.299	57.993.256.641
Jumlah/ *total*		**3.159.248.000.000**			**3.108.197.779.938**	**1.990.476.465**	**3.106.207.303.473**

2 0 2 4

Nama pihak penjual/ *Counterparty*	Jenis efek/ *Type of security*	Nilai nominal/ *Nominal amount*	Tanggal mulai/ *Value date*	Tanggal jatuh tempo/ *Maturity date*	Nilai penjualan kembali/ *Resale amount*	Pendapatan bunga yang belum diamortisasi/ *Unamortized interest*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
PT Bank Mega Tbk	FR0096	200.000.000.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	2 Januari/ *January 2,* 2025	190.114.933.750	32.469.648	190.082.464.102
PT Bank Mega Tbk	FR0096	200.000.000.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	2 Januari/ *January 2,* 2025	190.114.933.750	32.469.648	190.082.464.102
PT Bank Mega Tbk	FR0096	200.000.000.000	31 Desember/ *December 31,* 2024	2 Januari/ *January 2,* 2025	195.617.173.040	33.409.373	195.583.763.667
Jumlah/ *total*		**600.000.000.000**			**575.847.040.540**	**98.348.669**	**575.748.691.871**

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

9. MARKETABLE SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENTS TO RESELL (continued)

Tingkat suku bunga tetap tahunan:

Annual fixed interest rates:

	Rupiah %
Suku bunga kontrak:	
31 Desember 2025	4,65% - 4,82%
31 Desember 2024	6,15%

Contractual interest rates:
December 31, 2025
December 31, 2024

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN / *10. LOANS*

a. Berdasarkan jenis penggunaan / *a. Based on type of use*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Konsumsi	16.142.482.969.483	16.455.348.888.286	*Consumer*
Program Pemerintah	4.163.889.412.044	4.133.584.346.835	*Government Programs*
Modal kerja	2.740.026.585.374	2.801.242.496.332	*Working capital*
Sindikasi	936.616.469.438	882.411.456.647	*Syndicated*
Investasi	784.292.543.079	738.258.665.174	*Investment*
Karyawan	502.259.255.145	539.977.734.916	*Employee*
Jumlah	**25.269.567.234.563**	**25.550.823.588.190**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(539.507.650.751)	(509.853.185.186)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**24.730.059.583.812**	**25.040.970.403.004**	***Total - net***

b. Berdasarkan hubungan / *b. Based on relationship*

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Karyawan	31.847.882.987	24.607.281.382	*Employee*
Konsumsi	6.143.922.957	4.539.839.694	*Consumer*
Program Pemerintah	995.663.496	-	*Government Programs*
Investasi	311.290.307	-	*Investment*
Modal kerja	59.086.315	-	*Working capital*
Sub jumlah	39.357.846.062	29.147.121.076	*Sub total*
Pihak ketiga			***Third parties***
Konsumsi	16.136.339.046.526	16.450.809.048.592	*Consumer*
Program Pemerintah	4.162.893.748.548	4.133.584.346.835	*Government Programs*
Modal kerja	2.739.967.499.059	2.801.242.496.332	*Working capital*
Sindikasi	936.616.469.438	882.411.456.647	*Syndicated*
Investasi	783.981.252.772	738.258.665.174	*Investment*
Karyawan	470.411.372.158	515.370.453.534	*Employee*
Sub jumlah	25.230.209.388.501	25.521.676.467.114	*Sub total*
Jumlah	**25.269.567.234.563**	**25.550.823.588.190**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(539.507.650.751)	(509.853.185.186)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**24.730.059.583.812**	**25.040.970.403.004**	***Total - net***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) ***10. LOANS (continued)***

c. Berdasarkan sektor ekonomi ***c. Based on economic sector***

	2025	2024	
Bukan lapangan usaha lainnya	14.947.704.140.301	14.973.486.194.953	*None of the other business fields*
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	3.201.810.819.091	3.513.237.773.366	*Censtruction wholesale and retail, repair and maintenance of cars and motorcycles*
Rumah tangga	2.684.869.981.142	2.699.444.899.807	*Households*
Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.780.902.739.049	1.863.218.972.684	*Agriculture, forestry and fishing*
Industri pengolahan	894.254.212.740	934.865.943.227	*Manufacturing*
Konstruksi	603.655.552.468	478.513.878.535	*Construction*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	264.264.358.458	286.783.866.413	*Accommodation and food and beverages*
Pengangkutan dan pergudangan	211.690.851.011	212.349.467.538	*Transportation and warehousing*
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	206.326.444.547	181.613.539.555	*Leasing and operating lease, employment travel agency and business other support*
Aktivitas jasa lainnya	203.484.382.259	170.170.720.770	*Other service activities*
Pendidikan	71.976.534.911	66.429.070.862	*Education*
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	57.020.882.184	30.427.330.828	*Health and social activities*
Real estate	45.244.699.877	53.446.707.650	*Real estate*
Aktivitas keuangan dan asuransi	25.872.756.226	1.067.707.875	*Financial and insurance activities*
Pertambangan dan penggalian	25.505.823.512	28.338.480.528	*Mining and excavation*
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	20.139.326.036	22.382.892.407	*Professional, scientific and technical activities*
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	18.163.087.380	26.714.386.660	*Water management, wastewater management , waste management and recycling, and remediation activities*
Informasi dan komunikasi	5.463.596.917	6.303.303.194	*Information and communication*
Pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin	678.894.466	876.729.937	*Electricity, gas, steam/hot water and air cold*
Kesenian, hibur dan rekreasi	333.710.573	892.845.780	*Arts, entertainment and recreation*
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	204.441.415	258.875.621	*Household activities as entrepreneurs, activities that produce goods and services by households that are used to meet their own needs*
Jumlah	**25.269.567.234.563**	**25.550.823.588.190**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(539.507.650.751)	(509.853.185.186)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**24.730.059.583.812**	**25.040.970.403.004**	***Total - net***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

10. LOANS (continued)

c. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

Rincian kredit yang diberikan kepada sektor ekonomi "Bukan lapangan usaha lainnya dan aktivitas jasa lainnya" adalah sebagai berikut:

c. Based on economic sector (continued)

Details of credit to other economic sector "None of the other business fields and other service activities" are as follows:

	2025	2024	
Pokok			***Outstanding***
Kredit pegawai	13.588.500.903.637	13.903.204.971.549	*Employee loans*
Kredit jaminan deposito	22.185.705.771	22.796.966.403	*Deposit guarantee loans*
Kredit pemilikan rumah	16.159.715.091	16.109.078.352,00	*House financing*
Lain-lain	1.320.857.815.802	1.031.375.178.649	*Others*
Jumlah - bersih	**14.947.704.140.301**	**14.973.486.194.953**	***Total - net***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(31.163.521.273)	(25.230.968.975)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**14.916.540.619.028**	**14.948.255.225.978**	***Total - net***

Kredit pegawai terdiri dari Kredit Cicilan Uang (KCU) Umum dan KCU-Intern merupakan fasilitas kredit kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Otonom, PNS Non Otonom atau PNS Vertikal, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Perusahaan Swasta, kredit kepada anggota DPRD, kredit kepada Direksi dan/atau Komisaris, kredit kepada karyawan Bank dan kredit kepada para pensiunan yang berpenghasilan tetap untuk keperluan konsumer. Pembayaran kredit tersebut di atas sebagian besar dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan oleh Bank.

Employee loans consist of General Fund Installment Loans (KCU) and KCU-Intern, which is a credit facility for the Autonomous Government Employees (PNS), Non Autonomous PNS or Vertical PNS, Army/Police, Officer/State-owned or Regional-owned enterprises employees and private companies employees, loans to parliament members, credit to the Directors and/or the Commissioner, loans to employees of the Bank and loans to retirees who had fixed income for consumer purposes. Credit payments mentioned above are done through monthly payroll deductions by the Bank.

Kredit pemilikan rumah merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan yang berkaitan dengan rumah, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), toko, kios, rumah untuk disewakan (rumah sewa), rumah susun (rusun)/apartemen/flat.

House financing are credit facilities granted to individuals associated with the home, the home store (shop), home office, stores, kiosks, houses for rent, apartment/flat.

Kredit lain-lain merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha/badan hukum, yang pembayaran kewajibannya dijamin dengan dana deposito.

Other loans are loans granted to individuals or entities/legal entities, whose payment obligations are guaranteed by deposits.

d. Berdasarkan penilaian secara kolektif dan individual

d. Based on assessment as collective and individual

	2025	2024	
Nilai tercatat			***Carrying amount***
Individual	549.312.169.948	571.294.311.208	*Individual*
Kolektif	24.720.255.064.615	24.979.529.276.982	*Collective*
	25.269.567.234.563	25.550.823.588.190	
Cadangan kerugian penurunan nilai			***Allowance for impairment losses***
Individual	(271.323.089.095)	(285.176.346.914)	*Individual*
Kolektif	(268.184.561.656)	(224.676.838.272)	*Collective*
	(539.507.650.751)	(509.853.185.186)	
Jumlah - bersih	**24.730.059.583.812**	**25.040.970.403.004**	***Total - net***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***10. LOANS (lanjutan))***

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit) / ***e. Terms (based on agreements covering loan)***

	2025	2024	
Jangka waktu			***Maturity period***
Sampai dengan 1 tahun	1.062.523.251.840	981.296.896.262	*Up to 1 year*
1 - 2 tahun	297.896.512.158	349.756.312.115	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	7.392.517.471.800	7.554.250.501.679	*2- 5 years*
Lebih dari 5 tahun	16.516.629.998.765	16.665.519.878.134	*Over 5 years*
Jumlah	**25.269.567.234.563**	**25.550.823.588.190**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(539.507.650.751)	(509.853.185.186)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**24.730.059.583.812**	**25.040.970.403.004**	***Total - net***

f. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / ***f. Based on remaining period to maturity***

	2025	2024	
Jangka waktu			***Maturity period***
Sampai dengan 1 tahun	1.648.874.187.446	1.568.330.296.506	*Up to 1 year*
1 - 2 tahun	1.365.413.260.262	1.258.617.066.403	*1 - 2 years*
2 - 5 tahun	7.140.428.959.457	7.320.538.113.631	*2- 5 years*
Lebih dari 5 tahun	15.114.850.827.398	15.403.338.111.650	*Over 5 years*
Jumlah	**25.269.567.234.563**	**25.550.823.588.190**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(539.507.650.751)	(509.853.185.186)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**24.730.059.583.812**	**25.040.970.403.004**	***Total - net***

g. Tingkat suku bunga per tahun / ***g. Annual interest rates***

	%	
Suku bunga kontrak:		*Contractual interest rates:*
2025	10,81%	*2025*
2024	11,74%	*2024*

h. Pinjaman yang direstrukturisasi

Jumlah kredit yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah dibentuk penyisihan kerugian masing-masing sebesar Rp1.711.877.606.492 dan Rp1.596.272.146.955.

h. Restructured loans

Restructured loans and those categorized as of December 31, 2025 and 2024, with allowance had been established amounted Rp1,711,877,606,492 and Rp1,596,272,146,955. respectively.

i. Pinjaman sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit pembiayaan bersama yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain.

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan Bank lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp936.616.469.438 dan Rp882.411.456.647.

Persentase bagian Bank dalam pinjaman sindikasi, dimana Bank bertindak sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut:

i. Syndicated loans

Syndicated loan represents loan provided to borrowers under syndication agreements with other Banks.

Bank participation in syndicated loans with other banks for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp936.616.469.438 and Rp882,411,456,647, respectively.

Bank percentage share in syndicated loans, where Bank acts as the syndication member, are as follows:

	2025	2024	
% Partisipasi	1,39% - 30,30%	1,39% - 25,77%	*% Participation*

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan) / ***10. LOANS (lanjutan))***

j. Berdasarkan *stage*

Berikut adalah perubahan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

j. By stage

Below is movement of loans based on stages for the years ended December 31, 2025 and 2024:

	2025					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	20.881.308.078.404	201.455.409.025	428.208.300.373	4.039.851.800.388	25.550.823.588.190	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	46.096.439.737	(35.169.602.490)	(10.926.837.247)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(168.156.659.506)	168.332.359.761	(175.700.255)	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	(149.153.006.667)	(52.130.211.905)	201.283.218.572	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(165.056.313.665)	(21.931.312.268)	(186.987.625.933)	*Write-off*
Modifikasi arus kas kontraktual	63.238.393.883	5.766.100.878	12.751.990.152	-	81.756.484.913	*Modification of contractual cash flows*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(769.362.857.045)	(62.334.889.156)	41.394.466.696	614.278.066.898	(176.025.212.607)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**19.903.970.388.806**	**225.919.166.113**	**507.479.124.626**	**4.632.198.555.018**	**25.269.567.234.563**	***Ending balance***

	2024					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	20.140.335.397.599	137.292.606.906	348.802.220.796	3.405.590.898.271	24.032.021.123.572	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(189.447.723.004)	190.166.567.092	(718.844.088)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(169.769.303.936)	(32.288.555.169)	202.057.859.105	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	33.008.623.529	(31.294.976.869)	(1.713.646.660)	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(148.868.800.422)	(22.091.118.443)	(170.959.918.865)	*Write-off*
Modifikasi arus kas kontraktual	53.255.274.158	3.353.413.711	5.320.720.571	-	61.929.408.440	*Modification of contractual cash flows*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	1.013.925.810.058	(65.773.646.646)	23.328.791.071	656.352.020.560	1.627.832.975.043	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**20.881.308.078.404**	**201.455.409.025**	**428.208.300.373**	**4.039.851.800.388**	**25.550.823.588.190**	***Ending balance***

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

10. LOANS (lanjutan))

k. Cadangan kerugian penurunan nilai

Berikut adalah perubahan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

k. Allowance for impairment losses

Below is movement of allowance for impairment losses by stage for the years ended December 31, 2025 and 2024 was as follows:

	2025					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	94.197.578.595	31.117.545.353	344.346.646.811	40.191.414.427	509.853.185.186	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	11.244.962.078	(4.791.535.847)	(6.453.426.231)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(2.360.256.163)	2.423.281.314	(63.025.151)		-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	(2.094.436.566)	(10.577.506.270)	12.671.942.836		-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Penghapusbukuan	-	-	(165.056.313.665)	(21.931.312.268)	(186.987.625.933)	*Write-off*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(7.051.386.620)	12.310.971.309	162.767.199.034	48.615.307.775	216.642.091.498	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**93.936.461.324**	**30.482.755.859**	**348.213.023.634**	**66.875.409.934**	**539.507.650.751**	***Ending balance***

	2024					
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Saldo awal	233.233.778.903	22.564.645.191	309.865.629.296	39.674.389.489	605.338.442.879	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(7.049.531.449)	7.403.539.871	(354.008.422)	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(60.715.293.320)	(5.451.137.425)	66.166.430.745	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	5.694.130.747	(5.014.358.245)	(679.772.502)	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(76.965.506.286)	11.614.855.961	118.217.168.116	22.608.143.381	75.474.661.172	*Net change in exposure and remeasurement*
Penghapusbukuan	-	-	(148.868.800.422)	(22.091.118.443)	(170.959.918.865)	*Write-off*
Saldo akhir	**94.197.578.595**	**31.117.545.353**	**344.346.646.811**	**40.191.414.427**	**509.853.185.186**	***Ending balance***

l. Kredit dihapusbukukan

Kredit yang dihapusbukukan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp958.083.898.182 dan Rp835.746.886.664.

l. Written-off Loans

Loans written-off for the years ended December 31, 2025 and 2024 are Rp958,083,898,182 and Rp835,746,886,664 respectively.

10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (lanjutan)

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diberikan

Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan.

Rasio kredit usaha kecil, mikro dan menengah terhadap jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Nagari per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar 23,43% dan 26,52%.

Kredit yang diberikan kepada karyawan bank merupakan kredit yang umumnya digunakan untuk kredit kepemilikan rumah dengan jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 20 tahun. Tingkat bunga rata-rata kredit untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar 8% per tahun.

Kredit Program Pemerintah terdiri atas KUR, KPUM, FLPP, dan lain-lain. Saldo kredit program pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.162.893.748.548 dan Rp4.133.584.346.835.

Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan pengadaan barang-barang modalnya.

Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kredit perorangan lainnya.

10. LOANS (continued)

m. Other significant information relating to loans

Loans are secured by deposits, collateral bound by hypothecation or a power of attorney to sell and other collateral commonly accepted by banks.

The micro, small and medium scale loans to total loans ratio for Bank Nagari as of December 31, 2025 and 2024 was 23.43% and 26.52%, respectively

Credit given to bank employees is a credit that is generally used for home ownership loans with a period of between 1 year to 20 years. The average interest rate on credits for the years ended December 31, 2025 and 2024 was 8% per year.

Government Program Loans consist of KUR, KPUM, FLPP, and others. The outstanding balances of as of December 31, 2025 and 2024 is amounting to Rp4,162,893,748,548 and Rp4,133,584,346,835, respectively.

Working capital or investment loans are granted to the debtors for the purpose of working capital and procurement of capital goods.

Consumer credit consist of home loan, vehicle loan, and other personal loans.

n. Informasi syariah

1. Berdasarkan jenis akad

n. Sharia information

1. Based on type of agreements

	2025	2024	
Murabahah	3.632.580.974.938	3.226.689.451.034	*Murabahah*
Musyarakah	872.374.224.979	727.232.756.255	*Musyarakah*
Qardh	124.492.042.002	83.100.773.166	*Qardh*
Ijarah	2.751.313.100	2.828.819.933	*Ijarah*
Jumlah	**4.632.198.555.019**	**4.039.851.800.388**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(66.875.409.934)	(40.191.414.427)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**4.565.323.145.085**	**3.999.660.385.961**	***Total - net***

2. Kisaran tingkat margin rata-rata per tahun

2. Range of average profit margin rates per annum

	%	
2025	3,00% - 15,00%	*2025*
2024	3,00% - 16,00%	*2024*

11. PENYERTAAN SAHAM / *11. INVESTMENT IN SHARE*

		2025			
			Perubahan selama periode berjalan/ *Movement during the year*		
	% Kepemilikan/ *% Ownership*	Nilai tercatat awal/ *Initial carrying amount*	Penambahan/ *Additions*	Bagian atas rugi bersih/*Share of net loss*	Nilai tercatat akhir/ *Ending balance*
Jenis usaha perbankan/ *Banking type*:					
Metode ekuitas/ *Equity method*:					
PT BPR Mutiara Nagari*)	28,61	310.752.571	-	45.036.879	355.789.450
Metode biaya/ *Cost method*					
PT BPR Tilatang Kamang	2,14	107.000.000	34.000.000	-	141.000.000
PT BPR Batang Kapas	2,07	125.000.000	-	-	125.000.000
PT BPR Pariangan	1,80	112.000.000	-	-	112.000.000
PT BPR Gema Pesisir	2,53	107.000.000	-	-	107.000.000
PT BPR Suliki Gunung Emas	1,30	107.000.000	-	-	107.000.000
PT BPR Jam Gadang	0,79	75.000.000	-	-	75.000.000
PT BPR Pulau Punjung	1,15	62.000.000	-	-	62.000.000
PT BPR Lengayang	0,88	62.000.000	-	-	62.000.000
PT BPR Swadaya Anak Nagari	1,91	59.150.000	-	-	59.150.000
PT BPR Cincin Permata Andalas	0,91	57.000.000	-	-	57.000.000
PT BPR Harau	0,71	57.000.000	-	-	57.000.000
PT BPR Pembangunan Nagari	1,51	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR Khatulistiwa Bonjol	0,69	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR X Koto Singkarak	0,86	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR Solok Selatan	2,22	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR Dharma Nagari	1,52	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR LPN Panampung	0,80	26.000.000	-	-	26.000.000
PT BPR LPN Padang Kuning	1,34	25.600.000	-	-	25.600.000
PT BPR Ganto Nagari	0,45	22.800.000	-	-	22.800.000
PT BPR LPN Tarantang	0,43	15.000.000	-	-	15.000.000
PT BPR LPN Andalas Baruh Bukit	0,25	15.000.000	-	-	15.000.000
PT BPR Labuh Gunung	0,20	15.000.000	-	-	15.000.000
PT BPR LPN Sungai Rumbai	0,68	14.690.000	-	-	14.690.000
PT BPR LPN Taeh Baruah	0,27	19.270.000	-	-	19.270.000
PT BPR Gunung Talang	0,63	12.000.000	-	-	12.000.000
PT BPR LPN Talawi Sakato	0,76	10.110.000	-	-	10.110.000
PT BPR VII Koto	0,46	10.000.000	-	-	10.000.000
PT BPR Gudam (dahulu PT BPR LPN Padang Magek)	0,12	9.000.000	-	-	9.000.000
Sub Jumlah		**1.685.372.571**	**34.000.000**	**45.036.879**	**1.764.409.450**
Jenis usaha ventura/ *Venture type*					
PT Sarana Sumbar Ventura	3,40	955.681.000	-	-	955.681.000
Jumlah		**2.641.053.571**	**34.000.000**	**45.036.879**	**2.720.090.450**

Catatan:

*) Bank memiliki pengaruh signifikan, namun tidak memiliki pengendalian, sehingga Entitas tersebut tidak dikonsolidasi.

Noted:

**) The Bank has significant influence, but does not have any controls therefore the Entity is not consolidated.*

11. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) / *11. INVESTMENT IN SHARE (continued)*

		2024			
			Perubahan selama periode berjalan/ *Movement during the year*		
	% Kepemilikan/ *% Ownership*	Nilai tercatat awal/ *Initial carrying amount*	Penambahan/ *Additions*	Bagian atas rugi bersih/*Share of net loss*	Nilai tercatat akhir/ *Ending balance*
Jenis usaha perbankan/ *Banking type*:					
Metode ekuitas/ *Equity method*:					
PT BPR Mutiara Nagari*)	28,61	301.998.233	-	8.754.338	310.752.571
Metode biaya/ *Cost method*					
PT BPR Gema Pesisir	3,20	107.000.000	-	-	107.000.000
PT BPR Suliki Gunung Emas	3,78	107.000.000	-	-	107.000.000
PT BPR Tilatang Kamang	5,73	107.000.000	-	-	107.000.000
PT BPR Jam Gadang	7,75	75.000.000	-	-	75.000.000
PT BPR Batang Kapas	2,88	75.000.000	-	-	75.000.000
PT BPR Pulau Punjung	1,67	62.000.000	-	-	62.000.000
PT BPR Pariangan	2,05	62.000.000	-	-	62.000.000
PT BPR Lengayang	1,71	62.000.000	-	-	62.000.000
PT BPR Swadaya Anak Nagari	2,51	59.150.000	-	-	59.150.000
PT BPR Cincin Permata Andalas	1,66	57.000.000	-	-	57.000.000
PT BPR Harau	1,42	57.000.000	-	-	57.000.000
PT BPR Pembangunan Nagari	1,69	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR Khatulistiwa Bonjol	1,63	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR X Koto Singkarak	3,40	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR Batipuh	6,71	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR Batang Tarusan	6,19	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR Solok Selatan	2,31	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR Dharma Nagari	1,72	50.000.000	-	-	50.000.000
PT BPR LPN Panampung	2,02	26.000.000	-	-	26.000.000
PT BPR LPN Padang Kuning	2,98	25.600.000	-	-	25.600.000
PT BPR Ganto Nagari	4	22.800.000	-	-	22.800.000
PT BPR LPN Tarantang	0,51	15.000.000	-	-	15.000.000
PT BPR LPN Andalas Baruh Bukit	0,35	15.000.000	-	-	15.000.000
PT BPR Labuh Gunung	0,93	15.000.000	-	-	15.000.000
PT BPR LPN Sungai Rumbai	0,27	14.690.000	-	-	14.690.000
PT BPR LPN Taeh Baruah	0,63	19.270.000	-	-	19.270.000
PT BPR Gunung Talang	1,2	12.000.000	-	-	12.000.000
PT BPR LPN Talawi Sakato	1,01	10.110.000	-	-	10.110.000
PT BPR VII Koto	0,49	10.000.000	-	-	10.000.000
PT BPR LPN Padang Magek	2	9.000.000	-	-	9.000.000
Sub jumlah		**1.676.618.233**	**-**	**8.754.338**	**1.685.372.571**
Jenis usaha ventura/ *Venture type*					
PT Sarana Sumbar Ventura	3,4	955.681.000	-	-	955.681.000
Jumlah		**2.632.299.233**	**-**	**8.754.338**	**2.641.053.571**

Catatan:
*) Bank memiliki pengaruh signifikan, namun tidak memiliki pengendalian, sehingga Entitas tersebut tidak dikonsolidasi.

Noted:
**) The Bank has significant influence, but does not have any controls therefore the Entity is not consolidated.*

11. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Pada tahun 2025, Bank melakukan penambahan penyertaan saham pada BPR Tilatang Kamang sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta Rupiah).

Berdasarkan Akta No.146 tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Irdayusman, SH, telah dilakukan penggabungan usaha antara PT BPR Gudam, PT BPR Rangkiang Nagari, PT BPR Lumbung Pitih Nagari Padang Magek, PT BPR Luhak Nan Tuo, PT BPR Cahaya Intan Mandiri, dan PT BPR LPN Pandai Sikek, dengan PT BPR Gudam sebagai perseroan yang dipertahankan, dan penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.09-0057989 tanggal 2 Februari 2023.

Berdasarkan Akta No.15 tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat oleh Irdayusman, SH, telah dilakukan penggabungan usaha antara PT BPR Batipuh dengan PT BPR Pariangan, dengan PT BPR Pariangan sebagai perseroan yang dipertahankan, dan penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0008653 tanggal 8 Februari 2023.

Berdasarkan Akta No.3 tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat oleh Intania Selly, S.H., M.Kn., telah dilakukan penggabungan usaha antara PT BPR Batang Tarusan dengan PT BPR Batang Tarusan, dengan PT BPR Batang Kapas sebagai perseroan yang dipertahankan, dan penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No.AHU-0015793.AH.01.01 tanggal 11 Januari 2023.

11. INVESTMENT IN SHARE (continued)

In 2025, the Bank increased its equity investment in BPR Tilatang Kamang amounting to Rp34,000,000 (thirty-four million Rupiah).

Based on Deed No.146 dated January 31, 2023, drawn up by Notary Irdayusman, SH, a business merger was carried out involving PT BPR Gudam, PT BPR Rangkiang Nagari, PT BPR Lumbung Pitih Nagari Padang Magek, PT BPR Luhak Nan Tuo, PT BPR Cahaya Intan Mandiri, and PT BPR LPN Pandai Sikek, with PT BPR Gudam designated as the surviving entity, and the merger was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-AH.01.09-0057989 dated February 2, 2023.

Based on Deed No.15 dated 6 February, 2023, drawn up by Notary Irdayusman, SH, a business merger was carried out involving between PT BPR Batipuh and PT BPR Pariangan, with PT BPR Pariangan designated as the surviving entity, and the merger was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No.AHU-0008653 dated February 8, 2023.

Based on Deed No.3 dated 5 Januari, 2023, drawn up by Notary Intania Selly, S.H., M.Kn., a business merger was carried out involving between PT BPR Batang Tarusan and PT BPR Batang Kapas, with PT BPR Batang Kapas designated as the surviving entity, and the merger was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No.AHU-0015793.AH.01.01 dated January 11, 2023.

12. ASET TETAP

12. FIXED ASSETS

Aset tetap kepemilikan langsung:

Direct ownership of fixed assets:

	2025						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclasification***	**Penyesuaian/ *Adjustment***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Tanah	190.917.860.408	-	-	-	-	190.917.860.408	*Land*
Gedung kantor	215.306.484.349	202.543.514	-	17.500.000	-	215.526.527.863	*Buildings*
Rumah dinas	2.334.179.000	531.628.220	-	-	-	2.865.807.220	*Official house*
Kendaraan	13.309.696.380	105.505.500	17.173.000	-	-	13.398.028.880	*Vehicles*
Mesin-mesin	33.659.838.818	494.194.550	473.271.070	-	-	33.680.762.298	*Machinery*
Alat komunikasi	1.231.604.527	29.455.000	2.850.000	-	-	1.258.209.527	*Telecommunication*
Perabot kantor	53.664.032.492	1.363.935.640	510.002.947	7.600.000	-	54.525.565.185	*Office furnitures*
Perabot rumah tangga kantor	34.011.171.365	1.621.342.204	679.950.110	(25.100.000)	-	34.927.463.459	*Household furnitures office*
Hardware komputer	65.774.876.482	6.010.174.527	2.415.104.444	-	-	69.369.946.565	*Computer hardware*
Aset dalam penyelesaian	151.330.342	-	-	-	(31.968.000)	119.362.342	*Constructions in progress*
Jumlah	**610.361.074.163**	**10.358.779.155**	**4.098.351.571**	**-**	**(31.968.000)**	**616.589.533.747**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Gedung kantor	23.540.664.856	10.793.640.469	-	(4.507.614)	-	34.329.797.711	*Buildings*
Rumah dinas	233.417.912	121.139.188	-	-	-	354.557.100	*Official house*
Kendaraan	11.200.439.383	1.195.075.285	17.173.000	-	(3.658.731)	12.374.682.937	*Vehicles*
Mesin-mesin	30.397.850.025	2.325.479.715	473.271.015	-	(147.893.805)	32.102.164.920	*Machinery*
Alat telekomunikasi	1.176.956.766	48.180.738	2.849.997	-	(2.941.236)	1.219.346.271	*Telecommunication*
Perabot kantor	46.148.755.945	3.815.228.561	509.697.114	-	(23.062.766)	49.431.224.626	*Office furnitures*
Perabot rumah tangga kantor	27.288.236.075	3.734.503.512	672.081.171	4.507.614	(65.269.365)	30.289.896.665	*Household furnitures office*
Hardware komputer	57.854.534.389	6.261.501.176	2.412.743.844	-	(177.955.527)	61.525.336.194	*Computer hardware*
Jumlah	**197.840.855.351**	**28.294.748.644**	**4.087.816.141**	**-**	**(420.781.430)**	**221.627.006.424**	***Total***
Nilai buku bersih	**412.520.218.812**					**394.962.527.323**	***Net book value***

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

Aset tetap kepemilikan langsung: (lanjutan)

Direct ownership of fixed assets: (continued)

	2024						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Disposals***	**Reklasifikasi/ *Reclasification***	**Revaluasi/ *Revaluation***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Biaya perolehan							***Acquisition cost***
Tanah	190.917.860.408	-	-	-	-	190.917.860.408	*Land*
Gedung kantor	214.293.935.661	670.148.688	-	342.400.000	-	215.306.484.349	*Buildings*
Rumah dinas	2.334.179.000	-	-	-	-	2.334.179.000	*Official house*
Kendaraan	13.193.609.880	311.605.500	21.819.000	-	(173.700.000)	13.309.696.380	*Vehicles*
Mesin-mesin	34.781.773.438	353.017.080	1.474.951.700	-	-	33.659.838.818	*Machinery*
Alat komunikasi	1.288.573.877	24.889.150	81.858.500	-	-	1.231.604.527	*Telecommunication*
Perabot kantor	52.105.087.660	2.126.744.647	567.799.815	-	-	53.664.032.492	*Office furnitures*
Perabot rumah tangga kantor	33.940.916.847	1.884.929.942	1.814.675.424	-	-	34.011.171.365	*Household furnitures office*
Hardware komputer	63.570.019.461	3.995.000.158	1.777.822.537	-	(12.320.600)	65.774.876.482	*Computer hardware*
Aset dalam penyelesaian	222.082.342	271.648.000	-	(342.400.000)	-	151.330.342	*Constructions in progress*
Jumlah	**606.648.038.574**	**9.637.983.165**	**5.738.926.976**	**-**	**(186.020.600)**	**610.361.074.163**	***Total***
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Gedung kantor	12.605.760.836	10.934.904.020	-	-	-	23.540.664.856	*Buildings*
Rumah dinas	116.708.960	116.708.952	-	-	-	233.417.912	*Official house*
Kendaraan	10.566.323.150	746.403.974	21.818.997	-	(90.468.744)	11.200.439.383	*Vehicles*
Mesin-mesin	30.894.273.216	953.154.653	1.449.577.844	-	-	30.397.850.025	*Machinery*
Alat telekomunikasi	1.230.396.356	28.418.879	81.858.469	-	-	1.176.956.766	*Telecommunication*
Perabot kantor	44.327.018.938	2.385.718.816	563.981.809	-	-	46.148.755.945	*Office furnitures*
Perabot rumah tangga kantor	27.386.434.487	1.669.741.688	1.767.940.100	-	-	27.288.236.075	*Household furnitures office*
Hardware komputer	54.967.123.900	4.668.755.666	1.774.721.921	-	(6.623.256)	57.854.534.389	*Computer hardware*
Jumlah	**182.094.039.843**	**21.503.806.648**	**5.659.899.140**	**-**	**(97.092.000)**	**197.840.855.351**	***Total***
Nilai buku bersih	**424.553.998.731**					**412.520.218.812**	***Net book value***

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The details of constructions in progress as of December 31, 2025 are as follows:

Periode	**Persentase penyelesaian/** ***Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/** ***Accumulated cost***	**Estimasi penyelesaian/** ***Estimated completion***	***Period***
2 0 2 5				***2 0 2 5***
Bangunan				*Buildings*
Pembangunan gedung kantor				*Construction of office buildings*
Kantor cabang Padang Panjang	1%	47.020.000	Desember/ *December, 2026*	*Padang Panjang Branch*
Kantor cabang Painan	1%	20.000.000	Desember/ *December, 2026*	*Painan Branch*
Kantor cabang Payakumbuh	1%	52.342.342	Desember/ *December, 2026*	*Payakumbuh Branch*

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan bencana alam kepada PT Asuransi Bangun Askrida dan PT Jasa Raharja Putra dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp637.500.550.748 dan Rp647.252.744.988 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. PT Asuransi Bangun Askrida dan PT Jasa Raharja Putra bukan merupakan pihak berelasi dengan Bank.

Bank has insured their property (not including land rights) to cover possible losses against fire, theft and natural disasters to PT Asuransi Bangun Askrida and PT Jasa Raharja Putra with full insurance coverage as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp637.500.550.748 and Rp647,252,744,988, respectively. PT Asuransi Bangun Askrida and PT Jasa Raharja Putra is not a related party to the Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank mencatat revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh penilai independen yang laporannya bertanggal 16 Juni 2023, untuk aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp357.027.844.796, dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal 1 Januari 2023, dengan nilai revaluasi sebesar Rp402.805.830.000 dan selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp45.777.985.204.

As of December 31, 2023, the Bank revalued its fixed assets performed by an independent appraiser who report dated July 16, 2023, to fixed assets per December 31, 2022 by Rp357,027,844,796, that determined using fair value as of January 1, 2023, the revalued amount of the asset revaluation reserve Rp402,805,830,000 and fixed at Rp45,777,985,204.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan.

On December 31, 2025 and 2024, there are no fixed assets used as collateral.

Bedasarkan hasil penelahaan keadaan akun masing-masing jenis aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berpendapat bahwa tidak terjadi penurunan nilai atas aset tetap.

Based on the reviewed results of the state of the account each types of fixed assets on the date of December 31, 2025 and 2024, management believes that no impairment of fixed assets.

13. ASET TAKBERWUJUD / *13. INTANGIBLE ASSETS*

	2025				
	1 Januari/ January 1	**Penambahan/ *Additonal***	**Pengurangan/ *Deduction***	**31 Desember/ *December 31***	
Biaya perolehan					***Cost***
Perangkat lunak	22.374.733.804	322.300.000	-	22.697.033.804	*Software*
Jumlah	**22.374.733.804**	**322.300.000**	-	**22.697.033.804**	***Total***
Akumulasi amortisasi					***Accumulated amortization***
Perangkat lunak	21.125.372.064	507.857.633	-	21.633.229.697	*Software*
Jumlah	**21.125.372.064**	**507.857.633**	-	**21.633.229.697**	***Total***
Nilai buku	**1.249.361.740**			**1.063.804.107**	***Book value***

	2024					
	1 Januari/ *January 1*	**Penambahan/ *Additonal***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**31 Desember/ *December 31***	
Biaya perolehan						***Cost***
Perangkat lunak	21.925.033.804	449.700.000	-	-	22.374.733.804	*Software*
Jumlah	**21.925.033.804**	**449.700.000**	-	-	**22.374.733.804**	***Total***
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Perangkat lunak	20.407.350.620	718.021.444	-	-	21.125.372.064	*Software*
Jumlah	**20.407.350.620**	**718.021.444**	-	-	**21.125.372.064**	***Total***
Nilai buku	**1.517.683.184**				**1.249.361.740**	***Book value***

Tidak terdapat aset takberwujud yang dijaminkan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There are no intangible assets pledged by the Bank as of December 31, 2025 and 2024.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset takberwujud yang dimiliki oleh Bank.

Management believes that there is no indication of permanent impairment in the value of intangible assets of the Bank.

14. ASET HAK GUNA / *14. RIGHT OF USE ASSETS*

	2025					
	Bangunan/ ***Building***	**Mesin/** ***Machinery***	**Kendaraan/** ***Vehicles***	**Server/** ***Server***	**Jumlah/** ***Total***	
Aset hak guna						***Right -of-use assets***
Saldo awal	16.298.274.473	13.604.595.486	5.479.824.759	70.971.442.959	106.354.137.677	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	6.149.115.092	8.210.658.960	26.619.930.976	257.041.816	41.236.746.844	*Addition for the year*
Beban penyusutan selama tahun berjalan	(7.034.533.667)	(9.875.914.838)	(7.071.007.131)	(17.527.945.125)	(41.509.400.761)	*Depreciation change for the year*
Saldo akhir	**15.412.855.898**	**11.939.339.608**	**25.028.748.604**	**53.700.539.650**	**106.081.483.760**	***Ending balance***

	2024					
	Bangunan/ ***Building***	**Mesin/** ***Machinery***	**Kendaraan/** ***Vehicles***	**Server/** ***Server***	**Jumlah/** ***Total***	
Aset hak guna						***Right -of-use assets***
Saldo awal	14.818.138.349	12.880.293.014	9.533.490.382	-	37.231.921.745	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	8.701.586.439	10.246.323.551	6.497.865.597	87.438.593.345	112.884.368.932	*Addition for the year*
Beban penyusutan selama tahun berjalan	(7.214.274.899)	(9.522.021.079)	(10.551.531.220)	(16.467.150.386)	(43.754.977.584)	*Depreciation change for the year*
Penyesuaian tahun berjalan	(7.175.416)	-	-	-	(7.175.416)	*Adjustment for the year*
Saldo akhir	**16.298.274.473**	**13.604.595.486**	**5.479.824.759**	**70.971.442.959**	**106.354.137.677**	***Ending balance***

15. ASET LAIN-LAIN / *15. OTHER ASSETS*

	2025	**2024**	
Piutang bunga	131.267.377.604	134.697.883.553	*Interests receivable*
Tagihan kepada pihak ketiga	90.101.932.428	92.372.779.617,00	*Third parties receivable*
Biaya dibayar di muka	25.515.710.646	28.702.449.697	*Prepaid expenses*
Tagihan transaksi ATM	25.719.087.784	18.547.094.583	*ATM transaction receivables*
Uang muka operasional	18.007.520.402	14.656.544.035	*Operational advances*
Uang muka pajak	14.745.060.060	1.853.598.775	*Tax advances*
Persediaan dan perlengkapan kantor	6.308.516.623	6.058.782.622	*Inventories and office supplies*
Aset pengampunan pajak	4.882.516.096	4.882.516.096	*Tax amnesty assets*
Tagihan lain	3.303.640.777	2.899.958.922	*Other bills*
Persekot	2.634.821.511	1.909.626.086	*Advance payments*
Uang jaminan	2.208.306.114	2.283.134.639	*Security deposit*
Penampungan selisih kas teller operasional	347.423.892	270.103.785	*Operational Teller cash difference storace*
Kecurangan dalam penyelesaian	-	1.536.631.691	*Fraud in the completion*
Properti terbengkalai setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp6.930.960.000 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024	-	-	*Abandoned properties, net of allowance for impairment losses of Rp6,930,960,000 as of December 31, 2025 and 2024*
Lain-lain	14.185.536.345	7.403.537.099	*Other*
Jumlah	**339.227.450.282**	**318.074.641.200**	***Total***

15. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada Lembaga *Switching* yang terkait dengan transaksi pembayaran, transfer, tarik tunai, debit GPN dan QRIS yang dilakukan nasabah. Lembaga *Switching* berkewajiban melakukan *settlement* atas transaksi pada rekening tagihan ini.

15. OTHER ASSETS (continued)

Third parties receivables are receivables transaction to Switching Institutions related to payment, transfer, cash withdrawal, GPN debit, and QRIS transactions made by customers. Switching Institutions are obliged to make settlements for transactions on this billing account.

Piutang Bunga

Pendapatan yang masih akan diterima merupakan bunga yang akan diterima dari aset produktif. Rincian piutang bunga per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari:

Accrued Interest Income

Accrued interest incomes is accrued interest on earnings assets. Details of the interest receivable as of December 31, 2025 and 2024 consist of:

	2025	2024	
Bunga atas pinjaman yang diberikan	121.239.127.034	108.567.086.540	*Loans accrued interest*
Bunga atas surat berharga	9.259.760.000	25.346.597.500	*Marketable securities accrued interest*
Bunga pendapatan bagi hasil	767.341.141	774.811.161	*Profit-sharing accrued interest*
Bunga atas penempatan pada bank lain	1.149.429	9.388.352	*Placements with other banks accrued interest*
Jumlah	**131.267.377.604**	**134.697.883.553**	***Total***

16. LIABILITAS SEGERA

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

	2025	2024	
Titipan nasabah	233.901.894.746	226.354.707.445	*Other deposit to be paid*
Liabilitas transaksi ATM	62.166.296.434	48.770.007.407	*ATM transaction liabilities*
Titipan notaris	13.795.145.679	14.436.715.394	*Notary deposits*
Kiriman uang dari bank lain	11.293.170.665	8.075.036.808	*Money transfers from other banks*
Kiriman uang	8.452.022.887	10.311.486.720	*Money transfers*
Premi asuransi kredit	7.909.382.282	7.533.640.198	*Loan insurance premiums*
Bunga deposito jatuh tempo	3.618.199.002	3.510.121.019	*Matured deposit interest*
Liabilitas kepada Pemerintah	1.459.374.598	1.727.827.026	*Liabilities to the Government*
Jaminan *safe deposit box*	1.281.000.000	1.174.000.000	*Safe deposit box guarantee*
Titipan klaim asuransi	538.468.643	657.219.206	*Deposit insurance claims*
Lain - lain	19.159.580.154	12.922.817.331	*Others*
Jumlah	**363.574.535.090**	**335.473.578.554**	***Total***

17. SIMPANAN NASABAH

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. Based on type and currency

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Giro	2.516.318.630.049	1.772.964.161.519	*Current account*
Tabungan	7.293.117.686.180	7.235.408.065.278	*Savings*
Deposito berjangka	12.458.068.239.526	13.126.911.808.518	*Time deposits*
	22.267.504.555.755	22.135.284.035.315	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Tabungan	2.005.267.800	1.489.093.144	*Savings*
Deposito berjangka	1.923.628.000	1.918.202.100	*Time deposits*
	3.928.895.800	3.407.295.244	
Jumlah	**22.271.433.451.555**	**22.138.691.330.559**	***Total***

17. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Giro

Simpanan nasabah berdasarkan prinsip syariah termasuk di dalamnya adalah giro *wadiah* dan *mudharabah*, tabungan *wadiah* dan *mudhabah* tabungan *wadiah* dan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* merupakan simpanan *wadiah yad-dhamanah* dimana pemilik dana akan memperoleh pendapatan bonus.

Giro *wadiah* yang dikelola oleh Unit Usaha Syariah Bank pada tanggal 31.Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp87.544.430.990 dan Rp31.893.880.794.

Giro *mudharabah* yang dikelola oleh Unit Usaha Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, masing-masing sebesar Rp426.775.455.381 dan Rp210.445.441.960.

Tabungan

Tabungan *wadiah* yang dikelola oleh Unit Usaha syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp255.033.410.763 dan Rp162.205.619.936.

Tabungan *mudharabah* yang dikelola oleh Unit Usaha Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.656.827.804.489 dan Rp1.712.560.398.265.

Deposito berjangka

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan deposito dari pihak lain yang memberikan bagian dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, jumlah deposito berjangka *mudharabah* masing-masing sebesar Rp2.484.078.798.027 dan Rp2.621.635.529.635.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 deposito berjangka dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp5.608.000.000 dan Rp5.403.000.000 atau 0,08% dan 0,07% dari jumlah tabungan (Catatan 40).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Based on type and currency (continued)

Current account

Customer deposits based on sharia principles include wadiah and mudharabah demand deposits, wadiah and mudharabah savings, wadiah and mudharabah savings, and mudharabah deposits.

Wadhia demand deposits and wadhia savings are wadhia yad-dhamanah deposits where the owner of the funds will receive bonus income.

Wadhia demand deposits managed by the Bank's Sharia Business Unit as of December 31, 2025 and 2024, amounting to Rp87,544,430,990 and Rp31,893,880,794, respectively.

Mudharabah current accounts managed by the Bank's Sharia business unit as of December 31, 2025 and 2024, amounting to Rp426,775,455,381 and Rp210,445,441,960, respectively.

Savings account

Wadiah savings managed by the Bank's Sharia Business Unit as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp255,033,410,763 and Rp162,205,619,936, respectively.

Mudharabah savings managed by the Bank's Sharia Business Unit as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp1,656,827,804,489 and Rp1,712,560,398,265, respectively.

Time deposits

Mudharabah time deposits are deposits from other parties that provide a share of the income from the use of these funds at a predetermined and agreed ratio. As of December 31, 2025 and 2024, the total mudharabah time deposits amounted to Rp2,484,078,798,027 and Rp2,621,635,529,635, respectively.

As of December 31, 2025 and 2024, total time deposit from related parties were amounted to Rp5,608,000,000 and Rp5,403,000,000, respectively, or 0.08% and 0.07%, from total time deposits (Notes 40).

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, which was amended by the Government Regulation No. 3 dated October 13, 2008, the Indonesia Deposit Insurance Agency (LPS) was formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criteria.

17. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

Deposito (lanjutan)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank.

17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

a. Based on type and currency (continued)

Time deposits (continued)
Based on Government Regulation No. 66 Year 2008 dated October 13, 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by Indonesia Deposit Insurance Corporation, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 per customers per bank.

b. Berdasarkan hubungan / ***a. Based on relationship***

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	1.107.186.442.258	444.984.391.075	*Current account*
Tabungan	3.167.676.753	14.241.526.239	*Savings*
Deposito berjangka	5.608.000.000	5.403.000.000	*Time deposits*
	1.115.962.119.011	464.628.917.314	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Tabungan	-	15.419.654,00	*Savings*
Sub jumlah	1.115.962.119.011	464.644.336.968	*Sub total*
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			***Rupiah***
Giro	1.409.132.187.790	1.327.979.770.444	*Current account*
Tabungan	7.289.950.009.428	7.221.166.539.039	*Savings*
Deposito berjangka	12.452.460.239.526	13.121.508.808.518	*Time deposits*
	21.151.542.436.744	21.670.655.118.001	
Mata uang asing			***Foreign currency***
Tabungan	2.005.267.800	1.473.673.490	*Savings*
Deposito berjangka	1.923.628.000	1.918.202.100	*Time deposits*
	3.928.895.800	3.391.875.590	
Sub jumlah	21.155.471.332.544	21.674.046.993.591	*Sub total*
Jumlah	**22.271.433.451.555**	**22.138.691.330.559**	***Total***

c. Berdasarkan jenis produk / ***c. Based on product type***

	2025	2024	
Konvensional			***Conventional***
Giro swasta	2.428.774.199.058	1.741.070.280.725	*Current account private*
Tabungan			*Savings*
Sikoci	5.801.997.869.101	5.783.132.764.698	*Sikoci*
Simpeda	880.731.846.269	944.019.276.827	*Simpeda*
TabunganKu	339.218.821.204	326.543.104.014	*TabunganKu*
Tahari Mabrur	9.482.797.466	11.356.739.501	*Tahari Mabrur*
Simpel	8.658.209.177	9.639.653.446	*Simpel*
Sub jumlah	7.040.089.543.217	7.074.691.538.486	*Sub total*
Deposito berjangka	12.459.991.867.526	13.128.830.010.618	*Time deposits*
Dipindahkan	**21.928.855.609.801**	**21.944.591.829.829**	***Carried forward***

17. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) ***17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)***

c. Berdasarkan jenis produk (lanjutan) ***c. Based on product type (continued)***

	2025	2024	
Pindahan	**21.928.855.609.801**	**21.944.591.829.829**	***Brought forward***
Syariah			***Sharia***
Giro swasta	87.544.430.990	31.893.880.794	*Current account private*
Tabungan			*Savings*
Sikoci	215.225.135.778	128.504.543.015	*Sikoci*
TabunganKu	27.258.293.899	18.681.713.081	*TabunganKu*
Tahari Mabrur	11.340.294.510	6.138.378.221	*Tahari Mabrur*
Simpel IB	1.209.686.577	1.511.336.250	*Simpel IB*
Tabungan Khusus	-	7.369.649.369	*Tabungan Khusus*
Sub jumlah	255.033.410.764	162.205.619.936	*Sub total*
Jumlah	**22.271.433.451.555**	**22.138.691.330.559**	***Total***

d. Deposito berjangka berdasarkan waktu kontrak ***d. Time deposits by contractual period***

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
1 bulan	3.187.813.140.821	2.587.038.116.971	*1 month*
3 bulan	6.426.718.942.558	2.183.550.785.400	*3 months*
6 bulan	2.415.829.280.000	4.440.281.630.000	*6 months*
12 bulan	419.648.576.147	3.908.288.976.147	*12 months*
Di atas 12 bulan	8.058.300.000	7.752.300.000	*Over 12 months*
Sub jumlah	12.458.068.239.526	13.126.911.808.518	*Sub total*
Mata uang asing			***Foreign currency***
1 bulan	1.623.478.000	1.628.492.100	*1 months*
3 bulan	300.150.000	289.710.000	*3 months*
Sub jumlah	1.923.628.000	1.918.202.100	*Sub total*
Jumlah	**12.459.991.867.526**	**13.128.830.010.618**	***Total***

e. Deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo: ***e. Based on residual period until maturity date:***

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Sampai dengan 1 bulan	4.320.618.368.479	4.382.105.347.971	*Up to 1 month*
1 - 3 bulan	6.312.393.671.900	1.790.567.430.547	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	1.688.451.949.147	3.964.305.180.000	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	133.747.950.000	2.984.046.850.000	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	2.856.300.000	5.887.000.000	*Over 12 months*
Sub jumlah	12.458.068.239.526	13.126.911.808.518	*Sub total*
Mata uang asing			***Foreign currency***
Sampai dengan 1 bulan	1.840.253.000	1.918.202.100	*Up to 1 month*
1 - 3 bulan	83.375.000	-	*1 - 3 months*
Sub jumlah	1.923.628.000	1.918.202.100	*Sub total*
Total	**12.459.991.867.526**	**13.128.830.010.618**	***Jumlah***

17. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) / ***17. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)***

f. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / ***f. Deposits blocked and pledged as collateral***

	2025	2024	
Tabungan	1.006.673.810.903	1.049.911.814.118	*Savings*
Giro	166.356.028.966	142.279.189.891	*Current accounts*
Deposito	93.346.000.000	100.795.000.000	*Time deposits*
Jumlah	**1.266.375.839.869**	**1.292.986.004.009**	***Total***

Giro yang diblokir, yang umumnya digunakan untuk jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh Bank dan transaksi lainnya dengan Bank pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.000.000.000 dan Rp142.279.189.891.

Blocked current accounts, which are generally used for guarantees on loans provided by the Bank and other transactions with the Bank on December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp10,000,000,000 and Rp142,279,189,891, respectively.

Tabungan diblokir karena adanya program untuk produk tabungan tertentu, program bundling antara kartu kredit dengan produk tabungan tertentu, sebagai jaminan pelunasan KPR dan transaksi lainnya.

Savings were generally blocked because of program on certain saving accounts, the bundling program between the credit card and certain saving products, as the collaterals of housing loans and other transactions.

Pemblokiran deposito berjangka dilakukan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank dan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank serta transaksi lainnya. Deposito berjangka yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp49.604.000.000 dan Rp100.795.000.000.

The time deposits are blocked and pledged as collaterals to the to credit facilities extended by the Bank and bank guarantees issued by the Bank and other transactions. Time deposits blocked as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp49,604,000,000 and Rp100,795,000,000, respectively.

g. Kisaran tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / ***g. Range of annual interest rate and profit sharing***

	2025	2024	
Giro			***Current Accounts***
Rupiah	0,00% - 2,50%	0,00% - 1,00%	*Rupiah*
Syariah	0,00% - 2,50%	0,00% - 0,98%	*Sharia*
Tabungan			***Savings***
Rupiah	0,00% - 3,50%	0,00% - 4,00%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,00% - 0,75%	0,00% - 0,75%	*United States Dollar*
Syariah	0,00% - 7,15%	0,00% - 0,00%	*Sharia*
Deposito			***Time Deposits***
Rupiah	3,00% - 7,00%	3,50% - 7,50%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	0,75% - 1,00%	0,75% - 1,00%	*United States Dollar*

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

The average interest rates per annum on deposits with related parties are similar to those for third parties.

Simpanan dari nasabah syariah merupakan giro dan tabungan yang menggunakan akad wadiah yakni titipan dana pihak lain dimana Bank tidak diwajibkan untuk memberikan pendapatan bonus.

Deposits from customers-sharia is savings and current account that use contract wadiah of others party funds on which the Bank is not obliged to provide bonus income.

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN / *18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS*

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / *a. Range of annual interest rate and profit sharing*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga			*Third parties*
Tabungan Simpeda	135.408.141.477	109.651.434.992	*Savings*
Deposito berjangka	44.575.000.000	45.500.000.000	*Time deposits*
Giro	316.625.670	3.982.778.869	*Current accounts*
Jumlah	**180.299.767.147**	**159.134.213.861**	***Total***

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There were no deposits from other banks that were blocked and pledged as loans collateral as of December 31, 2025 and 2024.

b. Berdasarkan transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga / *b. Based on related parties and third parties*

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh simpanan dari bank lain merupakan transaksi dengan pihak ketiga.

As of December 31, 2025 and 2024, deposits from other banks are all with third parties.

c. Rincian deposito berjangka dan sertifikat deposito berdasarkan jangka waktu / *c. Details of time deposits, and certificates of deposits by term*

Berdasarkan jangka waktu: / *By maturity:*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	11.535.000.000	13.800.000.000	*≤ 1 month*
> 1 bulan sampai ≤ 3 bulan	20.100.000.000	23.800.000.000	*> 1 month to ≤ 3 months*
> 3 bulan sampai ≤ 6 bulan	12.000.000.000	7.300.000.000	*> 3 months to ≤ 6 months*
> 6 bulan sampai ≤ 12 bulan	940.000.000	600.000.000	*> 6 months to ≤ 12 months*
Jumlah	**44.575.000.000**	**45.500.000.000**	***Total***

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo: / *By remaining period to maturity:*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
≤ 1 bulan	22.535.000.000	18.300.000.000	*≤ 1 month*
> 1 bulan sampai ≤ 3 bulan	14.100.000.000	23.100.000.000	*> 1 month to ≤ 3 months*
> 3 bulan sampai ≤ 6 bulan	7.100.000.000	4.100.000.000	*> 3 months to ≤ 6 months*
> 6 bulan sampai ≤ 12 bulan	840.000.000,00	-	*> 6 months to ≤ 12 months*
Jumlah	**44.575.000.000**	**45.500.000.000**	***Total***

d. Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun / *d. Based on annual interest rates and profit sharing*

	2025	2024	
Rupiah			***Rupiah***
Giro	1,00%	1,00%	*Current accounts*
Tabungan	0,00% - 1,75%	0,00% - 2,00%	*Savings*
Deposito berjangka	3,00% - 3,25%	3,50% - 3,75%	*Time deposits*

e. Simpanan yang diblokir dan dijadikan jaminan / *e. Deposits blocked and pledges as collateral*

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

There were no deposits from other banks that were blocked and pledged as loan collateral as of December 31, 2025 and 2024.

19. PINJAMAN YANG DITERIMA / *19. BORROWINGS*

	2025	2024	
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	416.703.799.171	409.069.155.619	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
PT Sarana Multigriya Financial (Persero)	386.426.969.411	272.077.012.653	*PT Sarana Multigriya Financial (Persero)*
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) - Syariah	105.366.232.568	99.462.211.671	*Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) - Syariah*
Dana kelolaan	45.000.000	45.000.000	*Managed Fund*
Jumlah	**908.542.001.150**	**780.653.379.943**	***Total***

a. Pinjaman yang diterima dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) KPR merupakan perjanjian kerjasama antara Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kemenpupera) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan perjanjian kerjasama No.06/PKS/DP/2015 dan No.PKS/075/DIR/08-2015 tentang penyaluran dana Faslilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/ pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tujuan pemberian pinjaman adalah sebagai sumber dana bagi penyaluran pembiayaan dalam rangka pengadaan perumahan melalui KPR Sejahtera kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Perjanjian kerjasama beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tahun 2024, adalah adendum Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai pengelola dana dan PT Bank Nagari sebagai penyalur dana dengan perjanjian No.32/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 dan No.PKS/009/DIR/12-2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang penyaluran dana FLPP. Porsi dana pembiayaan KPR Sejahtera adalah 75% pembiayaan berasal dari dana FLPP, dan 25% berasal dari Bank. Jangka waktu kredit yang diberikan adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan suku bunga KPR Sejahtera paling tinggi 5%. Suku bunga KPR ini bersifat tetap (*fixed rate mortgage*).

Pengembalian pertama dana FLPP kepada Pusat Pembiayaan Kemenpupera paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pencairan dana FLPP. Pengembalian dana (pokok dan bunga) berikutnya dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

a. Borrowings from Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Liquidity Facility of House Financing (FLPP) Loan is operation agreement between the House Financing Agency of the Public Housing Ministry of Republic of Indonesia (Kemenpupera) and PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat based on Operation Agreement No.06/PKS/DP/2015 and No.PKS/075/DIR/08-2015 regarding the funding distribution of Liquidity Facility of House Financing (FLPP) in the framework of the housing procurement through the Welfare House Ownership Loan (KPR Sejahtera) for Citizens with Low Income (MBR).

The purpose of this lending is as working capital funds/financing for housing loan through KPR Sejahtera to the citizens with low income.

The operation agreement of FLPP has been amended several times, at the latest 2023 is addendum of Operational Cooperation Agreement (PKO) between Public Housing Savings Management Agency (BP Tapera) as a fund manager and PT Bank Nagari as a distributing bank with agreements No.32/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 and No.PKS/009/DIR/12-2024 dated December 23, 2024 regarding funding distribution of FLPP. The portion of funding is 75% from FLPP and 25% from Bank. The longest term of loan is 20 (twenty) years with the highest intererst rate of KPR Sejahtera is 5%. Intereset rate of KPR is fix (fixed rate mortgage).

The first installments of FLPP to the House Financing Agency of Kemenpupera will be made not later than the date of 10 for the next month after fund disbursed date. The next repayment (principal and interest) will be made not later than the date of 10 for each month.

19. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman yang diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Bank melakukan kerjasama Tripartit antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan perjanjian kerjasama No.47/PKS/Pg/2020, No.153A/PKS/FLPP/PPDPP-SMF-BNGR/X/2020, dan No.PKS/130/DIR/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang informasi data penyaluran kredit kepemilikan rumah sejahtera dan telah update perjanjian kerjasama No.02/PKS/BP-TPR/1/2/2023, No.037/PKS/FLPP/BPTAPERA-SMF-B.NAGARI/II/2023, No.PKS/051/DIR/02-2023 tanggal 22 Februari 2023. Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kemudian melakukan kerjasama Bipartit sesuai dengan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman No.205/FLPP/PP/SMF-BNGRI/XII/2020 dan No.PKS/131/DIR/12-2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang penyaluran KPR sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan telah update perjanjian kerjasama No.068/FLPP/PP/SMF-BN/III/2025 dan No: PKS/028/DIR/03-2025 tanggal 13 Maret 2025. Bunga pinjaman atas fasilitas pinjaman yang ditarik selama *availability period* kepada PT Sarana Multigriya Finansial paling rendah sebesar 4,45% *fixed* per tahun.

Bank (Unit Usaha Syariah) juga melakukan kerjasama Tripartit dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) berdasarkan perjanjian kerjasama No.48/PKS/Pg/2020, No.190/PKS/FLPP/PPDPP-SMF-BNGR/XII/2020, dan No.PKS/128/DIR/12-2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang informasi data penyaluran pembiayaan kepemilikan rumah sejahtera dan telah dikinikan perjanjian kerjasama No.20/PKS/BP-TPR/IV/12/2023, No.255/PKS/FLPP/BPTAPERA-SMF-B.NAGARI.Sy/XII/2023, PKS/165/DIR/11/2023 tanggal 20 Desember 2023. Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) kemudian melakukan kerjasama Bipartit sesuai dengan akad pemberian fasilitas pembiayaan *mudharabah muqayah* No.207/FLPP/AKAD/SMF-BNGRS/XII/2020 dan No.PKS/129/DIR/12-2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang penyaluran PPR sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan telah dikinikan perjanjian kerjasama No.069/PKS/SMF-BN/II/2025 dan No.PKS/025/DIR/02-2025 tanggal 13 Maret 2025.

19. BORROWINGS (continued)

b. Borrowing from The Ministry of Public Working and Public Housing of The Republic of Indonesia and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

The Bank has conducted a Tripartit agreement between the Center of Housing Financing Funds Management of Ministry of Public Working and Public Housing of the Republic of Indonesia and PT Sarana Multigriya Finansial based on cooperation agreement No.47/PKS/Pg/2020, No.153A/PKS/FLPP/PPDPP-SMF-BNGR/X/2020, and No.PKS/130/DIR/2020 dated December 17, 2020 regarding information of the loan distribution of welfare house and has renewed the cooperation agreement No.02/PKS/BP-TPR/1/2/2023, No.037/PKS/FLPP/BPTAPERA-SMF-B.NAGARI/II/2023, No.PKS/051/DIR/02-2023 dated February 22, 2023.Then the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial has conducted a Bipartit agreement based on loan facility agreement No.205/FLPP/PP/SMF-BNGRI/XII/2020 and No.PKS/131/DIR/12-2020 dated December 17, 2020 regarding the KPR Sejahtera loan distribution to the citizens with low income and has renewed the cooperation agreement No.014/FLPP/PP/SMF-BN/I/2024 dan No. PKS/004/DIR/01-2024 dated January 19, 2024.The lowest interest on loan facilities during the availability period to PT Sarana Multigriya Financial is 4.45% fixed per year.

The Bank (Sharia Business Unit) has entered into a tripartite cooperation agreement with the Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on Cooperation Agreements No. 48/PKS/Pg/2020, No. 190/PKS/FLPP/PPDPP-SMF-BNGR/XII/2020, and No. PKS/128/DIR/12-2020 dated December 17, 2020, concerning data information on the distribution of Prosperous Home Ownership Financing (PPR), which was subsequently updated through Cooperation Agreements No. 20/PKS/BP-TPR/IV/12/2023, No. 255/PKS/FLPP/BPTAPERA-SMF-B.NAGARI.Sy/XII/2023, and No. PKS/165/DIR/11/2023 dated December 20, 2023. Furthermore, the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) entered into a bipartite cooperation agreement under the Mudharabah Muqayyadah financing facility contract No. 207/FLPP/AKAD/SMF-BNGRS/XII/2020 and No. PKS/129/DIR/12-2020 dated December 17, 2020 regarding the distribution of Prosperous Housing Financing (PPR) for low-income communities, which was later updated through Cooperation Agreements No. 069/PKS/SMF-BN/II/2025 and No. PKS/025/DIR/02-2025 dated March 13, 2025.

19. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman yang diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (lanjutan)

Nisbah bagi hasil untuk *Shahibul Maal* sebesar 22,25% yang dihitung dari proyeksi pendapatan bagi hasil atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability* period dengan equivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan.

Kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank merupakan gabungan antara dana FLPP dari Kementerian PUPR dan fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial dengan porsi dana pembiayaan masing-masing adalah 75% pembiayaan berasal dari Kementerian PUPR dan PT SMF dan 25% berasal dari Bank. Bank memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada tanggal 10 setiap bulannya. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman.

Bank dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) juga melakukan perjanjian bipartit sesuai dengan akta Perjanjian *Uncommited Facility Line* Pembiayaan *Mudharabah Muqayyah* No. 20 tanggal 10 September 2024 oleh Notaris Ir. Nanette Chayanie Handari Adi Waristo, S.H,. dan telah dilakukan update perjanjian kerjasama No.227/ADD/II/SMF-BN/XI/2025.

Fasilitas Pembiayaan yang ditarik digunakan untuk Refinancing Aset Keuangan Bank sesuai dengan yang telah ditentukan dalam akta perjanjian. Bank memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada tanggal 20 setiap bulannya. Nisbah bagi hasil, rata-rata tingkat imbalan hasil kas efektif Fasilitas Pembiayaan Perumahan Dan/Atau Pemukiman PT Bank Nagari dan proyeksi Bagi Hasil akan ditentukan dalam Surat Penegasan Pencairan Dana. Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatangan Perjanjian ini yakni tanggal 10 September 2024 sampai dengan 10 September 2025 dan diperpanjang sampai dengan 10 September 2026.

19. BORROWINGS (continued)

b. Borrowing from The Ministry of Public Working and Public Housing of The Republic of Indonesia and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (continued)

The profit-sharing ratio (nisbah) for the Shahibul Maal is 22.25%, calculated based on the projected profit-sharing income from financing facilities withdrawn during the availability period, equivalent to approximately 4.45% per annum of distributable profit income.

Loan and financing disbursed by the Bank is a combination of FLPP financing from Ministry of Public Working and Public Housing of the Republic of Indonesia and funding facility from PT Sarana Multigriya Financial with funding proportion 75% from Ministry of Public Working and Public Housing of the Republic of Indonesia and PT Sarana Multigriya Financial and 25% from the Bank. The installments of principal and interest funds will be made not later than the date of 10 for each month. The longest term of funding facility is 20 (twenty) years since the agreement has been signed.

Then the Bank and PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) has conducted a Bipartit agreement in accordance with the deed of Uncommitted Facility Line Agreement of Mudharabah Muqayyah Financing No. 20 dated September 10, 2024 by Notary Ir. Nanette Chayanie Handari Adi Waristo, S.H,.

The drawn financing facility is used for refinancing the Bank's financial assets as specified in the deed of agreement. The Bank has an obligation to make principal and interest payments on the 20th of each month. The profit sharing ratio, the average effective cash yield rate of PT Bank Nagari Housing And / Or Settlement Financing Facility and the projection of Profit Sharing will be determined in the Fund Disbursement Affirmation Letter. The term of the loan facility is 1 (one) year from the date of signing of this Agreement, namely September 10, 2024 to September 10, 2025 and extended until September 10, 2026

19. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) - Syariah

Pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) syariah merupakan perjanjian kerjasama antara Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berdasarkan perjanjian kerjasama No. 50/PKS/Sg/2019 dan No. PKS/133/DIR/08-2019 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka perolehan rumah melalui pembiayaan pemilikan rumah Sejahtera Syariah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perjanjian kerjasama berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, terakhir pada tahun 2024, adalah Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai pengelola dana FLPP dan PT Bank Nagari (Unit Usaha Syariah) sebagai penyalur dengan perjanjian No.18/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 dan No.PKS/010/DIR/12-2024 tanggal 23 Desember 2024. Pembiayaan pemilikan rumah sejahtera syariah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan dana FLPP dalam rangka kepemilikan rumah tapak.

Tujuan perjanjian kerjasama operasional ini adalah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Syariah dalam rangka pemenuhan program satu juta rumah. Porsi dana pembiayaan KPR sejahtera syariah adalah 75% pembiayaan berasal dari dana FLPP, dan 25% berasal dari Bank. Jangka waktu KPR sejahtera syariah paling lama adalah 20 (dua puluh) tahun dengan suku margin paling tinggi 5% per tahun. Suku margin pinjaman bersifat tetap *(fixed rate mortgage)* .

Pengembalian pertama dana FLPP kepada LPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pencairan dana FLPP sejahtera syariah. Pengembalian dana (pokok dan bunga) berikutnya dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

d. Pinjaman yang diterima dari Dana Kelolaan

Dana Kelolaan merupakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Sawahlunto, Lembaga Business Development Centre Kota Sawahlunto dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Pembiayaan Bersama Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan di Kota Sawahlunto.

19. BORROWINGS (continued)

c. Sharia - Liquidity Facility of House Financing (FLPP) Financing

Sharia Liquidity Facility of House Financing (FLPP) Financing is operation between Housing Finance Fund Management (LPDPP) of the Public Housing Ministry of Republic Indonesia (Kemenpupera) and PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat based on operation agreement No.50/PKS/Sg/2019 and No.PKS/133/DIR/08-2019 regarding funding distribution of liquidity facility of house financing in framework of housing procurement through Sharia Welfare House Ownership Financing (KPR Sejahtera Syariah) for Citizens with Low Income (MBR).

The cooperation agreement is valid for one (1) fiscal year. The most recent agreement, in 2024, is the Cooperation Agreement between Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) as the FLPP fund manager and PT Bank Nagari (Sharia Business Unit) as the distributing bank under Agreement No. 18/PKS/BP-TPR/IV/12/2024 and No. PKS/010/DIR/12-2024 dated December 23, 2024. Sharia Prosperous Home Ownership Financing represents financing based on sharia principles supported by FLPP funds for landed housing ownership.

The purpose of this financing is as working capital funds for house financing through KPR Sejahtera Sharia to the citizens with low income. Portion of financing is 75% from FLPP and 25% from Bank. The longest term of this financing is 20 (twenty) years with the highest margin rate of KPR Sejahtera Syaria is 5%. Margin rate of the financing is fix (fixed rate mortgage).

The first installments of FLPP to LPDPP the House Financing Agency of Kemenpupera will be made not later than the date of 10 for the next month after fund disbursed date. The next repayment (principal and interest) will be made not later than the date of 10 for each month.

d. Borrowings from The Management Fund

Management fund is a cooperative agreement between the Municipal Government of Sawahlunto, the Institute for Business Development Centre Municipal of Sawahlunto and Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat on Joint Financing in the Context of the Economic Populist Empowerment of Sawahlunto.

19. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. Pinjaman yang diterima dari Dana Kelolaan (lanjutan)

Kerjasama ini diikat dengan Perjanjian Kerjasama No.074/61/Bappeda-2005, No.PKS/004/DIR/02-2005 dan No.935/FEB/BDC/SWL/2005 tanggal 14 Pebruari 2005. Tujuan kerjasama ini untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan Kota Sawahlunto melalui program Konsultan Keuangan Mikro Banking (KKMB) dalam mendukung Program Dana Co Financing antara Pemerintah Kota Sawahlunto/Sijunjung dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang difasilitasi oleh *Business Development Centre* (BDC) Kota Sawahlunto/Sijunjung.

Jenis pinjaman/kredit berupa kredit modal kerja dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan kredit investasi maksimal 5 (lima) tahun. Suku bunga kepada debitur ditetapkan sebesar 12% pertahun secara sliding rate. Pendapatan bunga tersebut dibagi kepada Pemerintah Kota Sawahlunto sebesar 4%, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar 6% dan 2% untuk management fee. Selain itu debitur juga dikenakan provisi sebesar 1% dari plafon kredit, yang dibayarkan pada saat realisasi kredit dan menjadi hak Bank Nagari.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank telah memenuhi sesuai jadwal semua pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo. Bank juga telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembayaran di atas.

19. BORROWINGS (continued)

d. Borrowings from The Management Fund (continued)

This cooperation is tied by Cooperation Agreement No.074/61/Bappeda-2005, No.PKS/004/DIR/02-2005 and No.935/FEB/BDC/SWL/2005 dated February 14, 2005. The purpose of this cooperation is to empower the population economy of the Municipal of Sawahlunto through programs of Consultant Banking Microfinance (KKMB) in support of the Fund Program Co Financing Sawahlunto/Sijunjung Municipal Sawahlunto City and Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat that is facilitated by the Business Development Centre (BDC) of Municipal of Sawahlunto/Sijunjung.

This type of loan in the form of working capital loans with a maximum term of 3 (three) years and investment loans with a maximum term of 5 (five) years. Interest rates to borrowers are set at 12% per annum in sliding rate. Such interest income is distributed respectively 4% to the Local Government Sawahlunto, 6% for Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat and 2% for the management fee. In addition, the debtor is also subject to a provision 1% of the credit plafond, which is paid upon realization of the credit and becomes the right of Bank Nagari.

As of December 31, 2025 and 2024, the Bank has complied with the schedule of all principal and interest payments on matured loans. The Bank has also met all the payment requirements set forth in the above loan agreements.

20. LIABILITAS SEWA / ***20. LEASE LIABILITIES***

	2025	**2024**	
Server	58.951.913.290	74.370.126.393	*Server*
Kendaraan	26.061.522.566	6.164.401.200	*Vehicles*
Mesin	13.273.355.299	14.879.678.655	*Machines*
Bangunan	751.844.020	581.462.957	*Buildings*
Jumlah	**99.038.635.175**	**95.995.669.205**	***Total***

21. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

21. ALLOWANCE FOR POSSIBLE ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

	2025	2024	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	894.632.033	1.034.836.829	*Unused loan facilities to debtors*
Garansi bank yang diterbitkan	20.241.451	69.891.557	*Bank guarantees issued*
Jumlah	**914.873.484**	**1.104.728.386**	***Total***

Perubahan estimasi kerugian pada garansi bank yang diterbitkan berdasarkan *stage* untuk tahun yang berakhir pada tanggal berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement of estimated losses on bank guarantees issued by stage for the year ended December 31, 2025 dan 2024 was as follows:

a. Garansi yang diterbitkan

a. Bank guarantees issued

	2025				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	***Jumlah/ Total***	
Saldo awal	69.891.557	-	-	69.891.557	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	(49.650.106)	-	-	(49.650.106)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**20.241.451**	**-**	**-**	**20.241.451**	***Ending balance***

	2024				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	***Jumlah/ Total***	
Saldo awal	87.486.450	-	-	87.486.450	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	-	-	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	-	-	-	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	-	-	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	(17.594.893)	-	-	(17.594.893)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**69.891.557**	**-**	**-**	**69.891.557**	***Ending balance***

21. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *21. ALLOWANCE FOR POSSIBLE ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

b. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik / ***b. Unused loan facilities to debtors***

	2025				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	***Jumlah/ Total***	
Saldo awal	1.014.637.716	10.516.227	9.682.886	1.034.836.829	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(13.773.424)	13.773.424	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(12.242.572)	-	12.242.572	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	10.657.713	(10.429.491)	(228.222)	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	(124.273.540)	(1.952.795)	(13.978.461)	(140.204.796)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**875.005.893**	**11.907.365**	**7.718.775**	**894.632.033**	***Ending balance***

	2024				
	***Stage* 1**	***Stage* 2**	***Stage* 3**	***Jumlah/ Total***	
Saldo awal	1.222.701.102	266.980	-	1.222.968.082	*Beginning balance*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya (*Stage* 2)	(4.454.032)	4.454.032	-	-	*Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)*
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage* 3)	(782.328)	(97.574)	879.902	-	*Transfer to credit impaired (Stage 3)*
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage* 1)	169.382	(169.382)	-	-	*Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)*
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran	(202.996.408)	6.062.171	8.802.984	(188.131.253)	*Net change in exposure and remeasurement*
Saldo akhir	**1.014.637.716**	**10.516.227**	**9.682.886**	**1.034.836.829**	***Ending balance***

Manajemen berpendapat bahwa estimasi kerugian pada komitmen dan kontinjensi di atas telah memadai.

Management believes that the estimated losses on commitments and contingencies are adequate.

22. LIABILITAS LAIN-LAIN / *22. OTHER LIABILITIES*

	2025	2024	
Jasa produksi	129.278.076.249	143.485.052.569	*Production service bonus*
Dana kesejahteraan	75.521.570.959	87.448.437.614	*Welfare fund*
Biro personalia	67.945.299.831	60.346.690.563	*Personnel agency*
Beban bunga yang masih harus dibayar	35.195.185.755	38.221.673.546	*Accrued interest expenses*
Titipan jaminan hari tua	6.222.269.491	4.258.023.579	*Pension plan deposits*
Rekening penampungan	5.996.255.786	7.040.270.144	*Escrow account*
Setoran jaminan	2.057.895.296	2.377.437.272	*Security deposits*
Pendapatan ditangguhkan	1.885.759.394	1.017.179.909	*Deferred income*
Lainnya	10.028.931.807	11.887.970.876	*Others*
Jumlah	**334.131.244.568**	**356.082.736.072**	***Total***

22. LIABILITAS LAIN-LAIN (lanjutan)

Setoran jaminan merupakan nilai uang tunai yang dijaminkan untuk bank garansi, sebesar 100% dari nilai bank garansi.

Biro personalia merupakan dana yang dicadangkan untuk pembayaran hak Komisaris, Direksi dan karyawan yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun, yang terdiri dari tunjangan dan insentif.

Dana kesejahteraan merupakan dana yang diperoleh dari pembagian laba yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pendapatan yang ditangguhkan merupakan pendapatan administrasi pembiayaan syariah yang diamortisasi selama jangka waktu pembiayaan.

22. OTHER LIABILITIES (continued)

The guarantee deposit is the value of the cash guaranteed for the bank guarantee, amounting to 100% of the bank guarantee value.

Personnel agency are funds reserved for payment Commissioners, Directors and employees right, which are not paid until the end of year, consists of allowance and incentives.

Welfare fund is a fund derived from profit distribution has been determined in accordance with the decision of the Board of Directors designation with the approval of the Board of Commissioners.

Deferred income consists of administration revenue sharia financing, which are amortized over the term of financing.

23. DANA SYIRKAH TEMPORER

a. Bukan bank

Seluruh simpanan mudharabah dalam mata uang Rupiah.

23. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

a. Non bank

All of mudharabah deposits are dominated in Rupiah.

	2025	2024	
Pihak berelasi			***Related parties***
Giro	222.692.555.843	101.480.768.232	*Current Accounts*
Tabungan			*Savings Deposits*
Sikoci	3.935.938.649	26.156.680.279	*Sikoci*
Tahari Mabrur	295.081.900	16.415.301	*Tahari Mabrur*
Bisnis	2.137.608	-	*Business*
Deposito berjangka	119.020.570.104	456.967.000.000	*Time deposits*
	345.946.284.104	584.620.863.812	
Pihak ketiga			***Third parties***
Giro	204.082.899.537	108.974.673.728	*Current Accounts*
Tabungan			*Saving Deposits*
Sikoci	1.535.353.209.730	1.583.271.466.234	*Sikoci*
Tahari Mabrur	109.918.799.782	98.496.397.787	*Tahari Mabrur*
Sikoci hadiah langsung	1.059.846.520	3.659.670.931	*Sikoci hadiah langsung*
Bisnis	6.262.790.300	-	*Business*
Simpel IB	-	959.767.733	*Simpel IB*
Deposito berjangka	2.365.058.227.922	2.164.686.529.635	*Time deposits*
	4.221.735.773.791	3.960.048.506.048	
Jumlah dana syirkah temporer bukan bank	**4.567.682.057.895**	**4.544.669.369.860**	***Total temporary syirkah funds non bank***

Rincian deposito berjangka mudharabah berdasarkan jangka waktu

Details of mudharabah time deposits by term

	2025	2024	
Sampai dengan 1 bulan	420.156.677.922	775.893.879.531	*Up to 1 month*
1 - 3 bulan	1.515.840.620.104	1.198.082.950.104	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	485.990.950.000	571.821.950.000	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	61.744.550.000	75.539.600.000	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	346.000.000	315.150.000	*Over 12 months*
Jumlah	**2.484.078.798.026**	**2.621.653.529.635**	***Total***

23. DANA SYIRKAH TEMPORER (lanjutan) / ***23. TEMPORARY SYIRKAH FUNDS (continued)***

a. Bukan bank (lanjutan) / ***a. Non bank (continued)***

Rincian deposito berjangka mudharabah berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *Details of mudharabah time deposits by remaining period of maturity*

	2025	2024	
Sampai dengan 1 bulan	688.742.347.651	1.169.703.786.012	*Up to 1 month*
1 - 3 bulan	1.490.051.900.375	1.091.817.993.623	*1 - 3 months*
3 - 6 bulan	280.813.450.000	334.873.500.000	*3 - 6 months*
6 - 12 bulan	24.371.100.000	24.818.100.000	*6 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	100.000.000	440.150.000	*Over 12 months*
Jumlah	**2.484.078.798.026**	**2.621.653.529.635**	***Total***

Kisaran bagi hasil syariah per tahun / *Based on annual sharia profit sharing*

	2025	2024	
Giro	0,00% - 2,50%	0,65% - 2,50%	*Current accounts*
Tabungan	0,00% - 7,15%	0,81% - 7,15%	*Savings deposits*
Deposito berjangka	3,06% - 6,60%	3,32% - 7,00%	*Time deposits*

b. Bank / ***b. Bank***

Seluruh simpanan mudharabah dari bank lain dalam mata uang Rupiah. Tidak terdapat simpanan mudharabah dari pihak berelasi.

All of mudharabah deposits from other banks are denominated in Rupiah. There were no mudharabah deposits from related parties.

	2025	2024	
Tabungan	20.592.347.986	23.210.022.316	*Saving deposits*
Deposito berjangka	13.350.000.000	3.250.000.000	*Time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer bank	**33.942.347.986**	**26.460.022.316**	***Total temporary syirkah funds bank***

Rincian deposito berjangka mudharabah berdasarkan jangka waktu / *Details of mudharabah time deposits by term*

	2025	2024	
Sampai dengan 1 bulan	13.350.000.000	3.250.000.000	*Up to 1 month*
Jumlah	**13.350.000.000**	**3.250.000.000**	***Total***

Rincian deposito berjangka mudharabah berdasarkan sisa umur jatuh tempo / *Details of mudharabah time deposits by remaining period of maturity*

	2025	2024	
Sampai dengan 1 bulan	13.350.000.000	3.250.000.000	*Up to 1 month*
Jumlah	**13.350.000.000**	**3.250.000.000**	***Total***

Tingkat bagi hasil syariah rata-rata per tahun / *Average of sharia profit sharing per annum*

	2025	2024	
Tabungan	0,5% - 1,00%	0,81% - 0,88%	*Savings deposits*
Deposito berjangka	3,50% - 4,50%	3,32% - 3,60%	*Time deposits*

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Modal Saham

Modal dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No.20 tanggal 23 Desember 2020. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, posisi modal saham adalah sebagai berikut:

Share Capital

Authorized capital of Bank has changed several times, last pursuant by deed No.20 dated December 23, 2020. As of December 31, 2025 and 2024, share capital position are as follows:

	2025			
	Lembar saham/ ***Number of shares***	**Nominal saham/** ***Par value***	**Jumlah nilai saham/** ***Total amount of shares***	
Modal Dasar				***Authorized Capital***
Saham Seri A	3.000.000	1.000.000	3.000.000.000.000	*Series A Shares*
Saham Seri B	20.000.000	100.000	2.000.000.000.000	*Series B Shares*
	23.000.000		**5.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid***
Saham Seri A	1.921.371	1.000.000	1.921.371.000.000	*Series A Shares*
	1.921.371		**1.921.371.000.000**	

	2024			
	Lembar saham/ ***Number of shares***	**Nominal saham/** ***Par value***	**Jumlah nilai saham/** ***Total amount of shares***	
Modal Dasar				***Authorized Capital***
Saham Seri A	3.000.000	1.000.000	3.000.000.000.000	*Series A Shares*
Saham Seri B	20.000.000	100.000	2.000.000.000.000	*Series B Shares*
	23.000.000		**5.000.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				***Issued and Fully Paid***
Saham Seri A	1.904.573	1.000.000	1.904.573.000.000	*Series A Shares*
Jumlah	**1.904.573**		**1.904.573.000.000**	***Total***

Jumlah yang disetor oleh para Pemegang Saham sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1.921.371.000.000

Total paid up by shareholders up until December 31, 2025 amounted to Rp1,921,371,000,000.

Tambahan modal disetor sebesar Rp1.400.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan Akta Notaris Andika, S.H., M.Kn., No.153 tanggal 22 April 2025 dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0109777 tanggal 23 April 2025. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No.SR-172/KO.153/2025 tanggal 19 Mei 2025.

The additional paid-in capital of Rp1,400,000,000 has been approved as share capital based on the Notarial Deed of Andika, SH., M.Kn., No.153 dated April 22, 2025 and recorded in the Legal Entity Administration System based on Letter No.AHU-AH.01.03-0109777 April 23, 2025.The changes of issued and paid-up capital was approved by Financial Services Authority based on letter No.SR-172/KO.153/2025 dated May 19, 2025.

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Tambahan modal disetor sebesar Rp5.100.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan Akta Notaris Andika, S.H., M.Kn., No.79 tanggal 11 Juni 2025 dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0161478 tanggal 18 Juni 2025. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No.SR-208/KO.153/2025 tanggal 7 Juli 2025.

Tambahan modal disetor sebesar Rp5.298.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan Akta Notaris Andika, S.H., M.Kn., No.214 tanggal 27 Oktober 2025 dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0246337 tanggal 28 Oktober 2025. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No.SR-377/KO.153/2025 tanggal 12 November 2025.

Tambahan modal disetor sebesar Rp5.000.000.000 telah disahkan menjadi modal saham berdasarkan Akta Notaris Andika, S.H., M.Kn., No.244 tanggal 22 Desember 2025 dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0257258 tanggal 23 Desember 2025. Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat No.SR-8/KO.153/2026 tanggal 14 Januari 2026.

24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

The additional paid-in capital of Rp5,100,000,000 has been approved as share capital based on the Notarial Deed of Andika, SH., M.Kn., No.79 dated June 11, 2025 and recorded in the Legal Entity Administration System based on Letter No.AHU-AH.01.03-0161478 June 18, 2025.The changes of issued and paid-up capital was approved by Financial Services Authority based on letter No.SR-208/KO.153/2024 dated July 7, 2025.

The additional paid-in capital of Rp5,298,000,000 has been approved as share capital based on the Notarial Deed of Andika, SH., M.Kn., No.214 dated October 27, 2025 and recorded in the Legal Entity Administration System based on Letter No.AHU-AH.01.03-0246337 October 28, 2025.The changes of issued and paid-up capital was approved by Financial Services Authority based on letter No.SR-377/KO.153/2024 dated 12 November, 2025.

The additional paid-in capital of Rp5,000,000,000 has been approved as share capital based on the Notarial Deed of Andika, SH., M.Kn., No.244 dated December 22, 2025 and recorded in the Legal Entity Administration System based on Letter No.AHU-AH.01.03-02257258 December 23, 2025.The changes of issued and paid-up capital was approved by Financial Services Authority based on letter No.SR-8/KO.153/2026 dated January 14, 2026.

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2025, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the composition of the Bank's shareholders are as follows:

	2025			
	Jumlah lembar Saham ditempatkan dan disetor/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership (%)*	Jumlah dalam Rupiah/ *Amount in Rupiah*	
Pemegang Saham				***Shareholders***
Pemerintah Provinsi				*Provincial Government*
Provinsi Sumatera Barat	621.224	32,33	621.224.000.000	*Province of West Sumatera*
Pemerintah Kota				*Municipalities Government*
Solok	105.509	5,49	105.509.000.000	*Solok*
Padang	89.321	4,65	89.321.000.000	*Padang*
Sawahlunto	85.601	4,46	85.601.000.000	*Sawahlunto*
Payakumbuh	61.610	3,21	61.610.000.000	*Payakumbuh*
Pariaman	60.284	3,14	60.284.000.000	*Pariaman*
Bukittinggi	44.524	2,32	44.524.000.000	*Bukittinggi*
Padang Panjang	40.398	2,10	40.398.000.000	*Padang Panjang*
Pemerintah Kabupaten				*Regencies Government*
Tanah Datar	133.279	6,94	133.279.000.000	*Tanah Datar*
Sijunjung	110.145	5,73	110.145.000.000	*Sijunjung*
Kepulauan Mentawai	80.578	4,19	80.578.000.000	*Kepulauan Mentawai*
Pasaman	72.755	3,79	72.755.000.000	*Pasaman*
Agam	69.243	3,60	69.243.000.000	*Agam*
Pesisir Selatan	58.608	3,05	58.608.000.000	*Pesisir Selatan*
Pasaman Barat	51.125	2,66	51.125.000.000	*Pasaman Barat*
Padang Pariaman	48.509	2,52	48.509.000.000	*Padang Pariaman*
Solok	44.997	2,34	44.997.000.000	*Solok*
Dharmasraya	28.852	1,50	28.852.000.000	*Dharmasraya*
Lima Puluh Kota	23.584	1,23	23.584.000.000	*Lima Puluh Kota*
Solok Selatan	17.225	0,90	17.225.000.000	*Solok Selatan*
Koperasi				*Cooperation*
Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	74.000	3,85	74.000.000.000	*Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat*
Jumlah	**1.921.371**	**100,00**	**1.921.371.000.000**	***Total***

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2024, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the composition of the Bank's shareholders are as follows:

	2024			
	Jumlah lembar Saham ditempatkan dan disetor/ *Number of shares issued and fully paid*	***Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)***	***Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah***	
Pemegang Saham				***Shareholders***
Pemerintah Provinsi				*Provincial Government*
Provinsi Sumatera Barat	621.224	32,62	621.224.000.000	*Province of West Sumatera*
Pemerintah Kota				*Municipalities Government*
Solok	105.509	5,54	105.509.000.000	*Solok*
Padang	89.321	4,69	89.321.000.000	*Padang*
Sawahlunto	85.601	4,49	85.601.000.000	*Sawahlunto*
Payakumbuh	61.610	3,23	61.610.000.000	*Payakumbuh*
Pariaman	57.348	3,01	57.348.000.000	*Pariaman*
Bukittinggi	44.524	2,34	44.524.000.000	*Bukittinggi*
Padang Panjang	40.398	2,12	40.398.000.000	*Padang Panjang*
Pemerintah Kabupaten				*Regencies Government*
Tanah Datar	133.279	7,00	133.279.000.000	*Tanah Datar*
Sijunjung	105.145	5,52	105.145.000.000	*Sijunjung*
Kepulauan Mentawai	80.578	4,23	80.578.000.000	*Kepulauan Mentawai*
Pasaman	72.755	3,82	72.755.000.000	*Pasaman*
Agam	69.243	3,64	69.243.000.000	*Agam*
Pesisir Selatan	58.608	3,08	58.608.000.000	*Pesisir Selatan*
Pasaman Barat	51.125	2,68	51.125.000.000	*Pasaman Barat*
Padang Pariaman	46.147	2,42	46.147.000.000	*Padang Pariaman*
Solok	44.997	2,36	44.997.000.000	*Solok*
Dharmasraya	27.352	1,44	27.352.000.000	*Dharmasraya*
Lima Puluh Kota	23.584	1,24	23.584.000.000	*Lima Puluh Kota*
Solok Selatan	17.225	0,90	17.225.000.000	*Solok Selatan*
Koperasi				*Cooperation*
Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	69.000	3,62	69.000.000.000	*Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat*
Jumlah	**1.904.573**	**100,00**	**1.904.573.000.000**	***Total***

Jumlah penambahan modal disetor selama tahun 2025 adalah sebanyak 10.000 lembar saham atau senilai Rp10.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Sijunjung melakukan penambahan modal disetor sebanyak 5.000 lembar saham atau senilai Rp5.000.000.000
- Koperasi Karyawan PT Bank Nagari melakukan penambahan modal disetor sebanyak 5.000 lembar saham atau senilai Rp5.000.000.000

Total additional paid-in-capital during the year 2025 are 10,000 shares amounted to Rp10,000,000,000 with details as follows:

- *The Government of Sijunjung District has increase paid-in-capital 5,000 of shares or Rp5,000,000,000*
- *Koperasi Karyawan PT Bank Nagari has increase paid-in-capital 5,000 of shares or Rp5,000,000,000*

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Jumlah penambahan modal disetor selama tahun 2025 adalah sebanyak 6.798 lembar saham atau senilai Rp6.798.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Pemerintah Kota Pariaman melakukan penambahan modal disetor sebanyak 2.936 lembar saham atau senilai Rp2.936.000.000.

  Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan penambahan modal disetor sebanyak 2.362 lembar saham atau senilai Rp2.362.000.000.

  Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penambahan modal disetor sebanyak 1.500 lembar saham atau senilai Rp1.500.000.000.

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Total additional paid-in-capital during the year 2025 are 6,798 shares amounted to Rp6,798,000,000 with details as follows:

- *The Government of Payakumbuh City has increase paid-in-capital of 2,936 shares or Rp2,936,000,000.*

  The Government of Padang Pariaman District has increase paid-in-capital of 2,362 shares or Rp2,362,000,000.

  The Government of Dharmasraya District has increase paid-in-capital of 1,500 shares or Rp1,500,000,000.

The details of additional paid-in-capital are as follows:

	2025	2024	
Pemerintah Kota			***Municipalities Government***
Bukittinggi	2.279.000.000	-	*Bukittinggi*
Solok	750.000.000	-	*Solok*
Padang Panjang	602.746	602.746	*Padang Panjang*
Pemerintah Kabupaten			***Regencies Government***
Agam	1.000.000.000	-	*Agam*
Kabupaten Kepulauan Mentawai	920.000	920.000	*Kepulauan Mentawai Regency*
Jumlah	**4.030.522.746**	**1.522.746**	***Total***
Aset pengampunan pajak	4.882.516.096	4.882.516.096	*Tax amnesty assets*
Jumlah	**8.913.038.842**	**4.884.038.842**	***Total***

Bank menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak No.KET-712/PP/WPJ.27/2017 tanggal 9 Januari 2017, Bank telah melaporkan harta untuk pengampunan pajak sebesar Rp4.882.516.096.

The Bank has received Tax Amnesty Approval No.KET-712/PP/WPJ.27/2017 dated January 9, 2017, the Company have reported assets for tax amnesty amounted to Rp4,882,516,096.

25. SELISIH PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP

25. FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE

	2025	2024	
Saldo awal tahun	170.853.322.254	173.476.596.666	*Beginning balance of year*
Surplus revaluasi dipindahkan ke saldo laba	(2.623.274.412)	(2.623.274.412)	*Revaluation surplus transferred to retained earnings*
Saldo akhir tahun	**168.230.047.842**	**170.853.322.254**	***Ending balance of year***

Surplus revaluasi yang berasal dari revaluasi aset tetap yang telah dijual, bagian dari surplus revaluasi dari tanah dan bangunan dan prasarana tersebut direalisasikan dengan memindahkan langsung ke saldo laba. Bagian dari surplus revaluasi atas aset tetap yang telah dihapusbukukan dipindahkan ke saldo laba.

Revaluation surplus from revalue fixed assets sold, part of the surplus from the revaluation of land and buildings and infrastructure is realized by moving directly to retained earnings. The part of revaluation surplus of fixed assets was written-off are transferred to retained earnings.

25. SELISIH PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank mencatat revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh penilai independen yang laporannya bertanggal 16 Juni 2023, untuk aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp357.027.844.796, dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal 1 Januari 2023, dengan nilai revaluasi sebesar Rp402.805.830.000 dan selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp45.777.985.204 (Catatan 12).

25. FIXED ASSETS REVALUATION RESERVE (continued)

As of December 31, 2023, the Bank revalued its fixed assets performed by an independent appraiser who report dated July 16, 2023, to fixed assets per December 31, 2022 by Rp357,027,844,796, that determined using fair value as of January 1, 2023, the revalued amount of the asset revaluation reserve Rp402,805,830,000 and fixed at Rp45,777,985,204 (Note 12).

26. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Penggunaan laba bersih tahun 2024 ditetapkan berdasarkan risalah Keputusan Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Nagari tanggal 21 April 2025.

Penggunaan laba bersih tahun 2023 ditetapkan berdasarkan risalah Keputusan Agenda Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank Nagari tanggal 2 April 2024.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di atas, pengalokasian laba bersih masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

26. APPROPRIATION OF NET INCOME

The use of net profit in 2024 is determined based on the minutes of the Decision of the First Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 Financial Year of PT Bank Nagari on April 21, 2025.

The use of net profit in 2023 is determined based on the minutes of the Decision of the First Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Financial Year of PT Bank Nagari on April 2, 2024.

In accordance with the resolutions of the Annual General Shareholders' Meetings,the allocation of the net income for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively,are as follows:

	2024	2023	
Laba Bersih			***Net Income***
Dividen	376.648.262.993	366.637.927.479	*Dividends*
Cadangan umum	161.420.684.140	157.130.540.348	*Specific reserves*
Jumlah	**538.068.947.133**	**523.768.467.827**	***Total***

Rincian persentase penggunaan laba tahun 2024 dan 2023 seperti di bawah ini:

The details of percentage appropriate of net income year 2024 and 2023 are as follow:

	2024	2023	
Dividen	70,00%	70,00%	*Dividends*
Cadangan umum	30,00%	30,00%	*Specific reserves*
Jumlah	**100,00%**	**100,00%**	***Total***

27. PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH / *27. INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME*

	2025	2024	
Bunga kredit yang diberikan	2.242.992.638.873	2.306.155.109.212	*Loan interest*
Marjin dan pendapatan bagi hasil syariah	522.167.744.966	422.169.303.979	*Margin and Sharia profit-sharing revenue*
Efek-efek untuk tujuan investasi	128.148.953.052	171.270.880.008	*Marketable securities for investment purposes*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	46.355.601.046	27.449.109.344	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	41.439.338.707	27.487.752.022	*Securities purchased with an agreement to resell*
Giro pada Bank Indonesia	10.214.850.487	12.635.563.476	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	97.430.906	15.579.036.119	*Current accounts with other banks*
Jumlah	**2.991.416.558.037**	**2.982.746.754.160**	***Total***

28. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *28. OTHER OPERATIONAL INCOME*

	2025	2024	
Penerimaan kembali kredit hapusbuku	53.667.313.240	59.842.779.387	*Recoveries from write-off loans*
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	806.434.450	1.393.555.372	*Fees and commissions not related to loans*
Lain-lain:			*Others:*
Fee	59.655.018.944	69.007.287.969	*Fees*
Penggantian ongkos administrasi	54.293.102.534	47.147.871.125	*Reimbursement cost of administration*
Pendapatan administrasi ATM dan BPD-Net	37.534.316.478	37.979.395.007	*Administration revenue ATM and BPD-Net*
Pendapatan denda, pokok, bunga	2.854.346.417	4.019.131.842	*Fines, principal, interest revenue*
Sewa *safe deposit box*	811.702.325	733.565.811	*Safe deposit box rental*
Penggantian barang cetakan	225.457.300	235.494.876	*Reimbursement of printed material*
Dividen penyertaan saham	166.530.845	294.919.909	*Dividend from investment in shares*
Referensi bank	19.781.500	33.431.622	*Bank reference*
Penggantian administrasi Western Union	1.686.074	8.921.818	*Reimbursement of administration Western Union*
Lainnya	2.997.755.881	522.233.649	*Others*
Jumlah	**213.033.445.988**	**221.218.588.387**	***Total***

29. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH / *29. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE*

	2025	2024	
Beban bunga			*Interest expense*
Deposito berjangka	813.188.901.574	893.541.616.967	*Time deposits*
Tabungan	53.786.331.885	66.859.543.211	*Savings deposits*
Pinjaman yang diterima	40.033.905.314	5.647.228.286	*Borrowings*
Giro	33.988.000.970	33.902.861.695	*Current accounts*
Premium surat berharga	3.987.459.523	7.139.841.192	*Premium on marketable securities*
Interbank call money	528.944.444	677.250.000,00	*Interbank call money*
Jumlah beban bunga	945.513.543.710	1.007.768.341.351	*Total interest expenses*

29. BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH (lanjutan) / *29. INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE (continued)*

	2025	2024	
Dana syirkah temporer			*Temporary syirkah funds*
Deposito berjangka mudharabah	153.015.877.037	115.050.426.214	*Mudharabah time deposits*
Tabungan *mudharabah*	26.839.066.691	28.951.021.481	*Mudharabah savings deposits*
Giro *mudharabah*	8.555.093.241	8.991.366.244	*Mudharabah current accounts*
Jumlah dana syirkah temporer	188.410.036.969	152.992.813.939	*Total temporary syirkah funds*
Premi penjaminan simpanan (Catatan 43)	47.295.736.398	45.204.801.627	*Premium of deposit guarantee (Note 43)*
Emisi obligasi	7.470.020	40.421.361	*Issuance of bonds*
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank ("SIPA")	5.555.556	-	*Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")*
Jumlah	**1.181.232.342.653**	**1.206.006.378.278**	***Total***

30. BEBAN TENAGA KERJA / *30. EMPLOYEE EXPENSE*

	2025	2024	
Gaji dan upah	280.343.060.159	270.850.241.875	*Salary and wages*
Jasa produksi	129.278.076.249	143.485.052.569	*Production services*
Tunjangan pajak penghasilan	78.445.104.294	100.434.398.997	*Income tax allowances*
Penghargaan masa kerja	63.997.771.272	30.881.355.538	*Working period award*
Program pensiun imbalan pasti	46.938.762.922	-	*Defined benefit pension plan*
Insidentil	45.274.264.435	61.561.655.212	*Incidental*
Sandang pangan	42.752.692.470	40.170.935.859	*Food and clothing*
Pendidikan dan pelatihan	30.104.994.464	29.676.270.466	*Education and training*
Penghargaan dan jasa pengabdian	30.021.726.839	23.752.562.238	*Appreciation and devotion services*
Cuti	21.413.377.815	13.479.761.172	*Leave*
Tunjangan hari raya	20.648.816.786	20.336.411.515	*Holiday allowance*
Kesehatan	12.495.132.547	11.858.599.156	*Health*
Lembur	9.905.784.621	7.036.549.940	*Overtime*
Honorarium Dewan Komisaris dan Pengawas Syariah	2.746.336.933	2.201.695.072	*Honorarium of the Board of Commissioners and Sharia Supervisors*
Rekreasi	2.121.463.005	1.521.567.873	*Recreation*
Insentif	310.054.771	67.279.651.587	*Incentive*
Iuran dana pensiun	-	16.823.272.735	*Pension fund contributions*
Program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja	-	926.147.330	*Other benefit programs post-employment compensation fund*
Beban pegawai lainnya	16.080.459.918	9.760.695.087	*Other employee expenses*
Jumlah	**832.877.879.500**	**852.036.824.221**	***Total***

Termasuk di dalam beban gaji dan tunjangan terdapat gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Salaries and wages include salaries and other compensation benefits for the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee.

Per 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen telah mencadangkan beban tantiem dan jasa produksi untuk Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang dicatat pada akun jasa produksi.

As of December 31, 2025 and 2024, management has made provisions concerning to bonus for Board of Commissioners, Directors and bonus for employees which had been recorded in production services.

Beban imbalan kerja yang telah dibayarkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebagai berikut (Catatan 39):

As of December 31, 2025 and 2024, employee benefits which have been paid are as follows (Notes 39):

30. BEBAN TENAGA KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE EXPENSE (continued)*

	2025	2024	
Penghargaan masa kerja	63.997.771.272	30.881.355.538	*Employee service period*
Program pensiun imbalan pasti	46.938.762.922	-	*Defined benefit pension plan*
Imbalan program pesangon pensiun	19.959.658.429	17.988.613.874	*Pension severance program*
Cuti besar berimbalan	15.120.083.262	6.015.063.523	*Long-term compensated leaves*
Penghargaan dan jasa pengabdian	10.062.068.410	5.763.948.364	*Appreciation and devotion services*
Program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja	-	926.147.330	*Other benefit programs post-employment compensation fund*
Jumlah	**156.078.344.295**	**61.575.128.629**	***Total***

Sesuai dengan kebijakan Bank, selain gaji, pegawai juga mendapatkan fasilitas dan tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), fasilitas kesehatan, sumbangan kematian, tunjangan cuti, fasilitas jabatan untuk jabatan tertentu, program pensiun untuk pegawai tetap, insentif sesuai dengan kinerja Bank dan pegawai, dan manfaat untuk pegawai yang berhenti bekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

Under the Bank's policy, in addition to salaries, employees are entitled to allowances and benefits, such as yearly allowance (THR), medical reimbursements, death allowance, leave allowance, functional allowance for certain levels, pension plan for permanent employees', incentives based on the Bank and employees' performance, and post-employment benefits in accordance with prevailing Labor Law.

Per 31 Desember 2025 dan 2024, tantiem untuk Dewan Komisaris dan Direksi, dan jasa produksi untuk karyawan dibukukan sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Jumlah gaji, tunjangan dan bonus/tantiem Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah, Pemimpin Divisi, Pemimpin Bagian, dan Pemimpin Satuan masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, bonus for Board of Commissioners and Director, and bonus for employees are recorded as expenses in the current year statements of comprehensive income. Total gross salaries, allowances and bonus tantiem the Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Risk Monitoring Committee, Sharia Supervisory Board and Division Head, and Section and Unit Leader for the period ended December 31, 2025 and 2024, respectively, are as follows:

	2025					
	Jumlah anggota/ *Members*	Gaji/ *Salaries*	Tunjangan/ *Allowance*	Bonus/ *Bonuses*	Jumlah/ *Total*	
Dewan Komisaris	3	2.063.202.536	3.853.789.509	7.259.154.960	13.176.147.005	*Board of Commissioners*
Direksi	5	3.206.870.481	18.029.624.044	15.564.334.126	36.800.828.651	*Directors*
Dewan Pengawas Syariah	2	424.080.000	126.247.190	-	550.327.190	*Sharia Supervisory Committee*
Komite Audit	2	540.000.000	62.448.780	-	602.448.780	*Audit Committee*
Pejabat eksekutif	48	9.035.566.457	29.506.231.583	8.925.706.595	47.467.504.635	*Executive Board*
Jumlah	**60**	**15.269.719.474**	**51.578.341.106**	**31.749.195.681**	**98.597.256.261**	***Total***

	2024					
	Jumlah anggota/ *Members*	Gaji/ *Salaries*	Tunjangan/ *Allowance*	Bonus/ *Bonuses*	Jumlah/ *Total*	
Dewan Komisaris	3	1.513.523.110	4.296.242.326	7.362.988.546	13.172.753.982	*Board of Commissioners*
Direksi	5	2.130.050.794	17.157.162.427	21.020.361.532	40.307.574.753	*Directors*
Dewan Pengawas Syariah	2	285.000.000	119.212.998	-	404.212.998	*Sharia Supervisory Committee*
Komite Audit	2	450.000.000	123.954.245	-	573.954.245	*Audit Committee*
Pejabat eksekutif	48	9.040.472.560	31.427.302.745	14.837.763.230	55.305.538.535	*Executive Board*
Jumlah	**60**	**13.419.046.464**	**53.123.874.741**	**43.221.113.308**	**109.764.034.513**	***Total***

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE*

	2025	2024	
Outsourcing	60.809.600.525	56.407.698.473	*Outsourcing employee*
Teknologi Informasi	51.050.483.821	49.825.528.494	*Information technology*
Asuransi	50.702.402.862	71.098.472.511	*Insurance*
Promosi	49.352.235.400	40.458.025.832	*Promotion*
Aset hak guna (Catatan 14)	41.509.400.761	43.754.977.584	*Right of use assets (Note 14)*
Dana kesejahteraan	32.319.519.062	35.871.263.142	*Welfare funds*
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	28.294.748.644	21.503.806.648	*Depreciation of fixed assets (Note 12)*
Iuran dan alat tulis kantor	25.455.309.670	25.706.429.706	*Fees and office stationery*
Sewa	18.534.980.844	14.162.818.491	*Rental*
Pemeliharaan dan perbaikan	17.290.671.093	16.318.043.155	*Repair and maintenance*
Listrik, air dan komunikasi	12.560.406.042	14.329.673.280	*Electricity, water and communication*
Representasi dan rapat	8.347.468.969	6.911.274.681	*Representation and meeting*
Administrasi dan peralatan kantor	8.293.987.305	7.600.705.107	*Administrative and office equipment*
BBM	7.506.097.571	7.304.110.892	*Fuel*
Perjalanan dinas	5.119.693.631	4.247.883.979	*Business trip*
Keamanan	4.754.684.028	4.447.999.136	*Security*
Ekspedisi dan pajak	4.727.627.411	5.447.940.138	*Expedition and tax*
Jasa profesional	3.392.397.355	3.973.910.337	*Professional services*
Amortisasi beban ditangguhkan	2.410.173.149	2.281.662.188	*Amortisation of deferred expenses*
Kerugian risiko operasional	1.463.639.850	39.050.000	*Loss on operational risk*
Amortisasi aset takberwujud	507.857.633	718.021.444	*Amortisation of intangible assets*
Lain-lain	8.209.063.059	11.702.887.626	*Others*
Jumlah	**442.612.448.685**	**444.112.182.844**	***Total***

32. PEMBENTUKAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *32. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES*

	2025	2024	
Pinjaman yang diberikan:			*Loans:*
Pembentukan	322.471.702.499	209.043.469.056	*Provision*
Pemulihan	(105.829.611.001)	(133.568.807.884)	*Recovery*
Penempatan dana antar bank (pemulihan)	67.519	(6.321.129)	*Placement with other banks (recovery)*
Jumlah	**216.642.159.017**	**75.468.340.043**	***Total***

33. PEMBENTUKAN (PEMULIHAN) ESTIMASI KERUGIAN ATAS KOMITMEN DAN KONTIJENSI / *33. ALLOWANCE (RECOVERY) FOR COMMITMENTS AND CONTINGENCY*

	2025	2024	
Beban CKPN longgar tarik	404.346.119	497.076.187	*Impairment losses on comitment and contigencies*
Beban CKPN bank garansi	15.527.718	44.058.657	*Impairment losses on impairment loss of guarantees*
Pemulihan CKPN bank garansi	(65.177.824)	(61.653.550)	*Recovery on impairment loss of guarantees*
Pemulihan CKPN longgar tarik	(544.550.915)	(685.207.440)	*Recovery on impairment comitment and contigencies*
Jumlah	**(189.854.902)**	**(205.726.146)**	***Total***

34. PENDAPATAN NON OPERASIONAL / *34. NON OPERATING INCOME*

	2025	2024	
Klaim asuransi	78.903.816.835	68.374.882.873	*Insurance claim*
Pemulihan imbalan kerja	14.226.869.803	-	*Reversal of employee benefit*
Lainnya	7.174.364.440	11.031.743.687	*Others*
Jumlah	**100.305.051.078**	**79.406.626.560**	***Total***

35. BEBAN NON OPERASIONAL / *35. NON OPERATING EXPENSE*

	2025	2024	
Rugi penghapusan aset tetap	10.535.429	79.027.836	*Loss on write off of fixed assets*
Denda dan sanksi	204.429.158	35.293.782	*Fines and penalties*
Lainnya	3.300.884.137	1.316.906.123	*Others*
Jumlah	**3.515.848.724**	**1.431.227.741**	***Total***

36. PERPAJAKAN / *36. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Tax payable*

	2025	2024	
Pajak Penghasilan pasal 21	336.804.830	5.726.154.813	*Income tax article 21*
Pajak Penghasilan pasal 25	24.823.409.574	17.240.178.377	*Income tax article 25*
Pajak Penghasilan pasal 29	1.008.657.007	80.662.408	*Income tax article 29*
Pajak Penghasilan pasal 4 (2)	6.810.606.912	8.883.122.094	*Income tax article 4 (2)*
Pajak Penghasilan pasal 23	293.854.881	301.315.918	*Income tax article 23*
Pajak Penghasilan pasal 26	46.470	46.470	*Income tax article 26*
Lainnya	132.968	262.493.396	*Income tax article 22*
Jumlah	**33.273.512.642**	**32.493.973.476**	***Total***

b. Beban pajak / *b. Expense tax*

	2025	2024	
Pajak kini	140.268.578.120	152.520.121.600	*Current tax*
Pajak tangguhan	3.002.867.370	13.933.673.393	*Deferred tax*
Jumlah	**143.271.445.490**	**166.453.794.993**	***Total***

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax, as shown in the statements of income, and taxable income are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	628.064.231.426	704.522.742.126	*Profit before tax according to statement of profit or loss*

36. PERPAJAKAN (lanjutan) / *36. TAXATION (continued)*

b. Beban (manfaat) pajak (lanjutan) / *b. Expense (income) tax (continued)*

	2025	2024	
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Imbalan kerja karyawan	78.605.237.784	(10.937.850.730)	*Employee benefits*
Penyusutan aset hak guna	3.315.619.887	2.608.762.297	*Depreciation of right-of-use assets*
Imbalan lainnya	-	(7.000.000.000)	*Other benefits*
Penyusutan aset tetap	(2.381.225.364)	(2.381.225.364)	*Depreciation of an fixed assets*
Dana kesejahteraan	(11.926.866.655)	(19.233.537.962)	*Welfare fund*
Jasa produksi	(14.206.976.320)	5.867.289.427	*Production service*
Kerugian penurunan nilai	(67.055.186.470)	(32.258.316.728)	*Impairment loss*
	(13.649.397.138)	**(63.334.879.060)**	
Perbedaan tetap	**23.169.612.232**	**52.085.416.934**	***Permanent differences***
Laba kena pajak	**637.584.446.000**	**693.273.280.000**	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan			***Income tax expense***
22% x Rp637.584.446.000	(140.268.578.120)	-	*22% x Rp637,584,446,000*
22% x Rp693.273.280.000	-	(152.520.121.600)	*22% x Rp693,273,280,000*
Jumlah	(140.268.578.120)	(152.520.121.600)	***Total***
Pajak dibayar dimuka			***Prepaid tax***
Pajak penghasilan pasal 25	139.259.921.113	152.439.459.192	*Income tax article 25*
Utang pajak	**(1.008.657.007)**	**(80.662.408)**	***Current tax payable***

Rekonsiliasi antara beban pajak Bank dan hasil penyajian laba akuntansi sebelum manfaat (beban) pajak dikalikan dengan pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Bank's tax expense and the Bank's commercial reporting income before income tax benefit (expense) multiplied by the prevailing rate is as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif	628.064.231.426	704.522.742.126	*Income before tax expense as reported in the statement of comprehensive income*
Pembulatan	628.064.231.000	704.522.742.000	*Rounded*
Pajak dihitung berdasarkan tarif berlaku	(138.174.130.820)	(154.995.003.240)	*Tax expenses calculated based on rates*
Pengaruh beban yang tidak dapat dikurangkan	(5.097.314.670)	(11.458.791.753)	*Non deductible expense*
Jumlah	**(143.271.445.490)**	**(166.453.794.993)**	***Total***

Bank akan menyampaikan SPT untuk tahun 2025 sesuai dengan perhitungan tersebut di atas.

The Bank will file its SPT for 2025 in accordance with the above calculation.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai dengan SPT yang dilaporkan ke kantor pajak.

The calculation of corporate income tax for the years ended December 31, 2024 have been agreed with the Annual Corporate Tax Return reported to the tax office.

36. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***36. TAXATION (continued)***

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan
Pengaruh pajak tangguhan atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan perpajakan adalah sebagai berikut:

c. Deferred tax assets (liabilities)
The tax effects of significant temporary differences between commercial reporting and tax purposes are as follows:

	2025				
	31 Desember/ *December, 31,* 2024	**Diakui pada laporan laba rugi/ *Recognised in statements of income***	**Diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Recognised in other comprehensive income***	**31 Desember/ *December, 31,* 2025**	
Jasa produksi	31.566.711.566	(3.125.534.790)	-	28.441.176.776	*Production service*
Dana kesejahteraan	19.238.656.275	(2.623.910.664)	-	16.614.745.611	*Welfare funds*
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit	126.077.627.752	(14.752.141.023)	-	111.325.486.729	*Allowance impairment losses on loans*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	67.909.870.430	17.293.152.312	614.733.175	85.817.755.917	*Employee benefits liabilities*
Penyusutan aset hak guna	(2.278.863.064)	729.436.375	-	(1.549.426.689)	*Depreciation of right of use assets*
Penyusutan aset tetap	(11.527.990.586)	(523.869.580)	-	(12.051.860.166)	*Depreciation of fixed assets*
Aset pajak tangguhan	**230.986.012.373**	**(3.002.867.370)**	**614.733.175**	**228.597.878.178**	***Deferred tax assets***

	2024				
	31 Desember/ *December, 31,* 2023	**Diakui pada laporan laba rugi/ *Recognised in statements of income***	**Diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Recognised in other comprehensive income***	**31 Desember/ *December, 31,* 2024**	
Jasa produksi	30.275.907.892	1.290.803.674	-	31.566.711.566	*Production service*
Dana kesejahteraan	23.470.034.627	(4.231.378.352)	-	19.238.656.275	*Welfare funds*
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit	133.174.457.432	(7.096.829.680)	-	126.077.627.752	*Allowance impairment losses on loans*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	69.404.696.915	(2.406.327.161)	911.500.676	67.909.870.430	*Employee benefits liabilities*
Penyusutan aset hak guna	(2.852.790.770)	573.927.706	-	(2.278.863.064)	*Depreciation of right of use assets*
Imbalan lainnya	1.540.000.000	(1.540.000.000)	-	-	*Depreciation of Other benefits*
Penyusutan aset tetap	(11.004.121.006)	(523.869.580)	-	(11.527.990.586)	*Depreciation of fixed assets*
Aset pajak tangguhan	**244.008.185.090**	**(13.933.673.393)**	**911.500.676**	**230.986.012.373**	***Deferred tax assets***

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 ("PMK-74") tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, terdapat perubahan pada ketentuan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selisih lebih antara saldo awal cadangan piutang tak tertagih tahun 2024 yang dihitung menggunakan PMK-74 dan saldo akhir cadangan piutang tak tertagih tahun 2023 yang dihitung menggunakan peraturan sebelumnya akan diakui oleh Bank sebagai beban yang dapat dikurangkan pada tahun fiskal 2024 dan 2025. Terkait dengan hal tersebut, aset pajak tangguhan yang dimanfaatkan Bank pada tahun fiskal 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.773.154.037 2024 dan Rp8.333.919.569.

36. TAXATION (continued)

c. Deferred tax assets (liabilities)

Based on the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 74 Year 2024 ("PMK-74") concerning the Establishment of Reserves for Uncollectible Receivables that Can Be Deductible from Gross Income, there are changes to the provisions for calculating the allowance for uncollectible receivables that can be deducted from gross income. The excess difference between the initial balance of the 2024 uncollectible receivables reserve calculated using PMK-74 and the final balance of the 2023 uncollectible receivables reserve calculated using the previous regulation will be recognised by the Bank as a deductible expense in the 2024 and 2025 fiscal years. Related to this, the deferred tax assets utilized by the Bank in fiscal years 2025 and 2024 amounted to Rp55,773,154,037 and Rp8,333,919,569, respectively.

d. Surat Ketetapan Pajak

Tahun pajak 2020

Pada tahun 2025, Bank telah menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan dan surat tagihan pajak untuk tahun pajak 2020 yang terdiri dari:

(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan 25/29 Badan No.00030/206/20/201/25 tanggal 30 Desember 2025 Masa Pajak Januari - Desember 2020 sebesar Rp5.332.461.788.

(ii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 No.00030/201/20/201/25 tanggal 30 Desember 2025 Masa Pajak Desember 2020 sebesar Rp2.738.689.865.

(iii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00029/203/20/201/25 tanggal 30 Desember 2025 Masa Pajak Desember 2020 sebesar Rp97.487.815.

Tahun pajak 2019

Pada tahun 2023, Bank telah menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan dan surat tagihan pajak untuk tahun pajak 2019 yang terdiri dari:

(i) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan 25/29 Badan No.00007/206/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp23.993.379.309.

d. Tax Assessment Letter

Fiscal year 2020

In 2025, the Bank has received a tax assessment letter for underpayment of income tax and tax colletion letter for the 2020 fiscal year which consists of:

(i) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax 25/29 No.00030/206/20/201/25 dated December 30, 2025 tax period January to December 2020 amounted to Rp5,332,461,788.

(ii) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 21 No.00030/201/20/201/25 dated December 30, 2025 tax period December 2020 amounted to Rp2,738,689,865.

(iii) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 23 No.00029/203/20/201/25 dated December 30, 2025 tax period December 2020 amounted to Rp97,487,815.

Fiscal year 2019

In 2023, the Bank has received a tax assessment letter for underpayment of income tax and tax colletion letter for the 2019 fiscal year which consists of:

(i) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax 25/29 No.00007/206/19/201/23 dated June 20, 2023 tax period December 2019 amounted to Rp23,993,379,309.

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)
Tahun pajak 2019 (lanjutan)

(ii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 No.00007/201/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Januari sampai Desember 2019 sebesar Rp3.074.775.980.

(iii) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00025/203/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp1.051.615.317.

(iv) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) No.00031/240/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp95.323.631.314.

(v) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00012/207/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp645.342.759.

(vi) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Bea Materai No.00001/259/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp3.462.012.000.

(vii) Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00350/107/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp44.915.281.

Bank telah melakukan pembayaran atas risiko SKPKB dan STP yang mungkin terjadi sebesar Rp5.642.027.260, dan bank telah mengajukan keberatan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, dengan rincian sebagai berikut:

(i) Pengajuan Surat Keberatan No.SR/181/DIR/UM/09-2023 tanggal 4 September 2023 tentang pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan 25/29 Badan No. 00007/206/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp23.993.379.309.

(ii) Pengajuan Surat Keberatan No.SR/182/DIR/UM/09-2023 tanggal 4 September 2023 tentang pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 No. 00007/2011/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Januari sampai Desember 2019 sebesar Rp3.074.775.980.

36. TAXATION (continued)

d. Tax Assessment Letter (continued)
Fiscal year 2019 (continued)

(ii) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 21 No.00007/201/19/201/23 dated June 20, 2023 tax period January to December 2019 amounted to Rp3,074,775,980.

(iii) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Tax Article 23 No.00025/203/19/201/23 dated June 20, 2023 tax period December 2019 amounted to Rp1,051,615,317.

(iv) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Income Article 4 (2) Tax No.00031/240/19/201/23 dated June 20, 2023 tax period December 2019 amounted to Rp95,323,631,314.

(v) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Value Added Tax on goods and services No.00012/207/19/201/23 dated June 20, 2023 tax period December 2019 amounted to Rp645,342,759.

(vi) Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB) Stamp Duty Tax No.00001/259/19/201/23 dated June 20, 2023 tax period December 2019 amounted to Rp3,462,012,000.

(vii) Tax Colletion Letter (STP) Value Added Tax on Goods and Services No.00350/107/19/201/23 dated June 20, 2023 tax period December 2019 amounted to Rp44,915,281.

The bank has made payments for the risks of SKPKB and STP that may occur in the amount of Rp5,642,027,260, and the bank has filed an objection to the Regional Office of the Directorate General of Taxes of West Sumatra and Jambi, with the following details:

(i) Submission of Objection Letter No. SR/181/DIR/UM/09-2023 dated September 4, 2023 regarding the submission of an objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) Income Tax 25/29 Entity No.00007/206/19/201/23 dated June 20, 2023 for the December 2019 Tax Period amounting to IDR 23,993,379,309.

(ii) Submission of Objection Letter No. SR/181/DIR/UM/09-2023 dated September 4, 2023 regarding the submission of an objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) Income Tax 25/29 Entity No.00007/206/19/201/23 dated June 20, 2023 for the December 2019 Tax Period amounting to IDR 23,993,379,309.

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)
Tahun pajak 2019 (lanjutan)

Bank telah melakukan pembayaran atas risiko SKPKB dan STP yang mungkin terjadi sebesar Rp5.642.027.260, dan bank telah mengajukan keberatan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi, dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

(iii) Pengajuan Surat Keberatan No.SR/183/DIR/UM/09-2023 tanggal 4 September 2023 tentang pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00025/2013/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp1.051.615.317.

(iv) Pengajuan Surat Keberatan No.SR/179/DIR/UM/09-2023 tanggal 4 September 2023 tentang pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) No. 00031/240/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp95.323.631.314.

(v) Pengajuan Surat Keberatan No.SR/178/DIR/UM/09-2023 tanggal 4 September 2023 tentang pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No.00012/207/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp645.342.759.

(vi) Pengajuan Surat Keberatan No.SR/177/DIR/UM/09-2023 tanggal 4 September 2023 tentang pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Bea Materai No.00001/259/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023 Masa Pajak Desember 2019 sebesar Rp3.462.012.000.

36. TAXATION (continued)

d. Tax Assessment Letter (continued)
Fiscal year 2019 (continued)

The bank has made payments for the risks of SKPKB and STP that may occur in the amount of Rp5,642,027,260, and the bank has filed an objection to the Regional Office of the Directorate General of Taxes of West Sumatra and Jambi, with the following details: (continued)

(iii) Submission of Objection Letter No. SR/183/DIR/UM/09-2023 dated September 4, 2023, regarding the submission of an objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) of Income Tax Article 23 No.00025/2013/ 19/201/23 dated June 20, 2023 for the December 2019 Tax Period in the amount of IDR 1,051,615,317.

(iv) Submission of Objection Letter No. SR/179/DIR/UM/09-2023 dated September 4, 2023 regarding the submission of an objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) of Income Tax Article 4 (2) No.00031/240/19/201/23 dated June 20, 2023 for the December 2019 Tax Period in the amount of IDR 95,323,631,314.

(v) Submission of Objection Letter No.SR/178/DIR/UM/09-2023 dated September 4, 2023 regarding the submission of an objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) for Value Added Tax on Goods and Services No.00012/207/19/201/23 dated June 20, 2023 for the December 2019 Tax Period in the amount of IDR 645,342,759.

(vi) Submission of Objection Letter No. SR/177/DIR/UM/09-2023 dated September 4, 2023 regarding the submission of an objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) Stamp Duty No.00001/259/19/201/23 dated June 20, 2023 for the December 2019 Tax Period amounting to IDR 3,462,012,000.

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)
Tahun pajak 2019 (lanjutan)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatra Barat dan Jambi telah memberikan putusan keberatan senilai Rp114.358.120.256 dengan rincian sebagai berikut:

(i) Surat Keputusan Keberatan No.KEP-00148/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tetang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 25/29 Badan sehingga Pajak Terhutang Menjadi Rp14.458.424.649.

(ii) Surat Keputusan Keberatan No.KEP-00144/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tetang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga Pajak Terhutang Menjadi Rp2.968.052.456.

(iii) Surat Keputusan Keberatan No.KEP-00145/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tetang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga Pajak Terhutang Menjadi Rp962.669.078.

(iv) Surat Keputusan Keberatan No.KEP-00146/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tetang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 sehingga Pajak Terhutang tetap dipertahankan Menjadi Rp95.323.631.314.

(v) Surat Keputusan Keberatan No.KEP-00147/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tetang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa sehingga Pajak Terhutang tetap dipertahankan Menjadi Rp645.342.759.

(vi) Surat Keputusan Keberatan No.KEP-00149/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tetang keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Bea Meterai sehingga Pajak Terhutang Menjadi Nihil.

36. TAXATION (continued)

d. Tax Assessment Letter (continued)
Fiscal year 2019 (continued)

The Regional Office of the Directorate General of Taxes for West Sumatra and Jambi has issued an objection decision worth IDR 114,358,120,256 with the following details:

(i) Objection Decision Letter No.KEP-00148/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024 regarding the taxpayer's objection to the Tax Assessment Letter for Income Tax Underpayment 25/29 Entity so that the Tax Payable becomes Rp14,458,424,649.

(ii) Objection Decision Letter No.KEP-00144/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding the taxpayer's objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment of Income Tax Article 21, resulting in a tax liability of IDR 2,968,052,456.

(iii) Objection Decision Letter No.KEP-00145/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding the taxpayer's objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment of Income Tax Article 23, resulting in a tax liability of IDR 962,669,078.

(iv) Objection Decision Letter No.KEP-00146/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding the taxpayer's objection to the Tax Assessment Letter for Underpayment of Income Tax Article 4 Paragraph 2, so that the Tax Payable remains at Rp95,323, 631,314.

(v) Decision Letter No.KEP-00147/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding taxpayer objections to the Tax Assessment Letter for Value Added Tax Underpayment on Goods and Services, thereby maintaining the tax payable at Rp645,342,759.

(vi) Objection Decision Letter No.KEP-00149/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding taxpayer objections to the Tax Assessment Letter for Stamp Duty Underpayment, resulting in zero tax payable.

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)
Tahun pajak 2019 (lanjutan)

Terkait dengan Keputusan Keberatan yang diterbitkan, bank telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

(i) Permohonan Banding No.SR/126/DIR/UM/08-2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-00148/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Badan) No.00007/206/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023.

(ii) Permohonan Banding No.SR/123/DIR/UM/08-2024 Tanggal 12 Agustus 2024 tentang permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-00144/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 No.00007/201/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023.

(iii) Permohonan Banding No.SR/125/DIR/UM/08-2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-00145/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00025/203/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023.

(iv) Permohonan Banding No.SR/127/DIR/UM/08-2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-00146/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) No.00031/240/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023.

(v) Permohonan Banding No.SR/124/DIR/UM/08-2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP- 00147/KEB/PJ/WPJ.27/2024 tanggal 6 Juni 2024 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00012/207/19/201/23 tanggal 20 Juni 2023.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Pengadilan Pajak Repbulik Indonesia belum mengeluarkan putusan terkait Permohonan Banding yang disampaikan.

36. TAXATION (continued)

d. Tax Assessment Letter (continued)
Fiscal year 2019 (continued)

Regarding the published Objection Decision, the bank has filed an appeal with the Tax Court of the Republic of Indonesia, with the following details:

(i) Appeal No. SR/126/DIR/UM/08-2024 dated August 12, 2024, regarding an appeal against the Director General of Taxes' Decision No. KEP-00148/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding the objection to Tax Assessment Letter for Income Tax Underpayment (Entity) No. 00007/206/19/201/23 dated June 20, 2023.

(ii) Appeal No.SR/123/DIR/UM/08-2024 dated August 12, 2024, regarding an appeal against the Director General of Taxes' Decision No. KEP-00144/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding the Objection to Tax Assessment Letter for Income Tax Underpayment Article 21 No.00007/201/19/201/23 dated June 20, 2023.

(iii) Appeal No. SR/125/DIR/UM/08-2024 dated August 12, 2024, regarding an appeal against the Director General of Taxes' Decision No. KEP-00145/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding the Objection to Tax Assessment Letter for Income Tax Underpayment Article 23 No.00025/203/19/201/23 dated June 20, 2023.

(iv) Appeal No.SR/127/DIR/UM/08-2024 dated August 12, 2024, regarding an appeal against the Director General of Taxes' Decision No.KEP-00146/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding the objection to the Tax Assessment Letter for Final Income Tax Underpayment Article 4 Paragraph (2) No.00031/240/19/201/23 dated June 20, 2023.

(v) Appeal No. SR/124/DIR/UM/08-2024 dated August 12, 2024, regarding an appeal against the Director General of Taxes' Decision No. KEP-00147/KEB/PJ/WPJ.27/2024 dated June 6, 2024, regarding the Objection to Tax Assessment Letter for Value Added Tax Underpayment No. 00012/207/19/201/23 dated June 20, 2023.

As of the date of publication of the financial statements, the Tax Court of the Republic of Indonesia has not yet issued a decision regarding the Appeal.

37. LABA PER SAHAM

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan jumlah saham biasa akhir tahun yang biasa beredar pada tahun yang bersangkutan.

37. EARNINGS PER SHARES

Net earning per share is computed by dividing the net earning to the shareholders with total ordinary shares at end of year generally that outstanding during the related year.

	2025	2024	
Laba operasional	531.275.029.072	626.547.343.307	*Operating income*
Laba bersih	484.792.785.936	538.068.947.133	*Net income*

Jumlah rata-rata tertimbang lembar saham ditempatkan dan setor penuh:

Weighted average total of issued and fully-paid share units:

	2025	2024	
Rata tertimbang lembar saham	1.906.324	1.868.978	*Weighted Average of shares*
Laba operasional per saham	278.691	335.235	*Operating income per share*
Laba bersih per saham	254.308	287.895	*Net income per share*

38. TAGIHAN DAN LIABILITAS KONTINJENSI

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Bank yang dicatat pada *extra-comptable (off balance sheet*) adalah sebagai berikut:

38. RECEIVABLES AND LIABILITIES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Commitments and contingent transaction in the normal course of the Bank's activities that have recorded on extra-comptable (off balance sheet) are as follow:

	2025	2024	
Komitmen			***Commitment***
Komitmen kredit yang belum ditarik	(731.635.419.416)	(473.268.029.199)	*Unused loan facility*
Liabilitas komitmen - bersih	(731.635.419.416)	(473.268.029.199)	*Liabilities - net*
Kontijensi			***Contingency***
Tagihan kontinjensi:			*Contingencies receivables*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	244.492.904.806	301.288.874.299	*Interest receivable on non performing loan*
Liabilitas kontinjensi:			*Contingency liabilities*
Garansi yang diterbitkan:	(318.308.425.107)	(269.709.814.747)	*Guarantee granded:*
Tagihan kontinjensi - bersih	(73.815.520.301)	31.579.059.552	*Contingencies receivables - net*
Total liabilitas komitmen dan kontinjensi - bersih	**(805.450.939.717)**	**(441.688.969.647)**	***Total commitment and contingencies liabilities - net***

IMBALAN KERJA | ***39. EMPLOYEE BENEFITS***

	2025	2024	
Liabilitas imbalan kerja	390.080.708.718	308.681.229.231	*Defined benefit pension plan*
Jumlah	**390.080.708.718**	**308.681.229.231**	***Total***

a. Program pensiun imbalan pasti

Bank Nagari memiliki program pensiun imbalan pasti melalui Dana Pensiun PT Bank Nagari yang pesertanya meliputi semua pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai tetap.

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada karyawannya yang memenuhi syarat yaitu program pensiun manfaat pasti.

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan masa kerja karyawan tersebut pada Bank Nagari dan penghasilan dasar pensiun peserta terakhir dari peserta sebelum berhenti bekerja dengan maksimum manfaat pensiun sebesar 2,5% dari penghasilan dasar pensiun.

Jumlah pegawai Bank Nagari yang memiliki hak atas imbalan kerja adalah 1.875 orang dan 1.927 orang masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak direview).

Program pensiun Bank dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. luran pensiun ditetapkan 35,96% dari gaji karyawan, kontribusi pegawai adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan sisa jumlah yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank sebesar 30,96%.

Penilaian aktuaria atas manfaat pensiun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaris dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Mutasi atas nilai kini liabilitas program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a. Defined benefit pension plan

Bank Nagari has a defined benefit pension program through the Pension Fund of PT Bank Nagari, whose participants include all employees who have been appointed as permanent employees.

The Bank provides long-term benefits and post-employment benefits to all qualified employee which is defined benefit pension.

The program provides retirement benefits to be paid to eligible employees at the time the employee retired in accordance with the relevant pension fund regulations. Retirement benefits are calculated based on the period of employment at the Bank Nagari and the basic retirement income last participant of the participants before they retired with the maximum retirement benefit at 2.5% of pensionable earnings.

The total number of qualified employees of Bank Nagari who are entitled to the benefits are 1,875 employees and 1,927 employees as of December 31, 2024 and 2023, respectively (unreview).

The Bank's defined benefit pension plan is managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. The contribution is 35,96% of the employee's salary, the employee‘s contribution is 5% of the employee's pension base salary and the remaining amounts required to fund the plan are contributed by the Bank 30.96%.

The actuarial calculations of pension benefits for the years ended December 31, 2025 and 2024 were prepared by a registered actuarial consulting firm and using the "Projected Unit Credit" method.

The movement in the present value of defined benefits pension plan liability for the dated December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas	(1.391.596.792.106)	(1.370.664.100.068)	*Present value of liability*
Biaya bunga	(96.448.423.784)	(95.094.656.172)	*Interest cost*
Biaya jasa kini	(55.804.069.088)	(57.072.933.866)	*Current service cost*
(Kurtailmen)/ penyesuaian	-	125.680.120.253	*(Curtailment)/ adjustment*
Kerugian aktuaria - asumsi	(74.277.998.326)	71.134.092.367	*Actuarial loss - assumption*
Pembayaran imbalan kerja	66.336.576.214	62.605.491.079	*Actual benefit paid*
Kerugian aktuaria - liabilitas	21.783.330.610	(128.184.805.699)	*Actuarial loss - liability*
Nilai kini liabilitas program pensiunan imbalan pasti	**(1.530.007.376.480)**	**(1.391.596.792.106)**	***Present value of defined benefits pension plan liability***

39. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

a. Program pensiun imbalan pasti (lanjutan)
Mutasi atas nilai wajar aset program masing - masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

a. Defined benefit pension plan (continued)
The movement in the value of plan assset for the dated December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	1.394.865.808.853	1.447.497.737.919	*Beginning balance*
Hasil pengembangan riil	125.159.417.069	91.014.075.897	*Actual investment result*
Pembayaran iuran-iuran - pemberi kerja	45.814.942.073	41.233.592.356	*Contribution paid - employer's*
Pembayaran iuran - iuran - peserta program	6.990.705.671	6.303.357.769	*Contribution paid - employee plan*
Penyelesaian	-	(128.577.464.009)	*Settlement*
Pembayaran imbalan kerja	(66.336.576.214)	(62.605.491.079)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**1.506.494.297.452**	**1.394.865.808.853**	***Ending balance***

Mutasi atas liabilitas program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit pension plan liability for the dated December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Liabilitas program pensiun imbalan pasti awal tahun	-	-	*Defined benefit pension plan liability at beginning of year*
Beban tahun berjalan	(69.328.021.101)	(41.233.592.356)	*Expenses for the year*
Pembayaran manfaat	45.814.942.073	41.233.592.356	*Payment of benefits*
Liabilitas program pensiun imbalan pasti akhir tahun	(23.513.079.028)	-	***Defined benefit pension plan liability at end of the year***

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The remeasurement of the defined benefit pension plan liabilities (assets) as of December 31, 2025 and 2024, respectively, is as follows:

	2025	
Saldo awal	-	*Beginning balance*
(Keuntungan)/ kerugian aktuaria	(52.494.667.716)	*Actuarial (gain)/ loss*
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga neto aset/liabilitas	3.501.116.936	*Amendment of the impact on assets outside interest in net assets/liability*
Imbal hasil atas aset program	26.604.292.601	*Return on assets program*
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	**(22.389.258.179)**	***The remeasurement of defined benefit pension liability net***

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Pension expenses recognized in the statements of comprehensive income are as follow:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	(55.804.069.088)	(57.072.933.866)	*Current service cost*
Bunga neto atas aset	1.874.600.495	1.687.561.729	*Net interest on assets*
Kerugian aktuaria	-	(2.897.343.756)	*Actuarial loss*
Iuran dibayar karyawan	6.990.705.671	6.303.357.769	*Contribution paid by emploiee*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(46.938.762.922)**	**(51.979.358.124)**	***Expense recognized in the profit loss statement***

39. IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program pensiun imbalan pasti (lanjutan)
Perhitungan liabilitas imbalan kerja program dana pensiun untuk tahun 2025 dan 2024 telah sesuai dengan Laporan Aktuaris No.25072/BNGR/AP/02/2026 tanggal 19 Februari 2026 oleh Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan di atas adalah:

39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Defined benefit pension plan (continued)
The calculation of liabilities for employee benefits pension plans for year 2025 and 2024 in accordance with the Actuary Report No.25072/BNGR/AP/02/2026 dated February 19, 2026 by Actuary Consulting Firm Enny Diah Awal.

The key assumptions used in the above calculation are:

	2025	**2024**	
Tingkat bunga aktuaria	6,80%	7,10%	*Actuarial interest rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	7,50%	7,50%	*Annual salary growth rate*
Tabel mortalita - peserta aktif	*125% The 1971 Group Annuity (Male)*	*125% The 1971 Group Annuity (Male)*	*Mortality table - active participant*
Tabel mortalita - peserta pasif	UN 2010 *Male*	UN 2010 *Male*	*Mortality table - passive participant*
Tingkat cacat	0,01% per tahun/ *0.01% per year*	10% tingkat kematian/ *10% mortality rate*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	1,00% pada usia 25 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/ *1.00% at age 25 and decreasing linearly to 0.00% at normal retirement age*	1,00% pada usia 25 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/ *1.00% at age 25 and decreasing linearly to 0.00% at normal retirement age*	*Resignation rate*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

b. Program pesangon pensiun
Perhitungan aktuaria atas imbalan pasca kerja berupa program pesangon pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dalam laporannya tanggal 19 Februari 2026 dan 21 Januari 2025 dengan mempertimbangkan asumsi - asumsi sebagai berikut:

b. Pension severance program
Actuarial calculation of post employment benefits in the form of pension severance program as of December 31, 2026, and 2024 in their reports dated February 19, 2026 and January 21, 2025, respectively, by considering the following assumptions:

	2025	**2024**	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	6,47%	7,10%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan upah	7,50%	7,50%	*Annual salary growth rate*
Asumsi lainnya:			***Othe assumptions:***
Tabel mortalita	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Mortality Indonesia 2019 Table*	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Mortality Indonesia 2019 Table*	*Mortality table*
Tingkat cacat	10% tabel mortalita/ *10% mortality table*	10% tabel mortalita/ *10% mortality table*	*Disability rate*

39. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

b. Program pesangon pensiun (lanjutan) / *b. Pension severance program (continued)*

	2025	2024	
Asumsi lainnya: (lanjutan)			***Othe assumptions: (continued)***
Tingkat pengunduran diri	1% pada usia 20 tahun menurun secara linear sampe dengan 0 pada usia pensiun normal/ *1% at age 20 decreases linearly to 0 at normal retirement age*	1% pada usia 20 tahun menurun secara linear sampe dengan 0 pada usia pensiun normal/ *1% at age 20 decreases linearly to 0 at normal retirement age*	*Retirement rate*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

Mutasi atas nilai kini liabilitas program pesangon pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of pension severance program liability for the dated December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas	(240.741.490.659)	(220.497.200.894)	*Present value of liability*
Biaya bunga	(16.807.331.083)	(14.567.539.242)	*Interest cost*
Biaya jasa kini	(14.210.650.535)	(13.087.309.194)	*Current service cost*
Pembayaran imbalan kerja	8.037.035.314	12.537.365.248,00	*Actual benefit paid*
Kerugian aktuaria - asumsi	(13.151.662.582)	6.807.416.820,00	*Actuarial loss - assumption*
Kerugian aktuaria - liabilitas	30.209.020.953	(11.934.223.397)	*Actuarial loss - liability*
Nilai kini liabilitas program pensiunan imbalan pasti	**(246.665.078.592)**	**(240.741.490.659)**	***Present value of defined benefits pension plan liability***

Mutasi atas liabilitas program pesangon pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the pension severance program liability for the dated December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Liabilitas imbalan pasca kerja awal tahun	(86.524.365.614)	(77.934.329.274)	*Post employee benefits liability at beginning of year*
Beban tahun berjalan	(19.959.658.429)	(17.988.613.874)	*Expenses for the year*
Pengukuran kembali atas liabilitas	21.458.854.890	(2.314.061.016)	*Remeasurement of liability*
Pembayaran manfaat	11.104.846.874	11.712.638.550	*Payment of benefits*
Liabilitas imbalan pasca kerja akhir tahun	**(73.920.322.279)**	**(86.524.365.614)**	***Post employment benefits liability at end of year***

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program pesangon pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The remeasurement of pension severance program liabilities (assets) as of December 31, 2025 and 2024, respectively, is as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	21.936.211.616	24.250.272.632	*Beginning balance*
(Keuntungan)/ kerugian aktuaria	21.458.854.890	(2.314.061.016)	*Actuarial (gain)/ loss*
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	**43.395.066.506**	**21.936.211.616**	***The remeasurement of defined benefit pension liability net***

39. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

b. Program pesangon pensiun (lanjutan) / *b. Pension severance program (continued)*

Biaya program imbalan pesangon pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut:

Pension severance program expenses recognized in the statements of comprehensive income are as follow:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	(14.210.650.535)	(13.087.309.194)	*Current service cost*
Bunga neto atas aset	(5.749.007.894)	(4.901.304.680)	*Net Interest on assets*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(19.959.658.429)**	**(17.988.613.874)**	***Expense recognized in the profit loss statement***

c. Program imbalan cuti panjang / *c. Long - term compensated leaves benefits*

Perhitungan aktuaria atas imbalan jangka panjang lainnya berupa program imbalan cuti panjang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dalam laporannya tanggal 19 Februari 2026 dan 21 Januari 2025 dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Actuarial calculation of other long-term benefits in the form of long-term compensated leaves benefits as of December 31, 2025 and 2024 in their reports dated February 19, 2026 and January 21, 2025, respectively, by considering the following assumptions:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	6,00%	6,70%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan upah	7,50%	7,50%	*Annual salary growth rate*
Asumsi lainnya:			***Othe assumptions:***
Tabel mortalita	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Mortality Indonesia 2019 Table*	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Mortality Indonesia 2019 Table*	*Mortality table*
Tingkat cacat	10% tabel mortalita/ *10% mortality table*	10% tabel mortalita/ *10% mortality table*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/ *1% at age 20 decreases linearly to 0 at normal retirement age*	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/ *1% at age 20 decreases linearly to 0 at normal retirement age*	*Retirement rate*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun berdasarkan laporan aktuaria disajikan sebagai berikut:

A reconciliation of the funding status of the pension plan based on the actuarial reports are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	(23.150.548.700)	(15.957.264.343)	*Present value of employee benefits obligation*
Nilai wajar aset program imbalan kerja	-	-	*Fair value of employee benefits plan assets*
Liabilitas imbalan kerja	**(23.150.548.700)**	**(15.957.264.343)**	***Employee benefits obligation***

39. IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Program imbalan cuti panjang (lanjutan)

Tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

Rekonsiliasi atas perubahan aset neto selama tahun 2025 dan 2024 yang diakui di laporan posisi keuangan dana pensiun adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

c. Long - term compensated leaves benefits (continued)

The above assets were not recognized in the statements of financial position as the assets did not meet the recognition criteria under the accounting standards.

The reconciliation of the movements of the net assets during 2025 and 2024 recognized in the pension fund's statement of financial position is as follows:

	2025	2024	
Aset neto pada awal tahun	(15.957.264.343)	(15.363.793.161)	*Net assets at beginning of year*
Imbalan yang dibayarkan	7.926.798.905	5.421.592.341	*Actual benefit paid*
Dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan	(15.120.083.262)	(6.015.063.523)	*Amount charged to statement of income current year*
Jumlah	**(23.150.548.700)**	**(15.957.264.343)**	***Total***

Pendapatan (biaya) program imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Employee benefits income (expenses) regocnized in the statements of income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	(5.650.093.502)	(5.299.192.785)	*Current service cost*
Biaya bunga	(803.588.948)	(835.097.801)	*Interest cost*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(8.666.400.812)	119.227.063	*(Gain) loss on actuarial recognition*
Beban yang diakui dalam Laporan laba rugi	**(15.120.083.262)**	**(6.015.063.523)**	***Expense recognized in the proft loss statement***

d. Program imbalan penghargaan masa kerja

Perhitungan aktuaria atas imbalan jangka panjang lainnya berupa penghargaan masa kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dalam laporannya tanggal 19 Februari 2026 dan 21 Januari 2025 dengan mempertimbangkan asumsi - asumsi sebagai berikut:

d. Employee services period benefits

Actuarial calculation of other long-term benefits in the form of long-term service awards as of December 31, 2025 and 2024 in their reports dated February 19, 2026 and Januari 21, 2025, respectively, by considering the following assumptions:

	2025	2024	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	6,60%	7,10%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan upah	7,50%	7,50%	*Annual salary growth rate*
Asumsi lainnya:			***Othe assumptions:***
Tabel mortalita	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Mortality Indonesia 2019 Table*	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Mortality Indonesia 2019 Table*	*Mortality table*
Tingkat cacat	10% tabel mortalita/ *10% mortality table*	10% tabel mortalita/ *10% mortality table*	*Disability rate*

39. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

d. Program imbalan penghargaan masa kerja (lanjutan) / *d. Employee services period benefits (continued)*

	2025	2024	
Asumsi lainnya: (lanjutan)			***Othe assumptions: (continued)***
Tingkat pengunduran diri	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/ *1% at age 20 decreases linearly to 0 at normal retirement age*	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/ *1% at age 20 decreases linearly to 0 at normal retirement age*	*Retirement rate*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun berdasarkan laporan aktuaria disajikan sebagai berikut:

A reconciliation of the funding status of the pension plan based on the actuarial reports are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	(252.055.073.585)	(198.177.635.843)	*Present value of employee benefits obligation*
Nilai wajar aset program imbalan kerja	-	-	*Fair value of employee benefits plan assets*
Liabilitas imbalan kerja	**(252.055.073.585)**	**(198.177.635.843)**	***Employee benefits obligation***

Tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

The above assets were not recognized in the statements of financial position as the assets did not meet the recognition criteria under the accounting standards.

Rekonsiliasi atas perubahan aset neto selama tahun 2025 dan 2024 yang diakui di laporan posisi keuangan dana pensiun adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net assets during 2025 and 2024 recognized in the pension fund's statement of financial position is as follows:

	2025	2024	
Liabilitas neto pada awal tahun	(198.177.635.844)	(179.659.839.422)	*Net Liability at beginning of year*
Imbalan yang dibayarkan	10.120.333.530	12.363.559.116	*Actual benefit paid*
Dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan	(63.997.771.272)	(30.881.355.538)	*Amount charged to statement of income current year*
Jumlah	**(252.055.073.585)**	**(198.177.635.844)**	***Total***

Pendapatan (biaya) program imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Employee benefits (expenses) income regocnized in the statements of income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	(16.371.546.627)	(15.709.409.549)	*Current service cost*
Biaya bunga	(13.711.340.305)	(11.796.508.071)	*Interest cost*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(33.914.884.340)	(3.375.437.918)	*(Gain) loss on actuarial recognition*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(63.997.771.272)**	**(30.881.355.538)**	***Expense recognized in the proft loss statement***

39. IMBALAN KERJA (lanjutan)

e. Program penghargaan dan jasa pengabdian Direksi

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja program penghargaan dan jasa pengabdian direksi pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 19 Februari 2026 dan 21 Januari 2025 dengan mempertimbangkan asumsi - asumsi sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

e. Award program and service of the Board of Directors

The actuarial valuation of the rewards of award program work and service of directors for the years ended December 31, 2025 and 2024, was performed by registered actuarial consulting firm, Enny Diah Awal Actuarial Consultant Office, using the "Projected Unit Credit" method as stated in its reports dated February 19, 2026 and January 21, 2025, taking into account the following assumptions:

	2025	**2024**	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto	5,40%	6,70%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan upah	7,50%	7,50%	*Annual salary growth rate*
Asumsi lainnya:			***Othe assumptions:***
Tabel mortalita	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Mortality Indonesia 2019 Table*	Tabel Mortalita Indonesia 2019/ *Mortality Indonesia 2019 Table*	*Mortality table*
Tingkat cacat	10% tabel mortalita/ *10% mortality table*	10% tabel mortalita/ *10% mortality table*	*Disability rate*
Tingkat pengunduran diri	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/ *1% at age 20 decreases linearly to 0 at normal retirement age*	1,00% pada usia 20 tahun dan menurun secara linear sampai dengan 0,00% pada usia pensiun normal/ *1% at age 20 decreases linearly to 0 at normal retirement age*	*Retirement rate*
Metode	*Projected Unit Credit*	*Projected Unit Credit*	*Method*

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program penghargaan dan jasa pengabdian Direksi berdasarkan laporan aktuaria disajikan sebagai berikut:

A reconciliation of the funding status of the award program and service of the Board of Directors based on the actuarial reports are as follows:

	2025	**2024**	
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	(12.983.685.126)	(3.978.616.716)	*Present value of employee benefits obligation*
Nilai wajar aset program imbalan kerja	-	-	*Fair value of employee benefits plan assets*
Liabilitas imbalan kerja	**(12.983.685.126)**	**(3.978.616.716)**	***Employee benefits obligation***

Tidak ada aset yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

The above assets were not recognized in the statements of financial position as the assets did not meet the recognition criteria under the accounting standards.

39. IMBALAN KERJA (lanjutan)

e. Program penghargaan dan jasa pengabdian Direksi (lanjutan)

Rekonsiliasi atas perubahan liabilitas neto selama tahun 2025 dan 2024 yang diakui di laporan posisi keuangan dana pensiun adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

e. Award program and service of the Board of Directors (continued)

The reconciliation of the movements of the net liabilty during 2025 and 2024 recognized in the pension fund's statement of financial position is as follows:

	2025	2024	
Liabilitas neto pada awal tahun	(3.978.616.716)	(32.092.076.458)	*Net Liabilty at beginning of year*
Imbalan yang dibayarkan	-	30.476.408.106	*Actual benefit paid*
Dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan	(9.005.068.410)	(2.362.948.364)	*Amount charged to statement of income current year*
Jumlah	**(12.983.685.126)**	**(3.978.616.716)**	***Total***

(Biaya) pendapatan program imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Employee benefits (expenses) income regocnized in the statements of income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	(8.806.117.914)	(3.978.616.716)	*Current service cost*
Biaya bunga	(266.567.320)	(1.061.793.961)	*Interest cost*
Keuntungan aktuarial	67.616.824	2.677.462.313	*Gain on actuarial recognition*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(9.005.068.410)**	**(2.362.948.364)**	***Expense recognized in the proft loss statement***

f. Program penghargaan Komisaris

Bank menghitung program penghargaan Komisaris dengan perhitungan intern sebagai berikut:

f. Award program Commissioner

The Bank count award program for Commissioner with internal calculations are as follow:

	2025	2024	
Liabilitas imbalan kerja awal tahun	(3.401.000.000)	(10.425.856.754)	*Employee benefit obligations at beginning of year*
Pembayaran manfaat	-	10.425.856.754	*Payment of benefits*
Beban tahun berjalan	(1.057.000.000)	(3.401.000.000)	*Current year expense*
Liabilitas imbalan kerja akhir tahun	**(4.458.000.000)**	**(3.401.000.000)**	***Employee benefit obligations at end of year***

Program manfaat lain

Pada tahun 2024, Bank melakukan pemecahan cadangan program manfaat lain yang sebelumnya digabung dengan Program Pensiun Manfaat Pasti. Adapun program manfaat lain antara lain sebagai berikut:

Other benefit program

In 2024, the Bank split the reserves of other benefit programs that were previously combined with the Defined Benefit Pension Program. The other benefit programs include the following:

a. Program manfaat lain dana manfaat tambahan

Manfaat yang diperhitungkan adalah 1 kali manfaat pensiun bulanan dibayarkan tiap tahun sebelum hari raya Idul Fitri. Kenaikan manfaat pensiun berkala sebesar 2,5% pertahun.

a. Other benefit programs supplementary benefit fund

The calculated benefit is 1 times the monthly pension benefit paid annually before Eid al-Fitr. Periodic pension benefit increase of 2.5% per year.

39. IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program manfaat lain dana manfaat tambahan (lanjutan)

Penilaian aktuaria atas program manfaat lain dana manfaat tambahan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dilakukan oleh kantor konsultan aktuaria dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

Mutasi atas nilai kini liabilitas program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Other benefit programs supplementary benefit fund (continued)

The actuarial calculations of other benefit programs supplementary benefit fund for the years ended December 31, 2025 and 2024, were prepared by a registered actuarial consulting firm and using the "Projected Unit Credit" method.

The movement in the present value of other benefit programs supplementary benefit fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas	(122.489.508.831)	-	*Present value of liability*
Biaya bunga	(8.410.657.872)	(8.221.639.656)	*Interest cost*
Biaya jasa kini	(4.220.778.298)	(4.428.458.816)	*Current service cost*
(Kurtailmen)/ penyesuaian	-	(117.958.944.478)	*(Curtailment)/ adjustment*
Kerugian aktuaria - asumsi	(11.025.143.709)	4.080.080.507	*Actuarial loss - assumption*
Pembayaran imbalan kerja	4.674.507.033	4.322.405.700	*Actual benefit paid*
Kerugian aktuaria - penyesuaian pengalaman	5.870.666.642	(282.952.088)	*Actuarial loss - liability*
Nilai kini liabilitas program pensiunan imbalan pasti	**(135.600.915.035)**	**(122.489.508.831)**	***Present value of defined benefits pension plan liability***

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the value of plan assset for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	130.226.456.137	-	*Beginning balance*
Hasil pengembangan riil	11.320.355.500	11.392.786.542	*Actual investment result*
Pembayaran iuran-iuran - pemberi kerja	3.833.282.758	4.029.991.074	*Contribution paid - employer's*
Penyelesaian	-	119.126.084.221	*Settlement*
Pembayaran imbalan kerja	(4.674.507.033)	(4.322.405.700)	*Actual benefit paid*
Saldo akhir	**140.705.587.362**	**130.226.456.137**	***Ending balance***
Surplus	**5.104.672.327**	**7.736.947.306**	***Surplus***

(Biaya) pendapatan program imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Employee benefits (expenses) income regocnized in the statements of income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	(4.220.778.298)	(4.428.458.816)	*Current service cost*
Bunga neto	134.164.897	225.931.604	*Net interest*
Keuntungan aktuarial	-	1.167.139.743	*Gain on actuarial recognition*
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(4.086.613.401)**	**(3.035.387.469)**	***Expense recognized in the proft loss statement***

39. IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program manfaat lain dana manfaat tambahan (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Other benefit programs supplementary benefit fund (continued)

The remeasurement of other benefit programs supplementary benefit fund liabilities (assets) for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	(994.603.605)	-	*Beginning balance*
Keuntungan aktuaria	(5.154.477.067)	3.797.128.419	*Gain on actuarial recognition*
Imbal hasil atas aset program	2.233.946.420	2.945.215.282	*Return on plan assets program*
Perubahan dampak atas aset dilua bunga neto	3.173.861.290	(7.736.947.306)	*Change in impact on assets excluding net interest*
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	**(741.272.962)**	**(994.603.605)**	***The remeasurement of defined benefit pension liability net***

Perubahan liabilitas bersih atas program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Net change in liability of other benefit programs supplementary benefit fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Liabilitas bersih awal	-	-	*Initial net liabilities*
Beban yang diakui dalam laba rugi	(4.086.613.401)	(3.035.387.469)	*Expense recognized in the profit loss statement*
Pengukuran kembali periode berjalan	253.330.643	(994.603.605)	*Current period remeasurement*
Pembayaran iuran periode berjalan	3.833.282.758	4.029.991.074	*Contribution paid - employer's*
Liabilitas bersih akhir	**-**	**-**	***Net liability***

b. Program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja

Manfaat yang diperhitungkan adalah memasuki usia pensiun normal dan atau meninggal dunia sebesar 37 kali gaji dasar serta mengundurkan diri telah diatur didalam Peraturan Dana Pensiun Bank Nagari.

Penilaian aktuaria atas program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dilakukan oleh kantor konsultan aktuaria dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

b. Other benefit programs post-employment compensation fund

Benefits that are calculated are entering normal retirement age and or death amounting to 37 times the basic salary and resignation have been regulated in the Bank Nagari Pension Fund Regulations.

The actuarial calculations of other benefit programs post-employment compensation fund for the years ended December 31, 2025 and 2024, were prepared by a registered actuarial consulting firm and using the "Projected Unit Credit" method.

39. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

b. Program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja (lanjutan)

b. Other benefit programs post-employment compensation fund (continued)

Mutasi atas nilai kini liabilitas program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of other benefit programs post-employment compensation fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas	(4.096.001.517)	-	*Present value of liability*
Biaya bunga	(287.348.462)	(103.423.904)	*Interest cost*
Biaya jasa kini	(2.397.879.206)	(1.960.595.560)	*Current service cost*
(Kurtailmen)/ penyesuaian	-	(1.456.674.710)	*(Curtailment)/ adjustment*
Pembayaran imbalan kerja	97.680.155	-	*Actual benefit paid*
Kerugian aktuaria - asumsi	(444.784.046)	183.644.921	*Actuarial loss - assumption*
Kerugian aktuaria - penyesuaian pengalaman	23.148.006	(758.952.264)	*Actuarial loss - liability*
Nilai kini liabilitas program pensiunan imbalan pasti	**(7.105.185.070)**	**(4.096.001.517)**	***Present value of defined benefits pension plan liability***

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the value of plan assset for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	3.453.654.802	-	*Beginning balance*
Hasil pengembangan riil	327.326.929	249.707.058	*Actual investment result*
Pembayaran iuran-iuran - pemberi kerja	4.374.105.868	644.606.322	*Contribution paid - employer's*
Pembayaran iuran-iuran - peserta program	640.346.675	347.095.712	*Contribution paid - program participants*
Pembayaran imbalan kerja	(97.680.155)	-	*Actual benefit paid*
Penyelesaian	-	2.212.245.710	*Settlement*
Saldo akhir	**8.697.754.119**	**3.453.654.802**	***Ending balance***
Defisit	**1.592.569.049**	**(642.346.715)**	***Deficit***

(Biaya) pendapatan program imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Employee benefits (expenses) income regocnized in the statements of income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	(2.397.879.206)	(1.960.595.560)	*Current service cost*
Bunga neto	132.406.449	(68.218.482)	*Net interest*
Keuntungan aktuarial	640.346.675	347.095.712	*Gain on actuarial recognition*
Iuran peserta	-	755.571.000	
Beban yang diakui dalam laporan laba rugi	**(1.625.126.082)**	**(926.147.330)**	***Expense recognized in the proft loss statement***

39. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja pada tanggal - tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Other benefit programs post-employment compensation fund (continued)

The remeasurement of other benefit programs post-employment compensation fund liabilities (assets) for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	(360.805.707)	-	*Beginning balance*
Kerugian aktuaria	(421.636.040)	(575.307.343)	*Loss on actuarial recognition*
Imbal hasil atas aset program	(92.427.982)	214.501.636	*Return on plan assets program*
Perubahan dampak atas aset diluar bunga neto	(1.592.569.049)	-	*Change in impact on assets excluding net interest*
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	**(2.467.438.778)**	**(360.805.707)**	***The remeasurement of defined benefit pension liability net***

Perubahan liabilitas bersih atas program manfaat lain dana kompensasi pasca kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Net change in liability of other benefit programs post-employment compensation fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Liabilitas bersih awal	(642.346.715)	-	*Initial net liabilities*
Beban yang diakui dalam laba rugi	(1.625.126.082)	(926.147.330)	*Expense recognized in the profit loss statement*
Pengukuran kembali periode berjalan	(2.106.633.071)	(360.805.707)	*Current period remeasurement*
Pembayaran iuran periode berjalan	4.374.105.868	644.606.322	*Contribution paid - employer's*
Liabilitas bersih akhir	**-**	**(642.346.715)**	***Net liability***

c. Program manfaat lain dana santunan kematian

Manfaat yang diperhitungkan adalah 12 kali (gaji dasar + tunjangan jabatan + tunjangan kinerja) untuk peserta pegawai yang meninggal dunia pada saat masih aktif bekerja. Kebijakan ini telah diatur didalam Peraturan Dana Pensiun Bank Nagari.

Penilaian aktuaria atas program manfaat lain dana santunan kematian yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dilakukan oleh kantor konsultan aktuaria dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

c. Other benefit programs death benefit fund

The calculated benefit is 12 times (basic salary + position allowance + performance allowance) for employee participants who die while still actively working. This policy has been regulated in the Bank Nagari Pension Fund Regulations.

The actuarial calculations of Other benefit programs death benefit fund for the years ended December 31, 2025 and 2024, were prepared by a registered actuarial consulting firm and using the "Projected Unit Credit" method.

39. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

b. Program manfaat lain dana santunan kematian (lanjutan) / *b. Other benefit programs death benefit fund (continued)*

Mutasi atas nilai kini liabilitas program manfaat lain dana santunan kematian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the present value of Other benefit programs death benefit fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Nilai kini liabilitas	(6.478.623.125)	-	*Present value of liability*
Biaya bunga	(435.376.688)	(444.779.576)	*Interest cost*
Biaya jasa kini	(540.431.671)	(570.117.399)	*Current service cost*
(Kurtailmen)/ penyesuaian	-	(6.264.501.065)	*(Curtailment)/ adjustment*
Pembayaran imbalan kerja	517.912.296	-	*Actual benefit paid*
Kerugian aktuaria - asumsi	(454.618.009)	335.872.456	*Actuarial loss - assumption*
Kerugian aktuaria - penyesuaian pengalaman	226.864.756	464.902.459	*Actuarial loss - liability*
Nilai kini liabilitas program pensiunan imbalan pasti	**(7.164.272.441)**	**(6.478.623.125)**	***Present value of defined benefits pension plan liability***

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The movement in the value of plan assset for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	7.670.510.434	-	*Beginning balance*
Hasil pengembangan riil	318.087.516	431.376.356	*Actual investment result*
Pembayaran iuran-iuran - pemberi kerja	532.335.900	-	*Contribution paid - employer's*
Pembayaran imbalan kerja	(517.912.296)	-	*Actual benefit paid*
Penyelesaian	-	7.239.134.078	*Settlement*
Saldo akhir	**8.003.021.554**	**7.670.510.434**	***Ending balance***
Surplus	**838.749.113**	**1.191.887.309**	***Surplus***

(Biaya) pendapatan program imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Employee benefits (expenses) income regocnized in the statements of income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Biaya jasa kini	(540.431.671)	(570.117.399)	*Current service cost*
Bunga neto	18.631.757	69.198.944	*Net interest*
Keuntungan aktuarial	-	974.633.013	*Gain on actuarial recognition*
Pendapatan yang diakui dalam laporan laba rugi	**(521.799.914)**	**473.714.558**	***Income recognized in the proft loss statement***

39. IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Program manfaat lain dana santunan kematian (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program manfaat lain dana santunan kematian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

39. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

b. Other benefit programs death benefit fund (continued)

The remeasurement of Other benefit programs death benefit fund liabilities (assets) for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Saldo awal	(473.714.558)	-	*Beginning balance*
Keuntungan aktuaria	(227.753.253)	800.774.915	*Loss on actuarial recognition*
Imbal hasil atas aset program	(219.353.041)	(82.602.164)	*Return on plan assets program*
Perubahan dampak atas aset diluar bunga neto	436.570.308	(1.191.887.309)	*Change in impact on assets excluding net interest*
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	**(484.250.544)**	**(473.714.558)**	***The remeasurement of defined benefit pension liability net***

Perubahan liabilitas bersih atas program manfaat lain dana santunan kematian pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Net change in liability of Other benefit programs death benefit fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Liabilitas bersih awal	-	-	*Initial net liabilities*
Beban yang diakui dalam laba rugi	(521.799.914)	473.714.558	*Expense recognized in the profit loss statement*
Pengukuran kembali periode berjalan	(10.535.986)	(473.714.558)	*Current period remeasurement*
Pembayaran iuran periode berjalan	532.335.900	-	*Contribution paid - employer's*
Liabilitas bersih akhir	**-**	**-**	***Net liability***

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Bank melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yangmempunyai hubungan dengan pemegang saham dan/atau manajemen yang sama dengan Bank. Kecuali pinjaman karyawan untuk karyawan kunci, transaksi-transaksi ini terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

40. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Banks conduct business with companies that have shareholders and/or management as the Bank. Except for loans to employees to key employees, these transactions is primarily related to borrowing and lending of funds in the normal course of business and have substantially been done with the normal requirements such as that done by the parties which have no special relationship.

No.	Pihak berelasi/ *Related party*	Jenis Hubungan Istimewa/ *Type of relationship*	Unsur transaksi pihak berelasi/ *Related party transactions*
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat/ *The Government of Province of West Sumatera*	Pemegang Saham Pengendali/ *Controlling Shareholders*	a. Simpanan giro/ *Demand deposit* b. Simpanan deposito berjangka/ *Time deposit* c. Beban bunga/ *Interest expenses*
2	Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Bank sebagai pendiri/ *Bank as founder*	a. Simpanan giro/ *Demand deposit* b. Simpanan deposito berjangka/ *Time* c. Beban bunga/ *Interest expenses*
3	Manajemen dan Pejabat Eksekutif Bank/ *Management and Executive Bank Officers*	Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi, Ketua Satuan Kerja Audit Intern, Ketua Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut/ *Board of Commissioner, Directors, Head of Division, Head of Internal Audit Task Force, Head of Compliance and Risk Management Task Force and Head of Branch Office and close members of the families of such individuals*	a. Simpanan giro/ *Demand deposit* b. Simpanan tabungan/ *Saving* c. Simpanan deposito berjangka/ *Time deposit* d. Beban bunga/ *Interest expenses* e. Pinjaman yang diberikan/ *Loans* f. Pendapatan bunga/ *Interest income*

Dalam kegiatan usahnya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. These transactions and balances include the following:

	2025	2024	
Pinjaman yang diberikan			***Loans***
Direksi dan karyawan	39.357.846.062	29.147.121.076	*Directors and employees*
Jumlah pinjaman yang diberikan	**39.357.846.062**	**29.147.121.076**	***Total loans***
Persentase terhadap jumlah aset	0,12%	0,09%	*Percentage to total assets*
Simpanan nasabah			***Deposit from customers***
Giro			*Current accounts*
Pemerintah Provinsi	222.692.555.843	101.480.768.232	*Government Province*
Pemerintah Kota/ Kabupaten lainnya	1.107.186.442.258	444.984.391.075	*Government Municipalities/ Regencies / others*
Tabungan			*Savings*
Direksi dan karyawan	7.400.834.910	40.430.041.473	*Directors and employees*

40. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *40. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

	2025	2024	
Deposito berjangka			*Time deposits*
Pemerintah Provinsi	92.237.570.104	-	*Government Province*
Direksi dan karyawan	32.391.000.000	462.370.000.000	*Directors and employees*
Jumlah simpanan nasabah	**1.461.908.403.115**	**1.049.265.200.780**	***Total deposits from customers***
Persentase terhadap jumlah liabilitas	5,01%	3,65%	*Percentage to total liability*

41. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING / *41. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES*

	2025		2024		
	Jumlah dalam valuta asing (angka penuh)/ *Amount in foreign currency*	**Setara dengan/ *Equivalent***	**Jumlah dalam valuta asing (angka penuh)/ *Amount in foreign currency***	**Setara dengan/ *Equivalent***	
Aset					***Assets***
Kas (Catatan 4)					*Cash (Note 4)*
Dolar Amerika Serikat	14.475	241.370.625	2.775	44.663.625	*United States Dollar*
Dolar Singapura	123	1.594.701	48	568.540	*Singaporean Dollar*
Yen Jepang	7.000	745.500	71.000	7.315.130	*Japanese Yen*
Riyal Saudi Arabia	1.175	5.257.244	1.443	6.210.874	*Saudi Arabian Riyal*
Euro	3.605	70.555.077	6.860	114.960.703	*European Euro*
Ringgit Malaysia	115	472.438	183	658.408	*Malaysian Ringgit*
Dolar Australia	620	6.914.389	360	3.604.864	*Australian Dollar*
Giro pada Bank Indonesia (Catatan 5)					*Current account with Bank Indonesia (Note 5)*
Dolar Amerika Serikat	12.815	213.690.125	15.490	249.311.550	*United States Dollar*
Giro pada bank lain (Catatan 6)					*Current account with other bank (Note 6)*
Dolar Amerika Serikat	316.556	5.278.573.300	354.154	5.700.114.424	*United States Dollar*
Aset lain-lain					*Other assets*
Dolar Amerika Serikat	7.988	133.197.065	7.988	128.566.860	*United States Dollar*
Jumlah	**364.472**	**5.952.370.464**	**460.301**	**6.255.974.978**	***Total***

41. ASET DAN LIABILITAS DALAM VALUTA ASING (lanjutan) / *41. ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCIES (continued)*

	2025		2024		
	Jumlah dalam valuta asing (angka penuh)/ *Amount in foreign currency*	**Setara dengan/ *Equivalent***	**Jumlah dalam valuta asing (angka penuh)/ *Amount in foreign currency***	**Setara dengan/ *Equivalent***	
Liabilitas					***Liabilities***
Simpanan pihak ketiga					*Third parties savings*
Tabungan					*Savings*
Dolar Amerika Serikat	120.256	2.005.267.800	92.519	1.489.093.144	*United States Dollar*
Deposito perorangan					*Individual time deposits*
Dolar Amerika Serikat	115.360	1.923.628.000	119.180	1.918.202.100	*United States Dollar*
Liabilitas lain-lain					*Other liabilities*
Dolar Amerika Serikat	90	1.493.246	-	-	*United States Dollar*
Rekening perantara valuta					*Claim payments of bank*
Dolar Amerika Serikat	141.660	2.362.183.335	183.951	2.960.692.794	*United States Dollar*
Dolar Singapura	123	1.594.701	48	568.540	*Singaporean Dollar*
Yen Jepang	7.000	745.500	71.000.000	7.315.130.000	*Japanese Yen*
Riyal Saudi Arabia	1.175	5.257.244	1.443	6.210.874	*Saudi Arabian Riyal*
Euro	3.605	70.555.077	6.860	114.960.703	*European Euro*
Ringgit Malaysia	115	472.438	183	658.408	*Malaysian Ringgit*
Dolar Australia	620	6.914.389	360	3.604.864	*Australian Dollar*
Jumlah	**390.004**	**6.378.111.730**	**71.404.544**	**13.809.121.427**	***Total***

42. INFORMASI SEGMEN / *42. SEGMENT INFORMATION*

	2025			
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
ASET				***ASSETS***
Kas	520.900.532.409	36.583.647.089	557.484.179.498	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	402.783.125.311	182.314.126.709	585.097.252.020	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	8.366.728.141	172.624.862	8.539.353.003	*Current account with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	733.977.452.624	712.606.000.000	1.446.583.452.624	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek - efek untuk tujuan investasi	1.310.445.465.117	671.010.000.000	1.981.455.465.117	*Marketable securities for investment purposes*
Efek-Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.106.207.303.473	-	3.106.207.303.473	*Marketable securities purchased under agreement to resell*
Kredit yang diberikan	20.164.736.438.727	4.565.323.145.085	24.730.059.583.812	*Loan receivable*
Dipindahkan	**26.247.417.045.802**	**6.168.009.543.745**	**32.415.426.589.547**	***Carried forward***

42. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) ***42. SEGMENT INFORMATION (continued)***

	2025			
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
Pindahan	**26.247.417.045.802**	**6.168.009.543.745**	**32.415.426.589.547**	**Brought forward**
Penyertaan	2.720.090.450	-	2.720.090.450	*Prepaid expenses*
Aset tetap	387.027.024.655	7.935.502.668	394.962.527.323	*Fix assets*
Aset takberwujud	1.063.804.107	-	1.063.804.107	*Intangible assets*
Aset hak guna	103.833.720.797	2.247.762.963	106.081.483.760	*Right-of-use of assets*
Aset lain-lain	327.660.297.406	11.567.152.876	339.227.450.282	*Other assets*
Aset pajak tangguhan	228.597.878.178	-	228.597.878.178	*Differed Tax*
Jumlah aset	**27.298.319.861.395**	**6.189.759.962.252**	**33.488.079.823.647**	***Total aset***

	2025			
	Konvensional/ *Conventional*	**Syariah/ *Sharia***	**Jumlah/ *Total***	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	350.342.706.545	13.231.828.545	363.574.535.090	*Borrowings*
Simpanan nasabah	21.928.855.609.802	342.577.841.753	22.271.433.451.555	*Deposit from customers*
Simpanan dari bank lain	180.239.279.147	60.488.000	180.299.767.147	*Deposit from other banks*
Utang pajak	32.337.111.977	936.400.665	33.273.512.642	*Tax payable*
Liabilitas sewa	93.801.554.489	5.237.080.686	99.038.635.175	*Lease liabilities*
Pinjaman yang diterima	783.793.713.307	124.748.287.843	908.542.001.150	*Accepted Loans*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	914.873.484	-	914.873.484	*Allowance for possible on commitments and contingencies*
Liabilitas imbalan kerja	390.080.708.718	-	390.080.708.718	*Employee benefits obligation*
Liabilitas lain-lain	331.327.056.038	2.804.188.530	334.131.244.568	*Other liabilities*
Dana syirkah temporer	-	4.601.624.405.881	4.601.624.405.881	*Temporary syirkah funds*
Jumlah liabilitas	**24.091.692.613.507**	**5.091.220.521.903**	**29.182.913.135.410**	***Total liabilities***
Pendapatan segmen				***Segment income***
Pendapatan operasi	2.467.898.751.592	523.517.806.445	2.991.416.558.037	*Operating income*
Pendapatan operasi lainnya	179.219.661.425	33.813.784.563	213.033.445.988	*Other operating income*
Pendapatan non operasi	92.927.393.040	7.377.658.038	100.305.051.078	*Non-operating income*
Jumlah pendapatan segmen	**2.740.045.806.057**	**564.709.249.046**	**3.304.755.055.103**	***Total segment income***
Beban segmen				***Segment expense***
Beban operasi	975.802.550.255	205.429.792.398	1.181.232.342.653	*Operating expense*
Beban operasi lainnya	1.360.196.262.908	131.746.369.392	1.491.942.632.300	*Other operating expense*
Beban non operasi	2.658.418.366	857.430.358	3.515.848.724	*Non-operating expense*
Jumlah beban segmen	**2.338.657.231.529**	**338.033.592.148**	**2.676.690.823.677**	***Total segment expense***
Beban pajak kini	(140.268.578.120)	-	(140.268.578.120)	*Current tax expense*
Pendapatan pajak tangguhan	(3.002.867.370)	-	(3.002.867.370)	*Deferred income tax*
Laba bersih	**258.117.129.038**	**226.675.656.898**	**484.792.785.936**	***Net income***

42. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) ***42. SEGMENT INFORMATION (continued)***

	2024			
	Konvensional/ ***Conventional***	**Syariah/** ***Sharia***	**Jumlah/** ***Total***	
ASET				***ASSETS***
Kas	500.033.076.519	23.265.382.192	523.298.458.711	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	670.730.507.089	182.314.126.709	853.044.633.798	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	14.184.967.084	165.806.542	14.350.773.626	*Current account with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	499.927.154.594	375.000.000.000	874.927.154.594	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek - efek untuk tujuan investasi	2.485.866.364.308	1.517.783.000.000	4.003.649.364.308	*Marketable securities for investment purposes*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dibeli kembali	575.748.691.871	-	575.748.691.871	*Securities purchased under agreements to sell*
Kredit yang diberikan	21.041.310.017.043	3.999.660.385.961	25.040.970.403.004	*Loan receivable*
Penyertaan	2.641.053.571	-	2.641.053.571	*Prepaid expenses*
Aset tetap	404.501.331.058	8.018.887.754	412.520.218.812	*Fixed assets*
Aset takberwujud	1.249.361.740	-	1.249.361.740	*Intangible assets*
Aset hak guna	104.106.374.714	2.247.762.963	106.354.137.677	*Right-of-use of assets*
Aset lain-lain	306.507.488.324	11.567.152.876	318.074.641.200	*Other assets*
Aset pajak tangguhan	230.986.012.373	-	230.986.012.373	*Deferred tax assets*
Jumlah aset	**26.837.792.400.288**	**6.120.022.504.997**	**32.957.814.905.285**	***Total aset***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	323.539.289.387	11.934.289.167	335.473.578.554	*Borrowings*
Simpanan nasabah	21.944.591.829.829	194.099.500.730	22.138.691.330.559	*Deposit from customers*
Simpanan dari bank lain	155.873.159.861	3.261.054.000	159.134.213.861	*Deposit from other banks*
Utang pajak	30.558.090.010	1.935.883.466	32.493.973.476	*Tax payable*
Liabilitas sewa	90.784.719.245	5.210.949.960	95.995.669.205	*Lease liabilities*
Pinjaman yang diterima	464.965.995.073	315.687.384.870	780.653.379.943	*Accepted Loans*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.104.728.386	-	1.104.728.386	*Allowance for possible on commitments and contingencies*
Liabilitas imbalan kerja	308.681.229.231	-	308.681.229.231	*Employee benefits obligation*
Liabilitas lain-lain	353.278.547.542	2.804.188.530	356.082.736.072	*Other liabilities*
Dana syirkah temporer	-	4.571.129.392.176	4.571.129.392.176	*Temporary syirkah funds*
Jumlah liabilitas	**23.673.377.588.564**	**5.106.062.642.899**	**28.779.440.231.463**	***Total liabilities***
Pendapatan segmen				***Segment income***
Pendapatan operasi	2.558.951.800.682	423.794.953.478	2.982.746.754.160	*Operating income*
Pendapatan operasi lainnya	194.106.730.226	27.111.858.161	221.218.588.387	*Other operating income*
Pendapatan non operasi	77.783.327.767	1.623.298.793	79.406.626.560	*Non-operating income*
Jumlah pendapatan segmen	**2.830.841.858.675**	**452.530.110.432**	**3.283.371.969.107**	***Total segment income***
Beban segmen				***Segment expense***
Beban operasi	1.046.182.751.471	156.861.276.865	1.203.044.028.336	*Operating expense*
Beban operasi lainnya	1.273.304.910.151	101.069.060.753	1.374.373.970.904	*Other operating expense*
Beban non operasi	1.424.772.105	6.455.636	1.431.227.741	*Non-operating expense*
Jumlah beban segmen	**2.320.912.433.727**	**257.936.793.254**	**2.578.849.226.981**	***Total segment expense***
Dipindahkan	**509.929.424.948**	**194.593.317.178**	**704.522.742.126**	***Carried forward***

42. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) ***42. SEGMENT INFORMATION (continued)***

	2024			
	Konvensional/ ***Conventional***	**Syariah/** ***Sharia***	**Jumlah/** ***Total***	
Pindahan	**509.929.424.948**	**194.593.317.178**	**704.522.742.126**	***Brought forward***
Beban pajak kini	(152.520.121.600)	-	(152.520.121.600)	*Current tax expense*
Pajak kini - koreksi hasil pemeriksaan pajak pengl tahun sebelumnya	-	-	-	*Current tax - adjustment income tax previously*
Pendapatan pajak tangguhan	(13.933.673.393)	-	(13.933.673.393)	*Deferred income tax*
Laba bersih	**343.475.629.955**	**194.593.317.178**	**538.068.947.133**	***Net income***

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.3 (Perppu No.3/2008) tanggal 13 Oktober 2008, Pemerintah telah membentuk lembaga penjaminan independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Penjaminan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 26/KMK.17/1998 tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional No.32/46/KEP/DIR dan 181/BPPN/0559 tanggal 14 Mei 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Pembayaran Bank Umum. Penjaminan ini berlaku sampai dengan 26 Januari 2000.

43. THE GOVERNMENT'S GUARANTEE FOR PAYMENT LIABILITY OF COMMERCIAL BANK

Based on Law No. 24 dated September 22, 2004 which became effective on 22 September 2005, as amended by Government replacement regulation of Law of the Republic of Indonesia No.3 (No. Perppu 3/2008) dated October 13, 2008, The Government has established an independent guarantee agency was formed to ensure public funds, including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings and I or other equivalent form with it based on the applicable guarantee program, which the magnitude of the value of the collateral can be changes if it meets certain criteria apply.

The guarantee is based on the Decisional Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 26/KMK.17/1998 dated January 28, 1998 and Collective Decisional Letter of the Governor of the Republic of Indonesia and the Director of Indonesian Bank Restructuring Agency No. 32/46/KEP/DIR and 181/BPPN/0559 dated May 14, 1999 concerning of term and The implementation of Execution of Government Guarantee on Public Bank Payment. This guarantee applies until January 26, 2000.

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2.000.000.000 (nilai penuh) dari semula Rp100.000.000 (nilai penuh), terhitung efektif tanggal 13 Oktober 2008.

Suku bunga pinjaman LPS pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 3,50% dan 4,25% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah dan masing-masing sebesar 2,00% dan 2,25% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

Semua bank yang telah memperoleh izin usaha dinyatakan sebagai peserta penjaminan LPS.

Sampai dengan 31 Desember 2025 program penjaminan simpanan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank Nagari adalah peserta dari pogram penjaminan tersebut.

Beban premi penjaminan Pemerintah yang dibayar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp47.295.736.398 dan Rp45.204.801.627.

43. THE GOVERNMENT'S GUARANTEE FOR PAYMENT LIABILITY OF COMMERCIAL BANK (continued)

Furthermore, in accordance with Government Regulation No. 66 year 2008 regarding the Amount of Deposit Guaranteed by the Indonesian Deposit Insurance Corporation, the amount of deposit covered by LPS increased to Rp2,000,000,000 (full amount) from the previous of Rp100,000,000 (full amount), effective as of October 13, 2008.

The interest rate of Indonesian Deposit Insurance Corporation as of December 31, 2025 and 2024 is amounting to 3.50% and 4.25%, respectively, for deposits in Rupiah and 2.00% and 2.25%, respectively for deposits in foreign currencies.

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2009, Government replacement regulation of Law, regarding Indonesian Deposit Insurance Corporation on Deposit Guaranty has been established to be the Law since January 13, 2009.

All banks that have obtained business licenses stipulated as participants of LPS.

Until December 31, 2025 the deposit insurance program still applies.

As at December 31, 2025 and 2024, Bank Nagari was a participant of that guarantee program.

The Government guarantee's premium had paid for the period ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp47,295,736,398 and Rp45,204,801,627, respectively.

44. MANAJEMEN RISIKO

Untuk mengantisipasi tantangan ekonomi domestik maupun global serta peningkatan eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko dan permodalan yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing bank.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak diperkirakan (*unexpected* yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

44. RISK MANAGEMENT

To anticipate domestic and global economic challenges and also increase risk exposures faced by Bank, an effective and integrated risk and capital management system is needed, which is able to support the achievement and growth of sustainable performance while enhancing the competitiveness of the bank.

Risk is the potential loss due to certain events. Risk in the banking context is a potential event, either an expected or an unexpected that has a negative impact on bank income and capital of the bank.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank, termasuk upaya untuk memitigasi dan/atau meminimalkan kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas bank, hubungan antara bank dengan nasabah maupun dalam internal bank.

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung oleh adanya kerangka manajemen risiko yang mencakup strategi manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, kebijakan dan prosedur serta tata kelola risiko (*risk governance*) yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi Bank.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko di Bank Nagari adalah:

1. Mengelola risiko, baik yang didapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*), yang melekat pada setiap produk, aktivitas dan kegiatan usaha/bisnis bank.
2. Memberikan gambaran kepada Manajemen mengenai kemungkinan kerugian yang dialami pada masa mendatang.
3. Membantu proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersedian informasi.
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan Bank Nagari.
5. Menciptakan dan memelihara posisi strategis (*strategic positioning*) dan reputasi Bank Nagari.

Penerapan Manajemen Risiko didasari oleh kebutuhan akan keseimbangan fungsi bisnis dengan pengelolaan risiko, dimana Manajemen Risiko menjadi *strategic partner* dari Unit Bisnis untuk mengoptimalkan pendapatan dari Unit Bisnis secara keseluruhan.

Penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan 4 (empat) cakupan, yaitu:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari peran pengawasan manajemen;
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman penerapan manajemen risiko;
3. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman penerapan manajemen risiko, dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk management is a set of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor, or control the risks arising from the entire Bank's business activities, including the efforts to mitigate and/or minimize financial or non-financial losses that may arise from products or activities of the Bank, the relationship between the Bank and its customer and also within the internal Bank.

The Bank has had an integrated risk management framework, which includes the Bank's policy, the division of tasks and responsibilities in order to run an effective risk management in all aspects of the Bank.

The objectives of the implementation of risk management in Bank Nagari are:

1. *Managing risks, both expected and unexpected, attached to each product, the Bank's business activities and operations.*
2. *Providing an overview to Management with regard to potential losses experienced in the future.*
3. *Assisting a systematic decision-making process based on the availability of information.*
4. *Maintaining and improving the health of Bank Nagari.*
5. *Creating and maintaining strategic positioning and reputation of Bank Nagari.*

The Risk Management implementation is based on the need to maintain balance between the business functions with the risk management, where Risk Management becoming a strategic partner for the Business Units to optimize the revenue from the Business Unit as a whole.

Risk management implementation of Bank based on 4 (four) aspects are:

1. *Active Commissioners Board supervisor and Directors as part of management monitoring role;*
2. *Policy coverage, procedures and limit determining as manual of risk management implementation;*
3. *Policy coverage, procedures and limit determining as manual of risk management implementation; and*
4. *Whole internal controlling system.*

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dalam proses penerapan manajemen risiko, hal-hal yang telah dilakukan:

1. Dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya, Komisaris telah melakukan evaluasi dan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan RKAT Bank;
2. Direksi telah menyusun Kebijakan Umum Direksi yang memuat kebijakan dan strategi manajemen risiko sebagai dasar penyusunan rencana bisnis bank;
3. Sosialisasi *Risk Awarness* ke seluruh cabang;
4. Penyusunan *Risk Appetite, Risk Tolerance*, dan *Risk Limit;*
5. Pembuatan tool untuk mengukur risiko konsentrasi kredit berupa *Loan Exposure Limit* (LEL);
6. Pengembangan sistem informasi manajemen risiko yang dapat menyediakan informasi yang memadai untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan;
7. Pengembangan sistem yang dapat membantu unit bisnis melakukan aktifitas operasional sehari-hari lebih prudent sesuai peraturan yang berlaku;
8. Setiap *Risk Taking Unit* (RTU) diwajibkan melakukan identifikasi risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank;
9. Menyempurnakan struktur organisasi dan uraian tugas dan tanggung jawab dalam rangka penyempurnaan penerapan *four eyes principle*;
10. Melakukan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan yang menyangkut kegiatan operasional Bank yang berupa:
    a. Penyempurnaan struktur dan fungsi pada setiap unit kerja;
    b. Pengisian SDM yang sesuai dengan kompetensinya;
    c. Pembaharuan BPP/SOP manajemen risiko, BPP/SOP Tresuri, BPP/SOP Perkreditan, BPP/SOP SKA/, BPP/SOP TI;
    d. Penyempurnaan Sistem Teknologi dengan menambah *system back-up database (Disaster and Recovery Center)* dan penyusunan prosedur *Contingency Plan*;
    e. Penyusunan pedoman pengendalian intern.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

In risk management implementation process, concerning things have done are:

1. *In application authority and responsibility, commissioners have evaluated and agreement to policy of risk management stated in Bank Business Plan and RKAT Bank;*
2. *The Board of Directors has prepared the Board of Directors 's General Policy that includes policies and risk management strategies as a basis for the preparation of Bank's business plan;*
3. *Socialization of Risk Awarness to all branches;*
4. *Preparing Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limit;*
5. *Developing a tool to measure credit concentration risk in the form of Loan Exposure Limit (LEL);*
6. *Development of risk management information system that can provide adequate information to assist management in making decisions;*
7. *System development that can help the business units perform their daily operation activities more prudent in accordance to applicable regulations;*
8. *Every Risk Taking Unit (RTU) is obliged to identify risk concern to Bank functional activities;*
9. *Improving the organizational structure and job descriptions and responsibilities in order to improve the application of four eyes principle;*
10. *Making betterment/completing steps concerned to Bank operational activity such as:*
    a Structure completing and function to every unit work;
    b Placement of human resources in accordance with their competence;
    c Updating BPPISOP risk management, BPP/SOP Treasury, BPP/SOP Credit, BPP/SOP SKA/, BPP/SOP TI;
    d Technology System completing to add system back up database (Disaster and Recovery Center) and procedure compiling (Contingency Plan);
    e Arranging intern controlling manual.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Penerapan manajemen risiko di Bank secara umum terangkum dalam kerangka (*framework*) manajemen risiko. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta diaplikasikan dalam perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko agar sesuai dengan perkembangan bisnis dan perubahan regulasi.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan secara efektif, Bank menyusun *Risk Governance* sebagai bagian dari sistem Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang fokus pada struktur, proses dan pendekatan pengelolaan risiko dalam upaya pencapaian tujuan bisnis.

Inisiatif dan langkah-langkah penyempurnaan telah dilakukan untuk meletakkan landasan yang kuat dalam manajemen risiko di Bank yang mencakup aspek-aspek organisasi, strategi, sistem informasi dan operasi, serta pengembangan sumber daya manusia. Bank juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif yang menyentuh aspek humanis dan personal setiap individu Bank, yaitu dengan membangun budaya risiko yang kuat yang merupakan bagian dari budaya perusahaan Bank. Bank terus berupaya untuk meningkatkan budaya risiko segenap insan Bank agar tercipta budaya risiko yang kuat.

Terkait dengan produk atau aktivitas baru yang akan diterbitkan, penilaian (*assessment*) yang komprehensif dilakukan terhadap risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru untuk memastikan bahwa potensi risiko yang mungkin timbul telah dimitigasi dengan baik.

Pengelolaan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan operasional Bank sebagaimana diuraikan pada Catatan 46 sampai dengan Catatan 49 adalah sesuai dengan definisi dari Regulator.

Bank juga melakukan pengelolaan terhadap risiko lainnya sesuai aturan Regulator, yaitu (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis seperti ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko stratejik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Implementation of risk management in Bank is undertaken within the risk management framework. This risk management framework is outlined in the policies, procedures, transaction limits, authorities and other regulations as well as being applied in the risk management tools, which is applicable in the whole scope of business activities.

Periodic evaluation is applied to Risk Management Policies and Procedures to ensure it reflects the Bank's current business and regulations.

Risk Governance is formed to enforce the effectiveness of Risk Management Implementation, and as a part of Corporate Governance system, which focuses on structure, process and approach to risk management in achieving the business goals.

Initiatives and corrective actions have been taken to build a solid foundation for Bank's risk management, covering aspect of organization, strategies, information system and operations, and human capital. Bank has taken some anticipatory actions related to humanity and personal aspects of each individual of Bank by implementing risk culture enhanchement to build a strong risk culture that is part of the Bank's company culture. Bank constantly strives to improve employee's risk culture in order to create a strong risk culture.

Related to new product or activity, a comprehensive assessment for each of inherent risk in those new product or activity is done to ensure the potential risk that may occur is mitigated.

The management of Bank's credit, liquidity, market and operational risks, as described in Notes 46 to 49 are consistent with Regulator's definition.

Bank also has risk management for other risks as regulated by Regulator, as follows (i) legal risk to minimize possible losses from lawsuits or weakness in juridical aspects such as the absence of laws and regulations, or weaknesses such as non-compliance with the terms of the engagements validity of contracts or binding of imperfect collaterals; (ii) reputation risk to minimize possible losses due to stakeholder's declining levels of trust which comes from the negative perception of the Bank; (iii) strategic risk to minimize possible losses arising from inappropriate or improper implementation of Bank's strategy and business decisions, or strategy that is not responsive to external changes; and (iv) compliance risk to minimize possible losses of the Bank from non-compliance or failure to implement the prevailing laws and regulations.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko kepatuhan merupakan potensi kerugian yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perbankan seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan perkreditan yaitu kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, batas maksimum pemberian kredit, peraturan yang terkait dengan keadaan pasar (Posisi Devisa Neto), dan peraturan perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan

Bagian kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan bertugas memastikan semua unit kerja telah mematuhi ketentuan dan peraturan perbankan yang dibuat berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risks

Compliance risks are risks arising from Bank's noncompliance and/or failure to comply with the applicable laws and regulations.

Compliance risks are potential losses inflicted by Bank's noncompliance or failure to comply with banking regulations such as regulations related to loan facilities, namely minimum capital requirements, earning assets quality, allowance for impairment losses, legal lending limit, net open position and other banking regulations in relation to report submission to Bank Indonesia/Financial Services Authority

Department in charge of compliance, which is the Compliance Division, must ensure that all work units comply with bank rules and regulations made under the applicable regulations and standards.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak *counterparty* baik dari debitur maupun deposan, Bank memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan kerahasiaan data nasabah, terutama berkaitan dengan data informasi keuangan nasabah yang ada di bank. Hal ini diperlukan agar bank terhindar dari tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh nasabah.

Divisi Sekretaris Perusahaan melaksanakan pengkajian ulang secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan counterparty Bank untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh bank.

Legal Risks

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weakness of judicial aspects. To avoid lawsuits from counterparts, either from debtors or depositors, Bank observes and complies with all provisions regarding the confidentiality of customer data, particularly with regard to customer financial information data in the bank. This is necessary so that the Bank can avoid lawsuits that may be filed by the customer

Corporate Secretary and Legal Divisions performs review on regular basis toward agreements and contracts made with the Bank's counterparts to ensure the strength of the implementation of the provisions stipulated in the agreements and contracts entered into by the bank.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dan persepsi negatif terhadap bank. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengakibatkan Bank menderita kerugian atau menghalangi Bank untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam upaya pengendalian risiko reputasi dapat berjalan efektif, Bank membentuk Satuan Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi berita negatif atau informasi yang bersifat kontra produktif.

Bank mempublikasikan materi komunikasi seperti brosur dan pamflet yang menerangkan secara rinci produk dan layanan Bank Nagari. Bank juga senantiasa menjalin hubungan baik dengan media masa melalui penyelenggaraan jumpa pers secara rutin dan pemberitaan untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat.

Reputation Risks

Reputation risk is the risk due to declining level of stakeholders trust resulting from their negative perception to the bank. It directly and indirectly may lead Bank to suffer losses or hinder the Bank from making profits.

In an effort to effectively control reputation risk, the Bank formed Company Secretary Unit, which is responsible for the implementation of the policies related to handling of adverse or counter-productive news or information.

The Bank published promotional materials such as brochures and pamphlets that explain in detail the products and services provided by Bank Nagari. The Bank also continues to establish good relations with the mass media by organizing press conferences on regular basis and providing transparent information to the public.

44. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Hasil keputusan penetapan strategi memiliki konsekuensi yang signifikan dalam jangka yang panjang.

Perumusan strategi pada Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memeriksa hal penting yang mendasari strategi bank dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* , dan *Threat*);
- Membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual;
- Mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

44. RISK MANAGEMENT (continued)

Strategic Risks

Strategic risk is the risk due to inaccuracies in strategic decision making and/or implementation and failure to anticipate changes in the business environment. The result of strategic decision making has significant consequences in the long term.

Formulation of strategy at the Bank must consider the following points:

- *Identifying substantial points that underlie the Bank's strategy using the SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat);*
- *Comparing the expected result with the actual results;*
- *Taking appropriate actions to ensure that the implementation goes according to plan.*

45. RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya. Bank dalam upayanya untuk mengelola risiko kredit selalu berpedoman kepada peraturan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan analisa terhadap pengelolaan maupun tindakan tindakan untuk meminimalisir risiko, baik dalam penyaluran kredit maupun portofolio.

Pengelolaan risiko kredit ditujukan untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta mempertahankan independensi dari proses manajemen risiko, yaitu dengan melakukan kajian terhadap kebijakan dan proses kredit dan melakukan pemantauan terhadap portofolio kredit.

Risiko kredit dapat bersumber dari seluruh aktivitas bank, baik dibanking *book* maupun *trading book* serta *on* dan *off balance sheet* . Bank menghadapi risiko kredit dari berbagai aktivitas fungsional Bank seperti pemberian kredit, bank garansi, transaksi treasuri seperti transaksi surat berharga,interbank placement, transaksi nilai tukar (*foreign exchange*).

45. CREDIT RISK

Credit risk is risk caused as a result of counterparty failure fulfilling the obligation Bank in its effort to manage credit risk always guided to Bank Indonesia regulation and applicable statutory regulation analyzing to managing or activities to minimize risk in loans or portfolio.

Risk management credit is purposed to increase carefulness principles in delivering credit as well as to maintain independency of the risk management process, which is evaluating the policy and credit process and supervising to portfolio credit.

Credit risk can be sourced from all bank activities, both in the banking book and the trading book and on and off balance sheet. Banks face credit risk from various functional activities such as bank loans, bank guarantees, treasury transactions such as securities transactions, interbank placements, foreign exchange transaction.

45. RISIKO KREDIT

Dalam rangka meningkatkan pengendalian risiko kredit, Bank telah melakukan upaya dan langkah sebagai berikut :

- Bank telah membentuk unit independen yang terpisah dari unit bisnis/unit kredit untukmelakukan analisis terhadap suatu usulan kredit bersama-sama dengan unit bisnis/unit kredit. Analisis risiko ini dituangkan dalam format profil risiko yang mencakup identifikasi potensi risiko pada seluruh aspek beserta mitigasi risko guna meminimalisir potensi risiko yang ada. Hasil analisis ini akan diputus dalam rapat Komite Kredit;

- Bank telah menerapkan mekanisme *three lines of defense* untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal yang terdiri dari *the first line of defense* (*risk taking unit* yang bertanggung jawab langsung pada aktivitas keseharian), *the second line of defense* yakni Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan (*risk control* yang bertanggung jawab dalammenyusun kebijakan dan metodologi pengelolaan risiko), *the third line of defense* yakni Divisi Pengawasan Intern (selaku *risk assurance*);

- Penerapan metode *pipeline* secara tepat untuk optimalisasi penyaluran kredit yang lebih efektif dan terarah sehingga kredit-kredit baru yang disalurkan tidak mengalami penurunan kualitas;
- Penerapan penggunaan program LIS (*loan integrated system*) yang ditujukan untuk mempercepat proses pemberian kredit secara efektif;
- Mengaktifkan peran Satuan Kredit Khusus secara optimal dalam pemantauan dan pengendalian kredit bermasalah.
- Penerapan *credit scoring* sebagai tahapan awal dalam menganalisa aplikasi permohonan kredit calon debitur guna memitigasi resiko kredit yang akan terjadi;

- Proses pemberian kredit diputuskan dengan menerapkan *Four Eyes Principle* dimana keputusan kredit ditentukan oleh dua pihak independen yaitu sisi analisa bisnis dan sisi analisa risiko kredit;
- Adanya tools untuk mengendalikan risiko kredit diantaranya *Loan Exposure Limit* (LEL) dan *Industry Risk Rating* (IRR) sebagai salah satu upaya strategis untuk mengendalikan eksposur pinjaman sekaligus mengoptimumkan pendapatan serta mitigasi risiko dalam portofolio pinjaman;

- Penggunaan aplikasi *early warning system* (EWS) untuk BMPK sebagai salah satu upaya preventif dalam hal mendeteksi indikasi-indikasi terjadinya risiko kesalahan penginputan oleh *user* ;

45. CREDIT RISK

In order to improve the credit risk control,the bank has done some efforts and measures as follow:

- *the Bank has established an independent unit separate from the business unit/credit unit to conduct an analysis of a proposed loan cooperate with business unit/credit unit. Risk analysis is outlined in the risk profile format which includes the identification of potential risks and their mitigation in all aspects of risks in order to minimize potential risks. The results of this analysis will be decided in the Credit Committee meeting;*

- *The Bank has implemented a three lines of defense mechanism to improve the effectiveness of internal control consisting of the first line of defense (risk taking unit directly responsible for daily activities), the second line of defense, namely the Risk Management Division and the Compliance Division (risk control which is responsible for preparing policies and methodologies for risk management), the third line of defense, namely the Internal Oversight Division (as risk assurance);*

- *The pipeline method is appropriately implemented to optimize more effective and targeted lending so that new loans disbursed do not experience a decrease in quality;*
- *Implementing the LIS (loan integrated system) program, which is aimed at accelerating the process of effective provision of loans;*
- *Activating the role of special loans units in monitoring and controlling non-performing loans;*
- *Implementing credit scoring as an initial step in analyzing loan applications submitted by prospective debtors to mitigate credit risk that will occur;*

- *The loans granting process is decided by applying the Four Eyes Principle in which loans decisions are determined by two independent parties namely from the business analysis side and the credit risk analysis side;*
- *There are tools to control credit risk including Loan Exposure Limit (LEL) and Industry Risk Rating (IRR) as a strategic effort to control loan exposure while optimizing revenue and mitigating risk in the loan portfolio;*

- *Utilizing the early warning system (EWS) application for BPMK as one of the preventive measures in terms of detecting indications of the risk of input errors by the user;*

45. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Dalam rangka meningkatkan pengendalian risiko kredit, Bank telah melakukan upaya dan langkah sebagai berikut : (lanjutan)

- Pengecekan DHN dan SLIK dilakukan sebelum analisa kredit;
- Adanya unit terpisah dan independen dalam melakukan proses kredit awal dengan unit yang melakukan restrukturisasi kredit;
- Terdapat laporan berkala kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit mengenai perkembangan portofolio kredit seperti Laporan BMPK dan Laporan 25 Debitur Inti;
- Monitoring kualitas kredit dan pembiayaan juga dilakukan melalui laporan kelolaan per analis yang berisi besaran outstanding dan jumlah rekening yang dapat di tangani per analis sebagai bagian dari pengendalian risiko kredit;
- PIN dan KI Cabang melakukan audit secara berkala terhadap proses pemberian kredit dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit, dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit;
- MER melakukan pemantauan secara bulanan terhadap realisasi *Loan Exposure Limit* (LEL);
- MER melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi diskresi kredit;
- MER melakukan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap perkembangan kredit debitur inti;
- MER melakukan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap perkembangan kredit berdasarkan sektor ekonomi.

Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit selama tahun 2025, Bank melakukan upaya dan langkah sebagai berikut:

- Menyempurnakan BPP/SOP yang berkaitan dengan aktivitas perkreditan dan penerapan manajemen risiko;
- Mengembangkan aplikasi *scoring* dan rating kredit guna percepatan dan meminimalkan risiko;
- MER membuat laporan *stress test* risiko kredit guna mengukur eksposur risiko kredit dalam keadaan/kondisi stress akibat faktor internal atau eksternal
- Menetapkan *cut off passing grade tools* rasio keuangan *industry benchmark* ;
- Menetapkan *Industry Risk Rating* yang dapat memberikan peluang untuk masuk ke sektor ekonomi baru dan membiayai calon debitur di sektor ekonomi tersebut;

45. CREDIT RISK (continued)

In order to improve the credit risk control,the bank has done some efforts and measures as follow: (continued)

- *DHN and SLIK checks are carried out before the credit*
- *There are separate and independent units for conducting the initial loans process and for carrying out loans restructuring;*
- *Periodic reports are provided to the Board of Commissioners, Directors and Audit Committee regarding the development of the credit portfolio such as the BPMK Report and the 25 Core Debtor Report;*
- *Credit and financing quality monitoring is also carried out through a analyst managed report that contains the outstanding amount and number of accounts that can be handled by analyst as part of credit risk control;*
- *PIN and KI of Branch Office conduct periodic audits of the process of loans granting with adequate coverage, document audit findings and management responses to audit results, as well as review the follow-up on audit findings;*
- *MER monitors the realization of Loan Exposure Limit (LEL) on monthly basis;*
- *MER regularly monitors the realization of loans discretion;*
- *MER conducts periodic and continuous reviews of the development of core debtor loans;*
- *MER conducts periodic and continuous review of loans developments based on economic sectors.*

In managing credit risk during the year 2025, the Bank made efforts and measures as follows:

- *Updating Company Handbook/SOP on credit activities and risk management implementation;*
- *Developing credit scoring and rating application to accelerate and minimize the risk;*
- *MER prepares credit risk stress test reports to measure credit risk exposure in stressful situations / conditions due to internal or external factors*
- *Establishing cut off passing grade tools for industry benchmark financial ratios;*
- *Establishing an industry Risk Rating that can provide opportunities for entry into new economic sectors and finance prospective debtors in such economic sectors;*

45. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit selama tahun 2025, Bank melakukan upaya dan langkah sebagai berikut: (lanjutan)

- Menetapkan *Industry Risk Rating* yang dapat memberikan peluang untuk masuk ke sektor ekonomi baru dan membiayai calon debitur di sektor ekonomi tersebut;
- Menetapkan *Loan Exposure Limit* (LEL) yaitu batas optimum pinjaman sekaligus target posisi (baki debet) pinjaman pada akhir tahun untuk setiap sektor ekomoni per segmen bisnis. Tujuannya sebagai salah satu upaya strategis untuk mengendalikan eksposur pinjaman sekaligus mengoptimumkan pendapatan dan memitigasi risiko dalam portofolio pinjaman;
- Melakukan pendidikan dan pelatihan dengan bekerjasama dengan pihak luar yang kompeten bagi officer kredit dan unit yang terkait lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada sektor-sektor ekonomi yang belum dikuasai bank, penilaian agunan atau jaminan yang memenuhi kualifikasi appraisal independen;

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro yang berpengaruh pada Bank, Bank secara berkala melakukan stress testing risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi bank serta kemampuan Bank menghadapi kondisi tersebut.

i. Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

Eksposur risiko kredit terhadap aset-neto sesudah cadangan kerugian penurunan nilai pada laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

45. CREDIT RISK (continued)

In managing credit risk during the year 2025, the Bank made efforts and measures as follows: (continued)

- *Establishing an industry Risk Rating that can provide opportunities for entry into new economic sectors and finance prospective debtors in such economic sectors;*
- *Establishing Loan Exposure Limit (LEL), which is the optimum limit of the loan as well as the (outstanding) loan target position at the end of the year for each economic sector per business segment, as one of the strategic efforts to control the exposure of the loan as well as to optimize the income and mitigate the risk in the loan portfolio;*
- *Cooperating with competent external parties to provide education and training for credit officers and other relevant units to broaden their knowledge and understanding on economic sectors beyond the control of the bank. collateral valuation, or securities qualified for independent appraisal;*

As part of the measurement of credit risk and to anticipate the occurrence of macro-factor changes affecting the Bank, Bank periodically performs stress testing of credit risk to assess changes in loan portfolio and its impact to the bank and the Bank's ability to face the condition.

i. Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements

Credit risk exposures relating to the assets-net of allowance for possible losses on the consolidated statement of financial position as of 31 December 2025 and 31 December 2024 are as follows:

Keterangan	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* 2025	2024	*Description*
Giro pada Bank Indonesia	585.097.252.020	853.044.633.798	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	8.539.353.003	14.350.773.626	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia	1.446.583.452.624	874.927.154.594	*Placement with other banks and Bank Indonesia*
Efek - efek untuk tujuan investasi	1.981.455.465.117	4.003.649.364.308	*Marketable securities for investment purposes*
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.106.207.303.473	575.748.691.871	*Marketable securities purchased under agreement to resell*
Pinjaman yang diberikan	24.730.059.583.812	25.040.970.403.004	*Loans*
Penyertaan saham	2.720.090.450	2.641.053.571	*Investment in shares*
Jumlah - bersih	**31.860.662.500.499**	**31.365.332.074.772**	***Total - net***

45. RISIKO KREDIT (lanjutan)

Eksposur maksimum kredit terhadap rekening administrasi pada tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

45. CREDIT RISK (continued)

Maximum exposure on credit to administrative accounts on December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Keterangan	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure* 2025	2024	*Description*
Fasilitas kredit kepada nasabah dan bank lain yang belum digunakan	731.635.419.416	473.268.029.199	*Unused loans commitments granted to customers and other banks*
Garansi yang diterbitkan	318.308.425.107	269.709.814.747	*Guarantees issued*

Saldo tersebut diatas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank Nagari pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset pada laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan posisi keuangan.

The amount above represents credit risk exposures at maximum of Bank Nagari as of December 31, 2025 and 2024, without taking into account any collateral held or other credit enhancements. The exposures set out above are based on net carrying amounts of the assets as reported in the statements of financial position.

ii. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Saldo berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank Nagari pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

ii. Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

The following amount provide the details of the Bank Nagari credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2025 and 2024:

	2025				
	Pemerintah/ *Government*	Bank/ *Bank*	Perusahaan/ *Company*	Perserorangan/ *Individual*	
Giro pada Bank Indonesia	585.097.252.020	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	8.539.353.003	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.121.583.402.624	325.000.050.000	-	-	*Placements with Bank Indonesia*
Efek - efek untuk tujuan investasi	1.981.455.465.117	-	-	-	*Marketable securities for investment purposes*
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.106.207.303.473	-	-	-	*Marketable securities purchased under agreement to resell*
Pinjaman yang diberikan	-	-	1.362.350.702.661	18.802.385.736.065	*Loans*
Pembiayaan yang diberikan	-	-	4.512.671.922.614	52.651.222.472	*Sharia financing*
Jumlah	**6.794.343.423.234**	**333.539.403.003**	**5.875.022.625.275**	**18.855.036.958.537**	***Total***

45. RISIKO KREDIT (lanjutan)

ii. Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Saldo berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank Nagari pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

45. CREDIT RISK (continued)

ii. Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

The following amount provide the details of the Bank Nagari credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2025 and 2024: (continued)

	2 0 2 4				
	Pemerintah/ *Government*	**Bank/ *Bank***	**Perusahaan/ *Company***	**Perserorangan/ *Individual***	
Giro pada Bank Indonesia	853.044.633.798	-	-	-	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	-	14.350.773.626	-	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	874.927.104.594	50.000	-	-	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Efek - efek untuk tujuan investasi	4.003.649.364.308	-	-	-	*Marketable securities for investment purposes*
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	575.748.691.871	-	-	-	*Marketable securities purchased under agreement to resell*
Pinjaman yang diberikan	-	-	1.341.494.772.668	19.699.815.244.374	*Loans*
Pembiayaan yang diberikan	-	-	433.704.365.756	3.565.956.020.206	*Sharia financing*
Jumlah	**6.307.369.794.571**	**14.350.823.626**	**3.164.464.803.970**	**23.265.771.264.580**	***Total***

46. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Bank mengelola risiko likuiditasnya agar dapat memenuhi setiap kewajibannya yang jatuh tempo dan menjaga tingkat likuiditas yang optimal, mengukur, dan menetapkan limit untuk risiko likuiditas serta penyusunan rencana kontinjensi.

Bank terus meningkatkan dan mengembangkan manajemen likuiditas yang efektif untuk mengelola dan memelihara likuiditas dalam memenuhi kebutuhan operasional harian dan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

46. LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is risk caused by Bank does not have ability to fulfill the obligation become due. Bank manage liquidity risk to fulfill every obligation become due and keep optimum liquidity, measure, and determine to liquidity risk and to arrange contingency plan.

Bank continue to improve and develop effective liquidity management to manage and maintain liquidity to meet daily operational needs and in order to mitigate the risk due to bank's inability to meet its maturing obligations from funding cash flow, and! or from high quality liquid assets that can be pledged , without disturbing the activities and financial condition of the Bank.

46. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Untuk meminimalisasi risiko likuiditas, Bank telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjaga ketersediaan dana sesuai dengan kebutuhan operasional kas pemerintah daerah, pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) dan kebutuhan penarikan nasabah masyarakat;
2. Mengoptimalkan fungsi ALCO dan treasuri;
3. Mengelola penghimpunan Dana Pihak Ketiga yang seimbang dengan pertumbuhan penyaluran kredit;
4. Menjaga hubungan baik dengan sumber pendanaan dan pemegang dana dominan;
5. Menjaga diversifikasi dan kestabilan sumber pendanaan sebagai aset likuid;
6. Menjaga *Secondary Reserve* (SR) harian agar berada di atas limit SR ideal.

46. LIQUIDITY RISK (continued)

To minimize liquidity risk, Bank has made some steps, they are:

1. *Maintain the availability of funds in accordance with the operational needs of local government coffers, compliance to Minimum Statutory Reserves (GWM) and withdrawal of society customers' needs;*
2. *Optimizing ALCO dan treasury function;*
3. *Managing the balance of Third Party fund raising to lending growth;*
4. *Managing the balance of Third Party fund raising to lending growth;*
5. *Maintaining diversification and stability of funding sources as liquid assets;*
6. *Maintaining daily Secondary Reserve (SR) above the ideal SR limit.*

46. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

46. LIQUIDITY RISK (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	2 0 2 5					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Lainnya/ *Others***	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**1-6 bulan/ *1-6 months***	**6-12 bulan/ *6-12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***
ASET/ *ASSETS*						
Kas/ *Cash*	557.484.179.498	-	557.484.179.498	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	585.097.252.020	-	585.097.252.020	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	8.539.353.003	-	8.539.353.003	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placement with Bank Indonesia and other banks*	1.446.583.452.624	-	-	-	-	-
Efek - efek untuk tujuan investasi - bruto/ *Marketable securities for investment purposes - gross*	1.981.455.465.117	-	431.208.733.995	1.010.240.133.429	540.006.597.693	-
Efek-Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Marketable securities purchase under agreement to resell*	3.106.207.303.473	-	3.106.207.303.473	-	-	-
Penyertaan saham/ *Investment in shares*	2.720.090.450	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diberikan - bersih/ *Loans - net*	24.730.059.583.812	-	274.636.053.944	550.051.609.192	599.206.299.661	23.306.165.621.015
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	394.962.527.323	394.962.527.323	-	-	-	-
Aset takberwujud - bersih/ Intangible assets - net	1.063.804.107	1.063.804.107	-	-	-	-
Aset hak guna - bersih/ *Right of use assets*	106.081.483.760	106.081.483.760	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan - bersih / *Deferred tax assets - net*	228.597.878.178	228.597.878.178	-	-	-	-
Aset lain-lain - neto/ *Other assets - net*	339.227.450.282	339.227.450.282	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**33.488.079.823.647**	**1.069.933.143.650**	**6.409.756.328.557**	**1.560.291.742.621**	**1.139.212.897.354**	**23.308.885.711.465**

46. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

46. LIQUIDITY RISK (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024: (continued)

	2 0 2 5					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Lainnya/ *Others***	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**1-6 bulan/ *1-6 months***	**6-12 bulan/ *6-12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***
LIABILITAS/ *LIABILITIES*						
Liabilitas segera/ *Liabilities Due Immediately*)*	363.574.535.090	-	-	-	363.574.535.090	-
Simpanan dari nasabah/ *Deposits from Customers*						
Giro/ *Current account*	2.516.318.630.049	-	2.516.318.630.049	-	-	-
Deposito/ *Time deposits*	12.459.991.867.526	-	4.322.458.621.479	8.000.928.996.047	133.747.950.000	2.856.300.000
Tabungan/ *Savings*	7.295.122.953.980	-	7.295.122.953.980	-	-	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	180.299.767.147	-	158.259.767.147	21.200.000.000	840.000.000	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	908.542.001.150	-	-	-		908.542.001.150
Liabilitas imbalan kerja/ *Employee benefits*	390.080.708.718	390.080.708.718	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	467.358.265.869	467.358.265.869	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**24.581.288.729.529**	**857.438.974.587**	**14.292.159.972.655**	**8.022.128.996.047**	**498.162.485.090**	**911.398.301.150**

46. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

46. LIQUIDITY RISK (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024: (continued)

	2 0 2 4					
	Nilai tercatat/ *Carrying value*	**Lainnya/ *Others***	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**1-6 bulan/ *1-6 months***	**6-12 bulan/ *6-12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***
ASET/ *ASSETS*						
Kas/ *Cash*	523.298.458.711	-	523.298.458.711	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	853.044.633.798	-	853.044.633.798	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	14.350.773.626	-	14.350.773.626	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ *Placement with Bank Indonesia and other banks*	874.927.154.594	-	874.927.154.594	-	-	-
Efek - efek untuk tujuan investasi - bruto/ *Marketable securities for investment purposes - gross*	4.003.649.364.308	-	968.455.755.288	1.012.048.592.484	1.436.500.606.253	586.644.410.283
Efek-Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Marketable securities purchase under agreement to resell*	575.748.691.871	-	575.748.691.871	-	-	-
Pinjaman yang diberikan - bruto/ *Loans - gross*	25.040.970.403.004	-	203.896.196.123	499.825.197.055	626.237.263.575	23.711.011.746.251
Penyertaan saham/ *Investment in shares*	2.641.053.571	-	-	-	-	2.641.053.571
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	412.520.218.812	412.520.218.812	-	-	-	-
Aset takberwujud - bersih/ Intangible assets - net	1.249.361.740	1.249.361.740	-	-	-	-
Aset hak guna - bersih/ *Right of use assets*	106.354.137.677	106.354.137.677	-	-	-	-
Aset pajak tangguhan - bersih / *Deferred tax assets - net*	230.986.012.373	230.986.012.373	-	-	-	-
Aset lain-lain - neto/ *Other assets - net*	318.074.641.200	318.074.641.200	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**32.957.814.905.285**	**1.069.184.371.802**	**4.013.721.664.011**	**1.511.873.789.539**	**2.062.737.869.828**	**24.297.656.156.534**

46. RISIKO LIKUIDITAS (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: (lanjutan)

46. LIQUIDITY RISK (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024: (continued)

	2 0 2 4					
	Nilai Tercatat/ *Carrying value*	**Lainnya/ *Others***	**Sampai dengan 1 bulan/ *Up to 1 month***	**1-6 bulan/ *1-6 months***	**6-12 bulan/ *6-12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***
LIABILITAS/ *LIABILITIES*						
Liabilitas segera/ *Liabilities Due Immediately*)*	335.473.578.554	-	-	-	335.473.578.554	-
Simpanan dari nasabah						
Giro/ *Current account*	1.772.964.161.519	-	1.772.964.161.519	-	-	-
Deposito/ Time deposits	13.128.830.010.618		4.384.023.550.071	5.754.872.610.547	2.984.046.850.000	5.887.000.000
Tabungan/ *Savings*	7.236.897.158.422	-	7.236.897.158.422	-	-	-
Simpanan dari bank lain/ *deposits from other bank*	159.134.213.861	-	145.734.213.861	12.900.000.000	500.000.000	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	780.653.379.943	-	-	-	-	780.653.379.943
Liabilitas imbalan kerja/ *Employee benefits*	308.681.229.231	308.681.229.231	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	485.677.107.139	485.677.107.139	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**24.208.310.839.287**	**794.358.336.370**	**13.539.619.083.873**	**5.767.772.610.547**	**3.320.020.428.554**	**786.540.379.943**

*) Terdiri dari titipan nasabah, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

*) *The table below shows the remaining contractual maturities of financial liabilities based on un-discounted cash flow (principal and interest).*

47. RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Bank mengendalikan risiko pasar melalui limit transaksi yang disetujui oleh Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan.

Pengendalian risiko pasar dilakukan dengan pemantauan terhadap:

a. Limit transaksi dengan *counterparty* ;
b. *Limit open position trading money market, forex, dan capital market;*
c. *Limit budget loss transaksi trading money market, forex, dan capital market;*
d. Limit Posisi Devisa Neto (PDN).

Untuk meminimalisir risiko pasar, Bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan untuk mengurangi potensi kerugian suku bunga dakam banking book melalui keputusan rapat Komite ALCO;
b. Memantau dan mengendalikan *maturity missmatch* ;
c. Mengoptimalkan peran ALMA dalam manajemen maturity profile;
d. Memberikan saran dan masukan terkait pemantauan transaksi di *dealing room* melalui laporan yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan secara berkala, dan memberikan saran atau masukan terkait transaksi yang berpotensi mengalami kerugian;
e. Memantau PDN secara mingguan dan bulanan.

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas masa depan dari nilai wajar instrumen keuangan.

47. MARKET RISK

Market risks are risks on balance sheet psoition and administrative account icluding derivative transactions; resulted from overall changes in market conditions, including changes in option price. The bank controls market risk with transaction limits approved by Risk Management Committee overseen by the Compliance Director.

Market risk controlling is conducted through the monitoring of:

a. Counterparty transaction limits;
b. Money market, foreign exchange, and capital market, trading open position limits;
c. Money market, foreign exchange, and capital market, trading budget loss limits;
d. Net Devisa Position limits (PDN).

To minimalized market risk, Bank has done following steps:

a. Establishing policies to reduce potential interest rate losses in the banking book transaction through the ALCO Committee decisions;
b. Monitoring and controlling mistmatch maturity;
c. Optimizing ALMA role in maturity profile management;
d. Providing advice and input related to the monitoring of transactions in the dealing room through reports submitted to the Director of Compliance periodically and providing feedback related to the potential transaction loss;
e. Monitoring PDN the intra weekly and monthly.

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows or the fair values of financial instruments.

47. RISIKO PASAR (lanjutan)

47. MARKET RISK (continued)

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk aset dan liabilitas yang periling untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The table below summarizes the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for period ended December 31, 2025 and 2024:

	2025		**2024**		
	Rupiah/ *Rupiah*	**Mata uang asing/ *Foreign currency***	**Rupiah/ *Rupiah***	**Mata uang asing/ *Foreign currency***	
ASET					***ASSETS***
Giro pada bank Lain	0,00% - 1,00%	-	0,00% - 1,90%	-	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	0% - 4,89%	-	0% - 5,25%	-	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek - efek untuk tujuan investasi	4,60% - 7,28%	-	4,88% - 7,50%	-	*Marketable securities for investment purposes*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,65% - 4,82%	-	6,15%	-	*Marketable securities purchased under agreement to resell*
Tingkat bunga tetap					*Fixed interest rate*
Pinjaman yang diberikan	10,81%	-	11,74%	-	*Loans*
Pembiayaan	3,00% - 15,00%	-	13% - 14%	-	*Sharia financing*
LIABILITAS					***LIABILITIES***
Simpanan nasabah					*Customer savings*
Giro	0,00% - 2,50%	-	0,00% - 1,00%	-	*Current account*
Tabungan	0,00% - 3,50%	0,00% - 0,75%	0,00% - 4,00%	0,00% - 0,75%	*Savings*
Deposito berjangka	3,00% - 7,00%	0,75% - 1,00%	3,50% - 7,50%	0,75% - 1,00%	*Time deposits*

47. RISIKO PASAR (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan suku bunga dalam Rupiah yang wajar, dengan semua variabel lainnya tetap konstan, dalam laporan laba rugi Bank. Sensitivitas laporan laba rugi adalah dampak dari perubahan asumsi suku bunga pada laporan laba rugi pada periode tersebut. Sensitivitas total laba atau rugi didasarkan pada asumsi bahwa ada pergeseran paralel kurva hasil.

47. MARKET RISK (continued)

The following tables demonstrate the sensitivity to a reasonable possible change in IDR interest rates, with all other variables held constant, in the Bank's profit or loss. The sensitivity of profit or loss is the effect of the changes in interest rates assumptions on the profit or loss for the period. The total sensitivity of profit or loss is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

	2 0 2 5					
	Jumlah/ *Total*	**< 3 bulan/ *< 3 months***	**3 - 12 bulan/ *3 - 12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***	**Suku Bunga Tetap/ *Fixed Interest Rate***	**Tidak Dikenakan Bunga/ *Non Interest Bearing***
Aset keuangan/ Financial assets						
Kas/ *Cash*	557.484.179.498	-	-	-	-	557.484.179.498
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	585.097.252.020	585.097.252.020	-	-	-	-
Giro pada bank lain/ *current accounts with* other banks	8.539.353.003	8.539.353.003	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain/ *Placement with Bank Indonesia and other banks*	1.446.583.452.624	-	-	-	1.446.583.452.624	-
Efek - efek untuk tujuan *investasi - bruto/ Marketable securities for - gross*	1.981.455.465.117	-	-	-	1.981.455.465.117	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Marketable securities purchase under agreement to resell*	3.106.207.303.473	-	-		3.106.207.303.473	-
Penyertaan saham/ *Investment in shares*	2.720.090.450	-	-	-	-	2.720.090.450
Dipindahkan/ *Carried forward*	**7.688.087.096.185**	**593.636.605.023**	**-**	**-**	**6.534.246.221.214**	**560.204.269.948**

47. RISIKO PASAR (lanjutan) ***47. MARKET RISK (continued)***

	2025					
	Jumlah/ *Total*	**< 3 bulan/ *< 3 months***	**3 - 12 bulan/ *3 - 12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***	**Suku Bunga Tetap/ *Fixed Interest Rate***	**Tidak Dikenakan Bunga/ *Non Interest Bearing***
Aset keuangan (lanjutan)/ Financial assets *(continued)*						
Pindahan/ *Brought forward*	**7.688.087.096.185**	**593.636.605.023**	**-**	**-**	**6.534.246.221.214**	**560.204.269.948**
Pinjaman yang diberikan - bruto/ *Loans - gross*	24.730.059.583.812	520.703.913.746	768.427.356.356	20.863.887.446.660	2.577.040.867.050	-
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	394.962.527.323	-	-	-	-	394.962.527.323
Aset takberwujud - bersih/ *Intangible assets - net*	1.063.804.107	-	-	-	-	1.063.804.107
Aset hak guna - bersih/ *Right of use assets*	106.081.483.760	-	-	-	-	106.081.483.760
Aset pajak tangguhan - bersih / *Deferred tax assets - net*	228.597.878.178	-	-	-	-	228.597.878.178
Aset lain-lain - neto/ *Other assets - net*	339.227.450.282	-	-	-	-	339.227.450.282
Total financial assets	**33.488.079.823.647**	**1.114.340.518.769**	**768.427.356.356**	**20.863.887.446.660**	**9.111.287.088.264**	**1.630.137.413.598**
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*						
Liabilitas segera/ *Liabilities due immediately*)*	363.574.535.090	-	-	-	-	363.574.535.090
Simpanan nasabah/ *deposit from customers*						
Giro/ *Current account*	2.516.318.630.048				2.516.318.630.048	
Deposito/ *Time deposits*	12.459.991.867.526	-	-	-	12.459.991.867.526	-
Tabungan/ *Savings*	7.295.122.953.981				7.295.122.953.981	
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	180.299.767.147	172.359.767.147	7.940.000.000	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	908.542.001.150	-	-	908.542.001.150	-	-
Liabilitas imbalan kerja/ *Employee benefits*	390.080.708.718	-	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	467.358.265.869	-	-	-	-	467.358.265.869
Jumlah liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**24.581.288.729.529**	**172.359.767.147**	**7.940.000.000**	**908.542.001.150**	**22.271.433.451.555**	**1.221.013.509.677**

47. RISIKO PASAR (lanjutan) ***47. MARKET RISK (continued)***

	2 0 2 4					
	Jumlah/ *Total*	**< 3 bulan/ *< 3 months***	**3 - 12 bulan/ *3 - 12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***	**Suku Bunga Tetap/ *Fixed Interest Rate***	**Tidak Dikenakan Bunga/ *Non Interest Bearing***
Aset keuangan/ *Financial assets*						
Kas/ *Cash*	523.298.458.711	-	-	-	-	523.298.458.711
Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*	853.044.633.798	853.044.633.798	-	-	-	-
Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	14.350.773.626	14.350.773.626	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ *Placement with Bank Indonesia and other banks*	874.927.154.594	-	-	-	874.927.154.594	-
Efek - efek untuk tujuan *investasi - bruto/ Marketable securities for - gross*	4.003.649.364.308	-	-	-	4.003.649.364.308	-
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali/ *Marketable securities purchased*	575.748.691.871	-	-	-	575.748.691.871	-
Pinjaman yang diberikan - bruto/ *Loans - gross*	25.040.970.403.004	415.555.304.156	789.492.486.214	20.515.254.152.594	3.320.668.460.040	-
Penyertaan saham/ *Investment in shares*	2.641.053.571	-	-	-	-	2.641.053.571
Aset tetap - bersih/ *Fixed assets - net*	412.520.218.812	-	-	-	-	412.520.218.812
Aset takberwujud - bersih/ *Intangible assets - net*	1.249.361.740	-	-	-	-	1.249.361.740
Aset hak guna - bersih/ *Right of use assets*	106.354.137.677	-	-	-	-	106.354.137.677
Aset pajak tangguhan - bersih / *Deferred tax assets - net*	230.986.012.373	-	-	-	-	230.986.012.373
Aset lain-lain - neto/ *Other assets - net*	318.074.641.200	-	-	-	-	318.074.641.200
Jumlah aset keuangan/ *Total financial assets*	**32.957.814.905.285**	**1.282.950.711.580**	**789.492.486.214**	**20.515.254.152.594**	**8.774.993.670.813**	**1.595.123.884.084**

47. RISIKO PASAR (lanjutan) ***47. MARKET RISK (continued)***

	2 0 2 4					
	Jumlah/ *Total*	**< 3 bulan/ *< 3 months***	**3 - 12 bulan/ *3 - 12 months***	**> 12 bulan/ *> 12 months***	**Suku Bunga Tetap/ *Fixed Interest Rate***	**Tidak Dikenakan Bunga/ *Non Interest Bearing***
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*						
Liabilitas Segera/ *Liabilities due immediately**)	335.473.578.554	-	-	-	-	335.473.578.554
Simpanan nasabah/ *deposit from customers*						
Giro/ *Current account*	1.772.964.161.519	-	-	-	1.772.964.161.519	-
Deposito/ *Time deposits*	13.128.830.010.618	-	-	-	13.128.830.010.618	-
Tabungan/ Savings	7.236.897.158.422	-	-	-	7.236.897.158.422	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*	159.134.213.861	156.534.213.861	2.600.000.000	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	780.653.379.943	-	-	780.653.379.943	-	-
Liabilitas imbalan kerja/ *Employee benefits*	308.681.229.231	-	-	--	-	308.681.229.231
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	485.677.107.139	-	-	-	-	485.677.107.139
Jumlah liabilitas keuangan/ *Total financial liabilities*	**24.208.310.839.287**	**156.534.213.861**	**2.600.000.000**	**780.653.379.943**	**22.138.691.330.559**	**1.129.831.914.924**

47. RISIKO PASAR (lanjutan)

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan label di bawah ini. Secara umum, sensitvitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga atas laba rugi untuk suatu periode, berdasarkan nilai suku bunga mengambang atas aset dan liabilitas yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2025. Analisis sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2025. Jumlah sensitivitas atas laporan laba rugi komprehensif didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva penghasilan.

47. MARKET RISK (continued)

Sensitivity analysis for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are in the following tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the floating rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2025. The sensitivity of the statement of comprehensive income is calculated by revaluing fixed rate available- for sale financial assets, as of December 31, 2025 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of statement of comprehensive income is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The table below demonstrates the sensitivity of the Bank statement of income and statement of comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	2025		**2024**		
	Perubahan Persentase/ *Percentage Change*	**Pengharuh terhadap laporan laba rugi (dalam jutaan rupiah)/ *Impact to profit loss (in million rupiah)***	**Perubahan Persentase/ *Percentage change***	**Pengharuh terhadap laporan laba rugi (dalam jutaan rupiah)/ *Impact to profit loss (in million rupiah)***	
Rupiah (dalam jutaan)	+1	89.068	+1	87.495	*Rupiah (in million)*
Rupiah (dalam jutaan)	-1	(89.068)	-1	(87.495)	*Rupiah (in million)*

48. RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia dan/atau adanya kejadian-kejadian ekstemal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional terus ditingkatkan dalam rangka memitigasi munculnya risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian ekstemal. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem dan kejadian eksternal.

48. OPERATIONAL RISK

Operational risk is a risk of losses due to inadequacy and/or failure of internal processes, system failure, human errors, and/or external events which have an impact on the Bank's operations.

Operational risk management is continuously improved in order to mitigate the risk due to the inadequacy and/or failure of internal processes, human errors, system failure, and/or the external events. Operational risks may be caused by human resources, processes, systems and external events.

48. RISIKO OPERASIONAL (lanjutan)

Untuk meminimalisasi risiko operasional terutama yang bersumber dari sumber daya manusia, Bank melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Penyempumaan sistem rekruitmen SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
- Penyempumaan sistem *Workload Analysis* ;
- Perencanaan program *Exit Policy* ;
- Perencanaan program Assessment untuk kompetensi pegawai;
- Peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis;
- Melakukan pembinaan karir pegawai secara terarah, terprogram untuk mendapatkan kaderisasi pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, profesional dan bertanggung jawab.

Bank juga menghitung kecukupan modal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*). Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan PID dilakukan sebesar 12,5 x beban modal Risiko Operasional (adalah rata-rata dari penjumlahan Pendapatan Bruto (*gross income*) tahunan dari Januari sampai dengan Desember selama 3 tahun terakhir yang positif) dikali 15%.

48. OPERATIONAL RISK (continued)

To minimize operational risks, especially those caused by human resources, the Bank has undertaken the following measures:

- *Improving the Human Resource recruitment system, which is tailored to the needs and the development of the organization;*
- *Improving the Workload Analysis system;*
- *Planning the Exit Policy program;*
- *Planning the assessment of employee competency*
- *Increasing competence of human resources through education and training tailore;d to the needs and development of the company*
- *Providing career development guidance and program to employees in order to have regeneration of leaders that have competency, integrity, professionalism, and responsibility.*

The Bank also calculates it's capital adequacy in accordance with the Regulation of Financial Service Authority by using the Basic Indicator Approach. The calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk using PID is carried out at 12.5 x capital charge for Operational Risk (which is the average of the sum of the annual gross income from January to December for the last 3 years in positive value) multiplied by 15%.

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan disajikan per kategori dari instrumen keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The next table summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities presented per category of financial instruments. The fair values disclosed are based on relevant information available as of 31 Desember 2025 and 2024, and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) ***49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)***

	2025		
	Nilai tercatat/ ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset keuangan			***Financial sssets***
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			***Financial assets at fair value through profit or loss***
Kas	557.484.179.498	557.484.179.498	*Cash*
Penyertaan saham	2.720.090.450	2.720.090.450	*Investment in shares*
Biaya perolehan diamortisasi			***Amortized Cost***
Giro pada Bank Indonesia	585.097.252.020	585.097.252.020	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	8.539.353.003	8.539.353.003	*Current acocunts with other bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.446.583.452.624	1.446.583.452.624	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	1.981.455.465.117	1.985.744.076.880	*Securities for investment purposes*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	3.106.207.303.473	3.133.884.610.000	*Marketable securities under agreements to resell*
Pinjaman yang diberikan	24.730.059.583.812	24.730.059.583.812	*Loans*
Aset tetap	394.962.527.323	394.962.527.323	*Fixed assets*
Aset takberwujud	1.063.804.107	1.063.804.107	*Intangible assets*
Aset hak guna	106.081.483.760	106.081.483.760	*Right-of-use of assets*
Aset pajak tangguhan	228.597.878.178	228.597.878.178	*Deffered tax assets*
Aset lain-lain - bersih	339.227.450.282	339.227.450.282	*Other assets - net*
Jumlah	**33.488.079.823.647**	**33.520.045.741.937**	***Total***
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Liabilitas segera	363.574.535.090	363.574.535.090	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Giro	2.516.318.630.049	2.516.318.630.049	*Current accounts*
Tabungan	7.295.122.953.980	7.295.122.953.980	*Saving accounts*
Deposito	12.459.991.867.526	12.459.991.867.526	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	180.299.767.147	180.299.767.147	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	908.542.001.150	908.542.001.150	*Borrowings*
Liabilitas sewa	99.038.635.175	99.038.635.175	*Lease liabilities*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	914.873.484	914.873.484	*Allowance for possible on commitments and contingencies*
Liabilitas lain-lain	334.131.244.568	334.131.244.568	*Other liabilities*
Jumlah	**24.157.934.508.169**	**24.157.934.508.169**	***Total***

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	2024		
	Nilai tercatat/ ***Carrying value***	**Nilai wajar/** ***Fair value***	
Aset keuangan			***Financial assets***
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi			***Financial assets at fair value through profit or loss***
Kas	523.298.458.711	523.298.458.711	*Cash*
Penyertaan saham	2.641.053.571	2.641.053.571	*Investment in shares*
Biaya perolehan diamortisasi			***Amortized Cost***
Giro pada Bank Indonesia	853.044.633.798	853.044.633.798	*Current Accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	14.350.773.626	14.350.773.626	*Current acounts with other bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	874.927.154.594	874.927.154.594	*Placement with Bank Indonesia and other banks*
Efek-efek untuk tujuan investasi	4.003.649.364.308	2.273.249.155.687	*Securities for investment purposes*
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	575.748.691.871	598.800.000.000	*Marketable securities under agreements to resell*
Pinjaman yang diberikan	25.040.970.403.004	25.040.970.403.004	*Loans*
Aset tetap	412.520.218.812	412.520.218.812	*Fixed assets*
Aset takberwujud	1.249.361.740	1.249.361.740	*Intangible assets*
Aset hak guna	106.354.137.677	106.354.137.677	*Right-of-use of assets*
Aset pajak tangguhan	230.986.012.373	230.986.012.373	*Deffered tax assets*
Aset lain-lain - bersih	318.074.641.200	318.074.641.200	*Other assets - Net*
Jumlah	**32.957.814.905.285**	**31.250.466.004.793**	***Total***
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Liabilitas segera	335.473.578.554	335.473.578.554	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
Giro	1.772.964.161.519	1.772.964.161.519	*Current accounts*
Tabungan	7.236.897.158.422	7.236.897.158.422	*Saving accounts*
Deposito	13.128.830.010.618	13.128.830.010.618	*Time deposits*
Simpanan dari bank lain	159.134.213.861	159.134.213.861	*Deposits from other banks*
Pinjaman yang diterima	780.653.379.943	780.653.379.943	*Borrowings*
Liabilitas sewa	95.995.669.205	95.995.669.205	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.104.728.386	1.104.728.386	
Liabilitas lain-lain	356.082.736.072	356.082.736.072	*Other liabilities*
Jumlah	**23.867.135.636.580**	**23.867.135.636.580**	***Total***

Bank menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

i Tingkat 1: Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik

ii Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas keuangan, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga);

iii Tingkat 3: input untuk aset atau liabilitas keuangan yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

The Bank adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments:

i Level 1: Quoted prices in active market for the same/identical financial asset or liability;

ii Level 2: Inputs other than quoted market prices included in Level 1 that are observable for the financial asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price);

iii Level 3: Inputs for the financial assets or liability that are not based on observable market data (unobservable information).

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tidak terdapat perpindahan antara tingkat 1 dan tingkat 2 hirarki nilai wajar.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif (contohnya surat berharga yang diukur dan tersedia untuk dijual), ditentukan dengan berdasarkan harga pasar yang dikutip pada tanggal pelaporan. Suatu pasar dianggap aktif apabila informasi mengenai harga kuotasian dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara berkala dari suatu bursa, pedagang efek, broker, kelompok penilai harga pasar industri tertentu, regulator dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan regular pada tingkat yang wajar. Harga pasar dikutip untuk aset keuangan yang dimiliki Bank adalah harga penawaran (*bid price*). Instrumen-instrumen tersebut digolongkan dalam Tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam Tingkat 1 umumnya meliputi investasi yang diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (contohnya derivatif *over-the-counter* ditentukan dengan teknik penilaian. Teknik-teknik penilaian tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi dan sedapat mungkin meminimalisir penggunaan estimasi spesifik dari entitas. Apabila seluruh input yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan dapat diobservasi, maka instrumen keuangan tersebut dikategorikan dalam Tingkat 2. Sebaliknya, jika salah satu atau lebih data tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi, instrumen ini termasuk dalam Tingkat 3.

Teknik penilaian spesifik yang digunakan untuk melakukan penilaian pada instrumen keuangan, antara lain:

- Harga yang dikutip dari pasar atau pedagang efek
- Nilai wajar dari *swap* tingkat suku bunga yang diperhitungkan sebagai nilai kini dari estimasi arus kas masa datang berdasarkan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi.
- Nilai wajar dari kontrak berjangka valuta asing yang ditentukan berdasarkan kurs berjangka pada tanggal pelaporan keuangan, dan
- Teknik-teknik lainnya, seperti analisis arus kas diskontoan yang digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

There is no transfer between level 1 and level 2 of the fair value hierarchy.

The fair value of financial instruments traded in an active market (i.e. measured and available-for-sale securities), is based on quoted market price at reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from exchange, dealer or broker, industry Bank pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occuring market transaction on an arm's length basis. The quoted market price used for financial asset held by Bank is bid price. These instruments are included in Level 1. Instruments included in Level 1 comprise primarily of securities classified as fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (i.e over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required for the fair value of an instrument are observable, the instrument is included in Level 2. Otherwise, if one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- *Quoted market prices or dealer quotes for similar*
- *Fair value of interest rate swap is calculated as the present value of estimated future cashflow based on observable yield curves.*
- *Fair value of foreign exchange contracts is determined using forward exchange rates at reporting date,and*
- *Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for other financial instruments.*

i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, bills and other receivables, equity investments, acceptance receivables, securities purchases under agreements to resell and other assets.

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia merupakan penanaman dana dalam bentuk *Deposit facility*, *term deposit, deposit facility* syariah, penempatan *"fixed term"* dan lain-lain.

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, tagihan akseptasi dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, wesel ekspor, tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, tagihan akseptasi dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

ii) Pinjaman yang diberikan
Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan pinjaman yang diberikan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Pinjaman yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari pinjaman yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari pinjaman yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas pinjaman jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

iii) Liabilitas segera, simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain.

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap, liabilitas akseptasi dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

Placements with other banks and Bank Indonesia represent placements in the form of Bank Indonesia deposit facility, term deposit, sharia deposit facility, call money, "fixed-term" placements, time deposits and others.

The carrying amount of cash and cash equivalents, as well as placements with floating rates are a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair values of fixed interest bearing placements, marketable securities, bills and other receivables, acceptance receivables and other assets were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate placements, bills and other receivables, acceptance receivables, securities purchased under agreements to resell and other assets were a reasonable approximation of their fair value.

ii) Loans
Generally, the Bank's portfolio consists of loans with floating interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amount of floating rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

iii) Obligations due immediately, deposits from customers and deposits from other banks, acceptance payables and other liabilities.

The estimated fair value of obligations due immediately, deposits with no stated maturity, which include non-interest bearing deposits, are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of fixed interest-bearing deposits and acceptance payables are based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate deposits, acceptance payables and other liabilities are the reasonable approximation of their fair values.

49. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

iv) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah
Nilai wajar untuk efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara *(broker)* /pedagang efek *(dealer)* . Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

49. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

iv) Marketable securities and Government Bonds
The fair value for amortized cost marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

50. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN

Pada tanggal 31 Desember 2025, Bank Nagari memiliki sejumlah perikatan-perikatan penting dengan pihak ketiga dengan ikhtisar sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Fasilitasi Kartu Identitas Anak (KIA) dalam bentuk pemberian bonus saldo tabungan anak lingkup kabupaten/kota se-Sumatera Barat

   Bank telah mengadakan kerjasama fasilitasi Kartu Identitas Anak (KIA) dalam bentuk pemberian bonus saldo tabungan anak lingkup Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.470/612/Dukcapil-2/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanginya perjanjian kerjasama sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak. Perjanjian ini telah dilakukan perpanjangan secara otomatis.

2. Perjanjian kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Melalui Virtual Account dengan PT Finnet Indonesia

   Bank telah mengadakan kerjasama tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Melalui Virtual Account dengan PT Finnet Indonesia sebagaimana tertuang dalam perjanjian PKS No.PKS/103/DIR/03-2024 tanggal 19 Maret 2024. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku 1 tahun sejak ditandatanginya perjanjian kerjasama. Perjanjian ini telah dilakukan perpanjangan secara otomatis.

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS

As of December 31, 2025, Bank Nagari has several significant agreement with a third party with summaries as follows:

1. Agreement of Facilitation for Child Identity Cards (KIA) in the form of giving bonuses to child savings balances in districts/cities in West Sumatera

   Bank performs an agreement of facilitation for Child Identity Cards (KIA) in the form of Providing a Balance Bonus for Child Savings in Districts/Cities throughout West Sumatra with the Office of Population and Civil Registration of West Sumatra Province as stated in the agreement No.470/612/Dukcapil-2/VII /2022 July 18, 2022. This cooperation agreement is effective from the signing of the cooperation agreement until December 31, 2022 and can be extended upon agreement of the parties. This agreement was automatically extended.

2. Agreement of Payment Acceptance Services through Virtual Account with PT Finnet Indonesia

   Bank has entered into cooperation on Payment Acceptance Services through Virtual Account with PT Finnet Indonesia as stated in PKS agreement No.PKS/103/DIR/03-2024 dated March 19, 2024. This cooperation agreement takes effect 1 year after the signing of the cooperation agreement. This agreement was automatically extended.

50. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. Perjanjian kerjasama penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah

   Bank telah mengadakan kerjasama penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.46/PKS/BP-TPR/IV/12/2023 tanggal 28 Desember 2023. Jangka waktu adalah 1 tahun sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

   Bank telah melakukan adendum sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Nomor PKS/009/DIR/12-2024 tertanggal 23 Desember 2024.Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlangsung dan mengikat Para Pihak, sepanjang masih terdapat kewajiban salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang belum diselesaikan.

4. Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Jasa Penanganan *Core Banking System* Konvensional, *Core Banking System Syariah*, *Disaster Recovery Center* serta Aplikasi *Risk Management*, Data Warehouse dan MIS dengan PT Collega Inti Pratama

   Bank telah mengadakan kerjasama tentang penyediaan jasa layanan *Core Banking System* dan Jasa Lainnya dengan PT Collega Inti Pratama sebagaimana tertuang dalam perjanjian PKS/019/DIR/03-2007 tanggal 20 Maret 2007 dan adendum terakhir di adendum ke IX tanggal 22 Januari 2024. Jangka waktu adalah 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2029.

5. Perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa IFG

   Bank telah mengadakan kerjasama dengan PT Asuransi Jiwa IFG tentang pengelolaan asuransi IFG pendanaan hari tua bagi karyawan PT Bank Nagari sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.SR/005/DIR/HC/02-2023 tanggal 10 Februari 2023. Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangi sampai dengan tanggal akhir masa asuransi/peserta terakhir.

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

3. Agreement of distribution of liquidity facility funds for housing financing through prosperous home ownership loans for low-income communities

   Bank performs an agreement in the distribution of liquidity facility funds for housing financing through prosperous home ownership loans for low-income communities with the Public Housing Savings Management Agency as stated in agreement No.46/PKS/BP-TPR/IV/12/2023 dated December 28, 2023. Term time is 1 year from January 1, 2024 to December 28, 2024.

   Bank performs an addendum as set forth in Agreement Number PKS/009/DIR/12-2024 dated 23 December 2024. The agreement becomes effective as of the signing date and shall remain valid and binding upon the Parties for as long as any rights and/or obligations of either Party to the other remain outstanding.

4. Agreement of Conventional Core Banking System Handling Services, Sharia Core Banking System, Disaster Recovery Center as well as Risk Management, Data Warehouse and MIS Applications with PT Collega Inti Pratama

   Bank has entered into cooperation on the provision of Core Banking System services and other services with PT Collega Inti Pratama as stated in the PKS/019/DIR/03-2007 agreement dated March 20, 2007 and the last addendum in the IX addendum dated January 22, 2024. The period is January 22, 2024 to January 21, 2029.

5. Cooperation agreement with PT IFG Life Insurance

   Bank has collaborated with PT Asuransi Jiwa IFG regarding the management of IFG insurance for old age funding for PT Bank Nagari employees as stated in agreement No.SR/005/DIR/HC/02-2023 dated 10 February 2023. The agreement is valid from the date it is signed until the end date of the insurance period/last participant.

50. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

6. Perjanjian Kerjasama dengan PT Sentra Finansial Teknologi Tentang Layanan Virtual Account (*Host to Host*) Terintegrasi Dengan Sistem Aplikasi Edufin

   Bank telah mengadakan kerjasama bersama PT Sentra Finansial Teknologi tentang Layanan Virtual Account (*Host to Host*) Terintegrasi Dengan Sistem Aplikasi Edufin sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.PKS/097/DIR/07-2024 pada 1 Juli 2024. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatangan sampai dengan 1 Juli 2027.

7. Perjanjian kerjasama Penyedia dan Pengelola Infrastruktur BI-Fast dengan PT Rintis Sejahtera

   Bank telah mengadakan kerjasama bersama PT Rintis Sejahtera sebagai Penyedia dan Pengelola Infrastruktur BI-Fast secara *Sharing* / *Multi-Tenancy* sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.PKS/104/DIR/06-2022 pada 30 Juni 2022. Perjanjian ini dimulai tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 29 Juni 2025. Perjanjian secara otomatis dilakukan perpanjangan.

8. Perjanjian kerjasama sebagai *acquirer* Bank Kartu ATM dalam rangka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

   Bank telah mengadakan kerjasama sebagai *acquirer* Bank Kartu ATM dalam Rangka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dengan PT Rintis Sejahtera sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.RS-LGL-ADD-1904-0005 tanggal 29 April 2019.

9. Perjanjian kerjasama Kartu Debit Domestik dalam rangka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) antara Bank Nagari sebagai *acquirer* Bank dengan PT Rintis Sejahtera

   Bank telah mengadakan perjanjian kerjasama kartu debit domestik dalam rangka Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) antara Bank Nagari sebagai *acquirer* bank dengan PT Rintis Sejahtera sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.PKS/149/DIR/9/2019 tanggal 24 September 2019.

10. Perjanjian kerjasama berlangganan jasa jaringan ATM Bersama

    Bank telah mengadakan kerjasama berlangganan jasa jaringan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.028/PKS.BNGR/AJ/000/2003 tanggal 15 Desember 2003 dan adendum terakhir di PKS No.094/PKS.BNGR/AJ/000/2018 tanggal 8 Juni 2018 dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan para pihak.

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

6. Agreement Between PT Sentra Finansial Teknologi regarding Virtual Account Services (Host to Host) Integrated with Edufin Application System

   Bank has entered into a collaboration with PT Sentra Finansial Teknologi regarding Virtual Account Services (Host to Host) Integrated with Edufin Application System as stated in agreement No.PKS/097/DIR/07-2024 on July 1, 2024. This agreement is valid from the date of signing until July 1, 2027.

7. Agreement between PT Rintis Sejahtera as BI-Fast Infrastructure Provider and Manager cooperation

   Bank has entered into cooperation with PT Rintis Sejahtera as BI-Fast Infrastructure Provider and Manager on a Sharing / Multi-Tenancy basis as stated in agreement No.PKS/104/DIR/06-2022 on June 30, 2022. This agreement starts on June 30, 2022 until June 29, 2025. This agreement was automatically extended.

8. Agreement as an acquirer for an ATM Card Bank in the Context of the National Payment Gateway (GPN)

   Bank performs an agreement as an acquirer of an ATM Card Bank in the Context of the National Payment Gateway (GPN) with PT Rintis Sejahtera as stated in the agreement No.RS-LGL-ADD-1904-0005 dated April 29, 2019.

9. Agreement of Domestic Debit Card in the framework of the National Payment Gateway (GPN) between Bank Nagari as the acquirer of the Bank and PT Rintis Sejahtera

   Bank performs an agreement of domestic debit cards in the context of the National Payment Gateway (GPN) between Bank Nagari as the acquirer of the bank and PT Rintis Sejahtera as stated in the agreement No.PKS/149/DIR/9/2019 dated September 24, 2019.

10. Agreement of subscribe to ATM Bersama network services

   Bank performs an agreement of subscribe to ATM joint network services with PT Artajasa Pembayaran Elektronis as stated in the agreement No.028/PKS.BNGR/AJ/000/2003 dated December 15, 2003 and the final addendum to PKS No.094/PKS.BNGR/AJ/000/2018 dated June 8, 2018 with conditions that can be extended again with the agreement of the parties.

50. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

11. Perjanjian kerjasama sewa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Mesin *Cash Recycle Machine* (CRM) dengan PT Datindo Infonet Prima

    Bank telah mengadakan kerjasama sewa ATM dan mesin CRM sebanyak 86 unit ATM dan 4 unit mesin CRM dengan PT Datindo Infonet Prima sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.PKS/002/DIR/01-2024 tanggal 4 Januari 2024. Jangka waktu adalah 3 tahun terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Operasional.

12. Perjanjian kerjasama sewa mesin Customer Relationship Management (CRM) dengan PT Asaba Computer Center

    Bank telah mengadakan kerjasama sewa CRM dengan PT Asaba Computer Center sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.034/PKS/DUM/UM/06-2022 tanggal 6 Juni 2022. Jangka waktu adalah 3 tahun terhitung mulai Berita Acara Aktivasi.

    Bank telah melakukan adendum sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Nomor 030/ADD/DUM/UM/09-2025 tertanggal 10 September 2025, dengan masa berlaku sejak 13 September 2025 hingga 12 September 2026.

13. Perjanjian kerjasama Bank Sponsor dan peserta tidak langsung dalam menggunakan BI-FAST

    Bank telah mengadakan kerjasama Bank Sponsor dan peserta tidak langsung dalam Menggunakan BI-FAST dengan PT Bank Syariah Indonesia sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.PKS/113/DIR/07-2022 tanggal 20 Juli 2022. Perjanjian berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal perjajian hingga 20 Juli 2025. Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang.

17. Perjanjian Kerjasama pemberian fasilitas pinjaman dalam rangka penyaluran KPR sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah

    Bank telah mengadakan perjanjian pemberian fasilitas pinjaman dari PT Sarana Multigriya finansial (persero) kepada PT Bank Nagari dalam rangka penyaluran KPR sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.PKS/044/DIR/01-2024 tanggal 19 Januari 2024. Bank telah melakukan adendum sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Nomor PKS/028/DIR/03-2025 tertanggal 13 Maret 2025, dengan jangka waktu pinjaman paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman.Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlangsung dan mengikat Para Pihak, sepanjang masih terdapat kewajiban salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang belum diselesaikan.

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

11. Agreement of rent an automated teller machine (ATM) and Cash Recycle Machine (CRM) with PT Datindo Infonet Prima

Bank performs an agreement of ATM and CRM machine rental cooperation as many as 86 ATM units and 4 CRM machine units with PT Datindo Infonet Prima as stated in the agreement No.PKS/002/DIR/01-2024 dated January 4, 2024. The period is 3 years starting from the signing of the Operational Minutes.

12. Agreement of rent an Customer Relationship Management machine (CRM) with PT Asaba Computer Center

Bank performs an agreement of an rent an CRM with PT Asaba Computer Center based on agreement of No.034/PKS/DUM/UM/06-2022 dated June 6, 2022. The term is 3 years starting from the Activation Minutes.

The Bank performs an addendum as set forth in Agreement Number 030/ADD/DUM/UM/09-2025 dated 10 September 2025, with a validity period from 13 September 2025 until 12 September 2026.

13. Agreement of Bank Sponsors and indirect participants in using BI-FAST

Bank performs an agreement of bank sponsor and indirect participant in using BI-FAST with PT Bank Syariah Indonesia as stated in the agreement No.PKS/113/DIR/07-2022 dated July 20, 2022. The agreement is valid for 3 years from the date of agreement until July 20, 2025. This agreement is automatically extended.

17. Agreement of provides loan facilities in the context of distributing prosperous KPR for low-income communities

Bank has entered into an agreement to provide loan facilities from PT Sarana Multigriya Financial (Persero) to PT Bank Nagari in the context of distributing prosperous KPR for low-income communities as stated in the agreement No.PKS/044/DIR/01-2024 dated January 19, 2024. Bank performs an addendum as set forth in Agreement Number PKS/028/DIR/03-2025 dated 13 March 2025, stipulating a loan term of up to 20 (twenty) years from the date of loan facility disbursement, and such agreement becomes effective as of the signing date and shall remain valid and binding upon the Parties for as long as any obligations of either Party to the other remain outstanding.

50. PERIKATAN-PERIKATAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

18. Perjanjian kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan mudharabah muqayyadah dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Bank telah mengadakan perjanjian pemberian pemberian fasilitas pembiayaan mudharabah muqayyadah dari PT Sarana Multigriya finansial (persero) kepada PT Bank Nagari dalam rangka penyaluran PPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana tertuang dalam perjanjian No.023/FLPP/PP/SMF-BPD.NagariSy/I/2024 dan No.PKS/003/DIR/01-2024 tanggal 19 Januari 2024. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlangsung dan mengikat Para Pihak, sepanjang masih terdapat kewajiban salah satu Pihak kepada Pihak lainnya yang belum diselesaikan. Perjanjian ini telah dilakukan *update* dengan perjanjian No.069/PKS/SMF-BN/II/2025 dan No.PKS/025/DIR/02-2025 tanggal 13 Maret 2025.

50. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

18. Agreement of provide mudharabah muqayyadah financing facilities in the context of distributing PPR Sejahtera to low-income communities

Bank has has entered into an agreement to mudharabah muqayyadah financing facilities from PT Sarana Multigriya Financial (Persero) to PT Bank Nagari in the context of distributing PPR Sejahtera to communities with low placement as stated in No.PKS/003/DIR/01-2024 dated January 19, 2024. This agreement effective from the date of signing and will remain valid and binding on the Parties, as long as there are still obligations of one Party to the other Party that have not been completed.The agreement was subsequently amended through Agreement No.069/PKS/SMF-BN/II/2025 and No.PKS/025/DIR/02-2025 dated March 13, 2025.

51. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUM BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025:

Berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026:

- PSAK 117, “Kontrak Asuransi”, yang diadopsi dari IFRS 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 109 dan PSAK 115.

- PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Saat ini Bank sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari penerapan standar tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

51. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (“DSAK-IAI”) has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial statements ended December 31, 2025:

Effective on or after January 1, 2026:

- *PSAK 117, “Insurance Contracts”, adopted from IFRS 17, early application is permitted for entities that have also applied PSAK 109 and PSAK 115.*

- *Amandment PSAK 221, “The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on the Lock of Convertibility". Early application is permitted.*

The Bank is currently evaluating the above standards and has not yet determined the impact of these standard on the financial statement of the Bank.

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

a. Giro pada Bank Indonesia

Setiap bank di Indonesia diwajibkan mempunyai Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing untuk bank yang melakukan transaksi mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada Prinsip Perbankan Syariah, masing-masing sebesar Rp133.786.852.110 dan Rp152.384.645.883.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) terakhir yaitu PADG No.12 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

GWM dalam Rupiah adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. Giro Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUK dalam bentuk surat berharga (SUN/SBI/SBSN) yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia. Giro RIM adalah saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan RIM dengan batas bawah target RIM sebesar 84,00% atau batas atas target RIM sebesar 94,00% dan KPMM Insentif sebesar 14,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Bank Nagari memiliki RIM sebesar 90,92% dan 91,18%.

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards:

a. Current accounts with Bank Indonesia

Each bank in Indonesia is required to maintain a Minimum Statutory Reserves at Bank Indonesia for liquidity reserve in Rupiah and foreign currency for foreign exchange banks.

As of December 31, 2025 and 2024, in current accounts with Bank Indonesia there are current accounts are based on the principles of Sharia, amounted to Rp133,786,852,110 and Rp152,384,645,883 respectively.

As of December 31, 2025, and 2024, the Bank's Minimum Statutory Reserves (GWM) has complied with Bank Indonesia Regulation (PBI) No.15/15/PBI/2013 regarding the Minimum Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units. This regulation was last amended by PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022, along with the latest Board of Governors' Regulation (PADG) being PADG No. 2 of 2023 dated March 24, 2023, concerning the Mandatory Minimum Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units.

Minimum Statutory Reserves in Rupiah is the minimum deposit in Rupiah that must be maintained by the Bank in the form of a Demand Deposit Account with Bank Indonesia. Macroprudential Liquidity Buffer Account is the minimum liquidity reserve in Rupiah that must be maintained by BUK in the form of securities (SUN/SBI/SBSN) that meet certain requirements, the amount of which is determined by Bank Indonesia. RIM Current Account is a current account balance in the Rupiah Demand Deposit Account at Bank Indonesia that must be maintained by BUK be eligible for RIM with an RIM lower target limit of 84.00% or an RIM upper target limit of 94.00% and an Incentive KPMM of 14.00%.

On December 31, 2025 and 2024, Bank Nagari established an RIM Current Account at 90,92% and 91.18%.

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

a. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah rasio hasil perbandingan antara:

1. Kredit yang diberikan dalam rupiah dan valas;
2. Surat berharga Korporasi dalam rupiah dan Valas yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki BUK;
3. DPK BUK dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka/deposito dalam rupiah dan Valas, tidak termasuk dana antarbank, dan
4. Surat berharga dalam rupiah dan Valas yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diterbitan oleh BUK untuk memperoleh sumber pendanaan.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

a. Current accounts with Bank Indonesia (continued)

The Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) is the ratio of the results of a comparison between:

1. *Loans in rupiah and foreign currency;*
2. *Corporate securities in rupiah and foreign exchange that meet certain requirements owned by BUK;*
3. *BUK Deposits in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits in rupiah and foreign currencies, excluding interbank funds; and*
4. *Securities in rupiah and foreign currency that meet certain requirements, which are issued by BUK to obtain funding sources.*

The Minimum Statutory Reserve Ratios as of December 31, 2025 and 2024 required under Bank Indonesia regulations are as follows:

	2025	2024	
Giro Wajib Minimum:			*Minimum Reserved Account:*
Primer	4,80%	6,10%	*Primer*
Harian	0,00%	0,00%	*Daily*
Rata-Rata *)	4,80%	6,10%	*Average* *)
PLM	4,00%	5,10%	*PLM*
GWM Valas	4,00%	4,00%	*GWM Foreign Currency*

*) Pada 31 Desember 2025, Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, sehingga mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM dalam Rupiah sebesar 4,20%. GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi Bank sebesar 9,00%, berubah menjadi sebesar 4,80%.

*) Pada 31 Desember 2024, Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, sehingga mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM dalam Rupiah sebesar 2,90%. GWM dalam Rupiah yang harus dipenuhi Bank sebesar 9,00%, berubah menjadi sebesar 6,10%.

*) *On December 31, 2025, Bank provides funds for certain and inclusive economic activities, so that Bank gets incentives in the form of relaxation of the Statutory Reserves in Rupiah amounting to 4.20%. Statutory Reserves in Rupiah that must be fulfilled by the Bank which should be 9.00% become 4.80%.*

*) *On December 31, 2024, Bank provides funds for certain and inclusive economic activities, so that Bank gets incentives in the form of relaxation of the Statutory Reserves in Rupiah amounting to 1.20%. Statutory Reserves in Rupiah that must be fulfilled by the Bank which should be 9.00% become 6.00%.*

Realisasi Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Nagari Konvensional masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The realization of Minimum Statutory Reserves (GWM) of the Conventional Bank Nagari as of December 31, 2025 and 2024, respectively are as follows:

	2025	2024	
Giro Wajib Minimum:			*Minimum Reserved Account:*
Primer			*Primer*
Harian	2,06%	5,52%	*Daily*
Rata-Rata *)	4,84%	6,19%	*Average* *)
PLM	15,12%	10,94%	*PLM*
GWM Valas	4,59%	6,37%	*GWM Foreign Currency*

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

a. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Unit Usaha Syariah

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Unit Usaha Syariah yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Syariah			*Sharia*
Giro wajib minimum	3,00%	7,50%	*Minimum statutory reserves*
Harian	0,00%	0,00%	*Daily*
Rata-Rata *)	3,00%	7,50%	*Average* *)

*) Pada 31 Desember 2025 dan 2024, Bank melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, sehingga mendapatkan insentif berupa kelonggaran GWM syariah sebesar 4,50%. GWM dalam syariah yang harus dipenuhi Bank sebesar 7,00%, berubah menjadi sebesar 3,00%.

Realisasi Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Unit Usaha Syariah yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	2024	
Giro Wajib Minimum			*Minimum Reserved Account:*
Harian	2,70%	3,62%	*Daily*
Rata-Rata	3,26%	3,52%	*Average*

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 5.

b. Giro pada bank lain

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada Bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 7.

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

a. Current accounts with Bank Indonesia (continued)

Sharia Business Unit

The minimum statutory reserve ratios of Sharia Business Unit required by Bank Indonesia's regulation as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

*) *On December 31, 2025 and 2024, Bank provides funds for certain and inclusive economic activities, so that Bank gets incentives in the form of relaxation of the sharia Statutory Reserves amounting to 4.50%. Sharia Statutory Reserves that must be fulfilled by the Bank which should be 7.00% become 3.00%.*

The minimum statutory reserve ratios of Sharia Business Unit required by Bank Indonesia's regulation as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 5.

b. Current accounts with other banks

All current accounts with other banks as of December 31, 2025 and 2024 are classified as current.

The further disclosures on current accounts with other Banks are presented in Note 6.

c. Placement with Bank Indonesia and other banks

All placement with Bank Indonesia and other banks as of December 31, 2025 and 2024 were classified as current.

The further disclosures on placement with Bank Indonesia and other banks are presented in Note 6.

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Pinjaman yang diberikan

Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

d. Loans

Loans quality based on collectability according to Financial Services Authority regulation

	2025						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Bukan lapangan usaha lainnya	14.844.649.437.616	47.253.534.105	7.517.354.725	12.022.459.089	36.261.354.766	14.947.704.140.301	*None of the other business fields*
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	2.795.070.999.576	171.804.625.077	34.368.295.016	32.175.508.976	168.391.390.446	3.201.810.819.091	*censtruction wholesale and retail, repair and maintenance of cars and motorcycles*
Rumah tangga	2.488.464.559.581	95.728.630.204	10.837.827.119	10.711.303.442	79.127.660.796	2.684.869.981.142	*Households*
Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.643.423.404.156	55.359.405.520	8.451.954.597	7.747.910.325	65.920.064.451	1.780.902.739.049	*Agriculture, forestry and fishing*
Industri pengolahan	850.469.417.356	12.936.005.091	8.317.926.406	5.846.737.359	16.684.126.528	894.254.212.740	*Manufacturing*
Konstruksi	535.738.373.963	34.420.581.529	-	511.527.448	32.985.069.528	603.655.552.468	*Construction*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	253.394.709.422	5.918.736.873	883.355.434	1.066.456.711	3.001.100.018	264.264.358.458	*Accommodation and food and beverages*
Pengangkutan dan pergudangan	180.676.576.279	17.859.155.917	2.258.812.300	2.778.730.406	8.117.576.109	211.690.851.011	*Transportation and warehousing*
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	186.132.442.696	8.119.072.734	1.816.807.092	995.571.353	9.262.550.672	206.326.444.547	*Leasing and operating lease, employment travel agency and business support other*
Aktivitas jasa lainnya	175.832.263.074	15.379.559.131	2.144.964.432	1.410.604.754	8.716.990.868	203.484.382.259	*Other service activities*
Pendidikan	70.886.865.907	1.089.669.004	-	-	-	71.976.534.911	*Education*
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	56.637.181.257	145.992.604	3.535.893	20.049.093	214.123.337	57.020.882.184	*Health and social activities*
Real estate	31.113.695.180	937.326.996	-	4.678.877.701	8.514.800.000	45.244.699.877	*Real estate*
Aktivitas keuangan dan asuransi	25.872.756.226	-	-	-	-	25.872.756.226	*Financial and insurance activities*
Pertambangan dan penggalian	20.820.523.941	252.222.126	41.725.036	-	4.391.352.409	25.505.823.512	*Mining and excavation*
Dipindahkan	**24.159.183.206.230**	**467.204.516.911**	**76.642.558.050**	**79.965.736.657**	**441.588.159.928**	**25.224.584.177.776**	***Carried forward***

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)
Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (lanjutan)

d. Loans (continued)
Loans quality based on collectability according to Financial Services Authority regulation (continued)

	2025						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Pindahan	**24.159.183.206.230**	**467.204.516.911**	**76.642.558.050**	**79.965.736.657**	**441.588.159.928**	**25.224.584.177.776**	***Brought forward***
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	13.727.254.103	1.397.095.296	-	30.432.102	4.984.544.535	20.139.326.036	*Professional, scientific and technical activities*
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	15.552.014.376	1.035.542.059	106.421.282	-	1.469.109.663	18.163.087.380	*Water management, waste water management , waste management and recycling, and remediation activities*
Informasi dan komunikasi	4.124.598.361	109.566.441	-	-	1.229.432.115	5.463.596.917	*Information and communication*
Pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin	521.324.486	-	-	-	157.569.980	678.894.466	*Electricity, gas, steam/hot water and air cold*
Kesenian, hiburan dan rekreasi	-	-	-	-	333.710.573	333.710.573	*Arts, entertainment and recreation*
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	69.612.364	-	-	134.829.051	-	204.441.415	*Household activities as entrepreneurs, activities that produce goods and services by households that are used to meet their own needs*
Jumlah	**24.193.178.009.920**	**469.746.720.707**	**76.748.979.332**	**80.130.997.810**	**449.762.526.794**	**25.269.567.234.563**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(97.766.549.984)	(41.261.922.018)	(28.481.931.077)	(33.588.226.025)	(338.409.021.647)	(539.507.650.751)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**24.095.411.459.936**	**428.484.798.689**	**48.267.048.255**	**46.542.771.785**	**111.353.505.147**	**24.730.059.583.812**	***Total - net***

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)
Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (lanjutan)

d. Loans (continued)
Loans quality based on collectability according to Financial Services Authority regulation (continued)

	2 0 2 4						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Bukan lapangan usaha lainnya	14.910.522.516.387	36.486.382.112	3.510.416.104	4.343.355.779	18.623.524.571	14.973.486.194.953	*None of the other business fields*
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	3.161.873.223.322	146.878.068.108	9.049.825.802	13.472.043.366	181.964.612.768	3.513.237.773.366	*Censtruction wholesale and retail, repair and maintenance of cars and motorcycles*
Rumah tangga	2.554.608.091.008	69.050.894.712	3.216.243.218	4.133.532.374	68.436.138.495	2.699.444.899.807	*Households*
Pertanian, kehutanan dan perikanan	1.720.351.440.955	60.903.156.134	6.665.463.412	9.725.925.537	65.572.986.646	1.863.218.972.684	*Agriculture, forestry and fishing*
Industri pengolahan	908.840.051.261	13.549.067.522	802.331.648	1.212.666.314	10.461.826.482	934.865.943.227	*Manufacturing*
Konstruksi	437.707.300.977	13.751.404.577	985.000.000	1.244.107.735	24.826.065.246	478.513.878.535	*Construction*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	278.902.183.557	3.460.910.352	973.917.221	563.050.559	2.883.804.724	286.783.866.413	*Accommodation and food and beverages*
Pengangkutan dan pergudangan	196.760.089.741	9.119.815.751	298.727.451	712.836.995	5.457.997.600	212.349.467.538	*Transportation and warehousing*
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	165.831.333.965	7.530.520.961	182.087.821	485.974.166	7.583.622.642	181.613.539.555	*Leasing and operating lease, employment travel agency and business support other*
Aktivitas jasa lainnya	154.320.308.925	6.444.417.144	850.029.655	2.496.927.104	6.059.037.942	170.170.720.770	*Other service activities*
Pendidikan	66.429.070.862	-	-	-	-	66.429.070.862	*Education*
Real estate	48.554.638.220	2.549.409.076	-	-	2.342.660.354	53.446.707.650	*Real estate*
Pertambangan dan penggalian	22.717.674.591	252.335.608	195.260.410	723.832.183	4.449.377.736	28.338.480.528	*Mining and excavation*
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	22.809.471.284	2.023.488.463	273.628.264	30.644.380	1.577.154.269	26.714.386.660	*Water management, waste water management , waste management and recycling, and remediation activities*
Dipindahkan	**24.650.227.395.055**	**371.999.870.520**	**27.002.931.006**	**39.144.896.492**	**400.238.809.475**	**25.488.613.902.548**	***Carried forward***

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)
Kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (lanjutan)

d. Loans (continued)
Loans quality based on collectability according to Financial Services Authority regulation (continued)

	2 0 2 4						
	Lancar/ *Current*	**Dalam perhatian khusus/ *Special mention***	**Kurang lancar/ *Substandard***	**Diragukan/ *Doubtful***	**Macet/ *Loss***	**Jumlah/ *Total***	
Pindahan	**24.650.227.395.055**	**371.999.870.520**	**27.002.931.006**	**39.144.896.492**	**400.238.809.475**	**25.488.613.902.548**	***Brought forward***
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	30.034.040.826	-	-	179.166.665	214.123.337	30.427.330.828	*Health and social activities*
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	17.398.347.872	-	-	-	4.984.544.535	22.382.892.407	*Professional, scientific and technical activities*
Informasi dan komunikasi	5.005.532.324	-	-	-	1.297.770.870	6.303.303.194	*Information and communication*
Aktivitas keuangan dan asuransi	1.067.707.875	-	-	-	-	1.067.707.875	*Financial and insurance activities*
Kesenian, hiburan dan rekreasi	211.009.708	320.500.001	-	-	361.336.071	892.845.780	*Arts, entertainment and recreation*
Pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin	719.159.957	-	-	-	157.569.980	876.729.937	*Electricity, gas, steam/hot water and air cold*
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	258.875.621	-	-	-	-	258.875.621	*Household activities as entrepreneurs, activities that produce goods and services by households that are used to meet their own needs*
Jumlah	**24.704.922.069.238**	**372.320.370.521**	**27.002.931.006**	**39.324.063.157**	**407.254.154.268**	**25.550.823.588.190**	***Total***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(100.157.611.615)	(36.213.995.241)	(9.239.352.353)	(19.314.321.487)	(344.927.904.490)	(509.853.185.186)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**24.604.764.457.623**	**336.106.375.280**	**17.763.578.653**	**20.009.741.670**	**62.326.249.778**	**25.040.970.403.004**	***Total - net***

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

d. Loans (continued)

Berdasarkan kolektibilitas

Based on collectibility

2 0 2 5

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	*Kurang lancar/ Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Konsumsi/ *Consumer*	15.892.994.269.246	107.815.872.524	15.299.412.202	20.104.167.054	106.269.248.457	16.142.482.969.483
Program Pemerintah/ *Government program*	3.851.151.863.568	159.629.577.430	39.120.815.703	34.059.627.287	79.927.528.056	4.163.889.412.044
Modal kerja/ *Working capital*	2.291.340.767.892	177.100.801.031	19.219.627.744	23.452.378.856	228.913.009.851	2.740.026.585.374
Sindikasi/ *Syndicated*	936.616.469.438	-	-	-	-	936.616.469.438
Investasi/ *Investments*	722.584.697.703	23.263.103.307	2.728.621.512	2.138.057.967	33.578.062.590	784.292.543.079
Karyawan/ *Employees*	498.489.942.073	1.937.366.415	380.502.171	376.766.646	1.074.677.840	502.259.255.145
Jumlah/ Total	**24.193.178.009.920**	**469.746.720.707**	**76.748.979.332**	**80.130.997.810**	**449.762.526.794**	**25.269.567.234.563**
Dikurangi/ Less:						
Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(97.766.549.984)	(41.261.922.018)	(28.481.931.077)	(33.588.226.025)	(338.409.021.647)	(539.507.650.751)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**24.095.411.459.936**	**428.484.798.689**	**48.267.048.255**	**46.542.771.785**	**111.353.505.147**	**24.730.059.583.812**

2 0 2 4

	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	*Kurang lancar/ Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*
Konsumsi/ *Consumer*	16.285.360.030.313	75.067.315.588	6.337.726.432	7.588.344.402	80.995.471.551	16.455.348.888.286
Sindikasi/ *Syndicated*	882.411.456.647	-	-	-	-	882.411.456.647
Modal kerja/ *Working capital*	2.417.428.931.011	132.262.168.849	6.795.615.197	15.572.301.051	229.183.480.224	2.801.242.496.332
Investasi/ *Investments*	680.808.739.358	16.841.004.774	1.198.509.698	2.354.646.986	37.055.764.358	738.258.665.174
Karyawan/ *Employees*	538.882.005.263	324.287.556	-	-	771.442.097	539.977.734.916
Program Pemerintah/ *Government program*	3.900.030.906.646	147.825.593.754	12.671.079.679	13.808.770.718	59.247.996.038	4.133.584.346.835
Jumlah/ Total	**24.704.922.069.238**	**372.320.370.521**	**27.002.931.006**	**39.324.063.157**	**407.254.154.268**	**25.550.823.588.190**
Dikurangi/ Less:						
Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment losses*	(100.157.611.615)	(36.213.995.241)	(9.239.352.353)	(19.314.321.487)	(344.927.904.490)	(509.853.185.186)
Jumlah - Bersih/ *Total - Net*	**24.604.764.457.623**	**336.106.375.280**	**17.763.578.653**	**20.009.741.670**	**62.326.249.778**	**25.040.970.403.004**

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

d. Loans (continued)

Pinjaman bermasalah dan penyisihan penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi (NPL)

Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment loss*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment loss*	
Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	234.935.194.438	(165.425.451.591)	204.486.481.936	(173.359.081.032)	*Censtruction wholesale and retail, repair and maintenance of cars and motorcycles*
Pertanian, kehutanan dan perikanan	82.119.929.373	(60.181.260.343)	81.964.375.595	(59.091.975.118)	*Agriculture, forestry and fishing*
Rumah tangga	100.676.791.355	(70.261.929.271)	75.785.914.086	(56.192.927.779)	*Households*
Bukan lapangan usaha lainnya	55.801.168.580	(23.866.718.944)	26.477.296.454	(16.426.223.918)	*None of the other business fields*
Konstruksi	33.496.596.976	(20.674.454.013)	27.055.172.981	(21.393.575.996)	*Construction*
Industri pengolahan	30.848.790.294	(15.874.177.357)	12.476.824.444	(9.965.561.924)	*Manufacturing*
Aktivitas jasa lainnya	12.272.560.054	(8.573.748.042)	9.405.994.701	(7.052.109.341)	*Other service activities*
Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	12.074.929.117	(7.057.734.503)	8.251.684.629	(6.629.005.370)	*Leasing and operating lease, employment travel agency and business support other*
Pengangkutan dan pergudangan	13.155.118.815	(6.710.961.311)	6.469.562.046	(5.176.054.945)	*Transportation and warehousing*
Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis	5.014.976.637	(5.004.146.063)	4.984.544.535	(4.984.321.391)	*Professional, scientific and technical activities*
Pertambangan dan penggalian	4.433.077.445	(3.922.966.710)	5.368.470.329	(4.667.958.528)	*Mining and excavation*
Real estate	13.193.677.701	(6.404.295.747)	2.342.660.354	(2.020.620.715)	*Real estate*
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	4.950.912.163	(3.181.761.769)	4.420.772.504	(3.357.318.823)	*Accommodation and food and beverages*
Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	1.575.530.945	(1.336.892.169)	1.881.426.913	(1.289.605.263)	*Water management, wastewater management , waste management and recycling, and remediation activities*
Informasi dan komunikasi	1.229.432.115	(1.199.617.550)	1.297.770.870	(1.257.129.333)	*Information and communication*
Kesenian, hiburan dan rekreasi	333.710.573	(333.710.573)	361.336.071	(358.053.772)	*Arts, entertainment and recreation*
Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	237.708.323	(227.460.595)	393.290.002	(259.985.103)	*Health and social activities*
Dipindahkan	**606.350.104.904**	**(400.237.286.551)**	**473.423.578.450**	**(373.481.508.351)**	***Carried forward***

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

d. Loans (continued)

Pinjaman bermasalah dan penyisihan penurunan nilai berdasarkan sektor ekonomi (NPL)

Non-performing loans and allowance for impairment losses by economic sector

	2025		2024		
	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment loss*	Pokok/ *Principal*	Cadangan kerugian penurunan nilai/ *Allowance for impairment loss*	
Pindahan	**606.350.104.904**	**(400.237.286.551)**	**473.423.578.450**	**(373.481.508.351)**	***Brought forward***
Pengadaan listrik, gas, uap/ air panas dan udara dingin	157.569.980	(157.569.980)	157.569.978,00	(69.980,00)	*Electricity, gas, steam/hot water and air cold*
Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	134.829.052	(84.322.218)	-	-	*Household activities as entrepreneurs, activities that produce goods and services by households that are used to meet their own needs*
Jumlah	**606.642.503.936**	**(400.479.178.749)**	**473.581.148.428**	**(373.481.578.331)**	***Total***

Rasio pinjaman bermasalah bruto (rasio NPL kotor) terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah 2,40% dan 1,85% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Non-performing loans - gross to total loan ratios are 2,40% and 1.85% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Rasio pinjaman bermasalah bersih (rasio NPL bersih) terhadap jumlah pinjaman yang diberikan adalah 0,82% dan 0,39% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Non-performing loans - net to total loan ratios are 0.82% and 0.39% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Rasio pinjaman bermasalah - bersih terhadap jumlah aset keuangan adalah 1,81% dan 0,32% masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The ratio of non-performing loans to the amount of financial assets is 1.81% and 0.32% for December 31, 2025 and 2024, respectively.

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

d. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Sehubungan dengan diterbitkannya PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran No. 7/14/DPnP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum serta POJK No.32/POJK.03/2018 Tanggal 26 Desember 2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, maka perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank Nagari, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan atau keuangan, seperti Direksi, Kepala Departemen, Kepala Divisi dianggap sebagai pihak berelasi dengan Bank Nagari. Berdasarkan peraturan tersebut, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak berelasi adalah 10% dari modal Bank Nagari.

Sesuai dengan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 tidak terdapat pemberian pinjaman yang melanggar/ maupun melampaui terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Informasi syariah
Rasio pembiayaan syariah *non-performing* kotor terhadap total pembiayaan syariah adalah 1,96% dan 1,15% masing-masing untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

Rasio pembiayaan syariah *non-performing* bersih terhadap total pembiayaan syariah adalah 0,81% dan 0,42% masing-masing untuk 31Desember 2025 dan 2024.

Rasio pembiayaan syariah *non-performing* bersih terhadap total aset keuangan adalah 0,28% dan 0,28% masing-masing untuk 31.Desember 2025 dan 2024.

Pengungkapan lebih lanjut pinjaman yang diberikan diungkapkan pada Catatan 10.

d. Loans (continued)

Legal Lending Limit (BMPK)
In relation to the issuance of Bank Indonesia Regulation No.7/3/PBI/2005 dated January 20, 2005 and the Circular Letter No.7/14/DPnP dated April 18, 2005 on the Legal Lending Limit of Commercial Banks, and POJK No.32/POJK.03/2018 dated December 26, 2018 concerning the Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks, companies which are directly or indirectly controlled by Bank Nagari through ownership, management or financial, such as Director, Head Department, Head Division are considered related parties of Bank Nagari. Under this regulation, the Legal Lending Limit (BMPK) for related party borrowers is 10% of Bank Nagari's capital.

In accordance with the Bank's Legal Lending Limit (BMPK) report to Financial Service Authority as of December 31, 2025 and 2024 there were no loans granted which breach/ exceed the maximum Legal Lending Limit requirements of Bank Indonesia for third parties and related parties.

Sharia information
Non-performing sharia financing - gross to total sharia financing are 1,96% and 1.15% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Non-performing sharia financing - net to total sharia financing are 0,81% and 0.42% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Non-performing sharia financing ratio - net to total financial assets are 0.28% and 0.28% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

The further disclosures on loanss are presented in Note 10.

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

e. Manajemen modal dan rasio kewajiban penyediaan modal minimum

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku tentang Kewajiban Penyertaan Modal Minimum Bank Umum, Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah:

- 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1;
- 9%(sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2;
- 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
- 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.

Tujuan utama manajemen permodalan Bank adalah untuk memastikan bahwa permodalan telah memenuhi persyaratan permodalan eksternal dan mempertahankan peringkat kredit yang kuat dan permodalan yang sehat dalam rangka menunjang bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Bank mengatur struktur modal dan membuat penyesuaian atas perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko kegiatannya. Tidak terdapat perubahan tujuan, kebijakan dan proses dari tahun sebelumnya.

CAR adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), perhitungannya didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 dan Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 Tanggal 28 September 2016 serta Surat Edaran OJK No. 26/SEOJK.03/2016 Tanggal 14 Juli 2016, Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Capital management and minimum required capital adequacy ratio (CAR)

Based on the prevailing Financial Services Authority (POJK) Regulation concerning the Minimum Capital Participation Obligations for Commercial Banks, the minimum capital requirement is set at the lowest:

- *8%(eight percent) of Risk Weighted Assets (RWA) for Banks with a risk profile of Rating 1;*
- *9% (nine percent) to less than 10% (ten percent) of RWA for Banks with a risk rating of Rating 2;*
- *10% (ten percent) to less than 11% (eleven percent) of RWA for Banks with a risk rating of Rating 3; or*
- *11% (eleven percent) to 14% (fourteen percent) of RWA for Banks with a risk profile of Rating 4 or Rating 5.*

The primary objectives of the Bank capital management are to ensure that it complies with externally imposed capital requirements and it maintaints strong credit ratings and healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder's value.

The Bank manages its capital structure and makes adjustments to it in the light changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities, No changes weremade in the objectives, policies and processes from the previous period.

CAR is the ratio of capital to Risk Weighted Assets (RWA), the calculation is based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 34/POJK.03/2016 dated September 22, 2016 and OJK Circular No. 42/SEOJK.03/2016 September 28, 2016 and OJK Circular No. 26/SEOJK.03/2016 July 14, 2016, Banks are required to provide minimum capital according to the risk profile.

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

e. Manajemen modal dan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (lanjutan)

Kecukupan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR tersebut, antara lain risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga pada *banking book* (*interest rate risk in banking book*), risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko stratejik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario *stress test* terhadap kecukupan modal Bank.

e. Capital management and minimum required capital adequacy ratio (CAR) (continued)

The minimum capital adequacy in accordance with the risk profile, in addition to aiming at anticipating potential losses which among others arise from Risk Weighted Assets (RWA) which has taken into account credit risk, market risk and operational risk, is also to anticipate potential losses in the future from risks that has not been fully calculated in the RWA, including concentration risk, liquidity risk, interest rate risk in the banking book (interest rate risk in the banking book), legal risk, compliance risk, reputation risk and strategic risk, as well as to anticipate the impact of implementing stress scenarios test of the Bank's capital adequacy.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (dalam jutaan rupiah)

The capital adequacy ratio as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (in million rupiah)

	2025	**2024**	
Modal inti *(Tier 1)*			*Core capital (Tier 1)*
Modal inti utama (CET 1)	4.056.763	3.925.262	*Core capital (CET 1)*
Modal inti tambahan (AT 1)	-	-	*Additional core capital (AT 1)*
	4.056.763	3.925.262	
Modal pelengkap *(Tier 2)*	174.518	174.850	*Supplementary capital (Tier 2)*
Jumlah modal	4.231.281	4.100.112	*Total capital*
Aset Tertimbang Menurut Risiko			*Risk Weighted Asset*
Risiko kredit	13.961.422	13.987.966	*Credit risk*
Risiko pasar	2.268	3.264	*Market risk*
Risiko operasional	3.886.277	3.734.883	*Operational risk*
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko	17.849.967	17.726.113	*Total Risk Weighted Asset*
Rasio kecukupan modal			*Capital Adequacy Ratio*
Rasio CET 1	22,73%	22,14%	*CET 1 Ratio*
Rasio *tier* 1	22,73%	22,14%	*Tier 1 Ratio*
Rasio *tier* 2	0,98%	0,99%	*Tier 2 Ratio*
Rasio modal terhadap ATMR	23,71%	23,13%	*Ratio of capital to ATMR*
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	9,00% - <10,00%	9,00% - <10,00%	*Required Minimum Capital Adequacy Ratio*

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

f. Manajemen risiko

Penerapan manajemen risiko secara umum yang dilakukan oleh Bank Nagari berlandaskan pada regulasi dan prinsip-prinsip praktek terbaik (*best practise*). Regulasi yang digunakan meliputi Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan surat Edaran Bank Indonesi (SEBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Sedangkan *best practise* mengacu pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) serta dokumen dokumen lain yang dijadikan acuan penerapan manajemen risiko di perbankan. Dalam proses penerapan manajemen risiko, Bank perlu melakukan kegiatan identifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari produk dan aktivitas baru. Selain itu Bank telah mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level senior analis ke atas.

Regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

- POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Risiko Stratejik

Penilaian profil risiko Bank menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk masing-masing jenis risiko. Penilaian Profil Risiko Bank telah dilakukan sesuai dengan lampiran SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berdasarkan hasil laporan terakhir atas penilaian sendiri (*self assessment*), peringkat risiko inheren Bank posisi 31 Desember 2025 adalah 2 (*Low to Moderate*) dengan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai (*satisfactory* sehingga peringkat komposit Profil Risiko Bank adalah 2 (*Low to Moderate*) (tidak direviu).

Pengungkapan lebih lanjut manajemen risiko diungkapkan pada Catatan 44.

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

f. Risk management

Financial risk management development in the Bank is guided by Bank Indonesia regulations which govern risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision In optimally implement Basel II, the Bank continues to improve and increase the infrastructure development in risk management. In the risk management implementation process, the Bank needs to conduct risk identification activities in a way to know and understand all the risks that have already exist (inherent risks), or may arise from the product and new activities. In addition, the Bank has required risk management certification from all senior-analyst level officials to the top levels officials.

Regulasi yang terkait dengan Manajemen Risiko Bank adalah sebagai berikut:

- *POJK No.18/POJK.03/2016, March 16th of 2016 and SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 September 1st of 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*

Strategic Risks

The risk profile assessment of Bank reflects the inherent risk of the Bank's business, including the risk control system for each type of risk. The risk profile of Bank has been performed based on attachment of SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 about the Bank's soundness rating assessment.

Based on the results of a recent self-assessment report, inherent risk rank of Bank as of 31 Desember 2025 is 2 (low to moderate) and the quality of the risk management implementation rank is satisfactory, therefore the risk profile composite rank of Bank is 2 (low to moderate) (unreviewed).

The further disclosures on risk management are presented in Note 44.

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

g. Risiko kredit

Berikut ini adalah rasio atas *non-performing loans* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

g. Credit risk

Below is the ratio of non-performing loans as of December 31, 2025 and 2024:

	2025	**2024**	
Rasio NPL - bruto	2,40%	1,85%	*NPL Ratio - gross*
Rasio NPL - net	0,82%	0,39%	*NPL Ratio - net*

Pengungkapan lebih lanjut risiko kredit diungkapkan pada Catatan 45.

The further disclosures on credit risk are presented in Note 45.

h. Risiko pasar

Berikut adalah Posisi Devisa Neto (PDN), dalam nilai absolut, Bank pada tanggal 31 Desember 2025 per mata uang, sesuai dengan peraturan Bank Indonesia:

h. Market risk

Presented below is the Net Open Position (NOP), in absolute amounts, of Bank as of 31 December 2025 by currency, based on Bank Indonesia regulations:

	2025			
Mata uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabiliy***	**Posisi devisa neto/ *Net open position***	***Currencies***
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	5.866.831.116	3.929.218.628	1.937.612.488	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	5.257.244	-	5.257.244	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	70.555.077	-	70.555.077	*European Euro*
Dolar Singapura	1.594.701	-	1.594.701	*Singapore Dollar*
Ringgit Malaysia	472.438	-	472.438	*Malaysian Ringgit*
Dolar Australia	6.914.389	-	6.914.389	*Australian Dollar*
Yen Jepang	745.500	-	745.500	*Japanese Yen*
Jumlah			**2.023.151.837**	***Total***
Jumlah Modal *Tier I* dan *Tier II*			**4.231.280.780.000**	***Total Tier I and Tier II Capital***
Rasio PDN (Laporan posisi keuangan)			**0,05**	*NOP Ratio (Statement of financial position)*

52. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia: (lanjutan)

52. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not information required by Indonesian Accounting Standards: (continued)

h. Risiko pasar (lanjutan)

h. Market risk (continued)

	2 0 2 4			
Mata uang	**Aset/ *Assets***	**Liabilitas/ *Liabiliy***	**Posisi devisa neto/ *Net open position***	***Currencies***
LAPORAN POSISI KEUANGAN				***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION***
Dolar Amerika Serikat	6.720.510.276	3.492.788.048	3.227.722.228	*United States Dollar*
Riyal Saudi Arabia	423.393	-	423.393	*Saudi Arabian Riyal*
Euro Eropa	96.607.274	-	96.607.274	*European Euro*
Dolar Singapura	54.294.981	-	54.294.981	*Singapore Dollar*
Ringgit Malaysia	738.144	-	738.144	*Malaysian Ringgit*
Dolar Australia	7.259.331	-	7.259.331	*Australian Dollar*
Yen Jepang	2.117.600	-	2.117.600	*Japanese Yen*
Jumlah			**3.389.162.951**	***Total***
Jumlah Modal *Tier I* dan *Tier II*			**4.100.112.000.000**	***Total Tier I and Tier II Capital***
Rasio PDN (Laporan posisi keuangan)			**0,08**	*NOP Ratio (Statement of financial position)*

Pengungkapan lebih lanjut risiko pasar diungkapkan pada Catatan 47.

The further disclosures on market risk are presented in Note 47.

Bank Nagari

PT BANK NAGARI

Jl. Pemuda No. 21 Padang, 25117
Sumatera Barat, Indonesia
Telp: (0751) 31577, 31578
Fax : (0751) 37749
www.banknagari.co.id

BALAIRUNG

ANNUAL REPORT

2025

PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Tantangan Bisnis Perhotelan

Bisnis Perhotelan pada tahun 2025 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangkit seperti sedia kala. Penurunan daya beli masyarakat hingga Inpres No 1 Tahun 2025 teentang ***Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025*** efisiensi anggaran pemerintah merupakan salah satu factor utama penurunan kinerja bisnis perhotelan. Dampak dari factor tersebut terjadi penurunan pendapatan hingga 60% (Sumber PHRI) dari tahun 2024.

Dampak paling signifikan adalah berkurangnya MICE (Meetings Incentives, Conferences & Exhibitions) yang mana pembatasan anggaran perjalanan dinas dan kegiatan instansi pemerintah membuat segmen tersebut sangat tertetkan. Dengan penurunan bisnis tersebut juga berdampak pada pengurangan tenga kerja, padahal bisnis perhotelan sangat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Sebagai sektor pendukung pariwisata, sektor jasa akomodasi memiliki peran vital sebagai tulang punggung dalam menyediakan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi wisatawan. Lebih dari sekadar tempat bermalam, sektor jasa akomodasi berkontribusi langsung pada penggerak ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan penciptaan peluang usaha.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, manajemen melakukan stretagi peralihan dan penguatan segmen market selain instansi pemerintahan seperti : korporasi, wedding, perkumpulan (paguyuban, ikatan, alumni, asosiasi, dll), lembaga pendidikan untuk wisuda juga penguatan kerjasama pemasaran dengan Online Travel Agent (traveloka, tiket.com dll). Selain itu dalam upaya meningkatkan market, manajemen secara bertahap juga mengimbangi dengan investasi berupa renovasi kamar, beautifikasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan tamu. Manajemen juga berharap tahun 2026 Pemerintah dapat memberikan kelonggaran atas efisiensi anggaran pemerintah agar geliat MICE dapat kembali normal.

PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR (Perseroda)

DAFTAR ISI

1. Kilas Kinerja 2025 1
   - Ikhtisar Keuangan 2
   - Kilas Peristiwa 5
2. Laporan Manajemen 7
   - Laporan Ringkas Pengawasan Komisaris 8
   - Laporan Pertanggungjawaban Direksi 12
3. Profil Perusahaan 22
   - Identitas Perusahaan 23
   - Sekilas Tentang Perusahaan 24
   - Visi & Misi 29
   - Riwayat Singkat Pengurus Perusahaan 30
   - Struktur Pemegang Saham 31
   - Struktur Organisasi 33
4. Analisis dan Pembahasan Manajemen 37
   - Tinjauan Ekonomi 38
   - Tinjauan Keuangan 43
   - Pencapaian Terhadap RKAP 2025 54
   - Ringkasan RKAP 2026 55
   - Program Sales Visit 63
5. Sumber Daya Manusia 64
6. Tata Kelola Perusahaan 77
   - Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan 78
   - Struktur Tata Kelola Perusahaan 79
   - Penerapan Tata Kelola Perusahaan 85
7. Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2025 96

01
Kilas Kinerja

ANNUAL REPORT 2025

IKHTISAR KEUANGAN

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR (Perseroda)			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
K E T E R A N G A N	**2025**	**2024**	**2023**
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	537.546.580	1.214.047.914	560.582.016
Piutang Usaha	196.454.079	44.129.535	88.415.987
Piutang Yang Memiliki Hubungan Istimewa	1.176.181.818	1.176.181.818	1.176.181.818
Persediaan	166.755.041	200.795.677	201.115.860
Perlengkapan Operasional Hotel	90.965.884	-	57.990.287
Uang Muka	37.130.521	14.081.982	61.315.040
Jumlah Aset Lancar	**2.205.033.923**	**2.649.236.926**	**2.145.601.008**
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	158.992.502.159	161.858.192.819	164.047.490.810
Aset Tidak Berwujud	-		-
Aset Pajak Tangguhan	112.167.000	90.447.006	95.306.748
Jumlah Aset Tidak Lancar	**159.104.669.159**	**161.948.639.825**	**164.142.797.558**
Aset Lain-lain	162.723.320	0	316.077.280
T O T A L A S E T	**161.472.426.402**	**164.597.876.751**	**166.604.475.846**
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Lancar			
Utang Usaha	386.480.177	838.617.929	834.044.555
Beban Akrual	300.814.109	751.481.970	733.257.279
Utang Pajak	7.714.919.524	7.858.681.779	8.179.793.613
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	664.926.836	1.096.781.198	899.121.565
Utang Lain-lain	149.759.406	194.348.736	184.511.246
Jumlah Liabilitas Lancar	**9.216.900.052**	**10.739.911.614**	**10.830.728.258**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Pajak Tangguhan	3.034.899.797	3.034.899.797	3.034.899.797
Utang Imbalan Pasca Kerja	505.100.000	387.346.000	409.587.500
Jumlah Liabilitas	**12.756.899.849**	**14.162.157.411**	**14.275.215.555**
Ekuitas			
Modal di tempatkan dan disetor	164.025.990.000	164.025.990.000	164.025.990.000
Tambahan Modal Disetor - TA	2.030.287.790	2.030.287.790	2.030.287.790
Selisih Revaluasi Aset Tetap	33.329.979.575	33.329.979.575	33.329.979.575
Defisit	(50.670.730.812)	(48.950.538.025)	(47.056.997.074)
Jumlah Modal	**148.715.526.553**	**150.435.719.340**	**152.329.260.291**
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**161.472.426.402**	**164.597.876.751**	**166.604.475.846**

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR (Perseroda)			
RASIO KEUANGAN %			
KETERANGAN	**2025**	**2024**	**2023**
Current Ratio			
Asset Lancar / *Hutang Lancar*	24%	25%	20%
Quick Current Ratio			
Asset Lancar - Inventory-Perlengkapan / *Hutang Lancar*	21%	23%	17%
Cash Ratio			
Cash & Bank / *Hutang Lancar*	6%	11%	5%
Debt Ratio/ Solvabilitas			
Liabilitas / *Asset*	7,9%	8,6%	8,6%

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR (Perseroda) LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
K E T E R A N G A N	**2025**	**2024**	**2023**
Pendapatan Usaha	5.141.192.719	15.256.322.662	15.037.969.060
Beban Pokok Penjualan	1.222.160.548	5.950.957.367	5.952.222.834
LABA (RUGI) KOTOR	**3.919.032.171**	**9.305.365.295**	**9.085.746.226**
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	-	4.511.047	16.446.904
Beban Usaha			
Beban Pemasaran	107.110.788	1.069.855.189	959.983.781
Beban Administrasi dan Umum	2.536.476.525	6.701.794.199	7.800.609.944
Beban Lain-lain		-	-
Jumlah Beban Usaha	2.643.587.313	7.771.649.387	8.760.593.725
LABA (RUGI) SEBELUM PENYUSUTAN, AMORTISASI & PAJAK PENGHASILAN	**1.275.444.858**	**1.538.226.954**	**341.599.406**
Beban Penyusutan & Amortisasi	3.017.357.639	3.426.908.162	3.853.427.283
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**(1.741.912.781)**	**(1.888.681.207)**	**(3.511.827.877)**
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan			
Pajak Tangguhan	(21.719.994)	4.859.742	15.736.373
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	**(21.719.994)**	**4.859.742**	**15.736.373**
LABA (RUGI) BERSIH	**(1.720.192.787)**	**(1.893.540.950)**	**(3.527.564.251)**
Pendapatan Komprehensif Lain-lain			
Selisih Revaluasi Aset Tetap			
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	**(1.720.192.787)**	**(1.893.540.950)**	**(3.527.564.251)**

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR (Perseroda) RASIO PERTUMBUHAN (%)			
K E T E R A N G A N	**2025**	**2024**	**2023**
Pendapatan Usaha	-66%	1%	-3%
Laba (Rugi) Usaha	-17%	350%	-68%
Laba (Rugi) Bersih	-9%	-46%	47%
Jumlah Aset	-2%	-1%	-2%
Jumlah Ekuitas	-1%	-1%	-2%

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR RASIO USAHA (%)			
K E T E R A N G A N	**2025**	**2024**	**2023**
Laba (Rugi) Usaha Terhadap Pendapatan Usaha	-33%	-12%	-23%
Laba (Rugi) Usaha Terhadap Jumlah Ekuitas	-1%	-1%	-2%
Laba (Rugi) Usaha Terhadap Jumlah Aset	1%	1%	0%
Laba (Rugi) Bersih Terhadap Pendapatan Usaha	-33%	-12%	-23%
Laba (Rugi) Bersih Terhadap Jumlah Ekuitas	-1%	-1%	-2%
Laba (Rugi) Bersih Terhadap Jumlah Aset	-1%	-1%	-2%
Beban Terhadap Pendapatan Usaha	75%	90%	98%

Pencapaian 2025

Pendapatan Perusahaan Rp. 5,1 M

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Penyusutan Amortisasi & Pajak Rp. 1,27 M

Laba (rugi) Bersih Perusahaan (Rp. 1,72 M)

Aset Perusahaan Turun (1,9%)

KILAS PERISTIWA

Pada tahun 2025 Perseroan telah menyelesaikan beberapa hal terkait kerjasama pengelolaan hoteldan juga pekerjaan serta peremajaan fasilitas yakni:

1. Peralihan pengelolaan Hotel Balairung Jakarta dari PT. Metropolitan Golden Management (Horison Group) ke PT Balairung CItrajaya Sumbar (PT. BCS) efektif per 1 Oktober 2025
2. Penandatangan kerjasama program magang (PKL) siswa/i & kunjungan ke sekolah-sekolah berikut (*SMK Citra Pariwisata Bogor ; SMK Bina Nusa Mandiri; SMK Cipta Karya; SMK Kemala Bhayangkari I; SMK Jakarta Pusat 1; SMKN 31 Jakarta; SMKN 70 Jakarta; SMKN 29 Jakarta; SMKN 34 Jakarta & SMKN 61 Jakarta*)
3. Kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 29 April 2025
4. Kegiatan Medical Chek Up karyawaan/ti untuk kegiatan preventif (penyakit tertentu & test narkoba)
5. Kegiatan penandatangan komitmen General Manager & Head of Departement untuk merealisasikan RKA tahun 2026
6. Kegiatan lepas sambut siswa/i untuk program magang selama 6 bulan dan 1 tahun
7. Penyelesaian sebagian pogram beautifikasi berupa peremajaan beberapa fasilitas penunjang operasional hotel
   a. Renovasi kamar 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 811, 812, 816
   b. Penambahan sofa lobby & covering kursi restaurant & kadai
   c. Peremajaan koridor kamar dengan pengecatan dan penggantian lampu

KILAS PERISTIWA

02
Laporan Manajemen

ANNUAL REPORT 2025

Laporan Pengawasan Komisaris
PT. Balairung Citrajaya Sumbar Tahun Buku 2025

Para pemegang saham yang terhormat,

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan yang tercantum dalam Akta Pendirian PT Balairung Citrajaya Sumbar (PT. BCS), juga Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Udaha Milik Daerah serta Permendari nomor 37 tahun 2018 yang memuat tugas dan kewajiban komisaris pada BUMD adalah melakukan pengawasan BUMD dan memberikan nasehat kepada direksi dalam pengurusan perusahaan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pemegang saham yang telah memberi kepercayaan kepada Komisaris PT. BCS. Kami telah berusaha untuk mengemban amanah ini sebaik-baiknya. Pelaksanaan tugas dilakukan melalui penelaahan dokumen-dokumen dan pembahasan dalam rapat dewan komisaris dengan direksi.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja tahun 2025 secara umum belum terlalu menggembirakan, hal tersebut ditandai dengan penurunan tingkat hunian kamar sehingga berdampak pada penurunan pendapatan dan belum dapat memenuhi target RKA 2025.
2. Tingkat hunian hotel tahun 2025 tercapai **49,31%**, turun (19,3%) dari tahun 2024 yakni **61,08%**.
3. Penurunan tingkat hunian juga diikuti harga rata-rata kamar yang turun dari tahun lalu yakni sebesar Rp. 289.052 atau turun (Rp. 26.662) dari harga rata-rata tahun lalu Rp. 315.714.
4. Pendapatan perusahaan tahun 2025 sebesar **Rp.5.141.192.719,-** turun (66,3%) dibandingkan tahun 2024 yakni sebesar Rp. **Rp.15.256.322.662**,-. Penurunan ini lebih disebabkan perbedaan skema pendapatan yakni pendapatan sharing dari ex Mitra Horison pada periode Januari s.d September 2025.
5. Beban pokok penjualan dan beban usaha, diluar beban penyusutan tahun 2025 adalah sebesar **Rp.3.865.747.861,-** turun (71,8%) dibandingkan tahun 2024

sebesar Rp. **13.718.095.709**. Penurunan tersebut merupakan dampak kerjasama pengelolaan dimana seluruh biaya operasional di tanggung oleh ex Mitra (Horison).

6. Sehingga, tahun 2024, perusahaan masih mencatatkan laba operasional operasional sebesar **Rp. 1.275.444.858,-**diluar beban penyusutan aset tetap & amortisasi sebesar **Rp. 3.017.357.639,-.**

7. Setelah memperhitungkan beban penyusutan dan pajak tangguhan, perusahaan mengalami rugi komprehensif sebesar (**Rp.1.720.192.787).** Jumlah kerugian ini turun (9,2%) dibandingkan tahun kerugian tahun sebelumnya (**Rp.1.893.540.590**)

8. Kontribusi tamu dari Pemda se-Sumatera Barat yang menginap di Balairung pada tahun 2025 mengalami penurunan dari *17%* pada 2024 turun menjadi *8,5%* pada 2025 terhadap kontribusi 16.603 kamar terjual. Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan, perlu upaya mengarahkan dan menghimbau pegawai pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota pemegang saham untuk menginap di Balairung. Disatu sisi, manajamen akan terus berbenah baik dari sisi produk maupun pelayanan.

9. Komisaris mengapresiasi langkah manajemen dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kerjasama dengan ex Mitra Horison. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian dan target-target yang tidak tercapai antara lain :
   - Realisasi investasi (baru tercapai 16% dari 100%) selama 9 bulan dari target 6 bulan.
   - Pelaksanaan pekerjaan dan RAB tidak dilakukan secara transparan.
   - Realisasi tingkat hunian tidak mencapai target yang ditetapkan, cendeung turun dari tahun sebelumnya saat dikelola sendiri yakni 61% pada tahun 2024 dan 49% pada tahun 2025.

- Pengurangan ciri khas minang dan muslim friendly hotel.

10. Manajemen mengambil langkah strategis dengan menyampaikan Surat Peringatan 3 sekaligus pengakhiran Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 September 2025 dengan Nomor 031/BCS/DIR/IX-2025, setelah sebelumnya sudah menyampaikan surat Peringatan 1 & 2 namun belum ada tindakan kongkrit dari Horison untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi poin-poin kesepakatan sehingga pada 1 Oktober 2025 pengelolaan hotel balairung resmi kembali ke PT Balairung Citrajaya Sumbar.

11. Komisaris juga mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan oleh Direktur dengan membuat perubahan-perubahan dalam periode yang singkat (September s.d Desember) pasca di kelola oleh PT. Balairung Citrajaya Sumbar yakni seperti:
    - Renovasi kamar Superior & Deluxe sebanyak 8 kamar;
    - Beautifikasi Lobby & Restaurant dengan penggantian Covering & penambahan Sofa yang lebih modern;
    - Penggantian linen kamar dan ruang rapat
    - Aktivasi system proteksi kebakaran (springkler yang tidak berfungsi);

    Komisaris menyadari bahwa perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu yang singkat karena manajemen harus memperhatikan cashflow yang ada sehingga perlu kiranya ada opsi yang lebih baik untuk dapat merealisasikan semua.

12. Langkah kongkrit yang dilakukan oleh Direktur terkait efisiensi juga terlihat pada penurunan biaya SDM pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan keseriusan terhadap pengelolaan hotel.

13. Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Direksi, dan seluruh karyawan atas hasil kerja yang telah dicapai, dedikasi dan loyalitas serta kerjasama yang baik sepanjang tahun 2025.

14. Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk periode tahun-tahun sebelumnya yang tertuang dalam Laporan Pengawasan Komisaris pada Laporan Tahunan dan telah dipertanggungjawabkan setiap tahun melalui RUPS

Akhir kata, dalam kesempatan ini saya mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para Pemegang Saham, Direksi, seluruh team manajemen dan karyawan perusahaan, atas dukungan yang tak ternilai dan terus menerus yang diberikan selama ini. Saya berharap dukungan tersebut di berikan juga pada tahun tahun mendatang, guna memberikan kontribusi yang lebih terhadap kemajuan perseroda.

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Jakarta, 30 April 2026

Arry Yuswandi, SKM, MKM

Komisaris

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

TAHUN BUKU 2025

Para Pemegang saham yang terhormat,

Saya selaku Direksi mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan tuntunan-Nya sehingga PT. Balairung Ciltrajaya Sumbar tetap dan terus berada pada kinerja yang baik. Mengawali laporan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada Perseroan untuk terus berprogres ke perubahan-perubahan yang lebih baik. Kami berharap dapat menjalin sinergi yang solid untuk membawa Perseroan meraih pertumbuhan kinerja yang lebih baik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Para Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya, Direksi akan melaporkan hasil jalannya kepengurusan dan pengelolaan Perseroan dalam Laporan Tahunan 2025 dan disajikan dalam satu laporan yang terintegrasi dengan tema: Tantangan Bisnis Perhotelan, yang berarti bahwa manajemen harus terus berinovasi dalam dalam memberikan pelayanan terbaik.

Untuk pengelolaan tahun 2025, manajemen menyajikan laporan pertanggungjawaban ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi perusahaan yang diadakan pada hari ini bertempat di Hotel Balairung Jakarta.

A. PENDAPATAN

Perseroan membukukan pendapatan perusahaan tahun 2025 sebesar Rp. 5.141.192.719 (2024; *Rp.15.256.322.622*) atau mengalami penurunan sebesar (66% dibandingkan tahun 2024). Faktor utama besarnya penurunan kinerja pendapatan dibandingkan tahun 2025 perbedaan skema pendapatan yakni

pendapatan sharing dari ex Mitra Horison pada periode Januari s.d September 2025. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang maximalnya kinerja pendapatan tahun 2025 Adalah 1) kurang optimalnya kinerja exmitra Horison baik secara branding maupun pemasaran sehingga berpengaruh terhadap kinerja pendapatan; 2) tidak tercapainya realisasi investasi untuk peremajaan produk dan fasilitas; 3) efisiensi anggaran pemerintah untuk belanja melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sehingga permintaan paket meeting cenderung turun.

Secara umum ada 3 sumber pendapatan utama perusahaan yaitu pendapatan sewa kamar dan pendapatan makanan & minuman paket rapat serta pendapatan sewa ruang perkantoran dengan rincian pada table beikut dibawah ini:

URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	
PENDAPATAN			**(Rp)**	**%**
- Kamar	1.307.504.672	6.493.604.059	(5.186.099.387)	-79,9%
- Makanan & Minuman	1.473.791.093	7.286.688.958	(5.812.897.865)	-79,8%
- Sharing	859.379.604	-	859.379.604	#DIV/0!
- Sewa Ruang Perkantoran	1.474.164.000	1.419.660.000	54.504.000	3,8%
- Lainnya	26.353.350	56.369.645	(30.016.295)	-53,2%
Jumlah	**5.141.192.719**	**15.256.322.662**	**(10.115.129.943)**	**-66,3%**

Dari data di atas terlihat pendapatan perusahaan tahun 2025 turun signifikan dibandingkan tahun 2024 dimana terdapat perbedaan skema pendapatan yakni pendapatan sharing dari ex Mitra Horison pada periode Januari s.d September 2025 dan skema pendapatan kembali seperti sebelumnya pada Oktober s.d Desember.

- Pendapatan kamar tahun 2025 sebesar Rp.1.307.504.672 atau turun (79,9%) dibandingkan tahun 2024. Pendapatan kamar sangat tergantung pada tingkat hunian merupakan salah satu alat untuk penjualan kamar dalam bisnis hotel

URAIAN	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	YTD
	2025	2025	2025	2025	2025
1 Jumlah Kamar Terisi	3.892	3.740	4.156	4.815	16.603
2 Tingkat Hunian Kamar	47%	45%	49%	**57%**	49%
3 Harga Rata-rata Kamar	309.870	286.475	288.313	271.548	289.052
4 Total Pendapatan	**671.513.316**	**607.670.050**	**713.843.508**	**3.148.165.844**	**5.141.192.719**

- Pendapatan kamar tidak lepas dari factor tingkat hunian kamar, dimana pada triwulan IV 2025 setelah tidak bekerjsama dengan Horison, tingkat hunian (penjulan kamar) sebesar 57% atau lebih tinggi dari saat dikelola oleh Horison yakni 47% pada Triwulan I, 45% pada triwulan II dan 49% pada triwulan IV. Hal ini menandakan bahwa manajemen saat ini dapat bekerja professional dan tidak kalah dengan mitra pengelola. Namun demikian karena waktu yang sangat terbatas (3 bulan Oktober, November dan Desember) pengelolaan. Manajemen belum dapat memaksimalkan harga rata-rata kamar yang cenderung menurun pada tahun 2025.
- Begiu juga dengan pendapatan makanan & minuman / paket rapat tahun 2025 sebesar Rp.1.473.791.098 yang turun (79,9%) dibandingkan tahun 2024.
- Pendapatan sharing tahun 2025 sebesar Rp. 859.379.604. Dari pengelolaan selama 9 bulan yakni Januari s.d September, hanya 2 bulan (pilkada season) yang tercapai targetnya sesuai PKS. Jika di bandingkan dengan tahun 2024 dengan periode yang sama yakni Januari s.d September 2025 sebesar Rp.8.147.608.139 dan tahun 2024 saat dikelola mandiri sebesar Rp.9,901.084.919 atau terdapat penurunan sebesar (Rp.1.753.476.780)
- Pendapatan sewa ruangan kantor tahun 2025 sebesar Rp.1.474.164.000 mengalami kenaikan yakni sebesar Rp. 54.504.000 atau naik 3,8% dari tahun 2024 yakni Rp.1.419.660.000.
- Pendapatan lainnya tahun 2025 sebesar Rp.26.353.350 mengalami penurunan (53,2%) dari tahun 2024 yakni Rp.56.369.645.

URAIAN	2025 AUDITED	RKA 2025	PENCAPAIAN	
PENDAPATAN			(Rp)	%
- Kamar	1.307.504.672	1.657.765.977	(350.261.305)	78,9%
- Makanan & Minuman	1.473.791.093	2.139.267.604	(665.476.511)	68,9%
- Sharing	859.379.604	1.050.758.921	(191.379.317)	81,8%
- Sewa Ruang Perkantoran	1.474.164.000	1.419.660.000	54.504.000	103,8%
- Lainnya	26.353.350	48.663.273	(22.309.923)	54,2%
Jumlah	**5.141.192.719**	**6.316.115.775**	**(1.174.923.056)**	**81,4%**

Jika di bandingkan dengan RKA 2025 secara keseluruhan pendapatan tahun buku 2025 hanya tercapai sebesar 81%. Hal ini juga merupakan salah satu factor tidak dilanjutkannya kerjasama pengelolaan dengan ex Mitra Horison. Terdapat beberapa hal terkait belum optimalnya pencapaian tahun 2025 terhadap RKA 2025 diantaranya disebabkan oleh beberapa hal :

- Branding dan promosi tidak optimal (ex mitra horison)
- Efisiensi anggaran pemerintah untuk belanja melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
- Jika ada kegiatan, segmen pemerintahan lebih memilih kegiatan keluar Jakarta.
- Segmen pemerintahan biasanya menggunakan hotel bintang 4 dengan kapasitas ballroom yang lebih besar.
- Produk dan fasilitas yang kurang optimal / perlu peremajaan (karpet & kamar) sehingga berdampak pada image hotel yang kurang modern.

B. BIAYA-BIAYA USAHA

URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	
BIAYA-BIAYA			(Rp)	%
- Biaya Langsung	1.222.160.548	5.950.957.367	(4.728.796.819)	-79,5%
- Biaya Tidak Langsung	2.643.587.313	7.767.138.341	(5.123.551.028)	-66,0%
Jumlah	**3.865.747.861**	**13.718.095.708**	**(9.852.347.847)**	**-71,8%**

Dari table biaya di atas terlihat penurunan biaya usaha perusahaan secara signifikan, baik itu biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung sebesar Rp.1.222.160.548. Sementara itu biaya tidak langsung sebesar Rp.2.643.587.313. Penurunan biaya lebih dipengruhi oleh :

a. Periode Januari s.d September seluruh biaya operasional oleh ex mitra – Horison, namun demikian ;
b. Efisiensi jumlah pegawai dari 61 di tahun 2024 menjadi 41 di tahun 2025;
c. Efisiensi biaya energy (listrik, solar, air);
d. Efisiensi biaya korporasi (pembayaran PBB lebih awal, pengurangan manfaat asuransi yang dirasa tidak signifikan dibutuhkan) juga menjadi factor yang berpengaruh terhadap penurunan biaya

C. LABA (RUGI) USAHA

URAIAN	2025 AUDITED	2024 AUDITED	KENAIKAN/ PENURUNAN	
LABA SEBELUM PENYUSUTAN	**1.275.444.858**	**1.538.226.954**	**(262.782.096)**	**-17,1%**
- Biaya Penyusutan	3.017.357.639	3.426.908.162	(409.550.523)	-12,0%
- Biaya Pajak Tangguhan	(21.719.994)	4.859.742	(26.579.736)	-546,9%
LABA (RUGI) BERSIH	**(1.720.192.787)**	**(1.893.540.950)**	**173.348.163**	**-9,2%**

Dari table di atas Perseroan masih membukukan laba sebelum penyusutan sebesar Rp. 1.275.444.858 atau turun (17%) di bandingkan dengan tahun 2024 yakni Rp. 1.538.226.954. namun demikian setelh dikurangi beban penyusutan sebesar Rp. 3.017.357.639, dan pajak tangguhan sebesar (Rp.23.014.664) maka kerugian pada tahun 2025 turun tipis sebesar (Rp. 1.70.192.787) atau turun (9,2%) dari kerugian tahun 2024 sebesar (Rp.1.893.540.950).

D. KEBIJAKAN STRATEGIS

Direksi merumuskan strategi perusahaan dengan menimbang berbagai masukan dan analisis dari banyak pihak terkait dengan sinergi kerja yang lebih bijak di antara jajaran manajemen, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk saling mendukung secara profesional. Manajemen telah mengambil beberapa kebijakan sebagai langkah strategis guna mencapai tujuan perusahaan yang berkelanjutan. Seluruh langkah strategis yang telah ditetapkan diharapkan dapat berjalan, dan dapat berperan dalam meningkat kinerja bisnis Perseroan. Pada

dasarnya, Perseroan tetap melanjutkan strategi-strategi yang sudah efektif di tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan strategis perusahaan selama tahun 2025 yaitu

1. Sebagai bentuk evaluasi manajemen mengambil langkah strategis dengan menyampaikan Surat Peringatan 3 sekaligus pengakhiran Perjanjian Kerjasama pada tanggal 1 September 2025 dengan Nomor 031/BCS/DIR/IX-2025, setelah sebelumnya sudah menyampaikan surat Peringatan 1 & 2 namun belum ada tindakan kongkrit dari Horison untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi poin-poin kesepakatan sehingga pada 1 Oktober 2025 pengelolaan hotel balairung resmi kembali ke PT Balairung Citrajaya Sumbar
2. Dalam upaya manajemen meningkatkan kinerja pendapatan, manajemen melakukan jangkauan market yang lebih luas yakni selain promosi konvensional dengan melakukan sales visit ke lembaga pemerintahan; korporasi; asosiasi; paguyuban; alumni; lembaga pendidikan serta kolaborasi dengan beberapa weeding organizer.

   Manajemen juga aktif melalui promosi digital seperti membuat konten promosi melalui Instagram dan tiktok, kerjasama dengan Online Travel Agent seperti Traveloka ; Tiket.com dll agar masuk di beranda utama platform tsb dengan tujuan meningkatkan rangking di daftar pencarian & kolaborasai dengan beberapa influncer dan youtuber untuk review produk dan fasilitas Hotel Hotel Balairung Jakarta:
3. Manajemen juga menambah beberapa mitra kerjasama khususnya untuk weeding organizer. Hal ini kami tujukan untuk memaksimalkan ruang ballroom pada hari weekend.
4. Dalam upaya efisiensi pada tahun 2025, manajemen telah melakukan MOU untuik program siswa training / magang dengan periode 6 bulan dan 1 tahun :

a. SMK Citra Pariwisata Bogor
b. SMK Bina Nusa Mandiri
c. SMK Cipta Karya
d. SMK Kemala Bhayangkari I
e. SMK Jakarta Pusat 1
f. SMKN 31 Jakarta
g. SMKN 70 Jakarta
h. SMKN 29 Jakarta
i. SMKN 34 Jakarta
j. SMKN 61 Jakarta

Dalam menunjang program magang tersebut, melalui HRD juga dilakukan seleksi terhadap calon siswa/i training untuk mendapat siswa/I training yang mempunyai kriteria yang sesuai dengan kebutuhan Hotel Balairung Jakarta.

Dampak positif dari program tersebut manajemen menekan biaya SDM dengan melakukan efisiensi tenaga kerja dari 61 staf di 2024 menjadi 41 staf pada 2025, jika diequalkan dengan rupiah maka efisiensi dikisaran 40 jutaan.

5. Dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana manajemen melakukan secara bertahap juga terus melakukan program beautifikasi berupa peremajaan beberapa fasilitas penunjang operasional hotel
   a. Renovasi kamar di lantai 8 yakni kamar 801, 802, 803, 804, 805, 806, 808, 811, 812, 816
   b. Program beautifikasi yakni penambahan sofa lobby & covering kursi restaurant & kadai
   c. Peremajaan koridor kamar dengan pengecatan dan penggantian lampu (koridor, restaurant, café, dll)

d. Penggantian projector dengan layar TV 85 Inch untuk ruang meeting kecil
e. Penggantian AC Dan TV pada kamar-kamar renovasi
f. Penggantian linen dikamar & ruang meeting
g. Penyelesaian akhir lanjutan pekerjaan aktivasi system proteksi kebakaran

E. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Manajemen juga berkolaborasi dengan BPKP untuk melakukan penilaian GCG pada bulan Desember 2025 dengan hasil "**Cukup Baik**". Komitmen penerapan GCG telah dilaksanakan berdasarkan prinsip korporasi yang profesional, rasional dan terukur pada hasil dan pertanggungjawabannya.

Manajemen berkomitmen akan terus melakukan pembenahan terhadap praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance /GCG) sebagai dasar penyusunan, penerapan dan pelaksanaannya di lingkup Perseroan. Program Internalisasi dan sosialisasi akan dilakukan secara rutin untuk dapat terus meningkatkan kesadaran pentingnya GCG dalam seluruh lingkup dan segala aktivitas Perseroan

Menutup laporan ini, Direksi ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan kontribusi yang terbaik. Kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, Direksi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga pengelolaan bisnis Perseroan dapat berjalan baik. Terima kasih kepada regulator, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha, atas kerjasama yang telah terbina.

Direksi menyampaikan terima kasih kepada Komisaris atas pengawasan, arahan, nasihat, saran serta rekomendasi, sehingga pengurusan dan pengelolaan Perseroan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Direksi juga mengucapkan terima kasih dan

memberikan apresiasi kepada seluruh staf Perseroan, atas loyalitas dan dedikasinya yang tinggi, serta atas kerja keras dan kerja cerdas yang telah ditunjukkan untuk maju bersama sesuai harapan pemegang saham.

Direksi berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja Perseroan agar target tahun 2026 dapat direalisasikan. Dengan dukungan, kerjasama, dan kepercayaan yang diterima, Perseroan optimis akan mampu mempersembahkan pencapaian yang lebih baik, sesuai dengan harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Jakarta, 30 April 2026

Oktofrida Wisnu Pamungkas

Direktur

COIN for GAZA.org
AMS
action for humanity

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN 2024
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

03

Profil Perusahaan

ANNUAL REPORT 2025

PROFIL PERUSAHAAN

1. IDENTITAS PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN	: PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR (Perseroda)
ALAMAT	: GEDUNG BALAIRUNG Jl. Matraman Raya No. 19, Matraman, Jakarta 13140 Indonesia
TELEPON	: (021) – 8591 7217, (021) – 2936 1010
FAX	: (021) – 2936 0139
WEBSITE	: www.balairung-hotel.co.id
INSTAGRAM	: officialbalairung
TANGGAL PENDIRIAN	: 10 November 2009
NIB	: 1241000530755
NPWP	: 02.835.292..0-001.000
TDUP	: 03.06.12.13.07199 / 28/2014 Tgl 06/01/2014
TDP	: 09.04.1.46.30452
BIDANG USAHA	: Perhotelan & Property
MODAL DASAR	: 308.078.000.000
DISETOR PENUH	: 164.025.990.000
KEPEMILIKAN SAHAM	: Pemprov Sumbar sebesar 79,7% Pemkab/Pemko Sumbar sebesar 20,3%

MANAJEMEN PERSEROAN

KOMISARIS	: Arry Yuswandi, SKM, MKM
DIREKTUR	: Oktofrida Wisnu Pamungkas, SE, M.Ak, AK, CA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: Abdul Ghonie, Bachtiar, Noegroho

2. SEKILAS TENTANG PERUSAHAAN :

PT. Balairung Citrajaya Sumbar selanjutnya disebut PT. BCS berdiri ditandai dengan diakta-notariskannya pendirian perusahaan pada tanggal 10 November 2009 pada Notaris Catur Virgo, SH dengan dasar hukum Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar. Pemegang saham saat Pendirian Pemegang saham saat pendirian Pemprov Sumbar bersama PT.Dinamika Sumbar Jaya.

Sejarah perusahaan tidak terlepas dari sejarah pembangunan gedung Balairung yang merupakan keinginan bersama Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemda Kota dan Kabupaten se-Sumatera Barat pada bilangan tahun 2007 yang silam.

A. Sejarah Pembangunan Gedung

Semangat Memiliki Gedung di Jakarta

Mempunyai sebuah gedung kebanggaan di Jakarta merupakan suatu pemikiran bersama dari Pemda se-Sumbar yang dimotori oleh Pemprov Sumbar. Semangat bersama ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pemprov dengan Pemko/Kab se-Sumbar pada tahun 2007. Berikut penjelasan terkait Perjanjian Kerjasama dan adendumnya.

i. Perjanjian Kerjasama Pemprov Sumbar dengan Pemko/Kab se-Sumbar nomor 030-424.1-2007 tanggal 22 November 2007 dengan isi sbb:
   a. Perjanjian Kerjasama merupakan kerjasama membangun dan mengelola Gedung Balerung Sumatera Barat di Jalan Matraman Raya 19 Jakarta.
   b. Modal tanah Rp. 17.080.000.000,- dan modal investasi bangunan dan perlengkapan sebesar Rp. 109.536.900.000,-
   c. Tanah merupakan setoran modal Pemprov.

d. Modal Investasi non tanah dibagi ke Pemprov 51% (Rp.55.863.819.000-) dan seluruh Pemko/Kab se-Sumbar 49% dengan masing-masingnya Rp. 2.824.899.000,-

e. Masing-masing pemda mendapatkan satu ruangan bersifat sewa yang disepakati dengan pengelola gedung.

f. Gedung dibangun dalam 3 tahun (2007-2009)

ii. Adendum I atas Perjanjian Kerjasama Pemprov Sumbar dengan Pemko/Kab se-Sumbar nomor 600-5-2009 tanggal 10 Juni 2009 dengan isi sbb:

a. Kesepakatan membentuk badan usaha untuk mengelola gedung

b. Dana investasi yang diperlukan menjadi Rp. 134.594.409.564,- dengan rincian sbb:

a. Dana Investasi Rp. 125.238.125.564,-

b. Modal kerja 8 bulan Rp. 9.356.284.000,-

c. Kenaikan nilai investasi semua menjadi porsi Pemprov Sumbar, yaitu menjadi Rp. 90.277.612.564,- atau setara dengan 60,12% dari modal non tanah.

d. Jaminan dari Pemprov bahwa tanah tersebut bebas dari beban apapun.

e. Pembangunan selama 4 tahun (2007-2010)

iii. Adendum II atas Perjanjian Kerjasama Pemprov Sumbar dengan Pemko/Kab. se-Sumbar nomor 600-6.1-2009 tanggal 24 September 2009 yang isinya sbb:

a. Gedung dikelola oleh perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki bersama Pemprov dan Pemko/Kab se-Sumbar dan PT.Dinamika Sumbar Jaya

b. Dana investasi dan modal kerja dianggap sebagai modal setor untuk pendirian perseroan terbatas dan sebagai penyertaan modal bagi Pemko/Kab.

c. Pemko/Kab akan disediakan satu ruangan yang akan digunakan bersama-sama sebagai Kantor Penghubung

Adendum ke-2 ini juga mendasari pendirian perusahaan, PT Balairung Citrajaya Sumbar.

B. Proses Pembangunan

Peletakan Batu Pertama (Pekerjaan Tahap I)

Peletakan batu pertama pembanguan gedung Balairung Sumbar dilakukan oleh Bp. Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi pada tanggal 14 Desember 2007. Peletakan batu pertama ini menandai juga dimulainya pekerjaan tahap I gedung Balairung Sumbar dengan nilai Rp 91,8 M dengan kontrak tahun jamak sampai tahun 2010. Anggaran berasal dari APBD Pemprov Sumbar dengan Pengguna Anggaran Kantor Penghubung Sumbar di Jakarta.

Pekerjaan Tahap II

Sesuai dengan ketersediaan dana APBD, maka pekerjaan Tahap I baru menyelesaikan pekerjaan struktur, sehingga diperlukan pekerjaan Tahap II. Pekerjaan Tahap II dimulai pada tanggal 1 Juni 2011 dengan anggaran Rp 28,4 M. Dana masih berasal dari APBD Pemprov Sumbar dengan Pengguna Anggaran Kantor Penghubung Sumbar di Jakarta. Pekerjaan tahap II ini berakhir pada akhir bulan Desember 2011. Kondisi bangunan setelah selesai Tahap II, diperkirakan baru selesai 85% dari rencana awal hingga dapat digunakan untuk operasional hotel/wisma Sumatera Barat.

Penyerahan ke Perusahaan

Pada akhir tahun 2011, tepatnya tanggal 30 Desember 2011, diserahkan bangunan dalam kondisi kurang lebih 85% tersebut diserahkan ke perseroan sebagai setoran modal Pemprov Sumbar ke PT. Balairung Citrajaya Sumbar dengan awalnya sebesar Rp. 127.544.000.000,- yang kemudian dikoreksi menjadi Rp. 130.767.000.000,- pada penilaian kedua oleh KJPP sesuai arahan BPK. Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Pemda Sumbar antara Gubernur Sumbar dengan Komisaris PT. BCS

Penyelesaian Pekerjaan oleh Perusahaan

Penyelesaian pekerjaan harus dilakukan perusahaan agar segera dapat operasional. Sesuai dengan perhitungan Konsultan Perencana, nilai penyelesaian gedung beserta perlengkapannya (tidak termasuk modal kerja) sebesar Rp. 29.684.300.569,- dimana anggaran ini belum termasuk penyelesaian ballroom di lantai 3 dan 12.

Penyelesaian ini dengan menggunakan dana setoran modal Pemko/Kab per tahun 2012 dengan total setoran Rp. 29.799.192.000,-

Pada akhir tahun 2012, dengan dana yang tersedia, manajemen perusahaan telah melakukan hal-hal sbb:

1. Menyelesaikan pembangunan dan perlengkapan hotel 100%
2. Penyempurnaan pisik lantai 3 (keramik) dan lantai 12 (Partisi, AC, keramik, dan karpet) yang berfungsi sebagai ballroom yang tidak masuk dalam rencana penyelesaian pada tahun 2012 sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
3. Biaya untuk melengkapi legalitas usaha perhotelan
4. Pengadaan 4 (empat) kendaraan operasional
5. Biaya pre opening dan modal kerja 3 bulan pertama.

Jika dibandingkan dengan alokasi modal kerja pada Adendum I atas PKs Pemprov Sumbar dengan Pemko/Kab se-Sumbar nomor 600-5-2009 tanggal 10 Juni 2009 dinyatakan bahwa diperlukan dana modal kerja 8 bulan pertama dengan nilai Rp.9.356.284.000,- yang tidak terealisasi penyediaannya oleh pemegang saham, sehingga harus bekerja keras menyediakan cashflow agar hotel teap berjalan

Grand Launching.

Setelah pembangunan sudah selesai 100% dan siap untuk beroperasi penuh, maka pembukaan resmi operasional hotel dilakukan pada 27 Desember

2012. Acara ini dilakukan di Pagaruyung Ballroom lantai 3 yang dihadiri oleh Gubernur dan Ketua DPRD Prov. Sumatera Barat. Peresmian yang ditandai dengan panandatangan prasasti peresmian operasional Hotel Balairung Jakarta oleh Gubernur Sumatera Barat.

C. Bidang Usaha Perusahaan

Sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan pasal 3, maksud dan tujuan sebagai berikut :

1) Maksud dan tujuan perusahaan didirikan adalah bidang usaha pembangunan, perdagangan, dan jasa.
2) Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Sesuai dengan Nomor Induk Berusaha PT. Balairung Citrajaya SUmbar Nomor 1241000530755, jenis usaha perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1241000530755

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85499	PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA
2	79111	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA
3	79990	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL
4	79120	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA
5	77100	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
6	70209	AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA
7	55113	HOTEL BINTANG TIGA
8	79112	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA
9	56101	RESTORAN
10	68110	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
11	56303	RUMAH MINUM/KAFE

Sampai dengan akhir tahun 2025, perusahaan masih fokus dalam pengelolaan hotel..

3. VISI DAN MISI

Visi PT. Balairung Citrajaya Sumbar

"Menjadi perusahaan milik daerah yang dikelola secara profesional dan terus tumbuh, serta berbasis pada sistem informasi yang handal".

Misi PT. Balairung Citrajaya Sumbar

1. Menempatkan perusahaan berdomisili di Jakarta sebagai plaza Sumatra Barat (Minangkabau) di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bernilai ekonomi.
2. Menempatkan perusahaan berdomisili di Jakarta sebagai plaza Sumatra Barat (Minangkabau) di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bernilai ekonomi.
3. Menjadi perusahaan yang profesional dengan menempatkan konsep GCG dan berbasis sistem informasi tekonologi.
4. Menjadi perusahaan yang tumbuh di atas rata-rata industrinya.
5. Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan usaha dalam bidang perhotelan yang disesuaikan dengan keinginan pemilik perusahaan dan kebutuhan dari para konsumen.
6. Menyusun, mengolah, dan mengoptimalkan produk serta servis yang berkualitas, kompetitif, dan memiliki nilai jual yang tinggi.
7. Membina dan mengembangkan standar dan prosedur operasional yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka menjamin terciptanya kepuasan.
8. Selalu memberikan solusi yang terbaik dalam menjalankan usaha perhotelan.

4. NAMA, JABATAN DAN RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENGURUS

KOMISARIS

ARRY YUSWANDI

Komisaris

Merupakan lulusan S2 Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 200, memulai karir sebagai ASN di Setda Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (sebelum pemekearan) dari tahun 2008 hingga 2018 dengan menjabat Kepala Puskesmas Tanjung Ampalu 2000 s.d 2003, kemudian 2004 s.d 2011 menjabat Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat hingga Kepala Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Kepala Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan, dan Khusus. Sejak 2011 hingga tahun 2011 beliau mendapatkan promosi menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan dan Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sijunjung hingga 2018. Pada tahun 2018 s.d 2023 beliau berhasil masuk di Provinsi Sumatera Barat dan mendapatkan promosi dengan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan hingga Kepada Dinas Kesehatan, beliau juga sampat menduduki Kepala Dinas Sosial pada tahun 2023 hingga mendaoatkan promosi menjadi Asisten II BIdang Perekonomian dan Pembangunan.

Beliau juga sempat menjadi Penjabat Sementara Bupati Tanah Datar pada September s.d November 2024. Pada April 202 hingga saat ini mendapatkan kepercayaan Pemegang Saham dengan mengisi jabatan sebagai Komisaris di PT. Balairung Citrajaya Sumbar dan sejak April 2025 beliau mendapatkan amanah menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini.

DIREKTUR

OKTOFRIDA WISNU PAMUNGKAS

Direktur

Lulusan S2 Magister Akuntansi tahun 2014 dari Universitas Trisaktiini juga telah memperoleh sertifikaasi Register Akuntan dari Universitas Brawijaya sejak 2007 serta mempunyai keahlian di bidang Perpajakan ini memulai karis karir tahun 2007 hingga 2009 sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi. Lalu tahun 2009 sampai dengan 2012 beliau bekerja sebagai Manager Keuangan & Akunting hingga Corporate Chief Accountant di PT. Sofyan Hotels,Tbk. Kemudian dari tahun 2012 Masuk di PT. Balairung CItrajaya Sumbar Manager Keuangan & Akunting juga sebagai Tim Pre Opening Hotel Balairung pada saat itu hingga tahun 2016. Kemudian Beliau menlanjutkan karirnya di jariangan Group Hotel jaringan Group Archipelago/Aston. Kemudian tahun 2017 kembali bergabung di PT Balairung Cirajaya Sumbar sebagai Corporate Controller hingga dipercaya rangkap jabatan untuk General Manager (s.d Desember 2018) serta Sekretaris Perusahaan. Sejak Maret 2024 dipercaya untuk mengisi Plt Direktur PT. Balairung Citrajaya Sumbar hingga Agustus 2024 dan mendapatkan amanah sejak Agustus 2024 hingga saat ini sebagai Direktur PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

5. STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2007, dengan payung Perjanjian Kerjasama Pemprov Sumbar dengan Pemko/Kab se-Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007 tanggal 22 November 2007 sebanyak 12 (dua belas) Pemda Kota/Kabupaten telah merealisasikan invetasinya untuk pembangunan Gedung Balairung dengan total Rp. 17.649.798.000,-. Setelah perusahaan resmi didirikan pada 9 November 2009, penyetoran terus bertambah

dari masing-masing pemegang saham, sehingga nilai saham setor per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 164.025.990.000,-.

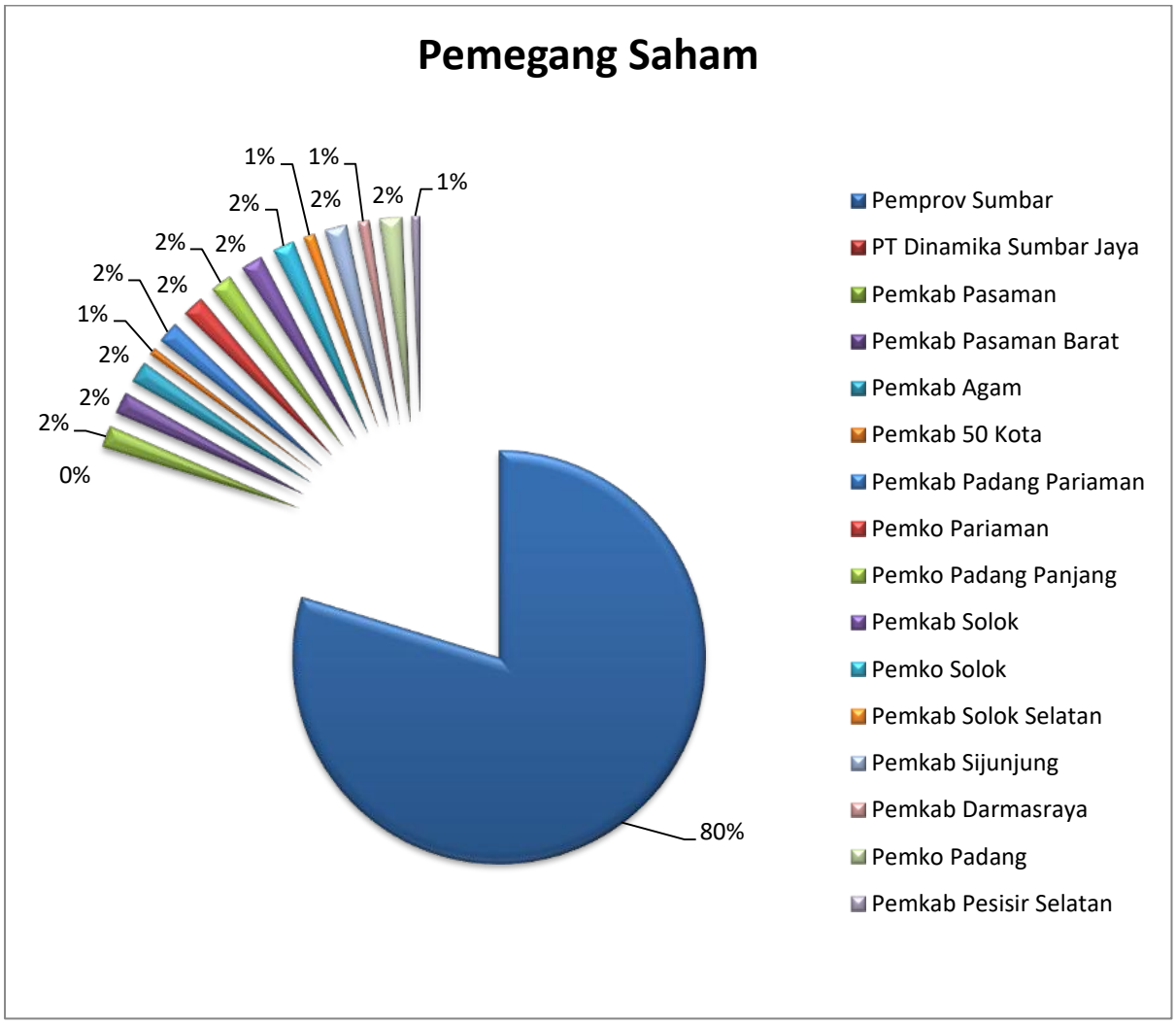

Kondisi Saham per 31 Desember 2025

Dari 19 (Sembilan belas) Pemda Kota Kabupaten se-Sumatera Barat, kondisi realisasi kesepakatan penyetoran saham ke Balairung sebagai berikut :

a. 10 (sepuluh) Pemda Kota Kabupaten telah menyetor secara penuh
b. 4 (empat) Pemda Kota Kabupaten telah menyetor sebagian
c. 5 (lima) Pemda Kota Kabupaten belum merealisasikan setoran

Dari Pemda Kota Kabupaten telah menyetor sebagian dan belum menyetor, Balairung masih berpotensi untuk menerima tambahan setoran saham sebesar Rp. 20.424.091.000,- dengan rincian :

No	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH POTENSI
1	Pemkab 50 Kota	1,824,899,000
2	Pemkab Darmasraya	1,324,899,000
3	Pemkab Pesisir Selatan	1,824,899,000
4	Pemkab Solok Selatan	1,324,899,000
5	Pemko Bukittinggi	2,824,899,000
6	Pemko Payakumbuh	2,824,899,000
7	Pemko Sawahlunto	2,824,899,000
8	Pemkab Tanah Datar	2,824,899,000
9	Pemkab Mentawai	2,824,899,000
Jumlah		20,424,091,000

6. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

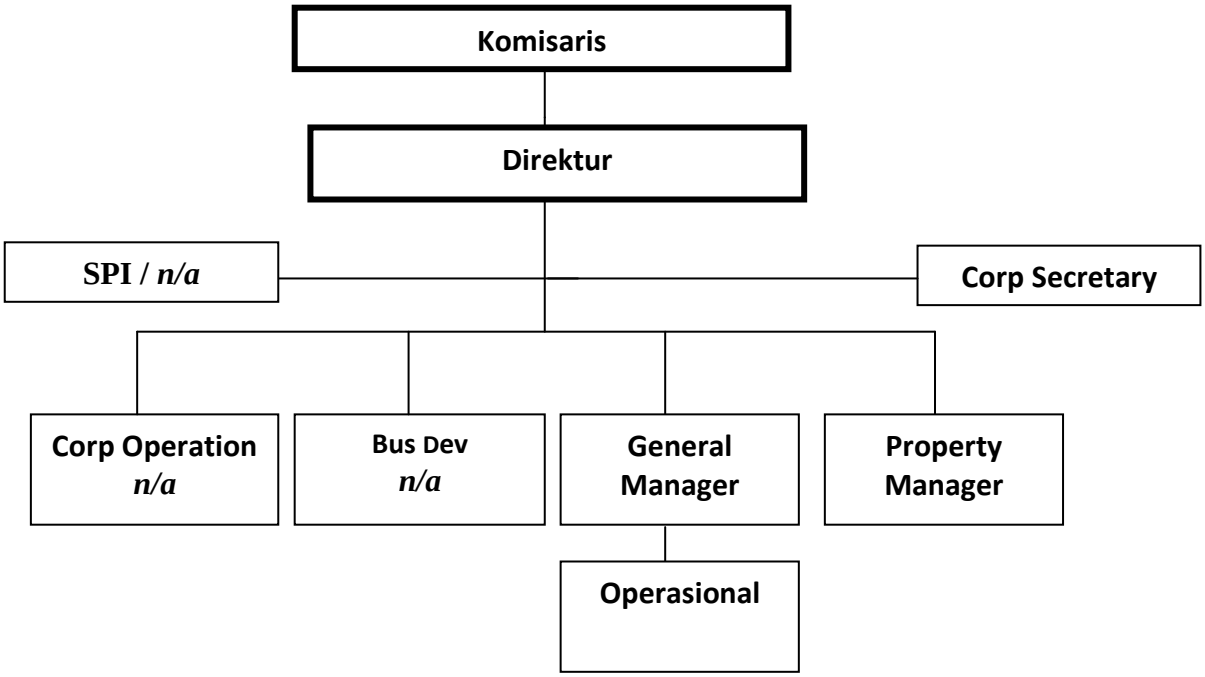

RUANG BERSAMA PEMERINTAH KOTA / KABUPATEN PROVINSI SUMBAR

Junior Suite

Junior Suite has a size of 45m² and consists of 15 rooms in total. This well-designed suite offers a comfortable and elegant living space, making it ideal for guests who desire extra room and amenities, whether for an extended stay or special occasions.

Suite Room

Suite Room has a size of 55 m² and consists of 4 rooms in total. This well-designed suite offers a spacious, comfortable, and elegant living space, making it ideal for guests who desire extra room and enhanced amenities, whether for an extended stay or special occasions.

Room Rates

ROOM TYPE	TOTAL	SIZE	PUBLISH RATE	
Superior Room	36	34 M²	IDR	1,500,000,- Nett
Deluxe Room	36	34 M²	IDR	2,500,000,- Nett
Junior Suite	15	45 M²	IDR	3,000,000,- Nett
Suite Room	4	55 M²	IDR	4,500,000,- Nett
Royal Suite	1	88 M²	IDR	5,000,000,- Nett

Room *Types*

• Superior Room	36 Rooms
• Deluxe Room	36 Rooms
• Junior Suite	15 Rooms
• Suite Room	4 Rooms
• Royal Suite	1 Rooms
Total :	92 Rooms

Each Room *Includes:*

- Cable TV
- Wi-Fi Access
- Safe Deposit Box
- Shower & Bathtub
- Prayer Area in the Room
- Coffee & Tea Maker

Superior Room

The Balairung Superior room spans 34 m^2 and includes a total of 52 rooms. Designed for comfort and convenience, these rooms feature modern amenities, making them an ideal choice for both business and leisure travelers seeking a cozy retreat.

Deluxe Room

Measuring 34m^2, the Balairung Deluxe room offers a spacious and inviting atmosphere with a total of 35 rooms available. These rooms are perfect for guests looking for a blend of luxury and comfort, providing an ideal setting for relaxation after a busy day.

04
Analisis & Pembahasan Manajemen

ANNUAL REPORT 2025

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

A. TINJAUAN EKONOMI

Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, terutama sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Salah satu tujuan utama pembangunan bidang pariwisata adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dampak ekonomi yang diberikan bisa diukur dari keberadaan kegiatan usaha penunjang pariwisata. Berbagai jenis usaha dapat tumbuh terstimulasi oleh kegiatan pariwisata seperti jasa transportasi, penyediaan makan dan minum, jasa akomodasi, tour guide, pertunjukan seni, fotografi, penerjemah dan kegiatan sejenis. Saat ini, penyediaan jasa akomodasi merupakan kegiatan usaha yang memberikan kontribusi ekonomi paling besar selain penyediaan makan dan minum.

Perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan jumlah usaha penyedia jasa akomodasi di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang tercatat di BPS bahwa jumlah hotel pada kurun waktu 2019-2024 cukup berfluktuasi. Pemulihan kondisi perekonomian tahun 2024 menjadi momen bangkitnya industri perhotelan DKI Jakarta. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah usaha jasa akomodasi menjadi 1.052 usaha, dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah hotel sebelum COVID.

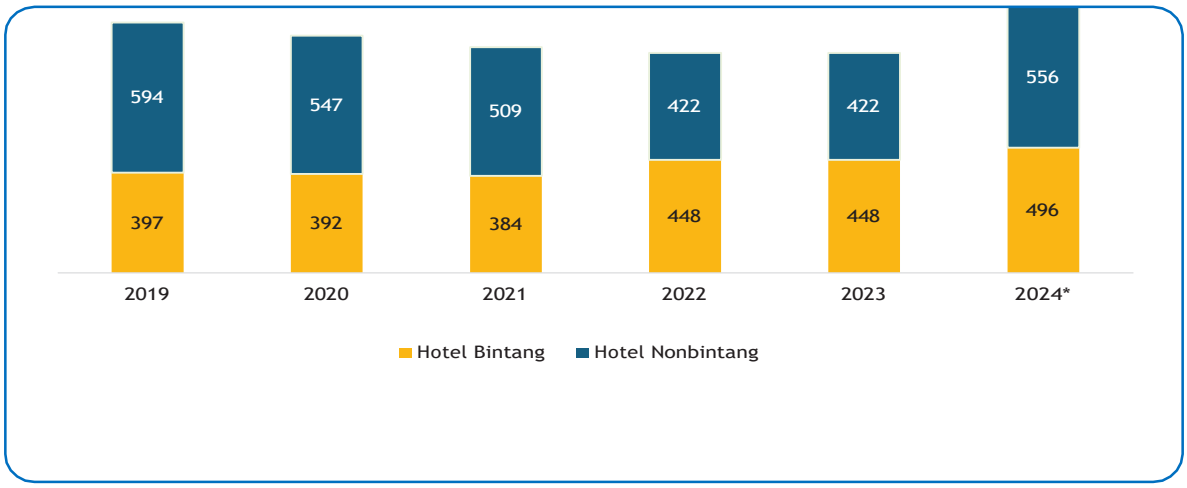

*) Angka Sementara

Data ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sejalan dengan permintaan jasa akomodasi di DKI Jakarta. Peningkatan jumlah usaha akomodasi dipicu dengan dengan bertambahnya hotel bintang yang sebelumnya 448 menjadi sebesar 496 hotel bintang, sementara untuk hotel non bintang peningkatan menjadi 556 hotel yang sebelumnya 422 hotel. Persaingan usaha hotel yang semakin kompetitf membuat hotel hrus terus berinovasi untuk memberikan terbaik baik dari sisi produk maupun pelayanan.

Provinsi/ *Province*	Klasifikasi/*Classification*					Jumlah/ *Total*
	Bintang 5/ *5 Star*	Bintang 4/ *4 Star*	Bintang 3/ *3 Star*	Bintang 2/ *2 Star*	Bintang 1/ *1 Star*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Aceh	1	2	24	10	19	56
02. Sumatera Utara	7	25	73	38	28	171
03. Sumatera Barat	1	14	25	42	33	115
04. R i a u	3	15	38	31	14	101
05. J a m b i	1	4	15	12	6	38
06. Sumatera Selatan	4	16	33	42	21	116
07. Bengkulu	–	1	6	8	2	17
08. Lampung	–	7	18	17	3	45
09. Kep. Bangka Belitung	1	12	18	14	12	57
10. Kepulauan Riau	13	33	36	43	14	139
11. DKI Jakarta	37	88	176	142	53	496
12. Jawa Barat	20	136	278	137	49	620
13. Jawa Tengah	14	70	140	101	63	388
14. D.I. Yogyakarta	14	56	81	39	17	207
15. Jawa Timur	26	86	173	64	19	368
16. B a n t e n	1	35	68	35	11	150
17. B a l i	123	160	162	81	24	550
18. Nusa Tenggara Barat	14	43	92	17	15	181
19. Nusa Tenggara Timur	7	12	19	12	2	52
20. Kalimantan Barat	–	12	34	6	1	53
21. Kalimantan Tengah	1	6	9	18	6	40
22. Kalimantan Selatan	–	12	27	9	14	62
23. Kalimantan Timur	3	19	36	14	3	75
24. Kalimantan Utara	–	2	1	4	5	12
25. Sulawesi Utara	3	16	21	12	6	58
26. Sulawesi Tengah	–	4	9	7	11	31
27. Sulawesi Selatan	2	23	77	50	40	192
28. Sulawesi Tenggara	–	2	14	9	3	28
29. Gorontalo	–	3	1	1	3	8
30. Sulawesi Barat	–	1	1	4	1	7
31. Maluku	–	4	9	11	7	31
32. Maluku Utara	–	1	13	5	–	19
33. Papua Barat	–	2	4	4	1	11
34. Papua Barat Daya	–	5	7	6	–	18
35. Papua	–	8	10	13	3	34
36. Papua Selatan	–	1	2	2	2	7
37. Papua Tengah	–	2	5	14	3	24
38. Papua Pegunungan	–	2	–	5	–	7
I n d o n e s i a	296	940	1.755	1.079	514	4.584

- Banyaknya Usaha Hotel berbintang Menurut Provinsi pada tahun 2024

Provinsi/	Tahun/Year				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Aceh	24	26	42	43	56
02. Sumatera Utara	143	145	146	146	171
03. Sumatera Barat	85	86	92	92	115
04. R i a u	95	93	100	100	101
05. J a m b i	36	37	35	35	38
06. Sumatera Selatan	78	77	82	83	116
07. Bengkulu	15	17	17	17	17
08. Lampung	27	28	28	28	45
09. Kep. Bangka Belitung	55	51	53	55	57
10. Kepulauan Riau	127	101	118	119	139
11. DKI Jakarta	392	384	448	448	496
12. Jawa Barat	510	521	593	598	620
13. Jawa Tengah	324	333	352	359	388
14. D.I. Yogyakarta	172	168	192	193	207
15. Jawa Timur	288	283	349	349	368
16. B a n t e n	129	126	148	148	150
17. B a l i	508	403	541	541	550
18. Nusa Tenggara Barat	71	63	95	96	181
19. Nusa Tenggara Timur	35	34	43	46	52
20. Kalimantan Barat	45	48	49	49	53
21. Kalimantan Tengah	19	20	27	28	40
22. Kalimantan Selatan	61	60	57	57	62
23. Kalimantan Timur	71	70	72	73	75
24. Kalimantan Utara	7	7	8	8	12
25. Sulawesi Utara	41	50	52	52	58
26. Sulawesi Tengah	11	13	14	14	31
27. Sulawesi Selatan	151	147	194	195	192
28. Sulawesi Tenggara	23	25	27	27	28
29. Gorontalo	8	7	8	8	8
30. Sulawesi Barat	7	3	6	6	7
31. Maluku	20	22	26	26	31
32. Maluku Utara	9	11	13	13	19
33. Papua Barat	19	19	22	22	11
34. Papua Barat Daya	–	–	–	–	18
35. P a p u a	38	43	55	55	34
36. Papua Selatan	–	–	–	–	7
37. Papua Tengah	–	–	–	–	24
38. Papua Pegunungan	–	–	–	–	7
I n d o n e s i a	3.644	3.521	4.104	4.129	4.584

- Pertumbuhan Usaha Hotel berbintang menurut Provinsi dari tahun 2021-2024

WILAYAH OPERASIONAL

B. TINJAUAN KEUANGAN

Laporan Laba (Rugi) merupakan gambaran kinerja perusahaan selama satu periode. Untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini, perusahaan menyajikan kinerja dibandingkan tahun buku 2024.

URAIAN	2025 (audited)	2024 (audited)	Naik/ (Turun)
PENDAPATAN	**5.141.192.719**	**15.256.322.662**	**(66%)**
Biaya Langsung	1.222.160.548	5.950.957.367	(79,5%)
Biaya Tidak Langsung	2.643.587.313	7.767.138.341	(66,0%)
Biaya Lain-lain	-	-	-
Laba Operapsi sebelum Penyusutan & Pajak Tangguhan	**1.274.444.858**	**1.538.226.954**	**(17,1%)**
Biaya Penyusutan & Amortisasi	3.017.357.639	3.426.908.162	(12,0%)
Laba (rugi) Usaha	**(1.741.912.781)**	**(1.888.681.208)**	**(0,07%)**
Nilai Revaluasi Aset	-.	-.	(9,2%)
Pajak Tangguhan	(21.719.994)	4.859.742	
Laba (Rugi) Bersih	**(1. 720.192.787)**	**(1.892.540.950)**	

Pada tahun buku 2025 pendapatan usaha Perseroan sebesar Rp. 5.141.19.719,- atau turun (66,3%) dar tahun 2025 yakni sebesar Rp. 15.256.322.667,-. Penurunan pendapatan Perseroan lebih disebabkan perbedaan skema pendapatan yakni pendapatan sharing dari ex Mitra Horison pada periode Januari s.d September 2025 dan skema pendapatan kembali seperti sebelumnya pada Oktober s.d Desember 2025. Namun demikian, ada beberapa factor lain selain perbedaan skema pendapatan yakni :

- Branding dan promosi tidak optimal (ex mitra – horison) sehingga berdampak pada kinerja pendapatan
- Efisiensi anggaran pemerintah untuk belanja melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Laba (rugi) usaha perusahaan sebelum penyusutan & amortisasi sebesar Rp.1.275.444.858),- atau mengalami penurunan sebesar (Rp. 262.782.096) dari tahun buku 2024 sebesar Rp.1.538.226.954,- atau setara dengan kenaikan sebesar (17,1%).

Sedangkan Laba (Rugi) Bersih Perusahaan pada tahun buku 2024 sebesar (Rp.1.720.192.787),- mengalami sedikit penurunan di bandingkan Laba (Rugi) Komprehensif Perusahaan pada tahun buku 2024 sebesar (Rp. 1.893.540.950),-. Secara umum dengan memperhitungkan rugi komprehensif sampai dengan laporan per 31 Desember 2025, maka akumulasi laba (rugi) komprehensif perusahaan menjadi (Rp. 50.670.730.812),-

1. Tingkat Hunian Kamar

Tingkat hunian merupakan salah satu alat untuk mengukur penjualan kamar dalam bisnis hotel. Makin tinggi tingkat hunian dan ARR, perinciannya sebagai berikut :

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Kamar	92	92	-
Tersedia	33.672	33.672	-
Terjual	16.603	20.568	(19,3%)
% Terjual	49,31%	61,08%	(19,3%)
Tarif Kamar Rata-rata (Rp)	289.052	315.714	(8,4%) / (Rp.26.662)

Tingkat hunian Hotel Balairung pada tahun 2025 sebesar 49,31% atau turun sebesar (19,3%) dibandingkan dengan tingkat hunian di tahun 2024 lalu sebesar 61,08%. Penurunan tingkat hunian kamar tersebut juha diikuti dengan penurunan tarif rata-rata kamar yakni sebesar Rp. 289.052 atau turun (Rp.26.662) dibandingkan dengan tahun 2024 yakni sebesar Rp. 315.714. Berikut gambaran tingkat hunian rata-rata bulanan kamar pada tahun 2025 dan 2024.

BULAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Variance %
JANUARI	50,28%	52,81%	**-2,52%**
FEBRUARI	67,47%	51,69%	**15,78%**
MARET	25,25%	46,49%	**-21,25%**
APRIL	36,16%	41,70%	**-5,54%**
MEI	50,35%	67,04%	**-16,69%**
JUNI	47,32%	65,72%	**-18,41%**
JULI	52,91%	74,05%	**-21,14%**
AGUSTUS	52,38%	62,90%	**-10,52%**
SEPTEMBER	41,78%	63,08%	**-21,30%**
OKTOBER	47,41%	64,41%	**-17,01%**
NOVEMBER	60,29%	76,49%	**-16,20%**
DESEMBER	63,08%	66,09%	**-3,02%**
AVERAGE	**49,31%**	**61,04%**	**-11,62%**

Perbandingan pencapaian tingkat hunian kamar 2025 dibandingkan 2024 tercermin pada table dibawah ini :

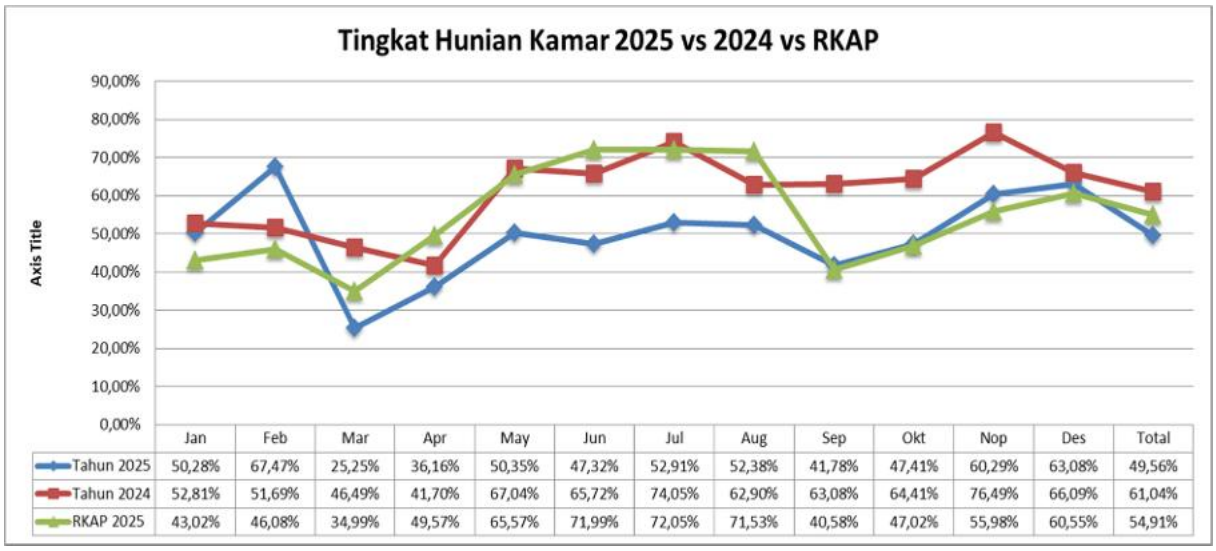

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nop	Des	Total
Tahun 2025	50,28%	67,47%	25,25%	36,16%	50,35%	47,32%	52,91%	52,38%	41,78%	47,41%	60,29%	63,08%	49,56%
Tahun 2024	52,81%	51,69%	46,49%	41,70%	67,04%	65,72%	74,05%	62,90%	63,08%	64,41%	76,49%	66,09%	61,04%
RKAP 2025	43,02%	46,08%	34,99%	49,57%	65,57%	71,99%	72,05%	71,53%	40,58%	47,02%	55,98%	60,55%	54,91%

Pada tahun 2025 tingkat hunian kamar Hotel Balairung sebesar 49,31% atau turun (19,3%) atau selisih 11,62% dari tahun 2024. Hal yang paling mendasari penurunan tingkat kunian kamar 2025 adalah belum optimalnya kinerja ex mitra-

horison pada triwulan I, II dan III, selain itu Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN Dan APBD juga turut berpengaruh terhadap tingkat hunian kamar.

2. Pesaing (Hotel Competitor)

Pada data competitor yang diambil di area sekita hotel meliputi area Senen, CIkini, Jatinegara, dapat dilihat bahwa average city occupancy menunjukkan tingkat hunian rata-rata berada di 57% dengan kata lain , Hotel Balairung masih di bawah rata-rata average city occupancy.

NO	HOTEL KOMPETITOR (Area & Tipe Hotel)	TW I	TW II	TW III	TW IV	YTD 2025
1	Balairung	48%	45%	49%	57%	49%
2	Blue Sky Pandurata	39%	37%	47%	56%	45%
3	Sofyan Betawi	57%	60%	62%	72%	63%
4	Juno Jatinegara	44%	38%	41%	75%	49%
5	Amaris Senen	60%	56%	57%	71%	61%
6	Maxone Kramat	56%	48%	47%	59%	53%
AVR CITY HOTEL		51%	48%	45%	49%	57%

3. Segmen Market

Produksi kamar terjual pada 2025 sebanyak 16.603 kamar, juga merupakan kontribusi dari beberapa golongan tamu, dengan rincian online travel agent masih mendominasi kontribusi paling tinggi 5.652 kamar atau 34% diikuti segmen corporate 2.797 kamar atau 16%. Sedangkan segmen lain dapat dilihat pada table berikut :

NO	MARKET SEGMENT	YTD 2025 KAMAR TERJUAL	HARGA RATA-RATA	PENDAPATAN	%
1	OTA	5.652	244.270	1.380.612.623	34,0%
3	HOTEL'S WEB	87	234.216	20.376.827	0,5%
4	WIG	1.485	313.378	465.366.927	8,9%
5	FIT	1.152	301.567	347.404.965	6,9%
6	CORP INDL	2.797	271.014	758.027.272	16,8%
7	CORP GROUP	1.404	278.155	390.529.750	8,5%
8	TA IND	216	361.998	78.191.538	1,3%
9	TA GROUP	486	269.185	130.823.801	2,9%
10	GOV INDIVIDUAL	1.812	373.774	677.277.684	10,9%
11	GOV GROUP	1.369	323.963	443.505.785	8,2%
12	PACKAGE	143	269.101	38.481.403	0,9%
TOTAL		**16.603**	**288.091**	**4.783.180.125**	**100,0%**

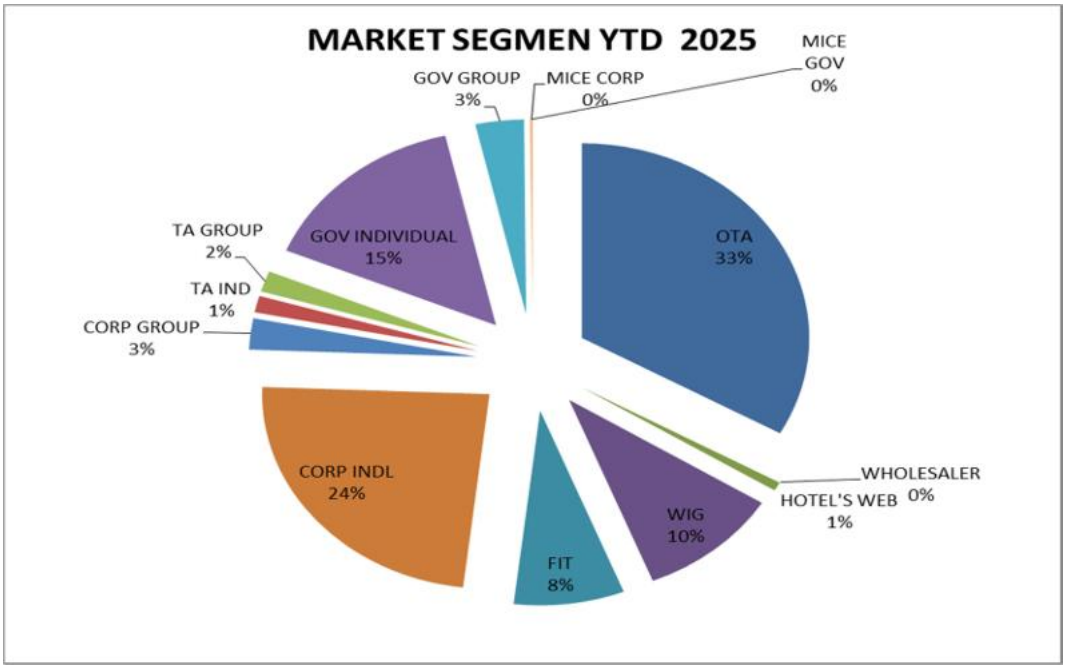

4. Kendala & Masalah Operasional

Didalam perjalanan operasional usaha manajemen juga mengalami beberapa kendala dan masalah yang sedikit banyak membuat operasional terganggu yatu:

a. Harga rata-rata kamar cenderung rendah, hal ini merupakan dampak dari persaingan hotel yang kompetitif. Segmen market online travel agent juga berperan dalam penurunan harga rata-rata kama
b. Konsistensi *taste* makanan masih belum stabil
c. Kondisi produk yang sudah lebih dari 12 tahun yang tidak tersentuh peremajaan secara total membuat beberapa produk perlu dilakukan peremajaan dan juga penggantian agar tetap kompetitif hotel lain.
   - Karpet ruang ballroom (pagaruyung)
   - Karpet koridor kamar (4 Koridor sudah dilakukan penggantian karpet)
   - Linen kamar & FB sudah kusam (sudah dilakukan bertahap)

- 79 kamar yang perlu peremajaan (8 + 5 kamar sudah dilakukan renovasi)
- Brand Image Gedung Balairung masih banyak yang banyak yang mengira gedung perkantoran (sudah di berikan signed di beberapa titik)
- Area parkir yang terbatas

d. Standarisasi pelayanan perlu di tingkatkan, manajemen terus melakukan upaya berupa in house training untuk meningkatkan skill staf.

e. Inovasi, manajemen terus melakukan inovasi-inovasi promosi seperti kolaborasi dengan influenser (youtuber), pembuatan konten-konten yang menarik, pembuatan paket-paket bundling kamar dengan makan malam serta voucher taksi untuk ASN

5. Analisis Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektibilitas Piutang Hutang

Total liabilitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 12.756.899.849,- terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar 9.216.900.052,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 3.539.999.797,-.

Keterangan	2025	2024
Rasio sekarang		
Total Liabilitas	12.756.899.849	14.162.157.410
Total Aktiva	161.473.721.072	164.597.876.950
Rasio total aset dengan total liabilitas	7,9%	8,6%

Piutang

Saldo Piutang Usaha per 31 Desember 2025 sebesar Rp 196.454.079 dengan jangka waktu penagihan 8,5 hari. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka terlihat sebagai berikut:

Keterangan	2025	2024
Pendapatan	5.141.192.719	15.256.322.622
Piutang Usaha	196.454.079	44.129.535
Rata-rata Piutang Usaha	120.291.807	66.272.761
Perputaran Piutang	43 kali	230 kali
Jangka Waktu Pengutipan Piutang (hari)	8,5	1,5

6. Belanja Modal

Pasca peralihan pengelolaan hotel dari Horison yakni 1 Oktober 2025, manajemen melakukan beberapa langkah strategis dalam hal perbaikan dan renovasi dengan skala proritas agar tetap kompetitif dengan hotel pesaing. Adapun perbaikan yang sudah dilakukan pada triwulan IV 2025 sebagai berikut

a. Penggantian totem/ signed
b. Pekerjaan renovasi sebanyak 4 kamar
c. Pangadaan sofa lobby & ruang tunggu lt 2 sebanyak 4 set dalam rangka beautifikasi
d. Pengadaan AC & TV untuk kamar baru masing-masing sebanyak 6 unit
e. Pengadaan TV 85 inch untuk hybrid
f. Pengadaan linen baik untuk kamar maupun meeting
g. Pekerjaan penyempurnaan system proteksi kebakaran (mekanikal elektrikal (diesel, eectrik pump, Jocky pum)
h. Pengecatan koridor kamar (sebelumnya wallpaper) sebanyak 3 koridor

Realisasi belanja modal tersebut tertera dalam Laporan Arus Kas di bagian Aktivitas Investasi dimana belanja modal dan perbaikan pada tahun 2025 sebesar Rp 405.356.182 (Oktober s,d Desember) lebih kecil dibanding belanja modal tahun 2024 sebesar Rp 863.542.604,-.

7. **Fasilitas Utama (kamar & ruang rapat)**

Fasilitas utama mempunyai peran sangat vital dalam mendukung proses untuk kinerja pendapatan. Kondisi fasilitas yang prima akan berdampak sangat siginifikan untuk sarana promosi marketing. Semakin banyaknya hotel yang terus tumbuh di area sekitar Hotel Balairung Jakarta, membuat manajemen harus terus melakukan inovasi yang juga peremajaan fasilitas utama khususnya kamar dan juga kebijakan harga yang tepat agar mampu bersaing dengan hotel lain.

Kamar

Sarana produksi utama dalam usaha perhotelan adalah kamar. Tahun ini manajemen telah melakukan renovasi kamar sebanyak 2 kamar deluxe dan 6 kamar superior:

Room *Types*

- Superior Room 36 Rooms
- Deluxe Room 36 Rooms
- Junior Suite 15 Rooms
- Suite Room 4 Rooms
- Royal Suite 1 Rooms

Total : 92 Rooms

Each Room *Includes:*

- Cable TV
- Wi-Fi Access
- Safe Deposit Box
- Shower & Bathtub
- Prayer Area in the Room
- Coffee & Tea Maker

Superior Room

The Balairung Superior room spans 34 m^2 and includes a total of 52 rooms. Designed for comfort and convenience, these rooms feature modern amenities, making them an ideal choice for both business and leisure travelers seeking a cozy retreat.

Deluxe Room

Measuring 34m^2, the Balairung Deluxe room offers a spacious and inviting atmosphere with a total of 35 rooms available. These rooms are perfect for guests looking for a blend of luxury and comfort, providing an ideal setting for relaxation after a busy day.

Junior Suite

Junior Suite has a size of 45m^2 and consists of 15 rooms in total. This well-designed suite offers a comfortable and elegant living space, making it ideal for guests who desire extra room and amenities, whether for an extended stay or special occasions.

Suite Room

Suite Room has a size of 55 m^2 and consists of 4 rooms in total. This well-designed suite offers a spacious, comfortable, and elegant living space, making it ideal for guests who desire extra room and enhanced amenities, whether for an extended stay or special occasions.

Room Rates

ROOM TYPE	TOTAL	SIZE	PUBLISH RATE
Superior Room	36	34 M^2	IDR 1,500,000,- Nett
Deluxe Room	36	34 M^2	IDR 2,500,000,- Nett
Junior Suite	15	45 M^2	IDR 3,000,000,- Nett
Suite Room	4	55 M^2	IDR 4,500,000,- Nett
Royal Suite	1	88 M^2	IDR 5,000,000,- Nett

Ruang Meeting

Sarana poduk yang tidak kalah penting selain kamar adalah ruang rapat. Berikut Ruang Meeting yang tersedia di hotel sebagai berikut :

Balairung
Ethnic Moslem Friendly Hotel

MEETING & EVENTS

The latest facility meeting and events, which conveniently located at 2nd Floor, 3rd Floor and 12th Floor of Hotel Balairung Jakarta. Our meeting rooms will be equipped with complete banquet facility and reflect to exclusive Ethnic Minang Stylish design concept.

FLOOR	MEETING ROOM	ROUND	CLASSROOM	U SHAPE	THEATRE	BOARD	Long	Width	Height
1st	VIP	-	-	-	-	10	5.7 M	3.8 M	2.7 M
2th	Merapi 1	-	10	10	15	10	5.0 M	7.5 M	2.4 M
	Merapi 2	-	10	10	15	10	7.7 M	4.0 M	2.4 M
	Business Center	-	-	-	-	6	5.0 M	4.0 M	2.4 M
	Dekranasda	-	-	-	-	10	7.7 M	4.0 M	2.4 M
	Singgalang	30	30	30	60	20	11.7 M	7.7 M	2.4 M
	Singgalang 1/2/3	10	10	10	15	16	7.7 M	4.0 M	2.4 M
3rd	Pagaruyung Ballroom	180	200	180	350	100	26.3M	13.5 M	4.2 M
	Carano 1/2/3	50	50	40	70	30	13.5 M	7.6 M	4.2 M
5th	Rancak	25	25	25	25	20	10.0 M	6.1 M	2.6 M
12th	Sago Ballroom	100	90	80	150	50	18.0 M	8.3 M	4.6 M
	Sago A/B	30	30	30	50	20	8.3 M	9.6 M	4.6 M

MEETING ROOM PACKAGE

Inclusions: Screen, Proyector, Flip-Chart, White Board, Marker, Notepad, Pencil, Sound System, Mineral Water, Candy, Free Wi-Fi

PACKAGE	RATES	INCLUSIONS
Coffe Break	IDR 200.000,- Nett/Pax	1x Coffee Break with 2 kind of snacks, Meeting Room for 4 Hours
Half Day	IDR 550.000,- Nett/Pax	1x Coffee Break with 2 kind of snacks, 1x Lunch or Dinner, Meeting Room for 6 Hours.
Full Day	IDR 700.000,- Nett/Pax	2x Coffee Break with 2 kind of snacks, 1x Lunch or Dinner, Meeting Room for 8 Hours.
Full Board	IDR 850.000,- Nett/Pax	2x Coffee Break with 2 kind of snacks, 1x Lunch or Dinner, Meeting Room for 10 Hours.
Residential Twin	IDR 1.500.000,- Nett/Pax	1 Night Stay For 2 Persons Inc. Breakfast, 2x Coffee Break with 2 kind of snacks, 1x Lunch or Dinner, Meeting Room for 10 Hours.
Residential Single	IDR 1.800.000,- Nett/Pax	1 Night Stay For 1 Person Inc. Breakfast, 2x Coffee Break with 2 kind of snacks, 1x Lunch or Dinner, Meeting Room for 10 Hours.

Phone: 0812-9085-0077
Instagram: @hotelbalairungofficial
www.balairung-hotel.co.id

Hotel Balairung Jakarta
Jl. Matraman Raya No. 19,
Jakarta Timur 13140

C. PENCAPAIAN TERHADAP RKA 2025

Tahun 2025 pencapaian kinerja PT BCS belum cukup menggembirakan. Dari sisi pendapatan usaha hotel, perusahaan mampu mencapai pendapatan operasional sebesar Rp.5.141.192.719,- atau tercapai 81% dari target RKA 2025 sebesar Rp.6.316.115.665. Laba (rugi) usaha sebelum penyusutan dan pajak tangguhan sebesar Rp.1.275.444.858 mencapai 63% dari target RKA 2025 sebesar Rp.2.021.841.424,- .Rincian capaian laporan laba rugi 2025 terhadap RKA tercermin pada table berikut :

URAIAN	2025 (audited)	2024 (audited)	2025 RKAP	Variance % 2024	Pencapaian to RKAP %
Statistik					
- Jumlah Kamar	92	92	92	0,0%	100%
- Kamar Tersedia	33.672	33.672	33.672	0,0%	100%
- Kamar Terjual	16.603	20.568	18.465	-19,3%	90%
- Tingkat Hunian (%)	49%	61%	54,8%	-19,3%	90%
- Jumlah Tamu (Menginap)	36.417	34.944	36.952	4,2%	99%
- Rata-rata Harga Kamar	289.052	315.714	359.691	-8,4%	80%
Pendapatan					
- Kamar	1.307.504.672	6.493.604.059	1.657.765.977	-79,9%	79%
- Makanan & Minuman	1.473.791.093	7.286.688.958	2.139.267.604	-79,8%	69%
- Sharing	859.379.604		1.050.758.921	#DIV/0!	82%
- Sewa Ruang Perkantoran	1.474.164.000	1.419.660.000	1.419.660.000	3,8%	104%
- Lain-lain	26.353.350	56.369.645	48.663.273	-53,2%	54%
JUMLAH	**5.141.192.719**	**15.256.322.662**	**6.316.115.775**	**-66,3%**	**81%**
Biaya					
Biaya Langsung	1.222.160.548	5.950.957.367	1.374.635.356	-79,5%	89%
Biaya-biaya Tidak Langsung	946.490.169	5.216.487.554	1.241.460.996	-81,9%	76%
Gross Operating Profit (GOP)	**2.972.542.001**	**4.088.877.741**	**3.700.019.424**	**-27,3%**	**80%**
%	**58%**	**27%**			
Beban Umum Perusahaan	1.697.097.144	2.550.650.787	1.678.178.000	**-33,5%**	**110%**
Laba Usaha Sebelum Penyusutan, amortisasi & Pajak Tangguhan	**1.275.444.858**	**1.538.226.954**	**2.021.841.424**	**-17,1%**	**63%**
Beban Penyusutan	3.017.357.639	3.426.908.162	3.017.357.628	-12,0%	100%
Pajak Tangguhan	(21.719.994)	4.859.742		-546,9%	#DIV/0!
Laba (Rugi) Bersih	**(1.720.192.787)**	**(1.893.540.950)**	**(995.516.204)**	**-9,2%**	**173%**

D. RINGKASAN RKAP 2026

Pasca perlihan pengelolaan hotel balairung, manajemen telah menyusun strategi guna meningkatkan kinerja pada tahun 2026. Meskipun hanya memiliki waktu yang relative singkat dalam penyusunan RKA 2026, manajemen tetap berupaya untuk langkah strategis menhadapi tantangan bisnis di tahun 2026, diantarannya:

Dalam RKAP 2026 ini, manajemen menargetkan proyeksi statistik keuangan sebagai berikut :

a. Sewa Kamar dengan target pendapatan Rp. 6.730.564.327
b. Paket Meeting dengan target pendapatan Rp. 7.612.673.682
c. Lain-lain (Laundry & Parkir) dengan target pendapatan Rp.46.190.250
d. Pendapatan Sewa Ruangan target pendapatan Rp. 1.419.660.000
e. Laba Kotor Operasional / GOP dengan taget laba Rp. 5.418.637.377 atau 34% dari total pendapatan keseluruhan
f. Laba Sebelum Penyusutan sebesar Rp. 3.386.758.887
g. Laba Bersih dengan taget laba Rp. 369.401.247
h. Tingkat Hunian kamar dengan target Occupancy sebesar 61,1% atau 20.529 kamar terjual
i. Harga rata-rata kamar dengan target sebesar Rp. 327.856.
j. Cut off utang ditargetkan paling tinggi 200 juta setiap akhir bulan
k. Cut off piutang ditargetkan paling tinggi 5% dari nilai pendapatan juta setiap akhir bulan

Selain target keuangan diatas manajemen juga menargetkan beberapa hal terkait operasional

1. Dalam pelaksanaan operasional, manajemen manargetkan nilai komplain pada keluhan tamu dibawah 2% dari total comment
2. Dalam menunjang pemasaran, manajemen menargetkan renovasi kamar sebanyak 2-4 kamar dalam 1 bulan sehingga target penyelesaian renovasi

kamar pada tahun 2026 sebanyak 24-48 kamar selain itu manajemen juga menargetkan penggantian karpet 4 koridor.

3. Sertifikasi karyawan sebanyak 80% karyawan pada 2026
4. Pemberian kontribusi ke pemegang saham sebesar Rp.650.000.000

Dalam menunjang proyeksi pendapatan tahun 2026, manajemen melakukan 3 point strategi berikut: :

A. Program Optimlisasi Pendapatan

1) Melakukan promosi melalui Online

a. Promosi reguler melalui monthly promo baik kamar ruang meeting maupun makanan/ minuman melalui website, story Instagram, story Tiktok,

b. Kebijakan penggunaan Ekatalog https://e-katalog.lkpp.go.id/info/penyedia/615268 untuk pemasaran Kamar dan ruang meeting

c. Promosi melalui kerjasama dengan Influencer, youtuber & food vlogger

d. Promosi melalui program flash sale traveloka, tiket.com dengan system sistem *Bulk via traveloka dan tiket.com*

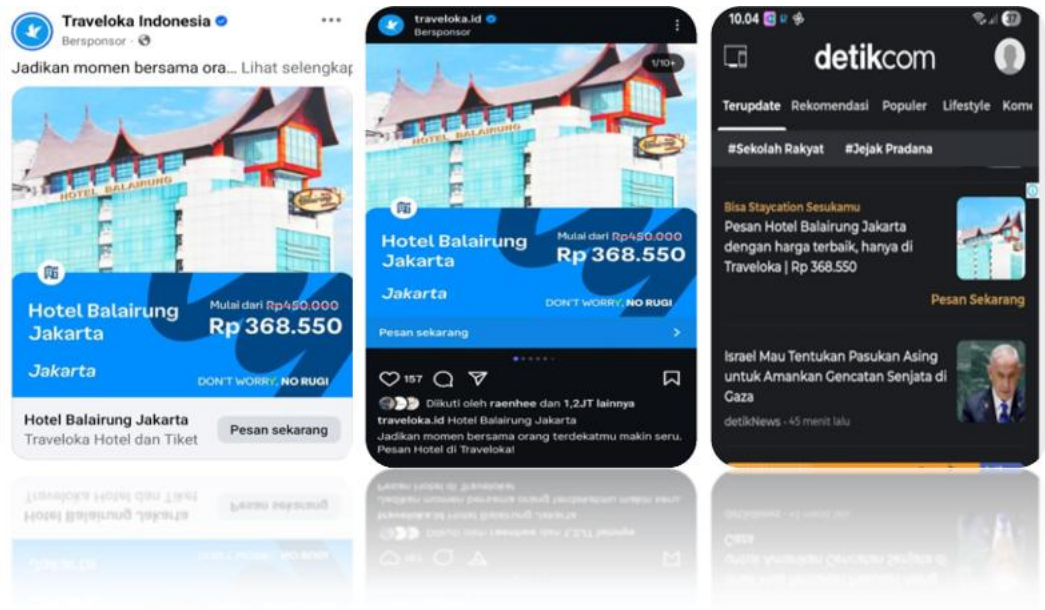

2) Melakukan penambahan staf marketing sehingga dapat mgnoptimalkan promosi melalui offline, melakukan kegiatan sales visit secara door to door ke korporasi, pemerintahan, asosiasi, ikatan, alumni dll

3) Melakukan promosi melalui open both acara-acara kalender Dinas Pariwisata baik DKI Jakarta maupun Sumatera Barat (Sumbar Expo, Tabel top dan Weeding exhibition)

4) Melaksanakan kerjasama Wedding Organizer untuk mengoptimalkan ruangan ballroom khusunya pada saat weekend
5) Optimalisasi paket nasi box ditujukan untuk lembaga pemerintahan maupun korporasi yang memilih melakukan rapat menggunakan fasilitas ruang rapat internal

B. Program Efisiensi

Dalam menekan biaya operasional dan diharapkan dapat memperbesar laba usaha, manajemen terus melakukan upaya efisiensi dengan target diantaranya :

1. Rencana migrasi mesin boiler (pemanas air) diesel/solar ke Heatpump (listrik) diharapkan akan menghemat 50% dari biaya eksisting
2. Meliburkan sebagian besar SDM Daily Worker, Part time. Departement juga diminta melakukan pengaturan jadwal masuk SDM Daily Worker, Part time secara efisien dan bijak berdasarkan occupancy kamar dan jumlah event.

No	Departement	Jumlah Karyawan		Jumlah Staf
		PKWT	Harian	
1	Front Office	4	1	6
2	Housekeeping	3	-	5
3	FB Service	1	2	3
4	FB Product	4	1	5
5	Sales & Marketing	4	-	4
6	Admin & General	4	2	6
7	Engineering	3	1	4
8	HRD	1	3	3
Total karyawan		24	10	34
Rasio to Kamar (PKWT+ DW)		**92 kamar**		**0,36**
Training /PKL				30

3. Mengoptimalkan kerjasama program magang (PKL) dari berbagai SMK di jakarta dengan program 6 bulan sebagai tenaga pendukung untuk PKWT sehingga tenaga harian bisa diminimalisir
4. Melakukan renegosiasi harga kontrak service yang akan berakhir yakni : TV Kabel, Internet, STP serta vendor-vendor lainnya
5. Sementara waktu jika tidak ada event dan occupancy rendah, akan memaksimalkan product yang masih ada di stock dan belanja kebutuhan dapur secara cash untuk mendapatkan harga yang competitive
6. Penggunaan kembali aminities kamar dan rapat yang masih layak pakai seperti noted pad, pensil, , sleeper\Melakukan prioritas zooning kamar satu lantai ketika low occupancy
7. Menyalakan AC ruang rapat minimal 15 menit sebelum dimulai
8. Pengkoordinasian antara tim sales & FB product untuk menu-menu paket rapat atau wediing untuk asper chef sehingga chef bisa memaksimalkan stock yang ada

9. Menyajikan kelebihan breakfast untuk makanan kantin karyawan\Melanjutkan program go green disetiap kamar dalam mengurangi botol minuman dikamar dengan mengganti pitcher yang dapat di refill

Dalam melaksanakan strategi efisiensi di korporat, manajemen korporat juga membuat **kebijakan** yakni :

1. Kebijakan perjalanan dinas denga nmenghadiri undangan di Sumbar maksimal 1 bulan 1 x dengan meminta arahan Komisaris/ berdasarkan undangan prioritas.
2. Kebijakan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan lebih awal agar mendapaltkan diskon lebih besar (10%).
3. Pengurangan manfaat premi asuransi gedung dengan mengilangkan manfaat “huru-hara” sehingga dapat menghemat sekitar 25 juta
4. Kebijakan rangkap jabatan untuk jabatan tetentu dengan memperhatikan tugas dan wewenang agar GCG tetap dapat diimplementasikan dengan baik seperti Room Division Manager (Housekeeping dan Front Office), Manager HRD dan Finance Acccounting

C. Program Investasi

Dalam upaya meningkatkan pendapatan, manajemen secara bertahap akan meneruskan berbagai peremajaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang sudah dilakukan pada tahun 2025 dengan target utama perbaikan adalah 2 unit kamar/ bulan dan karpet ruang rapat pagaruyung) serta sarana lainnya dengan target investasi sebesar 50% dari Anggaran Belanja Modal Tahun 2026 yakni Sebesar 44% X Rp. 5.297.585.000. = Rp. 2.311.917.500

NO.	DEPARTMENT	TOTAL CAPEX 2026
1	Front Office	19.920.000
2	Housekeeping	924.500.000
3	Food & Baverage	761.625.000
4	Finance & Accounting	21.600.000
5	HRD	32.000.000
6	Sales & Marketing	30.500.000
7	Property & Maintenance	3.507.440.000
TOTAL CAPEX		**5.297.585.000**
TARGET REALISASI		**2.311.917.000**
%		**44%**

URAIAN	2025 Realisasi	2026 RKAP	Variance % RKAP 2026
Statistik			
- Jumlah Kamar	92	92	0,0%
- Kamar Tersedia	33.672	33.580	-0,3%
- Kamar Terjual	16.603	20.529	23,6%
- Tingkat Hunian (%)	49%	61%	24,0%
- Jumlah Tamu (Menginap)	36.417	-	-100,0%
- Rata-rata Harga Kamar	289.052	327.856	13,4%
Pendapatan			
- Kamar	1.307.504.672	6.730.564.327	414,8%
- Makanan & Minuman	1.473.791.093	7.612.673.682	416,5%
- Sharing Revenue	859.379.604	-	
- Sewa Ruang Perkantoran	1.474.164.000	1.419.660.000	-3,7%
- Lain-lain	26.353.350	46.190.250	75,3%
JUMLAH	**5.141.192.719**	**15.809.088.259**	**207,5%**
Biaya			
Biaya Langsung	1.222.160.548	5.596.551.955	357,9%
Biaya-biaya Tidak Langsung	946.490.169	4.793.898.927	406,5%
Gross Operating Profit (GOP)	**2.972.542.001**	**5.418.637.377**	**82,3%**
%	**58%**	**34%**	
Beban Umum Perusahaan	1.697.097.144	2.031.878.490	**19,7%**
Laba Usaha Sebelum Penyusutan, amortisasi & Pajak Tangguhan	**1.275.444.858**	**3.386.758.887**	**165,5%**
Beban Penyusutan	3.017.357.639	3.017.357.640	0,0%
Pajak Tangguhan	(21.719.994)	-	-100,0%
Laba (Rugi) Bersih	**(1.720.192.787)**	**369.401.247**	**-121,5%**

PROGRAM PROMOSI

05
Sumber Daya Manusia

ANNUAL REPORT 2025

BURBERRY

SUMBER DAYA MANUSIA

Persaingan dalam industri perhotelan, properti dan restoran, yang menawarkan keunggulan jasa umumnya berpusat pada Sumber Daya Manusia (SDM). Bagi entitas usaha yang bergerak pada industri ini, SDM menjadi aset dan investasi penting agar operasional dan usaha dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan kompetensi SDM tentu akan memberikan kemampuan kepada entitas usaha untuk terus memiliki daya saing di tengah persaingan usaha.

Sebagai salah satu pelaku usaha di industri tersebut, Perusahaan mengupayakan peningkatan kompetensi SDM secara bertahap, sekaligus menciptakan kondisi kenyamanan kerja bagi karyawan. Perseroan melakukan pengelolaan kompetensi SDM yang diawali dengan perekrutan SDM yang memiliki potensi pengembangan kapasitas di masa depan. Faktor pelatihan dan kesempatan untuk mengembangkan karir di Perseroan dan entitas anak juga menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan potensi setiap SDM yang berkomitmen untuk berkarir di kelompok usaha dari Perseroan. Elemen lain yang tak kalah penting adalah pemenuhan kewajiban Perusahaan terhadap karyawan serta pembentukan lingkungan kerja yang kondusif.

Dalam pengembangan kompetensi karyawan, Perusahaan memperhatikan pola pelatihan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan di bidangnya masing-masing. Dan dengan menerapkan program suksesi serta rotasi pekerjaan, karyawan diharapkan memperoleh pengalaman beragam di unit usaha lainnya dan memiliki gambaran jenjang karir yang jelas. Pola pengelolaan ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang berkompetensi, dapat memberikan kinerja optimal serta peningkatan mutu hasil kerja yang berkesinambungan.

Dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan komunikatif serta adanya Perencanaan Regenerasi di semua posisi maka akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Selain memberikan pelatihan,

Perusahaan juga bekerja sama dengan Akademi Pariwisata,Universitas serta SMK yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Hotel. Dengan mengikuti PKL ini diharapkan ketika lulus siswa langsung siap kerja.

Perseroan juga telah menetapkan strategi peninjauan berkala terhadap kompensasi dan manfaat yang diterima oleh karyawan berdasarkan tingkat penyesuaian kebutuhan hidup, perbandingan pada industri sejenis, regulasi Pemerintah, dan kemampuan Perseroan. Perseroan juga sangat menjaga keselamatan karyawan yang dilakukan dengan menyediakan pelayanan dan perlindungan kesehatan yang memadai sesuai dengan regulasi Pemerintah. Pedoman terhadap pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kerja di area operasional Perseroan juga telah ditetapkan dan selalu dijalankan dengan baik oleh seluruh karyawan sesuai dengan standar operasi yang berlaku.

Jumlah dan Komposisi SDM Perseroan

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 41 karyawan, turun 20 orang dibandingkan tahun 2024, dimana tahun 2024 Perseroan memiliki 61 karyawan. Komposisi karyawan berdasarkan tingkat jabatan, latar belakang pendidikan, status karyawan, usia dan jenis kelamin dapat dilihat di bawah ini.

Komposisi Berdasarkan tingkat Jabatan

Jabatan	2025	2024
Corporate	1	3
Operasional		
Manager / Head of Departement	7	7
Asst Manager	1	1
Supervisor	4	6
Staff	16	23
Daily Worker per 31 Desember	12	21
Jumlah	**41**	**61**

Dari jumlah karyawan diatas sebanyak 12 karyawan harian pada 2025 dan 21 karyawan harian pada 2024

Komposisi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	2025	2024
S-2	-	-
S-1	5	10
D-4	1	1
D-3	4	8
D-2	-	-
D-1	3	2
SMA	28	40
Jumlah	**41**	**61**

Komposisi Berdasarkan Jenis kelamin

Pendidikan	2025	2024
Laki-laki	29	46
Perempuan	12	15
Jumlah	**41**	**61**

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam pengelolaan kompetensi SDM, Perseroan memberikan pelatihan *skill* teknis dan pelatihan manajerial yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan bidang tugas dari masing-masing karyawan. Beberapa kegiatan penting yang diberikan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program kegiatan assessment karyawan untuk proses perpanjangan kontrak Kerja .
2. Program training Greating & Grooming untuk seluruh karyawan

3. Program Hotel Tour bersama Siswa/i training SMK-SMK yang melakukan kegiatan program magang di Hotel Balairung Jakarta
4. Sosialisasi bimbingan teknis oleh Suku Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Jakarta Timur terkait Wisata Ramah Muslim
5. Kegiatan Job fair di SMK Citra Pariwisata Bogor untuk program pemagangan siwa/i
6. Kegiatan penandatangan MOU dengan beberapa SMK untuk program magang siswa/i

Untuk keterampilan teknis, pelatihan diberikan dalam rangka memperkuat pengetahuan terhadap produk dan layanan yang diberikan Perseroan dan

entitas anak kepada pelanggan. Bentuk pelatihan ini erat kaitannya dengan pengetahuan produk Perusahaan yang berhubungan dengan industri properti, perhotelan dan restoran yang sangat memperhatikan aspek pelayanan atau servis yang berkualitas. Selain pelatihan mengenai pengetahuan produk dan servis, pelatihan yang diberikan mencakup tingkah laku atau *Attitude*, kepemimpinan, Etika Kantor, pengetahuan mengenai konstruksi, sistem keamanan dan pengamanan.

Pelatihan tersebut juga dalam rangka menyiapkan suksesor atau *second layer* yang berpotensi untuk dapat menjadi Kepala Divisi. Kriteria persiapan atas potensi-potensi tersebut didasari pada kompetensi, kinerja, pemahaman, serta penerimaan karyawan tersebut terhadap kultur dan budaya Organisasi.

Pemenuhan Hak Karyawan

Pemenuhan hak karyawan diberikan melalui gaji dan tunjangan dengan perhitungan sesuai dengan pemenuhan kewajiban dari setiap karyawan serta *service charge* untuk karyawan hotel yang diterima dari tamu hotel. Perseroan memegang teguh kesetaraan antara hak dan kewajiban dari Perseroan dan karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Kebijakan dan Prosedur (*Policy & Procedures*) sebagai panduan standar bagi setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, Perseroan juga memberikan fasilitas lainnya seperti program perlindungan kesehatan melalui program asuransi BPJS. Program tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kesehatan yang optimal kepada karyawan, yang dapat mendorong produktivitas yang tinggi bagi Perseroan. Perseroan juga bekerjasama dengan Klinik kesehatan termasuk dokter umum yang lokasinya di area sekitar hotel. Perseroan dan entitas anak juga memperhatikan hak karyawan yang memasuki usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Kesetaraan Kesempatan Kerja

Perseroan memiliki sistem penilaian dan promosi yang terus-menerus ditinjau setiap tahunnya. Kepada seluruh karyawan, Perseroan memberikan formulir penilaian untuk diisi, dimana Kepala departemen akan melakukan kajian atas hasil kinerja setiap karyawan sebagai dasar untuk mengajukan promosi. Beberapa kriteria yang termasuk dalam penilaian tersebut adalah:

1. Penilaian kinerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan
2. Tingkah laku atau attitude
3. Pemahaman akan kinerja Perseroan

Di samping itu, Perseroan juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan masukan terkait karir yang diinginkan atau pelatihan yang diperlukan untuk menunjang karir karyawan ke jenjang berikutnya. Masukan ini menjadi sesuatu yang berharga, dimana keinginan setiap karyawan untuk berkembang akan menjadi landasan yang baik bagi Perseroan dalam mengarahkan minat ke dalam kebutuhan organisasi Perseroan

GENERAL MANAGER & HEAD OF DEPARTEMENT

General Manager
ALI BROJONEGORO

Sales Manager
BOY RHENDI S.

Chief Accounting
ASHARI NUR

Room Division Manager
WARDIANA SOPIAN

Human Resources Supervisor
GENI LUKITA UTAMI

Head Chef
EDI SUHENDI

Food & Beverage Coordinator
A ZULFIKRI

Engineering Supervisor
AMIRUDIN

Housekeeping Supervisor
RAMDHANI

Front Office Supervisor
BAGUS SUTOMO

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

Selama periode tahun 2025, manajemen telah melakukan berbagai kegiatan social yang langsung berdampak pada lingkungan masyarakat sekitar maupun karyawan internal sendiri. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain

1. Penyerahan Bantuan paket makanan untuk untuk korban banjir bandang di sejumlah Kabupaten/kota di Sumatera Barat
2. Pemberian bantuan makanan & minuman Masjid di area hotel Masjid Al-Ni'mah & Al furqon
3. Penyerahan (satu) ekor kambing ke Masjid An Ni'mah dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1456 H
4. Pemberan santunan dana dan makanan untuk anak yatim Rumah Yatim area sekitar Hotel Balairung pada momen Tarhib Ramadhan 1446 H
5. Pembagian takjil untuk pengendara di Jl. Matraman Raya (area depan hotel)

Kegiatan karyawan

kegiatan karyawan merupakan hal yang penting guna mempererat hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga setelah kembali bekerja karyawan menjadi lebih fresh daln menjalankan pekerjaanya. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah

1. Penandatangan kerjasama program magang (PKL) siswa/i & kunjungan ke sekolah-sekolah berikut :
    a. SMK Citra Pariwisata Bogor
    b. SMK Bina Nusa Mandiri
    c. SMK Cipta Karya
    d. SMK Kemala Bhayangkari I
    e. SMK Jakarta Pusat 1
    f. SMKN 31 Jakarta
    g. SMKN 70 Jakarta
    h. SMKN 29 Jakarta

i. SMKN 34 Jakarta

j. SMKN 61 Jakarta

2. Kegiatan job fair di SMK Citra Pariwisata untuk menyerap database calon siswa/I training program magang 1 tahun
3. Kegiatan lepas sambut program magang (PKL) siswa/i
4. Kegiatan hotel tour untuk siswa/i magang
5. Kegiatan inhouse training HRD mengenai Grooming, Greeting, Service Excellent
6. Kegiatan pengajian rutin bulanan karyawan/ti
7. Kegiatan olahraga untuk karyawan/ti
8. Kegiatan Beauty Class untuk karyawati bekerjasama dengan Jafra Cosmetics
9. Kegiatan Executive Chef Hotel Balairung Jakarta dalam program sebagai guru tamu (penguji) ke SMK Bina Nusa Mandiri
10. Kegiatan Medical Chek Up (penyakit tertentu & test narkoba) bekerjasama dengan Klinik Utama Dr Indrajana
11. Kegiatan Assesment karyawan untuk proses renewal contract dengan system online bekerjasama dengan PT. Kinanti Kreasi Indonesia (HRD Room)
12. General Staff Meeting sekaligus peralihan dari MGM (Horison Group), ke Hotel Balairung Jakarta
13. Kegiatan penandatangan komitmen General Manager & Head of Departement untuk merealisasikan RKA tahun 2026

KEGIATAN KARYAWAN & CORPORATE SOCCIAL RESPONSIBILITY

Pisah Sambut PKL
Horison Balairung Jakarta

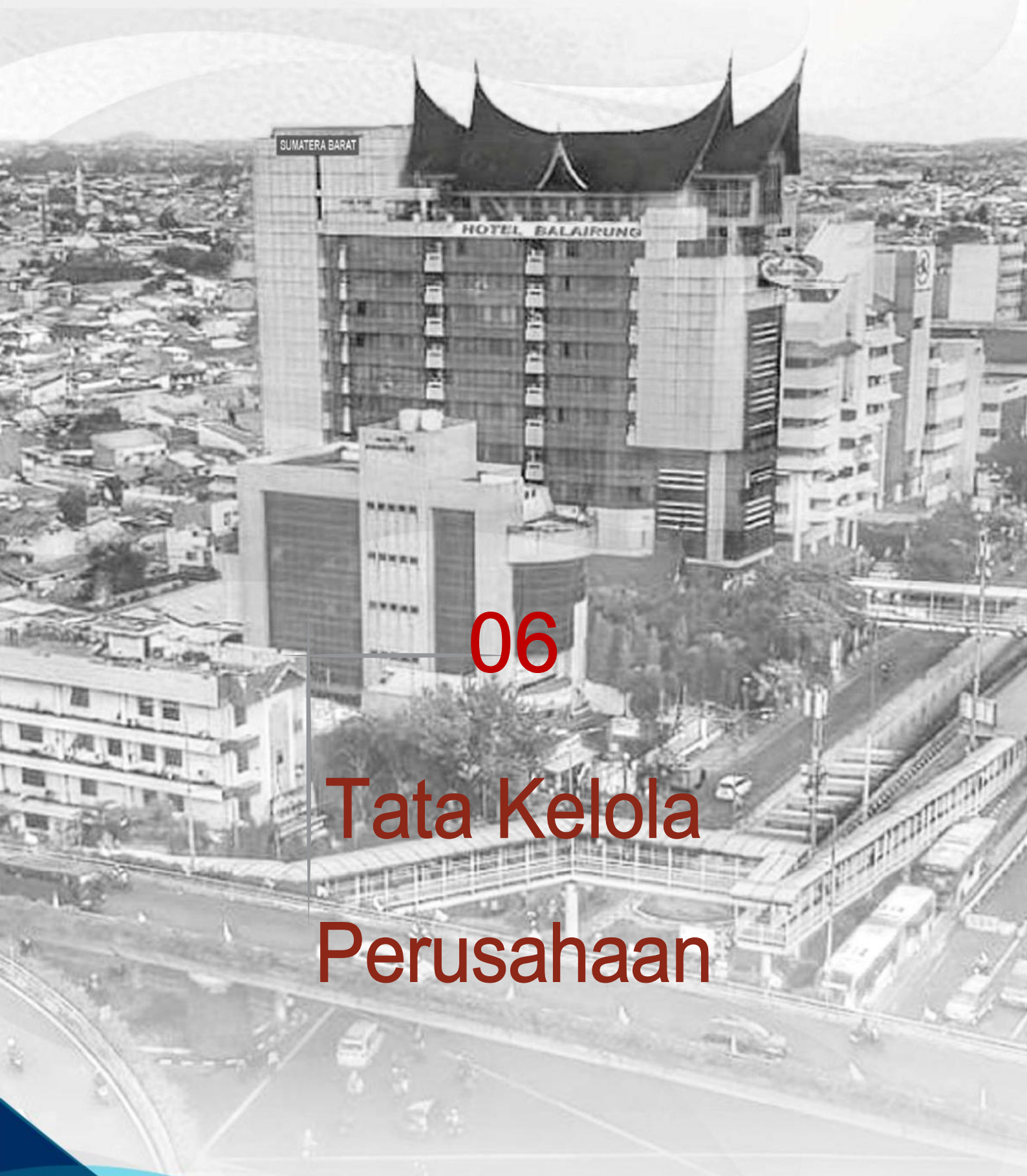

06

Tata Kelola Perusahaan

ANNUAL REPORT 2025

A. PRINSIP DASAR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan PT Balairung Citrajaya Sumbar (Perseroda) adalah:

1. Transparansi (*Transparency*)

   Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

   Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

   Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*Independency*)

   Suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

   Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang timbul.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Balairung Citrajaya Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil

agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan organ Perusahaan.
3. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku-kepentingan *stakeholders)* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian daerah dan nasional.
5. Membantu menciptakan iklim investasi daerah dan nasional.

Keberhasilan BUMD secara umum dan PT Balairung Citrajaya Sumbar (Perseroda) pada khususnya dalam menerapkan *Good Corporate Governance* bukan pada tersedianya piranti-piranti dari *Corporate Governance*, seperti *Code of Corporate Governance* ini, *Internal Audit Charter*, *Code of Conduct*, dan lain sebagainya, melainkan terletak kepada komitmen dari pimpinan tertinggi Perusahaan yang diikuti oleh seluruh staf dan karyawan serta didukung oleh Dewan Komisaris.

B. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pemegang saham

Anggaran Dasar perusahaan mengatur hubungan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan sebagai rapat tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis. RUPS merupakan wadah perlindungan dan perlakukan kesetaraan bagi seluruh pemegang saham, baik pengendali / minoritas dapat menyalurkan haknya untuk menciptakan nilai optimal bagi perusahaan. Berikut daftar pemegang saham perusahaan per 31 Desember 2025 adalah :

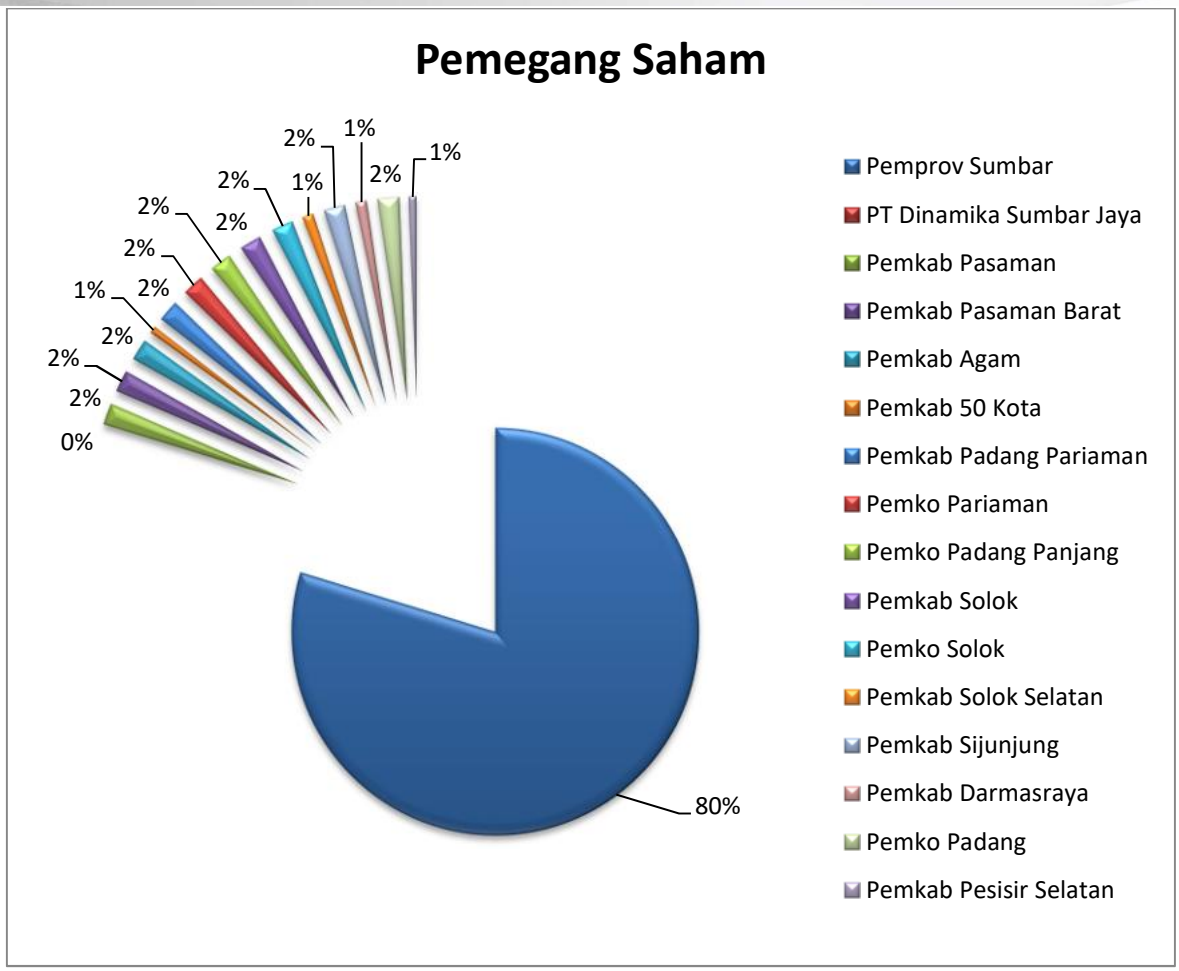

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. RUPS terdiri dari 2 (dua) yaitu :

1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun.
2. RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Wewenang RUPS antara lain membuat keputusan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui laporan keuangan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
2. Memutuskan penggunaan laba perusahaan

3. Menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar
4. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
5. Menetapkan gaji dan tunjangan Direksi serta honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Penyelenggaran RUPS pada tahun 2025

Pada tahun 2025, perusahaan menyelenggarakan 1 kali RUPS yakni 1 kali RUPS Tahunan yang diadakan di Jakarta tanggal 29 April 2025. Risalah rapat telah diaktakan oleh Notaris Catur Virgo SH dengan akta Notaris No 14 tanggal 29 April 2025.

PT. Balairung Citrajaya Sumbar mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham. Melalui kepatuhan kepada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang benar, perusahaan menjalankan perannya untuk menjaga kepercayaan pemegang saham.

Karyawan dan pengurus perusahaan menyadari bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah hal yang sangat penting untuk membangun kepercayaan pasar, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholder)* dan meningkatkan nilai tambah perusahaan. Nilai-nilai yang ditanamkan saat pendiri perusahaan untuk menjadikan PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebagai perusahaan dengan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” tidak hanya pada label, tetapi juga dilaksanakan dalam pengelolaan operasional hotel.

Berikut ini adalah perangkat-perangkat PT. Balairung Citrajaya Sumbar dalam melaksanakan tatakelola perusahaan yang baik dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan:

1) **Dewan Komisaris**

a) Uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris;

Secara umum komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Selain itu Komisaris juga memberikan persetujun atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Juga meminitor kemajuan dan hasil kebijakan program dan keputusan yang dibuat oleh Dewan Komisaris atau RUPS.

Melakukan pertemuan bulanan dengan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi, kebijkan, proyeksi dan tindakan yang diambil Direksi khususnya yang berdampak pada bisnis, reputasi perusahaan dan para pemimpinnya.

Melakukan komunikasi rutin dengan Direksi untuk membahas informasi-informasi penting terkait upaya peningkatan efisiensi operasional perusahaan, kondisi keuangan dan usaha penjualan.

Komisaris berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.

b) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota dewan komisaris;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2025 dan telah memutuskan menetapkan kepada masing – masing anggota Direksi dan Komisaris jumlah gaji serta tunjangan lainnya yang dituangkan dalam Akta RUPS No 14 tanggal 29 April 2025.

c) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris;

Rapat Komisaris dilakukan paling sedikit 1 kali dalam sebulan dan dihadiri oleh komisaris. Pada tahun 2025, Komisaris melaksanakan rapat manajemen sebanyak 11 kali yang mana pembahasan pada rapat tersebut telah dituangkan didalam notulen rapat.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Ria Wijayanty	Komisaris	4	4	100%
2	Arry Yuswndi	Komisaris	7	7	100%

2) **Direksi, mencakup antara lain;**

a) Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab direksi;

Direktur

Secara umum tugas dan tanggung jawab kepada Direktur

1. Bertanggung jawab atas semua kebijakan strategis dan operasinal sehari-hari.
2. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan dengan menetapkan arah, tujuan, strategi atas kontrol kerja yang sinergis antar departement keuanga, operasional serta pengembangan bisnis
3. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Perusahaan (RJPP) 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan kepada Komisaris dengan tembusan kepada Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS.
4. Melakukan pembinaan terhadap pegawai perusahaan.

5. Mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menyampaikan laporan perkembangan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan maupun semesteran kepada Pemegang Saham/Gubernur dalam hal ini kepada Kepala Biro Perekonomian Sekda Provinsi Sumatera Barat.

b) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi;

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2025 telah memutuskan menetapkan kepada masing – masing anggota Direksi dan Komisaris jumlah gaji serta tunjangan lainnya yang dituangkan dalam Akta RUPS No 14 tanggal 29 April 2025.

c) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi;

Rapat Direksi dilakukan 1 (satu) bulan sekali. Berkenaan dengan jumlah direksi hanya 1, maka rapat manajemen dilakukan dengan Komisaris dan Direksi saja. Pada tahun 2025, Direksi melaksanakan rapat manajemen sebanyak 11 kali yang mana pembahasan pada rapat tersebut telah dituangkan didalam notulen rapat.

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1.	Oktofrida WP	Direktur	11	11	100

3) **Sekretaris perusahaan, mencakup antara lain:**

Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan :

Secara umum bertanggung jawab kepada Direksi dan bertugas;

a. Secara Eksternal menjadi Public Relation dan mewakili Perseroan dalam mengadakan komunikasi dengan pemerintah, investor, pemilik

saham dan pihak lainnya termasuk mengurus kepentingan Perseroan sebagai Perusahaan Publik

b. Secara Internal merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinir semua kegiatan Perseroan secara administrasi termasuk membantu Direksi untuk mempersiapkan Program Kerja jangka pendek maupun jangka panjang serta membuat hasil evaluasi yang secara rutin akan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Membantu Direksi secara administrasi dalam mengadakan koordinasi dengan General Manager berkaitan dengan operasional Perseroan termasuk memonitor hasil kesepakatan yang telah ditetapkan.

c. Secara khusus bertindak sebagai General Affair Perseroan yang bertugas dalam hal mengkoordinir pemeliharaan kendaraan, pengurusan asuransi, penyediaan fasilitas bagi Direksi dan karyawan dengan jabatan Manager ke atas, pengurusan perizinan dan hal – hal lain yang berhubungan dengan instansi Pemerintah maupun swasta.

C. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1) Penerapan Audit Internal & Audit Eksternal

Fungsi Audit Internal

Manajemen telah telah menerapkan fungsi audit intern untuk melakukan pengawasan intern perusahaan secara periodik. Pada awal tahun Direktur menugaskan bagian audit internal/ SPI untuk melakukan pengawasan terhadap operational hotel agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, karena efisiensiFungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan operasional hotel. Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko,

pengendalian internal, tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern perusahaan yang membutuhkan

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
b. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (risk management), pengendalian internal (internal control), dan proses tata kelola (governance) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
c. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
d. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris/Direksi/Komite Audit, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.
f. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal Perseroan yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal.
g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan

Pelaksanaan Audit 2025

Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal, manajemen mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Laporan Keuangan Perseroan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan obyektif, serta menggunakan

kemahiran profesional secara cermat dan seksama (due professional care).

2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
   a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in-charge) yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan
   b. Tidak memberikan jasa lain kepada Perseroan pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
   c. Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie, Bactiar, Noegroho ditunjuk sebagai auditor Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.
   d. Perseroan memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai dengan Surat Komentar (Management Letter) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku

Keterangan	2025	2024	2023
Kantor Akuntan Publik	Abdul Ghonie, Bachtiar, Noegroho	Soekamto Adi Syahril & Rekan	Soekamto Adi Syahril & Rekan
Akuntan Publik	Drs. Abdul Ghonie Abubakar, MM, Ak, CA, CPA, CMA	Dr. Syahril Ali, SE, MS.i CPA, CA, CPI	David Wahyudi, SE, Ak, CPA, CA

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, Manajemen telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP dengan mempertimbangkan aspek-aspek:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi BPK dengan KAP dimaksud

2) **Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Tujuan dari pada manajemen resiko sendiri adalah

1. **Melacak Sumber-Sumber Risiko**

   Poin pertama tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset.

2. **Menyediakan Informasi Risiko Bagi Perusahaan**

   Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi.

3. **Minimalisasi Kerugian Akibat Terjadinya Risiko**

   Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer risiko

bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer risiko ke pihak lain.

4. **Memberikan Rasa Aman Bagi *Stakeholder***

   Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar *stakeholder* merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. *Stakeholder* di sini bukan sebatas investor saja, tapi juga pekerja, *supplier*, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan.

5. **Menjaga Stabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan**

   Terakhir, tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha.

MATRIKS ANALISIS RISIKO 5x5			DAMPAK				
DESKRIPSI	KEMUNGKINAN	SKALA KEMUNGKINAN	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SANGAT TINGGI
			1	2	3	4	5
HAMPIR PASTI TERJADI	91% - 99%	5	5	10	15	20	25
KEMUNGKINAN BESAR TERJADI	51% - 90%	4	4	8	12	16	20
MUNGKIN TERJADI	31% - 50%	3	3	6	9	12	15
KEMUNGKINAN KECIL TERJADI	11% - 30%	2	2	4	6	8	10
KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI	1% - 10%	1	1	2	3	4	5

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN	SKALA KEMUNGKINAN	DESKRIPSI
HAMPIR PASTI TERJADI	91% - 99%	5	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 91% sampai dengan 99%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan hampir pasti akan terjadi
KEMUNGKINAN BESAR TERJADI	51% - 90%	4	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 51% sampai dengan 90%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan besar akan terjadi
MUNGKIN TERJADI	31% - 50%	3	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 31% sampai dengan 50%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan mungkin akan terjadi
KEMUNGKINAN KECIL TERJADI	11% - 30%	2	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 11% sampai dengan 30%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan kecil akan terjadi
KEMUNGKINAN TIDAK TERJADI	1% - 10%	1	Jika kemungkinan keterjadian suatu risiko antara 1% sampai dengan 10%, maka risiko tersebut dapat diasumsikan kemungkinan tidak terjadi

Manajemen telah melakukan mitigasi risiko terhadap program kerja didalam Rencana Kerja & Anggaran tahun 2026

3) Kebijakan Remunerasi Komisaris dan Direksi

- Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi per tahun

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	1	Rp.195	1	Rp.390
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, purna bakti, dan sebagainya) yang : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki		Rp.36		Rp.196,7
Jumlah	1	Rp.231	1	Rp.586,7

- Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Komisaris	Direksi
Di atas Rp 1 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		1
Rp 500 juta ke bawah	1	

* Remunerasi Komisaris Rp. 231.000.000/th & Direksi Rp. 586.783.815/th

4) Jumlah Penyimpangan Internal

Jumlah penyimpangan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap dengan jumlah lebih dari Rp.10 jt untuk tahun 2025 sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun			
	Pengurus		Pegawi Tetap & Tidak Tetep	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan Penyelesaian	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5) Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan (CSR)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perseroan adalah:

BEASISWA :

PT. Balairung Citrajaya Sumbar saat ini belum ada kerjasama secara langsung dengan institusi khususnya pendidikan untuk menyalurkan

beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi namun secara secara ekonomi kurang mampu:

Nomor	Keterangan	Jumlah (rupiah)
1	Nihil	Nihil
Total		Nihil

KEPEDULIAN SOSIAL :

PT. Balairung Citrajaya Sumbar telah melakukan bakti dengan total dana yang dikeluarkan sebesar Rp.32.550.000 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Keterangan	Jumlah (rupiah)
1	Santunan kedukaan	2.000.000
2	Santunan kelahiran staf	1.750.000
3	Donasi Banjir Sumbar	7.500.000
4	Partisipasi kegiatan PMI	200.000
5	Iuran kegiatan RT RW Palmeriam, Matraman	5.100.000
6	Santunan anak yatim	2.200.000
7	Bantun hewan qurban	9.000.000
8	Pembagian makanan jumat berkah	4.800.000
Total		**32.550.000**

6) Laporan Hasil Penilaian BPKP Sumatera Barat (Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance 05 s.d 26 Desember 2025

Hasil Penilaian BPKP Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan GCG		
Individual	Cukup Baik Score 74,74	Mencerminkan Manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Perseroan.
Konsolidasi	-	-
ANALISIS		
Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja assessment Good Corporate Governance, penerapan Good Corporate Governance di PT Balairung Citrajaya SUmbar. secara umum adalah **Cukup Baik**, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip Good Corporate Governance Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam governance structure, governance process, dan governance outcome, namun kelemahan tersebut secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen. Manajemen akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen pemeriksaan		

Ringkasan Hasil Evaluasi BPKP
Atas Penerapan *Good Corporate Governance* pada
PT. Balairung Citrajaya Sumbar
Tahun 2024

No	Aspek *Governance*		Bobot	Skor Aspek	Persentase (%)
I	Komitmen		15	12,30	82,01
II	Kebijakan		10	8,90	88,97
III	Partisipan GCG				
	A	Pemilik Modal/Pemegang Saham	21	17,40	82,86
	B1	Dewan Pengawas/Dewan Komisaris	22	16,79	76,31
	B2	Komite Dewas/Dekom	0	0,00	0,00
	C1	Direksi	13	7,43	57,19
	C2	SPI	5	0,25	5,00
	C3	Sekretaris Perusahaan	4	3,67	91,67
IV	Pengungkapan		5	4,67	93,33
V	Aspek Lainnya		5	3,33	66,67
	Jumlah		**100**	**74,74**	**74,74**

Nilai/Skor	Predikat
>85	Sangat Baik
75 - 85	Baik
60 - 75	Cukup Baik
50 - 60	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN 2024
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

07
Laporan Keuangan Audit 2025

ANNUAL REPORT 2025

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PADA DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Audit Indopenden	
Neraca	1 - 2
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 23

SURAT PERNYATAAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Kami yang bertanda tangan berikut ini :

Nama : Oktofrida Wisnu Pamungkas

Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Balairung Citrajaya Sumbar untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan PT. Balairung Citrajaya Sumbar telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum
3. Semua Informasi dalam laporan keuangan PT. Balairung Citrajaya Sumbar untuk tahun yang berkahir 31 Desember 2025:
   a. Telah dimuat secara lengkap dan benar
   b. Tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi dan fakta material
4. Patuh dan bertanggung jawab terhadap sistem pengendalian intern yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Sampai saat ini, baik PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebagai pribadi, tidak sedang menghadapi masalah tuntutan hukum dari pihak lain.
6. Tidak ada penunjukan auditor lain untuk melaksanakan audit independen atas laporan keuangan PT. Balairung Citrajaya Sumbar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 16 April 2026

PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR,

(Oktofrida Wisnu Pamungkas)
Direktur

Jl. Matraman Raya No. 19, Jakarta 13140
Phone : +62-21 8591 7217, Fax. : +62-21 8591 7216
www.balairung-hotel.co.id

ABDUL GHONIE, BACHTIAR, NOEGROHO
Registered Public Accountant
Izin KAP No. KEP - 306/MK/SK/2025
Graha Satria 1, 3rd Floor, Suite 304
Jl. RS. Fatmawati No. 5, Jakarta 12430
Telp : (021) 751 1744

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 00115/2.1527/AU.1/05/0744-1/1/IV/2026

Pemegang Saham, Komisaris dan Dewan Direksi
PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal lain

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya tertanggal 24 Maret 2025, menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan,manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Abdul Ghonie, Bachtiar, Noegroho

Drs. Abdul Ghonie Abubakar Ak, M.Si, CPA, CA, CMA
Nomor Izin Akuntan Publik: AP. 0744

Jakarta, 16 April 2026

00115

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	4c,5	537.546.580	1.214.047.914
Piutang usaha			
Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai Rp 0 per 31 Desember 2025 dan Rp 23.776.756 per 31 Desember 2024)	4d,6	196.454.079	44.129.535
Pihak yang memiliki hubungan istimewa	4d,6	1.176.181.818	1.176.181.818
Persediaan	4e,7	166.755.041	200.795.677
Perlengkapan hotel	4i,8	90.965.884	-
Uang muka	4f,9	37.130.521	14.081.982
Jumlah Aset Lancar		**2.205.033.923**	**2.649.236.926**
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 3.017.357.639 pada tahun 2025 dan Rp 3.052.840.594 per 31 Desember 2024)	4g,11	158.992.502.158	161.858.192.819
Aset tidak berwujud	4h,12	-	-
Aset pajak tangguhan	4q,10	112.167.000	90.447.006
Aset tidak lancar lainnya	4r,13	162.723.320	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		**159.267.392.478**	**161.948.639.825**
JUMLAH ASET		**161.472.426.402**	**164.597.876.751**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang usaha	4l,14	386.480.177	838.617.929
Beban akrual	4m,15	300.814.109	751.481.970
Utang pajak	4l,4q,10	7.714.919.524	7.858.681.779
Pendapatan sewa diterima di muka	4m,16	664.926.836	1.096.781.198
Utang lain-lain	4l,17	149.759.406	194.348.737
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**9.216.900.052**	**10.739.911.614**
Kewajiban Jangka Panjang			
Cadangan purna bakti direksi dan komisaris	4p,4r,18	245.100.000	137.350.000
Liabilitas imbalan pasca kerja	4p,4r,19	260.000.000	249.996.000
liabilitas pajak tangguhan	4q,10	3.034.899.797	3.034.899.797
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**3.539.999.797**	**3.422.245.797**
Jumlah Kewajiban		**12.756.899.849**	**14.162.157.411**
Ekuitas			
Modal Dasar Rp.308.078.000.000 terdiri dari 184.848 Saham Seri A Nilai Nominal Rp.1000.000 per Saham dan 123.230.000 Saham Seri B Nilai Nominal Rp.1.000 per Saham.			
Modal Ditempatkan dan Disetor terdiri dari 98.405 Saham Seri A dan 65.620.990 Saham Seri B	20	164.025.990.000	164.025.990.000
Tambahan modal disetor	21	2.030.287.790	2.030.287.790
Selisih revaluasi aset tetap		33.329.979.575	33.329.979.575
Saldo laba (rugi)	22	(50.670.730.812)	(48.950.538.025)
Jumlah Ekuitas		**148.715.526.553**	**150.435.719.340**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**161.472.426.402**	**164.597.876.751**

Jakarta, 16 April 2026

Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024
Pendapatan			
Pendapatan usaha	4m,23	5.141.192.719	15.256.322.662
Beban pokok pendapatan	4m,24	1.222.160.548	5.950.957.367
Laba Kotor		3.919.032.171	9.305.365.295
Pendapatan lain-lain		-	4.511.047
Beban usaha			
Beban pemasaran	4m,26	107.110.788	1.069.855.189
Beban administrasi dan umum	4m,27	2.536.476.525	6.701.794.199
Jumlah beban usaha		2.643.587.313	7.771.649.388
Laba sebelum penyusutan dan amortisasi		**1.275.444.858**	**1.538.226.954**
Beban penyusutan dan amortisasi	4m,28	3.017.357.639	3.426.908.162
Laba (Rugi) sebelum pajak Penhasilan		**(1.741.912.781)**	**(1.888.681.208)**
Beban (manfaat) pajak penghasilan			
Pajak kini		-	-
Pajak tangguhan	4q,10	(21.719.994)	4.859.742
Jumlah Beban (manfaat) pajak penghasilan		(21.719.994)	4.859.742
Laba (rugi) bersih tahun berjalan			
Penghasilan komprehensif lain			
Total laba komprehensif tahun berjalan		**(1.720.192.787)**	**(1.893.540.950)**

Jakarta, 16 April 2026

Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba (Rugi)	Jumlah
Saldo 1 Januari 2024	164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(47.056.997.075)	152.329.260.290
Penambahan (pengurangan)	-	-	-	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	-
Pembagian dividen	-	-	-	(1.893.540.950)	(1.893.540.950)
Saldo 31 Desember 2024	**164.025.990.000**	**33.329.979.575**	**2.030.287.790**	**(48.950.538.025)**	**150.435.719.340**
Penambahan (pengurangan)	-	-	-	-	-
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	-
Pembagian dividen	-	-	-	(1.720.192.787)	(1.720.192.787)
Saldo 31 Desember 2025	**164.025.990.000**	**33.329.979.575**	**2.030.287.790**	**(50.670.730.812)**	**148.715.526.553**

Jakarta, 16 April 2026

Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	4.796.132.544	18.187.943.493
Pembayaran kepada karyaawan	(1.765.431.984)	(7.210.006.285)
Pembayaran beban operasional	(3.206.784.628)	(7.680.205.241)
Pembayaran PBB dan pajak pembangunan daerah	(210.061.084)	(1.780.723.466)
Arus Kas tersedia Dari Aktivitas Operasi	(386.145.152)	1.517.008.501
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembelian Aset Tetap	(151.666.978)	(863.542.603)
Pembelian perlengkapan	(90.965.884)	
Pekerjaan dalam Penyelesaian	(162.723.320)	-
Jumlah Arus kas dari aktivitas investasi	(405.356.182)	(863.542.603)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan Pihak ke 3	115.000.000	-
Jumlah Arus kas dari aktivitas pendanaan	115.000.000	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(676.501.334)	653.465.898
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.214.047.914	560.582.016
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	537.546.580	1.214.047.914

Jakarta, 16 April 2026

Oktofrida Wisnu Pamungkas

Direktur

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

PT Balairung Citrajaya Sumbar, (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan dengan akta Notaris Catur Virgo, SH, Notaris di Jakarta dengan akta nomor 15 tanggal 10 Nopember 2009 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor: AHU-59384.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta Nomor 2 tanggal 1 Februari 2021 tentang "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2020 sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor: AHU-0015622.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan pasal 3 akta perubahan angggaran dasar Nomor 2 tanggal 1 Februari 2021 adalah untuk melakukan usaha dibidang:

1) Penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minum
2) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.
3) Real estat
4) Aktivitas professional, ilmiah dan teknis.
5) Pendidikan.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan saat ini terutama bergerak di bidang perhotelan, dengan nama “Hotel Balairung” dan jasa akomodasi atau penyewaan ruangan yang berhubungan dengan kegiatan perhotelan serta melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan berdomisili di Jalan Matraman Raya No. 19, Jakarta Timur yang sekaligus adalah lokasi Hotel Balairung. Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2012. Pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan mempekerjakan 61 orang karyawan, yang terdiri dari karyawan tetap 1 orang dan karyawan kontrak 39 orang dan karyawan harian 21 orang.

2. Manajemen

Berdasarkan Akta Notaris No. 14 tanggal 29 April 2025 yang dibuat dihadapan Catur Virgo Putri, S.H.,M.H Notaris di Jakarta yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09.0267234 tanggal 27 Mei 2025, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Komisaris		
- Komisaris	Arry Yuswandi	Ria Wijayanty
Direksi		
- Direktur	Oktofrida Wisnu P	Oktofrida Wisnu P

3. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK–IAI).

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

b. Mata uang fungsional dan pelaporan
Mata uang pelaporan yang digunakan entitas adalah mata uang rupiah, sekaligus mata uang fungsional. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Aset atau liabilitas dalam mata uang asing dikonversi kedalam rupiah pada tanggal pelaporan dengan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia.

c. Kas dan setara kas
Kas dan setara kas didefinisikan sebagai saldo kas dan bank, deposito berjangka yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dengan segera dapat dijadikan kas dan tidak dijadikan jaminan pinjaman.

d. Piutang Usaha
Piutang usaha adalah jumlah piutang dari pelanggan untuk jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali dampak diskontonya tidak signifikan, dikurangi penyisihan untuk penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai piutang diukur berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang secara individual dan kolektif. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

e. Persediaan
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata (average method). Nilai realisasi bersih adalah harga jual kembali persediaan dalam kondisi normal setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk melakukan penjualan dan penagihan.

Penyisihan atas penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya.

f. Uang muka dan beban dibayar dimuka
Uang muka pembelian ditutup setelah proses pembelian selesai sedangkan uang muka lainnya ditutup setelah dipertanggungjawabkan.

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

g. Aset tetap
Aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya, termasuk pajak yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyiapan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal, estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, jika ada.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan, setelah pengakuan awal diukur dengan menggunakan model revaluasian. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian berdasarkan bukti pasar yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional. Penilaian dilakukan secara berkala bila terdapat kondisi yang mengindikasikan terjadinya perubahan nilai yang signifikan.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Semua aset tetap, kecuali tanah disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). Persentase penyusutan per tahun untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap	Taksiran masa manfaat	Tarif penyusutan/tahun
Bangunan	4-50 tahun	2,0%-25,0%
Kendaraan	5 tahun	20,0%
Furnitur, Peralatan dan Perlengkapan	4 - 8 tahun	12,5% - 25%
Mesin dan Elektronik	5 - 8 tahun	12,5% - 20%

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat ekonomis dan metode penyusutan ditelaah, dan jika hal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, akan disesuaikan secara prospektif. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari pelepasan aset tetap dikreditkan atau dibebankan ke operasi berjalan pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya atau dilepaskan.

h. Aset takberwujud - perangkat lunak (komputer)
Biaya Perolehan perangkat lunak komputer meliputi seluruh biaya yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut hingga siap digunakan dan diamortisasikan selama 10 tahun dengan metode garis lurus.

i. Perlengkapan operasional hotel
Perlengkapan operasional hotel terdiri dari barang-barang porselen, pecah belah, linen hollowware, seragam, utensils, dan perlengkapan lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Penyisihan untuk penggantian peralatan operasi hotel ditetapkan berdasarkan taksiran nilai ganti dari peralatan operasi hotel yang hilang atau rusak dicatat sebagai pengurangan akun penyisihan tersebut.

j. Beban ditangguhkan
Beban ditangguhan yang mencakup beban pemeliharaan bangunan yang diidentifikasi memiliki masa manfaat dimasa mendatang dikapitalisasi dan diamortisasi selama empat tahun.

k. Penurunan nilai aset nonkeuangan
Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai, jika ada. Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai, jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

l. Utang usaha dan utang lain-lain
Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang dibeli dalam kegiatan usaha biasa dari pemasok. Utang lain-lain terutama merupakan utang service charges dan utang loss and breakage. Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali dampak diskontonya tidak signifikan.

m. Pengakuan pendapatan dan beban
Pendapatan hotel dan hunian kamar diakui pada tanggal terhuninya sedangkan pendapatan hotel lainnya diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan.

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

m. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)
Pendapatan sewa diterima di muka diamortisasikan selama masa sewa dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Beban-beban yang mempunyai manfaat dimasa yang akan datang dikapitalisasi dan dibebankan pada periode-periode yang memperoleh manfaat atas bebanbeban tersebut.

n. Imbalan kerja
Imbalan pasca kerja
Sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyediakan uang penghargaan dan ganti kerugian berdasarkan lamanya masa kerja karyawan, jika terjadi pemutusan kontrak kerja (PKK) karena pemutusan hubungan kerja, memasuki masa pensiun atau pengunduran diri secara sukarela. Jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan jika terjadi PKK telah dicadangkan sebagai kewajiban imbalan pasca kerja dalam kewajiban jangka panjang per tanggal pelaporan untuk karyawan tetap yang berjumlah 2 orang. Jumlah yang dicadangkan tersebut mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), yang dihitung sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023, yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terjadinya.

o. Aset dan Liabilitas Keuangan
i. Aset Keuangan
Pengakuan awal
Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:
1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan perusahaan meliputi kas dan setara kas dan piutang usaha. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

i. Aset Keuangan (lanjutan)
Pengukuran setelah pengakuan awal
Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:
1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortiasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Effective Interest Rate - "EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan tidak memiliki investasi dalam instrumen ekuitas dan surat utang, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta biaya perolehan yang diamortisasi, kecuali piutang yang dinilai dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ii. Liabilitas Keuangan

Pengakuan awal

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi komprehensif ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Per tanggal pelaporan perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selain utang usaha.

iii. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, perusahaan menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok asset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

p. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain).
   (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (iv) suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasikan dalam huruf a.
   (vii) orang yang diidentifikasikan dalam huruf a (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

p. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

   (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan butir 29.

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

q. Perpajakan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Beban pajak kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara subtantif telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan akan dimanfaatkan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi. Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk dipulihkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat ditambahkan dalam perhitungan laba kena pajak. Nilai tercatat dari liabilitas pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika liabilitas diselesaikan.

r. Penggunaan asumsi dan estimasi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, diperlukan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan kewajiban dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi dan asumsi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan tujuan yang diestimasi semula. Manajemen telah melakukan estimasi dan asumsi terhadap hal-hal yang dijelaskan berikut ini, dan pengungkapan tersebut dipandang telah memadai.

Pajak tangguhan

Masa manfaat aset tetap diestimasi sesuai dengan estimasi manfaat ekonomis aset tetap dapat digunakan dalam operasi perusahaan pada saat aset tetap diperoleh. Estimasi tersebut dievaluasi setiap tanggal pelaporan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi teknis aset tetap dan perkembangan teknologi sekarang dan masa depan, dimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis suatu aset tetap yang berdampak pada besarnya beban penyusutan.

Pengaruh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap terhadap penyusutan, jika ada diperlakukan secara prospektif. Manajemen yakin bahwa semua aset tetap dapat dimanfaatkan selama estimasi masa manfaat ekonomisnya.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset/kewajiban pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Penurunan nilai aset keuangan - Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha

Perusahaan mengevaluasi akun-akun piutang tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

r. Penggunaan asumsi dan estimasi (lanjutan)
piutang dari pelanggan berdasarkan catatan piutang, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

Imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja No.6 tahun 2023. Pada saat berhenti bekerja perusahaan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar jumlah yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut.

Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. Perusahaan mengakui imbalan pasca kerja tersebut sebagai beban saat masih aktif dengan mengabaikan estimasi kenaikan gaji akan datang, jasa akan datang dan kemungkinan mortalitas pekerja kini selama pemberian jasa antara tanggal pelaporan dan tanggal pekerja diekspektasikan mulai menerima manfaat imbalan pasca kerja.

Lihat catatan 19 yang mengungkapkan jumlah beban dan saldo kewajiban imbalan pasca kerja.

Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

5. Kas dan setara kas

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Kas :		
Kas Rupiah	20.000.000	47.578.720
Sub Jumlah	20.000.000	47.578.720
Bank :		
Bank Mandiri In - 006-000-736-602-8	301.984.862	213.358.729
Bank Mandiri Out - 006-000-730-7204	3.731.351	3.200.552
Bank CIMB In 8600-1953-7700	52.000	753.450
Bank Nagari 3000-0103-000027	64.760.075	143.460.886
Bank Nagari 3000-0103-000039	119.256.063	988.085
Bank Nagari 2100-0103-04486	2.558.680	2.229.026
Bank Permata 123-443-6089	718.085	2.558.680
Bank BCA	13.325.845	34.345.009
Bank BCA Syariah	2.680.000	-
Bank BRI	2.543.069	2.871.570
Bank BNI	5.543.550	62.703.207
Cash In Transit	393.000	-
Sub Jumlah	517.546.580	466.469.194
Depsito Bank Nagari		700.000.000
Jumlah	537.546.580	1.214.047.914

Deposito Bank Nagari terdiri dari 1 buah sertifikat deposito berjangka waktu 1 bulan (Aoutomatic Roll Over) dengan tingkat bunga 4% per tahun.

6. Piutang usaha

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Pihak Ketiga		
Piutang Guest Ledger	51.700.097	-
Piutang Credit Card	-	62.415.788
Piutang Debit Card	3.625.000	2.789.523
Piutang Bank Transfer	194.400	2.700.980
Jumlah Pindahan	55.519.497	67.906.291

6. Piutang usaha (lanjutan)

Jumlah Pindahan	55.519.497	67.906.291
Piutang Company Ledger	38.865.154	-
Piutang Government Ledger	91.374.428	-
Piutang Individual Ledger	10.695.000	-
Jumlah	196.454.079	67.906.291
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	(23.776.756)
Sub Jumlah	196.454.079	44.129.535
Pihak yang memiliki hubungan istimewa		
Badan Penghubung Prov. Sumbar	1.176.181.818	1.176.181.818
Jumlah	1.176.181.818	1.176.181.818

Piutang Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan sewa kantor tahun 2023 yang belum dibayarkan (lihat catatan butir 29).

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha selama tahun berjalan sebagai berikut:

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Saldo awal	23.776.756	23.624.989
Penambahan (pengurangan):		
- Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	-	23.776.756
- Penghapusan piutang	(23.776.756)	(23.624.989)
Jumlah	-	23.776.756

Berdasarkan umur

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Belum jatuh tempo	51.700.097	36.926.859
Lewat jatuh tempo		
- 1 bulan - 2 bulan	136.803.981	769.925
- 2 bulan - 3 bulan	7.950.001	28.049.847
- > 3 bulan	-	2.159.660
Jumlah	196.454.079	67.906.291

Manajemen yakin penyisihan penurunan nilai piutang yang dibentuk akan dapat menutupi kerugian akibat tidak tertagihnya piutang di masa mendatang.

7. Persediaan

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Makanan	74.765.087	46.166.905
Minuman	5.460.976	2.500.442
Perlengkapan	86.528.979	152.128.330
Jumlah	166.755.041	200.795.677

Manajemen yakin bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal dan pada tanggal pelaporan tidak terdapat indikasi persediaan yang mengalami penurunan nilai.

8. Perlengkapan hotel

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Perlengkapan Operasional Hotel	90.965.884	-

Jumlah ini merupakan perlengkapan operasional hotel (Linen Room, Food dan Beverage).

9. Uang muka

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Uang muka lisensi	6.965.622	-
Uang muka lainnya	30.164.899	14.081.982
Jumlah	37.130.521	14.081.982

10. Perpajakan

Utang pajak

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Pajak Penghasilan – Pasal 21	74.689.001	64.209.920
Pajak Penghasilan – Pasal 23	-	-
Sangsi dan denda pajak	-	47.710.209
Pajak Pembangunan 1	1.267.030.523	1.373.561.650
Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	6.373.200.000	6.373.200.000
jumlah	7.714.919.524	7.858.681.779

Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) terutang adalah BPHTB transaksi pembelian/balik nama sertifikat lahan untuk hotel pada tahun 2013 yang belum direalisasikan. Jumlah tersebut di atas mungkin berbeda jika pengalihan nama sertifikat tersebut direalisasikan sekarang karena perubahan dasar pengenaan BPHTB (lihat catatan butir 11).

Beban (manfaat) pajak penghasilan

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Kini	-	-
Tangguhan	21.719.994	4.859.742
Jumlah	21.719.994	4.859.742

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak (laba fiskal) dan beban pajak kini untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(1.741.912.781)	(1.888.681.209)
Perbedaan permanen:		
- Beban donasi	-	20.350.000
- Entertainment	-	73.168.375
- Pendapatan yang dikenakan PPh final	1.474.164.000	(1.419.660.000)
- Lainnya	-	-
Jumlah	1.474.164.000	(1.326.141.625)
Perbedaan temporer		
- Penyisihan penurunan nilai piutang	-	151.767
- Cadangan imbalan kerja	-	(22.241.500)
Jumlah	-	(22.089.733)
Laba (rugi) fiskal tahun berjalan	(267.748.781)	(3.236.912.567)
Beban pajak-kini		

Berdasarkan self-assessment system, perusahaan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan.

10. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan

	2024 (Rp)	Dibebankan (dikreditkan) ke laporan laba rugi tahun berjalan (Rp)	2025 (Rp)
Aset pajak tangguhan:			
Penyisihan piutang	5.230.886	(5.230.886)	-
Cadangan imbalan kerja	85.216.120	26.950.880	112.167.000
Jumlah aset pajak tangguhan	90.447.006	21.719.994	112.167.000
Liabilitas pajak tangguhan:			
Selisih lebih beban penyusutan menurut fiskal di atas akuntansi	3.034.899.797	-	3.034.899.797
Jumlah	3.034.899.797	-	3.034.899.797
Beban (benefit) pajak tangguhan			

	2023 (Rp)	Dibebankan (dikreditkan) ke laporan laba rugi tahun berjalan (Rp)	2024 (Rp)
Aset pajak tangguhan:			
Penyisihan piutang	5.197.498	(33.388)	5.230.886
Cadangan imbalan kerja	90.109.250	4.893.130	85.216.120
Jumlah aset pajak tangguhan	95.306.748	4.859.742	90.447.006
Liabilitas pajak tangguhan:			
Selisih lebih beban penyusutan menurut fiskal di atas akuntansi	3.034.899.797	-	3.034.899.797
Jumlah	3.034.899.797	-	3.034.899.797
Beban (benefit) pajak tangguhan		4.859.742	

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmosasi Peraturan Perpajakan, Pasal 11 ayat 6a menyebutkan bahwa apabila bangunan permanen mempunyai masa manfaat melebihi dua puluh tahun, penyusutan bangunan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Oleh karena itu, mulai tahun 2021 tidak terdapat perbedaan beban penyusutan menurut akuntansi dengan fiskal, dengan demikian tidak berdampak pada liabilitas pajak tangguhan.

11. Aset tetap

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2025 dan perubahan selama tahun tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Des. 2025			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan :				
Tanah	55.510.000.000	-	-	55.510.000.000
Bangunan	138.763.151.120	-	-	138.763.151.120
Kendaraan bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
Perlengkapan	11.173.577.957	27.277.437	-	11.200.855.394
Mesin dan elektronik	3.500.663.909	124.389.541	-	3.625.053.450
Jumlah	208.962.967.986	151.666.978	-	209.114.634.964

11. Aset tetap (lanjutan)

Akumulasi Penyusutan :				
Bangunan	33.108.265.662	2.830.603.357		35.938.869.019
Kendaraan bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
Perlengkapan	11.040.860.477	37.278.132		11.078.138.609
Mesin dan elektronik	2.940.074.028	149.476.150	-	3.089.550.178
Jumlah	47.104.775.167	3.017.357.639	-	50.122.132.806
Nilai Buku Bersih	161.858.192.819			158.992.502.158

Sedangkan biaya perolehan, akumulasi penyusutan, nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember2024 dan perubahan selama tahun tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Des. 2024			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan :				
Tanah	55.510.000.000	-	-	55.510.000.000
Bangunan	138.219.198.620	543.952.500		138.763.151.120
Kendaraan bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
Perlengkapan	11.149.586.257	23.991.700		11.173.577.957
Mesin dan elektronik	3.205.065.506	295.598.403	-	3.500.663.909
Jumlah	208.099.425.383	863.542.603	-	208.962.967.986
Akumulasi Penyusutan :				
Bangunan	30.277.662.300	2.830.603.362		33.108.265.662
Kendaraan bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
Perlengkapan	10.990.233.589	50.626.888		11.040.860.477
Mesin dan elektronik	2.768.463.684	171.610.344	-	2.940.074.028
Jumlah	44.051.934.573	3.052.840.594	-	47.104.775.167
Nilai Buku Bersih	164.047.490.810			161.858.192.819

Beban penyusutan yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi adalah sebesar Rp 3.017.357.639 pada tahun 2025 dan Rp 3.052.840.594 pada tahun 2024.

Tanah lokasi berdirinya bangunan hotel seluas 1.708 M2 masih atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, proses balik nama ke perusahaan belum direalisasikan (lihat catatan butir 10).

Gedung dan mesin, diasuransikan terhadap risiko FLEXAS (Fire, Lightning, Explossion, Falling Aircraft, Smoke) pada Bosowa General Insurance dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 110.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

12. Aset tidak berwujud

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Perangkat lunak computer	357.025.685	357.025.685
Akumulasi amortisasi	(357.025.685)	(357.025.685)
Jumlah	-	-

13. Aset tidak lancar lainnya

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Aset - Tax Amnesty		
- Nilai perolehan	2.030.287.800	2.030.287.790
- Akumulasi Penyusutan	(2.030.287.800)	(2.030.287.790)
Jumlah	-	-
Beban ditangguhkan		
- Beban sertifikasi laik fungsi bangunan	3.034.899.797	512.718.030
- Beban perbaikan Gedung	-	408.220.920
- Akumulasi amortisasi	-	(920.938.950)
- Invesment On Project	162.723.320	-
Jumlah	3.197.623.117	-
Jumlah aset tidak lancar lainnya	3.197.623.117	-

14. Utang usaha

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Utang usaha		
- M T F Berkah	-	266.457.590
- Koperasi Garudayaksa Nusantara	-	214.962.400
- Mulia Artha Matra,	174.034.892	-
- Tunggal Jaya	26.600.000	-
- Lain-Lain (di bawah Rp 10.000.000)	148.167.159	357.197.939
Utang Usaha Lainnya	22.943.550	-
Utang Reimbursement	14.734.576	-
Jumlah	386.480.177	838.617.929

Utang usaha merupakan utang yang berasal dari pembelian barang dan jasa. Utang usaha tidak dijamin, tidak dibebani bunga dan penyelesaiannya akan dilakukan secara tunai.

15. Beban akrual

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Listrik	105.245.059	119.540.164
Laundry	13.317.900	2.296.800
Gaji Karyawan	17.160.000	-
Bonus dan THR	57.163.638	96.742.937
Penghargaan kerja karyawan	-	253.025.000
BPJS Ketenagakerjaan	8.683.739	2.931.069
Telepon & Fax	1.234.318	1.079.506
Air	23.856.455	18.220.276
Contact service	9.216.000	-
Makan	3.000.000	11.479.500
Transportasi	21.787.000	6.485.000
Audit	14.000.000	-
Jumlah Pindahan	274.664.109	511.800.252

Jumlah Pindahan	274.664.109	511.800.252
Pengendali Hama	8.000.000	-
Sampah	1.650.000	-
Internet	6.000.000	-
Perangkat Lunak	10.500.000	-
Lain-lain	-	239.681.718
Jumlah	300.814.109	751.481.970

16. Pendapatan sewa diterima dimuka

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Sewa ruangan	204.930.000	614.790.000
Deposit hotel	459.996.836	481.991.198
Jumlah	664.926.836	1.096.781.198

Pendapatan sewa ruangan diterima dimuka merupakan pendapatan sewa terima dimuka dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) berdasarkan surat perjanjian sewa ruangan No. 237/BCS/PKSM/VII-2024 dan Nomor 007/JK/UM/07-2024 untuk jangka waktu 2 tahun, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan 18 Juni 2026 dan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Perjanjian sewa Gedung Kantor nomor 200/273/Sperj-PLA/BPHB-2025 telah melakukan penandatangan sewa gedung kantor penghubung Sumatera Barat untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

17. Utang lain-lain

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Utang biaya service hotel	22.899.406	132.783.062
Lain-lain	126.860.000	61.565.675
Jumlah	149.759.406	194.348.737

18. Cadangan purna bakti Direksi dan Komisaris

Jumlah ini merupakan cadangan purna bakti Direksi dan Komisaris bersaldo Rp 245.100.000 per 31 Desember 2025 dan Rp 137.350.000 per 31 Desember 2024. Perubahan cadangan purna bakti Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Saldo Awal	137.350.000	158.587.500
Penambahan (pengurangan):		
- Beban cadangan purna bakti tahun berjalan	108.000.000	93.100.000
- Pembayaran	(2.500.000)	(114.337.500)
- Koreksi	2.250.000	
Jumlah	245.100.000	137.350.000

19. Liabilitas imbalan pasca kerja

Jumlah ini merupakan penyisihan cadangan imbalan kerja karyawan bersaldo Rp 260.000.000 per 31 Desember 2025 dan Rp 249.996.000 per 31 Desember 2024. Perubahan penyisihan cadangan imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Saldo Awal	249.996.000	251.000.000
Penambahan (pengurangan):		
- Cadangan imbalan kerja tahun berjalan	10.004.000	43.996.000
- Pembayaran		(45.000.000)
Jumlah	260.000.000	249.996.000

20. Modal saham

Modal saham perusahaan dianggarkan sebesar Rp 308.078.000.000 (tiga ratus delapan milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) terbagi atas 184.848 lembar saham seri A, nominal Rp 1.000.000 per lembar dan 123.300.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 164.025.990.000 yang terdiri dari 98.405 lembar saham seri A dan 65.620.990 lembar saham seri B oleh para pemegang saham sebagai berikut:

		2025		
Pemegang Saham	%	Saham Seri A (Lembar)	Saham Seri B (Lembar)	Jumlah (Rp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	79,72%	78.459	52.308.000	130.767.000.000
Pemerintah Kabupaten Pasaman	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Agam	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Pariaman	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Padang Panjang	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Solok	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Sijunjung	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	1,72%	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Padang	0,91%	900	600.000	1.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	0,91%	900	600.000	1.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	0,61%	600	400.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Solok	0,61%	600	400.000	1.000.000.000
PT Dinamika Sumbar Jaya	0,01%	6	4.000	10.000.000
Jumlah	100%	98.405	65.620.990	164.025.990.000

21. Tambahan modal disetor

Jumlah ini merupakan tambahan modal disetor yang berasal dari tambahan aset pengampunan pajak (Tax Amnesty) sebesar Rp 2.030.287.287790. Tambahan aset pengampunan pajak berupa biaya over houl mesin genset dan Fire Alarm System berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Kementerian Keuangan RI Nomor: KET-11831/PP/WPJ.20/2016, tanggal 23 September 2016.

22. Saldo laba (rugi)

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Saldo laba awal tahun	(48.950.538.025)	(47.056.997.075)
Penambahan (pengurangan)		
- Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(1.720.192.787)	(1.893.540.950)
Jumlah	(50.670.730.812)	(48.950.538.025)

23. Pendapatan

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Hotel		
- Pendapatan kamar	1.307.504.672	6.493.604.059
- Pendapatan makan dan minuman	1.473.791.093	7.286.688.958
- Pendapatan hotel lainnya	26.353.350	56.369.645
Jumlah	2.807.649.115	13.836.662.662

23. Pendapatan (lanjutan)

Non Hotel		
- Pendapatan Sharing	859.379.604	-
Pendapatan sewa ruangan :		
- Pendapatan sewa ruangan Bank Nagari	409.860.000	409.860.000
- Pendapatan sewa ruangan BPHB Sumbar	1.064.304.000	1.009.800.000
Jumlah	2.333.543.604	1.419.660.000
Total pendapatan	5.141.192.719	15.256.322.662

Pendapatan utama Perseroan pada bulan Januari s.d September 2025 masih menggunakan skema pendapatan sharing berupa prosentase tertentu dari pendapatan pengelolaan PT. Metropolitan Golden Management (Horison) lihat notes 30 tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pengelolaan Hotel, Sedangkan Pendapatan Oktober s.d Desember 2025 pasca peralihan pengelolaan hotel kembali ke PT BCS, skema pendapatan kembali seperti tahun sebelumnya.

24. Beban pokok penjualan

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Kamar:		
Tenaga kerja langsung	156.954.662	1.137.878.692
Beban overhead:		
- Supplies kamar	60.760.824	515.802.799
- Cetakan dan Alat tulis	2.844.363	27.167.198
- Transportasi	96.000	4.307.500
- Music & entertain	61.447	150.920
- Cable & tv satelit	9.000.000	35.600.000
- Systems support/internet	18.000.000	24.737.136
- Contract service	10.500.000	19.800.000
- Compliment welcome drink	-	14.160.168
- Commission	5.557.641	37.526.509
- Lain-lain (di bawah Rp 10.000.000)	91.107.959	12.914.286
Jumlah beban kamar	354.882.895	1.830.045.208
Makanan dan Minuman:		
Beban Makanan dan Minuman	541.907.737	2.586.946.405
Tenaga kerja langsung	146.282.760	1.014.521.712
Beban overhead:		
- Supplies restaurant	179.075.628	467.714.161
- Sewa peralatan	-	3.117.692
- Contract service	-	12.368.568
- Music & entertain	11.529	9.914.397
- Lain-lain (di bawah Rp 10.000.000)	-	26.329.224
Jumlah makanan dan minuman	867.277.654	4.120.912.159
Jumlah Beban Pokok Penjualan	1.222.160.548	5.950.957.367

25. Pendapatan lain-lain

Jumlah ini merupakan pendapatan lain-lain sebesar Rp 0 pada tahun 2025 dan Rp 4.511.047 pada tahun 2024.

26. Beban pemasaran

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Tenaga kerja langsung	83.504.054	403.645.688
Promosi, komisi dan iklan	3.528.700	366.638.547
Cetakan dan alat tulis	2.250.426	23.809.917
Contract service	-	19.028.568
Transportasi	9.169.300	205.603.600
Entertaint	2.765.892	34.442.057
Lain-lain (di bawah Rp 10.000.000)	5.892.416	16.686.812
Jumlah	107.110.788	1.069.855.189

27. Beban administrasi dan umum

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Beban pegawai	1.089.629.500	3.067.528.358
Beban energi dan telepon	368.313.144	1.610.584.113
Beban imbalan Pasca kerja & cadangan purna bakti direksi dan komisaris	103.250.000	137.096.000
Management / Incentive Fee	2.100.000	181.368.429
Beban konsultan (legal, audit, professional)	71.500.000	184.035.351
Program VHP dan service lainnya	11.228.500	91.424.724
Perbaikan dan pemeliharaan	96.625.701	464.216.507
Penyisihan Kerugin Piutang	-	23.776.756
Lisensi	5.884.862	-
Perjalanan dinas	39.310.000	73.949.171
Asuransi gedung dan kendaraan	53.200.001	84.000.000
Beban Pajak PPH serta Pajak Bumi dan Bangunan	522.243.616	477.565.940
Entertaintment	7.855.151	81.325.136
Cetakan dan alat tulis	7.617.734	42.045.483
Training	3.455.837	-
Pakaian seragam	4.968.000	-
BBM, parkir, dan transportasi	2.603.578	10.398.532
Keamanan dan kebersihan	66.978.000	20.350.000
Lain-lain (di bawah Rp 20.000.000)	79.712.901	152.129.699
Jumlah	2.536.476.525	6.701.794.199

28. Penyusutan dan amortisasi

	31 Des. 2025	31 Des. 2024
Penyusutan aset tetap	3.017.357.639	3.052.840.594
Amortisasi perlengkapan operasional hotel	-	57.990.288
Amortisasi beban ditangguhkan	-	316.077.280
Jumlah	3.017.357.639	3.426.908.162

29. Transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah Kantor Penghubung Pemerintah Provisi Sumatera Barat (pemegang saham pengendali) dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang pemegang saham pengendalinya juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Transaksi dengan kedua entitas tersebut adalah sewa menyewa ruangan.

Sewa yang diakui atas ruangan yang digunakan oleh Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada tahun 2025 masing-masing 1.064.304.000 (2024: Rp 1.009.800.000) dan Rp 409.860.000 (2024: Rp 409.860.000).

Kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada kepada Direksi dan Komisaris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp 709.783.815 (2024:Rp 684.650.000). Sedangkan beban purna bakti Direksi dan Komisaris yang dibebankan pada tahun 2025 sebesar Rp 108.000.000 (2024: Rp 93.100.000).

30. Rugi dan keberlangsungan usaha perusahaan

Perusahaan mengalami kerugian berulang dalam usahanya sampai dengan tahun berjalan. Pada tahun 2025 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 1.741.912.781 dan pada tahun 2024 rugi sebesar Rp 1.893.540.950, sehingga saldo rugi komulatif per 31 Desember 2025 berjumlah Rp 50.692.450.906 atau 31% dari modal disetor, dan per 31 Desember 2024 bersaldo 48.950.538.025 atau 29% dari modal disetor pada tanggal tersebut. Selain itu, total liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2025 berjumlah Rp 9.216.900.052 telah melebihi total aset lancar yang berjumlah Rp 2.205.033.923 yakni sebesar Rp.7.011.866.129, yang dapat berdampak pada kemampuan perusahaan membayar utang-utang jangka pendeknya pada tanggal jatuh tempo.

30. Rugi dan keberlangsungan usaha perusahaan (lanjutan)

Kerjasama Operasi (KSO) Pengelolaan Hotel

Untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan pada tanggal 26 September 2024 perusahaan dan PT Metropolitan Golden Management (Horison Grup) mengadakan perjanjian kerjasama operasi pengelolaan operasional hotel dengan Merk 'Horison Balairung Jakarta'. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 10 tahun dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

Berdasarkan perjanjian Kerjasama, Perusahaan menyerahkan aset berupa Gedung Hotel berserta isinya kecuali ruang kantor dan meeting Perusahaan yang berada di lantai 4 dan ruang kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang berada di lantai 4 dan ruang kantor Bank Nagari yang berada di lantai 1 dan 2. PT Metropolitan Golden Management meyetujui untuk melakukan pembiayaan berupa perbaikan, penggantian dan penambahan sesuai dengan standar produk dan fasilitas hotel yang dikelola oleh Grup Horison sebesar Rp 10.000.000.000 dan memberikan kontribusi sebesar persentase tertentu dari pendapatan dengan perhitungan sebagai berikut:

	Estimasi revenue hotel per tahun (Rp)	Estiamasi Sharing revenue hotel per tahun		Estiamasi Sharing revenue hotel	Nilai garansi /bulan(Rp)
1	16.384.108.639	11,0%	1.802.251.950	150.187.663	100.000.000
2	18.192.968.600	11,5%	2.092.191.389	174.349.282	110.000.000
3	19.570.879.051	13,0%	2.544.214.277	212.017.856	120.000.000
4	20.813.319.309	14,5%	3.017.931.300	251.494.275	130.000.000
5	22.084.179.120	15,0%	3.312.626.868	276.052.239	140.000.000
6	23.434.560.893	15,5%	3.632.356.938	302.696.412	150.000.000
7	24.482.700.594	15,5%	3.794.818.592	316.234.883	160.000.000
8	25.933.468.118	15,5%	4.019.687.558	334.973.963	170.000.000
9	27.303.413.261	15,5%	4.232.029.055	352.669.088	180.000.000
#	29.052.979.348	16,0%	4.648.476.696	387.373.058	190.000.000
	227.252.576.933		33.096.584.623		

Aset lancar berupa persediaan makanan, minuman dan perlengkapan termasuk karyawan terhitung tanggal 1 Januari 2025 telah dialihkan kepada manajemen baru hotel (PT Metropolitan Golden Management). Dengan kerjasama operasi ini, semua biaya operasional hotel menjadi beban PT Metropolitan Grup Management, kecuali biaya asuransi dan PBB gedung yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

Berdasarkan hasil evaluasi, manajemen telah melakukan telah melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap kelangsungan kerjasama antara PT Balairung Citrajaya Sumbar (PT BCS) dan PT Metropolitan Golden Management (PT MGM) dengan tindakan prosedural sesuai dengan PKS yakni pemberian SP 1 dengan nomor surat 022/BCS/DIR/VI-2024 pada tanggal 26 Juni 2025, SP 2 dengan nomor surat 027/BCS/DIR/VII-2025 tanggal 25 Juli 2025 serta merujuk surat PT BCS no 028/BCS/DIR/VIII-2025 tanggal 1 Agustus 2025 terkait target investasi yang di sampaikan, bahwa PT MGM tidak dapat memenuhi target sesuai dengan yang sudah ditetapkan, dengan hasil evaluasi yang sudah dilakukan maka PT BCS kembali menyampaikan SP3 sekaligus pengakhiran perjanjian dengan no surat 031/BCS/DIR/IX-2025 tanggal 1 September 2025. Per 1 oktober 2025 manajemen PT BCS secara resmi mengambil kembali pengelolaan Hotel.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Perseroan, Manajemen telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk tahun 2026 dengan menargetkan Pendapatan sebesar Rp 14.389.328.259 dengan target laba bersih sebesar Rp. 369.401.259. Manajemen cukup optimis dapat merealisasikan target tersebut dan mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan

31. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal

Perusahaan memiliki risiko keuangan yang timbul dari operasi yang dilakukannya. Kebijakan manajemen risiko keuangan ditetapkan terutama untuk meyakini bahwa sumber daya yang memadai tersedia bagi pengembangan bisnis Perusahaan serta untuk mengelola risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan menjalankan operasinya berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi untuk meyakini efektivitas proses manajemen risiko.

31. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)

Perusahaan tidak melakukan transaksi perdagangan aset keuangan untuk tujuan spekulatif, karena itu Perusahaan tidak menerapkan akuntansi lindung nilai. Perusahaan juga tidak melakukan kegiatan investasi sekuritas, baik dalam bentuk saham, surat utang dan reksadana. Karena itu tidak ada risiko yang terekspos berkaitan dengan aset keuangan dalam bentuk sekuritas.

Risiko keuangan utama yang dihadapi oleh Perusahaan dan kebijakan yang terkait dengan aktivitas keuangan Perusahaan diuraikan di bawah ini.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang dialami Perusahaan jika pelanggan gagal memenuhi liabilitasnya.

Perusahaan menghadapi risiko kredit yang berasal dari piutang kepada pelanggan, namun demikian Perusahaan memiliki kebijakan piutang yang memastikan bahwa penjualan jasa dilakukan hanya kepada pelanggan yang dapat dipercaya, dan risiko piutang dipantau secara berkesinambungan.

Risiko kredit (piutang) dikendalikan melalui penerapan prosedur persetujuan kredit, pembatasan jumlah kredit dan aktivitas pemantauan. Perusahaan tidak meminta jaminan untuk piutang yang diberikan. Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit yang berasal dari piutang adalah sebatas nilai tercatat piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo akibat tidak tersedianya dana. Perusahaan mengelola eksposurnya terhadap likuiditas agar dapat membiayai pengeluaran untuk barang modal dan aktivitas operasinya serta melunasi liabilitas pada saat jatuh tempo dengan memelihara tingkat saldo kas dan bank yang memadai (catatan 5). Serta mengatur kontrak-kontrak pembelian dengan pembayaran yang memungkinkan perusahaan dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko likuiditas berasal dari utang usaha dan utang lain-lain, dan biaya masih harus dibayar sejumlah nilai tercatatnya.

Risiko Likuiditas

Perusahaan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang saham. Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan. Namun karena Perusahaan mengalami kerugian yang berulang, perusahaan dihadapkan pada risiko penyediaan modal untuk reinvestasi jika tidak terdapat penambahan setoran modal dari pemegang saham.

32 Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi keuangan ("PSAK") dan Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar baru dan amendemen standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, yang relevan dengan perusahaan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan pengungkapan kebijakan akuntansi
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

33 Tanggung jawab dan tanggal penyelesaian laporan keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 23 merupakan tanggung jawab Direksi, dan telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 16 April 2026.

PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Jl. Matraman Raya No. 19, Jakarta 13410, Indonesia
Telepon: (021) 2936 1010 - 8591 7217

IKHTISAR LAPORAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM

TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
TAHUN ANGGARAN 2025

Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	**PENDAPATAN**			
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**894.527.417,56**	**285.771.283,56**	**608.756.134,00**
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	97.555.402,56	60.699.133,56	36.856.269,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	157.728.300,00	137.242.450,00	20.485.850,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	596.138.715,00	55.052.000,00	541.086.715,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	43.105.000,00	32.777.700,00	10.327.300,00
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**196.892.529.690,00**	**194.471.088.940,00**	**2.421.440.750,00**
1.2.1.	Dana Desa	100.939.408.000,00	98.028.894.550,00	2.910.513.450,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	8.001.451.617,00	9.648.433.652,00	(1.646.982.035,00)
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	87.951.670.073,00	86.793.760.738,00	1.157.909.335,00
1.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**1.854.140.517,06**	**1.111.374.167,09**	**742.766.349,97**
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	32.491.800,00	14.201.800,00	18.290.000,00
1.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Keti	24.454.400,00	40.734.000,00	(16.279.600,00)
1.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	42.845.500,00	21.845.500,00	21.000.000,00
1.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	618.770.556,88	258.859.947,88	359.910.609,00
1.3.6.	Bunga Bank	450.247.166,18	648.363.366,21	(198.116.200,03)
1.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	685.331.094,00	127.369.553,00	557.961.541,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**199.641.197.624,62**	**195.868.234.390,65**	**3.772.963.233,97**
2.	**BELANJA**			
2.1.	**Belanja Pegawai**	**48.831.436.600,56**	**48.097.666.299,97**	**733.770.300,59**
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	4.777.945.000,00	4.741.456.040,00	36.488.960,00
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	36.735.560.440,00	36.106.800.025,44	628.760.414,56
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.026.291.160,56	1.988.820.234,53	37.470.926,03
2.1.4.	Tunjangan BPD	5.291.640.000,00	5.260.590.000,00	31.050.000,00
2.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**78.720.436.652,79**	**62.255.653.364,60**	**16.464.783.288,19**
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.572.816.249,71	15.946.501.648,67	4.626.314.601,04
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.652.334.602,10	24.418.910.048,93	3.233.424.553,17
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	6.263.144.340,00	3.460.580.259,00	2.802.564.081,00
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	842.522.582,70	644.307.840,00	198.214.742,70
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	11.477.308.731,32	8.481.680.683,00	2.995.628.048,32
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.636.275.999,73	1.210.457.181,00	425.818.818,73
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	10.276.034.147,23	8.093.215.704,00	2.182.818.443,23
2.3.	**Belanja Modal**	**62.566.432.304,62**	**55.018.815.797,94**	**7.547.616.506,68**
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	92.823.623,00	0,00	92.823.623,00
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	5.646.379.224,01	4.499.754.253,00	1.146.624.971,01
2.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	699.876.913,92	614.486.000,00	85.390.913,92
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	18.223.743.655,61	15.804.536.900,13	2.419.206.755,48
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	23.453.503,324,71	21.211.972.832,65	2.241.530.492,06
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	1.173.011.752,15	1.142.058.799,00	30.952.953,15

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	11.743.726.261,49	10.441.935.051,16	1.301.791.210,33
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	792.983.748,69	644.666.678,00	148.317.070,69
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	740.383.801,04	659.405.284,00	80.978.517,04
2.4.	**Belanja Tidak Terduga**	**16.893.023.779,11**	**15.029.963.462,00**	**1.863.060.317,11**
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	16.893.023.779,11	15.029.963.462,00	1.863.060.317,11
	JUMLAH BELANJA	**207.011.329.337,08**	**180.402.098.924,51**	**26.609.230.412,57**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(7.370.131.712,46)**	**15.466.135.466,14**	**22.836.267.178,60**
3.	**PEMBIAYAAN**			
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**14.265.282.923,43**	**14.255.533.303,72**	**9.749.619,71**
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.265.282.923,43	14.255.533.303,72	9.749.619,71
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**6.822.601.232,97**	**5.665.637.306,00**	**1.156.963.926,97**
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	6.821.712.432,97	5.665.637.306,00	1.156.075.126,97
3.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	888.800,00	0,00	888.800,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**7.442.681.690,46**	**8.589.895.997,72**	**(1.147.214.307,26)**
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**72.549.978,00**	**24.056.031.463,86**	**(23.983.481,485,86)**

Lubuk Basung, 06 Februari 2026

BUPATI AGAM

BENNI WARLIS

LAPORAN REKAPITULASI

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : **13 PROVINSI SUMATERA BARAT**

KABUPATEN/KOTA : **13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01	**KECAMATAN TANJUNG MUTIARA**		278.283.454	546.460.298	299.150.595	163.112.175	20.867.141	20.867.141	0	0	0	404.215.264
01.2001.	PEMERINTAH NAGARI TIKU SELATAN	4	59.620.997	120.563.714	59.620.997	49.800.775	0	0	0	0	0	70.762.939
01.2002.	PEMERINTAH NAGARI TIKU UTARA	4	44.181.635	86.998.809	45.425.212	19.279.100	1.243.577	1.243.577	0	0	0	68.963.286
01.2003.	PEMERINTAH NAGARI TIKU LIMO JORONG	4	131.672.571	256.712.105	151.296.135	61.939.000	19.623.564	19.623.564	0	0	0	214.396.669
01.2004.	PEMERINTAH NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALA	5	42.808.251	82.185.670	42.808.251	32.093.300	0	0	0	0	0	50.092.370
02	**KECAMATAN LUBUK BASUNG**		875.717.155	918.794.696	885.695.903	513.393.840	9.978.748	9.978.748	0	0	0	415.079.604
02.2001.	PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG	5	361.452.155	361.452.155	370.824.445	279.515.250	9.372.290	9.372.290	0	0	0	91.309.195
02.2002.	PEMERINTAH NAGARI GARAGAHAN	5	45.818.640	91.691.281	45.818.640	27.888.400	0	0	0	0	0	63.802.881
02.2003.	PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG PINANG	5	86.861.917	86.861.917	86.863.574	58.452.690	1.657	1.657	0	0	0	28.410.884
02.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG TANGAH	5	82.822.610	82.822.610	82.873.035	30.646.750	50.425	50.425	0	0	0	52.226.285
02.2005.	PEMERINTAH NAGARI MANGGOPOH	5	298.761.833	295.966.733	299.316.209	117.190.750	554.376	554.376	0	0	0	179.330.359
03	**KECAMATAN TANJUNG RAYA**		829.503.567	957.262.638	851.879.194	607.230.868	22.375.627	22.375.627	0	0	0	372.407.397
03.2001.	PEMERINTAH NAGARI TANJUNG SANI	5	66.975.553	114.449.573	72.241.904	66.469.059	5.266.351	5.266.351	0	0	0	53.246.865
03.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI BATANG	5	86.183.471	86.183.471	86.250.731	81.335.486	67.260	67.260	0	0	0	4.915.245
03.2003.	PEMERINTAH NAGARI MANINJAU	5	84.459.948	84.459.948	99.907.917	22.274.600	15.447.969	15.447.969	0	0	0	77.633.317
03.2004.	PEMERINTAH NAGARI BAYUA	5	85.021.620	86.865.478	85.970.841	39.013.450	949.221	949.221	0	0	0	48.801.249
03.2006.	PEMERINTAH NAGARI KOTO KACIAK	5	81.372.279	81.372.279	81.378.136	67.380.994	5.857	5.857	0	0	0	13.997.142
03.2007.	PEMERINTAH NAGARI DUO KOTO	5	78.673.953	78.673.953	79.105.185	66.625.750	431.232	431.232	0	0	0	12.479.435
03.2008.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO	5	76.044.282	76.044.282	76.044.282	42.647.500	0	0	0	0	0	33.396.782
03.2009.	PEMERINTAH NAGARI KOTO MALINTANG	5	116.907.945	116.907.945	116.907.945	81.967.300	0	0	0	0	0	35.040.645
03.2010.	PEMERINTAH NAGARI PANINJAUAN	5	70.577.334	70.577.334	70.785.071	68.028.500	207.737	207.737	0	0	0	2.756.571
03.2011.	PEMERINTAH NAGARI DALKO	5	83.287.182	161.728.375	83.287.182	71.588.229	0	0	0	0	0	90.140.146
04	**KECAMATAN MATUR**		322.893.895	482.677.887	336.158.366	207.127.508	13.264.471	13.264.471	0	0	0	288.814.850
04.2001.	PEMERINTAH NAGARI MATUA HILIA	4	40.453.984	80.315.467	53.494.030	19.292.814	13.040.046	13.040.046	0	0	0	74.062.699
04.2002.	PEMERINTAH NAGARI MATUA MUDIAK	5	37.391.219	79.521.096	37.391.219	22.715.200	0	0	0	0	0	56.805.896

PROVINSI : 13 PROVNSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
04.2003.	PEMERINTAH NAGARI TIGO BALAI	4	42.178.507	85.684.711	42.208.645	31.522.338	30.138	30.138	0	0	0	54.192.511
04.2004.	PEMERINTAH NAGARI LAWANG	5	94.996.708	94.996.708	94.996.708	82.298.875	0	0	0	0	0	12.697.833
04.2005.	PEMERINTAH NAGARI PARIK PANJANG	5	34.469.716	68.756.144	34.470.113	31.313.281	397	397	0	0	0	37.443.260
04.2006.	PEMERINTAH NAGARI PANTA PAUAH	5	73.403.761	73.403.761	73.597.651	19.985.000	193.890	193.890	0	0	0	53.612.651
05	KECAMATAN IV KOTO		468.751.013	585.351.275	491.644.272	270.504.099	22.893.259	22.893.259	0	0	0	337.740.435
05.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI LANDIA	5	82.032.500	79.345.563	82.131.084	15.426.584	98.584	98.584	0	0	0	64.017.563
05.2003.	PEMERINTAH NAGARI BALINGKA	5	45.799.329	92.475.422	47.105.484	31.931.400	1.306.155	1.306.155	0	0	0	61.850.177
05.2004.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TUO	5	89.967.826	88.185.216	93.204.593	75.563.115	3.236.767	3.236.767	0	0	0	15.858.868
05.2005.	PEMERINTAH NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO	4	43.586.158	87.312.244	43.586.761	12.012.000	603	603	0	0	0	75.300.847
05.2006.	PEMERINTAH NAGARI KOTO PANJANG	4	51.028.176	81.695.806	69.279.326	27.747.450	18.251.150	18.251.150	0	0	0	72.199.506
05.2007.	PEMERINTAH NAGARI SIANOK ANAM SUKU	4	73.634.817	73.634.817	73.634.817	42.179.150	0	0	0	0	0	31.455.667
05.2008.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG	4	82.702.207	82.702.207	82.702.207	65.644.400	0	0	0	0	0	17.057.807
06	KECAMATAN BANUHAMPU		609.353.566	803.308.815	614.431.453	461.387.403	5.077.887	5.077.887	0	0	0	346.999.299
06.2001.	PEMERINTAH NAGARI PADANG LUA	4	57.972.865	117.193.814	58.645.018	29.106.250	672.153	672.153	0	0	0	88.759.717
06.2002.	PEMERINTAH NAGARI TALUAK AMPEK SUKU	4	136.743.232	136.743.232	136.743.232	97.702.946	0	0	0	0	0	39.040.286
06.2003.	PEMERINTAH NAGARI PAKAN SINAYAN	4	49.072.838	98.644.991	49.497.243	29.646.600	424.405	424.405	0	0	0	69.422.796
06.2004.	PEMERINTAH NAGARI KUBANG PUTIAH	4	93.474.812	93.862.431	95.316.100	94.791.000	1.841.288	1.841.288	0	0	0	912.719
06.2005.	PEMERINTAH NAGARI LADANG LAWEH	4	92.426.341	177.200.869	92.482.907	61.418.830	56.566	56.566	0	0	0	115.838.605
06.2006.	PEMERINTAH NAGARI CINGKARIANG	5	97.107.695	97.107.695	97.145.399	93.580.627	37.704	37.704	0	0	0	3.564.772
06.2007.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI TANANG	5	82.555.783	82.555.783	84.601.554	55.141.150	2.045.771	2.045.771	0	0	0	29.460.404
07	KECAMATAN AMPEK ANGKEK	4	539.346.339	760.351.832	566.329.356	310.462.906	27.094.769	27.094.769	111.752	0	0	476.983.695
07.2001.	PEMERINTAH NAGARI BATU TABA	4	47.662.524	98.245.139	47.663.543	39.822.200	1.019	1.019	0	0	0	58.423.958
07.2002.	PEMERINTAH NAGARI BIARO GADANG	4	67.540.035	133.829.341	69.263.316	51.783.875	1.723.281	1.723.281	0	0	0	83.768.747
07.2003.	PEMERINTAH NAGARI LAMBAH	4	61.369.555	113.888.839	61.964.553	38.464.500	594.998	594.998	0	0	0	76.019.337
07.2004.	PEMERINTAH NAGARI PANAMPUANG	4	64.650.485	114.385.498	67.882.818	21.725.950	3.232.333	3.232.333	0	0	0	95.891.881
07.2005.	PEMERINTAH NAGARI AMPANG GADANG	5	118.502.422	120.381.697	123.502.422	56.012.540	5.111.752	5.111.752	111.752	0	0	69.480.909
07.2006.	PEMERINTAH NAGARI PASIA	5	83.415.545	83.415.545	97.512.863	11.888.000	14.097.318	14.097.318	0	0	0	85.624.863
07.2008.	PEMERINTAH NAGARI BALAI GURAH	4	96.205.773	96.205.773	98.539.841	90.765.841	2.334.068	2.334.068	0	0	0	7.774.000
08	KECAMATAN BASO		478.526.762	693.001.394	479.768.955	278.894.899	1.242.193	1.242.193	0	0	0	415.348.688
08.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TINGGI	4	48.131.558	83.496.604	48.329.788	41.747.990	198.230	198.230	0	0	0	41.946.844
08.2002.	PEMERINTAH NAGARI TABEK PANJANG	5	99.550.256	99.550.256	99.917.164	48.150.000	366.908	366.908	0	0	0	51.767.164
08.2004.	PEMERINTAH NAGARI SIMARASOK	5	47.451.921	97.885.422	47.483.719	7.770.050	31.798	31.798	0	0	0	90.147.170

PROVINSI : 13 PROVNSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.08 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
08.2005.	PEMERINTAH NAGARI PADANG TAROK	5	34.993.868	80.367.287	35.633.484	14.625.202	639.616	639.616	0	0	0	66.381.701
08.2006.	PEMERINTAH NAGARI SALO	5	79.573.028	79.573.028	79.573.028	45.351.600	0	0	0	0	0	34.221.428
08.2007.	PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU	4	39.206.526	78.728.482	39.212.167	23.616.000	5.641	5.641	0	0	0	55.118.123
08.2008.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI CUBADAK	4	45.274.089	89.054.799	45.274.089	36.316.850	0	0	0	0	0	52.737.949
08.2009.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG	5	84.345.516	84.345.516	84.345.516	61.317.207	0	0	0	0	0	23.028.309
09	KECAMATAN TILATANG KAMANG		510.268.840	539.208.667	511.993.135	244.413.122	1.724.295	1.724.295	0	0	0	296.519.840
09.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TANGAH	4	211.962.730	208.783.466	212.312.355	76.167.000	349.625	349.625	0	0	0	132.966.091
09.2003.	PEMERINTAH NAGARI GADUT	5	224.997.974	224.997.974	226.351.096	115.737.350	1.353.122	1.353.122	0	0	0	110.613.746
09.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAPAU	4	73.308.136	105.427.227	73.329.684	52.508.772	21.548	21.548	0	0	0	52.940.003
10	KECAMATAN PALUPUH		482.323.730	481.221.277	484.789.639	333.283.479	2.465.909	2.465.909	0	0	0	150.403.707
10.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO RANTANG	5	95.301.700	95.301.700	96.874.979	89.300.542	1.573.279	1.573.279	0	0	0	7.574.437
10.2002.	PEMERINTAH NAGARI PASIA LAWEH	5	99.453.131	99.453.131	99.453.131	98.258.397	0	0	0	0	0	1.194.734
10.2003.	PEMERINTAH NAGARI PAGADIH	5	84.345.392	83.242.939	85.226.940	42.172.640	881.548	881.548	0	0	0	41.951.847
10.2004.	PEMERINTAH NAGARI NAN TUJUAH	5	97.281.786	97.281.786	97.292.868	11.621.150	11.082	11.082	0	0	0	85.671.718
10.2005.	PEMERINTAH NAGARI NAN LIMO	5	105.941.721	105.941.721	105.941.721	91.930.750	0	0	0	0	0	14.010.971
11	KECAMATAN PALEMBAYAN		879.839.368	1.054.377.800	886.966.979	407.179.185	7.127.611	7.127.611	0	0	0	654.326.226
11.2001.	PEMERINTAH NAGARI BARINGIN	4	45.047.426	86.422.954	45.069.829	11.691.370	22.403	22.403	0	0	0	74.753.987
11.2002.	PEMERINTAH NAGARI SIPINANG	4	39.964.805	81.115.683	43.324.070	22.521.500	3.359.265	3.359.265	0	0	0	61.953.448
11.2003.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUAR	5	89.789.556	89.789.556	91.231.083	51.543.400	1.441.527	1.441.527	0	0	0	39.687.683
11.2004.	PEMERINTAH NAGARI AMPEK KOTO PALEMBAYAN	4	44.910.868	88.272.946	47.057.655	37.637.150	2.146.787	2.146.787	0	0	0	52.782.583
11.2005.	PEMERINTAH NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG	5	62.218.634	115.022.508	62.645.335	38.625.375	426.701	426.701	0	0	0	76.823.834
11.2006.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA	5	90.634.946	86.461.020	90.365.874	34.301.500	(269.072)	(269.072)	0	0	0	51.910.448
11.2007.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA TIMUR	5	82.044.627	82.044.627	82.044.627	69.353.200	0	0	0	0	0	12.691.427
11.2008.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA UTARA	5	130.361.386	130.361.386	130.361.386	85.233.290	0	0	0	0	0	45.128.096
11.2009.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA BARAT	5	294.867.120	294.867.120	294.867.120	56.272.400	0	0	0	0	0	238.594.720
12	KECAMATAN SUNGAI PUA		368.171.414	403.554.489	368.887.462	284.375.957	716.048	716.048	0	0	0	119.894.580
12.2001.	PEMERINTAH NAGARI PADANG LAWEH	4	36.395.396	71.778.471	36.474.838	33.584.000	79.442	79.442	0	0	0	38.273.913
12.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA	5	98.150.075	98.150.075	98.164.725	91.246.457	14.650	14.650	0	0	0	6.918.268
12.2003.	PEMERINTAH NAGARI BATAGAK	5	86.463.060	86.463.060	86.494.792	79.883.570	31.732	31.732	0	0	0	6.611.222
12.2004.	PEMERINTAH NAGARI BATU PALANO	5	71.793.605	71.793.605	72.383.829	50.531.000	590.224	590.224	0	0	0	21.852.829
12.2005.	PEMERINTAH NAGARI SARIAK	4	75.369.278	75.369.278	75.369.278	28.130.930	0	0	0	0	0	46.238.348
13	KECAMATAN AMPEK NAGARI		409.366.413	407.196.607	410.275.885	253.742.053	909.472	909.472	0	0	0	154.364.026

PROVINSI : 13 PROVNSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
13.2001.	PEMERINTAH NAGARI BATU KAMBING	5	93.730.774	93.730.774	93.738.857	51.743.000	8.083	8.083	0	0	0	41.995.857
13.2002.	PEMERINTAH NAGARI SITALANG	5	82.742.262	80.572.456	83.436.356	67.304.553	694.094	694.094	0	0	0	13.961.997
13.2003.	PEMERINTAH NAGARI BAWAN	5	154.033.060	154.033.060	154.228.717	84.358.000	195.657	195.657	0	0	0	69.870.717
13.2004.	PEMERINTAH NAGARI SITANANG	5	78.860.317	78.860.317	78.871.955	50.336.500	11.638	11.638	0	0	0	28.535.455
14	KECAMATAN CANDUNG		239.490.182	306.050.058	241.643.996	141.854.030	2.153.814	2.153.814	0	0	0	166.349.842
14.2001.	PEMERINTAH NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH	4	55.430.746	121.990.622	55.437.561	40.812.580	6.815	6.815	0	0	0	81.184.857
14.2002.	PEMERINTAH NAGARI LASI	5	90.392.745	90.392.745	90.392.745	41.450.450	0	0	0	0	0	48.942.295
14.2003.	PEMERINTAH NAGARI BUKIK BATABUAH	5	93.666.691	93.666.691	95.813.690	59.591.000	2.146.999	2.146.999	0	0	0	36.222.690
15	KECAMATAN KAMANG MAGEK		405.917.242	405.917.242	406.095.430	212.848.250	178.188	178.188	0	0	0	193.247.180
15.2001.	PEMERINTAH NAGARI MAGEK	5	82.261.072	82.261.072	82.439.260	28.889.200	178.188	178.188	0	0	0	53.550.060
15.2002.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA	5	89.230.066	89.230.066	89.230.066	87.120.675	0	0	0	0	0	2.109.391
15.2003.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG MUDIAK	5	82.599.207	82.599.207	82.599.207	40.364.400	0	0	0	0	0	42.234.807
15.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG TANGAH ANAM SU	5	75.069.134	75.069.134	75.069.134	27.651.350	0	0	0	0	0	47.417.784
15.2005.	PEMERINTAH NAGARI PAUH KAMANG MUDIAK	4	76.757.763	76.757.763	76.757.763	28.822.625	0	0	0	0	0	47.935.138
16	KECAMATAN MALALAK		303.698.677	303.698.677	305.752.845	209.227.184	2.054.168	2.054.168	0	0	0	96.525.661
16.2001.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK UTARA	5	72.245.691	72.245.691	72.458.363	57.401.054	212.672	212.672	0	0	0	15.057.309
16.2002.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK TIMUR	5	76.712.831	76.712.831	78.531.159	43.363.250	1.818.328	1.818.328	0	0	0	35.167.909
16.2003.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK SELATAN	5	80.274.231	80.274.231	80.297.399	44.916.500	23.168	23.168	0	0	0	35.380.899
16.2004.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK BARAT	5	74.465.924	74.465.924	74.465.924	63.546.380	0	0	0	0	0	10.919.544
	JUMLAH		8.001.451.617	9.648.433.652	8.141.463.465	4.899.336.958	140.123.600	140.123.600	111.752	0	0	4.889.220.294

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Lubuk Basung, 06 Februari 2026

BUPATI AGAM

BENNY WARLIS

LAPORAN REKAPITULASI

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : **13 PROVNSI SUMATERA BARAT**

KABUPATEN/KOTA : **13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01	**KECAMATAN TANJUNG MUTIARA**		5.642.622.000	5.642.622.000	4.896.744.313	4.536.672.357	490.011.087	490.011.087	1.235.888.775	1.235.888.774	0	360.071.956
01.2001.	PEMERINTAH NAGARI TIKU SELATAN	4	1.686.702.000	1.686.702.000	1.395.858.595	1.322.320.014	109.156.595	109.156.595	400.000.000	400.000.000	0	73.538.581
01.2002.	PEMERINTAH NAGARI TIKU UTARA	4	1.270.768.000	1.270.768.000	1.278.781.352	1.167.725.401	158.013.352	158.013.352	150.000.000	150.000.000	0	111.055.951
01.2003.	PEMERINTAH NAGARI TIKU LIMO JORONG	4	1.630.761.000	1.630.761.000	1.339.804.261	1.226.217.285	136.311.711	136.311.711	427.268.450	427.268.450	0	113.586.976
01.2004.	PEMERINTAH NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALA	5	1.054.391.000	1.054.391.000	882.300.104	820.409.657	86.529.429	86.529.429	258.620.325	258.620.324	0	61.890.448
02	**KECAMATAN LUBUK BASUNG**		8.879.188.000	8.220.607.704	8.464.421.999	7.415.288.288	1.022.378.483	1.022.378.483	1.437.144.485	1.268.606.006	0	559.091.893
02.2001.	PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG	5	2.731.395.000	2.072.814.704	2.315.838.555	1.596.649.885	244.443.555	244.443.555	660.000.000	660.000.000	0	60.608.374
02.2002.	PEMERINTAH NAGARI GARAGAHAN	5	1.216.462.000	1.216.462.000	1.074.508.897	1.015.067.603	26.583.376	26.583.376	168.538.479	0	0	227.977.773
02.2003.	PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG PINANG	5	1.227.179.000	1.227.179.000	1.257.063.581	1.141.820.760	79.884.581	79.884.581	50.000.000	50.000.000	0	115.242.821
02.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG TANGAH	5	1.175.143.000	1.175.143.000	902.771.703	820.096.219	137.628.703	137.628.703	410.000.000	410.000.000	0	82.675.484
02.2005.	PEMERINTAH NAGARI MANGGOPOH	5	2.529.009.000	2.529.009.000	2.914.241.263	2.841.653.821	533.838.269	533.838.269	148.606.006	148.606.006	0	72.587.442
03	**KECAMATAN TANJUNG RAYA**		9.966.513.000	9.192.161.556	10.185.259.371	8.080.483.729	727.249.314	727.249.314	508.502.943	409.400.000	0	1.429.527.141
03.2001.	PEMERINTAH NAGARI TANJUNG SANI	5	1.196.959.000	1.196.959.000	1.297.918.488	859.661.515	100.959.488	100.959.488	0	0	0	438.256.973
03.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI BATANG	5	1.031.030.000	903.962.600	1.072.022.616	860.077.895	40.992.616	40.992.616	0	0	0	84.897.321
03.2003.	PEMERINTAH NAGARI MANINJAU	5	908.126.000	886.130.820	1.077.096.054	830.421.825	168.970.054	168.970.054	0	0	0	224.679.049
03.2004.	PEMERINTAH NAGARI BAYUA	5	1.115.713.000	1.016.530.540	1.155.893.743	1.011.144.577	40.180.743	40.180.743	0	0	0	45.566.706
03.2006.	PEMERINTAH NAGARI KOTO KACIAK	5	1.186.655.000	1.186.655.000	1.125.637.807	1.003.070.392	68.385.750	68.385.750	129.402.943	129.400.000	0	122.570.358
03.2007.	PEMERINTAH NAGARI DUO KOTO	5	1.140.005.000	1.140.005.000	906.014.580	798.837.830	46.009.580	46.009.580	280.000.000	280.000.000	0	107.176.750
03.2008.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO	5	792.558.000	792.558.000	898.940.790	749.380.051	106.382.790	106.382.790	0	0	0	149.560.739
03.2009.	PEMERINTAH NAGARI KOTO MALINTANG	5	960.440.000	960.440.000	934.224.773	876.837.225	18.784.773	18.784.773	45.000.000	0	0	102.387.548
03.2010.	PEMERINTAH NAGARI PANINJAUAN	5	783.825.000	517.600.296	852.836.000	577.543.630	74.011.000	74.011.000	5.000.000	0	0	14.067.666
03.2011.	PEMERINTAH NAGARI DALKO	5	851.202.000	591.300.300	864.674.520	513.508.789	62.572.520	62.572.520	49.100.000	0	0	140.364.031
04	**KECAMATAN MATUR**		5.384.766.000	5.384.766.000	5.579.968.450	4.944.124.176	268.202.450	268.202.450	73.000.000	73.000.000	0	635.844.274
04.2001.	PEMERINTAH NAGARI MATUA HILIA	4	898.949.000	898.949.000	957.642.472	877.421.986	58.693.472	58.693.472	0	0	0	80.220.486
04.2002.	PEMERINTAH NAGARI MATUA MUDIAK	5	1.166.566.000	1.166.566.000	1.256.023.821	1.173.676.076	89.457.821	89.457.821	0	0	0	82.347.745

PROVINSI : 13 PROVNSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
04.2003.	PEMERINTAH NAGARI TIGO BALAI	4	918.743.000	918.743.000	968.225.167	829.349.017	49.482.167	49.482.167	0	0	0	138.8[illegible]6.150
04.2004.	PEMERINTAH NAGARI LAWANG	5	936.749.000	936.749.000	892.566.281	873.926.644	28.817.281	28.817.281	73.000.000	73.000.000	0	18.639.637
04.2005.	PEMERINTAH NAGARI PARIK PANJANG	5	653.300.000	653.300.000	674.059.839	554.830.634	20.759.839	20.759.839	0	0	0	119.229.205
04.2006.	PEMERINTAH NAGARI PANTA PAUAH	5	810.459.000	810.459.000	831.450.870	634.919.819	20.991.870	20.991.870	0	0	0	196.531.051
05	KECAMATAN IV KOTO		7.195.801.000	6.402.283.020	7.461.481.393	5.997.295.037	625.934.188	625.934.188	306.703.817	160.000.000	53.549.978	870.922.171
05.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI LANDIA	5	806.307.000	806.307.000	787.436.849	770.115.660	49.266.738	49.266.738	68.136.889	0	0	85.458.078
05.2003.	PEMERINTAH NAGARI BALINGKA	5	1.572.193.000	1.329.159.432	1.581.336.484	1.228.644.530	87.710.422	87.710.422	78.566.928	0	0	188.225.324
05.2004.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TUO	5	999.083.000	808.417.352	900.895.200	759.130.762	115.362.178	115.362.178	160.000.000	160.000.000	53.549.978	4.648.768
05.2005.	PEMERINTAH NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO	4	1.193.771.000	1.193.771.000	1.275.300.174	1.107.782.122	81.529.174	81.529.174	0	0	0	167.518.052
05.2006.	PEMERINTAH NAGARI KOTO PANJANG	4	990.230.000	703.065.236	1.034.707.668	589.614.090	44.477.668	44.477.668	0	0	0	157.928.814
05.2007.	PEMERINTAH NAGARI SIANOK ANAM SUKU	4	818.628.000	745.974.000	901.901.490	717.277.430	83.273.490	83.273.490	0	0	0	111.970.060
05.2008.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG	4	815.589.000	815.589.000	979.903.518	824.730.443	164.314.518	164.314.518	0	0	0	155.173.075
06	KECAMATAN BANUHAMPU		7.367.260.000	7.367.260.000	7.826.261.953	7.390.618.098	511.919.693	511.919.693	52.917.740	0	0	488.561.596
06.2001.	PEMERINTAH NAGARI PADANG LUA	4	1.049.857.000	1.049.857.000	1.137.713.409	1.083.175.685	87.856.409	87.856.409	0	0	0	54.537.724
06.2002.	PEMERINTAH NAGARI TALUAK AMPEK SUKU	4	911.129.000	911.129.000	998.828.988	909.841.742	87.699.988	87.699.988	0	0	0	88.987.246
06.2003.	PEMERINTAH NAGARI PAKAN SINAYAN	4	1.072.630.000	1.072.630.000	1.127.384.657	1.086.633.778	54.754.657	54.754.657	0	0	0	40.750.879
06.2004.	PEMERINTAH NAGARI KUBANG PUTIAH	4	1.415.854.000	1.415.854.000	1.486.215.992	1.405.608.682	70.361.992	70.361.992	0	0	0	80.607.310
06.2005.	PEMERINTAH NAGARI LADANG LAWEH	4	1.009.204.000	1.009.204.000	1.019.205.540	942.010.609	62.919.280	62.919.280	52.917.740	0	0	130.112.671
06.2006.	PEMERINTAH NAGARI CINGKARIANG	5	1.117.738.000	1.117.738.000	1.184.300.759	1.157.061.296	66.562.759	66.562.759	0	0	0	27.239.463
06.2007.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI TANANG	5	790.848.000	790.848.000	872.612.609	806.286.306	81.764.609	81.764.609	0	0	0	66.326.303
07	KECAMATAN AMPEK ANGKEK	4r	7.461.516.000	7.336.354.128	7.413.086.004	6.608.038.767	550.459.736	550.459.736	598.889.732	357.728.433	0	921.046.664
07.2001.	PEMERINTAH NAGARI BATU TABA	4	1.336.210.000	1.336.210.000	1.231.148.304	1.192.450.779	6.188.438	6.188.438	111.250.134	111.250.134	0	38.697.525
07.2002.	PEMERINTAH NAGARI BIARO GADANG	4	1.091.824.000	1.091.824.000	1.233.817.865	1.034.166.598	196.993.865	196.993.865	55.000.000	0	0	254.651.267
07.2003.	PEMERINTAH NAGARI LAMBAH	4	899.987.000	899.987.000	816.464.461	720.660.535	96.151.160	96.151.160	179.673.699	174.673.699	0	100.803.926
07.2004.	PEMERINTAH NAGARI PANAMPUANG	4	1.106.812.000	1.106.812.000	1.080.782.842	959.959.494	48.970.842	48.970.842	75.000.000	0	0	195.823.348
07.2005.	PEMERINTAH NAGARI AMPANG GADANG	5	1.120.639.000	1.120.639.000	1.198.580.555	1.098.438.238	94.303.144	94.303.144	16.361.589	0	0	116.503.906
07.2006.	PEMERINTAH NAGARI PASIA	5	829.787.000	704.625.128	819.628.024	593.832.330	79.640.734	79.640.734	89.799.710	0	0	190.433.532
07.2008.	PEMERINTAH NAGARI BALAI GURAH	4	1.076.257.000	1.076.257.000	1.032.663.953	1.008.530.793	28.211.553	28.211.553	71.804.600	71.804.600	0	24.133.160
08	KECAMATAN BASO		8.369.318.000	8.281.485.422	9.116.064.070	7.795.626.168	860.399.113	860.399.113	113.653.043	79.000.000	0	1.267.258.367
08.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TINGGI	4	1.334.248.000	1.334.248.000	1.445.155.593	1.211.708.547	110.907.593	110.907.593	0	0	0	233.447.046
08.2002.	PEMERINTAH NAGARI TABEK PANJANG	5	1.314.070.000	1.314.070.000	1.448.517.564	1.351.155.420	134.447.564	134.447.564	0	0	0	97.362.144
08.2004.	PEMERINTAH NAGARI SIMARASOK	5	1.136.677.000	1.136.677.000	1.196.312.725	1.093.248.835	59.635.725	59.635.725	0	0	0	103.063.890

PROVINSI : 13 PROVNSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
08.2005.	PEMERINTAH NAGARI PADANG TAROK	5	1.207.840.000	1.207.840.000	1.428.123.481	1.170.140.626	234.936.523	234.936.523	14.653.043	0	0	272.635.897
08.2006.	PEMERINTAH NAGARI SALO	5	660.845.000	660.845.000	668.831.842	556.628.401	86.986.843	86.986.843	79.000.000	79.000.000	0	112.203.442
08.2007.	PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU	4	1.003.905.000	1.003.905.000	1.030.324.026	896.211.585	26.419.026	26.419.026	0	0	0	134.112.441
08.2008.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI CUBADAK	4	786.012.000	786.012.000	918.159.648	708.875.907	132.147.648	132.147.648	0	0	0	209.283.741
08.2009.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG	5	925.721.000	837.888.422	980.639.191	807.656.847	74.918.191	74.918.191	20.000.000	0	0	105.149.766
09	KECAMATAN TILATANG KAMANG		4.635.653.000	4.635.653.000	4.788.010.416	4.204.552.671	282.157.416	282.157.416	129.800.000	129.800.000	0	583.457.745
09.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TANGAH	4	1.891.794.000	1.891.794.000	1.901.412.921	1.742.196.804	63.618.921	63.618.921	54.000.000	54.000.000	0	159.216.117
09.2003.	PEMERINTAH NAGARI GADUT	5	1.884.390.000	1.884.390.000	1.871.816.509	1.653.518.893	63.226.509	63.226.509	75.800.000	75.800.000	0	218.297.616
09.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAPAU	4	859.469.000	859.469.000	1.014.780.986	808.836.974	155.311.986	155.311.986	0	0	0	205.944.012
10	KECAMATAN PALUPUH		5.017.095.000	5.017.095.000	5.071.387.573	4.822.017.600	309.292.573	309.292.573	255.000.000	240.000.000	0	264.369.973
10.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO RANTANG	5	890.985.000	890.985.000	935.357.966	908.065.676	109.372.966	109.372.966	65.000.000	65.000.000	0	27.292.290
10.2002.	PEMERINTAH NAGARI PASIA LAWEH	5	1.183.339.000	1.183.339.000	1.188.051.494	1.175.630.309	4.712.494	4.712.494	0	0	0	12.421.185
10.2003.	PEMERINTAH NAGARI PAGADIH	5	973.578.000	973.578.000	1.012.167.814	968.162.950	48.589.814	48.589.814	10.000.000	0	0	54.004.864
10.2004.	PEMERINTAH NAGARI NAN TUJUAH	5	1.071.776.000	1.071.776.000	1.129.426.213	1.040.644.469	62.650.213	62.650.213	5.000.000	0	0	93.781.744
10.2005.	PEMERINTAH NAGARI NAN LIMO	5	897.417.000	897.417.000	806.384.086	729.514.196	83.967.086	83.967.086	175.000.000	175.000.000	0	76.869.890
11	KECAMATAN PALEMBAYAN		8.711.185.000	8.590.241.434	9.204.529.502	7.641.807.144	498.344.502	496.861.712	5.000.000	0	0	1.445.296.002
11.2001.	PEMERINTAH NAGARI BARINGIN	4	870.081.000	870.081.000	905.880.229	780.350.496	35.799.229	35.799.229	0	0	0	125.529.733
11.2002.	PEMERINTAH NAGARI SIPINANG	4	685.571.000	564.627.434	713.696.000	535.045.866	33.125.000	31.642.210	5.000.000	0	0	61.223.778
11.2003.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUAR	5	808.047.000	808.047.000	954.306.080	601.477.633	146.259.080	146.259.080	0	0	0	352.828.447
11.2004.	PEMERINTAH NAGARI AMPEK KOTO PALEMBAYAN	4	1.001.576.000	1.001.576.000	1.067.329.941	984.028.357	65.753.941	65.753.941	0	0	0	83.301.584
11.2005.	PEMERINTAH NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG	5	1.446.577.000	1.446.577.000	1.498.799.454	1.416.829.857	52.222.454	52.222.454	0	0	0	81.969.597
11.2006.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA	5	1.178.750.000	1.178.750.000	1.266.240.867	794.933.935	87.490.867	87.490.867	0	0	0	471.306.932
11.2007.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA TIMUR	5	918.596.000	918.596.000	960.654.940	821.701.625	42.058.940	42.058.940	0	0	0	138.953.315
11.2008.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA UTARA	5	896.630.000	896.630.000	910.614.814	862.470.680	13.984.814	13.984.814	0	0	0	48.144.134
11.2009.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA BARAT	5	905.357.000	905.357.000	927.007.177	844.968.695	21.650.177	21.650.177	0	0	0	82.038.482
12	KECAMATAN SUNGAI PUA		5.186.478.000	5.186.478.000	4.489.525.182	4.297.349.387	174.474.860	164.564.764	871.427.678	576.691.400	0	477.001.977
12.2001.	PEMERINTAH NAGARI PADANG LAWEH	4	903.026.000	903.026.000	772.326.814	697.552.128	99.003.647	99.003.647	229.702.833	50.000.000	0	254.477.519
12.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA	5	1.723.032.000	1.723.032.000	1.385.786.429	1.382.661.042	7.360.829	7.360.829	344.606.400	344.606.400	0	3.125.387
12.2003.	PEMERINTAH NAGARI BATAGAK	5	905.519.000	905.519.000	879.726.572	870.853.527	4.729.517	4.729.517	30.521.945	0	0	39.394.990
12.2004.	PEMERINTAH NAGARI BATU PALANO	5	886.295.000	886.295.000	731.717.366	708.559.438	27.507.366	27.507.366	182.085.000	182.085.000	0	25.157.928
12.2005.	PEMERINTAH NAGARI SARIAK	4	768.606.000	768.606.000	719.968.001	639.723.252	35.873.501	25.963.405	84.511.500	0	0	154.846.153
13	KECAMATAN AMPEK NAGARI		5.481.115.000	5.481.115.000	5.218.850.675	4.766.012.853	305.235.675	305.235.675	567.500.000	527.500.000	0	492.837.822

PROVINSI : 13 PROVNSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : DDS Dana Desa (Dropping APBN)

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
13.2001.	PEMERINTAH NAGARI BATU KAMBING	5	1.295.870.000	1.295.870.000	1.278.052.166	1.136.522.744	59.682.166	59.682.166	77.500.000	77.500.000	0	141.529.422
13.2002.	PEMERINTAH NAGARI SITALANG	5	1.004.918.000	1.004.918.000	1.044.672.774	971.531.666	129.754.774	129.754.774	90.000.000	90.000.000	0	73.141.108
13.2003.	PEMERINTAH NAGARI BAWAN	5	2.257.218.000	2.257.218.000	1.981.639.745	1.817.896.832	74.421.745	74.421.745	350.000.000	310.000.000	0	203.742.913
13.2004.	PEMERINTAH NAGARI SITANANG	5	923.109.000	923.109.000	914.485.990	840.061.611	41.376.990	41.376.990	50.000.000	50.000.000	0	74.424.379
14	KECAMATAN CANDUNG		3.540.564.000	3.440.757.320	3.475.895.828	3.121.267.042	210.331.828	210.331.828	275.000.000	275.000.000	0	254.822.106
14.2001.	PEMERINTAH NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH	4	1.220.578.000	1.220.578.000	1.083.829.672	1.015.978.636	63.251.672	63.251.672	200.000.000	200.000.000	0	67.851.036
14.2002.	PEMERINTAH NAGARI LASI	5	1.122.673.000	1.122.673.000	1.141.942.533	1.014.744.131	94.269.533	94.269.533	75.000.000	75.000.000	0	127.198.402
14.2003.	PEMERINTAH NAGARI BUKIK BATABUAH	5	1.197.313.000	1.097.506.320	1.250.123.623	1.090.544.275	52.810.623	52.810.623	0	0	0	59.772.668
15	KECAMATAN KAMANG MAGEK		4.653.538.000	4.403.218.966	4.715.618.841	4.024.530.462	395.103.335	394.157.421	333.022.694	333.022.693	0	439.823.232
15.2001.	PEMERINTAH NAGARI MAGEK	5	951.725.000	951.725.000	951.725.000	868.468.385	48.022.694	48.022.694	48.022.694	48.022.693	0	83.256.616
15.2002.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA	5	1.020.304.000	769.984.966	1.016.415.608	765.892.296	96.111.608	96.111.608	100.000.000	100.000.000	0	204.278
15.2003.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG MUDIAK	5	1.082.113.000	1.082.113.000	1.055.339.375	962.402.265	158.226.375	158.226.375	185.000.000	185.000.000	0	92.937.110
15.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG TANGAH ANAM SU	5	798.759.000	798.759.000	843.654.374	700.805.081	44.895.374	43.949.460	0	0	0	141.903.379
15.2005.	PEMERINTAH NAGARI PAUH KAMANG MUDIAK	4	800.637.000	800.637.000	848.484.284	728.962.435	47.847.284	47.847.284	0	0	0	121.521.849
16	KECAMATAN MALALAK		3.446.796.000	3.446.796.000	3.602.003.225	3.146.783.629	178.984.225	178.984.225	23.777.000	0	0	478.996.596
16.2001.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK UTARA	5	818.976.000	818.976.000	832.538.419	761.887.155	13.562.419	13.562.419	0	0	0	70.651.264
16.2002.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK TIMUR	5	898.116.000	898.116.000	921.815.049	813.130.954	37.476.049	37.476.049	13.777.000	0	0	122.461.095
16.2003.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK SELATAN	5	914.457.000	914.457.000	960.192.347	773.535.525	50.735.347	50.735.347	5.000.000	0	0	191.656.822
16.2004.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK BARAT	5	815.247.000	815.247.000	887.457.410	798.229.995	77.210.410	77.210.410	5.000.000	0	0	94.227.415
	JUMLAH		100.939.408.000	98.028.894.550	101.509.108.594	88.792.467.407	7.410.478.477	7.398.139.677	6.787.227.906	5.665.637.306	53.549.978	10.968.929.515

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Lubuk Basung, 06 Februari 2026

BUPATI AGAM

BUPATI AGAM

BENNI WARLIS

LAPORAN REKAPITULASI

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI : **13 PROVNSI SUMATERA BARAT**

KABUPATEN/KOTA : **13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
01	**KECAMATAN TANJUNG MUTIARA**		4.984.194.770	4.691.480.784	5.604.304.729	4.789.124.739	620.109.959	620.109.959	0	0	0	522.466.004
01.2001.	PEMERINTAH NAGARI TIKU SELATAN	4	1.450.350.356	1.395.049.470	1.567.634.519	1.331.745.706	117.284.163	117.284.163	0	0	0	180.587.927
01.2002.	PEMERINTAH NAGARI TIKU UTARA	4	939.061.935	935.468.895	1.052.514.028	929.523.250	113.452.093	113.452.093	0	0	0	119.397.738
01.2003.	PEMERINTAH NAGARI TIKU LIMO JORONG	4	1.754.018.350	1.524.259.214	2.058.327.986	1.745.309.598	304.309.636	304.309.636	0	0	0	83.259.251
01.2004.	PEMERINTAH NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALA	5	840.764.129	836.703.205	925.828.197	782.546.185	85.064.068	85.064.068	0	0	0	139.221.088
02	**KECAMATAN LUBUK BASUNG**		8.182.079.231	8.158.600.933	8.881.980.390	8.041.489.367	699.901.159	699.901.159	0	0	0	817.012.725
02.2001.	PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG	5	2.958.145.391	2.952.894.787	3.295.862.788	2.764.474.411	337.717.397	337.717.397	0	0	0	526.137.773
02.2002.	PEMERINTAH NAGARI GARAGAHAN	5	1.097.497.171	1.093.645.841	1.149.326.108	1.101.850.146	51.828.937	51.828.937	0	0	0	43.624.632
02.2003.	PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG PINANG	5	729.958.381	726.005.341	741.334.723	689.846.256	11.376.342	11.376.342	0	0	0	47.535.427
02.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG TANGAH	5	933.063.322	928.702.978	975.913.474	934.307.155	42.850.152	42.850.152	0	0	0	37.245.975
02.2005.	PEMERINTAH NAGARI MANGGOPOH	5	2.463.414.966	2.457.351.986	2.719.543.297	2.551.011.399	256.128.331	256.128.331	0	0	0	162.468.918
03	**KECAMATAN TANJUNG RAYA**		8.455.193.099	8.407.802.939	8.925.737.066	8.249.134.816	470.543.967	470.543.967	0	0	0	629.212.090
03.2001.	PEMERINTAH NAGARI TANJUNG SANI	5	1.068.418.542	1.063.508.054	1.096.963.049	958.419.276	28.544.507	28.544.507	0	0	0	133.633.285
03.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI BATANG	5	993.820.327	988.416.013	1.047.532.545	991.033.512	53.712.218	53.712.218	0	0	0	51.094.719
03.2003.	PEMERINTAH NAGARI MANINJAU	5	772.596.376	768.374.554	915.430.893	808.677.852	142.834.517	142.834.517	0	0	0	102.531.219
03.2004.	PEMERINTAH NAGARI BAYUA	5	1.120.031.403	1.113.515.235	1.146.474.363	1.093.846.453	26.442.960	26.442.960	0	0	0	46.111.742
03.2006.	PEMERINTAH NAGARI KOTO KACIAK	5	762.081.431	757.391.725	799.096.280	727.890.815	37.014.849	37.014.849	0	0	0	66.515.759
03.2007.	PEMERINTAH NAGARI DUO KOTO	5	733.275.703	728.631.475	748.551.861	723.642.305	15.276.158	15.276.158	0	0	0	20.265.328
03.2008.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO	5	676.760.378	672.759.338	701.669.305	661.877.773	24.908.927	24.908.927	0	0	0	35.790.492
03.2009.	PEMERINTAH NAGARI KOTO MALINTANG	5	850.863.011	846.143.363	895.462.681	828.182.142	44.599.670	44.599.670	0	0	0	62.560.891
03.2010.	PEMERINTAH NAGARI PANINJAUAN	5	730.702.589	726.780.187	801.916.135	718.525.802	71.213.546	71.213.546	0	0	0	79.467.931
03.2011.	PEMERINTAH NAGARI DALKO	5	746.643.339	742.282.995	772.638.953	737.038.886	25.996.614	25.996.614	0	0	0	31.240.723
04	**KECAMATAN MATUR**		4.605.373.932	4.580.290.109	4.875.465.807	4.446.910.624	270.091.675	270.091.675	0	0	0	403.471.160
04.2001.	PEMERINTAH NAGARI MATUA HILIA	4	838.738.620	833.708.364	907.946.114	852.858.549	69.207.494	69.207.494	0	0	0	50.057.309
04.2002.	PEMERINTAH NAGARI MATUA MUDIAK	5	908.733.390	904.971.886	995.850.327	841.884.204	87.116.937	87.116.937	0	0	0	150.204.619

PROVINSI : 13 PROVINSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
04.2003.	PEMERINTAH NAGARI TIGO BALAI	4	856.589.812	851.959.990	892.324.688	810.114.854	35.734.876	35.734.876	0	0	0	77.580.012
04.2004.	PEMERINTAH NAGARI LAWANG	5	843.334.509	838.903.093	863.549.695	798.645.100	20.215.186	20.215.186	0	0	0	60.473.179
04.2005.	PEMERINTAH NAGARI PARIK PANJANG	5	545.802.983	542.209.894	562.964.003	541.024.814	17.161.020	17.161.020	0	0	0	18.346.100
04.2006.	PEMERINTAH NAGARI PANTA PAUAH	5	612.174.618	608.536.882	652.830.980	602.383.303	40.656.362	40.656.362	0	0	0	46.809.941
05	KECAMATAN IV KOTO		5.200.615.833	5.173.299.191	5.667.990.688	5.212.328.345	467.374.855	467.374.855	0	0	0	428.345.701
05.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI LANDIA	5	673.760.136	669.759.096	703.449.082	674.314.440	29.688.946	29.688.946	0	0	0	25.133.602
05.2003.	PEMERINTAH NAGARI BALINGKA	5	981.820.430	977.837.448	1.091.622.263	917.555.781	109.801.833	109.801.833	0	0	0	170.083.500
05.2004.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TUO	5	839.999.217	834.968.961	939.231.086	892.604.755	99.231.869	99.231.869	0	0	0	41.596.075
05.2005.	PEMERINTAH NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO	4	676.610.528	673.736.096	756.004.104	672.994.833	79.393.576	79.393.576	0	0	0	80.134.839
05.2006.	PEMERINTAH NAGARI KOTO PANJANG	4	752.831.295	749.249.443	816.971.523	803.307.390	64.140.228	64.140.228	0	0	0	10.082.281
05.2007.	PEMERINTAH NAGARI SIANOK ANAM SUKU	4	641.278.021	637.324.981	696.341.210	614.425.470	55.063.189	55.063.189	0	0	0	77.962.700
05.2008.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG	4	634.316.206	630.423.166	664.371.420	637.125.676	30.055.214	30.055.214	0	0	0	23.352.704
06	KECAMATAN BANUHAMPU		5.829.137.090	5.795.468.396	6.172.227.715	5.776.929.898	343.090.625	343.090.625	0	0	0	361.629.123
06.2001.	PEMERINTAH NAGARI PADANG LUA	4	790.872.238	786.919.894	884.227.492	777.404.462	93.355.254	93.355.254	0	0	0	102.870.686
06.2002.	PEMERINTAH NAGARI TALUAK AMPEK SUKU	4	681.228.513	678.305.385	712.212.106	681.816.199	30.983.593	30.983.593	0	0	0	27.472.779
06.2003.	PEMERINTAH NAGARI PAKAN SINAYAN	4	986.937.922	980.421.754	1.040.887.427	961.825.371	53.949.505	53.949.505	0	0	0	72.545.888
06.2004.	PEMERINTAH NAGARI KUBANG PUTIAH	4	1.124.929.169	1.117.265.263	1.182.065.477	1.171.165.789	57.136.308	57.136.308	0	0	0	3.235.782
06.2005.	PEMERINTAH NAGARI LADANG LAWEH	4	766.061.060	762.527.904	816.938.133	728.014.704	50.877.073	50.877.073	0	0	0	85.390.273
06.2006.	PEMERINTAH NAGARI CINGKARIANG	5	871.551.379	866.472.427	907.466.390	852.824.475	35.915.011	35.915.011	0	0	0	49.562.963
06.2007.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI TANANG	5	607.556.809	603.555.769	628.430.689	603.878.898	20.873.880	20.873.880	0	0	0	20.550.751
07	KECAMATAN AMPEK ANGKEK		5.759.370.556	5.730.256.148	6.175.546.643	5.730.533.936	427.835.151	427.835.151	11.659.064	0	0	427.557.363
07.2001.	PEMERINTAH NAGARI BATU TABA	4	877.926.719	873.274.955	892.565.624	881.266.222	14.638.905	14.638.905	0	0	0	6.647.638
07.2002.	PEMERINTAH NAGARI BIARO GADANG	4	913.959.116	909.946.888	990.150.788	896.538.602	76.191.672	76.191.672	0	0	0	89.599.958
07.2003.	PEMERINTAH NAGARI LAMBAH	4	683.813.809	680.220.769	736.870.416	648.018.137	53.056.607	53.056.607	0	0	0	85.259.239
07.2004.	PEMERINTAH NAGARI PANAMPUANG	4	981.396.287	976.725.335	1.091.747.532	1.073.126.110	110.351.245	110.351.245	0	0	0	73.950.470
07.2005.	PEMERINTAH NAGARI AMPANG GADANG	5	915.379.058	910.659.410	1.027.853.408	934.374.049	124.133.414	124.133.414	11.659.064	0	0	100.418.775
07.2006.	PEMERINTAH NAGARI PASIA	5	588.859.918	585.386.182	615.990.279	568.545.300	27.130.361	27.130.361	0	0	0	43.971.243
07.2008.	PEMERINTAH NAGARI BALAI GURAH	4	798.035.649	794.042.609	820.368.596	788.665.516	22.332.947	22.332.947	0	0	0	27.710.040
08	KECAMATAN BASO		6.399.677.312	6.366.718.414	6.868.010.853	6.328.168.790	468.333.641	468.333.641	0	0	0	506.683.265
08.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TINGGI	4	924.265.593	919.905.249	869.644.856	868.524.795	45.379.363	45.379.363	0	0	0	96.759.817
08.2002.	PEMERINTAH NAGARI TABEK PANJANG	5	832.782.922	828.781.882	881.735.115	799.959.078	48.952.193	48.952.193	0	0	0	77.774.997
08.2004.	PEMERINTAH NAGARI SIMARASOK	5	961.799.147	957.438.803	1.073.818.455	1.011.752.525	112.019.308	112.019.308	0	0	0	57.705.586

PROVINSI : 13 PROVNSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
08.2005.	PEMERINTAH NAGARI PADANG TAROK	5	1.086.301.255	1.080.862.999	1.158.662.926	1.064.962.410	72.361.671	72.361.671	0	0	0	88.262.260
08.2006.	PEMERINTAH NAGARI SALO	5	568.894.236	565.480.848	614.775.766	570.252.243	45.881.530	45.881.530	0	0	0	41.110.135
08.2007.	PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU	4	565.444.381	561.851.341	575.496.040	569.158.357	10.051.659	10.051.659	0	0	0	2.744.643
08.2008.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI CUBADAK	4	732.944.158	728.943.118	805.231.424	733.333.933	72.287.266	72.287.266	0	0	0	67.896.451
08.2009.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG	5	727.245.620	723.454.174	788.646.270	710.225.449	61.400.650	61.400.650	0	0	0	74.629.375
09	KECAMATAN TILATANG KAMANG		4.705.240.795	4.681.338.817	4.899.405.337	4.663.770.375	194.164.542	194.164.542	0	0	0	211.732.984
09.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TANGAH	4	2.317.427.856	2.304.971.288	2.408.412.818	2.330.571.961	90.984.962	90.984.962	0	0	0	65.384.289
09.2003.	PEMERINTAH NAGARI GADUT	5	1.523.289.369	1.518.569.721	1.583.128.729	1.495.240.295	59.839.360	59.839.360	0	0	0	83.168.786
09.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAPAU	4	864.523.570	857.797.808	907.863.790	837.958.119	43.340.220	43.340.220	0	0	0	63.179.909
10	KECAMATAN PALUPUH		5.180.768.086	5.156.697.644	5.394.064.755	5.123.556.625	213.296.669	213.296.669	0	0	0	246.437.688
10.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO RANTANG	5	905.880.191	901.190.485	946.040.894	913.928.172	40.160.503	40.160.503	0	0	0	27.422.816
10.2002.	PEMERINTAH NAGARI PASIA LAWEH	5	1.263.016.869	1.257.219.309	1.273.414.219	1.261.635.717	10.397.350	10.397.350	0	0	0	5.980.942
10.2003.	PEMERINTAH NAGARI PAGADIH	5	920.164.187	916.630.219	963.945.160	908.606.222	43.780.973	43.780.973	0	0	0	51.864.970
10.2004.	PEMERINTAH NAGARI NAN TUJUAH	5	1.040.320.147	1.035.649.195	1.076.444.433	995.831.679	36.124.286	36.124.286	0	0	0	75.941.802
10.2005.	PEMERINTAH NAGARI NAN LIMO	5	1.051.386.692	1.045.948.436	1.134.220.249	1.043.554.835	82.833.557	82.833.557	0	0	0	85.227.158
11	KECAMATAN PALEMBAYAN		8.342.996.408	8.140.424.163	8.728.587.191	7.765.718.722	385.590.783	384.936.798	0	0	0	759.642.239
11.2001.	PEMERINTAH NAGARI BARINGIN	4	875.880.411	870.146.735	906.505.599	850.496.151	30.625.188	30.625.188	0	0	0	50.275.762
11.2002.	PEMERINTAH NAGARI SIPINANG	4	752.424.040	680.955.488	794.355.539	682.771.056	41.931.499	41.277.515	0	0	0	39.461.947
11.2003.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUAR	5	794.453.095	794.453.095	844.066.070	725.262.630	49.612.975	49.612.975	0	0	0	118.803.440
11.2004.	PEMERINTAH NAGARI AMPEK KOTO PALEMBAYAN	4	1.087.383.307	1.082.034.877	1.131.577.909	1.053.760.310	44.194.602	44.194.602	0	0	0	72.469.169
11.2005.	PEMERINTAH NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG	5	1.348.417.668	1.344.775.932	1.402.506.878	1.244.182.216	54.089.210	54.089.210	0	0	0	154.682.926
11.2006.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA	5	954.298.811	850.583.746	1.019.930.128	841.307.757	65.631.317	65.631.317	0	0	0	74.907.306
11.2007.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA TIMUR	5	870.194.847	866.071.097	899.050.753	784.452.966	28.855.906	28.855.906	0	0	0	110.474.037
11.2008.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA UTARA	5	830.951.973	826.681.455	853.418.115	810.655.456	22.466.142	22.466.142	0	0	0	38.492.141
11.2009.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA BARAT	5	828.992.256	824.721.738	877.176.199	772.830.170	48.183.943	48.183.943	0	0	0	100.075.511
12	KECAMATAN SUNGAI PUA		4.148.655.779	4.125.435.597	4.311.176.008	4.120.497.380	162 520.229	172.436.524	0	0	0	177.374.741
12.2001.	PEMERINTAH NAGARI PADANG LAWEH	4	716.683.321	712.322.977	755.732.048	685.668.963	39.048.727	39.048.727	0	0	0	65.702.741
12.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA	5	1.184.611.646	1.179.891.998	1.202.092.349	1.180.365.285	17.480.703	17.480.703	0	0	0	17.007.416
12.2003.	PEMERINTAH NAGARI BATAGAK	5	814.117.484	809.487.662	838.689.130	830.243.364	24.571.646	24.571.646	0	0	0	3.815.944
12.2004.	PEMERINTAH NAGARI BATU PALANO	5	683.227.205	678.915.557	738.469.795	722.174.145	55.242.590	55.242.590	0	0	0	11.984.002
12.2005.	PEMERINTAH NAGARI SARIAK	4	750.016.123	744.817.403	776.192.687	702.045.623	26.176.564	36.092.859	0	0	0	78.864.639
13	KECAMATAN AMPEK NAGARI		4.714.151.345	4.404.095.884	4.958.480.064	3.832.461.640	244.328.719	244.328.719	0	0	0	815.962.963

PROVINSI : 13 PROVNSI SUMATERA BARAT

KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2025

Sumber Dana : ADD Alokasi Dana Desa

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN		BELANJA DESA		PENERIMAAN PBY		PENGELUARAN PBY		SILPA TAHUN BERJALAN	
			ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
13.2001.	PEMERINTAH NAGARI BATU KAMBING	5	929.097.005	924.766.603	941.116.757	876.977.574	12.019.752	12.019.752	0	0	0	59.808.781
13.2002.	PEMERINTAH NAGARI SITALANG	5	814.859.876	811.158.256	853.724.347	800.969.588	38.864.471	38.864.471	0	0	0	49.053.139
13.2003.	PEMERINTAH NAGARI BAWAN	5	2.113.852.986	1.815.822.587	2.277.048.280	1.331.253.612	163.195.294	163.195.294	0	0	0	647.764.270
13.2004.	PEMERINTAH NAGARI SITANANG	5	856.341.478	852.348.438	886.590.680	823.260.866	30.249.202	30.249.202	0	0	0	59.336.774
14	KECAMATAN CANDUNG		3.201.216.780	3.186.063.286	3.675.193.481	3.428.765.039	473.976.701	473.976.701	0	0	0	231.274.948
14.2001.	PEMERINTAH NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH	4	1.323.704.567	1.316.888.979	1.525.238.694	1.434.412.853	201.534.127	201.534.127	0	0	0	84.010.253
14.2002.	PEMERINTAH NAGARI LASI	5	875.661.908	871.708.868	1.080.866.654	994.551.002	205.204.746	205.204.746	0	0	0	82.362.612
14.2003.	PEMERINTAH NAGARI BUKIK BATABUAH	5	1.001.850.305	997.465.439	1.069.088.133	999.801.184	67.237.828	67.237.828	0	0	0	64.902.083
15	KECAMATAN KAMANG MAGEK		4.713.861.610	4.684.850.970	4.979.311.955	4.699.385.209	265.450.345	259.882.367	0	0	0	245.348.128
15.2001.	PEMERINTAH NAGARI MAGEK	5	1.125.761.446	1.117.478.700	1.171.911.339	1.128.667.029	46.149.893	46.149.893	0	0	0	34.961.564
15.2002.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA	5	1.181.392.169	1.172.468.989	1.200.305.034	1.183.332.452	18.912.865	18.912.865	0	0	0	8.049.402
15.2003.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG MUDIAK	5	938.881.680	934.570.032	991.474.400	941.542.381	52.592.720	52.592.720	0	0	0	45.620.371
15.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG TANGAH ANAM SU	5	677.436.050	674.153.618	749.387.151	663.183.238	71.951.101	66.383.123	0	0	0	77.353.503
15.2005.	PEMERINTAH NAGARI PAUH KAMANG MUDIAK	4	790.390.265	786.179.631	866.234.031	782.660.109	75.843.766	75.843.766	0	0	0	79.363.288
16	KECAMATAN MALALAK		3.529.137.447	3.510.937.463	3.773.259.539	3.463.821.330	244.122.092	244.122.092	0	0	0	291.238.226
16.2001.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK UTARA	5	761.429.139	757.068.795	784.728.089	730.260.588	23.298.950	23.298.950	0	0	0	50.107.157
16.2002.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK TIMUR	5	981.732.552	976.986.730	1.062.586.207	964.320.258	80.853.655	80.853.655	0	0	0	93.520.127
16.2003.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK SELATAN	5	974.665.783	969.994.135	1.028.733.574	960.311.425	54.067.791	54.067.791	0	0	0	63.750.501
16.2004.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK BARAT	5	811.309.973	806.887.803	897.211.669	808.929.059	85.901.696	85.901.696	0	0	0	83.860.441
	JUMLAH		87.951.670.073	86.793.760.738	93.890.742.320	85.672.597.034	5.950.731.311	5.854.425.644	11.659.064	0	0	7.075.589.347

KODE POSTING :
2 : APBDES AWAL
3 : PERKADES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBDES PERUBAHAN
5 : PERKADES SETELAH PERUBAHAN

Lubuk Basung, 06 Februari 2026

BUPATI AGAM

BENNI WARLIS